PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019
Tentang :

# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019-2023



"Sumsel Maju Untuk Semua"










**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019-2023

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2019-2023.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.

(2) RPJMD Tahun 2019-2023, disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Kepala Daerah.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :

a. PD dalam menyusun Renstra-PD;
b. Pemerintah Provinsi dalam menyusun RKPD;
c. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

(1) Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III : Gambaran Keuangan Daerah

BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

BAB VII : Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Sumatera Selatan

BAB VIII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

BAB IX : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB X : Penutup

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra PD.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Mei 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. NASRUN UMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 1..

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN :( 1-123/2019).

# DAFTAR ISI

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang ..... I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... I - 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... I - 5
1.3.1 RPJMD dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan ..... I - 5
1.3.2 RPJMD dan Rencana Tata Ruang Wilayah ..... I - 9
1.3.3 RPJMD dan RPJM Nasional ..... I - 14
1.3.4 RPJMD dan Rencana Strategis ..... I - 17
1.3.5 RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ..... I - 17
1.4 Maksud dan Tujuan ..... I - 18
1.4.1 Maksud ..... I - 18
1.4.2 Tujuan ..... I - 18
1.5 Sistematika Penulisan ..... I - 19

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

2.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... II - 1
2.1.1. Aspek Geografi ..... II - 1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ..... II - 19
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana ..... II - 31
2.1.4. Demografi ..... II - 39
2.2. Aspek Kesejahteraan Rakyat ..... II - 44
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... II - 45
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ..... II - 66
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ..... II - 81
2.2.4. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... II - 84
2.3 Aspek Pelayanan Umum ..... II - 88
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ..... II - 88
2.3.2 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar ..... II - 157
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan ..... II - 264
2.3.4. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang ..... II - 299
2.4. Aspek Daya Saing Daerah ..... II - 315
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ..... II - 315
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ..... II - 317
2.4.3. Fokus Iklim Investasi ..... II - 332
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia ..... II - 335
2.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Selatan ..... II - 336
2.5.1. Pilar I (Pembangunan Sosial) ..... II - 336
2.5.2. Pilar 2 ( Pembangunan Ekonomi ) ..... II - 344
2.5.3. Pilar 3 ( Pembangunan Lingkungan ) ..... II - 348
2.5.4. Pilar 4 ( Tata Kelola Pelaksanaan ) ..... II - 353
2.6 Kinerja BUMD di Sumatera Selatan ..... II - 356

**BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ..... III - 1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD ..... III - 1
3.1.2. Neraca Daerah ..... III - 7

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ..... III - 12
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran ..... III - 14
3.2.2. Analisis Pembiayaan ..... III - 14
3.3. Kerangka Pendanaan ..... III - 15
3.3.1. Komponen Penerimaan Daerah ..... III - 15
3.3.2. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah ..... III - 18
3.3.3. Proyeksi Pendapatan dan Belanja ..... III - 19
3.3.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan ..... III - 31

**BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**
4.1. Permasalahan Pembangunan ..... IV - 1
4.1.1. Evaluasi Kinerja Pembangunan 2013-2018 ..... IV - 1
4.1.2. Permasalahan Indikator Makro ..... IV - 2
4.1.3. Permasalahan Per Urusan ..... IV - 7
4.2. Isu Strategis ..... IV - 23
4.2.1. Telaah RPJPD ..... IV - 23
4.2.2. Telaah RPJMN ..... IV - 29
4.2.3. Telaah RTRW ..... IV - 30
4.2.4. Telaah SDGs ..... IV - 36

**BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**
5.1. Visi ..... V - 1
5.2. Misi ..... V - 2
5.3. Tujuan dan Sasaran ..... V - 2
5.4. Prioritas Pembangunan ..... V - 4
5.5. Janji Gubernur dan Wakil Gubernur ..... V - 6
5.6. Sinkronisasi RPJPD, RTRW dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan ..... V - 11

**BAB VI STRATEGI,ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - I**

**BAB VII ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA SELATAN**
7.1 Kondisi Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan ..... VII - 1
7.2 Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan ..... VII - 14
7.2.1 Kabupaten Ogan Ilir ..... VII - 15
7.2.2 Kota Palembang ..... VII - 18
7.2.3 Kabupaten Musi Rawas ..... VII - 20
7.2.4 Kabupaten Musi Rawas Utara ..... VII - 23
7.2.5 Kota Pagar Alam ..... VII - 25
7.2.6 Kota Lubuklinggau ..... VII - 28
7.2.7 Kabupaten Ogan Komering Ulu ..... VII - 31
7.2.8 Kabupaten Ogan Komering Ilir ..... VII - 34
7.2.9 Kabupaten OKU Timur ..... VII - 37
7.2.10 Kabupaten Musi Banyuasin ..... VII - 39
7.2.11 Kabupaten Empat Lawang ..... VII - 42
7.2.12 Kabupaten Muara Enim ..... VII - 44
7.2.13 Kabupaten OKU Selatan ..... VII - 47
7.2.14 Kabupaten Lahat ..... VII - 51
7.2.15 Kota Prabumulih ..... VII - 54
7.2.16 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) ..... VII - 56
7.2.17 Kabupaten Banyuasin ..... VII - 58

**BAB VIII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH** ..... VIII-1

**BAB IX KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH** ..... IX - 1

**BAB X PENUTUP** ..... X-1
10.1.1 Pedoman Transisi ..... X - 2
10.1.2 Kaidah Pelaksanaan ..... X - 3

# DAFTAR TABEL


| | | Hal |
|---|---|---|
| Tabel 2.1 | Luas Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan 2018 ..... | II - 2 |
| Tabel 2.2 | Luas Kabupaten/Kota Berdasarkan Kemiringan Lereng ..... | II - 4 |
| Tabel 2.3 | Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2017..... | II - 5 |
| Tabel 2.4 | Pembangkit Listrik eksisting berdasarkan sumber energi di Provinsi Sumatera Selatan ..... | II - 9 |
| Tabel 2.5 | Luas Wilayah Sungai dan Panjang Sungai Provinsi Sumatera Selatan..... | II - 13 |
| Tabel 2.6 | Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari menurut Stasiun di Provinsi Sumatera Selatan, 2017 ..... | II - 14 |
| Tabel 2.7 | Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan 2013-2014 (Ha) ..... | II - 16 |
| Tabel 2.8 | Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan 2015-2017 (Ha) ..... | II - 17 |
| Tabel 2.9 | Kabupaten/Kota yang telah atau belum memiliki Perda LP2B ..... | II - 25 |
| Tabel 2.10 | Luas Lahan Sawah yang ditanami Padi di Sumatera Selatan Tahun 2017 (Ha) . | II - 25 |
| Tabel 2.11 | Rekapitulasi Kejadian Bencana di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2013 – 2017 ..... | II - 31 |
| Tabel 2.12 | Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan ..... | II - 33 |
| Tabel 2.13 | Data Desa Rawan dan Sangat Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015..... | II - 35 |
| Tabel 2.14 | Data Desa Tangguh di BPBD Kabupaten di Sumatera Selatan ..... | II - 36 |
| Tabel 2.15 | Potensi Gerakan Tanah di Provinsi Sumatera Selatan ..... | II - 37 |
| Tabel 2.16 | Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten dan Kota Tahun 2013-2018..... | II - 40 |
| Tabel 2.17 | Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2018 | II - 42 |
| Tabel 2.18 | Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan, 2013-2018 ..... | II - 44 |
| Tabel 2.19 | Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2018 Atas Dasar Harga Konstan..... | II - 46 |
| Tabel 2.20 | Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2018 Atas dasar harga Berlaku..... | II - 49 |
| Tabel 2.21 | Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2018 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) ..... | II - 52 |
| Tabel 2.22 | Pertumbuhan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2014-2018 ..... | II - 53 |
| Tabel 2.23 | Perkembangan PDRB Kabupaten dan Kota Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Provinsi Sumatera Selatan ..... | II - 55 |
| Tabel 2.24 | Inflasi Spasial di Sumatera Selatan (2016-2018) ..... | II - 57 |
| Tabel 2.25 | Nilai Gini Ratio Provinsi Sumatera Selatan..... | II - 59 |
| Tabel 2.26 | Persentase Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... | II - 60 |
| Tabel 2.27 | Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 (Maret) ..... | II - 62 |
| Tabel 2.28 | Jumlah dan Persentase Kemiskinan Menurut Kabupaten dan Kota Tahun 2013-2018..... | II - 64 |
| Tabel 2.29 | Banyaknya Kasus Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Ditangani Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... | II - 65 |
| Tabel 2.30 | IPM Sumatera Selatan Menurut Komponen Tahun 2013-2018 ..... | II - 67 |
| Tabel 2.31 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... | II - 67 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.32 | Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... | II - 69 |
| Tabel 2.33 | Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... | II - 70 |
| Tabel 2.34 | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 ..... | II - 71 |
| Tabel 2.35 | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berusia 25 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 ..... | II - 73 |
| Tabel 2.36 | Pengeluaran Perkapita Menurut Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... | II - 75 |
| Tabel 2.37 | Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018..... | II - 75 |
| Tabel 2.38 | Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 ..... | II – 76 |
| Tabel 2.39 | Persentase Balita Gizi Buruk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... | II - 77 |
| Tabel 2.40 | Persentase Stunting pada Balita Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 .. | II - 78 |
| Tabel 2.41 | Persentase Luas tanah Bersertifikat di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2018 ..... | II - 78 |
| Tabel 2.42 | Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018..... | II - 79 |
| Tabel 2.43 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 ..... | II - 80 |
| Tabel 2.44 | Jumlah Tenaga Kerja yang Diserap PMDN dan PMA di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 -2018..... | II - 81 |
| Tabel 2.45 | Warisan Budaya Sumatera Selatan Yang Sudah Disertifikasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI..... | II - 81 |
| Tabel 2.46 | Jumlah Sanggar Seni Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan..... | II - 82 |
| Tabel 2.47 | Perkembangan Olahraga Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 ..... | II - 83 |
| Tabel 2.48 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Jenjang SMA/SMK/MA Tahun 2013-2017 ..... | II - 85 |
| Tabel 2.49 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2013 – 2017 ..... | II - 85 |
| Tabel 2.50 | Data Kejadian Bencana Rumah Korban Terdampak Bencana Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2017 ..... | II - 86 |
| Tabel 2.51 | Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2014-2017 ..... | II - 87 |
| Tabel 2.52 | Capaian Indikator SPM Kententeraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sumatera Selatan Tahun 2012-2017..... | II - 87 |
| Tabel 2.53 | Capaian Indikator SPM Sosial Sumatera Selatan Tahun 2014-2018 ..... | II - 88 |
| Tabel 2.54 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD dan SLTP Menurut Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... | II - 90 |
| Tabel 2.55 | Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SD/MI menurut Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... | II - 92 |
| Tabel 2.56 | Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SMP/MTs Menurut Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... | II - 93 |
| Tabel 2.57 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... | II - 94 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.58 | Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... | II - 95 |
| Tabel 2.59 | Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017..... | II - 96 |
| Tabel 2.60 | Rasio Penduduk Usia Sekolah Terhadap Ketersediaan Gedung Sekolah di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017..... | II - 97 |
| Tabel 2.61 | Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017..... | II - 99 |
| Tabel 2.62 | Rasio Murid Terhadap Jumlah Guru Pada Kelompok Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 ..... | II - 99 |
| Tabel 2.63 | APK Tingkat Pendidikan SMA/SMK/MA Menurut Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... | II - 100 |
| Tabel 2.64 | APM Tingkat Pendidikan SMA/SMK/MA Menurut Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... | II - 101 |
| Tabel 2.65 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... | II - 102 |
| Tabel 2.66 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... | II - 102 |
| Tabel 2.67 | Ketersediaan Sekolah Pada Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 ..... | II - 103 |
| Tabel 2.68 | Rasio Penduduk Usia Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Pada Jenjang SMA/MA/SMK di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 ..... | II - 103 |
| Tabel 2.69 | Rasio Guru Pada Jenjang Pendidikan SMA, SMK Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018..... | II - 105 |
| Tabel 2.70 | Rasio Guru dan Murid Menurut Kabupaten/Kota Pada Jenjang SMA/MA dan SMK di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 ..... | II - 112 |
| Tabel 2.71 | Kondisi Sarana dan Prasarana Jenjang SMA, SMK dan SLB di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018..... | II - 106 |
| Tabel 2.72 | Rasio Guru Pada Pendidikan Luar Biasa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... | II - 107 |
| Tabel 2.73 | Ketersediaan Sekolah Luar Biasa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018 . | II - 107 |
| Tabel 2.74 | Jumlah Sekolah Luar Biasa Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 ..... | II - 108 |
| Tabel 2.75 | Persentase Kualifikaksi Guru Per Jenjang Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018..... | II - 109 |
| Tabel 2.76 | Angka Melek Huruf Penduduk Menurut Tingkat Usia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018..... | II - 109 |
| Tabel 2.77 | Angka Kelulusan Untuk Setiap Jenjang PendidikanProvinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018..... | II - 111 |
| Tabel 2.78 | Angka Melanjutkan Sekolah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018..... | II - 112 |
| Tabel 2.79 | Persentase Akreditasi Sekolah Per Jenjang Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018..... | II - 113 |
| Tabel 2.80 | Rekapitulasi Lulusan SMK yang Terserap Kerja di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 - 2017 ..... | II - 113 |
| Tabel 2.81 | Angka Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas Provinsi Sumatera Selatan 2015-2017 ..... | II - 114 |
| Tabel 2.82 | Angka Kematian Ibu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... | II - 114 |
| Tabel 2.83 | Angka Kematian Bayi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... | II - 115 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.84 | Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018 ..... | II - 115 |
| Tabel 2.85 | Persentase Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018..... | II - 116 |
| Tabel 2.86 | Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018..... | II - 116 |
| Tabel 2.87 | Rasio Puskesmas Per 30.000 Penduduk di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2017 ..... | II - 117 |
| Tabel 2.88 | Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2013-2017 ..... | II – 117 |
| Tabel 2.89 | Persentase *Case Detection* Rate Penyakit TBC di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017..... | II - 118 |
| Tabel 2.90 | Persentase Kasus TBC yang diobati dan sembuh di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2016..... | II - 118 |
| Tabel 2.91 | Jumlah Kasus HIV dan AIDS Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 .... | II - 119 |
| Tabel 2.92 | Persentase Penderita DBD yang ditangani sesuai standar di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017..... | II - 119 |
| Tabel 2.93 | Jumlah Penderita DBD yang ditemukan dan diobati di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017..... | II - 120 |
| Tabel 2.94 | Jumlah kasus DBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017..... | II – 120 |
| Tabel 2.95 | Jumlah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang eliminasi Malaria Tahun 2013-2017..... | II – 120 |
| Tabel 2.96 | Kejadian Malaria per 1000 orang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 . | II – 121 |
| Tabel 2.97 | Persentase Desa yang Melaksanakan STBM di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 s/d 2018 ..... | II – 122 |
| Tabel 2.98 | Persentase Rumah Tangga ber-PHBS di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017..... | II – 122 |
| Tabel 2.99 | Persentase Kabupaten/Kota Sehat di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 s/d 2017..... | II – 122 |
| Tabel 2.100 | Jumlah Puskesmas Terakreditasi di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 ..... | II - 123 |
| Tabel 2.101 | Jumalah Puskesmas yang Mengembangkan Program Usila di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2017 ..... | II - 125 |
| Tabel 2.102 | Rasio dokter terhadap 100.000 Penduduk di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018..... | II - 125 |
| Tabel 2.103 | Rasio Dokter Gigi terhadap 100.000 Penduduk di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018..... | II - 125 |
| Tabel 2.104 | Rasio Bidan terhadap 100.000 Penduduk di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018..... | II - 126 |
| Tabel 2.105 | Rasio Tenaga Gizi terhadap 100.000 Penduduk di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018..... | II - 126 |
| Tabel 2.106 | Rasio Tenaga Sanitarian terhadap 100.000 Penduduk di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... | II - 126 |
| Tabel 2.107 | Persentase Pertolongan Persalinan di Fasilitasi Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 ..... | II - 127 |
| Tabel 2.108 | Persentase Desa/Kelurahan UCI di Sumatera Selatan 2013-2018 ..... | II - 127 |
| Tabel 2.109 | Jumlah Korban (Jiwa) Akibat Bencana per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018 ..... | II - 129 |
| Tabel 2.110 | Komposisi Panjang Jalan Menurut Statusnya di Sumatera Selatan Tahun 2018 | II - 132 |
| Tabel 2.111 | Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2014 ..... | II - 132 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.112 | Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2017..... | II - 133 |
| Tabel 2.113 | Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2017 | II - 134 |
| Tabel 2.114 | Kondisi Jaringan Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2017 ..... | II - 135 |
| Tabel 2.115 | Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Bersih Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... | II - 136 |
| Tabel 2.116 | Persentase Rumah Tangga Memiliki Sumber Listrik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2018 ..... | II - 137 |
| Tabel 2.117 | Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2013-2018 ..... | II - 138 |
| Tabel 2.118 | Data Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Oleh Pemda Bekerjasama dengan Kementerian ..... | II - 139 |
| Tabel 2.119 | Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Selatan..... | II - 140 |
| Tabel 2.120 | Jumlah Kepala Keluarga Kekurangan Rumah (Backlog) di Provinsi Sumatera Selatan..... | II - 141 |
| Tabel 2.121 | Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Ibukota Provinsi ..... | II - 142 |
| Tabel 2.122 | Batas Adminitrasi Wilayah Definitif ..... | II - 142 |
| Tabel 2.123 | Persentase Penegakan Perda Tahun 2012-2017..... | II - 146 |
| Tabel 2.124 | SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ..... | II - 146 |
| Tabel 2.125 | Indikator Kinerja Utama BPBD Prov. Sumsel yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... | II - 148 |
| Tabel 2.126 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan ..... | II - 151 |
| Tabel 2.127 | Data Kejadian Bencana Rumah Korban Terdampak Bencana di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2017 ..... | II - 153 |
| Tabel 2.128 | Jumlah Panti di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018..... | II - 153 |
| Tabel 2.129 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2013-2018 ..... | II - 157 |
| Tabel 2.130 | Permintaan Tenaga Kerja per Sektor Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2018 ..... | II - 158 |
| Tabel 2.131 | Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar dan Ditempatkan Tahun 2010-2017..... | II - 159 |
| Tabel 2.132 | Jumlah TKI menurut Daerah Asal, Jenis Kelamin dan Sektor Tahun 2013 – 2018 ..... | II - 160 |
| Tabel 2.133 | Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2013-2018 ..... | II - 161 |
| Tabel 2.134 | Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2013-2018..... | II - 162 |
| Tabel 2.135 | Data Hubungan Industrial Tahun 2018 di Sumatera Selatan ..... | II - 166 |
| Tabel 2.136 | Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Tahun 2014 – 2018 ..... | II - 166 |
| Tabel 2.137 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 ..... | II - 167 |
| Tabel 2.138 | Perkembangan Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Gender Tahun 2013-2017..... | II - 168 |
| Tabel 2.139 | Perkembangan Komponen IDG Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017.... | II - 169 |
| Tabel 2.140 | Nilai Verifikasi Tahap Awal (Aplikasi) KLA per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan ..... | II - 171 |
| Tabel 2.141 | Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018 ..... | II - 172 |
| Tabel 2.142 | Regulasi Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan ..... | II - 177 |
| Tabel 2.143 | Ketersediaan Pangan Utama Provinsi Sumatera Selatan..... | II - 180 |

Tabel 2.144 Fluktuasi Harga Komoditas Pangan Strategis Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018 ..... II - 181
Tabel 2.145 Perkembangan Jumlah Cadangan pangan (beras) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... II - 182
Tabel 2.146 Daftar Lokasi dan Jumlah Cadangan Pangan yang dititipkan di Lumbung Pangan Masyarakat (Ton) ..... II - 183
Tabel 2.147 Skor PPH Tingkat Konsumsi Pangan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018 ..... II - 184
Tabel 2.148 Neraca Bahan Makanan (NBM) Prov. Sumsel Tahun 2014-2018 ..... II - 185
Tabel 2.149 Skor PPH Tingkat Ketersediaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018.... II - 186
Tabel 2.150 Sebaran Angka Rawan Pangan Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 189
Tabel 2.151 Persentase Luas Tanah Bersertifikat di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2018 ..... II - 190
Tabel 2.152 Kualitas Air Sungai Provinsi Sumatera Selatan, 2017 ..... II - 193
Tabel 2.153 Kualitas Udara Ambient di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 ..... II - 201
Tabel 2.154 Emisi GRK dari enam sektor di Sumatera Selatan ..... II - 205
Tabel 2.155 Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengelolaan Persampahan ..... II - 207
Tabel 2.156 Timbunan Sampah di TPA Tahun 2018 ..... II - 209
Tabel 2.157 Sampah pada Sumbernya ..... II - 209
Tabel 2.158 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Selatan Tahun 2011 s.d. Tahun 2018 ..... II - 210
Tabel 2.159 Perbandingan Capaian IKLH Sumatera Selatan Tahun 2017 dengan Target RPJMD Tahun 2018 ..... II - 210
Tabel 2.160 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 211
Tabel 2.161 Kategori Desa di Sumatera Selatan berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2017 ..... II - 216
Tabel 2.162 Peserta KB Aktif di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 ..... II - 218
Tabel 2.163 Pemakaian Alat Kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 ..... II - 218
Tabel 2.164 Unmet Need KB di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 ..... II - 219
Tabel 2.165 Jumlah Keluarga Pra Sejahterah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2015 .. II- 220
Tabel 2.166 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2013-2017 ..... II - 221
Tabel 2.167 Kondisi Sarana Angkutan Umum yang Laik Jalan ..... II - 222
Tabel 2.168 Kondisi Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi ..... II - 222
Tabel 2.169 Kinerja Fasilitas Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 – 2017 ..... II - 222
Tabel 2.170 Indikator dan Target Penurunan Tingkat Fasilitas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 ..... II - 223
Tabel 2.171 Data Terminal di Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 225
Tabel 2.172 Jumlah Bus Pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 226
Tabel 2.173 Rute dan Panjang Rel PT. KA Divre III di Wilayah Sumbagsel ..... II - 226
Tabel 2.174 Jumlah Penumpang Light Rail Transit (LRT) Kota Palembang ..... II - 229
Tabel 2.175 Jumlah Wilayah di Sekitar Sungai ..... II - 230
Tabel 2.176 Daftar Dermaga Sungai dan Danau di Sumatera Selatan ..... II - 231
Tabel 2.177 Kondisi Bandar Udara di Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 235
Tabel 2.178 Persentase RT menurut Beberapa Indikator Akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi ..... II - 236
Tabel 2.179 Daftar Website dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 238

Tabel 2.180 Perkembangan Koperasi di Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... II - 243
Tabel 2.181 Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sumatera SelatanTahun 2013 – 2017 ..... II - 245
Tabel 2.182 Jumlah Investor PMDN dan PMA di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2018 ..... II - 245
Tabel 2.183 Jumlah Realisasi investasi PMDN dan PMA di Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... II - 247
Tabel 2.184 Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan non Perizinan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018 ..... II - 248
Tabel 2.185 Perkembangan Kepemudaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018 .... II - 251
Tabel 2.186 Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Asian Games 2018 ..... II - 252
Tabel 2.187 Perkembangan Keolahragaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018 ... II - 255
Tabel 2.188 Ketersediaan Buku Kabupaten/Kota Dalam Angka dan PDRB Kabupaten/Kota ... II - 256
Tabel 2.189 Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menggunakan Pelayanan Persandian ..... II - 257
Tabel 2.190 Jumlah Festival Seni dan Budaya yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 ..... II - 258
Tabel 2.191 Jumlah Perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan 2013-2017 ..... II - 259
Tabel 2.192 Jumlah Perpustakaan yang sesuai dengan Standar Perpustakaan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 ..... II - 259
Tabel 2.193 Jumlah Buku Koleksi Umum dan Referensi di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 2015-2017 ..... II - 260
Tabel 2.194 Data Ketersediaan Buku di Perpustakaan Daerah, Sekolah dan Universitas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... II - 260
Tabel 2.195 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 II - 261
Tabel 2.196 Jumlah Pustakawan dan tenaga teknis pengelola perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2017 ..... II - 262
Tabel 2.197 Tim Penilai Perpustakaan yang memiliki Sertifikat di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 ..... II - 263
Tabel 2.198 Nilai Tingkat Budaya Baca Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2018 ..... II - 263
Tabel 2.199 Jumlah Arsip Aktif dan Arsip Statis Provinsi Sumsel Tahun 2013-2018 ..... II - 264
Tabel 2.200 Produksi Ikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... II - 265
Tabel 2.201 Konsumsi Ikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... II - 265
Tabel 2.202 Data Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 267
Tabel 2.203 Produktivitas Tanaman Padi ..... II - 268
Tabel 2.204 Produktivitas Tanaman Jagung ..... II - 268
Tabel 2.205 Produktivitas Tanaman Kedelai ..... II - 269
Tabel 2.206 Produktivitas Tanaman Cabe ..... II - 271
Tabel 2.207 Produktivitas Tanaman Bawang ..... II - 272
Tabel 2.208 Produktivitas Tanaman Jeruk ..... II - 272
Tabel 2.209 Produktivitas Tanaman Duku ..... II - 273
Tabel 2.210 Produktivitas Tanaman Durian ..... II - 273
Tabel 2.211 Produktivitas Tanaman Nenas ..... II - 274
Tabel 2.212 Kontribusi Sektor pada Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 ..... II - 278
Tabel 2.213 Data Lahan Kritis Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 ..... II - 281
Tabel 2.214 Data Perkembangan Lahan Kritis Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 281
Tabel 2.215 Lahan Kritis Yang Direhabilitas di Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 282

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.216 | Hotspot dan Kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 | II - 285 |
| Tabel 2.217 | Izin Perhutanan Sosial yang telah dikeluarkan di Provinsi Sumatera Selatan | II - 287 |
| Tabel 2.218 | Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku | II - 289 |
| Tabel 2.219 | Capaian Kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2013-2018 | II - 290 |
| Tabel 2.220 | Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Sumatera SelatanTahun 2012-2018 | II - 291 |
| Tabel 2.221 | Nilai Perdagangan Antar Wilayah / Perdagangan Antar Pulau (Mode Transportasi Laut) | II - 292 |
| Tabel 2.222 | Persentase Kontribusi Sektoral Industri PengolahanTerhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2017 | II - 294 |
| Tabel 2.223 | Industri Menengah dan Besar Berbasis Sumber Daya Alama Lokal di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan 2018 | II - 295 |
| Tabel 2.224 | Sebaran Jumlah Transmigran Yang Ditempatkan di Kabupaten Sumatera Selatan Hingga Pada Tahun 2017 | II - 293 |
| Tabel 2.225 | Realisasi Penempatan Transmigran Tahun 2013 - 2017 | II - 297 |
| Tabel 2.226 | Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Dibangun Pada Permukiman Transmigrasi | II - 297 |
| Tabel 2.227 | Rekapitulasi Permasalahan Pertanahan Dalam Penyelenggaraan Transmigasi Tahun 2017 | II - 298 |
| Tabel 2.228 | Beban tunggakan sertifikat hak milik Atas tanah transmigran – provinsi sumatera selatan Tahun 2017 | II - 298 |
| Tabel 2.229 | Ketersediaan Dokumen Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan | II - 299 |
| Tabel 2.230 | Persentase ASN di Lingkungan Pemprov yang mengikuti Diklat Tahun 2014-2017 | II - 301 |
| Tabel 2.231 | Indikator Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan | II - 302 |
| Tabel 2.232 | Persentase Disiplin PNS Provinsi Sumatera Selatan | II - 302 |
| Tabel 2.233 | Rekapitulasi Hukuman Disiplin PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan | II - 302 |
| Tabel 2.234 | Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi yang Terisi melalui Seleksi Terbuka di Provinsi Sumatera Selatan | II - 303 |
| Tabel 2.235 | Capaian Indikator Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan | II - 304 |
| Tabel 2.236 | Skor maturitas SPIP Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 | II - 304 |
| Tabel 2.237 | Capaian Indikator Sekretariat Dewan Provinsi Sumatera Selatan | II - 309 |
| Tabel 2.238 | Capaian Indikator Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan | II - 306 |
| Tabel 2.239 | Penetapan Batas Wilayah Provinsi Sumsel dengan Provinsi Tetangga Tahun 2013-2017 | II - 306 |
| Tabel 2.240 | Penetapan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumsel Tahun 2013-2017 | II - 308 |
| Tabel 2.241 | Jumlah Peraturan yang disahkan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 | II - 308 |
| Tabel 2.242 | Nilai LKjIP (SAKIP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 | II - 309 |
| Tabel 2.243 | Hasil Capaian Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | II - 310 |
| Tabel 2.244 | Prestasi Kafilah Provinsi Sumatera Selatan pada STQ/MTQ Nasional | II - 310 |
| Tabel 2.245 | Perbandingan Jumlah Sekolah Sehat terhadap Jumlah Sekolah | II - 312 |
| Tabel 2.246 | Prestasi Kafilah Provinsi Sumatera Selatan pada Qasidah Skala Besar/Bintang Vokalis Nasional | II - 312 |
| Tabel 2.247 | Hasil Capaian Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan | II - 313 |
| Tabel 2.248 | Kuantitas dan Kualitas Hasil Penelitian Balitbangda Prov. Sumsel | II - 314 |
| Tabel 2.249 | Lembaga Litbang yang Terbentuk di Kab/Kota Prov. Sumsel | II - 314 |

Tabel 2.250 Paten dan Inovator Balitbangda Prov. Sumsel ..... II - 315
Tabel 2.251 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga ..... II - 315
Tabel 2.252 Nilai Tukar Petani Tahun 2013-2017 ..... II - 316
Tabel 2.253 Pengeluaran Persentase Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 ..... II - 317
Tabel 2.254 Rasio Panjang Jalan/Jumlah Kendaraan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 ..... II - 318
Tabel 2.255 Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2016 ..... II - 319
Tabel 2.256 Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2016 ..... II - 319
Tabel 2.258 Kegiatan Bongkar Muat Barang dan Penumpang di Pelabuhan Palembang Tahun 2012-2016 ..... II - 320
Tabel 2.258 Lalu Lintas Angkutan Udara untuk Penumpang di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang ..... II - 320
Tabel 2.259 Lalu Lintas Angkutan Udara untuk Barang di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang ..... II - 321
Tabel 2.260 Ketersediaan Perda RTRW ..... II - 321
Tabel 2.261 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang ..... II - 325
Tabel 2.262 Statistik Perasuransian Indonesia 2017 ..... II - 326
Tabel 2.263 Jumlah Restoran/Rumah Makan menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 ..... II - 327
Tabel 2.264 Jumlah Hotel Berbintang dan Kamar Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 ..... II - 327
Tabel 2.265 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2018 ..... II - 328
Tabel 2.266 Potensi Sumber Energi di Sumatera Selatan Tahun 2017 ..... II - 329
Tabel 2.267 Rumah Tangga Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi di Sumatera Selatan Tahun 2017 ..... II - 329
Tabel 2.268 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Memiliki Sumber Listrik ..... II - 330
Tabel 2.269 Pengeluaran Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Akses terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi 2012-2016 ..... II - 331
Tabel 2.270 Jumlah Tindak Kejahatan menurut Jenis Kegiatan menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 ..... II - 333
Tabel 2.271 Data Anggota Linmas Desa/Kelurahan dan Pos Kamling Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2017 ..... II - 333
Tabel 2.271 Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perizinan Usaha di Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 334
Tabel 2.273 Angka Beban Tanggungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 ..... II - 336
Tabel 2.274 Tabel Pencapaian Pilar I (Pembangunan Nasional) ..... II - 337
Tabel 2.275 Tabel Pencapaian Pilar II (Pembangunan Ekonomi) ..... II - 344
Tabel 2.276 Tabel Pencapaian Pilar III (Pembangunan Lingkungan) ..... II - 348
Tabel 2.277 Tabel Pencapaian Pilar IV (Tata Kelola Pelaksanaan) ..... II - 354
Tabel 2.278 Profil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 356
Tabel 2.279 Rincian Penyertaan Modal dan Aset BUMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 ..... II - 358
Tabel 2.280 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ..... II - 359
Tabel 2.281 Daftar Kerjasama yang Telah Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 360

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.282 | Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan ..... | II - 362 |
| Tabel 3.1 | Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 ..... | III - 2 |
| Tabel 3.2 | Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 ..... | III - 3 |
| Tabel 3.3 | Struktur Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 . | III - 4 |
| Tabel 3.4 | Struktur Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 ..... | III - 5 |
| Tabel 3.5 | Struktur Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017..... | III - 6 |
| Tabel 3.6 | Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2017 ..... | III - 8 |
| Tabel 3.7 | Rasio Likuiditas Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan..... | III - 11 |
| Tabel 3.8 | Rasio Solvabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ..... | III - 11 |
| Tabel 3.9 | Proporsi Realisasi Belanja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2017..... | III - 14 |
| Tabel 3.10 | Realisasi Defisit Riil Anggaran Provinsi Sumatera Selatan 2015-2017 ..... | III - 14 |
| Tabel 3.11 | Realisasi Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2017..... | III - 15 |
| Tabel 3.12 | Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2017 ..... | III - 15 |
| Tabel 3.13 | Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2014-2017 (Unit)..... | III - 18 |
| Tabel 3.14 | Pertumbuhan Kendaraan Baru Tahun 2016-2017 (unit) ..... | III - 19 |
| Tabel 3.15 | Rekap Unit kendaraan yang aktif membayar pajak dan Rekap sementara Jumlah Tunggakan PKB Tahun 2013-2017 Provinsi Sumatera Selatan ..... | III - 19 |
| Tabel 3.16 | Proyeksi Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 ..... | III - 25 |
| Tabel 3.17 | Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 ..... | III - 28 |
| Tabel 3.18 | Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023..... | III - 29 |
| Tabel 3.19 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Derah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 ..... | III - 32 |
| Tabel 3.20 | Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 ..... | III - 32 |
| Tabel 4.1 | Indikator Makro ..... | IV - 2 |
| Tabel 4.2 | Indikator Kinerja Akhir RPJMD 2013-2018..... | IV - 6 |
| Tabel 4.3 | Permasalahan IKD per Misi ..... | IV - 6 |
| Tabel 4.4 | Tabel Resume Permasalahan Pada Kondisi Awal RPJMD 2018-2023 ..... | IV - 7 |
| Tabel 4.5 | Hasil Telaahan RPJPD Periode Perencanaan Tahun 2018-2023..... | IV - 24 |
| Tabel 4.6 | Hasil Telaah Struktur Ruang Provinsi Sumatera Selatan ..... | IV - 31 |
| Tabel 4.7 | Hasil Telaah Pola Ruang Provinsi Sumatera Selatan ..... | IV - 34 |
| Tabel 4.8 | Keadaan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Menurut Jenis Kelamin ..... | IV - 54 |
| Tabel 4.9 | Keadaan Ketenagakerjaan Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin ..... | IV - 56 |
| Tabel 4.10 | Sasaran Umum Pembangunan Sektor Energi Tahun 2014-2018 ..... | IV - 60 |
| Tabel 4.11 | Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2015-2018 ..... | IV - 69 |
| Tabel 4.12 | Kondisi Makro dan Infrastruktur Dasar pada Kabupaten Daerah Tertinggal di Sumatera Selatan ..... | IV - 74 |
| Tabel 4.13 | Nilai Indeks Ketertinggalan Kabupaten Daerah Tertinggal di Sumatera Selatan | IV - 74 |
| Tabel 4.14 | Rekapitulasi Pendanaan KPBU Penugasan..... | IV - 82 |
| Tabel 4.15 | Persentase Akses Air Bersih di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2018 ... | IV - 83 |
| Tabel 4.16 | Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2011-2018 ..... | IV - 85 |
| Tabel 4.17 | Indikator Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Selatan ..... | IV - 87 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 4.18 | LKPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan | IV - 106 |
| Tabel 5.1 | Keterkaitan Misi dan Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 | V - 5 |
| Tabel 5.2 | Keterkaitan Misi dan Program Kerja HDMY RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 | V - 6 |
| Tabel 5.3 | Sinkronisasi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036 dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2018-2023 | V - 11 |
| Tabel 5.4 | Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 | V - 15 |
| Tabel 6.1 | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 | VI - 2 |
| Tabel 6.2 | Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 | VI - 20 |
| Tabel 6.3 | Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 | VI - 21 |
| Tabel 7.1 | Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018-2023 | VII - 17 |
| Tabel 7.2 | Target Indikator Makro Kota Palembang Tahun 2018-2023 | VII - 20 |
| Tabel 7.3 | Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2023 | VII - 22 |
| Tabel 7.4 | Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2023 | VII - 24 |
| Tabel 7.5 | Target Indikator Makro Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 | VII - 28 |
| Tabel 7.6 | Target Indikator Makro Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 | VII - 30 |
| Tabel 7.7 | Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018-2023 | VII - 33 |
| Tabel 7.8 | Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018-2023 | VII - 36 |
| Tabel 7.9 | Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018-2023 | VII - 38 |
| Tabel 7.10 | Target Indikator Makro Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023 | VII - 41 |
| Tabel 7.11 | Target Indikator Makro Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 | VII - 43 |
| Tabel 7.12 | Target Indikator Makro Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 | VII - 46 |
| Tabel 7.13 | Target Indikator Makro Kabupaten OKU Selatan Tahun 2018-2023 | VII - 51 |
| Tabel 7.14 | Target Indikator Makro Kabupaten Lahat Tahun 2018-2023 | VII - 53 |
| Tabel 7.15 | Target Indikator Makro Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 | VII - 55 |
| Tabel 7.16 | Target Indikator Makro Kabupaten PALI Tahun 2018-2023 | VII - 58 |
| Tabel 7.17 | Target Indikator Makro Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 | VII - 61 |
| Tabel 8.1 | Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 Provinsi Sumatera Selatan | VIII - 1 |
| Tabel 8.2 | Indikasi Rencnaa Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 | VIII - 2 |
| Tabel 9.1 | Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 | IX - 2 |
| Tabel 9.2 | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan | IX - 4 |
| Tabel 9.3 | Indikator Kinerja Utama Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 | IX - 23 |
| Tabel 9.4 | Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 | IX - 26 |

## DAFTAR GAMBAR


| | | Hal |
|---|---|---|
| Gambar 1.1 | Keterkaitan antara Dimensi Pembangunan dengan Nawa Cita dan Program Prioritas Nasional | I - 16 |
| Gambar 1.2 | Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya | I - 18 |
| Gambar 2.1 | Peta Wilayah Provinsi Sumatera Selatan | II - 3 |
| Gambar 2.2 | Peta Sebaran Batubara di Provinsi Sumatera Selatan | II - 7 |
| Gambar 2.3 | Peta Wilayah Usaha Pertambangan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan | II - 8 |
| Gambar 2.4 | Peta Izin Usaha Pertambangan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan | II - 8 |
| Gambar 2.5 | Peta Pembangkit Ketenagalistrikan yang Tersebar di Provinsi Sumatera Selatan | II - 10 |
| Gambar 2.6 | Peta Sebaran Panas Bumi di Provinsi Sumatera Selatan | II - 10 |
| Gambar 2.7 | Pola Struktur Cekungan Sumatera Selatan | II - 11 |
| Gambar 2.8 | Peta Sebaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas Provinsi Sumatera Selatan | II - 20 |
| Gambar 2.9 | Peta Sebaran Kawasan Hutan Produksi Tetap Provinsi Sumatera Selatan | II - 21 |
| Gambar 2.10 | Peta Sebaran Kawasan Hutan Produksi Konversi Provinsi Sumatera Selatan | II - 22 |
| Gambar 2.11 | Peta Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan | II - 24 |
| Gambar 2.12 | Peta Kawasan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan | II - 26 |
| Gambar 2.13 | Peta Kawasan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan | II - 27 |
| Gambar 2.14 | Peta Kawasan Peruntukan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan | II - 28 |
| Gambar 2.15 | Peta Kawasan Peruntukan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan | II - 29 |
| Gambar 2.16 | Peta Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Sumatera Selatan | II - 30 |
| Gambar 2.17 | Peta Kawasan Peruntukan Lainnya Provinsi Sumatera Selatan | II - 31 |
| Gambar 2.18 | Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Sumsel, 2015 | II - 34 |
| Gambar 2.19 | Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 | II - 41 |
| Gambar 2.20 | Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 | II - 43 |
| Gambar 2.21 | Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2018 di Provinsi Sumatera Selatan | II - 48 |
| Gambar 2.22 | Kontribusi PDRB Kabupaten dan Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 | II - 56 |
| Gambar 2.23 | Inflasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 | II - 57 |
| Gambar 2.24 | Perkembangan PDRB PerKapita di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 | II - 58 |
| Gambar 2.25 | Gini Rasio Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 | II - 59 |
| Gambar 2.26 | Perkembangan Kemiskinan Tahun 2013-2018 di Provinsi Sumatera Selatan | II - 61 |
| Gambar 2.27 | Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan (dalam ribu) Tahun 2013-2018 | II - 61 |
| Gambar 2.28 | Perkembangan IPM Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2013-2018 | II - 66 |
| Gambar 2.29 | Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2013-2018 | II - 68 |
| Gambar 2.30 | Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2013-2018 | II - 70 |
| Gambar 2.31 | Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2013-2018 | II - 73 |
| Gambar 2.32 | Pengeluaran Perkapita Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2013-2018 | II - 74 |

| | | |
|---|---|---|
| Gambar 2.33 | Angka Partisipasi Kasar PAUD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018.... | II - 88 |
| Gambar 2.34 | Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SD dan SLTP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018..... | II - 89 |
| Gambar 2.35 | Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SD dan SLTP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018..... | II - 91 |
| Gambar 2.36 | Angka Melek Huruf (AMH) pada Tingkat Usia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 ..... | II - 110 |
| Gambar 2.37 | Angka Putus Sekolah per Jenjang Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 - 2018 ..... | II - 110 |
| Gambar 2.38 | Roadmap Eliminasi Malaria Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 - 2020 ..... | II - 121 |
| Gambar 2.39 | Status kelulusan akreditasi Puskesmas di Sumatera Selatan Tahun 2016-2017 ..... | II - 123 |
| Gambar 2.40 | Jumlah RSUD Kabupaten / Kota yang sudah terakreditasi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2017..... | II - 124 |
| Gambar 2.41 | Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2017 ..... | II - 124 |
| Gambar 2.42 | Distribusi Kejadian Bencana Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2018 ..... | II - 128 |
| Gambar 2.43 | Jenis Bencana yang Terjadi di Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2018 ..... | II - 128 |
| Gambar 2.44 | Persentase Penduduk Yang Terdampak KLB yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 – 2018 .... | II - 130 |
| Gambar 2.45 | Distribusi Lokasi KLB di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2018..... | II - 131 |
| Gambar 2.46 | Distribusi Jenis KLB di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2018 ..... | II - 131 |
| Gambar 2.47 | Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... | II - 138 |
| Gambar 2.48 | Pemberian Penghargaan kepada Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Sepuluh Provinsi Terbaik Pertama Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 ..... | II - 145 |
| Gambar 2.49 | Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin (Persen) Tahun 2013-2017 ..... | II - 162 |
| Gambar 2.50 | Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tempat Tinggal (Persen) Tahun 2013-2018..... | II - 163 |
| Gambar 2.51 | Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan | II - 164 |
| Gambar 2.52 | Indikator Kota Layak Anak (KLA)..... | II - 170 |
| Gambar 2.53 | Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018..... | II - 173 |
| Gambar 2.54 | Peta Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 ..... | II - 184 |
| Gambar 2.55 | Sebaran Prioritas Kabupaten dan Kota 2018 ..... | II - 185 |
| Gambar 2.56 | Produksi Daging Tahun 2013-2018..... | II - 187 |
| Gambar 2.57 | Produksi Telur Tahun 2013-2018 ..... | II - 187 |
| Gambar 2.58 | Produksi Susu (Liter) Tahun 2014-2018..... | II - 188 |
| Gambar 2.59 | Jumlah Desa di Sumatera Selatan menurut status Indeks Pembangunan Desa Tahun 2018..... | II - 217 |
| Gambar 2.60 | Jalur Kereta Api dan Stasiun di Sumatera Bagian Selatan..... | II - 227 |
| Gambar 2.61 | Pelabuhan Penyebrangan Tanjung Api-api ..... | II - 234 |
| Gambar 2.62 | Jumlah Perolehan Medali Sumsel pada PON..... | II - 254 |

| | | |
|---|---|---|
| Gambar 2.63 | Areal Perhutanan Sosial Sumatera Selatan (Revisi II) ..... | II - 288 |
| Gambar 2.64 | Bauran Energi Sumatera Selatan ..... | II - 290 |
| Gambar 2.65 | Nilai Kemandirian Keuangan ..... | II - 300 |
| Gambar 2.66 | Grafik Time Series Bencana Banjir, Korban, dan Kerugian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014- 2017 ..... | II - 323 |
| Gambar 2.67 | Bencana Kekeringan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 ..... | II - 324 |
| Gambar 2.68 | Bencana Kekeringan Tahun 2016 dan Tahun 2017 ..... | II - 325 |
| Gambar 2.69 | Rasio Desa Berlistrik ..... | II - 331 |
| Gambar 4.1 | Komponen Pembentuk Isu Strategis Provinsi Sumatera Selatan ..... | IV - 1 |
| Gambar 4.2 | Laju Penurunan Angka Kemiskinan, 2010 – 2018 ..... | IV - 37 |
| Gambar 4.3 | Proporsi Penduduk Provinsi Sumatera Selatan dengan Asupan Kalori Minimum di bawah 1.400 kkal/Kapita/hari ..... | IV - 38 |
| Gambar 4.4 | Persentase Stunting pada Balita Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 - 2017 ..... | IV - 39 |
| Gambar 4.5 | Obesitas Pada Anak Balita Provinsi Sumatera Selatan ..... | IV - 40 |
| Gambar 4.6 | Obesitas Pada Penduduk Dewasa > 18 Tahun Provinsi Sumatera Selatan ..... | IV - 40 |
| Gambar 4.7 | Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... | IV - 42 |
| Gambar 4.8 | Angka Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 - 2018 ..... | IV - 43 |
| Gambar 4.9 | Jumlah Kematian Balita di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 - 2018 ..... | IV - 43 |
| Gambar 4.10 | Persentase Anak Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018 ..... | IV - 44 |
| Gambar 4.11 | Kejadian Malaria per 1.000 orang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2017 ..... | IV - 45 |
| Gambar 4.12 | Obesitas pada Penduduk Dewasa > 18 Tahun Provinsi Sumatera Selatan ..... | IV - 45 |
| Gambar 4.13 | Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018 ..... | IV - 47 |
| Gambar 4.14 | Tren APK PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan Perguruan Tinggi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018 ..... | IV - 48 |
| Gambar 4.15 | Tren Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 - 2018 . | IV - 49 |
| Gambar 4.16 | Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun ..... | IV - 49 |
| Gambar 4.17 | Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik Tahun 2013 – 2017 ..... | IV - 50 |
| Gambar 4.18 | Persentase Harapan Lama Sekolah Tahun 2013 – 2018 ..... | IV - 51 |
| Gambar 4.19 | Rasio APM Perempuan dari Laki-Laki SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Tahun 2015 – 2018 ..... | IV - 51 |
| Gambar 4.20 | Tren IPG dan IDG Sumsel Tahun 2013-2018..... | IV - 53 |
| Gambar 4.21 | Rasio Elektrifikasi Sumsel (Persen) 2008 – 2018..... | IV - 61 |
| Gambar 4.22 | Rasio Elektrifikasi Kab/Kota di Sumsel (Persen) 2017..... | IV - 61 |
| Gambar 4.23 | Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga Sumsel (Persen) 2015 – 2017 ..... | IV - 62 |
| Gambar 4.24 | Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2010 – 2018 ..... | IV - 63 |
| Gambar 4.25 | Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Sumsel (Persen) 2012 – 2018 ..... | IV - 64 |
| Gambar 4.26 | PDRB Per Kapita Sumsel (Ribu Rupiah) 2013 – 2018 ..... | IV - 65 |
| Gambar 4.27 | Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama (Persen) 2014 - 2017 ..... | IV - 65 |
| Gambar 4.28 | Proporsi Pekerja Informal Sektor Non Pertanian, 2015-2018 ..... | IV - 66 |
| Gambar 4.29 | Presentase Tenaga Kerja Formal (persen), 2015-2018 ..... | IV - 67 |
| Gambar 4.30 | Presentase Tenaga Kerja Informal sektor Pertanian Sumsel (Persen) Tahun 2015-2018 ..... | IV - 67 |
| Gambar 4.31 | Upah Rata-Rata Per Jam Pekerja (Rupiah), 2015 dan 2016 ..... | IV - 68 |

| | | |
|---|---|---|
| Gambar 4.32 | Tingkat Setengah Pengangguran (Persen), 2015-2018 ..... | IV - 69 |
| Gambar 4.33 | Persentase Usia Muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan, 2015-2018 ..... | IV - 70 |
| Gambar 4.34 | Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDB/PDRB ..... | IV - 70 |
| Gambar 4.35 | Proporsi Individu yang menggunakan Telepon Genggam di Sumatera Selatan, 2015 - 2017 ..... | IV - 71 |
| Gambar 4.36 | Proporsi Individu yang Menggunakan Internet, 2015-2017 ..... | IV - 71 |
| Gambar 4.37 | Koefisien Gini Sumatera Selatan, 2015-2018 ..... | IV - 73 |
| Gambar 4.38 | Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2018 ..... | IV - 77 |
| Gambar 4.39 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Sumatera Selatan Tahun 2010-2017 ..... | IV - 77 |
| Gambar 4.40 | Jumlah Pertumbuhan Ekspor Produk Non Migas (%) ..... | IV - 78 |
| Gambar 4.41 | Persentase Akses Air Bersih di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2018... | IV - 83 |
| Gambar 4.42 | Persentase Akses Sanitasi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2018 ..... | IV - 84 |
| Gambar 4.43 | Jumlah Ketaatan Proper 2002-2016..... | IV - 91 |
| Gambar 4.44 | Jumlah Perusahaan yang memiliki sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan (SML)..... | IV - 92 |
| Gambar 4.45 | Peta Potensi Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) ..... | IV - 98 |
| Gambar 4.46 | Peta Kawasan Konservasi Perairan ..... | IV - 99 |
| Gambar 4.47 | Indeks Kebebasan Sipil Sumatera Selatan dan Nasional (2011-2017) ..... | IV - 103 |
| Gambar 4.48 | Kejahatan terhadap Nyawa (Pembunuhan) ..... | IV - 103 |
| Gambar 7.1 | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.... | VII - 2 |
| Gambar 7.2 | Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 | VII - 4 |
| Gambar 7.3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan per Agustus Tahun 2018..... | VII - 5 |
| Gambar 7.4 | Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 ..... | VII - 6 |
| Gambar 7.5 | Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Kewenangan Tahun 2017 ..... | VII - 7 |
| Gambar 7.6 | Panjang Jalan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Kewenangan Tahun 2017 ..... | VII - 7 |
| Gambar 7.7 | Akses Air Minum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018..... | VII - 8 |
| Gambar 7.8 | Akses Sanitasi (Air Limbah) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 ..... | VII - 9 |
| Gambar 7.9 | Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan..... | VII - 11 |
| Gambar 7.10 | Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus Tahun 2018 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan | VII - 12 |
| Gambar 7.11 | Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus Tahun 2018 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan | VII - 14 |
| Gambar 7.12 | Peta Arahan Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 . | VII - 15 |
| Gambar 7.13 | Peta Proyek Strategis Nasional Provinsi Sumatera Selatan ..... | VII - 15 |
| Gambar 7.14 | Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012-2032..... | VII - 18 |
| Gambar 7.15 | Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032 ..... | VII - 20 |
| Gambar 7.16 | Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031..... | VII - 22 |
| Gambar 7.17 | Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2036..... | VII - 25 |

Gambar 7.18 Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 ..... VII - 28
Gambar 7.19 Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032 ..... VII - 31
Gambar 7.20 Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012-2032 ..... VII - 34
Gambar 7.21 Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2032 ..... VII - 37
Gambar 7.22 Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012-2032 ..... VII - 39
Gambar 7.23 Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036 ..... VII - 41
Gambar 7.24 Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012-2032 ..... VII - 44
Gambar 7.25 Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012-2032 ..... VII - 47
Gambar 7.26 Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Kabupaten OKU Selatan Tahun 2012-2032 ..... VII - 51
Gambar 7.27 Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 ..... VII - 54
Gambar 7.28 Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Kota Prabumulih Tahun 2012-2032 ..... VII - 56
Gambar 7.29 Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018-2038 ..... VII - 58
Gambar 7.30 Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012-2032 ..... VII - 62

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Daerah untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun.

Periode pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018 telah berakhir. Periode pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 dimulai sejak dilantiknya Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya pada tanggal 1 Oktober 2018.

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 merupakan RPJMD Keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD untuk periode ini, memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, karena RPJMD ini merupakan periode terakhir dimana tuntutan untuk mencapai target RPJPD juga memasuki periode terakhir pula. Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah “SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA” dalam rangka mencapai visi tersebut dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 5 Misi yaitu :

1. Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.
4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 telah melewati beberapa tahapan sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD antara lain Forum Konsultasi Publik pada tanggal 13 November 2018, Pembahasan dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 4 Desember 2018, dan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Gubernur dengan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan tentang Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 pada tanggal 7 Desember 2018. Telah dilakukan Konsultasi Rancangan Awal RPJMD ke Kemendagri pada tanggal 14 Desember 2018, Musrenbang RPJMD pada tanggal 16 Januari 2019, serta Rapat Pembahasan bersama Pansus IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Februari-Maret 2019 dan dilakukan penandatanganan bersama antara Gubernur dan Ketua DPRD terhadap Ranperda RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 pada tanggal 2 April 2019. Selanjutnya dokumen RPJMD telah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri Tanggal 15 April 2019 dan terbit keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-1072 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 Tanggal 30 April 2019. Setelah diperbaiki sesuai masukan, disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan mendapat No. Register (1-123/2019) pada tanggal 20 Mei 2019 sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023.

Penyusunan RPJMD, telah melalui analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif dalam rangka mendukung perumusan isu-isu strategis daerah dan arah kebijakan serta rencana program pembangunan. Salah satu rekomendasi yang menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan dan program pembangunan. Untuk itu RPJMD Provinsi Sumatera Selatan juga didasarkan pada KLHS RPJMD dalam rangka mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

## 1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka penyusunan RPJMD ini sudah memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan.

Keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnnya, yang secara detil seperti dijelaskan sebagai berikut.

### 1.3.1 RPJMD dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 merupakan RPJMD Keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD untuk periode ini, memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, karena RPJMD ini merupakan periode terakhir dimana tuntutan untuk mencapai target RPJPD juga memasuki periode terakhir pula.

Pada RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025 dinyatakan visi yang ingin dicapai oleh Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 adalah : "*Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025*". Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, misi Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 adalah (1) menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional, (2) meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan, (3) mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, dan (4) meningkatkan kapasitas manajemen kepemerintahan.

Tahapan keempat RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025 difokuskan untuk memantapkan perwujudan masyarakat Sumatera Selatan yang

mandiri, maju, sejahtera, lestari, unggul dan terdepan melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Sumatera Selatan yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Adapun tahapan yang dilakukan pada tahap keempat RPJPD sebagai berikut :

1. Memantapkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi dengan prioritas pada :
   1) Pemantapan laju pertumbuhan ekonomi daerah diatas 6,5 persen per tahun melalui pemantapan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, pertambangan, dan pariwisata dengan menciptakan integrasi antar dan intersektor;
   2) Pemantapan struktur ekonomi primer yang didukung oleh sektor sekunder dan sektor tersier melalui penguatan dan pemantapan nilai tambah sektor primer yang berbasis industri, pemantapan bidang industri, dan pemantapan bidang jasa yang potensial;
   3) Pemantapan sektor-sektor unggulan daerah melalui penguatan dan pemantapan sektor-sektor baru yang berpotensi dan memiliki nilai tambah;
   4) Penguatan Surplus Neraca Perdagangan Daerah melalui penguatan investasi dan daya saing, penguatan ekspor komoditi unggulan yang lebih berkualitas, dan penurunan jumlah impor yang digantikan dengan produk berbasis lokal;
   5) Penurunan Angka Pengangguran terbuka hingga bisa mencapai dibawah 10%, melalui penguatan dan pemantapan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar dan padat karya;
   6) Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Kesenjangan Pendapatan melalui pemantapan kemampuan dan keahlian penduduk miskin, pengembangan kesempatan bekerja dan berusaha, dan percepatan pertumbuhan sektor riil (UMKM) yang mencapai 33.000 unit usaha baru;
   7) Pemantapan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan dan pemantapan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli.

2. Memantapkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, dengan prioritas pada:
   1) Pemantapan kualitas dan pelayanan pendidikan melalui penguatan dan pemantapan guru yang bersertifikasi,penguatan dan pemantapan pelayanan, fasilitas, dan jumlah sekolah dan guru, dan pengembangan

kesempatan belajar dan bersekolah yang disertai dengan alokasi anggaran pembangunan sekurang-kurangnya 20 persen;

2) Pemantapan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengembangan kesempatan dan pemantapan akses terhadap informasi dan teknologi, pemantapan lembaga penelitian, dan penguatan dan pemantapan hasil dan implementasi penelitian;
3) Pemantapan derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan pemeriksaan dan pelayanan ibu dan bayi, pemantapan fasilitas melahirkan, dan pemantapan ketersediaan paramedis beserta sarana kesehatannya;
4) Pemantapan kualitas permukiman dan perumahan melalui penguatan penyediaan perumahan sehat sederhana beserta sarana air bersih dan drainase serta air limbah yang memenuhi standar, dan pengurangan kawasan kumuh;
5) Pemantapan pembangunan kesejahteraan sosial melalui pemantapan peran gender, penguatan penjaminan perlindungan perdagangan anak dan pekerja anak, penguatan aktivitas keagamaan, kebudayaan, seni dan budaya lokal, kepemudaan, dan olahraga berikut pemantapan sarana dan prasarananya, dan pemantapan jaringan KB, akses pelayanan sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), serta penguatan UMR, perlindungan terhadap tenaga kerja informal, hubungan industrial buruh, pengusaha dan pemerintah;

3. Pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan, yang berfokus pada :
   1) Pemantapan pemanfaatan sumberdaya energi yang berwawasan lingkungan melalui pemantapan sistim pengelolaan energi dan teknologi energi, dan terjaminnya pemenuhan kecukupan cadangan energi pemberian nilai tambah ekspor energi, dan pemantapan sumberdaya energi alternatif berbasis komoditi pertanian;
   2) Pemantapan tata ruang yang adil dan seimbang melalui pemantapan pola lokasi kota-kota, distribusi hirarki kota seimbang dalam setiap tingkatan, dan distribusi fungsi kota yang sesuai dengan potensinya, serta pemantapan kawasan budidaya dan pelestarian kawasan lindung;
   3) Pemantapan sistem transportasi melalui peningkatan panjang jalan, penguatan dan pemantapan akses antar pusat-pusat permukiman dan akses pada kawasan sentra produksi;
   4) Pemantapan pembangunan jaringan infrastruktur pelabuhan udara, laut, jalan raya, dan kereta api melalui penguatan dan pemantapan pelayanan teritorial, peningkatan wilayah pelayanan moda transportasi, penguatan

dan pemantapan integrasi antar moda, peningkatan variasi moda dan kapasitas kawasan prasarana *gateway*;

5) Revitalisasi pertanian, pemantapan sistem agribisinis, dan pemantapan institusi dan kelembagaan pengelolaan pertanian melalui peningkatan luas dan areal tanam dan ternak, penguatan dan pemantapan sarana produksi, pemantapan produktifitas, dan pemantapan sistem produksi, pemasaran, distribusi dan lembaga pertanian.

4. Pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih, dan bertanggung jawab dengan fokus pada :
   1) Pemantapan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah melalui pemantapan kapasitas sistem, organisasi, dan individu dalam penyelenggaraan pemerintahan;
   2) Pemantapan kualitas pelayanan umum melalui pemantapan kompetensi SDM aparatur, pemantapan Standar Pelayanan Minimum dan Standar Operasional Prosedur, dan pemantapan kepemimpinan birokrasi yang beretika;
   3) Pemantapan kapasitas keuangan daerah melalui pemantapan struktur anggaran yang lebih efektif dan efesien, dan pemantapan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
   4) Pemantapan peran serta masyarakat melalui penguatan dan pemantapan peranserta dalam perencanaan,pelaksanaan,dan pengawasan pembangunan;
   5) Keterbukaan informasi dan teknologi melalui penguatan penyebaran informasi dan teknologi, pemantapan keterbukaan dan transparansi informasi, dan berfungsi optimalnya kebebasan media yang bertanggung jawab dan penerapan peraturan perundangan yang menjamin keterbukaan informasi dan teknologi;
   6) Pemantapan pembangunan politik lokal melalui pemantapan kapasitas lembaga legislatif daerah, organisasi dan partai politik,dan pemantapan pendidikan politik masyarakat yang disertai juga dengan pemantapan etika politik lokal;
   7) Pemantapan kapasitas kelembagaan penegakan hukum dan tata peraturan daerah melalui pemantapan pendayagunaan peraturan daerah dan berfungsi optimalnya penerapan dan penindakan pelanggaran dengan prinsip adanya kesetaraan hokum;
   8) Pemantapan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana melalui pemantapan fungsi dan peran lembaga perlindungan masyarakat dan penanggulangan, pengatasan kerawanan sosial dan penanggulangan bencana;

9) Pemantapan aspek ketertiban dan keamanan daerah melalui penguatan profesionalitas aparat, pemantapan pelayanan kepada masyarakat, dan penguatan peran serta masyarakat dalam masalah keamanan lingkungan.

### 1.3.2 RPJMD dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Pulau Sumatera dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Selatan. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan. RTRW Provinsi Sumatera Selatan memuat strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang untuk mewujudkan pembangunan yang merata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Sesuai dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan, pengembangan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang terdiri dari kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Adapun kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang adalah :

1. Menciptakan Keterpaduan Sistem Perkotaan, dengan strategi :
   a. Memantapkan dan meningkatkan fungsi pusat-pusat kegiatan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
   b. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan lokal (PKL) dan sentra-sentra produksi;
   c. Mendorong pengembangan kawasan perkotaan di wilayah perbatasan;
   d. Membina keterkaitan antar pusat kegiatan dan wilayah *hinterland*nya;
   e. Meningkatkan peran PKW terutama PKW yang jauh dari Kota Palembang (seperti Lubuklinggau, Lahat, Baturaja) sebagai penghubung pergerakan dari PKL ke PKN terdekat sehingga kota-kota tersebut dapat berperan lebih besar dalam pelayanan skala wilayah secara seimbang;
   f. Pengembangan prasarana dan permukiman yang memperhatikan tata air secara berkelanjutan yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di wilayah sekitarnya;
   g. Meningkatkan peran PKL sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan;

h. Menguatkan sistem kota-kota dengan meningkatkan fungsi dan hirarki kota serta aksesibilitas kota-kota yang berada pada kawasan perbatasan atau pinggiran.

2. Pengembangan infrastruktur utama wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah untuk terwujudnya sistem kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan, dengan strategi :
   a. Mengembangkan jaringan jalan secara hirarki yang menghubungkan antar pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
   b. Mengembangkan sistem transportasi multimoda secara terintegrasi, pengembangan jalan bebas hambatan, jalan kereta api dan terminal peti kemas, transportasi laut, transportasi sungai/danau dan transportasi udara;
   c. Mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah sesuai dengan intensitas aktivitas;
   d. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, terminal khusus, bandara, pelabuhan dan pelabuhan penyeberangan sebagai simpul transportasi serta pelabuhan pendaratan perikanan;
   e. Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan di sepanjang koridor kawasan perkotaan lintas Sumatera bagian timur maupun bagian tengah;
   f. Mengembangkan sistem angkutan umum massal di kawasan perkotaan Palembang dan kawasan perkotaan PKW untuk mengurangi masalah transportasi perkotaan;
   g. Mengembangkan Pelabuhan Utama Tanjung Api-Api untuk memantapkan peran Provinsi dalam skala Regional dan Internasional; dan
   h. Memantapkan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang sebagai bandara pengumpul Primer.

3. Pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pendorong pengembangan wilayah, dengan strategi :
   a. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan;
   b. Mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan energi untuk memanfaatkan energi baru berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), energi terbarukan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

(PLTMH) secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik yang dapat memantapkan fungsi PKW dan PKL serta Provinsi sebagai lumbung energi;

c. Mengembangkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik di Provinsi, interkoneksi dengan seluruh Sumatera dan Pulau Jawa;
d. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS untuk menunjang kegiatan perkotaan dan pertanian serta kebijakan lumbung pangan nasional;
e. Pengembangan Sistem Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPA) regional sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perkotaan dan ekonomi;
f. Pengembangan sistem telekomunikasi yang merata terutama untuk menunjang kegiatan ekonomi yang dikembangkan di PKW dan PKL;
g. Peningkatan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan budaya terutama di PKL untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat-pusat kegiatan di PKW dan PKN;
h. Pengembangan sistem drainase perkotaan yang terintegrasi; dan
i. Pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik, setempat dan terpusat.

4. Mendorong terlaksananya peran Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk, dengan strategi : penentuan fungsi setiap KSP agar terjadi sinergitas pembangunan;
   a. Penentuan arah pengembangan wilayah sesuai potensi dan kendala di setiap KSP;
   b. Pencapaian fungsi PKW dan PKL di seluruh wilayah; dan
   c. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar di dalam KSP.

Sementara itu kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, meliputi Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung, meliputi :

1. Memantapkan fungsi kawasan lindung pada kawasan yang memenuhi kriteria kawasan lindung, dengan strategi :
   a. Peningkatan fungsi kawasan lindung baik di dalam maupun di luar kawasan hutan;
   b. Pemulihan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi;

c. Pembatasan pengembangan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi lahan kawasan lindung.

2. Menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan lindung dengan strategi :
   a. Optimalisasi pendayagunaan kawasan lindung hutan dan non hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
   b. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan pada kawasan lindung;
   c. Pencegahan kerusakan lingkungan akibat rencana usaha atau kegiatan budidaya;
   d. Rehabilitasi lahan kritis di kawasan lindung;
   e. Mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan *mangrove*; dan
   f. Penyusunan arahan insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi dalam hal alih fungsi dan/atau penerbitan izin pembangunan, rencana usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan lindung, dan pemanfaatan ruang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya, meliputi :

1. meningkatkan produktivitas lahan tidur atau lahan non produktif serta meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan dan menjadikan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional, dengan strategi :
   a. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur atau lahan non produktif sebagai kawasan budidaya pertanian yang didukung oleh penetapan regulasi bidang pertanian dan penyediaan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan, peningkatan sumberdaya manusia dan penguatan kapasitas kelembagaan;
   b. Revitalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tidak berfungsi secara optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan pertanian;
   c. Memelihara jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat;
   d. Meningkatkan produktivitas lahan sawah irigasi, tadah hujan, rawa lebak dan pasang surut;
   e. Meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan sistem pola tanam yang mendukung pelestarian unsur hara dan kesuburan tanah, serta disesuaikan dengan perubahan iklim global; dan

f. Menyelenggarakan keseimbangan areal produksi dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk dengan memperhatikan kelayakan ekonomi petani.

2. mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan strategi :
   a. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas serta pengembangan ekonomi di kawasan budidaya wilayah tertinggal;
   b. Meningkatkan akses kawasan budidaya ke jaringan arteri primer dan kolektor primer;
   c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pada PKL;
   d. Meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir;
   e. Mengembangkan potensi sektor pertambangan mineral dan migas dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
   f. Mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dan kawasan pariwisata berbasis keunikan budaya;
   g. Mengembangkan kegiatan sektor unggulan di wilayah sentra produksi; dan
   h. Mempertahankan fungsi lahan persawahan untuk tidak beralih fungsi menjadi lahan non persawahan dalam upaya kelestarian swasembada pangan dan kedaulatan pangan.

3. meningkatkan fungsi kawasan budidaya untuk pertahanan dan keamanan dengan strategi :
   a. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas serta pengembangan ekonomi di kawasan budidaya wilayah tertinggal;
   b. Meningkatkan akses kawasan budidaya ke jaringan arteri primer dan kolektor primer;
   c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pada PKL;
   d. Meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir;
   e. Mengembangkan potensi sektor pertambangan mineral dan migas dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
   f. Mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dan kawasan pariwisata berbasis keunikan budaya;
   g. Mengembangkan kegiatan sektor unggulan di wilayah sentra produksi; dan

h. Mempertahankan fungsi lahan persawahan untuk tidak beralih fungsi menjadi lahan non persawahan dalam upaya kelestarian swasembada pangan dan kedaulatan pangan.

Sinkronisasi dan sinergi RPJMD dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan agar pelaksanaaan pembangunan di wilayah Sumatera Selatan dapat lebih terarah serta mampu mendorong percepatan pembangunan wilayah. Selain itu, sinkronisasi dan sinergi RPJMD dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan juga diarahkan: (1) mewujudkan ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat; (2) memberikan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; (3) meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; (4) meningkatkan keterpaduan perencanaan tata ruang kabupaten/kota dengan wilayah nasional dan provinsi; (5) mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; (6) mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; serta (7) menjaga keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah serta keserasian kegiatan antarsektor dan antar SKPD.

Dalam menyusun RPJMD, selain berpedoman pada RTRW Provinsi Sumatera Selatan, juga perlu memperhatikan RTRW Nasional dan RTRW daerah/provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini adalah Provinsi: Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung. Telaah terhadap RTRW provinsi yang berbatasan tersebut diarahkan untuk: (1) tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi; (2) keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota; (3) dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

### 1.3.3 RPJMD dan RPJM Nasional

Periode pelaksanaan RPJMD Sumatera Selatan 2019-2023 akan bersinggungan dengan dokumen perencanaan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 harus disinkronisasikan dan diselaraskan dengan agenda Nawa Cita Pemerintahan 2015-2019 serta kebijakan dan berbagai program prioritas yang ditetapkan.

Dasar hukum penyelarasan RPJMD dengan RPJMN didasarkan pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa “RPJM Daerah merupakan

penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya **berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional**, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. “

Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan “RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan **berpedoman pada RPJPD dan RPJMN**.”

Selain itu juga pada Pasal 272 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa, “Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam **rencana strategis perangkat daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **diselaraskan dengan** pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam **rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian** untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.”

Visi RPJMN Tahun 2015-2019 yaitu “**Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”. Untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan (Trisakti), visi tersebut dirumuskan ke dalam 9 (sembilan) agenda prioritas yang disebut Nawa Cita, yaitu:

Cita 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

Cita 2 Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Cita 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

Cita 4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Cita 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Cita 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

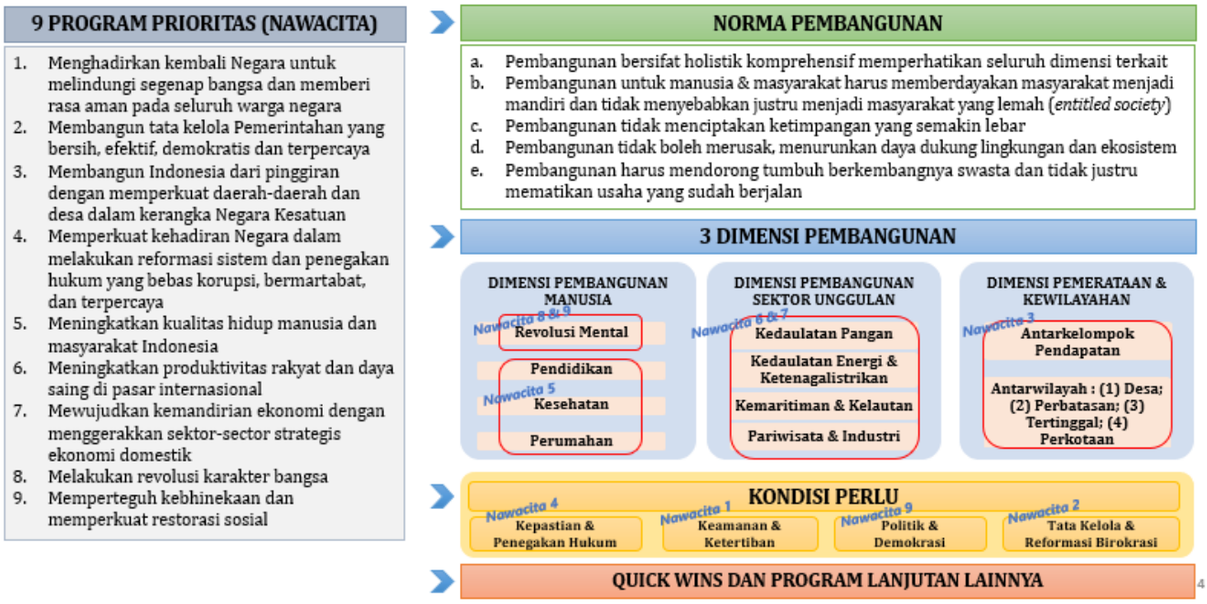
Cita 7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Cita 8 Melakukan revolusi karakter bangsa.

Cita 9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program *quick wins*. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019.

**Gambar 1.1.**
Keterkaitan antara Dimensi Pembangunan dengan Nawa Cita dan Program Prioritas Nasional




Keterkaitan antara Dimensi Pembangunan dengan Nawa Cita, Program Prioritas Nasional adalah:

1. **Dimensi Pembangunan Manusia** dengan prioritas: sektor pendidikan dengan melaksanakan program Indonesia pintar, sektor kesehatan dengan melaksanakan program Indonesia sehat, perumahan rakyat, melaksanakan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, dan melaksanakan revolusi mental. Program program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawa Cita.
2. **Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan** dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan

ilmu pengetahuan dan teknologi. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita.

3. **Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan** dengan prioritas pada upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita Ketiga, Cita Kelima, dan Cita Keenam.
4. **Kondisi yang diperlukan** memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi. Program-program pembangunan untuk menciptakan kondisi ini merupakan penjabaran dari Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita Keempat.

### 1.3.4 RPJMD dan Rencana Strategis

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan. Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan PD disertai dengan indikator kinerja utama dan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja PD (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

### 1.3.5 RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, serta bahan penyusunan Rencangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2.

**Gambar 1. 2**
Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.4 Maksud dan Tujuan

### 1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencaaan secara umum yang berisi rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023.

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi para pihak dalam rangka terjaganya konsistensi perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan, sebagaimana diamanatkan baik dalam dokumen perencanaan tingkat nasional, regional maupun provinsi.

### 1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

(1) Mendukung terwujudnya visi dan misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025 dalam mempercepat pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dengan fokus pada pemantapan kelembagaan dan pengelolaan sumberdaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara

berkelanjutan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan proses percepatan pembangunan;

(2) Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh para pihak yang akan memerlukan panduan dalam rangka keselerasan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan;

(3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal;

(4) Mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu pembangunan serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pencapaian kinerja yang didasari oleh analisis data-data yang terkini dan akurat;

(5) Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan potensi daerah secara optimal;

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA SELATAN

BAB VIII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB IX KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB X PENUTUP

# BAB II

**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Kondisi umum daerah Provinsi Sumatera Selatan digambarkan melalui beberapa aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Aspek-aspek ini memberikan gambaran secara umum tentang kondisi daerah Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus menjadi bahan acuan dalam pengambilan kebijakan dan sebagai salah satu dasar analisis dalam perumusan isu strategis yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

## 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Karakteristik lokasi wilayah di Provinsi Sumatera Selatan digambarkan melalui Aspek geografi, potensi sumberdaya, wilayah rawan bencana serta kondisi demografi.

### 2.1.1. Aspek Geografi

Gambaran aspek geografi dan demografi yang digunakan dalam gambaran umum kondisi daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari aspek luas dan batas wilayah, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan. Aspek-aspek geografi dan demografi ini memberikan gambaran kondisi daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang kondisi alam dan keberadaan penduduk sehingga dapat diperoleh gambaran potensi pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

#### 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Propinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di pulau Sumatera dengan luas wilayah sebesar 91.592,43 $km^2$. Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan posisi geografisnya terdiri dari:

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Provinsi Jambi,
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Provinsi Lampung
- Sebelah barat : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu
- Sebelah timur : Berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 (tujuh belas) kabupaten dan kota, yang terbagi atas 13 (tiga belas) kabupaten dan 4 (empat) kota serta 236 kecamatan, 2.853 desa dan 386 kelurahan. Dengan Kota Palembang sebagai ibukota Provinsi.

Pembentukan Kabupaten baru melalui pemekaran wilayah di Provinsi Sumatera Selatan yaitu pemekaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dari Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dari Kabupaten Musi Rawas telah dilakukan dengan pertimbangan luas wilayah Kabupaten asalnya. Pemekaran wilayah ini dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara. Pemekaran wilayah ini diharapkan mampu mempercepat pengembangan wilayah di Kabupaten tersebut, sehingga potensi wilayah dapat lebih dikembangkan secara maksimal oleh pemerintah Kabupaten sekaligus mempercepat proses pembangunan di daerah tersebut.

**Tabel. 2.1.**
Luas Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan 2018

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Luas ($Km^2$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banyuasin | 19 | 16 | 288 | 11.832,99 |
| 2 | Empat Lawang | 10 | 9 | 147 | 2.256,44 |
| 3 | Lahat | 24 | 18 | 360 | 5.311,74 |
| 4 | Lubuk Linggau | 8 | 72 | 0 | 401,50 |
| 5 | Muara Enim | 20 | 10 | 245 | 7.383,90 |
| 6 | PALI | 5 | 6 | 65 | 1.840,00 |
| 7 | Musi Banyuasin | 14 | 13 | 227 | 14.266,26 |
| 8 | Musi Rawas | 14 | 13 | 186 | 6.350,10 |
| 9 | Musi Rawas Utara | 7 | 7 | 82 | 6.008,55 |
| 10 | Ogan Ilir | 16 | 14 | 227 | 2.666,09 |
| 11 | Ogan Komering Ilir | 18 | 13 | 314 | 18.359,04 |
| 12 | Ogan Komering Ulu | 13 | 14 | 143 | 4.797,06 |
| 13 | OKU Selatan | 19 | 7 | 252 | 5.493,94 |
| 14 | OKU Timur | 20 | 7 | 305 | 3.370,00 |
| 15 | Pagar Alam | 5 | 35 | 0 | 633,66 |
| 16 | Palembang | 18 | 107 | 0 | 369,22 |
| 17 | Prabumulih | 6 | 25 | 12 | 251,94 |
| **Sumatera Selatan** | | **236** | **386** | **2.853** | **91.592,43** |

*Sumber : Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036*

Jika dilihat dari luas wilayahnya maka Kabupaten yang terluas di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kabupten Ogan Komering Ilir (OKI) seluas 18.359,04 $Km^2$ dan disusul oleh Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) seluas 14.266,26 $Km^2$. Sedangkan luas wilayah terkecil di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kota Prabumulih seluas 251,94 $Km^2$ dan Kota Palembang seluas 369,22 $Km^2$.

### 2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Sumatera Selatan Merupakan salah satu Provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera yang memiliki letak strategis. Secara Geografis Provinsi Sumatera Selatan terletak :

- antara 1° 25' 13" sampai 4° 55' 17" Lintang Selatan
- antara 102° 3' 52" dan 106° 19' 45" Bujur Timur.

**Gambar 2.1.**
Peta Wilayah Provinsi Sumatera Selatan




*Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036*

Secara Geografis Provinsi Sumatera Selatan memiliki letak yang strategis, daerah pantai timur merupakan jalur pelayaran dengan potensi maritim. Posisi geografis ini menyebabkan Provinsi Sumatera Selatan dialiri oleh banyak sungai-sungai besar kecil. Letak geografis Provinsi Sumatera Selatan secara umum sangat menguntungkan untuk dijadikan sebagai pelabuhan yang menjadi konektifitas wilayah Sumatera Selatan dengan wilayah lainnya baik sebagai sarana transportasi maupun jalur perdagangan. Selain itu kondisi geografis ini juga menyebabkan adanya sumberdaya alam berupa minyak bumi dan gas alam, batubara, dan lahan budidaya pertanian berupa lahan basah, perkebunan dan hutan.

### 2.1.1.3. Topografi

Topografi wilayah Provinsi Sumatera Selatan berupa pantai, dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan. Wilayah Sumatera Selatan

memiliki bentang wilayah dari Barat ke Timur dengan ketinggian 400-1.700 meter diatas permukaan laut (mdpl).

Di daerah pantai permukaan tanah berupa rawa-rawa dan pasang surut (payau) yang terletak di bagian pantai timur. Sedangkan dataran rendah terletak di bagian tengah dengan wilayah yang luas. Perbukitan membelah wilayah Provinsi Sumatera Selatan berupa bukit barisan dibagian barat, semakin masuk kedalam wilayah bergunung-gunung dengan ketinggian 900-1200 meter diatas permukaan laut (mdpl). Pegunungan Bukit Barisan memiliki puncak-puncak dengan ketinggian tertinggi berada pada Gunung Dempo dengan ketinggian mencapai 3.159 mdpl. Gunung tertinggi berikutnya adalah Gunung Bungkuk dengan ketinggian 2.125 mdpl, Gunung Seminung 1.964 mdpl dan Gunung Patah 1.107 mdpl.

**Tabel 2.2.**
Luas Kabupaten/Kota Berdasarkan Kemiringan Lereng

| No. | Kabupaten/Kota | Kemiringan Lereng | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0-8 | 8-15 | 16-25 | 26-40 | >40 |
| 1 | Ogan Komering Ulu | 236.011 | 124.065 | 58.855 | 41.939 | 18.836 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 1.832.553 | 2.293 | 1.058 | na | na |
| 3 | Muara Enim | 710.763 | 122.335 | 26.611 | 25.262 | 37.418 |
| 4 | Lahat | 126.787 | 142.785 | 148.751 | 5.133 | 107.718 |
| 5 | Musi Rawas | 542.957 | 267.264 | 160.457 | 20.200 | 244.988 |
| 6 | Musi Banyuasin | 1.284.134 | 113.236 | 20.934 | na | 8.232 |
| 7 | Banyuasin | 1.181.610 | 1.689 | na | na | na |
| 8 | OKU Selatan | 124.040 | 129.222 | 137.501 | 95.939 | 62.693 |
| 9 | OKU Timur | 297.717 | 39.109 | 174 | na | na |
| 10 | Ogan Ilir | 266.607 | na | na | na | na |
| 11 | Empat Lawang | 18.212 | 62.253 | 38.531 | 2.141 | 104.506 |
| 12 | PALI | na | na | na | na | na |
| 13 | Muratara | na | na | na | na | na |
| 14 | Palembang | 40.061 | na | na | na | na |
| 15 | Prabumulih | 24.760 | 15.220 | 3.470 | na | na |
| 16 | Pagar Alam | 86 | 26.931 | 20.005 | 11.703 | 4.641 |
| 17 | Lubuk Linggau | 2.863 | 24.546 | 5.492 | 1.569 | 5.680 |
| Sumatera Selatan | | 6.422.553 | 1.070.948 | 621.840 | 1.714.422 | 5.922.802 |

*Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036*

Daerah Sumatera Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata- rata + 79 meter diatas permukaan laut. Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari:

- 0 m - 25 m = 23,5 %
- 26 m - 50 m = 17,7 %
- 51 m -100 m = 35,3 %
- 101 m keatas = 23,5 %

Panjang wilayah pesisir di Provinsi Sumatera Selatan sekitar 450 km dari Sungai Benu (batas Provinsi Jambi) sampai Sungai Mesuji (batas Provinsi Lampung). Wilayah pegunungan terdapat di bagian Barat Provinsi Sumatera Selatan dengan puncak tertinggi Gunung Seminung (1.964 m) dan Gunung Dempo (3.159 m). Daerah ini tersusun dari bentukan lembah, dataran tinggi

*plateau* dan kerucut vulkanik. Bagian penting wilayah ini adalah lembahan yang merupakan lahan budidaya pertanian.

**Tabel 2.3.**
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2017

| Kabupaten / Kota | Ibukota | Tinggi (meter) |
|---|---|---|
| **Kabupaten** | | |
| Ogan Komering Ulu | Baturaja | ± 70 |
| Ogan Komering Ilir | Kayu Agung | ± 18 |
| Muara Enim | Muara Enim | ± 45 |
| Lahat | Lahat | ± 100 |
| Musi Rawas | Muara Beliti | ± 120 |
| Musi Banyuasin | Sekayu | ± 15 |
| Banyuasin | Pangkalan Balai | ± 63 |
| OKU Selatan | Muara Dua | ± 133 |
| OKU Timur | Martapura | ± 83 |
| Ogan Ilir | Indralaya | ± 25 |
| Empat Lawang | Tebing Tinggi | ± 90 |
| Pali | Talang Ubi | ± 40 |
| Musi Rawas Utara | Muara Rupit | ± 40 |
| **Kota** | | |
| Palembang | Palembang | ± 8 |
| Prabumulih | Prabumulih | ± 95 |
| Pagar Alam | Pagar Alam | ± 280 |
| Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | ± 120 |

*Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036*

Berdasarkan ketinggian wilayahnya maka daerah tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan adalah Pagar Alam, didaerah ini terdapat gunung Dempo dan deretan bukit barisan. Daerah yang tertinggi berikutnya adalah OKU Selatan dan Musi Rawas yang merupakan daerah perbukitan. Potensi pengembangan budidaya pertanian didataran tinggi dapat dilakukan di ketiga daerah ini, selain itu juga memiliki potensi wisata alam perbukitan dan pengunungan.

### 2.1.1.4. Geologi

Geologi Cekungan Sumatera Selatan adalah suatu hasil kegiatan tektonik yang berkaitan erat dengan penunjaman Lempeng Indi-Australia, yang bergerak ke arah utara hingga timurlaut terhadap Lempeng Eurasia yang relatif diam. Zone penunjaman lempeng meliputi daerah sebelah barat Pulau Sumatera dan selatan Pulau Jawa. Beberapa lempeng kecil (micro-plate) yang berada di antara zone interaksi tersebut turut bergerak dan menghasilkan zone konvergensi dalam berbagai bentuk dan arah. Penunjaman lempeng Indi-Australia tersebut dapat mempengaruhi keadaan batuan, morfologi, tektonik dan struktur di Sumatera Selatan. Tumbukan tektonik lempeng di Pulau Sumatera menghasilkan jalur busur depan, magmatik, dan busur belakang.

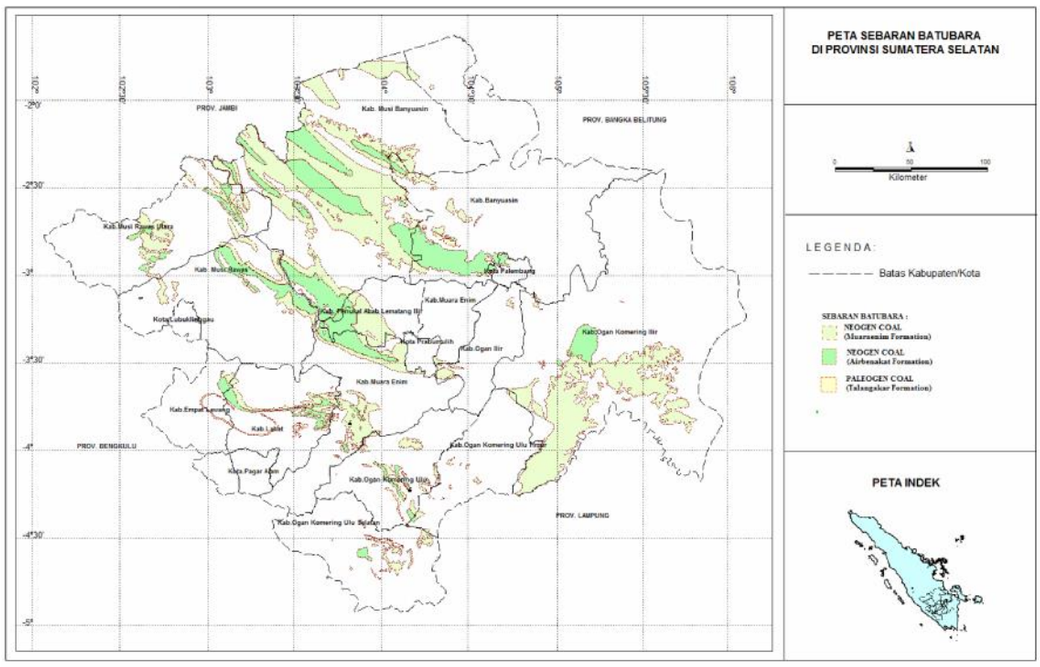
Berdasarkan tatanan tektoniknya, wilayah Provinsi Sumatera Selatan menempati cekungan belakang busur Paleogen yang dikenal sebagai Cekungan Sumatera Selatan di bagian timur, dan mendala busur vulkanik yang membentang secara regional di sepanjang Bukit Barisan bagian barat. Kedua mendala tektonik ini terbentuk akibat adanya interaksi menyerong antara Lempeng Samudera Hindia di barat daya dan Lempeng Benua Eurasia di timur laut pada tersier. Pertemuan kedua lempeng bumi tersebut terletak di sepanjang Parit Sunda yang berada di lepas Pantai Barat Sumatera, dimana lempeng samudera menyusup dengan penunjaman miring -30$^0$ di bawah kontinen yang dikenal sebagai Paparan Sunda.

Jenis struktur yang umum dijumpai dicekungan Sumatera Selatan terdiri dari lipatan, sesar dan kekar. Struktur lipatan memperlihatkan orientasi barat laut-tenggara, melibatkan sikuen batuan berumur *Oligosen-Plistosen*. Sedangkan sesar yang ada merupakan sesar normal dan sesar naik. Sesar normal dengan pola kelurusan barat laut-tenggara tampak berkembang pada runtutan batuan berumur *Oligosen-Moisen*, sedangkan struktur dengan arah umum timur laut-barat daya, utara-selatan, dan barat-timur terdapat pada sikuen batuan berumur *Plio-Plistosen*. Sesar naik biasanya berarah barat laut-tenggara, timur laut-barat daya dan barat-timur, dijumpai pada batuan berumur *Plio-Plistosen* dan kemungkinan merupakan hasil peremajaan struktur tua yang berupa sesar tarikan.

Struktur rekahan yang berkembang memperlihatkan arah umum timur laut-barat daya, relatif tegak lurus dengan struktur regional atau sejajar dengan arah pergerakan tektonik di Sumatera. Pembentukan struktur lipatan, sesar dan kekar di cekungan Sumatera Selatan memberikan implikasi yang signifikan terhadap akumulasi sumber daya minyak bumi, gas alam, batubara dan panas bumi. Kumpulan struktur lipatan yang membentuk *antiklinorium* telah banyak dijumpai berperan sebagai perangkap hidrokarbon.

Selain struktur geologi, jenis litologi penyusun stratigrafi cekungan Sumatera Selatan telah pula mengontrol penyebaran sumberdaya energi fosil non fosil di wilayah ini, salah satunya adalah Batubara yang sampai saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaannya.

**Gambar 2.2.**
Peta Sebaran Batubara di Provinsi Sumatera Selatan

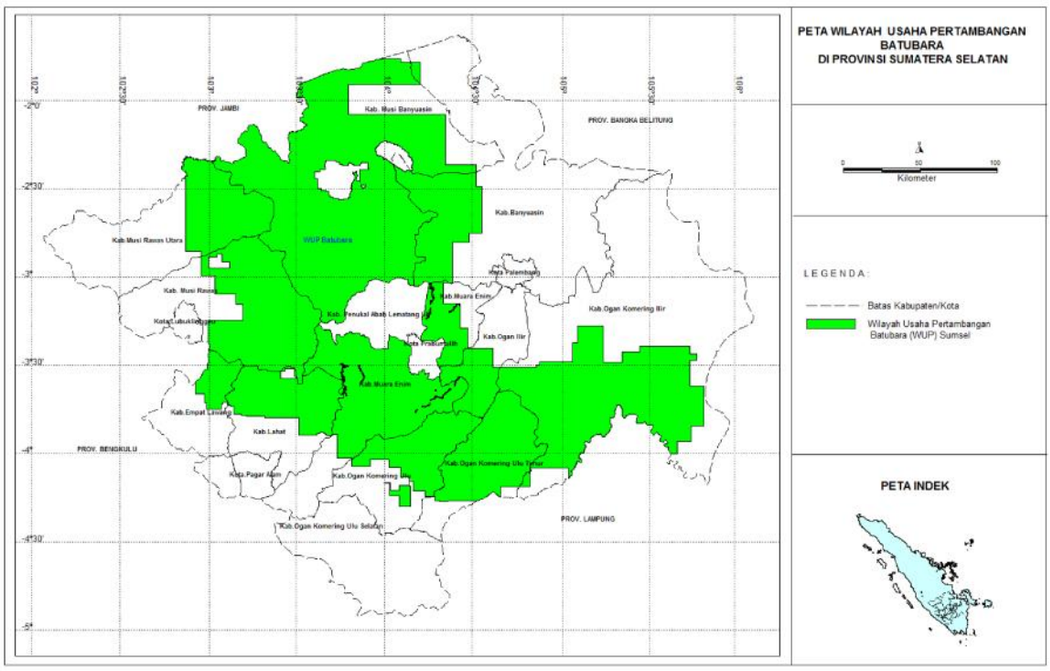



*Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036*

Potensi batubara di wilayah Provinsi Sumatera Selatan mencapai 22,24 Milyar ton (38% dari sumber daya Nasional) yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota, diantaranya : Kabupaten Muara Enim (13,54), Kabupaten Musi Banyuasin/Banyuasin (3,49), Kabupaten Lahat (2,71), Kabupaten Musi Rawas/Musi Rawas Utara (1,23), Kabupaten Ogan Komering Ulu (0,63), Kabupaten Ogan Komering Ilir (0,32), Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ( 0,20) dan Kota Prabumulih (0,09).

Berdasarkan potensi tersebut, optimalisasi pemanfaatan Batubara menjadi energi listrik melalui pembangunan pembangkit listrik dimana agar lebih efektif jika pembangkit yang dibangun merupakan pembangkit mulut tambang (PLTU *mine mouth*). Sehingga diharapkan dengan beroperasinya pembangkit tersebut maka Provinsi Sumatera Selatan mampu menjadi penyuplai listrik bagi Pulau Sumatera dan Jawa, sebagaimana yang diinginkan dalam konsep Sumsel Lumbung Energi.

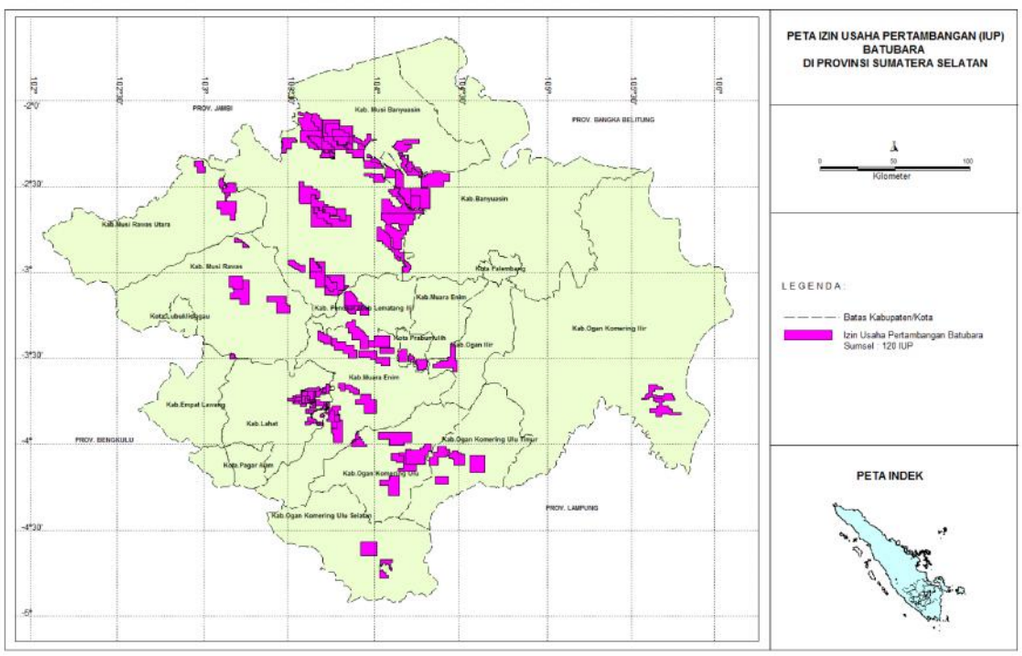
**Gambar 2.3.**
Peta Wilayah Usaha Pertambangan Batubara
di Provinsi Sumatera Selatan




*Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036*

Jika dilihat dari Peta Izin Usaha Pertambangan Batubara dan Peta Wilayah Usaha Pertambangan, masih banyak terdapat potensi batubara yang belum dimaksimalkan sebagai bahan baku energi.

**Gambar 2.4.**
Peta Izin Usaha Pertambangan Batubara
di Provinsi Sumatera Selatan




*Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036*

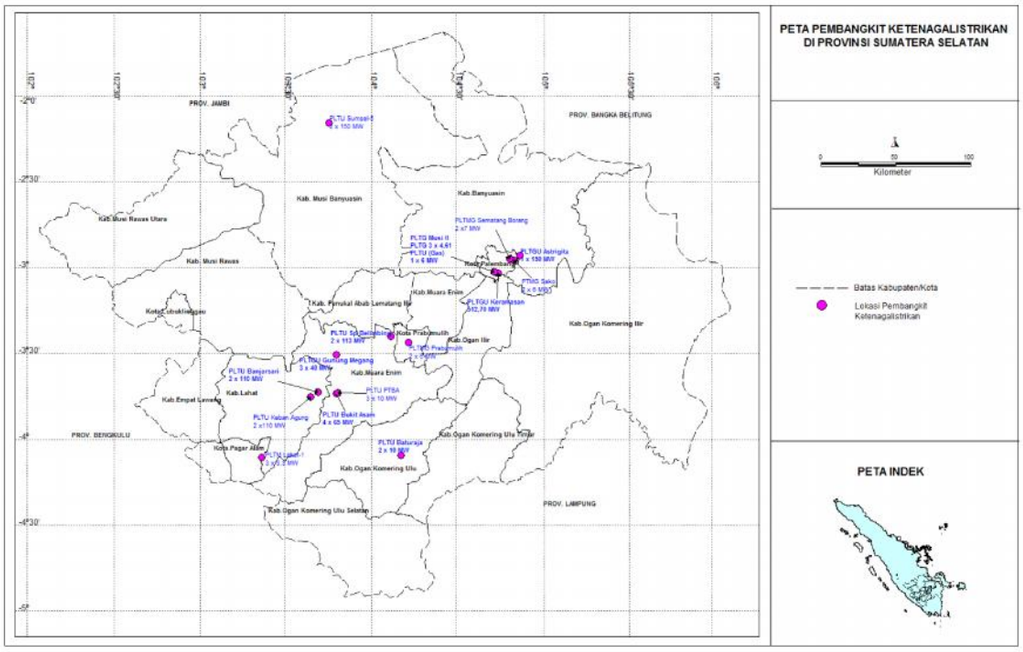
Oleh karena itu, wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya batubara yang besar diharapkan dapat menjadi wilayah lumbung energi, seperti Kabupaten Muara Enim, Lahat dan Musi Banyuasin.

**Tabel 2.4.**
Pembangkit Listrik eksisting berdasarkan sumber energi
di Provinsi Sumatera Selatan

| No | Nama Pembangkit | Lokasi | Kapasitas (MW) | Pemilik | Sumber Energi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTU Bukit Asam | Muara Enim | 4 x 65 | PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Sektor Bukit Asam | Batubara |
| 2 | PLTU Simpang Belimbing | Muara Enim | 2 x 113 | PT. GH-EMM Indonesia | Batubara |
| 3. | PLTU PTBA | Muara Enim | 3 x 10 (eccses power: 6) | PT. Bukit Asam | Batubara |
| 4. | PLTU Banjarsari | Lahat | 2 x 110 | PT. Bukit Pembangkit Inovatif | Batubara |
| 5. | PLTU Keban Agung | Lahat | 2 x 110 | PT. Priamanaya | Batubara |
| 6. | PLTGU Gunung Megang | Muara Enim | 3 x 40 | PT. Sumberdaya Sewatama | Gas |
| 7. | PLTU Sumsel -5 | Musi Banyuasin | 2 x 150 | PT. DSSP Power | Batubara |
| 8. | PLTU Baturaja | OKU | 2 x 10 | PT. Bhakti Nugraha Yuda Energi | Batubara |
| 9. | PLTMG Prabumulih | Prabumulih | 2x6 | PT. Energi Prima Elektrika | Gas |
| 10. | PLTGU Keramasan | Palembang | 512, 70 | PLN Sektor Keramasan | Gas |
| 11. | PLTM Lahat-1 | Lahat | 3 x 3,3 | PT. Green Lahat | Air |
| 12. | PLTGU Asrigita | Banyuasin | 1 x 150 | PT. Asrigita Prasarana | Gas |
| 13. | PLTG Musi II | Palembang | PLTG 3 x 4,61 PLTU (gas) 1 x 6 | PT. Pura Daya Prima | Gas |
| 14. | PTMG Sako | Palembang | 2x6 | PT. Multidaya Prima Elektrindo | Gas |
| 15. | PLTMG Sematang Borang | Palembang | 2 x 7 | PT. Pembangkit Listrik Palembang Jaya | Gas |

*Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel*

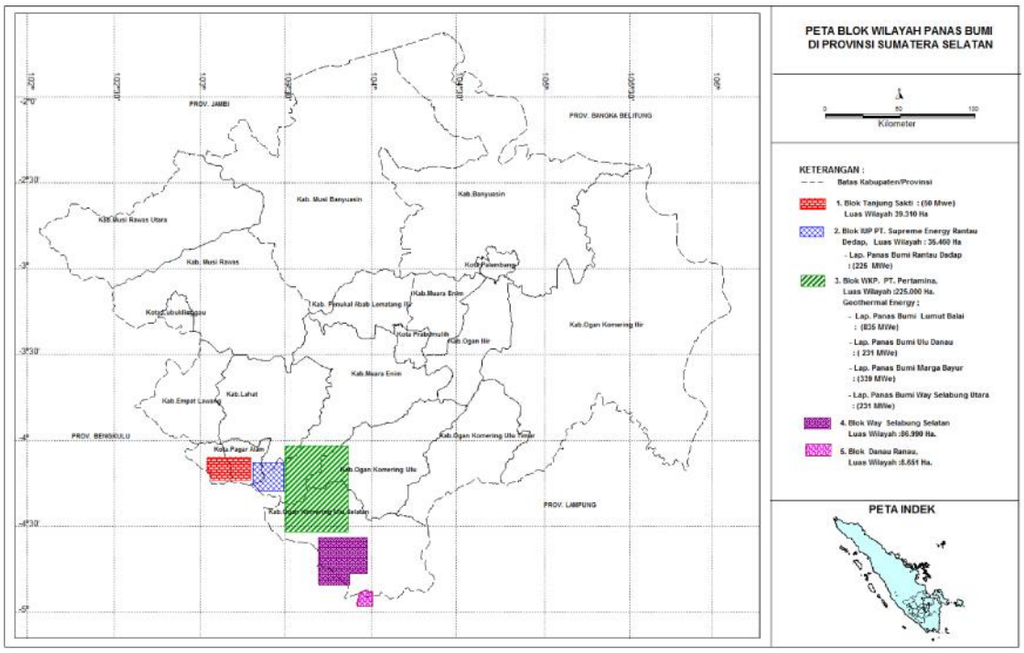
**Gambar 2.5.**
Peta Pembangkit Ketenagalistrikan yang Tersebar
di Provinsi Sumatera Selatan




*Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036*

Selain potensi batubara, Provinsi Sumatera Selatan juga memilik potensi energi yang berasal dari Panas Bumi, seperti pada Gambar 2.6. Namun demikian, pasca terbitnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 kewenangan pengelolaan sumber daya Panas Bumi tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi

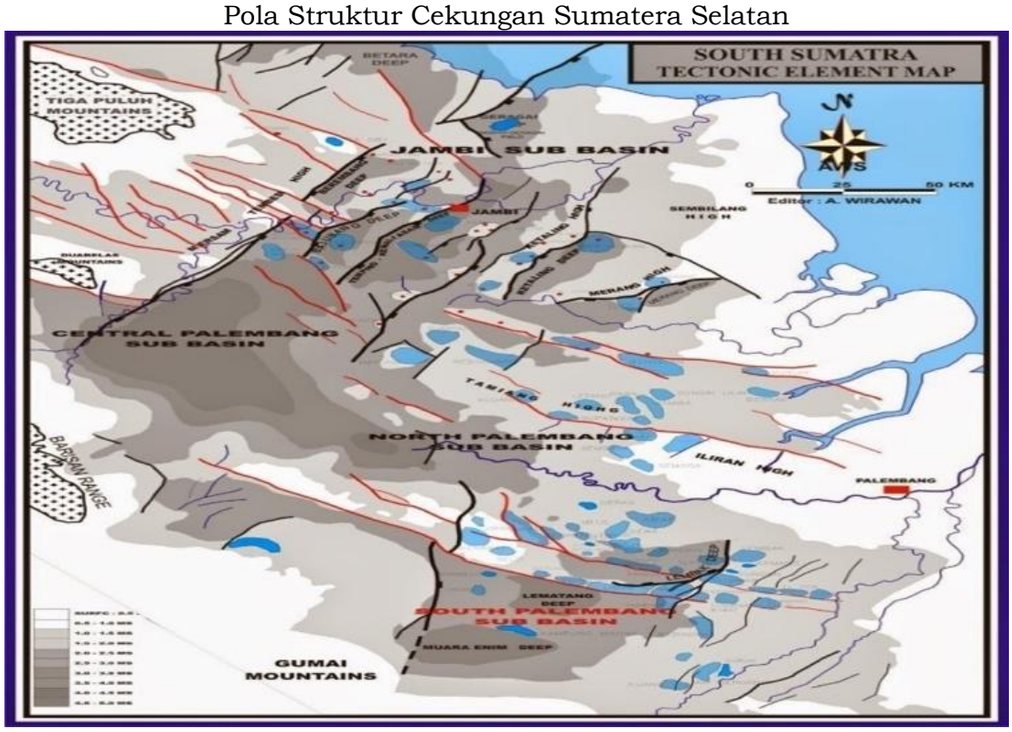
**Gambar 2.6.**
Peta Sebaran Panas Bumi
di Provinsi Sumatera Selatan




*Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036*

Batuan yang mendasari Cekungan Sumatera Selatan merupakan kompleks batuan berumur pra-tersier, yang terdiri dari batu gamping, andesit, granodiorit, pilit, kuarsit dan granit. Jenis batuan yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan adalah (1) formasi Lahat terdiri dari endapan tufa, aglomerat, breksi tufan, andesit, serpih, batu lanau, batu pasir dan batubara; (2) formasi Talang Akar terdiri dari batu pasir berukuran butir kasar-sangat kasar, serpih, batu lanau dan batubara; (3) formasi Baturaja terdiri dari batu gamping terumbu, serpih gampingan dan napal atau batu lempung gampingan; (4) formasi Baturaja terdiri dari serpih gampingan dan serpih lempungan; (5) formasi Air Benakat dengan penyusun utama batu pasir; (6) formasi Muara Enim terdiri dari batu pasir, batu lanau, batu lempung dan batubara; dan (7) formasi Kasai terdiri dari batu pasir tufaan dan tufa.

**Gambar 2.7.**
Pola Struktur Cekungan Sumatera Selatan




*Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036*

Cekungan Sumatera Selatan merupakan cekungan yang menghasilkan hidrokarbon paling produktif dalam tatanan cekungan belakang busur yang terbentuk di timur pantai Sumatera di bagian Barat Indonesia. Cekungannya dibatasi oleh Selat Malaka di bagian timur, Tinggian Tigapuluh di utara serta bentangan Bukit Barisan di bagian baratnya. Daerahnya hampir semua berada di darat dan hanya sebagian kecil di lepas pantai. Cekungan Sumatera Selatan mencakup luas area sekitar 119.000 km$^2$ dengan ketebalan sedimen tersier rata-rata 3,5 km**.** Tiga cekungan busur belakang di Sumatera merupakan cekungan Tersier yang lapisan penghasil hidrokarbonnya berada langsung

diatas batuan dasarnya yang berupa batuan metamorf dan batuan beku berumur Pra-Tersier; terbentuk sebagai depresi di belakang busur volkanik. Anomali gaya berat memberikan batas yang cukup signifikan untuk Cekungan Sumatera Selatan.

**2.1.1.5. Hidrologi**

Secara umum Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumber daya air berupa sumberdaya air permukaan dan sumberdaya air tanah. Sumber daya air permukaan berupa sungai. Sungai-sungai ini bermata air dari bukit barisan, sungai terpanjang adalah sungai Musi yang bermuara di Selat Bangka, sungai Musi memiliki panjang 750 Km. Sungai Musi memiliki beberapa anak sungai yaitu sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai rawas. Semua sungai ini bermata air dari bukit barisan, kecuali Sungai Lalan, Sungai Mesuji dan Sungai Banyuasin. Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering dan Sungai Lematang merupakan 3 anak Sungai Musi yang terbesar.

Kondisi air sungai di Sumatera Selatan pada umumnya berwarna keruh dan membawa endapan lempung *(suspensed materials)*. Hal ini disebabkan salah satunya oleh kegiatan penebangan pohon-pohon (hutan) yang tidak terkendali sehingga terjadi erosi di daerah hulu dan sedimentasi di sepanjang aliran sungai. Kondisi ini selanjutnya berakibat pada pendangkalan aliran sungai dan pergeseran pola aliran sungai. Kondisi ini mempengaruhi pelayaran di wilayah Sumatera Selatan.

Keberadaan air permukaan di wilayah sungai Musi juga dipengaruhi keberadaan lebak, embung dan rawa. Sebagian besar wilayah merupakan dataran aluvial sehingga ketinggian tanahnya relatif seragam. Kondisi yang datar demikian menyebabkan pengaturan air kurang lancar sehingga timbul daerah genangan pada wilayah yang ketinggiannya hampir sejajar sungai. Lebak yang berada di wilayah ini fluktuasi luasannya sangat tinggi bila dibandingkan antara musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan yang mencapai puncaknya genangan lebak sampai 500.000 Ha, sedang pada musim kemarau yang panjang genangan lebak tinggal 5.000 Ha.

Selain sungai di Provinsi Sumatera Selatan juga terdapat sumberdaya air berupa Rawa dan danau. Daerah rawa terdapat di dataran rendah berupa rawa lebak dan rawa pasang surut, danau yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan antara lain Danau Air Hitam, Danau ranau, Danau Matana, Danau Jembawan.

**2.1.1.5.1. DAS (Daerah Aliran Sungai)**

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, wilayah kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII

mencakup 4 (empat) Wilayah Sungai (WS): Musi, Sugihan, Banyuasin, dan Lemau (MSBL). DAS (Daerah Aliran Sungai) yang merupakan bagian dari WS MSBL terdiri dari DAS Musi, DAS Banyuasin, DAS Benawang, DAS Bulurariding dan DAS Mesuji (yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Musi).

Wilayah Sungai Musi dengan nama DAS Musi, Lakitan, Rawas, Semangus, Batang Hari Leko, Wilayah Sungai Sugihan dengan nama DAS Burung, Gaja Mati, Pelimbangan, Beberi, Olok, Daras, Medang, Padang, Banyuasin, Senda, Limau, Ibul, Puntian, Pangkalan Balai, Buluain, Kepayang, Mangsang, Kedawang, Titikan, Mendes, Tungkal, Keluang, Lalan, Supat, Lilin.

**Tabel 2.5.**
Luas Wilayah Sungai dan Panjang Sungai
Provinsi Sumatera Selatan

| No | Sub WS | Luas ($Km^2$) | Sungai Utama | Panjang (Km) | Beberapa Nama Anak Sungai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harileko | 4.013 | Batanghari -leko | 1.250 | Kapas, Menanti, Lain |
| 2 | Rawas | 5.841 | Rawas | 2.485 | Rupit, Liam, Lumpang, Kemang, Kulus, Kutu, Mengkulam |
| 3 | Lakitan | 2.563 | Lakitan | 1.113 | Hitam, Megang, Malus, Pelikai, Sumuk, Makai |
| 4 | Kelingi | 1.898 | Kelingi | 1.100 | Belumat, Ketuha, Naman, Meles, Alang, Saling |
| 5 | Musi | 15.226 | Musi | 8.887 | Keruh, Lintang, Kungkupring, Beliti, Noman, Kati, Lingsing, Pengi, Cawang, Gasing, Telang, Bulan,Padi, Saleh Upang, Padang |
| 6 | Semangus | 1.972 | Semangus | 865 | Keruh, Keras, Sialang, Temuan, Sembuta |
| 7 | Lematang | 7.168 | Lematang | 4.412 | Enim, Selangis, Endikat, Lengi |
| 8 | Ogan | 8.358 | Ogan | 5.445 | Kelekar, Rambang, Lubai, Kuang, Laye |
| 9 | Komering | 10.275 | Komering | 6.260 | Saka, Penaku, Gilas, Lempuing |
| 10 | Padang | 2.040 | Padang | 1.200 | Ro, Saleh, Muara Pulo, Sugihan, Padang, Kumbang, Rambai, Sebubus |
| **Total** | | **59.354** | | **33.017** | |

*Sumber : Studi Sinkronisasi Sungai Musi-Bengkulu, Dept. PU. 2015*

Wilayah Sungai terbesar dan terpanjang adalah Wilayah Sungai Musi dengan luas 15.226 $Km^2$ dan panjang 8.887 Km. Wilayah Sungai terbesar dan terpanjang setelah Wilayah Sungai musi adalah Wilayah Sungai Komering dengan luas sebesar 10.275 $Km^2$ dan panjang 6.260 Km. Keberadaan Wilayah Sungai yang luas dan panjang menjadi salah satu sumberdaya air yang sangat potensial bagi Provinsi Sumatera Selatan.

**2.1.1.5.2. Rawa**

Luas rawa di provinsi Sumatera Selatan sekitar 1.483.662 Ha atau 17,11% dari luas wilayah daratan yang terbagi menjadi RPS (rawa pasang surut), RL (rawa lebak). Rawa tersebut terdapat di Kabupaten Banyuasin dengan jumlah RPS 19 dan RL 1, di Kabupaten Muara Enim dengan jumlah RPS 7 dan RL 1, di Kabupaten Musi Banyuasin dengan jumlah RPS 3 dan RL 63, di Kabupaten Ogan Komering Ilir RPS 4 dan RL 14, sedangkan untuk Kabupaten Ogan Ilir dan OKU Timur Hanya terdapat RL yaitu Kabupaten Ogan Ilir dengan jumlah 53 dan OKU Timur dengan jumlah 5. Sementara, Kota Palembang hanya terdapat 1 RPS.

**2.1.1.6. Klimatologi**

Provinsi Sumatera Selatan memiliki dua musim yaitu musin penghujan dan musim kemarau. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari musim Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik, sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti itu terjadi tiap setengah tahun setelah melewati Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret dan Mei di Tahun 2017, dengan rata-rata 26 hari hujan. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dan November dengan 15 hari hujan.

**Tabel 2.6.**
Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

| Uraian | Stasiun |
|---|---|
| | Klimatologi Kenten Palembang |
| (1) | (2) |
| Suhu (°C) | |
| Maksimum | 32,90 |
| Minimum | 24,70 |
| Rata-rata | 27,50 |
| Kelembaban Udara | |
| Maksimum | 93,90 |
| Minimum | 67,10 |
| Rata-rata | 83,00 |
| Tekanan Udara (mb) | 1.009,90 |
| Kecepatan Angin (knot) | 3,50 |
| Jumlah Curah Hujan (mm) | 52,00 |
| Lama Penyinaran Matahari (Persen) | 2.684,40 |

*Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Kenten Palembang*

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan 52,00 $mm^2$ sepanjang tahun 2017. Provinsi Sumatera Selatan memiliki suhu yang cenderung panas berkisar antara 24.40°C hingga

32,90°C dengan rata-rata suhu udara sekitar 27.50°C. Suhu terendah/minimum terjadi pada bulan Februari, sedangkan suhu tertinggi/maksimum terjadi pada bulan Mei.

### 2.1.1.7. Penutupan Lahan

Lahan merupakan salah satu sumberdaya alam yang paling banyak digunakan di Provinsi Sumatera Selatan. Lahan sekaligus menjadi ruang tempat kehidupan dan menjadi tempat penyedia kebutuhan populasi di wilayah Sumatera Selatan. Pola penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dikelompokkan menjadi kawasan hutan dan kawasan non hutan. Hutan di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari kawasan hutan tetap dan kawasan hutan tidak tetap.

Kawasan hutan tetap terdiri dari :

1. Suaka Margasatwa
2. Taman Nasional
3. Taman Wisata Alam
4. Hutan Lindung
5. Hutan Produksi Tetap
6. Hutan Produksi Terbatas

Kawasan hutan tidak tetap berupa Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).

**Tabel 2.7.**
Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2014 (Ha)

| No. | Penutupan Lahan | 2013 | | | | 2014 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Luas Hutan (Ha) | Luas Non Hutan (Ha) | No Data | Total Luas (Ha) | Luas Hutan (Ha) | Luas Non Hutan (Ha) | No Data | Total Luas (Ha) |
| **A.** | **Kawasan Hutan Tetap** | | | | **3.295.386,71** | | | | **3.295.386,72** |
| | Kawasan Suaka Alam + Kawasan Hutan Pelestarian Alam + Taman Buru | 393.513,16 | 350.606,31 | 46.505,73 | 790.625,20 | 416.747,16 | 325.266,56 | 48.611,48 | 790.625,19 |
| | Hutan Lindung | 251.199,11 | 325.572,28 | 555,50 | 577.326,90 | 283.875,15 | 293.451,75 | - | 577.326,90 |
| | Hutan Produksi Terbatas | 512.562,18 | 1.200.674,99 | 293,46 | 1.713.530,63 | 540.306,89 | 1.173.223,75 | - | 1.713.530,64 |
| | Hutan Produksi Tetap | 42.790,80 | 171.111,02 | 2,18 | 213.904,00 | 84.525,59 | 129.378,40 | - | 213.903,99 |
| **B.** | **Hutan Produksi yang dikonversi** | **3.575,74** | **167.938,04** | - | **171.513,78** | **257,15** | **171.256,63** | - | **171.513,78** |
| **C.** | **Areal Penggunaan Lain** | **141.050,59** | **5.126.245,43** | **17.574,62** | **5.284.870,63** | **123.729,45** | **5.161.141,18** | - | **5.284.870,64** |
| **Total** | | **1.344.691,58** | **7.342.148,07** | **64.931,48** | **8.751.771,13** | **1.449.441,39** | **7.253.718,27** | **48.611,48** | **8.751.771,14** |

*Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

**Tabel 2.8.**
Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2017 (Ha)

| No. | Penutupan Lahan | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Luas Hutan (Ha) | Luas Non Hutan (Ha) | Total Luas (Ha) | Luas Hutan (Ha) | Luas Non Hutan (Ha) | Total Luas (Ha) | Luas Hutan (Ha) | Luas Non Hutan (Ha) | Total Luas (Ha) |
| **A.** | **Kawasan Hutan Tetap** | | | **3.296.833,48** | | | **3.296.833,48** | | | **3.276.135,16** |
| | Kawasan Suaka Alam + Kawasan Hutan Pelestarian Alam + Taman Buru | 400.199,10 | 390.586,30 | 790.785,40 | 400.199,10 | 390.586,30 | 790.785,40 | 398.783,53 | 389.648,96 | 788.432,49 |
| | Hutan Lindung | 261.511,81 | 316.767,12 | 578.278,93 | 261.511,81 | 316.767,12 | 578.278,93 | 268.559,23 | 309.091,77 | 577.651,00 |
| | Hutan Produksi Terbatas | 65.625,12 | 148.293,35 | 213.918,47 | 65.625,12 | 148.293,35 | 213.918,47 | 65.997,64 | 147.920,63 | 213.918,27 |
| | Hutan Produksi Tetap | 63.778,90 | 1.650.071,79 | 1.713.850,68 | 63.778,90 | 1.650.071,79 | 1.713.850,68 | 60.120,06 | 1.636.013,34 | 1.696.133,40 |
| **B.** | **Hutan Produksi yang dikonversi** | **64,84** | **160.960,36** | **161.025,20** | **64,84** | **160.960,36** | **161.025,20** | **4,8** | **148.080,07** | **148.084,87** |
| **C.** | **Areal Penggunaan Lain** | **60.530,10** | **5.235.291,60** | **5.295.821,70** | **60.530,10** | **5.235.291,60** | **5.295.821,70** | **60.423,59** | **5.268.993,46** | **5.329.417,05** |
| **Total** | | | | **8.753.680,39** | **851.709,88** | **7.901.970,51** | **8.753.680,39** | **853.888,85** | **7.899.748,23** | **8.753.637,08** |

*Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, 2017*

Hutan di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari kawasan hutan tetap, hutan produksi yang dikonversi dan areal penggunaan lain. Pada Kawasan Hutan Tetap, meliputi 1) Kawasan Suaka Alam + Kawasan Hutan Pelestarian Alam + Taman Buru seluas 790.625,20 ha atau sebesar 9,03% pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2017 seluas 788.432,49 ha atau sebesar 9,01%; 2) Hutan Lindung seluas 577.326,90 ha atau sebesar 6,60% pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2017 seluas 577.651,00 ha atau sebesar 6,60%; 3) Hutan Produksi Terbatas seluas 1.713.530,63 ha atau sebesar 19,58% pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2017 seluas 213.918,28 ha atau sebesar 2,44%; dan 4) Hutan Produksi Tetap seluas 213.904,00 ha atau sebesar 2,44% pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2017 seluas 1.696.133,39 ha atau sebesar 19,38%. Hutan Produksi yang dikonversi seluas 171.513,78 ha atau sebesar 1,96% pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 148.084,87 ha atau sebesar 1,69%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Luas hutan terbesar di Sumatera Selatan pada tahun 2013 adalah Hutan Produksi Terbatas dan yang terkecil adalah Hutan Produksi yang dikonversi, sedangkan pada tahun 2017 luas hutan terbesar adalah Hutan Produksi Tetap dan yang terkecil adalah Hutan Produksi yang Dikonversi.

Luas penggunaan hutan produksi terbatas yang merupakan kawasan yang diperuntukan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih tanam mengalami penurunan dari tahun 2013-2017 tiap tahunnya. Pada tahun 2013 seluas 1.713.530,63 ha dan turun menjadi 213.918,27 ha, sedangkan luas penggunaan hutan produksi tetap (kawasan yang diperuntukan bagi hutan produksi tetap) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2013 seluas 213.904,00 has dan meningkat menjadi 1.696.133,40 ha pada tahun 2017.

Tutupan hutan dalam kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan penafsiran Citra Satelit dari data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan bahwa pada tahun 2013 seluas 1.344.691,58 ha atau sebesar 15,36% terhadap luas lahan keseluruhan sebesar 8.751.771,13 ha, sedangkan pada tahun 2017 seluas 853.888,85 ha atau sebesar 9,75% terhadap luas lahan keseluruhan sebesar 8.753.637,08. Hal ini menunjukan bahwa luas penutupan lahan mengalami penurunan dan akan terus berkurang karena adanya kerusakan hutan yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat sekitar dan kebakaran. Kebakaran yang sering terjadi di kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan khususnya hutan gambut telah mengurangi luas hutan di Provinsi Sumatera Selatan.

Sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) maka pola penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 telah mencapai 3.424.220,03 ha (kawasan hutan tetap dan hutan produksi yang

dikonversi) atau sekitar 39,12% kawasan hutan dari luas lahan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan seluas 8.753.637,08 ha. Hal ini sesuai dengan sasaran indikator keberlanjutan ekosistem darat yaitu salah satunya adalah pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perarairan darat serta jasa lingkungan, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering.

Pemanfaatan potensi hutan terbesar di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai hutan produksi tetap, hal ini sejalan dengan *masterplan* Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan, dimana kegiata\n hutan produksi dapat menopang kontribusi penyediaan kayu sebagai bahan baku industri, dimana terdapat kesatuan kegiatan pertanian dalam arti luas dengan agroindustri.

### 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Jika dilihat dari deskripsi karakteristik wilayah Provinsi Sumatera Selatan maka dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung (konservasi). Hingga tahun 2015, luas kawasan budidaya sebesar 7.779.146,89 Ha atau 84,93% sedangkan luas kawasan lindung sebesar 1.380.096,11 Ha atau 15,06%.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036, kawasan budidaya di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

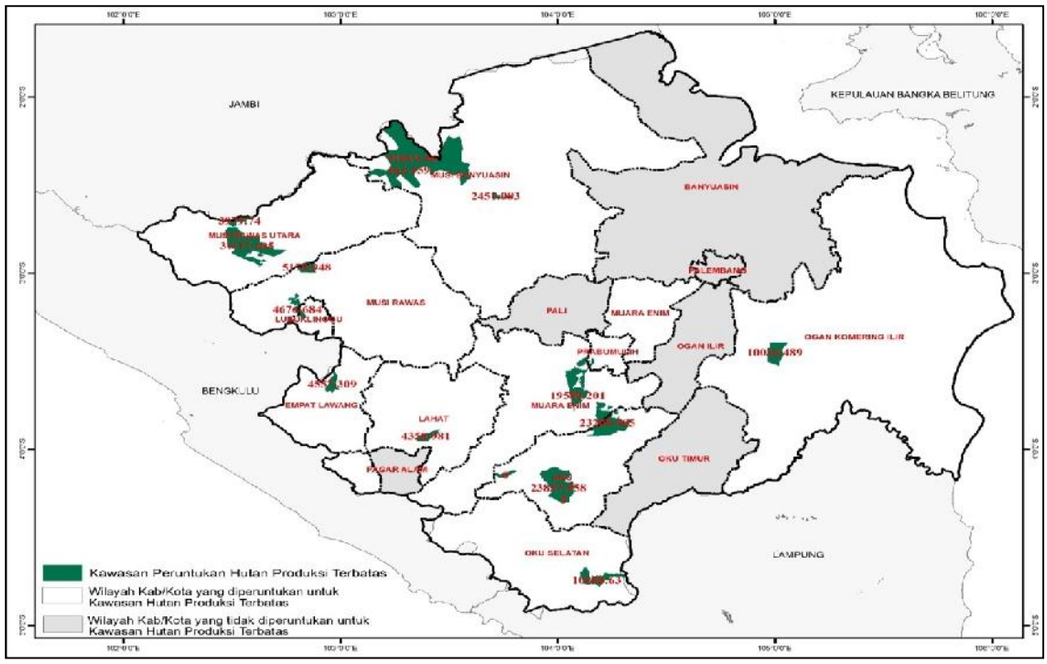
   Pengembangan Kawasan Hutan Produksi ditujukan untuk menciptakan pemanfaatan hasil hutan yang optimal, terkendali, serta tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Rencana kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:

   a. Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 213.904 Ha, meliputi:
      1) Kabupaten Empat Lawang dengan luas 4.555,02 Ha;
      2) Kabupaten Lahat dengan luas 4.350,98 Ha;
      3) Kota Lubuk Linggau dengan luas 1.096,22 Ha;
      4) Kabupaten Muara Enim dengan luas 25.498,07 Ha;
      5) Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 91.708 Ha;
      6) Kabupaten Musi Rawas dengan luas 7.385,84 Ha;
      7) Kabupaten Musi Rawas Utara dengan luas 36.752,80 Ha;
      8) Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas 10.034,52 Ha;

9) Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan luas 18.646,99 Ha;
10) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan luas 10.232,21 Ha; dan
11) Kota Prabumulih dengan luas 1.069,14 Ha.

Peta mengenai peruntukan kawasan hutan produksi terbatas diatas dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.8.**
Peta Sebaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Provinsi Sumatera Selatan

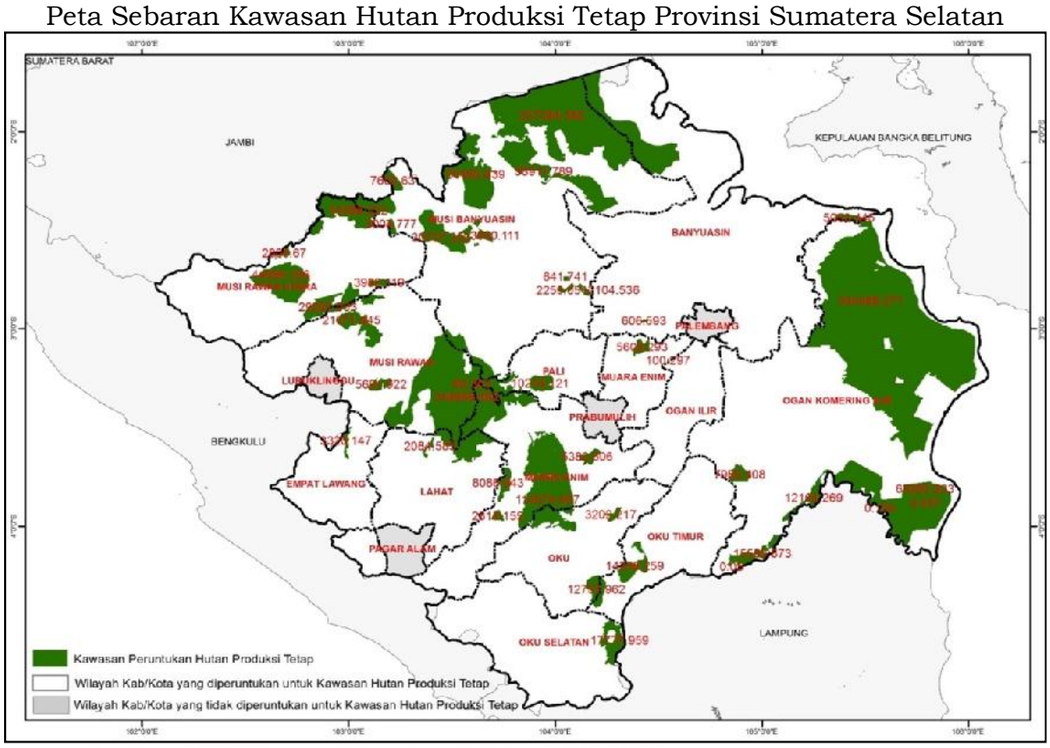



*Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036*

b. Kawasan hutan produksi tetap merupakan kawasan yang diperuntukan bagi hutan produksi tetap, dimana eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam, dengan luas 1.713.553,63 Ha.
1) Kabupaten Banyuasin dengan luas 70.932,02 Ha;
2) Kabupaten Empat Lawang dengan luas 3.269,25 Ha;
3) Kabupaten Lahat dengan luas 28.546,74 Ha;
4) Kabupaten Muara Enim dengan luas 162.370,99 Ha;
5) Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 400.545,99 Ha;
6) Kabupaten Musi Rawas dengan luas 177.976,26 Ha;
7) Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas 643.838,45 Ha;
8) Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan luas 54.958,68 Ha;
9) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan luas 7.844,67 Ha;
10) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan luas 19.475,77 Ha;

11) Kabupaten Ogan Ilir dengan luas 100,00 Ha;
12) Kabupaten Musi Rawas Utara dengan luas 109.785,59 Ha; dan
13) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan luas 23.886,63 Ha.

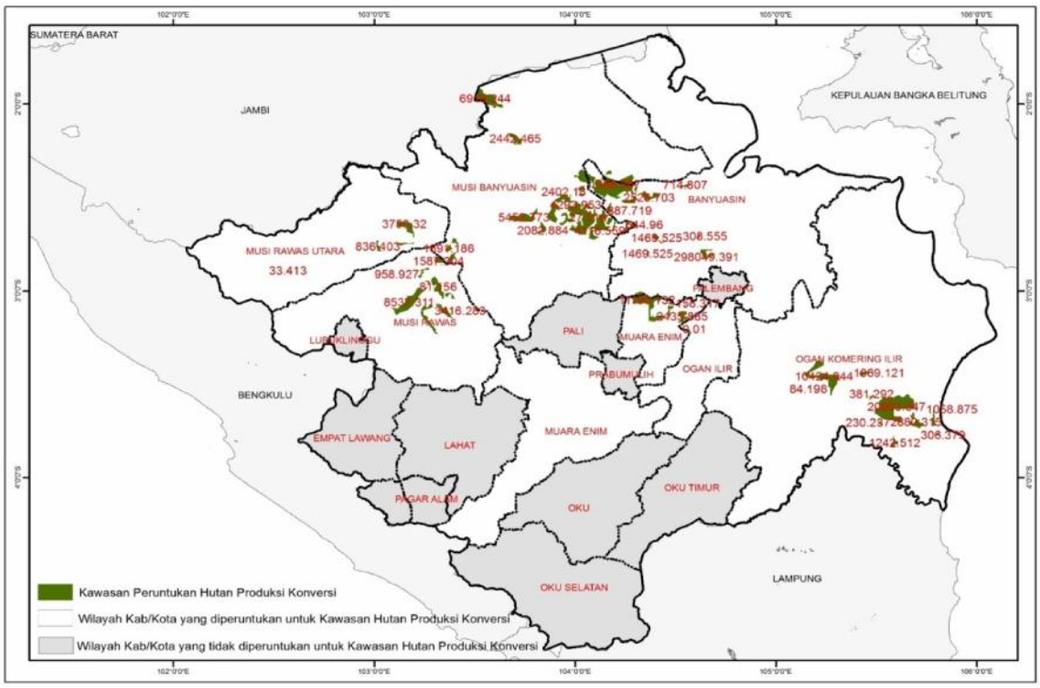
**Gambar 2.9.**
Peta Sebaran Kawasan Hutan Produksi Tetap Provinsi Sumatera Selatan



*Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036*

c. Kawasan hutan produksi konversi merupakan kawasan yang dapat diubah peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan perluasan pengembangan wilayah di luar bidang kehutanan, misalnya transmigrasi, pertanian, perkebunan, industri, pemukiman dan lain-lain, dengan luas 171.513,78 Ha.:
1) Kabupaten Banyuasin dengan luas 29.469,63 Ha;
2) Kabupaten Muara Enim dengan luas 13.470,07 Ha;
3) Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 62.864,85 Ha;
4) Kabupaten Musi Rawas dengan luas 21.9597,56 Ha;
5) Kabupaten Musi Rawas Utara dengan luas 5.415,94 Ha;
6) Kabupaten Ogan Ilir dengan luas 14,73 Ha;
7) Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas 38.680,99 Ha.

**Gambar 2.10.**
Peta Sebaran Kawasan Hutan Produksi Konversi
Provinsi Sumatera Selatan




*Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036*

1. Kawasan peruntukan pertanian

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 427/kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, kawasan peruntukan pertanian di sumatera selatan adalah :

1. Kawasan tanaman pangan
   a. Padi (Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Rawas, Ogan Ilir, OKU Timur, Ogan Komering Ilir, dan OKU Selatan)
   b. Jagung (Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ulu, dan OKU Timur)
   c. Kedelai (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, OKU Selatan, OKU Timur, dan Ogan Ilir)
2. Kawasan Hortikultura
   a. Cabai (Kabupaten Ogan Komering Ulu, OKU Selatan, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ilir, dan Banyuasin
   b. Bawang Merah (Kabupaten Ogan Komering Ulu, OKU Timur, Muara Enim, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Kota Pagar Alam, dan Kota Lubuk Linggau)
   c. Jeruk (Kabupaten Ogan Komering Ulu)

Sedangkan berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan 2016 – 2036, peruntukan pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura seluas

990.215,42 Ha.

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pertanian adalah untuk mendorong aspek pemberdayaan petani dalam satu kelembagaan ekonomi petani didaerah yang ditetapkan sebagai satu kawasan pertanian agar menjadi satu kesatuan yang utuh dalam perspektif sistem usaha tani.

Rencana kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:

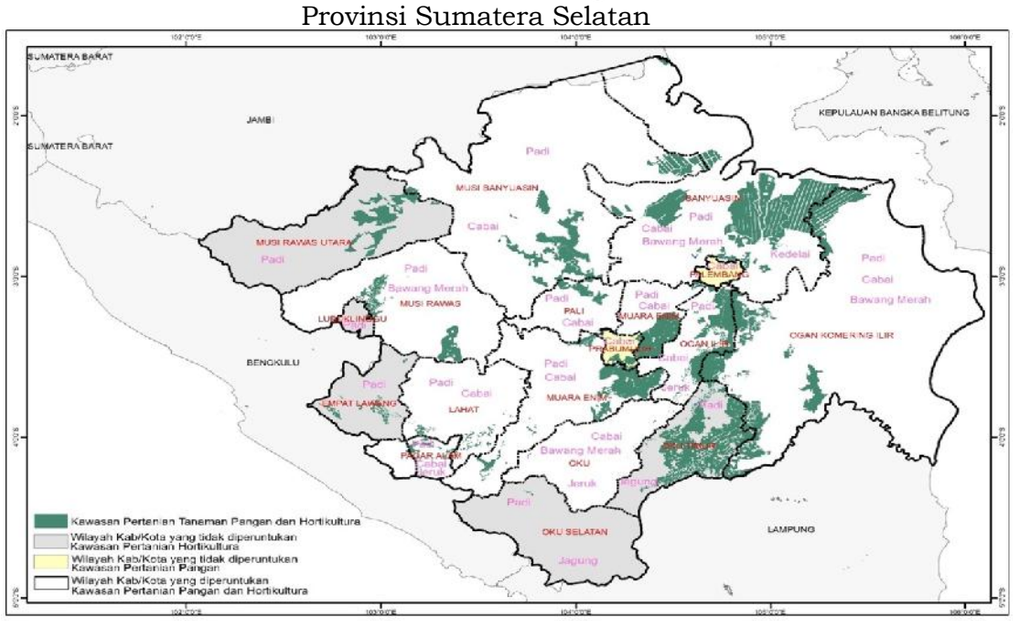
a. Kawasan pertanian pangan yang dikembangkan di seluruh kabupaten/kota dengan jenis komoditas unggulan diantaranya:
   1) Padi (terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Musi Rawas, Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Ilir);
   2) Jagung (terutama di Kabupaten OKU Timur dan OKU Selatan);
   3) Kedelai (terutama di Kabupaten Banyuasin).

b. Kawasan pertanian hortikultura yang dikembangkan di seluruh kabupaten/kota dengan jenis komoditas unggulan diantaranya:
   1) Cabai (terutama di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kota Prabumulih, Kabupaten PALI, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kota Palembang)
   2) Bawang merah (terutama di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Banyuasin); dan
   3) Jeruk (terutama di Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam).

Berdasarkan kepmentan dan perda tersebut terdapat kesesuaian kawasan untuk pengembangan :

1. Tanaman Pangan :
   a. Padi (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Empat Lawang, OKU Timur, dan Musi Rawas)
   b. Jagung (Kabupaten OKU Timur)
2. Hortikultura
   a. Cabe (Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ulu, dan Ogan Komering Ilir)
   b. Bawang Merah (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, dan Musi Rawas)
   c. Jeruk (Kabupaten Ogan Komering Ulu)

**Gambar 2.11.**
Peta Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Selatan




*Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036*

Untuk keberlanjutan kawasan, pengendalian alih fungsi pertanian khususnya pada lahan produktif yang memiliki irigasi dipertahankan fungsi dan peruntukannya guna menunjang program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka mempertahankan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Pengembangan kawasan pertanian ditujukan untuk mengembangkan area produksi pertanian dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan dengan kemungkinan dukungan prasarana pengairan.

Pada rentang waktu tahun 2013-2017 penurunan luas baku lahan sawah sebesar 5,62 % (41.533 Ha), sedangkan pada rentang waktu tersebut sebenarnya alih fungsi lahan sawah yang terjadi adalah seluas 66.091 Ha.

Kemudian dalam rentang waktu tahun 2013-2017 tersebut juga dilakukan perluasan lahan sawah (cetak sawah), tetapi cetak sawah tersebut bukan merupakan penggantian terhadap alih fungsi lahan sawah yang terjadi, tetapi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan luas baku lahan sawah.

Belum semua kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan membuat Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta belum adanya Perbup/Perwali yang menentukan luas lahan dengan titik koordinatnya yang mengikat lahan-lahan yang harus dilindungi berdasarkan Perda LP2B.

Dari tujuh belas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan baru ada beberapa kabupaten yang telah memiliki Peraturan

Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel. 2.9.**

Kabupaten/Kota yang telah atau belum memiliki Perda LP2B

| No | Kabupaten/Kota | Perda LP2B | | Perbub/Perwali | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sudah | Belum | Sudah | Belum |
| 1 | Ogan Komering Ulu | | Belum | | Belum |
| 2 | Ogan Komering Ilir | | Belum | | Belum |
| 3 | Muara Enim | Sudah | | | Belum |
| 4 | Lahat | | Belum | | Belum |
| 5 | Musi Rawas | Sudah | | | Belum |
| 6 | Musi Banyuasin | | Belum | | Belum |
| 7 | Banyuasin | Sudah | | | Belum |
| 8 | OKU Selatan | | Belum | | Belum |
| 9 | OKU Timur | | Belum | | Belum |
| 10 | Ogan Ilir | | Belum | | Belum |
| 11 | Empat Lawang | | Belum | | Belum |
| 12 | PALI | | Belum | | Belum |
| 13 | Musi Rawas Utara | | Belum | | Belum |
| 14 | Palembang | | Belum | | Belum |
| 15 | Prabumulih | | Belum | | Belum |
| 16 | Pagar Alam | | Belum | | Belum |
| 17 | Lubuk Linggau | | Belum | | Belum |

*Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumsel*

Berikut disajikan Luas Lahan Sawah yang ditanami Padi di Sumatera Selatan Tahun 2017 berdasarkan Data Olah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Selatan dibantu Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan :

**Tabel. 2.10.**

Luas Lahan Sawah yang ditanami Padi di Sumatera SelatanTahun 2017 (Ha)

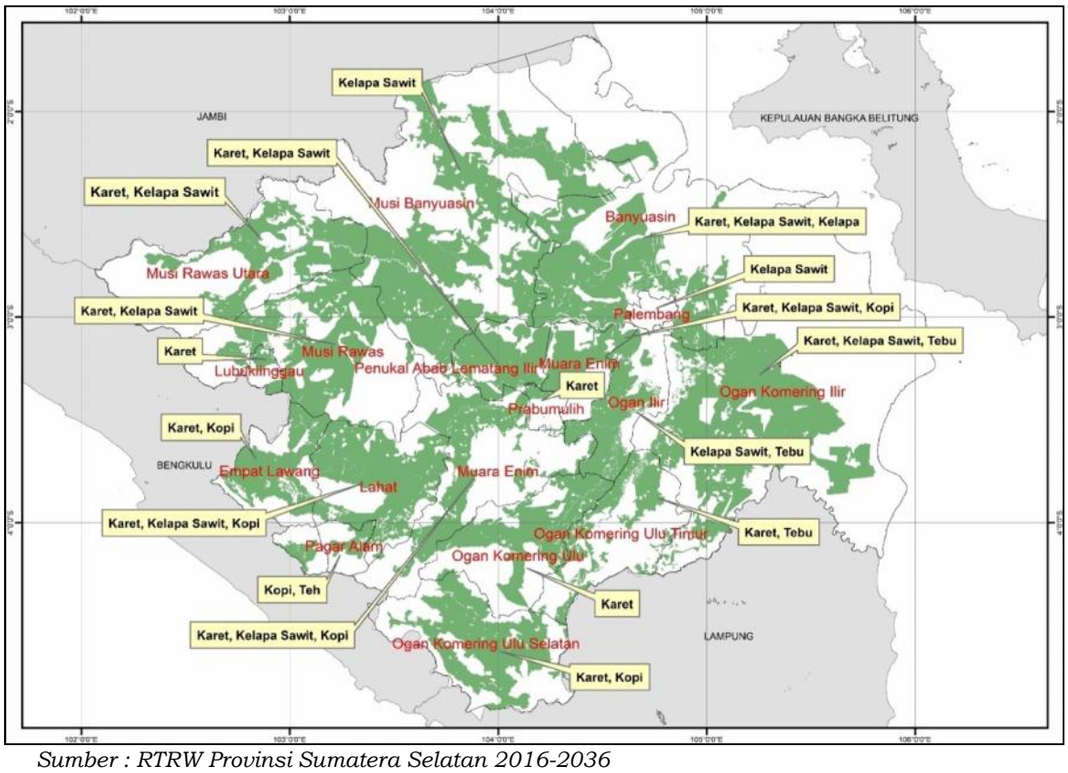
| No | Kabupaten/Kota | Irigasi | Tadah Hujan | Rawa Pasang Surut | Rawa Lebak | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 3.244 | 1.680 | na | 815 | 5.739 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 5.650 | 27.667 | 32.503 | 57.372 | 123.192 |
| 3 | Muara Enim | 6.124 | 3.534 | na | 11.745 | 21.402 |
| 4 | Lahat | 17.571 | 1.640 | na | na | 19.211 |
| 5 | Musi Rawas | 13.597 | 9.196 | na | 618 | 23.411 |
| 6 | Musi Banyuasin | na | 316 | 34.461 | 16.451 | 51.228 |
| 7 | Banyuasin | na | na | 161.917 | 30.767 | 192.684 |
| 8 | OKU Selatan | 16.205 | 1.749 | na | na | 17.954 |
| 9 | OKU Timur | 41.027 | 23.031 | na | 13.257 | 77.315 |
| 10 | Ogan Ilir | na | 246 | na | 49.385 | 49.631 |
| 11 | Empat Lawang | 13.050 | 504 | na | na | 13.554 |
| 12 | PALI | na | 334 | na | 7.630 | 7.964 |
| 13 | Musi Rawas Utara | 500 | 4.279 | na | 2.195 | 6.974 |
| 14 | Palembang | na | 20 | na | 5.918 | 5.934 |
| 15 | Prabumulih | na | na | na | 450 | 450 |
| 16 | Pagar Alam | 3.340 | na | na | na | 3.340 |
| 17 | Lubuk Linggau | 1.665 | 236 | 14 | 1 | 1.916 |
| **Jumlah** | | 121.973 | 74.432 | 228.895 | 196.604 | 621.903 |

*Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumsel*

c. Kawasan perkebunan yang dikembangkan dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan, peremajaan areal tanaman perkebunan, serta pengembangan sentra produksi perkebunan di seluruh wilayah Provinsi dengan jenis komoditi unggulan, meliputi:

1) Karet (terutama di Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, Lahat, OKU Selatan, Banyuasin, Musi Rawas Utara, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ilir, Kota Prabumulih, Empat Lawang dan Kota Lubuk Linggau);
2) Kelapa sawit (terutama di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Lahat dan Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir);
3) Kopi (terutama di Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim dan Kota Pagar Alam);
4) Kelapa (terutama di Kabupaten Banyuasin; dan Kabupaten Ogan Ilir);
5) Tebu (terutama di Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ilir); dan
6) Teh (terutama di Kota Pagar Alam).

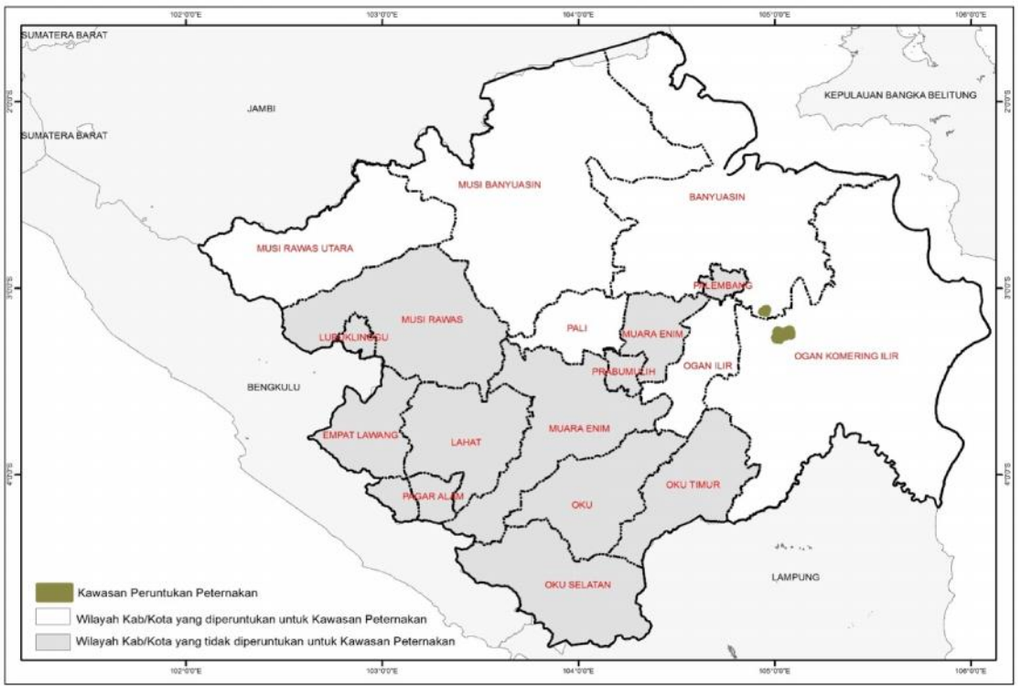
**Gambar 2.12.**
Peta Kawasan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan




*Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036*

d. Kawasan peternakan yang dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi terutama di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

**Gambar 2.13.**
Peta Kawasan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan



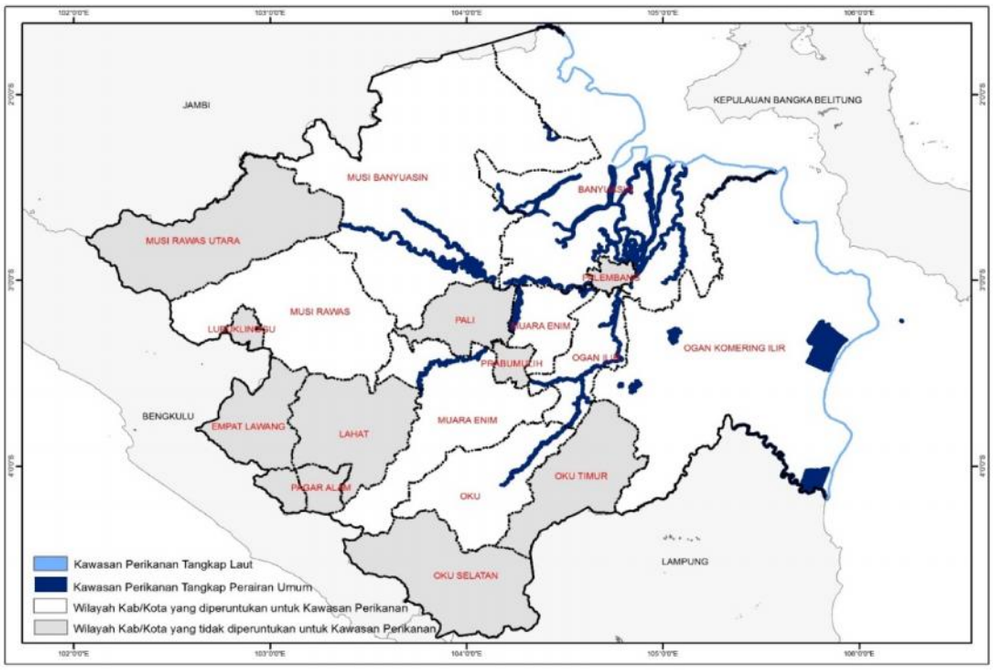

*Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036*

2. Kawasan peruntukan perikanan

   Pengembangan perikanan tangkap meliputi:

   a. Perikanan Tangkap Laut, terutama dikembangkan di sepanjang Pantai Timur Sumatera (wilayah pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Banyuasin); dan
   b. Perikanan Tangkap Perairan Umum, diarahkan di seluruh kabupaten/kota terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Musi Rawas dan Ogan Ilir.

**Gambar 2.14.**
Peta Kawasan Peruntukan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan




*Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036*

3. Kawasan peruntukan permukiman

   Pengembangan Kawasan Permukiman ditujukan untuk menciptakan pemusatan permukiman penduduk di wilayah perkotaan dan perdesaan beserta sarana prasarana dan fasilitas pendukung bagi kegiatan masyarakat.

   Arahan pengembangan permukiman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   a. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung;
   b. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat; dan
   c. Memiliki kelengkapan sarana, prasarana dan utilitas pendukung.

4. Kawasan peruntukan pariwisata

   Kriteria dalam penetapan kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki:

   a. Keindahan alam dan keindahan panorama;
   b. Masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan; dan
   c. Bangunan peninggalan budaya atau mempunyai nilai sejarah yang tinggi.

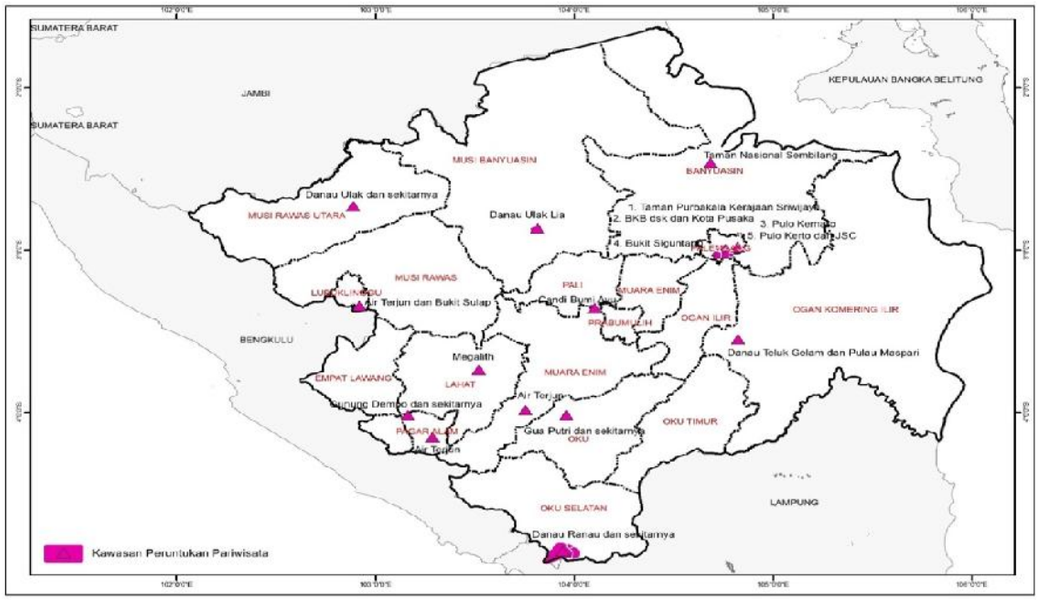
      Pengembangan pariwisata diarahkan di setiap kabupaten/kota, dengan prioritas pengembangan pada:

      a. Benteng Kuto Besak dan sekitarnya, Bukit Siguntang, Kota Pusaka Palembang, Pulau Kemaro, Taman Purbakala Kerajaan

Sriwijaya, Pulo Kerto dan Jakabaring Sport City (Palembang);

b. Megalith dan Air Terjun (Lahat dan Pagar Alam);
c. Danau Ranau dan sekitarnya (OKU Selatan);
d. Gunung Dempo dan sekitarnya (Pagar Alam);
e. Gua Putri dan Sekitarnya (OKU);
f. Danau Teluk Gelam dan Pulau Maspari (OKI);
g. Taman Nasional Sembilang (Banyuasin);
h. Air Terjun dan Bukit Sulap (Lubuk Linggau);
i. Air Terjun (Muara Enim);
j. Danau Ulak Lia (Musi Banyuasin);
k. Danau Raya dan sekitarnya (Musi Rawas Utara); dan
l. Candi Bumi Ayu (Penukal Abab Lematang Ilir).

**Gambar 2.15.**
Peta Kawasan Peruntukan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan




*Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036*

5. Kawasan peruntukan industri

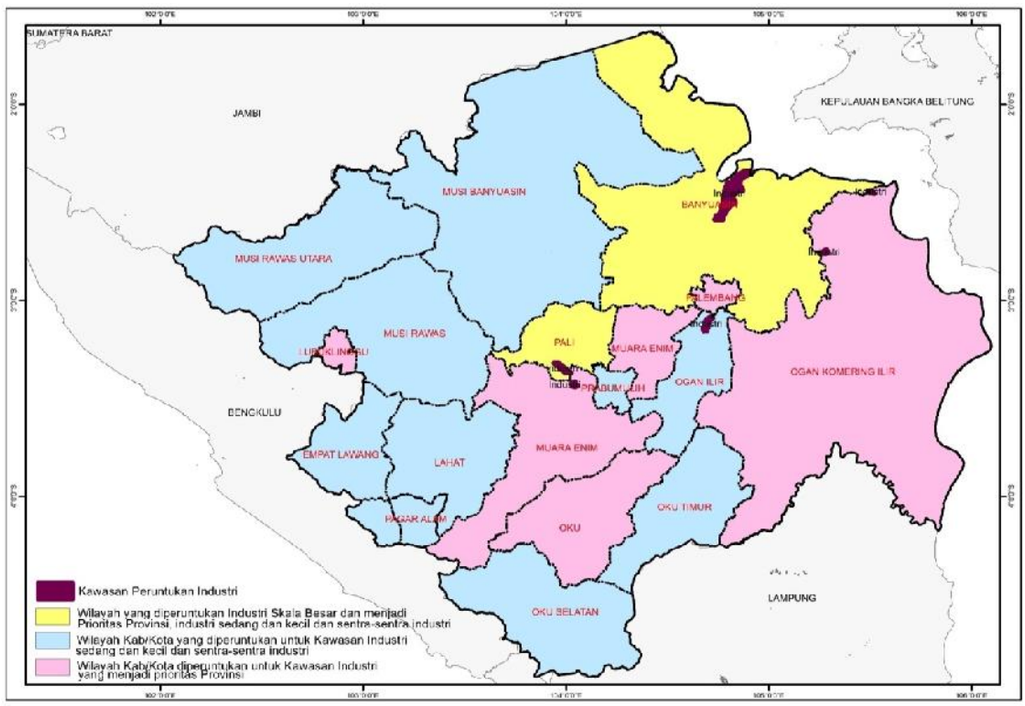
Arahan Pengembangan Kawasan Industri ditekankan pada pengembangan kawasan industri sebagai tempat pemusatan industri yang dilengkapi sarana, prasarana dan fasilitas penunjang.

Pengembangan kawasan industri dikelompokkan berdasarkan jenis industri yang terdapat di Provinsi, yaitu:

a. Industri skala besar direncanakan dikembangkan di Tanjung Api-api (Kabupaten Banyuasin) dan Pendopo (Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir);
b. Industri sedang dan industri kecil dan sentra-sentra industri direncanakan tersebar di setiap kabupaten/ kota; dan

c. Industri yang menjadi prioritas Provinsi terdapat di Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ilir.

**Gambar 2.16.**
Peta Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Sumatera Selatan



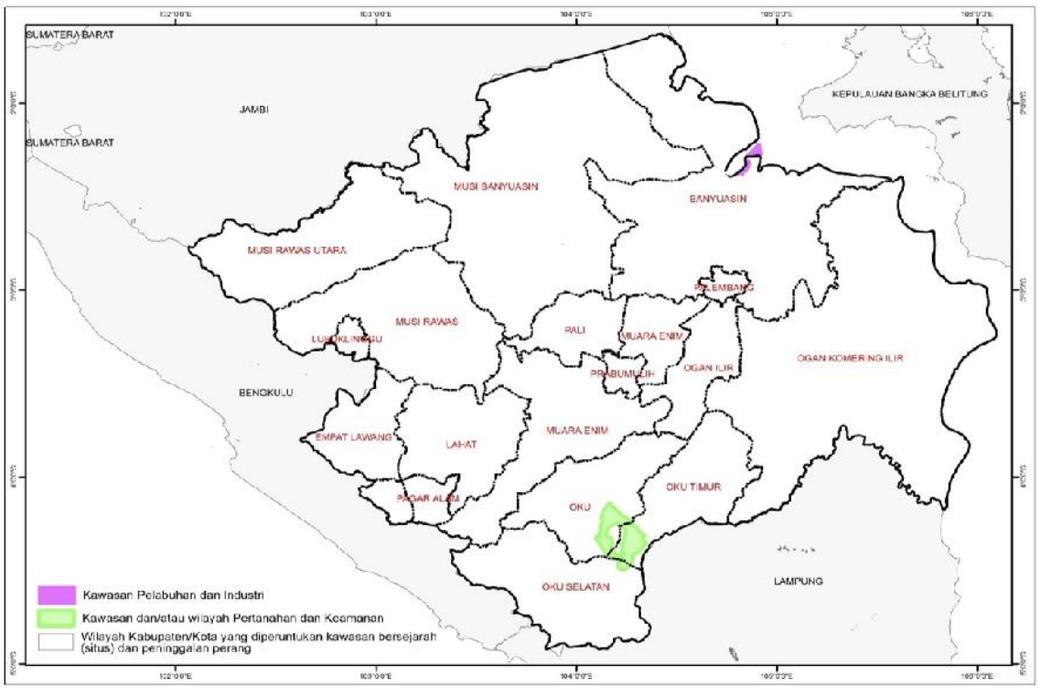

*Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036*

6. Kawasan peruntukan lainnya

Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya ditujukan bagi peruntukan kawasan yang meliputi :

a. Kawasan dan/atau wilayah pertahanan dan keamanan diarahkan di seluruh wilayah provinsi terutama Daerah Latihan Militer di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Komering Ulu Timur;
b. Kawasan bersejarah (situs) dan peninggalan perang diarahkan di seluruh wilayah Provinsi; dan
c. Kawasan pelabuhan dan industri di Kabupaten Banyuasin, meliputi areal reklamasi pantai yang diarahkan peruntukannya sebagai kawasan pelabuhan/ terminal dan industri, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, Pelabuhan Penyeberangan, Pelabuhan Laut/Peti Kemas dan Pusat Distribusi Regional (PDR)

**Gambar 2.17.**
Peta Kawasan Peruntukan Lainnya Provinsi Sumatera Selatan




*Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036*

### 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Jumlah kejadian bencana alam dan non alam atau dikarenakan ulah perbuatan manusia di Sumatera Selatan pada kurun tahun 2013 sampai tahun 2017 berjumlah 713 kejadian. Kejadian bencana terbagi atas bencana banjir, kebakaran, tanah longsor, dan angin puting beliung. Jumlah kejadian bencana terbesar adalah bencana kebakaran sebanyak 403 kejadian dari tahun 2013 sampai tahun 2017.

**Tabel 2.11.**
Rekapitulasi Kejadian Bencana di Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2013 – 2017

| No. | Jenis Bencana | Kejadian Bencana | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | Banjir | 47 | 24 | 22 | 29 | 22 | 144 |
| 2 | Kebakaran | 106 | 91 | 90 | 25 | 91 | 403 |
| 3 | Tanah longsor | 23 | 19 | 19 | 9 | 18 | 88 |
| 4 | Puting Beliung | 30 | 7 | 5 | 11 | 25 | 78 |
| **Total** | | **206** | **141** | **136** | **74** | **156** | **713** |

*Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018*

Banyaknya bencana kebakaran lahan tidak hanya semata-mata disebabkan oleh alam melainkan juga karena ulah dari perbuatan manusia seperti pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar hutan, sistem tanam padi sonor dan berbagai kegiatan lainnya yang memicu terjadinya

kebakaran hutan. Jumlah bencana banjir sebanyak 144 kejadian yang juga dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia. Jumlah kejadian bencana terkecil atau yang paling sedikit adalah bencana tanah longsor yaitu sebanyak 88 kejadian selama lima tahun terakhir pada periode 2013-2017.

Rekapitulasi kejadian bencana alam di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 adalah sebanyak 206 kejadian yang terdiri dari bencana banjir, kebakaran, tanah longsor dan angin puting beliung. Pada tahun 2014 jumlah kejadian bencana alam di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 141 kejadian bencana. Pada tahun 2017 jumlah kejadian bencana alam sebanyak 156 kejadian dengan total kejadian bencana alam selama 5 (lima) tahun terakhir adalah 713 kejadian.

Jumlah kejadian bencana terbanyak terdapat di Kota Palembang yaitu sebanyak 142 kejadian selama lima tahun terakhir sedangkan jumlah kejadian yang paling sedikit terjadi di Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Muratara sebanyak masing-masing 21 kejadian selama tahun 2013-2017. Bencana yang terjadi yang paling banyak sepanjang tahun 2013-2017 adalah bencana alam kebakaran. Secara keseluruhan jumlah kejadian bencana alam mengalami penurunan dari tahun ke tahun pada periode 2013 sampai 2017. Bencana alam yang terjadi tidak hanya disebabkan karena faktor alam melainkan juga disebabkan karena faktor ulah tangan manusia tanpa memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan, karena dampak dari bencana itu sendiri akan kembali ke manusia dan merugikan dari berbagai aspek baik ekonomi, sosial maupun budaya.

Dilihat dari Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah yang memiliki tingkat kerentanan bencana yang sedang dan tinggi. Indeks Risiko bencana tersebut tiap tahunnya stabil dan berada dalam kategori yang rawan sedang dan tinggi. Adapun daerah yang memiliki risiko bencana yang paling tinggi adalah Kabupaten Lahat, sedangkan yang memiliki risiko bencana yang paling sedang adalah Kota Lubuklinggau. Meskipun demikian, Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan memiliki risiko bencana yang sedang dan tinggi sehingga perlu adanya upaya penanggulangan bencana dan penurunan indeks risiko bencana di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

**Tabel 2.12.**
Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan

| NO | NAMA KOTA/KABUPATEN | 2013-2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL | KELAS | TOTAL | KELAS | TOTAL | KELAS | TOTAL | KELAS |
| 1 | OGAN KOMERING ULU | 155 | TINGGI | 155 | TINGGI | 155 | TINGGI | 155 | TINGGI |
| 2 | OGAN KOMERING ILIR | 153 | TINGGI | 153 | TINGGI | 153 | TINGGI | 153 | TINGGI |
| 3 | MUARA ENIM | 155 | TINGGI | 155 | TINGGI | 155 | TINGGI | 155 | TINGGI |
| 4 | LAHAT | 162 | TINGGI | 162 | TINGGI | 162 | TINGGI | 162 | TINGGI |
| 5 | MUSI RAWAS | 155 | TINGGI | 155 | TINGGI | 155 | TINGGI | 155 | TINGGI |
| 6 | MUSI BANYUASIN | 132 | SEDANG | 132 | SEDANG | 132 | SEDANG | 132 | SEDANG |
| 7 | BANYUASIN | 156 | TINGGI | 156 | TINGGI | 156 | TINGGI | 156 | TINGGI |
| 8 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 130 | SEDANG | 130 | SEDANG | 130 | SEDANG | 130 | SEDANG |
| 9 | OGAN KOMERING ULU TIMUR | 131 | SEDANG | 131 | SEDANG | 131 | SEDANG | 131 | SEDANG |
| 10 | OGAN ILIR | 132 | SEDANG | 132 | SEDANG | 132 | SEDANG | 132 | SEDANG |
| 11 | EMPAT LAWANG | 158 | TINGGI | 158 | TINGGI | 158 | TINGGI | 158 | TINGGI |
| 12 | KOTA PALEMBANG | 132 | SEDANG | 132 | SEDANG | 132 | SEDANG | 132 | SEDANG |
| 13 | KOTA PRABUMULIH | 132 | SEDANG | 132 | SEDANG | 132 | SEDANG | 132 | SEDANG |
| 14 | KOTA PAGAR ALAM | 126 | SEDANG | 126 | SEDANG | 126 | SEDANG | 126 | SEDANG |
| 15 | KOTA LUBUKLINGGAU | 125 | SEDANG | 125 | SEDANG | 125 | SEDANG | 125 | SEDANG |

*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

### 2.1.3.1. Bencana Banjir

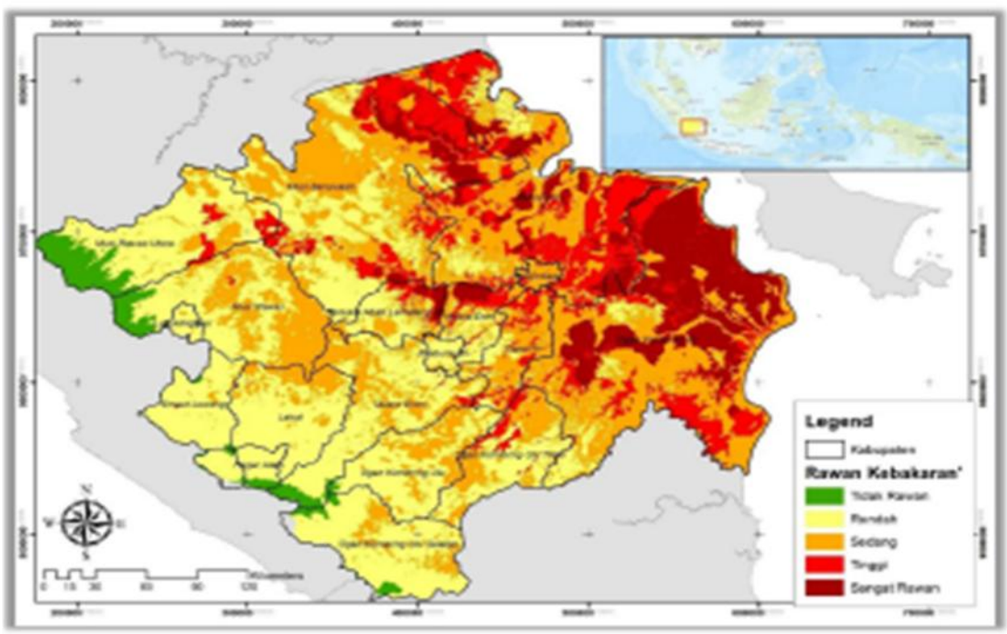
Bencana banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Selama kurun waktu dari tahun 2013 hingga Tahun 2017 tercatat 184 kejadian banjir di Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu penyebab banjir adalah semakin berkurangnya kawasan hutan lindung di daerah hulu dan merupakan penyebab yang paling dominan di wilayah ini. Berikut adalah kondisi banjir di DAS Musi :

- Di Sub DAS Musi banjir bandang sering terjadi. Pada tahun 1999 di Talang Padang beberapa rumah roboh diterjang banjir. Di Sub DAS Batang Harileko banjir terjadi dipertemuan dengan Sungai Musi.
- Di Sub DAS Rawas banjir terjadi Bingin Teluk dan Noman.
- Di Sub DAS Lematang banjir di Belimbing dan Pagar Alam.
- Di Sub DAS Ogan banjir terjadi Muara Kuang.
- Di Sub DAS Komering banjir terjadi di Muaradua.
- Di pertemuan Sungai Musi - Sungai Kelingi, Sungai Musi - Sungai Lakitan dan Sungai Musi - Sungai Rawas terjadi pada saat debit puncak sungai-sungai.
- Wilayah kota di hilir seperti Palembang dan Sekayu.

### 2.1.3.2. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Tercacat 469 kejadian bencana kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari Tahun 2013 hingga Tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa potensi bencana kebakaran sangat tinggi terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Sehingga diperlukan penanganan dan upaya antisipasi kebakaran di daerah rawan kebakaran

**Gambar 2.18.**
Peta Rawan Kebakaran Hutan Dan Lahan Sumsel, 2015




*Sumber : Giz-Bioclime Project Sumatera Selatan, 2015*

Pada Peta Rawan Bencana Kebakaran hutan dan lahan Tahun 2015, terlihat bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir berada pada status sangat rawan, disusul oleh Kabupaten Banyuasin serta Musi Banyuasin, yang berada pada status Rawan Tinggi.

**Tabel 2.13.**
Data Desa Rawan dan Sangat Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan
di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015

| No | Kabupaten | Kecamatan | | Desa | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rawan | Sangat Rawan | Rawan | Sangat Rawan | |
| 1 | Ogan Komering Ilir | 18 | 14 | 63 | 87 | 150 |
| 2 | Banyuasin | 19 | 14 | 111 | 35 | 146 |
| 3 | Musi Banyuasin | 14 | 12 | 68 | 66 | 134 |
| 4 | Ogan Ilir | 13 | 7 | 57 | 15 | 72 |
| 5 | Muara Enim | 18 | 12 | 102 | 39 | 141 |
| 6 | Penukal Lematang Abab Ilir | 5 | 5 | 34 | 11 | 45 |
| 7 | Musirawas | 13 | 8 | 88 | 27 | 115 |
| 8 | Musirawas Utara | 7 | 7 | 43 | 21 | 64 |
| 9 | Empat Lawang | 7 | 3 | 47 | 5 | 52 |
| 10 | Lahat | 18 | 7 | 80 | 12 | 92 |
| 11 | Ogan Komering Ulu | 12 | 7 | 68 | 23 | 91 |
| 12 | Ogan Komering Ulu Selatan | 17 | 8 | 83 | 20 | 103 |
| 13 | Ogan Komering Ulu Timur | 12 | na | 22 | 25 | 47 |
| 14 | Pagaralam | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 |
| 15 | Palembang | 8 | 1 | 10 | 1 | 11 |
| 16 | Lubuk Linggau | 5 | 2 | 9 | 4 | 13 |
| 17 | Prabumulih | 5 | 2 | 10 | 4 | 14 |
| **JUMLAH** | | **195** | **118** | **900** | **396** | **1.296** |

*Sumber: Dinas BPBD Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Dari tabel di atas dapat dilihat desa rawan dan sangat rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015, Kabupaten/Kota yang memiliki desa terbanyak rawan kebakaran hutan dan lahan adalah Kabupaten Banyuasin dengan jumlah 111 desa, sedangkan Kabupaten/Kota yang paling sedikit memiliki desa rawan kebakaran hutan dan bencana adalah Kota Pagaralam yaitu hanya 5 desa.

Kemudian untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai desa terbanyak dengan kategori sangat rawan kebakan hutan dan lahan adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan jumlah 87 desa, sedangkan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki desa paling sedikit dengan kategori sangat rawan kebakaran hutan dan lahan adalah Kota Pagaralam dan Kota Palembang yaitu hanya satu desa.

**Tabel 2.14.**
Data Desa Tangguh di BPBD Kabupaten
di Sumatera Selatan

| No | Kabupaten | Desa | Kecamatan | Ket |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Ilir | Rambutan | Indralaya Utara | |
| | | Tanjung Pering | Indralaya Utara | |
| 2 | Ogan Komering Ilir | Riding | Pangkalan Lampan | |
| | | Sumber Makmur | Lempuing | |
| | | Suka Putih | Pedamaran | |
| | | Cinta Jaya | Pedamaran | |
| | | Tanjung Beringin | Tanjung Lubuk | |
| | | Kota Bumi | Tanjung Lubuk | |
| 3 | Banyuasin | Lebung | Rantau Bayur | |
| 4 | Musi Banyuasin | Mangsang | Bayung Lincir | |
| | | Muara Medak | Bayung Lincir | |
| | | Mendes | Bayung Lincir | |

*Sumber: Sumber: Dinas BPBD Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Dari tabel di atas dapat diketahui desa tangguh di BPBD Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Pada Kabupaten Ogan Ilir terdapat dua desa yang masuk dalam data Desa Tangguh yaitu, Desa Rambutan dan Desa Tanjung Pering yang terletak di Kecamatan Indralaya Utara. Selanjutnya pada Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki enam desa yaitu, Desa Riding, Desa Suka Putih, Desa Cinta Jaya, Desa Tanjung Beringin, dan Desa Kota Bumi.

Selanjutnya pada Kabupaten Banyuasin hanya terdapat di Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur, dan yang terakhir adalah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki tiga Desa Tangguh yaitu, Desa Mangsang, Desa Muara Medak, dan Desa Mendes yang terletak di Kecamatan Bayung Lincir.

### 2.1.3.3. Bencana Tanah Longsor

Tercacat 105 kejadian longsor di Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari Tahun 2013 hingga Tahun 2017. Berdasarkan dari data hasil pemetaan gerakan tanah Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Provinsi Sumatera Selatan, dapat diketahui bahwa potensi gerakan tanah yang melanda Provinsi Sumatera Selatan relatif cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari data yang tercatat bahwa terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota yang memiliki potensi gerakan tanah, dimana lokasi yang memiliki potensi sebagian besar berada pada jaringan jalan dengan jenis potensi bencana berupa longsor. Kabupaten/kota yang rawan mengalami longsor adalah Kabupaten Musi Rawas, Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam, Muara Enim, OKU, OKU Timur dan OKU Selatan.

**Tabel 2.15.**
Potensi Gerakan Tanah di Provinsi Sumatera Selatan

| No | Daerah Yang Berpotensi | | | Jenis | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kab/Kota | Kecamatan | Desa | | |
| 1 | Musi Rawas | Surulangun | | Longsor | Jalan raya |
| | | Muara Rupit | Madang | Longsor | Jalan raya |
| | | | Bingin rupit | Longsor | Jalan raya |
| | | | Tanjung Beringin | Longsor | Jalan raya |
| | | Muara Kelingi | | | |
| | | Muara Beliti | | | |
| | | Terawas | | | |
| 2 | Lahat | Pendopo | Lingge | Longsor | Kebun kopi & buah |
| | | | Tanjung Raya | Longsor | Kebun kopi & buah |
| | | Tanjung Sakti | Tebing S. Manna | Runtuh | Jalan raya, km 10 |
| | | | Pulau panas | Longsor Batu | Jalan raya, km 19,5 |
| | | | Sindang Panjang | Runtuh Batu | Jalan raya, km 27 |
| | | | Tanjung Sakti Lama | Longsor Batu | Jalan raya, km 2 |
| | | | Ds Pulau Timun | Longsor | Jalan raya, km 8 |
| | | Pulau Pinang | Ds Tj. Mulak | Amblesan | Badan jalan 5 m |
| | | | | Gejala runtuh | km 17 |
| | | | Tanjung Sirih | aliran batu | Jalan raya, km 14 |
| | | | Muara Seban | kompleks | Jalan raya, km 3 |
| | | | Jati | longsoran | Jalan raya, km 3,3 |
| | | | Kuba | longsoran | Jalan raya, km 6,4 |
| | | Kikim | Saung Naga | longsoran | Jalan raya, km 63 |
| | | | Bungamas | longsoran | Jalan raya, km 15 |
| | | | Gunung Kerto | longsoran | Jalan raya, km 40 |
| | | | Paduraksa | longsoran | Jalan raya, km 34,5 |
| | | | Gn. Kembang | longsoran | Jalan raya, km 25 |
| | | Lahat | Sugiwaras | longsoran | Jalan raya, km 19,5 |
| | | | Sukarame | longsoran | Jalan raya, km 18,5 |
| | | Kota Agung | Tj. Tebat | longsoran | Jalan raya, km 31,5 |
| 3 | Empat Lawang | Ulu Musi | Bandaraji | Longsor | Jalan raya |
| | | | Karang Jaya | Longsor | Jalan raya |
| | | | Tangga Rasa | Longsor | Jalan raya |

| No | Daerah Yang Berpotensi | | | Jenis | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kab/Kota | Kecamatan | Desa | | |
| | | | Karang Dapo | Longsor | Tebing sungai |
| | | Tebing tinggi | Penanggungan | kompleks | Jalan raya, km 72 |
| 4 | Pagar Alam | Dempo selatan | Paharudipo | gejala runtuh | Jalan raya, km 56 |
| | | | Sukajadi | gejala runtuh | Jalan raya, km 57 |
| | | | Air Betung | gejala runtuh | Jalan raya, km 5 PA |
| | | | Mingkik | gejala runtuh | Jalan raya, km 37,5 |
| | | Dempo Utara | Krinjing | longsor | Jalan raya, km 15-18 |
| 5 | Muara Enim | G. Megang | Ujanmas | longsor | Jalan raya |
| | | Tanjung Enim | Tanjung Raja | longsor | Jalan raya |
| | | Tanjung Agung | Darmo | longsor | Jalan raya |
| | | | Seleman | longsor | Jalan raya |
| | | | Paduraksa | longsor | Jalan raya |
| | | | Padang Bindu | longsor | Jalan raya, km 4-9 |
| | | | Talang T. Benawa | Aliran tanah | Jalan raya, km 13 |
| | | | Talang T. Semen | Aliran tanah | Jalan raya, km 16 |
| | | Semedo Darat Laut | Talang habibnuh | longsor | Jalan raya, km 19 |
| | | | Talang keli | longsor | Jalan raya, km 23 |
| | | | talang P.Rinkeh | longsor | Jalan raya, km 27-30 |
| | | | Pulau Panggung | Runtuh | Jalan raya |
| | | | Padang Bindu | Runtuh | Jalan raya |
| | | | Sukaraya | Aliran tanah | Jalan raya |
| | | | Penyandingan | Aliran tanah | kebun |
| | | | Talang Gudang | longsor | Jalan raya, km 35 |
| | | | Ds. P Panggung | longsor | Jalan raya, km 3 - 3,2 |
| | | | Ds. Batusurau | Runtuh | Jalan raya, km 4,3 |
| | | | Ds. Muarobanau | longsor | Jalan raya, km 3 |
| | | | Ds. Penyandingan | longsor | Jalan raya, km 72 |
| | | | Karang raja | longsor | Jalan raya, km 6 |
| | | | Lingga | longsor | Jalan raya, km 12 |
| | | Semedo Darat Tengah | Ds. Sri Tanjung | longsor | Jalan raya, km 11 |
| | | | Ds. Muara Tenang | longsor | Jalan raya, km 14 |

| No | Daerah Yang Berpotensi | | | Jenis | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kab/Kota | Kecamatan | Desa | | |
| | | Muara Enim | Karang raja | longsor | Jalan raya, km 6 |
| | | | Lingga | longsor | Jalan raya, km 12 |
| | | Lawang Kidul | Karang asam | longsor | Jalan raya, km 16 |
| | | Tanjung Agung | Penyandingan | longsor | Jalan raya, km 29 |
| | | | Pandan enim | Runtuh | Jalan raya, km 49 |
| | | | Pulau Pinang | Runtuh | Jalan raya, km 51 |
| | | | Pandan Dulang | Runtuh | Jalan raya, km 52 |
| | | | Simpang Meo | longsor | Jalan raya, km 56 |
| 6 | OKU | Pengandonan | | longsor | Jalan raya |
| 7 | OKU Timur | Martapura | | longsor | Jalan raya |
| *8* | *OKU Selatan* | *Muara dua* | | *longsor* | *Jalan raya* |
| | | Banding agung | Ds Mekakau hilir | Aliran tanah | Jalan Desa |
| | | Pulau beringin | P Bgin- Ulu Danau | Aliran tanah | Jalan raya |
| | | | Gunung Batu | Runtuh Batu | Jalan raya |
| | | | Pagar agung | longsoran | Jalan raya |
| | | | Wates | Runtuh Batu | Jalan Desa |

*Sumber : Pemetaan Gerakan Tanah Dinas Pertambangan dan Energi, 2015.*

### 2.1.4. Demografi

#### 2.1.4.1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 sebanyak 8.217.551 jiwa yang terdiri dari 4.183.264 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 4.034.287 jiwa penduduk perempuan. Jika dibanding pada tahun 2013 dimana jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 7.975.145 jiwa maka laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2013-2018 adalah 3,04 persen. Secara umum jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal itu bisa dilihat dari jumlah penduduk di tahun 2014 sebesar 8.049.797 jiwa mengalami pertambahan jumlah menjadi 8.090.956 jiwa di tahun 2015, tahun 2016 menjadi sebesar 8.146.207 jiwa, tahun 2017 menjadi sebesar 8.152.528 jiwa dan di tahun 2018 menjadi sebesar 8.217.551 jiwa.

Jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 terdapat di Kota Palembang yaitu sebanyak 1.592,248 jiwa, dibandingkan dengan tahun 2017 dengan jumlah penduduk sebesar 1.509.297 jiwa

mengalami penambahan sebesar 82.951 jiwa atau 5,21 persen. Secara keseluruhan jumlah penduduk di Kota Palembang mengalami ppeningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,01 persen. Jumlah penduduk terbanyak kedua pada tahun 2018 terdapat di Kabupaten Banyuasin sebanyak 810.222 jiwa dan dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2013-2018 sebesar 2,92 persen.

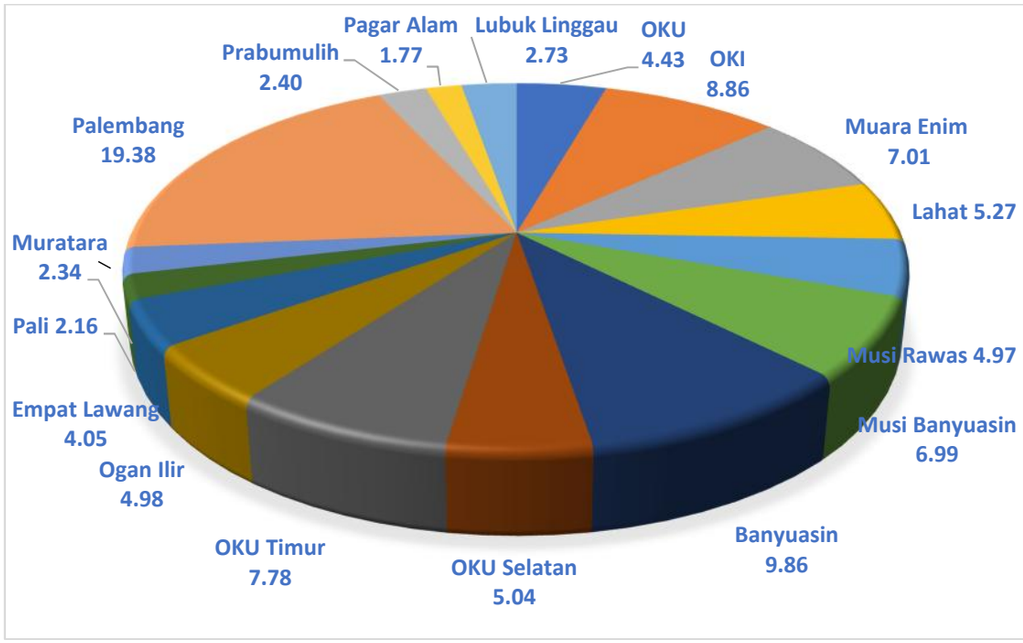
**Tabel 2.16.**
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan
Menurut Kabupaten dan Kota Tahun 2013-2018

| Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk | | | | | | LPP 2013-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Ogan Komering Ulu | 350.817 | 351.626 | 352.366 | 356.508 | 357.502 | 363,885 | 3,73 |
| Ogan Komering Ilir | 710.979 | 715.840 | 716.964 | 719.412 | 721.571 | 727,789 | 2,36 |
| Muara Enim | 718.120 | 560.539 | 561.223 | 565.752 | 567.450 | 576,105 | -19,78 |
| Lahat | 415,770 | 419.140 | 422.992 | 426.043 | 427.320 | 432,957 | 4,13 |
| Musi Rawas | 557.722 | 398.212 | 404.587 | 407.375 | 408.597 | 408,816 | -26,70 |
| Musi Banyuasin | 597.632 | 600.449 | 601.477 | 606.306 | 608.125 | 574,415 | -3,88 |
| Banyuasin | 787.248 | 798.030 | 798.831 | 801.491 | 803.895 | 810,222 | 2,92 |
| OKU Selatan | 401.025 | 405.980 | 407.303 | 326.074 | 410.303 | 414,252 | 3,30 |
| OKU Timur | 619.429 | 623.484 | 628.953 | 631.914 | 633.810 | 639,112 | 3,18 |
| Ogan Ilir | 424.762 | 428.382 | 430.048 | 432,854 | 419,529 | 409,310 | -3,64 |
| Empat Lawang | 319.578 | 323.286 | 324.630 | 326.074 | 327.053 | 332,515 | 4,05 |
| PALI | na | 159.675 | 165.808 | 167.147 | 170.497 | 177,111 | na |
| Musi Rawas Utara | na | 182.768 | 186.595 | 188.115 | 188.680 | 192,164 | na |
| Palembang | 1.545.734 | 1.549.147 | 1.551115 | 1.564.603 | 1.509.297 | 1.592,248 | 3,01 |
| Prabumulih | 183.016 | 188.214 | 188.731 | 190.341 | 190.913 | 197,069 | 7,68 |
| Pagar Alam | 135.940 | 136.327 | 137.862 | 139.448 | 139.867 | 145,549 | 7,07 |
| Lubuk Linggau | 207.377 | 208.698 | 211.471 | 213.749 | 217.119 | 224,032 | 8,03 |
| **Sumatera Selatan** | **7.975.149** | **8.049.797** | **8.090.956** | **8.146.207** | **8.152.528** | **8.217.551** | **3,04** |

*Sumber: Permendagri No. 137 Tahun 2017 dan Data Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018*

Secara umum penduduk di masing-masing Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun pada periode 2013-2018. Namun terdapat 3 (tiga) daerah yang mengalami penurunan jlaju pertumbuhan penduduk yaitu Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Ogan Ilir. Jumlah penduduk terkecil pada tahun 2018 terdapat di Kota Pagar Alam sebesar 145,549 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2017 yang sebesar 139.448 jiwa menjadi sebesar 145,549 jiwa pada tahun 2018 dengan persentase kenaikan sebesar 0000 persen dan laju pertumbuhan penduduk Kota Pagar Alam dari tahun 2013-2018 adalah 7,07 persen. Jumlah penduduk terkecil kedua terdapat di Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2018 sebanyak 177,111 jiwa.

**Gambar 2.19.**
Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten dan Kota
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018




*Sumber : Badan Pusat Statistk Provinsi Sumatera Selatan 2018*

Persentase distribusi penduduk terbesar pada tahun 2018 adalah Kota Palembang yaitu 19,38 persen dari seluruh jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan distribusi penduduk terkecil terdapat di Kota Pagar Alam hanya sebesar 1,77 persen dari seluruh jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukan adanya migrasi atau perpindahan penduduk dari desa atau kota ke pusat kota yang lebih besar. Sehingga jumlah penduduk dipusat kota di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan.

Sebagai langkah antisipasi menghadapi bonus demografi di Sumatera Selatan telah disusun Grand Desain Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2035, dimana didalamnya berisi serangkaian arah kebijakan antara lain :

1. Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui TFR, IMR, MMR, dan Mobilitas Penduduk;
2. Pengandalian kuantitas penduduk agar jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tamping lingkungan, dan
3. Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas penduduk yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan secara umum dan

pendidikan serta kesempatan kerja/berusaha. Dalam rangka peningkatan kualitas penduduk, dari sisi pelayanan kesehatan perlu diupayakan peningkatkan derajat kesehatan untuk menurunkan angka kematian terutama ibu dan anak serta meningkatkan usia harapan. Sementara dari sisi pendidikan, perlu diupayakan peningkatan kompetensi dan daya saing penduduk melalui pendidikan formal, non formal dan informal tanpa mengesampingkan masalah kesetaraan gender. Sedangkan dari sisi kesempatan kerja/berusaha perlu diupayakan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak atau kemudahan berwirausaha. Melalui pekerjaan yang layak memberi peluang keluarga untuk meningkatkan penghasilannya sehingga terbebas dari kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Jumlah penduduk Sumatera Selatan umur produktif (15-64 tahun) dari tahun 2015 sampai tahun 2018 sebesar 94,65% ini mengalami kenaikan sebesar 74,48% jika dibandingkan dengan penduduk non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) yaitu sebesar 20,17 %.

**Tabel 2.17.**
Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2018

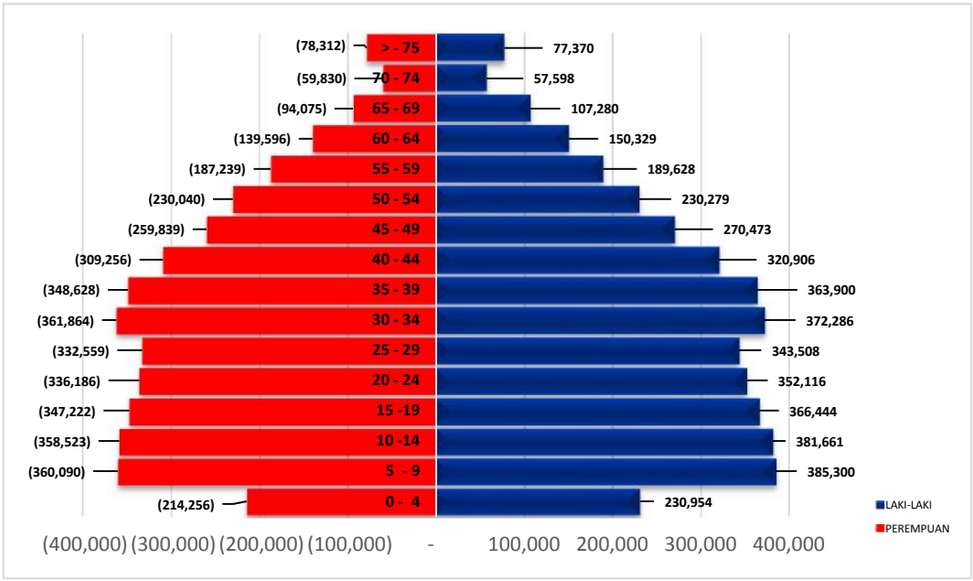
| KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI | | PEREMPUAN | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | JUMLAH | % LK | JUMLAH | % PR | JUMLAH | % |
| 0 - 4 | 230.954 | 2,81 | 214.256 | 2,61 | 445.210 | 5,42 |
| 5 - 9 | 385.300 | 4,69 | 360.090 | 4,38 | 745.390 | 9,07 |
| 10 -14 | 381.661 | 4,64 | 358.523 | 4,36 | 740.184 | 9,01 |
| 15 -19 | 366.444 | 4,46 | 347.222 | 4,23 | 713.666 | 8,68 |
| 20 - 24 | 352.116 | 4,28 | 336.186 | 4,09 | 688.302 | 8,38 |
| 25 - 29 | 343.508 | 4,18 | 332.559 | 4,05 | 676.067 | 8,23 |
| 30 - 34 | 372.286 | 4,53 | 361.864 | 4,40 | 734.150 | 8,93 |
| 35 - 39 | 363.900 | 4,43 | 348.628 | 4,24 | 712.528 | 8,67 |
| 40 - 44 | 320.906 | 3,91 | 309.256 | 3,76 | 630.162 | 7,67 |
| 45 - 49 | 270.473 | 3,29 | 259.839 | 3,16 | 530.312 | 6,45 |
| 50 - 54 | 230.279 | 2,80 | 230.040 | 2,80 | 460.319 | 5,60 |
| 55 - 59 | 189.628 | 2,31 | 187.239 | 2,28 | 376.867 | 4,59 |
| 60 - 64 | 150.329 | 1,83 | 139.596 | 1,70 | 289.925 | 3,53 |
| 65 - 69 | 107.280 | 1,31 | 94.075 | 1,14 | 201.355 | 2,45 |
| 70 - 74 | 57.598 | 0,70 | 59.830 | 0,73 | 117.428 | 1,43 |
| > - 75 | 77.370 | 0,94 | 78.312 | 0,95 | 155.682 | 1,89 |
| **JUMLAH** | **4.200.032** | **51,11** | **4.017.515** | **49** | **8.217.547** | **100,00** |

*Sumber : Database SIAK Provinsi Sumatera hail konsolidasi Ditjen Kependudukan dan Pencapil Kemendagri RI*

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur 15-64 tahun (70,73%) dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berumur 30-34 tahun. Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin terlihat pada penduduk laki-laki yang terbesar pada

kelompok umur 30-34 tahun, sedangkan penduduk perempuan berada pada kelompok umur 30-34 tahun (50%). Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar merupakan penduduk usia kerja (usia produktif) dan sisanya sebanyak 23,50 % merupakan penduduk usia muda berusia 15 tahun dan penduduk usia lanjut usia (65 tahun keatas) sebesar 5,77%.

**Gambar. 2.20.**
Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018




*Sumber : Database SIAK Provinsi Sumatera hail konsolidasi Ditjen Kependudukan dan Pencapil Kemendagri RI*

Piramida penduduk Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan struktur penduduk yang konstruktif dimana penduduk diusia produktif terutama pada usia 30-34 tahun lebih besar dari kelompok umur diatasnya, sedangkan pada kelompok umur 0-4 tahun terletak pada dasar piramida mulai mengecil. Ini berarti angka kelahiran mulai menurun, walaupun dari jumlah absolut tidak kecil, demikian juga jumlah penduduk berumur 5-9 tahun masih terlihat lebar atau lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk umur 0-4 tahun. Hal ini berarti lima tahun kedepan dibutuhkan fasilitas Pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok umur ini. Jumlah penduduk pada kelompok umur 30-34 tahun menunjukkan jumlah yang paling tinggi, maka diperlukan lapangan pekerjaan dan mendorong munculnya wirausahawan baru dengan cara memberikan program pelatihan kewirausahaan sedangkan untuk kelompok umur 65 tahun keatas menunjukkan proporsi yang paling rendah yaitu 5,77 %. Namun dimasa depan proporsi lansia akan terus merambat naik, karena pergeseran umur serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok umur ini

akan terus membesar dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan kebijakan seperti Kesehatan, Pelayanan lansia, serta kebutuhan social dasar lainnya.

### 2.1.4.2. Jumlah Angkatan Kerja

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan jumlah penduduk usia kerja. Jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2013 di Sumatera Selatan adalah 5.484.251 jiwa yang terdiri dari 2.780.218 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 2.704.033 penduduk perempuan. Jumlah penduduk usia kerja terus bertambah dari tahun 2013 sampai tahun 2018 dimana pada tahun 2018 jumlah penduduk usia kerja meningkat menjadi 6.025.900 jiwa.

Persentase laju pertumbuhan penduduk usia kerja pada tahun 2013-2018 adalah 9,87 persen.

**Tabel 2.18.**
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan, 2013-2018

| Jenis Kelamin | 2013 (Jiwa) | 2014 (Jiwa) | 2015 (Jiwa) | 2016 (Jiwa) | 2017 (Jiwa) | 2018 (Jiwa) | Laju Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Penduduk Usia Kerja** | | | | | | | |
| Laki-laki | 2.780.218 | 2.859.196 | 2.884.176 | 2.950.010 | 2.999.299 | na | na |
| Perempuan | 2.704.033 | 2.784.440 | 2.810.307 | 2.871.316 | 2.918.500 | na | na |
| **Total** | **5.484.251** | **5.643.636** | **5.694.483** | **5.821.326** | **5.917.799** | **6.025.900** | **9,87** |
| **Angkatan Kerja** | | | | | | | |
| Laki-laki | 2.289.673 | 2.412.369 | 2.440.363 | 2.518.306 | 2.554.231 | na | na |
| Perempuan | 1.357.323 | 1.473.305 | 1.494.424 | 1.660.488 | 1.569.438 | na | na |
| **Total** | **3.646.996** | **3.885.674** | **3.934.787** | **4.178.794** | **4.123.669** | **4.139.000** | **13,49** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2018*

Penduduk angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan juga meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk angkatan kerja pada tahun 2013 di Sumatera Selatan adalah 3.646.996 jiwa yang terdiri dari 2.289.673 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 1.357.323 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah angkatan kerja bertambah menjadi 4.139.000 jiwa. Laju pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013-2018 adalah 13,49 persen.

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat dianalisis terhadap beberapa fokus bidang kegiatan yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan masyarakat, fokus seni budaya dan olah raga serta fokus pelayanan minimal.

### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus bidang kegiatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ditinjau dari aspek pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, Indeks Gini, Kemiskinan, dan angka Kriminalitas. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini sejalan dengan indikator SDGs yaitu tanpa kemiskinan, kehidupan sehat dan sejahtera, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

#### 2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Struktur ekonomi wilayah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari besaran distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi wilayah. Terdapat pengelompokan tiga kegiatan ekonomi sektoral yang terdiri dari kegiatan ekonomi primer (pertanian, pertambangan dan penggalian), sekunder (industri pengolahan, listrik, gas, dan air, serta bangunan), dan tersier (Perdagangan, Hotel & Restoran; Pengangkutan & Komunikasi; Keuangan, Real Estat& Jasa Perusahaan; serta Jasa-jasa).

Menurut data BPS Provinsi Sumatera Selatan, Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai Rp. 419,72 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 298,57 triliun. Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 tumbuh 6,04 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 13,18 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 8,57persen.

Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan IV 2018 bila dibandingkan triwulan sebelumnya *(q-to-q)* mengalami kontraksi sebesar 2,91 persen. Hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami kontraksi sebesar 19,90 persen. Sementara dari sisi Pengeluaran disebabkan oleh Komponen Ekspor Luar Negeri yang mengalami kontraksi sebesar 30,68 persen.

**Tabel 2.19.**
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2018 Atas Dasar Harga Konstan

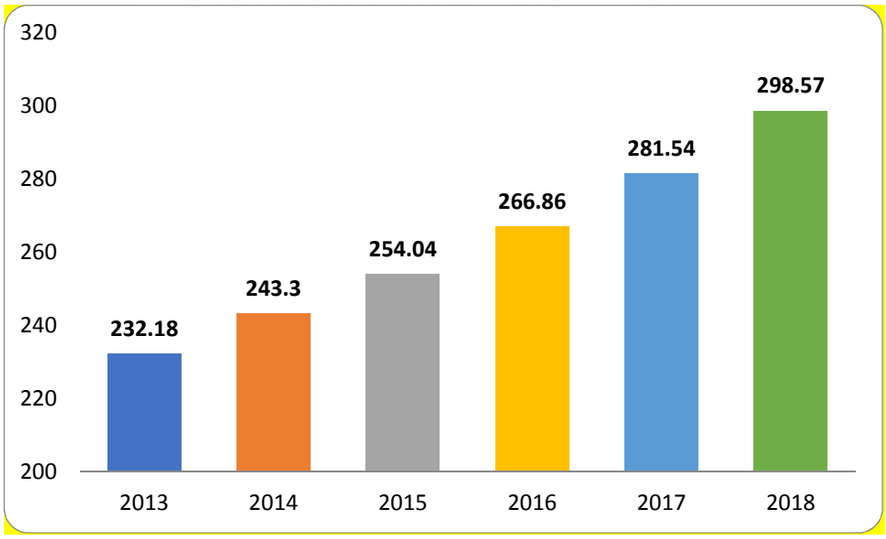
| Lapangan Usaha | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Triliun Rupiah) | % | (Triliun Rupiah) | % | (Triliun Rupiah) | % | (Triliun Rupiah) | % | (Triliun Rupiah) | % | (Triliun Rupiah) | % |
| A. | Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan | 44,79 | 19,29 | 46,61 | 19,16 | 48,29 | 19,01 | 48,94 | 18,34 | 49,52 | 17,59 | 50,59 | 16,94 |
| B. | Pertambangan dan Penggalian | 51,51 | 22,19 | 53,23 | 21,88 | 55,33 | 21,78 | 57,30 | 21,47 | 60,40 | 21,45 | 66,00 | 22,11 |
| C. | Industri Pengolahan | 42,70 | 18,39 | 44,65 | 18,35 | 47,07 | 18,53 | 50,00 | 18,74 | 53,27 | 18,92 | 56,21 | 18,83 |
| D. | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,19 | 0,08 | 0,22 | 0,09 | 0,23 | 0,09 | 0,27 | 0,10 | 0,29 | 0,10 | 0,31 | 0,10 |
| E. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah | 0,26 | 0,11 | 0,28 | 0,11 | 0,30 | 0,12 | 0,30 | 0,11 | 0,31 | 0,11 | 0,34 | 0,11 |
| F. | Konstruksi | 27,21 | 11,72 | 28,37 | 11,66 | 28,39 | 11,18 | 30,86 | 11,56 | 33,62 | 11,94 | 35,50 | 11,89 |
| G. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 22,67 | 9,76 | 23,68 | 9,73 | 24,52 | 9,65 | 26,65 | 9,99 | 28,70 | 10,19 | 31,02 | 10,39 |
| H. | Transportasi dan Pergudangan | 4,09 | 1,76 | 4,38 | 1,80 | 4,81 | 1,89 | 5,15 | 1,93 | 5,58 | 1,98 | 5,99 | 2,01 |
| I. | Penyediaan Akomodasi Makan Minum | 2,61 | 1,12 | 2,75 | 1,13 | 3,02 | 1,19 | 3,33 | 1,25 | 3,60 | 1,28 | 4,08 | 1,37 |
| J. | Informasi dan Komunikasi | 6,82 | 2,94 | 7,38 | 3,03 | 8,02 | 3,16 | 8,57 | 3,21 | 9,29 | 3,30 | 10,01 | 3,35 |

| Lapangan Usaha | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Triliun Rupiah) | % | (Triliun Rupiah) | % | (Triliun Rupiah) | % | (Triliun Rupiah) | % | (Triliun Rupiah) | % | (Triliun Rupiah) | % |
| K. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 6,14 | 2,64 | 6,37 | 2,62 | 6,65 | 2,62 | 7,14 | 2,68 | 7,33 | 2,60 | 7,46 | 2,50 |
| L. | Real Estate | 6,41 | 2,76 | 6,87 | 2,82 | 7,36 | 2,90 | 7,98 | 2,99 | 8,57 | 3,04 | 9,25 | 3,10 |
| M,N. | Jasa Perusahaan | 0,24 | 0,10 | 0,25 | 0,10 | 0,27 | 0,10 | 0,28 | 0,10 | 0,30 | 0,11 | 0,33 | 0,11 |
| O. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7,24 | 3,12 | 7,76 | 3,19 | 8,58 | 3,38 | 8,58 | 3,22 | 9,13 | 3,24 | 9,38 | 3,14 |
| P. | Jasa Pendidikan | 5,89 | 2,54 | 6,86 | 2,82 | 7,41 | 2,92 | 7,61 | 2,85 | 7,63 | 2,71 | 7,84 | 2,63 |
| Q. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1.50 | 0,64 | 1,64 | 0,67 | 1,76 | 0,69 | 1,78 | 0,67 | 1,84 | 0,65 | 1,88 | 0,63 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 1,90 | 0,82 | 1,96 | 0,81 | 2,04 | 0,80 | 2.09 | 0,78 | 2,18 | 0,77 | 2,38 | 0,80 |
| **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO** | | **232,18** | **100,00** | **243,30** | **100,00** | **254,04** | **100,00** | **266,86** | **100,00** | **281.54** | **100,00** | **298,57** | **100,00** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2018*

Nilai PDRB (Produk Domestik Bruto) Provinsi Sumatera Selatan atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif dimana nilai PDRB Sumatera Selatan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun pada periode 2013-2018. PDRB Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 mencapai sebesar 298,57 triliun rupiah. Nilai tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2017 dimana PDRB pada tahun 2017 adalah sebesar 281,54 triliun rupiah.

**Gambar 2.21.**
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2013-2018 di Provinsi Sumatera Selatan




*Sumber : Badan Pusat Statistk Provinsi Sumatera Selatan 2018*

Pada tahun 2018 sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah PDRB terbesar adalah sektor lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 66,00 triliun rupiah. Sektor ekonomi dengan nilai tambah PDRB terbesar kedua adalah sektor lapangan usaha Industri Penglahan yaitu sebesar 56,21 triliun rupiah. Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah PDRB terkecil adalah sektor Pengadaan Listrik, Gas yaitu sebesar 0,31 triliun rupiah pada tahun 2018. Selain itu sekor ekonomi terkecil kedua adalah sektor lapangan usaha Jasa Perusahaan dengan nilai tambah PDRB sebesar 0,33 triliun rupiah.

**Tabel 2.20.**
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012-2018 Atas dasar harga Berlaku

| Lapangan Usaha | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Triliun Rupiah) | % | (Triliun Rupiah) | % | (Triliun Rupiah) | % | (Triliun Rupiah) | % | (Triliun Rupiah) | % | (Triliun Rupiah) | % |
| A. | Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan | 52,15 | 18,60 | 54,41 | 17,76 | 56,84 | 17,13 | 59,09 | 16,70 | 60,51 | 15,80 | 62,12 | 14,80 |
| B. | Pertambangan dan Penggalian | 70,03 | 24,98 | 73,32 | 23,93 | 72,35 | 21,81 | 69,76 | 19,71 | 73,67 | 19,24 | 84,94 | 20,24 |
| C. | Industri Pengolahan | 48,09 | 17,15 | 53,16 | 17,35 | 60,91 | 18,36 | 67,03 | 18,94 | 74,90 | 19,56 | 81,93 | 19,52 |
| D. | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,19 | 0,07 | 0,24 | 0,08 | 0,30 | 0,09 | 0,43 | 0,12 | 0,49 | 0,13 | 0,45 | 0,13 |
| E. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah | 0,26 | 0,09 | 0,31 | 0,10 | 0,36 | 0,11 | 0,40 | 0,11 | 0,44 | 0,12 | 0,50 | 0,12 |
| F. | Konstruksi | 35,54 | 12,68 | 41,06 | 13,40 | 41,75 | 12,58 | 46,36 | 13,10 | 50,68 | 13,24 | 54,49 | 12,98 |
| G. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 25,21 | 8,99 | 27,80 | 9,07 | 35,09 | 10,58 | 41,33 | 11,68 | 47,58 | 12,43 | 54,32 | 12,94 |
| H. | Transportasi dan Pergudangan | 4,95 | 1,77 | 5,70 | 1,86 | 6,90 | 2,08 | 7,81 | 2,21 | 8,85 | 2,31 | 9,94 | 2,37 |
| I. | Penyediaan Akomodasi Makan Minum | 3,31 | 1,18 | 3,85 | 1,26 | 4,69 | 1,41 | 5,53 | 1,56 | 6,26 | 1,64 | 7,40 | 1,76 |
| J. | Informasi dan Komunikasi | 6,71 | 2,39 | 7,41 | 2,42 | 8,31 | 2,50 | 9,42 | 2,66 | 10,63 | 2,78 | 11,94 | 2,85 |

| Lapangan Usaha | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Triliun Rupiah) | % | (Triliun Rupiah) | % | (Triliun Rupiah) | % | (Triliun Rupiah) | % | (Triliun Rupiah) | % | (Triliun Rupiah) | % |
| K. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 7,25 | 2,59 | 7,85 | 2,56 | 8,50 | 2,56 | 9,42 | 2,66 | 10,08 | 2,63 | 10,64 | 2,54 |
| L. | Real Estate | 6,76 | 2,41 | 7,95 | 2,60 | 9,34 | 2,81 | 10,58 | 2,99 | 11,60 | 3,03 | 12,90 | 3,07 |
| M,N. | Jasa Perusahaan | 0,29 | 0,10 | 0,33 | 0,11 | 0,37 | 0,11 | 0,41 | 0,12 | 0,46 | 0,12 | 0,53 | 0,13 |
| O. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 9,05 | 3,23 | 10,85 | 3,54 | 12,55 | 3,78 | 12,24 | 3,46 | 12,10 | 3,16 | 11,96 | 2,85 |
| P. | Jasa Pendidikan | 6,86 | 2,45 | 8,09 | 2,64 | 8,96 | 2,70 | 9,28 | 2,62 | 9,46 | 2,47 | 9,90 | 2,36 |
| Q. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,62 | 0,58 | 1,82 | 0,59 | 2,06 | 0,62 | 2,17 | 0,61 | 2,37 | 0,62 | 2,48 | 0,59 |
| R,S,T, U | Jasa lainnya | 2,08 | 74,00 | 2,26 | 0,74 | 2,51 | 0,76 | 2,61 | 0,74 | 2,79 | 0,73 | 3,18 | 0,76 |
| **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO** | | **280,35** | **100,00** | **306,42** | **100,00** | **331,77** | **100,00** | **353,87** | **100,00** | **382,89** | **100,00** | **419,72** | **100,00** |

*Sumber : Badan Pusat Statistk Provinsi Sumatera Selatan 2018*

Lima sektor lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi PDRB Provinsi Sumatera Selatan terbesar pada Tahun 2018 adalah :

- Sektor Pertambangan dan penggalian sebesar 20,24%
- Sektor Industri Pengolahan sebesar 19,52%
- Sektor Pertanian Sebesar 14,80%
- Sektor Konstruksi Sebesar 12,98%
- Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Sebesar 12,94%

Tiga Sektor PDRB yang memberikan kontribusi terkecil bagi Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2018 adalah :

- Sektor Pengadaan Air, pengelolaan sampah dan libah daur ulang sebesar 0,12%
- Sektor Jasa Perusahaan Sebesar 0,13%
- Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,13%

Kontribusi PDRB terkecil merupakan sektor yang harus diperhatikan, pertumbuhan Sektor Pengadaan Air, pengelolaan sampah dan libah daur ulang sebesar 0,09% pada Tahun 2013 hingga Tahun 2018 hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 0,12%, begitu juga dengan sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,07 pada Tahun 2013 hingga Tahun 2018 hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 0,13%, hal ini merupakan indikator bahwa program Lumbung energi belum sampai pada tahapan hilirisasi produk tambang menjadi energi. Tumbuhnya sektor Pertambangan dan penggalian tidak diiringi dengan tumbuhnya sektor listrik dan gas, yang menjadi indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan energi rumahtangga dan juga industri.

PDRB atas dasar harga berlaku di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 adalah sebesar 280,35 triliun rupiah dan mengalami kenaikan di tahun 2018 menjadi sebesar 419,72 triliun rupiah. Masing-masing sektor ekonomi berperan penting dalam pembentukan PDRB Sumatera Selatan dimana semakin besar sumbangan masing-masing sektor maka nilai PDRB Sumatera Selatan juga akan semakin besar.

**Tabel 2.21.**
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2018
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK)

| Lapangan Usaha | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan | 18,60 | 17,76 | 17,13 | 16,70 | 15,80 | 14,80 |
| B. | Pertambangan dan Penggalian | 24,98 | 23,93 | 21,81 | 19,71 | 19,24 | 20,24 |
| C. | Industri Pengolahan | 17,15 | 17,35 | 18,36 | 18,94 | 19,56 | 19,52 |
| D. | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
| E. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| F. | Konstruksi | 12,68 | 13,40 | 12,58 | 13,10 | 13,24 | 12,98 |
| G. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 8,99 | 9,07 | 10,58 | 11,68 | 12,43 | 12,94 |
| H. | Transportasi dan Pergudangan | 1,77 | 1,86 | 2,08 | 2,21 | 2,31 | 2,37 |
| I. | Penyediaan Akomodasi Makan Minum | 1,18 | 1,26 | 1,41 | 1,56 | 1,64 | 1,76 |
| J. | Informasi dan Komunikasi | 2,39 | 2,42 | 2,50 | 2,66 | 2,78 | 2,85 |
| K. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,59 | 2,56 | 2,56 | 2,66 | 2,63 | 2,54 |
| L. | Real Estate | 2,41 | 2,60 | 2,81 | 2,99 | 3,03 | 3,07 |
| M,N. | Jasa Perusahaan | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| O. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,23 | 3,54 | 3,78 | 3,46 | 3,16 | 2,85 |
| P. | Jasa Pendidikan | 2,45 | 2,64 | 2,70 | 2,62 | 2,47 | 2,36 |
| Q. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,58 | 0,59 | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,59 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 74,00 | 0,74 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,76 |
| **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO** | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Masing-masing sektor memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap pembentukan PDRB Sumatera Selatan. 5 (lima) sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi tertinggi dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sumatera Selatan antara lain: (1) Pertambangan dan Penggalian sebesar 20,24 persen, (2) Industri Pengolahan sebesar19,52 persen, (3) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan sebesar 14,80 persen, (4) Konstruksi sebesar 12,98 persen dan (5) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,94 persen.

Secara keseluruhan masing-masing sektor memiliki nilai kontribusi yang cenderung menurun dari tahun ke tahun pada periode 2013-2017, diantaranya adalah sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan pada tahun 2013 sebesar 18,60 persen menjadi 14,80 persen tahun 2018, sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2013 sebesar 24,98 persen menjadi 20,24 persen tahun 2018.

Namun terdapat beberapa sektor yang memiliki nilai kontribusi yang meningkat dari tahun ke tahun diantaranya adalah sektor pengadaan listrik dan gas pada tahun 2013 sebesar 0,07 persen menjadi 0,13 tahun 2018, Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah pada tahun 2013 sebesar 0,09 persen menjadi 0,12 persen tahun 2018, Konstruksi pada tahun 2013 sebesar 12,68 persen menjadi 12,98 persen tahun 2018 dan masih banyak sektor lainnya yang mengalami peningkatan seperti yang tergambar pada table 2.17, namun peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan.

**Tabel 2.22.**
Pertumbuhan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2014-2018

| Lapangan Usaha | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan | -4,52 | -3,55 | -2,51 | -5,39 | -6,33 |
| B. | Pertambangan dan Penggalian | -4,20 | -8,86 | -9,63 | -2,38 | 5,20 |
| C. | Industri Pengolahan | 1,17 | 5,82 | 3,16 | 3,27 | -0,20 |
| D. | Pengadaan Listrik dan Gas | 14,29 | 12,50 | 33,33 | 8,33 | 0,00 |
| E. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah | 11,11 | 10,00 | 0,00 | 9,09 | 0,00 |
| F. | Konstruksi | 5,68 | -6,12 | 4,13 | 1,07 | -1,96 |
| G. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 0,89 | 16,65 | 10,40 | 6,42 | 4,10 |
| H. | Transportasi dan Pergudangan | 5,08 | 11,83 | 6,25 | 4,52 | 2,60 |
| I. | Penyediaan Akomodasi Makan Minum | 6,78 | 11,90 | 10,64 | 5,13 | 7,32 |
| J. | Informasi dan Komunikasi | 1,26 | 3,31 | 6,40 | 4,51 | 2,52 |
| K. | Jasa Keuangan dan Asuransi | -1,16 | 0,00 | 3,91 | -1,13 | -3,42 |
| L. | Real Estate | 7,88 | 8,08 | 6,41 | 1,34 | 1,32 |
| M,N. | Jasa Perusahaan | 10,00 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 8,33 |
| O. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 9,60 | 6,78 | -8,47 | -8,67 | -9,81 |
| P. | Jasa Pendidikan | 7,76 | 2,27 | -2,96 | -5,73 | -4,45 |
| Q. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,72 | 5,08 | -1,61 | 1,64 | -4,84 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | -99,00 | 2,70 | -2,63 | -1,35 | 4,11 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Sumsel diolah BAPPEDA Prov. Sumsel 2018*

Pertumbuhan kontribusi dari masing-masing sektor ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan berbeda-beda dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Perbedaan kontribusi tersebut disebabkan karena perbedaan pendapatan dari masing-masing lapangan usaha pembentuk PDRB tersebut. Pertumbuhan kontribusi masing-masing sektoral dapat dilihat pada tabel diatas. Pada tahun 2018 pertumbuhan kontribusi terbesar terdapat pada sektor Jasa Perusahaan yaitu sebesar 8,33 persen disusul oleh sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum yaitu sebesar 7,32 persen selanjutnya sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 5,20 persen.

**Tabel 2.23.**
Perkembangan PDRB Kabupaten dan Kota Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Provinsi Sumatera Selatan

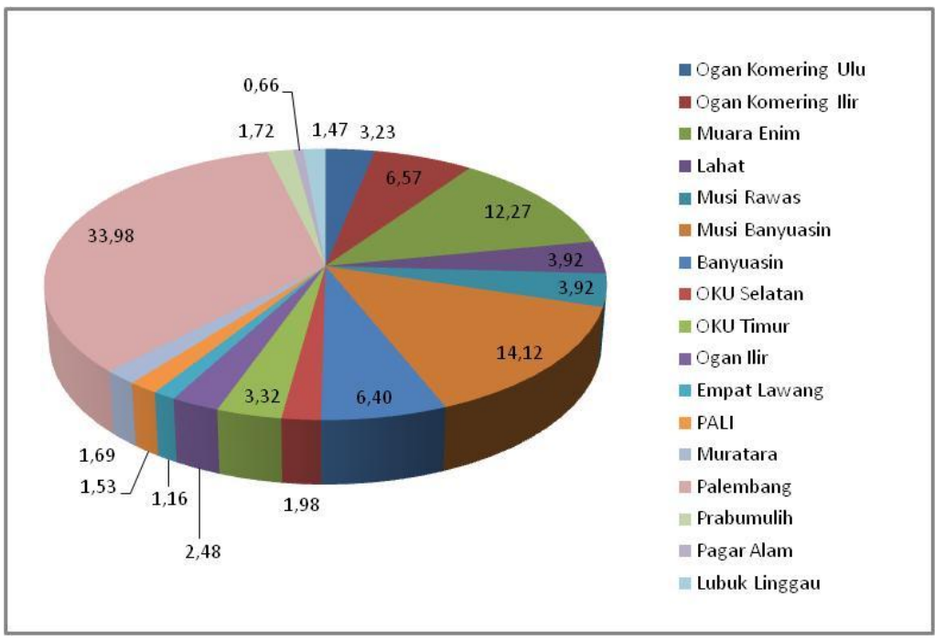
| Kabupaten/Kota | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ADHB | ADHK | ADHB | ADHK | ADHB | ADHK | ADHB | ADHK | ADHB | ADHK | ADHB | ADHK | ADHB | ADHK |
| Ogan Komering Ulu | 8,54 | 7,38 | 9,25 | 7,70 | 9,99 | 7,99 | 10,64 | 8,23 | 11,53 | 8,56 | 12,39 | 8,89 | na | na |
| Ogan Komering Ilir | 16,05 | 14,23 | 18,15 | 15,14 | 20,14 | 15,90 | 21,81 | 16,67 | 23,43 | 17,45 | 25,20 | 18,30 | na | na |
| Muara Enim | 31,60 | 26,37 | 35,26 | 28,16 | 37,45 | 29,04 | 40,99 | 31,25 | 42,40 | 32,89 | 47,11 | 35,76 | na | na |
| Lahat | 11,37 | 9,48 | 12,40 | 9,94 | 13,23 | 10,32 | 13,82 | 10,54 | 14,46 | 10,83 | 15,05 | 11,26 | na | na |
| Musi Rawas | 10,99 | 9,25 | 11,97 | 9,79 | 13,38 | 10,51 | 14,10 | 11,05 | 14,91 | 11,65 | 15,93 | 12,25 | na | na |
| Musi Banyuasin | 44,52 | 35,29 | 47,64 | 36,68 | 52,18 | 38,40 | 53,91 | 39,27 | 54,93 | 40,23 | 58,18 | 41,44 | na | na |
| Banyuasin | 15,64 | 13,78 | 17,52 | 14,63 | 19,13 | 15,38 | 20,79 | 16,24 | 22,83 | 17,19 | 24,56 | 18,06 | na | na |
| Ogan Komering Ulu Selatan | 4,67 | 4,06 | 5,22 | 4,27 | 5,81 | 4,50 | 6,37 | 4,71 | 7,04 | 4,95 | 7,60 | 5,17 | na | na |
| Ogan Komering Ulu Timur | 7,84 | 6,95 | 8,78 | 7,44 | 9,74 | 7,82 | 11,00 | 8,35 | 12,15 | 8,81 | 12,74 | 9,04 | na | na |
| Ogan Ilir | 5,79 | 5,12 | 6,56 | 5,49 | 7,34 | 5,85 | 8,17 | 6,12 | 8,86 | 6,43 | 9,51 | 6,76 | na | na |
| Empat Lawang | 2,90 | 2,58 | 3,17 | 2,72 | 3,47 | 2,84 | 3,82 | 2,96 | 4,18 | 3,10 | 4,44 | 3,21 | na | na |
| Pali | 4,00 | 3,35 | 4,51 | 3,58 | 4,75 | 3,58 | 5,09 | 3,74 | 5,41 | 3,93 | 5,88 | 4,17 | na | na |
| Musi Rawas Utara | 4,82 | 4,10 | 5,03 | 4,19 | 5,78 | 4,61 | 5,93 | 4,76 | 6,07 | 4,93 | 6,41 | 5,13 | na | na |
| Palembang | 75,27 | 70,09 | 85,19 | 74,19 | 95,13 | 78,08 | 108,48 | 82,33 | 118,72 | 87,09 | 130,42 | 92,45 | na | na |
| Prabumulih | 3,95 | 3,50 | 4,30 | 3,67 | 5,07 | 4,10 | 5,58 | 4,30 | 6,11 | 4,59 | 6,59 | 4,83 | na | na |
| Pagar Alam | 1,81 | 1,64 | 1,98 | 1,74 | 2,13 | 1,81 | 2,28 | 1,89 | 2,41 | 1,97 | 2,55 | 2,07 | na | na |
| Lubuk Linggau | 3,32 | 2,94 | 3,74 | 3,04 | 4,19 | 3,24 | 4,69 | 3,44 | 5,15 | 3,65 | 5,63 | 3,88 | na | na |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2018*

Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2017 daerah yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Sumatera Selatan adalah Kota Palembang yaitu sebesar 33,98 persen. Besarnya kontribusi yang diberikan oleh Kota Palembang dipengaruhi oleh banyaknya aktivitas ekonomi di kota itu sendiri sehingga nilai PDRB dari masing-masing lapangan usaha juga semakin besar. Kabupaten Musi Banyuasin menjadi daerah dengan penyumbang terbesar kedua dengan persentase kontribusi adalah 14,12 persen terhadap pembentukan PDRB Sumatera Selatan.

Sedangkan daerah yang memberikan kontribusi terkecil adalah Kota Pagar Alam dan Kabupaten Empat Lawang dengan nilai kontribusi masing-masing 0,66 persen dan 1,16 persen terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Selatan.

**Gambar 2.22.**
Kontribusi PDRB Kabupaten dan Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017



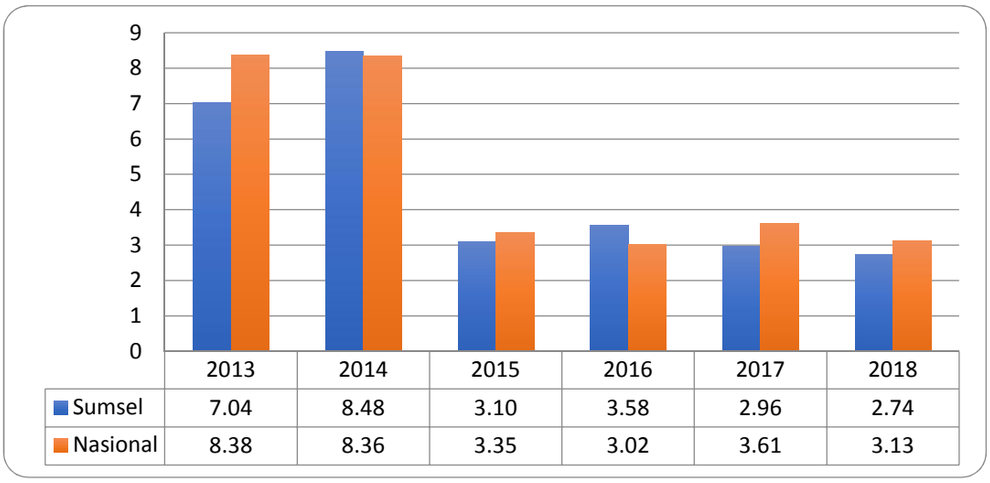

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2018*

### 2.2.1.2. Laju Inflasi

Perhitungan inflasi Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari perkembangan dua kota yaitu Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau. Komoditas yang mengalami inflasi terbesar pada tahun 2018 di Kota Palembang antara lain: angkutan udara, daging ayam ras, angkutan antar kota, telur ayam ras dan cabe merah. Sedangkan komoditas yang mengalami inflasi terbesar di Kota Lubuk Linggau antara lain: daging ayam ras, cabe merah, dan telur ayam ras. Membaiknya perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya permintaan atas faktor produksi dan membaiknya harga komoditas mampu membuat

angka inflasi terkendali. Perkembangan laju inflasi Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

**Gambar 2.23.**
Inflasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018




Pada tahun 2013 inflasi Provinsi Sumatera Selatan sebesar 7,04 persen dan meningkat menjadi 8,48 persen di tahun 2014. Besarnya nilai inflasi di tahun 2014 dipicu karena pasca kenaikan harga BBM bersubsidi dari pemerintah pada pertengahan tahun 2014. Namun inflasi mengalami penurunan di tahun 2015 dan 2016 menjadi masing-masing 3,10 dan 3,58. Nilai inflasi terkecil terjadi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yaitu masing-masing sebesar 2,96 persen dan 2,74 persen.

**Tabel 2.24.**
Inflasi Spasial di Sumatera Selatan (2016-2018)

| | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Sumsel | 5,05 | 4,37 | 4,38 | 3,58 | 3,71 | 4,31 | 3,00 | 2.96 | 3,35 | 2,93 | 2,60 | 2,74 |
| Palembang | 4,89 | 4,37 | 4,54 | 3,68 | 3,77 | 4,27 | 2,96 | 2,85 | 3,27 | 2,94 | 2,52 | 2,78 |
| Lubuk Linggau | 6,47 | 4,30 | 2,93 | 2,74 | 3,18 | 4,68 | 3,32 | 3,94 | 4,03 | 2,80 | 3,30 | 2,42 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2018*

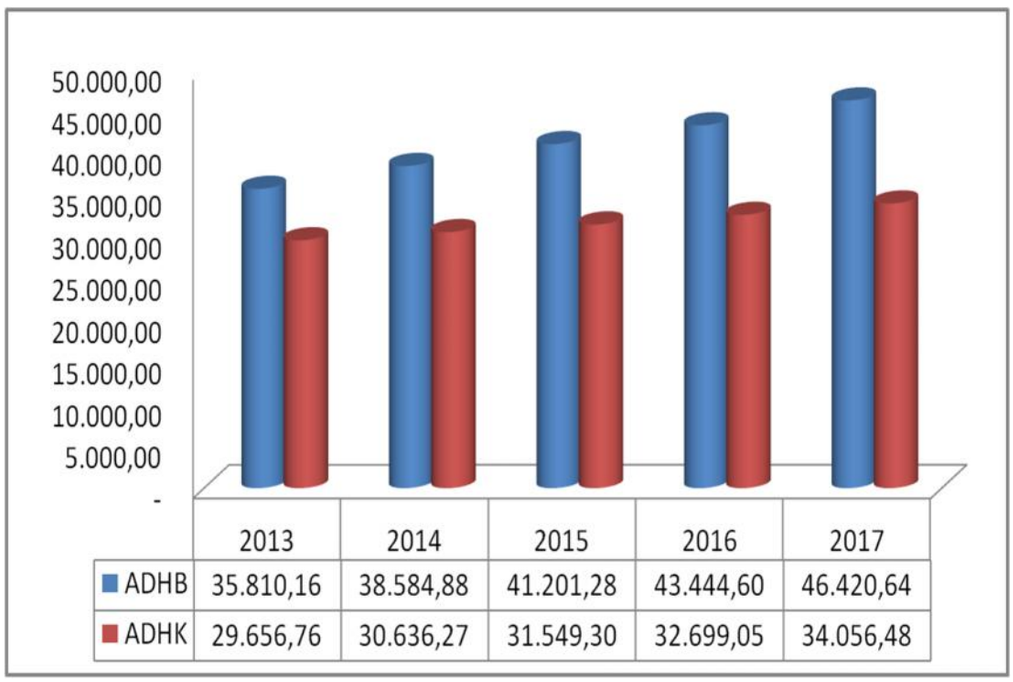
Inflasi Sumsel dari tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami penurunan dari sebesar 7,04 persen menjadi 3,10 persen, namun pada tahun 2016 sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,58 persen dan kembali turun pada tahun 2017 menjadi sebesar 2,96 persen dan pada tahun 2018 kembali turun menjadi 2,74 persen. Inflasi Sumatera Selatan selalu berada di bawah inflasi nasional.

### 2.2.1.3. PDRB Per Kapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil

pembagian pendapatan nasional suatu wilayah dengan jumlah penduduk dari wilayah tersebut.

**Gambar 2.24.**
Perkembangan PDRB Perkapita di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2017




| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADHB | 35.810,16 | 38.584,88 | 41.201,28 | 43.444,60 | 46.420,64 |
| ADHK | 29.656,76 | 30.636,27 | 31.549,30 | 32.699,05 | 34.056,48 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2018*

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa pendapatan per kapita penduduk di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun pada periode 2013-2017. Pada tahun 2013 PDRB per kapita ADHB di Sumatera Selatan sebesar 35,81 juta rupiah per tahun dan mengalami peningkatan menjadi 46,42 juta rupiah di tahun 2017. Begitu juga dengan PDRB per kapita ADHK di Sumatera Selatan pada periode 2013-2017 juga terus mengalami peningkatan dari sebesar 29,65 juta rupiah pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 34,05 juta rupiah pada tahun 2017. Peningkatan pendapatan per kapita mengindikasikan membaiknya perekonomian masyarakat sehingga pendapatan masyarakat pun ikut meningkat.

### 2.2.1.4. Indeks Gini

Indeks gini atau yang lebih dikenal dengan gini rasio adalah salah satu alat analisis untuk menghitung tingat ketimpangan atau kesenjangan pendapatan antar wilayah yang dihitung berdasarkan tingkat pengeluaran penduduk. Nilai indeks gini berkisar antara 0 dan 1 dimana nilai indeks yang semakin menekati 0 mengindikasikan ketimpangan yang semakin merata sedangkan nilai indeks gini yang semakin menekati 1 artinya ketimpangan antar penuduk semakin tinggi.

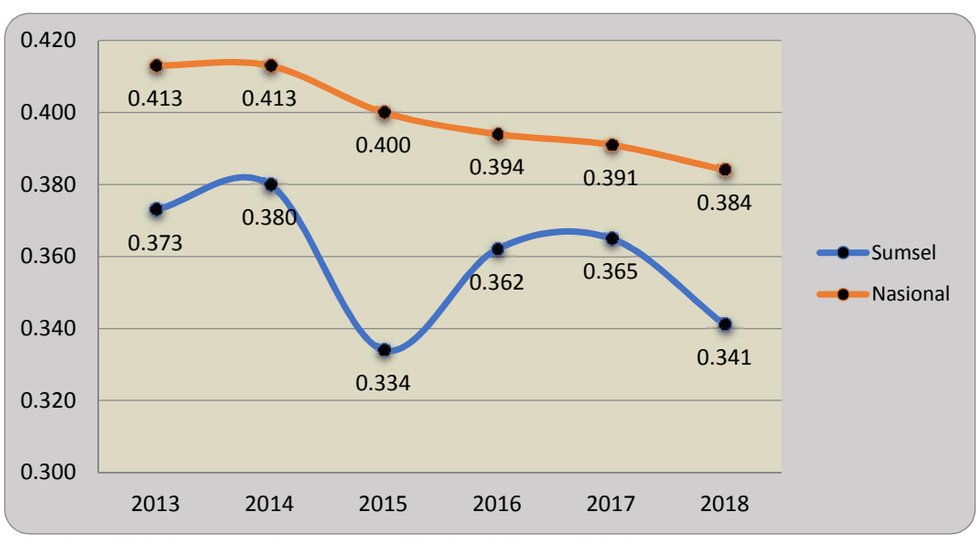
**Tabel 2.25.**
Nilai Gini Ratio Provinsi Sumatera Selatan

| Tahun | Gini Ratio | |
|---|---|---|
| | Sumsel | Nasional |
| 2013 | 0,373 | 0,413 |
| 2014 | 0,380 | 0,413 |
| 2015 | 0,334 | 0,400 |
| 2016 | 0,362 | 0,381 |
| 2017 | 0,381 | 0,391 |
| 2018 | 0,341 | 0,384 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2019*

Salah satu upaya pemerataan ekonomi di Sumatera Selatan adalah menekan tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah. Jika dilihat dari Tahun 2013 hingga Tahun 2017 maka tingkat kesenjangan atau ketimpangan semakin menurun. Provinsi Sumatera Selatan terlihat berhasil menekan angka kesenjangan ekonomi hingga mencapai 0,341 persen di Tahun 2018. Penurunan kesenjangan ekonomi yang paling rendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 0,334 persen namun mengalami peningkatan kembali di tahun 2016 yaitu 0,362 persen dan 2017 0,381 persen. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional, maka nilai Gini Ratio Provinsi Sumatera Selatan masih berada di bawah Nasional yang relatif lebih tinggi.

**Gambar 2.25.**
Gini Ratio Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018




*Sumber: BPS Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2019*

Adapun faktor yang turut mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar penduduk di Sumatera Selatan adalah distribusi pengeluaran penduduk kaya di perkotaan yang semakin meningkat dibandingkan dengan distribusi pengeluaran penduduk miskin yang semakin jauh tertinggal. Perbedaan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan menjadi faktor penyebab

ketimpangan pendapatan antar penduduk yang berakibat pada ketimpangan pengeluaran. Terpusatnya kegiatan perekonomian atau sentralisasi di perkotaan menyebabkan penduduk di perkotaan lebih maju dengan pekerjaan dan pendapatan yang beragam. Sedangkan penduduk di pedesaan yang relatif bekerja sebagai petani menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian dan perkebunan. Selain itu faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan pengeluaran ini adalah pengaruh dari krisis global dan fluktuatifnya harga komoditi terutama karet dan sawit.

Jika dilihat per Kabupaten/Kota maka Kabupaten/Kota yang memiliki Gini Ratio di atas Gini Ratio Provinsi pada tahun 2017 adalah Kota Prabumulih dan Kabupaten OKU Selatan.

### 2.2.1.5. Kemiskinan

Proporsi penduduk miskin di Sumatera Selatan masih tergolong tinggi, tingkat persentase kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan masih diatas persentase kemiskinan nasional. Persentase kemiskinan di Sumatera Selatan berfluktuasi dari Tahun 2013 hingga Tahun 2018. Proporsi penduduk miskin mengalami peningkatan di tahun 2015 menjadi 14,25%, dan terus menurun pada tahun 2016 sampai 2018.

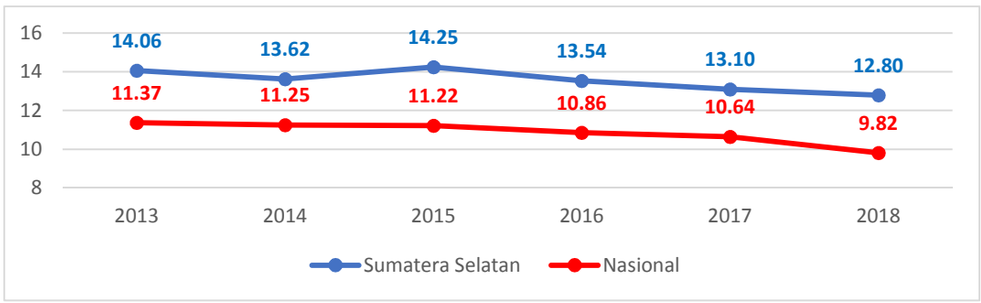
**Tabel 2.26.**
Persentase Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2018

| Tahun | Kemiskinan (%) | |
|---|---|---|
| | Sumsel | Nasional |
| 2013 | 14,06 | 11,37 |
| 2014 | 13,62 | 11,25 |
| 2015 | 14,25 | 11,22 |
| 2016 | 13,54 | 10,86 |
| 2017 | 13,10 | 10,64 |
| 2018 | 12,80 | 9,82 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2018*

Tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan selalu lebih tinggi dari angka nasional. Hal ini menunjukkan belum optimalnya upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Pada Tahun 2016 persentase kemiskinan Sumatera Selatan mulai menunjukkan penurunan yang positif dari 14,25% di tahun 2015 menjadi 12,80% di tahun 2018. Hal ini dikarenakan dampak dari upaya penurunan kemiskinan yang di lakukan Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya melalui Program Gertak Sejuta Mandiri.

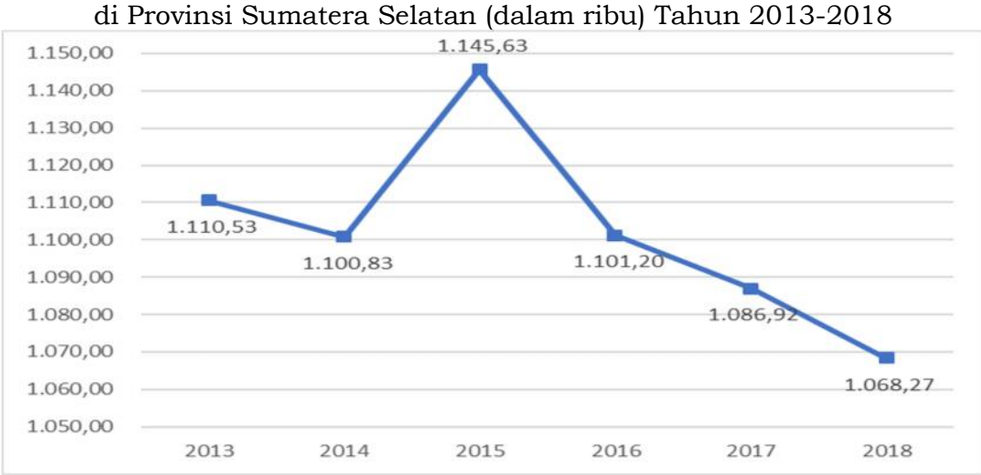
**Gambar 2.26.**
Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2018




*Sumber: Buku Saku dan Indikator Kesejahteraan Sumatera Selatan 2013-2018*

Apabila dilihat dari jumlah penduduk miskin maka secara umum jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun, tetapi mengalami penurunan dari tahun 2015 ke Tahun 2018. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 terjadi lonjakan jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan, akibat banyaknya pengurangan tenaga kerja dan meningkatnya pengangguran, serta turunnya harga komoditi karet dan sawit.

**Gambar 2.27.**
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
di Provinsi Sumatera Selatan (dalam ribu) Tahun 2013-2018




*Sumber: Buku Saku dan Indikator Kesejahteraan Sumatera Selatan 2013-2018*

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 di Provinsi Sumatera Selatan adalah 1.110.530 jiwa dengan persentase sebesar 14,06 persen. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 1.100.830 jiwa dengan persentase yang ikut menurun sebesar 13,62 persen. Pada tahun 2015 penduduk miskin meningkat menjadi 1.145.630 jiwa dengan persentase 14,25 persen. Namun di tahun 2016 dan 2017, sampai 2018 penduduk miskin terus menurun menjadi 1.068.270 jiwa dengan persentase sebesar 12,80 persen.

Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2018, maka kabupaten/kota yang paling banyak penduduk miskinnya adalah kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin,

Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin. Penduduk miskin terkonsentrasi paling banyak di kota Palembang, hal ini dikarenakan tingginya tingkat kepadatan penduduk di kota Palembang.

**Tabel 2.27.**
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018 (Maret)

| Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Miskin (000) | Persentase Penduduk Miskin | P1 | P2 | Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogan Komering Ulu | 45,71 | 12,61 | 2,56 | 0,75 | 415.785 |
| Ogan Komering Ilir | 124,86 | 15,28 | 3,05 | 0,78 | 333.505 |
| Muara Enim | 78,58 | 12,56 | 1,91 | 0,44 | 353.012 |
| Lahat | 65,31 | 16,15 | 2,85 | 0,73 | 419.658 |
| Musi Rawas | 54.75 | 13,76 | 2,25 | 0,62 | 427.595 |
| Musi Banyuasin | 105,15 | 16,52 | 3,41 | 1,02 | 466.822 |
| Banyu Asin | 95,29 | 11,32 | 2,21 | 0,62 | 381.437 |
| Ogan Komering Ulu Selatan | 37,87 | 10,64 | 1,20 | 0,22 | 310.717 |
| Ogan Komering Ulu Timur | 70,65 | 10,57 | 1,60 | 0,37 | 312.340 |
| Ogan Ilir | 55,87 | 13,19 | 2,20 | 0,51 | 416.098 |
| Empat Lawang | 30,20 | 12,25 | 1,73 | 0,39 | 306.546 |
| Penukal Abab Lematang Ilir | 25,78 | 13,81 | 2,24 | 0,61 | 377.160 |
| Musi Rawas Utara | 36,19 | 19,12 | 4,64 | 1,59 | 456.844 |
| Kota Palembang | 179,32 | 10,95 | 1,70 | 0,39 | 510.994 |
| Kota Prabumulih | 20,95 | 11,39 | 1,69 | 0,37 | 530.748 |
| Kota Pagar Alam | 12,07 | 8,77 | 1,03 | 0,20 | 324.025 |
| Kota Lubuklinggau | 29,74 | 13,02 | 2,05 | 0,57 | 470.897 |
| **Sumatera Selatan** | **1.068,27** | **12,80** | **2,33** | **0,60** | **397.150** |

*Sumber: Buku Saku dan Indikator Kesejahteraan Sumatera Selatan 2018*

Jika dilihat dari sebaran penduduk miskinnya, maka kabupaten/kota yang paling banyak penduduk miskinnya bahkan diatas persentase provinsi adalah Kabupaten Muratara, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi banyuasin dan kabupaten Ogan Komering Iir (OKI). Selanjutnya kabupaten/kota yang juga memerlukan perhatian dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Pali, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan Ilir dan kabupaten Muara Enim.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 sebanyak 1.068.270 jiwa. Jumlah penduduk miskin terbanyak adalah kota Palembang dan paling sedikit adalah kota Pagar Alam, hal ini menunjukkan bahwa semakin padat jumlah penduduk maka semakin banyak jumlah penduduk miskin yang berada di daerah tersebut.

Jika dilihat secara umum maka tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan cukup tinggi, dan kondisi kedalaman kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) juga tinggi. *Poverty Gap* atau kedalaman kemiskinan yang tinggi ada di Kabupaten Muratara sebesar 4,64, Musi Banyuasin sebesar 3,41 dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebesar 3,05. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap

garis kemiskinan di tiga Kabupaten tersebut semakin jauh dari rata-rata garis kemiskinan

Sedangkan untuk *Poverty Severity* atau indeks Keparahan kemiskinan (P2) yang terbesar berada di Kabupaten Muratara sebesar 1,59 dan di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 1,02. Hal ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin di kedua daerah tersebut tertinggi di Sumatera Selatan. Akan tetapi secara umum keparahan kemiskinan di Sumatera Selatan tidak terlalu tinggi karena nilai rata-rata indeks masih dibawah satu.

**Tabel 2.28.**
Jumlah dan Persentase Kemiskinan Menurut Kabupaten dan Kota Tahun 2013-2018

| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah dan Persentase Kemiskinan Menurut Kabupaten dan Kota | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
| | | Jumlah (Ribu) | Persen | Jumlah (Ribu) | Persen | Jumlah (Ribu) | Persen | Jumlah (Ribu) | Persen | Jumlah (Ribu) | Persen | Jumlah (Ribu) | Persen |
| 1 | Ogan Komering Ulu | 42,00 | 12,31 | 41,41 | 11,96 | 46,04 | 13,22 | 46,97 | 13,29 | 46.34 | 12.95 | 45,71 | 12,61 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 121,42 | 15,82 | 119,21 | 15,30 | 134,07 | 17,08 | 127,54 | 16,03 | 127.06 | 15.75 | 124,86 | 15,28 |
| 3 | Muara Enim | 108,20 | 14,26 | 106,05 | 13,76 | 86,95 | 14,54 | 82,35 | 13,56 | 81.30 | 13.19 | 78,58 | 12,56 |
| 4 | Lahat | 71,78 | 18,61 | 70,31 | 18,02 | 70,67 | 18,02 | 67,83 | 17,11 | 67.33 | 16.81 | 65,31 | 16,15 |
| 5 | Musi Rawas | 98,79 | 17,85 | 97,01 | 17,28 | 58,01 | 15,13 | 55,50 | 14,30 | 55.96 | 14.24 | 54.75 | 13,76 |
| 6 | Musi Banyuasin | 107,17 | 18,02 | 105,08 | 17,38 | 111,90 | 18,35 | 106,78 | 17,27 | 105.08 | 16.75 | 105,15 | 16,52 |
| 7 | Banyuasin | 97,14 | 12,28 | 95,38 | 11,88 | 100,64 | 12,54 | 95,99 | 11,72 | 95.28 | 11.47 | 95,29 | 11,32 |
| 8 | Oku Selatan | 38,88 | 11,57 | 38,18 | 11,21 | 40,63 | 11,58 | 38,42 | 10,95 | 38.63 | 10.98 | 37,87 | 10,64 |
| 9 | Oku Timur | 65,41 | 10,28 | 65,26 | 10,13 | 72,84 | 11,24 | 73,93 | 11,29 | 72.81 | 11.00 | 70,65 | 10,57 |
| 10 | Ogan Ilir | 55,40 | 13,86 | 54,21 | 13,38 | 58,96 | 14,43 | 57,01 | 13,80 | 56.85 | 13.58 | 55,87 | 13,19 |
| 11 | Empat Lawang | 30,47 | 13,10 | 30,38 | 12,89 | 31,62 | 13,33 | 30,17 | 12,54 | 30.29 | 12.44 | 30,20 | 12,25 |
| 12 | PALI | na | na | na | na | 26,81 | 14,88 | 25,89 | 14,26 | 26.75 | 14.53 | 25,78 | 13,81 |
| 13 | Mura Utara | na | na | na | na | 35,92 | 19,73 | 36,95 | 20,00 | 36.46 | 19.49 | 36,19 | 19,12 |
| 14 | Palembang | 205,99 | 13,36 | 202,31 | 12,93 | 2013,12 | 12,85 | 191,95 | 12,04 | 184.41 | 11.40 | 179,32 | 10,95 |
| 15 | Prabumulih | 19,36 | 11,23 | 19,02 | 10,86 | 21,37 | 12,12 | 20,47 | 11,44 | 20.72 | 11.42 | 20,95 | 11,39 |
| 16 | Pagar Alam | 11,84 | 9,00 | 11,83 | 8,90 | 12,87 | 9,64 | 12,40 | 9,19 | 12.12 | 8.89 | 12,07 | 8,77 |
| 17 | Lubuk Linggau | 30,73 | 14,37 | 30,18 | 13,90 | 33,21 | 15,16 | 31,05 | 12,99 | 29.54 | 13.12 | 29,74 | 13,02 |
| Sumatera Selatan | | | 1.104,57 | 13,62 | 1.085,8 | 1.145,63 | 14,25 | 1.101,20 | 13,54 | 1.086,92 | 13,19 | 1.068,27 | 12,80 |

*Sumber: Buku Saku dan Indikator Kesejahteraan Sumatera Selatan 2013-2018*

### 2.2.1.6 Angka Kriminalitas Yang Ditangani

Angka Kriminalitas berkaitan dengan jumlah tindak kejahatan yang terdiri dari penganiayaan, pencurian/perampokan, pembunuhan, penipuan, kesusilaan dan pelanggaran lainnya. Secara umum angka kriminalitas di Provinsi Sumatera Selatan yang dilaporkan dan ditangani kepolisian mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2017.

**Tabel 2.29.**
Banyaknya Kasus Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Ditangani Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2017

| Kabupaten dan Kota | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| OKU | 818 | 122 | 926 | 98 | 831 | 226 | 772 | 435 | 665 | 333 |
| OKI | 778 | 102 | 1.153 | 290 | 1.346 | 242 | 1.397 | 607 | 983 | 659 |
| Muara Enim | 1.501 | 952 | 1.645 | 962 | 1.062 | 653 | 894 | 595 | 806 | 588 |
| Lahat | 1.558 | 213 | 1.558 | 171 | 1.082 | 547 | 835 | 541 | 619 | 483 |
| Musi Rawas | 879 | 361 | 1.359 | 695 | 939 | 581 | 806 | 734 | 877 | 824 |
| Musi Banyuasin | 1.620 | 573 | 1.336 | 557 | 1.283 | 623 | 1.377 | 654 | 1.075 | 763 |
| Banyuasin | 1.105 | 449 | 1.071 | 503 | 1.090 | 547 | 990 | 509 | 881 | 537 |
| OKU Selatan | 218 | 371 | 216 | 410 | 257 | 663 | 285 | 104 | 242 | 164 |
| OKU Timur | 552 | 109 | 556 | 129 | 459 | 141 | 502 | 279 | 416 | 283 |
| Ogan ilir | 894 | 270 | 946 | 271 | 779 | 241 | 643 | 207 | 297 | 223 |
| Empat Lawang | na | na | 339 | 14 | 377 | 121 | 284 | 103 | 196 | 143 |
| PALI | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Muratara | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Palembang | 8.707 | 4.240 | 8.491 | 4.135 | 7.404 | 4.316 | 6.557 | 4.012 | 6.077 | 4.072 |
| Prabumulih | 996 | 241 | 739 | 78 | 925 | 268 | 762 | 428 | 637 | 401 |
| Pagar Alam | 405 | 80 | 416 | 82 | 413 | 171 | 412 | 199 | 296 | 210 |
| Lubuk Linggau | 1.649 | 607 | 1.698 | 470 | 1.325 | 246 | 1.329 | 696 | 994 | 497 |
| **Sumatera Selatan** | **27.680** | **8.690** | **22.449** | **8.865** | **19.572** | **9.586** | **17.845** | **10.103** | **15.061** | **10.180** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*
*Keterangan. : A (Dilaporkan); B (Ditangani)*

Jumlah kasus kriminal yang dilaporkan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 adalah sebanyak 27.680 kasus dan jumlah kasus yang ditangani sebanyak 8.690 kasus. Pada tahun 2017 jumlah kasus yang dilaporkan menurun menjadi 15.061 kasus dengan jumlah kasus yang sudah ditangani sebanyak 10.180 kasus. Secara umum, dalam kurun tahun 2013 hingga 2017 jumlah tindak kejahatan mengalami penurunan sebesar 12.619 kasus atau 54% serta terjadi peningkatan persentase penanganan kasus dari 31% menjadi 68%.

Menurut kabupaten dan kota, daerah yang mengalami tindak kejahatan (kriminal) terbanyak adalah Kota Palembang dengan jumlah kasus pada tahun 2017 sebanyak 6.077 kasus dengan penyelesaian sebanyak 4.072 kasus. Hal ini disebabkan karena Kota Palembang merupakan pusat kota dari Provinsi Sumatera Selatan dengan kepadatan penduduk terbanyak sehingga tingkat kejahatan dan kriminalitas juga sangat tinggi. Daerah dengan jumlah kasus yang paling sedikit adalah Kabupaten OKU Selatan sebanyak 242 kasus yang dilaporkan dengan sebanyak 164 kasus yang telah diselesaikan.

### 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

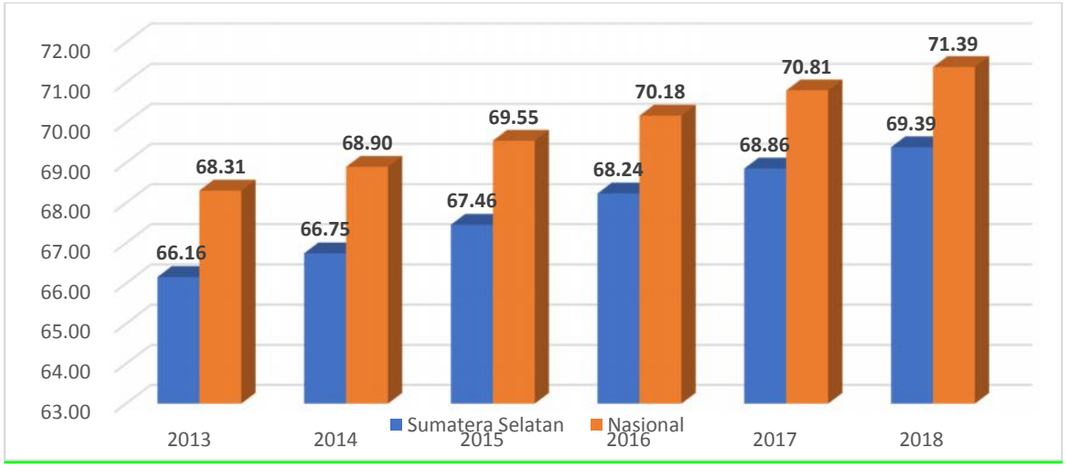
Fokus kesejahteraan masyarakat dikaji dari beberapa aspek yaitu pendidikan, kesehatan, pertanahan dan ketenagakerjaan. Aspek-aspek ini merupakan indikator dalam melakukan program program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### 2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia dengan menggunakan tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup yang diukur dengan angka harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan atau tingkat pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua pertiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga) serta suatu standar hidup yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP rupiah).

IPM di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2013 hingga Tahun 2017 terlihat mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 IPM Provinsi Sumatera Selatan adalah 66,16 dan meningkat menjadi 66,75 pada tahun 2014. Nilai IPM pada tahun 2016 sebesar 68,24 juga meningkat menjadi 68,86 di tahun 2017 dan meningkat kembali pada Tahun 2018 menjadi 69,39. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

**Gambar 2.28.**
Perkembangan IPM
Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2013-2018




*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

Nilai IPM Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2013-2018 selalu lebih rendah dibandingkan dengan nilai IPM nasional. Pada tahun 2013 nilai IPM Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 66,16 sedangkan IPM Nasional pada tahun 2013 adalah 68,31. Pada tahun 2018 nilai IPM Sumatera Selatan adalah sebesar 69,39 sedangkan IPM Nasional sebesar 71,39 dan nilai IPM nasional lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai IPM Sumatera Selatan. Hal ini

menunjukkan peningkatan IPM yang semakin membaik dari tahun ke tahun yang juga menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan.

**Tabel 2.30.**
IPM Sumatera Selatan Menurut Komponen Tahun 2013-2018

| Komponen | Satuan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) | Tahun | 68,84 | 68,93 | 69,14 | 69,16 | 69,18 | 69,41 |
| Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 11,46 | 11,75 | 12,02 | 12,23 | 12,35 | 12,36 |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 7,53 | 7,66 | 7,77 | 7,83 | 7,99 | 8,00 |
| Pengeluaran per Kapita | Rp.000 | 9.230 | 9.302 | 9.474 | 9.935 | 10.220 | 10.652 |
| **IPM** | | **66,16** | **66,75** | **67,46** | **68,24** | **68,86** | **69.39** |
| **Pertumbuhan IPM** | **%** | **0,56** | **0,89** | **1,06** | **1,16** | **0,91** | **0,77** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

Nilai indeks pembangunan manusia (IPM) menurut kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 tertinggi terdapat di Kota Palembang sebesar 75,49 persen sedangkan IPM terkecil terdapat Kabuaten PALI sebesar 59,69 persen. Pada tahun 2018 angka IPM tertinggi terdapat di Kota Palembang sebesar 77,89 persen dan terkecil terdapat di Kabupaten PALI sebesar 63,49 persen. Peningkatan nilai IPM dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan kualitas dari sumber daya manusia semakin baik dari tahun ke tahun serta mengindikasikan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat dan membaik.

**Tabel 2.31.**
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| No. | Kabupaten/Kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering ulu | 66,51 | 66,21 | 67,18 | 67,47 | 68,28 | 69.01 |
| 2 | Ogan komering Ilir | 63,52 | 63,87 | 64,73 | 65,44 | 66,11 | 66.57 |
| 3 | Muara Enim | 64,34 | 65,02 | 65,82 | 66,71 | 67,63 | 68.28 |
| 4 | Lahat | 64,15 | 64,52 | 65,25 | 65,75 | 66,38 | 66.99 |
| 5 | Musi Rawas | 62,23 | 63,19 | 64,11 | 64,75 | 65,31 | 66.18 |
| 6 | Musi Banyuasin | 64,18 | 64,93 | 65,76 | 66,45 | 66,96 | 67.57 |
| 7 | Banyuasin | 62,42 | 63,21 | 64,15 | 65,01 | 65,85 | 66.4 |
| 8 | OKU Selatan | 61,58 | 61,94 | 62,57 | 63,42 | 63,96 | 64.84 |
| 9 | OKU Timur | 66,09 | 66,74 | 67,17 | 67,38 | 67,84 | 68.58 |
| 10 | Ogan Ilir | 63,64 | 64,49 | 65,35 | 65,45 | 65,63 | 66.43 |
| 11 | Empat Lawang | 62,74 | 63,17 | 63,55 | 64,00 | 64,21 | 64.81 |
| 12 | PALI | 59,69 | 59,89 | 60,83 | 61,66 | 62,58 | 63.49 |
| 13 | Muratara | 60,56 | 61,34 | 62,32 | 63,05 | 63,18 | 63.75 |
| 14 | Palembang | 75,49 | 76,02 | 76,29 | 76,59 | 77,22 | 77.89 |
| 15 | Prabumulih | 71,87 | 72,20 | 73,19 | 73,38 | 73,58 | 74.04 |
| 16 | Pagar Alam | 64,14 | 64,75 | 6537 | 65,96 | 66,81 | 67.62 |
| 17 | Lubuk Linggau | 72,55 | 72,84 | 73,17 | 73,37 | 73,67 | 74.09 |
| **Sumatera Selatan** | | **66,16** | **66,75** | **67,46** | **68,24** | **68,86** | **69.39** |
| **Nasional** | | **68,31** | **68,90** | **69,55** | **70,18** | **70,81** | **71,39** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

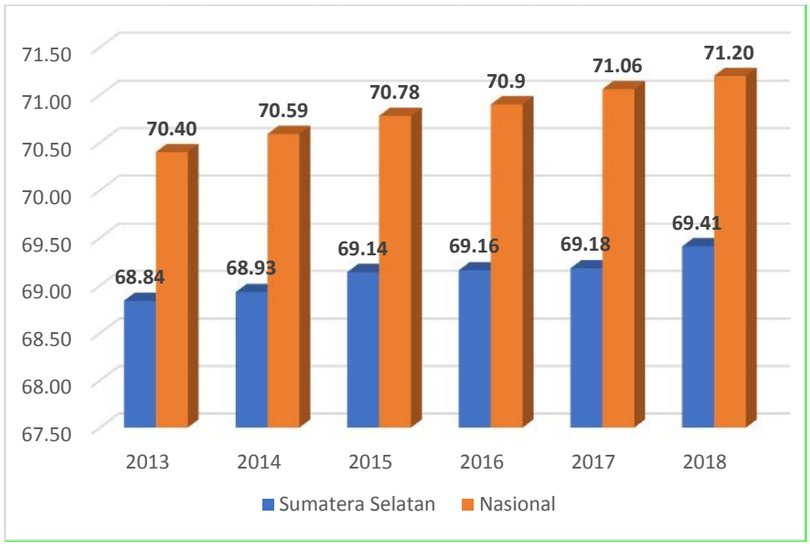
### 2.2.2.2. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Usia harapan hidup penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu.

Secara umum pada tahun 2018 angka usia harapan hidup di Provinsi Sumatera Selatan masih dibawah angka usia harapan hidup nasional yang mencapai usia 71,20 tahun. Provinsi Sumatera Selatan memliki angka usia harapan hidup yang masih rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat di Sumatera Selatan tidak lebih baik dari kondisi kesehatan masyarakat di daerah lainnya.

Angka Usia Harapan Hidup di Sumatera Selatan secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2013 yaitu 68,84 tahun menjadi 69,41 tahun di tahun 2018. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesehatan masyarakat di Sumatera Selatan sehingga terjadi kenaikan angka harapan hidup masyarakat di daerah ini.

**Gambar 2.29.**
Angka Harapan Hidup
Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2013-2018




*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

Pada tahun 2018 rata-rata kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki angka harapan hidup dibawah rata-rata Provinsi yakni 69,41 tahun. Adapun Kabupaten/kota yang yang memiliki angka harapan hidup berada di atas rata-rata angka harapan hidup provinsi adalah Kota Palembang dan Kota Prabumulih.

**Tabel 2.32.**
Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| No. | Kabupaten/kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 69,61 | 69,70 | 67,43 | 67,65 | 67,66 | 67.83 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 68,48 | 68,52 | 68,01 | 68,02 | 68,04 | 68.22 |
| 3 | Muara Enim | 68,03 | 68,11 | 68,00 | 68,07 | 68,14 | 68.38 |
| 4 | Lahat | 68,90 | 68,99 | 64,87 | 65,06 | 65,25 | 65.50 |
| 5 | Musi Rawas | 65,10 | 65,56 | 67,18 | 67,26 | 67,34 | 67.59 |
| 6 | Musi Banyuasin | 70,39 | 70,44 | 68,09 | 68,11 | 68,14 | 68.33 |
| 7 | Banyuasin | 67,77 | 67,84 | 68,31 | 68,33 | 68,36 | 68.55 |
| 8 | Oku Selatan | 69,51 | 69,59 | 66,08 | 66,16 | 66,24 | 66.49 |
| 9 | Oku Timur | 68,48 | 68,56 | 68,19 | 68,31 | 68,44 | 68.65 |
| 10 | Ogan Ilir | 66,86 | 66,90 | 64,58 | 64,65 | 64,72 | 64.96 |
| 11 | Empat Lawang | 65,78 | 65,78 | 64,18 | 64,25 | 64,32 | 64.56 |
| 12 | PALI | na | na | 67,65 | 67,68 | 67,70 | 67.88 |
| 13 | Muratara | na | na | 64,89 | 64,94 | 64,99 | 65.21 |
| 14 | Palembang | 71,60 | 71,67 | 70,00 | 70,05 | 70,10 | 70.32 |
| 15 | Prabumulih | 72,73 | 72,80 | 69,59 | 69,63 | 69,67 | 69.88 |
| 16 | Pagar Alam | 70,61 | 70,70 | 65,70 | 65,78 | 65,87 | 66.14 |
| 17 | Lubuk Linggau | 65,99 | 66,05 | 68,59 | 68,61 | 68,64 | 68.83 |
| **Sumsel** | | **68,67** | **68,84** | **69,14** | **69,16** | **69,18** | **69.41** |
| **Nasional** | | **70,20** | **70,40** | **70,78** | **70,90** | **71,06** | **71.20** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

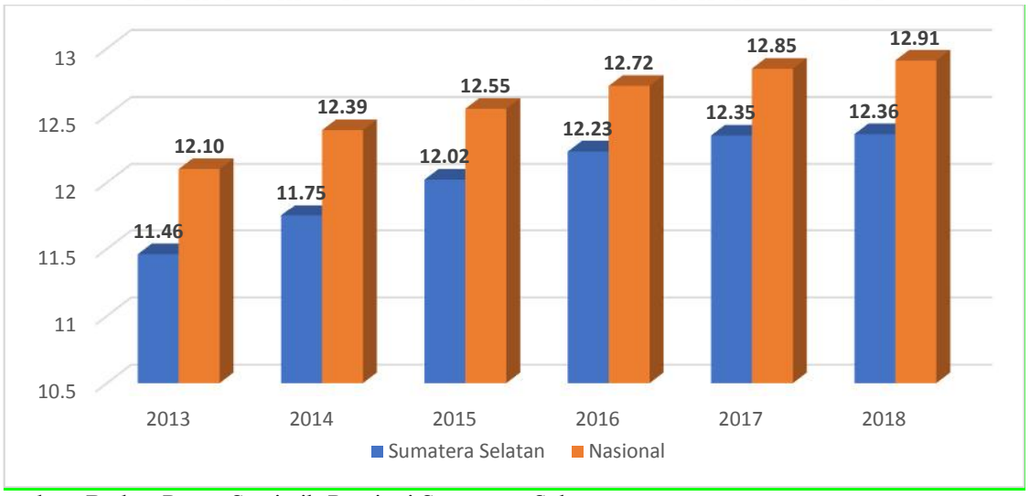
Angka harapan hidup tertinggi terdapat di Kota Palembang yakni 70,32 tahun pada tahun 2018. Sedangkan angka harapan hidup terkecil terdapat di Kabupaten Empat Lawang 64,56 tahun. Kabupaten dan kota yang memiliki angka harapan hidup diatas angka harapan hidup provinsi adalah Kota Palembang dan Kota Prabumulih. Sedangkan daerah lain memiliki Usia harapan hidup yang masih berada dibawah provinsi. Masih rendahnya angka harapan hidup di masing masing kabupaten/kota yang di bawah usia harapan hidup Provinsi menunjukkan masih perlunya dilakukan peningkatan fasiltas pelayanan umum terutama rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya yang menjangkau ke daerah-daerah yang jauh dari pusat kota.

### 2.2.2.3. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan, karena harapan lama sekolah mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk untuk menamatkan pendidikannya

di mulai pada usia tujuh tahun. HLS juga merupakan salah satu komponen pembentuk indikator IPM metode baru.

**Gambar 2.30.**
Angka Harapan Lama Sekolah
Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2013-2018




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi masih di bawah capaian nasional. Pada tahun 2013 harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan adalah 11,64 tahun atau setara dengan kelas 2 SMA sederajat. Pada tahun 2018 harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan menjadi 12,36 tahun atau setara dengan kelas 3 SMA sederajat. Capaian harapan lama sekolah Kabupaten/Kota tertinggi pada tahun 2018 adalah Kota Palembang yaitu 14,39 tahun dan capaian terendah pada Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu 11,40 tahun.

**Tabel 2.33.**
Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten dan Kota
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| No | Wilayah Kab/Kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 11,80 | 11,99 | 12,54 | 12,55 | 12,56 | 12.57 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 10,63 | 10,78 | 11,34 | 11,35 | 11,39 | 11.4 |
| 3 | Muara Enim | 11,00 | 11,48 | 11,49 | 11,93 | 11,94 | 11.95 |
| 4 | Lahat | 12,08 | 12,25 | 12,29 | 12,30 | 12,31 | 12.32 |
| 5 | Musi Rawas | 10,88 | 11,10 | 11,63 | 11,73 | 11,74 | 11.99 |
| 6 | Musi Banyuasin | 11,06 | 11,57 | 11,79 | 11,80 | 11,97 | 11.98 |
| 7 | Banyuasin | 10,61 | 10,87 | 11,32 | 11,71 | 11,72 | 11.73 |
| 8 | OKU Selatan | 11,08 | 11,21 | 11,22 | 11,58 | 11,72 | 11.73 |
| 9 | OKU Timur | 11,53 | 11,66 | 11,79 | 11,79 | 11,97 | 12.04 |
| 10 | Ogan Ilir | 11,37 | 11,63 | 12,24 | 12,26 | 12,27 | 12.28 |
| 11 | Empat Lawang | 11,65 | 11,84 | 11,85 | 12,02 | 12,03 | 12.04 |
| 12 | PALI | 10,08 | 10,13 | 10,56 | 10,92 | 11,30 | 11.7 |
| 13 | Musi Rawas Utara | 10,69 | 10,89 | 11,22 | 11,53 | 11,54 | 11.55 |

| No | Wilayah Kab/Kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Kota Palembang | 13,34 | 13,67 | 13,70 | 13,71 | 14,11 | 14.39 |
| 15 | Kota Prabumulih | 12,10 | 12,21 | 12,86 | 12,87 | 12,88 | 12.89 |
| 16 | Kota Pagar Alam | 12,62 | 12,78 | 12,80 | 12,81 | 12,82 | 12.83 |
| 17 | Kota Lubuk Linggau | 13,13 | 13,26 | 13,28 | 13,29 | 13,30 | 13.31 |
| **Sumatera Selatan** | | **11,46** | **11,75** | **12,02** | **12,23** | **12,35** | **12.36** |
| **Nasional** | | **12,10** | **12,39** | **12,55** | **12,72** | **12,85** | **12.91** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.2.2.4. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

**Tabel 2.34.**
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017

| No. | Kabupaten/Kota | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 1 | Ogan Komering Ulu | 8.45 | 8.37 | 8.74 | 8.56 | 8.84 | 8.42 | 8.86 | 8.76 | 9.24 | 8.92 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 7.27 | 6.88 | 7.14 | 6.87 | 7.29 | 6.73 | 7.51 | 6.97 | 7.72 | 7.18 |
| 3 | Muara Enim | 8.2 | 7.81 | 7.8 | 7.43 | 8.28 | 7.45 | 8.3 | 7.73 | 8.28 | 7.57 |
| 4 | Lahat | 8.57 | 8.06 | 8.59 | 8.44 | 8.81 | 8.17 | 8.56 | 8.24 | 9.14 | 8.71 |
| 5 | Musi Rawas | 7.13 | 6.68 | 7.51 | 6.9 | 7.71 | 6.92 | 7.64 | 7.17 | 8.8 | 7.48 |
| 6 | Musi Banyuasin | 8.11 | 7.59 | 8.05 | 7.5 | 8.19 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 8.23 | 7.87 |
| 7 | Banyuasin | 7.56 | 7.2 | 7.87 | 7.39 | 7.51 | 6.75 | 7.28 | 6.94 | 7.87 | 7.36 |
| 8 | Oku Selatan | 8.03 | 7.63 | 7.84 | 7.48 | 8 | 7.52 | 7.73 | 7.45 | 8.15 | 7.87 |
| 9 | Oku Timur | 7.8 | 7.56 | 8.18 | 7.66 | 7.75 | 7.34 | 7.83 | 7.41 | 7.82 | 7.49 |
| 10 | Ogan Ilir | 7.9 | 7.5 | 8.34 | 7.79 | 8.08 | 7.56 | 7.99 | 7.6 | 7.94 | 7.75 |
| 11 | Empat Lawang | 7.86 | 7.65 | 8 | 7.67 | 7.88 | 7.52 | 7.65 | 7.63 | 7.87 | 7.76 |
| 12 | PALI | na | na | na | na | 6.22 | 6.21 | 6.97 | 6.42 | 7.27 | 6.89 |
| 13 | Musi Rawas Utara | na | na | na | na | 7.44 | 6.68 | 7.43 | 6.72 | 7.42 | 6.62 |
| 14 | Palembang | 10.47 | 9.91 | 10.65 | 10.26 | 10.4 | 10.06 | 10.88 | 10.32 | 10.07 | 9.79 |
| 15 | Prabumulih | 9.11 | 8.83 | 9.66 | 9.18 | 9.64 | 9.13 | 9.56 | 9.23 | 9.64 | 9.41 |
| 16 | Pagar Alam | 8.65 | 9.03 | 9.45 | 8.93 | 9.2 | 9 | 8.8 | 8.74 | 9.50 | 9.58 |
| 17 | Lubuk Linggau | 9.54 | 9.36 | 10.01 | 9.65 | 10.04 | 9.78 | 9.5 | 9.2 | 10.05 | 9.46 |
| Sumatera Selatan | | 8,44 | 8,08 | 8,59 | 8,22 | 8,50 | 8,02 | 8,52 | 8,12 | 8,60 | 8,22 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

Rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas di Provinsi Sumatera Selatan menurut Kabupaten dan kota berkisar antara 6 sampai 10 tahun. Rata-rata penduduk berusia 15 tahun ke atas menamatkan pendidikannya dalam jangka waktu maksimal 10 tahun yang artinya bahwa penduduk di Sumatera Selatan sudah mengenyam pendidikan menengah atas sampai perguruan tinggi. Pada tahun 2013 penduduk berusia 15 tahun ke atas rata-rata lama sekolah yang paling singkat terdapat pada Kabupaten Musi Rawas yaitu 7,13 tahun untuk penduduk laki-laki dan 6,68 tahun untuk penduduk

perempuan. sedangkan rata-rata lama sekolah tertinggi terdapat di Kota Palembang yaitu 10,47 tahun untuk penduduk laki-laki dan 9,91 untuk penduduk perempuan. Pada tahun 2017 rata-rata lama sekolah terendah terdapat pada Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu 7,42 tahun untuk penduduk laku-laki dan 6,62 tahun untuk penduduk perempuan. Sedangkan rata-rata lama sekolah tertinggi masih di Kota Palembang yaitu 10,07 tahun untuk penduduk laki-laki dan 9,79 untuk penduduk perempuan. Secara keseluruhan tahun 2017 rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Selatan adalah 8,41 tahun, angka ini masih di bawah indikator nasional yaitu 8,5 tahun.

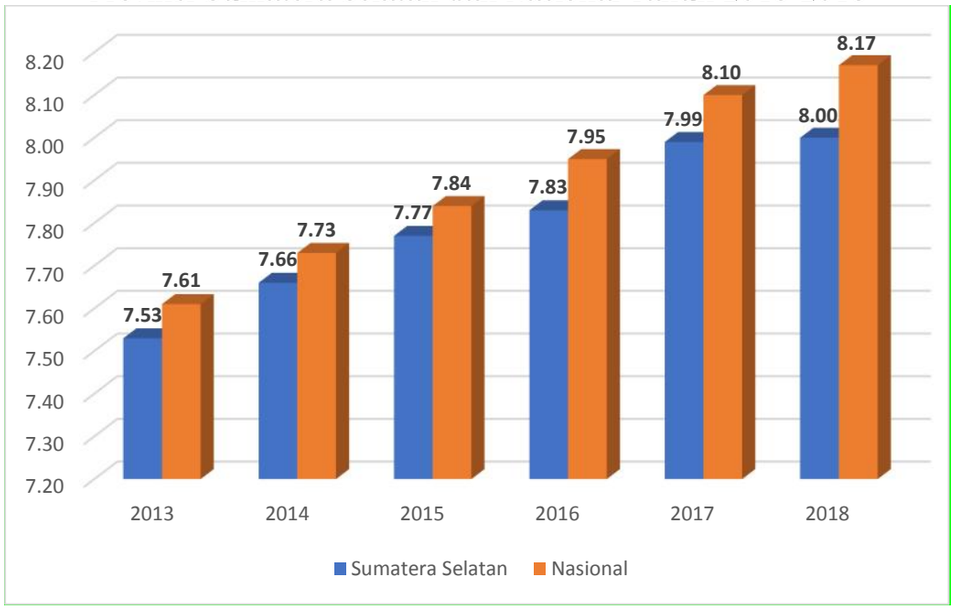
Jika dilihat dari rata-rata lama sekolah di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan maka angka RLS ini menunjukkan bahwa taraf pendidikan yang di lalui rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas baru pada tahap Sekolah lanjutan tingkat Pertama (SLTP) belum mencapai Sekolah lanjutan tingat atas (SLTA). Hal ini merupakan salah satu indikator rendahnya tingkat pendidikan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan.

RLS tertinggi ada di Kota Palembang, hal ini dikarenakan di daerah ini tersedia fasilitas sekolah yang banyak dan mudah diakses masyarakat, selain itu budaya masyarakat akan pendidikan yang telah meningkat. Namun kondisi ini belum terjadi secara merata di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Di Kabupaten Musi Rawas Utara Rata-rata lama sekolah pada tahun 2017 hanya 6,62 tahun untuk penduduk perempuan, hal ini berarti sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Musi Rawas Utara hanya berpendidikan lulus Sekolah dasar (SD), begitu juga dengan Kabupaten PALI. Daerah ini merupakan daerah yang memerlukan perhatian dalam hal peningkatan taraf pendidikan.

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk berusia 25 tahun ke atas menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) metode baru. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup di suatu wilayah.

**Gambar 2.31.**
Rata-rata Lama Sekolah
Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2013-2018




*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

Rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun masih berada di bawah capaian nasional. Pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan mencapai 7,53 tahun sedangkan capaian nasional 7,61 tahun. Pada tahun 2018 rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan mencapai 8,00 tahun sedangkan capaian nasional 8,17 tahun. Untuk capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota tertinggi pada tahun 2018 adalah Kota Palembang yaitu 10,37 tahun dan yang terendah pada Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu 6,45 tahun.

**Tabel 2.35.**
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berusia 25 Tahun Ke Atas
Menurut Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2018

| No | Wilayah Kab/Kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 7,57 | 7,91 | 8,17 | 8,33 | 8,67 | 8.68 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 6,41 | 6,44 | 6,45 | 6,74 | 7,01 | 7.02 |
| 3 | Muara Enim | 7,16 | 7,19 | 7,40 | 7,41 | 7,49 | 7.60 |
| 4 | Lahat | 7,76 | 7,86 | 8,09 | 8,10 | 8,43 | 8.44 |
| 5 | Musi Rawas | 6,16 | 6,61 | 6,69 | 6,85 | 7,18 | 7.28 |
| 6 | Musi Banyuasin | 7,17 | 7,18 | 7,54 | 7,55 | 7,59 | 7.60 |
| 7 | Banyuasin | 6,55 | 6,87 | 6,88 | 6,89 | 7,16 | 7.17 |
| 8 | OKU Selatan | 7,26 | 7,30 | 7,46 | 7,47 | 7,66 | 7.82 |
| 9 | OKU Timur | 6,82 | 7,05 | 7,05 | 7,06 | 7,12 | 7.27 |
| 10 | Ogan Ilir | 7,01 | 7,34 | 7,35 | 7,36 | 7,37 | 7.58 |
| 11 | Empat Lawang | 7,02 | 7,14 | 7,29 | 7,30 | 7,37 | 7.38 |
| 12 | PALI | 6,49 | 6,50 | 6,53 | 6,54 | 6,57 | 6.58 |

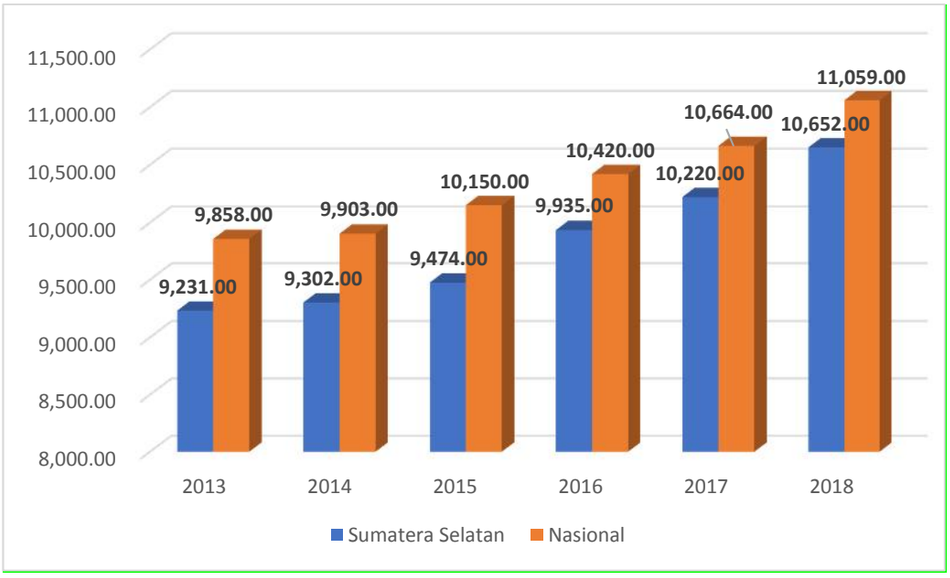
| No | Wilayah Kab/Kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Musi Rawas Utara | 5,71 | 6,06 | 6,33 | 6,43 | 6,44 | 6.45 |
| 14 | Kota Palembang | 10,19 | 10,23 | 10,25 | 10,35 | 10,36 | 10.37 |
| 15 | Kota Prabumulih | 9,52 | 9,60 | 9,62 | 9,67 | 9,68 | 9.71 |
| 16 | Kota Pagar Alam | 8,45 | 8,61 | 8,63 | 8,64 | 8,93 | 9.08 |
| 17 | Kota Lubuk Linggau | 9,29 | 9,32 | 9,47 | 9,49 | 9,50 | 9.51 |
| **Sumatera Selatan** | | **7,53** | **7,66** | **7,77** | **7,83** | **7,99** | **8.00** |
| **Nasional** | | **7,61** | **7,73** | **7,84** | **7,95** | **8,10** | **8.17** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.2.2.5. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita (disesuaikan) di Sumatera Selatan mengalami tren peningkatan dari Rp.9.231 ribu pada tahun 2013 menjadi Rp.10.652 ribu pada tahun 2018, capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita penduduk Sumatera Selatan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Sumatera Selatan, dapat dilihat pada gambar 2.29.

**Gambar 2.32.**
Pengeluaran Perapita
Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2013-2018




*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

Pengeluaran per kapita (disesuaikan) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan mengalami tren peningkatan pada tahun 2013 sampai tahun 2018, Pengeluaran Perkapita terbesar Kota Palembang pada tahun 2018 sebesar Rp. 14.697 ribu dan pengeluaran perkapita terkecil Kabupaten PALI sebesar Rp. 8.136 ribu. Berikut rincian Pengeluaran Perkapita menurut Kabupaten/Kota sebagai berikut :

**Tabel 2.36.**
Pengeluaran Perkapita Menurut Kabupaten dan Kota
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 (dalam ribu rupiah)

| No | Wilayah Kab/Kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 8.782,25 | 8.848,11 | 8.922,98 | 8.993,00 | 9.340,00 | 9.940,00 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 9.394,69 | 9.516,90 | 9.723,40 | 10.039,00 | 10.306,00 | 10.706,00 |
| 3 | Muara Enim | 8.405,86 | 9.051,02 | 9.396,62 | 9.766,00 | 10.575,00 | 11.012,00 |
| 4 | Lahat | 8.565,34 | 8.627,99 | 8.700,24 | 9.037,00 | 9.157,00 | 9.600,00 |
| 5 | Musi Rawas | 8.692,69 | 8.787,03 | 8.876,00 | 9.140,00 | 9.218,00 | 9.562,00 |
| 6 | Musi Banyuasin | 8.614,16 | 8.772,33 | 8.850,50 | 9.452,00 | 9.705,00 | 10.212,00 |
| 7 | Banyuasin | 8.157,13 | 8.218,23 | 8.539,15 | 8.899,00 | 9.328,00 | 9.760,00 |
| 8 | OKU Selatan | 7.254,19 | 7.380,02 | 7.581,10 | 7.902,00 | 7.997,00 | 8.445,00 |
| 9 | OKU Timur | 10.537,06 | 10.766,52 | 10.862,05 | 11.024,00 | 11.169,00 | 11.612,00 |
| 10 | Ogan Ilir | 9.548,45 | 9.688,97 | 9.809,48 | 9.846,00 | 9.972,00 | 10.412,00 |
| 11 | Empat Lawang | 8.586,39 | 8.655,64 | 8.726,51 | 8.944,00 | 9.010,00 | 9.450,00 |
| 12 | PALI | 6.850,98 | 6.940,90 | 7.197,04 | 7.491,00 | 7.834,00 | 8.136,00 |
| 13 | Musi Rawas Utara | 8.823,03 | 8.892,32 | 9.051,05 | 9.272,00 | 9.348,00 | 9.795,00 |
| 14 | Kota Palembang | 13.392,88 | 13.623,95 | 13.784,85 | 13.981,00 | 14.277,00 | 14.697,00 |
| 15 | Kota Prabumulih | 11.626,08 | 11.775,02 | 12.045,82 | 12.162,00 | 12.355,00 | 12.765,00 |
| 16 | Kota Pagar Alam | 7.1010,98 | 7.272,55 | 7.600,19 | 7.989,00 | 8.352,00 | 8.758,00 |
| 17 | Kota Lubuk Linggau | 12.070,05 | 12.232,96 | 12.331,47 | 12.798,00 | 12.878,00 | 13.288,00 |
| **Sumatera Selatan** | | **9.231,00** | **9.302,00** | **9.474,00** | **9.935,00** | **10.220,00** | **10.652,00** |
| **Nasional** | | **9.858,00** | **9.903,00** | **10.150,00** | **10.420,00** | **10.664,00** | **11.059,00** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.2.2.6. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Dalam perencanaan pembangunan wilayah, AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan, secara umum Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2013 hingga Tahun 2018 mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Provinsi Sumatera Selatan telah mampu membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.

**Tabel 2.37.**
Perkembangan Angka Melek Huruf
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| No. | Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah penduduk usia 15 Tahun Keatas yang bisa membaca dan menulis | 5.387.997 | 5.511.650 | 5.593.121 | 5.747.554 | 5.847.122 | - |
| 2. | Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas | 5.536.372 | 5.616.110 | 5.694.483 | 5.837.451 | 5.933.755 | - |
| 3. | Angka Melek Huruf (%) | 97,32 | 98,14 | 98,22 | 98,46 | 98,54 | 98,66 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

Pada tahun 2013 AMH penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 97,32% kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 98,14% dan terus meningkat hingga pada tahun 2018 sebesar 98,66%. Peningkatan angka melek huruf menunjukkan semakin banyaknya penduduk yang sudah bisa baca tulis. Hal ini juga didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik sehingga menciptakan sumber daya manusia yang juga bermutu baik. Kegiatan kejar Paket A yang dilakukan di desa-desa dan daerah tertinggal telah mampu memberikan peningkatan terhadap angka melek huruf di Provinsi Sumatera Selatan.

**Tabel 2.38.**
Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten dan Kota
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

| No. | Kabupaten dan Kota | Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis | Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas | Angka Melek Huruf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 255.936 | 259.307 | 98,70 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 564.869 | 575.868 | 98,09 |
| 3 | Muara Enim | 430.088 | 436.859 | 98,45 |
| 4 | Lahat | 287.707 | 289.153 | 99,50 |
| 5 | Musi Rawas | 276.559 | 282.809 | 97,79 |
| 6 | Musi Banyuasin | 439.571 | 442.002 | 99,45 |
| 7 | Banyuasin | 575.813 | 591.002 | 97,43 |
| 8 | OKU Selatan | 250.330 | 252.222 | 99,25 |
| 9 | OKU Timur | 469.830 | 483.812 | 97,11 |
| 10 | Ogan Ilir | 296.423 | 300.388 | 98,68 |
| 11 | Empat Lawang | 169.294 | 172.802 | 97,97 |
| 12 | PALI | 120.658 | 123.536 | 97,67 |
| 13 | Musi Rawas Utara | 124.449 | 129.325 | 96,23 |
| 14 | Palembang | 1.200.476 | 1.204.088 | 99,70 |
| 15 | Prabumulih | 128.003 | 129.374 | 98,94 |
| 16 | Pagar Alam | 98.326 | 99.773 | 98,55 |
| 17 | Lubuk Linggau | 158.917 | 161.435 | 98,44 |
| **Sumatera Selatan** | | **5.847.122** | **5.933.755** | **98,54** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

Menurut kabupaten dan kota di Sumatera Selatan angka melek huruf (AMH) Tahun 2017 terbesar terdapat di Kota Palembang sebesar 99,70 persen yang artinya hampir seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas sudah bisa membaca dan menulis. AMH terbesar kedua terdapat di Kabupaten Lahat yaitu sebesar 99,50 persen artinya hampir seluruh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Lahat sudah bisa membaca dan menulis. Sedangkan nilai AMH terkecil terdapat di Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 96,23 persen. Namun secara keseluruhan AMH di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 berada di atas 96 persen yang

menunjukkan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan hampir seluruhnya sudah bisa membaca dan menulis.

### 2.2.2.7. Persentase Balita Gizi Buruk

Secara umum persentase balita gizi buruk pada tahun 2013-2017 di Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai target yang dibuat dalam RPJMD tahun 2013-2018 dimana angka gizi buruk mencapai kurang dari 1 persen.

**Tabel 2.39.**
Persentase Balita Gizi Buruk
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Balita Gizi Buruk | 0,12 | 0,02 | 0,018 | 1,9 | 0,032 | na |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

Persentase angka gizi buruk di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 0,018 persen dari tahun 2014 yaitu 0,02 persen. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 1,9 persen di tahun 2016 akan tetapi mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 menjadi 0,032 persen. Penurunan persentase ballita gizi buruk menunjukkan tingkat kesehatan yang semakin membaik yang di dukung dengan ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan dalam mengatasi kasus balita gizi buruk.

Kasus gizi buruk terbanyak di tahun 2017 ditemukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebanyak 79 kasus per 1000 balita. Disusul Kabupaten Musi Rawas sebanyak 37 kasus per 1000 balita, dan Kabupaten Lahat sebanyak 32 kasus per 1000 Balita.

Jumlah bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) juga paling banyak ditemukan di Kabupaten Musi rawas yaitu 100 kasus di tahun 2017 dan yang tertinggi di kota Palembang sebanyak 283 kasus.

### 2.2.2.8. Persentase Stunting pada Balita

Prevalensi stunting pada anak bayi di bawah lima tahun (balita) dan bayi di bawah dua tahun (baduta) masih cukup tinggi, walaupun menunjukkan kecenderungan yang menurun selama periode 2012-2017. Persentase stunting pada anak balita Provinsi Sumatera Selatan dalam enam tahun terakhir mengalami trend penurunan namun sedikit naik pada tahun 2017. Pada tahun 2012 sebesar 27,6%, naik menjadi 28,4% (Riskesdas, 2013) pada tahun 2013, turun menjadi 26,3% pada tahun 2014, kemudian turun menjadi 24,5% pada tahun 2015, turun lagi menjadi 19,30 (PSG, 2016) pada tahun 2016 kemudian naik sedikit menjadi 22,8% (PSG, 2017) pada tahun 2017 tetapi capaian

Provinsi Sumatera Selatan masih berada di bawah capaian Nasional yaitu 29,6% (PSG, 2017).

**Tabel 2.40.**
Persentase Stunting pada Balita
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| Indikator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Stunting pada Balita | 27,6 | 28,4 | 26,3 | 24,5 | 19,3 | 22,8 | na |

*Sumber : Buku Saku Pemantauan Status Gizi (PSG) Kementerian Kesehatan RI; Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.2.2.9. Pertanahan

Bidang tanah di Provinsi Sumatera Selatan yang telah terdaftar sebesar 201.324 dengan luas 98.182 ha pada tahun 2017, sedangkan bidang tanah yang belum terdaftar sebesr 3.477.727 dengan luas 1.832.305 ha. Luas bidang tanah yang belum terdaftar lebih luas jika dibandingkan dengan luas bidang tanah yang sudah terdaftar.

**Tabel 2.41.**
Persentase Luas tanah Bersertifikat
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2018

| No. | Tahun | Tanah Terdaftar | | Tanah Belum Terdaftar | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bidang | Luas (Ha) | Bidang | Luas (Ha) |
| 1 | 2012 | 20.472 | 148.097 | 3.750.108 | 3.041.872 |
| 2 | 2013 | 71.057 | 1.111.385 | 3.679.051 | 1.930.487 |
| 3 | 2014 | 53.150 | 66.640 | 3.657.005 | 1.863.846 |
| 4 | 2015 | 28.104 | 19.955 | 3.628.901 | 1.843.891 |
| 5 | 2016 | 20.373 | 623.052 | 3.608.528 | 1.220.838 |
| 6 | 2017 | 201.324 | 98.182 | 3.477.727 | 1.832.305 |
| 7 | 2018 | 297.555 | na | 3.180.172 | na |
| | Jumlah | 692.035 | 2.067.312 | 24.981.492 | 11.733.240 |

*Sumber: Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Selatan, 2018*
*Ket. Lahan yang disertifikasi merupakan bukan kawasan hutan*

Total luas tanah yang terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan periode 2012-2018 adalah seluas 692.035 ha bidang tanah, jauh lebih sedikit dibandingkan bidang tanah yang belum terdaftar selama 7 (tujuh) tahun di Sumatera Selatan adalah seluas 24.981.492 ha.

Terkait permasalahan masih tingginya tanah yang belum terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera akan melakukan strategi dan sinergi program dengan pemerintah pusat, adapun beberapa program dan kegiatan yang telah dan akan dilakukan sebagai berikut :

a. Terhadap program dan kegiatan Pemerintah Pusat berupa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan surat edaran kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Sumatera Selatan sesuai Surat Edaran :
   1) Nomor: 590/2436/DLHP/B-V/2017 tanggal 9 Oktober 2017
   2) Nomor: 593/0371/DLHP/B-V/2018 tanggal 19 Februari 2018
   3) Nomor: 590/0928/DLHP/B-V/2019 tanggal 15 April 2019
b. Terkait program Reforma Agraria Gubernur Sumatera Selatan telah membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 770/KPTS/DISHUT/2017 dan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 159/KPTS/DLHP/2019 Tanggal 8 Maret 2019

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga akan melaksanakan program dan kegiatan Optimalisasi pendaftaran dan pemanfaatan tanah, sehingga dengan kegiatan ini akan mendorong peningkatan pendaftaran dan pemafaatan lahan baik oleh Pemerintah, Swasta dan masyarakat.

### 2.2.2.10. Ketenagakerjaan

Angkatan kerja merupakan bagian dari aspek demografi penduduk yang mempunyai kecenderungan bertambah atau menurun sejalan dengan perubahan yang dialami oleh penduduk itu sendiri. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Selatan selama tahun 2013-2018 secara garis besar mengalami peningkatan baik dari segi angkatan kerja laki-laki maupun dari angkatan kerja perempuan.

**Tabel 2.42.**
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| Jenis Kelamin | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | 2.289.673 | 2.412.369 | 2.440.363 | 2.518.306 | 2.554.231 | na |
| Perempuan | 1.357.323 | 1.473.305 | 1.494.424 | 1.660.488 | 1.589.438 | na |
| Total | 3.646.996 | 3.885.674 | 3.934.787 | 4.178.794 | 4.123.669 | 4.139.000 |

*Sumber: Buku Saku dan Data Indikator Kesejahteraan Sumatera Selatan*

Pada tahun 2015 jumlah angkatan kerja adalah sebanyak 3.934.787 jiwa yang terdiri dari 2.440.363 jiwa angkatan kerja laki-laki dan sebanyak 1.494.424 angkatan kerja perempuan. Angkatan kerja terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 4.139.000 jiwa. Peningkatan angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan ketersediaan sumber daya manusia yang siap untuk bekerja pada berbagai sektor ekonomi, peran pemerintah adalah mendukung penyediaan lapangan pekerjaan dalam rangka menurunkan angka pengangguran.

**Tabel 2.43.**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

| Kabupaten/Kota | TPAK | TPT (2018) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Ogan Komering Ulu | 68.19 | 4,61 |
| Ogan Komering Ilir | 69.69 | 2,61 |
| Muara Enim | 72.59 | 4,27 |
| Lahat | 72.74 | 3,29 |
| Musi Rawas | 74.14 | 3,23 |
| Musi Banyuasin | 67.64 | 3,29 |
| Banyuasin | 66.25 | 3,84 |
| Ogan Komering Ulu Selatan | 79.41 | 4,14 |
| Ogan Komering Ulu Timur | 70.66 | 3,51 |
| Ogan Ilir | 78.62 | 2,42 |
| Empat Lawang | 74.60 | 2,28 |
| PALI | 73.22 | 3,79 |
| Musi Rawas Utara | 72.96 | 4,22 |
| Palembang | 62.27 | 7,21 |
| Prabumulih | 71.61 | 6,99 |
| Pagar Alam | 71.99 | 3,03 |
| Lubuk Linggau | 69.10 | 4,55 |
| Sumatera Selatan | 69,50 | 4,23 |

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan*

Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Sumatera Selatan mencapai 69,50% pada tahun 2017, artinya masih banyak penduduk berusia 15 tahun ke atas yang belum bekerja. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 sebesar 4,23%.

Kabupaten/kota dengan partisipasi angkatan kerja tertinggi adalah Kabupaten OKU selatan yaitu sebesar 79,41% dan yang terendah adalah Kota Palembang, artinya jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas yang belum bekerja paling banyak terdapat di Kota Palembang. Tingkat Pengangguran terbuka paling besar juga di Kota Palembang yaitu 7,21%. Jumlah penduduk yang padat di Kota Palembang, dengan jumlah pengangguran yang tinggi menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat di kota Palembang juga rendah.

Capaian realisasi penyerapan tenaga kerja merupakan tambahan tenaga kerja yang dapat diserap oleh kegiatan investasi yang terealisasi pada periode berjalan.Angka capaian serapan tenaga kerja yang positif dapat mendorong upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja.

Tenaga kerja yang diserap dari realisasi investasi yang masuk ke Sumatera Selatan pada tahun 2018 mencapai lebih dari 14.076 tenaga kerja. Perusahaan PMA menyerap tenaga kerja mencapai 3.491 orang, sedangkan PMDN menyerap 10.585 orang.

**Tabel 2.44.**
Jumlah Tenaga Kerja yang Diserap PMDN dan PMA
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 -2018

| Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenaga Kerja PMDN | 4.224 | 11.496 | 16.978 | 14.312 | 10.585 |
| Tenaga Kerja PMA | 8.916 | 46.401 | 30.297 | 6.114 | 3.491 |
| Total Serapan TK (org) | 13.140 | 57.897 | 47.275 | 20.426 | 14.076 |

*Sumber : BPMD Provinsi Sumatera Selatan*

Mengingat begitu besarnya manfaat investasi bagi peningkatan perekonomian, iklim investasi yang kondusif sangat diperlukan agar dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat, tidak hanya berdampak teciptanya lapangan kerja melainkan juga stabilitas harga dan peningkatan pajak sebagai pendapatan pemerintah. Pemerintah harus mampu memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi pengusaha dan investor sehingga secara berkelanjutan dapat terus meningkatkan iklim investasi. Pemerintah terus menciptakan iklim investasi yang kondusif agar target investasi pemerintah bisa tercapai di tengah krisis perekonomian dunia.

### 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Ragam budaya di Provinsi Sumatera Selatan secara umum terbagi dalam jenis rumah adat, pakaian, tarian juga kuliner. Selain itu tata kehidupan masyarakat di Sumatera Selatan juga memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri. Sebagaimana daerah lain di Pulau Sumatera, kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan juga dipengaruhi oleh kebudayaan melayu, agama islam, agama hindu dan yang paling melekat adalah keberadaan eksistensi dari kerajaan Sriwijaya. Warisa budaya di Provinsi Sumatera Selatan berupa warisan benda dan tak benda. Warisan berupa benda seperti peninggalan-peninggalan sejarah yang berwujud contohnya rumah limas Cek Mas, candi Gede Ing Suro, rumah batu, makam Raden Nangling, Bungker jepang Sumisno dan lain-lainnya yang dijadikan sebagai cagar budaya. Sedangkan warisan budaya tak benda berupa kerajinan tangan, kuliner, kreasi, dan lainya.

**Tabel 2.45.**
Warisan Budaya Sumatera Selatan Yang Sudah Disertifikasi
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI

| Tahun | Nama karya Budaya | Asal Daerah | Domian |
|---|---|---|---|
| 2013 | Dulmuluk | Sumatera Selatan | Seni Pertunjukan |
| | Songket Palembang | Sumatera Selatan | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional |
| 2014 | Tari Gending Sriwijaya | Sumatera Selatan | Seni Pertunjukan |
| | Tembang Batanghari Sembilan | Sumatera Selatan | Seni Pertunjukan |
| | Pempek | Sumatera Selatan | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional |
| | Buritan Basemah | Sumatera Selatan | Seni Pertunjukan |
| | Rumah Ulu | Sumatera Selatan | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional |

| Tahun | Nama karya Budaya | Asal Daerah | Domian |
|---|---|---|---|
| | Limas Palembang | Sumatera Selatan | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional |
| 2015 | Kue Lapan Jam | Sumatera Selatan | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional |
| | Senjang | Sumatera Selatan | Tradisi dan Ekspresi Lisan |
| 2016 | Ande-ande | Sumatera Selatan | Tradisi dan Ekspresi Lisan |
| | Rejung Sumatera Selatan | Sumatera Selatan | Tradisi dan Ekspresi Lisan |
| | Warahan Sumatera Selatan | Sumatera Selatan | Tradisi dan Ekspresi Lisan |
| | Bidar | Sumatera Selatan | Adar Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan |
| 2017 | Tari Penguton | Sumatera Selatan | Seni Pertunjukan |
| | Kerajinan Lak Palembang | Sumatera Selatan | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional |
| | Rumah Baghi | Sumatera Selatan | Arsitektur |

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Provinsi Sumatera Selatan, 2017*

Khusus untuk Songket Palembang telah ditetapkan sebagai sebagai Warisan Budaya Indonesia asal Sumatera Selatan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 2013, dan telah didaftarkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Unesco (*Intangible Culture Heritage*) bersama tenun lainnya di Indonesia masih di posisi daftar tunggu. Kesenian Sumatera Selatan terus dipacu, disamping untuk meningkatkan daya kreasi masyarakat juga diharapkan dapat memacu kegiatan perekonomian. Pertumbuhan sanggar senin di Sumatera Selatan, walaupun tidak terlalu pesat namun menunjukkan adanya kegiatan seni yang berusaha di lestarikan oleh masyarakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesenian daerah sebagai unsur penting dalam mempertahankan kelestarian budaya dan kesenian daerah yang telah ada dan diwariskan secara turun-temurun.

**Tabel 2.46.**
Jumlah Sanggar Seni Menurut Kabupaten dan Kota
di Provinsi Sumatera Selatan

| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Sanggar Seni |
|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 82 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 41 |
| 3 | Muara Enim | 130 |
| 4 | Lahat | 18 |
| 5 | Musi Rawas | 22 |
| 6 | Musi Banyuasin | 11 |
| 7 | Banyuasin | 24 |
| 8 | OKU Selatan | 17 |
| 9 | OKU Timur | 6 |
| 10 | Ogan Ilir | 13 |
| 11 | Empat Lawang | 18 |
| 12 | Muratara | 4 |
| 13 | PALI | 5 |
| 14 | Palembang | 57 |
| 15 | Prabumulih | 10 |
| 16 | Pagar Alam | 22 |
| 17 | Lubuk Linggau | 25 |
| Total | | 505 |

*Sumber: Statistik Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, 2017*

Tempat-tempat wisata di Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar merupakan peninggalan sejarah yang diterus di jaga, dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat. Beragam tempat wisata tersebut pada umumnya merupakan warisan dari zaman kerajaan Sriwijaya seperti Masjid Agung yang didirikan pada tahun 1738 oleh Sultan Mahmud Badaruddin I, jembatan Ampera yang dibangun oleh rakyat dimana Ampera berarti Amanat Penderitaan Rakyat, Pulau Kemaro peninggalan kerajaan China, serta museum-musem yang juga menjadi tempat wisata di Provinsi Sumatera Selatan seperti museum Al-Quran terbesar yang dibangun pada tahun 2002.

Berbagai kegiatan seni budaya dan kejuaraan olahraga baik skala nasional maupun internasional sudah dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan seperti kegiatan PON, SEA GAMES, Islamic Solidarity Games (ISG) serta ASIAN GAMES pada tahun 2018 dimana Sumatera Selatan menjadi Provinsi terpilih sebagai tuan rumah kegiatan tersebut. Dalam mendukung kegiatan seni budaya dan olahraga berbagai sarana dan prasarana harus perlu ditingkatkan salah satunya adalah peningkatan sarana dan prasarana di kawasan Jakabaring sebagai salah satu pusat wisata berskala internasional.

Memberdayakan pusat-pusat kegiatan seni dan budaya di Provinsi Sumatera Selatan agar tetap lestari dan terjaga terutama kesenian tradisional yang menjadi ciri khas Sumatera Selatan seperti seni tari gending sriwijaya. Kemudian menggalakkan festival seni dan budaya yang berskala nasional dan internasional serta mengembangkan manajemen olahraga dalam menggabungkan kegiatan promosi, ekonomi dan prestasi olah raga yang bermutu.

**Tabel 2.47.**
Perkembangan Olahraga Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Klub Olahraga per 10.000 Penduduk | Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 Penduduk |
|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 1 | 1 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 2 | 2 |
| 3 | Muara Enim | 1 | 1 |
| 4 | Lahat | 0 | - |
| 5 | Musi Rawas | 1 | 1 |
| 6 | Musi Banyuasin | 6 | 1 |
| 7 | Banyuasin | 1 | 1 |
| 8 | OKU Selatan | 0 | 0 |
| 9 | OKU Timur | 1 | 1 |
| 10 | Ogan Ilir | 1 | 1 |
| 11 | Empat Lawang | 0 | - |
| 12 | Pali | 0 | - |
| 13 | Muratara | 0 | - |
| 14 | Kota Palembang | 7 | 30 |
| 15 | Kota Prabumulih | 2 | 2 |
| 16 | Kota Pagar Alam | 0 | - |
| 17 | Kota Lubuk Linggau | 1 | 1 |
| 18 | Sumatera Selatan | | 15 |
| | **JUMLAH** | 24 | 57 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2018*

### 2.2.4. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai Pasal 258 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan:

1. pendapatan masyarakat;
2. kesempatan kerja;
3. lapangan berusaha;
4. akses dan kualitas pelayanan publik; dan
5. daya saing Daerah.

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, selanjutnya untuk 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar di provinsi diikat dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 (enam) bidang pelayanan dasar tersebut.

#### 2.2.4.1. Bidang Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Daerah Provinsi terdiri dari:

##### 2.2.4.1.1. Pendidikan Menengah

a). Angka Partisipasi Kasar (APK) Menengah

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Pada tahun 2013 nilai APK SMA/SMK/MA adalah 63,78% artinya masih terdapat 36% penduduk berusia 16-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan SMA/SMK/MA. Meningkatnya APK untuk SMA/SMK/MA di tahun 2017 menjadi sebesar 83,44% menunjukkan sudah semakin banyaknya penduduk berusia 16-18 tahun yang bersekolah di tingkat SMA/SMK/MA dan hanya tersisa sekitar 17% yang belum bersekolah di tingkat SMA/SMK/MA pada umur yang sesuai. APK SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun, Untuk tahun 2016 dan 2017 APK SMA/SMK/MA diatas nasional, hal ini karena Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA di Sumatera Selatan menurut kabupaten/kota pada tahun 2017 terlihat capaian tertinggi adalah Kota Palembang (104,59), dan terendah adalah Kabupaten Musi Rawas Utara (64,24). Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.48.**
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten dan Kota
di Provinsi Sumatera Selatan Jenjang SMA/SMK/MA Tahun 2013-2017

| No | Kabupaten/Kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKU | 59,21 | 71,28 | 82,49 | 79,09 | 77,93 |
| 2 | OKI | 48,83 | 59,32 | 60,99 | 67,96 | 73,50 |
| 3 | Muara Enim | 69,43 | 70,16 | 65,71 | 87,01 | 93,00 |
| 4 | Lahat | 87,86 | 92,04 | 84,13 | 88,09 | 84,49 |
| 5 | Musi Rawas | 48,00 | 54,94 | 69,18 | 73,59 | 68,91 |
| 6 | Musi Banyuasin | 42,27 | 67,72 | 72,73 | 67,65 | 77,29 |
| 7 | Banyuasin | 49,67 | 61,66 | 53,91 | 80,32 | 73,17 |
| 8 | Oku Selatan | 65,78 | 71,43 | 60,78 | 74,31 | 75,09 |
| 9 | Oku Timur | 59,31 | 70,43 | 76,21 | 76,03 | 81,24 |
| 10 | Ogan Ilir | 71,93 | 74,18 | 80,31 | 72,71 | 75,63 |
| 11 | Empat Lawang | 74,63 | 82,43 | 71,23 | 95,90 | 84,01 |
| 12 | PALI | na | na | 56,07 | 69,75 | 79,94 |
| 13 | Mura Utara | na | na | 62,98 | 72,73 | 64,24 |
| 14 | Palembang | 73,00 | 80,19 | 84,31 | 101,77 | 104,59 |
| 15 | Prabumulih | 76,66 | 87,54 | 107,23 | 102,28 | 81,09 |
| 16 | Pagar Alam | 81,98 | 83,87 | 87,20 | 95,82 | 79,56 |
| 17 | Lubuk Linggau | 62,87 | 81,75 | 91,05 | 96,24 | 72,51 |
| Sumsel | | 62,78 | 72,51 | 73,18 | 82,51 | 83,44 |

*Sumber: Buku Saku dan Indikator Kesejahteraan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017*

**Tabel 2.49.**
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Provinsi
Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2013 – 2017

| No | Tahun | SMA/SMK/MA (%) | |
|---|---|---|---|
| | | Provinsi | Nasional |
| 1 | 2013 | 62,78 | 78,19 |
| 2 | 2014 | 72,51 | 74,63 |
| 3 | 2015 | 73,18 | 75,53 |
| 4 | 2016 | 82,51 | 76,45 |
| 5 | 2017 | 83,44 | 81,95 |
| 6 | 2018 | 77,40 | 80,68 |

*Sumber: Buku Saku dan Indikator Kesejahteraan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017*

#### 2.2.4.1.2. Pendidikan Khusus

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendidikan menengah menjadi kewenangan provinsi

### 2.2.4.2. Bidang Kesehatan

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri dari:

a. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk berdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi

b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Target pencapaian jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 ditetapkan sebesar 100% melalui program Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat terdampak Bencana dan/atau KLB pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

### 2.2.4.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri dari:

a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
b. Penyediaan pelayanan pegolahan air limbah domestic regional lintas kabupaten/kota

### 2.2.4.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi terdiri dari:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi

Jumlah kejadian bencana alam dan non alam atau dikarenakan ulah perbuatan manusia di Sumatera Selatan pada kurun tahun 2013 sampai tahun 2017 berjumlah 879 kejadian. Kejadian bencana terbagi atas bencana banjir, kebakaran, tanah longsor,, angin puting beliung dan gempa bumi dengan rumah terdampak bencana berjumlah 4.568 unit.

**Tabel 2.50.**
Data Kejadian Bencana Rumah Korban Terdampak Bencana
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2017

| No | Tahun | Kejadian Bencana (Kali) | Rumah Terdampak Bencana (Unit) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 206 | 1.291 |
| 2 | 2014 | 178 | 1.177 |
| 3 | 2015 | 143 | 565 |
| 4 | 2016 | 192 | 723 |
| 5 | 2017 | 160 | 812 |
| Total | | 879 | 4.568 |

*Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Selatan (tahun 2018*)

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 121.477 unit (tahun 2018) atau sebesar 6,43% terhadap jumlah rumah menunjukkan bahwa pelayanan peningkatan mutu RTLH masih menjadi agenda prioritas.

**Tabel 2.51.**
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Tahun 2014-2017

| No | Tahun | BSPS (Unit) |
|---|---|---|
| 1 | 2014 | na |
| 2 | 2015 | 2.516 |
| 3 | 2016 | 2.989 |
| 4 | 2017 | 3.003 |
| 5 | 2018 | 6.400 |

*Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. Sumsel*

### 2.2.4.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Jenis pelayanan dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi yaitu pelayanan ketenteraman, dan ketertiban umum provinsi.

**Tabel 2.52.**
Capaian Indikator SPM Kententeraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat Sumatera Selatan Tahun 2012-2017

| Indikator Kinerja | REALISASI TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Persentase ketentraman dan kenyamanan lingkungan | 0,32 | 0,11 | 2,43 | 0,60 | 0,23 | 1,4 |
| Persentase meningkatnya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | 0,07 | 0,04 | 1,44 | 0,60 | 0,22 | 0,73 |
| Persentase meningkatnya ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat | na | na | 36,34 | 0,30 | 0,11 | 0,34 |
| Jumlah kasus pelanggaran perda | na | na | 68 | 519 | 235 | 406 |

*Sumber: Satpol PP Prov. Sumsel*

### 2.2.4.6. Sosial

Jenis pelayanan dasar pada SPM Sosial Daerah Provinsi terdiri dari:

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti.
b. Rehabilitas sosial dasar anak telantar di dalam panti.
c. Rehabilitas sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti.
d. Rehabilitas sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti.
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

**Tabel 2.53.**
Capaian Indikator SPM Sosial Sumatera Selatan Tahun 2014-2018

| No | Nama Panti Sosial | Jumlah Penghuni Panti Sosial | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| 1 | Lanjut Usia Terlantar | 100 | 100 | 100 | 225 | 210 | 735 |
| 2 | Anak Terlantar | 200 | 200 | 200 | 195 | 170 | 965 |
| 3 | Penyantunan dan Rehabilitasi Sosial Penyandangan Disabilitas | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 81 |
| 4 | Rahabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar dengan Psikotik | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 |

*Sumber: Dinas Sosial Prov. Sumsel*

## 2.3. Aspek Pelayanan Umum

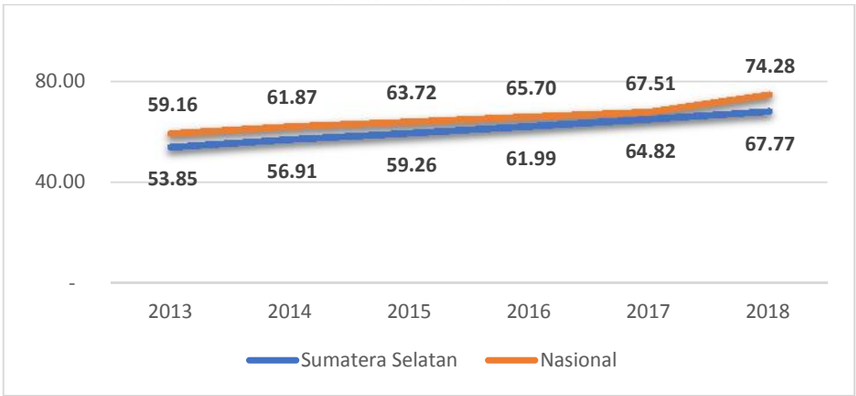
### 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

#### 2.3.1.1. Pendidikan

##### 2.3.1.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pada tahun 2013-2017, APK PAUD di Sumatera Selatan mengalami peningkatan, dari 53,85 menjadi 64,82. Pada tahun 2018 APK PAUD di Sumatera Selatan meningkat kembali menjadi 67,77 dan namun masih di bawah capaian nasional sebesar 74,28. Kondisi tersebut masih perlu ditingkatkan guna mendukung upaya perwujudan pendidikan untuk semua di Sumatera Selatan. Data APK PAUD selengkapnya sebagaimana gambar 2.33.

**Gambar 2.33.**
Angka Partisipasi Kasar PAUD Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2018




*Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI*

##### 2.3.1.1.2. Pendidikan Dasar

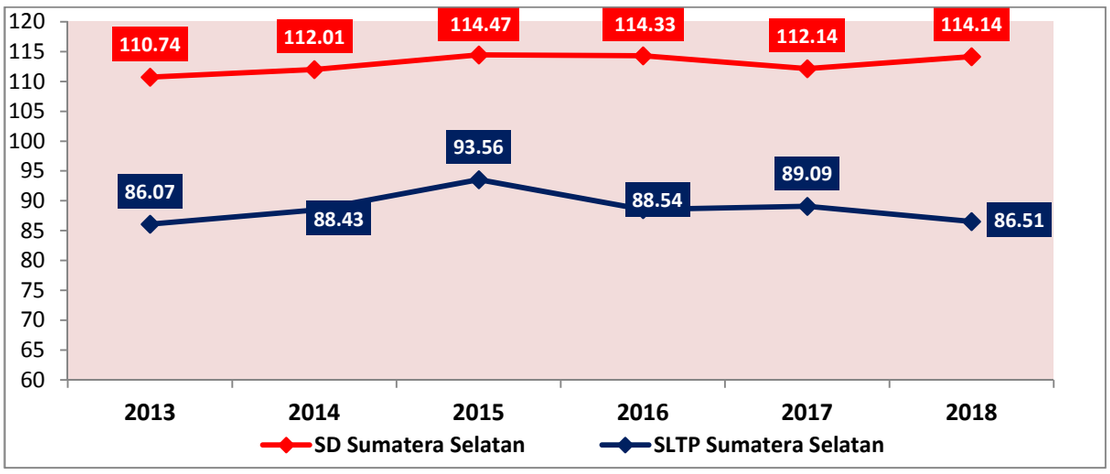
###### 2.3.1.1.2.1. Angka Partisipasi Sekolah

###### 2.3.1.1.2.2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka

Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

**Gambar 2.34.**
Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SD dan SLTP
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018




*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

Angka partisipasi kasar (APK) di Provinsi Sumatera Selatan cenderung meningkat. APK pada jenjang pendidikan SD di tahun 2013 adalah sebesar 110,74% artinya terdapat penduduk 10 persen murid yang tidak berusia 7-12 tahun bersekolah atau masih sekolah di tingkat SD. Sedangkan pada tahun 2018 APK tingkat SD adalah 114,14% yang artinya terdapat 14 persen murid yang masih duduk dibangku SD yang tidak berusia 7-12 tahun. Pada jenjang pendidkan SLTP APK pada tahun 2013 adalah sebesar 86,07% artinya masih kurang dari 100 persen penduduk yang berusia 13-15 tahun yang mengenyam pendidikan SLTP yaitu sekitar 14 persen. Namun pada tahun 2018 nilai APK meningkat menjadi 86,51% yang artinya masih sekitar 14 persen lagi penduduk berusia 13-15 tahun yang tidak mengenyam pendidikan SLTP.

Jika dilihat dari persentase APK SD yang melebihi 100% setiap tahunnya dari tahun 2013 hingga 2018, menunjukan bahwa masih terdapat siswa yang bersekolah di sekolah dasar (SD) yang usianya di atas usia sekolah dasar (SD) yaitu di atas 7-12 tahun. Sedangkan untuk APK SLTP persentase masih dibawah 100% artinya masih ada siswa usia SLTP yang tidak bersekolah di jenjang SLTP atau tidak melanjutkan ke SLTP.

**Tabel 2.54.**
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD dan SLTP Menurut Kabupaten dan Kota
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

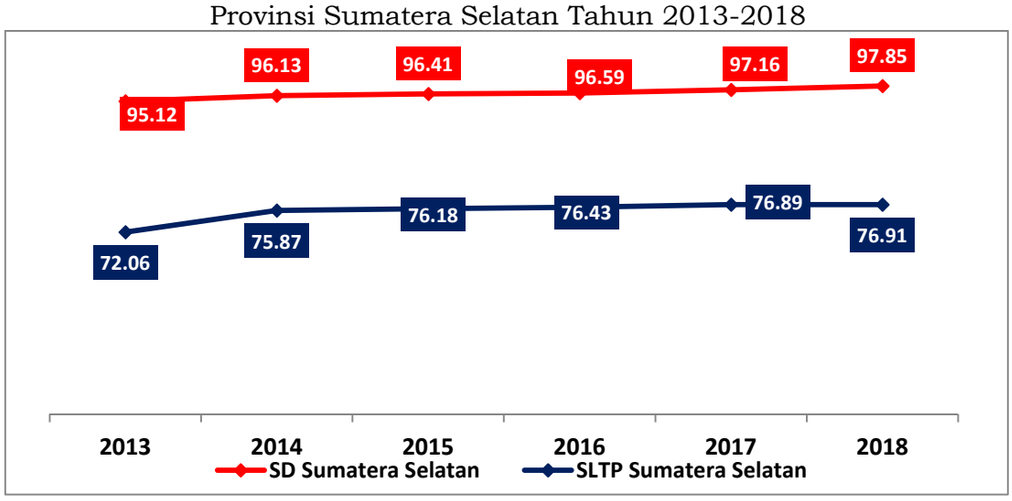
| No | Wilayah Kab/Kota | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SD | SLTP | SD | SLTP | SD | SLTP | SD | SLTP | SD | SLTP | SD | SLTP |
| 1 | Ogan Komering Ulu | 111,23 | 87,61 | 111,85 | 91,09 | 109,03 | 95,52 | 116,55 | 82,71 | 110,16 | 87,88 | na | na |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 111,18 | 70,59 | 110,91 | 83,53 | 115,88 | 92,26 | 119,84 | 80,71 | 112,96 | 89,42 | na | na |
| 3 | Muara Enim | 108,56 | 76,28 | 112,47 | 81,80 | 116,80 | 90,74 | 114,41 | 91,91 | 110,39 | 82,11 | na | na |
| 4 | Lahat | 111,96 | 83,84 | 119,23 | 87,16 | 116,03 | 103,09 | 115,21 | 91,15 | 111,99 | 85,69 | na | na |
| 5 | Musi Rawas | 114,33 | 87,59 | 113,88 | 83,52 | 113,07 | 95,20 | 118,50 | 94,86 | 121,53 | 97,96 | na | na |
| 6 | Musi Banyuasin | 114,42 | 78,19 | 114,49 | 82,30 | 120,54 | 85,92 | 112,67 | 96,42 | 112,24 | 93,38 | na | na |
| 7 | Banyuasin | 110,55 | 81,69 | 113,92 | 86,49 | 117,29 | 85,37 | 116,67 | 80,55 | 113,25 | 81,00 | na | na |
| 8 | OKU Selatan | 113,74 | 80,19 | 111,10 | 85,31 | 115,36 | 102,08 | 119,27 | 93,74 | 112,28 | 92,17 | na | na |
| 9 | OKU Timur | 110,83 | 82,48 | 112,10 | 86,11 | 107,99 | 93,68 | 116,70 | 76,82 | 115,54 | 88,08 | na | na |
| 10 | Ogan Ilir | 113,58 | 75,52 | 111,05 | 75,52 | 108,93 | 94,66 | 111,02 | 93,90 | 113,51 | 84,66 | na | na |
| 11 | Empat Lawang | 110,43 | 86,06 | 119,51 | 87,49 | 115,68 | 92,36 | 117,92 | 91,25 | 110,65 | 98,31 | na | na |
| 12 | Pali | na | na | na | na | na | na | 115,78 | 94,57 | 115,78 | 93,00 | na | na |
| 13 | Musi Rawas Utara | na | na | na | na | na | na | 114,70 | 103,37 | 109,9 | 94,83 | na | na |
| 14 | Kota Palembang | 105,30 | 112,72 | 106,91 | 108,36 | 112,05 | 97,08 | 106,75 | 88,27 | 107,83 | 90,34 | na | na |
| 15 | Kota Prabumulih | 112,76 | 81,92 | 113,41 | 82,18 | 112,89 | 92,17 | 114,40 | 96,01 | 109,74 | 96,95 | na | na |
| 16 | Kota Pagar Alam | 112,21 | 90,93 | 115,08 | 92,49 | 115,89 | 94,94 | 115,77 | 97,13 | 115,56 | 91,94 | na | na |
| 17 | Kota Lubuk Linggau | 121,41 | 80,42 | 106,08 | 90,60 | 119,05 | 97,26 | 113,94 | 93,80 | 113,14 | 87,44 | na | na |
| **Sumatera Selatan** | | **110,74** | **86,07** | **112,01** | **88,43** | **114,47** | **93,56** | **114,33** | **88,54** | **112,14** | **89,09** | **114,14** | **86,51** |
| **Nasional** | | **107,71** | **85,96** | **108,88** | **88,63** | **110,50** | **91,17** | **109,31** | **90,12** | **108,50** | **90,23** | **108,61** | **91,52** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

**2.3.1.1.2.3. Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

**Gambar 2.35.**
Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SD dan SLTP
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018




*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

Angka Patisipasi murni (APM) penduduk berusia 15 tahun ke atas di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan pada tingkat SD APM sebesar 95,12 persen di tahun 2013 yang artinya terdapat 95 persen penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD. Pada tahun 2018 nilai APM meningkat menjadi 97,85 persen yang artinya terdapat 98 persen penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD. Pada jenjang pendidikan SLTP APK di tahun 2013 adalah 72,06 persen yang artinya terdapat 72 persen penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SLTP dan pada tahun 2018 nilai APK meningkat menjadi 76,91 persen dimana terdapat peningkatan penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di tingkat SLTP. Secara umum di Provinsi Sumatera Selatan untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) hampir semua penduduk telah bersekolah pada tingkat SD tepat pada waktunya. Untuk tingkat SLTP dan SLTA masih ada penduduk Sumatera Selatan yang bersekolah tidak tepat pada waktunya atau tidak sesuai usia SLTP dan SLTA. Hal ini menunjukkan bahwa ketika meningkat pada jenjang SLTP dan SLTA jumlah penduduk yang langsung melanjutkan sekolah tidak seratus persen, hanya sebagian yang langsung melanjutan ke sekolah lanjutan.

**2.3.1.1.2.4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan SMP/MTs**

Pada tahun 2017, Angka partisipasi Murni (APM) taraf pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Sumatera Selatan menunjukkan sudah cukup baik, rata-rata 97,16% telah bersekolah sesuai usia SD atau tepat pada waktunya. Rata-rata semua daerah telah memiliki APM yang baik yaitu mendekati 100%, bahkan untuk Kota Pagaralam, Kabupaten Lahat, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Musi Rawas Utara di Tahun 2017, APM SD/MI telah mencapai 100%.

Secara umum dari tahun 2013 hingga tahun 2017 telah terjadi peningkatan angka partisipasi murni (APM) tingkat SD/MI di Provinsi Sumatera Selatan. Angka Partisipasi Murni (APM) terbesar di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas sebesar 98,58 persen artinya terdapat 99 persen penduduk berusia 7-12 tahun yang mengenyam pendidikan di tingkat SD. Pada tahun 2017 APM terbesar terdapat di Kota Pagaralam, Kabupaten Lahat, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu 100 persen penduduk berusia 7-12 tahun bersekolah di tingkat pendidikan SD. Sedangkan APM terendah di tahun 2017 terdapat di Kota Palembang dimana penduduk yang berusia 7-12 tahun dan bersekolah pada jenjang pendidikan SD hanyalah sebesar 90,15 persen.

**Tabel 2.55.**
Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SD/MI Menurut Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| No. | Kabupaten/kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 95,29 | 96,58 | 94,59 | 98,83 | 99,46 | na |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 96,24 | 96,42 | 99,30 | 98,11 | 96,46 | na |
| 3 | Muara Enim | 95,91 | 96,97 | 98,41 | 98,66 | 98,79 | na |
| 4 | Lahat | 94,53 | 97,36 | 93,34 | 97,64 | 100 | na |
| 5 | Musi Rawas | 98,58 | 98,64 | 98,63 | 99,18 | 98,30 | na |
| 6 | Musi Banyuasin | 98,58 | 98,88 | 98,90 | 99,05 | 99,21 | na |
| 7 | Banyuasin | 96,03 | 97,26 | 98,85 | 97,54 | 98,13 | na |
| 8 | OKU Selatan | 98,15 | 98,53 | 96,20 | 99,33 | 100 | na |
| 9 | OKU Timur | 97,94 | 98,54 | 96,63 | 98,34 | 97,96 | na |
| 10 | Ogan Ilir | 94,09 | 95,21 | 93,51 | 95,32 | 99,03 | na |
| 11 | Empat Lawang | 97,40 | 98,22 | 98,83 | 98,70 | 99,59 | na |
| 12 | PALI | na | na | 96,46 | 98,94 | 99,41 | na |
| 13 | Muratara | na | na | 94,89 | 97,13 | 100 | na |
| 14 | Palembang | 88,06 | 89,76 | 92,70 | 89,01 | 90,15 | na |
| 15 | Prabumulih | 95,90 | 98,57 | 92,71 | 100,00 | 99,29 | na |
| 16 | Pagar Alam | 96,30 | 98,13 | 96,71 | 99,08 | 100 | na |
| 17 | Lubuk Linggau | 94,71 | 95,34 | 96,95 | 98,86 | 99,53 | na |
| **Sumatera Selatan** | | **95,06** | **96,13** | **96,41** | **96,59** | **97,16** | **97,85** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

Di Kota Palembang tingkat APM SD/MI relatif lebih rendah dari Kabupaten/kota lainnya, hal ini dikarenakan banyak penduduk yang besekolah

ditingkat SD sebelum usia mencapai 7 tahun. Hal ini menyebabkan angka APM Kota Palembang setiap tahunnya hanya berkisar antara 88,06% di tahun 2013 hingga 90,15% ditahun 2017.

Secara umum angka partisipasi murni (APM) SMP/MTS di Provinsi Sumatera Selatan relatif lebih rendah dari APM SD/MI. Hal ini terlihat dari APM SMP/MTs pada tahun 2017 di Provinsi Sumatera Selatan yang hanya mencapai 76,89%. Hal ini menunjukan bahwa banyak siswa SLTP yang bersekolah tidak sesuai usia SLTP (13-15 tahun) atau tidak tepat waktu. Jika dibandingkan dari tahun 2013 hingga tahun 2017 APM tingkat SMP/MTs di Sumatera Selatan telah mengalami peningkatan, yang berarti bahwa telah terjadi peningkatan ketepatan waktu sekolah atau sesuai usia di tingkat SLTP.

**Tabel 2.56.**
Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SMP/MTs Menurut Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| No. | Kabupaten/kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 73,53 | 77,61 | 78,00 | 78,67 | 77,08 | na |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 61,02 | 70,57 | 78,07 | 72,96 | 74,43 | na |
| 3 | Muara Enim | 66,44 | 72,08 | 80,05 | 80,25 | 77,83 | na |
| 4 | Lahat | 70,96 | 77,22 | 78,98 | 82,97 | 82,49 | na |
| 5 | Musi Rawas | 78,40 | 78,77 | 83,58 | 89,24 | 87,31 | na |
| 6 | Musi Banyuasin | 69,02 | 74,83 | 69,61 | 83,73 | 83,58 | na |
| 7 | Banyuasin | 70,76 | 72,19 | 67,44 | 71,31 | 74,05 | na |
| 8 | OKU Selatan | 71,64 | 77,96 | 86,99 | 85,12 | 83,48 | na |
| 9 | OKU Timur | 76,76 | 77,37 | 74,75 | 69,32 | 71,76 | na |
| 10 | Ogan Ilir | 59,09 | 66,05 | 75,01 | 76,58 | 75,39 | na |
| 11 | Empat Lawang | 79,38 | 82,25 | 84,34 | 86,49 | 86,38 | na |
| 12 | PALI | na | na | 57,05 | 88,61 | 88,06 | na |
| 13 | Muratara | na | na | 78,37 | 89,08 | 88,29 | na |
| 14 | Palembang | 80,84 | 81,29 | 75,00 | 61,73 | 64,55 | na |
| 15 | Prabumulih | 70,63 | 74,46 | 76,22 | 92,40 | 91,33 | na |
| 16 | Pagar Alam | 77,32 | 87,57 | 83,70 | 93,97 | 91,31 | na |
| 17 | Lubuk Linggau | 68,11 | 79,51 | 80,55 | 85,27 | 83,16 | na |
| **Sumatera Selatan** | | **71,78** | **75,87** | **76,18** | **76,43** | **76,89** | **76,91** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

Angka Partisipasi Murni (APM) terbesar di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 terdapat di Kota Palembang sebesar 80,84 persen artinya terdapat 81 persen penduduk berusia 13-15 tahun yang mengenyam pendidikan di tingkat SLTP. Pada tahun 2017 APM terbesar terdapat di Kota Prabumulih yaitu 91,33 persen penduduk berusia 13-15 tahun bersekolah di tingkat pendidikan SLTP. Sedangkan APM terendah di tahun 2017 terdapat di Kota Palembang dimana penduduk yang berusia 13-15 tahun dan bersekolah pada jenjang pendidikan SLTP hanyalah sebesar 64,55 persen.

### 2.3.1.1.2.5. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Angka partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sesuai. Capaian APS di Provinsi Sumatera Selatan telah menunjukkan hasil yang optimal yang ditunjukkan dengan meningkatnya APS dari tahun ke tahun di Sumatera Selatan. Peningkatan APS mengindikasikan penurunan angka buta huruf serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perkembangan angka partisipasi sekolah di tahun 2013 pada kelompok umur 7-12 tahun adalah 98,52 persen dan meningkat menjadi 99,47 tahun 2014. Begitu juga pada kelompok umur 13-15 dan 16-18 masing-masing APS 89,17 persen dan 60,08 persen pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 93,36 persen dan 67,84 persen pada tahun 2014. Secara keseluruhan perkembangan APS dari tahun 2013 ke tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2018 APS pada kelompok umur 7-12 tahun adalah 99,71 persen, pada kelompok umur 13-15 tahun sebesar 94,41 persen.

**Tabel 2.57.**
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| No | Jenjang Pendidikan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD/MI | | | | | | |
| 1.1 | Jumlah murid 7-12 tahun | 1.004.230 | 1.054.410 | 1.020.968 | 1.016.663 | 1.015.000 | na |
| 1.2 | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun | 1.019.315 | 1.060.028 | 1.025.789 | 1.020.643 | 1.018.769 | na |
| 1.3 | APS SD/MI | 98,52 | 99,47 | 99,53 | 99,61 | 99,63 | 99,71 |
| 2. | SMP/MTs | | | | | | |
| 2.1 | Jumlah murid usia 13-15 tahun | 405.840 | 413.453 | 415.247 | 429.198 | 430.159 | na |
| 2.2 | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | 455.130 | 442.857 | 444.019 | 458.153 | 457.567 | na |
| 2.3 | APS SMP/MTs | 89,17 | 93,36 | 93,52 | 93,68 | 94,01 | 94,41 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

Berdasarkan APS tahun 2017 di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan, APS tertinggi pada kelompok umur 7-12 tahun atau jenjang pendidikan SD terdapat di Kabupaten Lahat, OKU Selatan, OKU Timur, Musi Rawas Utara yaitu sebesar 100,00 persen. Sedangkan APS terendah pada kelompok umur 7-12 tahun terdapat di Kabupaten Banyuasin sebesar 99,09 persen. APS pada kelompok umur 13-15 tahun tertinggi terdapat di Kabupaten Empat Lawang sebesar 98,64 persen dan terendah terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebesar 88,62 persen.

**Tabel 2.58.**
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten dan Kota
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| No | Wilayah Kab/Kota | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7-12 | 13-15 | 7-12 | 13-15 | 7-12 | 13-15 | 7-12 | 13-15 | 7-12 | 13-15 | 7-12 | 13-15 |
| 1 | Ogan Komering Ulu | 97,70 | 93,06 | 98,95 | 94,06 | 100,00 | 95,18 | 99,14 | 93,31 | 99,46 | 92,35 | na | na |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 97,05 | 82,27 | 99,16 | 87,53 | 100,00 | 91,50 | 100,00 | 86,39 | 99,57 | 88,62 | na | na |
| 3 | Muara Enim | 97,92 | 89,64 | 98,77 | 92,28 | 99,15 | 93,36 | 100,00 | 95,21 | 99,51 | 94,66 | na | na |
| 4 | Lahat | 97,38 | 94,46 | 100,00 | 100,00 | 99,40 | 96,48 | 99,53 | 95,14 | 100 | 94,26 | na | na |
| 5 | Musi Rawas | 99,72 | 90,80 | 99,47 | 95,02 | 98,63 | 96,29 | 100,00 | 96,67 | 99,45 | 95,71 | na | na |
| 6 | Musi Banyuasin | 99,14 | 82,43 | 99,70 | 90,85 | 99,44 | 90,52 | 99,54 | 96,76 | 99,92 | 95,56 | na | na |
| 7 | Banyuasin | 97,44 | 86,92 | 99,38 | 91,18 | 100,00 | 88,31 | 99,25 | 90,99 | 99,09 | 89,94 | na | na |
| 8 | OKU Selatan | 99,20 | 88,91 | 100,00 | 91,60 | 98,55 | 95,25 | 100,00 | 90,21 | 100 | 91,76 | na | na |
| 9 | OKU Timur | 99,24 | 86,04 | 100,00 | 93,44 | 99,67 | 95,11 | 99,60 | 92,82 | 100 | 93,81 | na | na |
| 10 | Ogan Ilir | 98,86 | 85,18 | 99,06 | 87,58 | 99,23 | 88,12 | 99,56 | 89,09 | 99,70 | 90,91 | na | na |
| 11 | Empat Lawang | 97,88 | 92,05 | 98,92 | 98,13 | 99,38 | 97,76 | 100,00 | 97,06 | 99,59 | 98,64 | na | na |
| 12 | Pali | na | na | na | na | 96,75 | 85,99 | 99,29 | 94,84 | 99,41 | 93,70 | na | na |
| 13 | Musi Rawas Utara | na | na | na | na | 100,00 | 91,01 | 99,30 | 96,10 | 100 | 95,81 | na | na |
| 14 | Kota Palembang | 99,20 | 95,08 | 99,69 | 97,94 | 100,00 | 95,89 | 99,36 | 95,94 | 99,64 | 97,45 | na | na |
| 15 | Kota Prabumulih | 99,44 | 89,07 | 100,00 | 94,70 | 99,42 | 97,02 | 100,00 | 98,02 | 99,29 | 97,24 | na | na |
| 16 | Kota Pagar Alam | 100,00 | 93,28 | 100,00 | 98,46 | 99,54 | 96,84 | 100,00 | 98,10 | 100 | 97,49 | na | na |
| 17 | Kota Lubuk Linggau | 100,00 | 92,72 | 100,00 | 94,41 | 100,00 | 97,83 | 99,63 | 97,22 | 99,53 | 96,42 | na | na |
| **Sumatera Selatan** | | **98,52** | **89,17** | **99,47** | **93,36** | **99,53** | **93,52** | **99,61** | **93,68** | **99,63** | **94,01** | **99,71** | **94,41** |
| **Nasional** | | **98,42** | **90,81** | **98,92** | **94,44** | **99,09** | **94,72** | **99,09** | **94,88** | **99,14** | **95,08** | **99,22** | **95,36** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.1.1.2.6. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Kondisi pendidikan ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta ketersediaan tenaga pengajar. Sejalan dengan peningkatan angka partisipasi sekolah, perluasan daya tampung ruang kelas dan penyediaan fasilitas belajar siswa menjadi persyaratan keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar. Perluasan daya tampung dilakukan dengan pembangunan dan penambahan gedung kelas baru, rehabilitasi atau perbaikan gedung SD, SLTP yang rusak berat serta penempatan guru kontrak di sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru.

**Tabel 2.59.**
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017

| No | Jenjang Pendidikan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD/MI | | | | | |
| 1.1 | Jumlah gedung sekolah | 4.588 | 4.616 | 5.092 | 5.167 | 5.182 |
| 1.2 | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun | 1.019.315 | 1.060.028 | 1.025.789 | 1.020.643 | 1.018.769 |
| 1.3 | Rasio | 45,01 | 43,55 | 49,64 | 50,62 | 50,87 |
| 2. | SMP/MTs | | | | | |
| 2.1 | Jumlah gedung sekolah | 1.189 | 1.240 | 1.669 | 1.742 | 1.795 |
| 2.2 | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | 455.130 | 442.857 | 444.019 | 458.153 | 457.567 |
| 2.3 | Rasio | 26,12 | 28,00 | 37,59 | 38,02 | 39,23 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

Sarana dan prasarana yang cukup dan memadai berperan penting dalam mendukung pendidikan dimana sarana dan prasarana yang tersedia akan menentukan kualitas pendidikan tersebut yang akan berdampak pada mutu sumber daya manusia yang dihasilkan. Rasio ketersediaan gedung sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah akan menentukan seberapa mencukupinya gedung sekolah yang ada untuk menampung penduduk usia sekolah. Angka rasio menunjukkan tren yang terus menurun, hal ini berarti bahwa laju pertambahan jumlah gedung sekolah setiap tahunnya lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertambahan jumlah penduduk usia sekolah.

Secara umum jumlah gedung sekolah di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik pada tingkat SD/ MI maupun pada tingkat SMP/MTs. Hal ini menunjukkan pembangunan sekolah yang lebih baik dan tingkat pendidikan yang lebih maju.

**Tabel 2.60.**
Rasio Penduduk Usia Sekolah Terhadap Ketersediaan Gedung Sekolah di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

| No. | Kabupaten/Kota | SD/MI | | | SMP/MTS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Gedung | Jumlah penduduk Usia 7-12 th | Rasio | Jumlah gedung sekolah | Jumlah penduduk usia 13-15 th | Rasio |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ogan Komering Ulu | 220 | 44.688 | 49,23 | 75 | 20.436 | 36,70 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 527 | 100.894 | 52,23 | 202 | 42.068 | 48,02 |
| 3 | Muara Enim | 418 | 75.670 | 55,24 | 134 | 34.632 | 38,69 |
| 4 | Lahat | 319 | 47.683 | 66,90 | 87 | 23.022 | 37,79 |
| 5 | Musi Rawas | 334 | 47.537 | 70,26 | 96 | 21.115 | 45,47 |
| 6 | Musi Banyuasin | 493 | 91.845 | 53,68 | 190 | 36.780 | 51,66 |
| 7 | Banyuasin | 557 | 106.471 | 52,31 | 182 | 43.138 | 42,19 |
| 8 | Oku Selatan | 294 | 42.599 | 69,02 | 91 | 19.194 | 47,41 |
| 9 | Oku Timur | 505 | 77.067 | 65,53 | 144 | 36.092 | 39,90 |
| 10 | Ogan Ilir | 279 | 49.288 | 56,61 | 120 | 25.567 | 46,94 |
| 11 | Empat Lawang | 192 | 30.167 | 63,65 | 42 | 13.093 | 32,08 |
| 12 | PALI | 126 | 28.086 | 44,86 | 50 | 11.602 | 43,10 |
| 13 | Mura Utara | 141 | 24.950 | 56,51 | 44 | 10.451 | 42,10 |
| 14 | Palembang | 463 | 184.770 | 25,06 | 242 | 86.783 | 27,89 |
| 15 | Prabumulih | 100 | 22.617 | 44,21 | 29 | 11.158 | 25,99 |
| 16 | Pagar Alam | 99 | 16.411 | 60,33 | 27 | 7.905 | 34,16 |
| 17 | Lubuk Linggau | 115 | 27.994 | 41,08 | 40 | 14.230 | 28,11 |
| **Sumatera Selatan** | | **5.182** | **1.018.769** | **50,87** | **1.795** | **457.567** | **39,23** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

Pada tingkat pendidikan SD/MI rasio penduduk usia sekolah pada tahun 2013 adalah 45,01 yang artinya dalam 45 gedung sekolah dapat menampung 10.000 penduduk usia sekolah atau sama dengan 1 gedung sekolah menampung 222 penduduk usia sekolah. Sedangkan pada tahun 2017 rasio penduduk usia sekolah terhadap sekolah adalah 50,87 yang artinya 51 gedung sekolah dapat menampung 10.000 penduduk usia sekolah atau satu gedung dapat menampung 197 penduduk usia sekolah. Pada tahun 2013 di tingkat pendidikan SMP/MTs rasio penduduk usia sekolah terhadap ketersediaan bangunan sekolah adalah 26,12 yang artinya 26 gedung sekolah menampung 10.000 penduduk usia sekolah setingkat SMP/MTs atau satu gedung sekolah menampung 383 penduduk usia sekolah. Rasio gedung sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP di tahun 2017 yaitu 39,23 yang artinya 39 gedung sekolah menampung 10.000 penduduk usia sekolah atau satu gedung sekolah dapat menampung 255 penduduk usia sekolah.

Pada tahun 2017, jumlah gedung sekolah pada tingkat SD/MI terbanyak terdapat di Kabupaten Banyuasin sebanyak 557 unit dengan jumlah penduduk usia sekolah terbanyak terdapat di Kota Palembang sebanyak 184.770 jiwa. Sedangkan jumlah bangunan sekolah yang paling sedikit terdapat di Kota Pagar

Alam sebanyak 99 unit. Jumlah penduduk usia sekolah yang paling sedikit terdapat di Kota Pagar Alam sebesar 16.411 penduduk usia sekolah. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs jumlah bangunan sekolah terbanyak terdapat di Kota Palembang sebanyak 242 unit dengan jumlah penduduk usia sekolah terbanyak terdapat di Kota Palembang sebanyak 86.783 jiwa penduduk usia sekolah. Sedangkan jumlah bangunan sekolah yang paling sedikit pada jenjang pendidikan SMP/MTs terdapat di Kota Pagar Alam sebanyak 27 unit dengan jumlah penduduk usia sekolah terkecil juga terdapat di Kota Pagar Alam sebesar 7.905 penduduk usia sekolah.

Rasio jumlah penduduk usia sekolah terhadap jumlah bangunan sekolah pada tingkat SD/MI yang terbesar terdapat di Kabupaten Musi Rawas yaitu 70,26 yang artinya 70 gedung sekolah menampung 10.000 penduduk usia sekolah atau 1 unit sekolah mampu menampung 142 penduduk usia sekolah. Pada tingkat SMP/MTs rasio jumlah penduduk usia sekolah terhadap jumlah bangunan sekolah yang ada yang paling besar terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 51,66 yang artinya 52 gedung sekolah menampung 10.000 penduduk usia sekolah atau 1 bangunan sekolah SMP/MTs dapat menampung 194 penduduk usia sekolah.

**2.3.1.1.2.7. Rasio Guru dan Murid SD/MI dan SMP/MTs**

Rasio guru dan murid menunjukkan perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru yang ada di Sumatera Selatan. Jumlah guru di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 pada tingkat pendidikan SD/MI adalah 62.428 orang sedangkan pada tahun 2017 justru mengalami penurunan menjadi 60.627 orang. Sedangkan jumlah murid mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 1.004.230 orang menjadi 1.015.000 orang pada tahun 2017. Rasio murid terhadap guru di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 adalah 1:16,08 yang artinya 1 guru dapat mengajar 16 murid SD/MI. Sedangkan pada tahun 2017 rasio murid terhadap guru adalah 16,74 yang artinya 1 guru terhadap 17 murid.

Pada jenjang pendidikan SMP/MTs jumlah guru pada tahun 2013 di Provinsi Sumatera Selatan adalah 23.788 orang dan meningkat menjadi 31.972 orang pada tahun 2017. Jumlah murid juga meningkat dari tahun 2013 sebesar 405.840 orang menjadi 430.159 orang pada tahun 2017. Rasio murid terhadap guru pada tahun 2013 di Provinsi Sumatera Selatan adalah 1:17,06 yang artinya 1 guru dapat mengajar 17 murid, sedangkan pada tahun 2017 rasio murid terhadap guru sebesar 1:13,45 yang artinya 1 guru dapat mengajar 13 siswa SMP/MTS.

**Tabel 2.61.**
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017

| No | Jenjang Pendidikan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD/MI | | | | | |
| 1.1 | Jumlah guru | 62.428 | 63.384 | 67.065 | 65.243 | 60.627 |
| 1.2 | Jumlah murid | 1.004.230 | 1.054.410 | 1.020.968 | 1.016.663 | 1.015.000 |
| 1.3 | Rasio | 1 : 16,08 | 1 : 16,63 | 1 : 15,22 | 1 : 15,58 | 1 : 16,74 |
| 2. | SMP/MTs | | | | | |
| 2.1 | Jumlah guru | 23.788 | 25.476 | 37.334 | 32.312 | 31.972 |
| 2.2 | Jumlah murid | 405.840 | 413.453 | 415.247 | 429.198 | 430.159 |
| 2.3 | Rasio | 1 : 17,06 | 1 : 16,23 | 1 : 11,12 | 1 : 13,28 | 1 : 13,45 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

Pada tahun 2017, Rasio jumlah murid terhadap guru pada masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan pada jenjang pendidikan SD/MI jumlah guru terbanyak terdapat di kota Palembang sebesar 8.449 orang guru dengan jumlah murid terbanyak juga terdapat di Kota Palembang sebanyak 184.105 murid sehingga rasio murid terhadap guru di Kota Palembang adalah sebesar 21,79 yang artinya 1 orang guru terhadap 22 orang murid. Hal ini masih belum sesuai dengan standar minimal peserta didik terhadap tenaga pengajar pada peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 dimana jumlah jumlah murid terhadap guru maksimal adalah 1:20 dimana 1 guru untuk 20 siswa.

**Tabel 2.62.**
Rasio Murid Terhadap Jumlah Guru Pada Kelompok Sekolah
SD/MI dan SMP/MTs Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

| No. | Kabupaten/Kota | Sd/MI | | | SMP/MTS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ogan Komering Ulu | 2.841 | 44.447 | 15,64 | 1.593 | 18.873 | 11,85 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 5.883 | 100.461 | 17,08 | 2.917 | 37.281 | 12,78 |
| 3 | Muara Enim | 4.439 | 75.300 | 16,96 | 2.370 | 32.783 | 13,83 |
| 4 | Lahat | 4.462 | 47.683 | 10,69 | 1.766 | 21.701 | 12,29 |
| 5 | Musi Rawas | 2.956 | 47.276 | 15,99 | 1.598 | 20.210 | 12,65 |
| 6 | Musi Banyuasin | 5.093 | 91.772 | 18,02 | 2.352 | 35.147 | 14,94 |
| 7 | Banyuasin | 5.975 | 105.503 | 17,66 | 2.831 | 38.799 | 13,71 |
| 8 | Oku Selatan | 3.177 | 42.599 | 13,41 | 1.480 | 17.613 | 11,90 |
| 9 | Oku Timur | 4.964 | 77.067 | 15,53 | 2.772 | 33.858 | 12,21 |
| 10 | Ogan Ilir | 3.385 | 49.141 | 14,52 | 2.070 | 23.243 | 11,23 |
| 11 | Empat Lawang | 2.193 | 30.044 | 13,70 | 949 | 12.915 | 13,61 |
| 12 | PALI | 1.329 | 27.921 | 21,01 | 702 | 10.872 | 15,49 |
| 13 | Mura Utara | 1.436 | 24.950 | 17,37 | 898 | 10.014 | 11,15 |
| 14 | Palembang | 8.449 | 184.105 | 21,79 | 5.093 | 84.571 | 16,61 |
| 15 | Prabumulih | 1.236 | 22.457 | 18,17 | 895 | 10.851 | 12,12 |
| 16 | Pagar Alam | 1.268 | 16.411 | 12,94 | 710 | 7.707 | 10,85 |
| 17 | Lubuk Linggau | 1.541 | 27.863 | 18,08 | 976 | 13.721 | 14,06 |
| **Sumatera Selatan** | | **60.627** | **1.015.000** | **16,74** | **31.972** | **430.159** | **13,45** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

Rasio guru dan murid terendah pada jenjang pendidikan SD terdapat di Kabupaten Lahat sebesar 10,69 dimana 1 guru terhadap 11 orang murid. Pada jenjang pendidikan SMP/MTS rasio guru terhadap murid terendah terdapat di Kota Pagar Alam sebesar 10,85 dan rasio murid dan guru tertinggi juga terdapat di Kota Palembang yaitu sebesar 16,61. Angka ini telah memenuhi standar dari peraturan pemerintah dengan standar minimal rasio guru terhadap murid adalah sebesar 1:20.

#### 2.3.1.1.3. Pendidikan Menengah

##### 2.3.1.1.3.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA

APK pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA lebih kecil dibandingkan APK pada jenjang pendidikan SD maupun SMP/MTs dimana pada tahun 2013 nilai APK SMA/SMK/MA adalah 63,78 artinya masih terdapat 36% penduduk berusia 16-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan SMA/SMK/MA. Meningkatnya APK untuk SMA/SMK/MA di tahun 2017 menjadi sebesar 83,44 menunjukkan sudah semakin banyaknya penduduk berusia 16-18 tahun yang bersekolah di tingkat SMA/SMK/MA dan hanya tersisa sekitar 17% yang belum bersekolah di tingkat SMA/SMK/MA pada umur yang sesuai, namun pada tahun 2018 APK SMA/SMK/MA menurun menjadi 77,40.

**Tabel 2.63.**
APK Tingkat Pendidikan SMA/SMK/MA Menurut Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| No | Wilayah Kab/Kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 59,21 | 71,28 | 82,49 | 79,09 | 77,93 | - |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 48,83 | 59,32 | 60,99 | 67,96 | 73,5 | - |
| 3 | Muara Enim | 69,43 | 70,16 | 65,71 | 87,01 | 93 | - |
| 4 | Lahat | 87,86 | 92,04 | 84,13 | 88,09 | 84,49 | - |
| 5 | Musi Rawas | 48,00 | 54,94 | 69,18 | 73,59 | 68,91 | - |
| 6 | Musi Banyuasin | 42,27 | 67,72 | 72,73 | 67,65 | 77,29 | - |
| 7 | Banyuasin | 49,67 | 61,66 | 53,91 | 80,32 | 73,17 | - |
| 8 | OKU Selatan | 65,78 | 71,43 | 60,78 | 74,31 | 75,09 | - |
| 9 | OKU Timur | 59,31 | 70,43 | 76,21 | 76,03 | 81,24 | - |
| 10 | Ogan Ilir | 71,93 | 74,18 | 80,31 | 72,71 | 75,63 | - |
| 11 | Empat Lawang | 74,63 | 82,43 | 71,23 | 95,90 | 84,01 | - |
| 12 | Pali | na | na | na | 69,75 | 79,94 | - |
| 13 | Musi Rawas Utara | na | na | na | 72,73 | 64,24 | - |
| 14 | Kota Palembang | 73,00 | 80,19 | 84,31 | 101,77 | 104,59 | - |
| 15 | Kota Prabumulih | 76,66 | 87,54 | 107,23 | 102,28 | 81,09 | - |
| 16 | Kota Pagar Alam | 81,98 | 83,87 | 87,20 | 95,82 | 79,56 | - |
| 17 | Kota Lubuk Linggau | 62,87 | 81,75 | 91,05 | 96,24 | 72,51 | - |
| **Sumatera Selatan** | | **63,78** | **72,51** | **73,18** | **82,51** | **83,44** | **77,40** |
| **Nasional** | | **66,61** | **74,26** | **78,02** | **80,89** | **82,84** | **80,68** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

**2.3.1.1.3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA**

Jika dilihat dari angka partisipasi murni (APM) tingkat SMA/SMK/MA di Provinsi Sumatera Selatan, tergolong masih rendah. Pada tahun 2018, hanya 59,87% penduduk usia SMA/SMK/MA yaitu antara 16-18 tahun yang bersekolah tepat pada waktunya.

**Tabel 2.64.**
APM Tingkat Pendidikan SMA/SMK/MA Menurut Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| No. | Kabupaten/Kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 54,00 | 60,34 | 64,96 | 55,30 | 56,59 | na |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 32,10 | 40,48 | 46,89 | 55,10 | 57,95 | na |
| 3 | Muara Enim | 48,07 | 52,81 | 53,92 | 59,98 | 61,88 | na |
| 4 | Lahat | 70,27 | 74,31 | 67,97 | 67,65 | 68,78 | na |
| 5 | Musi Rawas | 45,33 | 46,70 | 60,34 | 55,38 | 57,63 | na |
| 6 | Musi Banyuasin | 38,66 | 52,39 | 51,91 | 54,08 | 55,67 | na |
| 7 | Banyuasin | 41,08 | 51,04 | 46,26 | 57,70 | 53,88 | na |
| 8 | OKU Selatan | 55,97 | 61,05 | 50,85 | 63,33 | 61,04 | na |
| 9 | OKU Timur | 55,99 | 59,90 | 56,35 | 56,84 | 55,11 | na |
| 10 | Ogan Ilir | 48,35 | 51,33 | 63,42 | 54,14 | 57,03 | na |
| 11 | Empat Lawang | 63,40 | 68,53 | 58,35 | 62,41 | 63,09 | na |
| 12 | PALI | na | na | 46,14 | 57,43 | 57,18 | na |
| 13 | Muratara | na | na | 54,22 | 57,06 | 55,96 | na |
| 14 | Palembang | 59,32 | 65,21 | 67,44 | 60,95 | 61,15 | na |
| 15 | Prabumulih | 60,24 | 65,64 | 78,15 | 63,71 | 64,89 | na |
| 16 | Pagar Alam | 63,35 | 74,88 | 72,57 | 64,95 | 65,33 | na |
| 17 | Lubuk Linggau | 57,65 | 64,93 | 72,40 | 62,23 | 60,40 | na |
| | Sumatera Selatan | 50,92 | 57,92 | 58,27 | 58,59 | 59,06 | 59,87 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/SMK/MA yang terbesar di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 terdapat di Kabupaten Lahat sebesar 70,27 persen artinya terdapat 70 persen penduduk berusia 16-18 tahun yang mengenyam pendidikan di tingkat SMA/SMK/MA. Pada tahun 2017 APM terbesar terdapat di Kabupaten Lahat yaitu 68,78 persen penduduk berusia 16-18 tahun bersekolah di tingkat pendidikan SMA/SMK/MA. Sedangkan APM terendah di tahun 2017 terdapat di Kabupaten Banyuasin dimana penduduk yang berusia 16-18 tahun dan bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA hanyalah sebesar 53,88 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk usia SMA/SMK/MA yang tidak melanjutkan ke sekolah SLTA pada waktunya, hal ini menunjukkan indikasi masih banyaknya penduduk yang tidak langsung melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMA/SMK/MA.

**2.3.1.1.3.3. Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA**

Angka partisipasi sekolah adalah perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih sekolah dengan jumlah seluruh penduduk

pada kelompok usia yang bersesuaian. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2013 adalah 60,08 persen dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 69,55 persen. Secara keseluruhan APS pada tingkat pendidikan SMA/SMK/MA terus meningkat dari tahun ke tahun pada periode 2013-2018.

**Tabel 2.65.**
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| Jenjang Pendidikan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SMA/SMK/MA** | | | | | | |
| Jumlah murid usia 16-18 tahun | 247.806 | 259.331 | 212.714 | 344.215 | 351.527 | na |
| Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun | 412.460 | 382.269 | 310.985 | 501.260 | 509.090 | na |
| APS SMA/SMK/MA | 60,08 | 67,84 | 68,40 | 68,67 | 69,05 | 69,65 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat SMA/SMK/MA yang terbesar di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 terdapat di Kabupaten Lahat sebesar 77,93 persen sedangkan yang terkecil di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 42,62 persen. Pada tahun 2017 APS terbesar terdapat di Kabupaten Empat Lawang sebesar 76,03 persen sedangkan yang terkecil di Kabupaten Banyuasin sebesar 60,2 persen.

**Tabel 2.66.**
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| No | Wilayah Kab/Kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16 - 18 | 16 - 18 | 16 - 18 | 16 - 18 | 16 - 18 | 16 - 18 |
| 1 | Ogan Komering Ulu | 65,20 | 73,56 | 76,56 | 60,55 | 69,81 | - |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 42,62 | 50,45 | 57,40 | 60,24 | 67,79 | - |
| 3 | Muara Enim | 55,55 | 63,56 | 66,39 | 70,73 | 66,62 | - |
| 4 | Lahat | 77,93 | 82,65 | 76,62 | 73,17 | 72,15 | - |
| 5 | Musi Rawas | 54,15 | 55,04 | 68,06 | 61,42 | 74,02 | - |
| 6 | Musi Banyuasin | 46,17 | 60,22 | 65,36 | 67,41 | 68,07 | - |
| 7 | Banyuasin | 49,46 | 62,15 | 53,39 | 65,47 | 60,2 | - |
| 8 | OKU Selatan | 63,16 | 66,78 | 60,99 | 70,85 | 69,34 | - |
| 9 | OKU Timur | 60,87 | 67,58 | 68,28 | 64,32 | 68,55 | - |
| 10 | Ogan Ilir | 61,80 | 65,97 | 69,93 | 62,85 | 64,35 | - |
| 11 | Empat Lawang | 68,85 | 75,20 | 65,24 | 66,89 | 76,03 | - |
| 12 | Pali | na | na | 59,49 | 62,87 | 63,89 | - |
| 13 | Musi Rawas Utara | na | na | 59,07 | 71,34 | 63,16 | - |
| 14 | Kota Palembang | 71,57 | 76,44 | 78,98 | 80,18 | 74,4 | - |
| 15 | Kota Prabumulih | 65,07 | 76,09 | 86,85 | 69,66 | 74,39 | - |
| 16 | Kota Pagar Alam | 69,38 | 78,11 | 78,04 | 69,20 | 68,32 | - |
| 17 | Kota Lubuk Linggau | 68,89 | 72,48 | 80,67 | 73,29 | 69,13 | - |
| **Sumatera Selatan** | | **60,08** | **67,84** | **68,40** | **68,67** | **69,05** | **69,65** |
| **Nasional** | | **63,84** | **70,31** | **70,61** | **70,83** | **71,42** | **71,99** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

#### 2.3.1.1.3.4. Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah SMA/SMK/MA

Pada tingkat pendidikan SMA/MA/SMK rasio penduduk usia sekolah pada tahun 2013 adalah 19,32 yang artinya dalam 19 gedung sekolah menampung 10.000 penduduk usia sekolah atau sama dengan 1 gedung sekolah menampung 518 penduduk usia sekolah. Sedangkan pada tahun 2017 rasio penduduk usia sekolah terhadap sekolah adalah 22,86 yang artinya 23 gedung sekolah dapat menampung 10.000 penduduk usia sekolah atau satu gedung sekolah menampung 437 penduduk usia sekolah.

**Tabel 2. 67.**
Ketersediaan Sekolah Pada Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017

| No | Jenjang Pendidikan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA/MA/SMK | | | | | |
| 1.1 | Jumlah gedung sekolah | 797 | 840 | 721 | 1.174 | 1.164 |
| 1.2 | Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun | 412.460 | 382.269 | 310.985 | 501.260 | 509.090 |
| 1.3 | Rasio | 1 : 19,32 | 1 : 21,97 | 1 : 23,18 | 1 : 23,42 | 1 : 22,86 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

**Tabel 2. 68.**
Rasio Penduduk Usia Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Pada Jenjang SMA/MA/SMK di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

| No. | Kabupaten/Kota | SMA/MA/SMK | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Gedung | Jumlah penduduk Usia 16-18 th | Rasio |
| 1 | Ogan Komering Ulu | 77 | 24.231 | 31,78 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 100 | 38.116 | 26,24 |
| 3 | Muara Enim | 65 | 36.533 | 17,79 |
| 4 | Lahat | 57 | 27.541 | 20,70 |
| 5 | Musi Rawas | 45 | 18.590 | 24,21 |
| 6 | Musi Banyuasin | 98 | 36.843 | 26,60 |
| 7 | Banyuasin | 106 | 43.209 | 24,53 |
| 8 | Oku Selatan | 46 | 16.806 | 27,37 |
| 9 | Oku Timur | 109 | 39.615 | 27,51 |
| 10 | Ogan Ilir | 78 | 27.591 | 28,27 |
| 11 | Empat Lawang | 21 | 11.424 | 18,38 |
| 12 | PALI | 36 | 13.315 | 27,04 |
| 13 | Mura Utara | 19 | 9.986 | 19,03 |
| 14 | Palembang | 220 | 117.949 | 18,65 |
| 15 | Prabumulih | 29 | 14.796 | 19,60 |
| 16 | Pagar Alam | 19 | 10.363 | 18,33 |
| 17 | Lubuk Linggau | 39 | 19.972 | 19,53 |
| **Sumatera Selatan** | | **1.164** | **509.090** | **22,86** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

Pada tahun 2017, jumlah gedung sekolah pada tingkat SMA/MA/SMK terbanyak terdapat di Kota Palembang sebanyak 220 unit dengan jumlah penduduk usia sekolah terbanyak juga terdapat di Kota Palembang sebanyak 117.949 jiwa. Sedangkan jumlah bangunan sekolah yang paling sedikit terdapat di Kota Pagar Alam dan Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu masing-masing sebanyak 19 unit. Jumlah penduduk usia sekolah yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 9.986 jiwa.

Rasio jumlah penduduk usia sekolah terhadap jumlah bangunan sekolah pada tingkat SMA/MA/SMK pada tahun 2017 yang terbesar terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu 31,78 yang artinya 32 gedung sekolah menampung 10.000 penduduk usia sekolah atau 1 unit sekolah mampu menampung 315 penduduk usia sekolah. Sedangkan rasio yang terkecil terdapat di Kabupaten Muara Enim yaitu 17,79 yang artinya 18 gedung sekolah menampung 10.000 penduduk usia sekolah atau 1 unit sekolah dapat menampung 562 jiwa penduduk usia sekolah.

#### 2.3.1.1.3.5. Rasio Guru dan Siswa SMA/MA, SMK

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan keter-sediaan jumlah pendidik dan jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai proses pembelajaran yang berkualitas.

Pada periode waktu tahun 2016-2018, rasio guru (PNS + non PNS) terhadap murid SM di Sumatera Selatan meningkat dari 1 : 14 menjadi 1 : 15. Sedangkan rasio guru (PNS + non PNS) terhadap murid SMK juga meningkat dari 1 : 15 menjadi 1 : 17. Rasio tersebut menunjukkan kondisi ketersediaan guru terhadap murid cukup memadai. Permasalahannya adalah belum terwujudnya pemerataan distribusi guru khususnya antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Namun demikian untuk rasio guru PNS dan murid masih belum memadai, dapat dilihat rasio guru PNS dan murid untuk SMA sebesar 1 : 37 dan untuk SMK sebesar 1 : 57.

**Tabel 2. 69.**
Rasio Guru Pada Jenjang Pendidikan SMA, SMK
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018

| No | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA | | | |
| 1.1 | Jumlah guru | 13.142 | 14.383 | 13.379 |
| 1.2 | Jumlah murid | 188.876 | 204.560 | 204.034 |
| 1.3 | Rasio guru dan Murid | 1 : 14 | 1 : 14 | 1 : 15 |
| 1.4 | **Rasio Guru PNS dan Murid** | na | 1 : 32 | 1 : 37 |
| 2. | SMK | | | |
| 2.1 | Jumlah guru | 6.198 | 7.301 | 7.045 |

| No | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Jumlah murid | 93.648 | 111.653 | 116.392 |
| 2.3 | Rasio guru dan Murid | 1 : 15 | 1 : 15 | 1:17 |
| 2.4 | **Rasio Guru PNS dan Murid** | na | 1 : 47 | 1 : 57 |

*Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemdikbud*

**Tabel 2. 70.**
Rasio Guru dan Murid Menurut Kabupaten/Kota Pada Jenjang SMA/MA dan SMK di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

| No. | Kabupaten/Kota | SMA | | | SMK | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ogan Komering Ulu | 729 | 10.642 | 1 : 15 | 307 | 4.854 | 1 : 16 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 915 | 14.158 | 1 : 15 | 565 | 8.698 | 1 : 15 |
| 3 | Muara Enim | 755 | 12.863 | 1 : 17 | 579 | 9.426 | 1 : 16 |
| 4 | Lahat | 1.036 | 13.045 | 1 : 13 | 464 | 5.438 | 1 : 12 |
| 5 | Musi Rawas | 636 | 10.226 | 1 : 16 | 142 | 2.225 | 1 : 16 |
| 6 | Musi Banyuasin | 866 | 15.561 | 1 : 18 | 446 | 8.223 | 1 : 18 |
| 7 | Banyuasin | 1.058 | 16.032 | 1 : 15 | 389 | 5.825 | 1 : 15 |
| 8 | Oku Selatan | 617 | 7.713 | 1 : 13 | 185 | 2.638 | 1 : 14 |
| 9 | Oku Timur | 838 | 12.157 | 1 : 15 | 694 | 9.763 | 1 : 14 |
| 10 | Ogan Ilir | 667 | 8.283 | 1 : 12 | 347 | 5.874 | 1 : 17 |
| 11 | Empat Lawang | 455 | 6.633 | 1 : 15 | 142 | 2.124 | 1 : 15 |
| 12 | PALI | 393 | 6.075 | 1 : 15 | 146 | 2.475 | 1 : 17 |
| 13 | Mura Utara | 300 | 4.978 | 1 : 17 | 44 | 742 | 1 : 17 |
| 14 | Palembang | 2.769 | 48. 031 | 1 : 17 | 1.804 | 36. 182 | 1 : 20 |
| 15 | Prabumulih | 422 | 5.455 | 1 : 13 | 325 | 5.192 | 1 : 16 |
| 16 | Pagar Alam | 564 | 7.871 | 1 : 14 | 277 | 4.608 | 1 : 17 |
| 17 | Lubuk Linggau | 564 | 7.871 | 1 : 14 | 277 | 4.608 | 1 : 17 |
| Sumatera Selatan | | 13.379 | 204.034 | 1 : 15 | 7.045 | 116.392 | 1 : 17 |

*Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemdikbud 2018*

Rasio guru dan murid terendah pada jenjang pendidikan SMA terdapat di Kabupaten Ogan Ilir sebesar 1 : 12 dimana 1 guru terhadap 12 orang murid. Pada jenjang pendidikan SMK rasio guru terhadap murid terendah terdapat di Kabupaten Lahat sebesar 1 : 12 dimana 1 orang guru terhadap 12 orang murid. Sedangkan rasio guru terhadap murid tertinggi terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu sebesar 1 : 18 yang artinya 1 orang guru terhadap 18 orang murid untuk jenjang SMA dan rasio tertinggi untuk jenjang SMK terdapat di Kota Palembang yaitu sebesar 1 : 20 yang artinya 1 orang guru terhadap 20 orang murid. Secara keseluruhan angka rasio guru (PNS + Non PNS) terhadap murid di Provinsi Sumatera Selatan memenuhi standar ideal rasio guru terhadap murid untuk SMA sebesar 1:20, namun untuk SMK hanya beberapa kabupaten/kota yang memenuhi kondisi ideal 1 : 15 yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Lahat, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan

Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Empat Lawang.

### 2.3.1.1.3.6. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Kualitas pendidikan didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa.

Pada periode waktu tahun 2018 jumlah ruang kelas yang dalam kondisi baik untuk jenjang SMA sebanyak 2.934, kondisi ruasak ringan sebanyak 3.483 dan kondisi berat sebanyak 315 ruang untuk 6.655 rombongan belajar siswa, sedangkan untuk jenjang SMK ruang kelas yang kondisi baik sebanyak 1.727 ruang, rusak ringan sebanyak 1.736 ruang dan rusak berat sebanyak 66 ruang dengan rombongan belajar 3.881. Untuk jenjang SLB ruang kelas yang dalam kondisi baik sebanyak 184 ruang, rusak ringan sebanyak 125 ruang dan rusak berat sebanyak 11 ruang dengan rombongan belajar sebanyak 469.

**Tabel 2. 71.**
Kondisi Sarana dan Prasarana Jenjang SMA, SMK dan SLB
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018

| Sarana dan Prasarana | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SMA | SMK | SLB | SMA | SMK | SLB | SMA | SMK | SLB | SMA | SMK | SLB |
| **Rombel** | 5.937 | 2.982 | 401 | 6.143 | 3.248 | 412 | 6.406 | 3.557 | 464 | 6.655 | 3.881 | 469 |
| **Ruang Kelas** | 6.704 | 2.560 | na | 6.095 | 2.813 | na | 6.457 | 3.128 | 372 | 6.732 | 3.529 | 320 |
| Baik | 3.901 | 1.251 | na | 2.732 | 1.307 | na | 2.917 | 1.545 | 228 | 2.934 | 1.727 | 184 |
| Rusak Ringan | 2.369 | 1.164 | na | 3.016 | 1.360 | na | 3.275 | 1.512 | 141 | 3.483 | 1.736 | 125 |
| Rusak Berat | 434 | 145 | na | 347 | 146 | na | 265 | 71 | 3 | 315 | 66 | 11 |
| **Ruang Perpustakaan** | 466 | 178 | na | 471 | 176 | na | 495 | 193 | 35 | 534 | 214 | 18 |
| Baik | 226 | 81 | na | 203 | 78 | na | 209 | 85 | 15 | 221 | 92 | 9 |
| Rusak Ringan | 201 | 84 | na | 238 | 87 | na | 260 | 99 | 10 | 284 | 115 | 9 |
| Rusak Berat | 39 | 13 | na | 30 | 11 | na | 26 | 9 | 10 | 29 | 7 | - |
| **Laboratorium** | 1.054 | 307 | na | 1.103 | 327 | na | 1.190 | 348 | 8 | 977 | 375 | 5 |
| Baik | 563 | 149 | na | 545 | 157 | na | 584 | 161 | 4 | 468 | 176 | 2 |
| Rusak Ringan | 420 | 137 | na | 490 | 141 | na | 544 | 175 | 4 | 453 | 191 | 3 |
| Rusak Berat | 71 | 21 | na | 68 | 29 | na | 62 | 12 | na | 56 | 8 | na |
| **Kamar Mandi** | 1.576 | 734 | na | 1.577 | 807 | na | 1.937 | 976 | 100 | 2.328 | 1.076 | 44 |
| Baik | 679 | 298 | na | 659 | 322 | na | 796 | 399 | 42 | 1.000 | 462 | 22 |
| Rusak Ringan | 781 | 395 | na | 907 | 456 | na | 1.019 | 542 | 58 | 1.182 | 585 | 21 |
| Rusak Berat | 116 | 41 | na | 11 | 29 | na | 122 | 35 | na | 146 | 29 | 1 |

*Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

#### 2.3.1.1.4. Pendidikan Luar Biasa

SLB atau Sekolah Luar Biasa diperuntukkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus yaitu tunanetra (buta), tunawicara (tuli-bisu), tunagrahita (cacat mental), tunadaksa (cacat tubuh), dan tunalaras (kenakalan anak-anak).

Pada tahun 2013 jumlah guru SLB di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 338 orang dengan jumlah murid 1.730 orang. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah guru SLB berjumlah 444 orang dengan jumlah murid sebanyak 2.372 orang. Namun jumlah guru SLB pada tahun 2017 dan 2018 ini mengalami penurunan dibanding tahun 2016, pada tahun 2016 jumlah guru SLB sebanyak 492 orang dan tahun 2017 sebanyak 448 orang. Adapun Rasio guru SLB terhadap murid pada tahun 2013 yaitu 1: 5,12 sedangkan pada tahun 2018 rasio guru SLB terhadap murid adalah 1: 5,34.

**Tabel 2. 72.**
Rasio Guru Pada Pendidikan Luar Biasa
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| No | Jenjang Pendidikan SLB | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Jumlah guru | 338 | 392 | 537 | 492 | 448 | 444 |
| 1.2 | Jumlah murid | 1.730 | 1.722 | 2.018 | 2.102 | 2.271 | 2.372 |
| 1.3 | Rasio | 1 : 5,12 | 1 : 4,39 | 1 : 3,76 | 1 : 4,27 | 1 : 5,07 | 1 : 5,34 |

*Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI*

Selain itu ketersediaan sekolah luar biasa di Provinsi Sumatera Selatan juga masih minim, pada tahun 2014 jumlah SLB sebanyak 59 sekolah dan pada tahun 2018 jumlah SLB sebanyak 33 sekolah. Jumlah SLB pada tahun 2018 ini berkurang dari jumlah SLB tahun 2017 yang sebanyak 34 sekolah.

**Tabel 2.73.**
Ketersediaan Sekolah Luar Biasa
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018

| No | Jenjang Pendidikan SLB | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Jumlah gedung sekolah | 59 | 29 | 28 | 34 | 33 |
| 1.2 | Jumlah penduduk kelompok usia sekolah penyandang disabilitas | na | na | na | na | na |
| 1.3 | Rasio | na | na | na | na | na |

*Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan*

Pada tahun 2018, ketersedian SLB di Provinsi Sumatera selatan sebanyak 33 sekolah yang terdiri dari 14 SLB negeri dan 19 SLB swasta yang tersebar di 15 Kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota memiliki 1 (satu)

sekolah SLB negeri kecuali kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Empat Lawang dan Musi rawas Utara yang belum memiliki SLB negeri. Namun juga masih terdapat kabupaten/kota yang belum memiliki SLB baik negeri maupun swasta yaitu kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

**Tabel 2.74.**
Jumlah Sekolah Luar Biasa Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah | |
|---|---|---|---|
| | | Negeri | Swasta |
| 1 | Ogan Komering Ulu | 1 | 0 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 1 | 0 |
| 3 | Muara Enim | 1 | 1 |
| 4 | Lahat | 1 | 0 |
| 5 | Musi Rawas | 1 | 0 |
| 6 | Musi Banyuasin | 1 | 0 |
| 7 | Banyuasin | 1 | 2 |
| 8 | Oku Selatan | 0 | 1 |
| 9 | Oku Timur | 1 | 0 |
| 10 | Ogan Ilir | 1 | 0 |
| 11 | Empat Lawang | 0 | 0 |
| 12 | PALI | 1 | 0 |
| 13 | Mura Utara | 0 | 0 |
| 14 | Palembang | 1 | 13 |
| 15 | Prabumulih | 1 | 1 |
| 16 | Pagar Alam | 1 | 0 |
| 17 | Lubuk Linggau | 1 | 1 |
| Sumatera Selatan | | 14 | 19 |

*Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

### 2.3.1.1.5. Kualifikasi Guru Per Jenjang Pendidikan

Seorang guru dikatakan profesional jika memiliki keahlian, kemahiran, kecakapan yang memenuhi standar mutu serta memerlukan pendidikan profesi. Oleh karena itu, guru disyaratkan memenuhi kualifikasi akademik minimal sarjana S1 atau D4 yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai seorang pendidik.

Pada tahun 2013 persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di Provinsi Sumatera Selatan untuk jenjang SD sebesar 52,73 persen, jenjang SMP sebesar 83,69 persen, jenjang SMA sebesar 92,35 persen, jenjang SMK sebesar 83,69 persen dan SLB sebesar 55,92 persen, sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 81,69 persen untuk jenjang SD, untuk jenjang SMP sebesar 90,99 persen, jenjang SMA sebesar 97,11 persen, jenjang SMK sebesar 93,19 persen dan SLB sebesar 89,76 persen.

**Tabel 2.75.**
Persentase Kualifikaksi Guru Per Jenjang Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| Jenjang Pendidikan | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ≥D4/ S1 | <D4/ S1 | ≥D4/ S1 | <D4/ S1 | ≥D4/ S1 | <D4/ S1 | ≥D4/ S1 | <D4/ S1 | ≥D4/S 1 | <D4/ S1 | ≥D4/ S1 | <D4/ S1 |
| SD | 52,73 | 47,27 | 75,07 | 24,93 | 74,00 | 26,00 | 77,21 | 22,79 | 71,75 | 28,25 | 81,69 | 18,31 |
| SMP | 83,69 | 16,31 | 89,91 | 10,09 | 84,00 | 16,00 | 86,37 | 13,63 | 89,50 | 10,50 | 90,99 | 9,01 |
| SMA | 92,35 | 7,65 | 91,22 | 8,78 | 96,00 | 4,00 | 96,59 | 3,41 | 96,30 | 3,70 | 97,11 | 2,89 |
| SMK | 83,69 | 16,31 | 72,89 | 27,11 | 92,00 | 8,00 | 91,92 | 8,08 | 92,21 | 7,79 | 93,19 | 6,81 |
| SLB | 55,92 | 44,08 | 57,40 | 42,60 | 76,72 | 23,28 | 84,26 | 15,74 | 83,66 | 16,34 | 89,76 | 10,24 |

*Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*

### 2.3.1.1.6. Angka Melek Huruf Menurut Tingkat Usia

Angka Melek Huruf (AMH) penduduk di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan tingkatan usia pada tahun 2013 penduduk usia 15 tahun ke atas adalah 97,32 persen dan terus meningkat menjadi 98,66 persen di tahun 2018. Pada tingkatan usia 15-24 tahun AMH adalah sebesar 99,82 di tahun 2013 dan meningkat menjadi 99,90 persen di tahun 2018. AMH pada usia 15-44 tahun sebesar 99,30 persen di tahun 2013 dan meningkat menjadi 99,75 persen di tahun 2017. AMH penduduk usia 45 tahun keatas tahun 2013 sebesar 92,16 persen dan meningkat menjadi 95,96 persen di tahun 2017.

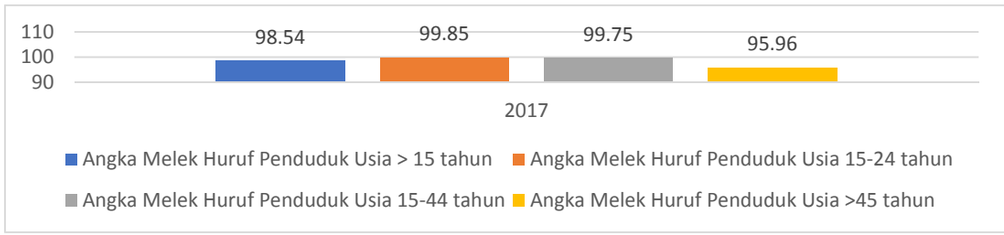
**Tabel 2.76.**
Angka Melek Huruf Penduduk Menurut Tingkat Usia
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMH penduduk >15 Thn | 97,32 | 98,14 | 98,22 | 98,46 | 98,54 | 98,66 |
| AMH penduduk 15-24 thn | 99,82 | 99,93 | 99,90 | 99,90 | 99,85 | 99,90 |
| AMH penduduk usia 15-44 thn | 99,30 | 99,48 | 99,52 | 99,65 | 99,75 | - |
| AMH penduduk usia >45 thn | 92,16 | 94,94 | 94,27 | 95,82 | 95,96 | - |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

Capaian nasional tahun 2018, AMH penduduk berusia lebih dari 15 tahun sebesar 95,66 persen, usia 15-24 tahun 99,71 persen dan capaian nasional tahun 2017, AMH penduduk berusia 15-44 tahun 99,06 persen, dan usia >45 tahun 88,92 persen. Secara keseluruhan AMH pada masing-masing tingkatan usia di Sumatera Selatan sudah melampaui AMH nasional dan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yang menunjukkan peningkatan jumlah penduduk yang bisa membaca dan menulis. Secara umum pada tahun 2017 AMH tertinggi terdapat di tingkatan usia 15-24 tahun sebesar 99,85 persen sedangkan AMH terendah terdapat pada tingkat usia 45 tahun ke atas yaitu sebesar 95,96 persen.

**Gambar 2.36.**
Angka Melek Huruf (AMH) pada Tingkat Usia
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

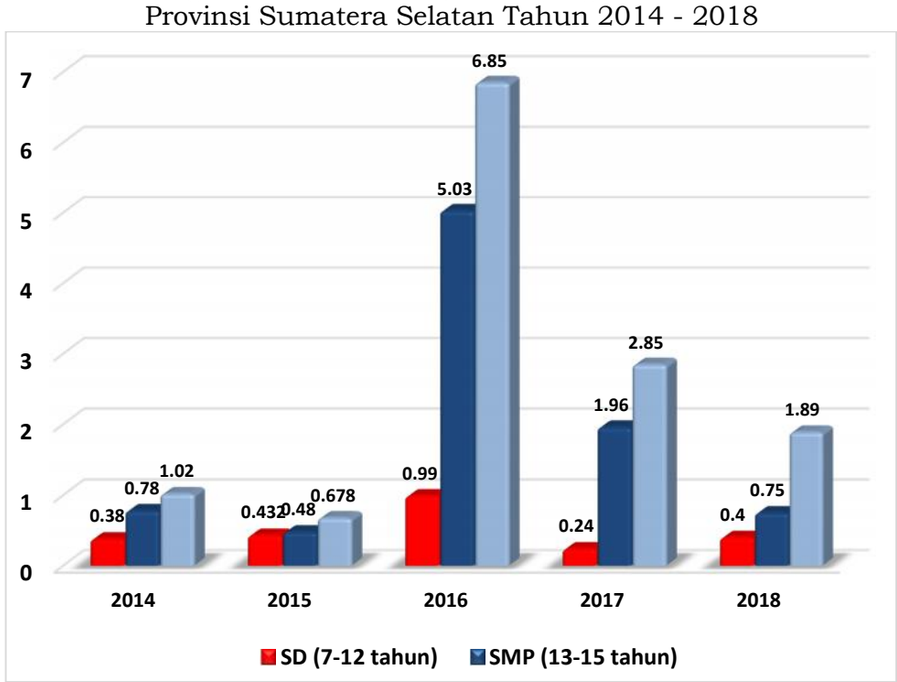



*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.1.1.7. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah (APTS) adalah Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah pada kelompok umur 7-12 tahun (jenjang pendidikan SD), 13-15 tahun (jenjang pendidikan SMP) dan 16-18 tahun (jenjang pendidikan SMA). Beberapa faktor yang menjadi penyebab angka putus sekolah antara lain yaitu: daerah perairan sehingga kesulitan transportasi, pemerataan prasarana sekolah, yaitu tidak semua daerah memiliki sarana pendidikan di tingkat menengah pertama maupun menengah atas, usia pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor lainnya.

**Gambar 2.37.**
Angka Putus Sekolah per Jenjang Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 - 2018




*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

Angka Putus Sekolah secara umum mengalami penurunan pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016, pada jenjang SD (7-12 tahun)

mengalami penurunan menjadi 0,24 persen pada tahun 2017 dibanding tahun 2016 yaitu 0,99 persen, begitu pula jenjang SMP (13-15 tahun) mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 1,96 dibanding tahun 2016 yaitu 5,03, dan pada jenjang SMA (16-18 tahun) juga mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 2,85 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 6,85 persen.

#### 2.3.1.1.8. Angka Kelulusan

Angka kelulusan berdasarkan jenjang pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 adalah sebesar 99,54 persen pada tingkat pendidikan SD, 99,83 persen tingkat SMP, 89,68 persen pada tingkat SMA dan sebesar 99,82 persen pada tingkat SMK. Angka kelulusan SD dan SMA pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 menjadi masing-masing 99,68 persen tingkat SD dan 98,25 persen pada tingkat SMA, sedangkan angka kelulusan SMP dan SMK mengalami penurunan. Secara umum angka kelulusan disetiap jenjang mengalami peningkatan pada tahun 2017. Angka kelulusan yang paling tinggi pada tahun 2017 yaitu pada tingkat SD sebesar 99,83 persen. Pada tahun 2017 angka kelulusan tingkat SMP sebesar 99,39 persen, tingkat SMA sebesar 99,16 dan SMK sebesar 99,17 persen. Namun pada tahun 2018 angka kelulusan disetiap jenjang mengalami penurunan, angka kelulusan SD sebesar 99,47, angka kelulusan SMP sebesar 98,96, angka kelulusan SMA sebesar 98,75 dan angka kelulusan SMK sebesar 93,43.

**Tabel 2.77.**
Angka Kelulusan Untuk Setiap Jenjang Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| Jenjang Pendidikan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | 99,54 | 99,68 | 99,76 | 99,90 | 99,83 | 99,47 |
| SMP | 99,83 | 97,85 | 95,39 | 98,81 | 99,39 | 98,96 |
| SMA | 89,68 | 98,25 | 109,14 | 98,53 | 99,16 | 98,75 |
| SMK | 99,82 | 99,53 | 97,38 | 96,51 | 99,17 | 93,43 |

*Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI*

#### 2.3.1.1.9. Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan (AM) sekolah merupakan perbandingan antara adalah jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan dapat digunakan untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya serap sekolah yang lebih tinggi.

**Tabel 2.78.**
Angka Melanjutkan Sekolah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| Angka Melanjutkan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | 68,17 | 80,19 | 78,10 | 79,56 | 79,73 | 82,38 |
| Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | 100,49 | 96,7 | 95,57 | 96,50 | 99,14 | 100,08 |

*Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI*

Pada tahun 2013 angka melanjutkan sekolah di Provinsi Sumatera Selatan untuk angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs adalah sebesar 68,17 persen. Hal ini menunjukan bahwa pada tahun 2013 siswa yang melanjutkan atau bersekolah di SMP/MTs sebesar 68,17 persen dari jumlah lulusan SD/MI. Sedangkan angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 100,49 persen, yang berarti semua lulusan SMP/MTs dapat ditampung di sekolah SMA/SMK/MA. Secara umum angka melanjutkan sekolah mengalami peningkatan yang berfluktuatif pada setiap tahunnya. Pada tahun 2018 angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 82,38 persen yang berarti 82,38 persen dari lulusan SD/MI yang bersekolah di jenjang SMP/MTs sedangkan angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2018 sebesar 100,08 persen yang berarti hampir semua lulusan SMP/MTs dapat diserap di sekolah SMA/SMK/MA.

### 2.3.1.1.10. Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah merupakan penilaian sekolah yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja sekolah yang dilihat dari berbagai unsur yang terkait, disamping itu juga akreditasi sekolah bertujuan agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil penilaian tersebut.

Pada tahun 2013 persentase akreditasi sekolah minimal B di Provinsi Sumatera Selatan untuk jenjang SD sebesar 54,0 persen, untuk jenjang SMP sebesar 53,0 persen, jenjang SMA sebesar 59,7 persen, jenjang SMK sebesar 36,5 persen dan SLB sebesar 55,2 persen. Sedangkan pada tahun 2017 akreditasi sekolah minimal B sebesar 67,2 persen untuk jenjang SD, untuk jenjang SMP sebesar 58,1 persen, jenjang SMA sebesar 66,9 persen, jenjang SMK sebesar 27,5 persen

dan SLB sebesar 47,1 persen. Pada tahun 2018 akreditasi sekolah minimal B sebesar 71,10 persen untuk jenjang SD, untuk jenjang SMP sebesar 63,86 persen, jenjang SMA sebesar 72,53 persen dan jenjang SMK sebesar 54,66 persen.

**Tabel 2.79.**
Persentase Akreditasi Sekolah Per Jenjang Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018

| Jenjang Pendidikan | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | Belum | A | B | C | Belum | A | B | C | Belum | A | B | C | Belum |
| SD | 5,8 | 48,2 | 30,8 | 15,2 | 6,1 | 49,0 | 29,1 | 15,8 | 11,6 | 55,6 | 22,9 | 9,9 | 12,22 | 58,88 | 23,88 | 4,76 |
| SMP | 14,9 | 38,1 | 19,7 | 27,3 | 17,0 | 37,6 | 16,6 | 28,8 | 25,5 | 32,6 | 15,8 | 26,1 | 25,69 | 38,17 | 20,96 | 14,27 |
| SMA | 22,9 | 36,8 | 18,4 | 21,9 | 25,4 | 38,6 | 17,2 | 18,8 | 32,9 | 34,0 | 13,2 | 19,9 | 35,51 | 37,02 | 15,91 | 10,55 |
| SMK | 12,5 | 24,0 | 10,3 | 53,2 | 40,3 | 45,9 | 13,8 | na | 13,6 | 13,9 | 4,0 | 68,6 | 27,33 | 27,33 | 7,79 | 37,16 |
| SLB | 6,9 | 48,3 | 3,4 | 41,4 | 7,1 | 50,0 | 3,6 | 39,3 | 5,9 | 41,2 | 2,9 | 50,0 | na | na | na | na |

*Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI*

### 2.3.1.1.11. Lulusan SMK yang Terserap Kerja

Serapan tamatan SMK di Sumatera Selatan yang bekerja sebesar 53,21 persen pada tahun 2017 dibandingkan dengan belum bekerja sebesar 21,06 persen. Lulusan SMK yang belum bekerja antara lain disebabkan karena belum mengikuti uji kompetensi (bersertifikat), belum berpengalaman kerja, usia lulusan SMK yang belum cukup memenuhi persyaratan usia kerja, serta kemampuan berwirausaha yang rendah, ada juga lulusan SMK yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi sebesar 16,49 persen. Berikut table rekapitulasi lulusan SMK di Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

**Tabel 2.80.**
Rekapitulasi Lulusan SMK yang Terserap Kerja
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 - 2017

| Jumlah Lulusan SMK | Bekerja | | Melanjutkan | | Belum Bekerja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah | Persentase (%) | Jumlah | Persentase (%) | Jumlah | Persentase (%) |
| 30.221 | 16.081 | 53,21 | 4.982 | 16,49 | 6.364 | 21,06 |

*Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.1.1.12. Angka Pendidikan yang ditamatkan

Angka Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dengan kelompok penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari setiap jenjang pendidikan seperti tabel diatas yaitu Angka Pendidikan yang ditamatkan SD pada tahun 2017 sebesar 25,36 persen, Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP sebesar 21,43 persen, Angka Pendidikan yang ditamatkan SMA sebesar 19,88 persen, Angka Pendidikan yang ditamatkan SMK sebesar 5,84 persen, Angka Pendidikan yang ditamatkan DI/DII/DIII/Akademisi sebesar 2,44 persen dan Angka Pendidikan yang ditamatkan Universitas

sebesar 6,80 persen, artinya sebagian besar penduduk di Provinsi Sumatera Selatan telah menamatkan di jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA.

**Tabel 2.81.**
Angka Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan penduduk
usia 15 tahun ke atas Provinsi Sumatera Selatan 2015-2017

| Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan | 2015 (%) | 2016 (%) | 2017 (%) |
|---|---|---|---|
| Tidak/belum pernah sekolah | 2,06 | 1,26 | 1,08 |
| Tidak/belum Tamat SD | 14,87 | 14,44 | 17,17 |
| SD | 29,01 | 26,87 | 25,36 |
| SMP | 22,00 | 22,64 | 21,43 |
| SMA | 20,28 | 19,43 | 19,88 |
| SMK | 4,72 | 6,28 | 5,84 |
| DI/DII/DIII/Akademi | 2,14 | 2,36 | 2,44 |
| Universitas | 4,92 | 6,72 | 6,80 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.1.2 Kesehatan

#### 2.3.1.2.1 Angka Kematian Ibu dan Bayi

Jika dilihat dari angka kematian ibu di provinsi Sumatera Selatan mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2013 terdapat 146 kejadian dan mengalami peningkatan di tahun 2014 menjadi 155 kejadian per 100.000 KH, meningkat kembali ditahun 2015 dengan jumlah 166 kejadian per 100.000 KH, tetapi mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 142 kejadian per 100.000 KH, dan terus menurun secara signifikan pada tahun 2017 menjadi 107 kejadian tetapi mengalami peningkatan kembali pada tahun 2018 menjadi 120 kejadian per 100.000 KH.

**Tabel 2.82.**
Angka Kematian Ibu Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2018

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angka Kematian Ibu | 146 | 155 | 165 | 140 | 107 | 120 |

*Sumber : Buku Saku Kinerja Sumatera Selatan, 2018*

Kondisi kematian ibu yang masih terjadi bahkan sempat mengalami peningkatan di tahun 2015 menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat yang masih memerlukan peningkatan, sehingga resiko kematian ibu dan anak dapat di minimalkan.

Menurunnya angka kematian bayi dan meningkatnya angka harapan hidup mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan penduduk. Angka kematian bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR) merupakan indikator utama dalam mengukur derajat kesehatan masyarakat.

**Tabel 2.83.**
Angka Kematian Bayi Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2018

| Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Angka Kematian Bayi | 775 | 643 | 637 | 497 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

Angka Kematian Bayi selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, capaian tahun 2015 yaitu sebesar 775 kasus pada 2016 mengalami penurunan menjadi 643 kasus, pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 637 kasus dan pada tahun 2018 kembali menurun dengan signifikan menjadi 496 kasus.

### 2.3.1.2.2. Imunisasi Dasar Lengkap

Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Provinsi Sumatera Selatan selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 mencapai 91,20%, mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2016 yaitu 98,80%. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 juga mengalami peningkatan yaitu menjadi 99,00% dan 99,40%.

**Tabel 2.84.**
Persentase anak usia 0-11 bulan
yang mendapat imunisasi dasar lengkap
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018

| Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Persentase Anak Usia 0-11 bulan yang Mendapat Imunsasi Dasar Lengkap | 91,20 | 98,80 | 99,00 | 99,40 |

*Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.1.2.3. Persentase Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan pada hasil dari Dinas Kesehatan tahun 2013 cakupan pemberian ASI eksklusif pada seluruh bayi di bawah 6 bulan (0–6 bulan) hanya 63,77%. Cakupan pemberian ASI Eksklusif yang terhimpun menurut laporan ASIE di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 61,66 dibandingkan tahun 2016 sebesar 59,38%, namun kembali mengalami penurunan menjadi 60,70% di tahun 2018.

Rendahnya cakupan pemberian ASI Eksklusif 0-6 bulan dapat disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat bahkan petugas kesehatan tentang manfaat dan pentingnya pemberian ASI Eksklusif kepada bayi usia 0-6 bulan, adanya promosi yang intensif susu formula, pemantauan sulit dilakukan, pencatatan dan pelaporan yang kurang tepat, masih kurangnya tenaga konselor ASI di lapangan, RS, Klinik Bersalin belum sayang bayi, belum adanya sanksi tegas bagi RS/Klinik Bersalin/Bidan Praktek Swasta yang belum sayang bayi,

dan masih banyak RS yang belum melakukan rawat gabung antara ibu dan bayinya, serta masih rendahnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD).

**Tabel 2.85.**
Persentase Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Bayi yang Mendapatkan Asi Ekslusif | 63,77 | 63,44 | 61,00 | 59,38 | 61,66 | 60,70 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.1.2.4. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

Dalam mendukung mensukseskan Program Pemerintah dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan atau Coverage Program Kesehatan 2019, yang lebih populer disebut dengan BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi beserta Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan jajarannya melakukan upaya Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Kader Kesehatan dalam membantu Sosialisasi Program JKN. Kita bersama berharap agar masyarakat yang memiliki kemampuan untuk dapat ikut JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) secara mandiri dengan mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan sesuai dengan kelas yang diinginkan berdasarkan kemampuan masing-masing, serta mendorong perusahaan dalam percepatan integrasi karyawan-karyawati ke BPJS Kesehatan.

Integrasi Jamsoskes ke JKN, sesuai amanat UU No.40/2004 tentang SJSN, UU No.24/2011 tentang BPJS, PP No.12/2013 tentang Jaminan Kesehatan, PP 109/2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial, PP No.74/2014 tentang pedomanan penyusunan peta jalan penyelenggaraan jaminan sosial bidang kesehatan dan bidang ketenagakerjaan, dan TL surat Mendagri No. 440/3889/SJ 19 Okt 2016 tentang Dukungan Pemda pada program JKN. Berikut ini persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan :

**Tabel 2.86.**
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 – 2018

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan | 42,93 | 45,37 | na | na | 56,50 | 58,40 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

Rasio jumlah sarana kesehatan puskesmas terhadap jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 24.541 yang artinya satu puskesmas dapat melayani 24.541 jiwa penduduk. Pada tahun 2014 rasio puskesmas terhadap jumlah

penduduk adalah 25.952 yang artinya 1 puskesmas dapat melayani 25.952 jiwa penduduk. Pada tahun 2017 rasio menurun menjadi 24.243. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah puskesmas yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sudah mencukupi dengan standar rasio adalah 1:30.000 penduduk. Selain kuantitas, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kualitas dari setiap puskesmas yang ada baik dari sisi kelayakan gedung puskesmas dan peningkatan fasilitas serta sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia pada setiap puskesmas.

**Tabel 2.87.**
Rasio Puskesmas Per 30.000 Penduduk
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah puskesmas | 319 | 306 | 335 | 333 | 341 |
| Jumlah Penduduk | 7.828.740 | 7.941.495 | 8.052.315 | 8.160.901 | 8.266.983 |
| Rasio Puskesmas Per 30.000 Penduduk | 24.541 | 25.952 | 24.036 | 24.507 | 24.243 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.1.2.5. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Berdasarkan Tabel 2.88 menjelaskan bahwa telah terjadi peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Provinsi Sumatera Selatan dimana pada tahun 2013 sebesar 92,94 persen meningkat di tahun 2017 menjadi 93,11 persen. Akan tetapi pada tahun 2014 terjadi penurunan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kebidanan menjadi 91,72 persen. Namun selama periode 5 tahun yaitu 2013 sampai 2017 persentase pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kebidanan sudah berada di atas 90 persen, angka ini juga berada di atas indikator nasional yaitu 79,70 persen.

**Tabel 2.88.**
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2013-2018

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | 92,94 | 91,72 | 92,80 | 93,08 | 93,11 | 94,31 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

#### 2.3.1.2.6. Persentase *Case Detection Rate* pada TBC

Persentase *case detection rate* penyakit TBC Provinsi Sumatera Selatan dalam lima tahun terakhir mengalami trend penurunan. Pada tahun 2013, Persentase *case detection rate* penyakit TBC Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 52,28%. Pada tahun 2014, menurun menjadi 48,41%. Pada tahun 2015, menurun menjadi 45,05%. Pada tahun 2016, menurun menjadi 39,01%.Baru pada tahun 2017, naik menjadi 46 %. Tiga Kabupaten / kota terendah *Case detection rate* penyakit TBC pada tahun 2017 yaitu Kabupaten OKI sebesar 27 %, Kabupaten OKU Selatan sebesar 28 % dan Kota Prabumulih sebesar 29%.

**Tabel 2.89.**
Persentase *Case Detection Rate* Penyakit TBC
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase *Case Detection Rate* Penyakit TBC | 52,28 | 48,41 | 45,05 | 39,01 | 46 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

#### 2.3.1.2.7. Persentase Kasus TBC yang diobati dan sembuh

Persentase Kasus TBC yang diobati dan sembuh di Provinsi Sumatera Selatan mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2012, Persentase Kasus TBC yang diobati dan sembuh di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 89,77 %, pada tahun 2013, naik menjadi 94,09 %. Pada tahun 2014, turun menjadi 86,27%. Pada tahun 2015, naik menjadi 88,31%. Pada tahun 2016, naik menjadi 94,34%. Kabupaten / kota terendah Kasus TBC yang diobati dan sembuh pada tahun 2016 yaitu Kota Pagaralam sebesar 86,4%, Kabupaten Lahat sebesar 89,26% dan Kota Lubuklinggau sebesar 90,91%. Meskipun demikian, secara nasional, Persentase Kasus TBC yang diobati dan sembuh di Provinsi Sumatera Selatan telah melebihi target nasional sebesar 85%.

**Tabel 2.90.**
Persentase Kasus TBC yang diobati dan sembuh
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2016

| Indikator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Kasus TBC yang diobati dan Sembuh | 89,77 | 94,09 | 86,27 | 88,31 | 94,34 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.1.2.8. Jumlah Kasus HIV dan AIDS

Jumlah kasus penderita HIV di Provinsi Sumatera Selatan secara umum mengalami penurunan dari tahun 2013-2016, akan tetapi mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017. Pada tahun 2013 jumlah kasus HIV sebanyak 106 kasus dan menurun menjadi 89 kasus pada tahun 2014. Pada tahun 2018 jumlah penderita HIV kembali meningkat menjadi 189 kasus. Untuk kasus AIDS justru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 jumlah kasus AIDS sebanyak 150 orang dan meningkat menjadi 215 orang di tahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 189 orang, akan tetapi pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 246 kasus.

**Tabel 2.91.**
Jumlah Kasus HIV dan AIDS Provinsi
di Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasus HIV | 106 | 89 | 71 | 63 | 157 | 189 |
| Kasus AIDS | 150 | 156 | 179 | 215 | 189 | 246 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.1.2.9. Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar

Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar dari total penderita yang ditemukan merupakan prosentase jumlah penderita yang ditemukan dan diobati. Persentase ini Pada tahun 2013 s/d 2017 adalah 100%.

**Tabel 2.92.**
Persentase Penderita DBD yang ditangani sesuai standar
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Penderita DBD yang ditangani sesuai standar | 1.345 | 1.617 | 3.520 | 3.735 | 1.452 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

Untuk jumlah penderita DBD yang ditemukan dan diobati tiap tahunnya Jumlahnya cenderung untuk meningkat. Namun terjadi penurunan pada tahun 2017. Pada tahun 2013, jumlah penderita yang ditemukan dan diobati adalah sebanyak 1.345 orang. Pada tahun 2014 meningkayt menjadi 1.617 orang. Paa tahun 2015, meningkat kembali menjadi 3.520 orang. Pada tahun 2016, meningkat menjadi 3735 orang. Dan pada tahun 2017, menurun menjadi 1.452 orang. Kabupaten kota dengan penderita DBD yang ditemukan dan diobati terbanyak pad tahun 2017 adalah Kota Palembang sebanyak 325 orang, Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 55 orang, dan Kabupaten Banyuasin sebanyak 55 orang.

**Tabel 2.93.**
Jumlah penderita DBD yang ditemukan dan diobati
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Penderita DBD yang ditemukan dan diobati | 1.345 | 1.617 | 3.520 | 3.735 | 1.452 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.1.2.10. Jumlah Kasus DBD

Perkembangan kasus DBD (Demam Berdarah *Dengue*) di Provinsi Sumatera Selatan. Kasus DBD dari tahun ke tahun terjadi fluktuatif. Pada tahun 2013 jumlah kasus penyakit DBD sebanyak 1.450 kasus dan meningkat menjadi 1.536 kasus di tahun 2014, namun terjadi peningkatan yang drastis dari tahun 2014 ke tahun 2015 menjadi 3.232 kasus dan 3.792 kasus di tahun 2016. Akan tetapi mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 menjadi 1.438 kasus. Pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 2.443 kasus.

**Tabel 2.94.**
Jumlah Kasus DBD Provinsi Selatan Tahun 2013-2018

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Kasus DBD | 1.450 | 1.536 | 3.232 | 3.792 | 1.438 | 2.443 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.1.2.11. Jumlah kabupaten / kota yang eliminasi Malaria

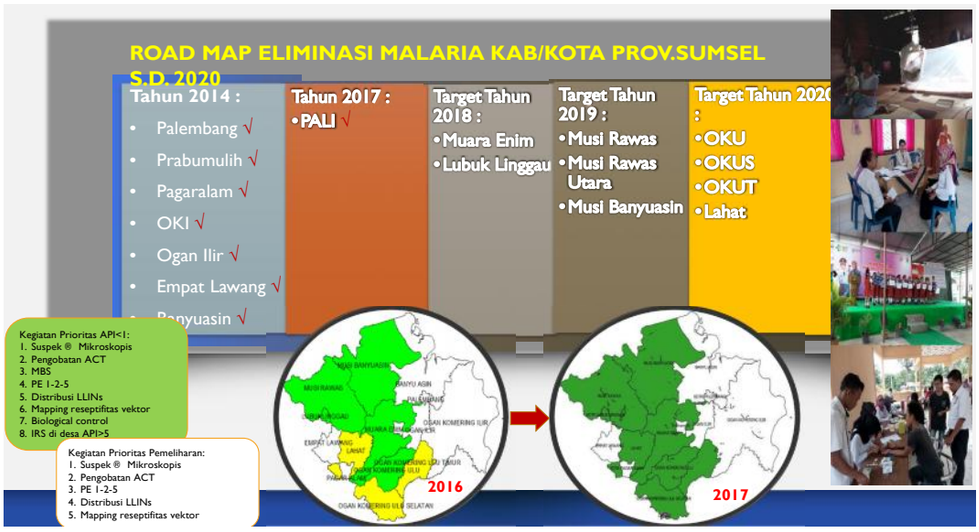
Jumlah kabupaten / kota yang eliminasi malaria adalah sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan. Pada tahun 2013 s/d 2016, kabupaten kota yang telah eliminasi malaria dalah sebanyak 6 (enam) kabupaten kota, yaitu Palembang, Prabumulih, Pagaralan, OKI, Ogan Ilir, Empat Lawang, dan Banyuasin. Pada tahun 2017, ditambah Kabupaten PALI sehingga menjadi 7 (tujuh), sedangkan pada tahun 2018 ditambah Kota Lubuk Linggau kabupaten/kota yang telah eliminasi malaria.

**Tabel 2.95.**
Jumlah kabupaten / kota Provinsi Sumatera Selatan
yang eliminasi Malaria Tahun 2013-2018

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Kabupaten/Kota yang Eliminasi Malaria | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

**Gambar 2.38.**
Roadmap Eliminasi Malaria Kabupaten / Kota
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 - 2020




*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.1.2.12. Kasus Malaria

Kemajuan yang signifikan dicapai dalam upaya mengakhiri epidemi malaria, kusta dan filariasis. Kecenderungan angka kesakitan malaria di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Annual Paracite Incidence (API) menurun cukup signifikan dari 0,47% pada tahun 2013 menjadi 0,10% per 1000 penduduk pada tahun 2017. Namun kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 0,60%.

**Tabel 2.96.**
Kejadian Malaria per 1000 orang
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kejadian Malaria per 1000 Orang | 0,47 | 0,36 | 0,22 | 0,29 | 0,10 | 0,60 |

*Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.1.2.13. Persentase Desa yang STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Persentase Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dilihat dari tren tahun 2014-2017 mengalami peningkatan dari 9 persen tahun 2014 naik menjadi 33 persen di tahun 2015 naik kembali menjadi 42,83 persen pada tahun 2016 dan naik kembali menjadi 52,8 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 61,4 persen seperti terlihat pada grafik berikut:

**Tabel 2.97.**
Persentase Desa yang Melaksanakan STBM
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 s/d 2018

| Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Desa yang Melakukan STBM | 9 | 33 | 42,83 | 52,8 | 61,4 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.1.2.14. Persentase Rumah Tangga ber- PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)

Persentase Rumah Tangga ber- PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di Provinsi Sumatera Selatan mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2013, Persentase Rumah Tangga ber- PHBS di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 62,2%, pada tahun 2014, naik menjadi 64,3%. Pada tahun 2015, naik menjadi 67,6%. Pada tahun 2016, turun menjadi 67,5%. Pada tahun 2017, turun menjadi 64,92%. Pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 55%.

**Tabel 2.98.**
Persentase Rumah Tangga ber - PHBS
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 - 2018

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Rumah Tangga ber-PHBS | 62,2 | 64,3 | 67,6 | 67,5 | 64,92 | 55 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.1.2.15. Persentase Kabupaten/Kota Sehat

Persentase Kabupaten / Kota yang Melaksanakan KKS (Kabupaten/ Kota Sehat) pada tahun 2017 sebesar 11,7 %. Meningkat pada tahun 2018 menjadi 20%.

**Tabel 2.99.**
Persentase Kabupaten/Kota Sehat
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 s/d 2018

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Kabupaten/Kota Sehat | na | na | na | 29,41 | 11,7 | 20 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.1.2.16. Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi

Salah satu arah kebijakan penguatan pelayanan kesehatan di Indonesia adalah dengan melalui terwujudnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat. Salah satu upayanya adalah melalui akreditasi Fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan terbagi menjadi fasilitas pelayanan kesehatan primer (puskesmas) dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (rumah sakit). Setiap puskesmas dan rumah sakit diharapkan dapat terakreditasi.

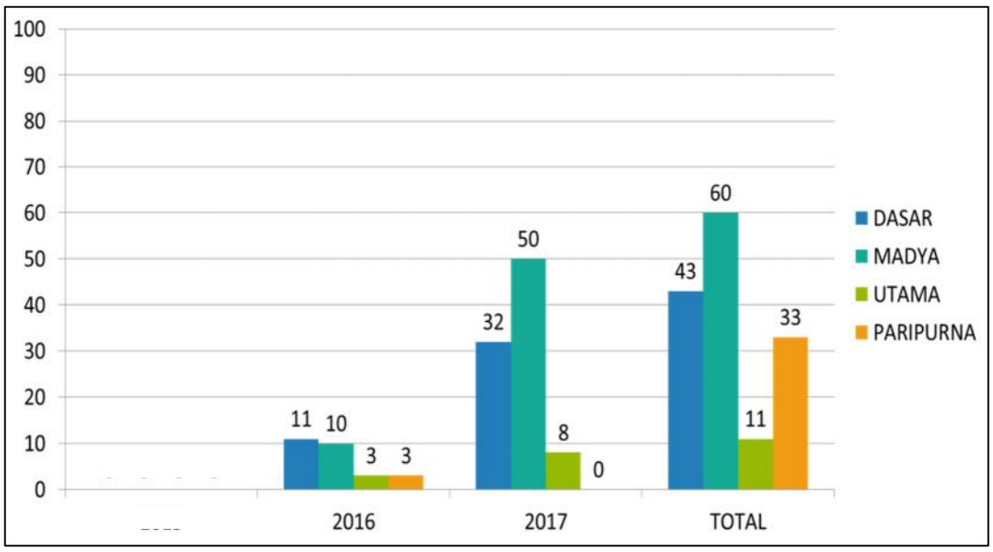
Jumlah Puskesmas yang ada di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 341 Puskesmas. Jumlah Puskesmas yang terakreditasi sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 117 puskesmas. Dimana pada tahun 2016 puskesmas terakreditas sebanyak 27 puskesmas dan pada tahun 2017 sebanyak 90 puskesmas.

**Tabel 2.100.**
Jumlah Puskesmas Terakreditasi
di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Puskesmas Terakreditasi | na | na | na | 27 | 117 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

**Gambar 2.39.**
Status kelulusan akreditasi Puskesmas
di Sumatera Selatan Tahun 2016-2017

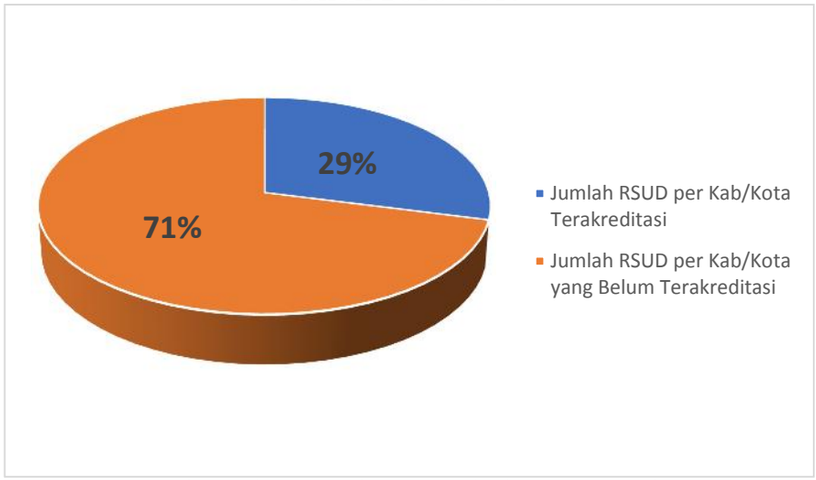



*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

Jumlah Rumah Sakit yang berada di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 67 Rumah Sakit. Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi sampai

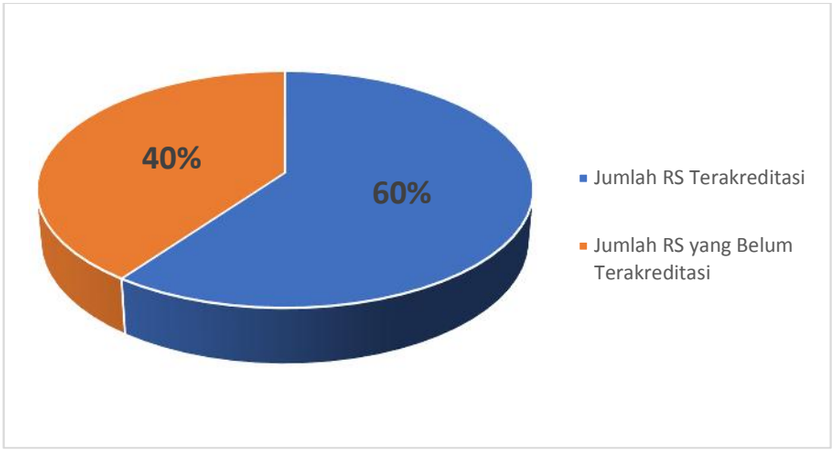
dengan tahun 2017 adalah sebanyak 26 Rumah Sakit baik milik Pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI/Polri maupun swasta.

**Gambar 2.40.**
Jumlah RSUD Kabupaten / Kota yang sudah terakreditasi
di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2016-2017




*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

**Gambar 2.41.**
Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi
di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2016-2017




*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

**2.3.1.2.17. Persentase puskesmas yang mengembangkan program usila (Usia Lanjut)**

Jumlah Kabupaten / Kota yang mengembangkan Program Usila pada tahun 2017 ditargetkan 17 Kabupaten dan terealisasi 17 Kabupaten atau sebesar 100 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2017, maka hasil capaian sudah mencapai target akhir Renstra 2017.

Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Jumlah Kabupaten / Kota telah semua menjalankan Program usila tapi dilihat dari Jumlah Puskesmas yang menjalankan Program Usila dari tahun 2013 mengalami peningkatan dari 256 Puskesmas pada tahun 2013 menjadi 261 Puskesmas pada tahun 2014

kemudian naik menjadi 279 puskesmas di tahun 2015 naik lagi menjadi 322 puskesmas pada tahun 2016 dan naik menjadi 339 puskesmas pada tahun 2017 seperti terlihat pada grafik berikut.

**Tabel 2.101.**
Jumlah Puskesmas yang Mengembangkan Program Usila
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Puskesmas yang Mengembangkan Program Usila | 256 | 261 | 279 | 322 | 339 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

Jumlah usia lanjut yang meningkat saat ini akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Untuk itu perlu pengkajian masalah usia yang lebih mendasar agar tercapai tujuan pembinaan kesehatan usia lanjut yaitu mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

### 2.3.1.2.18. Rasio Dokter terhadap 100.000 Penduduk

Jika dilihat rasio dokter terhadap 100.000 penduduk di provinsi Sumatera Selatan terlihat mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, rasionya adalah 10 dokter per 100.000 penduduk, Pada tahun 2017, rasionya adalah 10 dokter per 100.000 penduduk, dan Pada tahun 2018, rasionya adalah 11 dokter per 100.000 penduduk.

**Tabel 2.102.**
Rasio dokter terhadap 100.000 Penduduk
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Dokter terhadap 100.000 Penduduk | na | na | na | 10 | 10 | 11 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.1.2.19. Rasio Dokter Gigi terhadap 100.000 Penduduk

Jika dilihat rasio dokter gigi terhadap 100.000 penduduk di provinsi Sumatera Selatan terlihat sama. Pada tahun 2016 s/d tahun 2018, rasionya adalah 2 dokter per 100.000 penduduk,

**Tabel 2.103.**
Rasio Dokter Gigi terhadap 100.000 Penduduk
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Dokter Gigi terhadap 100.000 Penduduk | na | na | na | 2 | 2 | 2 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.1.2.20. Rasio Bidan terhadap 100.000 Penduduk

Jika dilihat rasio bidan terhadap 100.000 penduduk di provinsi Sumatera Selatan terlihat mangalami peningkatan. Pada tahun 2016, rasionya adalah 100 bidan per 100.000 penduduk, Pada tahun 2017, rasionya adalah 111,5 bidan per 100.000 penduduk, dan Pada tahun 2018, rasionya adalah 125 bidan per 100.000 penduduk.

**Tabel 2.104.**
Rasio Bidan terhadap 100.000 Penduduk
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Bidan terhadap 100.000 Penduduk | na | na | na | 100 | 111,5 | 125 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.1.2.21. Rasio tenaga gizi terhadap 100.000 Penduduk

Jika dilihat rasio tenaga gizi terhadap 100.000 penduduk di provinsi Sumatera Selatan terlihat mangalami peningkatan. Pada tahun 2016, rasionya adalah 5,2 tenaga Gizi per 100.000 penduduk, Pada tahun 2017, rasionya adalah 5,2 tenaga Gizi per 100.000 penduduk, dan Pada tahun 2018, rasionya adalah 5,7 tenaga Gizi per 100.000 penduduk.

**Tabel 2.105.**
Rasio Tenaga Gizi terhadap 100.000 Penduduk di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2018

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Tenaga Gizi terhadap 100.000 Penduduk | na | na | na | 5,2 | 5,2 | 5,7 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.1.2.22. Rasio Sanitarian terhadap 100.000 Penduduk

Jika dilihat rasio sanitarian terhadap 100.000 penduduk di provinsi Sumatera Selatan terlihat mangalami penurunan. Pada tahun 2016, rasionya adalah 5,9 sanitarian per 100.000 penduduk, Pada tahun 2017, rasionya adalah 5,8 sanitarian per 100.000 penduduk, dan Pada tahun 2018, rasionya adalah 5,5 sanitarian per 100.000 penduduk.

**Tabel 2.106.**
Rasio Sanitarian terhadap 100.000 Penduduk
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Tenaga Sanitarian terhadap 100.000 Penduduk | na | na | na | 5,9 | 5,8 | 5,5 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.1.2.23. Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan

Persentase Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 hingga 2018 terlihat mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 terdapat 83% Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pada tahun 2017 terdapat 88% Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, lalu meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi 88,4%.

**Tabel 2.107.**
Persentase Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan | na | na | na | 83 | 88 | 88,4 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.1.2.24. Persentase desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Persentase desa/kelurahan UCI di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 s/d 2017 terlihat fluktuatif. Pada tahun 2015, persentase desa/kelurah UCI adalah sebesar 92,1%. Pada tahun 2016, sebesar 91,0%. Pada tahun 2017, sebesar 92,6% dan kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 94.20%.

**Tabel 2.108.**
Persentase Desa / Kelurahan UCI
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018

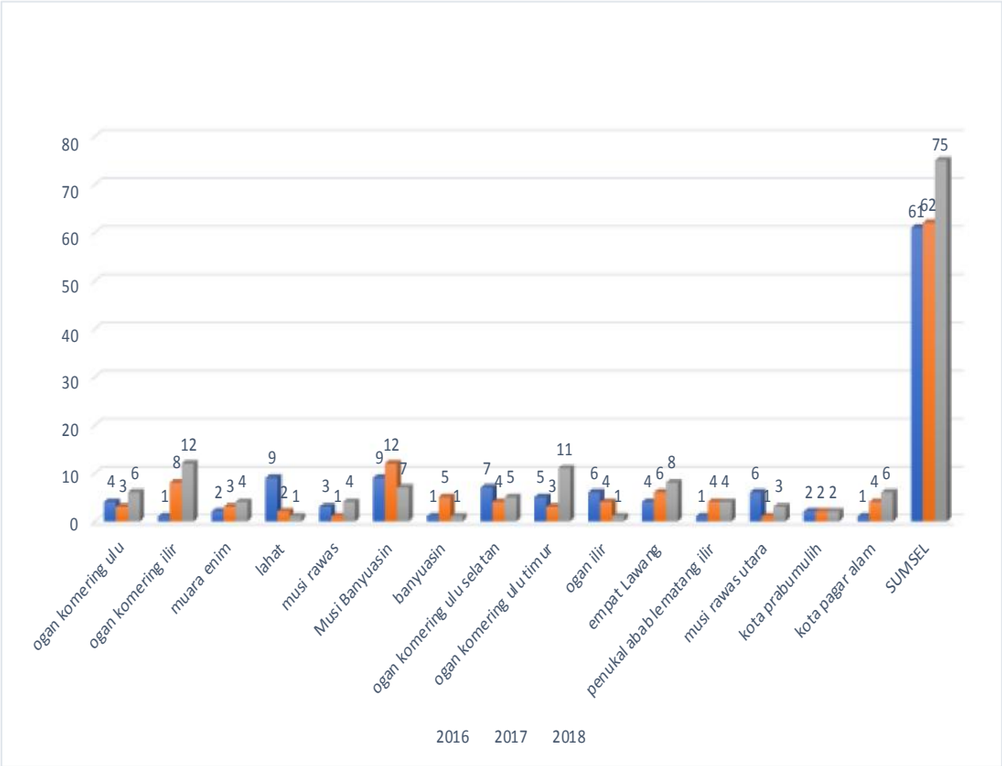
| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Desa/Kelurahan UCI | na | na | 92,10 | 91,00 | 92,60 | 94,20 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.1.2.25. Persentase Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

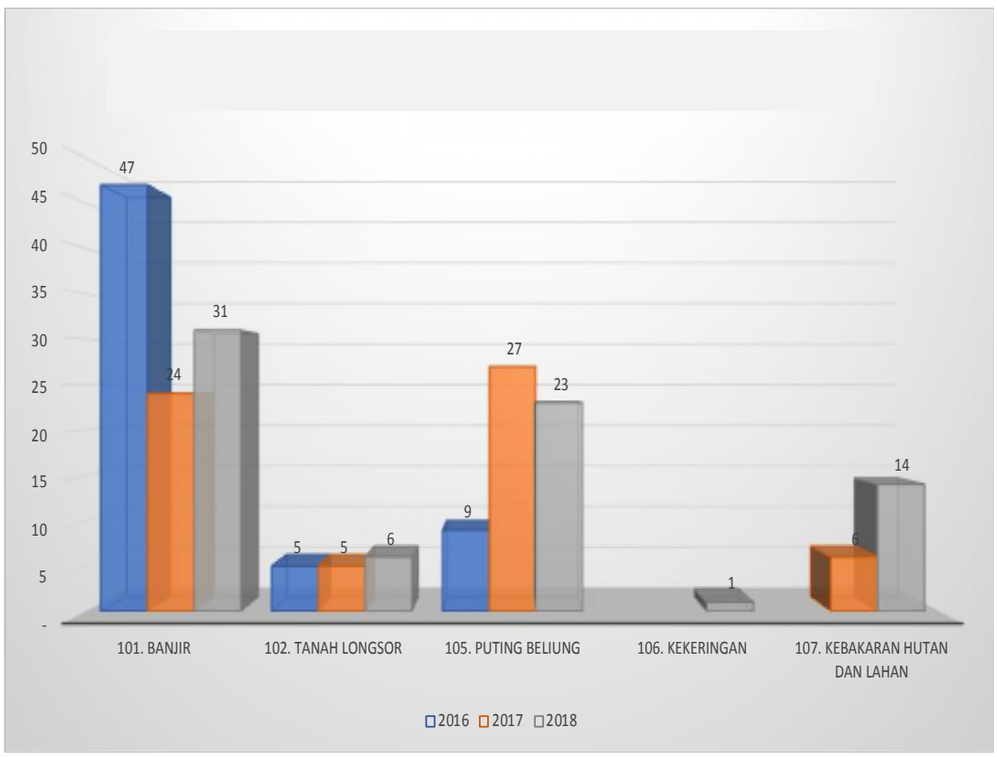
Jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2016 – 2018 terus mengalami peningkatan. Kejadian bencana pada tahun 2016 sebanyak 61 kejadian bencana meningkat menjadi 62 kejadian bencana pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 75 kejadian bencana pada tahun 2018. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kejadian bencana terbanyak adalah kabupaten Ogan Komering Ilir, OKU Timur dan Empat Lawang, dimana hampir terjadi peningkatan jumlah bencana per kab/kota di tahun 2018 seperti terlihat pada grafik berikut ini.

**Gambar 2.42.**
Distribusi Kejadian Bencana Per Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2018




*Sumber : BNPB*

**Gambar 2.43.**
Jenis Bencana yang Terjadi di Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2018




*Sumber : BNPB*

Jenis bencana yang paling banyak terjadi di Sumatera Selatan yaitu banjir, angin putting beliung, Kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor dan kekeringan. seperti terlihat pada grafik dibawah ini.

**Tabel 2.109.**
Jumlah Korban (Jiwa) Akibat Bencana per Kabupaten/Kota
di Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2018

| No | Wilayah | Korban (jiwa) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Meninggal & Hilang | | | Luka-luka | | | Menderita & Mengungsi | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Ogan Komering Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2285 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028 | 15970 |
| 3 | Muara Enim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 400 |
| 4 | Lahat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492 | 20 | 0 |
| 5 | Musi Rawas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12488 | 160 | 690 |
| 6 | Musi Banyuasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19126 | 5558 | 2197 |
| 7 | Banyuasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 280 | 184 | 835 |
| 8 | OKU Selatan | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16580 | 4 | 5 |
| 9 | OKU Timur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18103 | 245 | 300 |
| 10 | Ogan Ilir | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2774 | 98 | 28 |
| 11 | Empat Lawang | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3132 | 2644 | 1258 |
| 12 | PALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 46075 |
| 13 | Musi Rawas Utara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139172 | 0 | 0 |
| 14 | Kota Prabumulih | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3996 | 8030 | 0 |
| 15 | Kota Pagar Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 | 13 |
| 16 | **SUMSEL** | 3 | 7 | 1 | 3 | 26 | 2 | 217.143 | 23.423 | 70.056 |

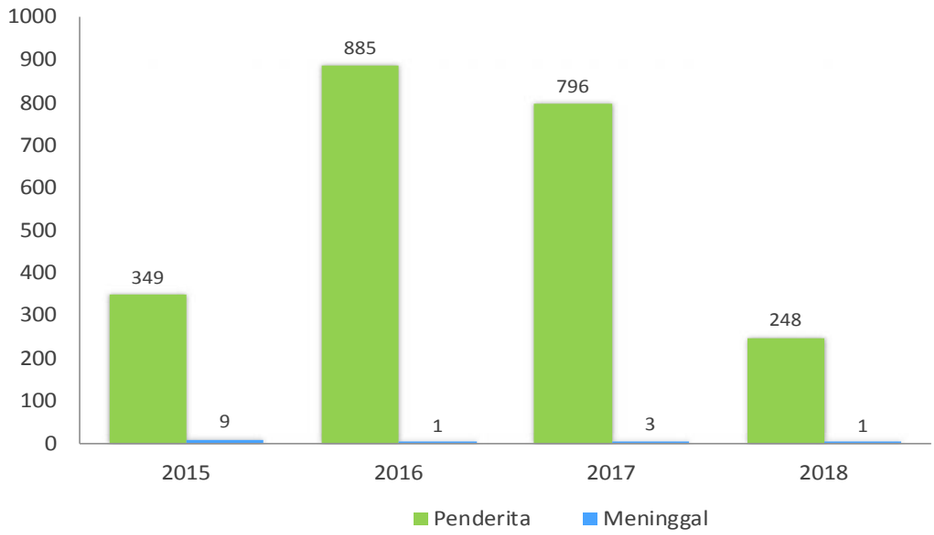
*Sumber : BNPB*

Jumlah korban jiwa meninggal dunia dan hilang akibat bencana pada tahun 2016 sebanyak 3 orang, naik menjadi 7 orang pada tahun 2017 dan turun menjadi 1 orang pada tahun 2018. Untuk korban luka-luka pada tahun 2016 sebanyak 3 orang, naik menjadi 26 orang pada tahun 2017 dan turun menjadi 2 orang pada tahun 2018. Korban jiwa yang menderita dan mengungsi akibat bencana terbanyak pada tahun 2016 sebanyak 217.143 orang kemudian turun menjadi 23.423 orang pada tahun 2017 dan turun lagi menjadi 70.056 orang pada tahun 2018. Untuk semua penduduk terdampak krisis akibat bencana telah mendapatkan pelayanan kesehatan baik ditingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.

### 2.3.1.2.26. Persentase Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapat Pelayanan Sesuai Standar.

Pada tahun 2018 terjadi 26 kasus KLB di Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk yang terdampak KLB sebanyak 249 orang. Dari penduduk yang terdampak KLB pada tahun 2018 semuanya telah mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar kurang dari 24 jam, sehingga persentase penduduk yang terdampak KLB dan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2018 sebesar 100 persen. Berikut jumlah penduduk yang terdampak KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar pada tahun 2015 – 2018.

**Gambar 2.44.**
Persentase Penduduk Yang Terdampak KLB yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 – 2018

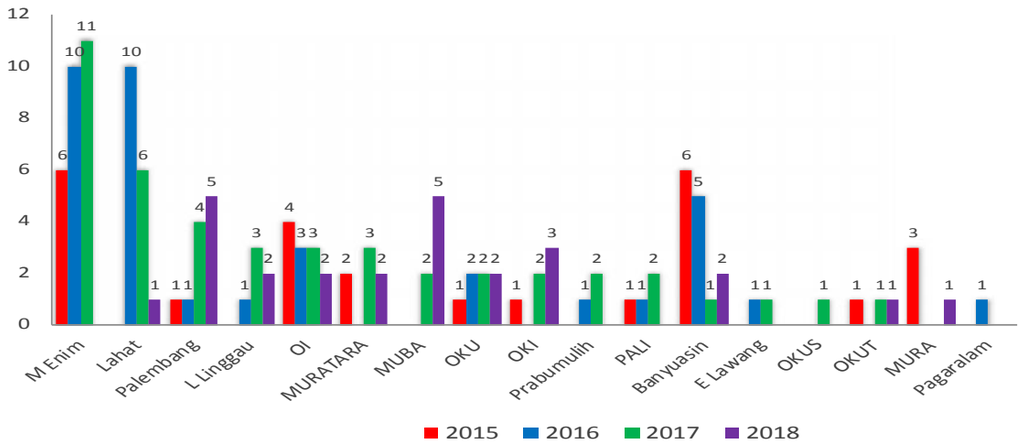



*Sumber : BNPB*

Pada tahun 2015 jumlah penduduk yang terdapak KLB dan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar kurang dari 24 jam sebanyak 358 orang. Dari 358 orang yang mendapat pelayanan kesehatan tersebut sebanyak 9 orang meninggal dunia. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang terdampak KLB dan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yaitu sebanyak 886 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 1 orang meninggal dunia. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2017 dan 2018 dengan masing-masing pada tahun 2017 sebanyak 799 orang yang terdampak KLB dan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dari jumlah tersebut sebanyak 3 orang meninggal dunia. Pada tahun 2018 sebanyak 249 orang yang terdampak KLB dan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dari jumlah tersebut sebanyak 1 orang meninggal dunia.

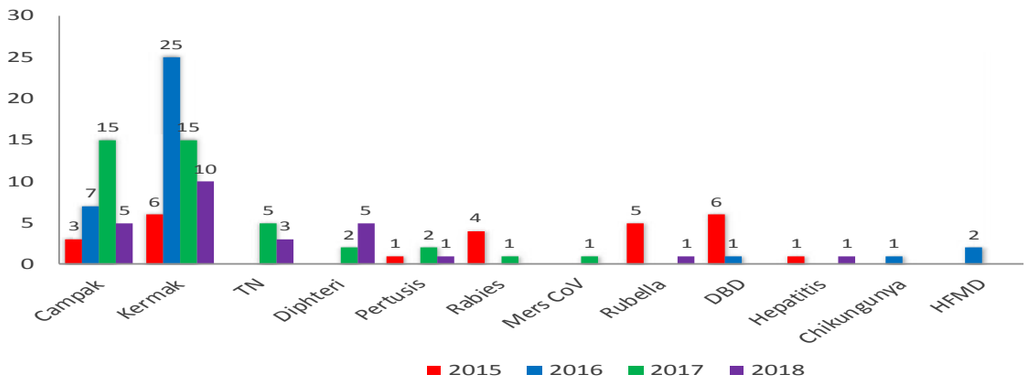
Dilihat dari distribusi lokasi terjadinya KLB selama tahun 2015 – 2018, lokasi paling banyak terjadinya KLB yaitu di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan kota Palembang. Dari Grafik diatas juga menunjukkan terjadi peningkatan frekuensi KLB di Sumatera Selatan pada tahun 2018 terjadi di Kota Palembang, Kab. Muba dan Kab. Banyuasin. Setiap KLB yang terjadi di Kab/Kota sudah dilakukan penanganan terhadap kasus dan penyelidikan epidemiologi serta tindakan dalam upaya pencegahan dan penyebarluasan penyakit.

**Gambar 2.45.**
Distribusi Lokasi KLB di Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2018




*Sumber : BNPB*

**Gambar 2.46.**
Distribusi Jenis KLB di Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2018




*Sumber : BNPB*

Dilihat dari jenis KLB yang paling banyak terjadi selama tahun 2015 - 2018 adalah keracunan makanan, campak, tetanus neotorum dan difteri seperti terlihat pada grafik diatas.

### 2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 2.3.1.3.1 Proporsi Panjang Jaringan jalan Dalam Kondisi Baik

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan yang semakin meningkat menyebabkan peningkatan pergerakan dan aktivitas orang, barang dan jasa. Salah satu infrastruktur utama dalam menunjang aktivitas manusia maupun aktivitas perekonomian adalah jalan. Keberadaan infrastruktur jalan sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi masyarakat serta untuk menjamin aksesibilitas antar wilayah.

Total panjang jalan pada tahun 2018 Jaringan jalan berstatus di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 18.769,44 km. Jaringan jalan tersebut terdiri atas jalan dengan status jalan nasional sebesar 8,53 persen atau sepanjang 1.600,18

km, jalan provinsi sebesar 8,06 persen atau sepanjang 1.513,66 km dan jalan kabupaten/kota sebesar 83,41 persen atau sepanjang 15.655,58 km yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

**Tabel 2.110.**
Komposisi Panjang Jalan Menurut Statusnya di Sumatera Selatan Tahun 2018

| Kabupaten/ Kota | Panjang Jalan Nasional (Km) | % | Panjang Jalan Provinsi (Km) | % | Panjang Jalan Kabupaten (Km) | % | Total Panjang Jalan (Km) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKU | 131,00 | 10,19 | 123,02 | 9,57 | 1.031,13 | 80,23 | 1.285,15 | 100 |
| OKI | 109,60 | 4,92 | 79,10 | 3,55 | 2.037,11 | 91,52 | 2.225,81 | 100 |
| Muara Enim | 178,38 | 10,98 | 171,21 | 10,54 | 1.275,32 | 78,49 | 1.624,91 | 100 |
| Lahat | 166,28 | 10,37 | 98,28 | 6,13 | 1.339,15 | 83,50 | 1.603,71 | 100 |
| Musi Rawas | 161,06 | 10,62 | 45,30 | 2,99 | 1.309,71 | 86,39 | 1.516,07 | 100 |
| Musi Banyuasin | 310,59 | 21,81 | 39,85 | 2,80 | 1.073,77 | 75,39 | 1.424,21 | 100 |
| Banyuasin | 118,96 | 8,71 | 48,51 | 3,55 | 1.198,60 | 87,74 | 1.366,07 | 100 |
| OKU Selatan | 0,00 | 0,00 | 191,23 | 21,26 | 708,13 | 78,74 | 899,36 | 100 |
| OKU Timur | 7,30 | 0,64 | 205,75 | 17,96 | 932,57 | 81,40 | 1.145,62 | 100 |
| Ogan Ilir | 64,15 | 5,85 | 156,75 | 14,29 | 876,00 | 79,86 | 1.096,90 | 100 |
| Empat Lawang | 35,38 | 3,11 | 117,56 | 10,33 | 984,60 | 86,56 | 1.137,54 | 100 |
| Muratara | 57,90 | 9,78 | 33,75 | 5,70 | 500,24 | 84,52 | 591,89 | 100 |
| PALI | 0,00 | 0,00 | 108,30 | 18,31 | 483,31 | 81,69 | 591,61 | 100 |
| Palembang | 96,20 | 11,50 | 58,93 | 7,04 | 681,75 | 81,46 | 836,88 | 100 |
| Prabumulih | 84,13 | 17,25 | 11,34 | 2,33 | 392,13 | 80,42 | 487,60 | 100 |
| Pagar Alam | 58,82 | 9,54 | 9,58 | 1,55 | 548,25 | 88,91 | 616,65 | 100 |
| Lubuk Linggau | 20,45 | 6,40 | 15,20 | 4,76 | 283,81 | 88,84 | 319,46 | 100 |
| **Sumatera Selatan** | **1.600,18** | **8,53** | **1.513,66** | **8,06** | **15.655,58** | **83,41** | **18.769,44** | **100** |

*Sumber: BBPJN III, Dinas PU Bina Marga Sumsel dan Data DAK Kab/Kota, 2018*

Dilihat dari kondisi kemantapan jalan Kewenangan Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2012-2018 dapat dikatakan bahwa kondisi jalan pada tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami kenaikan yakni dari 76,61% menjadi 81,59%, namun pada tahun 2013 s.d 2018 mengalami penurunan menjadi 61,22% atau sepanjang 923,33 km. Dengan demikian, masih adanya jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan yang belum dalam kondisi mantap. 38,78% dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat sepanjang sepanjang 586.99 km.

**Tabel 2.111.**
Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2014

| Kab/Kota | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Panjang | Mantap (B) | % Mantap | Panjang | Mantap (B) | % Mantap | Panjang | Mantap (B) | % Mantap |
| Ogan Komering Ulu | 138,52 | 101,62 | 73,36% | 138,52 | 115,82 | 83,61% | 138,52 | 96,11 | 69,39% |
| Ogan Komering Ilir | 79,10 | 52,90 | 66,88% | 79,10 | 45,00 | 56,89% | 79,10 | 51,77 | 65,45% |
| Muara Enim | 215,00 | 172,10 | 80,05% | 215,00 | 161,19 | 74,97% | 141,70 | 126,67 | 89,39% |
| PALI | na | na | na | na | na | na | 73,30 | 72,90 | 99,45% |
| Lahat | 87,93 | 88,59 | 100,75% | 87,93 | 102,25 | 99,49% | 87,93 | 82,59 | 93,92% |
| Musi Rawas | 89,65 | 72,48 | 80,85% | 89,65 | 67,30 | 75,07% | 89,65 | 79,38 | 88,54% |
| Musi Rawas Utara | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Musi Banyuasin | 40,85 | 29,85 | 73,07% | 40,85 | 27,95 | 68,42% | 40,85 | 38,85 | 95,10% |
| Palembang | 86,91 | 76,27 | 87,76% | 83,91 | 73,43 | 87,51% | 83,91 | 79,65 | 94,93% |
| Prabumulih | 18,40 | 14,10 | na | 18,40 | 15,01 | na | 18,40 | 17,11 | 93,00% |
| Pagaralam | 5,00 | 3,83 | na | 5,00 | 4,08 | Na | 5,00 | 4,40 | 87,94% |

| Kab/Kota | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Panjang | Mantap (B) | % Mantap | Panjang | Mantap (B) | % Mantap | Panjang | Mantap (B) | % Mantap |
| OKU Selatan | 191,23 | 161,23 | 84,31% | 191,23 | 173,33 | 90,64% | 191,23 | 189,28 | 98,98% |
| OKU Timur | 205,75 | 148,65 | 72,25% | 205,75 | 154,85 | 75,26% | 205,75 | 172,80 | 83,99% |
| Ogan Ilir | 126,35 | 82,80 | 65,53% | 126,35 | 112,75 | 89,24% | 126,35 | 77,93 | 61,68% |
| Empat Lawang | 120,09 | 92,00 | 76,61% | 120,09 | 97,98 | 81,59% | 120,09 | 114,80 | 95,59% |
| Lubuk Linggau | 4,60 | 3,52 | na | 4,60 | 3,75 | na | 4,60 | 3,39 | 73,68% |
| Banyuasin | 56,50 | 23,00 | 40,71% | 56,50 | 38,90 | 68,85% | 56,50 | 43,42 | 76,85% |
| **Provinsi Sumsel** | **1.465,87** | **1.122,94** | **76,61%** | **1.462,87** | **1.193,59** | **81,59%** | **1.462,87** | **1.251,05** | **85,52%** |

*Sumber : BPJN III, DPU BM Sumsel, DAK Kab/Kota*

**Tabel 2.112.**
Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2015-2017

| Kab/Kota | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Panjang | Mantap (B) | % Mantap | Panjang | Mantap (B) | % Mantap | Panjang | Mantap (B) | % Mantap |
| Ogan Komering Ulu | 138,52 | 107,06 | 77,29% | 123,02 | 110,02 | 89,43% | 123,02 | 101,02 | 82,12% |
| Ogan Komering Ilir | 79,10 | 54,09 | 68,38% | 79,10 | 75,10 | 94,94% | 79,10 | 56,50 | 71,43% |
| Muara Enim | 141,70 | 124,81 | 88,08% | 189,17 | 89,82 | 47,48% | 171,21 | 93,88 | 54,83% |
| PALI | 73,30 | 64,65 | 88,20% | 108,30 | 97,30 | 89,84% | 108,30 | 97,00 | 89,57% |
| Lahat | 100,08 | 97,81 | 97,73% | 98,28 | 90,78 | 92,37% | 98,28 | 79,25 | 80,64% |
| Musi Rawas | 39,70 | 34,13 | 85,97% | 39,68 | 36,95 | 93,12% | 45,30 | 34,46 | 76,07% |
| Musi Rawas Utara | 39,37 | 36,50 | 92,71% | 39,38 | 35,67 | 90,58% | 33,75 | 24,96 | 73,96% |
| Musi Banyuasin | 40,85 | 40,73 | 99,71% | 39,85 | 24,85 | 62,36% | 39,85 | 27,70 | 69,51% |
| Palembang | 127,04 | 120,62 | 94,95% | 64,15 | 62,147 | 96,88% | 58,93 | 54,047 | 91,72% |
| Prabumulih | na | na | na | 5,00 | 0,83 | 16,60% | 11,34 | 2,07 | 18,27% |
| Pagaralam | 10,78 | 9,60 | 89,05% | 9,58 | 6,58 | 68,68% | 9,58 | 7,56 | 78,91% |
| OKU Selatan | 191,23 | 168,06 | 87,88% | 191,23 | 165,23 | 86,40% | 191,23 | 154,18 | 80,63% |
| OKU Timur | 205,70 | 162,51 | 79,00% | 205,75 | 173,80 | 84,47% | 205,75 | 154,25 | 74,97% |
| Ogan Ilir | 126,35 | 102,96 | 81,49% | 145,13 | 123,55 | 85,13% | 156,75 | 92,55 | 59,04% |
| Empat Lawang | 120,56 | 103,81 | 86,11% | 117,56 | 99,06 | 84,26% | 117,56 | 101,21 | 86,09% |
| Lubuk Linggau | 15,22 | 12,33 | 81,04% | 15,20 | 14,44 | 95,00% | 15,20 | 11,88 | 78,16% |
| Banyuasin | 13,37 | 12,73 | 95,21% | 43,29 | 39,29 | 90,76% | 48,51 | 30,84 | 63,57% |
| **Provinsi Sumsel** | **1.462,86** | **1.252,40** | **85,6%** | **1.513,65** | **1.245,40** | **82,3%** | **1.513,65** | **1.123,35** | **74,2%** |

*Sumber : BPJN III, DPU BM Sumsel, DAK Kab/Kota*

Selain itu untuk mendukung tujuan ekonomi dan sosial infrastruktur sumber daya air juga penting antara lain infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan. Pada tahun 2017, kondisi jaringan irigasi kewenangan provinsi dengan kondisi baik sebesar 56,31%, rusak ringan sebesar 19,02%, rusak sedang sebesar 13,03% dan rusak berat sebesar 11,64%. Kondisi jaringan irigasi Provinsi yang rusak secara keseluruhan mencapai 43,64%. Untuk mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat terutama petani di pedesaaan melalui sektor pertaniaan maka Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan menyusun program/kegiatan untuk pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, dan Program/Kegiatan Penyediaan Air Baku yang dilaksanakan secara

bertahap selama 5 tahun, dan untuk keberlanjutan terutama bagi pengelolaan dan pemanfaatan juga mendorong sistem irigasi partisipatif yang didukung pendanaan Loan/APBN.

Terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Pelayanan Umum Jalan dan Jembatan tidak memiliki indikator SPM.

**Tabel 2.113.**
Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi di Sumatera Selatan
Tahun 2017

| No | Nama Daerah Irigasi (DI) | Luas (Ha) | | | Kondisi (%) TA 2017 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Daerah Irigasi | Areal Tanam | Potensi Tanam | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat |
| **Kab. Empat Lawang** | | | | | | | | |
| 1 | D.I. Air Keban | 1.500 | 975 | 525 | 70,00 | 7,67 | 13,00 | 9,33 |
| | | | | | | | | |
| **Kab. Lahat** | | | | | | | | |
| 2 | D.I. Air Gohong | 1.200 | 780 | 420 | 48,50 | 26,83 | 16,33 | 8,33 |
| 3 | D.I. Air Makim | 1.000 | 650 | 350 | 54,00 | 21,00 | 13,00 | 12,00 |
| 4 | D.I. Air Manna I | 1.500 | 975 | 525 | 76,67 | 10,00 | 13,33 | 0,00 |
| 5 | D.I. Air Merendang | 1.341 | 872 | 469 | 52,00 | 31,00 | 13,00 | 4,00 |
| 6 | D.I. Air Mulak | 1.645 | 1.069 | 576 | 57,00 | 30,00 | 13,00 | 0,00 |
| 7 | D.I. Air Pangi | 1.001 | 651 | 350 | 0,00 | 15,98 | 8,99 | 75,02 |
| 8 | D.I. Masam Bulau | 1.500 | 975 | 525 | 58,00 | 26,00 | 16,00 | 0,00 |
| 9 | D.I. Tebing Panjang | 1.256 | 816 | 440 | 58,00 | 21,00 | 13,00 | 8,00 |
| | | | | | | | | |
| **Kab. Muara Enim** | | | | | | | | |
| 10 | D.I. Ataran Sungai Air Deras (Cahaya Alam) | 1.000 | 650 | 350 | 47,00 | 21,00 | 13,00 | 19,00 |
| 11 | D.I. Danau Tampang | 2.690 | 1.749 | 941 | 49,44 | 21,00 | 25,84 | 3,72 |
| 12 | D.I. Endikat Bengkok /T. Bute | 1.500 | 975 | 525 | 41,67 | 23,67 | 16,67 | 18,00 |
| 13 | D.I. Lecah Paye | 1.295 | 842 | 453 | 46,33 | 22,01 | 9,58 | 22,08 |
| 14 | D.I. Tunggul Bute | 2.400 | 1.560 | 840 | 51,00 | 25,00 | 13,00 | 11,00 |
| | | | | | | | | |
| **Kab. Musi Rawas** | | | | | | | | |
| 15 | D.I. Air Deras I | 1.461 | 950 | 511 | 76,66 | 7,94 | 6,91 | 8,49 |
| 16 | D.I. Air Gegas | 2.300 | 1.495 | 805 | 60,00 | 21,00 | 13,00 | 6,00 |
| 17 | D.I. Air Satan | 1.175 | 764 | 411 | 72,77 | 10,21 | 10,21 | 6,81 |
| 18 | D.I. Megang Tikip | 1.077 | 700 | 377 | 58,87 | 22,93 | 13,00 | 5,20 |
| | | | | | | | | |
| **Kota Pagaralam** | | | | | | | | |
| 19 | D.I. Air Merah | 1.500 | 975 | 525 | 58,00 | 21,00 | 13,00 | 8,00 |
| 20 | D.I. Pasemah | 1.107 | 720 | 387 | 52,39 | 15,99 | 13,37 | 18,25 |
| 21 | D.I. Selangis Besar/ Jemair | 1.020 | 663 | 357 | 34,71 | 20,98 | 22,75 | 21,57 |
| 22 | D.I. Selangis Kecil | 1.352 | 879 | 473 | 58,00 | 21,00 | 13,00 | 8,00 |
| | | | | | | | | |
| **Kab. OKU Selatan** | | | | | | | | |
| 23 | D.I. Air Pius | 1.600 | 1.040 | 560 | 80,88 | 13,00 | 6,13 | 0,00 |
| 24 | D.I. Air Sungkai | 1.500 | 975 | 525 | 63,33 | 8,67 | 8,67 | 19,33 |
| 25 | D.I. Air Sunur | 1.701 | 1.106 | 595 | 75,66 | 6,11 | 7,64 | 10,58 |
| | | | | | | | | |
| **Kab. OKU Timur** | | | | | | | | |
| 26 | D.I. Air Gilas | 1.050 | 683 | 367 | 58,00 | 21,00 | 13,00 | 8,00 |
| 27 | D.I. Lebak Semendawa | 2.102 | 1.366 | 736 | 63,04 | 19,27 | 10,89 | 6,80 |
| 28 | D.I. Lebak Datuk | 1.768 | 1.149 | 619 | 54,81 | 21,38 | 15,44 | 8,37 |
| | **JUMLAH** | **41.541** | **27.004** | **14.537** | **56,31** | **19,02** | **13,03** | **11,64** |

*Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

**Tabel 2.114.**
Kondisi Jaringan Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi
di Sumatera Selatan Tahun 2017

| No | Nama Daerah Irigasi Rawa (DIR) | Luasan Potensial Baku (Ha) | Kecamatan | Sumber Air baku Daerah Irigasi Rawa |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Muara Enim | | | | |
| 1. | D.I.R Air Putak | 1.200 | Kec. Gelumbang | Sungai Air Belida dan Sungai Keruh |
| Kabupaten Musi Banyuasin | | | | |
| 2. | D.I.R Bailangu | 2.150 | Kec. Sekayu | Sungai Musi dan Batangharileko |
| 3. | D.I.R Buntiale | 2.000 | Kec. Batangharileko | Sungai Batangharileko |
| 4. | D.I.R Danau Cala | 1.769 | Kec. Lais | Sungai Musi |
| 5. | D.I.R Lumpatan | 1.300 | Kec. Sekayu | Sungai Musi |
| 6. | D.I.R Pinang Banjar | 1.000 | Kec. Sungai Lilin | Sungai Supat dan Sungai Biduk |
| 7. | D.I.R Rantau Panjang | 1.922 | Kec. Lawang Wetan | Sungai Musi dan Sungai Putat |
| Kabupaten Ogan Illir | | | | |
| 8. | D.I.R Lbk Bakung | 2.975 | Kec. Indralaya Utara | Sungai Belida, Sungai Keruh |
| 9. | D.I.R Lbk Lorok | 1.681 | Kec. Indralaya Utara | Sungai Keramasan |
| 10. | D.I.R Lbk Parit | 1.575 | Kec. Indralaya Utara | Sungai Keramasan |
| 11. | D.I.R Lbk Purna Jaya | 2.002 | Kec. Indralaya Utara | Sungai Keramasan |
| 12. | D.I.R Lbk Tanjung Pering | 2.559 | Kec. Indralaya Utara | Sungai Kelekar |
| 13. | D.I.R Lbk Palas | 2.450 | Kec. Muara Kuang | Sungai Ogan |
| 14. | D.I.R Lbk Tiang | 1.750 | Kec. Pemulutan | Sungai Ogan |
| Kabupaten Ogan Komering Illir | | | | |
| 15 | D.I.R Bumi Agung | 1.750 | Kec. Tanjung Lubuk | Sungai Komering |
| 16. | D.I.R Jejawi | 1.400 | Kec. Jejawi | Sungai Komering |
| 17 | D.I.R Mesuji Illir/ Sungai Buayo | 2.916 | Kec. Mesuji | Sungai Buaya, Sungai Komering |
| 18 | D.I.R Pancur | 2.450 | Kec. Kayu Agung | Sungai Komering, Sungai Lamping |
| 19. | D.I.R Sangkaji | 1.400 | Kec. Pangkalan Lampam | Sungai Komering dan Sungai Lempuing |
| 20 | D.I.R Suka Pulih | 1.750 | Kec. Lempuing | Sungai Komering dan Sungai Lempuing |
| 21 | D.I.R Ulak Jermun/Jermal | 1.050 | Kec. Sirah Pulau Padang | Sungai SP Padang dan Sungai Komering |
| 22. | D.I.R Doros | 1.400 | Kec. Mesuji Raya | Sungai Komering |
| Kabupaten OKU Timur | | | | |
| 23 | D.I.R Labak Datuk | 1.960 | Kec. Madang Suku I dan Madang Suku II | Sungai Komering |
| 24 | D.I.R Lebak Pauh | 2.100 | Kec. Buay Pemuka Peliung | Sungai Komering |
| 25 | D.I.R Lebak Semendawai | 1.400 | Kec. Cempaka | Sungai Komering |
| 26. | D.I.R Lebak Tobong | 2.100 | Kec. Madang Suku I | Sungai Tobong, Sungai komering |

*Sumber: Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

### 2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kebutuhan perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang. Rumah digunakan sebagai tempat untuk berlindung terhadap gangguan dari luar dan sebagai tempat untuk tumbuh, hidup, berinteraksi dan berbagai fungsi lainnya. Oleh karena rumah harus mampu memberikan rasa nyaman

bagi penghuninya dengan syarat harus memenuhi aspek-aspek kesehatan yang sangat penting. Data keadaan perumahan menggambarkan salah satu dimensi kesejahteraan rumah tangga. Adapun beberapa aspek yang digambarkan dari fasilitas perumahan adalah adanya akses rumah tangga terhadap air bersih, sanitasi layak akses terhadap sumber listrik dan berbagai indikator lainnya.

#### 2.3.1.4.1 Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih

Salah satu aspek perumahan yang sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia adalah air bersih. Akses rumah tangga ke sumber air bersih yang layak di Sumatera Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun pada periode tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 sebesar 59,77 persen dan meningkat menjadi 59.97 persen tahun 2014, dan terus meningkat menjadi 62.71 persen pada tahun 2017. Akses terhadap air bersih harus terus ditingkatkan karena angka tersebut masih jauh di bawah indikator nasional yaitu 71,27 persen pada tahun 2016.

Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan persentase daerah dengan sumber air bersih terbesar terdapat di Kota Palembang sebesar 97,28 persen sedangkan persentase rumah tangga dengan sumber air bersih terkecil terdapat di Kabupaten Empat Lawang yaitu 22,19 persen. Rendahnya persentase pengguna air bersih di Kabupaten Empat Lawang menjadi perhatian utama pemerintah karena masih banyaknya penduduk yang tidak atau belum mendapatkan akses terhadap air bersih karena air bersih merupakan salah satu kunci kesehatan masyarakat. Target pemerintah adalah akses terhadap air bersih dapat mencapai 100 persen pada tahun 2019.

**Tabel 2.115.**
Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Bersih
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| No. | Kabupaten/Kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 67,51 | 71,28 | 62,57 | 65,41 | 68,76 | 61,52 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 39,62 | 42,16 | 57,08 | 59,75 | 61,83 | 59,54 |
| 3 | Muara Enim | 58,74 | 54,58 | 67,59 | 72,17 | 61,02 | 65,63 |
| 4 | Lahat | 42,75 | 38,29 | 41,89 | 54,68 | 45,83 | 43,70 |
| 5 | Musi Rawas | 55,3 | 54,22 | 58,91 | 61,62 | 59,34 | 59,52 |
| 6 | Musi Banyuasin | 43,22 | 49,32 | 60,37 | 60,40 | 58,28 | 65,47 |
| 7 | Banyuasin | 45,58 | 48,32 | 47,71 | 43,55 | 41,71 | 44,49 |
| 8 | OKU Selatan | 39,46 | 39,77 | 41,52 | 28,00 | 36,86 | 41,60 |
| 9 | OKU Timur | 69,16 | 69,16 | 72,48 | 59,14 | 61,50 | 59,06 |
| 10 | Ogan Ilir | 57,76 | 56,11 | 56,40 | 57,97 | 61,14 | 58,29 |
| 11 | Empat Lawang | 37,20 | 20,32 | 32,08 | 12,11 | 22,19 | 26,03 |
| 12 | PALI | na | na | 57,89 | 64,09 | 61,39 | 61,46 |
| 13 | Muratara | na | na | 51,87 | 50,39 | 46,20 | 53,45 |
| 14 | Palembang | 96,07 | 98,37 | 97,92 | 96,68 | 97,28 | 95,03 |
| 15 | Prabumulih | 6,47 | 72,27 | 68,73 | 72,85 | 66,51 | 69,64 |
| 16 | Pagar Alam | 35,75 | 32,19 | 59,39 | 52,38 | 53,87 | 49,57 |
| 17 | Lubuk Linggau | 68,26 | 64,24 | 66,17 | 73,57 | 65,17 | 61,84 |
| **Sumatera Selatan** | | **59,77** | **59,97** | **65,16** | **63,24** | **62,71** | **62,84** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2017*

Terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pelaksanaan SPM Air Minum Regional/Lintas Kabupaten di Sumatera belum dapat dilaksanakan karena kondisi geografis antar Kabupaten masih dominan berupa hutan dan

jarak yang cukup jauh, sehingga membutuhkan dana yang besar dan kesultan dalam pelaksanaan distribusi. Kemudian terdapat ego antar Kabupaten/Kota dimana masing - masing kabupaten/kota memiliki Intake dan IPA (Intalasi Pengelolaan Air Minum) sehingga merasa mampu mengelolah sendiri kebutuhan akses air minum wilayahnya yang berpengaruh pada PAD kabupaten/kota tersebut.

#### 2.3.1.4.2 Rumah Tangga Pengguna Listrik

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan kenyamanan suatu tempat tinggal. Salah satu aspek penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar perumahan adalah adanya sumber listrik sebagai penerangan. Pada tahun 2012 persentase sumber listrik di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 94,02 persen dan terus meningkat menjadi 96,62 persen di tahun 2015 kemudian pada tahun 2016 persentase rumah tangga yang memiliki listrik meningkat menjadi 97,64 persen.

**Tabel 2.116.**
Persentase Rumah Tangga Memiliki Sumber Listrik
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2018

| No. | Kabupaten/Kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 96,27 | 98,24 | 94,29 | 99,07 | 97,72 | 99,15 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 91,60 | 95,96 | 94,85 | 95,57 | 97,08 | 98,83 |
| 3 | Muara Enim | 96,22 | 95,67 | 98,88 | 98,21 | 99.15 | 99,46 |
| 4 | Lahat | 97,03 | 97,70 | 99,12 | 98,88 | 99,81 | 99,28 |
| 5 | Musi Rawas | 92,30 | 95,83 | 98,98 | 98,77 | 99,06 | 99,79 |
| 6 | Musi Banyuasin | 93,24 | 96,40 | 96,53 | 97,65 | 95,78 | 98,30 |
| 7 | Banyuasin | 91,99 | 97,23 | 98,58 | 98,33 | 99,05 | 98,03 |
| 8 | OKU Selatan | 75,36 | 77,98 | 88,73 | 80,70 | 94,05 | 93,51 |
| 9 | OKU Timur | 98,17 | 98,20 | 99,22 | 99,26 | 99,59 | 99,57 |
| 10 | Ogan Ilir | 92,83 | 99,05 | 97,04 | 98,77 | 95.01 | 98,37 |
| 11 | Empat Lawang | 92,35 | 91,24 | 92,98 | 96,53 | 96.10 | 95,85 |
| 12 | PALI | na | na | 95,33 | 98,02 | 99,61 | 99,58 |
| 13 | Muratara | na | na | 97,05 | 96,18 | 99,67 | 94,48 |
| 14 | Palembang | 99,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Prabumulih | 98,79 | 99,75 | 98,96 | 100,00 | 98,89 | 100,00 |
| 16 | Pagar Alam | 98,15 | 97,98 | 97,02 | 99,08 | 97,72 | 99,12 |
| 17 | Lubuk Linggau | 99,78 | 99,79 | 99,60 | 99,39 | 99,87 | 100,00 |
| Sumatera Selatan | | 94,58 | 96,62 | 97,45 | 97,64 | 93,64 | 98,74 |

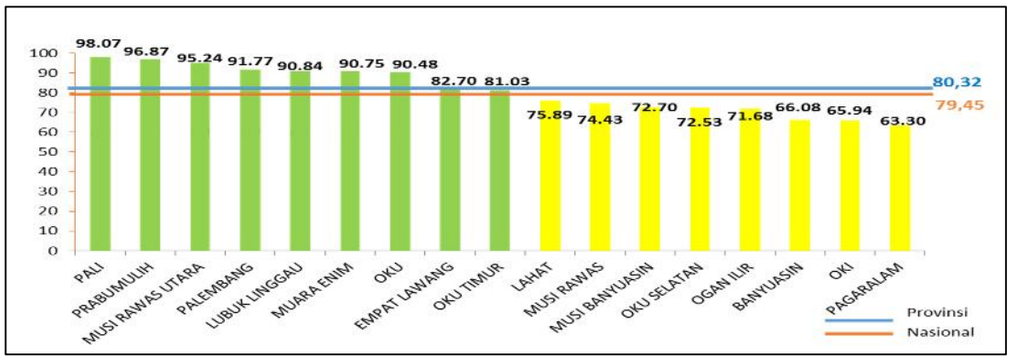
*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2019*

Menurut Kabupaten dan Kota daerah dengan persentase rumah tangga terbanyak yang memiliki sumber listrik adalah Kota Palembang dan Prabumulih sebesar 100,00 persen yang artinya seluruh rumah tangga yang ada di Kota Palembang telah menggunakan listrik. Sedangkan persentase rumah tangga terkecil yang memakai sumber listrik terdapat di daerah Kabupaten OKU Selatan sebesar 93,51 persen. Peningkatan terhadap jumlah rumah tangga yang memiliki sumber listrik harus terus diupayakan pemerintah sehingga bisa mencapai angka 100 persen di seluruh kabupaten/kota, yang berarti bahwa seluruh rumah tangga di Sumatera Selatan telah memiliki sumber listrik.

### 2.3.1.4.3 Rumah Tangga Bersanitasi

Laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan fasilitas terhadap akses sanitasi layak oleh rumah tangga penduduk di Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun persentase rumah tangga terhadap akses sanitasi layak sudah diatas 50 persen, namun pemerintah tetap harus memberikan perhatian khusus dalam penyediaan infrastruktur sanitasi termasuk sarana dan prasarananya karena capaian Sumatera Selatan tahun 2018 masih di bawah angka indikator nasional yaitu 80,32 persen.

**Gambar 2.47.**
Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018




*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2018*

Secara keseluruhan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak di Provinsi Sumatera Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk sudah cukup meingkat dari tahun sebelumnya. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 sebesar 54,20 persen dan meningkat menjadi 56,96 persen di tahun 2014. Pada tahun 2015 persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak sebanyak 55.84 persen dan meningkat menjadi 80,32 persen pada tahun 2018.

**Tabel 2.117.**
Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak
Tahun 2013-2018

| No. | Kabupaten/Kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 64,50 | 63,18 | 64,12 | 74,46 | 91,41 | 90,48 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 35,60 | 42,26 | 46,59 | 55,41 | 68,19 | 65,94 |
| 3 | Muara Enim | 65,70 | 61,25 | 61,13 | 72,08 | 91,68 | 90,75 |
| 4 | Lahat | 46,00 | 43,44 | 47,19 | 53,47 | 68,65 | 75,89 |
| 5 | Musi Rawas | 37,70 | 40,88 | 42,11 | 61,98 | 63,42 | 74,43 |
| 6 | Musi Banyuasin | 44,30 | 49,54 | 49,80 | 64,35 | 58,91 | 72,70 |
| 7 | Banyuasin | 42,50 | 52,16 | 47,94 | 57,32 | 73,35 | 66,08 |
| 8 | OKU Selatan | 29,00 | 32,11 | 35,57 | 44,32 | 60,54 | 72,53 |
| 9 | OKU Timur | 58,30 | 61,20 | 64,76 | 72,39 | 82,75 | 81,03 |
| 10 | Ogan Ilir | 50,90 | 55,50 | 51,11 | 73,27 | 74,86 | 71,68 |

| No. | Kabupaten/Kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Empat Lawang | 37,90 | 14,46 | 28,95 | 20,68 | 67,13 | 82,70 |
| 12 | PALI | na | na | 57,18 | 54,42 | 92,01 | 98,07 |
| 13 | Muratara | na | na | 37,51 | 53,76 | 74,57 | 95,24 |
| 14 | Palembang | 78,20 | 84,40 | 75,70 | 89,39 | 94,79 | 91,77 |
| 15 | Prabumulih | 68,00 | 80,65 | 80,35 | 92,08 | 98,54 | 96,87 |
| 16 | Pagar Alam | 47,80 | 51,10 | 41,55 | 45,34 | 33,80 | 63,30 |
| 17 | Lubuk Linggau | 84,40 | 75,12 | 66,48 | 81,40 | 88,42 | 90,84 |
| **Sumatera Selatan** | | **54,20** | **56,96** | **55,84** | **66,78** | **78,62** | **80,32** |

*Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2017*

Data sensus nasional (susenas) menunjukkan bahwa persentase rumah tangga penduduk yang memiliki akses sanitasi layak pada tahun 2018 adalah 80,32 persen. Angka tersebut merupakan peningkatan dari persentase sanitasi layak pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Kabupaten dan Kota persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak pada tahun 2018 terdapat di Kabupaten PALI sebesar 98,07 persen, Kota Prabumulih sebesar 96,87 persen dan Kabupaten Muratara sebesar 95,24 persen. Sedangkan persentase rumah tangga terendah dengan akses sanitasi layak adalah Kota Pagar Alam sebesar 63,30 persen.

### 2.3.1.4.4. Lingkungan Pemukiman Kumuh

Pada tahun 2016 di Sumatera Selatan proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak sebesar 9,8 persen. Lingkungan pemukiman kumuh dapat terus diturunkan jumlahnya seiring dengan peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Sumatera Selatan pada tahun 2016 sebesar 92,23 persen. Angka ini masih dibawah indikator nasional yaitu sebesar 93,98 persen.

**Tabel 2.118.**
Data Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Oleh Pemda Bekerjasama dengan Kementerian

| No. | Provinsi/Kabupaten/Kota | Rumah Murah | Rusunawa | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumatera Selatan | 2.000 | 1 Kawasan | Pembangunan Rusunawa di kawasan Jakabaring |
| 2 | Palembang | na | 3 Kawasan | Pembangunan Rusunawa pada kawasan Kasnariasyah, 5 Ulu dan IAIN Raden Fatah |
| 3 | Musi Banyuasin | 800 | na | na |
| 4 | Ogan Ilir | na | 1 Kawasan | Pembangunan Rusunawa di Kawasan Unsri Indralaya |
| Jumlah | | 2.800 | 5 Kawasan | |

*Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017*

### 2.3.1.4.5 Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni merupakan rumah dengan kondisi bangunan tidak layak dan tidak memiliki akses prasarana yang layak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 menunjukan bahwa rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Selatan tiap tahun mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2015 sebesar 8,87%, tahun 2016 sebesar 9,96%, dan tahun 2017 sebesar 13,35%. Wilayah di Provinsi Sumatera Selatan yang paling banyak terdapat rumah tidak layak huninya berada di Kabupaten Empat Lawang sebesar 25,36%, sedangkan yang paling sedikit berada di Kota Palembang sebesar 3,91%. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan rumah tidak layak huni yang dimiliki oleh setiap rumah tangga dalam rangka pemenuhan hunian yang layak dengan didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.

**Tabel 2.119.**
Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Selatan

| NO | KABUPATEN/KOTA | TAHUN 2015 | | | TAHUN 2016 | | | TAHUN 2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| 1 | Kab.Ogan Komering Ulu | 7,15 | 11,03 | 9,09 | 8,02 | 7,95 | 7,99 | 5,18 | 18,73 | 11,96 |
| 2 | Kab.Ogan Komering Illir | 11,00 | 9,17 | 10,09 | 11,90 | 5,24 | 8,57 | 8,98 | 14,21 | 11,60 |
| 3 | Kab.Muara Enim | 8,02 | 6,45 | 7,23 | 9,92 | 7,28 | 8,60 | 9,76 | 19,08 | 14,42 |
| 4 | Kab. Lahat | 10,06 | 10,19 | 10,13 | 12,13 | 8,21 | 10,17 | 8,60 | 23,91 | 16,25 |
| 5 | Kab. Musi Rawas | 5,83 | 5,62 | 5,73 | 7,63 | 4,60 | 6,12 | 6,33 | 18,30 | 12,31 |
| 6 | Kab. Musi Banyuasin | 11,89 | 9,11 | 10,50 | 14,08 | 4,13 | 9,11 | 11,60 | 17,86 | 14,73 |
| 7 | Kab. Banyuasin | 8,74 | 2,53 | 5,64 | 13,99 | 9,42 | 11,70 | 11,21 | 23,99 | 17,60 |
| 8 | Kab. OKU Selatan | 15,40 | 18,74 | 17,07 | 17,05 | 20,22 | 18,63 | 12,08 | 33,66 | 22,87 |
| 9 | Kab. OKU Timur | 4,88 | 2,36 | 3,62 | 5,76 | 3,27 | 4,51 | 3,71 | 15,63 | 9,67 |
| 10 | Kab. Ogan Illir | 14,61 | 8,94 | 11,78 | 18,01 | 9,61 | 13,81 | 11,62 | 19,51 | 15,56 |
| 11 | Kab. Empat Lawang | 11,65 | 20,58 | 16,11 | 13,18 | 18,97 | 16,07 | 9,35 | 41,37 | 25,36 |
| 12 | Kab. PALI | 14,01 | 8,74 | 11,38 | 17,58 | 14,05 | 15,82 | 10,15 | 19,67 | 14,91 |
| 13 | Kab. Musi Rawas Utara | 10,37 | 18,20 | 14,28 | 13,11 | 17,29 | 15,20 | 10,71 | 26,48 | 18,59 |
| 14 | Kota Palembang | 7,83 | 0,65 | 4,24 | 10,72 | 0,53 | 5,63 | 6,44 | 1,38 | 3,91 |
| 15 | Kota Prabumulih | 4,68 | 2,48 | 3,58 | 6,69 | 1,92 | 4,31 | 5,00 | 12,98 | 8,99 |
| 16 | Kota Pagaralam | 10,58 | 5,37 | 7,97 | 13,28 | 6,58 | 9,93 | 8,79 | 17,59 | 13,19 |
| 17 | Kota Lubuk Linggau | 2,28 | 2,32 | 2,30 | 3,58 | 2,68 | 3,13 | 4,46 | 15,27 | 9,86 |
| 18 | Provinsi Sumatera Selatan | 9,35 | 8,38 | 8,87 | 11,57 | 8,35 | 9,96 | 8,47 | 18,24 | 13,35 |

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018*

**Keterangan:**
A = Persentase Rumah Tangga Perkotaan dan Perdesaan yang kondisi bangunan tidak layak
B = Persentase RT Perkotaan dan Perdesaan yang tidak memiliki akses prasarana layak
C = Persentase RT Perkotaan dan Perdesaan Rumah Tidak Layak Huni

### 2.3.1.4.6 Akses Kepemilikan Rumah

Berdasarkan Data Statistik kesejahteraan rakyat tahun 2016 dan 2017 BPS, Jumlah Kepala Keluarga (KK) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

yang tidak memiliki rumah jumlahnya tetap sebanyak 78.181 KK, sedangkan jumlah KK non MBR yang tidak memiliki rumah mengalami penurunan sebanyak 46.225 KK dari 330.936 KK menjadi 284.795 KK. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masih adanya ketimpangan/backlog bagi Kepala Keluarga/Rumah Tangga MBR yang tidak memiliki rumah sehingga perlu adanya upaya penyediaan perumahan bagi MBR.

**Tabel 2.120.**
Jumlah Kepala Keluarga Kekurangan Rumah (*Backlog*)
di Provinsi Sumatera Selatan

| No | Wilayah | KK MBR yang Tidak memiliki Rumah | | KK Non MBR yang Tidak Memiliki rumah | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 1 | Ogan Komering Ulu | 3.792 | 3.792 | 16.233 | 15.997 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 4.549 | 4.549 | 19.706 | 13.417 |
| 3 | Muara Enim | 4.154 | 4.154 | 19.667 | 22.821 |
| 4 | Lahat | 5.266 | 5.266 | 17.247 | 14.059 |
| 5 | Musi Rawas | 4.004 | 4.004 | 3.260 | 3.946 |
| 6 | Musi Banyuasin | 4.047 | 4.047 | 14.054 | 11.813 |
| 7 | Banyuasin | 3.608 | 3.608 | 16.761 | 7.579 |
| 8 | OKU Selatan | 2.603 | 2.603 | 10.136 | 15.183 |
| 9 | OKU Timur | 312 | 312 | 15.890 | 10.620 |
| 10 | Ogan Ilir | 2.023 | 2.023 | 15.929 | 14.340 |
| 11 | Empat Lawang | 2.047 | 2.047 | 10.026 | 8.934 |
| 12 | Pali | 923 | 923 | 2.264 | 5.218 |
| 13 | Muratara | 2.730 | 2.730 | 16.672 | 16.672 |
| 14 | Palembang | 31.694 | 31.694 | 122.327 | 100.557 |
| 15 | Prabumulih | 2.201 | 2.201 | 9.840 | 6.512 |
| 16 | Pagar Alam | 909 | 909 | 7.839 | 6.612 |
| 17 | Lubuk Linggau | 3.403 | 3.403 | 13.085 | 10.432 |
| **Sumatera Selatan** | | **78.265** | **78.265** | **330.936** | **284.711** |

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018*

### 2.3.1.5. Penataan Ruang

#### 2.3.1.5.1 Persentase Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap Pemerintah Daerah Provinsi memiliki wewenang untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berfungsi untuk pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi. Wewenang tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah provinsi, pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi sangat penting fungsinya dalam tata ruang wilayah perkotaan. RTH merupakan salah satu indikator untuk menuju kota hijau (*green city*). Dalam kurun waktu 2012-2017 RTH yang ada di Kota Palembang sebagai pusat ibukota Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil meningkatkan persentase RTH sesuai dengan amanat perundang-undangan

bahwa masing-masing kota minimal harus menyediakan 30 persen RTH. Pada tahun 2017 Palembang telah memenuhi standar minimal RTH di perkotaan dengan persentase RTH sebesar 30 persen.

**Tabel 2.121.**
Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Ibukota Provinsi

| Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase RTH | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |

*Sumber: BKPRD Provinsi Sumatera Selatan, 2017*

### 2.3.1.5.2 Batas Administrasi antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi

Belum seluruhnya Batas Administrasi Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan berstatus definitif, di mana masih terdapat 14 Kabupaten/Kota yang batas wilayah administrasi belum definitif dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, di mana terdapat 3 Kabupaten/Kota yang sedang dalam proses penerbitan Permendagri Penetapan Batas Wilayah, yakni Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, segmen batas wilayah yang telah diselesaikan, yakni pada tahun 2014 sebanyak 2 segmen antar kabupaten/kota dengan 2 permendagri, pada tahun 2017 sebanyak 18 segmen antar provinsi dengan 18 permendagri dan 5 segmen antar kabupaten/kota dengan 4 permendagri, dan pada tahun 2018 telah diterbitkan 8 Permendagri (8 Segmen antar provinsi dan 1 Segmen antar kabupaten/kota), sedangkan 7 segmen lagi antar kabupaten/kota sedang proses penerbitan permendagri. Dengan demikian, masih tersisa 21 segmen antar kab/kota yang belum terselesaikan batas wilayah. Adapun batas administrasi yang telah definitif yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negerinya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.122.**
Batas Adminitrasi Wilayah Definitif

| No. | Tahun | Segmen Batas | Permendagri |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | - 2 segmen antar Kabupaten/Kota<br>1. Kab. Musi Rawas dengan Kab. Musi Banyuasin<br>2. Kab. Musi Banyuasin dengan Kab. Musi Rawas Utara | Permendagri No. 13/2014 dan Permendagri No. 76/2014 |
| 2 | 2017 | - 18 segmen antar provinsi (Sumatera Selatan dengan Bengkulu dan Jambi)<br>- 4 segmen antar Kabupaten/Kota<br>1. Kab. Banyuasin – Kab. PALI<br>2. Kota Prabumulih – Kab. PALI<br>3. Kab. Musi Rawas – Kab. Muara Enim<br>4. Kab. Musi Rawas – Kab. PALI | Antar Provinsi: Permendagri No. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 126, 127, 128, 129, 130, dan 131 Tahun 2017 |

| No. | Tahun | Segmen Batas | Permendagri |
|---|---|---|---|
| | | | Antar Kab/Kota: Permendagri No. 43, 44, 45, dan 46 Tahun 2017 |
| 3 | 2018 | - 8 segmen antar provinsi<br>1. Kab. OKI Prov. Sumsel – Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung<br>2. Kab. OKI Prov. Sumsel – Kab. Mesuji Prov. Lampung dan Kab. OKI Prov. Sumsel – Kab. Tulang Bawang Barat Prov. Lampung<br>3. Kab. OKI Prov. Sumsel – Kab. Way Kanan Prov. Lampung<br>4. Kab. OKU Timur Prov. Sumsel – Kab. Way Kanan Prov. Lampung<br>5. Kab. OKU Selatan Prov. Sumsel – Kab. Way Kanan Prov. Lampung<br>6. Kab. OKU Selatan dengan Kab. Lampung Barat<br>7. Kab. OKU Selatan Prov. Sumsel – Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung<br>- 1 Segmen antar Kabupaten/Kota Kota Palembang dan Kab. Muara Enim<br>- 7 segmen antar Kabupaten/Kota sedang proses penerbitan permendagri<br>- 21 segmen antar Kabupaten/Kota yang belum terselesaikan batas wilayahnya | Antar Provinsi: Permendagri No. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 Tahun 2018<br><br>Antar Kab/Kota: Permendagri No. 31 Tahun 2018 |

*Sumber: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

**2.3.1.5.3 Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomoar 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatatera Selatan Tahun 2016-2036 telah ditetapkan sebanyak 23 Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Sumatera Selatan yang perlu disusun Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasannya dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang berlaku. Pada tahun 2018, terdapat 1 KSP yang akan ditetapkan perdanya, yakni Kawasan Terpadu Tanjung Api-Api. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masih sedikitnya perda RTR KSP Provinsi Sumatera Selatan sehingga perlu segera dilakukan penyusunan dan penetapan perda RTR KSP. Adapun 23 KSP Sumatera Selatan, antara lain:

a. Kawasan Strategis dengan Kategori Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, meliputi:
   1. Kawasan Perkotaan Lubuk Linggau;
   2. Kawasan Muara Enim dan sekitarnya;
   3. Kawasan Terpadu Tanjung Api-api;

4. Kawasan Koridor Palembang - Prabumulih;
5. Kawasan Koridor Lahat - Muara Enim;
6. Kawasan Koridor Baturaja - Martapura;
8. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Danau Ranau;
9. Kawasan Agropolitan Musi Rawas;
10. Kawasan Agropolitan OKI;
11. Kawasan Agropolitan OKU Timur;
12. Kawasan Koridor Lubuk Linggau - Muara Beliti;
13. Kawasan Agropolitan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang;
14. Kawasan Minapolitan di Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, Banyuasin, OKU Selatan, Musi Banyuasin, Musi Rawas; dan
15. Kawasan Pengembangan Kerbau Rawa Pampangan dan Itik Pegagan (OKI dan Banyuasin).

b. Kawasan Strategis yang Memiliki Nilai Strategis Sosial Budaya meliputi:
   1. Kawasan Megalith Kota Pagar Alam;
   2. Kawasan Megalith Kabupaten Lahat; dan
   3. Kawasan Candi Bumi Ayu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
c. Kawasan Strategis yang Memiliki Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup meliputi:
   1. Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan;
   2. Kawasan Hutan Rawa Gambut Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir dan Muara Enim; dan
   3. Kawasan Kebun Raya Sriwijaya.
d. Kawasan Strategis yang Memiliki Fungsi Pendayagunaan SDA/Teknologi Tinggi, yaitu : Kawasan Panas Bumi di sepanjang Bukit Barisan di wilayah Sumatera Selatan meliputi:
   1. Kawasan Panas Bumi (Geothermal) Lumut Balai (OKU, Muara Enim dan Empat Lawang), dan Rantau Dedap (Kabupaten Muara Enim, Lahat dan Pagar Alam); dan
   2. Kawasan Panas Bumi Ulu Danau (OKU Selatan).
e. Kawasan Strategis yang Memiliki Fungsi Mempercepat Pertumbuhan Kawasan Tertinggal: Kawasan Tulung Selapan - Cengal Kabupaten OKI.

Terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar Urusan Penataan Ruang tidak memiliki indikator SPM.

#### 2.3.1.6 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pada tahun 2017 Ombudsman RI melakukan survey Survei Indeks Persepsi Maladministrasi (Inperma). Survey ini untuk menjelaskan tingkat kenyamanan masyarakat

dalam perolehan Pelayanan Publik. Dimensi yang diteliti dalam survei ini adalah *Pertama*, mengenai penyimpangan standar pelayanan yang indikatornya penundaan berlarut, permintaan imbalan, dan penyimpangan prosedur. *Kedua*, dimensi penyimpangan perilaku yang indikatornya tidak kompeten, tidak patut, dan diskriminasi pelayanan. Berdasarkan hasil Survei, Provinsi Sumatera Selatan termasuk kedalam 5 (lima) provinsi dengan dengan indeks terendah terjadinya maladministrasi yaitu dengan skor -0,039.

Kondisi ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi Sumatera Selatan cukup kondusif dan minim konflik baik yang mengarah kepada konflik SARA, Anarkisme maupun Separatisme, Penertiban ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lebih diupayakan secara promotif dan preventif melalui pendekatan persuasif. Kondisi tersebut berdampak pada situasi ketenteraman dan demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan termasuknya Provinsi Sumatera Selatan ke dalam 10 (sepuluh) provinsi dengan indeks demokrasi tertinggi dan telah menerima penghargaan IDI dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

**Gambar 2.48.**
Pemberian Penghargaan kepada Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Sepuluh Provinsi Terbaik Pertama Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017




Selain itu, pada tahun 2017 dalam Operasi penegakan Perda yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 350 kasus pelanggaran Perda/Perakada dan sebanyak 320 kasus yang telah diselesaikan. Dengan terjaminnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka pelayanan publik dapat dilaksanakan secara maksimal.

**Tabel 2.123.**
Persentase Penegakan Perda Tahun 2012-2017

| Komponen | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | 3 | 68 | 519 | 235 | 350 |
| Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 0 | 61 | 487 | 92 | 320 |
| **% penegakan Perda** | **0%** | **89,70%** | **93,83%** | **39%** | **91,4%** |

*Sumber : Sat. Pol. PP Provinsi Sumsel, 2018 (data diolah)*

Jenis pelayanan dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi yaitu pelayanan ketenteraman, dan ketertiban umum Provinsi.

**Tabel 2.124.**
SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

| Indikator Kinerja | REALISASI TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Persentase ketentraman dan kenyamanan lingkungan | 0,32 | 0,11 | 2,43 | 0,60 | 0,23 | 1,4 |
| Persentase meningkatnya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | 0,07 | 0,04 | 1,44 | 0,60 | 0,22 | 0,73 |
| Persentase meningkatnya ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat | na | na | 36,34 | 0,30 | 0,11 | 0,34 |
| Jumlah kasus pelanggaran perda | na | na | 68 | 519 | 235 | 406 |

*Sumber : Sat. Pol. PP Provinsi Sumsel, 2018 (data diolah)*

Jenis pelayanan dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi yaitu pelayanan ketenteraman, dan ketertiban umum Provinsi SUMSEL Sub urusan bencana.

Bersadarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dikarenakan belum adanya turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang SPM Trantibum maka pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas di bidang Trantibum berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi :

1. SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, ruang lingkupnya penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Kententeraman Masyarakat antara lain :
   1) Tertib Jalan
   2) Tertib Lingkungan
   3) Tertib Tata Ruang
   4) Tertib Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai
   5) Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat-tempat Umum
   6) Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Pinggir Pantai
   7) Tertib Usaha dan Usaha Tertentu
   8) Tertib Bangunan
   9) Tertib Sosial
   10) Tertib Kesehatan
   11) Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian
   12) Tertib Peran Serta Masyarakat
   13) Tertib Pemerintahan

   Pelaksanaan sesuai SOP :
   1) Pembinaan tentang Trantib tentang 13 (tiga belas) tertib, antara lain:
      - Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum di Perbatasan Palembang-Banyuasin dan Jakabaring.
      - Tertib Bangunan yaitu penertiban bangunan liar di atas aset milik Pemprov di daerah Lahat dan Jakabaring.
      - Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai, yaitu penertiban bangunan yang berada di sempadan sungai Solok Udang Jakabaring.
      - Tertib Kesehatan yaitu penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.
   2) Laporan atau pelanggara oleh masyarakat, aparatur atau badan hukum tentang Ketertiban Umum dan Kententeraman Masyarakat
   3) Tindaklanjut terhadap Laporan atau Pelanggaran
2. SOP Penanganan Ujuk Rasa dan Kerusuhan Massa berupa Demonstrasi, Pawai, gangguan Trantibum yang dapat merusak keselamatan jiwa, fasilitas umum dan instansi pemerintah. Target dari SPM Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa adalah 100 %, mulai dari pemeritahuan Unjuk Rasa, penyiapan anggota, berkoordinasi dengan instasi terkait termasuk terjadi kerusuhan massa.
3. SOP Patroli, sesuai dengan ruang lingkup kerja pelaksaan partroli antara lain :
   1) Patroli Trantibum di antar batas Kab/Kota

2) Patroli Wilayah, adanya gangguan Tibum, sesuai SOP Patroli dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 1 hari

Prosedur yang harus dilakukan :

1) Surat Perintah Tugas Patroli pengawasan dan pengamanan aset Pemprov. Sumsel dari gangguan pihak ketiga
2) Saranan dan Prasarana

Pengaduan dari Masyarakat, aparatur (OPD terkait).

**Tabel 2.125.**
Indikator Kinerja Utama BPBD Prov. Sumsel yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| NO | Indikator Kinerja Utama | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Jumlah Sistem peringatan dini (early warning system) | na | na | na | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 3 unit Sistem peringatan dini (early warning system) yang terpasang. |
| 2. | Respon Time Kejadian Bencana | na | na | 4 jam | 3 jam | 2 jam | 1 jam | 1 jam Respon Tme terhadap kejadian Bencana. |
| 3. | Jumlah masyarakat Siaga Bencana | 400 org | 50 org | 50 org- | 50 org | 50 org | 50 org | 250 orang masyarakat Siaga Bencana. |
| 4. | Jumlah desa Tangguh | 1 desa | 2 desa | 2 desa | 2 desa | 2 desa | 2 desa | 10 desa Tangguh yang terbentuk |
| 5. | Persentase kerugian akibat bencana | na | 100 % | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 10 % kerugian akibat bencana yang tertangani setiap tahunnya. |
| 6. | Jumlah kerjasama pencegahan dan penanggulangan bencana | na | na | 1 MoU | 1 MoU | 1 MoU | 1 MoU | 4 perjanjian kerja sama MoU pencegahan dan penanggulangan bencana |
| 7. | Persentase penurunan titik kebakaran (hotspot) | na | na | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % penanganan titik kebakaran (hotspot) dalam setiap tahunnya. |
| 8. | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | na | na | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 untuk Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di daerah rawan bencana |

Terkait dengan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi yaitu pelayanan ketenteraman, dan ketertiban umum Provinsi Sumatera Selatan Sub urusan bencana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bagian keenam pasal 9 menjelaskan sub urusan bencana masuk dalam rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan bencana juga masuk dalam rumpun ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Maka menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, konsekuensinya urusan bencana mengandung layanan

dasar, memerlukan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan menjadi prioritas dalam penganggaran dan pembangunan daerah.

Setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) kemudian aturan teknisnya di keluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 Tentang Sub-Urusan Bencana, di dalam peraturan tersebut ada tiga standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh BPBD yaitu:

1. Pelayanan Informasi rawan bencana
   Kegiatan Pelayanan Informasi rawan bencana adalah:
   a. Penyusunan kajian risiko bencana;
   b. Komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
   Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana adalah:
   a. Penyusunan rencana penanggulangan bencana;
   b. Pembuatan rencana kontinjensi;
   c. Pelatihan pencegahan dan mitigasi;
   d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
   e. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
   f. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
3. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana
   Kegiatan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah:
   a. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
   b. Respon cepat darurat bencana;
   c. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
   d. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
   e. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Standar pelayanan dasar sub-urusan bencana menjadi peluang dalam penanganan bencana karena urusan bencana menjadi urusan pemerintah wajib, urusan wajib pelayanan harus ada dan mejadi indikator di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah ini merupakan peluang terlaksananya kegiatan terkait pelayanan sub urusan bencana karena menjadi prioritas dalam rencana pembangunan. Selain itu pelayanan dasar harus dimuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen anggaran daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bisa berbentuk dokumen

Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang di danai melalui APBD, APBN ataupun CSR.

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 Tentang Sub-Urusan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah melaksanakan setandar pelayanan minimal dengan intervensi program kegiatan yang senada dengan SPM yang ada didalam Sub urusan bencana didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018. Adapun program tersebut adalah :

1. Program pencegahan dan mitigasi bencana;
2. Program tanggap darurat penanggulangan bencana;
3. Program pencegahan dan kesiapsiagaan

Hasil evaluasi BPBD bahwa ada 1 (satu) SPM yang akan dimasukkan menjadi indikator dalam RPJMD 2018-2023 yaitu Pelayanan Informasi di Daerah Rawan Bencana selain karena Pelayanan Informasi ini merupakan SPM yang pertama dalam sub urusan bencana, secara nomenklatur memang pada RPJMD 2013-2018 dan RENSTRA OPD belum memuat Program Informasi didaerah rawan bencana namun dikegiatan sudah ada di bawah Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebencanaan ini salah satu point yang ada didalam SPM Pelayanan Informasi di Daerah Rawan Bencana.

Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan terkait SPM Sub- Urusan Bencana dan jenis pelayanan dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi yaitu pelayanan ketenteraman, dan ketertiban umum Provinsi Sumsel Sub urusan bencana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.126.**
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

| No. | Uraian | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi | 3.927.000.000 | 4.587.500.000 | 4.584.050.000 | 4.803.500.000 | 5.081.500.000 | 4.217.755.219 | 4.217.755.220 | 4.217.755.221 | 4.217.755.222 | 4.217.755.223 | 107% | 92% | 92% | 88% | 83% | 20% | 20% |
| 2 | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana | 800.000.000 | 965.000.000 | 2.130.000.000 | 2.915.500.000 | 1.480.000.000 | 604.793.450 | 4.217.755.221 | 4.217.755.222 | 4.217.755.223 | 4.217.755.224 | 76% | 437% | 198% | 145% | 285% | 20% | 20% |
| 3 | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur dalam Bekerja | - | - | - | - | - | 45.500.000 | 4.217.755.222 | 4.217.755.223 | 4.217.755.224 | 4.217.755.225 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
| 4 | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | | | Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | - | - | - | - | - | 32.297.800 | 4.217.755.223 | 4.217.755.224 | 4.217.755.225 | 4.217.755.226 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
| 5 | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia** | | | Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya | 300.000.000 | 450.000.000 | 600.000.000 | 750.000.000 | 900.000.000 | 4.217.755.223 | 4.217.755.224 | 4.217.755.225 | 4.217.755.226 | 4.217.755.227 | 1406% | 937% | 703% | 562% | 469% | 20% | 20% |

| No. | Uraian | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi |
| 6 | **Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana** | | | | 1.200.000.000 | 2.470.000.000 | 3.300.000.000 | 3.310.000.000 | 3.900.000.000 | 4.217.755.224 | 4.217.755.225 | 4.217.755.226 | 4.217.755.227 | 4.217.755.228 | 351% | 171% | 128% | 127% | 108% | 20% | 20% |
| 7 | **Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana** | | | Persentase Korban Bencana yang dievakuasi saat tanggap darurat | 6.320.000.000 | 10.480.000000 | 15.500.000000 | 18.530.000.000 | 18.200.000.000 | 4.217.755.225 | 4.217.755.226 | 4.217.755.227 | 4.217.755.228 | 4.217.755.229 | 67% | 40% | 27% | 23% | 23% | 20% | 20% |
| 8 | **Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana** | | | Persentase Penanganan Pasca Bencana | 2.850.000.000 | 4.020.000.000 | 5.050.000.000 | 6.170.000.000 | 7.100.000.000 | 4.217.755.226 | 4.217.755.227 | 4.217.755.228 | 4.217.755.229 | 4.217.755.230 | 148% | 105% | 84% | 68% | 59% | 20% | 20% |
| 9 | **Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana** | | | Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 400.000.000 | 850.000.000 | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 | 1.000.000.000 | 4.217.755.227 | 4.217.755.228 | 4.217.755.229 | 4.217.755.230 | 4.217.755.231 | 1054% | 496% | 402% | 402% | 422% | 20% | 20% |
| 10 | **Program Peningkatan Balai Pengobatan Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan** | | | Persentase Korban Bencana yang terlayani | 100.000.000 | 250.000.000 | 350.000.000 | 500.000.000 | 600.000.000 | 4.217.755.228 | 4.217.755.229 | 4.217.755.230 | 4.217.755.231 | 4.217.755.232 | 4218% | 1687% | 1205% | 844% | 703% | 20% | 20% |
| 11 | **Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana** | | | | - | - | - | - | - | 4.217.755.229 | 4.217.755.230 | 4.217.755.231 | 4.217.755.232 | 4.217.755.233 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |

*Sumber: BPBD Prov. Sumsel, 2018*

Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi terdiri dari:

**a.** Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi

**b.** Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi

Jumlah kejadian bencana alam dan non alam atau dikarenakan ulah perbuatan manusia di Sumatera Selatan pada kurun tahun 2013 sampai tahun 2017 berjumlah 879 kejadian. Kejadian bencana terbagi atas bencana banjir, kebakaran, tanah longsor,, angin puting beliung dan gempa bumi dengan rumah terdampak bencana berjumlah 4.568 unit.

**Tabel. 2.127**
Data Kejadian Bencana Rumah Korban Terdampak Bencana
di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2014-2017

| No | Tahun | Kejadian Bencana (Kali) | Rumah Terdampak Bencana (Unit) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 206 | 1.291 |
| 2 | 2014 | 178 | 1.177 |
| 3 | 2015 | 143 | 565 |
| 4 | 2016 | 192 | 723 |
| 5 | 2017 | 160 | 812 |
| Total | | 879 | 4.568 |

*Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Selatan (tahun 2018)*

### 2.3.1.7 Sosial

#### 2.3.1.7.1 Jumlah Panti Asuhan

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab pemerintah untuk merawatnya. Jumlah panti di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang periode 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2.128**
Jumlah Panti di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018

| Jumlah Panti | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Panti Swasta*** | **233** | **216** | **224** | **227** | **264** |
| Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) | 143 | 134 | 141 | 144 | 153 |
| Yayasan Panti Asuhan | 76 | 63 | 63 | 63 | 80 |
| Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) | 5 | 10 | 15 | 15 | 21 |
| Panti Asuhan dan Pondok Pesantren | 9 | 9 | 5 | 5 | 10 |
| ***Panti Pemerintah*** | **17** | **17** | **17** | **17** | **12** |
| **Total** | **250** | **233** | **241** | **244** | **275** |

*Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018*

Sesuai amanat UU 23 tahun 2014, pengelolaan seluruh Panti milik Pemerintah menjadi kewenangan Provinsi mulai tahun 2017, dimana yang semula berjumlah 4 panti menjadi 16 panti atau bertambah sebanyak 12 panti yang sebelumnya dikelola oleh Kabupaten/Kota serta ada 1 Panti yang dikelola Pemerintah Pusat sehingga total berjumlah 17 Panti miliki Pemerintah di Sumatera Selatan. Akan tetapi pada tahun 2018 jumlahnya menjadi 12 Panti dikarenakan Panti Sosial Mawar Putih di Kabupaten Ogan Ilir tidak diserahkan karena masih milik masyarakat, Panti Sosial Graha Lansia Kabupaten MUBA tidak diserahkan karena aset gedung dan tanahnya masih milik Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, Panti Rehabilitasi Anak Nusantara Palembang dan Panti Sosial Bina Anak dan Remaja Palembang digabung dengan UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum Kab. Ogan Ilir, dan Panti yang dikelola Pemerintah Pusat menjadi Balai Besar. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan, uraian tugas, dan fungsi unit pelaksana teknis dinas di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, 16 Panti yang ada di Provinsi Sumatera Selatan tersebut dikelola oleh 6 UPTD yaitu : UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, dan orang dengan gangguan jiwa;UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik, UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial, UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak membutuhkan perlindungan khusus, UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak berhadapan dengan hukum, UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita. Namun Kondisi sejumlah panti asuhan yang ada di Sumatera Selatan (Sumsel) cukup memprihatinkan. Kondisi ini disebabkan karena terhitung per 1 Januari 2017, semua UPT panti pemerintah yang ada di Sumsel tanggung jawabnya dikembalikan ke Dinas Sosial Provinsi Sumsel. Hal in tentunya memerlukan sumber daya provinsi, sedangkan kemampuan anggaran 2017 yang terbatas.

Dinas Sosial Sumatera Selatan meningkatkan penertiban dan pembinaan panti asuhan yang diduga beroperasi secara ilegal atau tanpa izin di 17 kabupaten dan kota. Berdasarkan hasil pendataan petugas di lapangan, sekarang ini terdapat sekitar 10 persen panti asuhan di Provinsi Sumsel beroperasi tanpa izin atau ilegal. Sampai tahun 2017 ada 264 panti yang terdaftar dan resmi berada di bawah pengawasan dan pembinaan Dinas Sosial Sumsel. Panti asuhan itu sebagian besar berlokasi di wilayah Kota Palembang, sedangkan selebihnya tersebar di 16 kabupaten dan kota lainnya. Melihat jumlah panti asuhan yang tidak memiliki izin masih cukup banyak, maka perlu ditingkatkan kegiatan penertiban yang telah berjalan dengan baik selama ini sehingga tidak merugikan masyarakat dan mengganggu kegiatan pembinaan sosial yang diprogramkan. Melalui kegiatan penertiban dan pembinaan maka diharapkan ke depan tidak ada lagi panti asuhan beroperasi secara ilegal dan

dimanfaatkan oleh "oknum" tertentu untuk kepentingan memperkaya diri sendiri serta kelompok tertentu.

#### 2.3.1.7.2 Basis Data Terpadu dan PMKS, PSKS

Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, kewenangan untuk melakukan verifikasi dan validasi data berada di tingkat Kabupaten / Kota. Sampai dengan bulan Desember 2018 baru 13 Kabupaten / Kota yang melaksanakan Verifikasi dan Validasi data. Dari 13 Kabupaten/Kota tersebut 6 Kabupaten/Kota yang telah rekapitulasi import data BDT yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kota Prabumulih. Lambatnya proses verifikasi dan validasi data BDT disebabkan keterbatasan anggaran dan minimnya SDM yang kompeten di Kabupaten/Kota.

Undang Undangan Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan penangan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ada 26 jenis PMKS diantaranya anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, korban traffiking, korban bencana alam/sosial dan lain lain, serta ada 12 jenis PSKS seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna dan sebagainya. Berdasarkan data rekapitulasi sampai dengan Desember 2018 terdapat 2.677.366 jiwa PMKS dan 5.136 PSKS yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota. Updating data PMKS dan PSKS belum dilakukan, dikarenakan keterbatasan anggaran dan kurangnya kontribusi dari Kabupaten/Kota.

#### 2.3.1.7.3 Tenaga Penyuluh Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial disebutkan Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Provinsi Sumatera Selatan memiliki 21 tenaga penyuluh sosial yang tersebar di 3 Kabupaten/Kota. Minimnya tenaga penyuluh sosial dan akses untuk melakukan penyuluhan yang tidak didukung dengan sarana prasarana penyuluhan yang memadai menyebabkan kurangnya informasi, publikasi dan koordinasi tentang permasalahan sosial dan penanganannya ke masyarakat.

#### 2.3.1.7.4 Standar Pelayanan Minimal Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, pencapaian target SPM sesuai dengan 5 indikator kinerja yaitu :

1. Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, dengan target 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan;
2. Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, dengan target 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan;
3. Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, dengan target 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan;
4. Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, dengan target 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan;
5. Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi, dengan target 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan.

Pada tahun 2018 capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Bidang Sosial di Daerah Provinsi sebagai berikut:

1. Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, target 100% dan realisasi 100% dengan jumlah penghuni panti sebanyak 40 Orang di Kota Palembang;

2. Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, dengan target 100% dan realisasi 100% dengan jumlah penghuni panti sebanyak 170 Orang di Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Musi Rawas, Musi Banyuasin;
3. Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, dengan target 100% dan realisasi 100% dengan jumlah penghuni panti sebanyak 210 orang yang tersebar di 5 (lima) panti yaitu Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Ogan Ilir , Musi Banyuasin dan Musi Rawas;
4. Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, dengan target 100% dan realisasi 100% dengan jumlah penghuni panti sebanyak 200 orang di Kota Palembang;
5. Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi, dengan target 100% dan realisasi 100% dengan jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapat bantuan logistik sebanyak 57.780 orang yang tersebar di Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, Kab. Musi Rawas, Kab. OKI, Kab. Ogan Ilir, Kab. OKUS, Kab. Pali, Kab. Muara Enim, Kab. OKUT, Kab. OKU, Kab. Banyuasin, Kab. Empat Lawang, Kab. Lahat, Kab. Muratara , dan Kab.Muba.

### 2.3.2 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

#### 2.3.2.1. Ketenagakerjaan

##### 2.3.2.1.1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu sebesar 68,85 persen dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 66,75 persen, namun mengalami penurunan sedikit tahun 2015 sebesar 68,53 persen dan pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 71,59 persen lalu pada tahun 2017 menurun menjadi 69,50 persen dan 68,69 persen di tahun 2018. Hal ini agar ditingkatkan dalam program ketenagakerjaan maupun dapat menyesuaikan dengan kebutuhan menurut struktur ketenagakerjaan.

**Tabel 2.129.**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2013-2018

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 66,75 | 68,85 | 68,53 | 71,59 | 69,50 | 68,69 |

*Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2013-2018*

Meskipun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berfluktuatif, secara struktur lapangan pekerjaan tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selama periode Agustus 2017-Agustus 2018 terdapat 7

lapangan usaha mengalami peningkatan penyerapan penduduk bekerja, yaitu kategori pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, angkutan dan informasi, akomodasi dan penyiapan makan minum serta jasa perusahaan. Sementara berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sektor industri pengolahan dan jasa mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja. Adapun sektor-sektor lainnya dapat dilihat di tabel berikut:

**Tabel 2.130.**
Permintaan Tenaga Kerja per Sektor Lapangan Usaha Tahun 2014-2018

| No | Sektor Lapangan Usaha | Tahun | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Perikanan | 40 | 77 | 428 | na | 283 | 828 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 1 | 2 | 406 | na | 10 | 419 |
| 3 | Industri Pengolahan | 1,853 | 267 | 236 | 39 | 1,193 | 3588 |
| 4 | Listrik, Gas dan Air | na | 24 | na | na | 75 | 99 |
| 5 | Bangunan | na | 36 | na | na | 64 | 100 |
| 6 | Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel | 126 | 82 | 26 | 33 | 96 | 363 |
| 7 | Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi | 8 | 318 | 61 | na | 1 | 388 |
| 8 | Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan, Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan | 7 | 123 | 156 | 52 | 5 | 343 |
| 9 | Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan | 40 | 847 | 4,983 | 465 | 2,965 | 9300 |
| | | **2.075** | **1.776** | **6.296** | **589** | **4.692** | **15.428** |

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel*

Dalam setahun terakhir menurut status pekerjaan penduduk bekerja formal dan informal, secara absolut pekerja sektor informal telah berkurang sebesar 1,16 persen sedangkan pekerja formal juga bertambah sebesar 1,16 persen. Peningkatan penyerapan penduduk bekerja di sektor informal terjadi hampir disemua status pekerjaan.

### 2.3.2.1.2. Besaran Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar dan yang telah ditempatkan pada tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013. Besaran pencari kerja yang terdaftar yaitu 4.775 untuk laki-laki dan 3.801 untuk perempuan sedangkan besaran pencari kerja yang telah ditempatkan 2.079 untuk laki-laki dan 2.848 untuk perempuan. Hal ini harus menjadi program prioritas pada tahun kedepannya agar dapat menekan tingkat pengangguran dan penempatan sumber daya manusia unggul yang diterima sesuai dengan bidangnya.

**Tabel 2.131.**
Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar dan Ditempatkan
Tahun 2010-2017

| Tahun | Terdaftar | | Telah Ditempatkan | |
|---|---|---|---|---|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| 2010 | 16.032 | 15.629 | 5.281 | 5.603 |
| 2011 | 3.532 | 2.244 | 451 | 395 |
| 2012 | 16.062 | 15.167 | 5.265 | 6.456 |
| 2013 | 18.454 | 20.825 | 12.318 | 13.436 |
| 2014 | 10.527 | 8.827 | 5.021 | 5.952 |
| 2015 | 9.209 | 6.356 | 5.547 | 3.983 |
| 2016 | 7.948 | 6.063 | 3.675 | 1.760 |
| 2017 | 4.775 | 3.801 | 2.079 | 2.848 |

*Sumber : BPS, 2018*

Selain ditempatkan di dalam daerah, pencari kerja asal Sumatera Selatan juga banyak yang bekerja sebagai pekerja migran. Selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, Sumatera Selatan telah mengirimkan sebanyak 12.025 orang Pekerja Migran Indonesia ke lebih dari 22 negara. Apabila dilihat dari sektor usahanya, Pekerja Migran Indonesia yang berada di sektor informal sebanyak 3.349 atau sekitar 27,85 persen dari total keseluruhan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan jumlah pekerja formal sebesar 8.676 orang atau 72,15 persen. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya maka Pekerja Migran Indonesia perempuan berjumlah 9.200 orang dengan perbandingan 35,91 persen untuk pekerja migran perempuan informal dan 64,09 persen untuk pekerja migran formal perempuan. Sedangkan Pekerja Migran Indonesia yang Laki-laki didominasi sektor usaha formal sebanyak 2.780 orang. Dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan penyumbang terbesar Pekerja Migran Indonesia ialah Kota Palembang dengan total PMI sebanyak 3.744 orang disusul dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir masing-masing sebanyak 2.355 orang dan 2.305 orang.

**Tabel 2.132.**
Jumlah TKI menurut Daerah Asal, Jenis Kelamin dan Sektor
Tahun 2013-2018

| No. | Daerah Asal | Laki-laki | | Perempuan | | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Informal | Formal | Informal | Formal | Informal | Formal | Total |
| 1 | Banyuasin | 2 | 139 | 140 | 485 | 142 | 624 | 766 |
| 2 | Empat Lawang | - | 18 | 71 | 32 | 71 | 50 | 121 |
| 3 | Lahat | 2 | 166 | 457 | 151 | 459 | 317 | 776 |
| 4 | Lubuk Linggau | - | 14 | 63 | 19 | 63 | 33 | 96 |
| 5 | Muara Enim | - | 98 | 85 | 48 | 85 | 146 | 231 |
| 6 | Musi Banyuasin | 2 | 52 | 70 | 70 | 72 | 122 | 194 |
| 7 | Musi Rawas | - | 77 | 93 | 26 | 93 | 103 | 196 |
| 8 | Ogan Ilir | 1 | 486 | 312 | 1.506 | 313 | 1.992 | 2.305 |
| 9 | Ogan Komering Ilir | 7 | 305 | 480 | 1.563 | 487 | 1.868 | 2.355 |
| 10 | Ogan Komering Ulu | 1 | 85 | 131 | 42 | 132 | 127 | 259 |
| 11 | OKU Selatan | - | 34 | 129 | 20 | 129 | 54 | 183 |
| 12 | OKU Timur | 2 | 110 | 93 | 81 | 95 | 191 | 286 |
| 13 | Pagar Alam | - | 76 | 226 | 66 | 226 | 142 | 368 |
| 14 | Palembang | 27 | 1.063 | 892 | 1.762 | 919 | 2.825 | 3.744 |
| 15 | Prabumulih | 1 | 53 | 54 | 24 | 55 | 77 | 132 |
| 16 | PALI | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | Musi Rawas Utara | - | 2 | 7 | - | 7 | 2 | 9 |
| | **JUMLAH** | **45** | **2.780** | **3.304** | **5.896** | **3.349** | **8.676** | **12.025** |

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

Adapun dari jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Sumatera Selatan dalam jangka waktu 2013 sampai dengan 2018 berjumlah 12.025 orang. Negara tujuan dengan penempatan PMI paling banyak selama 6 tahun adalah Malaysia dengan jumlah sebanyak 7.831 orang atau sebesar 65,12 persen. Negara Taiwan berada pada peringkat kedua dengan jumlah PMI sebanyak 1.123 orang, disusul dengan Singapura serta Saudi Arabia masing-masing 741 orang dan 559 orang. Sedangkan Hongkong walaupun berada di peringkat kelima akan tetapi selama dua tahun terakhir penempatan PMI mengalami kenaikan secara signifikan berbeda halnya dengan Saudi Arabia yang jumlah penempatannya mengalami penurunan drastis selama lima tahun terakhir.

**Tabel 2.133.**
Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2013-2018

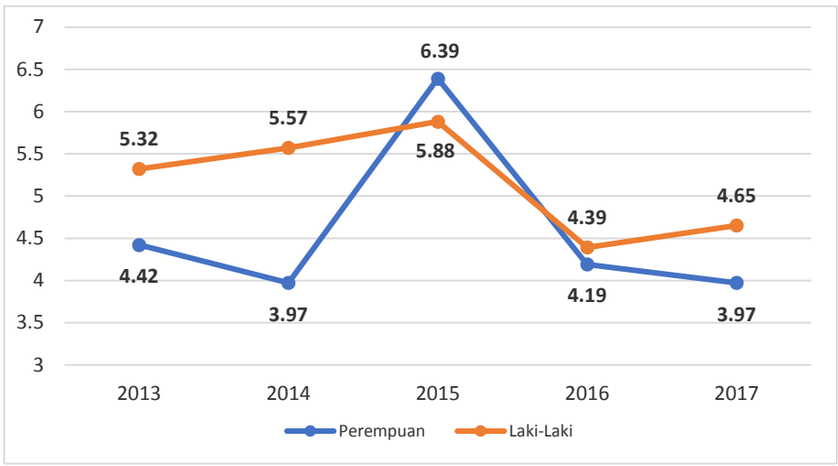
| No. | Negara | Tahun | | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | | | | | | | |
| 1. | Malaysia | 1,301 | 1,031 | 1,084 | 1,264 | 1,722 | 1,429 | 7,831 |
| 2. | Taiwan | 256 | 219 | 137 | 158 | 152 | 201 | 1,123 |
| 3. | Singapore | 239 | 133 | 67 | 104 | 105 | 93 | 741 |
| 4. | Saudi Arabia | 167 | 189 | 78 | 69 | 28 | 28 | 559 |
| 5. | Hongkong | 116 | 85 | 13 | 17 | 125 | 147 | 503 |
| 6. | United Arab Emirates | 224 | 74 | 13 | 3 | 4 | 3 | 321 |
| 7. | Korea Selatan | 45 | 42 | 26 | 18 | 14 | 26 | 171 |
| 8. | Brunei Darussalam | 35 | 34 | 27 | 24 | 13 | 16 | 149 |
| 9. | Qatar | 76 | 29 | 6 | 1 | 6 | 7 | 125 |
| 10. | Oman | 67 | 37 | 6 | 1 | 2 | - | 113 |
| 11. | United States | 21 | 16 | 2 | - | - | - | 39 |
| 12. | Bahrain | 30 | 20 | 1 | - | 1 | - | 52 |
| 13. | Japan | 11 | 9 | 5 | - | 3 | 9 | 37 |
| 14. | Kuwait | 17 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 33 |
| 15. | Papua New Guinea | 9 | 4 | 5 | - | - | - | 18 |
| 16. | China | 8 | 8 | 5 | - | - | - | 21 |
| 17. | South Africa | 11 | 4 | - | - | - | - | 15 |
| 18. | Thailand | 4 | 5 | - | - | - | - | 9 |
| 19. | Iraq | 14 | 4 | 1 | - | - | - | 19 |
| 20. | India | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 |
| 21. | Lainnya | 68 | 60 | 6 | - | 3 | 3 | 140 |
| | | | | | | | | |
| | JUMLAH | 2,722 | 2,013 | 1,483 | 1,660 | 2,181 | 1,966 | 12,025 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

### 2.3.2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Angka Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2010 selalu lebih kecil dibanding nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan bila dilihat dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,65 persen pada laki-laki dan penurunan menjadi sebesar 3,97 persen pada perempuan, artinya TPT perempuan lebih rendah dibandingkan dengan TPT laki-laki. Secara rata-rata TPT Provinsi Sumsel tahun 2018 sebesar 4,23 persen, hal ini berarti persentase pengangguran di Provinsi Sumsel lebih rendah dibandingkan persentase pengggangguran nasional yang mencapai 5,34 persen. Secara absolut jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2018 sebanyak 175,1 ribu orang atau berkurang sebanyak 6 ribu orang dari Agustus 2017 sebesar 181,1 ribu orang.

**Gambar 2.49.**
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin (Persen)
Tahun 2013-2017




*Sumber : Sakernas, 2012-2017*

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan pada Agustus 2018 sebanyak 4,14 juta orang, naik sebanyak 15,3 ribu orang atau meningkat sebesar 0,39 persen dibandingkan Agustus 2017. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Selatan pada Agustus 2018 mencapai 4,23 persen, mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2017 sebesar 4,39 persen atau turun 0,16 persen.

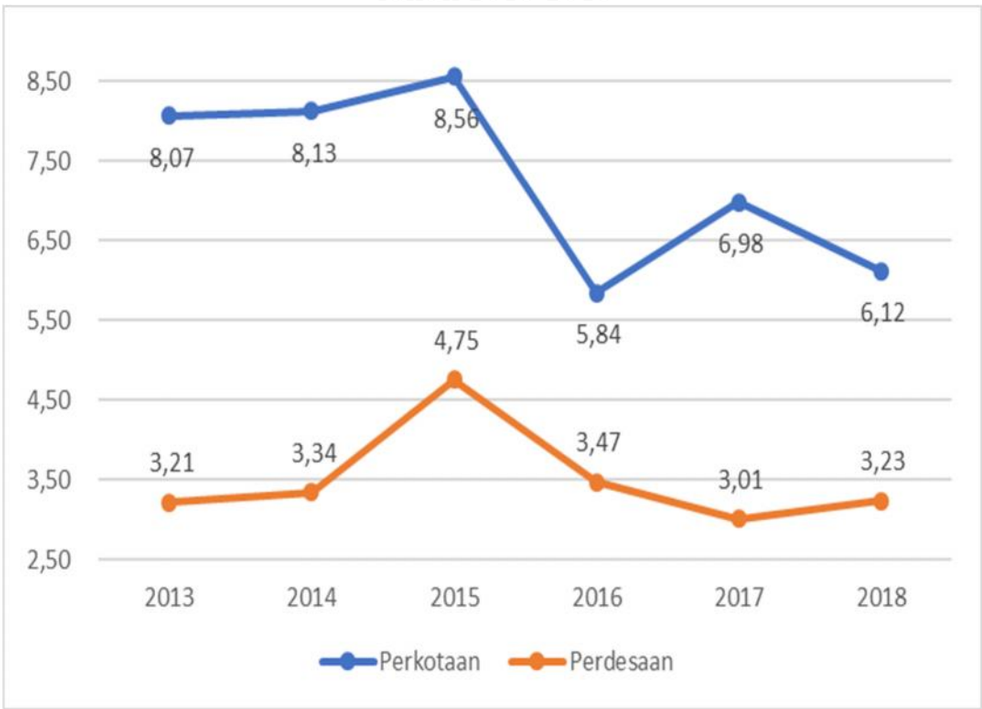
**Tabel 2.134.**
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
di Sumatera Selatan, 2013-2018

| No | Kab/Kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 3,79 | 4,40 | 7,64 | na | 4,50 | 4,61 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 4,58 | 3,48 | 6,89 | na | 3,54 | 2,61 |
| 3 | Muara Enim | 4,23 | 5,61 | 6,69 | na | 3,31 | 4,27 |
| 4 | Lahat | 3,76 | 5,62 | 4,26 | na | 4,33 | 3,29 |
| 5 | Musi Rawas | 0,92 | 1,67 | 2,04 | na | 2,80 | 3,23 |
| 6 | Musi Banyuasin | 3,19 | 3,74 | 5,61 | na | 2,75 | 3,29 |
| 7 | Banyuasin | 6,49 | 2,97 | 5,56 | na | 3,65 | 3,84 |
| 8 | OKU Selatan | 2,33 | 1,92 | 1,83 | na | 3,54 | 4,11 |
| 9 | OKU Timur | 4,09 | 4,32 | 4,74 | na | 2,35 | 3,51 |
| 10 | Ogan Ilir | 3,47 | 3,03 | 5,43 | na | 3,20 | 2,42 |
| 11 | Empat Lawang | 4,53 | 5,87 | 5,21 | na | 3,85 | 2,28 |
| 12 | Pali | na | na | 0,94 | na | 4,43 | 3,79 |
| 14 | Muratara | na | na | 2,99 | na | 6,11 | 4,22 |
| 14 | Kota Palembang | 9,15 | 9,32 | 9,52 | na | 8,20 | 7,21 |
| 15 | Kota Prabumulih | 5,36 | 6,90 | 6,26 | na | 6,73 | 6,99 |
| 16 | Kota Pagar Alam | 7,04 | 4,81 | 3,53 | na | 2,57 | 3,03 |
| 17 | Kota Lubuk Linggau | 7,17 | 6,80 | 12,31 | na | 4,00 | 4,55 |
| **Sumatera Selatan** | | **5,00** | **4,96** | **6,07** | **4.31** | **4,39** | **4,23** |

*Sumber : Sakernas, 2013-2018*

Pola yang ada pada saat ini, TPT di daerah perkotaan selalu lebih tinggi daripada di daerah pedesaan. Tingginya tingkat pengangguran terbuka di kota terutama disebabkan oleh pertumbuhan alamiah penduduk dan tingginya arus masuk angkatan kerja dari pedesaan serta banyaknya pencari kerja sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendidikan penduduk di perkotaan. Sementara itu kesempatan kerja pada sektor-sektor produktif di perkotaan tidak mampu menampung seluruh pencari kerja. Ini berakibat pada tingginya tingkat pengangguran. Berbeda dengan daerah pedesaan yang ada pada umumnya tingkat pendidikan penduduknya relatif masih rendah sehingga angkatan kerja yang ada tidak mempunyai banyak tuntutan terhadap jenis pekerjaan yang diinginkan dan mau menerima pekerjaan-pekerjaan di sektor tradisional.

**Gambar 2.50.**
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tempat Tinggal (Persen)
Tahun 2013-2018



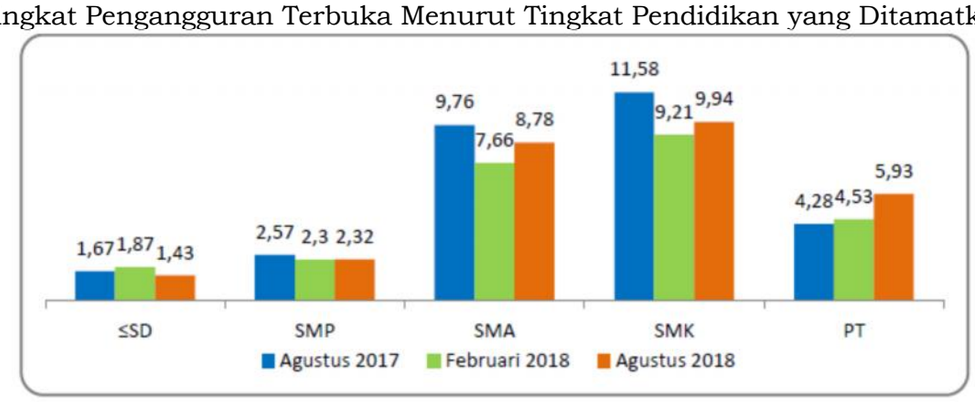

*Sumber : Sakernas, 2012-2018*

Selain permasalahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pekerja tidak penuh atau penduduk bekerja kurang dari 35 jam per minggu masih menjadi permasalahan tersendiri di Sumatera Selatan. Jumlah setengah penganggur atau pekerja tidak penuh dan masih mencari pekerjaan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 sebesar 8,75% atau sebanyak 344.028 orang lebih tinggi dari angka nasional sebesar 7,55%. Dalam setahun terakhir Agustus 2017-Agustus 2018 pekerja sektor informal menurun dari 62,40% menjadi 61,24%. Apabila dibandingkan dengan persentase pekerja sektor formal sebesar 38,76%

pekerja sektor informal jauh lebih tinggi 22,48 %. Dari total persentase pekerja informal sebesar 61,24%, 20,64 % nya adalah penduduk bekerja dengan berusaha sendiri.

Permasalahan ketenagakerjaan lainnya adalah masih relatif tingginya tingkat pengangguran terdidik terutama di daerah perkotaan. Beberapa penyebab yang mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran terdidik adalah terbatasnya lapangan kerja yang tidak diminati oleh tenaga kerja terdidik. Dengan pendidikan yang relatif tinggi menyebabkan para pencari kerja merasa enggan untuk bekerja di kegiatan ekonomi informal. Pilihan utama biasanya adalah bekerja di sektor formal atau sektor ekonomi produktif. Padahal lapangan kerja di sektor tersebut sangat terbatas sehingga mereka terpaksa menganggur. Tingginya angka pengangguran terdidik lebih disebabkan faktor eksternal pendidikan misalnya budaya priyayi, atau pola pikir masyarakat yang menganggap pekerjaan formal lebih bonafit dibandingkan pekerjaan informal.

**Gambar 2.51.**
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan




*Sumber: BPS Sumsel, Agustus 2018*

Jika kita lihat gambar di atas, pada Agustus 2018 TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 9,94 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 8,78 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap, terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dapat dilihat dari TPT SD ke bawah paling kecil di antara semua tingkat pendidikan, yaitu sebesar 1,43 persen. Dibandingkan kondisi pada Februari 2018 yang lalu, peningkatan TPT terjadi pada seluruh tingkat pendidikan kecuali TPT pada tingkat pendidikan SD ke bawah yang menurun.

Selain angka pengangguran, permasalahan ketenagakerjaan di Sumatera Selatan lainnya yaitu belum terlindunginya tenaga kerja dari ancaman PHK dan belum terjaminnya hak dan kewajiban pekerja. Di Sumsel, jumlah perusahaan tahun 2018 sebanyak 5.745 yang terdiri dari Perusahaan

Kecil 3.729, Perusahaan sedang 1.362, dan Perusahaan Besar 654. Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 bahwa kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang semula berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka dengan berlakunya UU 23 tersebut, maka kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan berada di Provinsi. Provinsi Sumtera Selatan mempunyai Pegawai Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan berjumlah 34 orang. Bahwa sesuai dengan Permenaker Nomor 33 tahun 2016 Kewajiban Pegawai Pengawas ketenagakerjaan melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap 5 perusahaan dalam 1 bulan diluar pemeriksaan kasus (pengaduan yang masuk), sedangkan untuk Pengawas Spesialis mempunyai kewajiban untuk melakukan pengujian objek K3 sebanyak 8 perusahaan dalam 1 bulan.

Dengan perbandingan jumlah perusahaan 5.754 dan jumlah Pegawai Pengawas 34 orang, belum dapat mengcover seluruh perusahaan, dan belum dapat menjamin seluruh perusahaan menerapkan norma Ketenagakerjaan dan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam upaya perlindungan tenaga kerja terhadap bahaya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dan penerapan hak normatif tenaga kerja berupa pemenuhan upah dan upah lembur, serta terjaminnya tenaga kerja dalam perlindungan jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan).

Selain itu, dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, kondusif dan berkeadilan di perusahaan, maka fungsi pemerintah adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan fungsi pengusaha adalah menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Untuk mencapai itu perlu diciptakan hubungan industrial yang baik melalui sarana hubungan industrial seperti serikat karyawan, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit, peraturan perusahaan, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kesemua itu untuk menjamin adanya kepastian dan perlindungan di dalam hubungan kerja, sehingga dapat tercipta ketenangan kerja dan berusaha. Dari sisi hubungan industrial, sebanyak 5.754 perusahaan di Sumatera Selatan belum semuanya memiliki sarana hubungan industrial, seperti yang dapat dilihat pada tabel bibawah ini:

**Tabel 2.135.**
Data Hubungan Industrial Tahun 2018 di Sumatera Selatan

| NO | KABUPATEN / KOTA | JUMLAH | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SP/SB | LKS BIPARTIT | LKS TRIPARTIT | APINDO | PP | PKB | KASUS HI | DEWAN PENGUPAHAN | UMP/UMK |
| 1 | PROV. SUM SEL | - | - | 1 | 1 | 8 | 5 | 38 | 1 | 2.595.995 |
| 2 | PALEMBANG | 324 | 114 | 1 | 1 | 753 | 298 | 69 | 1 | 2.700.360 |
| 3 | BANYUASIN | 265 | 41 | 1 | 1 | 290 | 55 | 9 | 1 | 2.637.643 |
| 4 | MUSI BANYUASIN | 55 | 40 | 1 | 1 | 41 | 22 | 4 | 1 | 2.684.650 |
| 5 | OGAN ILIR | 58 | 25 | - | | 23 | 14 | - | - | - |
| 6 | OGAN KOMERING ILIR | 15 | 27 | - | 1 | 14 | 17 | - | - | - |
| 7 | OGAN KOMERING ULU | 40 | 25 | - | - | 21 | 29 | - | - | - |
| 8 | OKU SELATAN | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - | - |
| 9 | OKU TIMUR | 11 | 7 | - | 1 | 55 | 9 | - | 1 | - |
| 10 | MUARA ENIM | 46 | 49 | 1 | 1 | 96 | 78 | 27 | 1 | 2.694.240 |
| 11 | PRABUMULIH | 12 | 6 | - | - | 33 | 4 | 5 | - | - |
| 12 | LAHAT | 35 | 26 | - | - | 55 | 21 | 11 | - | - |
| 13 | PALI | 4 | 1 | - | - | 3 | 5 | - | - | - |
| 14 | EMPAT LAWANG | 1 | 2 | - | - | 29 | 10 | - | - | - |
| 15 | LUBUK LINGGAU | 4 | 2 | - | 1 | 44 | 5 | - | - | - |
| 16 | MUSI RAWAS | 64 | 3 | 1 | 1 | 15 | 35 | 15 | 1 | 2.725.800 |
| 17 | PAGAR ALAM | 36 | 6 | - | - | 42 | 31 | - | - | - |
| 18 | MUSI RAWAS UTARA | 26 | 14 | - | 1 | 21 | 11 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH | **998** | **390** | **6** | **10** | **1547** | **653** | **178** | **7** | |

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan*

**Tabel 2.136.**
Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Tahun 2014-2018

| No. | Jenis Perselisihan | Satuan | TAHUN | | | | | Jumlah | Penyelesaian | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hubungan Industrial | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | PB | Anjuran | Proses | Keterangan |
| 1 | PHK | Kasus | 19 | 25 | 31 | 46 | 39 | 159 | 82 | 36 | 33 | 3 kasus dilimpahkan<br>3 kasus ditarik<br>2 kasus dikembalikan kebipartit |
| 2 | Hak | Kasus | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 33 | 25 | 5 | 1 | 2 kasus tidak di proses |
| 3 | Kepentingan | Kasus | na | 1 | na | 1 | 12 | 14 | 1 | 3 | 7 | 1 kasus tidak diproses<br>2 kasus diselesaikan secara bipartit |
| Total | | | 26 | 31 | 38 | 52 | 59 | 206 | 108 | 44 | 41 | |

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

Berdasarkan tabel diatas, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018 jumlah kasus hubungan industrial yang telah diselesaikan sebanyak 206 kasus perselisihan yang terdiri dari perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 159 kasus yang diselesaikan secara perjanjian bersama (82 kasus), melalui anjuran (36 kasus), masih dalam proses penyelesaian (33 kasus), 3 kasus dilimpahkan, 3kasus ditarik dan 2 kasus dikembalikan ke bipartit. Kasus PHK sendiri terjadi karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja oleh salah satu pihak.

Selain perselisihan terkait PHK, perselisihan yang terjadi selanjutnya adalah perselisihan mengenai Hak sebanyak 33 kasus dengan penyelesaian secara perjanjian bersama sebanyak 25 kasus, melalui anjuran sebanyak 5 kasus, 1 kasus masih dalam proses dan 2 kasus yang tidak diproses. Perselisihan kasus hak terjadi karena tidak terpenuhinya hak yang disebabkan adanya perbedaan penafsiran dan pelaksanaan perundang-undangan, PK, PP, dan PKB.

Perselisihan kasus ketiga yaitu mengenai kepentingan sebanyak 14 kasus dengan penyelesaian secara perjanjian bersama sebanyak 1 kasus, melalui anjuran sebanyak 3 kasus, 7 kasus masih dalam proses penyelesaian, 1 kasus tidak diproses dan 2 kasus diselesaikan secara bipartit yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai syarat kerja yang ditetapkan dalam PP,PK dan PKB karena dan kepentingan.

### 2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### 2.3.2.2.1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio IPM perempuan dengan laki-laki, dimana komponen pembentuk IPM laki-laki dan perempuan sama dengan komponen pembentuk IPM. Komponen pembentuk tersebut yaitu angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita.

**Tabel 2.137.**
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| TAHUN | IPM | IPG |
|---|---|---|
| 2013 | 74,36 | 91,25 |
| 2014 | 66,75 | 91,64 |
| 2015 | 67,46 | 92,22 |
| 2016 | 68,24 | 92,08 |
| 2017 | 68,86 | 92,43 |
| 2018 | 69,39 | 92,62 |

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan*

Nilai IPG selalu mengalami kenaikan walaupun peningkatannya kecil. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan untuk menciptakan persamaan dan kesetaraan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan harus terus dilakukan secara terencana, terus menerus dan berkelanjutan.

**Tabel 2.138.**
Perkembangan Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Gender
Tahun 2013-2018

| TAHUN | Komponen IPG | | | | | | | | IPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Angka Harapan Hidup | | Harapan Lama Sekolah | | Rata-rata lama sekolah | | Pengeluaran per kapita | | |
| | laki-laki | perempuan | laki-laki | Perempuan | laki-laki | perempuan | laki-laki | Perempuan | |
| 2013 | 66,95 | 70,83 | 11,34 | 11,58 | 7,95 | 7,10 | 66,09 | 33,91 | 91,25 |
| 2014 | 67,03 | 70,91 | 11,74 | 11,76 | 8,08 | 7,23 | 13.022.000 | 8.340.000 | 91,64 |
| 2015 | 67,25 | 71,13 | 11,86 | 12,20 | 8,17 | 7,37 | 13.275.000 | 8.479.000 | 92,22 |
| 2016 | 67,28 | 71,16 | 12,17 | 12,30 | 8,18 | 7,48 | 13.920.000 | 8.797.000 | 92,08 |
| 2017 | 67,29 | 71,17 | 12,18 | 12,56 | 8,30 | 7,67 | 14.330.000 | 8.927.000 | 92,43 |
| 2018 | 67,52 | 71,40 | 12,19 | 12,60 | 8,32 | 7,68 | 14.772.000 | 9.262.000 | 92,62 |

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan*

Dilihat dari komponen pembentuk IPG di Sumatera Selatan, pada komponen Angka Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah menunjukkan tren meningkat dan angka perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Untuk Rata-rata Lama Sekolah dari tahun 2013-2018 menunjukkan tren meningkat dan angka laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa Rata-rata Lama Sekolah Laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan artinya agar terjadi kesetaraan, yang perlu diprioritaskan untuk diintervensi pada Rata-rata Lama Sekolah adalah perempuan. Sementara untuk Pengeluaran Per Kapita nilai nya berfluktuasi dari tahun ke tahun dan angka laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Dari keempat komponen tersebut hanya pada komponen Angka Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah nilai perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender pada kedua komponen IPG tersebut maka perempuanlah yang diprioritaskan untuk diintervensi karena keduanya menunjukkan angka perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Kesenjangan yang paling besar dari ketiga komponen tersebut adalah pada komponen Pengeluaran Per Kapita.

Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu :

1. Masih rendahnya pemahaman serta komitmen Para pemegang kebijakan dan pelaksana Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Perencanan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
2. Belum semua kabupaten/kota memiliki kebijakan tentang pelaksanaan PUG . Provinsi Sumsel melalui Pergub 47/2015ttg Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan, sedang kabupaten baru PALI dan MUBA yang memiliki kebijakan daerah terkait PUG.
3. Masih Kurangnya pemahaman dan kompetensi perencana Perangkat

Daerah yang mengerti tentang PUG. Perwakilan fokal point yang telah dilatih PPRG mengalami mutasi.

4. Masih belum optimalnya kinerja Pokja PUG dan Fokal Point. Sampai Tahun 2018 setelah terjadinya perubahan nomenklatur dari 41 Perangkat Daerah baru 16 Perangkat Daerah yang telah membuat dan melaporkan SK Fokal Point, 21 kegiatan yang telah dibuat Analisis Anggaran Responsif Gender. Belum optimalnya jejaring pelaksanaan PUG dengan stakeholder baik akademisi, media dan dunia usaha. Akademisi yang telah menjalin koordinasi dan kerjasama terkai PUG yaitu PSGA Unsri dan UIN Raden Fatah.

**Tabel 2.139.**
Perkembangan Komponen IDG
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017

| Tahun | Komponen IDG | | | IDG |
|---|---|---|---|---|
| | Keterlibatan Perempuan di Parlemen | Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja | Perempuan sebagai Tenaga Manajer Profesional Administrasi Teknis | |
| 2013 | 18,18 | 33,91 | 51,32 | 70,41 |
| 2014 | 17,33 | 34,31 | 52,09 | 70,20 |
| 2015 | 17,33 | 34,55 | 53,31 | 70,36 |
| 2016 | 17,33 | 34,57 | 52,37 | 70,69 |
| 2017 | 20,27 | 34,70 | 49,25 | 73,53 |

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan*

Berdasarkan data perkembangan Komponen IDG Provinsi Sumatera Selatan untuk komponen keterwakilan Perempuan di Parlemen masih rendah. Hasil Pemilu tahun 2014 keterwakilan perempuan di legislatif Sumsel sebesar 17,33%. Sedangkan tahun 2017 dengan adanya PAW meningkat menjadi 20,27%. Untuk komponen sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja terdapat masih tingginya kesenjangan ekonomi perempuan. Pengeluaran perkapita perempuan hanya 8.927 (ribu rupiah) jauh lebih rendah dibanding laki-laki 14.330 (ribu rupiah). Sumbangan pendapatan perempuan hanya sebesar 34,70 persen. Untuk komponen Perempuan sebagai Tenaga Manajer Profesional Administrasi Teknis masih sebesar 49,25% di tahun 2017.

Pada tahun 2013 hanya komponen sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja yang mengalami peningkatan sedangkan untuk komponen Keterlibatan Perempuan di Parlemen dan Perempuan sebagai Tenaga Manager Profesional, Administrasi, Teknisi mengalami berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan menurunnya peran perempuan di bidang politik dan peran dalam proses pengambil keputusan, sementara kontribusi perempuan dalam bidang ekonomi mengalami peningkatan. Namun demikian apabila dilihat capaian secara keseluruhan, Pemberdayaan Perempuan di Sumatera Selatan Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Sumatera Selatan dari

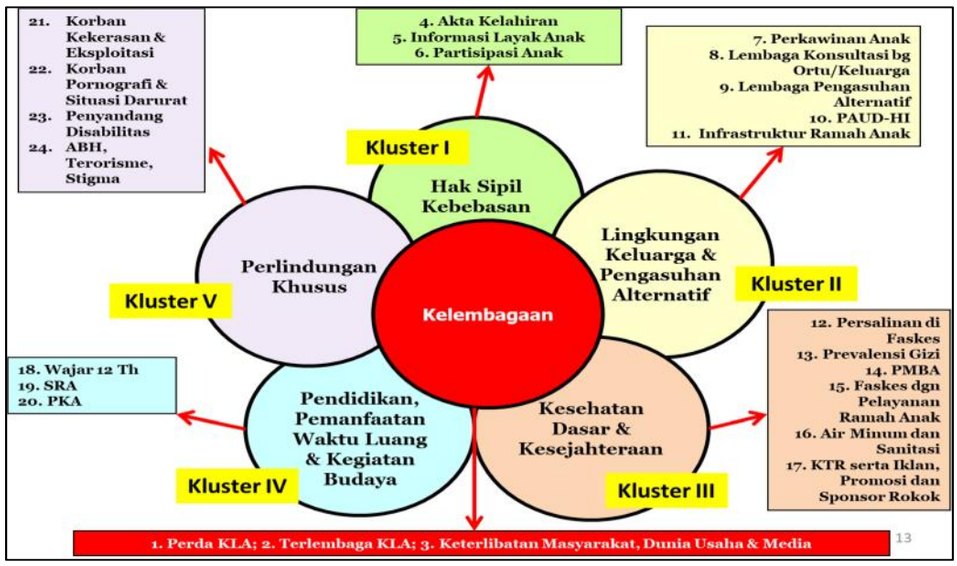
tahun 2013–2017 menunjukkan trend meningkat dari 70,41% pada tahun 2013 menjadi 73,53% pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan perempuan di Sumatera Selatan selama periode tersebut mengalami peningkatan. Namun demikian apabila dilihat dari capaian komponen IDG Sumatera masih perlu ditingkatkan.

#### 2.3.2.2.2. Persentase Kabupaten/Kota Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Tujuan dari kabupaten/kota layak anak ini adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definis, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak-hak anak pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota.

Ada 24 (dua puluh empat) indikator KLA yang digunakan untuk mengukur pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dibagi dalam 5 (lima) kluster yaitu dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 2.52.**
Indikator Kota Layak Anak (KLA)




*Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

Adapun kategori penghargaan KLA adalah : 1) Kabupaten/Kota Layak Anak, 2) Utama (801-900), 3) Nindya (701-800), 4) Madya (601-700), dan 5) Pratama (500-600). Hasil evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak se-Sumatera Selatan Tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut :

**Tabel 2.140.**
Nilai Verifikasi Tahap Awal (Aplikasi) KLA per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

| No. | KABUPATEN/KOTA | NILAI/BOBOT | |
|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 |
| 1. | Palembang | 4 | 108 |
| 2. | Prabumulih | 0 | 0 |
| 3. | Pagaralam | 0 | 0 |
| 4. | Lubuk Linggau | 0 | 518 |
| 5. | Musi Banyuasin | 756,3 | 875,53 |
| 6. | Banyuasin | 0 | 170 |
| 7. | Muara Enim | 9 | 440 |
| 8. | Lahat | 16 | 0 |
| 9. | Pali | 606,45 | 703 |
| 10. | Empat Lawang | 10 | 16 |
| 11. | Ogan Ilir (Oi) | 66,5 | 0 |
| 12. | Ogan Komering Ilir | 152,5 | 0 |
| 13. | Ogan Komering Ulu | 0 | 66,5 |
| 14. | Ogan Komering Ulu Timur | 197,5 | 301,7 |
| 15. | Ogan Komering Ulu Selatan | 0 | 0 |
| 16. | Musi Rawas | 153,5 | 525,99 |
| 17. | Musi Rawas Utara | 90 | 0 |

*Sumber : DPPPA Provinsi Sumsel, 2018*

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2017 kabupaten Musi Banyuasin memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak kategori Pratama. Sedangkan di tahun 2018 ada 2 (dua) Kabupaten yang memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak yaitu Musi Banyuasin (kategori Madya) dan PALI (kategori Pratama).

### 2.3.2.2.3. Perlindungan Perempuan dan Anak

Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Selatan selama ini sudah berjalan dengan melibatkan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, namun belum optimal pelaksanaannya. Salah satu

indikator perlindungan perempuan dan anak yaitu jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Walaupun Provinsi Sumatera Selatan tidak termasuk provinsi dengan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak tertinggi, namun upaya pencegahan dan penanganan harus terus dilakukan.

Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Selatan sebagai wadah penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mulai Tahun 2018 ditingkatkan statusnya menjadi Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD).

Jenis kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi bervariasi seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking (perdagangan orang), penelantaran dan lainnya. Jumlah kasus dan korban kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2014-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.141.**
Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018

| Kasus Kekerasan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Korban Perempuan (dewasa) | 665 | 481 | 325 | 325 | 238 |
| Korban Anak (laki-laki+perempuan) | 405 | 553 | 400 | 458 | 379 |
| Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak | 1.060 | 1.037 | 772 | 788 | 646 |

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan*

Penghitungan kasus kekerasan perempuan dan anak sampai Tahun 2015 masih menggunakan penghitungan manual melalui formulir yang diisi oleh Dinas PP-PA Kabupaten/Kota. Data Berasal dari P2TP2A Provinsi dan Kabupaten/Kota, *Woman Crisis Centre* (WCC), Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA). Permasalahan Data Manual dari kabupaten/kota antara lain : data belum bisa divalidasi dikarenakan sumber data yang belum seragam dan penyampaian data yang tidak kontinyu.

**Gambar 2.53.**
Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018




*Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan*

Mulai Tahun 2016 telah ada sistem aplikasi online pelaporan kasus kekerasan perempuan (e-simfoni). Pelaksanaan e-simfoni selama ini telah berjalan cukup baik walau pun masih harus terus ditingkatkan. Kesulitan yang dialami antara lain mutasi petugas operator yang telah ditunjuk, operator belum konsisten menginput data dan masih harus selalu dipantau dan diingatkan, serta menu penyajian data dalam aplikasi yang masih terbatas. Permasalahan lainnya sampai Tahun 2018 aplikasi Simfoni ini didukung melalui pembiayaan dana dekonsentrasi, yang diharapkan di masa depan dapat dilaksanakan melalui pembiayaan APBD. Namun, yang perlu diapresiasi telah ada komitmen dari kabupaten/kota untuk mulai kontinu mengirimkan data kekerasan sehingga diharapkan nantinya data simfoni bisa menggambarkan secara real kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan.

Upaya peningkatan perlindungan perempuan dan anak ke depan harus dilakukan dengan mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai sektor dan elemen masyarakat. Kelompok sasaran yang dituju pun lebih diperluas tidak hanya hanya kekerasan perempuan dan anak tetapi lebih luas seperti perempuan penyandang disabilitas, perempuan yang termarginalkan serta perlindungan khusus anak seperti yang diamanatkan dalam UU Perlindungan Anak.

### 2.3.2.3. Ketahanan Pangan

#### 2.3.2.3.1. Regulasi Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Kebijakan umum pemerintah daerah dalam pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk mengatasi tantangan dan masalah yang menghambat proses dan kinerja sub sistem ketahanan pangan serta mendayagunakan peluang yang tersedia untuk memenuhi kecukupan pangan bagi setiap penduduk dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Peningkatan ketersediaan pangan disebabkan adanya Gerakan UPSUS PAJALE ( Upaya Khusus Swasembada Pangan Padi Jagung Kedelai) yang merupakan program utama kementerian pertanian.

Realisasi Ketersediaan energi sudah melebihi target yang diharapkan dan jauh diatas Standar Nasional sebesar 2.400 kkal/kap/hari. Kelompok pangan penyumbang energi terbesar adalah kelompok pangan padi-padian dan minyak dan lemak, sedangkan kelompok pangan yang memiliki kontribusi paling rendah terhadap ketersediaan energi berasal dari susu.

Realisasi Ketersediaan protein dari sudah melebihi target yang diharapkan diatas Standar Nasional sebesar 63 gr/kap/hari (WNPG Tahun 2012). Kelompok pangan penyumbang protein terbesar adalah kelompok pangan padi-padian dan ikan, sedangkan kelompok pangan yang memiliki kontribusi paling rendah terhadap ketersediaan protein berasal dari susu serta minyak dan lemak.

Dalam hal Penanganan Kerawanan Pangan, Ketahanan pangan pada saat ini belum dapat diwujudkan karena masih banyaknya kejadian kerawanan pangan di berbagai daerah bersifat kronis (terjadi berulang sepanjang waktu) dan transien (terjadi secara mendadak).

Dalam rangka menurunkan kerawanan pangan sesuai target RPJMD Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera

Selatan melaksanakan kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan. Capaian penanganan kerawanan pangan belum mencapai target yang diharapkan yaitu 1 %/tahun. Pengembangan Desa Mandiri Pangan yang merupakan kegiatan lintas sektor sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan keterlibatan dan sinergitas antar instansi dan stakeholder yang terkait, dimana diharapkan masyarakat desa mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari secara berkelanjutan.

Pemantauan distribusi dan stabilitas harga pangan pokok merupakan upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak/fluktuasi harga pangan pokok strategis yang ekstrim, melalui pemantapan di 17 kab/kota se Sumatera Selatan.

Perkembangan harga komoditi pangan strategis menunjukkan bahwa perkembangan harga rata-rata tingkat konsumen komoditi pangan strategis dikategorikan cukup stabil setiap tahun. Fluktuasi harga komoditi pangan biasa terjadi menjelang HBKN dan setelah itu harga akan normal kembali. Komoditi pangan yang sering mengalami fluktuasi menjelang HBKN yaitu cabe, telur, bawang merah, dan ayam ras.

Skor PPH penduduk Sumatera Selatan belum mencapai target dikarenakan konsumsi beberapa kelompok bahan pangan yang masih dibawah konsumsi harapan dan perlu ditingkatkan lagi yaitu dari kelompok Umbi-umbian, Pangan Hewani, Kacang-kacangan dan sayur-sayuran dan buah-buahan kelompok pangan sumber vitamin dan mineral. Untuk itu perlu peningkatan pola konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi dan berimbang dalam rangka pencapaian penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal

Dalam rangka pengawasan mutu dan keamanan pangan segar telah dibentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) di Sumatera Selatan. Masalah keamanan pangan terutama buah dan sayur segar merupakan tanggung jawab pemerintah, produsen dan konsumen.

Berdasarkan UU Pangan No 18 Tahun 2012 Pasal 68 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas dalam mewujudkan penyelenggaraan keamanan pangan di tiap rantai pangan secara terpadu dan sesuai dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan penanganan keamanan

pangan segar merupakan urusan yang telah didelegasikan ke Pemerintah Dearah.

Pengawasan keamanan pangan segar (pre market dan post market) saat ini dilaksanakan oleh Dinas yang menangani Pangan di daerah selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

Untuk mendukung kinerja pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan segar, maka kementerian Pertanian telah menerbitkan Permentan Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Kemanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan dan telah ditandatangani oleh Bapak Menteri Pertanian pada tanggal 31 Desember 2018, dalam regulasi ini pangan segar terkemas wajib didaftarkan.

Kewenangan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 di bagi menjadi dua yaitu :

1. Pangan olahan oleh BPOM
2. Pangan Segar oleh Kementerian Pertanian.

Kewenangan Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut Beras tanpa klaim, Telur segar/asin, Sayuran segar/beku, Kentang segar/beku, Biji-bijian, Buah-buahan segar, Daging segar/beku, Ayam segar/beku. Sesuai dengan kewenangan tersebut di atas Menteri Pertanian berwenang mengatur, membina, dan atau mengawasi kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan segar. Infrastruktur mutu yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengawasan keamanan pangan hasil petanian di daerah adalah Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). Dengan ditetapkannya OKKPD sebagai unit kerja yang melakukan pengawasan keamanan pangan hasil pertanian diharapkan mampu memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan mutu dan keamanan pangan, sehingga operasional pengawasan akan bejalan secara efektif.

Di Provinsi Sumatera Selatan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah berada di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya OKKPD menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar. OKKPD Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Pergub No. 71 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Sumatera Selatan. Tugas Pokok OKKPD adalah untuk menjamin keamanan dan mutu pangan serta meningkatkan daya saing produk segar asal tumbuhan yang beredar di masyarakat melalui sertifikasi dan pendaftaran / registrasi pangan segar asal tumbuhan.

Untuk mendukung pelaksanaan program-program yang terkait dengan ketahanan pangan, Provinsi Sumatera Selatan sudah didukung dengan regulasi yang terkait dengan ketahanan pangan. Regulasi ketahanan pangan Provinsi Sumatera Selatan sudah diatur berdasarkan UU, PP, Perpres, Permentan, Perda, Pergub, Keputusan Gubernur, dan Keputusan Kepala Daerah.

**Tabel 2.142.**
Regulasi Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan

| No | JENIS | JUMLAH | NOMOR | Mengatur Tentang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UU | 1 | 16 Tahun 2012 | Pangan |
| 2 | PP | 1 | 68 Tahun 2013 | Ketahanan Pangan |
| 3 | Perpres | 1 | 22 Tahun 2009 | Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal |
| 4 | Permentan | 2 | 65/Permentan/OT.140/12/2012 | Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan, |
| | | | 43/Permentan/OT.140/10/2009 | Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal |
| 5 | Perda | 1 | 06 Tahun 2007 | Arah Kebijakan Sumatera Selatan Lumbung Pangan 2006- 2025 |
| 6 | Pergub | 6 | 71 Tahun 2008 | Pembentukan OKKP-D Provinsi Sumsel |
| | | | 63 Tahun 2009 | Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Di Sumsel |
| | | | 03 Tahun 2012 | Standar Biaya Perjalanan Dinas |
| | | | 12 Tahun 2012 | Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Provinsi Sumatera Selatan |
| | | | 18 Tahun 2012 | Perubahan Pergub Sumsel No 12 Tahun 2012 |
| | | | 38 Tahun 2012 | Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan |
| 7 | Keputusan Gubernur | 1 | 319/KTPS/DISPTPH/2013 | Pembentukan Tim Pemantauan Dan Pembinaan Pelaksanaan Peningkatan Produksi Beras Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 |
| 8 | Keputusan Kepala Badan | 1 | 912/SK/BAN.KETPANG.391/I/2013 | Penunjukkan Dan Penetapan Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Intern (SPI) BKP Sumatera Selatan |

*Sumber : Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan*

#### 2.3.2.3.2. Ketersediaan Pangan Utama

Sumatera Selatan sejak tahun 2005 telah memiliki Master plan Lumbung Pangan. Lumbung pangan yang ingin dicapai oleh Sumatera Selatan bukan dalam artian harfiah hanya berkaitan dengan ketersediaan atau simpanan pangan bagi masyarakat Sumatera Selatan dan Nasional, tetapi juga mencakup hasil produksi pertanian non pangan yang menjadi sumber pendapatan yang memadai sehingga masyarakat juga dapat mengakses pangan secara berkecukupan. Program Sumsel Lumbung Pangan dapat juga diartikan sebagai serangkaian aktivitas terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan termasuk agroindustri dan pemasarannya dalam kerangka sistem dan usaha agribisnis untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan ekspor sektor pertanian, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan/atau mengurangi tingkat pengangguran, menanggulangi dan/atau mengentaskan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memacu revitalisasi pedesaan dan memantapkan ketahanan pangan masyarakat Sumatera Selatan. Sampai saat ini Sumatera Selatan telah mengalami surplus beberapa bahan pangan yaitu beras, jagung, kacang tanah, ubi kayu,ubi jalar, gula pasir, minyak goreng, daging, telur, susu, dan ikan, kecuali kacang hijau, sayur dan buah, seperti tampak pada tabel.

Pangan yang bermutu adalah pangan hasil pertanian yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan mulai dari proses budidaya, proses penanganan panen, pasca panen, pengemasan, distribusi, serta pemasarannya yang bebas dari cemaran residu fisik (pecahan kaca, batu, kayu, dll) serta bebas dari cemaran mikrobiologi (e-coli, salmonella, dll). Ciri-ciri yang dapat dilihat untuk mengidentifikasi pangan bermutu adalah :

1. Terdapat kode registrasi pada kemasan produk pertanian. Contoh : KEMTAN RI PD 31.72-II.I.00-03-0007-08/15
2. Atau terdapat logo sertifikat Prima, yang terdiri dari :
   - Prima 1 : aman, bermutu, dan berwawasan lingkungan
   - Prima 2 : aman dan bermutu
   - Prima 3 : aman dari residu
3. Atau terdapat logo organik.

Data ketersediaan pangan utama di Provinsi Sumatera Selatan ditampilkan pada Tabel 2.89. Berdasarkan tabel tersebut, neraca perimbangan pangan dari perhitungan produksi dan konsumsi terlihat bahwa Sumatera Selatan sebagian besar surplus, hanya beberapa komoditi yang mengalami defisit yaitu susu, minyak goreng, ubi jalar, kedelai, sayuran dan buah-buahan serta kacang hijau.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya produksi telah didukung dengan penetapan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan terkait dengan ketersediaan potensi sumber daya lahan yang cukup variatif, mulai dari lahan sawah irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut, lebak dan lahan kering. Selain juga memiliki komoditas unggulan lain seperti jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, komoditas sayuran dan buah-buahan. Berbagai upaya dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lahan yang tersedia secara keseluruhan melalui upaya peningkatan pelayanan jaringan irigasi dan rawa, penggunaan bahan baku, peningkatan keterampilan petani dan kemampuan petani mengakses modal perbankan, dan pengembangan penggunaan alat mesin pertanian.

**Tabel 2.143.**
Ketersediaan Pangan Utama Provinsi Sumatera Selatan

| No | Komoditi | Tahun 2014 | | | Tahun 2015 | | | Tahun 2016 | | | Tahun 2017 | | | Tahun 2018 (ASEM) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Produksi (Ton) | Konsumsi | Surplus/ Minus (+/-) | Produksi (Ton) | Konsumsi | Surplus/ Minus (+/-) | Produksi (Ton) | Konsumsi | Surplus/ Minus (+/-) | Produksi (Ton) | Konsumsi | Surplus/ Minus (+/-) | Produksi (Ton) | Konsumsi | Surplus/ Minus (+/-) |
| 1 | Beras | 2.302.830 | 797.881 | 1.504.949 | 2.688.129 | 809.015 | 1.879.114 | 3.246.456 | 819.925 | 2.426.531 | 3.101.283 | 905.032 | 2.196.251 | 2.058.527 | 916.345 | 1.142.182 |
| 2 | Jagung | 191.974 | 1.478 | 190.496 | 191.974 | 1.499 | 190.475 | 624.887 | 1.519 | 623.368 | 892.358 | 4.647 | 887.711 | 692.191 | 4.705 | 687.486 |
| 3 | Ubi Kayu | 220.014 | 31.247 | 188.767 | 217.807 | 31.683 | 186.124 | 320.462 | 32.111 | 288.351 | 539.009 | 58.418 | 480.591 | 212.178 | 59.148 | 153.030 |
| 4 | Ubi Jalar | 24.454 | 7.855 | 16.599 | 16.563 | 7.965 | 8.598 | 16.524 | 8.072 | 8.452 | 13.429 | 23.230 | -10.801 | 8.867 | 24.533 | -15.666 |
| 5 | Kedelai | 12.550 | 86.293 | -73.743 | 16.818 | 87.497 | -70.679 | 25.316 | 88.677 | -63.361 | 11.792 | 59.115 | -47.323 | 10.488 | 59.854 | -49.366 |
| 6 | Gula Pasir | 140.808 | 82.061 | 58.747 | 146.319 | 83.412 | 62.907 | 146.319 | 84.536 | 61.783 | 77.670 | 102.525 | -24.855 | 77.670 | 103.803 | -26.133 |
| 7 | Minyak Goreng/ Sawit | 395.999 | 60.640 | 335.359 | 384.481 | 61.486 | 322.995 | 346.804 | 62.315 | 284.489 | 0 | 100.306 | -100.306 | 0. | 101.560 | -101.560 |
| 8 | Sayuran dan Buah-buahan | 635.612 | 572.685 | 62.927 | 516.722 | 580.677 | -63.955 | 260.538 | 588.507 | -327.970 | 605.319 | 1.201.771 | -596.452 | 1.090.174 | 1.446.083 | -355.909 |
| 9 | Daging | 27.210 | 9.942 | 17.268 | 43.211 | 328.532 | -285.321 | 45.361 | 332.962 | -287.602 | 46.014 | 69.775 | -23.671 | 50.661 | 70.200 | -19.539 |
| 10 | Telur | 65.773 | 62.147 | 3.626 | 56.239 | 63.014 | -6.775 | 71.483 | 63.864 | 7.619 | 59.253 | 55.567 | 3.648 | 59.547 | 55.304 | 4.243 |
| 11 | Susu | 67.813 | 28.378 | 39.435 | 155 | 28.774 | -28.619 | 166 | 29.162 | -28.995 | 112 | 1.018 | -906 | 112 | 95 | 17 |
| 12 | Ikan | 1.447.586 | 180.325 | 1.267.261 | 1.559.244 | 182.841 | 1.376.403 | 1.568.499 | 185.307 | 1.383.192 | 618.707 | 603.059 | 15.648 | 391.984 | 216.973 | 175.011 |
| 13 | Kacang Tanah | 2.864 | 1.246 | 1.618 | 2.127 | 1.264 | 863 | 1.859 | 1.281 | 578 | 3.113 | 1.660 | 1.453 | 819 | 1.680 | -861 |
| 14 | Kacang Hijau | 1.182 | 1.652 | -470 | 974 | 1.675 | -701 | 1.156 | 1.698 | -542 | 951 | 33 | 918 | 703 | 34 | 669 |

*Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.2.3.3. Tidak Stabilnya Pasokan dan Harga Pangan Strategis di Tingkat Produsen dan Konsumen

Hal ini disebabkan karena :

a. Fluktuasi harga pangan strategis ditingkat produsen dan konsumen relatif tinggi.
b. Stok/cadangan pangan daerah masih rendah,

Tidak stabilnya harga pangan/fluktuasi harga pangan yang ditunjukkan oleh *coefficient of variantion* (cv) perlu diantisipasi karena nilai cv yang tinggi mencerminkan harga jual pangan sangat fluktuatif sehingga mempengaruhi inflasi. Fluktuasi harga pangan dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan, persaingan permintaan misalnya melonjaknya harga pangan dunia, sifat produksi yang musiman, dan tidak merata antar musim serta meningkatnya frekuensi bencana alam, hal ini mengakibatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan menurun sehingga kondisi ketahanan pangan terganggu. Adanya fluktuasi harga ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 2.144.**
Fluktuasi Harga Komoditas Pangan Strategis Provinsi Sumtera Selatan
Tahun 2014-2018

| Tahun | GKP Tk Petani | Beras | Gula pasir | Minyak goreng | Cabe merah keriting | Bawang merah | Daging sapi murni | Daging ayam ras | Telur ayam ras | Kedelai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | na | 9.194 | 11.799 | 11.895 | 34.128 | 23.461 | 111.397 | 30.153 | 18.000 | 10.200 |
| 2015 | 3.826 | 10.025 | 11.832 | 11.430 | 36.947 | 26.704 | 107.854 | 29.598 | 19.645 | 9.940 |
| 2016 | 3.791 | 11.170 | 14.250 | 12.212 | 40.476 | 40.908 | 119.577 | 30.750 | 21.366 | 8.869 |
| 2017 | 3.958 | 12.294 | 12.650 | 12.121 | 38.028 | 25.371 | 114.633 | 31.064 | 22.115 | 9.065 |
| 2018 | 4.436 | 11.908 | 12.254 | 11.984 | 39.125 | 27.724 | 122.389 | 34.000 | 22.950 | 9.507 |
| **Pert/thn (%)** | **5,19** | **6,85** | **1,59** | **0,26** | **3,66** | **9,58** | **2,58** | **3,13** | **6,30** | **-1,56** |
| **Rata-rata** | **3.202** | **9.100** | **10.464** | **9.940** | **31.451** | **24.030** | **95.975** | **25.928** | **17.347** | **9.516** |
| **Rata-rata CV** | **9,30** | **14,23** | **9,64** | **3,06** | **7,65** | **28,86** | **6,15** | **6,59** | **11,47** | **5,92** |
| **Target CV** | **-** | **< 10 %** | **< 5 %** | **< 5 %** | **< 25 %** | **< 25 %** | **< 10 %** | **< 10 %** | **< 10 %** | **< 10 %** |

*Sumber : DKPP Prov. Sumsel*

Berdasarkan pemantauan perkembangan harga pada komoditas pangan strategis tahun 2014 – 2018 terlihat bahwa :

1. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani mengalami peningkatan sebesar 5,19 %. Semakin Harga GKP di tingkat petani semakin tinggi pendapatan petani, sehingga kesejahteraannya semakin meningkat.
2. Selain kedelai dan minyak goreng, seluruh pangan strategis tingkat konsumen mengalami peningkatan harga berkisar 1,59 – 9,58 persen. Peningkatan terkecil adalah komoditas gula pasir dan terbesar adalah bawang merah.
3. Terdapat 6 (enam) komoditi yang selalu mengalami kenaikan/fluktuasi harga setiap tahun yaitu : (1) beras, rata-rata 6,85 % ; (2) cabe merah

keriting , rata-rata 3,66 % ; (3) bawang merah, rata-rata 9,56 % ; (4) Daging sapi murni, rata-rata 2,58 % ; (5) Daging ayam ras, rata-rata 3,13 % ; (6) telur ayam ras, rata-rata 6,30 %.

4. Berdasarkan perhitungan *coefficient of variations* (CV) harga masing-masing komoditas tingkat konsumen, terlihat bahwa sebagian besar komoditas pangan strategis cukup stabil harganya yaitu (1) minyak goreng 3,06 %, (2) cabe merah keriting 7,65 % (3) daging sapi murni 6,15 %, (4) daging ayam ras 6,59 % dan (5) kedelai 5,92 %. Sedangkan 4 komoditas lainnya sangat berfluktuasi bahkan sempat bergejolak dimasyarakat yaitu : (1) bawang merah 28,86 % (2) telur ayam ras 11,47 % (3) beras 14,23 % (4) gula pasir 9,64 %.

Selain ketidakstabilan harga pangan strategis, stok cadangan pangan pemerintah daerah juga masih rendah, karena fungsi cadangan pangan antara lain adalah untuk meningkatkan ketersediaan cadangan pangan dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi kekurangan pangan dan ketidakmampuan mengakses pangan masyarakat, gejolak harga pangan, serta untuk mengantisipasi kerawanan pangan bila terjadi bencana alam. Perkembangan jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut

**Tabel 2.145.**
Perkembangan Jumlah Cadangan Pangan (beras)
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2018

| No | Tahun | Pengadaan (Ton) | Jumlah (Ton) | Disalurkan (Ton) | Stock (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2013 | 88,00 | 88,00 | na | 88,00 |
| 2. | 2014 | 30,00 | 118,00 | 32,50 | 85,50 |
| 3. | 2015 | na | 85,50 | 6,00 | 79,50 |
| 4. | 2016 | na | 79,50 | 68,00 | 11,50 |
| 5. | 2017 | 2,00 | 13,50 | 2,50 | 11,00 |
| 6. | 2018 | 9,73 | 20,73 | 2,00 | 18,73 |

*Sumber : DKPP Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 telah bekerja sama dengan Perum Bulog Divre Sumsel Babel dalam pengadaan, pengelola penyimpanan dan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pada Tahun 2018, dengan stock cadangan pangan (beras) Pemerintah Provinsi (CBPP) sebesar 18,73 ton sangat kecil bila dibandingkan dengan cadangan pangan (beras) yang seharusnya disediakan sebesar 810 Ton,

sedangkan jumlah cadangan beras total provinsi (cadangan beras pemerintah provinsi + cadangan beras pemerintah Kabupaten/Kota) sebesar 4.050,82 ton.

Sedangkan cadangan pangan yang dititipkan di Lumbung Pangan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.146.**
Daftar Lokasi dan Jumlah Cadangan Pangan yang dititipkan di Lumbung Pangan Masyarakat (Ton)

| No | Kabupaten | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Muara Enim | 4 | na | na | na | na |
| 2. | OKUT | 4 | na | na | na | na |
| 3 | OKUS | 4 | na | na | na | na |
| 4. | OKI | 4 | na | na | na | na |
| 5. | MURA | 4 | 8 | na | na | na |
| 6. | Banyuasin | 4 | na | na | na | na |
| 7. | Ogan Ilir | 4 | 7 | na | na | na |
| 8. | Lahat | 4 | 7 | na | na | na |
| 9. | Musi Banyuasin | 4 | na | na | na | na |
| 10. | Empat Lawang | 4 | na | na | na | na |
| Total | | 40 | 22 | na | na | na |

*Sumber : DKPP Prov. Sumsel*

Adapun penyebab kecilnya stock pangan (beras) ini disebabkan anggaran yang tidak tersedia dan efisiensi anggaran.

Untuk itu perlu adanya dukungan Program/Kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yaitu melalui Program Peningkatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan baik di provinsi maupun dukungan kabupaten/Kota.

### 2.3.2.3.4. Konsumsi Pangan Penduduk Sumsel Masih didominasi Karbohidrat serta Kurang Konsumsi Pangan Hewani, Sayur dan Buah.

Konsumsi pangan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya masih tergantung pada satu komoditi yaitu beras sebagai sumber karbohidrat. Akibatnya konsumsi beras melebihi dari angka anjuran, sebaliknya beberapa komoditi pangan masih rendah seperti umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah sehingga menyebabkan konsumsi pangan penduduk belum Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), hal ini ditunjukkan oleh skor PPH yang masih rendah. Berikut perkembangan skor PPH Konsumsi dari tahun 2014-2018 Provinsi Sumatera Selatan.

**Tabel 2.147.**
Skor PPH Tingkat Konsumsi Pangan Penduduk
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018

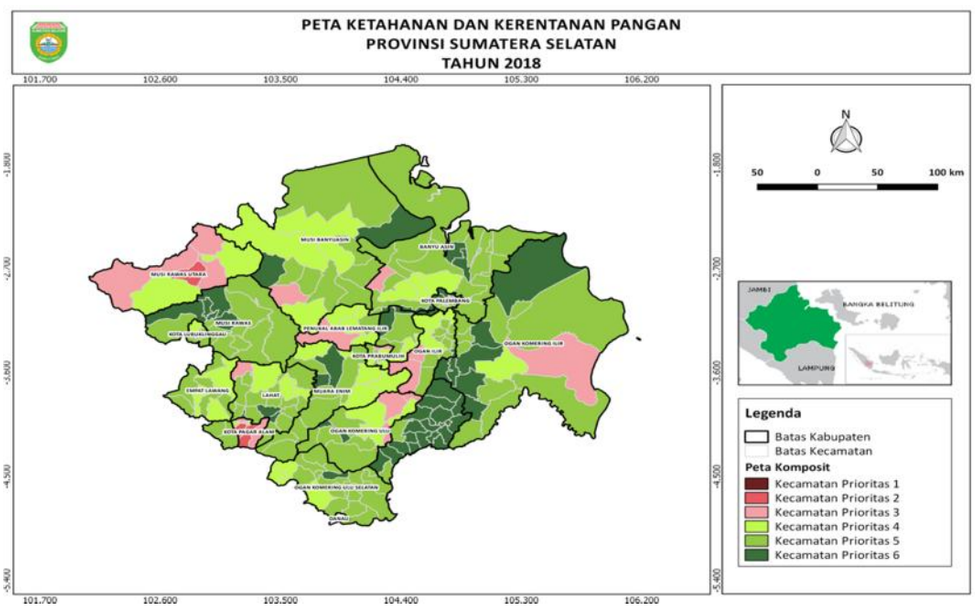
| No | Kelompok Pangan | Perkembangan Skor (KKal/Kap/hari) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | Ideal |
| 1. | Padi-padian | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | **25,0** |
| 2. | Makanan Berpati | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | **2,5** |
| 3. | Pangan Hewani | 19,7 | 20,2 | 20,9 | 24,0 | 24,0 | **24,0** |
| 4. | Minyak dan Lemak | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | **5,0** |
| 5. | Buah/Biji Berminyak | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | **1,0** |
| 6. | Kacang-kacangan | 4,4 | 4,4 | 5,6 | 4,6 | 5,3 | **10,0** |
| 7. | Gula | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | **2,5** |
| 8. | Sayur dan Buah | 25,4 | 27,8 | 28,2 | 30,0 | 30,0 | **30,0** |
| 9. | Minuman dan Bumbu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | na | **0** |
| Jumlah | | **83,7** | **87,0** | **89,6** | **93,4** | **94,3** | **100** |

*Sumber : DKPP Prov. Sumsel*

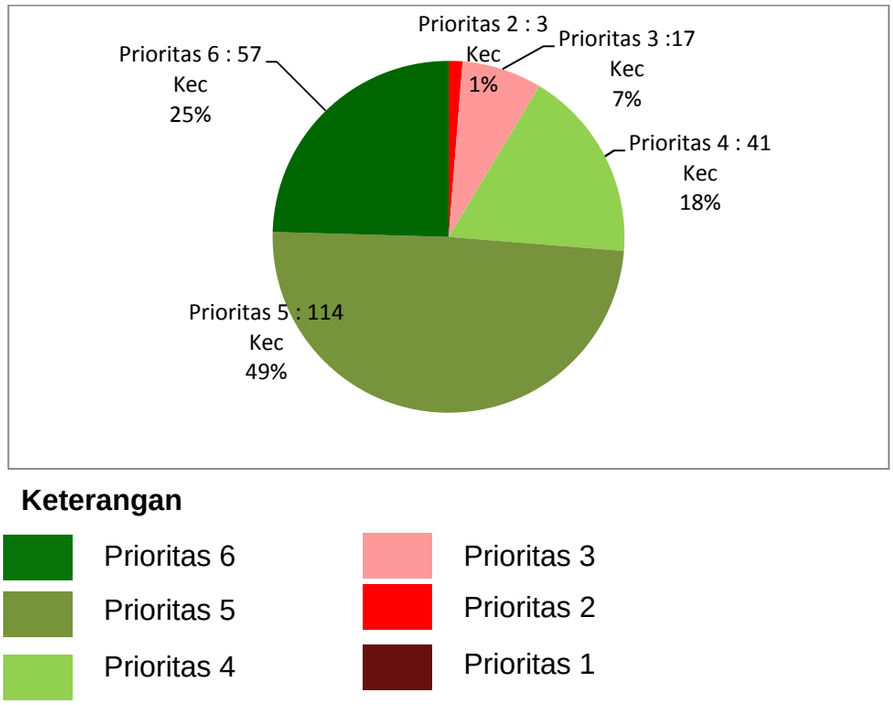
### 2.3.2.3.5. Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk Masih Belum Terpenuhi serta Masih Rentan Rawan Pangan di Daerah Miskin.

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat., rumah tangga dan individu secara berkelanjutan. Target perncapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kuantitas konsumsi pangan. Kreteria ketersediaan pangan minimal 2.400 Kkal/kap/hari untuk energi dan minimal 63 gram/kap/hari untuk protein**.**

**Gambar 2.54.**
Peta Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018



**Gambar 2.55.**
Sebaran Prioritas Kabupaten dan Kota 2018




**Tabel 2.148.**
Neraca Bahan Makanan (NBM) Prov. Sumsel Tahun 2014-2018

| No | Keterangan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* |
| 1. | Kalori (Kkal/Kap/Hr) | 5.345 | 5.745 | 2.170,2 | 2.219.81 | 2.124,21 |
| 2. | Protein (Gr/Kap/Hr) | 156,41 | 179,0 | 69,24 | 81.49 | 62,15 |
| 3. | Lemak (Gr/Kap/Hr) | 184,46 | 176,0 | 57,51 | 57,47 | 55,67 |

*Sumber : DKPP Prov. Sumsel*

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan dari tahun 2014 dan tahun 2015 serta tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 angka ketersediaan energi dan protein mengalami kenaikan. Nilai pada Neraca Bahan Makanan Tahun 2014 dan 2015 dengan 2016-2018 mengalami penurunan hal ini karena pada tahun 2014 dan 2015 jumlah Ekspor/pengeluaran masih dimasukkan dalam perhitungan sedangkan pada tahun 2016 dan seterusnya nilai NBM sudah dikurangi dengan ekspor/pengeluaran. Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2017 (Atap) ketersediaan Energi masih belum mencapai standar Nasional Energi sebesar 2.400 Kkal/Kap/hari, Sedangkan untuk Protein sebesar 63 gram/kap/hari

sudah melebihi standar ideal. Walaupun demikian, ketersediaan energy Provinsi Sumatera Selatan untuk dikonsumsi sudah melebihi cukup yaitu 2.150 Kkal/Kap/Hr.

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 (Asem) Ketersediaan Energi untuk dikonsumsi sebesar 2.124,21 Kkal/kap/hari dan ketersediaan protein untuk dikonsumsi sebesar 62,15 gram/kap/hari sedangkan standar nasional sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan 63 gram/kap/hari. Diharapkan meskipun ketersediaan energi dan protein itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi masih ada komoditi pangan yang devisit dari produksi wilayah sendiri sehingga masih harus didatangkan dari luar wilayah lain, sebaiknya jika memungkinkan maka komoditi yang devisit tersebut dapat diupayakan dengan produksi yang dihasilkan sendiri.

Ketersediaan zat gizi pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 masing-masing untuk energi sebesar 4,31% dan lemak sebesar 23,73 %. Penurunan ketersediaan zat gizi ini selain disebabkan karena data yang digunakan merupakan angka sementara tahun 2018 juga karena turunnya pasokan energi dari kelompok pangan antara lain pangan hewani sebesar 39,51% dan kacang-kacangan sebesar 0.31%, ada beberpa kolompok pangan yang devisit antara lain Kedelai, Daging Ayam Ras, Sayur dan Buah, dan Susu. (Atap 2017).

**Tabel 2.149.**
Skor PPH Tingkat Ketersediaan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2014-2018

| No | Kelompok Pangan | Perkembangan Skor (KKal/Kap/hari) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | Ideal |
| 1. | Padi-padian | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25 | **25,0** |
| 2. | Makanan Berpati | 2,42 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,86 | **2,5** |
| 3. | Pangan Hewani | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 14.27 | **24,0** |
| 4. | Minyak dan Lemak | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,00 | **5,0** |
| 5. | Buah/Biji Berminyak | 0,8 | 0,2 | 0.1 | 0,0 | 0,29 | **1,0** |
| 6. | Kacang-kacangan | 1,7 | 2,0 | 0.8 | 1,4 | 6,43 | **10,0** |
| 7. | Gula | 0,1 | 2,5 | 2,5 | 0,1 | 2,50 | **2,5** |
| 8. | Sayur dan Buah | 12,9 | 15,4 | 8.9 | 10,2 | 27,84 | **30,0** |
| 9. | Dll | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** |
| Jumlah | | **74,7** | **76,2** | **68.8** | **68,1** | **82,2** | **100** |

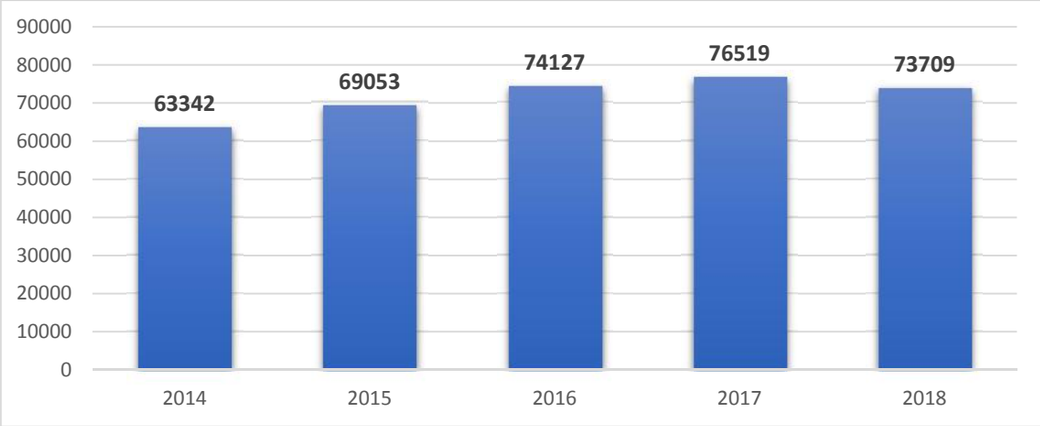
*Sumber : DKPP Prov. Sumsel*

### 2.3.2.3.6. Produksi Hasil Ternak (Daging, Telur, dan Susu) masih Belum Bisa Memenuhi Swasembada Pangan Hewani

Pencapaian produksi daging tahun 2018 menurun 3,67% (2.810 ton) dibanding tahun 2017 dan dari tahun 2017 meningkat 3,22% (2.392 ton)

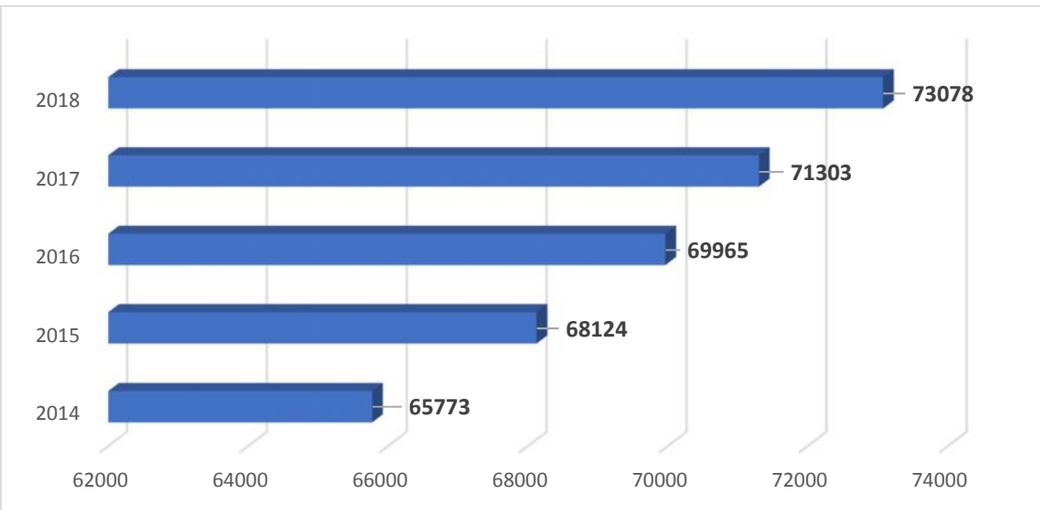
dibandingkan tahun 2016. Produksi daging tahun 2017 dan 2018 masih di dominasi oleh produksi daging ayam ras pedaging dan sapi potong. Grafik Produksi Daging dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

**Gambar 2.56.**
Produksi Daging Tahun 2014-2018




Adapun perbandingan antara realisasi produksi Telur serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik-grafik berikut ini.

**Gambar 2.57.**
Produksi Telur Tahun 2014-2018

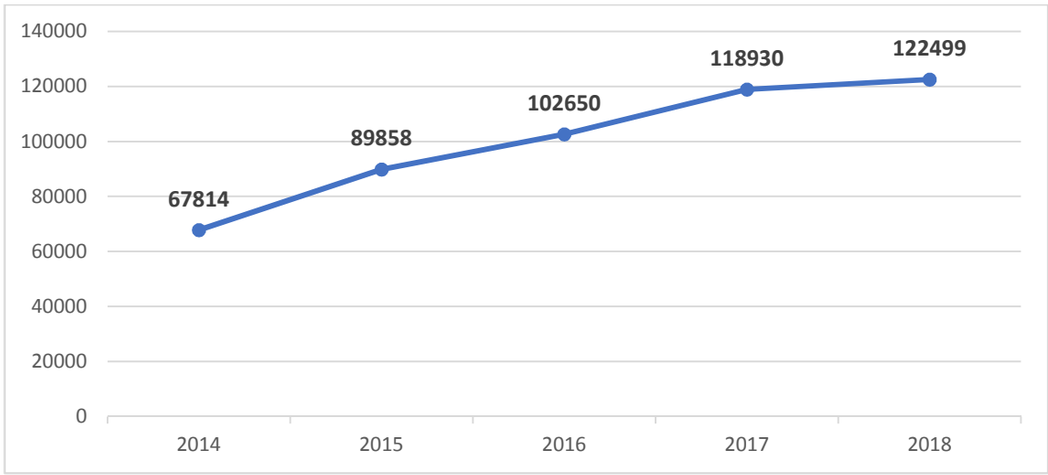



Pencapaian produksi telur tahun 2018 meningkat 2,49% (1.775 ton) dibanding tahun 2017 dan dari tahun 2017 meningkat 1,91% (1.338 ton) dibandingkan tahun 2016. Upaya untuk mencapai sasaran target Telur tahun 2018 melalui pembinaan kelembagaan peternakan antara lain : pembinaan kemitraan Ternak Unggas melalui penguatan kelembagaan, sanitasi perkandangan. Disamping itu upaya lainnya dengan mengoptimalkan kegiatan pencegahan penyakit Flu burung dan pelayanan

kesehatan hewan melalui Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

Produksi Susu serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini

**Gambar 2.58.**
Produksi Susu (Liter) Tahun 2014-2018




Pencapaian produksi susu tahun 2018 meningkat 3% (3.569 liter) dibanding tahun 2017 dan dari tahun 2017 meningkat 15,86% (16.280 liter) dibandingkan tahun 2016. Pencapaian produksi susu tahun 2018 di dominasi oleh sapi perah, namun untuk tahun 2017 produksi susu segar di dominasi oleh ternak kerbau rawa bertipe perah.

Upaya untuk mencapai sasaran target susu tahun 2018 melalui pembinaan kelembagaan peternakan antara lain : pembinaan kelompok tani melalui perbaikan managemen kelembagaan, budidaya dan pakan. Disamping itu upaya lainnya dengan mengoptimalkan kegiatan pencegahan penyakit ternak menular dan pelayanan kesehatan hewan melalui Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) serta Zoonosis.

### 2.3.2.3.7. Angka Kecukupan gizi masyarakat masih dibawah 90 %

Kemiskinan dan kerawanan pangan merupakan dua fenomena yang saling terkait bahkan dipandang sebagai hubungan debab akibat. Kondisi ketahanan pangan yang rentan menjadi sumber kemiskinan, sebaliknya kemiskinan bisa menjadi penyebab terjadinnya rawan pangan. Tingkat perkembangan penduduk rawan pangan merupakan gabaran situasi tingkat aksesibilitas pangan masyarakat dicerminkan dari tingkat kecukupan gizi masyarakat. Angka rawan pangan penduduk dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 angka

rawan pangan tahun 2017 turun derngan persentase yang sangat tinggi yaitu dari 12,69% tahun 2016 menjadi 7,91 % ditahun 2017. Tingkat Kerawanan Pangan di Sumatera Selatan masih cukup memprihatinkan, angka Rawan Pangan Provinsi Sumatera Selatan adalah Sangat Rawan 10,62 % ( <70% AKG) Rawan 27,68% (70%-89% AKG) dan Aman 61,7 % ( >=90% AKG ) . Sedangkan untuk sebarannya angka rawan pangan Kabupaten/Kota sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 2.150.**
Sebaran Angka Rawan Pangan Provinsi Sumatera Selatan

| No | Provinsi/Kb/Kota | Tahun 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | <70% AKG | 70%-89,9% AKG | >=90% AKG |
| 1 | Provinsi Sumatera Selatan | 10,62 | 27,68 | 61,7 |
| 2 | Ogan Komering Ulu | 15,77 | 33,4 | 50,82 |
| 3 | Ogan Komering Ilir | 10,01 | 23,22 | 66,77 |
| 4 | Muara Enim | 9,97 | 26,49 | 63,53 |
| 5 | Lahat | 7,65 | 23,75 | 68,6 |
| 6 | Musi Rawas | 9,29 | 28,24 | 62,47 |
| 7 | Musi banyuasin | 10,23 | 29,97 | 59,8 |
| 8 | Banyuasin | 10,6 | 23,87 | 65,53 |
| 9 | Ogan Komering Ulu Selatan | 13,29 | 27,41 | 58,67 |
| 10 | Ogan Komering Ulu Timur | 5,57 | 28,94 | 65,49 |
| 11 | Ogan Ilir | 9,86 | 27,8 | 62,34 |
| 12 | Empat Lawang | 4,88 | 20,58 | 74,54 |
| 13 | Penukal Abab Lematang Ilir | 5,21 | 25,13 | 69,66 |
| 14 | Musi Rawas Utara | 7,22 | 33,44 | 59,33 |
| 15 | Palembang | 13,47 | 30,61 | 55,92 |
| 16 | Prabumulih | 21,85 | 30,19 | 47,96 |
| 17 | Pagar Alam | 12,11 | 28,02 | 59,86 |
| 18 | Lubuk Linggau | 9,33 | 29,59 | 61,08 |

*Sumber : DKPP Prov. Sumsel*

Angka rawan pangan masih tinggi dikarenakan konsumsi pangan masih dominan beras/karbohidrat pemanfaatan pangan lokal serta penganekaragaman konsumsi pangan belum optimal. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam mendukung keberhasilan indikator adalah dengan kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan melalui pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan yang diberikan bantuan pemeberdayaan masyarakat miskin di pedesaan berupa bantuan ternak, ikan tanmaman sayuran dan pakan. Sampai dengan tahun 2018 jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan sebanayak 127 desa di 15 Kabupaten/Kota dengan sasaran KK miskin sebanyak lebih kurang 3.175 KK dengan jumlah jiwa lebih kurang 12.700 jiwa.

### 2.3.2.4. Pertanahan

#### 2.3.2.4.1. Luas Tanah Bersertifikat

Ketentuan pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang meperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Ketentuan setelah 5 (lima) tahun sertifikat tanah tak bisa digugat disatu sisi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum tetapi disisi lain kebijakan tersebut juga riskan dan tak memberikan perlindungan hukum kepada rakyat kecil yang sejauh ini belum sepenuhnya paham hukum.

**Tabel 2.151.**
Persentase Luas Tanah Bersertifikat di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2012-2018

| No | Tahun | Tanah Terdaftar | | Tanah Belum Terdaftar | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bidang | Luas (Ha) | Bidang | Luas (Ha) |
| 1 | 2012 | 20.472 | 148.097 | 3.750.108 | 3.041.872 |
| 2 | 2013 | 71.057 | 1.111.385 | 3.679.051 | 1.930.487 |
| 3 | 2014 | 53.150 | 66.640 | 3.657.005 | 1.863.846 |
| 4 | 2015 | 28.104 | 19.955 | 3.628.901 | 1.843.891 |
| 5 | 2016 | 20.373 | 623.052 | 3.608.528 | 1.220.838 |
| 6 | 2017 | 201.324 | 98.182 | 3.477.727 | 1.832.305 |
| 7 | 2018 | 297.555 | Na | 3.180.172 | na |
| Jumlah | | 692.035 | 2.067.312 | 24.981.492 | 11.733.240 |

*Ket: Lahan yang disertifikasi bukan merupakan kawasan hutan*
*Sumber: Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Total luas tanah yang terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan periode 2012-2018 adalah seluas 692.035 ha bidang tanah, jauh lebih sedikit dibandingkan bidang tanah yang belum terdaftar selama 7 (tujuh) tahun di Sumatera Selatan adalah seluas 24.981.492 ha.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mengimplementasikan program Reforma Agraria bersama dengan BPN/ATR Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria melalui Kepgub. 257/KPTS/Dishut/2018 ttg Gugus Tugas Reforma Agraria Prov. Sumsel yang direvisi dan disesuaikan dengan Perpres 86/2018 tentang Reformasi Agraria menjadi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 131/KPTS.16.400/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Selatan.

Terkait permasalahan masih tingginya tanah yang belum terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera akan melakukan strategi dan sinergi program dengan pemerintah pusat, adapun beberapa program dan kegiatan yang telah dan akan dilakukan sebagai berikut :

a. Terhadap program dan kegiatan Pemerintah Pusat berupa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan surat edaran kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Sumatera Selatan sesuai Surat Edaran :
   1) Nomor: 590/2436/DLHP/B-V/2017 tanggal 9 Oktober 2017
   2) Nomor: 593/0371/DLHP/B-V/2018 tanggal 19 Februari 2018
   3) Nomor: 590/0928/DLHP/B-V/2019 tanggal 15 April 2019
b. Terkait program Reforma Agraria Gubernur Sumatera Selatan telah membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 770/KPTS/DISHUT/2017 dan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 159/KPTS/DLHP/2019 Tanggal 8 Maret 2019

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga akan melaksanakan program dan kegiatan Optimalisasi pendaftaran dan pemanfaatan tanah, sehingga dengan kegiatan ini akan mendorong peningkatan pendaftaran dan pemafaatan lahan baik oleh Pemerintah, Swasta dan masyarakat.

### 2.3.2.5. Lingkungan Hidup

#### 2.3.2.5.1. Pencemaran Air

Sumatera Selatan memiliki sumber daya air yang relatif besar dan tersebar namun laju pertambahan penduduk dan banyaknya aktifitas ekonomi menyebabkan kebutuhan air semakin meningkat dan penurunan kualitas air. Awal mula pencemaran suatu sungai adalah ketidakpedulian manusia yang tinggal di sekitar sungai dimana mereka membuang kotoran atau sampah dan limbah ke badan perairan sungai secara bebas tanpa peduli. Padahal mereka yang tinggal di sekitar sungai tersebut juga memanfaatkan airnya sebagai sumber kehidupan rumah tangga. Selain itu, air tersebut juga diperlukan untuk bebagai keperluan misalnya industri, pertanian, perikanan, dan sebagainya. Sedangkan sumber pencemaran air sungai yang lain yaitu disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri karena belum seluruh

industri memiliki IPAL, limbah pestisida, kerusakan lahan yang menyebabkan lumpur, rumput liar, kegiatan transportasi sungai, dan pemakaian air tanah yang tidak terkontrol.

Air dikatakan tercemar apabila terjadi penambahan bahan buangan (kontaminan) sampai pada suatu tingkatan atau keadaan tertentu yang dapat membahayakan fungsi air tersebut. Masing-masing fungsi air untuk keperluan tertentu memiliki standar kualitas sebagai batasan penilaian apakah air sudah mengalami pencemaran atau masih di bawah batas toleransi.

**Tabel 2.152.**

Kualitas Air Sungai Provinsi Sumatera Selatan, 2017

| No | Nama Sungai | Titik Pantau | Waktu Sapling | Temperatur | Residu Terlarut | Residu Tersuspensi | pH | DHL | TDS | TSS | DO | BOD | COD | NO2 | NO3 | NH3 | Klorin Bebas | T-P | Fenol | Minyak dan Le | Deterge n | Fecal coliform | Total coliform | Sianida | H2S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (Tgl/Bln/Thn) | (°C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | **S. Musi** | **Tanjung Raya** | 26/04/2017 | 26 | 0 | 0 | 7,5 | 87,4 | 33,2 | 22,4 | 6,52 | 1,7 | 5,77 | 0,033 | 0,143 | <0,0041 | 0,15 | 2,4 | 0,008 | 0,3 | 0,124 | 100 | 900 | <0,02 | 18 |
| 2 | **S. Musi** | **Tebing Tinggi** | 26/04/2017 | 32,7 | 0 | 0 | 7,3 | 93,6 | 33,9 | 23,2 | 7,5 | 1,84 | 7,26 | 0,029 | 0,139 | <0,0041 | 0,16 | 0,08 | <0,003 | 0,3 | 0,141 | 100 | 1100 | <0,02 | 18 |
| 3 | **S. Semangus** | **Semeteh** | 28/04/2017 | 29 | 0 | 0 | 6,6 | 18 | 8,57 | 27,8 | 5,1 | 1,96 | 8,89 | 0,015 | 0,067 | <0,0041 | 0,21 | 0,91 | 0,123 | 0,3 | 0,235 | 100 | 1100 | 0,02 | 13 |
| 4 | **S. Kikim** | **Bunga Mas** | 28/04/2017 | 26,7 | 0 | 0 | 7,1 | 88,2 | 70,7 | 23,2 | 7,9 | 1,75 | 7,68 | 0,023 | 0,13 | <0,0041 | 0,11 | 0,34 | 0,004 | 0,4 | 0,232 | 100 | 1100 | <0,02 | 9 |
| 5 | **S. Kelingi** | **Muara Kelingi** | 28/04/2017 | 28 | 0 | 0 | 6,5 | 23 | 19,5 | 29,3 | 5,5 | 1,94 | 9,17 | 0,022 | 0,115 | <0,0041 | 0,31 | 0,48 | 0,131 | 0,3 | 0,125 | 100 | 900 | <0,02 | 16 |
| 6 | **S. Lakitan** | **Muara Lakitan** | 28/04/2017 | 29 | 0 | 0 | 6,5 | 26 | 18,8 | 28 | 4,9 | 1,99 | 10,9 | 0,015 | 0,088 | <0,0041 | 0,21 | 0,43 | 0,135 | 0,4 | 0,221 | 100 | 1600 | <0,02 | 11 |
| 7 | **S. Rawas** | **Muara Rawas** | 26/04/2017 | 26,7 | 0 | 0 | 6,6 | 21 | 14,7 | 39,7 | 5,2 | 1,87 | 8,71 | 0,017 | 0,118 | <0,0041 | 0,17 | 0,45 | 0,121 | <0,3 | 0,146 | 100 | 1100 | <0,02 | 11 |
| 8 | **S. Musi** | **Sekayu** | 26/04/2017 | 31 | 0 | 0 | 6,6 | 20 | 19,3 | 42,3 | 4,8 | 2,03 | 12,3 | 0,019 | 0,092 | <0,0041 | 0,2 | 0,37 | 0,036 | <0,3 | 0,151 | 100 | 1300 | <0,02 | 12 |
| 9 | **S. Batanghari Leko** | **Desa Teluk** | 26/04/2017 | 28 | 0 | 0 | 6,9 | 19 | 11,7 | 44,6 | 4,9 | 2,1 | 14,7 | 0,044 | 0,225 | <0,0041 | 0,44 | 0,34 | 0,094 | 0,3 | 0,188 | 100 | 900 | <0,02 | 22 |
| 10 | **S. Lematang** | **Ujan Mas** | 25/04/2017 | 26,5 | 0 | 0 | 7,6 | 107 | 69,1 | 604 | 7,7 | 1,95 | 9,05 | 0,031 | 0,142 | <0,0041 | 0,39 | 0,18 | 0,004 | 0,4 | 0,311 | 100 | 1200 | <0,02 | 35 |
| 11 | **S. Lematang** | **Muara Lematang** | 26/04/2017 | 29,5 | 0 | 0 | 7,1 | 69,6 | 49,6 | 19,3 | 5,3 | 2,17 | 11,8 | 0,051 | 0,163 | <0,0041 | 0,01 | 0,11 | <0,003 | <0,3 | 0,057 | 100 | 1400 | <0,02 | 23 |

| No | Nama Sungai | Titik Pantau | Waktu Sapling (Tgl/Bln/Thn) | Temperatur (°C) | Residu Terlarut | Residu Tersuspensi | pH | DHL | TDS | TSS | DO | BOD | COD | NO2 | NO3 | NH3 | Klorin Bebas | T-P | Fenol | Minyak dan Le | Deterge n | Fecal coliform | Total coliform | Sianida | H2S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 12 | **S. Musi** | **PDAM** | 13/04/2017 | 30,7 | 0 | 0 | 7,31 | 47,8 | 34 | 22,8 | 5,27 | 2,2 | 12,6 | 0,01 | 0,103 | <0,0041 | 0,02 | 0,16 | <0,003 | 0,3 | 0,124 | 100 | 1800 | <0,02 | 32 |
| 113 | **S. Keramasan** | **Muara Keramasan** | 13/04/2017 | 32,1 | 0 | 0 | 3,33 | 634 | 449 | 17,8 | 5,3 | 2,13 | 10,5 | 0,021 | 0,141 | <0,0041 | 0,01 | 0,07 | 0,004 | <0,3 | 0,115 | 100 | 900 | <0,02 | 11 |
| 14 | **S. Ogan** | **Kertapati** | 13/04/2017 | 29,7 | 0 | 0 | 7,34 | 44,9 | 31,7 | 22,2 | 5,4 | 2,18 | 11,4 | 0,01 | 0,113 | <0,0041 | 0,03 | 0,12 | 0,005 | <0,3 | 0,052 | 200 | 1400 | 0,011 | 28 |
| 15 | **S. Musi** | **Ampera** | 13/04/2017 | 29,9 | 0 | 0 | 7,28 | 49,3 | 34,9 | 22,6 | 5,4 | 2,19 | 13,3 | 0,012 | 0,121 | <0,0041 | 0,02 | 0,08 | 0,004 | 0,4 | 0,063 | 100 | 600 | <0,02 | 25 |
| 16 | **S. Komering** | **Pertamina Plaju** | 13/04/2017 | 30,9 | 0 | 0 | 5,2 | 59,8 | 42,3 | 18,1 | 4,4 | 2,57 | 14,9 | 0,004 | 0,096 | <0,0041 | 0,01 | 0,11 | 0,003 | <0,3 | 0,077 | 100 | 1100 | <0,02 | 9 |
| 17 | **S. Musi** | **Borang** | 04/11/2017 | 29,8 | 0 | 0 | 8,13 | 49,1 | 34,4 | 20,9 | 6,5 | 1,74 | 17,2 | 0,01 | 0,108 | <0,0041 | 0,02 | 0,14 | <0,003 | 0,3 | 0,063 | 100 | 1200 | <0,02 | 17 |
| 18 | **S. Musi** | **Sungsang** | 04/11/2017 | 30,7 | 0 | 0 | 6,38 | 1313 | 928 | 20,8 | 5,1 | 2,22 | 14,9 | 0,02 | 0,137 | <0,0041 | 0,01 | 0,08 | <0,003 | <0,3 | 0,05 | 200 | 1600 | <0,02 | 19 |
| 19 | **S. Mesuji** | **Mesuji** | 04/11/2017 | 27,6 | 0 | 0 | 6 | 34 | 21,5 | 34 | 4,9 | 2 | 9,12 | 0,01 | 0,127 | <0,0041 | 0,42 | 0,88 | 0,019 | <0,3 | 0,2 | 200 | 12000 | <0,02 | 11 |
| 20 | **S. Warkuk** | **Kota Batu** | 28/04/2017 | 23 | 0 | 0 | 6,87 | 111 | 78,1 | 20,6 | 8,8 | 1,84 | 6,18 | 0,022 | 0,122 | <0,0041 | 0,04 | 1,41 | 0,005 | 0,3 | 0,238 | 100 | 11000 | <0,02 | <7 |
| 21 | **S. Musi** | **Tanjung Raya** | 16/05/2017 | 27 | 0 | 0 | 6 | 129 | 98,7 | 59,3 | 5,42 | 2,16 | 12,1 | 0,019 | 0,178 | <0,0041 | 0,04 | 0,12 | 0,009 | 0,5 | 0,196 | 100 | 1000 | <0,02 | 21 |
| 22 | **S. Musi** | **Tebing Tinggi** | 16/05/2017 | 32,9 | 0 | 0 | 6 | 58,6 | 49,2 | 46,2 | 6,02 | 1,99 | 8,54 | 0,02 | 0,192 | <0,0041 | 0,08 | 0,07 | 0,011 | 0,3 | 0,096 | 100 | 900 | <0,02 | 19 |
| 23 | **S. Semangus** | **Semeteh** | 18/05/2017 | 29,5 | 0 | 0 | 7,92 | 77 | 54,2 | 38,2 | 5,05 | 1,97 | 9,79 | 0,021 | 0,176 | <0,0041 | 0,04 | 0,18 | 21 | <0,3 | 0,191 | 100 | 1000 | <0,02 | 21 |
| 24 | **S. Kikim** | **Bunga Mas** | 18/05/2017 | 27,3 | 0 | 0 | 7 | 149 | 98,2 | 50,5 | 6,02 | 1,98 | 10,2 | 0,018 | 0,156 | <0,0041 | 0,04 | 0,17 | 0,013 | 0,3 | 0,073 | 100 | 1400 | <0,02 | 24 |

| No | Nama Sungai | Titik Pantau | Waktu Sapling | Temperatur | Residu Terlarut | Residu Tersuspensi | pH | DHL | TDS | TSS | DO | BOD | COD | NO2 | NO3 | NH3 | Klorin Bebas | T-P | Fenol | Minyak dan Le | Deterge n | Fecal coliform | Total coliform | Sianida | H2S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (Tgl/Bln/Thn) | (°C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | **S. Kelingi** | **Muara Kelingi** | 18/05/2017 | 28,2 | 0 | 0 | 7,82 | 45,2 | 32,1 | 27,7 | 4,39 | 2,12 | 11,8 | 0,024 | 0,189 | 0,006 | 0,03 | 0,19 | 0,006 | 0,3 | 0 | 100 | 800 | <0,02 | 23 |
| 26 | **S. Lakitan** | **Muara Lakitan** | 18/05/2017 | 28 | 0 | 0 | 7,8 | 65,6 | 46,6 | 32,8 | 5,1 | 1,99 | 9,48 | 0,02 | 0,163 | <0,0041 | 0,03 | 0,1 | 0,01 | <0,3 | 0,136 | 100 | 1300 | <0,02 | 18 |
| 27 | **S. Rawas** | **Muara Rawas** | 16/05/2017 | 28 | 0 | 0 | 7,8 | 51 | 36,2 | 20,2 | 4,9 | 1,96 | 10,1 | 0,018 | 0,16 | <0,0041 | 0,02 | 0,16 | 0,008 | 0,3 | 0,206 | 100 | 1000 | <0,02 | 31 |
| 28 | **S. Musi** | **Sekayu** | 16/05/2017 | 29,6 | 0 | 0 | 7,4 | 39,3 | 28 | 19,8 | 4,32 | 2,24 | 10,2 | 0,027 | 0,207 | <0,0041 | 0,01 | 0,19 | 0,004 | 0,3 | 0,082 | 100 | 900 | <0,02 | 28 |
| 29 | **S. Batanghari Leko** | **Desa Teluk** | 16/05/2017 | 28,5 | 0 | 0 | 7,9 | 67,8 | 48,1 | 20,2 | 3,65 | 2,27 | 18,8 | 0,002 | 0,191 | <0,0041 | 0,01 | 0,12 | 0,006 | 0,4 | 0,092 | 100 | 1200 | <0,02 | 24 |
| 30 | **S. Lematang** | **Ujan Mas** | 15/05/2017 | 32,1 | 0 | 0 | 7,1 | 122 | 42,6 | 38,5 | 6,18 | 1,84 | 8,77 | 0,021 | 0,183 | <0,0041 | 0,02 | 0,17 | 0,009 | <0,3 | 0,12 | 100 | 1300 | <0,02 | 18 |
| 31 | **S. Lematang** | **Muara Lematang** | 16/05/2017 | 28,1 | 0 | 0 | 7,5 | 110 | 77,5 | 32,3 | 6,5 | 1,97 | 9,54 | 0,203 | 0,025 | <0,0041 | 0,02 | 0,07 | 0,007 | 0,4 | 0,036 | 100 | 1200 | <0,02 | 23 |
| 32 | **S. Musi** | **PDAM** | 25/05/2017 | 28,9 | 0 | 0 | 7,7 | 42,7 | 30,3 | 21,3 | 5,1 | 1,97 | 9,74 | 0,028 | 0,177 | <0,0041 | 0,01 | 0,12 | <0,003 | <0,3 | 0,21 | 100 | 1100 | <0,02 | 28 |
| 33 | **S. Keramasan** | **Muara Keramasan** | 25/05/2017 | 29,8 | 0 | 0 | 3,71 | 372 | 263 | 19,3 | 4,16 | 2,13 | 19,9 | 0,019 | 0,16 | <0,0041 | 0,02 | 0,07 | 0,004 | 0,4 | 0,211 | 100 | 1000 | <0,02 | 21 |
| 34 | **S. Ogan** | **Kertapati** | 25/05/2017 | 30 | 0 | 0 | 6,6 | 48,9 | 34,7 | 29,6 | 5,26 | 1,98 | 9,58 | 0,022 | 0,172 | <0,0041 | 0,01 | 0,16 | <0,003 | 0,3 | 0,163 | 100 | 900 | <0,02 | 30 |
| 35 | **S. Musi** | **Ampera** | 25/05/2017 | 28.8 | 0 | 0 | 6,65 | 44 | 26,5 | 23,4 | 4,82 | 2,2 | 16,3 | 0,02 | 0,169 | <0,0041 | 0,02 | 0,14 | <0,003 | 0,4 | 0,161 | 100 | 1200 | <0,02 | 33 |
| 36 | **S. Komering** | **Pertamina Plaju** | 25/05/2017 | 30,1 | 0 | 0 | 6,5 | 45,2 | 32,1 | 236 | 4,5 | 2,25 | 15,6 | 0,024 | 0,163 | <0,0041 | 0,02 | 0,08 | 0,008 | 0,4 | 0,119 | 100 | 900 | <0,02 | 33 |
| 37 | **S. Musi** | **Borang** | 23/05/2017 | 29,2 | 0 | 0 | 8,31 | 45,1 | 31,5 | 18,4 | 4,05 | 2,03 | 13,7 | 0,019 | 0,169 | <0,0041 | 0,02 | 0,1 | 0,005 | 0,3 | 0,061 | 100 | 1000 | <0,02 | <0,01 |

| No | Nama Sungai | Titik Pantau | Waktu Sapling (Tgl/Bln/Thn) | Temperatur (°C) | Residu Terlarut | Residu Tersuspensi | pH | DHL | TDS | TSS | DO | BOD | COD | NO2 | NO3 | NH3 | Klorin Bebas | T-P | Fenol | Minyak dan Le | Deterge n | Fecal coliform | Total coliform | Sianida | H2S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 38 | **S. Musi** | **Sungsang** | 23/05/2017 | 29,3 | 0 | 0 | 7,32 | 1203 | 844 | 22,8 | 4,54 | 2,1 | 12,8 | 0,021 | 0,178 | <0,0041 | 0,02 | 0,13 | 0,01 | 0,3 | 0,108 | 100 | 1000 | <0,02 | <0.01 |
| 39 | **S. Mesuji** | **Mesuji** | 19/05/2017 | 27,6 | 0 | 0 | 6 | 46 | 24,2 | 16,2 | 3,92 | 2,26 | 14,8 | 0,02 | 0,173 | <0,0041 | 0,02 | 0,15 | <0,003 | <0,3 | 0,2 | 100 | 1000 | <0,02 | 32 |
| 40 | **S. Warkuk** | **Kota Batu** | 18/05/2017 | 27 | 0 | 0 | 7,5 | 134 | 87,9 | 57,5 | 5,31 | 2,89 | 16,5 | 0,017 | 0,152 | <0,0041 | 0,03 | 0,14 | 0,011 | <0,3 | 0,099 | 100 | 900 | <0,02 | 26 |
| 41 | **S. Musi** | **Tanjung Raya** | 08/04/2017 | 27 | 0 | 0 | 7,9 | 103 | 54,6 | 42,2 | 6,21 | 1,53 | 8,61 | 0,025 | 0,154 | <0,0041 | 0,02 | 0,08 | 0,005 | 0,4 | 0,076 | 400 | 900 | <0,02 | 29 |
| 42 | **S. Musi** | **Tebing Tinggi** | 08/04/2017 | 30 | 0 | 0 | 7,4 | 133 | 59,6 | 4,22 | 6,37 | 1,79 | 8,48 | 0,293 | 0,187 | <0,0041 | 0,02 | 0,12 | 0,005 | 0,4 | 0,14 | 400 | 900 | <0,02 | 29 |
| 43 | **S. Semangus** | **Semeteh** | 08/04/2017 | 29,2 | 0 | 0 | 7,41 | 103 | 55,2 | 19,4 | 6,26 | 1,24 | 8,64 | 0,006 | 0,133 | <0,0041 | 0,01 | 0,16 | 0,006 | 0,4 | 0,171 | 400 | 800 | <0,02 | 15 |
| 44 | **S. Kikim** | **Bunga Mas** | 08/02/2017 | 34 | 0 | 0 | 8,4 | 129 | 68,6 | 11,3 | 5,46 | 3,15 | 19,5 | 0,21 | 0,163 | <0,0041 | 0,02 | 0,06 | 0,003 | <0,3 | 0,197 | 400 | 900 | <0,02 | 9 |
| 45 | **S. Kelingi** | **Muara Kelingi** | 08/04/2017 | 27,5 | 0 | 0 | 7,5 | 0,61 | 32,2 | 14,8 | 5,24 | 3,11 | 23,3 | 0,006 | 0,112 | <0,0041 | 0,01 | 0,13 | 0,01 | 0,4 | 0,189 | 400 | 1500 | <0,02 | 15 |
| 46 | S. Lakitan | Muara Lakitan | 08/04/2017 | 27,5 | 0 | 0 | 7,3 | 0,94 | 49,2 | 17,7 | 5,34 | 3,21 | 21,5 | 0,005 | 0,105 | <0,0041 | 0,01 | 0,11 | 0,005 | 0,3 | 0,14 | 400 | 1500 | <0,02 | 11 |
| 47 | S. Rawas | Muara Rawas | 08/02/2017 | 31 | 0 | 0 | 7,15 | 0,75 | 40,3 | 36,7 | 5,44 | 2,86 | 17,1 | 0,006 | 0,143 | <0,0041 | 0,01 | 0,18 | 0,008 | 0,3 | 0,231 | 400 | 900 | <0,02 | 17 |
| 48 | S. Musi | Sekayu | 08/02/2017 | 25 | 0 | 0 | 6,8 | 0,65 | 34,7 | 30,8 | 5,04 | 3,12 | 22,2 | 0,008 | 0,173 | <0,0041 | 0,02 | 0,15 | 0,015 | 0,4 | 0,231 | 400 | 1600 | <0,02 | 28 |
| 49 | S. Batanghari Leko | Desa Teluk | 08/02/2017 | 29,8 | 0 | 0 | 6,7 | 0 | 15,8 | 27,3 | 9,07 | 3,06 | 21 | 0,018 | 0,215 | <0,0041 | 0,02 | 0,17 | 0,019 | 0,4 | 0,394 | 500 | 1400 | <0,02 | 31 |
| 50 | S. Lematang | Ujan Mas | 08/01/2017 | 28,8 | 0 | 0 | 7,8 | 118 | 83,3 | 39,4 | 5,7 | 2,56 | 13,9 | 0,013 | 0,149 | <0,0041 | 0,01 | 0,16 | <0,003 | 0,3 | 0,141 | 900 | 1500 | <0,02 | 8 |

| No | Nama Sungai | Titik Pantau | Waktu Sapling | Temperatur | Residu Terlarut | Residu Tersuspensi | pH | DHL | TDS | TSS | DO | BOD | COD | NO2 | NO3 | NH3 | Klorin Bebas | T-P | Fenol | Minyak dan Le | Detergen | Fecal coliform | Total coliform | Sianida | H2S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (Tgl/Bln/Thn) | (°C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 51 | S. Lematang | Muara Lematang | 08/02/2017 | 28,4 | 0 | 0 | 6,05 | 104 | 74,1 | 39,8 | 5,8 | 3,44 | 21,7 | 0,021 | 0,125 | <0,0041 | 0,02 | 0,09 | 0,005 | 0,4 | 0,128 | 1600 | 2600 | <0,02 | <0,01 |
| 52 | S. Musi | PDAM | 08/10/2017 | 29,5 | 0 | 0 | 7,2 | 50,6 | 76,1 | 39,8 | 5,1 | 2,76 | 19,2 | 0,032 | 0,132 | <0,0041 | 0,01 | 0,18 | 0,003 | 0,3 | 0,044 | 100 | 300 | <0,02 | 21 |
| 53 | S. Keramasan | Muara Keramasan | 08/10/2017 | 29,3 | 0 | 0 | 7,2 | 124 | 8,8 | 33,1 | 5,8 | 2,92 | 23,6 | 0,016 | 0,172 | <0,0041 | 0,02 | 0,16 | 0,005 | 0,3 | 0,084 | 100 | 2100 | <0,02 | 30 |
| 54 | S. Ogan | Kertapati | 08/10/2017 | 30 | 0 | 0 | 6,8 | 103 | 73 | 42,2 | 5,5 | 2,66 | 19,5 | 0,031 | 0,241 | <0,0041 | 0,02 | 0,16 | 0,003 | 0,3 | 0,17 | 100 | 1600 | <0,02 | 27 |
| 55 | S. Musi | Ampera | 08/10/2017 | 30 | 0 | 0 | 7,65 | 96,6 | 68,6 | 24,2 | 5,5 | 3,54 | 23,1 | 0,026 | 0,132 | <0,0041 | 0,01 | 0,17 | 0,005 | 0,4 | 0,092 | 100 | 4000 | <0,02 | 31 |
| | S. Komering | Pertamina Plaju | 08/10/2017 | | 0 | 0 | 6,96 | 143 | 101 | 21,6 | 4,9 | 3,64 | 24,2 | 0,029 | 0,101 | <0,0041 | 0,02 | 0,11 | 0,003 | 0,4 | 0,203 | 100 | 600 | <0,02 | 28 |
| 57 | S. Musi | Borang | 08/08/2017 | 28,9 | 0 | 0 | 7,5 | 97,6 | 67,3 | 38,4 | 5,8 | 2,99 | 19,5 | 0,045 | 0,125 | <0,0041 | 0,02 | 0,16 | 0,003 | 0,4 | 0,072 | 100 | 1000 | <0,02 | 32 |
| 58 | S. Musi | Sungsang | 08/08/2017 | 28,9 | 0 | 0 | 8,11 | 5,85 | 3,92 | 21,7 | 5,1 | 3,08 | 21,4 | 0,046 | 0,139 | <0,0041 | 0,02 | 0,14 | 0,004 | 0,5 | 0,203 | 100 | 4000 | <0,02 | 27 |
| 59 | S. Mesuji | Mesuji | 08/08/2017 | 28,6 | 0 | 0 | 7,67 | 0,26 | 14,2 | 15,4 | 6,14 | 1,8 | 9,44 | 0,016 | 0,132 | <0,0041 | 0,02 | 0,1 | <0,003 | 0,3 | 0,1 | 500 | 9000 | <0,02 | 7 |
| 60 | S. Warkuk | Kota Batu | 08/04/2017 | 25,8 | 0 | 0 | 4,2 | 270 | 192 | 37,5 | 7,1 | 1,99 | 17,7 | 0,028 | 0,178 | <0,0041 | 0,01 | 0,14 | <0,003 | 0,3 | 0,206 | 800 | 1600 | <0,02 | 11 |
| 61 | S. Musi | Tanjung Raya | 10/07/2017 | 25 | 0 | 0 | 6,89 | 94,6 | 66,3 | 198 | 6,1 | 1,7 | 9,33 | 0,26 | 1,08 | <0,0041 | 0,13 | 0,6 | 0,079 | 0,5 | 0,143 | 1000 | 3500 | <0,02 | 44 |
| 62 | S. Musi | Tebing Tinggi | 10/07/2017 | 24,3 | 0 | 0 | 6,56 | 89,8 | 64,1 | 154 | 6,59 | 1,67 | 8,65 | 0,186 | 0,298 | <0,0041 | 0,08 | 0,59 | 0,059 | 0,4 | 0,169 | 1600 | 3500 | <0,02 | 18 |
| 63 | S. Semangus | Semeteh | 19/10/2017 | 26,5 | 0 | 0 | 6,9 | 82 | 51,5 | 27,9 | 7,1 | 1,76 | 9,61 | 0,1395 | 0,248 | <0,0041 | 0,04 | 0,09 | 0,005 | 0,3 | 0,1627 | 200 | 3000 | <0,02 | 15 |
| 64 | S. Kikim | Bunga Mas | 10/05/2017 | 29,4 | 0 | 0 | 6,84 | 128,4 | 91,1 | 12,1 | 6,2 | 1,72 | 9,07 | 0,063 | 0,192 | <0,0041 | 0,13 | 0,14 | <0,003 | 0,4 | 0,014 | 500 | 6300 | <0,02 | <7 |
| 65 | S. Kelingi | Muara Kelingi | 19/10/2017 | 26,5 | 0 | 0 | 7,2 | 95 | 42,9 | 24,7 | 6,8 | 1,88 | 8,68 | 0,1383 | 0,21 | <0,0041 | 0,02 | 0,07 | <0,003 | <0,3 | 0,026 | neg atif | 600 | <0,02 | 8 |

| No | Nama Sungai | Titik Pantau | Waktu Sapling | Temperatur | Residu Terlarut | Residu Tersuspensi | pH | DHL | TDS | TSS | DO | BOD | COD | NO2 | NO3 | NH3 | Klorin Bebas | T-P | Fenol | Minyak dan Le | Deterge n | Fecal coliform | Total coliform | Sianida | H2S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (Tgl/Bln/Thn) | (°C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 66 | S. Lakitan | Muara Lakitan | 19/10/2017 | 26,1 | 0 | 0 | 6,9 | 79 | 49,6 | 34,9 | 7 | 1,89 | 9,26 | 0,1526 | 0,206 | <0,0041 | 0,06 | 0,13 | 0,007 | 0,3 | 0,1717 | 200 | 2500 | <0,02 | 17 |
| 67 | S. Rawas | Muara Rawas | 17/10/2017 | 28,7 | 0 | 0 | 7,1 | 89 | 55,4 | 50,4 | 6,8 | 1,72 | 9,07 | 0,1322 | 0,218 | <0,0041 | 0,5 | 0,14 | 0,005 | 0,4 | 0,1393 | 2000 | 2.500 | <0,02 | 18 |
| 68 | S. Musi | Sekayu | 17/10/2017 | 26,7 | 0 | 0 | 6,4 | 79 | 34,6 | 127 | 7,1 | 1,85 | 8,85 | 0,1524 | 0,248 | <0,0041 | 0,03 | 0,16 | 0,003 | 0,4 | 0,1557 | 600 | 4500 | <0,02 | 21 |
| 69 | S. Batanghari Leko | Desa Teluk | 17/10/2017 | 25,9 | 0 | 0 | 7,2 | 92 | 48,7 | 51,3 | 6,8 | 1,83 | 9,48 | 0,1187 | 0,251 | <0,0041 | 0,03 | 0,18 | 0,004 | 0,3 | 0,1256 | neg atif | 1600 | <0,02 | 15 |
| 80 | S. Lematang | Ujan Mas | 10/09/2017 | 26,4 | 0 | 0 | 9,48 | 97,3 | 68,5 | 671 | 6,95 | 1,58 | 9,2 | 1,283 | 2,245 | <0,0041 | 0,07 | 1,24 | 0,295 | 0,6 | 0,073 | 400 | 3000 | <0,02 | 75 |
| 81 | S. Lematang | Muara Lematang | 10/10/2017 | 27,2 | 0 | 0 | 6,38 | 78,6 | 56,6 | 236 | 5,6 | 2,48 | 15,7 | 0,1664 | 0,258 | <0,0041 | 0,13 | 0,19 | 0,015 | 0,5 | 0,1386 | 4500 | 6400 | <0,02 | 45 |
| 82 | S. Musi | PDAM | 14/10/2017 | 28,9 | 0 | 0 | 6,22 | 56,2 | 79,8 | 26,5 | 5,6 | 2 | 18,6 | 0,1291 | 0,325 | <0,0041 | 0,03 | 0,15 | 0,006 | 0,4 | 0,1494 | 100 | 900 | <0,02 | 8 |
| 83 | S. Keramasan | Muara Keramasan | 14/10/2017 | 29 | 0 | 0 | 5,38 | 88,8 | 63,4 | 22,4 | 5,5 | 2,18 | 20,8 | 0,0983 | 0,181 | <0,0041 | 0,02 | 0,06 | <0,003 | 0,5 | 0,1002 | 1200 | 600 | <0,02 | 7 |
| 84 | S. Ogan | Kertapati | 14/10/2017 | 29,2 | 0 | 0 | 6,65 | 80,6 | 57,4 | 52,2 | 5,7 | 2,14 | 14,5 | 0,0911 | 0,174 | <0,0041 | 0,04 | 0,1 | 0,007 | 0,4 | 0,0423 | 100 | 1900 | <0,02 | 15 |
| 85 | S. Musi | Ampera | 14/10/2017 | 29 | 0 | 0 | 6,78 | 63,2 | 44,9 | 26,5 | 5,9 | 2,27 | 19,1 | 0,1045 | 0,211 | <0,0041 | 0,05 | 0,17 | 0,004 | 0,4 | 0,1548 | 900 | 4800 | <0,02 | 8 |
| 86 | S. Komering | Pertamina Plaju | 14/10/2017 | 29,7 | 0 | 0 | 6,58 | 87 | 50,3 | 31,8 | 5,5 | 2,19 | 22,5 | 0,1204 | 0,187 | <0,0041 | 0,03 | 0,13 | <0,003 | 0,4 | 0,1684 | 600 | 3500 | <0,02 | 14 |
| 87 | S. Musi | Borang | 10/12/2017 | 29,1 | 0 | 0 | 6,08 | 61,7 | 43,8 | 17,2 | 5,8 | 1,96 | 13,5 | 0,1248 | 0,154 | <0,0041 | 0,05 | 0,13 | 0,006 | <0,3 | 0,1496 | 100 | 900 | <0,02 | 11 |
| 88 | S. Musi | Sungsang | 10/12/2017 | 25,5 | 0 | 0 | 8,11 | 18,39 | 18,4 | 24,9 | 5,1 | 2,08 | 20,1 | 0,1507 | 0,215 | <0,0041 | 0,03 | 0,15 | 0,004 | 0,3 | 0,1773 | 800 | 8000 | <0,02 | 9 |

| No | Nama Sungai | Titik Pantau | Waktu Sapling (Tgl/Bln/Thn) | Temperatur (°C) | Residu Terlarut | Residu Tersuspensi | pH | DHL | TDS | TSS | DO | BOD | COD | NO2 | NO3 | NH3 | Klorin Bebas | T-P | Fenol | Minyak dan Le | Deterge n | Fecal coliform | Total coliform | Sianida | H2S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 89 | S. Mesuji | Mesuji | 10/03/2017 | 28,4 | 0 | 0 | 6,2 | 54,1 | 33,4 | 288 | 5,96 | 2,18 | 18,6 | 0,138 | 0,54 | <0,0041 | 0,02 | 0,13 | <0,003 | 0,4 | 0,1 | 1800 | 4.500 | <0,02 | 43 |
| 90 | S. Warkuk | Kota Batu | 10/12/2017 | 26,6 | 0 | 0 | 6,76 | 115 | 80,5 | 65,5 | 5,9 | 1,99 | 16,4 | 0,122 | 0,521 | <0,0041 | 0,03 | 0,13 | 0,006 | 0,4 | 0,096 | 300 | 4500 | <0,02 | 11 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan*
*Berdasarkan Laporan Pemantauan Sungai Skala Nasional dan/atau Lintas Batas Negara,Dana Dekonsentrasi Pemantauan Kualitas Air Sungai Tahun 2017*
*Keterangan : 0: Data tidak tersedia*

#### 2.3.2.5.2. Mutu Udara terkait Perubahan Iklim

Udara merupakan faktor yang penting dalam kehidupan, namun dengan meningkatnya pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri, kualitas udara telah mengalami perubahan. Udara yang dulunya segar, kini kering dan kotor. Perubahan lingkungan udara pada umumnya disebabkan pencemaran udara, yaitu masuknya zat pencemar (berbentuk gas-gas dan partikel kecil/aerosol) ke dalam udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan atau komponen lain kedalam udara ambient oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu udara ambient yang telah ditetapkan. Beberapa polutan di udara, yaitu partikulat dengan diameter kurang dari 10µm ($PM_{10}$), sulfur dioksida ($SO_2$), nitrogen dioksida ($NO_2$), karbonmonoksida (CO) dan timbal.

Manusia mudah terserang pusing, sakit kepala, daya tangkap melemah akibat gas CO, radang saluran pernafasan akibat gas $SO_2$, iritasi mata, malfungsi pada paru-paru akibat dari gas $NO_2$ dan berbagai penyakit lain dari buangan yang beredar di atas udaranya. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pencemaran udara antara lain:

1. Kecepatan angin. Semakin cepat angin semakin cepat pula perluasan derajat pencemaran; meski disisi lain diharapkan terjadi penipisan derajat konsentrasi yang lebih cepat pula.
2. Kemampuan Atmosfer untuk meningkatkan atau menekan gerakan udara secara vertikal (stabilitas udara) dapat memperluas atau mempertipis volume pencemaran.
3. Inversi dan turunnya hujan dapat pula menipiskan pencemaran udara. Namun dampak negatif yang mungkin ditimbulkan adalah terbawanya polutan oleh hujan yang dapat menimbulkan pencemaran air atau tanah.

Pencemaran udara dapat ditimbulkan kegiatan manusia seperti dari transportasi, industri pembangkit listrik, pembakaran (perapian, kompor, furnace, insinerator dengan berbagai jenis bahan bakar) termasuk pembakaran biomassa secara tradisional gas buang pabrik yang menghasilkan gas berbahaya seperti CFC maupun dari sumber alami seperti gunung berapi, rawa-rawa dan kebakaran hutan. Dampak dari pencemaran udara dapat dirasakan oleh setiap individu yang menghirup udara yang mengandung zat pencemar, dampak lain adalah terhadap ekosistem. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global. Pencemaran udara merupakan permasalahan yang kebanyakan terjadi di daerah perkotaaan yang dapat memberikan dampak negatif kepada masyarakat sehingga sedini mungkin perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka pengendalian pencemaran udara. Hasil uji kualitas udara ambient di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.153.**

Kualitas Udara Ambient di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

| Lokasi | Lama Pengukuran | SO2 (Âµg/Nm3) | CO (Âµg/Nm3) | N02 (Âµg/Nm3) | O3 (Âµg/Nm3) | HC | PM10 (Âµg/Nm3) | pm2,5 | TSP (Âµg/Nm3) | Pb (Âµg/Nm3) | dustfall | total fluorides sbg f | khlorine khlorine dioksid | sulphat inde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palembang | 12 hari | 116,3 | 116,3 | 121,1 | 124,9 | 2,1 | 54,8 | 0 | 109,6 | 0,0142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 hari | 99,0 | 99,0 | 120,3 | 62,3 | 0,9 | 27,9 | 0 | 55,7 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogan Ilir | 12 hari | 99,2 | 99,2 | 113,5 | 124,0 | 0,7 | 16,8 | 0 | 33,6 | 0,0036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 hari | 62,9 | 62,9 | 69,0 | 63,7 | 0,7 | 26,4 | 0 | 52,8 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banyuasin | 12 hari | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 98,9 | 1,5 | 13,8 | 0 | 27,5 | 0,0052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 hari | 58,6 | 58,6 | 75,3 | 68,5 | 0,0 | 26,9 | 0 | 53,8 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prabumulih | 12 hari | 103,0 | 103,0 | 111,7 | 109,1 | 1,0 | 18,1 | 0 | 36,1 | 0,0030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 hari | 78,3 | 78,3 | 72,3 | 75,0 | 0,5 | 24,4 | 0 | 48,8 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OKI | 12 hari | 103,0 | 103,0 | 119,5 | 114,8 | 0,0 | 23,4 | 0 | 46,8 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 hari | 70,5 | 70,5 | 84,5 | 64,7 | 0,2 | 21,2 | 0 | 42,4 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OKU | 12 hari | 89,9 | 89,9 | 134,6 | 127,6 | 2,2 | 12,5 | 0 | 24,9 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 hari | 75,9 | 75,9 | 81,2 | 79,3 | 0,7 | 21,2 | 0 | 42,5 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OKU Timur | 12 hari | 102,3 | 102,3 | 99,2 | 85,7 | 0,2 | 11,3 | 0 | 22,7 | 0,0192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 hari | 67,4 | 67,4 | 80,9 | 68,1 | 1,0 | 22,8 | 0 | 45,6 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OKU Selatan | 12 hari | 96,0 | 96,0 | 99,0 | 129,0 | 0,0 | 9,0 | 0 | 18,0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 hari | 68,0 | 68,0 | 82,0 | 67,0 | 0,0 | 20,0 | 0 | 40,0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUBA | 12 hari | 103,5 | 103,5 | 126,8 | 88,4 | 1,7 | 23,2 | 0 | 46,4 | 0,0028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.hari | 83,8 | 83,8 | 71,8 | 69,1 | 0,5 | 31,4 | 0 | 62,8 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lubuk Linggau | 12 hari | 108,3 | 108,3 | 128,5 | 96,1 | 1,1 | 11,5 | 0 | 23,1 | 0,0070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 hari | 74,3 | 74,3 | 80,3 | 53,5 | 13,0 | 24,3 | 0 | 56,0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALI | 12 hari | 104,0 | 104,0 | 126,8 | 99,8 | 0,7 | 14,1 | 0 | 28,2 | 0,0096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 hari | 73,5 | 73,5 | 70,6 | 57,5 | 0,2 | 21,2 | 0 | 42,5 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muara Enim | 12 hari | 94,3 | 94,3 | 111,9 | 109,1 | 0,0 | 19,1 | 0 | 38,3 | 0,0050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 hari | 65,5 | 65,5 | 79,1 | 66,9 | 1,0 | 25,4 | 0 | 50,7 | 0,0670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lahat | 12 hari | 101,8 | 101,8 | 115,9 | 110,3 | 1,2 | 13,6 | 0 | 27,1 | 0,0056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 hari | 64,2 | 64,2 | 78,6 | 67,3 | 1,1 | 23,8 | 0 | 47,6 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pagaralam | 12 hari | 99,7 | 99,7 | 111,6 | 116,4 | 0,7 | 31,6 | 0 | 72,5 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 hari | 69,3 | 69,3 | 70,7 | 48,6 | 0,2 | 18,4 | 0 | 36,7 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EmpatLawang | 12 hari | 102,5 | 102,5 | 111,8 | 116,8 | 0,0 | 43,8 | 0 | 87,7 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 hari | 63,4 | 63,4 | 50,8 | 57,4 | 1,0 | 21,4 | 0 | 42,7 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Musi Rawas | 12 hari | 106,0 | 106,0 | 111,4 | 117,0 | 1,5 | 28,0 | 0 | 56,1 | 0,0110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 hari | 72,3 | 72,3 | 76,5 | 75,1 | 0,7 | 24,9 | 0 | 49,8 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muratara | 12 hari | 101,8 | 101,8 | 119,7 | 78,8 | 1,5 | 13,7 | 0 | 27,4 | 0,0078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 hari | 81,5 | 81,5 | 65,5 | 73,5 | 0,2 | 31,1 | 0 | 62,1 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017*

*Keterangan : 0 : tidak dilakukan pengukuran pada parameter tersebut*

*Periode pemantauan dilaksanakan sebanyak 2 tahap, Periode I Bulan April-Mei, Periode II Bulan September-Oktober*

*Metode pengukuran yang digunakan passive sample*

**2.3.2.5.3 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**

Efek rumah kaca disebabkan oleh keberadaan CO2, CFC, metana,ozon, dan N2O di lapisan troposfer yang menyerap radiasi panas matahariyang dipantulkan oleh permukaan bumi. Akibatnya panas terperangkapdalam lapisan troposfer dan menimbulkan fenomena pemanasan global yangdapat meningkatnya suhu rata-rata bumi, pencairan es di kutub, perubahaniklim regional dan global, perubahan siklus hidup flora dan fauna. kerusakanlapisan ozon, lapisan ozon yang berada di stratosfer (ketinggian 20-35 km)merupakan pelindung alami bumi yang berfungsi memfilter radiasi ultravioletB dari matahari. Pembentukan dan penguraian molekul-molekul ozon (O3)terjadi secara alami di stratosfer. Emisi CFC yang mencapai stratosfer danbersifat sangat stabil menyebabkan laju penguraian molekul-molekul ozonlebih cepat dari pembentukannya, sehingga terbentuk lubang-lubang padalapisan ozon.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) selain berkomitmen menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Komitmen Pemprov Sumsel meningkatkan kontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen hingga 2020. Langkah nyata untuk mewujudkan komitmen tersebut dilakukan dengan mengkaji ulang dokumen rencana aksi daerah dan pemantauan evaluasi pelaporan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Upaya ini melibatkan seluruh *stakeholder*, kaji ulang dan evaluasi RAD perlu dilakukan untuk menyesuaikan target pengurangan emisi dengan perkembangan signifikan di sektor kehutanan, pertanian, transportasi, lahan gambut, industri dan pengelolaan limbah.

Sampai saat ini, Pemprov Sumsel terus mengupayakan perbaikan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Ada tiga bidang yang menjadi sasaran utama, yakni sektor lahan yang terdiri atas pertanian dan lahan gambut, energi, transportasi, dan industri, dan pengelolaan limbah baik padat maupun cair. Proyeksi *Business as Usual* (BAU) Provinsi Sumsel tahun 2020 tanpa intervensi aksi mitigasi menunjukkan bidang berbasis lahan masih menempati porsi penyumbang emisi GRK terbesar sebanyak 98,0596. Sedangkan bidang berbasis energi dan limbah secara berturut-turut menyumbang 1,8496 dan 0,11 persen dari total BAU 2020 di Provinsi Sumatera Selatan.

Pada tahun 2016, Sumatera Selatan telah berhasil menekan angka titik api sampai dengan 90 persen dan di 2017 tetap dapat dipertahankan walaupun sempat terjadi beberapa kebakaran kecil namun dapat segera ditanggulangi. Upaya inilah yang akan terus dilanjutkan oleh pemerintah. Rencana aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca sudah menjadi kebutuhan yang harus terus dilanjutkan. Hal ini akan menjadi salah satu tolok ukur kinerja pemerintah

daerah dalam mencapai target penurunan emisi. Target penurunan emisi Sumsel sendiri awalnya sebesar 10,16 persen di tahun 2020, kemudian disesuaikan di tahun 2030 yang besarnya akan disepakati dalam rencana aksi daerah yang dikaji ulang. Keberlanjutan rencana aksi tersebut telah didukung oleh regulasi Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, pada dasarnya peraturan ini mengatur keterlibatan seluruh pihak khususnya kabupaten/kota dan pihak swasta di Sumatera Selatan. Kondisi Emisi Gas Rumah Kaca dari enam sektor di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.154.**
Emisi GRK dari enam sektor di Sumatera Selatan

| No | Sektor | Emisi GRK | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | | 2016 | |
| | | BAU Baseline (tCO2eq)* | Penurunan Emisi (tCO2eq)** | BAU Baseline (tCO2eq)* | Penurunan Emisi (tCO2eq)** |
| 1 | Pertanian | 1.456.741,55 | na | 1.575.666,98 | 1.068.328,64 |
| 2 | Kehutanan dan Lahan Gambut | 134.995.793,53 | na | 146.230.844,97 | 22.658.931,09 |
| 3 | Energi | 2.782.433.065,00 | na | 2.907.642.553,31 | 330.755.207,24 |
| 4 | Transportasi | 3.561.941,80 | na | 4.096.233,07 | 1.351.756,91 |
| 5 | Industri | 2.959.376,16 | na | 3.107.344,97 | 1.143.401,29 |
| 6 | Sampah/Limbah | 1.233.801,00 | na | 1.280.583,00 | 103.624,00 |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2017*

Terkait dengan pengelolaan persampahan, Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu dari 34 Provinsi di Indonesia yang memiliki luas 91.575, 84 $km^2$ dan jumlah penduduk 8.364.362 jiwa tersebar di 13 kabupaten dan 4 kota. Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, maupun pertambangan. Adapun salah satu prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah "Pembangunan Lingkungan Yang Berbasis Landskap".

Dalam kaitan dengan program kerja pengelolaan persampahan pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam pelaksanaan JAKSTRADA yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari (belum termasuk tinja dan sampah spesifik). Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan rencana akan melaksanakan kegiatan peringatan *"Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2019"* yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memilah, mengkompos, dan mendaur ulang sampah secara berkesinambungan melalui pencanangan Gerakan Tiga Jari Kelola Sampah : Pilah, Kompos, Daur Ulang Menuju Indonesia Bersih Sampah 2020. ***Melalui Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 007/SE/DLHP/2019 tanggal 19. Februari 2019*** dengan himbauan mengkampanyekan, mengedukasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan gerakan memilah, mengkompos, dan mendaur ulang sampah di perumahan, sekolah, kampus, pasar, kawasan bisnis, kawasan wisata, kawasan industri, tempat ibadah, dan kawasan lainnya dengan tema "***Bersatu Sumsel Maju Menuju Kelola Sampah Untuk Hidup Bersih, Sehat dan Bernilai***".

Kegiatan pengelolaan persampahan di Provinsi Sumatera Selatan berkembang dengan tingkat kesadaran yang meningkat melalui program keberadaan bank sampah yaitu pengelolaan sampah *reduce, reuse, recycle,* yang biasa kita sebut *"3R"* berbasis pemberdayaan masyarakat melalui kombinasi operasional bank sampah dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) 3R.

Sampai dengan saat ini Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki 168 bank sampah dan belum termasuk bank sampah di sekolah-sekolah, jumlah TPST sebesar 1.331 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Berdasarkan data penduduk diatas timbulan sampah di Provinsi Sumatera selatan diperkirakan 5,8 ribu ton/hari atau setara dengan 2 juta ton/tahun, sedangkan sampah terkelola kondisi existing yang masuk ke TPA sampai dengan saat ini tercatat sebesar 1,5 ribu ton/hari, sampah yang belum terkelola sebesar diestimasi 4,3 ribu ton/hari dan angka terbesar timbulan sampah 900 sampai dengan 1000 ton/hari di Kota Palembang.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, paradigma pengelolaan sampah harus kita rubah dari

kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan disumber dan daur ulang sumberdaya. Pemanfaatan sampah (waste utilitation), dan pemrosesan akhir sampah di TPA sanitary landfill yang berwawasan lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan dari hulu saat barang belum digunakan atau dimanfaatkan, sampai hilir saat barang dan kemasan mencapai akhir masa gunanya.

Jika prinsip 3R tersebut dijalankan dengan konsisten, maka akan mendatangkan manfaat yang sangat banyak bagi kehidupan karena mampu mengurangi beban polutan bagi lingkungan hidup, mengurangi resiko kesehatan, menghemat penggunaan sumber daya alam dan energi, serta mendatangkan benefit ekonomi bagi banyak orang khusus di Provinsi Sumsel.

Pelaksanaan pengelolaan persampapahan di Provinsi Sumatera Selatan bersamaan dengan pencanangan Gerakan Tiga Jari Kelola Sampah: Pilah, Kompos dan Daur Ulang Menuju Indonesia Bersih Sampah Tahun 2020 adalah melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan program kerja evaluasi Jakstrada, adipura, bank sampah, pengembangan fasilitas teknis, program kampung iklim, adiwiyata, proper, dan sanitasi lingkungan, serta beberapa gerakan untuk membangun komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengolah sampah dengan bantuan fasilitas pengelolaan persampahan melalui program CSR perusahaan dalam wilayah Provinsi Sumsel.

Dalam kegiatan pengelolaan persampahan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tujuan untuk membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memilah, mengkompos, dan mendaur ulang sampah secara berkesinambungan.

**Tabel 2.155.**
Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengelolaan Persampahan

| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Proyeksi Timbulan Sampah (Ton/Hari) | Perbup/Perwako Jakstrada |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ogan Komering Ilir | 819.570 | 573,70 | No. 46/2018 tanggal 20 Agustus 2018 |
| 2. | Ogan Komering Ulu | 363.617 | 254,53 | No. 36/2018 tanggal 2 Oktober 2018 |
| 3. | Muara Enim | 627.818 | 439,47 | No. 43/2018 tanggal 5 Oktober 2018 |
| 4. | Lahat | 405.524 | 283,87 | No. 36/2018 tanggal 12 Oktober 2018 |
| 5. | Musi Rawas | 399.075 | 279,35 | No. 66/2018 tanggal 30 Agustus 2018 |
| 6. | Banyuasin | 844.175 | 590,92 | No. 104/2018 tanggal 31 Agustus 2018 |
| 7. | Musi Banyuasin | 638.625 | 447,04 | No. 86/2018 tanggal 18 September 2018 |
| 8. | Ogan Ilir | 425.032 | 297,52 | No. 73/2018 tanggal 7 Desember 2018 |
| 9. | OKU Selatan | 352.944 | 247,06 | No. 42/2018 tanggal 26 Desember 2018 |
| 10. | OKU Timur | 670.272 | 469,19 | No. 50/2018 tanggal 13 September 2018 |

| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Proyeksi Timbulan Sampah (Ton/Hari) | Perbup/Perwako Jakstrada |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Empat Lawang | 247.285 | 173,10 | No. 50/2018 tanggal 16 Oktober 2018 |
| 12. | Palembang | 1.643.488 | 1.150,442 | No. 73/2018 tanggal 19 Oktober 2018 |
| 13. | Prabumulih | 182.128 | 127,49 | No. 54/2018 tanggal 5 Oktober 2018 |
| 14. | Pagaralam | 137.909 | 96,54 | No. 4/2019 tanggal 11 Maret 2019 |
| 15. | Lubuk Linggau | 229.224 | 160,46 | No. 56/2018 tanggal 20 Desember 2018 |
| 16. | PALI | 187.781 | 131,45 | No. 75/2018 tanggal 20 Nopember 2018 |
| 17. | Musi Rawas Utara | 189.895 | 132,93 | No. 70/2018 tanggal 3 Oktober 2018 |
| ***Sumsel*** | | ***8.364.362*** | ***5.855,05*** | ***Pergub Sumsel No. 65/2018 Tanggal 19 September 2018*** |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel, 2019*

Terkait Komposisi Sampah, Provinsi Sumatera Selatan dipilih sebagai salah satu provinsi sebagai Pilot Project penyusunan dokumen RAD - GRK. Di Sumatera Selatan, kegiatan yang berhubungan dengan perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca melalui sektor limbah khususnya pengelolaan persampahan di TPA, karena Sumatera Selatan telah memiliki beberapa kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Seperti diketahui, Provinsi Sumatera Selatan dalam perubahan iklim telah memiliki inventarisasi GRK disektor persampahan. Sehingga kegiatan penyusunan RAD - GRK ini menyatukan semua kegiatan mitigasi yang pernah dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun komposisi sampah Sumatera Selatan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang bersumber dari Inventarisasi Emisi GRK JICA SP3 yakni sebagai berikut:

1. Sisa Makanan : 56,9 %
2. Plastik : 17,5 %
3. Kertas, Karton, Nappies : 15,1 %
4. Kayu dan Sampah Taman : 5,4 %
5. Kain dan Produk Tekstil : 2,7 %
6. Gelas : 0,8 %
7. Logam : 0,5 %
8. Karet dan Kulit : 0,3 %
9. Lain-lain : 0,8 %

Timbulan Sampah di TPA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota berjumlah dari 20 ton/hari hingga 931,28 ton/hari, di mana Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki timbulan sampah yang paling sedikit dan Kota Palembang memiliki timbulan sampah paling besar. Untuk Sumber sampah paling banyak berasal dari rumah tangga sebesar 48%,

sedangkan yang paling sedikit berasal dari sumber lainnya, di luar sampah yang bersumber dari pasar tradisional, kawasan komersil, sekolah, kantor dan jalan.

**Tabel 2.156.**
Timbulan Sampah di TPA Tahun 2018

| NO. | Kabupaten/Kota | Jumlah Timbulan | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1. | Ogan Komering Ilir | 20,00 | ton/hari |
| 2. | Ogan Komering Ulu | 37,68 | ton/hari |
| 3. | Muara Enim | 27,53 | ton/hari |
| 4. | Lahat | 24,42 | ton/hari |
| 5. | Musi Rawas | 19,67 | ton/hari |
| 6. | Banyuasin | 17,25 | ton/hari |
| 7. | Musi Banyuasin | 34,20 | ton/hari |
| 8. | OKU Selatan | 25,00 | ton/hari |
| 9. | OKU Timur | 40,50 | ton/hari |
| 10. | Ogan Ilir | 34,22 | ton/hari |
| 11. | Empat Lawang | 16,00 | ton/hari |
| 12. | Palembang | 931,28 | ton/hari |
| 13. | Prabumulih | 127,78 | ton/hari |
| 14. | Pagaralam | 58,31 | ton/hari |
| 15. | Lubuk Linggau | 109,10 | ton/hari |
| 16. | Penukal Abab Lematang Ilir | 19,20 | ton/hari |
| 17. | Musi Rawas Utara | 32,63 | ton/hari |
| | ***Sumsel*** | ***1,575*** | ***ton/hari*** |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel, 2019*

**Tabel 2.157.**
Sampah pada Sumbernya

| NO. | Sumber Sampah | Persentase Jumlah Sampah (%) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Rumah Tangga | 48 | % |
| 2. | Pasar Tradisional | 24 | % |
| 3. | Kawasan Komersil | 09 | % |
| 4. | Sekolah | 04 | % |
| 5. | Kantor | 06 | % |
| 6. | Jalan | 7,5 | % |
| 7. | Lainnya | 1,5 | % |
| | **Jumlah** | **100** | **%** |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel, 2019*

### 2.3.2.5.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan umumnya dilakukan secara parsial berdasarkan media yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai apakah kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks.

Studi-studi tentang indeks lingkungan telah banyak dilakukan terutama oleh perguruan tinggi di luar negeri, seperti Yale University dan Columbia University yang menghasilkan *Environmental Sustainability Index* (ESI) dan *Virginia Commonwealth University* yang berkolaborasi dengan *World Economic Forum* dan *Joint Research Center of the European Commission*. Studi tersebut

menghasilkan indeks yang disebut sebagai *Environmental Performance Index* (EPI).

Indeks Kualitas Lingkungan dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan. Selain sebagai sarana untuk mengevaluasi efektivitas program-program pengelolaan lingkungan, indeks kualitas lingkungan mempunyai peranan dalam hal membantu perumusan kebijakan, membantu dalam mendesain program lingkungan, dan mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi lingkungan.

**Tabel 2.158.**
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Selatan Tahun 2011 s.d. Tahun 2018

| Tahun | Indeks Kualitas Udara | Indeks Kualitas Air | Indeks Kualitas Tutupan Hutan | Nilai IKLH | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 89,34 | 60,80 | 34,52 | 58,85 | Kurang |
| 2012 | 84,06 | 55,00 | 34,68 | 55,59 | Kurang |
| 2013 | 83,86 | 63,20 | 36,03 | 58,53 | Kurang |
| 2014 | 89,25 | 66,19 | 37,47 | 61,62 | Kurang |
| 2015 | 94,96 | 50,28 | 33,66 | 57,04 | Sangat Kurang |
| 2016 | 94,96 | 50,00 | 57,14 | 66,34 | Cukup |
| 2017 | 96,11 | 62,64 | 36,03 | 62,04 | Kurang |
| 2018 | 96,11 | 62,64 | 49,17 | 67,29 | Cukup |

*Sumber : LKPJ Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

*) Keterangan :
Rentang nilai IKLH sbb :
Unggul : > 90
Sangat Baik : 82 < x ≤ 90
Baik : 74 < x ≤ 82
Cukup : 66 ≤ x ≤ 74
Kurang : 58 ≤ x < 66
Sangat Kurang : 50 ≤ x < 58
Waspada : < 50

Tabel perbandingan capaian IKLH Tahun 2017 dengan Target RPJMD 2018 dan target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.159.**
Perbandingan Capaian IKLH Sumatera Selatan Tahun 2017 dengan Target RPJMD Tahun 2018

| | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 (Target Kementerian LH dan Kehutanan) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Target (Jangka menengah Renstra) | Realisai | |
| Nilai IKLH | 59,23 | 62,04 | 59,48 | 67,29 | 66,5 – 68,5 |

*Sumber: LKPJ Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

**Tabel 2.160.**
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan

| Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indek Kualitas Lingkungan Hidup | 59,10 | 61,62 | 57,04 | 63,50 | 62,04 | 67,29 |

*Sumber : LKPJ Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan, untuk Tahun 2015 terdapat penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2014. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan nilai tutupan hutan pada Tahun 2015 akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang cukup panjang yang melanda beberapa kawasan hutan di Sumatera Selatan. Pada Tahun 2017 nilai IKLH terjadi penurunan dibandingkan Tahun 2016, hal ini disebabkan adanya perubahan fungsi hutan/lahan, sehingga target Renstra dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum tercapai, sedangkan pada tahun 2018 nilai IKLH meningkat dibandingkan tahun 2017.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa IKLH Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 masuk di dalam kategori Cukup yaitu berkisar antara 61,62 sampai dengan 67,29. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2018 terdapat 1.895 hotspot, dengan luasan terbakar 37.362 Ha. Selain itu, dikarenakan terjadinya penurunan indeks tutupan hutan dan lahan akibat adanya perubahan fungsi hutan/lahan, seperti pertambangan yang semakin pesat di Sumatera Selatan dan Pertumbuhan Penduduk untuk Kebutuhan Perumahan serta aktivitas lainnya. Tidak hanya itu, adapun beberapa hal yang mempengaruhi rendahnya penurunan IKLH yakni *pertama ;* pada tahun tersebut terjadi Fenomena Iklim El Nino. Fenomena El Nino tersebut dapat menyebabkan tingkat curah hujan yang sangat sedikit dan penguapan cadangan air yang tinggi sehingga berakibat banyaknya wilayah menjadi mudah terbakar. Juga dipengaruhi kebakaran yang terjadi di bawah tanah (*ground fire*) pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau. *Kedua ;* selain itu masih kurang maksimalnya pengelolaan Tata Guna Air yang dilakukan oleh pemegang ijin lain. *Ketiga ;* penggunaan api yang masih dilakukan dalam persiapan lahan oleh masyarakat maupun korporasi. *Keempat;* masih belum maksimalnya sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan.

Permasalahan emisi GRK merupakan perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui telah di Kaji Ulangnya Rencana Aksi Daerah (RAD) Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 sampai

dengan Tahun 2030 melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2018 Tanggal 30 April 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Dari perhitungan dalam kaji Ulang RAD GRK, diperkirakan akan berdampak pada penurunan emisi terhadap *baseline* Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Bidang Perubahan penggunaan lahan dan gambut berpotensi menurunkan emisi hingga 22,51% secara kumulatif, sedangkan sektor lain seperti pertanian-peternakan, limbah, dan energi-transportasi adalah 0,82%, 9,20%, dan 0,60%, sehingga secara keseluruhan dibandingkan dengan baseline (total) seluruh aksi mitigasi berpotensi menurunkan emisi sebesar 11,79%.

Dalam meningkatkan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD GRK telah disusun *stakeholder* yang berperan atau penanggung jawab kegiatan aksi mitigasi yang dilakukan disetiap bidang yaitu :

1. Bappeda Prov. Sumsel berperan sebagai koordinator PEP RAD-GRK di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Dinas Kehutanan berperan sebagai penanggung jawab dan penyedia data bidang kehutanan dan lahan gambut.
3. Dinas Pertanian berperan sebagai penanggung jawab dan penyedia data bidang pertanian, peternakan dan perkebunan.
4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berperan sebagai penanggung jawab dan penyedia data bidang energy.
5. Dinas Perhubungan berperan sebagai penanggung jawab dan penyedia data bidang transportasi.
6. Dinas Pekerjaan Umum/Cipta Karya berperan sebagai penanggung jawab dan penyedia data bidang pengelolaan limbah.
7. Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai penanggung jawab dan penyedia data bidang pengelolaan limbah.

Koordinasi antar OPD di atas dilaksanakan oleh Bappeda Prov. Sumsel dengan melakukan rapat koordinasi minimal 2 kali dalam setahun.

### 2.3.2.6. Kependudukan dan Catatan Sipil

#### 2.3.2.6.1 Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan wajib pelayanan dasar yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil menjadi kewenangan bersama antara pusat dan daerah. Demikian, hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjadi wewenang Provinsi.

Sampai dengan akhir tahun 2018, Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 8.181.311 Jiwa dan Jumlah Wajib KTP sebanyak 5.817.642 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 5.721.684 atau (98,35 %).

Di tingkat Kabupaten/Kota, Perekaman KTP-el Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Timur, dan Kabupaten Ogan Ilir telah mencapai 100 % Perekaman. Sedangkan beberapa daerah lainnya Perekaman KTP-el masih dibawah 90 % yaitu Kabupaten OKU Selatan baru mencapai 84,9 % penduduk yang melakukan Perekaman, Kabupaten Musi Rawas Utara perekaman 74,35 % sedangkan Kabupaten Empat Lawang Perekaman KTP-el nya baru mencapai 71,21 % Perekaman. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian perekaman KTP-el diantaranya Jarak tempuh yang sulit dijangkau, Alat Perekaman yang sudah tua dan rusak, Jaringan Listrik yang belum memadahi dan Masyarakat belum memahami pentingnya Dokumen Kependudukan.

Sedangkan untuk Kartu Identitas Anak dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 bahwa anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah harus mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Di Provinsi Sumatera Selatan Jumlah data Kartu Identitas Anak yang tercetak sampai saat ini baru berjumlah 179.937 KIA dari 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten OKU Timur sebanyak 46.636 KIA, Banyuasin sebanyak 25.479 KIA, Ogan Ilir sebanyak 340 KIA, Ogan Komering ULU sebanyak 17.342 KIA, Musi Banyuasin sebanyak 21.616 KIA, Ogan Komering Ilir sebanyak 5.569 KIA, OKU Selatan sebanyak 13.264 KIA, Lahat sebanyak 12.361 KIA, PALI sebanyak 46.485 KIA, Musi Rawas sebanyak 199 KIA, Kota Palembang sebanyak 3.600 KIA, Lubuk Linggau sebanyak 2.300 KIA, dan Pagar Alam sebanyak 38.357 KIA, sedangkan 4 (empat) Kabupaten/Kota antara lain Empat Lawang, Mura Tara, Muara Enim dan Kota Prabumulih akan dimulai pada tahun 2019.

### 2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu Lembaga kemasyarakatan desa yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan di desa, baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan desa, maupun dalam menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM/PKK/Karang Taruna/RT/RW) di Provinsi

Sumatera Selatan sebanyak 2.853 lembaga dan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK/PKK/Karang Taruna /RT/RW) sebanyak 386 Lembaga.

Untuk dapat menjalankan peranan tersebut secara efektif, maka LPM harus didukung oleh sumberdaya manusia pengurus/anggota yang mempunyai kualitas pengetahuan dan kecakapan/keterampilan yang memadai di bidang pembangunan desa; dan memiliki semangat dan komitmen yang kuat/tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsi LPM dengan sebaik-baiknya. Selain itu LPM harus didukung dengan dana biaya operasional yang cukup, serta adanya komitmen dari pemerintah desa setempat untuk memberdayakan LPM berperan dalam pembangunan desa, ada beberapa fenomena yang dapat mengindikasikan belum maksimalnya peranan LPM dalam pembangunan desa, yaitu : (1) LPM belum banyak berperandalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di desa. (2) LPM juga belum banyak berperan dalam pelaksanaan rencana program pembangunan desa yang sudah ditetapkan, terutama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pelaksanaan program pembangunan desa tersebut. (3) LPM belum banyak berperan dalam menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat desadalam pembangunan desa, seperti dalam memberikan penerangan atau penjelasan kepada warga desa tentang program yang akan dilaksanakan, memberi persuasi atau ajakan dan dorongan kepada warga desa untuk ikut serta berparan aktif dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan desa sehingga dalam pelaksanaan di lapangan belum maksimal dan diharapkan Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pelatihan atau Bimtek bagi LPMD / LPMK.

Pasal Nomor 12 Tahun 2005 menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan suatu institusi yang salah satu tugas pokoknya adalah membantu Gubernur Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang salah satu program yang menunjang pembangunan masyarakat di Desa / Kelurahan adalah Tim Penggerak PKK desa dan kelurahan yang di bina oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan. Dimana Tim Penggerak PKK merupakan lembaga kemasyarakatan yang sebagai mitra kerja pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program kerja PKK. Program kerja dan kegiatan PKK sendiri telah berjalan aktif baik untuk tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota sampai ke Tim Penggerak PKK desa maupun kelurahan. Dan untuk penganggaran kegiatan PKK di tingkat Provinsi sudah berjalan aktif dan setiap

tahun selalu dianggarkan untuk menunjang kegiatan dan program kerja PKK guna menunjang pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

Upaya peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Desa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan guna dapat mewujudkan kualitas pelayanan publik, yang dimaksudkan untuk melestarikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya. Bagi aparat pemerintah desa perlu memahami dengan pasti apa perannya dalam pelayanan publik, bagaimana mewujudkan kualitas layanan yang memuaskan bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan publik, dan bagaimana seharusnya aparat pemerintah desa akan mampu melayani dengan baik. Keberhasilan Pemerintah Desa ditandai dengan keberhasilan para penyelenggara pemerintah desa termasuk aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tanggungjawabnya yang esensinya adalah sebagai penyelenggaraan fungsi pelayanan. Salah satu sorotan yang menghambat kinerja pelayanan publik di daerah pedesaan disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah desa terhadap bidang pelayanan tersebut antara lain rendahnya kualitas aparat sehingga mempengaruhi sistem pelayanan yang maksimal. Sistem pelayanan yang maksimal dapat terukur dan teraplikasikan dengan baik apabila didukung dengan perangkat sebagai pelaksana yang mampu memahami tugas-tugasnya. Banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam proses pelayanan antara lain keluhan masyarakat dengan cara pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah desa mulai dari system pelayanan yang sangat lamban, tidak transparan, tidak tepat waktu, memberi janji yang tidak pasti, mengutamakan sistem pelayanan yang tidak sesuai seperti sistem antrian lebih mengutamakan teman sejawat, saudara, atau karena faktor tertentu seperti ada uang pelicin. Cara pemberian pelayanan seperti ini turut menghambat kinerja pelayanan, sehingga target yang dicapai dalam kinerja pelayanan publik kurang maksimal. Rendahnya kinerja pelayanan publik ada hubungannya dengan tingkat pengetahuan aparat Desa terhadap kegiatan pelayanan, rendahnya disiplin kerja serta kurangnya kesadaran dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Pemberdayaan aparat pemerintah Desa akan bertumpu pada kemampuan mengelola potensi sumberdaya atau modal sosial masyarakat secara optimal.

Kinerja aparat pemerintah desa bukan hanya merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan sistem pelayanan publik di desa namun juga berperan penting dalam hal pengelolaan potensi-potensi di kawasan pedesaan sehingga membantu desa-desa tersebut menemukan keunggulannya masing-masing yang pada akhirnya dapat menjadikan desa tersebut lebih berkembang dan mandiri.

Saat ini di Sumatera Selatan, masih banyak jumlah desa dengan kategori sangat tertinggal dan tertinggal. Berdasarkan Permendes & PDT Nomor 2 Tahun 2016, total desa dengan kategori tersebut mencapai 1.644 desa tertinggal dan

176 desa sangat tertinggal. Penetapan kategori serta jumlah desa berdasarkan statusnya dirilis oleh Kemendes PDT melalui "Indeks Desa Membangun" (IDM). Indeks Desa membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan social (IKS), indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan ekologi desa. Masing-masing indeks tersebut terdiri dari beberapa dimensi yang terdiri dari banyak indikator. Setiap indikator akan diberikan skor dari 0 sampai 5 sesuai dengan tingkat keberartiannya dan dikelompokkan ke dalam masing-masing dimensi untuk menghasilkan skor dimensi. Skor dimensi akan dirumuskan menjadi indeks dengan nilai 0 sampai 1. Indeks dari setiap dimensi menjadi indeks komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun.

Indeks Desa membangun mengklasifikasikan Status Desa Menjadi 5, yaitu :

- Desa Mandiri
- Desa Maju
- Desa Berkembang
- Desa Tertinggal
- Desa Sangat Tertinggal

**Tabel 2.161.**
Kategori Desa di Sumatera Selatan berdasarkan Indeks Desa Membangun
Tahun 2017

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa | Kategori | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mandiri | Maju | Berkembang | Tertinggal | Sangat Tertinggal | Tanpa Keterangan |
| 1 | Ogan Komering Ulu | 12 | 143 | na | 3 | 40 | 82 | 18 | na |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 18 | 314 | 1 | 10 | 107 | 173 | 23 | na |
| 3 | Muara Enim | 20 | 245 | na | 4 | 117 | 117 | 6 | 1 |
| 4 | Lahat | 22 | 360 | na | 2 | 80 | 258 | 20 | na |
| 5 | Musi Rawas | 14 | 186 | na | 5 | 104 | 69 | 8 | na |
| 6 | Musi Banyuasin | 14 | 227 | na | 3 | 102 | 107 | 6 | 9 |
| 7 | Banyuasin | 19 | 288 | na | 7 | 101 | 164 | 16 | na |
| 8 | OKU Selatan | 19 | 252 | na | 1 | 38 | 180 | 33 | na |
| 9 | OKU Timur | 20 | 305 | na | 9 | 160 | 127 | 9 | na |
| 10 | Ogan Ilir | 16 | 227 | na | na | 37 | 190 | na | na |
| 11 | Empat Lawang | 10 | 147 | na | 1 | 51 | 94 | 1 | na |
| 12 | Pali | 5 | 65 | na | 1 | 20 | 36 | 8 | na |
| 13 | Muratara | 7 | 82 | na | na | 18 | 37 | 27 | na |
| 15 | Kota Prabumulih | 4 | 12 | na | na | 1 | 10 | 1 | na |
| **Total** | | **200** | **2.853** | **1** | **46** | **976** | **1.644** | **176** | **10** |

*Sumber : Indeks Desa Membangun Tahun 2017*

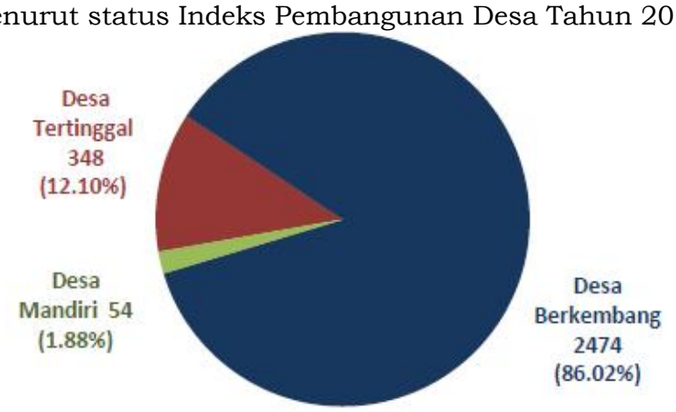
Berdasarkan tabel diatas, dari total jumlah desa di Sumatera Selatan sebanyak 2.853 desa, sekitar 64% nya atau 1.820 desa masih merupakan desa tertinggal dan sangat tertinggal. Jumlah tersebut sangat banyak sehingga diharapkan ada intervensi dari Pemerintah Daerah berupa Program/Kegiatan

yang diharapkan dapat mengurangi jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal atau meningkatkan statusnya menjadi desa berkembang.

Menurut Peraturan Presiden 131 Tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019, pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan 6 aspek (perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, karakteristik daerah) yang dijabarkan dalam 27 indikator. Mengacu pada 6 Aspek tersebut, masih ada dua Kabupaten yang termasuk kategori tertinggal di Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Berbagai upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal telah dilakukan dengan memperkuat fungsi koordinasi, kerjasama, dan kemitraan antara instansi pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Diprediksi pada akhir tahun 2019, dua daerah tertinggal di Sumatera Selatan akan terentaskan. Meskipun demikian, kedepan tetap ada pendampingan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam bentuk program/kegiatan yang sifatnya non fisik dan fokus pada pemberdayaan masyarakat.

Selain Indeks Desa Membangun, Badan Pusat Statistik juga merilis Indeks Pembangunan Desa yang menunjukkan tingkat perkembangan desa dengan 3 kategori yaitu : tertinggal, berkembang, dan mandiri. Secara definisi, Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. Indeks Pembangunan Dimensi disusun dari 5 dimensi yaitu : pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, pelayanan umum, dan pemerintah desa dan 42 indikator.

**Gambar 2.59.**
Jumlah Desa di Sumatera Selatan
menurut status Indeks Pembangunan Desa Tahun 2018




*Sumber : BPS Sumsel*

Berdasarkan tabel diatas, dari total jumlah desa sejumlah 2.876 di tahun 2018, 12,10% atau 348 desa adalah desa tertinggal, 86,02% atau 2.474 desa adalah desa berkembang, dan 1,88% atau 54 desa adalah desa mandiri.

### 2.3.2.8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

#### 2.3.2.8.1. Peserta KB Aktif

Mewujudkan keluarga kecil berkualitas merupakan tujuan dari pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga tersebut diarahkan pada peningkatan kesertaan berKB aktif di Sumatera Selatan pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuatif naik turun. Pada tahun 2013 jumlah peserta KB aktif sebesar 76,85%, tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 77,18%, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 76,13%. Sedangkan untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 secara umum mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar 78,64%.

**Tabel. 2.162.**
Peserta KB Aktif di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2018

| Tahun | Jumlah PUS | Peserta KB Aktif | Persentase |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1.678.389 | 1.289.924 | 76,85 |
| 2014 | 1.637.066 | 1.263.556 | 77,18 |
| 2015 | 1.694.186 | 1.289.728 | 76,13 |
| 2016 | 1.650.420 | 1.281.575 | 77,65 |
| 2017 | 1.685.705 | 1.308.889 | 77,65 |
| 2018 | 1.726.165 | 1.357.394 | 78,64 |

*Sumber : BKKBN Provinsi Sumatera Selatan*

#### 2.3.2.8.2. Alat Kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Pemakaian alat kontrasepsi MKJP tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 semakin meningkat secara berkelanjutan yaitu sebesar 28,34% % pada tahun 2013 menjadi 31,68% di tahun 2018. Namun peningkatan persentase pemakaian alat kontrasepsi MKJP tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah peserta KB MKJP yang bersifat flukuatif dari tahun ke tahun. Jumlah dan persentase pemakaian alat kontrasepsi MKJP di Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel. 2.163.**
Pemakaian Alat Kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| Tahun | Peserta KB Aktif | Peserta KB MKJP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IUD | MOW | MOP | IMPLAN | Jumlah | % |
| 2013 | 1.289.924 | 67.088 | 43.598 | 5.636 | 249.279 | 365.601 | 28,34 |

| Tahun | Peserta KB Aktif | Peserta KB MKJP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IUD | MOW | MOP | IMPLAN | Jumlah | % |
| 2014 | 1.263.556 | 62.807 | 41.808 | 6.691 | 259.761 | 371.067 | 29,37 |
| 2015 | 1.289.728 | 61.839 | 42.236 | 7.005 | 277.256 | 388.336 | 30,11 |
| 2016 | 1.281.575 | 60.470 | 40.175 | 6.423 | 280.007 | 387.075 | 30,20 |
| 2017 | 1.308.889 | 60.605 | 40.913 | 6.532 | 298.261 | 406.311 | 31,04 |
| 2018 | 1.357.394 | 63.461 | 39.852 | 6.079 | 320.690 | 430.082 | 31,68 |

*Sumber : BKKBN Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.2.8.3. Unmet Need

Perkembangan unmet need KB dari tahun 2013-2018 secara umum mengalami tren naik turun, untuk tahun 2013 dari Jumlah orang yang mengalamai Unmet Need sebesar 12,19% (204.522 orang) dari Jumlah PUS 1.678.389. Pada tahun 2014 dari Jumlah PUS sebesar 1.637.066 orang mengalami unmet need sebesar 13,96% (228.522 orang), tahun 2015 persentase unmet neednya berkisar 12,70% dari Jumlah PUS 1.694.186 orang yang mengalami unmet need nya sekitar 215.131 orang. Pada tahun 2016 terdapat penurunan dari tahun sebelumnya, Jumlah PUS 1.650.420 orang sehingga persentase unmet neednya 11.78% (194.402 orang), sedangkan pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 11,14% (192.763 orang) dari Jumlah PUS yang terdata 1.726.165 orang. Peningkatan ini disebabkan keyakinan agama sebagian masyarakat, takut efek samping, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB upaya yang dilakukan untuk mengurangi unmet need KB antara lain melalui penggerakan kesertaan KB bersama mitra kerja dan institusi masyarakat, advokasi kabupaten/kota yang persentase unmet need KB nya tinggi, optimaliasasi media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), dan fasilitas pelaksanaan kampung KB.

**Tabel. 2.164.**
Unmet Need KB di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2018

| No. | Tahun | Jumlah PUS | Jumlah (org) | Unmet Need KB(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 1.678.389 | 204.522 | 12,19 |
| 2 | 2014 | 1.637.066 | 228.522 | 13,96 |
| 3 | 2015 | 1.694.186 | 215.131 | 12,70 |
| 4 | 2016 | 1.650.420 | 194.402 | 11,78 |
| 5 | 2017 | 1.685.705 | 202.742 | 12,03 |
| 6 | 2018 | 1.726.165 | 192.763 | 11,14 |

*Sumber : BKKBN Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.2.8.4. Keluarga Pra-Sejahtera

Perkembangan jumlah keluarga Pra Sejahterah Sumatera Selatan mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Dari tabel berikut ini jumlah keluarga Pra Sejahterah tahun 2013 sebesar 11,31% (192.305) dari Jumlah KK 1.700.596, untuk tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 11,14% (200.610 orang) dari Jumlah KK 1.800.850, tahun 2015 sebesar 11,31% (220.157 orang) dari Jumlah KK 2.069.053, untuk tahun 2016 sebesar 10,42% (253.435 orang) daru Jumlah KK 2.431.970, sampai pada tahun 2018 masih pengalami penurunan untuk keluaraga Pra Sejahterah hingga 10,37% (271.467 orang) dari Jumlah KK 2.616.754.

**Tabel. 2.165.**
Jumlah Keluarga Pra Sejahterah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| Tahun | Jumlah KK | Keluarga Pra Sejahterah | |
|---|---|---|---|
| | | Jumlah | % |
| 2013 | 1.700.596 | 192.305 | 11,31 |
| 2014 | 1.800.850 | 200.610 | 11,14 |
| 2015 | 2.069.053 | 220.157 | 11,31 |
| 2016 | 2.431.970 | 253.435 | 10,42 |
| 2017 | 2.611.602 | 270.691 | 10,36 |
| 2018 | 2.616.754 | 271.467 | 10,37 |

*Sumber : BKKBN Provinsi Sumatera Selatan*

Berdasarkan dari data tersebut Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Sumatera Selatan mengalami naik turun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir ini, khususnya untuk indikator Pencapaian KB aktif dan indikator peserta yang dikategorikan *unmet need,* sedangkan untuk indikator Metode Kontrasepsi Jangka Panjang selama lima tahun terakhir ini mengalami peningkatan dari 28,34% menjadi 31,04%. Kemudian untuk indikator Keluarga Pra Sejahterah mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini dari 11,31% menjadi 10.36%.

### 2.3.2.9. Perhubungan

Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Provinsi berupaya mendorong terciptanya transportasi yang aman, nyaman, cepat dan terjangkau melalui penyediaan fasilitas keamanan transportasi, tersedianya moda yang cukup dan ramah lingkungan serta penerapan aturan keselamatan transportasi bagi semua pengguna dan penyedia jasa transportasi dan didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik. Perilaku sebagian besar pemakai jalan di yang masih kurang memperdulikan keselamatan diri

sendiri dan pemakai jalan lainnya harus ditingkatkan, budaya dan disiplin pengguna jalan dari sebagiaan pengemudi kendaraan belum berjalan baik. Ditambah lagi dengan masih adanya sarana dan prasarana transportasi yang belum memenuhi standar keselamatan, serta masih belum optimalnya keberfungsian jalan khusus angkutan tambang batu bara.

Untuk memecahkan permasalahan transportasi, diperlukan sistem kelembagaan yang kuat, koordinasi antar instansi yang baik dan pendanaan yang cukup untuk segera merumuskan dan menjalankan program keselamatan transportasi jalan yang terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang berkelanjutan maka masalah keselamatan transportasi jalan harus mendapat perhatian serius dan mendapat prioritas dalam pembangunan ataupun pengembangan sektor transportasi.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan data Satlantas menyatakan pada tahun 2017 terdapat 1137 kecelakaaan di Provinsi Sumsel, dari jumlah tersebut 595 meninggal dunia, 564 luka berat dan 822 orang luka ringan. Kerugian yang ditimbulkan cukup besar dengan Estimasi kerugian material Rp.5.972.765.000. Dalam 5 tahun terakhir terjadi penurunan kecelakaan dari 2.362 jumlah kecelakaan (28%) menurun menjadi 1.137 jumlah kecelakaan (13 %) pada tahun 2017, dan setiap tahun keselamatan transportasi di Sumatera Selatan terus ditingkatkan melalui program/kegiatan nyata dari Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Kepolisiaan, Dinas PU BMTR dan dukungan masyarakat sendiri.

**Tabel. 2.166.**
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2013-2017

| Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Kecelakaan | 2.362 | 1.827 | 1.663 | 1.428 | 1.137 |
| Korban (Org) | | | | | |
| Meninggal Dunia | 925 | 820 | 748 | 590 | 595 |
| Luka Berat | 1.410 | 928 | 862 | 700 | 564 |
| Luka Ringan | 1.863 | 1.416 | 1.610 | 1.213 | 822 |
| Kerugian Materil (Rp. ribu) | 13.613.450 | 31.975.240 | 9.761.133,7 | 7.365.375,04 | 5.972.765 |

*Data Dinas Perhubungan 2018*

Dalam rangka untuk mewujudkan penurunan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan dan dalam rangka memenuhi standar keselamatan 100%, maka kondisi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan saat ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.167.**
Kondisi Sarana Angkutan Umum Yang Laik Jalan

| NO. | ITEM | % LAIK JALAN |
|---|---|---|
| 1. | Angkutan Umum | 78% |
| | | |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

**Tabel 2.168.**
Kondisi Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi

| NO. | JALAN PROVINSI | % FASILITAS KESELAMATAN YANG TERPASANG |
|---|---|---|
| 1. | Jalan Provinsi di Kabupaten Banyuasin | 38 |
| 2. | Jalan Provinsi di Kabupaten Musi Banyuasin | 37 |
| 3. | Jalan Provinsi di Kabupaten Musi Rawas | 31 |
| 4. | Jalan Provinsi di Kabupaten Muara Enim | 40 |
| 5. | Jalan Provinsi di Kabupaten Lahat | 42 |
| 6. | Jalan Provinsi di Kabupaten OKI | 35 |
| 7. | Jalan Provinsi di Kabupaten OKU | 34 |
| 8. | Jalan Provinsi di Kabupaten OKU Timur | 37 |
| 9. | Jalan Provinsi di Kabupaten OKU Selatan | 43 |
| 10. | Jalan Provinsi di Kabupaten Ogan Ilir | 46 |
| 11. | Jalan Provinsi di Kabupaten Empat Lawang | 28 |
| 12. | Jalan Provinsi di Kabupaten PALI | 42 |
| 13. | Jalan Provinsi di Kabupaten Musi Rawas Utara | 45 |
| 14. | Jalan Provinsi di Kota Palembang | 53 |
| 15. | Jalan Provinsi di Kota Pagar Alam | 48 |
| 16. | Jalan Provinsi di Kota Lubuk Linggau | 33 |
| 17. | Jalan Provinsi di Kota Prabumulih | 53 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Terkait dengan pengurangan tingkat fatalitasi kecelakaan diperlukan indikator pengurangan tingkat fatalitas kecelakaan yang dapat diukur dengan melihat data kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan perhubungan mengenai kinerja fatalitas yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, yakni sebagai berikut:

**Tabel 2.169.**
Kinerja Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2017

| Uraian | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Jumlah Kecelakaan | 2.494 | 3.111 | 2.806 |
| Korban (Org) : | | | |
| Meninggal Dunia | 1.057 | 1.332 | 1.232 |
| Luka Berat | 1.536 | 1.676 | 1.716 |
| Luka Ringan | 2.146 | 2.481 | 2.111 |
| KerugianMateril(Rp. ribu) | 14.821.845 | 34.419.933 | 16.440.370 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

| Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Kecelakaan | 2.362 | 1.827 | 1.663 | 1.428 | 1.137 |
| Korban (Org) : | | | | | |
| Meninggal Dunia | 925 | 820 | 748 | 590 | 595 |
| Luka Berat | 1.410 | 928 | 862 | 700 | 564 |
| Luka Ringan | 1.863 | 1.416 | 1.610 | 1.213 | 822 |
| KerugianMateril (Rp. ribu) | 13.613.450 | 31.975.240 | 9.761.133,7 | 7.365.375,04 | 5.972.765 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Bahwa pada tahun 2010 jumlah korban jiwa yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (fatalitas) sebanyak 1.057 jiwa dan tahun 2017 sebanyak 595 jiwa, kurun waktu 7 (tujuh) tahun mengalami trend penurunan sebesar 44 % atau rata – rata penurunan per tahunnya sebesar 7%.

Dari data dan informasi yang disajikan seperti diatas, maka indikator penurunan tingkat fatalitas (%) tetap mengacu pada Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) menuju angka *zerro accident* dengan target penurunannya sebagai berikut.

**Tabel 2.170.**
Indikator dan Target Penurunan Tingkat Fatalitas
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

| NO. | INDIKATOR | Kinerja Awal RPJMD | | Rencana Target Penurunan (%) | | | | | Kinerja Akhir RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. | Persentase tingkat fatalitas | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Berdasarkan hal tersebut di atas dan dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi jalan yang terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan, maka *road map* rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan melalui pendekatan program/kegiatan, yakni sebagai berikut:

1. Pemenuhan fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan antara lain rambu, marka jalan, pagar pengaman jalan, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), paku marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu Lintas (APILL), Warning Light, Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), deliniator, khususnya pada ruas – ruas jalan provinsi yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota;
2. Melakukan pembinaan dengan peningkatan *capacity building* terhadap awak angkutan umum dengan pemberian penghargaan abdi yasa teladan;
3. Melakukan sosialisasi keselamatan secara kontinu dan berkelanjutan;

4. Menanamkan arti pentingnya keselamatan transportasi melalui pembelajaran pendidikan pada anak usia dini dengan target anak sekolah menengah umum;
5. Melakukan pembinaan terhadap karoseri yang ada di Sumatera Selatan;
6. Melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota untuk melakukan uji berkala terhadap angkutan umum;
7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai s*mart driving*;
8. Menerapkan analisis dampak lalu lintas di setiap aktivitas pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan perjalanan;
9. Menerapkan manajemen persimpangan secara terkoordinasi dengan metode Automatic *Traffic Control System* (ATCS);
10. Menerapkan kawasan tertib lalu lintas di daerah ibu kota kabupaten melalui lomba tertib lalu lintas;
11. Menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas pada ruas – ruas jalan provinsi;
12. Melakukan penertiban angkutan umum yang belum laik jalan;
13. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pintu perlintasan sebidang kereta api dengan jalan.

#### 2.3.2.9.1. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

##### 2.3.2.9.1.1. Terminal Bus

Untuk prasarana pendukung, saat ini di Sumatera Selatan memiliki 33 terminal angkutan umum yang terdiri dari terminal tipe A sebanyak 8 terminal atau sebesar 24,2 persen, tipe B sebanyak 7 terminal atau sebesar 21,2 persen dan tipe C sebanyak 19 terminal atau sebesar 57,57 persen. Semakin banyak angkutan antar kabupaten/kota dalam provinsi dan angkutan antar provinsi yang beplat hitam (travel) berdampak terhadap semakin berkurangnya angkutan umum (berplat kuning) pada jurusan yang sama dan pada akhirnya akan berdampak pada semakin berkurangnya angkutan umum yang masuk ke terminal.

**Tabel 2.171.**
Data Terminal di Provinsi Sumatera Selatan

| No | Kabupaten/Kota | Nama Terminal | Tipe Terminal | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palembang | 1. Karya Jaya | A | | |
| | | 2. Alang-Alang Lebar | A | | |
| | | 3. Plaju | | | C |
| | | 4. Jakabaring | | B | |
| | | 5. Tangga Buntung | | | C |
| | | 6. Lemabang | | | C |
| | | 7. Sako | | | C |
| 2 | Prabumulih | 1. Prabumulih | | | C |
| | | 2. Kota Prabumulih | | | C |
| 3 | Pagaralam | 1. Nendagung | | | C |
| | | 2. Pagar Gading | | | C |
| 4 | Lubuk Linggau | 1. Petanang | | B | |
| | | 2. Muara | | | C |
| | | 3. Kalimantan | | | C |
| | | 4. Watas | | | C |
| | | 5. Satelit | | | C |
| | | 6. Simpang Periuk | A | | |
| 5 | Banyuasin | 1. Betung | A | | |
| 6 | Musi Banyuasin | 1. Randik | | B | |
| 7 | Ogan Ilir | 1. Km 32 Indralaya | | B | |
| | | 2. Tanjung Raja | | | C |
| 8 | Ogan Komering Ilir | 1. Kayu Agung | A | | |
| | | 2. Tulung Selapan | | | C |
| 9 | Ogan Komering Ulu | 1. Baturaja | A | | |
| 10 | OKU Timur | 1. Kota Baru | | B | |
| | | 2. Lubuk Harjo | | B | |
| 11 | OKU Selatan | 1. Muara Dua | | B | |
| 12 | Muara Enim | 1. Muara Enim | A | | |
| | | 2. Simpang Kodim | | | C |
| | | 3. Bantingan | | | C |
| 14 | Lahat | 1. Batay | A | | |
| | | 2. Muara Siban | | | C |
| | | 3. Lembayung | | | C |
| 15 | Empat Lawang | - | - | - | - |
| 16 | PALI | 1. Talang Ubi | - | - | C |
| 17 | Muratara | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | | 8 | 7 | 19 |

*Sumber: Statistik Dishub Sumsel, 2018*

### 2.3.2.9.1.2. Bus Pariwisata

Jumlah angkutan bus pariwisata yang tersebar di tiap Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan tiap tahunnya mengalami peningkatan dari 36 unit pada tahun 2013 menjadi 81 unit pada tahun 2017. Meskipun demikian, ketersediaannya masih terbatas karena dipengaruhi minimnya rute paket wisata dengan menggunakan bus dan minimnya kerjasama pemerintah dengan agen pariwisata untuk penawaran paket wisata menggunakan bus.

**Tabel 2.172.**
Jumlah Bus Pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan

| No. | Tahun | Jumlah Bus Pariwisata (Unit) |
|---|---|---|
| 1 | 2013 | 36 |
| 2 | 2014 | 42 |
| 3 | 2015 | 80 |
| 4 | 2016 | 80 |
| 5 | 2017 | 81 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

### 2.3.2.9.1.3. Perkeretaapian

Untuk pengangkutan barang dalam volume besar dan dengan jarak yang cukup jauh diangkut dengan menggunakan kereta api atau kapal. Di Sumatera Selatan jalur kereta api yang dimiliki adalah untuk rute Palembang-Lampung dan Palembang-Lubuk Linggau. Dari 675,95 km jalan kereta api yang ada di Sumatera Bagia Selatan sebagian besar (89%) merupakan *single track* dan sisanya sepanjang 75 km merupakan jalur *double track*. Dari sisi kemampuan beban gandar sebagian besar jalan kereta api di Sumatera Selatan mempunyai kemampuan maksimal 13 ton dan baru sebagian kecil (32%) yang mempunyai beban gandar mencapai 18 ton.

**Tabel 2.173.**
Rute dan Panjang Rel PT. KA Divre III di Wilayah Sumbagsel

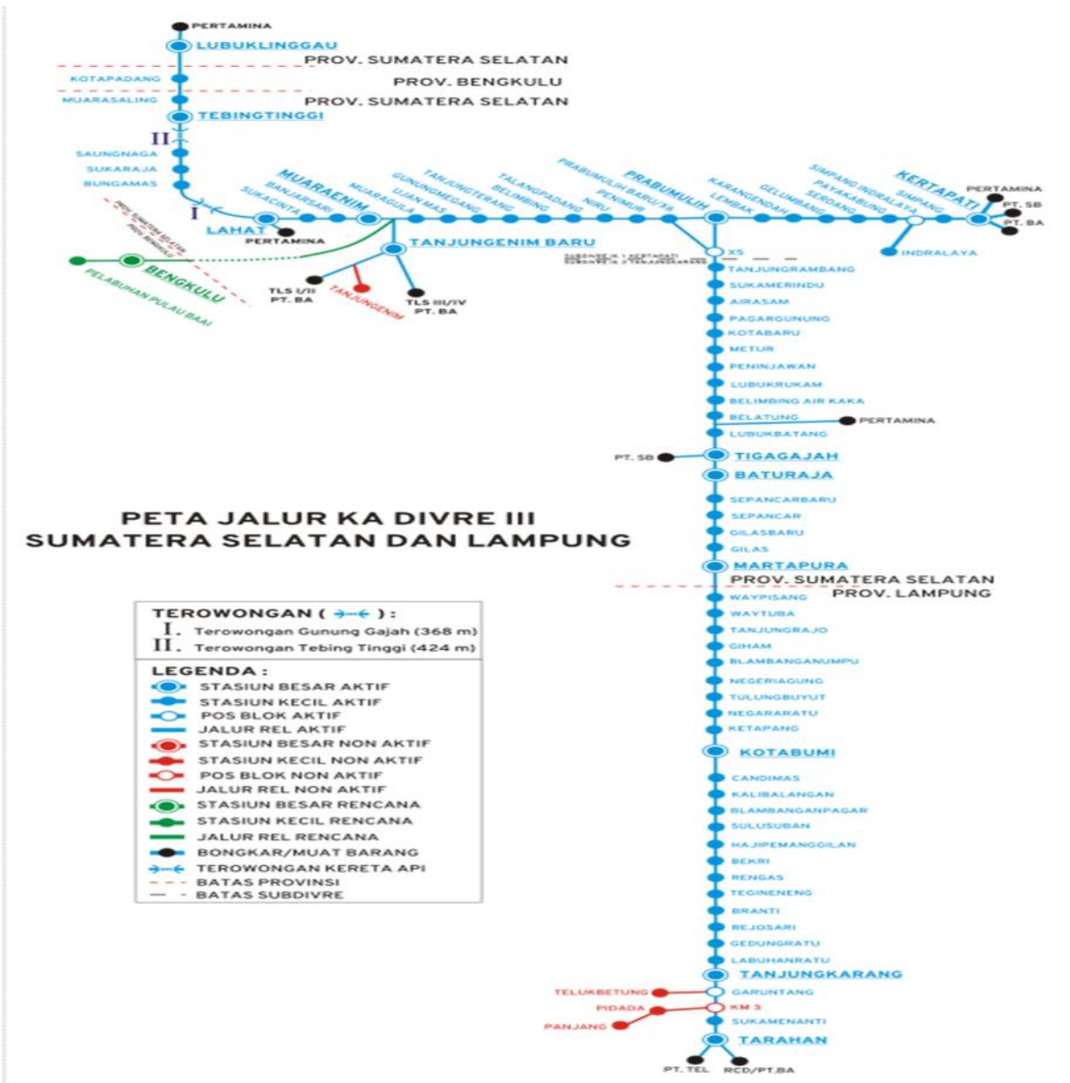
| No | Lintasan | Panjang (Km) | Beban Gandar (Ton) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kertapati-Prabumulih | 77,8 | 13 |
| 2 | Prabumulih-Baturaja | 96 | 13 |
| 3 | Baturaja-Martapura | 32 | 18 |
| 4 | Martapura-Kota Bumi | 98 | 18 |
| 5 | Kota Bumi-Tanjung Karang | 86 | 18 |
| 6 | Prabumulih-Tanjung Karang | 74 | 13 |
| 7 | Muara Enim-Lahat | 38,3 | 13 |
| 8 | Lahat-Tebing Tinggi | 66 | 13 |
| 9 | Tebing Tinggi-Lubuk Linggau | 49 | 13 |
| 10 | Lintasan Lainnya | 58,85 | 13 |
| | **Total** | **675,95** | |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2017*

Kondisi perkeretaapian Sumsel, proyek *partial double track* KA Sumsel sampai akhir tahun 2014 telah berhasil dibangun 52,69 km. Selanjutnya untuk tahun 2015-2016 sedang dikerjakan penambahan *partial double track* 76,35 km, masing-masing untuk ruas Sta. Lebak Sta. Simpang 40 km dan Martapura-Baturaja 36,35 km. Diperkirakan awal 2018, *Partial Double Track* di wilayah Sumsel sudah mencapai 129 km lebih. Pembangunan jalan KA di Sumsel selain diprioritaskan untuk angkutan barang, khususnya Batubara, Klingkers, dan BBM juga mulai diprioritaskan angkutan orang dalam kota. Untuk angkutan

kerata api mahasiswa (Kertalaya) saat ini masih beroperasi, namun belum berjalan optimal karena masih menggunakan jalur kereta api Palembang-Prabumulih eksisting sehingga baru melayani 1 (satu) kali Pulang-Pergi (PP) per harinya terlebih lagi kereta api belum masuk ke kampus sehingga mahasiswa harus naymbung naik angkot lagi. Di Kota Palembang, saat ini sudah beroperasi LRT Sumatera Selatan dimulai dalam rangka menyiapkan transportasi pada saat *Asian Games* XVIII.

**Gambar 2.60.**
Jalur Kereta Api dan Stasiun di Sumatera Bagian Selatan




*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2017*

Perhitungan jarak rel kereta api dimulai dari stasiun Panjang, Lampung (KM 0) yang telah ditutup sejak beroperasinya Pelabuhan Bakauheni yang menghentikan hegemoni pelayanan kapal penumpang dari Pelabuhan Panjang yang terintegrasi dengan jalur kereta api melalui stasiun Panjang. Dari pelabuhan tersebut, ruas jalur kereta api berakhir di Stasiun Prabumulih

(Sumatera Selatan) km 332 + 705. Setelah itu, jalur kereta api di Stasiun Prabumulih bercabang dua ke barat dan timur.

Ke arah barat, jalur kereta berakhir di Lubuklinggau (Sumatera Selatan) di Km 549 + 448, sedangkan ke arah timur kereta berakhir di Kertapati (Palembang, Sumatera Selatan) di Km 400 + 102. Karena wilayah Divre III ini cukup luas dibandingkan kedua divre lain di Sumatera Selatan dan meliputi dua provinsi (Sumatera Selatan dan Lampung), maka dibagilah dua wilayah (subdivre) dengan fungsi operasional yang serupa dengan Daop KAI di Pulau Jawa, namun dengan tingkatan administratif dalam lingkup KAI yang lebih rendah daripada Divre maupun Daop. Divre III memiliki dua subdivre yaitu Sub Divre III. 1 Kertapati (KPT) dan Sub Divre III. 2 Tanjungkarang (TNK).

#### 2.3.2.9.1.4. *Light Rail Transit (LRT)*

*Light Rail Transit* (LRT) atau kereta api ringan merupakan salah satu angkutan massal yang ada di Kota Palembang dan menjadi LRT Pertama yang ada di Indonesia. Manfaat dari LRT bagi Kota Palembang adalah peningkatan mutu pelayanan trasnportasi perkotaan Palembang melalui percepatan waktu tempuh, mengurai kemacetan, serta peningkatan keselamatan transportasi; mensukseskan pergelaran ASIAN Games 2018; gambaran peningkatan kelas dan wajah Kota Palembang; moda transportasi ramah lingkungan; dan menjadi potensi ekonomi untuk menarik kepercayaan investor untuk berinvestasi.

Dalam hal ketersediaan stasiun, LRT Kota Palembang dengan jalurnya sepanjang 23,4 km terdapat 13 stasiun, yakni stasiun Bandara SMB II, Asrama Haji, Punti Kayu, RSUD, Garuda Dempo, Demang Lebar Daun, Bumi Sriwijaya, Dishub, Cinde, Ampera, Polresta, Jakabaring, dan DJKA. Untuk Tarifnya, dapat dikatakan relatif murah dan cukup terjangkau, di mana untuk jarak jauh (dari Bandara SMB II ke Jakabaring) dikenakan sebesar Rp. 10.000,- , sedangkan untuk jarak dekat dikenakan sebesar Rp. 5.000,-. Sejak diremikan oleh Presiden RI pada tanggal 15 Juli 2018 dan mulai operasional pada tanggal 23 Juli 2018, di mana pengoperasional LRT dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia, jumlah angkutan penumpang LRT dari bulan Juli hingga September 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 246.134 penumpang pada bulan Juli ke Agustus dari 16.182 menjadi 262.316 penumpang, namun dari bulan Agustus ke September mengalami penurunan sebanyak 86.097 penumpang menjadi 176.219 penumpang. Hal ini dipengaruhi adanya event olahraga internasional ASIAN Games 2018 pada pertengahan Agustus hingga awal September dan belum sepenuhnya stasiun beroperasi, sedangkan mulai dari bulan Oktober seluruh stasiun sejumlah 13 stasiun sudah beroperasi.

**Tabel 2.174.**
Jumlah Penumpang Light Rail Transit (LRT) Kota Palembang

| No. | Bulan Tahun 2018 dan Tahun 2019 | Jumlah Penumpang | Stasiun yang Beroperasi |
|---|---|---|---|
| 1. | Juli | 16.182 | Stasiun Bandara, Asrama Haji, Punti Kayu, RSUD, Garuda Dempo, Demang, Bumi Sriwijaya, Dishub, Cinde, Ampera, Polresta, Jakabaring, DJKA |
| 2. | Agustus | 262.316 | Stasiun Bandara, RSUD, Garuda Dempo, Bumi Sriwijaya, Cinde, Ampera, Jakabaring, DJKA |
| 3. | September | 176.219 | Stasiun Bandara, Asrama Haji, Puti Kayu, RSUD, Bumi Sriwijaya, Cinde, Ampera, Polresta, Jakabaring, DJKA |
| 4. | Oktober | 144.653 | Stasiun Bandara, Asrama Haji, Punti Kayu, RSUD, Garuda Dempo, Demang, Bumi Sriwijaya, Dishub, Cinde, Ampera, Polresta, Jakabaring, DJKA |
| 5. | November | 155.699 | Stasiun Bandara, Asrama Haji, Punti Kayu, RSUD, Garuda Dempo, Demang, Bumi Sriwijaya, Dishub, Cinde, Ampera, Polresta, Jakabaring, DJKA |
| 6. | Desember | 186.035 | Stasiun Bandara, Asrama Haji, Punti Kayu, RSUD, Garuda Dempo, Demang, Bumi Sriwijaya, Dishub, Cinde, Ampera, Polresta, Jakabaring, DJKA |
| 7. | Januari 2019 | 146.954 | Stasiun Bandara, Asrama Haji, Punti Kayu, RSUD, Garuda Dempo, Demang, Bumi Sriwijaya, Dishub, Cinde, Ampera, Polresta, Jakabaring, DJKA |
| 8. | Februari 2019 | 108.978 | Stasiun Bandara, Asrama Haji, Punti Kayu, RSUD, Garuda Dempo, Demang, Bumi Sriwijaya, Dishub, Cinde, Ampera, Polresta, Jakabaring, DJKA |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2019*

Adapun dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang dalam menjaga keberlangsungan Operasional LRT bagi peningkatan pelayanan angkutan umum berbasis massa ke masyarakat yang aman, nyaman, cepat dan terjangkau dilakukan dengan strategi pengembangan LRT Sumatera Selatan dengan mengupayakan agar masyarakat kota Palembang mau beralih ke moda transportasi massal berbasis rel serta mengurangi beban subsidi APBN antara lain sebagai berikut:

1. Pengintegrasian layanan LRT dengan Damri dan *Bus Rapid Transit* (Trans Musi) dan angkutan Sungai (intermoda) menjadi satu jaringan layanan transportasi terpadu dimana LRT sebagai jaringan *backbone*nya yang akan di *supply* jaringan Transmusi dan Damri dari dan ke stasiun LRT melalui pengembangan integrasi moda *feeder* LRT.

2. Mengembangkan *Transit Oriented Development* (TOD) di beberapa stasiun LRT untuk menaikan kinerja *performance* pendapatan operator dan meningkatkan *load factor* penumpang.
3. Mengembangkan park and ride di beberapa stasiun LRT serta mengembangan skybridge sebagai transit joint development
4. Menciptakan *public policy* dengan *stated preference* agar masyarakat mau beralih ke angkutan umum massal antara lain kebijakan pengaturan kendaraan genap ganjil, kawasan *three in one*.
5. Meningkatkan sosialisasi penyadaran kepada masyarakat melalui media massa, penyebaran dan pecetakan spanduk, pamplet, leaflet untuk menggunakan fasilitas LRT.
6. Membuat Surat edaran atau peraturan gubenur untuk ASN satu hari dalam satu minggu untuk menggunakan angkutan umum.
7. Sejak tanggal 9 Januari 2019 telah terbentuk Balai Pengelola Kerata Api Ringan Sumatera Selatan. dibawah Kemenhub untuk pengelolaan sarana/aset LRT sehingga memberikan hasil seperti *Advertising*, *Transit Joint Development* dan rencana TOD untuk mengurangi subsidi operasional kedepan, di mana sata ini operasional dilakukan oleh PT. KAI.

Terkait dengan penganggaran, maka anggaran subsidi masih melalui APBN karena aset masih tercatat di Pemerintah Pusat, sehingga strategi penganggaran operasional LRT, yakni perlu adanya subsidi karena masih perintis (UU 23 tahun 2007) dan Hak pengusahaan prasarana LRT melalui pengembangan TOD sebagai pendapatan *non fare box* diluar tiket penumpang seperti pendapatan *advertising*.

### 2.3.2.9.1.5.Transportasi Sungai

Sumatera Selatan mempunyai banyak aliran sungai yang juga dapat dimanfaatkan untuk moda transportasi. Daerah yang memiliki akses ke alur sungai terdapat 8 kabupaten, 62 ke camatan, dan 356 desa/kelurahan atau 11,59 persen dari 3.079 desa di Sumatera Selatan.

**Tabel 2.175.**
Jumlah Wilayah di Sekitar Sungai

| No. | Sungai | Wilayah dengan Akses ke Sungai Baik | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kabupaten/ Kota | Kecamatan | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
| 1 | Banyuasin | Banyuasin | Tanjung Lago | 1 | 4 |
| 2 | Batanghari | Musi Banyuasin | Batanghari Leko | 1 | 10 |
| 3 | Calik | Banyuasin | Pulau Rimau | 1 | 10 |
| 4 | Kelingi | Musi Rawas | Bulan Tengah Suku Ulu, Muara Kelingi, Muara Lakitan | 3 | 5 |
| 5 | Komering | OKI | Kota Kayu Agung, Sirah Pulau Padang, Jejawi, Lempuing Jaya | 4 | 29 |
| | | OKU Timur | Buay Pemuka Bangsa Raja, Buay Pemuka Peliung, Cempaka, Madang, Suku II, | 5 | 11 |

| No. | Sungai | Wilayah dengan Akses ke Sungai Baik | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kabupaten/ Kota | Kecamatan | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
| | | | Semendawai Barat | | |
| 6 | Lalan | Musi Banyuasin | Bayung Lencir, Lalan | 2 | 16 |
| 7 | Lematang | Muara Enim | Abab, Rambang Dangku, Sungai Rotan, Tanah Abang, Muara Belida | 5 | 23 |
| 8 | Lilin | Banyuasin<br>Musi Banyuasin | Tungkal Ilir<br>Sungai Lilin | 1<br>1 | 2<br>1 |
| 9 | Lumpur | OKI | Cengal, Pampangan, Tulung Selapan | 3 | 23 |
| 10 | Mesuji | OKI | Pedamaran Timur, Sungai Menang, Cengal | 3 | 9 |
| 11 | Musi | Banyuasin | Banyuasin I, Rantau Bayur | 2 | 24 |
| | | Muara Enim | Penukal Utara | 1 | 1 |
| | | Musi Banyuasin | Sanga Desa | 1 | 3 |
| | | Palembang | Gandus, Ilir Timur II, Kertapati, Seberang Ulu I | 4 | 10 |
| 12 | Ogan | Ogan Ilir | Lubuk keliat, Muara Kuang, Rantau Alai, Indralaya Utara, Kandis, Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, Tanjung Batu, Tanjung Raja | 1<br>2 | 65 |
| 13 | Rawas | Musi Rawas | Karang Dapo, Rawas Ilir, Rawas Ulu, Rupit, Ulu Rawas | 5 | 34 |
| 14 | Saleh | Banyuasin | Air Saleh, Rambutan, Muara Sugihan | 3 | 30 |
| 15 | Sugihan | Banyuasin | Muara Sugihan | 1 | 18 |
| 16 | Telang | Banyuasin | Banyuasin II, Makarti Jaya, Muara Telang | 3 | 27 |
| | **Total** | | | **62** | **355** |

*Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2017*

Jumlah Dermaga Sungai di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 89 unit yang tersebar di 10 Kabupaten di Sumatera Selatan. Sebagian besar yaitu 87 persen, dermaga-dermaga sungai tersebut dalam kondisi baik, 3 persen dalam kondisi rusak dan sisanya 10 persen tidak diketahui kondisinya.

**Tabel 2.176.**
Daftar Dermaga Sungai dan Danau di Sumatera Selatan

| No | Dermaga | Lokasi | Jenis Dermaga | Kondisi | Tahun Pembuatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gandus | S. Musi, Palembang | Ponton | Baik | 2006-2008 |
| 2 | Tangga Buntung (35 Ilir) | S. Musi, Palembang | Ponton | Baik | 1992/1993 |
| 3 | Sekanak | S. Musi, Palembang | Ponton | Baik | 2006 |
| 4 | Benteng Kuto Besak (BKB) | S. Musi, Palembang | Ponton | Baik | 2007 |
| 5 | Bawah Ampera (7 ulu) | S. Musi, Palembang | Ponton | Baik | - |
| 6 | 16 Ilir | S. Musi, Palembang | Ponton | Baik | 2002 |
| 7 | 16 Ilir (Bawah Ampera) | S. Musi, Palembang | Ponton | Baik | 2004 |
| 8 | Kertapati | S. Musi, Palembang | Ponton | Baik | - |
| 9 | Kertapati (Samping Stasiun KA) | S. Ogan, Palembang | Beton | Baik | 2011 |
| 10 | 10 Ulu | S. Musi, Palembang | Ponton | Baik | - |
| 11 | Rumah Buruk | - | - | Baik | - |
| 12 | Pasar Kuto | - | - | Baik | - |
| 13 | 1 Ilir | - | - | Baik | - |

| No | Dermaga | Lokasi | Jenis Dermaga | Kondisi | Tahun Pembuatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Tangga Takat | - | - | Baik | - |
| 15 | 13 Ulu | - | - | Baik | - |
| 16 | Padatuan | - | - | Baik | - |
| 17 | Padatuan 7 Ulu (a) | - | - | Baik | 2009 |
| 18 | Padatuan 7 Ulu (b) | - | - | Baik | 2011 |
| 19 | 5 Ulu | - | - | Baik | - |
| 20 | 4 Ulu | - | - | Baik | - |
| 21 | Sei Buaya | - | - | Baik | - |
| 22 | Pegayut | - | - | Baik | - |
| 23 | Ki Merogan | - | - | Baik | 2008 |
| 24 | Tangga Batu | S. Musi, Palembang | Ponton | Rusak | - |
| 25 | Pasar Induk Jakabaring | S. Ogan, Palembang | Ponton | Baik | 2003/2005 |
| 26 | Sei Lais | S. Musi, Palembang | Ponton | Baik | - |
| 27 | Bek Ang DAM (TNI) | S. Musi, Palembang | - | Baik | 2010 |
| 28 | Kampung Kapiten | S. Musi, Palembang | - | Baik | 2008 |
| 29 | Lawang Kidul | S. Musi, Palembang | - | Baik | 2008 |
| 30 | 3/4 Ulu | S. Musi, Palembang | - | Baik | 2010 |
| 31 | Masjid Jamik | S. Musi, Palembang | - | Baik | 2010 |
| 32 | Solok Betutu | S. Musi, Palembang | - | Baik | 2009 |
| 33 | Pemulutan(Pos Peng) | S. Ogan, Ogan Ilir | Ponton | Baik | 1990 |
| 34 | Tanjung Raja | S. Ogan, Ogan Ilir | Ponton | Baik | 1994 |
| 35 | Muara Kuang | S. Ogan, Ogan Ilir | - | - | - |
| 36 | Kuala Sugihan | S. Sugihan, OKI | Ponton | Baik | 1990 |
| 37 | Lebong Hitam | S. Lebong Hitam, OKI | Ponton | Baik | 1990 |
| 38 | Pelabuhan Laut Sungai Lumpur | S. Lumpur, OKI | Kayu | Baik | 1990 |
| 39 | Sungai Batang | S. Batang, OKI | Ponton | Baik | 1990 |
| 40 | Tulung Selapan | S. Tulung Selapan, OKI | Beton | Baik | 2000 |
| 41 | Sugihan Kanan | Jalur 27, OKI | Kayu | Baik | 2003 |
| 42 | Kuala XII | S. Kuala, OKI | Ponton | Baik | 1990 |
| 43 | Cengal | Cengal, OKI | Beton | Baik | 2007 |
| 44 | Pulau Padang | S. Lumpur, OKI | - | Baik | - |
| 45 | Pampangan | S. Lumpur, OKI | - | Baik | - |
| 46 | Sukodarmo (Jejawi) | S. Komering, OKI | Beton | Baik | 2007 |
| 47 | Muara Kumbang | S. Musi, Banyuasin | Kayu | Baik | 2003 |
| 48 | Upang | S. Sugihan, Banyuasin | Kayu | Baik | 2003 |
| 49 | Sungsang | S. Lilin, Banyuasin | Ponton | Baik | 2004/2006 |
| 50 | Makarti Jaya | S. Sebalik Jalur 9 (P9), Banyuasin | Ponton | Rusak | 1983 |
| 51 | Sugihan (Ma. Padang) | Jalur 20, Banyuasin | Ponton | Baik | 1998 |
| 52 | Sugihan Kiri (cendana) | Jalur 14, Banyuasin | Kayu | Baik | 2003 |
| 53 | Sugihan Kiri (Timbul Jaya) | Jalur 13, Banyuasin | Kayu | Baik | 2003 |
| 54 | Gasing | Gasing | Beton, Ponton | Baik | 2003/2004 |
| 55 | Muara Telang | Jalur 8, Banyuasin | Ponton | Baik | 2003 |
| 56 | Telang Jaya | Jalur 8, Banyuasin | Besi/Kayu | Baik | 1992 |
| 57 | Simpang PU | S. Telang, Banyuasin | Ponton | Baik | 1997 |
| 58 | Muara Telang | Jalur 4, 5 Telang, Banyuasin | Ponton | Baik | 2005 |

| No | Dermaga | Lokasi | Jenis Dermaga | Kondisi | Tahun Pembuatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Sembilang | S. Sembilang, Banyuasin | Ponton | Baik | 2003/2004 |
| 60 | Pengumbuk | S. Musi Banyuasin | Besi/Kayu | Baik | 2001 |
| 61 | Teluk Betung | P. Rimau, Banyuasin | Ponton | Baik | - |
| 62 | Muara Padang | S. Sebalik, Banyuasin | Beton | Baik | - |
| 63 | Penuguan | S. Lilin, Banyuasin | - | - | - |
| 64 | Karang Agung | S. Lalan, Muba | Beton | Baik | 1985 |
| 65 | Sungai Lilin | S. Lilin, Muba | Ponton | Baik | 2004 |
| 66 | Sekayu | S. Musi, Muba | Beton | Baik | 1993 |
| 67 | Muara Lematang | S. Lematang, Muba | Ponton | Baik | 1990 |
| 68 | Bayung Lincir | S. Lalan, Muba | Ponton | Baik | 2009 |
| 69 | Babat | S. Musi, Muba | - | - | - |
| 70 | Telang | S. Lalan, Muba | - | - | - |
| 71 | Pangkalan Bulian | S. Batang Hari Leko, Muba | - | - | - |
| 72 | Muara Rawas | S. Kelingi, Muba | - | - | - |
| 73 | Teluk Kijing | S. Batang Hari Leko, | - | - | - |
| 74 | Muara Teladan | S. Batang Hari Leko, | - | - | - |
| 75 | Simpang | S. Komering, OKU | - | - | - |
| 76 | Banding Agung | Danau Ranau, OKU Selatan | Baja | Baik | 1993 |
| 77 | Kota Batu | Danau Ranau, OKU Selatan | Baja,Lantai Kayu | Rusak | 1994 |
| 78 | Talang Pangeran (Pemulutan) | S. Ogan, Ogan Ilir | Ponton | Baik | 2006 |
| 79 | Muara Rupit | S. Rawas, Musi Rawas | Beton | Baik | - |
| 80 | Muara Kelinci | S. Kelinci, Musi Rawas | - | Baik | - |
| 81 | Muara Lakitan | S. Kelinci, Musi Rawas | - | Baik | - |
| 82 | Beringin Teluk | S. Rawas, Musi Rawas | - | Baik | - |
| 83 | Pauh | S. Rawas, Musi Rawas | - | Baik | - |
| 84 | Padang Tepung | S. Kelinci, Lahat | - | Baik | - |
| 85 | Kota Agung | S. Lematang, Lahat | - | Baik | - |
| 86 | Muara Enim | S.Lematang, Muara Enim | - | Baik | - |
| 87 | Beringin | S. Ogan, Muara Enim | - | Baik | - |
| 88 | Gunung Megang | S. Lematang, Muara Enim | - | Baik | - |
| 89 | Muara Lematang | S. Musi, Muara Enim | - | Baik | - |

*Sumber : Statistik Dishubkominfo, 2017*

Angkutan Sungai (Kapal) mengalami penurunan jumlah yang beroperasi antara lain dipengaruhi oleh pembukaan jalan baru dan pendangkalan pada alur pelayaran sungai sebagai dampak dari sedimentasi. Selain itu Pelabuhan Boom Baru Palembang yang saat ini sebagai outlet utama untuk pengangkutan barang melaui kapal juga memiliki beberapa kendala antara lain : sulit untuk dikembangkan karena berada ditengah pemukiman, kedalaman alur pelayaran relatif dangkal, sehingga pelayaran sangat tergantung dengan pasang surut sekitar 6 jam/hari dan panjang alur pelayaran sungai Musi ke ambang luar relatif jauh ± 108 km (60 mil) yang menyebabkan tingginya biaya operasional kapal yang akan berlabuh.

Sumatera Selatan mempunyai banyak aliran sungai yang dimanfaatkan untuk moda transportasi. Daerah yang memiliki akses ke Alur Sungai terdapat 8 kabupaten, 62 kecamatan dan 356 desa/kelurahan atau 11,59 % dari 3.079 desa di Sumatera Selatan. Jumlah Dermaga Sungai di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 89 unit yang tersebar di 10 Kabupaten di Sumatera Selatan. Sebagian besar (87%) dermaga-dermaga Sungai tersebut dalam kondisi baik. Dermaga Penyeberangan TAA menuju Bangka sudah beroperasi dengan jumlah penumpang terangkut di tahun 2017 114.684 orang penumpang dan kendaraan yang diangkut 73.107 unit. Realisasi angkutan penumpang tahun 2017 meningkat mencapai 127,43%.

Pelabuhan Pengumpul Tanjung Api-Api pada tahun 2018 selesai dibangun dan rencananya akan dioperasionalkan sebagai pelabuhan pengumpul pada tahun 2019 sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Sejak tahun 2018 sedang proses serah terima aset dan pengajuan pelimpahan kewenangan pengelolaan dari Kementerian Perhubungan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk UPTD PASDPL (Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut) dan direncanakan beroperasi pada triwulan I tahun 2019.

**Gambar 2.61.**
Pelabuhan Penyebrangan Tanjung Api-api




*Sumber: Dinas Perhubungan 2017*

### 2.3.2.9.1.6.Transportasi Udara

Angkutan udara di Sumatera Selatan terus dikembangkan dan terevitalisasi. Total 8 bandar udara yang ada hanya 3 yang beroperasi yaitu SMB II Palembang, Silampari Lubuk Linggau dan Atung Bungsu Pagaralam, sedangkan 5 bandara lainnya (bandara perintis) saat ini belum beroperasional.

**Tabel 2.177.**
Kondisi Bandar Udara di Provinsi Sumatera Selatan

| No | Kab/Kota | Nama Bandara | Run Way | Jenis Pesawat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palembang | SMB II | 3000 x 45 m | Boeing 737/ Air Bus 330 | Operasional Bandara Internasional |
| 2 | PALI | Eks Stanvac Pendopo | 1300 x 20 m | - | *Vacuum* |
| 3 | Muara Enim | Tanjung Enim | 900 x 23 m | Cassa 212 | *Vacuum* (Lapter/Bandara Privat) |
| 4 | Lubuk Linggau | Silampari | 2050 x 30 m | Fokker 50 | Operasional dengan rute Lubuk Linggau- Palembang dan Lubuk Linggau Jakarta (PP) |
| 5 | OKU Selatan | Banding Agung | 900 x 23 m | Cassa 212 | *Vacuum* |
| 6 | Pagaralam | Atung Bungsu | 1400 x 30 m | Fokker 50 | Mualai Operasional Tahun 2014 |
| 7 | Muba | Sekayu | 900 x 23 m | Cassa 212 | Vacuum |

*Sumber: Dishubkominfo, 2017*

Pada tahun 2017 sudah diupayakan rencana bagi revitalisasi Bandara OKU Selatan, dimulai dengan penyusunan dokumen perencanaan (FS, DED dan Amdal) dan rencana penyerahan asset bandara oleh Pemda OKU Selatan ke Kementerian Perhubungan.

Satu-satunya bandara terbesar di Sumatera Selatan adalah Bandara SMB II. Sepanjang tahun 2016-2017 lalu Bandara SMB II Palembang telah berhasil memfasilitasi 3,511 juta orang dalam berpergian mengunakan pesawat udara, baik rute domestik maupun internasional. Tren kenaikan keberangkatan penumpang domestik mengunakan fasilitas Bandara SMB Itahun 2012 s.d. 2017 rata-rata diatas 10% /tahun, dan akan meningkat terus setelah Asian Games 2018.

Dari gambaran kondisi infarstruktur tersebut ada beberapa fokus yang harus dihadapi kedepannya, antara lain Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang mendukung pembangunan sektor unggulan masih perlu ditingkatkan terutama untuk mengangkut barang (produk dalam skala besar yaitu Batubara, CPO, Karet, Kayu, Pulp, Semen, dll), pembangunan infrastruktur juga harus mampu menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dan pembangunan infrastruktur kedepannya juga harus mampu untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

### 2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Tahun 2016 Pemprov Sumsel membentuk institusi baru yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika. Selama ini urusan komunikasi dan informatika bergabung dengan Dinas Perhubungan dengan nama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP 18 tahun 2016. Pembentukan dinas baru ini diharapkan bisa memberikan layanan maksimal kepada masyarakat. Misalnya penyediaan layanan internet gratis, sekarang internet sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan sistem birokrasi online atau *e-government*. Selain mengurusi bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika juga membawahi bidang sandi dan statistik.

#### 2.3.2.10.1. Persentase RT menurut Beberapa Indikator Akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi 2012-2017

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan payung besar triminologi yang mencakup semua keperluan teknis untuk memperoses dan menyampaikan sebuah informasi, TIK memiliki dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, pemakaian sebagai alat bantu, pengelolaan informasi, serta manipulasi informasi. Teknologi komunikasi merupakan semua hal yang berkaitan dengan pemakaian alat bantu untuk memperoses serta mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Oleh sebab itu, teknologi informasi dan komunikasi merupakan dua buah konsep yang terpisahkan, maka Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi memiliki perngertian luas, yaitu segala jenis kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, manipulasi, serta pemindahan informasi antar media.

**Tabel. 2.178.**
Persentase RT menurut Beberapa Indikator Akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

| Persentase Rumah tangga | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Memiliki telepon rumah | 5,11 | 4,55 | 4,93 | 3,44 | 2,83 | 2,62 |
| Ada ART memiliki telepon selular | 86,38 | 88,93 | 89,51 | 53,66 | na | na |
| Memiliki Komputer | 12,04 | 12,82 | 15,01 | 14,48 | 15,10 | 16,62 |
| | 10,87 | 11,97 | 14,02 | 17,71 | 19,98 | 25,65 |
| Akses internet di rumah | 2,86 | 2,56 | 2,08 | na | na | na |
| Ada ART akses internet di luar rumah | 10,21 | 16,50 | 20,26 | na | na | na |
| Memiliki Telepon Selular | na | na | na | 53,66 | 56,48 | 57,01 |

*Sumber : BPS, 2017*

Berdasarkan data yang ada, kepemilikian telepon rumah masih kecil dan terus mengalami penurunan, hal ini disebabkan kebutuhan komunikasi rumah tangga mulai tergantikan dengan keberadaan telpon genggam (seluler). Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya kepemilikan telepon seluler.

Walaupun tren kepemilikan komputer dari tahun ke tahun selalu meningkat, namun persentasenya masih belum tinggi, hal ini disebabkan harga komputer yang cukup mahal. Hal yang cukup menarik adalah perbedaan antara akses internet di dalam dan luar rumah, dimana akses Rumah Tangga di dalam rumah lebih rendah dibandingkan di luar rumah. Hal ini disebabkan karena akses internet di luar rumah biasanya dilakukan melalui telpon seluler, warnet, kantor dan sekolah.

#### 2.3.2.10.2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pengelolaan komunikasi publik di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tiap Perangkat Daerah, di mana hingga tahun 2018 terdapat 39 PPID. Adapun peran PPID, yakni

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
6. Melakukan Inventarisasi Informasi yang Dikecualikan untuk dilakukan Uji Konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;
7. Membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup :
   a. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
   b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
   c. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
   d. alasan penolakan permohonan informasi publik.

Selain itu, PPID dibantu oleh PPID-Pembantu yang peranannya, yakni

1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;

3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup SKPD masing-masing menjadi bahan informasi publik.

Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan menyediakan informasi yang bisa di akses oleh masyarakat umum melalui *website* dan aplikasi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terdapat di 51 perangkat daerah pengelola. Adapun daftar website, sub domain dan aplikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel. 2.179.**
Daftar Website dan Sub Domain
di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

| NO. | OPD PENGELOLA | ALAMAT WEBSITE | APLIKASI | ALAMAT AKUN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan | disdik.sumselprov.go.id | | |
| 2 | Dinas Kesehatan | dinkes.sumselprov.go.id | sistem informasi tempat tidur rs online | dinkes.sumselprov.go.id/lihat-info-bed-rs |
| | | rsud.sumselprov.go.id | Surat Tanda Regristrasi | Offline |
| | | rskmata.sumselprov.go.id | Sistem Jaringan Jalan | |
| 3 | Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang | pubmtr.sumselprov.go.id | GIS Pengairan | Offline |
| 4 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | pupengairan.sumselprov.go.id | Sistem Informasi Tata Ruang | sitarung.sumselprov.go.id |
| 5 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | disperkim.sumselprov.go.id | Sistem Informasi Monitoring Evaluation Reporting | simer.sumselprov.go.id |
| | | sitarung.sumselprov.go.id | | |
| | | simer.sumselprov.go.id | | |
| 6 | Dinas Sosial | dinsos.sumselprov.go.id | | |
| 7 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | disnakertrans.sumselprov.go.id | | |
| 8 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | bpppa.sumselprov.go.id | Sistem Informasi Gender & Anak | siga.sumselprov.go.id |
| | | siga.sumselprov.go.id | | |
| | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan | dkpp.sumselprov.go.id | | |
| 9 | | | | |

| NO. | OPD PENGELOLA | ALAMAT WEBSITE | APLIKASI | ALAMAT AKUN |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan | http://bkp.pertanian.go.id/bkp-sumsel/ | | |
| | | dlhp.sumselprov.go.id | | |
| 11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | labling.sumselprov.go.id | Sistem Informasi Manajemen Kependudukan | Intranet |
| 12 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | dukcapil.sumselprov.go.id | | |
| 13 | Dinas Perhubungan | https://bpmpdsumsel.blogspot.co.id/ | ATSC | Offline |
| 14 | Dinas Komunikasi dan Informatika | dishub.sumselprov.go.id | Portal Sumsel | sumselprov.go.id |
| | | kominfo.sumselprov.go.id | Layanan Pengadaan Secara elektronik | lpse.sumselprov.go.id |
| | | sekretariat.kominfo.sumselprov.go.id | e-Catolog / e-Purchasing | e-katalog.lkpp.go.id |
| | | ppid.kominfo.sumselprov.go.id | Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan | sirup.lkpp.go.id/sirup |
| | | ppid.sumselprov.go.id | Sistem Informasi Data | sidata.sumselprov.go.id |
| | | lpse.sumselprov.go.id | sumselcare | sumselcare.sumselprov.go.id |
| | | sidata.sumselprov.go.id | Aplikasi Perkantoran | eofficekominfo.sumselprov.go.id |
| | | sumselcare.sumselprov.go.id | | sumselgov.sumselprov.go.id |
| | | eofficekominfo.sumselprov.go.id | | |
| 15 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | sumselgov.sumselprov.go.id | Online Data System (ODS) Koperasi dan UKM | http://www.depkop.go.id/layanan-publik/online-data-system-ods/ |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | diskopukm.sumselprov.go.id | Pelayanan Terpadu satu Pintu | dpmptsp.sumselprov.go.id |
| 17 | Dinas Pemuda dan Olahraga | dpmptsp.sumselprov.go.id | | |
| 18 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | dispora.sumselprov.go.id | | |
| | | disbudpar.sumselprov.go.id | | |
| 19 | Dinas Perpustakaan | http://southsumatratourism.com/ | | banpustaka.com/website/?halm=pendaftaran-online |
| 20 | Dinas Kearsipan | http://www.banpustaka.com/website/ | | |
| 21 | Dinas Kelautan dan Perikanan | arsip.sumselprov.go.id | | |
| 22 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | dislutkan.sumselprov.go.id | | |
| 23 | Dinas Perkebunan | dispertantph.sumselprov.go.id | | |
| 24 | Dinas Kehutanan | disbun.sumselprov.go.id | kebakaran hutan | karhutla.dishut.sumselprov.go.id |

| NO. | OPD PENGELOLA | ALAMAT WEBSITE | APLIKASI | ALAMAT AKUN |
|---|---|---|---|---|
| | | dishut.sumselprov.go.id | data kehutanan | data.dishut.sumselprov.go.id |
| | | data.dishut.sumselprov.go.id | GIS Tambang | 103.52.146.34/esdm sumsel/ |
| 25 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | karhutla.dishut.sumselprov.go.id | Layanan Informasi dan Data ESDM | minerba.desdm.sumselprov.go.id |
| | | desdm.sumselprov.go.id | | |
| 26 | Dinas Perdagangan | minerba.desdm.sumselprov.go.id | | |
| 27 | Dinas Perindustrian | disdag.sumselprov.go.id | | |
| 28 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | bappeda.sumselprov.go.id | Sistem Informasi Gerakan Terpadu Serentak | sigertak.sumselprov.go.id |
| | | webmail.bappeda | eMonev | emonev.bappedasumsel.com |
| | | simpadu.sumselprov.go.id | Sistem Perencanaan Elektronik | eplanning.sumselprov.go.id |
| | | eplanning.sumselprov.go.id | Portal Data Sumatera Selatan | data.sumselprov.go.id |
| | | data.sumselprov.go.id | Sistem Informasi Pengembangan Hilirisasi Daerah | siphida.bappeda.sumselprov.go.id |
| | | siphida.bappeda.sumselprov.go.id | Jaringan Informasi Geospasial Nasional | geoportal.sumselprov.go.id |
| | | sigertak.sumselprov.go.id | | |
| 29 | Badan Pendapatan Daerah | bapenda.sumselprov.go.id | e-Samsat | Intranet |
| 30 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | bpkad.sumselprov.go.id | SIMDA Keuagan dan Aset | Intranet |
| | | | SIMonev | Intranet |
| | | | e-sumsel | Intranet |
| 31 | Badan Kepegawaian Daerah | bkd.sumselprov.go.id | Tata Naskah Kepegawaian Secara Elektronik (E-Takah) | |
| | | | epersonal | |
| | | | Simpeg | |
| | | | Sistem Pelayanan Kepegawaian (SAPK) | |
| 32 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | bpsdmd.sumselprov.go.id | | |
| 33 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | litbangda.sumselprov.go.id | ejournal.sumselprov.go.id | |
| | | ejournal.sumselprov.go.id | SIM WBTB (warisan budaya tak benda) | |
| | | | database penelitian | |
| | | | Sentra HKI Sumsel | |

| NO. | OPD PENGELOLA | ALAMAT WEBSITE | APLIKASI | ALAMAT AKUN |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | bpbd.sumselprov.go.id | Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) | Intranet |
| 35 | Badan Penghubung | bppss.sumselprov.go.id | | |
| 36 | Badan Kesatuan Bangsa Politik | kesbangpol.sumselprov.go.id | | |
| 37 | Biro Administrasi Pembangunan | biroadpem.sumselprov.go.id | monev.lkpp.go.id | Layanan Monitoring dan Evaluasi |
| 38 | Biro Hukum dan Hak Azazi Manusia | jdih.sumselprov.go.id | jdih | jdih.sumselprov.go.id |
| 39 | Biro Humas dan Protokol | birohumasprotokol.sumselprov.go.id | | |
| 40 | Biro Kesejahteraan Rakyat | birokesra.sumselprov.go.id | | |
| 41 | Biro Organisasi | eperformance.sumselprov.go.id | Lakip, Sakip & Renstra | eperformance.sumselprov.go.id |
| | | jipp.sumselprov.go.id | | jipp.sumselprov.go.id |
| 42 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | biropemerintahan.sumselprov.go.id | | |
| 43 | Biro Perekonomian | biroperekonomian.sumselprov.go.id | | |
| 44 | Biro Umum dan Perlengkapan | biroumper.sumselprov.go.id | | |
| 45 | Inspektorat Provinsi | inspektorat.sumselprov.go.id | | |
| 46 | Satuan Polisi Pamong Praja | satpolpp.sumselprov.go.id | | |
| 47 | RS. Ernaldi Bahar | rs-ernaldibahar.com | | |
| 48 | Sekretariat DPRD Provinsi | dprd.sumselprov.go.id | | |
| | | setwan.sumselprov.go.id | | |
| 49 | Komisi Penyiaran Indonesia Daerah | kpid.sumselprov.go.id | | |
| 50 | Tim Penggerak PKK Sumsel | tppkk.sumselprov.go.id | SIM PKK | tppkk.sumselprov.go.id |
| 51 | Kolega Sumsel | http://greenpartnership.sumselprov.go.id | | |

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel, 2018*

Dalam mendukung pelayanan kemudahan akses informasi ke masyarakat, pemerintah menyediakan pelayanan internet di Sumsel khususnya internet gratis, Gubernur Sumsel pada 1 Juni 2012 telah meluncurkan "Sumsel free Wifi Area". Ini merupakan pintu masuk menuju Sumsel sebagai provinsi *cyber*. Sumsel free Wifi Area dimulai dari Palembang. Untuk kota Palembang sudah terpasang lebih dari seribu titik wifi gratis. Wifi gratis juga dipasang di 17 pondok pesantren. Jumlah tersebut masih kurang, sehingga dengan pembentukan dinas baru Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan wifi gratis penyediaannya bisa lebih banyak sesuai kemampuan keuangan negara dan daerah.

Tahun 2017 Pemprov Sumsel meluncurkan Program Sumsel Smart and Care yang merupakan Inovasi Proyek Perubahan sebagai langkah awal dalam rangka mewujudkan Sumsel sebagai *Smart* Province. Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat serta tuntutan masyarakat yang tinggi, sehingga pemerintah harus dapat menyiapkan layanan baik internal maupun eksternal yang efektif, responsif, dan modern. Sumsel Smart Province adalah konsep pemanfaatan ICT (*lnformasi and Communication Technologies*) untuk semua aktivitas kegiatan dalam mendukung pelayanan publik dan tata kelola Pemerintah yang efektif atau *Good Govermance*.

Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Alex Noerdin secara resmi melaunching Program S2C, guna mensinergikan dan mengintregrasikan semua layanan publik OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel. Upaya mewujudkan Sumsel sebagai *Smart Province* yang terdepan perlu mendapatkan dukungan dari *Smart Society* (masyarakat Cerdas) sehingga dalam program S2C ini diadakan Lomba Aplikasi lnovatif di tahun 2017, dengan kategori Aplikasi mendukung Asian Games 2018.

Tahun 2017 telah diselesaikan penyusunan perencanaan Sumsel Commend Center (S2C) atau pusat kendali dan akan dimulai dan ditargetkan selesai sebelum pelaksanaan Asian Games ke 18 tahun 2018. Program S2C ini merupakan langkah awal dalam pembangunan Sumsel Smart Province, dan program S2C yang akan segera dioperasionalkan ini menyediakan berbagai aplikasi dan layanan yang terdiri dari Sumsel on Hand, Sumsel Care, Sumsel Gov, Sidata (Sistim informasi dan data ), E- Office dan Sumsel Smart Wifi. Selanjutnya program ini akan terus dikembangkan bersama dengan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sumsel dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang inovatif, modern dan memenuhi harapan semua lapisan masyarakat.

#### 2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerjasama demi kesejahteraan bersama. Data perkembangan koperasi di Sumatera Selatan dari tahun 2013 sampai 2018 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah koperasi yang ada di Sumatera Selatan sebanyak 5.790 unit dengan jumlah anggota sebanyak 811.800 orang, simpanan Rp. 1.192.789.680.000, volume usaha Rp. 2.688.466.760.000, dan SHU sebesar Rp. 129.583.590.000,-. Tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah koperasi menjadi 6.352 unit tetapi jumlah anggota mengalami penurunan menjadi 614.563 orang dan volume usaha meningkat menjadi Rp. 3.233.287.280.000,-.

**Tabel. 2.180.**
Perkembangan Koperasi di Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018

| Kabupaten /Kota | Uraian | Satuan | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Palembang | **Jumlah Koperasi** | **Unit** | **1.054** | **1.054** | **1.073** | **1.080** | **1.080** | **1.080** |
| | Koperasi Aktif | Unit | 793 | 798 | 812 | 819 | 819 | 819 |
| | Koperasi Tidak Aktif | Unit | 261 | 256 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Banyuasin | **Jumlah Koperasi** | **Unit** | **408** | **363** | **363** | **363** | **415** | **415** |
| | Koperasi Aktif | Unit | 269 | 261 | 242 | 242 | 294 | 294 |
| | Koperasi Tidak Aktif | Unit | 139 | 102 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Musi Banyuasin | **Jumlah Koperasi** | **Unit** | **1.029** | **271** | **277** | **277** | **277** | **277** |
| | Koperasi Aktif | Unit | 825 | 259 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| | Koperasi Tidak Aktif | Unit | 204 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Lubuk Linggau | **Jumlah Koperasi** | **Unit** | **193** | **193** | **205** | **205** | **205** | **205** |
| | Koperasi Aktif | Unit | 112 | 116 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| | Koperasi Tidak Aktif | Unit | 81 | 77 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Musi Rawas | **Jumlah Koperasi** | **Unit** | **347** | **786** | **730** | **730** | **730** | **730** |
| | Koperasi Aktif | Unit | 240 | 636 | 599 | 559 | 599 | 599 |
| | Koperasi Tidak Aktif | Unit | 107 | 150 | 131 | 121 | 131 | 131 |
| Prabumulih | **Jumlah Koperasi** | **Unit** | **350** | **155** | **168** | **168** | **168** | **168** |
| | Koperasi Aktif | Unit | 258 | 117 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | Koperasi Tidak Aktif | Unit | 92 | 38 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Muara Enim | **Jumlah Koperasi** | **Unit** | **350** | **482** | **482** | **482** | **479** | **492** |
| | Koperasi Aktif | Unit | 266 | 299 | 319 | 331 | 315 | 333 |
| | Koperasi Tidak Aktif | Unit | 84 | 183 | 163 | 151 | 164 | 159 |
| Ogan Komering Ilir | **Jumlah Koperasi** | **Unit** | **155** | **340** | **399** | **399** | **399** | **399** |
| | Koperasi Aktif | Unit | 114 | 269 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| | Koperasi Tidak Aktif | Unit | 41 | 71 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Ogan Ilir | **Jumlah Koperasi** | **Unit** | **189** | **198** | **204** | **204** | **204** | **217** |
| | Koperasi Aktif | Unit | 168 | 116 | 166 | 166 | 166 | 199 |
| | Koperasi Tidak Aktif | Unit | 21 | 82 | 38 | 38 | 38 | 18 |
| Ogan Komering Ulu | **Jumlah Koperasi** | **Unit** | **530** | **362** | **371** | **371** | **377** | **377** |
| | Koperasi Aktif | Unit | 339 | 260 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| | Koperasi Tidak Aktif | Unit | 191 | 102 | 102 | 102 | 108 | 108 |
| OKU Timur | **Jumlah Koperasi** | **Unit** | **125** | **401** | **421** | **421** | **421** | **421** |
| | Koperasi Aktif | Unit | 72 | 259 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| | Koperasi Tidak Aktif | Unit | 53 | 142 | 19 | 19 | 19 | 19 |

| Kabupaten /Kota | Uraian | Satuan | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| OKU Selatan | **Jumlah Koperasi** | **Unit** | **395** | **211** | **216** | **216** | **216** | **216** |
| | Koperasi Aktif | Unit | 271 | 171 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| | Koperasi Tidak Aktif | Unit | 124 | 40 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Empat Lawang | **Jumlah Koperasi** | **Unit** | **110** | **133** | **160** | **160** | **187** | **187** |
| | Koperasi Aktif | Unit | 48 | 75 | 79 | 79 | 124 | 124 |
| | Koperasi Tidak Aktif | Unit | 62 | 58 | 81 | 81 | 63 | 63 |
| Lahat | **Jumlah Koperasi** | **Unit** | **197** | **392** | **392** | **392** | **392** | **392** |
| | Koperasi Aktif | Unit | 113 | 274 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| | Koperasi Tidak Aktif | Unit | 84 | 118 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Pagar Alam | **Jumlah Koperasi** | **Unit** | **261** | **111** | **111** | **115** | **109** | **113** |
| | Koperasi Aktif | Unit | 249 | 51 | 39 | 43 | 43 | 47 |
| | Koperasi Tidak Aktif | Unit | 12 | 60 | 72 | 72 | 66 | 66 |
| Musi Rawas Utara | **Jumlah Koperasi** | **Unit** | **-** | **243** | **243** | **243** | **365** | **365** |
| | Koperasi Aktif | Unit | - | 243 | 243 | 243 | 260 | 260 |
| | Koperasi Tidak Aktif | Unit | - | - | - | - | 105 | 105 |
| Penukal Abab Lematang Ilir | **Jumlah Koperasi** | **Unit** | **-** | **60** | **61** | **61** | **180** | **180** |
| | Koperasi Aktif | Unit | - | 42 | 42 | 42 | 156 | 156 |
| | Koperasi Tidak Aktif | Unit | - | 18 | 19 | 19 | 24 | 24 |
| Provinsi | **Jumlah Koperasi** | **Unit** | **97** | **97** | **116** | **118** | **118** | **118** |
| | Koperasi Aktif | Unit | 90 | 90 | 109 | 111 | 111 | 111 |
| | Koperasi Tidak Aktif | Unit | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **TOTAL JUMLAH KOPERASI** | | **Unit** | **5.790** | **5.852** | **5.992** | **6.005** | **6.272** | **6.352** |

*Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan*

Jumlah UMKM Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari tahun ketahun, pada tahun 2013 jumlah UMKM Sumsel sebanyak 2.002.836 unit meningkat menjadi 2.108.604 unit di tahun 2018, begitu juga dengan modal kerja dan investasi dari Rp. 9.362.706.000.000 di tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 9.830.871.000.000 ditahun 2018, omzet usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2013-2018 juga terus mengalami peningkatan dari Rp. 24.720.838.000.000 tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 30.467.638.000.000 ditahun 2018 begitu juga dengan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2013 sebanyak 2.950.428 orang meningkat menjadi 3.066.587 orang ditahun 2018.

**Tabel. 2.181.**
Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sumatera Selatan
Tahun 2013 – 2018

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Jumlah UMKM | Unit | 2.002.836 | 2.022.868 | 2.071.416 | 2.102.478 | 2.103.268 | 2.108.604 |
| | - Pengusaha Mikro Kecil | Unit | 2.000.986 | 2.020.943 | 2.069.445 | 2.100.487 | 2.101.230 | 2.106.528 |
| | - Pengusaha Menengah | Unit | 1.850 | 1.925 | 1.971 | 1.991 | 2.038 | 2.076 |
| | | | | | | | | |
| 2. | Modal Kerja dan Investasi | Rp. Juta | 9.362.706 | 9.44.970 | 9.588.674 | 9.689.308 | 9.731.551 | 9.830.871 |
| | - Pengusaha Mikro Kecil | Rp. Juta | 8.136.710 | 8.184.195 | 8.306.957 | 8.388.365 | 8.379.635 | 8.463.431 |
| | - Pengusaha Menengah | Rp. Juta | 1.225.996 | 1.262.775 | 1.281.717 | 1.300.943 | 1.351.916 | 1.367.440 |
| | | | | | | | | |
| 3. | Omzet | Rp. Juta | 24.720.838 | 24.968.050 | 25.276.145 | 25.528.906 | 25.531.333 | 30.467.638 |
| | - Pengusaha Mikro Kecil | Rp. Juta | 20.026.861 | 20.133.229 | 20.344.628 | 20.548.074 | 20.402.754 | 26.184.781 |
| | - Pengusaha Menengah | Rp. Juta | 4.693.977 | 4.834.821 | 4.931.517 | 4.980.832 | 5.128.579 | 4.312.857 |
| | | | | | | | | |
| 4. | Penyerapan Tenaga Kerja | Orang | 2.950.428 | 2.978.457 | 3.008.007 | 3.038.087 | 3.059.356 | 3.066.587 |
| | - Pengusaha Mikro Kecil | Orang | 2.925.392 | 2.952.545 | 2.981.185 | 3.010.997 | 3.031.704 | 3.042.461 |
| | - Pengusaha Menengah | Orang | 25.036 | 25.912 | 26.822 | 27.090 | 27.652 | 28.792 |

*Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.2.12. Penanaman Modal

#### 2.3.2.12.1. Jumlah Investor PMDN dan PMA

Minat investor PMDN dan PMA untuk berinvestasi di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2014 – 2018 dapat dilihat dari capaian realisasi jumlah investor PMDN dan PMA di Sumatera Selatan, seperti pada tabel 2.91 berikut :

**Tabel 2.182.**
Jumlah Investor PMDN dan PMA di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2018

| Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Rata-rata pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Investor PMDN | 47 | 76 | 61 | 133 | 207 | 53,91 |
| Jumlah Investor PMA | 78 | 107 | 83 | 127 | 126 | 16,74 |
| Total Jumlah nvestor | 125 | 183 | 144 | 160 | 333 | 33,43 |

*Sumber : DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa minat investor PMDN dan PMA untuk berinvestasi di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun ke tahun fluktuatif

tetapi cenderung meningkat dengan rata – rata pertumbuhan jumlah investor selama lima tahun terakhir sebesar 33,43 %. Adapun Jumlah rata – rata pertumbuhan investor PMDN mencapai angka53,91%, sangat tinggi dari rata-rata pertumbuhan jumlah investor PMA sebesar 16,74%. Pertumbuhan tertinggi untuk jumlah investor PMDN dan PMA dicapai pada tahun 2018 dengan total investor 333, dengan jumlah investor PMA mencapai 126 investor dan PMDN mencapai 207 investor. Tingginya minat investor pada tahun 2018 tersebut antara lain didorong oleh rencana akan digelarnya event Internasional pelaksanaan Asian Games ke XVIII di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018, sehingga menjelang event tersebut pertumbuhan investasi sektor jasa, hotel, perdagangan dan teknologi informasi cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi nilai investasi PMDN pada tahun 2018tersebut mencapai Rp 7,465 Trilyun dengan 207 Investor, lebih rendah dari capaian tahun 2017 sebesar Rp 9,76 Trilyun tetapi jumlah investor lebih rendah yaitu 133 investor. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 tersebut investor PMDN yang berinvestasi dominan pada skala investasi kecil dan menengah. Selain itu juga bahwa para investor PMA telah melihat potensi dan peluang investasi yang cukup baik di provinsi Sumatera Selatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tetapi Provinsi Sumatera Selatan masih harus bekerja keras untuk meningkatkan jumlah investor PMA yang baru mencapai rata rata pertumbuhan 16,74% terutama untuk sector-sektor unggulan seperti industri, pertanian, pertambangan dan perdagangan yang masih rendah.. Adapun meningkatkan potensi dan peluang investasi sektor industri pengolahan merupakan tantangan selama lima tahun ke depan,terutama dalam rangka menarik minat investor untuk hilirisasi industri produk unggulan Sumatera Selatan seperti Karet, Kelapa sawit, Kopi dan batubara. Ada dua hal yang menjadi kendala dalam menarik minat investor untuk meningkatkan nilai investasi unggulan daerah antara lain :

- Belum berkembangnya perwilayahan industri di provinsi Sumatera Selatan, antara lain belum operasionalnya KEK Tj. Api-api, belum tersedianya Kawasan-Kawasan Industri.
- Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama lintas sector dalam mendorong terciptanya potensi dan peluang investasi.

Seperti KEK Tanjung Api-api yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin,sejak penetapannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014 dengan luasan 2030 Ha, proses pengembangannya berjalan lambat. Sampai dengan tahun 2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan baru dapat membebaskan lahan 66,13 Ha dari luasan 217 Ha tahap I pembebasan lahan KEK. Pada pertengahan Juli 2017 Gubernur Sumatera Selatan membentuk dan

menunjuk Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) yaitu BUMD PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT. SMS) dan PT. Sriwijaya Tanjung Carat (PT. STC) sebagai mitra kerjasama usaha untuk melakukan design and build serta mendanai KEK TAA, dengan konsep mengintegrasikan kawasan Tanjung Carat sebagai pelabuhan internasional laut dalam yang menjadi daya tarik berinvestasi bagi calon investor/tenant.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang KEK, sampai dengan tanggal 30 Juni 2017KEK Tj. Api-api dinyatakan masih belum siap beroperasi. Dengan dua kali permohonan perpanjangan sampai dengan Juni 2019 bahwa KEK Tj. Api-api harus beroperasi, berbagai kendala seperti status lahan, regulasi investasi, dan kemampuan pemerintah dalam pembiayaan pembebasan lahan serta pembangunan infrastruktur kawasan menjadikan KEK Tj. Api – api belum dapat menjadi Kawasan Pusat promosi potensi investasi Sumatera Selatan.Begitu pula untuk pembangunan Kawasan industri lainnya seperti kawasan Industri Gandus di Kota Palembang dan Kawasan Industri Tj. Api-api di Kab. Banyuasin, beberapa kajian dokumen perencanaan telah diselesaikan danuntuk proses selanjutnya perlu dukungan dan tindak lanjut dari Pemerintah Daerahnya. Dengan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik lagi untuk mewujudkan Perwilayahan Industri sebagai Kawasan Pusat Promosi dan peluang investasi di daerah, dimana dengan terwujudnya Kawasan Pusat Promosi tersebut maka bukan hanya sector investasi industri yang berkembang tetapi berbagai sector lainnya seperti Jasa dan Perdagangan, Pertanian dan Perkebunan serta sector lainnya akan turut meningkat nilai investasinya.

### 2.3.2.12.2. Jumlah Realisasi PMDN dan PMA

Pertumbuhan investasi PMDN dan PMA di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2014 – 2018 berfluktuatif dengan rata – rata pertumbuhan 22, 76%. Data relaisasi investasi PMA dan PMDN disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.183.**
Jumlah Realisasi investasi PMDN dan PMA di Sumatera Selatan
Tahun 2013-2018

| Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai realisasi investasi PMDN (Triliun Rupiah ) | 7,04 | 10,94 | 8,53 | 9,76 | 7,465 | 6,07 |
| Nilai realisasi investasi PMA (Trilyun Rupiah) | 11,12 | 8,97 | 38,83 | 16,03 | 15,613 | 63,06 |

| Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Realisasi Nilai Investasi (Trilyun Rupiah) | 18,16 | 19,51 | 47,36 | 25,79 | 23,078 | 22,76 |

*Sumber : DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata – rata pertumbuhan masih didominasi oleh investasi PMA dengan capaian 63,06%, sedangkan capaian rata – rata pertumbuhan realisasi investasi PMDN masih cukup rendah dengan capaian 6,07%. Bila dilihat dari realisasi rata-rata pertumbuhan investor PMDN yang cukup tinggi dengan 53,91% tetapi rara-rata pertumbuhan investasi hanya 6,07% maka investasi yang tumbuh masih pada skala kecil dan menengah. Sedangan untuk rata-rata pertumbuhan investor PMA hanya mencapai 16,74% tetapi rata-rata pertumbuhan investasi cukup tinggi dengan capaian 63,06% yang menunjukkan bahwa investasi yang tumbuh rata-rata industri besar. Beberapa investor sector industri menyelesaikan proyeknya pada tahun 2016 yang menyebabkan tingginya realisasi investasi PMA pada tahun tersebut yang mencapai Rp 38,83 Triltunantara lain OKI Pulp and Paper, PT. Tirta Fresindo dan PT. Surya Eka Perkasa.

Masih rendahnya rata rata pertumbuhan investasi PMDN dan bagaimana meningkatkan minat investor PMA, menjadi tantangan untuk membangun iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing selama lima tahun ke depan bagi provinsi Sumatera Selatanmelalui peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan, Promosi Investasi dan penanaman modal, penguatan regulasi dan kelembagaanl serta peningkatan daya saing potensi dan peluang investasi sektor unggulan daerah.

### 2.3.2.12.3. Pelayanan Perizinan dan non Perizinan

Pelayanan perizinan di Sumatera Selatan sedang mengalami proses transformasi menuju layanan yang cepat, tepat dan terintegrasi melalui layanan terpadu satu pintu. Pelayanan ini dilaksanakan melalui pembentukan Dinaspenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintudi tingkat Provinsi dan di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.Pencapaian kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan selama tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada table 2.148 sebagai berikut :

**Tabel 2.184.**
Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan non Perizinan
di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 – 2018

| Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rata-rata lama waktu pelayanan perizinandan | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |

| Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| non Perizinan (hari) | | | | | |
| Jumlah Perizinan dan non perizinan yang terlayani pada unit PTSP (angka) | 102 | 280 | 688 | 901 | 934 |
| Index Kepuasan masyarakat (angka) | 82,84 | 87,32 | 89,25 | 89 | 89,41 |

*Sumber : DPMPTSP Prov. Sumsel, 2018*

Dari table diatas untuk pencapaian rata-rata lama waktu pelayanan perizinan dan non perizinan selama tahun 2014 – 2018 telah berhasil mempercepat proses pelayanan dari 7 hari menjadi 5 hari atau efisiensi waktu 2 hari atau 28,57%. Lamanya proses perizinan dapat disebabkan beberapa hal antara lain prosedur layanan seringkali belum efisien, dimana rata-rata lama waktu layanan perizinan masih lebih lambat dari target yang dinyatakan dalam dokumen rencana pembangunan daerah (SOP), dan hal-hal yang terkait perbaikan birokrasi perizinan yang lambat berkembang. Dengan adanya regulasi perizinan dan perbaikan pada system aplikasi pelayanan online maka pelayanan perizinan dan non perizinan dapat menyederhanakan proses perizinannya menjadi lebih cepat.

Untuk jumlah perizinan dan non perizinan PMA dan PMDN yang terlayani selama tahun 2014 – 2018 mengalami peningkatan yang sangat baik dengan rata – rata pertumbuhan perizinan sebesar 88,81%, seiring dengan membaiknya iklim investasi di provinsi Sumatera Selatan. Untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan tersebut maka dilakukan survey Index Kepuasan Investor dengan angka capaian pada tahun 2014 sebesar 82,84 dan pada akhir tahun 2018 berhasil mencapai angka 89,41. Walaupun capaian kinerja Pelayanan Perizinan dan non Perizinan selama tahun 2014-2018 sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan terutama pada ketersediaan sarana dan prasarana perizinan seperti yang tertuang dalam Permendagri nomor 138 Tahun 2017 yang belum dapat di penuhi pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Selain penataan data dan informasi perizinan, perbaikan regulasi perizinan serta pengembangan system aplikasi pelayanan online terintegrasi perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai investasi di Provinsi Sumatera Selatan. :

### 2.3.2.12.4. Jumlah Perda yang mendukung iklim Usaha

Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sudah terdapat 2 (dua) Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha di Provinsi Sumatera Selatan, antara lain:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 tahun 2014, tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 tahun 2018, tentang Fasilitasi dan Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api.

#### 2.3.2.12.5. Perkembangan Jumlah Izin Usaha

Sumsel saat ini menjadi primadona bagi investor dalam dan luar negeri, selain lokasi yang strategis, suasana kondusif yang terus dijaga sangat berperan menarik minat investor. Selain itu, terkait perizinan investasi Pemerintah Sumsel akan siap memberikan kemudahan. Berbagai peluang investasi Sumsel dapat ditawarkan. Dibidang infrastruktur seperti pelabuhan Tanjung Api-Api,Double track, Kawasan Industri, Jalan Tol, dan Jembatan. Dibidang pertambangan seperti minyak bumi, Gas Bumi, Batu Bara serta bidang perkebunan seperti Karet dan Kelapa Sawit.

Perkembangan jumlah izin usaha semakin berkembang, namun tahun 2012 mengalami sedikit penurunan akibat perlambatan kegiatan ekonomi global dan sulitnya melakukan usaha yang memiliki margin keuntungan yang prospektif. Dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadikan Sumatera Selatan sebagai daerah yangsemakin kompetitif dari sisi investasi, perindustrian dan ekspor.

Di bidang pertambangan dari hasil penelitian 359 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan bupati (Kepala daerah), ternyata 175 IUP yang Clear and Clean (CnC). Penelitian lebih lanjut hingga akhir Desember 2016, ternyata 34 IUP yang tidak lolos dan yang benar-benar dinyatakan CnC hanya ada 141 IUP.Itu artinya, ada 218 IUP dicabut dan dilarang melakukan kegiatan penambangan.

### 2.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

#### 2.3.2.13.1. Kepemudaan

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdayasaing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keadaan Sumatera Selatan semakin mengalami kemajuan dalam berbagai dimensi pembangunan, ini terlihat dari semakin terakomodirnya sektor-sektor yang memungkinkan pemuda-pemuda Sumatera Selatan dapat berkembang untuk lebih maju, seperti adanya fasilitas sarana dan prasarana bagi pemuda, disamping itu juga melindungi pemuda dari pengaruh *destruktif* bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS,

pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan. Peran pemuda juga didukung dengan adanya Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, dan Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Peningkatan IMTAQ dan IPTEK Kepemudaan serta Penanggulangan HIV-AIDS.

Upaya peningkatan peran serta aktif dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dilaksanakan melalui fasilitasi kader kewirausahaan sesuai dengan minat, bakat dan potensi pemuda serta potensi daerah. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalan pembentukan kader kewirausahaan yaitu pelatihan, pembimbingan, pendampingan dan akses permodalan.

Perkembangan kepemudaan selama tahun 2014 – 2018 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.185.**
Perkembangan Kepemudaan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018

| No. | Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Jumlah Pemuda Berprestasi (Akademis, Seni, Budaya dan Olahraga) | na | na | na | na | 25 | 31 |
| 2 | Jumlah Pemuda yang Berperan dalam Pembangunan | na | na | na | na | 519 | 1.319 |
| 3 | Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 4 | Jumlah Wirausaha Muda | 60 | 40 | 40 | 40 | na | 40 |

*Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.2.13.2. Olahraga

Prestasi Olahraga dan Industri Olahraga menggambarkan kapasitas dan kapabilitas tenaga-tenaga olahraga (atlet-atlet) yang berperan serta secara aktif berprestasi dalam kejuaraan dan perlombaan Internasional, ini juga berkaitan dengan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang terlengkap dan tercanggih serta berstandar Internasional, terbentang luas di kawasan Jakabaring Sport City, yang semuanya terkoneksi pada suatu wilayah sehingga Sumatera Selatan menjadi surganya pencinta olahraga dan terciptanya industri-industri olahraga, jasa services, peralatan dan partisipasi masyarakat.

Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi yang bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi

olahragawan muda potensial, dan olahragawan andalan daerah secara sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan serta memanfaatkan IPTEK olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Adanya semangat otonomi daerah (pengembangan olahraga sesuai dengan potensi dan karakter daerah) merupakan kekuatan bagi daerah untuk membangun dunia olahraga yang sesuai dengan potensi dan karakter daerah tersebut. Terselenggaranya event-event yang bertaraf Nasional bahkan Internasional merupakan bukti kepedulian Pemerintah terhadap perkembangan keolahragaan di Sumatera Selatan, yang paling fenomenal adalah terlaksananya gelaran ASIAN GAMES tahun 2018 di Provinsi Sumatera Selatan.

Langkah strategis untuk mensukseskan kepercayaan yang diberikan kepada Sumatera Selatan adalah melakukan peningkatan fasilitas pendukung ASIAN GAMES 2018 di Sumatera Selatan baik peningkatan fasilitas di dalam Kawasan Jakabaring Sport City (JSC) maupun peningkatan infrastruktur aksesibilitas/konektivitas menuju kawasan Jakabaring Sport City.

**Tabel 2.186.**
Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Asian Games 2018

| No. | Infrastruktur | Perkembangan Kegiatan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| A | **Olympic Sports** | | |
| | 1 Shooting – Shooting Range | - DED Selesai.<br>- Kegiatan fisik tahun 2017 (pembangunan sheet and trap, perpanjangan range; pingkatan final hall) | APBD 2017 |
| | 2 Rowing – Rowing Lake | - DED selesai<br>- Pekerjaan Fisik : Perpanjangan lintasan dayung (progress 100 %) | - APBN 2016 - 2017<br>- APBD 2016 – 2017 |
| | 3 Canoe/Kayak -- Rowing Lake | - DED selesai<br>- Pembangunan infrastruktur pendukung venue dayung : Pembangunan tribun, rumah dayung, menara start, menara kontrol, menara finish, bangunan penunjang lainnya, area parkir | - APBN 2016 - 2017<br>- APBD 2016 – 2017 |
| | 4 Beach Volleyball – Beach Volleyball | - DED Selesai<br>- Kegiatan Fisik 2017 : perluasan lapangan, penambahan pasir, pembuatan tribun, bangunan penunjang, lampu | APBD 2017 |
| | 5 Football – Gelora Sriwijaya | - Proses DED<br>- Kegiatan Fisik 2017 : peningkatan kapasitas penonton, penambahan bangku penonton, perbaikan lapangan, peningkatan utilitas, peningkatan lampu arena | APBD 2017 |

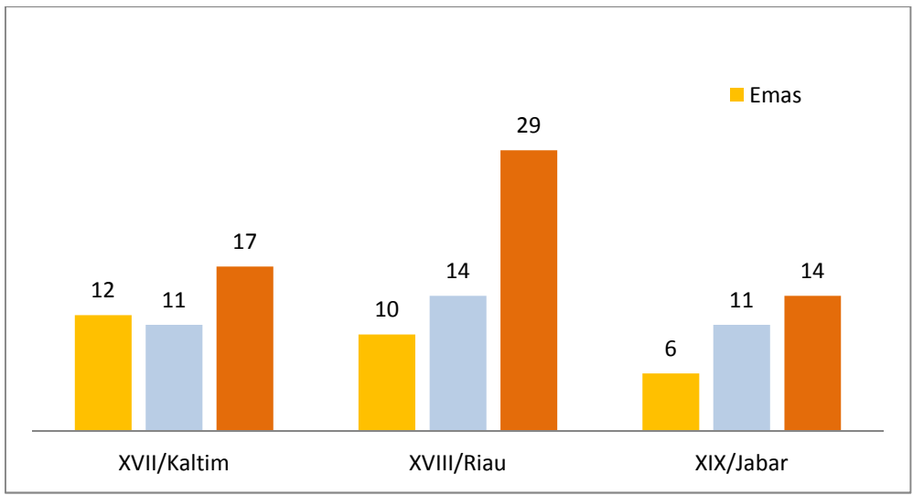
| No. | Infrastruktur | Perkembangan Kegiatan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | 6 Tennis – Lapangan Tennis PT. BA | - Kegiatan fisik 2017: penambahan 8 unit lapangan baru; pembangunan tribun dan pagar; rehabilitasi lapangan tennis eksisting | CSR PTBA |
| | 7 Triathlon -- Rowing Lake Sides | - Kegiatan fisik : Jalan lintasan triathlon;<br>- Jalan jalur sepeda, dermaga ponton, | APBD 2016 dan 2017 |
| | | | |
| B | **Non-Olympic Sports** | | |
| | 1 Bowling -- Bowling Center | - Pekerjaan pembangunan fisik: drencanakan 10 bulan (Sept 2016 – Juni 2017)<br>- Pengadaaan data instalasi peralatan (Januari – Agustus 2017) | CSR PT Sinarmas |
| | 2 Sepak takraw -- Ranau Sport Hall | - Kegiatan fisik 2017 | APBD 2017 |
| | 3 Sport Climbing -- Sc Complek | Pekerjaan fisik 2017 : peningkatan arena panjat tebing; perbaikan ruangan latihan indoor; pembuatan tribun, bangunan penunjang, peningkatan menikal dan eletrikal | APBD 2017 |
| | 4 Soft Tennis -- Convention Hall | Convention Hall<br>Penimbunan APBD 2016<br>Pembangunan Gedung : CSR PT BA<br>(Lelang manejemen Konstruksi (Juli 2016); lelang fisik (Oktober 2016); Bangunan direncanakan selesai 2017 | CSR PT, BA |
| | | | |
| C | **Non-Competition Venues** | | |
| | 1 Athletes' Village/AV (Tower A-B-C) | DED Rehabilitasi Sudah Siap | Bangunan Sea Games 2011 |
| | 2 AV (Rusunawa D-E-F) | Fisik Selesai 100% | Kementerian PUPR |
| | 3 AV (Rusunawa G-H) | Proses Kontrak Fisik | Kementerian PUPR |
| | 4 AV (Rusunami I-II-III-IV-V-VI) | Proses kegiatan fisik : selesai Desember 2017 | Perumnas |
| | 5 Palembang SPC (Main Media Center) | - Proses DED Rehabilitasi<br>- Kegiatan fisik 2017 | APBD 2017 |
| | 6 Bumi Sriwijaya Stadium (Football) | Proses penyusunan DED | |
| | 7 Rehab Stadion Atletik | Kegiatan fisik 2017 | APBD 2017 |
| | 9 Perbaikan Kolam Pemanasan Renang / Aquatic Stadium | Kegiatan fisik 2017 | APBD 2017 |

| No. | Infrastruktur | Perkembangan Kegiatan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | | |
| D | **Supporting: JSC** | | |
| | 1 Water Supply (Potable Water-AV) | Proses Penyusunan DED | APBN |
| | 2 Waste Water Treatment | Proses Penyusunan DED | APBN |
| | 3 Solid Waste Treatment (TPST 4R) | Proses Penyusunan DED | APBN |
| | 4 Drainage | Proses Penyusunan DED | APBN |
| | 5 Electricity (JSC) | Proses Penyusunan DED | PLN |

*Sumber:*

Capaian hasil pembinaan Olahraga diketahui bahwa hasil yang dicapai oleh Kontingen Sumsel pada PON XVII 2008 di Kalimantan Timur, PON XVIII 2012 di Riau, PON XIX 2016 di Bandung kurang memuaskan. Namun, yang menjadi kebanggaan kita atlet yang memperkuat Sumsel adalah atlet Putra Daerah. Untuk itu, mengantisipasi PON XX 2020 di Papua, Sumsel akan mengoptimalkan pembinaan pada atlet muda berpotensi melalui pembinaan empat tahunan. Berikut perolehan Medali Sumsel pada PON disajikan pada grafik berikut.

**Gambar 2.62.**
Jumlah Perolehan Medali Sumsel pada PON




*Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan*

Perkembangan keolahragaan selama tahun 2014 – 2018 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.187.**
Perkembangan Keolahragaan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018

| No. | Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Jumlah Pelatih yang Bersertifikat | - | - | - | - | 25 | 550 |
| 2 | Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga | 93 | 133 | 173 | - | 98 | 42 |
| 3 | Jumlah Pembinaan Atlet Muda | 78 | 79 | 731 | 94 | 298 | 232 |
| 4 | Jumlah Atlet Berprestasi | 28 | 36 | 38 | 50 | 50 | 30 |
| 5 | Jumlah Prestasi Olahraga | 16 | 18 | 22 | 44 | 39 | 10 |
| 6 | Jumlah Medali Atlet Muda Sumatera Selatan | | | | | 29 | 22 |
| 7 | Peringkat Sumatera Selatan pada PON | - | - | - | - | 21 | - |

*Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan***.**

### 2.3.2.14. Statistik

#### 2.3.2.14.1.Ketersediaan Buku Kabupaten/Kota Dalam Angka dan PDRB Kabupaten/Kota

Perencanaan yang baik harus didukung oleh keberadaan data dan informasi. Untuk itulah keberadaan buku yang menginformasikan data-data terkait dengan pembangunan sangatlah dibutuhkan. Buku Kabupaten/kota dalam angka maupun buku PDRB di provinsi Sumatera sudah tersedia dengan sangat baik, baik berupa soft-file maupun dalam bentuk print-out. Buku-buku ini merupakan hasil kerjasama antara Bappeda dan Badan Pusat Statistik di masing-masing wilayah. Pada Tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik terkait dengan Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data Dan/Atau Informasi Pembangunan Daerah Menuju Sumatera Selatan Satu Data, sehingga tersedianya data dan informasi statistik untuk mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan satu data. Untuk data sektoral yang saat ini ada di masing-masing Perangkat Daerah juga belum terintegrasi sehingga sulit diakses untuk berbagai kebutuhan. Kedepan fungsi Forum Data dan dukungan semua pihak/ Perangkat Daerah sangat diperlukan.

**Tabel 2.188.**
Ketersediaan Buku Kabupaten/Kota Dalam Angka dan PDRB Kabupaten/Kota

| Jenis Buku | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Kabupaten/kota Dalam Angka | ada | ada | ada | ada | ada |
| PDRB Kabupaten/Kota | ada | ada | ada | ada | ada |

*Sumber: Bappeda Sumatera Selatan*

### 2.3.2.15. Persandian

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, layanan peningkatan kapsitas sumber daya manusia dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam infrastruktur peralatan persandian, proses penyandian (enkripsi dan dekripsi), penggantian/setting, penyimpanan, pengembalian/pemusnahan sistem sandi (kunci sandi), pengamanan aset/fasilitas/instalasi penting vital/kritis, pengamanan sinyal; layanan filtering konten negatif, dan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah untuk keamanan informasi maka diperlukan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang integrasi data dan keamanan informasi; peningkatan kafasitas SDM, supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data infromasi e-Government serta fungsi integrasi interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan, layanan pusar Application Programm Interface (API) provinsi. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum terintegrasi dengan baik, di mana rata-rata perangkat daerah sudah memiliki aplikasi dan server berbasis elektronik.

Terkait dengan *Cyber Crime*, Peraturan Presiden nomor 133 tahun 2017 dan Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Infomatika telah memberikan pelayanan persandian di tiap Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk pengamanan data dan infromasi, namun masih belum optimal dikarenakan masih banyak perangkat daerah yang belum menggunakan pelayanan persandian. Adapun jenis layanan persandian yang diberikan kepada perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan hingga akhir tahun 2018, meliputi JKS email sanapati (15 PD atau 30%), jamming (1 PD atau 2%), sterilisasi/kontra penginderaan (12 DP atau 24%), sertifikat elektronik (1 PD atau 2%), audit dan sertifikasi keamanan informasi (Indeks KAMI) (1 PD atau 2%), dan IT *Security Assessment* (belum ada perangkat daerah yang terlayani). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.189.**
Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang meggunakan Pelayanan Persandian

| No. | Jenis Layanan | Jumlah OPD | | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sudah | % | Belum | % | |
| 1 | JKS email sanapati | 15 | 30 | 35 | 70 | |
| 2 | Jamming | 1 | 2 | 49 | 98 | |
| 3 | Sterilisasi / kontra penginderaan | 12 | 24 | 38 | 76 | |
| 4 | Sertifikat elektronik | 1 | 2 | 49 | 98 | Dinas PMPTSP Prov.Sumsel masih tahap proses sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital di BSrE |
| 5 | Audit dan Sertifikasi keamanan informasi (Indeks KAMI) | 1 | 2 | 49 | 98 | |
| 6 | IT *Security Assessment* | 0 | 0 | 50 | 100 | BSSN |

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel, 2018*

### 2.3.2.16. Kebudayaan

Seperti sebagian besar kebudayaan provinsi lain di Pulau Sumatera, kebudayaan provinsi Sumatera Selatan sebagian besar terpengaruh oleh budaya Melayu. Selain itu, ada beberapa kebudayaan yang terpengaruh oleh Islam, dan ada pula yang dipengaruhi oleh kebesaran dari kerajaan Sriwijaya. Kekayaan budaya Sumatera Selatan meliputi rumah adat, pakaian adat, berbagai jenis tarian, juga makanan khas dari daerah ini.Tiga budaya Sumatera Selatan (Sumsel) masuk dalam daftar 150 warisan budaya tak benda Indonesia 2017. Tiga karya budaya Sumsel yang masuk dalam daftar warisan tak benda tersebut adalah Rumah Basemah, Lukisan Laker dan Tari Penguton.

#### 2.3.2.16.1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Festival dan seni budaya yang diselenggarakan pemerintah merupakan salah satu cara mempromosikan atau memperkenalkan destinasi pariwisata di Sumatera Selatan yang berujung untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat. Jadi sebuah festival dan *event* akan membangkitkan kepariwisataan sehingga para wisatawan akan lebih banyak berkunjung. Salah satu festival yang setiap tahun rutin diselenggarakan oleh Pemprov Sumsel adalah Festival Sriwijaya. Tahun 2017 Festival Sriwijaya dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 27 Agustus di Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang.

Festival Sriwijaya diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mengangkat kembali nilai-nilai tradisional dalam bingkai kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Festival ini merupakan wadah bagi semua pekerja seni yang berasal dari 17 kabupaten dan kota yang berada di Sumatera Selatan. Tujuan utama dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk memberikan apresiasi terhadap usaha maksimal dan berkesinambungan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. Festival Sriwijaya tahun 2017 mengangkat tema

perniagaan maritim dengan tujuan menjadikan Sumatera Selatan sebagai prioritas destinasi pariwisata nasional. Pada acara ini ada yang istimewa dengan mempromosikan Asian Games XVIII. Salah satu promosi yang dilakukan adalah peluncuran *count down* atau hitung mundur satu tahun menjelang Asian Games.

**Tabel 2.190.**
Jumlah Festival Seni dan Budaya yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya | 11 | 10 | 11 | 19 | 2 | 1 |

*Sumber : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Prov. Sumsel*

### 2.3.2.17. Perpustakaan

#### 2.3.2.17.1. Jumlah Perpustakaan

Walaupun perkembangan teknologi informasi kian hari semakin meluas, keberadaan perpustakaan di suatu daerah sangat berdampak pada perkembangan minat baca masyarakat. Hasil survey indeks kegemaran membaca yang dirilis oleh Perpusnas pada tahun 2017 menunjukan tingkat budaya baca masyarakat Indonesia berada di kategori rendah dengan nilai 36,48%, kondisi ini menempatkan literasi Indonesia pada peringkat 60 dari 61 negara. Sedangkan nilai tingkat budaya baca masyarakat Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 sebesar 44,81% juga termasuk pada kategori rendah. Dengan demikian, Provinsi Sumatera Selatan tentu membutuhkan generasi yang cinta akan literasi. Sayangnya, hal tersebut tidak sejalan dengan jumlah perpustakaan yang ada saat ini. Masih kurangnya perpustakaan serta aksesnya menjadi salah satu faktor kurangnya minat baca masyarakat. Rendahnya minat baca atau literasi akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga perlu untuk menumbuh kembangkan minat baca masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan diantaranya pengadaan perpustakaan keliling, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus, Perpustakaan desa/kelurahan dan taman baca masyarakat. Semua itu diharapkan bisa mengajak masyarakat agar mau mencintai kegiatan literasi. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan dapat menciptakan generasi penerus yang hebat dan meningkatkan minat baca masyarakat. Sebab, rendahnya minat baca akan berdampak pada tingginya angka kebodohan dan kemiskinan.

**Tabel 2.191.**
Jumlah Perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| Jenis Perpustakaan | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Perpustakaan Umum | 709 | 840 | 1.009 | 1.214 | 1.441 | 1.442 |
| Perpustakaan Sekolah | 2.438 | 2.924 | 3.512 | 9.014 | 9.014 | 9.233 |
| Perpustakaan Peruguruan Tinggi | 70 | 84 | 101 | 121 | 121 | 128 |
| Perpustakaan Khusus | 96 | 118 | 141 | 765 | 765 | 780 |
| Perpustakaan Digital/Online | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 |

*Sumber : Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup bagus ditandai dengan peningkatan pelayanan dari tahun ke tahun seperti buku-buku baru yang jumlahnya semakin banyak dan para pegawai yang semakin ramah dalam pelayanan.

Dari sisi teknologi informasi, Perpustakaan Daerah telah menggunakan sistem terkomputerisasi untuk melayani aktivitas peminjaman dan pengembalian buku dengan sistem barcode. Jadi setiap anggota, khususnya anggota baru, saat ini dibekali dengan kartu online dengan bentuk seperti kartu ATM dengan ID dan password sebagai keanggotaannya. Para pengguna kartu online tinggal menggesekkan saja pada alat yang ada untuk masuk ke perpustakaan dan melakukan transaksi peminjaman dan atau pengembalian buku. Perpustakaan Daerah Sumsel juga menyediakan fasilitas "*Free Hotspot Area: no limit, no register and no cash*" yang menjadi salah satu alasan bagi banyak pengunjung yang datang ke Perpustakaan.

**Tabel 2.192.**
Jumlah Perpustakaan yang belum sesuai dengan Standar Perpustakaan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017

| NO | JENIS PERPUSTAKAAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Perpustakaan Umum | 390 | 462 | 555 | 684 | 684 |
| 2 | Perpustakaan Sekolah | 1341 | 1608 | 1935 | 4958 | 4958 |
| 3 | Perpustakaan Perguruan Tinggi | 39 | 46 | 56 | 67 | 67 |
| 4 | Perpustakaan Khusus | 53 | 65 | 78 | 529 | 529 |
| **TOTAL** | | **1823** | **2181** | **2624** | **6238** | **6238** |

*Sumber : Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.2.17.2. Koleksi Buku Perpustakaan Daerah

Tahun 2018 total buku yang dimiliki Perpustakaan Daerah Sumsel sebanyak 261.074 judul dan 828.485 eksemplar yang terdiri dari buku bahasa Indonesia dan bahasa asing.

**Tabel 2.193.**
Jumlah Buku Koleksi Umum dan Referensi di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 2015-2018

| Tahun | s.d 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bahasa Indonesia | Bahasa Asing | Bahasa Indonesia | Bahasa Asing | Bahasa Indonesia | Bahasa Asing | Bahasa Indonesia | Bahasa Asing | |
| Jumlah Judul Buku | 226.780 | 31.030 | 1.641 | 1.087 | 53 | na | 483 | na | 261.074 |
| Jumlah Eksemplar | 718.078 | 83.127 | 21.879 | 3.261 | 265 | na | 1.875 | na | 828.485 |

*Sumber : Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Secara umum, Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil menurunkan angka tuna aksara. Namun, penurunan angka tersebut belum menjadikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai provinsi yang mempunyai indeks literasi tinggi. Untuk meningkatkan hal tersebut, sudah banyak program dilakukan antara lain mengalokasikan dana hibah buku ke perpustakaan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya, perpustakaan komunitas dan mobil perpustakaan keliling. Selain itu, perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Selatan juga mengembangkan perpustakaan berbasis internet yang dapat diakses oleh pengunjung sesuai kebutuhannya. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan tidak berhenti begitu saja tapi akan diikuti dengan kegiatan-kegiatan *real* secara simultan dan terus-menerus serta berkesinambungan oleh masing-masing keluarga, satuan pendidikan dan seluruh komponen masyarakat sampai dengan masyarakat desa melalui perpustakaan desa/kelurahan yang berbasis internet sesuai kebutuhannya (inklusi) sehingga dapat meningkatkan minat baca masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perpustakaan sebagai jendela informasi.

**Tabel 2.194.**
Data Ketersediaan Buku di Perpustakaan Daerah, Sekolah dan Universitas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| Perpustakaan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Perpustakaan Prov | 316,716 | 317,434 | 801,205 | 826,345 | 826,610 | 828,485 |
| Bacaan Masyarakat | 38,395 | 44,920 | 74,704 | 120,238 | 144,447 | 152,447 |
| Perpustakaan Umum Kab/Kota | 318,064 | 349,520 | 383,826 | 421,005 | 451,231 | 460,564 |

| Perpustakaan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perpustakaan Kecamatan | 300,020 | 358,512 | 453,490 | 599,192 | 773,140 | 780,170 |
| Taman Kanak-Kanak | 756,736 | 926,138 | 1,263,456 | 1,691,374 | 1,900,470 | 1,900,590 |
| SD | 1,365,672 | 2,829,282 | 3,569,550 | 12,855,392 | 13,841,872 | 13,841,992 |
| SLTP | 721,264 | 918,262 | 1,203,536 | 3,449,563 | 3,876,015 | 3,876,135 |
| SLTA | 493,652 | 628,367 | 423,472 | 2,155,261 | 2,421,705 | 2,421,825 |
| Perguruan Tinggi | 1,129,300 | 1,523,256 | 2,033,534 | 2,557,214 | 2,678,214 | 2,678,334 |
| **Total Ketersediaan Buku** | **5,439,819** | **7,895,691** | **10,206,773** | **24,675,584** | **26,913,704** | **26,940,542** |
| **Jumlah Penduduk** | **7,975,149** | **8,049,797** | **8,090,956** | **8,146,207** | **8,152,528** | **8.217.551** |
| **Ketersediaan buku terhadap penduduk** | **0,68** | **0,98** | **1,26** | **3,03** | **3,30** | **3,28** |

*Sumber : Dinas Perpusakaan Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ketersedian buku terhadap jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 sebesar 0,68 dan belum memenuhi standar satu orang penduduk tersedia 2 buku. Namun pada tahun 2018 ketersediaan buku terhadap jumlah penduduk telah memenuhi standar yaitu sebesar 3,28, hal ini menunjukan bahwa pada tahun 2018 telah tersedia 3 buku untuk setiap satu orang penduduk di Provinsi Sumatera Selatan.

### 2.3.2.17.3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Perpustakaan ideal adalah perpustakaan yang mampu memberdayakan masyarakat. Perpustakaan sebagai jendela informasi dapat menjadi pusat kegiatan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas membaca, belajar, seni, budaya, dan keterampilan. Keberadaan perpustakaan tidak terlepas dari pengunjung perpustakaan. Ketersediaan bahan pustaka dalam berbagai media yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka atau masyarakat juga mempengaruhi kunjungan perpustakaan. Oleh karena itu data pengunjung perpustakaan dapat digunakan untuk melihat seberapa besar daya tarik perpustakaan dalam memberikan pelayanan. Dengan beragamnya kegiatan yang ada di perpustakaan dapat meningkatkan jumlah kunjungan pemustaka yang secara tidak langsung dapat meningkatkan minat baca masyarakat.

**Tabel 2.195.**
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Pengunjung | 121.168 | 165.000 | 107.052 | 195.373 | 201.051 | 235.590 |

*Sumber : Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Dari tabel di atas, secara umum jumlah pengunjung perpustakaan meningkat dari tahun ke tahunnya. Lonjakan jumlah pengunjung yang terbesar pada tahun 2016 yaitu 195.373 orang pengunjung dari 107.052 orang pada tahun sebelumnya. Ini menunjukan bahwa minat baca masyarakat yang semakin besar. Oleh karena itu daya tarik perpustakaan dalam memberikan layanan juga harus meningkat. Pada tahun 2018 jumlah pengunjung perpustakaan yaitu sebanyak 235.590 orang dengan rata –rata pengunjung perpustakaan setiap tahunnya adalah sebanyak 170.872 orang.

### 2.3.2.17.4. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai

Dalam mewujudkan bangsa yang mempunyai literasi yang tinggi, peran perpustakaan sangat perlukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Selain koleksi bahan bacaaan, pustakawan juga merupakan ujung tombak keberhasilan suatu perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat.

**Tabel 2.196.**
Jumlah Pustakawan dan tenaga teknis pengelola perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2017

| No | Sumber Daya Manusia Perpustakaan | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pustakawan | | | |
| | Provinsi | 35 | 35 | 32 |
| | Kab/kota | 6 | 6 | 15 |
| | Sekolah | 5 | 5 | 3 |
| | Perguruan Tinggi | 29 | 27 | 28 |
| 2. | Tenaga Teknis | | | |
| | Provinsi | 53 | 53 | 56 |
| | Kab/kota | 45 | 50 | 65 |
| | Sekolah | 410 | 420 | 430 |
| | Perguruan Tinggi | 45 | 55 | 59 |

*Sumber : Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan*

Dari tabel diatas jumlah pustakawan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 yaitu berjumlah 78 orang dan jumlah tenaga teknis perpustakaan yaitu 610 orang. Jumlah pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan ini meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yaitu pustakawan sebanayak 73 orang dan tenaga teknis perpustakaan sebanyak 578 orang. Tetapi jumlah pustakawan ini masih minim, masih banyak perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan yang belum memiliki tenaga pustakawan. Di mana idealnya satu perpustakaan harus memiliki minimal 1 (satu) orang pustakawan, sesuai standar nasional perpustakaan. Sehingga untuk mencapai ideal, pustakawan yang dibutuhkan sebanyak 11.350 orang untuk 11.350 perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan yang ada saat ini. Seorang pustakawan yang ideal adalah yang mampu

berperan sebagai agen informasi, ilmuwan, dan pendidik. Sebagai ilmuwan, pustakawan harus mampu memberdayakan informasi bukan sekadar melayankan informasi. Seiring dengan meningkatnya jumlah pustakawan, ketersediaan tim penilai pustakawan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pustakawan. Sampai dengan tahun 2018 jumlah tim penilai pustakawan yang memiliki sertifikat di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 12 orang.

**Tabel 2.197.**
Tim Penilai Perpustakaan yang memiliki Sertifikat
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

| No | Instansi | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 1. | Dinas perpustakaan | 7 | 7 |
| 2. | Universitas Sriwijaya (Unsri) | 5 | 5 |

*Sumber : Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

### 2.3.2.17.5. Nilai Tingkat Budaya Baca Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan

**Tabel 2.198.**
Nilai Tingkat Budaya Baca Masyarakat
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2018

| Indikator | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Nilai Tingkat Budaya Baca | 38,38 | 44,81 |

*Sumber : Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan*

Dari tabel di atas nilai tingkat budaya baca masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 sebesar 38,38 persen dan naik pada tahun 2018 menjadi 44,81 persen, namun nilai ini masih termasuk dalam kategori rendah.

### 2.3.2.18. Kearsipan

Di Bidang Kearsipan sampai tahun 2018, telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

a. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah.
   Kegiatannya antara lain melaksanakan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah yaitu penelusuran arsip sejarah dan arsip statis (arsip yang bernilai guna tinggi) baik dalam Provinsi maupun

Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Pada tahun 2018 arsip statis yang memiliki nilai sejarah dan arsip statis yang terdata dan tertata dengan baik pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1.099 berkas.

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran Gas $CO^2$ dan melakukan penyemprotan (Fumigasi) supaya arsip-arsip yang disimpan di dalam depo-depo penyimpanan dapat terpelihara dari bahaya kebakaran dan gangguan seperti hama, jamur, rayap, serangga, lipas dan lain sebagainya.

**Tabel 2.199.**
Jumlah Arsip Aktif dan Arsip Statis Provinsi Sumsel
Tahun 2013-2018

| KEARSIPAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsip Aktif | 7.121 | 10.402 | 19.439 | 21.961 | 24.743 | 24.743 |
| Arsip Statis | 7.573 | 8.790 | 8.893 | 9.283 | 10.373 | 10.373 |

*Sumber : Dinas Kearsipan, 2019*

Sampai dengan tahun 2018, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku semakin meningkat menjadi 100% dari tahun 2013 sebanyak 93%.

Pilar Kearsipan meliputi 4 (empat) Pilar, yaitu ; *(1)* Tata naskah Dinas, *(2)* Sistem Klasifikasi Arsip Dinamis, *(3)* Sistem Keamanan Akses Arsip, *(4)* Jadwal Retensi Arsip yang terdiri dari Jadwal Retensi Arsip Substantif, Tata Cara Penyusutan Arsip, Jadwal Retensi Arsip Keuangan, Arsip Kepegawaian, Arsip Non Keuangan serta Arsip Non Kepegawaian.

Pilar Tata Naskah Dinas di Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2010, sudah dilaksanakan dan diselenggarakan di seluruh OPD lingkup pemerintah provinsi. Pilar Sistem Klasifikasi Arsip Dinamis saat ini masih berupa draft dan sedang dalam proses penetapan Peraturan Gubernur.

Pilar Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Tata Cara Penyusutan Arsip sudah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2017, sedangkan untuk Jadwal Retensi Arsip Keuangan, Kepegawaian, Non Keuangan dan Non Kepegawaian telah disusun Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2013 namun belum dilasanakan dan masih dalam tahap pembinaaan dan sosialisasi.

### 2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

#### 2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Total produksi perikanan tangkap dan budidaya pada tahun 2016 sebesar 177.161,00 ton naik dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 92.217,80 ton.

Peningkatan dan pencapaian sasaran produksi perikanan didukung oleh peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya. Peningkatan produksi tersebut dipengaruhi oleh banyaknya bantuan, pembinaan dan pelatihan yang diterima oleh pelaku usaha baik nelayan, pembudidaya ikan dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) selama tahun 2015. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung operasional produksi.

**Tabel 2.200.**
Produksi Ikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| **TAHUN** | | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Angka Provinsi** | | **530.718,30** | **588.762,90** | **676.017,40** | **605.189,30** | **618.600,00** | **286.520,76** |
| No. | Kab/kota | | | | | | |
| 1 | OKU | 26.613,90 | 33.163,50 | 30.238,40 | 28.189,70 | 27.451,00 | 322.6 |
| 2 | Banyuasin | 84.403,34 | 81.760,10 | 92.791,25 | 93.147,68 | 101.673,44 | 95.181,56 |
| 3 | Prabumulih | 12.343,30 | 5.188,60 | 16.098,60 | 12.184,40 | 16.258,65 | 3.143,10 |
| 4 | Palembang | 32.745,50 | 36.543,80 | 37.022,90 | 29.437,30 | 35.163,36 | 2.068,20 |
| 5 | Muara enim | 15.758,70 | 12.643,60 | 14.134,30 | 13.113,21 | 16.289,43 | 1.533,80 |
| 6 | Pali | - | 1.451,60 | 8.116,70 | 5.775,80 | 600,63 | 3.595,80 |
| 7 | Lahat | 25.165,70 | 28.962,30 | 20.379,05 | 18.135,22 | 21.673,89 | 8.552,40 |
| 8 | Pagar alam | 20.924,40 | 17.009,50 | 15.680,50 | 11.446,32 | 18.898,14 | 7.952,40 |
| 9 | Empat lawang | 11.463,10 | 10.821,90 | 9.310,60 | 8.069,50 | 10.130,09 | 245,80 |
| 10 | Lubuk linggau | 23.917,60 | 32.887,00 | 42.624,10 | 41.545,10 | 38.632,39 | 15.514,90 |
| 11 | Mura | 52.983,60 | 51.784,70 | 59.522,60 | 61.554,21 | 50.626,49 | 18.993,20 |
| 12 | Muratara | 0,00 | 2.795,40 | 8.158,30 | 5.946,87 | 5.250,77 | 7.469,60 |
| 13 | Muba | 34.523,00 | 40.384,50 | 47.761,50 | 43.857,21 | 40.560,68 | 5.267,80 |
| 14 | Ogan ilir | 29.745,80 | 39.147,80 | 36.022,90 | 22.557,21 | 28.164,26 | 2.068,20 |
| 15 | OKI | 91.150,10 | 102.158,80 | 116.660,80 | 100.453,03 | 107.573,24 | 84.620,90 |
| 16 | OKUT | 35.590,30 | 43.212,40 | 85.021,20 | 78.896,96 | 72.413,22 | 29.346,10 |
| 17 | OKUS | 33.389,96 | 48.847,40 | 36.473,70 | 30.879,58 | 27.240,32 | 967,00 |

*Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Sedangkan konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2017 sebesar 618,600. kg/kapita/tahun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 177.576.626,5kg/kapita/tahun.

**Tabel 2.201.**
Konsumsi Ikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| **TAHUN** | | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angka Provinsi | | **37,89** | **38,98** | **39,02** | **39,63** | **40,04** | **41,00** |
| No. | KABUPATEN/KOTA | | | | | | |
| 1 | OKU | 37,88 | 38,21 | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 |
| 2 | BANYUASIN | 39,22 | 40,90 | 39,52 | 40,57 | 40,57 | 41,95 |
| 3 | PRABUMULIH | 37,14 | 38,14 | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 37,99 |
| 4 | PALEMBANG | 38,00 | 39,50 | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 41,25 |

| TAHUN | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angka Provinsi | | **37,89** | **38,98** | **39,02** | **39,63** | **40,04** | **41,00** |
| No. | KABUPATEN/KOTA | | | | | | |
| 5 | MUARA ENIM | 37,88 | 39,88 | 40,88 | 41,80 | 41,80 | 41,80 |
| 6 | PALI | 37,56 | 38,86 | 37,56 | 37,97 | 37,97 | 38,00 |
| 7 | LAHAT | 37,56 | 38,56 | 38,56 | 38,89 | 38,89 | 38,89 |
| 8 | PAGAR ALAM | 38,55 | 39,45 | 41,45 | 41,96 | 41,96 | 41,96 |
| 9 | EMPAT LAWANG | 37,40 | 37,96 | 37,98 | 37,98 | 37,98 | 38,95 |
| 10 | LUBUK LINGGAU | 38,55 | 38,99 | 38,98 | 39,55 | 39,55 | 40,98 |
| 11 | MURA | 37,12 | 37,95 | 37,97 | 38,46 | 38,98 | 39,56 |
| 12 | MURATARA | 38,98 | 39,69 | 39,68 | 40,89 | 40,89 | 40,89 |
| 13 | MUBA | 38,64 | 40,94 | 39,94 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
| 14 | OGAN ILIR | 36,33 | 37,33 | 37,94 | 38,56 | 39,91 | 40,66 |
| 15 | OKI | 38,00 | 38,90 | 39,87 | 40,21 | 40,21 | 41,22 |
| 16 | OKUT | 37,77 | 38,77 | 37,44 | 38,99 | 40,99 | 40,99 |
| 17 | OKUS | 37,55 | 38,55 | 38,55 | 39,97 | 39,97 | 40,22 |

*Sumber : RKPD Sumsel dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel, 2018*

Dalam pengelolaan wilayah pesisir masih mengalami permasalahan dikarenakan RZWP3K masih dalam proses penetapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini penting sebagai pedoman di dalam pengelolaan wilayah pesisir di dalam pengawasan pemanfaatan ruang zonasi di wilayah pesisir. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan percepatan penyelesaian Perda RZWP3K.

Kawasan konservasi di perairan laut Sumatera Selatan dicadangkan seluas ± 45.304 Ha. Kondisi IUU Fishing di Sumatera Selatan dan kegiatan di laut yang merusak sumberdaya adalah adanya penangkapan ikan yang mempergunakan alat tangkap trawl yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mengatasi hal ini akan dilaksanakan program penggantian alat tangkap nelayan yg merusak lingkungan (trawl mini) dengan alat tangkap yang ramah lingkungan.

### 2.3.3.2. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang sangat menjanjikan untuk pendapatan daerah. Kunjungan pariwisata di Sumatera Selatan salah satunya dipengaruhi oleh penyelengaraan acara internasional seperti SEA Games ke-26 yang diadakan di Palembang dan ASIAN Games yang diselenggarakan pada tahun 2018. Pada saat diadakan Sea Games ke-26 terjadi lonjakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 42.953 orang. Sepanjang tahun 2013,

wisatawan mancanegara yang berkunjung di Sumatera Selatan turun menjadi 30.117 orang dan pada tahun 2014 kunjungan wisatawan mencapai 32.365 orang. Pada tahun 2018 pada saat diadakan event Olahraga Asian Games jumlah kunjungan wisatawan mancanegara naik menjadi 70.917 orang. Total kujungan wisatawan mancanegara dan nusantara pada tahun 2018 mencapai 8.292.781 orang atau meningkat sekiter 9,96 persen bila dibandingkan tahun 2017. Lonjakan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Sumatera Selatan masih tergantung dari event-event olahraga bertaraf internasional yang diadakan di Jakabaring Sport City. Perkembangan sektor kepariwisataan di Sumatera Selatan dapat dilihat dari pembangunan hotel-hotel berbintang di Palembang, sebagai prasarana pendukung tumbuhnya sektor ini.

**Tabel 2.202.**
Data Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Sumatera Selatan

| No. | Tahun Kunjungan | Wisman (Wisatawan Mancanegara) | Wisnus (Wisatawan Nusantara) | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 31.408 | 3.243.313 | 3.274.721 |
| 2 | 2014 | 32365 | 3.406.385 | 3.438.750 |
| 3 | 2015 | 48.321 | 5.704.959 | 5.753.280 |
| 4 | 2016 | 64.257 | 7.118.516 | 7.182.773 |
| 5 | 2017 | 67.470 | 7.474.444 | 7.541.914 |
| 6 | 2018 | 70.917 | 8.221.864 | 8.292.781 |

*Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2019*

### 2.3.3.3. Pertanian

#### 2.3.3.3.1 Produktivitas Bahan Pangan

Produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran (output) dengan masukan (input). Produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumberdaya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Produktivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu usaha.Semakin tinggi perbandingannya berarti semakin tinggi produk yang dihasilkan. Sedangkan pengertian bahan pangan adalah bahan yang memungkinkan manusia tumbuh dan mampu memelihara tubuhnya serta berkembang biak. Manusia memerlukan bahan pangan untuk menunjang kelangsungan kehidupannya, misalnya untuk membangun sel-sel tubuh dan menjaga agar tubuh sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya.

**Tabel 2.203.**
Produktivitas Tanaman Padi

| **Komoditas** | **: Padi** | | | | **Ku/Ha** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kabupaten/Kota** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **ASEM 2018** |
| Ogan Komering Ulu | 36,10 | 42,40 | 41,49 | 54,23 | 44,26 | 39,46 |
| Ogan Komering Ilir | 43,25 | 43,21 | 45,00 | 43,28 | 49,54 | 49,75 |
| Muaraenim | 40,22 | 35,79 | 40,82 | 43,96 | 46,44 | 37,73 |
| Lahat | 47,54 | 43,17 | 48,39 | 50,12 | 47,28 | 52,92 |
| Musi Rawas | 47,20 | 50,34 | 53,56 | 56,74 | 59,22 | 54,67 |
| Musi Banyuasin | 40,34 | 41,53 | 47,33 | 39,99 | 47,15 | 45,20 |
| Banyuasin | 45,54 | 43,78 | 48,60 | 50,31 | 50,96 | 49,43 |
| OKU Selatan | 44,08 | 48,14 | 49,08 | 49,06 | 43,62 | 40,80 |
| OKU Timur | 54,48 | 54,18 | 60,31 | 66,31 | 53,11 | 64,74 |
| Ogan Ilir | 47,45 | 44,54 | 37,91 | 43,69 | 44,24 | 43,09 |
| Empat Lawang | 43,24 | 45,26 | 42,84 | 42,62 | 42,69 | 40,88 |
| PALI | - | 24,45 | 29,23 | 23,67 | 30,38 | 36,72 |
| MURATARA | - | | 33,20 | 39,48 | 31,16 | 36,77 |
| Palembang | 47,98 | 32,65 | 44,57 | 35,45 | 38,09 | 42,16 |
| Prabumulih | 24,73 | 37,24 | 27,89 | 34,39 | 42,39 | 32,21 |
| Pagar Alam | 47,23 | 46,73 | 49,51 | 46,92 | 52,69 | 54,06 |
| Lubuk Linggau | 44,97 | 45,85 | 45,98 | 48,63 | 44,83 | 44,26 |
| **JUMLAH** | **45,96** | **45,26** | **48,67** | **50,03** | **49,43** | **50,39** |

*Sumber : Dinas Pertanian dan TPH Prov. Sumsel*

**Tabel 2.204.**
Produktivitas Tanaman Jagung

| **Komoditas** | **: Jagung** | | | | **Ku/Ha** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kabupaten/Kota** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **ASEM 2018** |
| Ogan Komering Ulu | 36,24 | 72,49 | 81,97 | 55,19 | 61,99 | 85,25 |
| Ogan Komering Ilir | 38,00 | 38,01 | 38,27 | 55,41 | 52,24 | 54,07 |
| Muaraenim | 44,09 | 56,68 | 63,88 | 61,28 | 37,43 | 53,31 |
| Lahat | 37,59 | 65,03 | 63,54 | 53,83 | 77,05 | 54,02 |
| Musi Rawas | 38,10 | 60,85 | 77,51 | 74,49 | 84,87 | 68,20 |
| Musi Banyuasin | 27,96 | 72,15 | 66,84 | 70,29 | 67,37 | 59,48 |
| Banyuasin | 42,55 | 52,28 | 66,85 | 43,07 | 69,49 | 57,30 |
| OKU Selatan | 55,75 | 56,02 | 60,79 | 76,00 | 61,49 | 78,55 |
| OKU Timur | 68,32 | 70,97 | 57,23 | 75,80 | 66,49 | 60,61 |
| Ogan Ilir | 36,56 | 36,88 | 42,02 | 56,57 | 41,15 | 37,77 |
| Empat Lawang | 45,79 | 46,92 | 43,88 | 64,83 | 55,66 | 53,26 |
| PALI | - | 53,96 | 53,53 | 37,32 | 33,67 | 67,19 |
| MURATARA | - | | 51,52 | 71,08 | 57,65 | 62,50 |
| Palembang | 36,77 | 36,28 | 36,67 | 34,07 | 32,27 | 49,29 |
| Prabumulih | 23,69 | 29,00 | 24,74 | 43,48 | 62,27 | 79,86 |
| Pagar Alam | 40,62 | 67,19 | 87,44 | 57,19 | 52,58 | 55,01 |
| Lubuk Linggau | 63,24 | 61,14 | 69,00 | 68,33 | 73,41 | 100,26 |
| **JUMLAH** | **51,43** | **60,11** | **62,40** | **63,24** | **64,56** | **67,71** |

*Sumber : Dinas Pertanian dan TPH Prov. Sumsel*

**Tabel 2.205.**
Produktivitas Tanaman Kedelai

**Komoditas : Kedelai** **Ku/Ha**

| Kabupaten/Kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ASEM 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogan Komering Ulu | 13,40 | - | 15,77 | 13,00 | - | 14,88 |
| Ogan Komering Ilir | 15,13 | 24,27 | 20,38 | 18,91 | 17,61 | 43,38 |
| Muaraenim | 15,55 | 15,50 | 15,59 | 15,48 | 15,07 | 29,32 |
| Lahat | 17,53 | 18,07 | 18,23 | 15,17 | 15,37 | 36,67 |
| Musi Rawas | 15,81 | 19,11 | 18,42 | 19,00 | 20,37 | 49,75 |
| Musi Banyuasin | 14,75 | 14,95 | 13,58 | 21,96 | 13,53 | 22,23 |
| Banyuasin | 14,98 | 13,20 | 14,15 | 9,74 | 14,82 | 6,02 |
| OKU Selatan | 15,74 | 15,78 | 15,55 | 15,53 | - | - |
| OKU Timur | 9,92 | 11,62 | 8,05 | 10,50 | 7,88 | 29,71 |
| Ogan Ilir | 15,00 | 14,80 | 15,05 | 14,71 | - | - |
| Empat Lawang | 16,00 | 16,00 | 11,36 | 8,56 | 7,50 | 13,20 |
| PALI | - | - | 15,33 | 14,58 | - | 21,02 |
| MURATARA | - | - | 21,33 | 21,65 | 21,43 | 40,78 |
| Palembang | - | - | - | - | - | 15,00 |
| Prabumulih | - | - | - | 14,81 | - | - |
| Pagar Alam | - | - | 6,88 | 12,53 | 13,80 | 13,77 |
| Lubuk Linggau | 13,33 | 14,76 | 14,72 | 14,75 | 14,71 | 35,73 |
| **JUMLAH** | **14,42** | **17,34** | **15,09** | **15,44** | **17,49** | **11,72** |

*Sumber : Dinas Pertanian dan TPH Prov. Sumsel*

Produktivitas padi cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, pada tahun 2013 produktivitas padi sebesar 45,96 Ku/Ha namun menurun sebesar 0,70 Ku/Ha pada tahun 2014 menjadi 45,26 Ku/Ha, 6 kabupaten yang produktivitasnya di atas angka provinsi dan 9 Kabupaten di bawah angka provinsi dari 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Kabupaten yang di atas angka provinsi adalah Kabupaten OKU Timur, PagarAlam, Musi Rawas, Lahat, Palembang dan Ogan Ilir.

Bila dibandingkan dengan Provitas Nasional luar jawa tahun 2014 sebesar 46,21 Ku/Ha, provitas sumatera selatan tahun 2014 masih d bawah angka nasional sebesar 0,25 Ku/Ha.

Produktivitas padi Tahun 2015 sebesar 48,67 Ku/Ha mengalami peningkatan sebesar 3,41 Ku/Ha dari 45,26 Ku/Ha di tahun 2014, hal ini di karenakan sudah adanya program Upsus Pajale dimana kegiatan tersebut mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian dengan paket lengkap meskipun terjadi kekeringan hampir di semua kabupaten/Kota karena Dampak Perubahan Iklim. Beberapa kabupaten yang produktivitasnya di atas angka provinsi adalah Kabupaten OKU Timur, OKU Selatan, Musi Rawas dan Pagar Alam yang pengairannya menggunakan Irigasi.

Bila dibandingakan dengan provitas nasional luar jawa tahun 2015 sebesar 47,39 Ku/Ha provinsi sumatera selatan berada di atas angka nasional sebesar 1,28 Ku/Ha.

Produktivitas padi tahun 2016 sebesar 50,03 Ku/Ha meningkat sebesar 1,36 Ku/Ha dri 48,67 Ku/Ha di tahun 2015. Dipengaruhi oleh curah hujan yang cukup dan iklim yang relatif lebih baik dan di tambah dengan kegiatan Upsus

Pajale sehingga provitas meningkat cukup tinggi. Kabupaten yang produktivitasnya di atas angka provinsi

Bila dibandingkan dengan Provitas nasional luar jawa tahun 2016 sebesar 46,48 Ku/Ha, provitas sumatera selatan berada di atas angka nasional sebesar 3,55 Ku/Ha.

Pada Tahun 2017 terjadi penurunan produktivitas padi sebesar 0,60 Ku/Ha dari 50,03 Ku/Ha pada tahun 2016 menjadi 49,43 Ku/Ha pada tahun 2017, hal ini dipengaruhi oleh adanya serangan hama WBC di Kabupaen OKU Timur walaupun tingkat serangannya tidak terlalu luas, akan tetapi menyebabkan penurunan provitas yang cukup tinggi. Kabupaten dengan provitas di atas angka provinsi adalah kabupaten OKI, Lahat, Banyuasin, OKU Timur dan Pagaralam.

Pada tahun 2018 produktivitas padi meningkat sebesar 50,39 Ku/Ha (angka sementara 2018). Hal ini dipengaruhi oleh curah hujan yang cukup dan iklim yang relative lebih baik dan ditambah dengan dengan kegiatan Upsus Pajale sehingga provitas meningkat cukup tinggi. Kabupaten dengan produktivitas diatas angka provinsi adalah Musi Rawas, OKU Timur, Banyuasin dan Pagar Alam.

Bila dibandingkan dengan provitas nasional luar jawa tahun 2017 sebesar 47,02 Ku/Ha provitas sumatera selatan masih di atas angka nasional sebesar 2,41 Ku/Ha

Produktivitas jagung cenderung meningkat tahun demi tahun, Provitas sumatera selatan tahun 2014 sebesar 60,11 Ku/Ha meningkat sebesar 8,68 Ku/Ha bila dibandingkan dengan provitas tahun 2013 sebesar 51,43 ku/Ha. Kabupaten yang provitasnya di atas angka provinsi adalah kabupaten OKU sebesar 72,49 Ku/Ha.

Apabila dibandingkan dengan provitas nasional luar jawa tahun 2014 sebesar 47,11 Ku/Ha, provitas sumatera selatan sebesar 60,11 berada di atas angka nasional

Provitas jagung sumatera selatan tahun 2015 sebesar 62,40 Ku/Ha meningkat sebesar 2,29 Ku/Ha dari 60,11 Ku/Ha. Kabupaten yang provitasnya tertinggi yang berada di atas angka provinsi terjadi di Kota Pagaralam sebesar 87,44 Ku/Ha

Provitas nasional tahun 2015 sebesar 49,04 Ku/Ha, sumatera selatan masih diatas provitas nasional sebesar 62,40 Ku/Ha

Tahun 2016 provitas meningkat 0,84 Ku/Ha dari 62,30 Ku/Ha menjadi 63,24 ku/ha, kabupaten yang provitasnya tertinggi di kabupaten OKU Timur sebesar 75,80 Ku/Ha. Bila dibandingkan dengan provitas nasional sebesar 49,03 Ku/ha provinsi sumatera selatan masih di atas angka nasional.

Tahun 2017 provitas meningkat sebesar 1,32 Ku/Ha dari 63,24 Ku/Ha tahun 2016 menjadi 63,56 Ku/Ha tahun 2017. Kabupaten yang provitas tertinggi

terjadi di kabupaten Musi Rawas sebesar 84,87 Ku/Ha. Bila dibandingkan dengan provitas nasional sebesar 49,03 Ku/Ha provitas sumatera selatan masih di atas angka nasional

Tahun 2018 Provitas Jagung meningkat sebesar 3,15 Ku/Ha dari 64,56 Ku/Ha tahun 2017 menjadi 67,71 ku/Ha (Angka Sementara 2018). Kabupaten dengan angka tertinggi yaitu Lubuk Linggau sebesar 100,26 Ku/Ha.

Produktivitas kedelai cenderung fliktuatif tahun demi tahun, Provitas sumatera selatan tahun 2014 sebesar 17,34 Ku/Ha meningkat sebesar 2,29 Ku/Ha bila dibandingkan dengan provitas tahun 2013 sebesar 14,42 Ku/ha. Provitas tertinggi di atas angka provinsi terjadi di kabupaten Lahat sebesar 17,53 Ku/Ha. Bla dibandingkan dengan provitas nasional kedelai tahun 2014 sebesar 14,06 Ku/Ha masih berada di atas provitas nasional.

Provitas kedelai tahun 2015 cenderung menurun sebesar 2,25 Ku/Ha menjadi 15,09 Ku/Ha. Kabupaten yang provitasnya tertinggi di atas angka provinsi terjadi di kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 21,33 Ku/Ha. Bila dibandingkan dengan provitas nasional sebesar 14,20 Ku/Ha, sumatera selatan masih di atas angka provitas nasional.

Provitas kedelai tahun 2016 meningkat sebesar 0,35 Ku/Ha menjadi 15,44 Ku/Ha. Provitas yang tertinggi di atas angka provitas provinsi terjadi di kabupaten Musi Banyuasin sebesar 21,96 Ku/Ha. Apabila dibandingkan dengan provitas nasional sebesar 14,20 Ku/Ha, sumatera selatan masih di atas angka provitas nasional

Provitas kedelai tahun 2017 meningkat sebesar 2,05 Ku/Ha menjadi 17,49 Ku/Ha. Provitas tertinggi di atas angka provinsi terjadi di kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 21,43 Ku/Ha. Apabila dibandingkan dengan provitas nasional sebesar 13,68 Ku/Ha, sumatera selatan masih di atas angka nasional.

**Tabel 2.206.**
Produktivitas Tanaman Cabe

**Komoditas : Cabe** **Ku/Ha**

| Kabupaten/Kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ASEM 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogan Komering Ulu | 44,90 | 80,68 | 69,92 | 123,96 | 109,72 | 155,00 |
| Ogan Komering Ilir | 23,21 | 5,94 | 26,97 | 31,62 | 181,44 | 157,81 |
| Muaraenim | 29,22 | 24,84 | 53,00 | 36,58 | 58,16 | 72,80 |
| Lahat | 20,77 | 45,43 | 21,62 | 34,82 | 32,84 | 3.071,00 |
| Musi Rawas | 19,29 | 26,02 | 28,62 | 62,32 | 101,63 | 84,17 |
| Musi Banyuasin | 29,11 | 33,26 | 31,20 | 35,76 | 23,16 | 30,72 |
| Banyuasin | 30,73 | 22,22 | 13,11 | 21,27 | 33,94 | 12,26 |
| OKU Selatan | 15,83 | 14,38 | 20,27 | 162,30 | 114,38 | 97,75 |
| OKU Timur | 21,05 | 39,81 | 19,46 | 83,69 | 14,89 | 78,16 |
| Ogan Ilir | 19,90 | 18,42 | 13,96 | 23,75 | 33,80 | 32,76 |
| Empat Lawang | 8,28 | 4,69 | 6,29 | 6,54 | 5,08 | 6,33 |
| PALI | - | 10,91 | 27,95 | 6,42 | 5,50 | 6,78 |
| MURATARA | - | - | 49,25 | 23,20 | 74,48 | 24,09 |
| Palembang | 6,05 | 3,78 | 3,94 | 19,94 | 6,00 | 8,71 |
| Prabumulih | 11,00 | 10,98 | 13,00 | 17,95 | 8,36 | 3,779 |
| Pagar Alam | 33,84 | 39,82 | 20,34 | 73,87 | 73,04 | 139,82 |
| Lubuk Linggau | 4,64 | 5,42 | 75,07 | 46,00 | 4,00 | 2,50 |
| **JUMLAH** | **25,14** | **24,89** | **22,86** | **47,12** | **59,15** | **69,86** |

*Sumber : Dinas Pertanian dan TPH Prov. Sumsel*

**Tabel 2.207.**
Produktivitas Tanaman Bawang

| **Komoditas** | **: Bawang** | | | | **Ku/Ha** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kabupaten/Kota** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **ASEM 2018** |
| Ogan Komering Ulu | 4,00 | 80,00 | 67,27 | 129,00 | 28,40 | 80,00 |
| Ogan Komering Ilir | - | - | 60,26 | 30,00 | 47,15 | 55,00 |
| Muaraenim | 7,50 | 35,00 | 52,00 | 40,80 | 53,71 | 34,72 |
| Lahat | 150,00 | - | - | 1,00 | 86,67 | 7,14 |
| Musi Rawas | - | 96,17 | 75,24 | 75,92 | 105,20 | 75,34 |
| Musi Banyuasin | - | - | - | 1,00 | 7,00 | - |
| Banyuasin | - | - | 2,00 | 24,22 | 11,03 | 7,00 |
| OKU Selatan | - | 6,25 | - | 6,00 | - | - |
| OKU Timur | - | - | - | 96,33 | 36,42 | 127,08 |
| Ogan Ilir | - | - | - | 1,00 | - | - |
| Empat Lawang | - | - | - | 1,00 | - | - |
| PALI | - | - | - | 1,00 | - | - |
| MURATARA | - | - | - | 1,00 | - | - |
| Palembang | - | - | - | 1,00 | - | - |
| Prabumulih | - | - | - | 1,00 | - | - |
| Pagar Alam | - | - | 53,26 | 46,80 | 69,09 | 96,76 |
| Lubuk Linggau | - | - | - | 1,00 | - | - |
| **JUMLAH** | **20,00** | **61,61** | **60,71** | **61,90** | **60,08** | **81,74** |

*Sumber : Dinas Pertanian dan TPH Prov. Sumsel*

**Tabel 2.208.**
Produktivitas Tanaman Jeruk

| **Komoditas** | **: Jeruk** | | | | **Ku/Ha** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kabupaten/Kota** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **ASEM 2018** |
| Ogan Komering Ulu | 418,52 | 175,79 | 486,00 | 308,00 | 512,00 | 381,80 |
| Ogan Komering Ilir | 109,64 | 94,68 | 180,00 | 304,00 | 760,00 | 761,50 |
| Muaraenim | 686,90 | 98,97 | 48,00 | 152,00 | 300,00 | 244,90 |
| Lahat | 535,75 | 341,20 | 378,00 | 180,00 | 208,00 | 406,00 |
| Musi Rawas | 681,90 | 359,81 | 504,00 | 224,00 | 420,00 | 590,10 |
| Musi Banyuasin | 183,53 | 156,62 | 123,00 | 164,00 | 168,00 | 469,90 |
| Banyuasin | 212,97 | 104,58 | 48,00 | 192,00 | 344,00 | 206,40 |
| OKU Selatan | 554,97 | 452,46 | 126,00 | 168,00 | 368,00 | 707,80 |
| OKU Timur | 209,60 | 334,09 | 264,00 | 552,00 | 424,00 | 2.119,90 |
| Ogan Ilir | 184,19 | 100,09 | 45,00 | 296,00 | 228,00 | 280,00 |
| Empat Lawang | 161,16 | 163,72 | 474,00 | 708,00 | 448,00 | 666,20 |
| PALI | - | 340,00 | - | 40,00 | 40,00 | 88,30 |
| MURATARA | - | - | 120,00 | 212,00 | 216,00 | 230,20 |
| Palembang | 384,43 | 461,95 | 1.086,00 | 520,00 | 692,00 | 330,80 |
| Prabumulih | - | 755,23 | 354,00 | 64,00 | 420,00 | 130,50 |
| Pagar Alam | 154,67 | 135,73 | 1.620,00 | 260,00 | 376,00 | 346,20 |
| Lubuk Linggau | 221,00 | 102,32 | 150,00 | 52,00 | 180,00 | - |
| **JUMLAH** | **324,47** | **196,55** | **513,00** | **400,00** | **528,00** | **492,90** |

*Sumber : Dinas Pertanian dan TPH Prov. Sumsel*

**Tabel 2.209.**
Produktivitas Tanaman Duku

**Komoditas : Duku** **Ku/Ha**

| Kabupaten/Kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ASEM 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogan Komering Ulu | 68,61 | 100,00 | 146,00 | 33,00 | 175,00 | 151,68 |
| Ogan Komering Ilir | 83,81 | 32,44 | 61,00 | 102,00 | 190,00 | 152,45 |
| Muaraenim | 245,65 | 183,01 | 68,00 | 27,00 | 20,00 | 33,86 |
| Lahat | 45,07 | 51,55 | 35,00 | 40,00 | 52,00 | 61,40 |
| Musi Rawas | 107,44 | 35,94 | 91,00 | 119,00 | 69,00 | 180,44 |
| Musi Banyuasin | 71,05 | 88,08 | 51,00 | 60,00 | 50,00 | 128,79 |
| Banyuasin | 125,00 | 21,63 | 37,00 | 26,00 | 57,00 | 86,35 |
| OKU Selatan | 173,55 | 158,50 | 104,00 | 71,00 | 198,00 | 94,91 |
| OKU Timur | 74,63 | 98,03 | 82,00 | 71,00 | 52,00 | 67,02 |
| Ogan Ilir | 42,44 | 42,50 | 75,00 | 20,00 | 45,00 | 82,93 |
| Empat Lawang | 15,96 | 25,32 | 15,00 | 168,00 | 61,00 | 135,37 |
| PALI | - | - | - | 48,00 | 14,00 | 28,84 |
| MURATARA | - | - | 28,00 | 21,00 | 59,00 | 51,67 |
| Palembang | 260,00 | 313,46 | 221,00 | 272,00 | 214,00 | 198,37 |
| Prabumulih | 108,20 | 126,54 | 217,00 | 90,00 | 37,00 | 27,45 |
| Pagar Alam | - | 23,64 | 62,00 | 146,00 | 174,00 | 354,55 |
| Lubuk Linggau | 37,00 | 54,21 | 70,00 | 150,00 | 133,00 | 156,16 |
| **JUMLAH** | **93,27** | **82,59** | **79,00** | **76,00** | **130,00** | **123,81** |

*Sumber : Dinas Pertanian dan TPH Prov. Sumsel*

**Tabel 2.210.**
Produktivitas Tanaman Durian

**Komoditas : Durian** **Ku/Ha**

| Kabupaten/Kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ASEM 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogan Komering Ulu | 41,94 | 59,82 | 84,00 | 84,00 | 73,00 | 89,25 |
| Ogan Komering Ilir | 42,73 | 40,12 | 18,00 | 171,00 | 21,00 | 105,09 |
| Muaraenim | 287,12 | 124,92 | 45,00 | 19,00 | 30,00 | 36,09 |
| Lahat | 33,99 | 44,06 | 39,00 | 33,00 | 40,00 | 55,02 |
| Musi Rawas | 105,99 | 39,32 | 117,00 | 67,00 | 172,00 | 127,00 |
| Musi Banyuasin | 99,86 | 34,21 | 56,00 | 52,00 | 39,00 | 125,79 |
| Banyuasin | 56,57 | 29,23 | 50,00 | 150,00 | 13,00 | 23,24 |
| OKU Selatan | 176,12 | 119,56 | 118,00 | 148,00 | 127,00 | 190,58 |
| OKU Timur | 83,37 | 33,04 | 68,00 | 70,00 | 66,00 | 69,13 |
| Ogan Ilir | 30,63 | 49,88 | 49,00 | 17,00 | 37,00 | 78,53 |
| Empat Lawang | 14,52 | 14,33 | 76,00 | 105,00 | 49,00 | 258,10 |
| PALI | - | - | - | 180,00 | 13,00 | 21,67 |
| MURATARA | - | - | 40,00 | 31,00 | 39,00 | 118,79 |
| Palembang | 430,00 | 263,15 | 325,00 | 297,00 | 213,00 | 145,10 |
| Prabumulih | 290,25 | 356,76 | 262,00 | 122,00 | 32,00 | 27,98 |
| Pagar Alam | 42,61 | 32,91 | 51,00 | 138,00 | 194,00 | 192,75 |
| Lubuk Linggau | 42,57 | 31,87 | 209,00 | 156,00 | 199,00 | 96,55 |
| **JUMLAH** | **91,36** | **58,00** | **64,00** | **90,00** | **67,00** | **112,86** |

*Sumber : Dinas Pertanian dan TPH Prov. Sumsel*

**Tabel 2.211.**
Produktivitas Tanaman Nenas

| **Komoditas** | **: Nenas** | | | **Ku/Ha** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kabupaten/Kota** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **ASEM 2018** |
| Ogan Komering Ulu | 2.197,00 | 1.079,53 | 1.250,00 | 1.500,00 | 1.750,00 | 1.904,50 |
| Ogan Komering Ilir | 522,50 | 1.338,10 | 2.250,00 | 2.000,00 | 1.750,00 | 834,24 |
| Muaraenim | 1.221,83 | 545,70 | 1.250,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 673,95 |
| Lahat | - | 1.693,29 | 3.500,00 | 1.250,00 | 1.750,00 | 2.103,56 |
| Musi Rawas | 2.004,00 | 1.765,36 | 1.750,00 | 4.000,00 | 4.250,00 | 3.175,83 |
| Musi Banyuasin | 878,00 | 1.138,56 | 750,00 | 1.250,00 | 1.000,00 | 1.155,39 |
| Banyuasin | 1.577,00 | 989,05 | 1.000,00 | 2.250,00 | 1.500,00 | 691,47 |
| OKU Selatan | - | 929,93 | 1.750,00 | - | - | - |
| OKU Timur | 577,00 | 3.719,54 | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.250,00 | 3.387,44 |
| Ogan Ilir | 774,82 | 961,56 | 750,00 | 750,00 | 1.500,00 | 737,99 |
| Empat Lawang | - | 1.650,00 | 2.500,00 | 3.250,00 | 2.000,00 | 3.020,83 |
| PALI | - | 1.250,27 | 4.000,00 | 2.750,00 | 250,00 | 598,65 |
| MURATARA | - | - | 3.250,00 | 1.750,00 | 3.500,00 | 2.889,78 |
| Palembang | - | 2.638,89 | 3.250,00 | 2.500,00 | 3.250,00 | 2.148,44 |
| Prabumulih | 1.702,02 | 2.249,22 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.250,00 | 3.142,93 |
| Pagar Alam | - | - | - | - | - | - |
| Lubuk Linggau | - | 844,30 | 1.250,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.876,11 |
| **JUMLAH** | **1.056,34** | **1.095,71** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.500,00** | **845,03** |

*Sumber : Dinas Pertanian dan TPH Prov. Sumsel*

Produktivitas Cabai cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, terlihat pada tahun 2013 produktivitas sebesar 25,14 Ku/Ha menurun menjadi 24,89 Ku/Ha di tahun 2014 hal ini terjadi karena belum diterapkannya teknologi tepat guna dalam pengembangan tanaman Cabai. Penyumbang penurunan provitas terbesar di Kota Palembang sebesar 3,78 Ku/Ha . Pada tahun 2015 terjadi penurunan kembali menjadi 22,86%, hal ini dikarenakan pada tahun 2015 terjadi kekeringan di hampir seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Penyumbang penurunan terbesar di Kota Palembang sebesar 3,94 Ku/Ha. Sedangkan di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 terjadi peningkatan produktivitas sebesar 47,12 Ku/Ha (2016)dan 59,15 Ku/Ha (2017), peningkatan terjadi karena adanya bantuan pemerintah dalam pengembangan tanaman cabai. Penyumbang peningkatan produktivitas terbesar adalah Kabupaten Banyuasin (2016) sebesar 162,30 Ku/Ha dan Kabupten Ogan Komering Ilir (2017) sebesar 181,44 Ku/Ha). Angka produktivitas provinsi masih di bawah angka produktivitas nasional, yaitu 84,73 Ku/Ha untuk tahun 2016 dan 85,05 Ku/Ha untuk tahun 2017.

Produktivitas Bawang Merah mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak terlalu besar, peningkatan terbesar di tahun 2014 sebesar 61,61 Ku/Ha dari semula tahun 2013 sebesar 20 Ku/Ha. Peningkatan yang cukup besar ini dikarenakan pada tahun 2014 terdapat bantuan dari pemerintah dalam pengembangan bawang merah. Penyumbang peningkatan produktivitas terbesar adalah Kabupaten Musi Rawas sebesar 96,17 Ku/Ha. Sedangkan di tahun 2015 terjadi penurunan menjadi 60,71 Ku/Ha, hal ini dikarenakan pada tahun 2015

terjadi kekeringan di hampir seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Penyumbang penurunan produktivitas terbesar adalah Kabupaten Banyuasin sebesar 2 Ku/Ha. Sedangkan di tahun 2016 angka produktivitas sebesar 61,90 Ku/Ha, dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan produktivitas sebesar 1,19 Ku/Ha, penyumbang peningkatan produktivitas terbesar adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 129 Ku/Ha. Untuk tahun 2017 Dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi penurunan produktivitas sebesar 1,83 Ku/Ha hal ini dikarenakan di tahun 2017 terjadi iklim dengan curah hujan yang cukup tinggi sehingga banyak penyakit mohler dan ulat grayak yang menyerang tanaman bawang merah di beberapa kabupaten/kota pengembang tanaman tersebut. Penyumbang penurunan terbesar di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 7 Ku/Ha). Angka produktivitas provinsi masih di bawah angka produktivitas nasional, yaitu 96,69 Ku/Ha untuk tahun 2016 dan 93,19 Ku/Ha untuk tahun 2017.

Produktivitas jeruk mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup fluktuatif dari tahun ke tahun, terlihat pada tahun 2013 produktivitas sebesar 324,47 Ku/Ha menurun menjadi 196,55 Ku/Ha di tahun 2014 dengan penyumbang penurunan terbesar di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 109,64 Ku/Ha. Untuk tahun 2015 meningkat dari 2014 menjadi 513 Ku/Ha dengan penyumbang peningkatan terbesar di Kota Palembang sebesar 1.086Ku/Ha. Untuk tahun 2016 terjadi penurunan nilai produktivitas dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 400 Ku/Ha, penyumbang peningkatan terbesar di Kabupaten Empat Lawang sebesar 708 Ku/Ha. Sedangkan untuk tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 produktivitas meningkat menjadi 528 Ku/Ha, peningkatan terbesar di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 760 Ku/Ha. Angka produktivitas provinsi untuk komoditi jeruk sudah melebihi dari angka produktivitas nasional yaitu sebesar 333,84 Ku/Ha untuk tahun 2016 dan 418, 56 Ku/Ha untuk tahun 2017.

Produktivitas duku mengalami penurunan angka di beberapa tahun, terlihat pada tahun 2013 produktivitas sebesar 93,27 Ku/Ha menurun menjadi 82,59 Ku/Ha di tahun 2014 dengan penyumbang penurunan terbesar di Kabupaten Banyuasin dengan angka produktivitasnya 21,63 Ku/Ha. Untuk tahun 2015 angka produktivitasnya 79 Ku/Ha, menurun dari tahun 2014 dengan penyumbang penurunan terbesar di Kabupaten Empat Lawang dengan angka produktivitas sebesar 15 Ku/Ha. Untuk tahun 2016 nilai produktivitas sebesar 76 Ku/Ha terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2015, penyumbang penurunan terbesar di Kabupaten Ogan Ilir sebesar 20 Ku/Ha. Sedangkan untuk tahun 2017 angka produktivitas sebesar 130 Ku/Ha meningkat dibandingkan tahun 2016 Ku/Ha, peningkatan terbesar di Kota Palembang sebesar 214 Ku/Ha. Angka produktivitas provinsi untuk komoditi

duku sudah melebihi dari angka produktivitas nasional yaitu sebesar 100,95 Ku/Ha untuk tahun 2016 dan 114,58 Ku/Ha untuk tahun 2017.

Produktivitas durian mengalami penurunan produktivitas di beberapa tahun, terlihat pada tahun 2013 produktivitas sebesar 91,36 Ku/Ha menurun menjadi 58 Ku/Ha di tahun 2014 dengan penyumbang penurunan terbesar di Kabupaten Empat Lawang dengan angka produktivitasnya 14,52 Ku/Ha. Untuk tahun 2015 angka produktivitasnya 64 Ku/Ha, meningkat dari tahun 2014 dengan penyumbang peningkatan terbesar di Kota Palembang dengan angka produktivitas sebesar 325 Ku/Ha. Untuk tahun 2016 nilai produktivitas sebesar 90 Ku/Ha terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015, penyumbang peningkatan terbesar di Kota Palembang 297 Ku/Ha. Sedangkan untuk tahun 2017 angka produktivitas sebesar 67 Ku/Ha menurun dibandingkan tahun 2016 Ku/Ha, penurunan terbesar di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten PALI sebesar 13 Ku/Ha. Angka produktivitas provinsi untuk komoditi durian masih di bawah angka produktivitas nasional yaitu sebesar 128,58 Ku/Ha untuk tahun 2016 dan 125,56 Ku/Ha untuk tahun 2017.

Produktivitas nenas mengalami penurunan produktivitas di beberapa tahun, terlihat pada tahun 2013 produktivitas sebesar 1.056,34 Ku/Ha meningkat menjadi 1.095,71 Ku/Ha di tahun 2014 dengan penyumbang peningkatan terbesar terbesar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan produktivitasnya 3.719,54 Ku/Ha. Untuk tahun 2015 angka produktivitasnya 1.000 Ku/Ha, menurun dari tahun 2014 dengan penyumbang peningkatan terbesar di Kabupaten MUBA dan Kabupaten Ogan Ilir dengan produktivitas sebesar 750 Ku/Ha. Untuk tahun 2016 nilai produktivitas sebesar 1.000 Ku/Ha tetap dibandingkan dengan tahun 2015, penyumbang produktivitas terbesar di Kabupaten Musi Rawas sebesar 4.000 Ku/Ha. Sedangkan untuk tahun 2017 angka produktivitas sebesar 1.500 Ku/Ha meningkat dibandingkan tahun 2016 Ku/Ha, peningkatan terbesar di Kabupaten Musi Rawas sebesar 4.250 Ku/Ha. Angka produktivitas provinsi untuk komoditi durian untuk tahun 2016 masih di bawah angka produktivitas nasional yaitu sebesar 1.067 Ku/Ha sedangkan untuk untuk tahun 2017 angka produktivitas provinsi lebih besar dibandingkan dengan angka produktivitas nasional sebesar 865 Ku/Ha.

Alih fungsi lahan masih merupakan hal yang biasa di lakukan oleh masyaratat, pada rentang waktu tahun 2013 – 2017 terjadi penurunan luas baku lahan sawah sebesar 5.31 % (41.533 Ha), yang kemungkinan besar penurunan luas baku lahan sawah tersebut merupakan alih fungsi lahan dari komoditi pertanian ke non pertanian. Pada kurun waktu tersebut juga upaya penambahan luas baku lahan sawah dilakukan dengan kegiatan cetak sawah seluas 25.488 Ha.

Produktivitas Padi, Jagung dan Kedelai berdasarkan Angka Ramalan I (ARAM I) tahun 2018 yaitu, Produktivitas Padi sebesar 50,51 Ku/Ha atau 1,35 Ku/Ha di bawah rata-rata angka nasional. Produktivitas Jagung sebesar 68,66 Ku/Ha atau 7,09 Ku/Ha di bawah angka tertinggi nasional sedangkan Produktivitas Kedelai sebesar 12,30 Ku/Ha atau 1,93 Ku/Ha di bawah rata-rata angka nasional.

Produktivitas Cabe, Bawang Merah, Jeruk, Durian, Nenas dan Duku berdasarkan Angka Tetap (ATAP) tahun 2017 yaitu, Produktivitas Cabe sebesar 59,25 Ku/Ha atau 25,47 Ku/Ha di bawah rata-rata angka nasional, Produktivitas Bawang Merah sebesar 60,08 Ku/Ha atau 32,87 % di bawah rata-rata angka nasional, Produktivitas Jeruk sebesar 528,00 Ku/Ha atau 56,44 Ku/Ha di bawah angka tertinggi nasional, Produktivitas Durian sebesar 67,00 Ku/Ha atau 73,32 Ku/Ha di bawah rata-rata angka nasional, Produktivitas Nenas sebesar 1.500,00 Ku/Ha atau 1.455 Ku/Ha di bawah angka tertinggi nasional dan Produktivitas Duku sebesar 130,00 Ku/Ha atau 16,00 Ku/Ha di bawah rata-rata angka nasional.

Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Pertanian belum dapat melaksanakan peranannya dengan optimal sebagai instrumen pembangunan pertanian dalam mencapai sasaran produksi dan produktivitas yang telah ditetapkan. Adapun kondisi kelembagaan penyuluhan pertanian saat ini :

1. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dengan jumlah BPP sebanyak 190 dengan klasifikasi kelas Aditama sebanyak 3 BPP, Utama sebanyak 2, Madya sebanyak 25, Pratama sebanyak 41 dan tanpa klasifikasi sebanyak 119.
2. Kelompoktani, dengan jumlah kelompoktani yang terdaftar di dalam Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) sebanyak 30.099 Kelompok dengan klasifikasi kelas kelompoktani utama sebanyak 179 Kelompok, madya sebanyak 924 kelompok, lanjut sebanyak 6.595 kelompok, pemula 15.033 kelompok dan non klasifikasi 7.364 kelompok.

Selain itu ketenagaan penyuluhan pertanian berupa penyuluh PNS sebanyak 1.208 orang dan penyuluh non PNS sebanyak 1.255 orang terdiri dari THL – TB PP sebanyak 369 orang, swadaya sebanyak 607 orang dan THL-TKS Kab/Kota sebanyak 279 orang.

Jumlah penyuluh PNS yang telah mengikuti diklat dasar sebanyak 84 orang terbagi berdasarkan diklat dasar ahli sebanyak 38 orang, diklat ahli jenjang 16 orang dan diklat terampil 30 orang.

Rata – rata jumlah penyuluh PNS yang mengikuti diklat teknis pertanian pertahun sebanyak 10 orang. Dan rata – rata jumlah penyuluh non PNS yang mengikuti diklat teknis pertanian per tahun sebanyak 5 orang.

**Tabel 2.212.**
Kontribusi Sektor pada Produk Domestik Regional Bruto
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017

| Lapangan Usaha | | Kontribusi | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Sektor Primer | | | | | |
| A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 17,76 | 17,13 | 16,69 | 15,86 |
| | 1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian | 12,63 | 11,76 | 11,55 | 10,96 |
| | a. Tanaman Pangan | 2,72 | 2,82 | 3,10 | 2,86 |
| | b. Tanaman Hortikultura Semusim | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 |
| | c. Perkebunan Semusim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,78 |
| | e. Perkebunan Tahunan | 7,16 | 6,15 | 5,55 | 5,23 |
| | f. Peternakan | 1,41 | 1,45 | 1,52 | 1,50 |
| | g. Jasa Pertanian dan Perkebunan | 0,41 | 0,43 | 0,42 | 0,39 |
| | 2. Kehutanan dan Penegangan Kayu | 1,75 | 1,99 | 1,80 | 1,78 |
| | 3. Perikanan | 3,37 | 3,38 | 3,34 | 3,12 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 23,93 | 21,81 | 19,57 | 19,09 |
| Sektor Sekunder | | | | | |
| C | Industri Pengolahan | 17,35 | 18,36 | 18,91 | 19,52 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,13 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| F | Konstruksi | 13,4 | 12,58 | 13,08 | 13,21 |
| Sektor Tersier | | | | | |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 9,07 | 10,58 | 11,83 | 12,65 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 1,86 | 2,08 | 2,2 | 2,31 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,26 | 1,41 | 1,56 | 1,63 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 2,42 | 2,5 | 2,66 | 2,77 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,56 | 2,56 | 2,66 | 2,63 |
| L | Real Estate | 2,6 | 2,81 | 2,98 | 3,02 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,54 | 3,78 | 3,55 | 3,15 |
| P | Jasa Pendidikan | 2,64 | 2,7 | 2,62 | 2,47 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,59 | 0,62 | 0,61 | 0,62 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 0,74 | 0,76 | 0,74 | 0,73 |

*Sumber : BPS, 2017*

Struktur perekonomian Sumatera Selatan dalam empat tahun terakhir masih didominasi oleh sektor primer, dilanjutkan dengan sektor tersier yang menduduki urutan kedua dan sektor sekunder di urutan terakhir. Sektor primer (sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian), selama kurun waktu 2013 – 2017 cenderung mengalami penurunan.

Pada sektor pertanian di tahun 2017 kontribusi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian sebesar 10,96 % didominasi oleh perkebunan tahunan sebesar 5,23 %, tanaman pangan sebesar 2,86 % dan perikanan sebesar 3,12%.

### 2.3.3.3.2 Produktivitas Perkebunan (karet, Kelapa Sawit, Kopi dan Kelapa)

Perkebunan memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional saat ini sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-undang nomor 39 tahun 2014 yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan dan devisa negara; menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing; memenuhi

kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sub sektor Perkebunan di negara-negara sedang berkembang merupakan sektor yang sangat potensial dalam memberi kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional yaitu sebagai; 1) Kontribusi produk, 2) Kontribusi pasar, 3) Kontribusi faktor-faktor produksi dan 4) Kontribusi devisa. Hasil Perkebunan sendiri meliputi semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan yang banyak digunakan masyarakat dalam kesehari-hariannya.

Tabel Produktivitas Tanaman Perkebunan 2013-2017

Produktivitas Tanaman Karet cenderung fluktuatif dan menurun Tahun 2013 sebesar 1,42 ton Crum Rubber/Ha/tahun meningkat menjadi 1,44 ton/Ha/tahun ditahun 2014 dan menurun menjadi 1,28 ton/Ha/Tahun di Tahun 2017. Produktivitas Kelapa Sawit pada tahun 2013 sebesar 3,67 ton CPO Ha/Tahun meningkat menjadi 3,79 ton CPO/Ha/Tahun di Tahun 2014 dan menurun menjadi 3,42 ton CPO/Ha/Tahun di Tahun 2017. Produktivitas Kopi pada tahun 2013 sebesar 1,17 ton/ha/tahun menurun ditahun 2014 menjadi 0,65 ton/ha/tahun dan menjadi 0,89 ton/ha/tahun di tahun 2017. Begitu juga produktivitas kelapa pada tahun 2013 sebesar 0,68 ton/ha/tahun meningkat menjadi 1,18 ton/ha/tahun di Tahun 2014 dan menurun kembali menjadi 1,13 ton/ha/tahun di tahun 2017.

kondisi seiring dipengaruhi harga serta kondisi iklim, selain dipengaruhi oleh pasar internasional karena komoditas perkebunan merupakan komoditas ekspor sehingga harga pasar internasional sangatlah mempengaruhi harga ditingkat petani selain oleh kualitas mutu produk itu juga.

Untuk terus meningkatkan produksi/produktivitas terus dilakukan pengembangan kelapa sawit rakyat, pembinaan-pembinaan dalam melakukan Good Agriculture Practices (GAP), melakukan pengawasan peredaran benih/bibit, menjaga kestabilan harga, penanggulangan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang bisa menurunkan bahkan memperpendek usia produktif tanaman serta terus melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk pelaksanaan kegiatan revitalisasi perkebunan dalam rangka peremajaan perkebunan rakyat. Pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) sesuai Perpres 61 Tahun 2015 adalah terobosan penting dilihat fungsinya sebagai kata¬lisator dalam pe¬ngembangan kelapa sawit nasional dimana dilakukan pungutan dana untuk program-program menjamin peningkatan produktivitas dan pasar kelapa sawit. Dikarenakan dengan menggunakan dana BPDP KS dapat digunakan untuk melakukan

peremajaan Kelapa Sawit khusuSnya di Provinsi Sumatera Selatan. Dan skema pendanaan seperti ini diharapkan dapat juga diterapkan di komoditi-komoditi perkebunan lainnya seperti karet, kelapa dan kopi.

Komoditas perkebunan merupakan komoditas ekspor sehingga dalam penentuan harga komoditas sangatlah dipengaruhi oleh harga komoditas ditingkat ekspor serpeti halnya untuk komoditas karet yang mengacu pada harga di Singapore Comodity (SICOM). Sehingga untuk melakukan intervensi langsung terhadap kenaikan harga sangatlah sulit. Namun untuk peningkatan harga ditingkat petani dapat ditingkatkan melalui penentuan harga bersama atau melalui unit pengolahan dan pemasaran bersama (UPPB).

Harga komoditi karet (bokar) pada tahun 2018 sebesar Rp 8.940,00 kelapa sawit rata-rata Rp 7.692,00 kelapa sebesar Rp 2.568,00 dan kopi sebesar Rp 21.296,00.

### 2.3.3.4. Kehutanan

#### 2.3.3.4.1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Rehabilitasi lahan adalah suatu usaha memulihkan kembali, memperbaiki dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak supaya dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai lahan produksi, media pengatur tata air, ataupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya. Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan, yang dilokasikan pada kerangka daerah aliran sungai. Kegiatan Rehabilitasi ini menempati posisi untuk mengisi kekosongan ketika sistem perlindungan tidak dapat mengimbangi hasil sistem budidaya lahan dan hutan, sehingga terjadi deforestasi serta degredasi fungsi hutan dan lahan.

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan melalui kegiatan Penghijauan, Reboisasi, Pemeliharaan, Pengayaan tanaman atau Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.Kegiatan reboisasi dan penghijauan pada umumnya dilakukan pada tanah kritis dan areal bekas penebangan liar atau pembalakan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut membutuhkan bibit dalam jumlah besar dan berkualitas baik.

Lahan kritis adalah lahan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai pengatur media pengatur tata air, unsur produksi pertanian, maupun unsur perlindungan alam dan lingkungannya. Lahan kritis juga merupakan suatu lahan yang kondisi tanahnya telah mengalami proses kerusakan fisik, biologi atau kimia yang pada akhirnya bisa membahayakan fungsi hidrologi, produksi, orologi, pemukiman dan kehidupan sosial ekonomi di sekelilingnya.

Rehabilitasi hutan dan lahan dapat diimplementasikan pada semua kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Sistem RHL dicirikan oleh komponen sebagai berikut:Komponen obyek rehabilitasi hutan dan lahan, Komponen teknologi, dan Komponen institusi. Sistem RHL merupakan sistem yang terbuka, yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan penggunaan hutan dan lahan. Dengan demikian pada prinsipnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan, diselenggarakan atas inisiatif bersama semua pihak terkait. Ini berbeda dengan penyelenggaraan RHL, selalu melalui inisiatif pemerintah dan menjadi beban tanggungan pemerintah.Dengan kata lain, kedepannya RHL dilaksanakan oleh masyarakat dengan kekuatan utama dari masyarakat sendiri. Peran serta masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam melakukan rehabilitasi ini. Membangun kesadaran, kepedulian dan komitmen untuk mulai Peduli dan bertindak.

Luas lahan kritis Provinsi Sumatera Selatan ±733,756 ha *(sumber: BPDAS 2018).* Luas Kawasan Rehabilitasi ±5.386,17 Ha bekerjasama dengan Pemegang ijin IPPKH, Ditjen PDASKHL KLHK dan tahun 2019 akan direhabilitasi seluas ±18.000 ha melalui dana APBN di kawasan hutan lindun

**Tabel 2.213.**
Data Lahan Kritis Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

| NO | UPTD KPH | TINGKAT KEKRITISAN LAHAN (HA) | | TOTAL (HA) |
|---|---|---|---|---|
| | | Kritis | Sangat Kritis | |
| 1 | UPTD KPH Wil I Meranti | 20,638.43 | 1.06 | 20,639.49 |
| 2 | UPTD KPH Wil II Lalan-Mendis | 15,527.25 | 0 | 15,527.25 |
| 3 | UPTD KPH Wil III Palembang-Banyuasin | 166.95 | 0 | 166.95 |
| 4 | UPTD KPH Wil IV Sungai Lumpur-Riding | 17,439.50 | 0 | 17,439.50 |
| 5 | UPTD KPH Wil V Lempuing-Mesuji | 3,981.06 | 0 | 3,981.06 |
| 6 | UPTD KPH Wil VI Bukit Nanti-Martapura | 64,657.89 | 5,438.62 | 70,096.51 |
| 7 | UPTD KPH Wil VII Mekakau-Saka | 115,236.03 | 39,144.76 | 154,380.79 |
| 8 | UPTD KPH Wil VIII Semendo | 61,850.51 | 8,287.87 | 70,138.37 |
| 9 | UPTD KPH Wil IX Suban Jeriji | 33,719.85 | 783.97 | 34,503.82 |
| 10 | UPTD KPH Wil X Dempo | 17,816.84 | 2,223.92 | 20,040.76 |
| 11 | UPTD KPH Wil XI Kikim-Pasemah | 128,624.36 | 35,058.62 | 163,682.99 |
| 12 | UPTD KPH Wil XII Benakat | 5,253.22 | 0 | 5,253.22 |
| 13 | UPTD KPH Wil XIII Lakitan-Bukit Cogong | 29,405.73 | 1,997.06 | 31,402.79 |
| 14 | UPTD KPH Wil XIV Rawas | 57,794.81 | 2,081.08 | 59,875.90 |
| 15 | Kawasan Konservasi | 39,604.70 | 27,021.90 | 66,626.61 |
| | **TOTAL** | **611,717.13** | **122,038.87** | **733,756** |

*Sumber: Surat Keputusan MenLHK Nomor: SK.306/MenLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018, tanggal 6 Juli 2018*

**Tabel 2.214.**
Data Perkembangan Lahan Kritis Provinsi Sumatera Selatan

| TAHUN | KRITIS (Ha) | SANGAT KRITIS (Ha) |
|---|---|---|
| 2011 | 985.147,72 | 246.206,58 |
| 2013 | 299.172,00 | 13.692,00 |
| 2014 | 181.488,95 | 12.084,38 |

| TAHUN | KRITIS (Ha) | SANGAT KRITIS (Ha) |
|---|---|---|
| 2015 | 187.482,80 | 12.828,63 |
| 2016 | 182.160,92 | 12.814,98 |
| 2017 | 182.160,92 | 12.814,96 |
| 2018 | 611.766,87 | 121.989,12 |

*Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) 2018*

**Tabel 2.215.**
Lahan Kritis Yang Direhabilitas di Provinsi Sumatera Selatan

| No | Pelaksana | Lokasi | Luas (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | PT. Bukit Asam | a) HL Bukit Jambul Asahan,<br>b) HL Bukit Jambul Asahan,<br>c) Fasum TNI, Muara Enim | 260<br>100<br>93 | 2014<br>2014<br>APL, 2014 |
| 2 | PT. Medco E&P | HL Bukit Jambul Asahan, Muara Enim | 136,67 | 2017 |
| 3 | Conoco Phillips (Grissik) Ltd. | a) HL Meranti Sungai Merah, MUBA<br>b) SM Bentayan, MUBA<br>c) Kebun Raya Sriwijaya, OI | 175<br>85<br>35,41 | 2017<br>2017<br>KHDTK, 2017 |
| 4 | JOB Pertamina - Jadestone/Talisman Energy (Ogan Komering) | HL Bukit Nanti, OKU | 80 | 2015<br>serah terima |
| 5 | PT. PLN (Persero) | HL Meranti Sungai Merah, | 2,57 | 2016 |
| 6 | PT. Tropik Energi Pandan | HL Meranti Sungai Merah, MUBA | 4,5 | 2016 |
| 7 | PT. DSSP Power Sumsel | HL Bukit Nanti, OKU | 52 | 2016 |
| 8 | PT. PGN (Persero) | HL Bukit Nanti, OKU | 94 | 2016 |
| 9 | PT. Pertamina Geothermal Energy | HL Bukit Nanti, OKU | 130 | 2017 |

| No | Pelaksana | Lokasi | Luas (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 10 | JOB Pertamina-Talisman Jambi | a) Kebun Raya Sriwijaya, OI<br>b) SM Bentayan, MUBA | 12, 06<br>261,32 | KHDTK,2016<br>2017 |
| 11 | Dishut Sumsel (Pola Agroforestry) | HL Bukit Jambul Gn. Patah, Pagaralam | 25 | 2017 |
| 12 | Pertamina EP | HL Bukit Nanti, OKU | 44,4 | 2017 |
| 13 | Rehabilitasi KPHL/ HL | KPHL unit XIV Mekakau Saka desa tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten OKU | 100 | |
| 14 | Penanaman KBB (Kebun BBibit KPH) | KPHL Unit XV Bukit Nanti<br>Desa Mendingin Kecamatan<br>Ulu Ogan Kabupaten OKU<br>Luas Total<br>Luas Total Hutan<br>Luas Total Non Hutan<br>Total Luas Penanaman Rehab DAS Tahun 2016<br>Total Luas Penanaman Rehab DAS Tahun 2017 | 100<br><br><br>1.590,93<br>1.497,93<br>93,00<br>365,13<br>892,80 | |

*Sumber: Bidang Pengelolaan DAS dan RHL Dishut, 2015*

**2.3.3.4.2 Kerusakan Hutan**

Lahan yang kritis terutama pada lahan gambut pada musim kemarau berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan kabut asap. Data *hotspot* atau titik api kurun waktu tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada Tabel 2. 142 Pada tahun 2015 terdapat 27.043 hotspot dan lahan yang terbakar seluas 736.563,00 hektar. Kondisi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2018 turun dibandingkan tahun 2015 dengan luas lahan yang terbakar 41.150 Hektar dan hotspot terkendali sehingga turun menjadi 1.954 hotspot yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota.

**Tabel 2.216.**
Hotspot dan Kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| NO | Kabupaten | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | hot spot | Luas (Ha) | hot spot | Luas (Ha) | hot spot | Luas (Ha) | hot spot | Luas (Ha) | hot spot | Luas (Ha) | hot spot | Luas (Ha) |
| 1 | Ogan Komering Ilir | na | na | 4.229 | 195.419 | 16.008 | 377.333 | 151 | 213,31 | 201 | 1.639 | 726 | 19.408 |
| 2 | Banyuasin | na | na | 436 | 19.050 | 1.626 | 141.126 | 52 | 82,95 | 110 | 826 | 199 | 5.812 |
| 3 | Musi Banyuasin | na | na | 618 | 5.579 | 5.288 | 108.281 | 107 | 419,85 | 78 | 360 | 162 | 1.646 |
| 4 | Musi Rawas | na | na | 478 | 24.346 | 673 | 37.666 | 139 | 156,5 | 117 | 123 | 134 | 1.776 |
| 5 | Muara Enim | na | na | 606 | 21.842 | 939 | 30.292 | 55 | 7 | 112 | 2.430 | 139 | 4.404 |
| 6 | Musi Rawas Utara | na | na | na | na | 602 | 14.501 | 102 | 47 | 99 | na | 61 | 192 |
| 7 | Ogan Ilir | na | na | 153 | 17.272 | 226 | 12.297 | 22 | 43,65 | 71 | 2.614 | 87 | 3.577 |
| 8 | Penukal Abab Lematang Ilir | na | na | na | 2.350 | 234 | 5.904 | 62 | 2,1 | 79 | 264 | 25 | 289 |
| 9 | OKU Timur | na | na | 57 | 5.224 | 301 | 3.991 | 16 | na | 59 | 883 | 51 | 79 |
| 10 | Lahat | na | na | 126 | 8.656 | 243 | 2.789 | 39 | 6 | 42 | na | 42 | na |
| 11 | Ogan Komering Ulu/OKU | na | na | 218 | 4.061 | 412 | 1.088 | 65 | na | 99 | 57 | 102 | na |
| 12 | Empat Lawang | na | na | 81 | na | 119 | 914 | 27 | na | 44 | | 67 | |
| 13 | Palembang | na | na | 5 | 37 | 13 | 380 | 4 | na | 5 | 77 | 9 | 178 |
| 14 | OKU Selatan | na | na | 183 | 475 | 313 | na | 52 | na | 64 | na | 81 | na |
| 15 | Pagaralam | na | na | 12 | na | 8 | na | 2 | na | 2 | na | 4 | na |
| 16 | Lubuk Linggau | na | na | 7 | na | 18 | na | 7 | na | 15 | na | 2 | na |
| 17 | Prabumulih | na | na | 25 | na | 20 | na | 8 | na | 9 | 12 | 4 | na |
| | Total | na | na | 7.234 | 304.311 | 27.043 | 736.562 | 910 | 978,36 | 1.206 | 9.285 | 1.895 | 37.362 |

*Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan*

Kerusakan hutan mempunyai efek negatif terhadap lingkungan fisik, ekonomi dan sosial. Kerusakan atau berkurangnya penutupan hutan di hulu pada daerah tangkapan air dapat menyebabkan erosi, tanah longsor, banjir, endapan lumpur, dan pendangkalan sungai dan muara sungai. Demikian halnya bila deforestasi terjadi di kawasan hilir atau pada lahan basah dapat menghilangkan sumber daya gambut, tumbuhan sekat hijau atau *green belt* yang dapat menimbulkan abrasi, bahaya banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan gambut, angin puting beliung. Lahan yang mengalami kebakaran dan terdegradasi mengalami perubahan struktur dan kimiawi tanah menjadi marjinal yang membutuhkan teknologi dan biaya dalam pemanfaaat untuk kegiatan perkebunan dan pertanian yang dikelola oleh rakyat.

**2.3.3.4.3 Perhutanan Sosial**

Perhutanan sosial melalui Peraturan Presiden RI No. 56 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksaan proyek strategis nasional termasuk kedalam program strategis nasional yaitu pada program pemerataan ekonomi. Sehingga saat ini program perhutanan sosial sudah menjadi program strategis nasional bukan lagi program prioritas.

Kebijakan pengelolaan sumber daya hutan saat ini telah banyak mengalami kemajuan terutama dalam memposisikan masyarakat setempat sebagai salah satu subyek penting dalam pengelolaan hutan. Kesungguhan pemerintah dalam mengimplementasikan keberpihakan kepada masyarakat setempat sebelumnya telah diperkuat dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI nomor: P. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri LHK ini yang memberikan landasan legal kepada masyarakat setempat dalam mendapatkan akses kelola kawasan hutan, menandakan adanya perubahan paradigma pembangunan kehutanan yang mengarah pada pendekatan berbasis masyarakat yang menjadi angin segar bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. melalui pendekatan seperti ini masyarakat diberi kesempatan untuk dapat terlibat langsung dalam pengelolaan hutan sekaligus berkewajiban menjaga kelestarian hutan.

Salah satu alasan bagi masyarakat melakukan perambahan di kawasan hutan salah satunya adalah tuntutan kebutuhan ekonomi. Kebijakan yang hanya memihak kelompok tertentu akan mengesampingkan nasib masyarakat yang berada di sekitar hutan, berpotensi menimbulkan kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial yang semakin menguat yang akan bermuara kepada konflik sosial dan meningkatkan laju kerusakan hutan. Maka kebijakan

pemerintah yang memberi kesempatan kepada masyarakat dalam mengelola hutan melalui skema perhutanan sosial dalam bentuk pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan Kehutanan (KK) dan Hutan Adat (HA) merupakan suatu model nyata pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berkeadilan dan didalamnya mengandung prinsip pengelolaan yang berorientasi kepada pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari.

Adapun jumlah izin/hak perhutanan sosial yang telah mendapat izin di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Maret 2019 sebanyak 94 izin/hak seluas 99,358.10 Ha dengan anggota sebanyak ± 14.719 kk; terdiri dari :

a. Hutan Kemasyarakatan (HKM) 41 unit, seluas 21,529.64 Ha
b. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 23 unit, seluas 16,258.32 Ha
c. Hutan Desa (HD) 23 unit, seluas 32,961.00 Ha;
d. Kemitraan kehutanan 6 unit seluas 28,273.14 Ha.
e. Hutan Adat 1 unit seluas 336 Ha

Lebih lengkapnya data perizinan perhutanan sosial yang telah dikeluarkan di Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada tabel berikut ini:

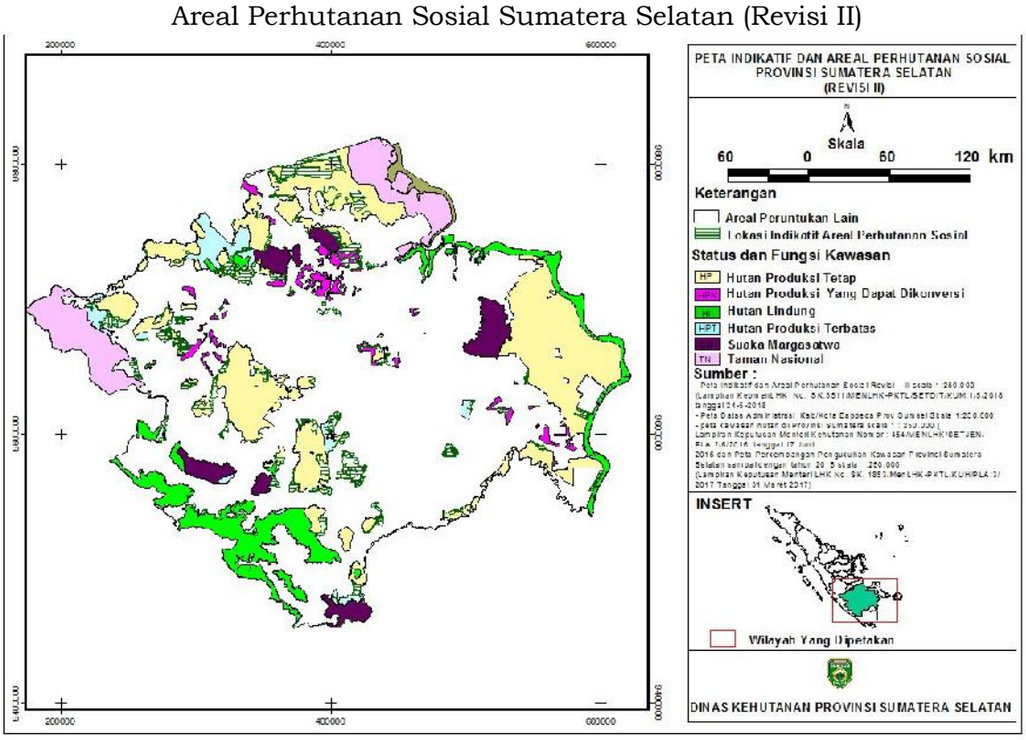
**Tabel 2.217.**
Izin Perhutanan Sosial yang telah dikeluarkan di Provinsi Sumatera Selatan

| UPTD KPH | HD | | HKm | | HTR | | Kemitraan | | Hutan Adat | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unit | Ha | Unit | Ha | Unit | Ha | Unit | Ha | Unit | Ha | Unit | Ha |
| WIL.I MERANTI | 0 | 0.00 | 2 | 1223.00 | 1 | 4,922.00 | 2 | 900.00 | 0 | 0 | 5 | 7,045.00 |
| WIL.II LALAN MENDIS | 2 | 12,185.00 | 1 | 522.00 | 1 | 3,556.00 | 3 | 17,373.14 | 0 | 0 | 7 | 33,636.14 |
| WIL.III PALEMBANG-BANYUASIN | 0 | 0.00 | 1 | 521.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 521.00 |
| WIL.IV SUNGAI LUMPUR-BTG RIDING | 0 | 0.00 | 1 | 123.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,000.00 | 0 | 0 | 2 | 10,123.00 |
| WIL.V MESUJI | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 4,377.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 14 | 4,377.59 |
| WIL.VI BUKIT NANTI-MPA | 0 | 0.00 | 2 | 730.00 | 4 | 1,185.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 1,915.73 |
| WIL.VII MEKAKAU-SAKA | 0 | 0.00 | 17 | 7115.64 | 3 | 2,217.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 20 | 9,332.64 |
| WIL.VIII SEMENDO | 14 | 17,878.00 | 6 | 1913.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 20 | 19,791.00 |
| WIL.IX SUBANJERIJI | 1 | 175.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 261.00 |
| WIL.X DEMPO | 0 | 0.00 | 7 | 2621.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 336 | 8 | 2,957.00 |
| WIL.XI KIKIM PASEMAH | 0 | 0.00 | 1 | 585.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 585.00 |
| WIL.XII LAKITAN-B.COGONG | 6 | 2,723.00 | 1 | 290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 3,013.00 |
| WIL.XIII BENAKAT | 0 | 0.00 | 1 | 5800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 5,800.00 |
| WIL.XIV RAWAS | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| **JUMLAH** | **23** | **32,961.00** | **41** | **21,529.64** | **23** | **16,258.32** | **6** | **28,273.14** | **1** | **336** | **94** | **99,358.10** |

*Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan*

Program Perhutanan Sosial memiliki peta indikatif area perhutanan sosial sebagai sasaran program perhutanan sosial. Peta indikatif area perhutanan sosial provinsi Sumatera Selatan saat ini seluas 262.633 Ha mengacu pada SK Menteri LHK No. 744/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019 tentang peta indikatif dan areal perhutanan sosial (revisi III).

**Gambar 2.63.**
Areal Perhutanan Sosial Sumatera Selatan (Revisi II)




*Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumsel adalah salah satu provinsi yang mempunyai sumber daya alam melimpah seperti energi dan pertambangan, sehingga perlu terus digali untuk meningkatkan kesejahteraan. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 kontribusi PDRB Provinsi Sumatera Selatan dari Sektor Pertambangan dan Penggalian Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku terus mengalami penurunan. Pada tahun 2014 sebesar Rp. 73,32 triliun turun menjadi Rp. 69,37 triliun namun pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp. 73,32 trilin, Pada tahun 2017 sektor Pertambangan dan Penggalian yang paling besar kontribusinya terhadap sektor Pertambangan dan Penggalian adalah Sub Sektor Pertambangan Minyak, Gas dan panas Bumi yaitu sebesar Rp. 29,34 triliun (40,06%), Sub Sektor Pertambangan Batubara dan Lignit sebesar Rp. 20,84 triliun (28,46%) dan Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya sebesar Rp. 23,30 triliun (31,48%).

**Tabel 2.218.**
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah)

| TAHUN | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pertambangan dan Penggalian** | **73.319,99** | **72.348,61** | **69.369,41** | **73.245,22** | **na** |
| a. Pertambangan Migas | 38.212,10 | 32.011,41 | 29.087,37 | 29.343,34 | na |
| b. Pertambangan Non Migas | 18.540,72 | 20.495,11 | 18.984,77 | 20.843,41 | na |
| c. Penggalian | 16.567,16 | 19.842,09 | 21.297,28 | 23.058,47 | na |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumsel 2019*

Mengenai hal kelistrikan, Sumsel menjadi salah satu penyokong besar dalam memberikan energi hingga menerangi berbagai daerah di sekitarnya. Sebagai provinsi dengan sumber daya energi yang berlimpah, Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2017 mempunyai daya kapasitas sebesar 2.168,44 MW, dengan 48 unit pembangkit. Potensi sumber energi di Sumatera Selatan sangat banyak yaitu berupa batubara, gas bumi, minyak bumi, panas bumi, dan gas metan batubara (CBM). Untuk rumah tangga yang telah dialiri listrik, di kabupaten/kota di Sumatera Selatan sampai tahun 2017 telah mencapai sebanyak 2.140,79 rumah tangga, yang terdiri dari rumah tangga pelanggan PLN dan Non PLN, secara keseluruhan setiap tahun terjadi peningkatan.Rumah yang teraliri listrik mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan ini terjadi juga akibat pembangunan perumahan dan penambahan kapasitas listrik yang dialokasikan untuk Sumatera Selatan.

Jumlah produksi hasil tambang batubara Sumatera Selatan selama kurun waktu 2013-2018 mengalami peningkatan dari 23,98 juta ton tahun 2013 meningkat menjadi 49,49 juta ton ditahun 2018. Dengan target peningkatan produksi batubara yang akan semakin meningkat di tahun-tahun kedepan maka fungsi pengawasan dan peran dari Inspektur Pertambangan untuk lebih ditingkatkan. Rasio elektrifikasi juga mengalami peningkatan dari 71,55 persen tahun 2013 meningkat menjadi 92,64 persen ditahun 2018, begitu juga dengan rasio desa berlistrik dari 88,22 persen tahun 2013 meningkat menjadi 97,75 persen ditahun 2018, jumlah pasokan listrik mengalami penurunan dari 1.246,19 MW tahun 2013 turun menjadi 2.065,19 MW, persentase desa dengan akses listrik meningkat dari 92,90 tahun 2014 meningkat menjadi 97,75 persen ditahun 2018.

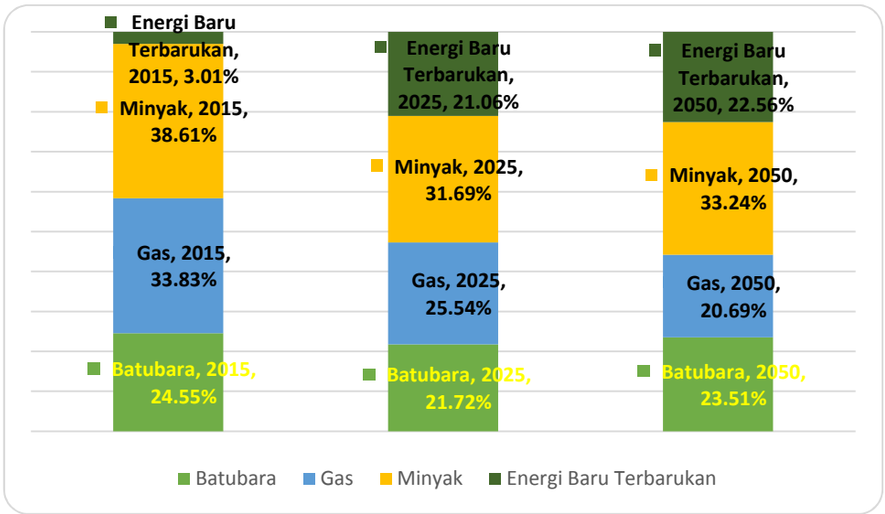
**Tabel 2.219.**
Capaian Kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2013-2018

| NO. | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Produksi Hasil Tambang Batubara | Juta Ton | 23,98 | 24,63 | 24,37 | 24,37 | 39,60 | 49,49 |
| 2 | Rasio Elektrifikasi | Persen | 71,55 | 73,86 | 80,88 | 83,82 | 87,61 | 92,64 |
| 3 | Rasio Desa Berlistrik | Persen | 88,20 | 92,96 | 94,28 | 94,96 | 97,13 | 97,75 |
| 4 | Jumlah Pasokan Listrik | (MW) | na | na | 1.246,73 | 2.051,19 | 2.065,19 | 2.065,19 |
| 5 | Persentase Desa Dengan Akses Listrik | Persen | na | 92,90 | 94,28 | 95,00 | 97,13 | 97,75 |

*Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel 2019*

Berdasarkan hasil pemodelan LEAP tahun dasar 2015, bauran energi daerah Provinsi Sumatera Selatan terbagi atas 4 jenis: batubara, minyak bumi, gas bumi, dan EBT. Dengan hasil batubara 24.55%, kemudian gas bumi sebesar 33.85% serta minyak sebesar 38.61. Selain itu, bauran energi lainnya berupa energi baru dan terbarukan menyumbang sangat kecil komposisi pada keseluruhan bauran energi daerah dimana hanya kurang dari 3.01%.

**Gambar 2.64.**
Bauran Energi Sumatera Selatan)




*Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel 2019*

Target bauran energi daerah ProvinsiSumatera Selatan di tahun 2025 dan 2050 sebesar 25.54 % dan 20.69% untuk gas bumi, 31.69% dan33.24% untuk batubara, 21.72% dan 23.51% untuk minyak bumi, kemudian 21.06% dan 22.56% bauran energi baru terbarukan. Dengan target tersebut dan dengan melihat capaian pada 2015, maka diperlukan upaya-upaya untuk mengejar target bauran energi daerah dengan memaksimalkan potensi EBT untuk meningkatkan bauran EBT Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

### 2.3.3.6. Perdagangan

#### 2.3.3.6.1. Bidang Perdagangan Luar negeri

Perkembangan realisasi ekspor dan impor di Sumatera Selatan selama tahun 2013 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.220.**
Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2018 (US$ juta)

| Tahun | Nilai Ekspor | Pertumbuhan | Impor Nilai | Pertumbuhan | Surplus | Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3.915,68 | -10,43% | 565,99 | 11,70% | 3.349,69 | -13,33% |
| 2014 | 3.084,04 | -21,24% | 750,21 | 32,55% | 2.333,83 | -30,33% |
| 2015 | 2.442,61 | -20,80% | 1466,22 | 95,44% | 976,39 | -58,16% |
| 2016 | 1.978,88 | -18,99% | 1024,71 | -30,11% | 954,17 | -2,28% |
| 2017 | 3.307,69 | 67,15% | 430,99 | -57,94% | 2.876,70 | 201,49% |
| 2018 (per Nov) | 3.463,05 | 13,06% | 704,30 | 79,67% | 2.758,75 | 3,28% |

*Sumber : BPS (Diolah oleh PDSI, Sekjen Kementerian Perdagangan)*

Dari tabel diatas, realisasi ekspor di Sumatera Selatan mengalami penurunan dari Tahun 2013 sampai dengan 2016 rata-rata sebesar -17,86%, naik kembali di tahun 2017 dan 2018 karena kuota ekspor komoditi karet dan kelapa yang semula ditetapkan pemerintah telah dicabut dan harga komoditi ekspor yang tergantung dangan harga pasar dunia. Pertumbuhan Ekspor Sumatera Selatan mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 67,15%.

Pertumbuhan Neraca Perdagangan dari tahun 2013 sampai dengan 2016 mengalami penurunan rata-rata sebesar -26,02%. Sedangkan ditahun 2017 pertumbuhan Neraca Perdagangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 201,49%, hal ini dikarenakan kuota karet dan kelapa tahun 2017 telah ditiadakan. Selain itu didukung juga komoditi bubur kayu/pulp yang mulai berproduksi di Sumatera Selatan dan mulai melakukan ekspornya. Untuk tahun 2018 (data per November 2018) pertumbuhan Neraca Perdagangan mengalami kenaikan sebesar 3,28%.

Komoditi-komoditi ekspor Sumatera Selatan pada umumnya masih didominasi oleh Karet, Batubara, CPO dan produk turunannya, Pulp, Produk Kayu dan produk turunannya. Adapun negara tujuan ekspor didominasi oleh negara-negara seperti China, Amerika Serikat, Malaysia dan India.

#### 2.3.3.6.2. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Sektor Perdaganganmerupakan salah satu sektor penyumbang PDRB Provinsi Sumatera Selatan, dimana pada Tahun 2018 sektor Perdagangan

berkontribusi sebesar 12,94% (tertinggi ke-5), untuk itu perlu untuk lebih ditingkatkan lagi salah satunya dengan mengoptimalkan jalur perdagangan antar daerah / antar pulau, untuk realisasi Nilai Perdagangan Antar Wilayah/Perdagangan AntarPulau di Sumatera Selatan tahun 2016-2018 dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel. 2.221.**
Nilai Perdagangan Antar Wilayah / Perdagangan Antar Pulau
(Moda TransportasiLaut)

| Tahun | Target(Ton) | Realisasi(Ton) | Capaian (%) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1.975.084 | 1.061.908 | 53,77% |
| 2017 | 2.098.750 | 1.343.967 | 64,04% |
| 2018 | 2.222.416 | 1.023.251 | 46,04% |

*Sumber: BPS*

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa Nilai Perdagangan Antar Wilayah / Perdagangan Antar Pulau(Moda TransportasiLaut) capaiannya di Tahun 2016 hanya sebesar 53,77% dan pada Tahun 2017 hanya sebesar 64,04%, sedangkan pada tahun 2018 hanya sebesar 46,04 %.

Selama tahun 2013 – 2018harga bahan pokok relatif stabil, fluktuasi perubahan harga barang pokok masih dibawah 10% walaupun ada beberapa komoditi yang lebih dari 10% seperti gula pasir, cabe merah besar, cabe merah keriting, bawang merah dan bawang putih. Perkembangan harga yang demikian tersebut merupakan indikator adanya kendala yang terjadi pada pasokan/logistik, sistem distribusi dan secara empiris permintaan meningkat menjelang hari-hari besar keagamaan. Tapi secara keseluruhan masih stabil karena tingkat inflasi Provinsi Sumatera Selatan masih pada kisaran ±4%.

Hasil survey Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan di Provinsi Sumatera Selatan adalah 36,4 yang menunjukkan bahwa keberdayaan konsumen Sumatera Selatan masih berada dalam level paham artinya konsumen Sumatera Selatan sudah mengenali hak dan kewajibannya sebagai konsumen, namun belum sepenuhnya mampu memanfaatkannya dan belum berperan aktif dalam memperjuangkan haknya sebagai konsumen, hal ini terlihat masih rendahnya jumlah pengaduan konsumen rata-rata per tahun 2017 dan 2018 kurang dari 100 (Tahun 2017 sebanyak 72 pengaduan/informasi dan di tahun 2018 sebanyak 88 pengaduan/informasi). Selain itu tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundangan terkait perlindungan konsumen pun masih relatif rendah, salah satunya tercermin dari rendahnya persentase barang beredar yang sesuai ketentuan SNI wajib.

### 2.3.3.7. Perindustrian

Kinerja Sektor Industri Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan pada lima tahun terakhir. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari semakin besarnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan. Hingga tahun 2017 lalu, kontribusi sektor industri pengolahan Sumatera Selatan telah mencapai angka 19,52% atau meningkat 2,37 % dari tahun 2013 lalu yang mencapai angka 17,15 %. Tingginya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Sumatera Selatan disaat tekanan krisis ekonomi global dan rendahnya harga komoditas ekspor Sumatera Selatan, merupakaan indikator positif bagi penguatan struktur perekonomian di Sumatera Selatan.

Sektor industri pengolahan Sumatera Selatan ditopang oleh peningkatan kontribusi Industri Makanan dan Minuman. Sektor Industri Makanan dan Minuman telah memberikan kontribusi sebesar 8,65% terhadap PDRB Sumatera Selatan ditahun 2017. Kinerja ini meningkat sebesar 3,12% dari 2013 lalu yang mencapai angka 5,53%. Sektor Industri Batubara dan Migas berada pada urutan kedua sebagai penyumbang terbesar PDRB Iindustri Pengolahan di Sumatera Selatan. Pada tahun 2017 lalu, Industri Batubara dan Migas mampu menyumbang 4,51% atau mengalami trend stagnan dan cenderung mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB pada lima tahun belakangan ini.

Meningkatnya kinerja Sektor Industri Makanan dan Minuman dan trend penurunan kinerja Sektor Industri Batubara dan Migas pada beberapa tahun belakangan ini, mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan terhadap struktur industri di Sumatera Selatan. Dimana sebelumnya, Sumatera Selatan sangat bergantung pada kinerja Sektor Industri Batubara dan Migas yang merupakan produk bahan mentah atau produk setengah jadi, dan mulai beralih kepada Sektor Industri komoditi non-migas yang mengolah bahan baku mentah menjadi produk olahan yang lebih bernilai tambah. Perubahan komposisi tersebut merupakan indikasi positif dan sejalan dengan arahan dari Kementerian Perindustrian untuk lebih meningkatkan kontribusi sektor industri non-migas sebagai penopang utama perekonomian di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan trend perubahan struktur industri di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memfokuskan Pembangunan pada sektor-sektor industri yang mampu menghasilkan produk yang lebih bernilai tambah dan padat karya. Konsep Pembangunan Industri akan dibagi menjadi 2 (dua) Pendekatan, yaitu : Pembangunan untuk Sektor Industri Kecil dan Pembangunan untuk Sektor Industri Menengah Besar.

Pembangunan sektor Industri Kecil lebih diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan pelaku usaha untuk menghasilkan produk-produk olahan yang berdaya saing tinggi dan diversifikasi produk. Pembangunan ini dilaksanakan melalui Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; Program Pengembangan dan Pembinaan OVOP; Program pengembangan Sentra IKM; Program Peningkatan Kerjasama Pengembangan Industri; Program Pengembangan Industri Kreatif; Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM Bagi Kelompok Masyarakat Miskin.

Pembangunan Sektor Industri Menengah dan Besar diarahkan pada upaya untuk percepatan hilirisasi komoditi unggulan Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan stimulus bagi peningkatan investasi hilirisasi Industri pada Komoditi Karet, Kelapa Sawit, Kelapa Dalam dan Kopi serta jenis Industri Menengah Besar lainnya. Para pelaku Industri diarahkan pada Peningkatan kemampuan kapasitas produksi, Peningkatan skala usaha, Peningkatan daya saing industri, Penerapan Industri Hijau, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.

**Tabel 2.222.**
Persentase Kontribusi Sektoral Industri PengolahanTerhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018

| No. | Lapangan Usaha | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri Pengolahan | | 18,39 | 18,35 | 18,53 | 18,74 | 18,92 | 18,82 |
| 1 | Industri Batubara dan Pengilangan Migas | 5,39 | 5,22 | 5,08 | 5,08 | 4,90 | 4,64 |
| 2 | Industri Makanan dan Minuman | 5,51 | 5,70 | 6,02 | 6,47 | 6,93 | 7,28 |
| 3 | Pengolahan Tembakau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,17 |
| 7 | Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 1,36 | 1,30 | 1,30 | 1,22 | 1,18 | 1,17 |
| 8 | Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional | 1,74 | 1,82 | 1,91 | 1,84 | 1,76 | 1,69 |
| 9 | Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik | 3,40 | 3,35 | 3,28 | 3,25 | 3,31 | 3,21 |

| No. | Lapangan Usaha | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Industri Barang Galian bukan Logam | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,30 |
| 11 | Industri Logam Dasar | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 12 | Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,17 |
| 13 | Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 14 | Industri Alat Angkutan | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 15 | Industri Furnitur | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| 16 | Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |

*Sumber : BPS Sumatera Selatan, 2019 diolah BAPPEDA Prov. Sumsel*

Perkembangan hilirisasi industri di Sumatera Selatan dengan memanfaatkan potensi bahan baku lokal telah mulai tumbuh pesat di beberapa sentra bahan baku sumber industri, seperti kelapa sawit dan karet. Hal ini dapat dilhat dari table di bawah ini.

**Tabel 2.223.**
Industri Menengah dan Besar Berbasis Sumber Daya Alam Lokal di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan 2018

| KAB BANYUASIN | | KOTA PALEMBANG | | KAB MUARA ENIM | | KAB OKU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Industri MB | No | Industri MB | No | Industri MB | No | Industri MB |
| 1 | PTPN UU Tebenan (SIR 20) | 1 | PTP Mitra Ogan (CPO) | 1 | PTPN UU Sungai Lengi (CPO) | 1 | PTP VII UU Kebun Baturaja (SIR 20) |
| 2 | PT. Tjakrawala Sembawa (Lateks) | 2 | PT.Prashida Aneka Niaga (SIR 20) | 2 | PTPN UU Sungai Niru (CPO) | 2 | Semen Baturaja |
| 3 | PT. Central Banindo Mahkota (Vulkanisir) | 3 | Gadjah Ruku (SIR 20) | 3 | Mahkota Andalan Sawit (CPO) | | |
| 4 | PT. Tunas Baru Lampung (Minyak Goreng) | 4 | PT.Hok Tong (SIR 20) | 4 | PT. Lingga Djaja (SIR 20) | | |
| 5 | PT.Bintang Gasing Persada (Crumb Rubber) | 5 | PT.Panca Samudera Simpati (SIR 20) | | | | |
| 6 | PT.Mardec Musi Lestari (SIR 20) | 6 | PT. Remco (SIR 20) | | | | |
| 7 | PT. Sumatera Candi Kencana (Kopra) | 7 | PT.Sunan Rubber (SIR 20) | | | | |
| 8 | PT.Melania Indonesia (RSS/CPO) | 8 | PT. Muara Kelingi (SIR 10,20) | | | | |
| 9 | PT. Sinar Alam Permai (Minyak Goreng) | 9 | PT.Aneka Bumi Pratama (SIR 20) | | | | |
| 10 | PTP VII Musi Landas (Karet) | 10 | PT.Kirana Musi Persada (SIR 20) | | | | |

*Sumber : Dinas Perindustrian Prov. Sumsel*

### 2.3.3.8. Transmigrasi

Penyelenggaraan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan telah dimulai pada zaman Kolonial Belanda yaitu tahun 1937 sampai dengan 1940 yang dilaksanakan pada dua lokasi yaitu di Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas. Ditentukannya kedua lokasi tersebut di atas oleh pemerintah Belanda sebagai lokasi pertanian karena lahannya subur dan cocok untuk areal pertanian, mudah dijangkau dari pulau jawa melalui Provinsi Lampung sehingga relatif ongkos transport lebih murah. Mengacu pada database penyelenggaraan transmigrasi tahun 2017, jumlah transmigran yang ditempatkan dari pra pelita sampai dengan tahun 2017 mencapai 235.998 KK atau 983.310 jiwa yang tersebar pada 11 (sebelas) Kabupaten.

**Tabel 2.224.**
Sebaran Jumlah Transmigran Yang Ditempatkan
di Kabupaten Sumatera Selatan Hingga Pada Tahun 2017

| No | Kabupaten | Jumlah UPT | Jumlah Transmigran (KK) | Asal Transmigran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Musi Banyuasin | 91 | 38.760 | Jabar; Jateng; Jatim; DIY; DKI; Bali |
| 2 | Banyuasin | 125 | 55.614 | Jabar; Jateng; Jatim; DIY; DKI; Bali, |
| 3 | Musi Rawas | 87 | 25.558 | Jabar; Jateng; Jatim; DIY; DKI; Bali |
| 4 | Lahat | 31 | 9.154 | Jabar; Jateng; Jatim; DIY; DKI; Bali |
| 5 | Empat Lawang | 4 | 715 | Jatim, Bali |
| 6 | Ogan Komering Ilir | 99 | 38.822 | Jabar; Jateng; Jatim; DIY; DKI; Bali |
| 7 | OKU Selatan | 2 | 300 | Jabar; Jateng |
| 8 | Ogan Komering Ulu | 22 | 9.002 | Jabar; Jateng; Jatim; DIY; DKI; Bali |
| 9 | OKU Timur | 140 | 45.187 | Jabar; Jateng; Jatim; DIY; DKI; Bali |
| 10 | Muara Enim | 40 | 11.486 | Jabar; Jateng; Jatim; DIY; DKI; Bali; Lampung |
| 11 | Ogan Ilir | 5 | 1.400 | Jabar; Jateng; Jatim; DKI |
| **Total** | | **646** | **235.998** | |

*Sumber : Database Transmigrasi Sumatera Selatan Tahun 2017*

Pada tahun 2017, jumlah transmigran yang ditempatkan di lokasi transmigrasi di Sumatera Selatan menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 125 jiwa. Adapun total capaian pembangunan di bidang Transmigrasi antara lain Penempatan transmigrasi umum sampai akhir Desember 2017 sebanyak 2.412 jiwa. Tahun 2018 tidak ada penempatan transmigran di Sumatera Selatan.

**Tabel 2.225.**
Realisasi Penempatan Transmigran Tahun 2013 - 2017

| No | Kabupaten/ Lokasi/ UPT | Tahun Penempatan | | | | | Jumlah KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | Ogan Komering Ilir | 150 | 100 | 716 | 100 | 20 | 1,086 |
| 2 | Musi Rawas | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 3 | Banyuasin | 100 | 50 | 277 | 80 | 30 | 537 |
| 4 | Lahat | - | - | 329 | 75 | 75 | 479 |
| 5 | Musi Banyuasin | 110 | - | - | 75 | - | 185 |
| 6 | Ogan Ilir | 75 | - | - | 50 | - | 125 |
| | **Jumlah** | **450** | **150** | **1,322** | **380** | **125** | **2,412** |

*Sumber: Database Transmigrasi Sumatera Selatan Tahun 2017*

Peningkatan dan perbaikan Kondisi Sarana dan Prasarana pada permukiman transmigrasi setiap tahunnya menunjukan capaian yang cukup positif. Semua telah dilakukan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Kawasan transmigrasi meskipun anggaran masih banyak memanfaatkan anggaran dari pemerintah pusat.

**Tabel 2.226.**
Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Dibangun Pada Permukiman Transmigrasi

| No | Sarana/Prasarana | Satuan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Rumah Transmigrasi | Unit | 450 | 100 | 380 | 380 | 130 |
| 2 | Jumlah Rumah Memiliki Jamban | Unit | 450 | 100 | 380 | 380 | 130 |
| 3 | Jumlah Rumah Memiliki Sumur Galian | Unit | 0 | 0 | 56 | 77 | 38 |
| 4 | Jumlah Rumah Ibadah | Unit | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Jumlah Gedung SD | Unit | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Jumlah Puskesmas Pembantu | Unit | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Panjang Jalan Desa | km | 205 | 5 | 13 | 13.02 | 5.38 |
| 8 | Jumlah Panjang Drainase | m | 5.000 | 40.000 | 0 | 3.000 | 2.920 |

*Sumber : Database Transmigrasi Sumatera Selatan Tahun 2017*

Selain dukungan anggaran pemerintah provinsi yang masih minim, masih ada beberapa permasalahan yang krusial yang terjadi perihal masalah pertahanan dalam penyelengaraan transmigrasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Sampai dengan tahun 2017, masih ada sekitar 58 permasalahan sengketa pertanahan di 8 Kabupaten yang dibagi kedalam empat jenis permasalahan yaitu sengketa terhadap tuntutan penduduk sebanyak 18 masalah, sengketa terhadap investor sebanyak 15 masalah, sengketa terhadap hak transmigrasi sebanyak 11 masalah dan sengketa terhadap Kawasan hutan

sebanyak 14 masalah. Hingga saat ini telah dilakukan upaya penyelesaian sengketa pertanahan di lahan kawasan transmigrasi baik oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota terkait dan Provinsi melalui upaya mediasi dan tinjauan ke lapangan.

**Tabel 2.227.**
Rekapitulasi Permasalahan Pertanahan Dalam Penyelenggaraan Transmigasi Tahun 2017

| No | Kabupaten | Jenis Permasalahn | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Tuntutan Penduduk | Dengan Investor | Hak Transmigrasi | Dengan Kawasan Hutan |
| 1 | Ogan Komering Ilir | - | 1 | - | 1 |
| 2 | Musi Banyuasin | 4 | 2 | - | 4 |
| 3 | Banyuasin | 4 | 3 | 1 | - |
| 4 | Musi Rawas | 5 | 1 | 8 | 8 |
| 5 | Lahat | 1 | 6 | - | - |
| 6 | Ogan Ilir | 2 | - | - | - |
| 7 | Muara Enim | 2 | 1 | - | 1 |
| 8 | OKU Timur | - | 1 | 2 | - |
| | **Total** | **18** | **15** | **11** | **14** |

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Sumatera Selatan Tahun 2017*

Hak Milik Atas Tanah Transmigrasi yang berkekuatan hukum / berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Agraria / Badan Pertanahan Nasional belum seluruhnya diterima oleh warga transmigrasi, hal ini menjadi beban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Transmigran setiap tahun sangat rendah dikarenakan keterbatasan anggaran, sampai akhir tahun 2017 beban tunggakan penerbitan SHM atas tanah transmigran ada 60.489 Persil/Sertifikat dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 2.228.**
Beban tunggakan sertifikat hak milik
Atas tanah transmigran – provinsi sumatera selatan Tahun 2017

| No | Kabupaten | Penempatan KK | Penerbitan Sertifikat Lahan (Persil) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Sisa |
| 1 | Musi Banyuasin | 38.760 | 80.751 | 72.167 | 8.584 |
| 2 | Banyuasin | 55.614 | 167.831 | 159.492 | 8.339 |
| 3 | Musi Rawas | 25.558 | 99.079 | 91.075 | 8.004 |
| 4 | Lahat | 9.154 | 55.896 | 39.225 | 16.671 |
| 5 | Empat Lawang | 715 | 19.709 | 16.067 | 3.642 |
| 6 | Ogan Komering Ilir | 38.822 | 25.209 | 15.707 | 9.502 |
| 7 | OKU Selatan | 300 | 300 | 300 | - |
| 8 | Ogan Komering Ulu | 9.002 | 3.600 | 2.220 | 1.380 |

| No | Kabupaten | Penempatan KK | Penerbitan Sertifikat Lahan (Persil) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Sisa |
| 9 | OKU Timur | 45.187 | 26.742 | 22.915 | 3.827 |
| 10 | Muara Enim | 11.486 | 13.213 | 12.845 | 368 |
| 11 | Ogan Ilir | 1.400 | 1.147 | 975 | 172 |
| **Total** | | **235.998** | **493.477** | **432.988** | **60.489** |

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Sumatera Selatan Tahun 2017*

### 2.3.4. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang

#### 2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

##### 2.3.4.1.1. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan UU 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan nasional menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana pembangunan tahunan. Ketiga amanat ini sudah dipenuhi dan dijabarkan oleh Provinsi Sumatera Selatan melalui penyusunan RPJP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025, RPJM daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008-2013 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kurun waktu 2008-2013 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 di Provinsi Sumatera Selatan. Permasalahan dalam perencananan pembangunan adalah belum adanya aplikasi/sistem informasi untuk menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran.

**Tabel 2.229.**
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan

| No. | Dokumen | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | RPJPD 2005-2025 | Ada | Perda Prov. Sumsel No.17 Tahun 2007 |
| 2 | RPJMD 2008-2013 | Ada | Perda Prov. Sumsel No.13 Tahun 2009 |
| 3 | RPJMD 2013-2018 | Ada | Perda Prov. Sumsel No. 9 Tahun 2014 |
| 4 | RKPD: | | |
| | -Tahun 2013 | Ada | Pergub Sumsel No. 21 Tahun 2012 |
| | -Tahun 2014 | Ada | Pergub Sumsel No.16 Tahun 2013 |
| | -Tahun 2015 | Ada | Pergub Sumsel No. 12 Tahun 2014 |
| | -Tahun 2016 | Ada | Pergub Sumsel No.32 Tahun 2015 |
| | -Tahun 2017 | Ada | Pergub Sumsel No. 34 Tahun 2016 |
| | -Tahun 2018 | ada | |
| 5 | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam RKPD | Ada | 70% |
| 6. | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam PBD | Ada | 70% |

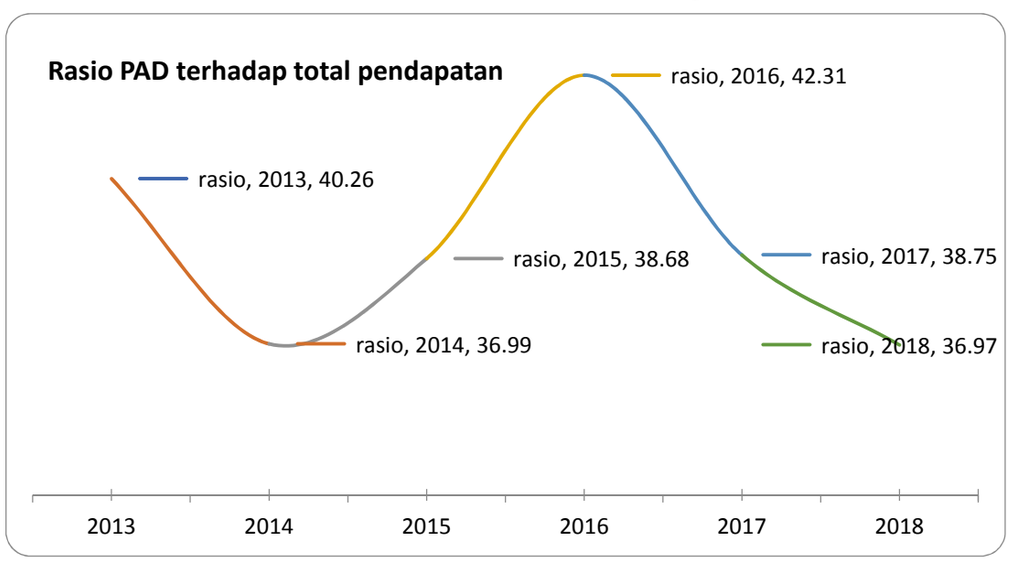
*Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan*

**2.3.4.2. Keuangan**

Nilai kemandirian keuangan pemerintah Sumatera Selatan dapat dilihat dari tingkat desentralisasi fiskal atau rasio penerimaan sektor PAD terhadap Total Pendapatan Daerah, dimana dalam 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 38,99%. Secara teori, dalam Bisma (2010:78) termasuk dalam kategori cukup mendekati baik, dimana kategori baik rasio PAD terhadap total pendapatan diatas 40%, yang berarti daerah telah mandiri secara keuangan dan tidak sepenuhnya tergantung dengan pemerintah pusat. Adapun pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2017, pelimpahan kewenangan pengelolaan sekolah menengah atas (SMA) ke Provinsi berpengaruh terhadap rasio kemandirian keuangan daerah.

Penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah, selama kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,99%. Dari empat komponen PAD kontribusi terbesar didapat melalui penerimaan sektor pajak daerah dengan rata-rata rasio diatas 90% atau dominan dibandingkan komponen PAD lainnya, diikuti penerimaan sektor lain-lain PAD yang sah, hasil pengelolaan kekayan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah. Upaya yang dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang diambil menjadi faktor penentu dalam capaian PAD 5 tahun terakhir dan terus mengupayakan peningkatan komponen lain PAD yang belum optimal penerimaannya.

**Gambar 2.63.**
**Nilai Kemandirian Keuangan**




*Sumber: APBD Provinsi Sumatera Selatan diolah*

Keterangan: KF = PAD x 100%/ TOTAL PENERIMAAN

Dari sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan provinsi Sumatera telah memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari tahun 2015, 2016 dan 2017. Permasalahannya kedepan diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan predikat WTP ini, kendala yang dihadapi antara lain masih terbatasnya SDM ditambah dengan terjadinya perpindahan SDM antar instansi sehingga berpotensi kepada inkonsistensi SDM untuk mempertahankan Laporan keuangan WTP.

### 2.3.4.3. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka pengembangan kompentensi Aparat Negeri Sipil lingkup Provinsi Sumatera Selatan, maka telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh ASN. Persentase kepesertaan ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dari tahun ke tahun semakin meningkat, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.230.**
Persentase ASN di Lingkungan Pemprov yang mengikuti Diklat
Tahun 2014-2017

| Indikator | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Pendidikan dan Pelatihan Formal | 20,23 | 32,57 | 42,72 | 49,2 |
| Pendidikan dan pelatihan Struktural | 66,67 | 85,08 | 91,33 | 95,25 |

*Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan*

Capaian Pendidikan dan pelatihan formal, belum menghitungkan data penambahan aparatur SMA/SMK dari Kabupaten Kota, sedangkan capaian Pendidikan dan pelatihan struktural belum memperhitungkan pejbat yang mutasi, pensiun dan faktor lainnya sehingga pemenuhan hak ASN untuk meningkatkan kompetensinya belum sepenuhnya terpenuhi.

Dalam rangka penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan standar kompetensi jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan Pembinaan Karier ASN berupa seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan dalam memberikan pemahaman dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat telah melaksanakan pembinnaan disiplin pegawai. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 2.231.**
Indikator Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Jumlah jabatan pimpinan tinggi yang terisi melalui seleksi terbuka | na | na | na | 17 | na |
| Persentase Disiplin PNS | na | 89,36 | 89,36 | 91,61 | 98,19 |

*Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan*

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,serta memberikan pemahaman dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat telah dilaksanakan kegiatan pembinaan disiplin pegawai, namun belum maksimalnya penegakan disiplin pegawai pada Perangkat Daerah masih dirasakan terkait belum adanya absensi terintegrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kurangnya pemahaman dan komitmen Perangkat Daerah dalam penegakan disiplin pegawai. Ini dapat terlihat dari tabel berikut:

**Tabel 2.232.**
Persentase Disiplin PNS Provinsi Sumatera Selatan

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Prosentase Disiplin PNS | % | na | 89,36 | 89,36 | 91,61 | 98,19 |

*Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan*

**Tabel 2.233.**
Rekapitulasi Hukuman Disiplin PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

| Jenis Hukuman | Tahun (orang) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| **Tingkat Ringan** | Data di OPD tidak dilaporkan ke BKD Prov. Sumsel | **3** | **2** | **12** |
| *- Teguran lisan* | na | 3 | 1 | 6 |
| *- Teguran tertulis* | na | na | 1 | 6 |
| *- Pernyataan tidak puas secara tertulis* | na | na | na | na |
| **Tingkat Sedang** | **1** | **1** | **0** | **3** |
| *- Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun* | 1 | 1 | na | na |
| *- Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun* | na | na | na | 2 |
| *- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 1 tahun* | na | na | na | 1 |
| **Tingkat Berat** | **1** | **5** | **4** | **10** |
| *- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun* | na | 1 | 1 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *- Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah* | na | na | na | na |
| *- Pembebasan dari jabatan* | na | 1 | na | na |
| *- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan* | na | 3 | 1 | 3 |
| *- Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS* | 1 | na | 2 | 5 |
| **Jumlah** | **2** | **9** | **6** | **25** |

*Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan*

Dalam rangka Penempatan PNS sesuai dengan standar kompetensi jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan Karier PNS berupa seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Adapun Jumlah jabatan pimpinan tinggi yang terisi melalui seleksi terbuka dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.234.**
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Yang Terisi Melalui Seleksi Terbuka di Provinsi Sumatera Selatan

| **Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*** | **Satuan** | **Kondisi Kinerja Awal** | | | | **Capaian Kinerja Program** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| | | **Target 2017** | **Realisasi** | **Target 2018** | **Realisasi** | **target** | **target** | **target** | **target** | **target** |
| Jumlah jabatan pimpinan tinggi yang terisi melalui seleksi terbuka | Jabatan | 18 | 17 | Tidak dilaksanakan | | 15 | 20 | 4 | 8 | 7 |

*Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.4.4. Pengawasan

Pada Tahun 2017, sampai dengan triwulan ini, indikator Persentase SKPD dengan nilai Akuntabilitas kategori B telah terealisasi capaiannya. Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut telah banyak dilaksanakan pada pada triwulan IV Tahun 2017. Hal ini dikarenakan biasanya pada triwulan kedua dan triwulan ketiga penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan baru berjalan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mulai menilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada instansinya masing-masing pada tahun 2016. Tingkat maturitas SPIP Sumatera Selatan pada tahun 2016 sebesar 1,52 meningkat menjadi 3,08 pada tahun 2018. Dengan menempati tingkat maturitas pada level 3 pada tahun 2018, artinya

Sumatera Selatan telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Indikator Kinerja pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2013-2018 :

**Tabel 2.235.**
Capaian Indikator Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

| No. | Bidang Urusan/Indikator | Capaian | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Presentase SKPD dengan status laporan kinerja baik | na | 62% | 97,56% | 92,68% | 95% | 97% |
| 2 | Persentase Peningkatan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 2,2961% | 2,5298% | 2,6802% | 2,6885% | 2,8200% | na |
| 3 | Tingkat Maturitas SPIP | na | na | na | 1,52 | 2,68 | 3,08 |

*Sumber : Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dan e-monev Sumsel.*

APIP Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan juga telah melakukan penilaian terhadap maturitas SPIP pada masing-masing instansinya, dengan hasil masing-masing sebagai berikut:

**Tabel 2.236.**
Skor Maturitas SPIP Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018

| No. | Kabupaten/Kota | Skor Maturitas SPIP | Tingkat Maturitas SPIP |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Lahat | 3,127 | 3 |
| 2 | Kabupaten Muara Enim | 3,120 | 3 |
| 3 | Kota Palembang | 3,083 | 3 |
| 4 | Kota Lubuk Linggau | 3,038 | 3 |
| 5 | Kabupaten Musi Rawas | 3,038 | 3 |
| 6 | Kota Prabumulih | 3,033 | 3 |
| 7 | Kabupaten Musi Banyuasin | 3,023 | 3 |
| 8 | Kabupaten Banyuasin | 3,023 | 3 |
| 9 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 3,023 | 3 |
| 10 | Kota Pagar Alam | 3,000 | 3 |
| 11 | Kabupaten Ogan Ilir | 3,000 | 3 |
| 12 | Kabupaten Musi Rawas Utara | 3,000 | 3 |
| 13 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 3,000 | 3 |

| No. | Kabupaten/Kota | Skor Maturitas SPIP | Tingkat Maturitas SPIP |
|---|---|---|---|
| 14 | Kabupaten Pali | 2,389 | 2 |
| 15 | Kabupaten OKU Timur | 2,301 | 2 |
| 16 | Kabupaten OKU Selatan | 2,104 | 2 |
| 17 | Kabupaten Empat Lawang | 2,042 | 2 |

*Sumber : Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.3.4.5. Sekretariat Dewan

Pada tahun 2017 Anggota DPRD yang telah mengalami peningkatan kapasitasnya sebesar 85 persen, ini meningkat dari capaian tahun 2016 yang hanya mencapai 71 persen. Dalam hal perumusan kebijakan publik, anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik pada tahun 2017 berada pada angka 74 persen yang menurun dari tahun 2016 sebesar 80 persen. Melihat partisipasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat dalam perumusan kebijakan publik maka jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik sebesar 45 buah masukan pada tahun 2017 dan begitu juga pada tahun 2016, sedangkan jumlah masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik sebesar 23 buah masukan pada tahun 2017, ini meningkat dari tahun 2016 yang jumlah masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik sebanyak 22 buah masukan.

**Tabel 2.237.**
Capaian Indikator Sekretariat Dewan Provinsi Sumatera Selatan

| No. | Bidang Urusan/Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Presentase anggota dewan yang meningkat kapasitasnya | na | 90,40% | 78,67% | 71% | 85% |
| 2 | Persentase anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik | na | 70% | 85,20% | 80% | 74% |
| 3 | Jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik | na | 52 | 45 | 45 | 45 |
| 4 | Jumlah masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik | na | 12 | 24 | 22 | 23 |

*Sumber : Sekretariat Dewan Provinsi Sumatera Selatan dan e-monev Sumsel.*

### 2.3.4.6. Biro-Biro (Sekretariat Daerah)

**a) Biro Administrasi Pembangunan**

Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Biro Administrasi Pembangunan, maka capaian indikator sebagai berikut :

**Tabel 2.238.**
Capaian Indikator Biro Administrasi Pembangunan
Provinsi Sumatera Selatan

| No. | Bidang Urusan/Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) | | | | | 100% |

*Sumber : Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan e-monev Sumsel.*

**b) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**

Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antara Provinsi Sumatera Selatan dengan provinsi tetangga telah dilaksanakan sejak tahun 2015, dan sampai dengan tahun 2017 tapal batas yang sudah diselesaikan sebanyak 17 batas daerah, sebagai berikut :

**Tabel. 2.239.**
Penetapan Batas Wilayah Provinsi Sumsel dengan
Provinsi Tetangga Tahun 2013-2017

| No. | Tahun | Judul Peraturan | Nomor Peraturan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | Batas Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan Batas Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan | Permendagri No.131 TH 2017 |
| 2 | 2017 | Batas Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan | Permen No.129 TH 2017 |
| 3 | 2017 | Batas Daerah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan | Permen No.128 TH 2017 |
| 4 | 2017 | Batas Daerah Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Dengan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan | Permen No.127 TH 2017 |

| No. | Tahun | Judul Peraturan | Nomor Peraturan |
|---|---|---|---|
| 5 | 2017 | Batas Daerah Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan | Permen No.126 TH 2017 |
| 6 | 2017 | Batas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu | Permendagri No.103 TH 2017 |
| 7 | 2017 | Batas Daerah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu | Permendagri No.102 TH 2017 |
| 8 | 2017 | Batas Daerah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Dan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu | Permendagri No.101 TH 2017 |
| 9 | 2017 | Batas Daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu | Permendagri No.100 TH 2017 |
| 10 | 2017 | Batas Daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu | Permendagri No.99 TH 2017 |
| 11 | 2017 | Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu | Permendagri No.98 TH 2017 |
| 12 | 2017 | Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu | Permendagri No.52 TH 2017 |
| 13 | 2017 | Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu | Permendagri No.51 TH 2017 |
| 14 | 2017 | Batas Daerah Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu | Permendagri No.50 TH 2017 |
| 15 | 2017 | Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu | Permendagri No.49 TH 2017 |
| 16 | 2017 | Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu | Permendagri No.48 TH 2017 |
| 17 | 2017 | Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu | Permendagri No.47 TH 2017 |

*Sumber : JDIH Kementerian Dalam Negeri*

Sedangkan batas daerah antar kabupaten/kota di dalam Provinsi Sumatera Selatan kurun waktu 2013-2017 yang sudah diselesaikan sebanyak 5 batas, sebagai berikut :

**Tabel. 2.240.**
Penetapan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota dalam
Provinsi Sumsel Tahun 2013-2017

| No. | Tahun | Judul Peraturan | Nomor Peraturan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan | Permen No.13 TH 2014 |
| 2 | 2017 | Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan | Permendagri No.46 TH 2017 |
| 3 | 2017 | Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan | Permendagri No.45 TH 2017 |
| 4 | 2017 | Batas Daerah Kota Prabumulih Dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan | Permendagri No.44 TH 2017 |
| 5 | 2017 | Batas Daerah Kabupaten Banyuasin Dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan | Permendagri No.43 TH 2017 |

*Sumber : JDIH Kementerian Dalam Negeri*

**c) Biro Hukum dan HAM**

Sesuai Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur merupakan salah satu jenis peraturan Perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintakan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Biro Hukum dan HAM merupakan instansi yang membidangi hukum yang melaksanakan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.241.**
Jumlah Peraturan yang disahkan di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2018

| U R A I A N | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pergub | 49 | 60 | 62 | 87 | 56 | 77 | 314 |
| Perda | 14 | 18 | 11 | 18 | 16 | 8 | 77 |
| Perda Inisiatif Dewan | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 |
| Jumlah | 66 | 82 | 73 | 105 | 77 | 86 | 403 |

*Sumber: Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel*

Sejak tahun 2013-1018 hasil capaian jumlah Pergub dan Perda yang telah ditetapkan tergantung dari Usulan Perangkat Daerah Pemrakarsa/Pengusul yang didasarkan atas :

a) Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
b) Rencana pembangunan daerah;
c) Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembatuan; dan aspirasi masyarakat daerah

**d) Biro Organisasi**

Salah satu alat ukur akuntabilitas adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dari tahun 2013 sampai tahun 2018, predikat SAKIP Provinsi Sumatera Selatan yang diterima terus meningkat.

**Tabel 2.242.**
Nilai LKjIP(SAKIP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

| Tahun | Nilai Angka | Kategori | Predikat |
|---|---|---|---|
| 2013 | 68,20 | B | Baik |
| 2014 | 70,66 | B | Baik |
| 2015 | 75,11 | BB | Sangat Baik |
| 2016 | 76,19 | BB | Sangat Baik |
| 2017 | 80,01 | A | Memuaskan |
| 2018 | 78,71 | BB | Memuaskan |

Sumber : LKPJ Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel, 2018

Secara spesifik, peningkatan skor SAKIP dipengaruhi antara lain: (1) keterlibatan langsung pimpinan daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja, melalui kegiatan telaah realisasi anggaran dan kinerja secara triwulanan yang semakin meningkat; (2) turunan (*cascading)* sasaran nasional ke dalam visi-misi organisasi sampai pada tingkatan terendah (indikator kinerja individu) telah diperbaiki; (3) penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja dan pelayanan yang mulai optimal.

**e) Biro Humas dan Protokol**

Satu diantara cara untuk melaksanakan program kehumasan dan keprotokolan adalah dengan program peningkatan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dalam rangka terlaksananya pelayanan maksimal terhadap Tamu Pimpinan, terlaksananya kelancaran kunjungan kerja Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah, dan terlaksananya silaturahmi untuk mempererat hubungan antara Pemimpin Daerah dengan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.243.**
Hasil Capaian Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Kunjungan Kerja Kepala /Inspeksi Daerah/ Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) ke Dalam Daerah | 45 Kali | 115 kali | 83 Kali | 62 kali | 132 Kali |
| 2 | Kunjungan Kerja Kepala /Inspeksi Daerah/ Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) ke Luar Daerah | 38 Kali | 98 Kali | 62 Kali | 83 kali | 161 kali |
| 3 | Kunjungan Kerja Kepala /Inspeksi Daerah/ Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) ke Luar Negeri | 4 Kali | 12 kali | 15 kali | 15 kali | 6 kali- |

*Sumber : LKPJ Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumsel, 2019*

Sejak 2014-2019, hasil capaian kehumasan dan keprotokolan dapat diasumsikan meningkat signifikan pada tahun 2015 dan seimbang di tahun 2017-2018.

**f) Biro Kesejahteraan Rakyat**

**1. Peringkat Provinsi Sumatera Selatan pada STQ/MTQ Nasional**

Melalui Program Perumusan Kebijakan Bidang Keagamaan, salah satu capaian Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan di bidang Keagamaan adalah prestasi Peringkat Kafilah Provinsi Sumatera Selatan pada STQ/MTQ Nasional.

**Tabel 2.244.**
Prestasi Kafilah Provinsi Sumatera Selatan pada STQ/MTQ Nasional

| TAHUN | EVENT | PRESTASI | PERINGKAT | KET |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | STQ | - | - | - |
| 2014 | MTQ | 1. Juara III Tilawah Dewasa Pria<br>2. Juara II Tafsir Bahasa Inggris Putri<br>3. Juara III Tilawah Anak Putri<br>4. Juara Harapan II Tilawah Cacat Netra Putri<br>5. Juara Harapan III Qiro'at Sab'ah<br>6. Juara Harapan III Menulis Makalah Al-Qur'an | 10 Besar | - |
| 2015 | STQ | - | - | - |
| 2016 | MTQ | 1. Juara I (Cabang Menulis Makalah Al-Qur'an (MMQ) putera<br>2. Juara Harapan II Cabang Tafir Bahasa Indonesia<br>3. Juara Harapan III Kaligrafi | 30 Besar | |

| TAHUN | EVENT | PRESTASI | PERINGKAT | KET |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | STQ | 1. Juara Harapan I Tilawah Dewasa Putra<br>2. Juara Harapan II Golongan 5 Juz dan Tilawah Putra | 30 Besar | - |
| 2018 | MTQ | 1. Juara Terbaik III Golongan Qira'at Murottal Dewasa Putra<br>2. Juara Terbaik II Golongan Qira'at Murottal Remaja Putra<br>3. Juara Harapan I Golongan Tafsir Bahasa Arab Putri<br>4. Juara Harapan II Golongan Tilawah Remaja Putri<br>5. Juara Harapan III Golongan MMQ Putra<br>6. Juara Harapan III Golongan Qira'at Murottal Remaja Putri | 30 Besar | - |

*Sumber : Lembaga Pengembangan Tilawatil Al-Qur'an (LPTQ) Prov. Sumsel*

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada program perumusan kebijakan bidang Keagamaan, diantaranya STQ/MTQ tingkat Provinsi sebagai penjaringan calon peserta STQ/MTQ tingkat Nasional, yang dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota sebagai tuan rumah serta Lembaga Pengembangan Tilawatil Al-Quran tingkat Provinsi dan Kab/Kota, melalui kegiatan ini Pemerintah Provinsi menyediakan Panitia dan Panitera Provinsi, Dewan Hakim, dan Hadiah Pemenang. Selanjutnya Pemerintah Provinsi memfasilitasi pemberangkatan Kafilah STQ/MTQ ke tingkat Nasional. Prestasi yang telah dicapai ini dapat dimaksimalkan capaiannya melalui program perumusan kebijakan bidang keagamaan dengan memaksimalkan fasilitasi kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat untuk melakukan pembinaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi serta memaksimalkan peran Lembaga Pengembangan Tilawatil Al-Qur'an (LPTQ) tingkat Provinsi dan Kab/Kota dan juga Lembaga Keagamaan lainnya seperti BKPRMI (TK/TPA) dan Rumah Tahfidz.

**2. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP. UKS/M) Provinsi Sumatera Selatan**

Melalui Program Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan, salah satu capaian Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan di bidang tersebut adalah Jumlah TP. UKS/M Kab/Kota yang telah terbentuk dan memiliki TP. UKS/M Kecamatan, sehingga terwujudnya pembinaan sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menjaring dan menghasilkan Sekolah/Madrasah yang memenuhi kriteria Sekolah Sehat.

**Tabel 2.245.**
Perbandingan Jumlah Sekolah Sehat Terhadap Jumlah Sekolah

| SD/MI | | SMP/MTs | | SMA/SMK/MA | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jumlah Sekolah** | **Jumlah Sekolah Sehat** | **Jumlah Sekolah** | **Jumlah Sekolah Sehat** | **Jumlah Sekolah** | **Jumlah Sekolah Sehat** |
| 4710 | 69 | 1138 | 23 | 640 | 19 |

*Sumber : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP. UKS/M Prov. Sumsel)*
*Catatan : Jumlah Sekolah Sehat adalah Sekolah yang telah melalui penilaian Sekolah Sehat Nasional*

**3. Festival Qasidah/Rebana Nasional**

Melalui Program Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, salah satunya mendukung pengembangan seni Qasidah/Rebana sebagai peran serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Agenda Tahunan tingkat Nasional.

**Tabel 2.246.**
Prestasi Kafilah Provinsi Sumatera Selatan pada
Qasidah Skala Besar/Bintang Vokalis Nasional

| TAHUN | EVENT | PRESTASI | PERINGKAT | KET |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Qasidah Skala Besar | Juara 6 Kolaborasi Qasidah Putri | na | na |
| 2014 | Qasidah Bintang Vokalis | na | na | na |
| 2015 | Qasidah Skala Besar | Juara 7 Cabang Klasik Remaja Putri | na | na |
| 2016 | Qasidah Bintang Vokalis | Juara Harapan III Kategori Dewasa Putra | na | na |
| 2017 | Qasidah Skala Besar | Kategori Provinsi Favorit | na | na |
| 2018 | Qasidah Bintang Vokalis | Juara III Dewasa Putri | na | na |

*Sumber: Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan*

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada program perumusan kebijakan bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, diantaranya Qasidah Skala Besar/Bintang Vokalis tingkat Provinsi sebagai penjaringan calon peserta Qasidah Skala Besar/Bintang Vokalis, melalui kegiatan ini Pemerintah Provinsi menyediakan Panitia, Dewan Juri, dan Hadiah Pemenang. Selanjutnya Pemerintah Provinsi memfasilitasi pemberangkatan Qasidah Skala Besar/Bintang Vokalis ke tingkat Nasional. Prestasi yang telah dicapai ini dapat dimaksimalkan capaiannya melalui program perumusan kebijakan bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dengan memaksimalkan fasilitasi kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat untuk melakukan

pembinaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi serta memaksimalkan peran Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Provinsi dan Kab./Kota dan juga Lembaga Keagamaan lainnya.

### 2.3.4.7. Penelitian dan Pengembangan

#### 2.3.4.7.1. Hasil-hasil penelitian belum dimanfaatkan dengan optimal

Kebutuhan akan lembaga Litbang IPTEK adalah sejalan dengan konstruksi pembangunan Sumatera Selatan yang dirancang berbasis Iptek. Keberadaan Balitbangda, diharapkan menghasilkan berbagai kegiatan yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan-kebutuhn OPD Provinsi Sumsel dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan Litbang harus mampu memberikan solusi yang tepat dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah. Optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil Litbang dalam penyiapan kebijakan adalah agar: a) kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan melalui rekomendasi yang diangkat dari hasil Litbang; b) hasil Litbang dapat memperkuat landasan proses pengambilan kebijakan strategis di lingkungan. Namun, berdasarkan data Balitbangda Prov. Sumsel pemanfaatan hasil kelitbangan belum Optimal baik dari OPD-OPD di lingkungan Pemprov Sumsel, dunia usaha maupun masyarakat. Data tahun 2014-2017 menunjukan bahwa pemanfaatan hasil kelitbangan baru mencapai 5 % - 10%.

**Tabel 2.247.**
Hasil Capaian Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan

| No | Bidang Urusan/indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Persentase teknologi hasil litbang yang dimanfaatkan | 0% | 10% | 5% | 0% | 7% |

*Sumber : Balitbangda Prov. Sumsel, 2017*

#### 2.3.4.7.2. Kualitas dan kuantitas hasil penelitian masih rendah

Hasil penelitian bila dilihat dari segi kuantitas masih rendah, Jumlah Peneliti di Balitbangda berjumlah 18 orang, namun hasil penelitian/jurnal yang dihasilkan berkisar 1 – 7 jurnal setiap tahunnya. Sementara kualitas jurnal ilmiah hasil peneliti di Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dinilai masih rendah. Hal ini dikarenakan mayoritas peneliti merupakan peneliti pertama. Hingga saat ini, mayoritas publikasi Ilmiah hanya terpublikasi di jurnal yang belum terakreditasi.

**Tabel 2.248.**

Kuantitas dan Kualitas Hasil Penelitian Balitbangda Prov. Sumsel

| No | Bidang Urusan/indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Jumlah hasil penelitian | 7 | 8 | 3 | 11 | 1 |
| 2 | Jumlah hasil penelitian yg dipublikasi ke jurnal akreditasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Sumber : Balitbangda Prov. Sumsel, 2017*

### 2.3.4.7.3 Pembinaan lembaga litbang di kab/kota tidak optimal

Masih banyaknya Kabupaten/Kota yang belum memiliki lembaga litbang daerah padahal lembaga Litbang daerah memiliki peran sentral dalam menggerakan penguatan inovasi daerah. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2011, kelitbangan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi utama dan fungsi pendukung. Fungsi utama terbagi lagi dalam beberapa hal yaitu fungsi untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan dan pengoperasian. Sementara untuk fungsi pendukung, terdiri dari terdiri dari empat pokok utama yaitu untukpeningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya organisasi lainnya. Balitbangda menjadi unsur perangkat daerah yang secara strategis mengawal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di daerah. Pada pelaksanaannya pembinaan terhadap lembaga litbang daerah memiliki permasalahan diantaranya belum adanya tenaga peneliti, mutasi pegawai yang relatif cepat, dan kurangnya sarana dan prasarana kelitbangan.

**Tabel 2.249.**

Lembaga Litbang yang Terbentuk di Kab/kota Prov. Sumsel

| No | Bidang Urusan/indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Jumlah Lembaga Litbang yang terbentuk di Daerah | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |

*Sumber : Balitbangda Prov. Sumsel, 2017*

### 2.3.4.7.4 Budaya inovasi masih rendah

Pengembangan inovasi di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa. Pemerintah telah memberikan dukungan kepada masyarakat untuk lebih maksimal didalam berinovasi maupun berkarya. Bahkan di dalam UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, menyebutkan bahwa inventor atau peneliti adalah sekaligus pemegang paten.

Serta, berhak mendapatkan imbalan. Namun hal tersebut tidak menumbuhkan budaya inovasi di kalangan masyarakat ataupun dunia usaha.

**Tabel 2.250.**

Paten dan Inovator Balitbangda Prov. Sumsel

| No | Bidang Urusan/indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Jumlah Paten yang diusulkan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jumlah Paten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Sumber : Balitbangda Prov. Sumsel, 2017*

## 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

### 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### 2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam pengeluaran. Data berikut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2014-2017 rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

**Tabel 2.251.**

Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

| Total Konsumsi Rumah Tangga | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ADHB (*Milyar Rp*) | 208.208,39 | 222.487,66 | 240.977,34 | 255.796,80 | na |
| 2. ADHK (*Milyar Rp*) | 156.430,72 | 163.296,76 | 170.532,25 | 174.644,76 | na |
| 3. Proporsi thd PDRB (% ADBH) | 67,95 | 67,06 | 67,97 | 66,66 | na |

*Sumber: BPS Prov. Sumsel 2019*

#### 2.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh petani yang dilambangkan dengan (It) dengan indeks harga yang dibayar petani yang di lambangkan dengan (Ib). Selama ini, tahun dasar NTP yang digunakan dalam penghitungan rasio indeks harga perdesaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu tahun 1976(1976=100) NTP yang pertama, kemudian tahun 1983(1983=100), 1987(1987=100), tahun 1993(1993=100), dan tahun 2007 (2007=100). Mulai tahun 2012, BPS melakukan perubahan tahun dasar dalam menghitung NTP dari tahun dasar 2007 menjadi tahun dasar 2012

(2012=100). Perubahan tahun dasar ini dilakukan oleh karena adanya perubahan pola produksi, struktur biaya, pola konsumsi rumahtangga dan struktur geografis (pemekaran wilayah) antara kondisi pada tahun dasar 2007 dengan kondisi saat ini. Kondisi tersebut dapat melemahkan nilai kepekaan terhadap informasi tentang kesejahteraan petani, apabila masih menggunakan tahun dasar 2007.

**Tabel 2.252.**
Nilai Tukar Petani Tahun 2013-2017

| Indikator | Satuan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai Tukar Petani | Indeks | 110,04 | 100.92 | 96,87 | 94,58 | 95,05 |

*Sumber : BPS Sumsel, 2018*

NTP Sumsel tahun 2013 dan 2014 berada di atas angka dasar NTP yaitu 100 jika biaya produksi yang dikeluarkan petani untuk usaha taninya cenderung sama besar dengan penerimaan yang didapatnya(impas). Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 NTP Sumatera Selatan mengalami penurunan masing-masing menjadi 96,87 dan 95,05. Secara umum menunjukkan bahwa daya beli petani pada bulan Desember 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun dasar 2013 yang disebabkan karena adanya kenaikan indeks harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar petani secara umum.

Berdasarkan data pada tabel menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani yang paling tinggi terdapat pada tahun 2013 dengan nilai NTP 110,04. Angka NTP yang lebih besar dari 100 berarti petani mengalami surplus dimana harga produksi naik lebih besar dibandingkan dari kenaikan harga konsumsinya. Pada kondisi ini pendapatan petani naik lebih besar daripada pengeluarannya.

Angka NTP terkecil terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 94,58, angka NTP yang kurang dari 100 menunjukkan bahwa petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan kenaikan harga barang yang dikonsumsi oleh petani. Pada kondisi ini pendapatan petani mengalami penurunan dan cenderung lebih kecil sementara tingkat pengeluaran petani semakin tinggi.

### 2.4.1.3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)

Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk

mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non makanan semakin sejahtera penduduk di wilayah tersebut. Data sampai dengan tahun 2016 menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen rata-rata pengeluaran masyarakat provinsi Sumatera Selatan dialokasikan untuk kebutuhan makanan.

**Tabel 2.253.**
Pengeluaran Persentase Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2017

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Makanan | 54,90 | 53,49 | 51,95 | 53,17 | 54,89 |
| Non makanan | 45,10 | 46,51 | 48,05 | 46,83 | 45,11 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : BPS-Susenas (data diolah)*

### 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerataan, meningkatkan kualitas hidup dan konektivitas antar daerah yang pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan, memfasilitasi pertumbuhan disektor industri dan usaha kecil menengah, pertanian dan pertambangan yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

#### 2.4.2.1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Infrastruktur jalan di Provinsi Sumatera Selatan meliputi jalan kewenangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Beberapa ruas jalan utama di Sumsel sering terjadi ke macetan akibat kapasitas jalan yang ada tidak mampu menampung volume kendaraan yang lewat. Pada kurun waktu satu tahun terakhir ini juga laju kerusakan ruas jalan melebihi dari upaya peningkatan/rehabilitasi jalan yang ada sebagai akibat dari tingginya lalu lintas kendaraan dengan tonase tinggi (MST 10 ton – 16 ton) sedangkan kemampuan daya dukung jalan di Sumatera Selatan rata-rata 10 ton.

Semakin besar rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, maka kapasitas kepadatan lalu lintas kendaraan semakin berkurang sehingga kemacetan lalu lintas semakin rendah, begitu juga sebaliknya semakin rendah rasionya, maka kapasitas kepadatan lalu lintas kendataan semakin bertambah sehingga kemacetan lalu lintas semakin tinggi. Pada tahun 2017, terlihat jelas pada tabel di bawah bahwa rasio yang paling besar sebesar 0,32 yang berada di Kabupaten Banyuasin, sedangkan rasio yang paling rendah sebesar 0,00 yang berada di Kabupaten Musi Rawas Utara.

**Tabel 2.254.**
Rasio Panjang Jalan/Jumlah Kendaraan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017

| Kab/Kota | 2013 | Jumlah Kdr | Rasio | 2014 | Jumlah Kdr | Rasio | 2015 | Jumlah Kdr | Rasio | 2016 | Jumlah Kdr | Rasio | 2017 | Jumlah Kdr | Rasio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Panjang | | | Panjang | | | Panjang | | | Panjang | | | Panjang | | |
| OKU | 788,33 | 64.262,39 | 0,01 | 1,298.39 | 65,241.00 | 0.02 | 1,386.75 | 65,241.00 | 0.02 | 918.94 | 70,232.00 | 0,01 | 1.285,15 | 70.934,32 | 0,02 |
| OKI | 1.727,57 | 63.638,88 | 0,03 | 1,778.35 | 64,608.00 | 0.03 | 1,778.35 | 64,608.00 | 0.03 | 1,064.70 | 68,176.00 | 0,02 | 2.225,81 | 68.857,76 | 0,03 |
| Muara enim | 1.883,66 | 89.702,97 | 0,02 | 1,620.12 | 91,069.00 | 0.02 | 1,634.47 | 91,069.00 | 0.02 | 1,633.45 | 97,287.00 | 0,02 | 1.624,91 | 98.259,87 | 0,02 |
| PALI | na | 61.857,02 | na | 376.70 | 62,799.00 | 0.01 | 376.70 | 62,799.00 | 0.01 | 591.61 | 72,163.00 | 0,01 | 591,61 | 72.884,63 | 0,01 |
| Lahat | 1.500,45 | 40.499,26 | 0,04 | 1,500.45 | 41,116.00 | 0.04 | 1,523.69 | 41,116.00 | 0.04 | 1,563.39 | 45,733.00 | 0,03 | 1.603,71 | 46.190,33 | 0,03 |
| Musi Rawas | 1.906,66 | 68.588,51 | 0,03 | 1,231.21 | 69,633.00 | 0.02 | 1,168.03 | 69,633.00 | 0.02 | 1,516.55 | 74,218.00 | 0,02 | 1.516,07 | 74.960,18 | 0,02 |
| Musi Rawas Utara | na | 563.696,79 | na | 675.45 | 572,281.00 | 0.00 | 719.95 | 72,281.00 | 0.00 | 579.42 | 667,786.00 | 0,00 | 591,89 | 674.463,86 | 0,00 |
| Muba | 1.435,30 | 42.495,86 | 0,03 | 1,435.30 | 43,143.00 | 0.03 | 1,425.21 | 43,143.00 | 0.03 | 1,424.21 | 49,344.00 | 0,03 | 1.424,21 | 49.837,44 | 0,03 |
| Palembang | 960,59 | 18.202,80 | 0,05 | 966.04 | 18,480.00 | 0.05 | 1,030.72 | 18,480.00 | 0.06 | 842.10 | 21,778.00 | 0,04 | 836,88 | 21.995,78 | 0,04 |
| Prabumulih | 447,85 | 24.451,64 | 0,02 | 493.47 | 24,824.00 | 0.02 | 485.68 | 24,824.00 | 0.02 | 490.68 | 28,031.00 | 0,02 | 487,60 | 28.311,31 | 0,02 |
| Pagaralam | 592,20 | 75.726,80 | 0,01 | 592.20 | 76,880.00 | 0.01 | 573.95 | 76,880.00 | 0.01 | 616.65 | 78,971.00 | 0,01 | 616,65 | 79.760,71 | 0,01 |
| OKUS | 698,35 | 37.719,59 | 0,02 | 893.74 | 38,294.00 | 0.02 | 893.74 | 38,294.00 | 0.02 | 899.36 | 43,460.00 | 0,02 | 899,36 | 43.894,60 | 0,02 |
| OKUT | 1.145,58 | 7.686,94 | 0,15 | 1,145.58 | 7,804.00 | 0.15 | 1,145.57 | 7,804.00 | 0.15 | 1,145.62 | 9,241.00 | 0,12 | 1.145,62 | 9.333,41 | 0,12 |
| OI | 1.027,98 | 44.754,46 | 0,02 | 1,027.98 | 45,436.00 | 0.02 | 1,028.97 | 45,436.00 | 0.02 | 1,085.28 | 55,188.00 | 0,02 | 1.096,90 | 55.739,88 | 0,02 |
| 4Lawang | 1.417,94 | 81.118,69 | 0,02 | 1,417.94 | 82,354.00 | 0.02 | 1,402.51 | 82,354.00 | 0.02 | 1,177.86 | 94,438.00 | 0,01 | 1.137,54 | 95.382,38 | 0,01 |
| Lubuk Linggau | 550,23 | 2.095,10 | 0,26 | 593.24 | 2,127.00 | 0.28 | 613.14 | 2,127.00 | 0.29 | 331.46 | 2,383.00 | 0,14 | 319,46 | 2.406,83 | 0,13 |
| Banyuasin | 1.165,97 | 1.512,96 | 0,77 | 1,308.97 | 1,536.00 | 0.85 | 1,328.63 | 1,536.00 | 0.86 | 1,360.85 | 4,196.00 | 0,32 | 1.366,07 | 4.237,96 | 0,32 |
| Provinsi Sumsel | 17.248,65 | 1.288.010,63 | 0,01 | 18,355.12 | 1,307,725.00 | 0.01 | 18,516.04 | 1,307,725.00 | 0.01 | 17,242.09 | 1,482,625.00 | 0,01 | 18.769,41 | 1.497.451,25 | 0,01 |

*Sumber : Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Data Diolah), 2017*

### 2.4.2.2. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Angkutan melalui udara terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah orang terangkut melalui angkutan udara sebesar 2.885.738 orang dan meningkat pada tahun 2016 mencapai 3.511.650 orang. Sedangkan dari jalur kerata api, pada tahun 2012 mencapai 1.425.500 orang dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 899.054 orang.

**Tabel 2.255.**
Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2016

| Jumlah Produksi Angkutan penumpang (org) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angkutan Udara | 2.408.923 | 2.734.504 | 3.339.158 | 3.437.390 | 3.511.650 |
| Angkutan Kereta Api | 1.425.500 | 1.350.846 | 1.452.370 | 855.798 | 899.054 |

*Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2017*

Tren kenaikan keberangkatan penumpang domestic dan internasional cukupsignifika, penjelasan tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan fasilitas bandara SMB II tahun 2012 sampai 201. Peningkatan tersebut lebih disebebabkan membaiknya perekonomian diiringi terlaksananya even skala nasional serta MICE menjadi penyebab pertumbuhan peningkatan penumpang.

**Tabel 2.256.**
Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2016

| Jumlah Produksi Angkutan Barang (Ton) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angkutan Udara | 36.021.220 | 33.486.030 | 49.036.502 | 35.165.546 | 33.627.964 |
| Angkutan Kereta Api | 17.837.287 | 15.859.859 | 17.837.287 | 4.735.145 | 18.730.661 |

*Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2017*

### 2.4.2.3. Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Jumlah orang dan barang yang melalui Pelabuhan merupakan indikasi pergerakan ekonomi di suatu wilayah. Angkutan perairan, khususnya di Indonesia memang menjadi salah satu moda transportsi yang terjangkau (murah) dan mempunyai kemampuan angkut yang besar. Sumatera Selatan yang memang dikenal memiliki wilayah perairan yang cukup luas menjangkau hingga ke wilayah pelosok, juga memanfaatkan transportasi perairan ini. Hal ini dapat terlihat dari aktivitas orang dan barang yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan di provinsi ini. Data pada tabel di bawah ini memberikan gambaran bahwa proses perdagangan dalam dan luar negeri dipelabuhan di Sumatera Selatan berjalan dinamis dan cukup fluktuatif dari tahun ke tahun.

**Tabel 2.257.**
Kegiatan Bongkar Muat Barang Dan Penumpang
Dipelabuhan Palembang Tahun 2012 - 2016

| NO | URAIAN | SATUAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| **I** | **PERDAGANGAN LUAR NEGERI** | | | | | | |
| 1 | BONGKAR | Ton | 746.295 | 1.456.178 | 631.061 | 2.119.558 | 476.664 |
| 2 | MUAT | Ton | 1.818.248 | 2.308.784 | 2.339.762 | 1.538.839 | 403.817 |
| * | ***SUB JUMLAH I*** | **Ton** | **2.564.543** | **3.764.962** | **2.970.824** | **3.658.397** | **880.481** |
| **II** | **PERDAGANGAN DALAM NEGERI** | | | | | | |
| 1 | BONGKAR | Ton | 1.481.815 | 1.598.208 | 1.220.494 | 3.730.479 | 807.238 |
| 2 | MUAT | Ton | 3.629.266 | 3.358.227 | 3.359.783 | 2.627.631 | 969.801 |
| ** | ***SUB JUMLAH II*** | **Ton** | **5.111.081** | **4.956.485** | **4.580.277** | **6.43.110** | **1.777.040** |
| *** | **JUMLAH I + II** | **Ton** | **7.675.624** | **8.721.447** | **7.551.101** | **10.061.507** | **2.657.521** |
| **III** | **PENUMPANG** | | | | | | |
| 1 | DATANG | Orang | 177.038 | 162.367 | 107.522 | 46.958 | 29.773 |
| 2 | BERANGKAT | Orang | 151.844 | 151.160 | 115.136 | 50.090 | 27.874 |
| * | **JUMLAH III** | **Orang** | **328.882** | **313.527** | **222.658** | **97.075** | **57.647** |

*Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2017*

### 2.4.2.3.1. Bongkar Orang dan Barang melalui Bandara di Sumatera Selatan

Seiring dengan proses pembenahan dan event-event internasional yang diselenggarakan di kota Palembang, bandara Sultan Mahmud Badarudin II mengalami peningkatan intensitas lalu lintas udara internasional yang signifikan. Pada tahun 2012 lalu lintas keberangkatan internasional di bandara SMB II hanya 634 kali, sedangkan pada tahun 2016 tercatat 64.438 kali keberangkatan.

**Tabel 2.258.**
Lalu Lintas Angkutan Udara Untuk Penumpang
di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

| Datang/ Berangkat | Trayek Angkutan | Kondisi Yang Ada | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Berangkat | Domestik | Pesawat | 10.825 | 11.245 | 12.820 | 16.363 | 20.051 |
| | | Penumpang | 1.286.949 | 1.640.704 | 1.632.277 | 1.699.878 | 2.238.545 |
| | Internasional | Pesawat | 549 | 875 | 508 | 539 | 757 |
| | | Penumpang | 57.779 | 108.817 | 57.331 | 65.594 | 85.829 |
| Datang | Domestik | Pesawat | 10.822 | 11.026 | 12.787 | 16.291 | 20.185 |
| | | Penumpang | 1.280.126 | 1.491.201 | 1.696.131 | 1.686.935 | 2.181.212 |
| | Internasional | Pesawat | 549 | 860 | 503 | 540 | 762 |
| | | Penumpang | 109.650 | 98.436 | 51.651 | 59.243 | 82.916 |
| Total | | Pesawat | 22.745 | 24.006 | 26.618 | 33.733 | 41.755 |
| | | Penumpang | 2.734.504 | 3.339.158 | 3.437.390 | 3.511.650 | 4.588.502 |

*Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2017*

**Tabel 2.259.**
Lalu Lintas Angkutan Udara Untuk Barang
di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

| BONGKAR / MUAT | TRAYEK ANGKUTAN | KONDISI YANG ADA | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| BONGKAR | Domestik | Bagasi | 601.267 | 20.259.411 | 10.636.623 | 8.886.478 | 15.314.964 |
| | | Kargo | 328.244 | 10.886.002 | 9.079.913 | 9.178.571 | 44.922.265 |
| | | | 105.261 | 19.042 | 32.244 | 208.891 | 11.841 |
| | Internasional | Bagasi | 601.267 | 313.680 | 462.100 | 535.318 | 641.481 |
| | | Kargo | 328.244 | 877.582 | 145.868 | 202.047 | 42.628 |
| | | Pos | 105.261 | 0 | 0 | 2.137 | 0 |
| MUAT | Domestik | Bagasi | 444.692 | 11.556.232 | 10.563.667 | 10.224.342 | 15.098.486 |
| | | Kargo | 62.560 | 3.913.560 | 3.561.702 | 3.758.913 | 11.905.634 |
| | | Pos | 47.053 | 200.538 | 227.407 | 240.408 | 245.016 |
| | Internasional | Bagasi | 444.692 | 140.404 | 383.284 | 336.172 | 922.667 |
| | | Kargo | 62.560 | 870.051 | 72.738 | 54.159 | 264.290 |
| | | Pos | 4.705.053 | 0 | 0 | 528 | 0 |
| | | Bagasi | 2.091.918 | 32.269.727 | 22.045.674 | 19.982.310 | 31.977.598 |
| | | Kargo | 781.608 | 16.547.195 | 12.860.221 | 13.193.690 | 57.134.817 |
| | | Pos | 4.962.628 | 219.580 | 259.651 | 451.964 | 256.857 |

*Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2017*

### 2.4.2.4. Ketaatan terhadap RTRW

Setiap wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan juga wajib menyusun Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan telah menyelesaikan penyusunan Perda RTRW. Saat ini berproses untuk peninjauan kembali RTRW Kabupaten/Kota yang telah lima tahun berlalu sejak ditetapkan Peraturan Daerahnya. Adapun penjelasan dimaksud dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.260.**
Ketersediaan Perda RTRW

| No | Wilayah | Nomor Perda RTRW | Tanggal RTRW |
|---|---|---|---|
| | Sumatera Selatan | No. 11 Tahun 2016 | 24-Okt-16 |
| 1 | Banyuasin | No. 28 Tahun 2012 | 28-Des-12 |
| 2 | Empat Lawang | No. 9 Tahun 2012 | 27-Jul-12 |
| 3 | Lahat | No. 11 Tahun 2012 | 28-Des-12 |
| 4 | Muara Enim | No. 31 Tahun 2018 | 21-Des-18 |
| 5 | Musi Banyuasin | No. 8 Tahun 2016 | 30-Sep-16 |
| 6 | Musi Rawas | No. 02 Tahun 2013 | 21-Okt-13 |
| 7 | Musi Rawas Utara | No. 12 Tahun 2018 | 31-Des-18 |
| 8 | Ogan Ilir | No. 1 Tahun 2012 | 24-Jan-12 |
| 9 | Ogan Komering Ilir | No. 9 Tahun 2013 | 9-Jul-13 |
| 10 | Ogan Komering Ulu | No. 22 Tahun 2012 | 27-Des-12 |
| 11 | OKU Selatan | No. 13 Tahun 2012 | 28-Des-12 |
| 12 | OKU Timur | No. 13 Tahun 2012 | 19-Okt-12 |
| 13 | Penukal Abab Lematang Ilir | No. 1 Tahun 2018 | 20-Juli-18 |
| 14 | Lubuk Linggau | No. 1 Tahun 2012 | 31-Agust-12 |
| 15 | Pagar Alam | No. 07 Tahun 2012 | 19-Nop-12 |

| No | Wilayah | Nomor Perda RTRW | Tanggal RTRW |
|---|---|---|---|
| 16 | Palembang | No. 15 Tahun 2012 | 27-Des-12 |
| 17 | Prabumulih | No. 1 Tahun 2014 | 2-Apr-14 |

*Sumber: Perda RTRW Kabupaten Kota Se Sumatera Selatan*

Dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta atau *One Map Policy* di Provinsi Sumsel telah dibentuk kelembagaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (IGD) sesuai dengan Perpres 27/2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 18 Tahun 2017 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Informasi (JIGD) Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 19 Tahun 2017 tentang Kebijakan Satu Peta Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, telah disusun Roadmap Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah, koordinasi secara intensif dengan peningkatan kapasitas, peran dan fungsi antara stakeholder terkait, peningkatan kapasitas dan jumlah PPNS melalui pelatihan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Penataan Ruang, penambahan SDM planologi dan tenaga GIS dalam bidang penataan ruang dan peningkatan koordinasi dengan sektor terkait.

#### 2.4.2.5. Luas Wilayah Produktif

Berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2036, bahwa luas kawasan budidaya di Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 7.320.591,03 hektar atau 84,13% dan kawasan lindung seluas ± 1.381.150,97 hektar atau 15,87%. Adapun yang termasuk kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi (HP terbatas seluas 208.724 ha, HP tetap seluas 1.713.581 ha, HP konversi seluas 168.332,97 ha), kawasan pertanian (pertanian pangan dan hortikultura seluas 990.215,42 ha, perkebunan seluas 3.716.193,91 ha, perikanan seluas 105.546,03 ha, dan peternakan seluas 2.703,41 ha), kawasan permukiman seluas 329.962,42 ha, kawasan pertambangan seluas 1.231.361,13 ha, kawasan pariwisata seluas 9.969,32 ha, kawasan industri seluas 29.436,69 ha, kawasan pertahanan dan keamanan seluas 44.948,88 ha dan kawasan reklamasi seluas 3.000 ha. Untuk kawasan lindung meliputi hutan lindung seluas 577.327 ha, sempadan sungai dan sempadan danau seluas 13.198,78 ha, serta KPA, KSA, dan cagar budaya seluas 790.625,19 ha.

#### 2.4.2.6. Luas Kawasan Industri

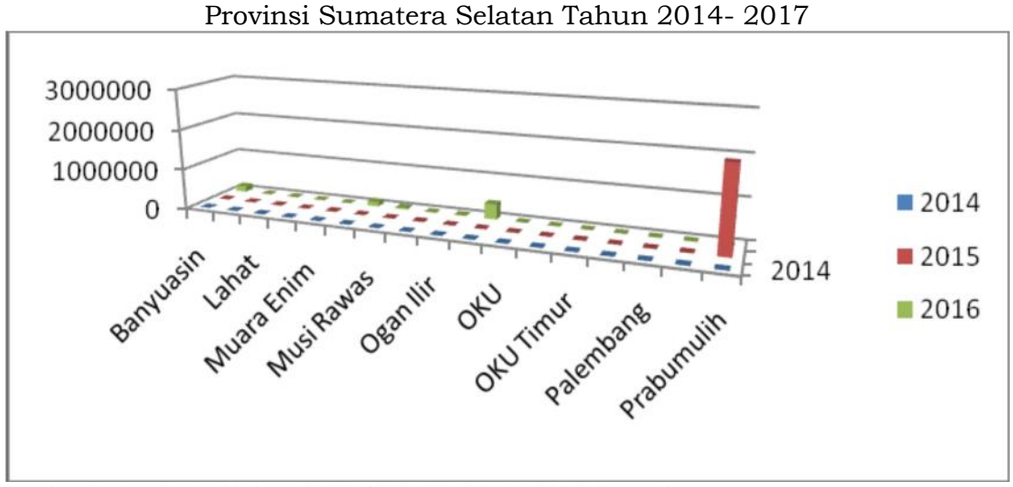
Selain fasilitas infrastruktur, ketersediaan kawasan industri menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dan dapat meningkatkan daya saing Sumatera Selatan.Sesuai data RTRW kabupaten/kota, luas kawasan industri di Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 37.000 hektar dengan berbagai fokus

pengembangan jenis industri, antara lain industri besar, industri kecil dan UMKM. Industri besar diarahkan di Kabupaten Banyuasin, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, OKU Timur, Kota Palembang.Namun sampai saat ini sedang disusun Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (RIPID) komoditas karet, kelapa sawit dan kopi serta belum ditetapkannya Kawasan Industri (KI) Muara Enim, Banyuasin, Palembang, dan Lubuklinggau sebagai klaster industri karet, kelapa sawit dan kopi. Kawasan industri di Kabupaten Banyuasin telah ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus yaitu KEK TAA melalui PP.No 51 Tahun 2014 tentang KEK Tanjung Api-Api.

### 2.4.2.7. Luas Wilayah Kebanjiran

Bencana banjir merupakan hal yang terjadi setiap tahun di Provinsi Sumatera Selatan pada saat musim hujan, berdasarkan tabel 37 Buku Data IKPLHD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 total area terendam 70.488 Ha, dan tidak ada korban yang mengungsi dan meninggal. Untuk tahun 2016 total area terendam 682.877 Ha juga tidak ada korban yang mengungsi dan meninggal. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, bencana banjir di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan dan jumlah korban meninggal tidak ada. Untuk kerugian dilakukan pendataan oleh Kabupaten/Kota masing-masing yang terkait dengan total Rp. 2.075.894.000,-

**Gambar 2.66.**
Grafik Time Series Bencana Banjir, Korban, dan Kerugian
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014- 2017




*Sumber Data : Data Olahan SLHD/IKPLHD 2014 -2017 Sumsel*

### 2.4.2.8. Luas Wilayah Kekeringan

Para ahli menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kekeringan adalah hubungan antara ketesediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Kekeringan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Kekeringan meteorologis berkaitan dengan curah hujan di bawah normal dalam satu musin
b. Kekeringan hidrologis berkaitan dengan kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah
c. Kekeringan pertanian berhubungan dengan kekurangan kandungan air di dalam tanah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah yang luas.

Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kekeringan menyebabkan penderitaan yang hebat bagi penduduk pada suatu daerah yang mengalaminya. Oleh sebab itu, kekeringan adalah salah satu bencana yang dapat mematikan bagi manusia. Dimana kekeringan yang panjang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

**Gambar 2.67.**
Bencana Kekeringan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017




*Sumber : Hasil Analisis Tabel 38 IKPLHD Provinsi Sumatera Selatan 2017*

Bencana kekeringan merupakan salah satu bencana yang selalu terjadi di Provinsi Sumatera Selatan setiap Tahunnya. Namun pada Tahun 2017 untuk 12 (dua belas) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tidak mengalami bencana kekeringan. Berdasarkan Gambar 3.25 diketahui bahwa kabupaten yang paling banyak mengalami bencana kekeringan pada Tahun 2017 dari urutan yang tertinggi adalah Kabupaten Musi Banyuasin seluas 108.335 Ha, Kabupaten Musi Rawas seluas 37.616 Ha, Kabupaten Banyuasin seluas 6.350 Ha, Kabupaten OKU Timur seluas 57 Ha dan terakhir adalah Kabupaten PALI seluas 48 Ha.

Jika dibandingkan Tahun 2016 dan Tahun 2017 maka terjadi penurunan baik dari segi kejadian di kabupaten/kota maupun luasan lahan yang terbakar. Kabupaten Musi Banyuasin luasan bencana kekeringan masih terjadi dengan

luasan yang sama. Wilayah yang terjadi bencana kekeringan pada Tahun 2016 namun pada Tahun 2017 tidak terjadi bencana kekeringan ada pada 9 (Sembilan) wilayah yaitu Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten OKI, Kabupaten OKU, Kota Pagar Alam dan Kota Palembang . Untuk Kota Lubuk Linggau, Kabupaten OKU Selatan dan Kota Prabumulih tidak terjadi bencana kekeringan baik pada Tahun 2016 maupun Tahun 2017. Perbandingan Bencana Kekeringan Tahun 2016 dan Tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar

**Gambar 2.68.**
Bencana Kekeringan Tahun 2016 dan Tahun 2017




*Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.4.2.9. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

**Tabel 2.261.**
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

| Jenis | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bank Konvensional** | | | | | |
| Jumlah Bank Devisa Pusat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah Bank Non Devisa Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Kantor | 560 | 536 | 570 | 570 | 498 |
| Bank Devisa | 483 | 460 | 477 | 477 | 460 |
| Bank Pemerintah | 237 | 257 | 215 | 215 | 175 |
| Bank Pemerintah Daerah | 41 | 34 | 30 | 30 | 122 |
| Bank Swasta Nasional | 194 | 155 | 221 | 221 | 156 |
| Bank Asing dan Campuran | 11 | 14 | 11 | 11 | 7 |
| Bank Non Devisa | 77 | 76 | 93 | 93 | 38 |
| Bank Pemerintah | 48 | 0 | 52 | 52 | 0 |
| Bank Pemerintah Daerah | 26 | 15 | 24 | 24 | 10 |
| Bank Swasta Nasional | 3 | 61 | 17 | 17 | 28 |
| Bank Asing dan Campuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bank Perkreditan Rakyat | | | | | |
| Jumlah Bank | 17 | 17 | 20 | 21 | 23 |
| Jumlah Kantor | 30 | 30 | 42 | 42 | 34 |
| **Bank Syariah** | | | | | |
| Jumlah Bank | 9 | 13 | 11 | 13 | 9 |
| Jumlah Kantor | 76 | 80 | 13 | 83 | 76 |
| Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah | | | | | |
| Jumlah Bank | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah Kantor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan*

Di Provinsi Sumatera Selatan terdapat beberapa jenis bank meliputi, bank konvensional dan bank syariah. Pada tahun 2017 Bank konvensional yang terdiri dari bank devisa sebanyak 460 unit (bank pemerintah sebanyak 175 unit, bank pemerintah daerah sebanyak 122 unit, bank swasta nasional sebanyak 156 unit dan bank asing maupun campuran sebanyak 7 unit), sedangkan bank non devisa sebanyak 38 unit terdiri dari (bank pemerintah sebanyak 0 unit, bank pemerintah daerah sebanyak 10 unit, bank swasta nasional sebanyak 28 unit dan bank asing maupun campuran sebanyak 0 unit), serta bank perkreditan rakyat). Untuk bank syariah hanya terdiri dari bank perkreditan rakyat (BPR) Syariah dengan jumlah kantor pada tahun 2017 sebanyak 9 unit.

Jumlah bank konvensional di provinsi sumatera selatan dari tahun 2013 – 2017 jumlahnya berfruktuatif, tidak seperti jumlah bank syariah yang jumlahnya stabil dari tahun 2013 – 2017.

### 2.4.2.10. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang

**Tabel 2.262.**
Statistik Perasuransian Indonesia 2017

| NO | Jenis Asuransi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Asuransi Jiwa** | **47** | **49** | **50** | **55** | **55** |
| | a. Swasta Nasional | 28 | 30 | 31 | 33 | 31 |
| | b. Patungan | 19 | 19 | 19 | 22 | 24 |
| 2. | **Asuransi Umum** | **84** | **82** | **81** | **80** | **80** |
| | a. Swasta Nasional | 66 | 65 | 64 | 64 | 58 |
| | b. Patungan | 18 | 17 | 17 | 16 | 22 |
| 3. | **Reasuransi** | **4** | **4** | **5** | **6** | **6** |
| | a. Swasta Nasional | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | b. Patungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | **Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| 5. | Penyelenggaraan Asuransi Wajib | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **6.** | **Jumlah (1 s.d 5)** | **140** | **140** | **141** | **146** | **146** |
| 7. | Pialang Asuransi | 150 | 153 | 157 | 166 | 169 |
| 8. | Pialang Reasuransi | 29 | 29 | 31 | 37 | 40 |
| 9. | Penilaian Kerugian Asuransi | 26 | 25 | 26 | 28 | 28 |
| **10.** | **Jumlah (7 s.d 9)** | **205** | **207** | **214** | **231** | **237** |
| **11.** | **Jumlah (6+10)** | **345** | **347** | **355** | **377** | **383** |

*Sumber: Statistik Perasuransian Indonesia 2017*

### 2.4.2.11. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Jumlah Restoran di Provinsi Kabupaten kota terutama di Perkotaan dan daerah transit mengalami peningkatan maupun

pengembangan dalam hotel tertentu yang dapat dilihat dari jumlah rumah makan dan peningkatan jumlah meja kursi.

**Tabel 2.263.**
Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten dan Kota
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017

| Kabupaten/kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogan Komering Ulu | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Ogan Komering Ilir | 76 | 90 | 90 | 180 | 180 |
| Muara Enim | 60 | 66 | 66 | 182 | 182 |
| Lahat | 66 | 81 | 81 | 81 | 77 |
| Musi Rawas | 41 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Musi Banyuasin | 25 | 75 | 75 | 152 | 164 |
| Banyuasin | 33 | 59 | 59 | 59 | 40 |
| OKU Selatan | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| OKU Timur | 18 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Ogan Ilir | 28 | 37 | 66 | 132 | 123 |
| Empat Lawang | 37 | 37 | 37 | 37 | 44 |
| PALI | 27 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Muratara | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Palembang | 418 | 430 | 446 | 446 | 446 |
| Prabumulih | 28 | 34 | 34 | 34 | 55 |
| Pagar Alam | 33 | 9 | 9 | 32 | 31 |
| Lubuk Linggau | 88 | 57 | 57 | 57 | 95 |
| Sumatera Selatan | 1.093 | 1.281 | 1.326 | 1.689 | 1.743 |

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

### 2.4.2.12. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Peningkatan hotel di Provinsi Sumatera Selatan terutama di perkotaan terjadi peningkatan yang signifikan seiring dengan pelaksanaan pesta olah raga dan pariwisata sehingga membuat perkembangan hotel menjadi maju hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini dimana kota Palembang telah membangun beberapa hotel baru seiring pelaksanaan kegiatan nasional dan internasional yang menjadi daya Tarik pengunjung untuk masuk ke kota tersebut.

**Tabel 2.264.**
Jumlah Hotel Berbintang dan Kamar Menurut Kabupaten dan Kota
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

| Kabupaten/kota | Jumlah hotel berbintang | Jumlah hotel non bintang | Jumlah Hotel | Jumlah kamar |
|---|---|---|---|---|
| Palembang | 55 | 91 | 146 | 7.431 |
| Ogan Ilir | 1 | 1 | 2 | 51 |
| Ogan Komering Ilir | 2 | 23 | 25 | 490 |
| Muara Enim | 3 | 20 | 23 | 497 |
| OKU | 1 | 34 | 35 | 531 |
| OKU Selatan | 0 | 21 | 21 | 307 |
| OKU Timur | 1 | 15 | 16 | 348 |
| Prabumulih | 0 | 15 | 15 | 342 |
| Empat Lawang | 0 | 6 | 6 | 94 |
| Musi Banyuasin | 1 | 27 | 28 | 722 |
| Banyuasin | 2 | 7 | 9 | 387 |

| Kabupaten/kota | Jumlah hotel berbintang | Jumlah hotel non bintang | Jumlah Hotel | Jumlah kamar |
|---|---|---|---|---|
| Musi Rawas | 0 | 2 | 2 | 41 |
| Lahat | 3 | 10 | 13 | 494 |
| Pagaralam | 0 | 23 | 23 | 434 |
| Lubuk Linggau | 13 | 20 | 33 | 1.044 |
| Muaratara | 0 | 2 | 2 | 20 |
| PALI | 0 | 12 | 12 | 114 |
| *Sumatera Selatan* | *82* | *329* | *411* | *13.374* |

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2019*

### 2.4.2.13. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Berdasarkan Data Susenas BPS, akses rumah tangga terhadap fasilitas air bersih layak di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tahun 2012 sebesar 56,02 persen menjadi 62,71 persen pada tahun 2017, dengan akses capaian tertinggi dicapai Kota Palembang dan Terendah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Empat Lawang.

**Tabel 2.265.**
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2018

| NO | WILAYAH | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 62,52 | 67,51 | 71,28 | 62,57 | 65,41 | 68,76 | 61,52 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 46,81 | 39,62 | 42,16 | 57,08 | 59,75 | 61,83 | 59,54 |
| 3 | Muara Enim | 61,09 | 58,74 | 54,58 | 67,59 | 72,17 | 61,02 | 65,63 |
| 4 | Lahat | 42,19 | 42,75 | 38,29 | 42,89 | 54,68 | 45,83 | 43,70 |
| 5 | Musi Rawas | 60,48 | 55,32 | 54,22 | 58,91 | 61,62 | 59,34 | 59,52 |
| 6 | Musi Banyuasin | 47,66 | 43,22 | 49,32 | 60,37 | 60,40 | 58,28 | 65,47 |
| 7 | Banyuasin | 43,19 | 45,58 | 48,32 | 47,71 | 43,55 | 41,71 | 44,49 |
| 8 | OKU Selatan | 29,91 | 39,46 | 39,77 | 41,52 | 28,00 | 36,86 | 41,60 |
| 9 | OKU Timur | 62,20 | 69,16 | 69,16 | 72,48 | 59,14 | 61,50 | 59,06 |
| 10 | Ogan Ilir | 43,00 | 57,76 | 56,11 | 56,40 | 57,97 | 61,14 | 58,29 |
| 11 | Empat Lawang | 20,80 | 37,22 | 20,32 | 32,08 | 12,11 | 22,19 | 26,03 |
| 12 | Kota Palembang | 94,23 | 96,07 | 98,37 | 97,92 | 96,68 | 97,28 | 61,46 |
| 13 | Kota Prabumulih | 69,65 | 68,47 | 72,27 | 68,73 | 72,85 | 66,51 | 53,45 |
| 14 | Kota Pagar Alam | 44,29 | 35,75 | 32,19 | 59,39 | 52,38 | 53,87 | 95,03 |
| 15 | Kota Lubuk Linggau | 54,41 | 68,26 | 64,24 | 66,17 | 73.57 | 65,17 | 69,64 |
| 16 | PALI | - | - | - | 57.89 | 64,09 | 61,39 | 49,57 |
| 17 | Muratara | - | - | - | 51.87 | 50,34 | 46,20 | 61,84 |
| **Sumatera Selatan** | | **56,02** | **61,18** | **60,75** | **65,16** | **63,77** | **62,71** | **62,84** |

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2017*

### 2.4.2.14. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Sebagai provinsi dengan sumber daya energi yang berlimpah, Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2017 mempunyai daya kapasitas sebesar 2.168,44 MW, dengan 48 unit pembangkit. Potensi sumber energi di Sumatera Selatan sangat banyak yaitu berupa batubara, gas bumi, minyak bumi, panas bumi, dan gas metan batubara (CBM). Kondisi kelistrikan di Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.266.**
Potensi Sumber Energi di Sumatera Selatan Tahun 2017

| NO. | PEMBANGKIT | UNIT | MW |
|---|---|---|---|
| A | PLN Pembangkit | | |
| | | | |
| 1 | PLTU (Batubara) | 4 | 260,00 |
| 2 | PLTU (Gas) | 0 | 0,00 |
| 3 | PLTG (Minyak/HSD) | 0 | 0,00 |
| 4 | PLTG Gas Turbin (Gas) | 14 | 358,62 |
| | | | |
| B | PLN WS2JB | | |
| 1 | PLTD (Isolated) | | 0,00 |
| | | | |
| C | Pembangkit Swasta | | |
| 1 | PLTGU (IPP/BORANG) | 1 | 150,00 |
| 2 | PLTG Gunung Megang | 3 | 110,00 |
| 3 | PLTG Prabumulih | 2 | 12,00 |
| 4 | PLTG Sako | 2 | 12,00 |
| 5 | PLTG/U Musi-2 | 1 | 19,83 |
| 6 | PLTU Simp. Belimbing | 2 | 227,00 |
| 7 | PLTU BATURAJA | 2 | 20,00 |
| 8 | PLTU BANJAR SARI | 2 | 220,00 |
| 9 | PLTU KEBAN AGUNG | 2 | 270,00 |
| 10 | PLTU SUMSEL-5 | 2 | 300,00 |
| 11 | PLTMG SEMATANG BORANG | 2 | 14,00 |
| 12 | PLTM GREEN LAHAT | 3 | 9,99 |
| | TOTAL | 48,00 | 2.168,44 |

*Sumber: Distamben Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

**Tabel 2.267.**
Rumah tangga berlistrik dan Rasio Elektrifikasi
di Sumatera Selatan Tahun 2017

| NO | Provinsi/ Kabupaten | Jumlah Rumah Tangga | Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Pln | Non Pln | Rasio Elektrifikasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banyuasin | 197.033 | 126.558 | 824 | 64,65 |
| 2 | Musi | 158.584 | 70.585 | 37.918 | 68,42 |
| 3 | Ogan Ilir | 102.638 | 72.257 | - | 70,40 |
| 4 | OKI | 207.930 | 138.294 | - | 66,51 |
| 5 | Palembang | 496.789 | 495.318 | 1.471 | 100,00 |
| 6 | Lahat | 100.717 | 89.839 | 252 | 89,45 |
| 7 | OKU | 88.568 | 81.694 | 638 | 93,01 |
| 8 | OKU Timur | 175.018 | 139.130 | 4.875 | 82,28 |
| 9 | OKU S | 94.279 | 47.516 | 3.376 | 53,98 |
| 10 | Muara Enim | 166.347 | 164.576 | 1.771 | 100,00 |
| 11 | Musi Rawas | 95.444 | 79.400 | 3.522 | 86,88 |
| 12 | Empat | 58.306 | 45.517 | 259 | 78,51 |
| 13 | Lubuk | 59.166 | 58.888 | 278 | 100,00 |
| 14 | Pagar Alam | 34.284 | 33.847 | 279 | 99,54 |
| 15 | Prabumulih | 56.216 | 55.941 | 275 | 100,00 |
| 16 | Pali | n.a | n.a | n.a | 0 |
| 17 | Muratara | 49.472 | 26.893 | - | 54,36 |
| **JUMLAH** | | **2.140,79** | **1.726,25** | **2.857,9** | **87,61** |

*Sumber: Distamben Prov.Sumsel, 2018*

### 2.4.2.15. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Untuk rumah tangga yang telah dialiri listrik, di kabupaten/kota di Sumatera Selatan sebanyak 2.140,79 rumah tangga, yang terdiri dari rumah tangga pelanggan PLN dan Non PLN, secara keseluruhan setiap tahun terjadi peningkatan.Rumah yang teraliri listrik mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan ini terjadi juga akibat pembangunan perumahan dan penambahan kapasitas listrik yang dialokasikan untuk Sumatera Selatan.

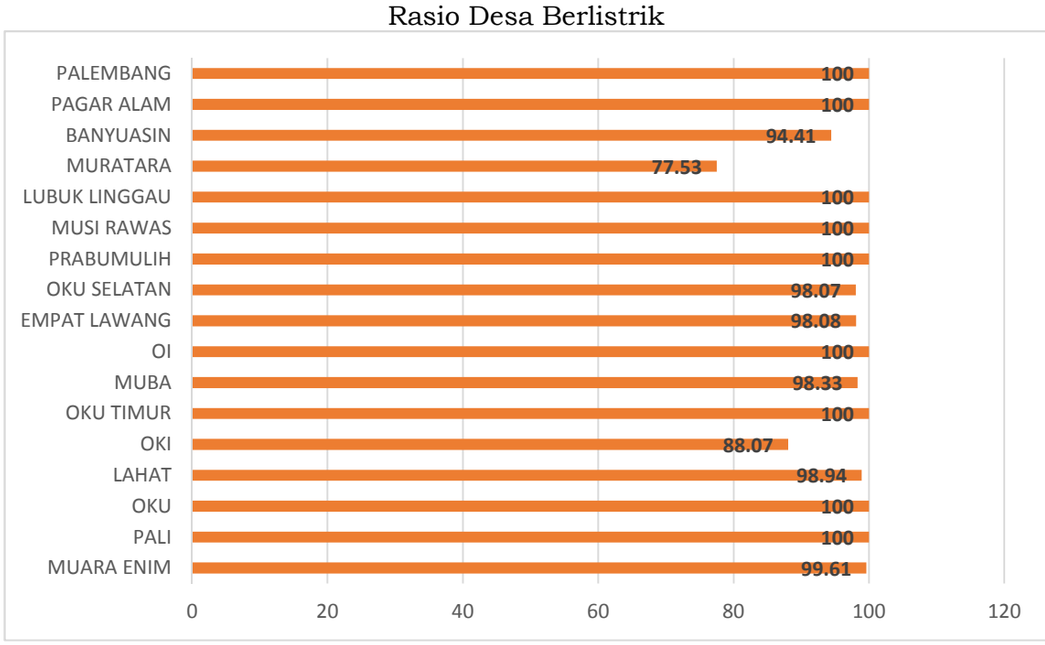
**Tabel 2.268.**
Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Memiliki Sumber Listrik

| No. | Kabupaten/Kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 96,27 | 98,24 | 94,29 | 99,07 | 97,72 | 99,15 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 91,60 | 95,96 | 94,85 | 95,57 | 97,08 | 98,83 |
| 3 | Muara Enim | 96,22 | 95,67 | 98,88 | 98,21 | 99,15 | 99,46 |
| 4 | Lahat | 97,03 | 97,70 | 99,12 | 98,88 | 99,81 | 99,28 |
| 5 | Musi Rawas | 92,30 | 95,83 | 98,98 | 98,77 | 99,06 | 99,79 |
| 6 | Musi Banyuasin | 93,24 | 96,40 | 96,53 | 97,65 | 95,78 | 98,30 |
| 7 | Banyuasin | 91,99 | 97,23 | 98,58 | 98,33 | 99,04 | 98,03 |
| 8 | OKU Selatan | 75,36 | 77,98 | 88,73 | 80,70 | 94,05 | 93,51 |
| 9 | OKU Timur | 98,17 | 98,20 | 99,22 | 99,26 | 99,59 | 99,57 |
| 10 | Ogan Ilir | 92,83 | 99,05 | 97,04 | 98,77 | 95,01 | 98,37 |
| 11 | Empat Lawang | 92,35 | 91,24 | 92,98 | 96,53 | 96,10 | 95,85 |
| 12 | PALI | n.a | n.a | 95,33 | 98,02 | 99,61 | 99,58 |
| 13 | Muratara | n.a | n.a | 97,05 | 96,18 | 99,67 | 94,48 |
| 14 | Palembang | 99,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Prabumulih | 98,79 | 99,75 | 98,96 | 100,00 | 98,89 | 100,00 |
| 16 | Pagar Alam | 98,15 | 97,98 | 97,02 | 99,08 | 97,73 | 99,12 |
| 17 | Lubuk Linggau | 99,78 | 99,79 | 99,60 | 99,39 | 99,87 | 100,00 |
| | Sumatera Selatan | 94,58 | 96,62 | 97,45 | 97,64 | 98,30 | 98,74 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2018*

Terjadi peningkatan setiap tahun untuk rumah tangga yang teraliri listrik di Sumatera Selatan hal ini dapat terlihat dari table di atas, pada tahun 2013 rumah tangga yang teraliri listrik di Sumatera Selatan sebesar 94,58 persen meningkat menjadi 98,74 persen pada tahun 2018.

**Gambar 2.69.**
Rasio Desa Berlistrik




*Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel*

Masih ada beberapa desa yang belum dijangkau listrik disebabkan karena kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk aliran listrik PLN, untuk itu diperlukan upaya-upaya pengembangan energi baru terbarukan di lokasi-lokasi tersebut sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

### 2.4.2.16. Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu indikator meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap informasi dan juga merupakan salah satu penanda terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga. Angka Kepemilikan telepon seluler terus meningkat dan jauh lebih besar dibandingkan kepemilikan telepon rumah. Pada tahun 2017 persentase rumah tangga yang memiliki telepon seluler di Sumatera Selatan mencapai 57,01 persen.

**Tabel 2.269.**
Pengeluaran Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Akses terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi 2012-2017

| Persentase Rumah Tangga | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Memiliki telepon rumah | 5,11 | 4,55 | 4,93 | 3,44 | 2,83 | 2,62 |
| Ada ART memiliki telepon selular | 86,38 | 88,93 | 89,51 | 53,66 | na | na |
| Memiliki Komputer | 12,04 | 12,82 | 15,01 | 14,48 | 15,10 | 16,62 |
| Akses internet | 10,87 | 11,97 | 14,02 | 17,71 | 19,98 | 25,65 |
| Akses internet di rumah | 2,86 | 2,56 | 2,08 | na | na | na |

| Persentase Rumah Tangga | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Ada ART akses internet di luar rumah | 10,21 | 16,50 | 20,26 | na | na | na |
| Memiliki Telepon Selular | na | na | na | 53,66 | 56,48 | 57,01 |

*Sumber: Statistik Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2017*

Persentase rumah tangga pada tahun 2017 yang memiliki telepon rumah lebih rendah sebesar 2,62 persen dibanding dengan rumah tangga yang memiliki telepon selular sebesar 57,01 persen. Hal ini sebanding dengan penggunaan internet, di mana persentase rumah tangga yang menggunakan internet mengalami peningkatan sebesar 25,65 persen. Hal ini disebabkan karena akses internet di luar rumah biasanya dilakukan melalui telepon seluler, kantor dan sekolah.

### 2.4.3. Fokus Iklim Investasi

Mengingat begitu besarnya manfaat investasi bagi peningkatan perekonomian, iklim investasi yang kondusif sangat diperlukan agar dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat, tidak hanya berdampak teciptanya lapangan kerja melainkan juga stabilitas harga dan peningkatan pajak sebagai pendapatan pemerintah. Pemerintah harus mampu memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi pengusaha dan investor sehingga secara berkelanjutan dapat terus meningkatkan iklim investasi. Pemerintah terus menciptakan iklim investasi yang kondusif agar target investasi pemerintah bisa tercapai di tengah krisis perekonomian dunia.

#### 2.4.3.1. Angka Kriminalitas

Tindak kejahatan yang signifikan terjadi di Sumatera Selatan yaitu ketertiban umum, pencurian, penganiayaan, pembunuhan, penipuan, dan kesusilaan. Angka tingkat kriminal tertinggi terdapat pada pencurian sebesar 1.469 kasus, sedangkan angka tingkat kriminal terendah terdapat pada kesusilaan sebesar 197 kasus. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir angka baseline nasional sebesar 1,04 persen (tahun 2016), sedangkan Sumsel memiliki angka yang lebih tinggi yaitu 1,26 persen (tahun 2015). Semakin tinggi angka kriminalitas berarti menunjukkan rendahnya tingkat keamanan suatu daerah sehingga akan berdampak pada turunnya iklim investasi.

**Tabel 2.270.**
Jumah Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kegiatan Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

| Kabupaten/kota | Jenis Kejahatan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ketertiban umum | Pencurian | Penganiayaan | Pembunuhan | Penipuan | Kesusilaan | Pelanggaran |
| Palembang | 168 | 90 | 125 | 40 | 175 | 15 | 16680 |
| Lubuk linggau | 18 | 470 | 45 | 47 | 74 | 42 | 1878 |
| Kayu Agung | 33 | 42 | 15 | 6 | 4 | 20 | 2265 |
| Muara Enim | 32 | 87 | 15 | 18 | 37 | 28 | 2877 |
| Baturaja | 6 | 86 | 17 | 22 | 46 | 29 | 8455 |
| Lahat | 18 | 90 | 32 | 8 | 23 | 16 | 11642 |
| Sekayu | 64 | 356 | 48 | 37 | 45 | 14 | 8645 |
| Prabumulih | 16 | 172 | 12 | 3 | 18 | 7 | 1085 |
| Pagar Alam | 7 | 18 | 9 | 3 | 8 | 19 | 1324 |
| Pangkalan Balai | 44 | 58 | 39 | 16 | 18 | 7 | 1436 |
| | 406 | 1.469 | 357 | 201 | 448 | 197 | 56.287 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2017*

**Tabel 2.271.**
Data Anggota Linmas Desa/Kelurahan dan Pos Kamling Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2017

| Kabupaten/kota | | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Desa | Jumlah Kec | JML Anggt Linmas Desa/ Kel | JML Pos Kamling | JML Anggt Linmas Desa/ Kel | JML Pos Kamling | JML Anggt Linmas Desa/Kel | JML Pos Kamling | JML Anggt Linmas Desa/ Kel | JML Pos Kamling |
| Palembang | 107 | 16 | 642 | 214 | 749 | 214 | 1.819 | 225 | 1.819 | 1.604 |
| Prabumulih | 37 | 6 | 222 | 74 | 259 | 74 | 407 | 187 | 370 | 199 |
| L.Linggau | 72 | 8 | 432 | 144 | 504 | 144 | 216 | 121 | 1.398 | 312 |
| P.Alam | 35 | 5 | 210 | 70 | 245 | 70 | 210 | 167 | 1.236 | 172 |
| Banyuasin | 304 | 19 | 1.824 | 608 | 2.128 | 608 | 3.040 | 1.786 | 3.040 | 2.180 |
| Musi Banyuasin | 240 | 14 | 1.440 | 480 | 1.680 | 480 | 1.440 | 480 | 1.860 | 720 |
| Ogan Ilir | 241 | 16 | 1.446 | 482 | 1.687 | 482 | 1.446 | 78 | 1.446 | 241 |
| OKI | 327 | 18 | 1.962 | 654 | 2.289 | 654 | 1.926 | 1.442 | 5.886 | 2.282 |
| OKU | 157 | 12 | 942 | 314 | 1.099 | 314 | 942 | 1.045 | 2.041 | 1.256 |
| OKU Timur | 306 | 20 | 1.836 | 612 | 2.142 | 612 | 1.836 | 350 | 2.406 | 1.256 |
| OKU Selatan | 259 | 19 | 1.554 | 518 | 1.813 | 518 | 2.119 | 259 | 2.136 | 279 |
| M.Enim | 255 | 20 | 1.530 | 510 | 1.785 | 510 | 4.211 | 1.047 | 4.208 | 1.271 |
| Lahat | 376 | 22 | 2.256 | 752 | 2.632 | 752 | 2.256 | 376 | 2.262 | 376 |
| Mura | 199 | 14 | 1.194 | 398 | 1.393 | 398 | 1.194 | 879 | 1.106 | 199 |
| E.Lawang | 156 | 10 | 936 | 312 | 1.092 | 312 | 936 | 199 | 2.388 | 879 |
| PALI | 71 | 5 | 426 | 142 | 497 | 142 | 630 | 197 | 928 | 197 |
| Muratara | 89 | 7 | 534 | 178 | 623 | 178 | 534 | 178 | 1.598 | 178 |
| | 3.231 | 231 | 19.386 | 6.462 | 22.167 | 6.462 | 25.162 | 9.016 | 35.913 | 13.297 |

*Sumber: Sat Pol PP Provinsi Sumatera Selatan*

### 2.4.3.2. Lama Proses Perizinan

Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang ramah dunia usaha. Salah satu indikatornya adalah kemudahan pelayanan perizinan. Dalam hal ini meski semua kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), namun masih perlu dipastikan bahwa impelementasi PTSP tersebut dapat meningkatkan efisiensi proses perizinan, baik dalam hal biaya maupun waktu yang dibutuhkan.

Layanan perizinan di Sumatera Selatan sedang mengalami proses transformasi dari layanan yang lambat menuju layanan yang cepat. Hal ini telah dibentuknya kantor layanan terpadu di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, tetapi prosedur layanan seringkali belum efisien. Rata-rata lama waktu layanan perizinan masih lebih lambat dari target yang dinyatakan dalam

dokumen rencana pembangunan daerah, terutama terkait perbaikan birokrasi perizinan lambat berkembang. Namun demikian, sejak berdiri PTSP terdapat perubahan signikan terhadap masa atau waktu pengurusan perizinan di bidang investasi dan non perizinan. Selama tahun 2014 – 2018 telah berhasil mempercepat proses pelayanan dari 7 hari menjadi 5 hari atau efisiensi waktu 2 hari atau 28,57%. Lamanya proses perizinan dapat disebabkan beberapa hal antara lain prosedur layanan seringkali belum efisien, dimana rata-rata lama waktu layanan perizinan masih lebih lambat dari target yang dinyatakan dalam dokumen rencana pembangunan daerah (SOP), dan hal-hal yang terkait perbaikan birokrasi perizinan yang lambat berkembang. Dengan adanya regulasi perizinan dan perbaikan pada system aplikasi pelayanan online maka pelayanan perizinan dan non perizinan dapat menyederhanakan proses perizinannya menjadi lebih cepat.

**Tabel 2.272.**
Rata-Rata Lama waktu Pelayanan Perizinan Usaha
di Provinsi Sumatera Selatan

| Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rata-rata lama waktu pelayanan perizinandan non Perizinan (hari) | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| Jumlah Perizinan dan non perizinan yang terlayani pada unit PTSP (angka) | 102 | 280 | 688 | 901 | 934 |
| Index Kepuasan masyarakat (angka) | 82,84 | 87,32 | 89,25 | 89 | 89,41 |

*Sumber: Dinas PMPTSP Prov. Sumsel 2019*

Dari tabel di atas dapat dilihiat bahwa untuk jumlah perizinan dan non perizinan PMA dan PMDN yang terlayani selama tahun 2014 – 2018 mengalami peningkatan yang sangat baik dengan rata – rata pertumbuhan perizinan sebesar 88,81%, seiring dengan membaiknya iklim investasi di provinsi Sumatera Selatan. Untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan tersebut maka dilakukan survey Index Kepuasan Investor dengan angka capaian pada tahun 2014 sebesar 82,84 dan pada akhir tahun 2018 berhasil mencapai angka 89,41. Walaupun capaian kinerja Pelayanan Perizinan dan non Perizinan selama tahun 2014-2018 sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan terutama pada ketersediaan sarana dan prasarana perizinan seperti yang tertuang dalam Permendagri nomor 138 Tahun 2017 yang belum dapat di penuhi pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Selain penataan data dan informasi perizinan, perbaikan regulasi perizinan serta

pengembangan sistem aplikasi pelayanan online terintegrasi perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai investasi di Provinsi Sumatera Selatan.

#### 2.4.3.3. Jumlah Perda yang mendukung iklim Usaha

Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sudah terdapat 2 (dua) Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha di Provinsi Sumatera Selatan, antara lain:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 tahun 2014, tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 tahun 2018, tentang Fasilitasi dan Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api.

#### 2.4.3.4. Perkembangan Jumlah Izin Usaha

Sumsel saat ini menjadi primadona bagi investor dalam dan luar negeri, selain lokasi yang strategis, suasana kondusif yang terus dijaga sangat berperan menarik minat investor. Selain itu, terkait perizinan investasi Pemerintah Sumsel akan siap memberikan kemudahan. Berbagai peluang investasi Sumsel dapat ditawarkan. Dibidang infrastruktur seperti pelabuhan Tanjung Api-Api,Double track, Kawasan Industri, Jalan Tol, dan Jembatan. Dibidang pertambangan seperti minyak bumi, Gas Bumi, Batu Bara serta bidang perkebunan seperti Karet dan Kelapa Sawit.

Perkembangan jumlah izin usaha semakin berkembang, namun tahun 2012 mengalami sedikit penurunan akibat perlambatan kegiatan ekonomi global dan sulitnya melakukan usaha yang memiliki margin keuntungan yang prospektif. Dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api menjadikan Sumatera Selatan sebagai daerah yangsemakin kompetitif dari sisi investasi, perindustrian dan ekspor.

Di bidang pertambangan dari hasil penelitian 359 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan bupati (Kepala daerah), ternyata 175 IUP yang Clear and Clean (CnC). Penelitian lebih lanjut hingga akhir Desember 2016, ternyata 34 IUP yang tidak lolos dan yang benar-benar dinyatakan CnC hanya ada 141 IUP. Itu artinya, ada 218 IUP dicabut dan dilarang melakukan kegiatan penambangan.

### 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

#### 2.4.4.1. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan penduduk suatu daerah dapat dihitung dari komposisi penduduk menurut umur. Dampak keberhasilan pembangunan

kependudukan dapat dilihat dari perubahan komposisi penduduk menurut umur, dimana jika jumlah proporsi penduduk usia produktif lebih tinggi dari usia tidak produktif, maka beban tanggungan akan ikut turun pula. Dilihat dari angka beban tanggungan terlihat bahwa terjadi penurunan dari tahun 2013 yaitu sebesar 0,495 persen hingga 2017 sebesar 0,490 persen.

**Tabel 2.273.**
Angka Beban Tanggungan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2017

| No. | Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah penduduk usia <15 tahun | 2.292.368 | 2.325.385 | 2.357.832 | 2.339.575 | 2.349.184 |
| 2. | Jumlah penduduk usia >64 tahun | 299.725 | 300.453 | 331.553 | 356.389 | 370.925 |
| 3. | Jumlah penduduk usia tidak produktif | 2.592.093 | 2.625.838 | 2.689.385 | 2.695.964 | 2.720.109 |
| 4. | Jumlah penduduk usia 15-64 tahun | 5.230.647 | 5.305.657 | 5.362.930 | 5.464.937 | 5.546.874 |
| **Rasio ketergantungan** | | **0.495** | **0.494** | **0.501** | **0.493** | **0.490** |

*Sumber: Buku Saku dan Data Indikator Kesejahteraan Sumatera Selatan 2013-2017*

## 2.5. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Selatan

Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Indonesia maka capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dilihat dari 4 ( empat ) pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar tata kelola pelaksanaan.

Provinsi Sumatera Selatan saat ini telah merampungan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2016-2018 dan juga sedang menyelesaikan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun Tahun 2018-2023 yang sedang di*mainstream*kan dengan RPJMD Tahun 2018-2023.

Dalam rangka penyempurnaan RPJMD Tahun 2018-2023, maka Sumatera Selatan perlu melihat gambaran umum capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Selatan. Hal tersebut dapat kita lihat bagaimana capaian per pilar, sebagai berikut.

### 2.5.1. Pilar I (Pembangunan Sosial)

Pilar ini terdiri dari 5 (lima) tujuan (goal), yaitu Goal 1: Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Goal 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, goal 4: Pendidikan Berkualitas, goal 5: Kesetaraan Gender

**Tabel 2.274.**
PERCAPAIAN PILAR I ( Pembangunan Sosial )

| TARGET TPB | INDIKATOR PROVINSI | CAPAIAN | | CAPAIAN NASIONAL | STATUS CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **PILAR I (PEMBANGUNAN SOSIAL)** | | | | | |
| **1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.** | 1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | 12,27 | 13,10 | 10,64 (2017) | Belum Tercapai dan masih di atas Nasional |
| **1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.** | 1.3.1 (a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | 70 | 70 (2016) | 71,8 | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |
| | 1.3.1 (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | 12.60 | 12.60 (2017) | 12,60 | Tercapai |
| | 1.3.1 (c) Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. | 206 | 206 (2017) | | Tercapai |
| | 1.3.1 (d) Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan. | 171,418 | 171,418 | | Tercapai |
| | 1.3.1 (e) Proporsi Penduduk Sumsel yang dijamin dengan Jamsoskes Sumsel Sumatera | 47.90 | 47.90% (2017) | 47,90 | Tercapai |
| **1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yangtepat, termasuk keuangan mikro.** | 1.4.1 Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar. | | | | Tidak ada data |
| | 1.4.1.(a) Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan | 69,04 | 69,04 (BPS, 2017) | 74,89 | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |
| | 1.4.1.(b) Persentase anak berusia 0-11 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap | 63.67 | 63,67 (2017) | | Tercapai |
| | 1.4.1.(c) Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | 70.42 | 70,42 | 65,6 | **Tercapai dan telah di atas nasional** |
| | 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. | 62.71 | 62,71 | 62,75 | Tercapai tapi masih di bawah nasional |
| | 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. | 78.62 | 78,62 | 53,81 | Tercapai dan telah di atas nasional |
| | 1.4.1.(g) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/sederajat | 99.64 | 99.64 | 97,21 | Tercapai dan telah atas Nasional |
| | 1.4.1.(h) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/sederajat | 105.30 | 105,30 | 76,55 | Tercpai dan telah di atas nasional |
| | 1.4.1.(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/MA/sederajat | 113.55 | 113,55 | 52,21 | Tercapai dan di atas nasional |
| | 1.4.1.(j) Persentase Penduduk usia 0-17 tahun dengan | 88.16 | 88.16 (2016) | 74,46 | Tercapai di atas nasional |

| TARGET TPB | INDIKATOR PROVINSI | CAPAIAN | | CAPAIAN NASIONAL | STATUS CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kepemilikan akta kelahiran | | | | |
| | 1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN | 87.61 | 87,61 | 94,52 | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |
| **1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana** | 1.5.1 (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. | PM | PM | | Tidak ada data |
| | 1.5.1 (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. | PM | PM | | Tidak ada data |
| | 1.5.1 (c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial. | PM | PM | | Tidak ada data |
| | 1.5.1 (d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. | 5 | 5 | | Tercapai |
| | 1.5.1 (e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. | 142 (2013) | 142 (2013) | | Tercapai |
| | 1.5.3 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | 1 dokumen | 1 dokumen | | Tercapai |
| **1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.** | 1.a.1(*) Proporsi pendanaan yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan (*) *modifikasi indikator yang dimaksud adalah proporsi anggaran daerah untuk program kemiskinan* | 1,614 T | 1,614 T | | Tercapai |
| | 1.a.2(*) Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah (*) *modifikasi indikator yang dimaksud adalah pengeluaran dari APBD.* | 35% | 35% | | Tercapai |
| **1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.** | 1.b.1 Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan. | | | | Tidak ada data |
| **1.c Peningkatan Aset masyarakat miskin** | 1.c.1 Jumlah masyarakat miskin yang mendapat penambahan aset | PM | 4,545 | | Belum tercapai |
| **1.d Peningkatan Daya Beli masyarakat miskin** | 1.d.1 Pengeluaran konsumsi per kapita masyarakat miskin | Rp.370,060 | 370,060 | | Tercapai |
| | | | | | |
| **2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun** | 2.1.1 (a) Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita. | 12,3 | 12,3 (PSG, 2017) | | Tercapai |
| | 2.1.2 (a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/hari. | 4,51a | 4,51 | | Tercapai |
| **2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang** | 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita | 22,8 | 22,8 (PSG, 2017 | 33,6 (2016) | Tercapai |

| TARGET TPB | INDIKATOR PROVINSI | CAPAIAN | | CAPAIAN NASIONAL | STATUS CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.** | 2.2.1(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta | 14,3 | 14,3 (PSG, 2017) | 29,6 (PSG, 2017) | Tercapai |
| | 2.2.2 Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita | 7,80 | 7,80 (PSG, 2017) | | Tercapai |
| | | 4,20 | 4,20 (PSG, 2017) | | |
| | 2.2.2(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil | 19,47 | 19,47 | | Tercapai |
| | 2.2.2(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif | 60,36 | 60,36 | | Tercapai |
| | | | | | |
| **3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.** | Jumlah Kematian Ibu yang terdata (terlaporkan) | 165 | 107 (Profil Kesehatan, 2017) | 305 (2015, Profil Penduduk Indonesia hasil SUPAS) | Tercapai tapi data sumsel adalah jumlah kematian ibu yang dilaporkan |
| | 3.1.2 Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih | 93,77 | 93,77 %(Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2016) | 92,60% (Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2016) | Tercapai tapi masih di atas Nasional |
| | 3.1.2(a) Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar | 70.18 | 70,18 | | Tercapai |
| **3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.** | 3.2.1 Jumlah Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. | 48 | 48 | 40 (IDHS, 2012) | Belum tercapai di bawah Nasional |
| | 3.2.2 Jumlah Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. | 461 | 461 | 19 (IDHS, 2012) | Tercapai tapi masih di atas Nasional |
| | 3.2.2a Jumlah Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | 98 | 98 | | Tercapai |
| | 3.2.2b Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. | 94.2a | 98,09 | | Tercapai |
| **3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya** | 3.3.1 Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV. | | | | Tidak ada data |
| | 3.3.1 (a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa. | 0,3 | 0,3 | | Tercapai |
| | 3.3.2 Kejadian TB per 1000 orang | 46 | 45,05 | | Tercapai |
| | 3.3.2 (a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk | 190 | 126,22 | 395 (2015) | Tercapai dan di bawah Nasional |
| | 3.3.3 Kejadian Malaria per 1000 orang. | 0.27 | 0,31 | 0,84 (2016) | Belum tercapai tapi telah bawah nasional |
| | 3.3.3 (a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria | 1 | 1 | | Tercapai |
| | 3.3.4 Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk. | 90 | PM | | Belum tercapai |
| | 3.3.4 (a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. | 23.53 | PM | | Belum tercapai |

| TARGET TPB | INDIKATOR PROVINSI | CAPAIAN | | CAPAIAN NASIONAL | STATUS CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 3.3.5 Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). | 3570324 | **PM** | Filariasis: 21,6 juta (2015) | Belum tercapai |
| | 3.3.5 (a) Persentase kabupaten/ kota dengan eliminasi Kusta. | PM | PM | | Tidak ada data |
| | 3.3.5 (b) Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I). | 1 | 1 | | Tercapai |
| **3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.** | 3.4.1 Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis. | NA | Na | | Tidak ada data |
| | 3.4.1 (a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun. | 7,2 | PM | 8,8 (2016) | Belum |
| | 3.4.1 (b) Prevalensi tekanan darah tinggi. | 25,8 | PM | 32,4 (2016) | Belum |
| | 3.4.1 (c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. | 16.6 | 16,6 (PSG,2017) | 20,7 (2016) | Tercapai dan telah di bawah Nasional |
| | 3.4.2 Angka kematian (*insidens rate*) akibat bunuh diri. | NA | Na | 1,77 (2014) | Tidak ada data |
| | 3.4.2 (a) Jun kabupaten/kota yang mem puskesmas Yang menyelenggarakan upayakesehatan jiwa. | 17 | 15 | | Belum tercapai |
| **3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.** | 3.5.1 Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat. | 875 | 2411 | | Tercapai |
| | 3.5.1 (a) Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis. | PM | PM | Kemenkes: 6028 (2016); BNN: 19000 (2015) | Tidak ada data |
| | 3.5.1 (b) Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi. | 328 | 80 | 10000 (2015) | Belum tercapai di bawah nasional |
| | 3.5.1 (c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan. | 215 | 319 | | Tercapai |
| | 3.5.1 (d) Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu. | 8 | 5 | | Belum |
| | 3.5.1 (e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba. | 1,37 | 1,47 | | Tercapai |
| | 3.5.2 Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. | PM | PM | 0,33 (2016) | Tidak ada data |
| **3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.** | 3.6.1 Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas. | PM | PM | | Tidak ada data |
| **3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke** | 3.7.1 Proporsi perempuan usia reproduksi (15 -49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat | PM | PM | 60,9 (2017) | Tidak ada data |

| TARGET TPB | INDIKATOR PROVINSI | CAPAIAN | | CAPAIAN NASIONAL | STATUS CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **dalam strategi dan program nasional.** | kontrasepsi metode modern. | | | | |
| | 3.7.1 (a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | 65,67 | 66,80 (SRPJMN,2017) | | Tercapai |
| | 3.7.1 (b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern). | 9,9 (2012) | PM | | Belum |
| | 3.7.2 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ ASFR). | 57,80 | 92,03 (BKKBN, 2017) | 42 (2017) | Belum Tercapai dan masih di atas Nasional |
| | 3.7.2 (a) Total Fertility Rate (TFR). | 2.48 | 2,31 (BKKBN, 2017) | | Tercapai |
| **3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.** | 3.8.1 Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung). | | | | Tidak ada data |
| | 3.8.1 (a) *Unmet need* pelayanan kesehatan. | 3,6 | 3,6 | | Tercapai |
| | 3.8.2 Persentase penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. | 100 | 100 | | Tercapai |
| | 3.8.2 (a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). | 57,7 | 57,7 | | Tercapai |
| **3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.** | 3.9.1 Angka kematian akibat tangga dan polusi udara ambien. | PM | PM | | Tidak ada data |
| | 3.9.2 Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis. | PM | PM | | Tidak ada data |
| | 3.9.3 Angka kematian akibat keracunan. | PM | PM | | Tidak ada data |
| | 3.9.3 (a) Proporsi kematian akibat keracunan. | PM | PM | 1% (2014) | Tidak ada data |
| **3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.** | 3.a.1 Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. | 31.57 | 31,57 (BPS, 2016) | 28,97 (2016) | Tercapai tapi masih di atas Nasional |
| | 3.a.2 Persentase Kab/Kota yang memiliki Peraturan tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok | 70,59 | 70,59 | | Tercapai |
| **3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang** | 3.b.1 Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan. | | | | Tidak ada data |
| | 3.b.1 (a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. | 70 | 76,28 | | Tercapai |

| TARGET TPB | INDIKATOR PROVINSI | CAPAIAN | | CAPAIAN NASIONAL | STATUS CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan** | | | | | |
| | | | | | |
| **4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.** | 4.1.1 (a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. | 67,18 | 67,18 (Kemendikbud 2016) | | Tercapai |
| | 4.1.1 (b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. | 58,09 | 58,09 (Kemendikbud 2016) | | Tercapai |
| | 4.1.1 (c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B. | 66,70 | 66,70 (Kemendikbud 2016) | | Tercapai |
| | 4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat. | 112,14 | 112,14 | 108,50 | Tercapai dan telah di atas Nasional |
| | 4.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat. | 89.09 | 89,09 | 90,23 | Tercapai tapi masih di bawah nasional |
| | 4.1.1 (f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat. | 76 | 83,44 | 82,84 | Tercapai dan telah di atas nasional |
| | 4.1.1 (g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. | 8.41 | 8,41 | | Tercapai |
| | 4.1.1 (h) Persentase Harapan Lama Sekolah | 12.35 (BPS) | 12,35 | | Tercapai |
| **4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.** | 4.2.2 (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | 67.77 | 67,77 (Kemendikbud, 2017) | 67,51 | Tercapai dan di atas Nasional |
| **TARGET 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.** | 4.3.1(a) Angka Partisipasi Kasar SMK sederajat | .... | 26,21 (Kemendikbud, 2017) | .... | Belum tercapai |
| | 4.3.1(b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) | 26 | 41,56 | 31,61 | Tercapai dan telah di atas nasional |
| **4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.** | 4.4.1 Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). | 54,9 (15-24) 28,60 (15-59) | 44,00 (15-24) 21,80 (15-59) (BPS, 2015) | remaja (15-24) = 58,21 (2016); dewasa (15-59) = 31,83 (2016) | Belum tercapai |
| **4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak- anak dalam kondisi rentan.** | 4.5.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. | SD: 99,55 SMP: 105,10, SMA:/SMK :113,15 PT: NA | SD :100,39, SMP: 104,44 SMA/SMK: 109,94 , PT: NA (BPS 2015) | SD/MI: 99,7 SMP/MTs: 104,89 ) SMA/SMK /MA/ :105,54 PT= 115,6 | Tercapai dan telah di atas nasional |
| **4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.** | 4.6.1 (a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. | 98.54a (BPS) | 98.22 (BPS, 2015) | 95,38 | Tercapai dan telah di atas nasional |
| | 4.6.1 (b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15 -59 tahun. | 99,85 (15-24), 99,45 (15-59) | 99,9 (15-24) 99,47 (15-59) (BPS, 2016) | 99,67 (15-24) 97,93 (15-59) | Tercapai dan telah di atas nasional |
| **4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.** | 4.c.1 Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. | TK : 45,75% SD : 80,70% SMP : 91,91% SMA : 97,30% SMK : | TK : 40,61% SD : 75,38% SMP : 86,23% SMA : 95,87% SMK : | 46,15 | Belum tercapai |

| TARGET TPB | INDIKATOR PROVINSI | CAPAIAN | | CAPAIAN NASIONAL | STATUS CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 93,21% PLB : 89,19%a (Kemendikbud) | 91,75% PLB : 81,10% (Kemendikbud, 2015) | | |
| | | | | | |
| **TARGET 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun** | 5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. (Matriks bidang pembangunan Hal. II.2.M-163) | 31 | 31 | 19 (2015) | Tercapai |
| | 5.1.2 Prevalensi Kasus Pelanggaran Hak Perempuan | 0,025 | 0,025 | | Tercapai |
| **5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.** | 5.2.1 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. | na | na | 10,4 (2016) | Tidak ada data |
| | 5.2.1 (a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. | 0.02 | na | | Belum tercapai |
| | 5.2.2 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan(umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. | NA | na | 4,66 (2016) | Tidak ada data |
| | 5.2.2 (a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | NA | na | | Tidak ada data |
| **5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.** | 5.3.1 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. | 22,77 | 22,77 | Sebelum umur 18 tahun= 22,35 (2016) | Belum tercapai masih di bawah nasional |
| | | 0,79 | 0,79 | Sebelum umur 15 tahun= 1,08 (2016); | |
| | 5.3.1 (a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. | 20 | 20 | 20,7 | Tercapai |
| | 5.3.1 (b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR). | 40 | 40 | | Tercapai |
| | 5.3.1 (c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat. | 82,51 | 82,51 | 82,84 | Tercapai |
| | 5.3.2 Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur. | PM | PM | | Tidak ada data |
| **5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan** | 5.4.1 Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi. | PM | PM | | Tidak ada data |

| TARGET TPB | INDIKATOR PROVINSI | CAPAIAN | | CAPAIAN NASIONAL | STATUS CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **keluarga yang tepat secara nasional.** | | | | | |
| **5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.** | 5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | 17,33 (DPRD PROV) | 17,33 (DPRD PROV) | DPR= 17,32 (2014); DPRD Prov= 16 (2014); DPRD Kab/kota= 14 (2014); DPD= 25,8 (2014) | Tercapai tapi masih di bawah nasional hanya DPRD Prov yang di atas nasional |
| | | 9,5 (DPRD Kab/Kota) | 9,5 (DPRD Kab/Kota) | | |
| | | 12,16 (Kepala Daerah dan Eselon I-II) | 12,16 (Kepala Daerah dan Eselon I-II) | | |
| | 5.5.2 Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | 27,51 | 27,51 | Eselon I= 15,6 (2016); Eselon II= 22,28 (2016) | Belum tercapai |
| | 5.6.1 (a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). | 12,03 (BKKBN, 2017) | 12,03 (BKKBN, 2017) | | Tercapai |
| | 5.6.1 (b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. | 98,3 9 (IDHS, 2012) | 98,3 9 (IDHS, 2012) | | Tercapai |
| | 5.6.2 Perda yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi. | na | na | | Tidak ada data |

### 2.5.2. Pilar 2 ( Pembangunan Ekonomi )

Pilar ini terdiri dari 5 (lima) goal, yaitu goal 7.Energi Bersih dan Terjangkau, goal 8. Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi, goal 9.Industri Inovasi dan Infrastuktur, goal 10.Berkurangnya Kesenjangan, dan Goal 17. Kemitraan Untuk mencapai Tujuan.

**Tabel 2.275.**
PERCAPAIAN PILAR II ( Pembangunan Ekonomi )

| TARGET TPB | INDIKATOR PROVINSI | CAPAIAN | | CAPAIAN NASIONAL | STATUS CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| **PILAR II ( Pembangunan Ekonomi )** | | | | | |
| **7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.** | 7.1.1 Rasio elektrifikasi. | 87.61% | 83.82% | 91,16 (2016) | Belum tercapai dan masih di bawah Nasional |
| | 7.1.1 (a) Konsumsi listrik per kapita. | 1.515 kWH | 1.489 kWH | 956 (2016) | Belum tercapai |
| | 7.1.2 (b) Rasio penggunaan gas rumah tangga. | 85.72% | 84.13% | na | Belum tercapai |
| **7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global** | 7.2.1 Bauran energi terbarukan | 13.20% | 11,9% | 7 (2016) | Belum tercapai tapi di atas Nasional |

| TARGET TPB | INDIKATOR PROVINSI | CAPAIAN | | CAPAIAN NASIONAL | STATUS CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| **7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.** | 7.3.1 Intensitas Energi Primer (SBM) | na | na | 440,3 (2016) | |
| | | | | | |
| **8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.** | 8.1.1 Laju pertumbuhan PDRB per kapita. | 3,63 | 3,63 | 3,7 (2016) | Belum tercapai |
| | 8.1.1 (a) PDRB per kapita. (ribu rupiah) | 46.420 | Rp. 43.551 | 47.957 | Belum tercapai |
| **8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.** | 8.2.1 Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun. | 4,5 | 4,33 (2015) | 2,8 | Tercapai di atas Nasional |
| **8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.** | 8.3.1 Pekerja informal sektor non-pertanian. | 44,3 | 44,69% (2016, BPS) | 89,50, Laki-laki: 85,69 Perempuan: 94,59 | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |
| | 8.3.1 (a) Persentase tenaga kerja formal. | 46,15 | 45,54%a (2016, BPS) | 42,97 | Belum tercapai tapi sudah di atas Nasional |
| | 8.3.1 (b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. | 77,5 | 77,77%a (2016, BPS) | | Tercapai |
| **8.5: Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki- laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.** | 8.5.1 Upah rata-rata per jam pekerja | 12.793 | 12.793 (2016, BPS) | 13.888,05 (2016) | Tercapai di bawah Nasional |
| | 8.5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka | 4,39a | 4,31%a (2016, BPS) | 5,5 Laki-laki: 5,53 Perempuan: 5,44 Usia 15-24: 20,44 Usia 25+: 2,68 | Belum tercapai di bawah Nasional |
| | 8.5.2 (a) Persentase setengah pengangguran. | 9,46 | 9,66%a (2016, BPS) | 7,55 | Tercapai dan telah Di bawah Nasional |
| **8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.** | 8.6.1 Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). | 22,43 | 23,43%a (2016, BPS) | 21,81 | Tercapai tapi masih Di atas Nasional |
| **8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.** | 8.8.1 (a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3 | 30% | %a (dari total 5830) | 700 (2015) | Tercapai di bawah Nasional |
| **8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan** | 8.9.1*Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB | 3,8 | 3,75 | 4,25 (2016) | Bekum tercapai dan masih Di bawah Nasional |
| | 8.9.1 (a) Jumlah wisatawan mancanegara. | 67.470 | 67.470 | 12,7 | Belum tercapai di atas Nasional |

| TARGET TPB | INDIKATOR PROVINSI | CAPAIAN | | CAPAIAN NASIONAL | STATUS CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| **kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.** | 8.9.1 (b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | 7.474.422 | 7.474.422 | 263 (2016) | Tercapai |
| | 8.9.2 Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. | 0,1444 | 0,0944a | 10,37 (2016) | Belum tercapai di bawah Nasional |
| | | | | | |
| **Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.** | 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional. | 94 % | 0,856 | 90,3 (2016) | Belum tercapai di bawah Nasional |
| | 9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol. | 707,62 km | 2,2 Km | 104 (2016) | Belum tercapai di bawah Nasional |
| | 9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api. | 902,3 km | 675,95 Km | 542,27 (2016) | Belum tercapai di atas Nasional |
| | 9.1.2.(a) Jumlah bandara | 6 (enam) Unit OKUS, Muba, PALI, PGA, LLG, PLG | 3 (tiga) Unit PGA, LLG, PLG | 15 (kumulatif sampai dengan tahun 2019) | Belum dan di bawah Nasional |
| | 9.1.2.(b) Jumlah dermaga Penyeberangan | 3 (pelabuhan boom baru, tj api-api, dan tg. buntung) | 2 (pelabuhan boom baru dan tj api-api) | 23 (2016) | Belum dan di bawah Nasional |
| | 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis. | 2 lokasi (pelabuhan boom baru dan tj api-api) | 2 lokasi (pelabuhan boom baru dan tj api-api) | 24 (kumulatif sampai dengan 2019) | Belum dan di bawah Nasional |
| **9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.** | 9.2.1 Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita. | 19,52% | 18,91% | nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB 18,2 (2016) dan nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap perkapita 6,6 (2016) | Belum tercapai di bawah Nasional |
| | 9.2.1 (a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. | 7,06 | 6,23 | | Belum tercapai |
| | 9.2.2 Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. | 6,06% | 5,38% | 13,1 (2016) | Belum tercapai dan masih Di bawah Nasional |
| **9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.** | 9.c.1 Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. | na | na | 93 (2015) | |
| | 9.c.1 (a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. | 56,48% a | 56,48% (2016, BPS) | 58,30 (2016) | Tercapai di bawah Nasional |
| | 9.c.1 (b) Proporsi individu yang menggunakan Internet. | 19,98% a | 19,98% (2016, BPS) | 32,3 | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |
| **10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.** | 10.1.1 Koefisien Gini. | 0,362 (2016, BPS) | ,362 (2016, BPS) | | Tercapai |
| | 10.1.1 (a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | 13,54% (2016, BPS) | 13,54% (2016, BPS) | 10,64 (2017) 9,82 (Maret 2018) | Tercapai di atas Nasional |

| TARGET TPB | INDIKATOR PROVINSI | CAPAIAN | | CAPAIAN NASIONAL | STATUS CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| | 10.1.1 (b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan. | na | na | 70 (2014) | Tidak ada data |
| | 10.1.1 (c) Jumlah desa tertinggal. | 1644 desa (2017,IDM ) | 1644 desa (2017,IDM) | 20.432 (2014) | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |
| | 10.1.1 (d) Jumlah Desa Mandiri | 1 desa (2017, IDM) | 1 desa (2017, IDM) | 50.763 (2014) | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |
| | 10.1.1 (e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. | Kab. Mura 5,41% Kab. Muratara 5,81 % | Kab. Mura 5,41% Kab. Muratara 5,81 % | 5,39 (2014) | Tercapai di atas Nasional |
| | 10.1.1 (f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. | Kab. Mura 14,30% Kab. Muratara 20,00 % | Kab. Mura 14,30% Kab. Muratara 20,00 % | 18 (2014) | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |
| **17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.** | 17.1.1 Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. | 1,93 | 1,85 | 12,54 (2016) | Belum tercapai di bawah Nasional |
| | 17.7.1 (a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. | 0,74 | 0,67 | | Belum tercapai |
| | 17.1.2 Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. | 34,47 | 35,89 | 67,02 (2016) | Tercapai di atas Nasional |
| **17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.** | 17.3.1(a) Rata-rata pertumbuhan investasi PMA dan PMDN | 2,52 | 2,14 | | Belum tercapai |
| **17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.** | 17.6.2 Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya. | 25,65 | 25,65 (BPS, 2017) | | Tercapai |
| **17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.** | 17.8.1 Proporsi individu yang menggunakan internet. | 25,65 | 26,65 (BPS, 2017) | 32,3 | Belum tercapai di bawah Nasional |
| **17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.** | 17.11.1 (a) Pertumbuhan ekspor produk non migas. | 26,79 | -18,33 | 15, 83 | Belum tercapai di bawah Nasional |
| **17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan** | 17.18.1 (a) Persentase konsumen Badan | na | na | 89,3 (2016) | Tidak ada data |

| TARGET TPB | INDIKATOR PROVINSI | CAPAIAN | | CAPAIAN NASIONAL | STATUS CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| **pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.** | Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. | | | | |
| | 17.18.1 (b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. | na | na | 91,35 (2016) | Tidak ada data |
| | 17.18.1 (d) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. | na | na | na | Tidak ada data |
| **17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.** | 17.19.2 (a) Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020. | na | na | 1 (2010) | Tidak ada data |
| | 17.19.2 (b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register). | na | na | na | Tidak ada data |
| | 17.19.2 (c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. | na | na | na | Tidak ada data |
| | 17.19.2 (d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). | na | na | na | Tidak ada data |
| | 17.19.2 (e) Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. | na | na | na | Tidak ada data |

### 2.5.3. Pilar 3 ( Pembangunan Lingkungan )

Pilar Pembangunan lingkungan terdiri dari goal 6. Air Bersih dan Sanitasi layak, goal 11. Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan, goal 12. Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab, goal 13. Penanganan perubahan iklim, goal 14.Ekosistem kelautan, dan goal 15.Ekosistem daratan.

Capaian Sumatera Selatan pada pilar Pembangunan Lingkungan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini,

**Tabel 2.276.**
PERCAPAIAN PILAR III ( Pembangunan Lingkungan )

| TARGET TPB | INDIKATOR PROVINSI | CAPAIAN | | CAPAIAN NASIONAL | STATUS CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| **PILAR III ( Pembangunan Lingkungan )** | | | | | |
| **6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.** | 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | 53,54 (Susenas 2016) | 53,54 (Susenas 2016) | 72,04 | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |
| | 6.1.1 (b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah | | 64,56/6,15 | na | Tercapai |

| TARGET TPB | INDIKATOR PROVINSI | CAPAIAN | | CAPAIAN NASIONAL | STATUS CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| | tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. | 64,56/6,15 | | | |
| | 6.1.1. (c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. | na | na | na | Tidak ada data |
| **6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.** | 6.2.1. (a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. | 58.51 | 58.51 | PM | Tidak ada data |
| | 6.2.1. (b) Proporsi populasi penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan | 54,06 (2016) | 54,06 (2016) | 67,2 (2016) | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |
| | 6.2.1 (c). Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | 279 | 279 (2017) | na | Tercapai |
| | 6.2.1. (d) Jumlah kota/kab yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. | 1 | 1 | na | Tercapai |
| | 6.2.1. (e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. | na | na | na | Tidak ada data |
| | 6.2.1. (f) Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. | na | na | na | Tidak ada data |
| **6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.** | 6.3.1 (a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). | 10 | 10 | 53 (2016) | Tercapai |
| | 6.3.1 (b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. | na | na | 60,14 | Tidak ada data |
| **6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.** | 6.3.2 (a) Kualitas air danau. | 1 | 1 | 0 (2014) | Tercapai |
| | 6.3.2 (b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. | 50 | 50 | 0 (2014) | Tercapai di atas Nasional |
| | 6.4.1 (a) Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah. | na | na | na | Tidak ada data |
| | 6.4.1 (b) Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri. | na | na | na | Tidak ada data |
| **6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.** | 6.5.1 (a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | 1 | 1 | na | Tercapai |
| | 6.5.1 (b) Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi. | 2a | 2 | na | Tercapai |
| | 6.5.1 © Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. | 2 | 2 | na | Tercapai |
| | 6.5.1 (d) Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara. | 3 | 3 | na | Tercapai |
| | 6.5.1 (e)Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) | | | na | Tidak ada data |

| TARGET TPB | INDIKATOR PROVINSI | CAPAIAN | | CAPAIAN NASIONAL | STATUS CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| | untuk pemulihan kawasan DAS. | | | | |
| | 6.5.1 (f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. | na | na | na | Tidak ada data |
| | 6.5.1 (g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. | 3 | 3 | na | Tercapai |
| | 6.5.1 (h) Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan. | na | na | na | Tidak ada data |
| | 6.5.1 (i) Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah. | 2 DAS | 2 DAS | na | Tercapai |
| **6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.** | 6.6.1 (a) Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya. | 1 | 1 | na | Tercapai |
| | 6.6.1 (b) Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%. | 1 | 1 | na | Tercapai |
| | 6.6.1 (c) Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya. | 14 | 14 | na | Tercapai |
| | 6.6.1 (d) Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi. | 150.000 | 150.000 | na | Tercapai |
| | 6.6.1 (e) Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya. | 4 | 4 | na | Tercapai |
| | | | | | |
| **11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.** | 11.1.1 Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak. | 9,4% | 9,4% | PM | Tercapai |
| | 11.1.1.(a) Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. | 1,603,877 .75 | 1,603,877.75 | na | Tercapai |
| | 11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP) | 1 | 1 | na | Tercapai |
| | 11.1.1.(c) Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP. | 3 dan 1a | 3 dan 1 | na | Tercapai |
| **11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, eningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.** | 11.2.1 (a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. | 26% | 26% | 24 | Tercapai di atas Nasional |
| | 11.2.1 (b) Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar. | 1 | 1 | na | Tercapai |
| **11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.** | 11.3.1 (a) Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama. | 1 | 1 | na | Tercapai |
| | 11.3.1 (b) Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). | 1 | 1 | na | Tercapai |
| **11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.** | 11.4.1 (a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. | 3 | 3 | na | Tercapai |

| TARGET TPB | INDIKATOR PROVINSI | CAPAIAN | | CAPAIAN NASIONAL | STATUS CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| **11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan** | 11.5.1 (a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). | 142 | 142 | 151,6 | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |
| | 11.5.1 (b) Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk. | 2 | 2 | na | Tercapai |
| | 11.5.1 (c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. | 0 | 0 | na | Belum tercapai |
| **11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.** | 11.6.1 (a) Persentase sampah perkotaan yangtertangani. | 80 | 80 | 46 (2013) | Tercapai |
| | 11.6.1 (b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan. | 1 | 1 | na | Tercapai |
| **11.b1 Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.** | ` | 0 | 0 | na | Belum tercapai |
| **12.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.** | 12.4.1 (a) Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU. | 20 | 20 | na | Tercapai |
| **13.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan** | 13.1.1 Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah | 0 | 0 | na | Belum tercapai |
| | 13.1.2 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang | 0.00012 (total 100,000 jiwa tahun 2016)a | 0.00012 (total 100,000 jiwa tahun 2016)a | na | Tercapai |
| **13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.** | 13.2.1 Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia. | 0 | 0 | na | Belum tercapai |
| | 13.2.1 (a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). | 1 | 1 | na | Tercapai |
| **14. Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir** | 14.2.1.(a) Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) | Dokumen Awal RZWP3K | Dokumen Awal RZWP3K | na | Tercapai |
| | 14.2.1.(b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan | 1 WPP | 1 WPP | 7 (2016) | Tercapai tapi di bawah Nasional |
| **T2. Pelestarian Wilayah Pesisir dan Laut** | 14.5.1 Jumlah luas kawasan konservasi perairan. | 1.900 Ha | 1.900 Ha | 17,1 (2016) | |

| TARGET TPB | INDIKATOR PROVINSI | CAPAIAN | | CAPAIAN NASIONAL | STATUS CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| | | | | | Tercapai tapi di bawah Nasional |
| **T3. Subsidi Sektor Perikanan** | 14.6.1 (a) Persentase kepatuhan pelaku usaha | 20% | 20% | 73 (2016) | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |
| **T4. Kapasitas Penelitian dan Alih Teknologi Kelautan** | 14.a.1 Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan. | 0% | 0% | na | Belum tercapai |
| **T5. Akses Nelayan Skala Kecil** | 14.b.1 (b) Jumlah nelayan yang terlindungi. | 10.891 org | 10.891 org | 22.500 (2016) | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |
| **15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.** | 15.1.1 Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan. | 39,50% | 39,50% | | Tercapai |
| | 15.1.1.(a) Tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan | 9,73% | 9,73% | 50,6 (2015) | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |
| | 15.2.1 Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan. | 2,23% | 2,23% | na | Tercapai |
| | 15.2.1 (a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya. | 2345,1 ha | 2345,1 ha | 10.000 (2015) | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |
| | 15.2.1 (c) Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%. | 2 KK | 2 KK | 20 (2015) | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |
| | 15.2.1 (d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan. | 24 unit | 24 unit | KPHA: 20 (2015) KPHL: 40 (2015) KPHP: 40 (2015) | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |
| **15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan** | 15.3.1 Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan. | 2,23% | 2,23% | | Tercapai |
| | 15.3.1 (a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. | 0,00% | 0,00% | 1,250,000 Ha (2015) 0.09 Persen (2015) dalam Proyeksi | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |
| **15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.** | 15.4.2 Indeks tutupan hijau pegunungan | 524.275,26 ha | 524.275,26 ha | na | Tercapai |
| **15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.** | 15.5.1 Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas. | 4% | 4% | 2 (2015) | Tercapai di atas Nasional |
| **15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.** | 15.6.1 Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata. | 3 PIC | 3 PIC | 1 PIC: 1 (2015) Unit: 1 (2015) | Tercapai di atas Nasional |
| | | 1 Peraturan | 1 Peraturan (Perhutanan Sosial) | na | Tercapai |

| TARGET TPB | INDIKATOR PROVINSI | CAPAIAN | | CAPAIAN NASIONAL | STATUS CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| | | (Perhutan an Sosial) | | | |
| **15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.** | 15.7.1 Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap. | na | na | na | Tidak ada data |
| | 15.7.1 (a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi. | 5% | 5% | 75 (2015) | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |
| | 15.7.1 (b) Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi. | 4 spesies | 4 spesies | 2 (2015) | Tercapai |
| **15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.** | 15.8.1 Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI). | na | na | na | Tidak ada data |
| | 15.8.1 (a) Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati. | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Hewan: 3 (2015)<br><br>Tumbuhan: 3 (2015) | Tercapai |
| **15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.** | 15.c.1 Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap. | na | na | na | Tidak ada data |
| | 15.c.1 (a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi. | 5% | 5% | 75 (2015) | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |

### 2.5.4. Pilar 4 ( Tata Kelola Pelaksanaan )

Pilar ini hanya terdiri dari 1 (satu) goal yaitu Goal 16. Menciptakan Perdamaian, menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh.

Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan. Upaya pengurangan segala bentuk kekerasan dan angka kematian ditandai dengan menurunnya angka kejahatan pembunuhan pada periode tahun 2012-2016 di Sumatera Selatan, pada tahun 2014 merupakan kondisi pembunuhan paling tinggi yaitu sebanya 224 kasus, sedangkan tahun 2016 menurun menjadi 132 kasus (Statistik Kriminal 2017, BPS).

Indikator utama lainnya adalah kekerasan terhadap anak. Prevalensi kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Selatan sebesar19% (baik perempuan maupun laki-laki) masih lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 20,48% kekerasan dialami oleh anak perempuan dan 38,62% dialami oleh anak laki-laki (DPPPA Prov Sumsel, 2018 dan SKtA, 2013). Dalam mencegah dan

menurunkan kekerasan terhadap anak dan kejahatan pembunuhan, pemerintah melakukan dua strategi yaitu pembuatan kebijakan dan program pembangunan yang relevan. Strategi pembuatan kebijakan, antara lain: (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23/2002 tentang Perlindungan Anak untuk mempertegas pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak serta Peraturan Menteri Pendidikan No.82/2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan; (2) Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKtA) 2016-2020 sebagai acuan lintas sektor dalam menghapuskan kekerasan anak melalui intervensi yang menyeluruh; (3) penyediaan akses layanan kepada anak seperti menciptakan Kota Layak Anak.

**Tabel 2.277.**
PERCAPAIAN PILAR IV (Tata Kelola Pelaksanaan)

| TARGET TPB | INDIKATOR PROVINSI | CAPAIAN | | CAPAIAN NASIONAL | STATUS CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| **PILAR IV ( Tata Kelola Pelaksanaan )** | | | | | |
| **16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.** | 16.1.1 (a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. | 132 | 132 | 1491 (2015) | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |
| | 16.1.2 (a) Persentase desa/ kelurahan yang ada kejadian konflik massal selama setahun terakhir | 2,07 | 2,07 | na | Tercapai |
| | 16.1.3 Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir. | 1,08 | 1,08 | 1,04 (2015) | Tercapai di atas Nasional |
| | 16.1.3 (a) Jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik/badan | 2528 | 2528 | na | Tercapai |
| | 16.1.3 (b) Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan | 211 | 211 | na | Tercapai |
| | 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. | na | na | 73,57 (2014) | Tidak ada data |
| **16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.** | 16.2.1 Jumlah anak umur 0-18 tahun yang mengalami kekerasan fisik dan/atau agresi psikologis dalam setahun terakhir yang dilaporkan | 571 | 571 | | Tercapai |
| | 16.2.1 (b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. | 0,19 | 0,19 | Anak laki-laki: 38,62; Anak perempuan: 20,48 (2013) | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |
| | 16.2.2 Jumlah korban perdagangan manusia menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi. | 8 | 8 | na | Tercapai |
| **16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparansi di semua tingkat.** | 16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. | 91% | 91% | 91,05 (2015) | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |
| | 16.6.1(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi; Kabupaten/Kota). | Provinsi : 100% Kab/Kota : 94%a | Provinsi : 100% Kab/Kota : 94%a | na | Tercapai |
| | 16.6.1(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) untuk | Provinsi : 100% | Provinsi : 100% | na | Tercapai |

| TARGET TPB | INDIKATOR PROVINSI | CAPAIAN | | CAPAIAN NASIONAL | STATUS CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| | Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). | Kab/Kota : 41%a | Kab/Kota : 41%a | | |
| | 16.6.1(c ) Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan. | 100% | 100% | na | Tercapai |
| | 16.6.2 (a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). | Provinsi : 73,24% Kab/Kota : 79,65% (2015)a | Provinsi : 73,24% Kab/Kota : 79,65% (2015) | Kementerian : 44 Lembaga : 66.67 Provinsi : 39.39 Kab/Kota : 22.14 (2016) | Tercapai di atas Nasional |
| **16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.** | 16.7.1 (a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | 11,08% | 11,08% | 16,6 DPR RI (2014) 16 DPRD Provinsi (2014) 14 DPRD Kab/Kota (2014) | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |
| | 16.7.1 (b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). | 19,04% | 19,04% | Eselon I = 20,66 dan Eselon II = 16,39 (2014) | Tercapai tapi masih di bawah Nasional |
| | 16.7.2 Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat. | na | na | na | Tidak ada data |
| | 16.7.2 (a) Indeks Lembaga Demokrasi. | 66,53 | 66,53 | 62,05 (2016) | Tercapai di atas Nasional |
| | 16.7.2 (b) Indeks Kebebasan Sipil. | 91,17 | 91,17 | 76,45 (2016) | Tercapai di atas Nasional |
| | 16.7.2 (c) Indeks Hak-hak Politik. | 81,94 | 81,94 | 70,11 (2016) | Tercapai di atas Nasional |
| **16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.** | 16.9.1 (a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. | na | na | na | Tidak ada data |
| | 16.9.1 (b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. | 88,16 | 88,16 | na | Tercapai |
| **16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.** | 16.10.1 (10) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan. | na | na | 80,7 | Tidak ada data |
| | 16.10.2 Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi. | na | na | 1 | |
| | 16.10.2 (a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | 0 | 0 | na | Belum tercapai |
| | 16.10.2 (b) Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi non litigasi. | 0 | 0 | na | Belum tercapai |
| | 16.10.2 (c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | 0 | 0 | na | Belum tercapai |
| **16.a Memperkuat lembaga- lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui** | 16.a.1 Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles. | na | na | 1 | Tidak ada data |

| TARGET TPB | INDIKATOR PROVINSI | CAPAIAN | | CAPAIAN NASIONAL | STATUS CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| **kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan** | | | | | |

## 2.6. Kinerja BUMD di Sumatera Selatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki sejumlah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di beberapa bidang usaha antara lain bidang pertambangan dan energi, perhotelan, perdagangan, perbankan, olahraga, asuransi dan air minum. Hingga tahun 2017 Pemerintah Sumatera Selatan telah memilki 15 Badan Usaha Milik Daerah, 4 BUMD dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah dan 11 BUMD dalam bentuk Perseroan Daerah. Profil Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.278.**
Profil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Selatan

| No | Nama BUMD | Dasar Pendirian | Bidang Usaha |
|---|---|---|---|
| 1 | PD Pertambangan dan Energi (PDPDE) | 1. Perda No. 7 tahun 2000<br>2. Perda No. 37 tahun 2001<br>3. Perda No. 12 tahun 2017<br>4. Perda No. 5 tahun 2018 | Energi, kelistrikan, perdagangan minyak gas bumi dan mineral batubara, infrastruktur seperti pipa gas, energi baru terbarukan, utilities sepeti penyediaan jaringan telekomunikasi |
| 2 | PD. Perhotelan Swarna Dwipa | 1. Perda No. 10 tahun 2015<br>2. Perda No. 19 tahun 2017 | Jasa perhotelan, catering, event organizer |
| 3 | PD Prodexim | 1. Perda No. 1 tahun 1965<br>2. Perda No. 10 tahun 1990<br>3. Perda No. 1 tahun 2000<br>4. Perda No. 14 tahun 2000 | Properti dan developer, perdagangan umum dan jasa, kontraktor konstruksi, angkutan darat, pelayaran, pertanian, perkebunan, kehutanan, mekanikal dan elektrikal, kelautan dan perikanan |
| 4 | PT. Bank Sumsel Babel | 1. Perda no. 6 tahun 2000<br>2. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-56914.AH.01.02 tahun 2009 | Jasa Perbankan |
| 5 | PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel | 1. Perda No. 5 tahun 2016<br>2. Perda No. 13 tahun 2016<br>3. Perda No. 11 tahun 2017 | Pengembangan Kawasan (Pembangunan, perdagangan, jasa, industry) |
| 6 | PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumsel | SK Mentri Hukum dan HAM AHU-0058133.AH.01.09 tahun 2011 | Jasa Perbankan |
| 7 | PT. Jakabaring Sport City | Perda No. 8 tahun 2017 | Jasa, Sewa |

| No | Nama BUMD | Dasar Pendirian | Bidang Usaha |
|---|---|---|---|
| 8 | PT. Swarna Dwipa Selaras Adiguna (Anak Perusahaan PT. Selaras Adigunatama kerjasama dengan Pemprov. Sumatera Selatan) | 1. Akte Pendirian No. 9 tahun 2003<br>2. SK Menteri Hukum dan HAM No. c-20801 HT.01.01 tahun 2003<br>3. SK Walikota Palembang No. 060617002672 | Penyediaan komoditi sayur mayur dan informasi lapak |
| 9 | PT. Penjaminan Kredit Daerah Prov. Sumsel (JAMKRIDA) | Akte Notaris No. 2 tanggal 1 oktober 2012 mengalami perubahan anggaran dasar Akte Pendiri No. 7 tanggal 15 januari 2013 | Lembaga Penjaminan Kredit |
| 10 | PT. Adhya Tirta Sriwijaya | Pergub No. 3/KPTS/IV/2013 (kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Pajak Air Bawah Tanah) | Penyediaan air bersih |
| 11 | PT. Syailendra Investasi Gemilang I | Perda No. 6 tahun 2016 | Pengelolaan Partisipasi Intrest Bidang Pertambangan |
| 12 | PT. Syailendra Investasi Gemilang II | Perda No. 6 tahun 2016 | Pengelolaan Partisipasi Intrest Bidang Pertambangan |
| 13 | PT. Syailendra Investasi Gemilang III | Perda No. 6 tahun 2016 | Pengelolaan Partisipasi Interest Bidang Pertambangan |
| 14 | PT. Industri Grafika Meru (proses likuidasi) | 1. Perda No. 6 tahun 1982<br>2. Perda No. 10 tahun 2012 tentang pencabutan Perda No. 6 tahun 1982 | Percetakan |

*Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan*

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 5 Badan Usaha Milik Daerah yang baru beroperasional pada tahun 2017 yaitu PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel yang didirikan untuk mendukung KEK Tanjung Api-Api, kemudian PT. Jakabaring Sport City yang didirikan untuk mengoperasionalkan kawasan olah raga terpadu Jakabaring Sport City. Selain itu juga pada tahun 2017 didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Pengelolaan Partisipasi Interest Bidang Pertambangan antara lain di sector Hulu Minyak dan Gas Bumi. Selain itu ada satu BUMD yang sedang proses di likuidasi yaitu PT. Industri Grafika Meru yang bergerak di bidang percetakan.

Dari sisi rencana penyertaan modal dari sekitar target modal dasar perusahaan sebesar Rp. 15.699.540.000.000,- pada 12 BUMD yang sudah berdiri saat ini (tidak termasuk PT. Adhya Tirta Sriwijaya dan PT. Industri Garfika Meru). Jumlah penyertaan modal yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp. 6.605.542.266.368,- dengan total asset yang telah terdata hingga tahun 2017 adalah sebesar Rp. 28.666.045.219.734,-

**Tabel 2.279.**
Rincian Penyertaan Modal dan Aset BUMD
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

| No | Nama BUMD | Modal Dasar (Rp) | Penyertaan Modal Prov. Sumsel (Rp) | Total Aset Tahun 2017 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PD Pertambangan dan Energi (PDPDE) | 120.000.000.000 | 111.217.095.738 | 153.382.288.030 |
| 2 | PD. Perhotelan Swarna Dwipa | 1.000.000.000.000 | 271.200.784.486 | 273.686.835.652 |
| 3 | PD Prodexim | 25.000.000.000 | 23.571.538.281 | Belum melaporkan |
| 4 | PT. Bank Sumsel Babel | - | 251.939.000.000 | 22.145410.143.202 |
| 5 | PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel | 1.194.250.000.000 | 46.307.462.863 | 46.307.462.863 |
| 6 | PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumsel | 250.000.000.000 | 98.000.000.000 | 212.868.927.582 |
| 7 | PT. Jakabaring Sport City | 10.000.000.000.000 | 5.738.498.385.000 (berupa aset) | 5.738.498.385.000 |
| 8 | PT. Swarna Dwipa Selaras Adiguna | 10.290.000.000 | 2.058.000.000 | 24.294.510.721 |
| 9 | PT. Penjaminan Kredit Daerah Prov. Sumsel (JAMKRIDA) | 100.000.000.000 | 62.750.000.000 | 71.596.666.684 |
| 10 | PT. Syailendra Investasi Gemilang I | 1.000.000.000 | na | na |
| 11 | PT. Syailendra Investasi Gemilang II | 1.000.000.000 | na | na |
| 12 | PT. Syailendra Investasi Gemilang III | 1.000.000.000 | na | na |
| Jumlah | | 15.699.540.000.000 | 6.605.542.266.368 | 28.666.045.219.734 |

*Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan*

Kinerja Badan Usaha Milik Daerah terhadap kontribusinya kepada Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan didapatkan bahwa dari 8 BUMD yang diberikan target menyumbang Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 2015-2017 secara komulatif hanya dua Badan Usaha Milik Daerah yang melebihi dari target yang diberikan yaitu : PD. Swarna Dwipa dan PT. Swarna Dwipa Selaras Adiguna.

**Tabel 2.280.**
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

| No | Nama Perusahaan | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | PD Swarna Dwipa | 900.000.000 | 1.053.264.317 | 250.000.000 | 750.000.000 | 1.261.325.000 | 1.125.000.000. |
| 2 | PD. Prodexim | 50.000.000 | na | na | na | 60.500.000 | na |
| 3 | PD. Pertambangan dan Energi (PDPDE) | 12.500.000.000 | 10.706.194.000 | 3.062.226.825 | 7.593.349.417 | 10.822.849.200 | 5.262.432.727 |
| 4 | PT. Bank Sumsel Babel | 125.137.656.883 | 39.776.172.397 | 44.718.759.181 | 44.718.759.181 | 53.398.947.083 | 41.883.826.707 |
| 5 | PT. Jamkrida | na | na | na | na | 500.000.000 | 293.232.505 |
| 6 | PT. Bukit Asam | 57.435.694.308 | 6.918.206.550 | 6.175.594.950 | 6.175.594.950 | 8.371.033.555 | 6.085.432.500 |
| 7 | PT. Asuransi Bangun Askrida | 225.000.000 | 279.597.815 | na | 316.999.182 | 333.050.612 | 331.849.913 |
| 8 | PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumsel | 852.813.831 | 422.469.508 | 2.174.132.274 | 2.174.132.274 | 2.764.800.000 | na |
| 9 | PT. Aditya Tirta Sriwijaya | 287.500.000 | 388.000.000 | 268.000.000 | 388.000.000 | 455.000.000 | na |
| 10 | PT. Swarna Dwipa Selaras Adiguna | 308.500.000 | 1.317.120.000 | na | 720.300.000 | 1.593.715.200 | 720.300.000 |

*Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan*

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari sisi besaran bagi hasil yang diberikan PT. Bank Sumsel Babel menyumbang tertinggi diikuti oleh PD. Pertambangan dan Energi (PDPDE).

**a. Kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal percepatan pembangunan di Sumatera Selatan juga melakukan beberapa kerjasama di beberapa sektor baik kerjasama antar pemerintah maupun kerjasama dengan badan usaha. Kerjasama yang telah berlangsung tersebut antara lain di sektor pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, transportasi, teknologi informasi serta pengembangan kawasan bisnis dan perdagangan.

**Tabel 2.281.**
Daftar Kerjasama yang Telah Dilaksanakan
Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

| No | Bentuk Kerjasama | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Kerjasama Sumatera Selatan sebagai Cambridge Center (kerjasama sektor Pendidikan) | Perjanjian Kerjasama dengan University of Cambridge International Examination (CIE) Inggris No. ID236120111 Tanggal 12 Januari 2011 |
| 2 | Kerjasama dibidang teknologi kereta api, Ilmu Teknologi Informasi dan pertanian hingga tahun 2020 | Kerjasama dengan beberapa Lembaga/ Universitas di China yaitu : Jiangsu Institute of Commerce ; Nanjing Institute Railway of Technology ; Nanjing College of Chemical of Technology ; Nanjing University of Information Science and Technology ; Jiangsu Agri-animal Husbandry ; Wuxi |
| 3 | Kerjasama ini dibidang Ilmu pengembangan pariwisata | Nippon Language Academy (sejak 2015) |
| 4 | Pengembangan Kursus Bersama dan Program Pendidikan berdasarkan Teknologi Informasi ; Pertukaran siswa, guru, dan staf lainnya ; Kerjasama dengan bidang penelitian ; Pendidikan dan Pelatihan secara online ; Konferensi seminar Internasional, symposium dan lokakarya | Kerjasama : High School CIFA JEAN LAMELOSE, FRENCH And South Sumatera Province – Indonesia, March, 13th, 2017 |
| 5 | Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Pengembangan Kawasan Central Bussiness District (CBD), Kawasan Perkantoran, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Pusat Kegiatan Pariwisata serta Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi-Vertikal di Kawasan Pasar Cinde Palembang | Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam skema Bangun Guna Serah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Aldiron Hero Group |
| 6 | Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Pembangunan Pusat Retail, Hotel dan Pusat Parkir di Kawasan Ex. Rumah SakitErnaldi Bahar di samping Rumah Sakit Provinsi Siti Fatimah | Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam skema Bangun Guna Serah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Praja Adikara Utama |

| No | Bentuk Kerjasama | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Kerjasama Pembangunan Bidang Climate Change yang meliputi : Pengembangan Ekonomi Hijau, Pembangunan Rendah Karbon, Spatial Planning dan Pembangunan Berbasis Lanskap, Restorasi Gambut | Kerjasama antara Pemerintah RI – Pemerintah Sumatera Selatan – Negara Donor |
| 8 | Kerjasama Capacity Building Penyiapan dan Transaksi Proyek dalam Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) | Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT.PII) |

*Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan*

Selain dari kerjasama di atas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga sedang menyiapkan beberapa skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk rencana pembangunan jalan kereta api, Lembaga Pendidikan, Rumah Sakit dan Pengembangan Kawasan Ekowisata.

Untuk Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.282.**
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1 | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | |
| 1.1 | **Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi** | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pertumbuhan PDRB (%) | 5,40 | 4,79 | 4,42 | 5,04 | 5,51 | 6,04 | 5,80 | Melampaui (>), capaian tahun 2018 sebesar 6,04 persen, lebih besar dari target RPJMD sebesar 5,80% |
| 1.1.2 | Laju inflasi (%) | 7,04 | 8,48 | 3,10 | 3,58 | 2,96 | 2,74 | 4 | Melampaui (>), capaian tahun 2018 sebesar 2,74%, lebih kecil dari target RPJMD sebesar 4% |
| 1.1.3 | PDRB ADHB per kapita (Juta) | 37,47 | 40,33 | 43,01 | 43,29 | 46,22 | 50,02 | 51,88 | Belum Tercapai (<) dibandingkan target di RPJMD. |
| 1.1.4 | PDRB ADHK per kapita (Juta) | 31,03 | 32,02 | 32,93 | 34,09 | 35,45 | 35,58 | 35,33 | Melampaui (>) dibandingkan target di RPJMD. |
| 1.1.5 | PDRB ADHB (Triliun Rupiah) | 280,4 | 306,4 | 331,8 | 354,6 | 383,8 | 419,72 | 392,99 | Melampaui (>), capaian tahun 2018 sebesar 419,72 T, lebih besar dari target RPJMD sebesar 392,99 T |
| 1.1.6 | PDRB ADHK (Triliun Rupiah) | 232,2 | 243,3 | 254,0 | 266,9 | 281,5 | 298,57 | 297,54 | Melampaui (>), capaian tahun 2018 sebesar 298,57 T, lebih besar dari target RPJMD sebesar 297,54 T |
| 1.1.7 | Indeks Gini (%) | 0,373 | 0,380 | 0,334 | 0,362 | 0,381 | 0,341 | 0,350 | Melampaui (>), capaian tahun 2018 sebesar 0,341, lebih kecil dari target RPJMD sebesar 0,350 |
| 1.1.8 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 66,16 | 66,75 | 67,46 | 68,24 | 68,86 | na | 68,50 | Melampaui (>), capaian Tahun 2017 sebesar 68,46 persen sedangkan Target RPJMD sebesar 68,50 persen |
| **1.2** | **Fokus Kesejahteraan Sosial** | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Angka melek huruf | 97,50 | 98,14 | 98,22 | 98,46 | 98,54 | 98,66 | 95,66 | Melampaui (>), angka melek huruf tahun 2018 sebesar 98,66 telah melampaui capaian nasional 95,66 tetapi belum mencapai target RPJMD 100 |
| 1.2.2 | Angka rata-rata lama sekolah | 7,53 | 7,66 | 7,77 | 7,83 | 7,99 | na | 8,10 | Belum tercapai (<), capaian Tahun 2017 sebesar 7,61 persen sedangkan Capaian Nasional sebesar 8,10 persen |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1.2.3 | Angka Usia Harapan Hidup | 68,84 | 68,93 | 69,14 | 69,16 | 69,18 | na | 71,06 | Belum tercapai (<), capaian Tahun 2017 sebesar 69,18 persen sedangkan Capaian Nasional sebesar 71,06 persen |
| 1.2.4 | Persentase Balita Gizi Buruk | 0,02 | 0,02 | 0,018 | 1,9 | 0,032 | 0,037 | 1,00 | Melampaui (>), capaian Tahun 2018 sebesar 0,037 persen dari target RPJMD Tahun 2018 sebesar 1,00 persen |
| 1.2.5 | Persentase Balita Gizi Kurang | 5,90 | 18.6 | 12,80 | 9,30 | 10,20 | na | 11,30 | Belum tercapai (<), capaian Tahun 2017 sebesar 10,20 persen sedangkan Capaian Nasional sebesar 11,30 persen |
| 1.2.6 | Jumlah Penduduk yang bekerja | 3.464.620 | 3.692.806 | 3.695.866 | 3.998.625 | 3.942.539 | 3.963.900 | 3.677.221 | Melampaui (>) |
| 1.2.7 | Rasio Penduduk yang bekerja | 95,00 | 95,04 | 93,93 | 95,69 | 95,61 | na | 100 | Belum tercapai (<) |
| 1.2.8 | Rasio Kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas | 64,27% | 65,43% | 64,90% | 68.69% | 66.62% | na | na | Tidak ada standar/pembanding |
| 1.2.9 | Proposi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja | 27,24% | 25,75% | 21,60% | 22,42% | 25,52% | na | na | Tidak ada standar/pembanding |
| **2** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | |
| **2.1** | **Fokus Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib** | | | | | | | | |
| **2.1.1** | **Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan pelayanan dasar** | | | | | | | | |
| **2.1.1.1** | **Pendidikan** | | | | | | | | |
| **2.1.1.1.1** | **Pendidikan dasar** | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.1 | APK PAUD | 53,85 | 56,91 | 59,26 | 61,99 | 64,82 | 67,77 | 74,28 | Belum Tercapai (<), APK PAUD pada tahun 2018 sebesar 67,77 dan masih dibawah angka nasional 74,28 |
| 2.1.1.1.1.2 | APK SD | 110,74 | 111,19 | 104,9 | 114,33 | 112,14 | 114,14 | 108,61 | Melampaui (>), APK SD/MI/Sederajat tahun 2018 sebesar 114,14 dan diatas angka nasional 108,61 dan melebihi target RPJMD sebesar 113,00 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 2.1.1.1.3 | APM SD | 95,12 | 96,13 | 96,41 | 96,59 | 97,16 | 97,85 | 97,58 | Melampaui (>), APM SD/MI/Sederajat tahun 2018 sebesar 97,85 telah t melampaui capaian nasional 97,58 dan mencapai target RPJMD 93 |
| 2.1.1.1.4 | APK SMP | 86,07 | 88,43 | 93,56 | 88,54 | 89,09 | 86,51 | 91,52 | Belum Tercapai (<), APK SMP/MTs/Sederajat tahun 2018 sebesar 86,51 masih dibawah angka nasional 91,52 dan belum mencapai target RPJMD sebesar 100 |
| 2.1.1.1.5 | APM SMP | 72,06 | 75,87 | 76,18 | 76,43 | 76,89 | 76,91 | 78,84 | Belum Tercapai (<), APM SMP/MTs/Sederajat tahun 2018 sebesar 76,91 masih di bawah capaian nasional 78,84 tetapi telah mencapai target RPJMD 76,00 |
| 2.1.1.1.6 | Angka Putus Sekolah SD | 1,57 | 0,38 | 0,432 | 0,99 | 0,24 | 0,40 | 0,51 | Melampaui (>), Angka putus sekolah SD tahun 2018 sebesar 0,40 telah melampaui capaian nasional sebesar 0,51 tetapi belum mencapai target RPJMD sebesar 0,2 |
| 2.1.1.1.7 | Angka Putus Sekolah SMP | 1,53 | 0,78 | 0,48 | 5,03 | 1,96 | 0,75 | 1,67 | Melampaui (>), Angka putus sekolah SMP tahun 2018 sebesar 0,75 telah melampaui capaian nasional sebesar 1,67 dan telah mencapai target RPJMD sebesar 5,50 |
| 2.1.1.1.8 | Angka Kelulusan SD | 99,54 | 99,68 | 99,76 | 99,90 | 99,83 | 99,47 | 99,90 | Belum Tercapai (<), Angka kelulusan SD tahun 2018 sebesar 99,47 belum mencapai target RPJMD sebesar 99,90 |
| 2.1.1.1.9 | Angka Kelulusan SMP | 98,83 | 97,85 | 95,39 | 98,81 | 99,39 | 98,96 | 99,90 | Belum Tercapai (<), Angka kelulusan SMP tahun 2018 sebesar 98,96 belum mencapai target RPJMD 99,90 |
| **2.1.1.1.2** | **Pendidikan menengah** | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.2.1 | APK SMA/K | 63,78 | 72,51 | 73,18 | 82,51 | 83,44 | 77,40 | 80,68 | Belum Tercapai (<), APK SMA/SMK/MA/Sederajat tahun 2018 sebesar 77,40 masih dibawah capaian nasional 80,68 dan belum mencapai target RPJMD sebesar 80,00 |
| 2.1.1.1.2.2 | APM SMA/K | 51,67 | 57,92 | 58,27 | 58,59 | 59,06 | 59,87 | 60,67 | Belum Tercapai (<), APM SMA/SMK/MA/Sederajat tahun 2018 sebesar 59,87 masih dibawah capaian nasional sebesar 60,67 dan belum mencapai target RPJMD 65,00 |
| 2.1.1.1.2.3 | Angka Putus Sekolah SMA/K | 0,56 | 1,02 | 0,678 | 6,85 | 2,85 | 1,89 | 2,94 | Melampaui (>), Angka putus sekolah SMA/SMK tahun 2018 sebesar 1,89 telah melampaui capaian nasional sebesar 2,94 dan telah mencapai target RPJMD sebesar 5 |
| 2.1.1.1.2.4 | Angka Kelulusan SMA/K | 99,93 | 99,62 | 99,36 | 97,22 | 98,30 | 98,56 | 99,90 | Belum Tercapai (<), Angka kelulusan SMA/SMK tahun 2018 sebesar 98,56 belum mencapai target RPJMD sebesar 99,90 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 2.1.1.1.2.5 | APK Perguruan Tinggi | 22,98 | 23,84 | 18,60 | 21,64 | 20,20 | 21,65 | 30 | Belum tercapai (<), APK PT tahun 2018 sebesar 21,65 dan belum mencapai target RPJMD sebesar 30,00 dan nasional 25,12 |
| 2.1.1.1.2.6 | Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif | 17 | 17 | 1 | 10 | 10 | 92 | 10 | Melampaui (>), jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi tahun 2018 sebanyak 101 sekolah dan mencapai target RPJMD sebesar 10 sekolah |
| 2.1.1.1.2.7 | Jumlah SMP/SMA satu atap | 0 | 17 | 17 | 34 | 1 | na | 102 | Belum Tercapai (<), jumlah SMP/SMA satu atap tahun 2018 sebanyak 0 sekolah dan belum mencapai target RPJMD sebanyak 102 sekolah |
| 2.1.1.1.2.8 | SMA yang memiliki Laboratorium dan Bengkel Keterampilan | 20 | 25 | 38 | 29 | 37 | na | 35 | Belum Tercapai (<), SMA yang memiliki laboratorium dan bengkel keterampilan tahun 2018 sebanyak 0dan telah mencapai target RPJMD sebanyak 35 |
| **2.1.1.1.3** | **Angka Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan penduduk usia ≥ 15 tahun** | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.3.1 | Tidak/belum pernah sekolah | Na | Na | 2.06 | 1.26 | 1.08 | Na | 4,62 | Melampaui (>), untuk angka pendidikan tertinggi yang tidak/belum pernah sekolah tahun 2017 yaitu 1,08 lebih kecil dibanding nasional 4,62 |
| 2.1.1.1.3.2 | tidak/belum tamat SD | na | na | 14.87 | 14.44 | 17.17 | Na | 12,39 | Belum Tercapai (<), untuk angka pendidikan tertinggi yang tidak/belum tamat SD tahun 2017 yaitu 17,17 masih tinggi jika dibandingkan dengan nasional 12,39 |
| 2.1.1.1.3.3 | SD/sederajat | na | na | 29.01 | 26.87 | 25.36 | na | 28,03 | Belum Tercapai (<), untuk angka pendidikan tertinggi yang tamat SD/sederajat tahun 2017 yaitu 25,36 masih dibawah nasional 28,03 |
| 2.1.1.1.3.4 | SMP/sederajat | na | na | 22 | 22.64 | 21.43 | na | 21,71 | Belum Tercapai (<), untuk angka pendidikan tertinggi yang tamat SMP/sederajat tahun 2017 yaitu 21,43 masih dibawah nasional 21,71 |
| 2.1.1.1.3.5 | SMA/SMK/sederajat | na | na | 25 | 25.71 | 25.72 | na | 25,10 | Melampaui (>), untuk angka pendidikan tertinggi yang tamat SMA/SMK/sederajat tahun 2017 yaitu 25,72 telah melampaui angka nasional 25,10 |
| 2.1.1.1.3.6 | Perguruan tinggi | na | na | 7.06 | 9.08 | 9.24 | na | 8,15 | Melampaui (>), untuk angka pendidikan tertinggi yang tamat perguruan tinggi tahun 2017 yaitu 9,24 dan telah melampaui angka nasional 8,15 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| **2.1.1.1.4** | **Angka Partisipasi Sekolah** | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.4.1 | SD/MI/sederajat | 98.52 | 99.47 | 99.53 | 99.61 | 99.63 | 99,71 | 99,22 | Melampaui (>), APS SD/MI/sederajat tahun 2018 sebesar 99,71 telah melampaui capaian nasional sebesar 99,22 |
| 2.1.1.1.4.2 | SMP/MTs/sederajat | 89.17 | 93.36 | 93.52 | 93.68 | 94.01 | 94,41 | 95,36 | Belum Tercapai (<), APS SMP/MTs/sederajat tahun 2018 sebesar 94,41 masih dibawah angka nasional 95,36 |
| 2.1.1.1.4.3 | SMA/SMK/MA/sederajat | 60.08 | 67.84 | 68.4 | 68.67 | 69.05 | 69,65 | 71,99 | Belum Tercapai (<), APS SMA/SMK/MA/sederajat tahun 2018 sebesar 69,65 masih dibawah angka nasional 71,99 |
| 2.1.1.1.4.4 | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | 68.17 | 80.19 | 78.1 | 79.56 | 79.73 | 82,38 | 81,50 | Melampaui (>),Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2018 sebesar 82,38 diatas capaian nasional 81,50 |
| 2.1.1.1.4.5 | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | 100.49 | 96.7 | 95.57 | 96.5 | 99.14 | 100,08 | 103,15 | Belum tercapai (<) masih dibawah capaian Nasional |
| **2.1.1.1.5** | **Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah** | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.5.1 | SD/MI | 45,01 | 43,55 | 49,64 | 50,62 | 50,87 | na | na | Tidak ada angka standar nasional |
| 2.1.1.1.5.2 | SMP/MTs | 26,12 | 28,00 | 37,59 | 38,02 | 39,23 | na | na | Tidak ada angka standar nasional |
| **2.1.1.1.6** | **Rasio guru/murid** | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.6.1 | SD/MI | 16,08 | 16,63 | 15,22 | 15,58 | 16,74 | na | 20:1 | Belum Tercapai (<), rasio guru dan murid SD/MI tahun 2017 yaitu 16,74 dan masih dibawah nasional 16,15 tetapi telah memenuhi standar ideal yaitu 20:1 (berdasarkan PP 74/2008) |
| 2.1.1.1.6.2 | SMP/MTs | 17,06 | 16,23 | 11,12 | 13,28 | 13,45 | na | 20:1 | Melampaui (>), rasio guru dan murid SMP/MTs tahun 2017 yaitu 13,45; telah melampaui rasio nasional 16,29 dan memenuhi standar ideal yaitu 20:1 (berdasarkan PP 74/2008) |
| 2.1.1.1.6.3 | SMA/MA | 10,51 | 10,82 | 9,25 | 12,74 | 12,98 | na | 20:1 | Melampaui (>), rasio guru dan murid SMA/MA tahun 2017 yaitu 12,98; telah melampaui rasio nasional 15,80 dan memenuhi standar ideal yaitu 20:1 (berdasarkan PP 74/2008) |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 2.1.1.1.6.4 | SMK | 13,96 | 12,22 | na | 14,29 | 15,09 | na | 15:1 | Melampaui (>), rasio guru dan murid SMK tahun 2017 yaitu 15,09; telah melampaui rasio nasional 16,96 dan sesuai dengan standar ideal yaitu 15:1 (berdasarkan PP 74/2008) |
| **2.1.1.2** | **Kesehatan** | | | | | | | | |
| 2.1.1.2.1 | Angka Kematian Ibu | 146 | 155 | 165 | 140 | 107 | 120 | 134 | melampaui (>), realisasi Tahun 2018 sebesar 120 dari target RPJMD 2018 sebesar 134 |
| 2.1.1.2.2 | Angka Kematian Bayi | 123 | 114 | 775 | 643 | 637 | 497 | na | melampaui (>) |
| 2.1.1.2.3 | Rasio Puskesmas Per 30.000 Penduduk | 24,541 | 25,952 | 24,036 | 24,507 | 24,243 | na | 30,000 | Melampaui (>), realisasi Tahun 2017 sebesar 24.243 dari target RPJMD 2017 sebesar 30.000 |
| 2.1.1.2.4 | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | 92,94 | 91,72 | 92,8 | 87,15 | 93,11 | na | 99 | Belum tercapai (>), realisasi 2017 sebesar 93,11 masih dibawah target RPJMD 2017 sebesar 99 |
| 2.1.1.2.5 | Jumlah Kasus HIV | 106 | 89 | 71 | 63 | 157 | 189 | na | Tidak bisa dibandingkan dengan angka Nasional. Dalam RPJMD Tahun 2013-2018 tidak tersedia target. |
| 2.1.1.2.6 | Jumlah Kasus AIDS | 150 | 156 | 179 | 215 | 189 | 246 | na | Tidak bisa dibandingkan dengan angka Nasional Dalam RPJMD Tahun 2013-2018 tidak tersedia target. |
| 2.1.1.2.7 | Jumlah Kasus DBD | 1.450 | 1.536 | 3.232 | 3.792 | 1.438 | 2.396 | na | Tidak bisa dibandingkan dengan angka Nasional Dalam RPJMD Tahun 2013-2018 tidak tersedia target. |
| 2.1.1.2.8 | Persentase PUS Perserta KB | 62 | 74,67 | 57 | 72,2 | 69,2 | 60,7 | 70 | realisasi 2018 telah melampaui yakni 60,7 persen dari target RPJMD 2018 sebesar 70 persen |
| 2.1.1.2.9 | Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi | na | 10,2 | 9,5 | 11,8 | 10,6 | na | 11,0 | realisasi 2017 telah melampaui yakni 10,6 persen dari target RPJMD 2017 sebesar 11,0 |
| 2.1.1.2.10 | Total Fertility Rate (TFR) | na | 3,2 | 3,2 | 2,37 | 2,6 | na | 2,48 | realisasi 2017 belum mencapai yaitu 2,6 masih dibawah target RPJMD 2017 sebesar 2,48 |
| 2.1.1.2.11 | Jumlah orang umur >15 tahun yang melakukan KTS (konseling dan testing sukarela) | na | 17.253 | 18.253 | 12.389 | 36.044 | na | 13.000 | realisasi 2017 telah melampaui yaitu 36.044 dari target RPJMD 2017 sebesar 13.000 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 2.1.1.2.12 | Angka Kesembuhan Penderita TB Paru (BTA +) | na | 85,35 | 86,27 | 75,91 | 94,34 | 89 | 95 | Belum tercapai (<),realisasi 2018 yaitu 89 dari target RPJMD 2018 sebesar 95 |
| 2.1.1.2.13 | Angka Kesakitan Penyakit DBD Per 100.000 penduduk | na | 15 | 42.6 | 65 | 18 | 29 | 47 | Belum tercapai (<),realisasi 2018 yaitu 29 dari target RPJMD 2018 sebesar 47 |
| 2.1.1.2.14 | Annual Parasit Insidence (API) | na | 0,36 | 0,26 | 0,28 | 0,1 | 0,07 | 0,50 | Melampaui (>),realisasi 2018 yaitu 0,07 dari target RPJMD 2018 sebesar 0,50 |
| 2.1.1.2.15 | Persentase Rumah Sehat | na | 72,94 | 72,94 | 72,97 | 82,72 | 73,51 | 75,00 | Belum tercapai (<),realisasi 2018 yaitu 73,51 dari target RPJMD 2018 sebesar 75,00 |
| 2.1.1.2.16 | Persentase Keluarga yang Memiliki Akses Air Bersih | na | 67,02 | 67,92 | 74,02 | 93,24 | na | 73,00 | realisasi 2017 telah melampaui yaitu 93,24 dari target RPJMD 2017 sebesar 73,00 |
| 2.1.1.2.17 | Jumlah Kasus Narkoba yang direhabilitasi | na | na | 601 | 210 | 167 | 126 | 200 | Belum tercapai (<) realisasi 2018 yaitu 126 dari target RPJMD sebesar 200 |
| 2.1.1.2.18 | Jumlah Kunjungan Penderita Narkoba Meningkat | na | na | 1,507 | 2,575 | 2,212 | 2,126 | 2.400 | Belum tercapai (<) realisasi 2018 yaitu 2126 dari target RPJMD sebesar 2.400 |
| 2.1.1.2.19 | Jumlah Kasus Gangguan Jiwa | na | na | na | na | 43.26 | 44,28 | 82,00 | Belum tercapai (<) realisasi 2018 yaitu 44,28 dari target RPJMD sebesar 82,00 |
| 2.1.1.2.20 | Jumlah Kunjungan Penderita Gangguan Jiwa | na | 37,080 | 42,629 | 41,232 | 38,332 | 35,246 | 48,332 | Belum tercapai (<) realisasi 2018 yaitu 35,246 dari target RPJMD sebesar 48,332 |
| 2.1.1.2.21 | Angka Kematian Ibu | 146 | 155 | 165 | 140 | 107 | 120 | 134 | melampaui (>), realisasi Tahun 2018 sebesar 120 dari target RPJMD 2018 sebesar 134 |
| **2.1.1.3** | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | |
| 2.1.1.3.1 | Persentase panjang jalan terbangun dan panjang jalan ditingkatkan/dilebarkan | 16.15 | 4.9 | 9.87 | 3.08 | 6.09 | 2,17 | 7.74% | belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.1.3.2 | Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (%) | 81.59 | 85.53 | 85.6 | 82.3 | 74.21 | 61,22 | 80 | belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD karena alokasi anggaran terbatas dan tingginya persentase jalan dengan permukaan tanah, kerikil dan batuan yang diperkeras. |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 2.1.1.3.3 | Menurunnya jumlah konflik pemanfaatan ruang | 0 | 100 | 86,67 | 100 | 75 | na | 20 konflik | belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD Karena masih terdapat regulasi-regulasi pemanfaatan ruang yang belum selesai, sehingga masih banyak terjadi konflik |
| 2.1.1.3.4 | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang | na | 60 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.1.3.5 | Panjang garis batas daerah yang disahkan | na | 2 | 0 | 0 | 22 | na | 63 segmen | belum tercapai (<)dibandingkan dengan target di RPJMD. Telah terselesaikan 2 segmen antar kabupaten/kota pada tahun 2014, 22 segmen antar provinsi pada tahun 2017, 8 segmen antar provinsi pada tahun 2018, 7 segmen antar kabupaten/kota sedang dalam proses penerbitan pernendagri, masih tersisa 21 segmen antar kab/kota yang belum terselesaikan dikarenakan masih dilaksanakan proses pengukuran/penetapan batas wilayah. |
| 2.1.1.3.6 | Jumlah peraturan daerah tentang penataan ruang | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 Perda | Sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.1.3.7 | Luas area pertanian yang diairi irigasi, sistem tata rawa dan jaringan pengairan lainnya | 1.7384 | 173.312 | 638.4 | 844.4 | 166.2 | na | 12.500 | melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.1.3.8 | Jumlah Kawasan Banjir yang ditangani | 100 | 100 | 116 | 240 | 260 | na | 5 | melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.1.3.9 | Jumlah kawasan bantaran Sungai yang ditangani | 100 | 75 | 125 | 120 | 160 | na | 5 | melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.1.3.10 | Jumlah kawasan yang memiliki sistem air baku | 100 | 100 | 200 | 400 | 200 | na | 1 | sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| **2.1.1.4** | **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.1 | Cakupan (%) Penanganan Drainase Permukiman | 100% | 66.67% | 200% | 100% | 100% | 100% | 3 kawasan | sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.1.4.2 | Cakupan (%) penanganan TPA Sampah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 2 kawasan | belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD. Kewenangan Kabupaten/Kota |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 2.1.1.4.3 | Jumlah kawasan kumuh yang tertangani | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 kawasan | Sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.1.4.4 | Jumlah kawasan layak huni yang tertangani | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 kawasan | melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.1.4.5 | Jumlah kawasan agropolitan yang tertangani | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 kawasan | belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD., karena anggaran defisit sehingga sektor angropolitan belum menjadi prioritas penanganan |
| 2.1.1.4.6 | Persentase Akses Pelayanan Sanitasi | 54% | 56.96% | 55.84% | 66.78% | 78.62% | 80,32% | 100.00% | belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD., karena: 1. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke dalam lubang, sungai, saluran irigasi, danau, laut, got dan selokan;<br>2. Terbatasnya ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS |
| 2.1.1.4.7 | Persentase Akses Pelayanan Air minum | 54% | 59.97% | 65.16% | 63.24% | 62.71% | 62,84% | 100.00% | belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD., karena: 1. Masih banyak rumah tangga yang memiliki akses ke sumber air minum utama yang berasal dari (1) sumur bor/pompa, mata air terlindung, yang jaraknya kurang dari 10 meter; (2) mata air tak terlindung, air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi);2. Masih terbatasnya rumah tangga yang menggunakan sumber air untuk minum, memasak, mandi dan cuci, berasal dari perpipahan atau hidran umum; |
| **2.1.1.5** | **Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | |
| 2.1.1.5.1 | Jumlah masyarakat Siaga Bencana | 150 | 180 | 200 | 250 | 250 | na | 50 | melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.1.5.2 | Jumlah Desa Tangguh | 1 | 2 | 2 | na | na | na | 2 | belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.1.5.3 | Jumlah kerjasama pencegahan dan penanggulangan bencana | na | na | 1 | 1 | 1 | na | 1 | melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.1.5.4 | Persentase penurunan titik kebakaran (hotspot) | na | na | 81.66 | 96.7 | 95.78 | na | 20 | melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.1.5.5 | Jumlah Kejadian Bencana | 150 | 186 | 146 | 195 | 164 | na | 0 | belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD. |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 2.1.1.5.6 | Persentase Sistem peringatan dini (early warning system) | na | na | na | na | na | 3 | 2 | belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.1.5.7 | Persentase kerugian akibat bencana | na | 100 | 90 | 80 | 70 | na | 70 | Belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| **2.1.1.6** | **Sosial** | | | | | | | | |
| 2.1.1.6.1 | Persentase PMKS yang mampu melaksanakan fungsi sosial melalui perlindungan dan jaminan sosial | 2,45% | 7,94% | 8,48% | 11,32% | 9,17% | na | 7.57% | melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.1.6.2 | Jumlah PMKS yang mampu melaksanakan fungsi sosial melalui perlindungan dan jaminan sosial | 42.722 org | 138.542 org | 137.139 Org | 218.223 org | 183.446 org | na | 170.000 Org | melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.1.6.3 | Jumlah Keluarga Miskin dan KAT yang mendapat bantuan | 2.509 KK | 6.532 KK | 4.342 KK | 3.385 KK | 1.159 KK | na | 1.115 KK | sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| **2.1.2** | **Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | |
| **2.1.2.1** | **Tenaga Kerja** | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1 | Jumlah pengangguran | 179,249 | 192,868 | 238,921 | 180,227 | 181,135 | 175,100 | 182,303 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.1.2 | Jumlah Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi | 60 | 243 | 191 | 171 | 17 | na | 140 | Belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.1.3 | Jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri secara legal | na | 1.958 | 1.410 | 1.580 | 2.103 | na | 2.040 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.1.4 | Upah/Gaji Pekerja Lajang terendah berdasarkan tingkat pendidikan | 1,630,000 | 1,826,000 | 1,974,000 | 2,206,000 | 2,388,000 | na | 2,634,152 | Belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD. |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | terendah, jabatan terendah serta masa kerja terendah | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.5 | Jumlah kasus hubungan industrial yang dilaporkan | na | 26 | 31 | 38 | 52 | na | 15 | Belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.1.6 | Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | na | 100% | 61.23% | 52.63% | 38.46% | na | 100% | Belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.1.7 | Jumlah pencari kerja yang ditempatkan | 25.754 | 10.972 | 9.530 | 5.436 | 4.927 | na | 26.552 | Belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.1.8 | Jumlah tenaga kerja yang dilindungi jaminan sosial | na | 233.528 | 717.901 | 715.159 | 2.160.092 | na | 329.075 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.1.9 | Angka pencari kerja yang dilatih di BLK/LLK yang telah ditempatkan | na | 1.190 | 9.530 | 2.504 | na | na | 2.000 | Tidak ada data capaian tahun 2017 |
| 2.1.2.1.10 | Jumlah sarana dan prasarana BLKI (unit) | na | na | 12 | 56 | na | na | 15 | Tidak ada data capaian tahun 2017 |
| 2.1.2.1.11 | Jumlah Penyelesaian Perselisahan Hubungan Industri | na | 25 | 26 | 230 | na | na | 162 | Tidak ada data capaian tahun 2017 |
| 2.1.2.1.12 | Jumlah pengangguran | 179.249 | 192.868 | 238.921 | 180.227 | 181.135 | 175.100 | 182.303 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| **2.1.2.2** | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | |
| 2.1.2.2.1 | Jumlah OPD Provinsi yang mengimplementasikan PPRG | 7 | 21 | 31 | 31 | 12 | 16 | 7 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD., capaian Tahun 2018 sebanyak 16 OPD sedangkan target RPJMD sebanyak 7 OPD |
| 2.1.2.2.2 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 91,25 | 91,64 | 92,22 | 92,08 | 92,43 | 92,62 | 71,48 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD, capaian Tahun 2018 sebesar 92,62 persen lebih tinggi dari target RPJMD sebesar 71,48 persen |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 2.1.2.2.3 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 66,78 | 70,41 | 70,20 | 70,36 | 70,69 | 73,53 | 70,12 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD, capaian Tahun 2018 sebesar 73,53 persen lebih tinggi dari target RPJMD sebesar 70,12 persen |
| 2.1.2.2.4 | Jumlah OPD Provinsi yang memiliki dan memanfaatkan Data Terpilih | 8 | 29 | 32 | 32 | 16 | 27 | 12 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD,capaian Tahun 2018 sebanyak 27 OPD sedangkan target RPJMD sebanyak 12 OPD |
| 2.1.2.2.5 | Jumlah kelompok usaha perempuan yang dibina | 299 | 310 | 310 | 470 | 478 | 532 | 335 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD, capaian Tahun 2018 sebanyak 532Kelompok lebih tinggi dari target RPJMD sebanyak 335 Kelompok |
| 2.1.2.2.6 | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani | 611 | 431 | 537 | 407 | 788 | 660 | 183 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD, capaian Tahun 2018 sebanyak 660 Kasus lebih tinggi dari target RPJMD sebanyak 183 Kasus |
| 2.1.2.2.7 | Jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak yang ditangani | 8 | 6 | 42 | 8 | 1 | 2 | 9 | Belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD, capaian Tahun 2018 sebanyak 2Kasus sedangkan target RPJMD sebanyak 9 Kasus |
| 2.1.2.2.8 | Jumlah kasus pelanggaran hak hak anak yang dilaporkan dan ditangani | 224 | 353 | 369 | 286 | 458 | 392 | 335 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD, capaian Tahun 2018 sebanyak 392 Kasus lebih tinggi dari target RPJMD sebanyak 335 Kasus |
| **2.1.2.3** | **Pangan** | | | | | | | | |
| 2.1.2.3.1 | Ketersediaan dan Cadangan Pangan ketersediaan energy perkilo kalori perkapita perhari minimal 2.400 kkal/kap/hari | na | 4.955 | 5.469 | 6.629 | 7.097 | 2.124,21 | 5.259 | Belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD, capaian Tahun 2018 sebesar 2.124,2 kkal/kap/hari sedangkan target RPJMD sebesar 5.259 kkal/kap/hari |
| 2.1.2.3.2 | ketersediaan protein pergram perkapita perhari minimal 63 gram/kap/hari | na | 137,99 | 163,24 | 203,00 | 180,77 | 62,15 | 125,00 | Belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD, capaian Tahun 2018 sebesar 62,15 gram/kap/hari sedangkan target RPJMD sebesar 125 gram/kap/hari |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 2.1.2.3.3 | Penurunan Rawan Pangan (%) | na | 0,13 | 0,10 | 0,05 | 0,33 | 0,17 | 1,00 | Belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD, capaian Tahun 2018 sebesar 0,17 % sedangkan target RPJMD sebesar 1% |
| 2.1.2.3.4 | Jenis pangan pokok Strategis yang didistribusikan ke masyarakat antar waktu dan antar wilayah (komoditi) | na | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | Belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD, capaian Tahun 2018 sebesar 11 komoditi sedangkan target RPJMD sebesar 13 komoditi |
| 2.1.2.3.5 | Pola Pangan Harapan (Skor) | na | 78,87 | 85,49 | 89,60 | 92,20 | 94,2 | 97,15 | Belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD, capaian Tahun 2018 sebesar 94,2 sedangkan target RPJMD sebesar 97,15 |
| 2.1.2.3.6 | Pangan segar yang aman dikonsumsi (Sampel) | na | 21 | 56 | 46 | 77 | 53 | 102 | Belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD, capaian Tahun 2018 sebesar 53 sedangkan target RPJMD sebesar 102 |
| **2.1.2.4** | **Lingkungan Hidup** | | | | | | | | |
| 2.1.2.4.1 | Laju Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks) | 58,53 | 61,62 | 57,04 | 66,34 | 62,04 | 67,34 | 59.48 | melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.4.2 | Jumlah penurunan laju peningkatan emisi GRK di 6 sektor (Ribu ton CO2eq) | 2.354.000 | 2.439.316 | 2.504.847 | 2.532.904 | 4.552.377 | 4.553.329 | 2.865.000 | melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.4.3 | Jumlah partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup | 20.000 | 21.124 | 21.370 | 42.000 | 30.724 | 21.500 | 22.000 | Belum tercapai (-)dibandingkan dengan target di RPJMD, karena jumlah sekolah yang ikut peserta adiwiyata berkurang |
| 2.1.2.4.4 | Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sesuai (=)dibandingkan dengan target di RPJMD. |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | hidup yang ditindaklanjuti | | | | | | | | |
| 2.1.2.4.5 | Peraturan daerah bidang Lingkungan Hidup yang diterbitkan | na | na | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | sesuai (=)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.4.6 | Laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi | Terakreditasi dengan teregistrasi lingkup air dan udara | Terakreditasi lingkup air Dan udara | Terakreditasi lingkup air Dan udara | Terakreditasi dengan teregistrasi lingkup air dan udara | Terakreditasi dengan teregistrasi lingkup air dan udara | Terakreditasi dengan teregistrasi lingkup air dan udara | Terakreditasi dengan teregistrasi | sesuai (=)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| **2.1.2.5** | **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | |
| 2.1.2.5.1 | Persentase aparatur pemdes yang tertib administrasi dan penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (Akte, KTP, Jamkesmas) | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | na | 80%-85% | sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD, realisasi tahun 2017 sebesar 85% sama dengan target tahun 2017 sebesar 80%-85% |
| | | | | | | | | | |
| **2.1.2.6** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | | | |
| 2.1.2.6.1 | Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | na | 75 orang | 100 orang | 120 orang | 150 orang | na | 150 orang | sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD, realisasi tahun 2017 sebesar 150 orang sama dengan target tahun 2017 sebesar 150 orang |
| 2.1.2.6.2 | Jumlah kelompok binaan PKK | na | 17 PKK | 17 PKK | 17 PKK | 17 PKK | na | 17 PKK | sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD, realisasi tahun 2017 sebesar 17 kelompok sama dengan target tahun 2017 sebesar 17 kelompok |
| 2.1.2.6.3 | Jumlah LPM Berprestasi | na | 6 LPM | 6 LPM | 6 LPM | 6 LPM | na | 6 LPM | sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD, realisasi tahun 2017 sebesar 6 LPM sama dengan target tahun 2017 sebesar 6 LPM |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 2.1.2.7.4 | Persentase PKK aktif | na | 5% | 5,5% | 6% | 6,5% | na | 6,5% | sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD, realisasi tahun 2017 sebesar 6,5% sama dengan target tahun 2017 sebesar 6,5% |
| 2.1.2.6.5 | Persentase Posyandu aktif | na | 5% | 5,5% | 6% | 6,5% | na | 6,5% | sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD, realisasi tahun 2017 sebesar 6,5% sama dengan target tahun 2017 sebesar 6,5% |
| 2.1.2.6.6 | Jumlah Organisasi dan Lembaga Desa yang Aktif | 14.230 | 14.414 | 14.638 | 14.910 | 15.236 | na | 15.236 | sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD, realisasi tahun 2017 sebesar 15236 sama dengan target tahun 2017 sebesar 15236 |
| 2.1.2.6.7 | Persentase masyarakat yang terlibat dalam organisasi dan lembaga masyarakat desa | 12 | 19 | 25 | 30 | 35 | na | 30-35 | sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD, realisasi tahun 2017 sebesar 35% sama dengan target tahun 2017 sebesar 30-35% |
| 2.1.2.6.8 | Persentase masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Desa | 12 | 19 | 25 | 30 | 35 | na | 30-35 | sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD, realisasi tahun 2017 sebesar 35% sama dengan target tahun 2017 sebesar 30-35% |
| 2.1.2.6.9 | Persentase Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes | 56 | 74 | 80 | 85 | 90 | na | 85-90 | sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD, realisasi tahun 2017 sebesar 90% sama dengan target tahun 2017 sebesar 85-90% |
| 2.1.2.6.10 | Persentase Aparatur Desa yang Profesional | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | na | 45-50 | sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD, realisasi tahun 2017 sebesar 50% sama dengan target tahun 2017 sebesar 45-50% |
| 2.1.2.6.11 | Jumlah SDM pemerintahan Desa yang profesional | na | 668 orang | 698 orang | 748 orang | 798 orang | na | 798 orang | sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD, realisasi tahun 2017 sebesar 798 orang sama dengan target tahun 2017 sebesar 798 orang |
| 2.1.2.6.12 | Jumlah kelompok tani/masyarakat yang menerapkan TTG | na | 6 Poktan/ Posmas | 6 Poktan/ Posmas | 6 Poktan/ Posmas | 6 Poktan/ Posmas | na | 6 Poktan/ Posmas | sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD, realisasi tahun 2017 sebesar 6 Poktan/posmas sama dengan target tahun 2017 sebesar 6 Poktan/posmas |
| **2.1.2.7** | **Perhubungan** | | | | | | | | |
| 2.1.2.7.1 | Prosentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas | 25% | 23% | 76% | 67% | 47% | 12% | 13% | melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD. |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 2.1.2.7.2 | Jumlah penumpang yang terlayani melalui angkutan sungai dan danau | na | 56.480 | 37.520 | 131.350 | 150.490 | na | 140,000 | melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.7.3 | Meningkatnya keterangkutan penumpang pesawat udara pada SMB II ataupun kawasan barat Sumsel dan tumbuhnya penerbangan perintis antar daerah | 2.734.504 | 3.339.158 | 3.437.390 | 3.511.650 | na | na | 3,180,000 | melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.7.4 | Prosentase menurunnya pelanggaran kelebihan muatan (over loading) | 45% | 37 % | 20% | 30% | 20% | na | 15% | melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.7.5 | Prosentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas perkotaan, khususnya kasus kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki dan unmotorized | 25% | 22,65% | 20% | 18% | 16% | 12% | 13% | melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.7.6 | Jumlah penumpang melalui Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api | 66.836 | 81.477 | 86.397 | 95038 | 114.680 | 194.729 | 90,000 | melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.7.7 | Jumlah Pengguna KA Perkotaan Palembang Metropolitan (Plg-Inderalaya) | na | 20.270 | 20.500 | 20.470 | 21.880 | na | 140,000 | belum tercapai (<)dibandingkan dengan target di RPJMD.: akses setasiun terlalu jauh |
| 2.1.2.7.8 | Jumlah penumpang angkutan laut (org) | 328.882 | 313.527 | 222.658 | 97.075 | 57.647 | 65.224 | 65.199 | melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 2.1.2.7.9 | Jumlah barang dengan angkutan laut (kg) | 7.675.624 | 8.721.447 | 7.551.101 | 10.061.507 | 2.657.521 | 3.222.926 | 2.158.237 | melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.7.10 | Jumlah barang dengan angkutan darat | 9.027.800 | 10.668.000 | 9.567.000 | 10.672.000 | 11.867.000 | na | 11.796.624 | melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.7.11 | Jumlah barang dengan angkutan kereta api (kg) | 15.859.859 | 17.837.287 | 19.423.376 | 18.730.661 | 20.603.727 | na | 17.102.304 | melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.7.12 | Jumlah barang dengan angkutan udara (ton) | 33.486.030 | 49.036.502 | 35.165.546 | 33.627.964 | 31.404.370 | 35.868.630 | 14.258.000 | melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.7.13 | Persentase kendaraan yang laik jalan | 36% | 42% | 80% | 80% | 81% | 82% | 65% | melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.7.14 | Jumlah bus pariwisata | 59 | 63 | 37 | 51 | 80 | 80 | 116 | belum tercapai (<)dibandingkan dengan target di RPJMD. : lokasi pariwisata sangat jauh |
| **2.1.2.8** | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | |
| 2.1.2.8.1 | Persentase penyebarluasan informasi melalui kerjasama dengan media | 50 | 60 | 60 | 65 | 70 | na | 70 | sesuai (=)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.8.2 | Persentase desa terlayani fasilitas teknologi, komunikasi dan informatika di wilayah Sumsel | na | na | na | na | 25 | na | 55 | belum tercapai (-) dibandingkan dengan target di RPJMD. dikarenakan ada effisiensi anggaran wifi area |
| 2.1.2.8.3 | Persentase pelayanan informasi *online* berbasis ICT yang dilaksanakan oleh Pemprov Sumsel | 50 | 60 | 60 | 70 | 89 | na | 89 | sesuai (=)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| | | | | | | | | | |
| **2.1.2.9** | **Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah** | | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 2.1.2.9.1 | Angka pertumbuhan modal koperasi (%) | na | 108,00 | 67,67 | 3,69 | 10,20 | 6,27 | 2 | Melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.9.2 | Persentase kenaikan nilai volume usaha koperasi (%) | na | 4,29% | 1% | 3,42% | 7,85% | 4,60% | 2% | Melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.9.3 | Persentase kenaikan omzet UMKM | na | 1% | 1,25% | 1,22% | 0.009% | 17,43% | 1% | Belum Tercapai (<)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.9.4 | Angka pertumbuhan UMKM | na | 1% | 2,4% | 1,50% | 0,040% | 0,25% | 1% | Belum Tercapai (<)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.9.5 | Angka pertumbuhan wirausaha baru | na | 181 | 319 | 698 | 1,258 | 1.721 | 1.500 | Sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.9.6 | Jumlah koperasi aktif | na | 4.336 | 4.450 | 4.495 | 4.699 | 4.754 | 4.667 | Belum Tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| **2.1.2.10** | **Penanaman Modal** | | | | | | | | |
| 2.1.2.10.1 | Persen Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN | na | 13,86 | 9,64 | 137,87 | -45,5 | -10,52 | 10 | Belum Tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.10.2 | Jumlah Investor | na | 125 | 183 | 144 | 260 | 333 | 176 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.10.3 | Nilai Realisasi Investasi PMDN (Triliun) | 3,39 | 7,04 | 10,94 | 8,53 | 9,76 | 7,46 | 11,11 | Belum Tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.10.4 | Nilai Realisasi Investasi PMA (Triliun) | 5,59 | 11,12 | 8,05 | 38,83 | 16,03 | 15,61 | 14,58 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.1.2.10.5 | Persen Perijinan dan Non Perijinan yang diterbitkan tepat waktu | na | 87,52% | 93,12% | 97,09% | 96,23% | 96,89% | 90% | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD., capaian tahun 2018 sebesar 96,89%, target RPJMD sebesar 90% |
| 2.1.2.10.6 | Jangka waktu perijinan dan non perijinan pada unit PTSP yang selesai sesuai dengan SOP | na | 7 hari | 7 hari | 6 hari | 6 hari | 5 hari | 5 hari | Sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| **2.1.2.11** | **Kepemudaan dan Olah Raga** | | | | | | | | |
| 2.1.2.11.1 | Jumlah pemuda yang difasilitasi | 2.009 | 2.311 | 4.577 | 6.693 | 519 | 422 | 4.756 | Belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD., capaian Tahun 2018 sebanyak 422 Orang sedangkan target RPJMD sebanyak 4756 Orang |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 2.1.2.11.2 | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi | 1 | 15 | 17 | 44 | 0 | Na | 19 | Belum tercapai (<), capaian Tahun 2017 sebanyak 0 OKP sedangkan target RPJMD sebanyak 19 OKP |
| 2.1.2.11.3 | Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan | na | na | na | 0 | 0 | Na | 2 | Belum tercapai (<), capaian Tahun 2017 sebanyak 0 Unit sedangkan target RPJMD sebanyak 2 Unit |
| 2.1.2.11.4 | Jumlah anggota Pramuka yang difasilitasi dalam kepanduan | 2.332 | 2.730 | 2.996 | 600 | 100 | Na | 500 | Belum tercapai (<), capaian Tahun 2017 sebanyak 100 Orang sedangkan target RPJMD sebanyak 500 Orang |
| 2.1.2.11.5 | Jumlah usaha-usaha Baru yang Dikelola oleh Pemuda | 60 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 600/50 | Belum tercapai (<), capaian Tahun 2018 sebanyak 40 Orang/Unit sedangkan target RPJMD sebanyak 600/50 Orang/Unit |
| 2.1.2.11.6 | Jumlah pemuda yang dapat difasilitasi meningkatkan pengetahuan terhadap bahaya narkoba, pornografi, pornoaksi, dan HIV/AIDs | na | 1.000 | 400 | 300 | 460 | 250 | 1000 | Belum tercapai (<), capaian Tahun 2018 sebanyak 250 Orang sedangkan target RPJMD sebanyak 1000 Orang |
| 2.1.2.11.7 | Jumlah tenaga keolahragaan yang bersertifikat | na | na | 0 | 90 | 50 | 550 | 100 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD, capaian Tahun 2018 sebanyak 550 Orang sedangkan target RPJMD sebanyak 100 Orang |
| 2.1.2.11.8 | Jumlah Produsen peralatan olahraga yang dapat difasilitasi | na | na | 50 | 0 | 0 | Na | 2/2 | Belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD, capaian Tahun 2017 sebanyak 0 Orang/Produsen sedangkan target RPJMD sebanyak 2/2 Orang/Produsen |
| 2.1.2.11.9 | Jumlah masyarakat yang ikut permassalan olahraga | 5.328 | 8.819 | 7.672 | 1.128 | 3.259 | 13.516 | 1.000 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD, capaian Tahun 2018 sebanyak 13.516 Orang lebih tinggi dari target RPJMD sebanyak 1.000 Kasus |
| 2.1.2.11.10 | Jumlah medali emas atlet PPLP | 15 | 18 | 27 | 44 | 29 | 22 | 30 | Belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD, capaian Tahun 2018 sebanyak 22 Mendali lebih tinggi dari target RPJMD sebanyak 30 Medali |
| 2.1.2.11.11 | Jumlah prestasi atlet pada PON | - | 94 | - | 21 | na | na | na | Tidak ada target dan capaian di tahun 2017 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 2.1.2.11.12 | Jumlah sarana dan prasarana olahraga | 5 | 94 | 25/25 | 6 | 0 | 19 | 5/15 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD, capaian Tahun 2018 sebanyak 19 Ponpes/Cabor sedangkan target RPJMD sebanyak 5/15 Ponpes/Cabor |
| **2.1.2.12** | **Statistik** | | | | | | | | |
| 2.1.2.12.1 | Jumlah dokumen statistik daerah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| | | | | | | | | | |
| **2.1.2.13** | **Perpustakaan** | | | | | | | | |
| 2.1.2.13.1 | Jumlah diversifikasi layanan perpustakaan | 13 | 16 | 18 | 17 | 20 | 19 | 17 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD., Jumlah diversifikasi layanan perpustakaan tahun 2018 sebanyak 19 jenis dan telah mencapai target RPJMD sebanyak 17 jenis |
| 2.1.2.13.2 | Jumlah masyarakat yang mengakses perpustakaan | na | 186.300 | 185.093 | 419.673 | 398.423 | 235.590 | 400.350 | Belum Melampui (<) dibandingkan dengan target di RPJMD, jumlah masyarakat yang mengakses perpustakaan tahun 2018 sebanyak 235.590 orang telah melampaui target RPJMD sebanyak 400.350 orang |
| 2.1.2.13.3 | Jumlah bahan pustaka yang dapat diakses oleh pemustaka | 315.356 | 317.707 | 775.567 | 443.330 | 278.728 | 277.754 | 331.443 | Belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD, jumlah bahan pustaka yang dapat diakses oleh pemustaka tahun 2018 sebanyak 277.754 eksemplar dan belum mencapai target RPJMD sebanyak 331.443 eksemplar |
| 2.1.2.13.4 | Jumlah perpustakaan yang dibina | 2.356 | 2.453 | 2.144 | 2.196 | 2.211 | 2.254 | 2.226 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD, jumlah perpustakaan yang dibina pada tahun 2017 sebanyak 2.254 unit dan sesuai dengan target RPJMD 2261. |
| 2.1.2.13.5 | Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun | 8.772 | 14.416 | 73.169 | 164.829 | 89.395 | na | na | Tren pengunjung perpustakaan bersifat fluktuatif. |
| | | | | | | | | | |
| **2.1.2.14** | **Kearsipan** | | | | | | | | |
| 2.1.2.14.1 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara Baku | 19 | 19 | 19 | 19 | 100 | 100 | 100 | Sesuai (=)dibandingkan dengan target di RPJMD, jumlah OPD yang mengelola Arsip secara baku 100% |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 2.1.2.14.2 | Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (orang) | na | na | na | na | 5 | 5 | 20 | Belum tercapai ( ≤) dibandingkan dengan target di RPJMD. Jumlah SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2018 sebanyak 5 |
| 2.1.2.14.3 | Jumlah Arsip Statis | 7.573 | 8.790 | 8.893 | 9.283 | 10.373 | 10.373 | 50 | Melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD Jumlah arsip statis tahun 2018 sebanyak 10.373 |
| 2.1.2.14.4 | Jumlah Arsip In Aktif | 7.121 | 10.402 | 19.439 | 21.961 | 24.743 | 24.743 | 100 | Melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD Jumlah arsip in aktif tahun 2018 sebanyak 24.743 |
| | | | | | | | | | |
| **2.2** | **Fokus Pelayanan Urusan pemerintahan Pilihan** | | | | | | | | |
| **2.2.1** | **Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | | |
| 2.2.1.1 | Produksi Ikan Tangkap (Ton) | na | 101.564 | 176.287 | 177.161 | 190.100 | 196.655 | 96.485,4 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD |
| 2.2.1.2 | Produksi Ikan Budidaya (Ton) | na | 487.199 | 496.943 | 415.000 | 428.500 | 436.800 | 636.884,0 | Belum Tercapai (<)dibandingkan dengan target di RPJMD |
| **2.2.2** | **Pariwisata** | | | | | | | | |
| 2.2.2.1 | Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Orang) | 3.243.313 | 3.406.385 | 3.704.959 | 7.118.516 | 7.474.444 | na | 3.650.377 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD |
| 2.2.2.2 | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Orang) | 31.408 | 32.365 | 48.321 | 64.257 | 67.470 | na | 35.349 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD |
| 2.2.2.3 | Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan (DTW/ Tempat Wiata) | na | 29 | 35 | 39 | 53 | na | 42 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD |
| 2.2.2.4 | Jumlah Sanggar Seni yang Berkembang (Sanggar) | na | 220 | 240 | 212 | 415 | na | 240 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD |
| 2.2.2.5 | Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Pariwisata (Orang) | na | 43.949 | 45.714 | 50.886 | 53.858 | na | 47.698 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD |
| **2.2.3** | **Pertanian** | | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| **2.2.3.1** | **Jumlah Produksi : (ton)** | | | | | | | | |
| 2.2.3.1.1 | - Padi | 3.676.722 | 3.670.434 | 4.247.922 | 5.074.613 | 4.943.071 | 5.076.131 | 4.419.461 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD |
| 2.2.3.1.2 | - Jagung | 167.457 | 191.974 | 298.007 | 552.199 | 892.142 | 1.030.993 | 188.474 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.3.1.3 | - Kedelai | 5.135 | 12.550 | 16.818 | 23.391 | 11.792 | 14.791 | 18.219 | Belum Tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.3.1.4 | - Jumlah Alat Penanganan pasca panen dan pengolahan tanaman pangan dan hortikultura (Unit) | na | 165 | 230 | 0 | 20 | | 257 | Belum Tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| **2.2.3.2** | **Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar** | | | | | | | | |
| 2.2.3.2.1 | Padi | 45,96 | 45,26 | 48,67 | 50,03 | 49,43 | 50,39 | 50,76 | Belum Tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.3.2.2 | Jagung | 51,43 | 60,11 | 62,40 | 63,24 | 64,56 | 67,71 | 65,11 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD, Asem 2018 melampaui |
| 2.2.3.2.3 | Kedelai | 14,42 | 17,34 | 15,09 | 15,44 | 17,49 | 11,72 | 12,38 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD, Produktivitas tanaman pangan untuk komoditas Kedelei telah melampaui target RPJMD sebanyak 12,38 |
| 2.2.3.3 | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%) | 18,60 | 17,76 | 17,13 | 16,70 | 15,80 | 14,80 | na | |
| | | | | | | | | | |
| 2.2.3.4 | Produksi Karet (Ton) | 1.075.209 | 1.095.492 | 1.302.826 | 966.489 | 1.260.321 | 1.082.617 | 1.200.000 | Belum Tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.3.5 | Produksi Kelapa Sawit (Ton) | 2.463.388 | 2.718.927 | 1.120.038 | 2.625.320 | 3.298.518 | 3.826.784 | 2.280.000 | Melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.3.6 | Produksi Kelapa (Ton) | 59,786 | 63,008 | 64,058 | 50.133 | 75.469 | 57.333 | 62.000 | Belum Tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.3.7 | Produksi Kopi (Ton) | 139.754 | 135.288 | 263.683 | 97.419 | 191.467 | 182.655 | 144.000 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD. |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 2.2.3.8 | Produksi Daging (Ton) | 61.781 | 63.342 | 69.053 | 74.127 | 76.519 | 73.709 | 82.315 | Belum Tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.3.9 | Produksi Susu (Liter) | 50 | 67.814 | 89.858 | 102.650 | 118.930 | 122.499 | 127.208 | Belum Tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.3.10 | Produksi Telur (Ton) | 62,686 | 65.773 | 68.124 | 69.965 | 71.303 | 73.078 | 90.316 | Belum Tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| **2.2.4** | **Kehutanan** | | | | | | | | |
| 2.2.4.1 | Jumlah Rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata batas | na | 16 lokasi | 23 lokasi | 9 lokasi | 9 lokasi | 8 lokasi | 8 lokasi | Sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.4.2 | Jumlah Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang beroperasi | na | 6 | 8 | 4 | 6 | 14 | 3 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.4.3 | Luas Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan | na | 923 ha/th | 575 ha/th | 445,13 ha/th | 2.038 ha/th | 1.405,24 ha/th | 70 ha/th | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.4.4 | Jumlah DAS/Sub DAS yang dikelola secara terpadu | na | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sesuai (=)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.4.5 | Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan (Ha) | na | 1.675 | 1.985 | 200 | 2.553 | 310 | 200 | Melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.4.6 | Luas Hutan Tanaman (Ha) | na | 62.037 | 73.000 | 99.470 | 56.961 | 80.664,12 | 60.000 | Melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.4.7 | Produksi Kayu dari Hutan Tanaman | na | 4,13 juta m3/th | 4,90 juta m3/tahun | 5 juta m3/tahun | 6,29 juta m3/tahun | 7,23 juta m3/tahun | 7 juta m3/tahun | Melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.4.8 | Jumlah Penerimaan Sub Sektor Kehutanan | na | 18,17 M/tahun | 31,34 M/tahun | 20 M/tahun | 33,08 M/tahun | 58,1 M/tahun | 20 M/tahun | Melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| **2.2.5** | **Energi dan Sumberdaya Mineral** | | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 2.2.5.1 | Produksi Batubara (Juta Ton) | 23.25 | 24.63 | 24.37 | 24.56 | 39.60 | 49,49 | 25.20 | Melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.5.2 | Nilai PNBP Pertambangan (Royalti dan Landrent) (Rp.Milyar) | 128.598 | 219.81 | 169.2 | 178.3 | 273.47 | 349,98 | 189.00 | Melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.5.3 | Nilai PNBP Minyak Bumi (Rp.Milyar) | 255.29 | 295.52 | 126.90 | 51.25 | 55.87 | 47,60 | 193.00 | Belum Tercapai (<)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.5.4 | Nilai PNBP Gas Bumi (Rp.Milyar) | 794.74 | 862.07 | 445.70 | 311.86 | 333.19 | 308,95 | 525.00 | Belum Tercapai (<)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.5.5 | PAD (Rp.Ribu) | na | 596 | 508.43 | 634.84 | 994.84 | 1.166,68 | 83.00 | Melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.5.6 | Jumlah produksi listrik (Gwh) | na | 7,556.00 | 7,317.97 | 8,416.42 | 8,706.83 | 8.780,23 | 7,517.00 | Melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.5.7 | Rasio elektrifikasi (%) | 71.55 | 73.84 | 80.88 | 83.82 | 87.61 | 92,22 | 83.80 | Melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.5.8 | Jumlah pasokan listrik (MW) | na | 1,448.00 | 1,246.73 | 2,051.19 | 2,065.19 | 2.065,19 | 1,392.33 | Melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.5.9 | Persentase desa dengan akses listrik (%) | 88.2 | 93.05 | 94.28 | 94.60 | 97.13 | 98,08 | 94.90 | Melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| **2.2.6** | **Perdagangan** | | | | | | | | |
| 2.2.6.1 | Nilai Ekspor (US $ Jt/th) | 3.915,68 | 3.084,04 | 2.442,61 | 1.978,88 | 3.410,25 | 3.463,06 | 2.994,30 | Melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.6.2 | Pertumbuhan Ekspor (%) | - 10,43 | - 21,24 | - 20,80 | - 18,99 | 67,15 | 13,06 | 3,50 | Melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.6.3 | Nilai Perdagangan Antar Wilayah/ Perdagangan Antar Pulau (Moda Transportasi Laut) (Ton) | na | na | na | 1.061.908 | 1.343.967 | 1.023.251 | 2.098.750 | Belum Tercapai (<)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| **2.2.7** | **Perindustrian** | | | | | | | | |
| 2.2.7.1 | Jumlah Produksi Industri Pengolahan (Ton) | na | 1.868.533 ton | 1.924.588 ton | 2.263.176 ton | 2.038.800 ton | 2.124.360 ton | 1.991.097 ton | Melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 2.2.7.2 | Pertumbuhan Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan (%) | na | 6,6% | 7,4 % | 4,5% | 4,53% | 6,26% | 4% | Melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.7.3 | Pertumbuhan Investasi di Sektor Industri Pengolahan (%) | na | 0,4% | 15,8% | 6,1% | 7,45% | 7,14% | 3% | Melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.7.4 | Jumlah Klaster Industri Unggulan Daerah (Unit Usaha) | na | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.7.5 | Jumlah IKM Pangan (Unit Usaha) | na | 27.945 UU | 24.606 UU | 28.486 UU | 30.458 UU | 30.991 UU | 27.945 UU | Melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.7.6 | Jumlah IKM kerajinan sandang dan kulit serta kerajinan dan umum (Unit Usaha) | na | 5.622 UU | 6.147 UU | 9.248 UU | 11.053 UU | 12.268 UU | 9.127 UU | Melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 2.2.7.7 | Jumlah Klaster Industri Unggulan Daerah / Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID)/Rencana Inti Pengembangan Industri Daerah (RIPID) yang Ditetapkan (Perda/Perka-da) | na | 2 perda | 2 perda | 2 perda | 2 perda | 2 perda | 2 perda | Sesuai (=) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| **2.2.8** | **Transmigrasi** | | | | | | | | |
| 2.2.8.1 | Penempatan transmigrasi | 450 | 150 | 1.322 | 380 | 125 | na | na | Tidak ada standar/pembanding |
| **3** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | | | |
| **3.1** | **Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah** | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.000) | na | na | na | na | na | 10.220 | 10.220 | Sesuai (=)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 3.1.2 | Nilai tukar petani | 110.03 | 102.54 | 96.87 | 94.58 | 95.05 | 93,95 | 100 | Belum tercapai (<)dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| **3.2** | **Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur** | | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian kinerja | | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | 0,0134 | 0,0140 | 0,0142 | 0,0116 | 0,0125 | na | >0,05 | Belum tercapai (<)dibandingkan dengan target di RPJMD; lintas harian rata'rata/ jumlah kendaraan lebih banyak dibanding ruas jalan |
| **3.3** | **Fokus Sumber Daya Manusia** | | | | | | | | |
| **3.3.1** | **Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | | | | |
| 3.3.1.1 | Jumlah Sumber daya aparatur yang kompeten dan pofesional | 752 | 752 | 758 | 727 | 714 | 1.269 | 690 | Melampaui (>)dibandingkan dengan target di RPJMD. Realisasi tahun 2018 telah melampaui target yaitu 1.269 orang dari target 690 orang atau sebesar 183,91 % |
| 3.3.1.2 | Jumlah sumber daya Widyaiswara yang kompeten dan profesional | 24 | 24 | 27 | 34 | 30 | 32 | 40 | Belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD. Realisasi tahun 2018 belum mencapai target yaitu 32 orang dari target 40 orang atau sebesar 80,00, hal ini dikarenakan adanya widyaswara yang mutase atau pension |
| **3.3.2** | **Kepegawaian** | | | | | | | | |
| 3.3.2.1 | Persentase pelanggaran disipilin PNS Prov. Sumsel | 20 | 20 | 10,64 | 10,64 | 8,39 | 1,81 | 3 | Melampaui (>) dibandingkan dengan target di RPJMD. |
| 3.3.2.2 | Pelayanan administrasi data kepegawaian berbasis WEB | 23 | 23 | 40,3 | 50 | 58,82 | 52,1 | 96 | Belum tercapai (<) dibandingkan dengan target di RPJMD. Realisasi Tahun 2018 belum mencapai yaitu 52,1% masih dibawah target RPJMD 2018 sebesar 96% |

# BAB III

# GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

## 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2017 diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Struktur APBD Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pengukuran Kinerja Pelaksanaan APBD dilaksanakan dengan mengukur sumber pendapatan daerah maupun dari sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Sumber Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Sedangkan Dana Perimbangan yang dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHP/ DBHBP), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun Belanja Daerah meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

**Tabel 3. 1**
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017

| NO | URAIAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| **PENDAPATAN** | | **5,468,139,691,033.10** | **6,252,136,312,520.51** | **5,990,424,062,511.95** | **6,582,780,929,676.33** | **8,195,968,131,799.96** | **11.14** |
| **A** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **2,021,696,787,275.10** | **2,422,673,788,768.86** | **2,534,526,413,315.20** | **2,546,177,544,348.66** | **3,031,633,624,303.95** | **10.99** |
| 1. | Pendapatan Pajak Daerah | 1,882,596,915,640.00 | 2,267,779,726,033.50 | 2,324,865,133,161.95 | 2,378,960,064,732.96 | 2,835,049,448,049.80 | 11.12 |
| 2. | Hasil Retribusi Daerah | 16,522,296,308.00 | 11,422,669,874.00 | 17,229,350,901.00 | 18,403,609,038.90 | 15,442,784,364.00 | 2.67 |
| 3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan | 59,352,768,749.12 | 30,668,098,292.55 | 60,861,027,587.28 | 62,837,135,004.93 | 55,702,074,349.60 | 10.50 |
| 4. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 63,224,806,577.98 | 112,803,294,568.81 | 131,570,901,664.97 | 85,976,735,571.87 | 125,439,317,540.55 | 26.57 |
| **B** | **DANA PERIMBANGAN** | **2,649,216,454,338.00** | **2,982,866,000,798.00** | **2,329,728,331,330.00** | **2,506,312,481,085.00** | **4,061,113,371,545.00** | **15.08** |
| 1. | Bagi Hasil Pajak/Bukan | 1,753,511,287,338.00 | 1,934,568,340,798.00 | 1,328,407,541,330.00 | 1,286,710,762,546.00 | 1,507,731,845,979.00 | (1.74) |
| 2. | Pendapatan Dana Alokasi | 870,516,767,000.00 | 985,542,760,000.00 | 931,915,470,000.00 | 1,071,421,391,000.00 | 1,697,897,817,000.00 | 20.30 |
| 3. | Pendapatan Dana Alokasi | 25,188,400,000.00 | 62,754,900,000.00 | 69,405,320,000.00 | 148,180,327,539.00 | 855,483,708,566.00 | 187.64 |
| **C** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | **797,226,449,420.00** | **846,596,522,953.65** | **1,126,169,317,866.75** | **1,530,290,904,242.67** | **1,103,221,135,951.01** | **11.80** |
| 1. | Pendapatan Hibah | 20,519,924,766.00 | 20,248,984,384.00 | 28,558,466,000.00 | 3,354,520,000.00 | 4,233,286,734.00 | (5.59) |
| 2. | Dana Penyesuaian dan Otonomi | 776,706,524,654.00 | 810,472,015,000.00 | 1,095,610,842,057.00 | 1,515,802,126,424.00 | - | 25.96 |
| 3. | Pendapatan Lainnya | - | 15,875,523,569.65 | 2,000,009,809.75 | 11,134,257,818.67 | 1,098,987,849,217.01 | 3379.88 |
| **BELANJA** | | **5,678,703,610,531.20** | **5,781,570,143,910.34** | **5,190,198,812,292.77** | **4,962,572,330,784.01** | **6,409,382,404,458.31** | **4.09** |
| **A** | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | **3,683,194,507,966.00** | **4,010,619,073,347.63** | **3,108,721,119,952.55** | **3,564,656,084,604.98** | **3,750,786,550,611.72** | **1.57** |
| 1. | Belanja Pegawai | 731,001,398,207.00 | 752,811,716,562.00 | 776,889,350,576.00 | 655,041,325,419.00 | 1,455,325,390,288.00 | 28.17 |
| 2. | Belanja Subsidi | - | - | - | - | - | |
| 3. | Belanja Hibah | 2,031,305,991,844.00 | 1,574,378,203,956.86 | 1,638,104,117,973.00 | 2,041,107,497,879.00 | 1,673,639,026,533.00 | (2.96) |
| 4. | Belanja Bantuan Sosial | 399,596,650.00 | 513,384,395.00 | 380,000,000.00 | 226,252,000.00 | 200,000,000.00 | (12.39) |
| 5. | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah | 115,227,611,600.00 | 268,508,789,635.77 | 115,950,084,843.55 | 239,086,976,321.18 | 513,766,114,832.72 | 74.32 |
| 6. | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa dan Partai | 804,677,610,665.00 | 1,413,549,040,429.00 | 576,359,566,560.00 | 629,014,032,985.80 | 107,063,762,958.00 | (14.35) |
| 7. | Belanja Tidak Terduga | 582,299,000.00 | 857,938,369.00 | 1,038,000,000.00 | 180,000,000.00 | 792,256,000.00 | 81.45 |
| **B** | **BELANJA LANGSUNG** | **1,995,509,102,565.20** | **1,770,951,070,562.71** | **2,081,477,692,340.22** | **1,397,916,246,179.03** | **2,658,595,853,846.59** | **15.91** |
| 1. | Belanja Pegawai | 58,351,299,579.00 | 23,441,740,729.00 | 5,368,504,097.00 | 3,224,229,230.00 | 6,741,710,474.00 | (16.94) |
| 2. | Belanja Barang dan Jasa | 1,074,254,134,559.80 | 1,014,127,014,898.00 | 1,035,087,257,474.96 | 786,951,090,203.75 | 1,274,471,464,949.00 | 8.61 |
| 3. | Belanja Modal | 862,903,668,426.40 | 733,382,314,935.71 | 1,041,021,930,768.26 | 607,740,926,745.28 | 1,377,382,678,423.59 | 27.99 |
| **PEMBIAYAAN** | | | | | | | |
| **A** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **521,334,563,016.89** | **10,179,492,465.79** | **39,970,123,458.85** | **44,860,613,263.36** | **64,859,465,661.33** | **62.86** |
| 1. | SiLPA | 521,334,563,016.89 | 10,179,492,465.79 | 39,970,123,458.85 | 35,579,268,821.76 | 64,859,465,661.33 | 66.48 |
| 2. | Penerimaan Piutang Daerah | - | - | - | 9,281,344,441.60 | - | |
| **B** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **300,591,151,053.00** | **441,906,397,051.11** | **818,811,227,176.39** | **1,600,209,593,770.35** | **1,810,463,316,940.86** | **60.22** |
| 1. | Penyertaan Modal | 28,130,000,000.00 | 87,872,691,604.00 | 60,000,000,000.00 | 45,000,000,000.00 | 7,199,146,283.00 | 17.91 |
| 2. | Pembayaran Utang Provinsi | 272,461,151,053.00 | 354,033,705,447.11 | 758,811,227,176.39 | 1,555,209,593,770.35 | 1,803,264,170,657.86 | 66.29 |

*Sumber: TAPD Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Realisasi pengelolaan pendapatan daerah selama periode 2013-2017 menunjukkan bahwa pendapatan daerah meningkat dari Rp.5.468.139.691.033,10 pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp.8.195.968.131.799,96 pada anggaran tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama periode 2013-2017 adalah 11,14 persen. Realisasi Pendapatan Asli Daerah juga terus meningkat dari Rp.2.021.696.787.275,10 pada tahun 2013 menjadi Rp.3.031.633.624.303,95 pada anggaran tahun 2017 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 10,29 persen. Sementara,

dana perimbangan meningkat dari Rp.2.649.216.454.338,00 pada tahun 2013 menjadi Rp.4.061.113.371.545,00 pada anggaran tahun 2017 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 15,08 persen. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2017 meningkat dari Rp.797.226.449.420,00 pada tahun 2013 menjadi Rp.1.530.290.904.242,67 pada tahun 2016, namun mengalami penurunan pada anggaran tahun 2017 yaitu menjadi Rp.1.103.221.135.951,01 sehingga rata-rata pertumbuhannya sebesar 11,80%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya perpindahan komponen pada Lain-Lain Pendapatan yang Sah, yaitu Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang terdiri dari Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke komponen Dana Perimbangan, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK).

**Tabel 3. 2**
Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2017

| Tahun | PAD | | DANA PERIMBANGAN | | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Rp) | Kontribusi terhadap Patda (%) | (Rp) | Kontribusi terhadap Patda (%) | (Rp) | Kontribusi terhadap Patda (%) |
| 2013 | 2,021,696,787,275.10 | 36.97 | 2,649,216,454,338.00 | 48.45 | 797,226,449,420.00 | 14.58 |
| 2014 | 2,422,673,788,768.86 | 38.75 | 2,982,866,000,798.00 | 47.71 | 846,596,522,953.65 | 13.54 |
| 2015 | 2,534,526,413,315.20 | 42.31 | 2,329,728,331,330.00 | 38.89 | 1,126,169,317,866.75 | 18.80 |
| 2016 | 2,546,177,544,348.66 | 38.68 | 2,506,312,481,085.00 | 38.07 | 1,530,290,904,242.67 | 23.25 |
| 2017 | 3,031,633,624,303.95 | 36.99 | 4,061,113,371,545.00 | 49.55 | 1,103,221,135,951.01 | 13.46 |
| **Rata-Rata** | | **38.74** | | **44.53** | | **16.73** |

*Sumber: TAPD Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa sumbangan PAD terhadap Pendapatan Daerah rata-rata sebesar 38,74 persen per tahun selama 2013-2017. Sementara, sumbangan Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah rata-rata sebesar 44,53 persen per tahun dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah sebesar 16,73 persen per tahun. Struktur Pendapatan Daerah tersebut menegaskan perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan. Dengan demikian, tantangan pengelolaan Pendapatan Daerah periode 2018-2023 adalah perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

**Tabel 3. 3**
Struktur Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2017

| Tahun | Pajak Daerah | | Retribusi Daerah | | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | Lain-Lain PAD yang Sah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Rp) | Kontribusi terhadap PAD (%) | (Rp) | Kontribusi terhadap PAD (%) | (Rp) | Kontribusi terhadap PAD (%) | (Rp) | Kontribusi terhadap PAD (%) |
| 2013 | 1,882,596,915,640.00 | 93.12 | 16,522,296,308.00 | 0.82 | 59,352,768,749.12 | 2.94 | 63,224,806,577.98 | 3.13 |
| 2014 | 2,267,779,726,033.50 | 93.61 | 11,422,669,874.00 | 0.47 | 30,668,098,292.55 | 1.27 | 112,803,294,568.81 | 4.66 |
| 2015 | 2,324,865,133,161.95 | 91.73 | 17,229,350,901.00 | 0.68 | 60,861,027,587.28 | 2.40 | 131,570,901,664.97 | 5.19 |
| 2016 | 2,378,960,064,732.96 | 93.43 | 18,403,609,038.90 | 0.72 | 62,837,135,004.93 | 2.47 | 85,976,735,571.87 | 3.38 |
| 2017 | 2,835,049,448,049.80 | 93.52 | 15,442,784,364.00 | 0.51 | 55,702,074,349.60 | 1.84 | 125,439,317,540.55 | 4.14 |
| **Rata-Rata** | | **93.08** | | **0.64** | | **2.18** | | **4.10** |

*Sumber: TAPD Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Pada Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa perkembangan struktur PAD menunjukkan bahwa rata-rata sumbangan pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 93,08 persen per tahun, rata-rata sumbangan Retribusi Daerah terhadap PAD adalah 0,64 persen per tahun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 2,18 persen per tahun dan lain-lain PAD yang sah sebesar 4,10 persen per tahun. Struktur PAD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2017 tersebut mengindikasikan bahwa sumber utama PAD berasal dari pajak daerah. Berbagai langkah yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan PAD antara lain adalah membentuk tim optimalisasi pendapatan daerah yang melibatkan OPD di Provinsi Sumatera Selatan, melakukan kerjasama dan institusi lain dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, mereview peraturan-peraturan tentang pajak daerah, pemantapan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak, peningkatan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak, intensifikasi pemungutan pajak daerah, penggalian sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, peningkatan pajak kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Provinsi Sumatera Selatan, serta pemanfaatan teknologi dalam sosialisasi pajak, penerapan sistem pelayanan dan pelaporan secara online dan pengembangan/up grade aplikasi samsat dan non samsat, serta melalukan kerjasama dengan institusi lain dan pendampingan korsupgah deputi pencegahan KPK bidang pendapatan daerah.

Langkah lain yang telah dilakukan adalah optimalisasi peningkatan koordinasi dan evaluasi dengan OPD pemungut retribusi, penggalian objek pemungutan retribusi baru dan memperbaiki sistem tarif retribusi,

pengoptimalan kinerja BUMD dan BLUD dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah, dan peningkatan bagian laba atas penyertaan modal. Berbagai langkah tersebut secara bertahap telah meningkatkan PAD Provinsi Sumatera Selatan.

Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga berasal dari Dana Perimbangan. Dalam kurun waktu 2013-2017, Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Selatan meningkat dari Rp. 2.649.216.454.338,00 pada tahun 2013 menjadi Rp. 4.061.113.371.545,00 pada tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,08 persen. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (DBHP/ DBHBP) mengalami penurunan selama periode 2013-2017 dari Rp.1.753.511.287.338,00 pada tahun 2013 menurun sebesar Rp. 1.507.731.845.979,00 pada tahun 2017. Rata-rata penurunan pertumbuhan DBHP/ DBHBP ini adalah -1,74 persen per tahun. Sementara, Dana Alokasi Umum meningkat dari Rp.870.516.767.000,00 pada tahun 2013 menjadi Rp.1.697.897.817.000,00 pada tahun 2017 atau mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 20,30 persen per tahun selama periode 2013-2017. Sedangkan Dana Alokasi Khusus juga mengalami peningkatan pada periode yang sama, khususnya pada tahun 2017, yaitu dari Rp. 25.188.400.000,00 pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 148.180.327.539,00 pada tahun 2016 dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 2.102.260.971.000,00 sehingga rata-rata pertumbuhan pada periode 2013-2017 sebesar 397,99 persen. Peningkatan yang signifikan ini disebabkan oleh adanya perpindahan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sebelumnya merupakan komponen dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah, yaitu Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

**Tabel 3. 4**
Struktur Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2017

| Tahun | Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | | DAU | | DAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Rp) | Kontribusi terhadap Dana Perimbangan (%) | (Rp) | Kontribusi terhadap Dana Perimbangan (%) | (Rp) | Kontribusi terhadap Dana Perimbangan (%) |
| 2013 | 1,753,511,287,338.00 | 66.19 | 870,516,767,000.00 | 32.86 | 25,188,400,000.00 | 0.95 |
| 2014 | 1,934,568,340,798.00 | 64.86 | 985,542,760,000.00 | 33.04 | 62,754,900,000.00 | 2.10 |
| 2015 | 1,328,407,541,330.00 | 57.02 | 931,915,470,000.00 | 40.00 | 69,405,320,000.00 | 2.98 |
| 2016 | 1,286,710,762,546.00 | 51.34 | 1,071,421,391,000.00 | 42.75 | 148,180,327,539.00 | 5.91 |
| 2017 | 1,507,731,845,979.00 | 37.13 | 1,697,897,817,000.00 | 41.81 | 855,483,708,566.00 | 21.07 |
| **Rata-Rata** | | **55.31** | | **38.09** | | **6.60** |

*Sumber: TAPD Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Struktur penerimaan pendapatan Provinsi Sumatera Selatan dari Dana Perimbangan pada Tabel 3.4 menunjukkan bahwa rata-rata sumbangan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Dana Perimbangan adalah sebesar 55,31 persen per tahun. Sementara, Dana Alokasi Umum rata-rata menyumbang sebesar 8.09 persen per tahun terhadap Dana Perimbangan, sedangkan rata-rata kontribusi Dana Alokasi Khusus sebesar 6,60 persen per tahun.

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2013-2017 meningkat dari Rp.5.678.703.610.531,20 pada tahun 2013 menjadi Rp.7.109.417.787.739,28 pada tahun 2017 atau rata-rata meningkat sebesar 7,62 persen per tahun. Belanja Tidak Langsung meningkat dari Rp.3.683.194.507.966,00 pada tahun 2013 menjadi Rp.3.895.477.213.670,28 pada tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,59 persen per tahun. Sedangkan Belanja Langsung meningkat dari Rp.1.995.509.102.565,20 pada tahun 2013 menjadi Rp.3.213.940.574.069,00 pada tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25,71 persen per tahun. Rincian objek Belanja Daerah beserta kontribusinya terhadap Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut.

**Tabel 3. 5**
Struktur Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2017

| NO | URAIAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata-Rata Kontribusi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kontribusi (%) | Kontribusi (%) | Kontribusi (%) | Kontribusi (%) | Kontribusi (%) | |
| **BELANJA** | | **100.00** | **100.00** | **100.00** | **100.00** | **100.00** | **100.00** |
| **A** | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | **64.86** | **69.37** | **59.90** | **71.83** | **58.52** | **64.90** |
| | 1. Belanja Pegawai | 12.87 | 13.02 | 14.97 | 13.20 | 22.71 | 15.35 |
| | 2. Belanja Subsidi | - | - | - | - | - | - |
| | 3. Belanja Hibah | 35.77 | 27.23 | 31.56 | 41.13 | 26.11 | 32.36 |
| | 4. Belanja Bantuan Sosial | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| | 5. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa | 2.03 | 4.64 | 2.23 | 4.82 | 8.02 | 4.35 |
| | 6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota/ Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 14.17 | 24.45 | 11.10 | 12.68 | 1.67 | 12.81 |
| | 7. Belanja Tidak Terduga | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| **B** | **BELANJA LANGSUNG** | **35.14** | **30.63** | **40.10** | **28.17** | **41.48** | **35.10** |
| | 1. Belanja Pegawai | 1.03 | 0.41 | 0.10 | 0.06 | 0.11 | 0.34 |
| | 2. Belanja Barang dan Jasa | 18.92 | 17.54 | 19.94 | 15.86 | 19.88 | 18.43 |
| | 3. Belanja Modal | 15.20 | 12.68 | 20.06 | 12.25 | 21.49 | 16.33 |

*Sumber: TAPD Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Struktur Belanja Daerah menunjukkan bahwa alokasi Belanja Tidak Langsung rata-rata sebesar 64,90 persen dengan rata-rata alokasi terbesar pada Belanja Hibah sebesar 32,36 persen, Belanja Pegawai sebesar 15,35

persen, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebesar 12,81 persen. Sementara, rata-rata alokasi Belanja Langsung sebesar 35,10 persen dengan rincian alokasi rata-rata sebesar 18,43 persen pada Belanja Barang dan Jasa, 16,33 persen pada Belanja Modal, dan 0,34 persen pada Belanja Pegawai. Struktur Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama 2013-2017 sebagian besar digunakan untuk Belanja Hibah. Selain itu, alokasi Belanja Modal masih relatif kecil, yaitu kurang dari 30 persen. Struktur belanja daerah tersebut perlu untuk dikaji kembali untuk mendukung percepatan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan periode selanjutnya.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah selama tahun 2013-2017 antara lain adalah:

(1) Belum adanya konsistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang struktur keuangan daerah. Selain itu, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah terus mengalami perubahan yang menyebabkan keterlambatan dalam proses penyusunan anggaran, mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan anggaran dan menghambat kecepatan dalam pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
(2) Adanya perubahan peraturan perundangan yang sangat cepat tanpa diikuti oleh sosialisasi, juga telah menyebabkan keterlambatan penyesuaian terhadap peraturan yang baru dan berdampak terhadap kurang optimalnya penyerapan belanja daerah;
(3) Terbatasnya pemahaman aparatur terhadap teknis penyusunan anggaran dan teknis pengalokasian dana terutama dalam penentuan prioritas belanja dengan mengacu pada prinsip anggaran berbasis kinerja;
(4) Belum adanya Standar Pelayanan Minimal sebagai acuan dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah;
(5) Belum adanya standar analisis belanja sebagai acuan yang digunakan untuk mengukur tingkat kewajaran belanja dan beban kerja;
(6) Belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik Dinas, Kantor, Badan maupun Biro menggunakan anggaran berbasis kinerja sebagai dasar penyusunan anggaran. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam menetapkan indikator kinerja program dan kegiatan setiap OPD dan ketidaktepatan dalam mengalokasikan belanja daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

### 3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah digunakan untuk memberikan informasi kepada manajemen Pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan daerah dan pada akhirnya akan mengarah kepada fleksibilitas keuangan (*financial*

*flexibility*) serta mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan entitas dalam hal ini meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Untuk Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tergambar dari Tabel 3.6 Pertumbuhan Neraca Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 3. 6**
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2017

| NO | URAIAN | 2015 (Rp) | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ASET** | | | | | |
| **A** | **ASET LANCAR** | **306,363,526,310.94** | **902,998,811,801.78** | **407,513,118,459.76** | **69.94** |
| | **1. Kas** | **35,665,667,437.64** | **71,685,058,242.33** | **54,984,626,965.18** | **38.85** |
| | - Kas di Kas Daerah | 239,018,960.64 | 48,753,226,578.82 | 16,756,607,804.29 | **10115.80** |
| | - Kas di Bendahara Penerimaan | - | 5,750,000.00 | 5,000,000.00 | **#DIV/0!** |
| | - Kas di Bendahara Pengeluaran | - | 38,103,704.70 | 2,006,489,688.00 | |
| | - Setara Kas | 15,000,000,000.00 | - | | |
| | - Kas di BLUD | 20,426,124,955.00 | 22,653,662,265.81 | 22,216,129,962.83 | |
| | - Kas Lainnya | 523,522.00 | 234,315,693.00 | 14,000,399,510.06 | |
| | **2. Piutang** | **37,427,572,975.32** | **492,926,802,718.45** | **238,458,863,370.83** | **582.70** |
| | - Piutang Pajak Daerah | 23,370,400,917.00 | 480,681,423,673.18 | 208,330,522,141.29 | 950.07 |
| | Beban Dibayar Dimuka | 1,899,559,546.71 | 1,179,655,119.88 | 1,109,486,396.94 | (21.92) |
| | - Penyisihan Piutang | (746,701,147.00) | (2,004,056,275.32) | (1,888,338,826.65) | 81.31 |
| | - Piutang Lain-lain | 12,904,313,658.61 | 13,069,780,200.71 | 30,907,193,659.25 | 68.88 |
| | **3. Persediaan** | **233,270,285,897.98** | **338,386,950,841.00** | **114,069,628,123.75** | **(10.61)** |
| **B** | **INVESTASI JANGKA PANJANG** | **1,104,786,850,323.72** | **1,001,167,487,465.65** | **6,879,306,071,390.30** | **288.87** |
| | **1. Investasi Non Permanen** | **100,483,595,000.00** | **-** | **-** | |
| | - Investasi Non Permanen Lainnya | 96,450,375,000.00 | - | - | #DIV/0! |
| | - Investasi Bergulir | 4,033,220,000.00 | - | - | #DIV/0! |
| | **2. Investasi Permanen** | **1,004,303,255,323.72** | **1,001,167,487,465.65** | **6,879,306,071,390.30** | **293.41** |
| | - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 977,271,111,789.13 | 1,001,167,487,465.65 | 6,879,306,071,390.30 | 294.79 |
| | - Investasi Permanen Lainnya | 27,032,143,534.59 | - | - | #DIV/0! |
| **C** | **ASET TETAP** | **10,109,950,803,388.00** | **11,135,870,709,793.30** | **13,036,193,680,564.70** | **13.61** |
| | 1. Tanah | 2,466,292,750,521.17 | 3,040,766,243,650.02 | 4,197,628,410,434.84 | 30.67 |
| | 2. Peralatan dan Mesin | 1,046,611,853,198.22 | 1,369,354,779,094.52 | 1,517,227,458,953.85 | 20.82 |
| | 3. Gedung dan Bangunan | 2,152,733,208,523.17 | 2,508,011,838,546.25 | 3,065,309,011,157.60 | 19.36 |
| | 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 10,880,384,179,090.70 | 11,394,478,494,798.50 | 12,070,174,194,474.10 | 5.33 |
| | 5. Aset Tetap Lainnya | 67,806,050,234.00 | 88,707,496,539.20 | 295,180,561,614.80 | 131.79 |
| | 6. Konstruksi dalam pengerjaan | 504,313,733,344.76 | 821,494,082,161.40 | 1,023,312,621,929.43 | 43.73 |
| | 7. Akumulasi Penyusutan | (7,008,190,971,524.03) | (8,086,942,224,996.59) | (9,132,638,577,999.92) | 14.16 |
| **C** | **DANA CADANGAN** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **D** | **ASET LAINNYA** | **2,239,261,972,936.01** | **2,238,271,885,111.45** | **1,840,974,343,896.30** | **(8.90)** |
| | 1. Tagihan piutang penjualan angsuran | 2,490,417,586.07 | 1,249,877,126.07 | 1,235,729,626.07 | (25.47) |
| | 2. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah | - | - | - | - |
| | 3. Kemitraan dengan pihak ketiga | 1,376,782,494,005.13 | 1,376,782,494,005.13 | 661,505,675,000.00 | (25.98) |
| | 4. Aset tidak berwujud | 75,816,628,550.00 | 82,066,578,651.11 | 72,657,326,047.00 | (1.61) |
| | 5. Aset Lain-lain | 784,172,432,794.81 | 778,172,935,329.14 | 1,105,575,613,223.23 | 20.65 |
| **JUMLAH ASET DAERAH** | | **13,760,363,152,958.70** | **15,278,308,894,172.20** | **22,163,987,214,311.10** | **28.05** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KEWAJIBAN** | | | | | | |
| **A** | | **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | **2,463,158,505,299.74** | **2,277,182,388,080.28** | **1,812,865,587,660.37** | **(13.97)** |
| | 1. | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 31,703,456.00 | 6,610,724,164.00 | 1,386,810.00 | 10325.88 |
| | 2. | Utang Bunga | - | - | - | - |
| | 3. | Utang Pajak | - | - | - | - |
| | 4. | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Bank | - | - | - | - |
| | 5. | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Obligasi | - | - | - | - |
| | 6. | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah | - | - | - | - |
| | 7. | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah | - | - | - | - |
| | 8. | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah | - | | | - |
| | 9. | Pendapatan Diterima Dimuka | 21,901,666.00 | 24,826,983.00 | 141,105,938.00 | 468.36 |
| | 10. | Utang Jangka Pendek Lainnya | 626,316,135,873.87 | 537,227,430,024.45 | 326,652,465,009.12 | (26.71) |
| | 11. | Utang Bagi Hasil Pajak | - | 1,375,038,724,494.34 | 1,157,668,295,267.70 | - |
| | 12. | Utang Kepada PT. Bukit Asam | - | - | | - |
| | 13. | Utang Beban | 1,836,788,764,303.87 | 358,280,682,414.49 | 328,402,334,635.55 | (8.34) |
| **B** | | **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** | **-** | **-** | | **-** |
| | 1. | Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan | - | - | - | - |
| | 2. | Utang Dalam Negeri Obligasi | - | - | - | - |
| | 3. | Utang Pemerintah Pusat | - | - | - | - |
| | 4. | Utang Pemerintah Provinsi | - | - | - | - |
| | 5. | Utang Pemerintah Kabupaten/Kota | - | - | - | - |
| | 6. | Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan | - | - | - | - |
| | 7. | Utang Obligasi | - | - | - | - |
| **JUMLAH KEWAJIBAN** | | | **2,463,158,505,299.74** | **2,277,182,388,080.28** | **1,812,865,587,660.37** | **(13.97)** |
| | | | | | | |
| **EKUITAS DANA** | | | | | | |
| **A** | | **EKUITAS DANA LANCAR** | **11,297,204,647,658.90** | **13,001,126,506,091.90** | **20,351,121,626,650.60** | **35.81** |
| **B** | | **EKUITAS DANA INVESTASI** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **C** | | **EKUITAS DANA CADANGAN** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **JUMLAH EKUITAS DANA** | | | **11,297,204,647,658.90** | **13,001,126,506,091.90** | **20,351,121,626,650.60** | **35.81** |
| **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA** | | | **13,760,363,152,958.60** | **15,278,308,894,172.20** | **22,163,987,214,311.00** | **28.05** |

*Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

### 1. Aset

Aset lancar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalami angka yang fluktuatif, dari Rp. 18.257.096.675.399,00 di tahun 2014 mengalami penurunan hingga menjadi Rp.9.386.837.685.426,77 pada tahun 2015, namun kembali meningkat di tahun 2016 mencapai Rp.11.626.831.708.941,30. Bila dilihat secara detail maka terlihat penyumbang peningkatan aset lancar adalah dari sisi kas yang mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2016.

Sementara investasi jangka panjang rata-rata menurun dari investasi non permanen. Sedangkan Investasi Permanen mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 16,38 persen. Penurunan juga terjadi pada aset tetap, yaitu rata-rata tumbuh sebesar -20,21 persen akibat akumulasi penyusutan. Penyumbang pertumbuhan terbesar pada Aset Tetap adalah Konstruksi dalam pengerjaan yang mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 47,71 persen, diikuti oleh Peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan dengan masing-masing rata-rata pertumbuhan sebesar 21,91 persen dan 20,58 persen. Selama kurun waktu 2014-2016 Pemprov Sumsel tidak mengalokasikan dana cadangan.

Sedangkan Aset Lainnya dalam neraca keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 44,38 persen selama kurun waktu 2014 – 2016.

**2. Kewajiban**

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2014-2016 terjadi pertumbuhan yang fluktuatif pada tiap tahunnya. Pada tahun 2014 kewajiban jangka pendek berjumlah Rp.1.365.110.113.463,87 kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar Rp.2.463.158.505.299,74, dan di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp. 2.277.182.388.080,28. Faktor utama penyebab pertumbuhan kewajiban jangka pendek ini adalah pertumbuhan utang kepada pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota meliputi diantaranya kekurangan pembayaran bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota. Untuk itu ke depan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus meningkatkan pengelolaan keuangan untuk mengurangi kewajiban jangka pendek tersebut. Sementara dari kewajiban jangka panjang tidak ada yang yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dan secara keseluruhan bahwa jumlah kewajiban periode 2014-2016 adalah mengalami pertumbuhan yang mencapai 36,44 persen.

**3. Ekuitas Dana**

Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, serta Ekuitas Dana Cadangan. Dimana pada setiap komponen terdiri dari pos – pos yang turut andil dalam naik dan turunnya pertumbuhan Ekuitas. Ekuitas Dana Lancar yang terdiri dari SILPA, pendapatan yang ditangguhkan, cadangan piutang, cadangan persediaan, serta dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Penurunan Ekuitas Dana Lancar utamanya karena penurunan pada dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Adapun untuk Ekuitas Dana Investasi, yang terdiri dari dana diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, dana diinvestasikan dalam aset tetap, dana diinvestasikan dalam aset lainnya, serta dana pembayaran utang jangka panjang, menunjukkan peningkatan tiap tahunnya untuk periode 2014-2016. Sementara itu, Ekuitas Dana Cadangan tidak dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Analisis lebih lanjut terhadap neraca daerah untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan berdasarkan analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, sebagai berikut:

**4. Rasio Likuiditas**

Dalam mencermati neraca keuangan Pemerintah Daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar dan rasio quick. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Untuk memperoleh rasio lancar, rumusan yang digunakan adalah dengan membagi aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Untuk Sumatera Selatan rasio likuiditas adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. 7**
Rasio Likuiditas Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

| Rasio Likuiditas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Rasio Lancar | 0,53 | 0,12 | 0,40 | 0,22 |
| Rasio quick | 0,32 | 0,03 | 0,25 | 0,16 |

*Rasio Lancar*

Rasio Lancar adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dengan aset lancarnya dapat menjamin pembayaran hutang. Semakin tinggi rasio berarti hutang–hutang yang ada semakin terjamin, sementara untuk Sumatera Selatan rasionya cukup rendah sehingga diindikasikan perlu diperbaiki pengelolaan keuangan agar tidak mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya.

*Rasio Quick*

Rasio quick adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah daerah membayar hutangnya dengan cepat. Rasio ini dinilai lebih baik dari rasio lancar karena aset lancar yang nantinya akan dicairkan untuk menutup tagihan jangka pendek sudah dikurangkan dengan jumlah persediaan, yang dinilai kurang liquid untuk membayar hutang. Nilai rasio yang dihasilkan menunjukkan hasil bahwa kemampuan aset lancar setelah dikurangi persediaan yang dimiliki cukup sulit untuk menutup semua tagihan jangka pendek yang dimiliki.

**5. Rasio Solvabilitas**

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

**Tabel 3. 8**
Rasio Solvabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

| Rasio Solvabilitas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Rasio total hutang terhadap aset | 0.12 | 0,18 | 0,15 | 0,08 |
| Rasio hutang terhadap modal | 0.13 | 0,22 | 0,18 | 0,09 |

Rasio solvabilitas juga merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang ditanggung Pemerintah Daerah dibandingkan dengan aset yang dimiliki atau untuk mengukur sejauh mana aset Pemerintah Daerah dibiayai dari hutang. Rasio ini diukur dengan:

*Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset*

Rasio ini menunjukkan besarnya bagian dari seluruh aset yang dibiayai dari hutang. Semakin kecil nilai yang didapat dari perhitungan berarti semakin baik rasio hutang terhadap total aset. Rasio ini juga dapat mengukur besarnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayarkan hutangnya kepada kreditur. Dari hasil perhitungan didapat rasio total hutang terhadap total aset adalah sebesar 0,12 dan menurun menjadi 0,08 di Tahun 2017.

Rasio Total Hutang Terhadap Modal

Rasio ini perbandingan antara hutang dan ekuitas dalam pendanaan Pemda dan menunjukkan kemampuan modal Pemda untuk memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki. Hasil perhitungan menunjukkan rasio ini pada angka 0,13 di tahun 2014 dan menurun menjadi 0,09 di tahun 2017.

## 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan pada kurun waktu 2013-2017 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

Tantangan pengelolaan PAD dalam lima tahun mendatang antara lain adalah perlunya percepatan pengembangan ekonomi daerah, pembenahan administrasi perpajakan dan perbaikan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan pajak daerah. Selain itu, tantangan yang perlu dihadapi untuk meningkatkan PAD adalah meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah, dan memberikan kemudahan perijinan usaha.

Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018. Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis money follows

program dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah dibedakan menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan Belanja Pegawai, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, serta Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik termasuk pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan prasarana, peningkatan produksi dan produktivitas, dan penciptaan nilai tambah daerah yang lebih tinggi.

Dalam periode 2013-2017, pengelolaan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung didasarkan pada kebijakan sebagai berikut.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung diarahkan untuk:

(1) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu dan nilai tambah dalam pelayanan umum dan administrasi pemerintahan;

(2) Melaksanakan kegiatan tugas pokok dan fungsi OPD yang memenuhi kriteria kesesuaian antara masukan dan daya dukung setiap unit kerja, antara keluaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat, serta antara dampak dan nilai tambah bagi kemajuan daerah;

(3) Meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan kriteria kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, tidak terjadi tumpang tindih, dan dapat mendorong keterpaduan tindakan antarunit organisasi.

Kebijakan Belanja Langsung diarahkan untuk:

(1) Mempercepat terwujudnya visi, misi dan tujuan dan sasaran pembangunan 2013-2018 terutama peningkatan mutu sumberdaya manusia melalui penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong peningkatan perekonomian masyarakat;

(2) Mendorong pengembangan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

(3) Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pemerataan pembangunan.

Tantangan pengelolaan belanja daerah dalam lima tahun mendatang (2019-2023) diarahkan pada perubahan struktur belanja dengan meningkatkan alokasi belanja modal dan transfer ke kabupaten/kota. Perubahan struktur belanja daerah diharapkan dapat meningkatkan percepatan pembangunan daerah. Langkah ini didukung dengan reformasi dan birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kinerja PNSD.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat disajikan ke dalam Tabel 3.9 berikut.

**Tabel 3. 9**
Proporsi Realisasi Belanja
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2017

| No | Uraian | Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) | Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) | Prosentase |
|---|---|---|---|---|
| | | (a) | (b) | (a)/(b)x100% |
| 1 | Tahun Anggaran 2015 | 2,042,142,540,998.50 | 6,009,010,039,469.16 | 33.98 |
| 2 | Tahun Anggaran 2016 | 1,460,148,671,920.10 | 6,562,781,924,554.36 | 22.25 |
| 3 | Tahun Anggaran 2017 | 3,061,716,868,726.59 | 8,219,845,721,399.17 | 37.25 |

*Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Adapun Realisasi Defisit Riil Anggaran berfluktuasi dari Rp.18.585.976.957,21 pada tahun 2015 menjadi Rp.23.877.589.599,21 pada tahun 2017 yang masing-masing ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.39.970.123.458,85 pada tahun 2015 dan Rp.64.859.465.661.33 pada tahun 2017sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.10.

**Tabel 3. 10**
Realisasi Defisit Riil Anggaran
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2017

| No | Uraian | 2015 (Rp) | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Realisasi Pendapatan Daerah | 5,990,424,062,511.95 | 6,582,780,929,676.33 | 8,195,968,131,799.96 |
| | Dikurangi realisasi: | | | |
| 2 | Belanja Daerah | 5,190,198,812,292.77 | 4,962,572,330,784.01 | 6,409,382,404,458.31 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 818,811,227,176.39 | 1,600,209,593,770.35 | 1,810,463,316,940.86 |
| A | Defisit riil | (18,585,976,957.21) | 19,999,005,121.97 | (23,877,589,599.21) |

*Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Pada tahun 2014 hingga 2016, Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran yang menyumbang proporsi dari defisit riil adalah Sisal Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya yang besarannya dapat dilihat pada Tabel 3.11.

**Tabel 3. 11**
Realisasi Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2017

| No | Uraian | Proporsi dari total defisit riil | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2015 (%) | 2016 (%) | 2017 (%) |
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 215.06 | 177.91 | 26.34 |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - |
| 3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan | - | - | - |
| 4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | - | - | - |
| 5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - |
| 6 | Penerimaan Piutang Daerah | - | 46.41 | - |

*Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

**Tabel 3. 12**
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2017

| No | Uraian | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA |
| 1 | Jumlah SiLPA | 39,970,123,458.85 | - | 35,579,268,821.76 | - | 64,859,465,661.33 | - |
| 2 | Pelampauan penerimaan PAD | na | na | na | na | na | na |
| 3 | Pelampauan penerimaan dana perimbangan | na | na | na | na | na | na |
| 4 | Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah | na | na | na | na | na | na |
| 5 | Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya | na | na | na | na | na | na |
| 6 | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | na | na | na | na | na | na |
| 7 | Kegiatan lanjutan | na | na | na | na | na | na |

*Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

## 3.3 Kerangka Pendanaan

### 3.3.1 Komponen Penerimaan Daerah

I. Penerimaan Asli Daerah (PAD) ,Terdiri dari :

1. Pajak Daerah, Berdasarkan UU no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah jenis pajak provinsi terdiri atas:

a) Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana

transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, untuk semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d) Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, untuk semua air yang teradapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun di darat.

e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

II. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang terdiri dari retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu dimana pemungutan objek retribusi tersebut dilakukan oleh masing-masing OPD di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

III. Pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan tahun-tahun sebelumnya dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan yang berasal dari perusahaan daerah (BUMD, BUMN) dan Perusahaan Swasta.

IV. Pendapatan yang bersumber dari Lain-lain PAD Yang Sah:

a. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan

pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.

b. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

c. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

d. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

e. Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

V. Pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

1. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden.
2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota.

3. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK.

6. Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah.

### 3.3.2 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah

Proyeksi Pendapatan daerah dilihat dari:

I. Pertumbuhan Pendapatan Daerah khusunya dari Pendapatan Pajak Daerah

**Tabel 3.13**
Pertumbuhan Pajak Daerah
Tahun 2014-2017 (Unit)

| Uraian | Pertumbuhan | | | | Rata-rata | Kontribusi | | | | Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| **Pajak Daerah** | **20,46** | **2,52** | **2,33** | **19,17** | **11,12** | | | | | |
| Pajak Kendaraan Bermotor* | - | 5,07 | 7,79 | 3,28 | 4,04 | 33,10 | 33,92 | 35,73 | 30,97 | 33,43 |
| Bea Balik Nama Kendaraan* Bermotor | (2,34) | (12,93) | (11,78) | 52,92 | 6,47 | 30,34 | 25,77 | 22,22 | 28,51 | 26,71 |
| Pajak Bahan Bakar** Kendaraan Bermotor | 16,38 | 3,21 | (15,95) | 30,66 | 8,58 | 26,09 | 26,26 | 21,57 | 23,65 | 24,39 |
| Pajak Air Permukaan | 9,60 | 22,83 | (2,95) | 56,22 | 21,42 | 0,25 | 0,30 | 0,28 | 0,37 | 0,30 |
| Pajak Rokok | - | 37,99 | 50,31 | (2,63) | - | 10,21 | 13,75 | 20,19 | 16,50 | 15,16 |

*Sumber: Hasil Analisis 2018*

II. Pertumbuhan Kendaraan Baru

Potensi pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (berpotensi 11,21%) dengan melihat rata-rata Pertumbuhan Taahun 2015-2017 kendaraan Roda 2 (R2) sebesar 11,30% dan kendaraan Roda empat sebesar Rp.10,76% (lihat Tabel 3.14)

**Tabel 3. 14**
Pertumbuhan Kendaraan Baru
Tahun 2016-2017 (Unit)




| JENIS | 2015 | 2016 | 2017 | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 112.793 | 107.962 | 136.991 | 11,30 % |
| R4 | 24.792 | 23.682 | 29.839 | 10,76 % |
| JUMLAH | 137.528 | 131.644 | 166.830 | 11,21 % |

*Sumber: Bapenda Provinsi Sumatera Selatan,2018*

III. Jumlah Unit Kendaraan Bermotor

**Tabel 3.15**
Rekap Unit kendaraan yang aktif membayar pajak dan Rekap sementara Jumlah Tunggakan PKB Tahun 2013-2017 Provinsi Sumatera Selatan

| Tahun | Unit Kendaraan yang aktif Membayar Pajak | Unit Kendaraan yang Menunggak Pajak | Total Jumlah Unit Kendaraan |
|---|---|---|---|
| **2013** | 1.363.931 | 230.437 | 1.594.368 |
| **2014** | 1.341.221 | 225.881 | 1.567.102 |
| **2015** | 1.253.762 | 232.112 | 1.485.874 |
| **2016** | 1.268.267 | 265.218 | 1.533.485 |
| **2017** | 1.138.113 | 234.135 | 1.372.248 |

*Sumber: Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2018*

Dari data Tabel 3.15 di atas dimana jumlah unit kendaraan yang tidak membayar Pajak Tahun 2017 sebanyak 1.372.248 unit kendaraan, maka ini menjadi potensi untuk meningkatan Pajak Kendaaran Bermotor.

### 3.3.3 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 2019-2023, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun.

Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran suatu OPD harus disertai sasaran dan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; serta memperhatikan kondisi keuangan daerah. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa pengendalian,

pengawasan, evaluasi dan pelaporan dilakukan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dearah dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pendapatan daerah bersumber dari:

A. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari
   1. Pajak Daerah

      Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
   2. Retribusi Daerah

      Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ada 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
   3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

      Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN dan bagian laba tas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.
   4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

B. Dana Perimbangan

   Sumber dana perimbangan, yaitu:
   1. Dana Bagi Hasil, terdiri atas bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); bagian daerah dari penerimaan Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam.
   2. Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam batas-batas arahan pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi ketimpangan horizontal antar daerah.
   3. Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu bantuan khusus yang digunkan untuk kegiatan pembangunan yang sasarannya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi ketimpangan vertical antara pusat dan daerah.

### 3.3.3.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan pertimbangan perkembangan keuangan daerah, maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2019-2023 diarahkan pada hal-hal berikut.

(1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:

a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;

c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;

d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penerimaan Pendapatan Asli Daerah guna peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan melalui pembenahan tata kelola administrasi dan pengawasan di lapangan secara berkala;

e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah, menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan pajak kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Provinsi Sumatera Selatan;

f. Memperkuat proses pemungutan pajak daerah melalui penyusunan produk hukum, penyesuaian tarif pajak serta peningkatan sumberdaya aparatur;

g. Pemanfaatan teknologi dalam sosialisasi pajak, penerapan sistem pelayanan dan pelaporan secara online dan pengembangan/up grade aplikasi samsat dan non samsat;

h. Terus melanjutkan dan mengembangkan kerjasama dengan institusi lain dalam upaya mengoptimalkan pendapatan seperti :
   - Pendampingan korsupgah/deputi pencegahan KPK bidang Optimalisasi Pendapatan daerah
   - Kerjasama dengan instansi lain seperti disdukcapil dalam penerapan pembayaran pajak berbasis Ktp-elektronik, BPH-Migas,

Kerjasama pertukaran data konsumsi/pendistribusian bahan bakar

- Pembentukan Tim OPAD ( Pol PP , Biro Hukum, PU PSDA dan PTSP)

i. Pengembangan sistem pelayanan baru yang memudahkan dan menjangkau proses pembayaran pajak secara lebih luas;

j. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah seperti gedung, asrama, aula dan asset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan aset tersebut;

k. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi dengan OPD pemungut retribusi daerah;

l. Sosialisasi terhadap peraturan yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi;

m. Menggali objek pemungutan retribusi baru dan memperbaiki sistem tarif retribusi;

n. Mengevaluasi besaran penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada perusahaan-perusahaan milik daerah, Perusahaan Milik Negara, Perusahaan Milik Swasta, dengan mempertimbangkan realisasi PAD dari kontribusi serta mengevaluasi Business Plan dari masing-masing perusahaan-perusahaan tersebut ;

o. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.

p. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah dengan melalui :

- Melakukan penyehatan internal perusahaan baik dengan cara perampingan jumlah tenaga kerja dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia perusahaan, serta melakukan efisiensi pengeluaran rutin perusahaan;
- Memperluas cakupan pelayanan perusahaan dengan membuka kantor cabang di Kabupaten/Kota yang potensial;
- Memperluas cakupan bidang usaha dari perusahaan, antara lain BPR Sriwijaya juga berpotensi untuk melakukan pembiayaan disektor pertanian atau agrobisnis dan PDPDE berpotensi untuk memperluas usaha di sektor hulu migas;

- Menyusun Rencana Pengembangan Usaha (Bussiness Plan) perusahaan untuk jangka menengah;
- Memperkuat pengawasan dan pembinaan BUMD oleh Pemerintah Provinsi melalui Biro Perekonomian
- Menambah stimulan pembiayaan untuk perusahaan yang baru berdiri atau stimulan untuk perusahaan yang memiliki rencana pengembangan usaha yang layak secara sekonomi dan finansial
- Mendorong BUMD untuk melakukan kerjasama usaha dengan investor baik dalam maupun luar negri

(2) Mengupayakan peningkatan penerimaaan dari Dana Perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil.

a. Melakukan rekonsiliasi antara pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota penghasil sebagai dasar penyaluran dana perimbangan termasuk juga melakukan upaya untuk mengusulkan revisi Regulasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) sehingga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar wilayah eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA). ;

b. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;

c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;

d. Mengupayakan peningkatan Dana Alokasi Khusus.

(3) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan berbagai asset daerah;

(4) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah terutama dari infrastruktur strategis yang baru dibangun.

Berdasarkan hasil evaluasi keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2017, maka dapat disiapkan asumsi penghitungan perkiraan pendapatan daerah tahun 2019-2023 sebagai berikut:

(1) Rata-rata Pertumbuhan PAD selama tahun 2019-2023 adalah sebesar 5,69 persen per tahun dengan rincian: (a) rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah sebesar 3,39 persen, (b) rata-rata pertumbuhan Retribusi Daerah sebesar 3,83 persen, (c) rata-rata pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 1,17 persen

(2) Rata-rata Pertumbuhan Dana Perimbangan selama tahun 2019-2023 adalah sebesar 7,40 persen per tahun.

(3) Rata-rata Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan yang Sah selama tahun 2019-2023 adalah sebesar 10,23 persen per tahun yang didukung oleh peningkatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Pendapatan Hibah.

Pertimbangan lain yang mendasari penetapan proyeksi 5 tahun kedepan juga memperhatikan tingkat capaian 5 tahun terakhir, untuk capaian PAD 5 tahun terakhir dengan pertumbuhan sebesar 10,99% didukung oleh tingginya pertumbuhan pajak daerah sebesar 11,12% karena adanya kebijakan kenaikan pajak pada medio tahun 2017 yang mengakibatkan lonjakan pertumbuhan tahun 2017. Akan tetapi pada proyeksi 5 tahun kedepan penetapan target dilakukan dengan tingkat rasionalitas yang cukup dengan memperhatikan realisasi tahun terakhir dan perekonomian masyarakat yang masih stagnat cenderung menurun karena turunnya nilai jual komoditas pertanian didaerah.

Begitu pun dengan penetapan target Dana Perimbangan telah dilakukan dengan hati-hati mengingat lonjakan pertumbuhan 5 tahun terakhir diakibatkan karena adanya pelimpahan dana untuk operasinal sekolah menengah atas yang telah menjadi kewenangan provinsi serta mempertimbangkan juga realisasi transfer pemerintah pusat dalam 5 tahun terakhir hanya tahun 2016 yang ditransfer penuh atau terealisasi 100%, selebihnya tidak pernah tercapai 100 persen. Kehati-hatian dalam penetapan target perlu dilakukan mengingat penerimaan daerah yang tidak tercapai akan mengganggu pembiayaan pembangunan yang akan dilakukan sebagaimana yang terjadi dalam 5 tahun terakhir dari tahu 2013- 2017, target pendapatan Provinsi Sumatera Selatan tidak pernah tercapai 100 % dan baru pada tahun 2018 dapat tercapai 100%.

Dengan berbagai kebijakan dan asumsi tersebut, pendapatan daerah diperkirakan akan meningkat dari Rp. 9.196.477.924.456,14 pada tahun 2018 menjadi Rp.12.127.449.930.221,00 pada tahun 2023 (lihat Tabel 3.16).

**Tabel 3. 16**
Proyeksi Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018-2023

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PENDAPATAN** | **9.196.477.924.456,14** | **9.760.923.645.962,25** | **10.193.684.382.340,00** | **10.778.569.681.006,00** | **11.424.545.758.456,00** | **12.127.449.930.221,00** |
| **1.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **3.449.590.628.837,14** | **3.329.244.876.962,25** | **3.462.128.767.192,00** | **3.603.159.125.085,00** | **3.749.605.087.361,00** | **3.906.447.325.910,00** |
| 1.1.1. | Pendapatan Pajak Daerah | 2.990.093.000.000,00 | 3.017.811.000.000,00 | 3.140.000.000.000,00 | 3.265.600.000.000,00 | 3.396.224.000.000,00 | 3.532.072.960.000,00 |
| 1.1.2. | Hasil Retribusi Daerah | 10.618.399.000,00 | 10.883.998.600,00 | 11.198.546.159,00 | 11.629.690.186,00 | 12.187.915.315,00 | 12.815.592.954,00 |
| 1.1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 86.765.902.171,00 | 64.024.469.697,00 | 67.569.228.058,00 | 75.024.251.142,00 | 79.749.970.571,00 | 87.095.700.047,00 |
| 1.1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 362.113.327.666,14 | 236.525.408.665,25 | 243.360.992.975,00 | 250.905.183.757,00 | 261.443.201.475,00 | 274.463.072.909,00 |
| **1.2.** | **DANA PERIMBANGAN** | **5.676.685.384.299,00** | **6.335.428.531.000,00** | **6.632.523.745.270,00** | **7.073.308.698.079,00** | **7.568.907.891.724,00** | **8.110.505.844.929,00** |
| 1.2.1. | Bagi Hasil Pajak | 832.710.280.807,00 | 881.241.580.000,00 | 891.416.024.840,00 | 944.900.986.330,00 | 1.011.044.055.373,00 | 1.081.817.139.249,00 |
| 1.2.2 | Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak | 907.055.046.492,00 | 1.352.490.092.000,00 | 1.370.339.547.480,00 | 1.452.559.920.328,00 | 1.554.239.114.751,00 | 1.663.035.852.784,00 |
| 1.2.2. | Pendapatan Dana Alokasi Umum | 1.697.897.817.000,00 | 1.743.742.960.000,00 | 1.858.132.498.176,00 | 1.987.830.146.548,00 | 2.127.177.039.821,00 | 2.287.566.188.624,00 |
| 1.2.3. | Pendapatan Dana Alokasi Khusus | 2.239.022.240.000,00 | 2.357.953.899.000,00 | 2.512.635.674.774,00 | 2.688.017.644.873,00 | 2.876.447.681.779,00 | 3.078.086.664.272,00 |
| **1.3.** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | **70.201.911.320,00** | **96.250.238.000,00** | **99.031.869.878,00** | **102.101.857.842,00** | **106.032.779.371,00** | **110.496.759.382,00** |
| 1.3.1. | Pendapatan Hibah | 5.016.411.320,00 | 29.203.000.000,00 | 30.046.966.700,00 | 30.978.422.667,00 | 32.171.091.940,00 | 33.525.494.911,00 |
| 1.3.2. | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 64.750.000.000,00 | 66.475.238.000,00 | 68.396.372.378,00 | 70.516.659.921,00 | 73.231.551.328,00 | 76.314.599.639,00 |
| 1.3.3. | Pendapatan Lainnya | 435.500.000,00 | 572.000.000,00 | 588.530.800,00 | 606.775.254,00 | 630.136.103,00 | 656.664.832,00 |

*Sumber: Bapenda, 2018*

### 3.3.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan redefinisi dan reposisi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh OPD dengan berbagai langkah.

(1) alokasi belanja dalam dokumen anggaran setiap unit satuan kerja harus dapat menjamin keselarasan dan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus mampu menghasilkan keluaran dan dampak positif yang menjadi target daerah untuk dicapai dalam lima tahun;

(2) alokasi anggaran dalam dokumen anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus secara jelas menunjukkan keselarasan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi setiap unit satuan kerja dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Hal ini harus dilakukan untuk menjamin setiap alokasi dana publik untuk membiayai proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD), dilaksanakan oleh institusi pemerintah yang berkompeten dan bertanggungjawab dalam proses pencapaiannya. Langkah

ini harus dilakukan untuk mencegah inefisiensi alokasi yang disebabkan oleh proses kerja yang tumpang tindih, tidak terarah, tidak konsisten dengan perencanaan tugas pokok dan fungsi serta tidak secara substansial memberikan kontribusi kepada pencapaian sasaran kebijakan daerah.

(3) seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus melakukan penilaian kembali dan penghematan pada kegiatan yang bersifat tidak substansif dalam mendukung pencapaian keluaran dan hasil. Sebaliknya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengidentifikasikan keluaran atau hasil yang sangat krusial untuk mencapai sasaran kebijakan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga alokasi anggaran menghasilkan secara nyata peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2019-2023 mengutamakan pada pencapaian hasil program dan kegiatan melalui belanja langsung dengan arah sebagai berikut.

(1) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diterapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(2) Meningkatkan wajib belajar 12 tahun melalui sekolah gratis bagi masyarakat miskin dan alokasi anggaran fungsi pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total belanja daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan prioritas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

(3) Meningkatkan alokasi anggaran fungsi kesehatan minimal 10 persen dari total belanja daerah diluar gaji.

(4) Mengoptimalkan belanja langsung untuk membiayai belanja modal yang dapat memberikan dampak berganda bagi pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum seperti pembangunan jalan dan jembatan, sarana kelistrikan, sarana air bersih, sarana transportasi dan lainnya.

(5) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja hibah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Meningkatkan pegawasan penuh terhadap belanja hibah yang merupakan belanja pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima

hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Dimana proyeksi belanja hibah diberikan untuk Badan/Lembaga/Organisasi seperti hibah sekolah gratis, hibah kuliah gratis, hibah untuk program pelaksanaan PILKADA, hibah organisasi keagamaan dan hibah organisasi kemasyarakatan serta hibah lain yang mendukung pencapaian target pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(7) Meningkatkan efektivitas bantuan subsidi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberikan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah perdesaan, tertinggal, dan daerah pemekaran baru.

(8) Meningkatkan sinergi anggaran melalui dana sharing antara APBN dan APBD Provinsi, dan antara APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

(9) Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien terutama kegiatan yang lebih dari 1 tahun (*multiyears*) yang berbasis kinerja dengan tetap memperhatikan ketentuaan dalam peraturan peundangan yang berlaku.

Belanja daerah pada tahun 2023 diproyeksikan meningkat menjadi sebesar Rp.12.135.735.068.498,70. Pada Tahun 2023 juga diproyeksikan terjadi peningkatan belanja modal, yang diharapkan akan mendorong percepatan penyediaan pelayanan dasar dan pembangunan ekonomi Sumatera Selatan.

Proyeksi belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan hingga tahun 2023 secara rinci pada Tabel 3.17.

**Tabel 3. 17**
Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018-2023

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **BELANJA** | **8.676.818.928.257,95** | **10.167.322.040.656,20** | **10.185.548.163.150,20** | **10.774.524.180.839,00** | **11.425.878.654.587,70** | **12.135.735.068.498,70** |
| **2.1.** | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | **5.290.178.657.469,00** | **6.648.159.295.321,25** | **5.886.141.306.169,08** | **6.027.985.681.449,92** | **6.221.157.938.553,07** | **6.420.612.856.323,760** |
| 2.1.1. | Belanja Pegawai | 1.768.433.252.810,00 | 1.803.716.819.834,31 | 1.839.791.156.231,00 | 1.876.586.979.355,62 | 1.914.118.718.942,73 | 1.952.401.093.321,58 |
| 2.1.2. | Belanja Subsidi | - | 25.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | 35.000.000.000,00 | 40.000.000.000,00 | 45.000.000.000,00 |
| 2.1.3. | Belanja Hibah | 2.265.696.533.459,00 | 1.571.409.184.520,00 | 1.557.959.340.108,75 | 1.538.588.351.773,50 | 1.563.588.351.773,50 | 1.587.588.351.773,50 |
| 2.1.4. | Belanja Bantuan Sosial | - | - | | | | |
| 2.1.5. | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 1.145.725.100.000,00 | 2.510.446.875.374,39 | 1.649.809.815.957,16 | 1.732.300.306.755,01 | 1.818.915.322.092,76 | 1.909.861.088.197,40 |
| 2.1.6. | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota / Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 102.823.771.200,00 | 718.648.565.592,55 | 777.080.993.872,18 | 812.435.043.565,79 | 849.806.795.744,08 | 889.297.135.531,28 |
| 2.1.7. | Belanja Tidak Terduga | 7.500.000.000,00 | 18.937.850.000,00 | 31.500.000.000,00 | 33.075.000.000,00 | 34.728.750.000,00 | 36.465.187.500,00 |
| **2.2.** | **BELANJA LANGSUNG** | **3.386.640.270.788,95** | **3.519.162.745.335,00** | **4.299.406.856.981,09** | **4.746.538.499.389,09** | **5.204.720.716.034,66** | **5.715.122.212.174,96** |
| 2.2.1. | Belanja Pegawai | 11.395.776.940,00 | 21.346.410.141,00 | 36.646.262.388,81 | 38.825.904.637,78 | 41.483.396.968,54 | 44.537.777.772,37 |
| 2.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.686.382.500.884,00 | 1.470.598.225.067,00 | 1.500.799.325.606,92 | 1.510.799.325.606,92 | 1.530.799.325.606,92 | 1.550.799.325.606,92 |
| 2.2.3. | Belanja Modal | 1.688.861.992.964,95 | 2.027.218.110.127,00 | 2.761.961.268.985,36 | 3.196.913.269.144,39 | 3.632.437.993.459,20 | 4.119.785.108.795,67 |
| **3** | **PEMBIAYAAN** | **601.622.748.322,43** | **406.398.394.694,00** | **132.063.780.810,16** | **150.174.499.833,01** | **170.974.896.131,74** | **194.891.338.277,72** |
| 3.1. | Penerimaan Pembiayaan | 40.981.876.062,12 | 406.398.394.694,00 | 61.963.780.810,16 | 73.064.499.833,01 | 86.153.896.131,74 | 101.588.238.277,72 |
| 3.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 560.640.872.260,31 | - | 70.100.000.000,00 | 77.110.000.000,00 | 84.821.000.000,00 | 93.303.100.000,000 |

*Catatan: Tahun 2019 ada pembayaran Hutang Bagi Hasil sebesar Rp.1.064.721.775.374,09*
*Tahun 2018 ada pembayaran Hutang Bagi Hasil sebesar Rp.490.540.872.260,31*
*Sumber: Hasil Analisis 2018*

Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 secara rinci pada Tabel 3.18.

**Tabel 3. 18**
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PENDAPATAN** | **9.196.477.924.456,14** | **9.760.923.645.962,25** | **10.193.684.382.340,00** | **10.778.569.681.006,00** | **11.424.545.758.456,00** | **12.127.449.930.221,00** |
| **1.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **3.449.590.628.837,14** | **3.329.244.876.962,25** | **3.462.128.767.192,00** | **3.603.159.125.085,00** | **3.749.605.087.361,00** | **3.906.447.325.910,00** |
| 1.1.1. | Pendapatan Pajak Daerah | 2.990.093.000.000,00 | 3.017.811.000.000,00 | 3.140.000.000.000,00 | 3.265.600.000.000,00 | 3.396.224.000.000,00 | 3.532.072.960.000,00 |
| 1.1.2. | Hasil Retribusi Daerah | 10.618.399.000,00 | 10.883.998.600,00 | 11.198.546.159,00 | 11.629.690.186,00 | 12.187.915.315,00 | 12.815.592.954,00 |
| 1.1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 86.765.902.171,00 | 64.024.469.697,00 | 67.569.228.058,00 | 75.024.251.142,00 | 79.749.970.571,00 | 87.095.700.047,00 |
| 1.1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 362.113.327.666,14 | 236.525.408.665,25 | 243.360.992.975,00 | 250.905.183.757,00 | 261.443.201.475,00 | 274.463.072.909,00 |
| **1.2.** | **DANA PERIMBANGAN** | **5.676.685.384.299,00** | **6.335.428.531.000,00** | **6.632.523.745.270,00** | **7.073.308.698.079,00** | **7.568.907.891.724,00** | **8.110.505.844.929,00** |
| 1.2.1. | Bagi Hasil Pajak | 832.710.280.807,00 | 881.241.580.000,00 | 891.416.024.840,00 | 944.900.986.330,00 | 1.011.044.055.373,00 | 1.081.817.139.249,00 |
| 1.2.2 | Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak | 907.055.046.492,00 | 1.352.490.092.000,00 | 1.370.339.547.480,00 | 1.452.559.920.328,00 | 1.554.239.114.751,00 | 1.663.035.852.784,00 |
| 1.2.2. | Pendapatan Dana Alokasi Umum | 1.697.897.817.000,00 | 1.743.742.960.000,00 | 1.858.132.498.176,00 | 1.987.830.146.548,00 | 2.127.177.039.821,00 | 2.287.566.188.624,00 |
| 1.2.3. | Pendapatan Dana Alokasi Khusus | 2.239.022.240.000,00 | 2.357.953.899.000,00 | 2.512.635.674.774,00 | 2.688.017.644.873,00 | 2.876.447.681.779,00 | 3.078.086.664.272,00 |
| **1.3.** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | **70.201.911.320,00** | **96.250.238.000,00** | **99.031.869.878,00** | **102.101.857.842,00** | **106.032.779.371,00** | **110.496.759.382,00** |
| 1.3.1. | Pendapatan Hibah | 5.016.411.320,00 | 29.203.000.000,00 | 30.046.966.700,00 | 30.978.422.667,00 | 32.171.091.940,00 | 33.525.494.911,00 |
| 1.3.2. | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 64.750.000.000,00 | 66.475.238.000,00 | 68.396.372.378,00 | 70.516.659.921,00 | 73.231.551.328,00 | 76.314.599.639,00 |
| 1.3.3. | Pendapatan Lainnya | 435.500.000,00 | 572.000.000,00 | 588.530.800,00 | 606.775.254,00 | 630.136.103,00 | 656.664.832,00 |
| **2** | **BELANJA** | **8.676.818.928.257,95** | **10.167.322.040.656,20** | **10.185.548.163.150,20** | **10.774.524.180.839,00** | **11.425.878.654.587,70** | **12.135.735.068.498,70** |
| **2.1.** | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | **5.290.178.657.469,00** | **6.648.159.295.321,25** | **5.886.141.306.169,08** | **6.027.985.681.449,92** | **6.221.157.938.553,07** | **6.420.612.856.323,760** |
| 2.1.1. | Belanja Pegawai | 1.768.433.252.810,00 | 1.803.716.819.834,31 | 1.839.791.156.231,00 | 1.876.586.979.355,62 | 1.914.118.718.942,73 | 1.952.401.093.321,58 |
| 2.1.2. | Belanja Subsidi | - | 25.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | 35.000.000.000,00 | 40.000.000.000,00 | 45.000.000.000,00 |
| 2.1.3. | Belanja Hibah | 2.265.696.533.459,00 | 1.571.409.184.520,00 | 1.557.959.340.108,75 | 1.538.588.351.773,50 | 1.563.588.351.773,50 | 1.587.588.351.773,50 |
| 2.1.4. | Belanja Bantuan Sosial | - | - | | | | |
| 2.1.5. | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 1.145.725.100.000,00 | 2.510.446.875.374,39 | 1.649.809.815.957,16 | 1.732.300.306.755,01 | 1.818.915.322.092,76 | 1.909.861.088.197,40 |
| 2.1.6. | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota / Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 102.823.771.200,00 | 718.648.565.592,55 | 777.080.993.872,18 | 812.435.043.565,79 | 849.806.795.744,08 | 889.297.135.531,28 |
| 2.1.7. | Belanja Tidak Terduga | 7.500.000.000,00 | 18.937.850.000,00 | 31.500.000.000,00 | 33.075.000.000,00 | 34.728.750.000,00 | 36.465.187.500,00 |
| **2.2.** | **BELANJA LANGSUNG** | **3.386.640.270.788,95** | **3.519.162.745.335,00** | **4.299.406.856.981,09** | **4.746.538.499.389,09** | **5.204.720.716.034,66** | **5.715.122.212.174,96** |
| 2.2.1. | Belanja Pegawai | 11.395.776.940,00 | 21.346.410.141,00 | 36.646.262.388,81 | 38.825.904.637,78 | 41.483.396.968,54 | 44.537.777.772,37 |
| 2.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.686.382.500.884,00 | 1.470.598.225.067,00 | 1.500.799.325.606,92 | 1.510.799.325.606,92 | 1.530.799.325.606,92 | 1.550.799.325.606,92 |
| 2.2.3. | Belanja Modal | 1.688.861.992.964,95 | 2.027.218.110.127,00 | 2.761.961.268.985,36 | 3.196.913.269.144,39 | 3.632.437.993.459,20 | 4.119.785.108.795,67 |
| **3** | **PEMBIAYAAN** | **601.622.748.322,43** | **406.398.394.694,00** | **132.063.780.810,16** | **150.174.499.833,01** | **170.974.896.131,74** | **194.891.338.277,72** |
| 3.1. | Penerimaan Pembiayaan | 40.981.876.062,12 | 406.398.394.694,00 | 61.963.780.810,16 | 73.064.499.833,01 | 86.153.896.131,74 | 101.588.238.277,72 |
| 3.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 560.640.872.260,31 | - | 70.100.000.000,00 | 77.110.000.000,00 | 84.821.000.000,00 | 93.303.100.000,000 |

*Sumber: Hasil Analisis 2018*

### 3.3.3.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

**(1) Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman

daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

a) Mencegah terjadinya Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dengan menerapkan perencanaan dan penganggaran secara terpadu dan konsisten, serta prinsip perencanaan dan anggaran berbasis kinerja.

b) Mengembangkan skema pengelolaan pinjaman daerah baik dari dalam maupun luar negeri melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program dan kegiatan strategis lainnya.

**(2) Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun angaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

a) Mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui pembiayaan untuk penyertaan modal BUMD. Penyerataan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

b) Menjamin kesinambungan penyelennggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran.

c) Mendukung penyertaan modal dan pemberian pinjaman pada saat terjadi surplus anggaran dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan fiskal daerah dan ketentuang peraturan perundangan yang berlaku.

**(3) Pengelolaan Dana Masyarakat dan Mitra Pihak Ketiga**

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus mengoptimalkan pengelolaan dana masyarakat dan mitra pihak ketiga untuk mendukung proses pembangunan Sumatera Selatan. Kebijakan pengelolaan dana masyarakat dan mitra pihak ketiga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 diarahkan untuk membangun kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/bdan usaha dan masyarakat dalam pembangunan Sumatera Selatan. Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

a) Mengembangkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk menyederhanakan proses perijinan dalam konsep Mall PTSP;

b) Melakukan harmonisasi peraturan daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Sumatera Selatan;

c) Mengelola kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pihak swasta atau dengan pihak pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati bersama terutama melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha baik di sektor Infrastruktur Konektivitas dan Energi, Infrastruktur Fasilitas Perkotaan dan Infrastruktur Fasilitas Sosial;

d) Meningkatkan kerjasama antara BUMD dan pihak swasta termasuk mendorong berdirinya BUMD baru yang berkaitan dengan sektor pertanian (BUMD Agro);

e) Mendorong kerjasama investasi regional, nasional dan internasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kegiatan yang melibatkan peran masyarakat luas seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; serta industri pengolahan hasil tambang;

f) Meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pemungutan, dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat;

g) Mengembangkan promosi secara aktif melalui penguatan jaringan kerjasama regional, nasional dan internasional dan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi.

### 3.3.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan digunakan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunannya. Perkiraan kapasitas rill kemmapuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan hingga tahun 2023 secara rinci pada Tabel 3.19.

**Tabel 3. 19**
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Derah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018-2023

| No | Uraian | Proyeksi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 1 | Pendapatan Daerah | 9.196.477.924.456,14 | 9.760.923.645.962,25 | 10.193.684.382.340,00 | 10.778.569.681.006,00 | 11.424.545.758.456,00 | 12.127.449.930.221,000 |
| 2 | Pencairan dana cadangan | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Penerimaan Pembiayaan | 40.981.876.062,12 | 406.398.394.694,00 | 61.963.780.810,16 | 73.064.499.833,01 | 86.153.896.131,74 | 101.588.238.277,73 |
| | **Total Penerimaan** | **9.237.459.800.518,26** | **10.167.322.040.656,20** | **10.255.648.163.150,20** | **10.851.634.180.839,00** | **11.510.699.654.587,70** | **12.229.038.168.498,70** |
| | Dikurangi: | | | | | | |
| 4 | Belanja Tidak Langsung | 5.290.178.657.469,00 | 6.648.159.295.321,25 | 5.886.141.306.169,08 | 6.027.985.681.449,92 | 6.221.157.938.553,07 | 6.420.612.856.323,76 |
| 5 | Pengeluaran Pembiayaan | 560.640.872.260,31 | - | 70.100.000.000,00 | 77.110.000.000,00 | 84.821.000.000,00 | 93.303.100.000,000 |
| | **Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah** | **3.386.640.270.788,95** | **3.519.162.745.335,00** | **4.299.406.856.981,09** | **4.746.538.499.389,09** | **5.204.720.716.034,66** | **5.715.122.212.174,96** |

*Sumber: Hasil Analisis 2018*

Berdasarkan proyeksi tahun 2018-2023, besaran Kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah akan dipergunakan pada beberapa prioritas, yang dapat dilihat pada Tabel 3.20, yaitu:

**Tabel 3. 20**
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023

| No | Uraian | Proyeksi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| | **Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah** | **3.386.640.270.788,95** | **3.519.162.745.335,00** | **4.299.406.856.981,09** | **4.746.538.499.389,09** | **5.204.720.716.034,66** | **5.715.122.212.174,96** |
| 1 | Prioritas I (Untuk Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar terkait urusan Wajib Pelayanan Dasar) | 2.658.394.239.998 | 2.920.748.079.700 | 3.028.549.546.044,17 | 3.392.642.778.840,59 | 3.763.987.882.302,91 | 4.157.762.744.440,29 |
| 2 | Prioritas II (Untuk Membiayai Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah diluar Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar ) | 385.553.551.267 | 322.423.075.235 | 842.821.480.548,92 | 959.508.525.548,50 | 1.037.331.007.059,75 | 1.106.243.153.036,39 |
| 3 | Prioritas III ( Untuk Membiayai Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya) | 342.692.479.524 | 275.991.590.400 | 428.035.830.388,00 | 394.387.195.000,00 | 403.401.826.672,00 | 451.116.314.698,28 |

*Sumber: Hasil Analisis 2018*

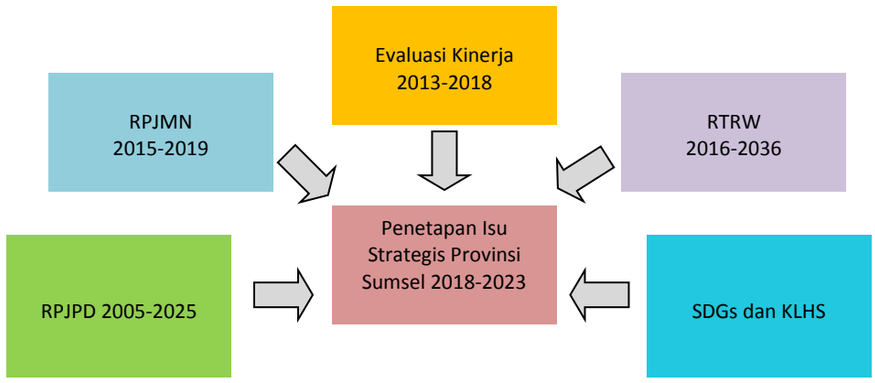
# BAB IV

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Dalam Bab IV ini diuraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, khususnya untuk jangka waktu 2019-2023. Komponen pembentuk isu-isu strategis di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari: analisis terhadap hasil pembangunan periode sebelumnya untuk mengetahui permasalahan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan dan faktor penentu keberhasilannya; hasil telaah terhadap dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; hasil telaah terhadap dokumen RPJMN 2015-2019; hasil telaah isu dari dunia internasional; dan analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/bisnis, sosial budaya, penemuan-penemuan teknologi, dan lain-lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun penjelasan dalam bentuk skematik disajikan dalam gambar di bawah ini.

**Gambar 4.1**

Komponen Pembentuk Isu Strategis Provinsi Sumatera Selatan




## 4.1. Permasalahan Pembangunan

### 4.1.1. Evaluasi Kinerja Pembangunan 2013-2018

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur Pemerintah Daerah telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dalam membangun daerah secara sistematik untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan pelayanan publik dan daya saing daerah dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah. Agenda pembangunan tersebut tentunya tertuang dalam suatu Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan

berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing serta mengintegrasikan dengan rencana tata ruang yang sesuai dengan dinamika perkembangan daerah. Rencana pelaksanaan pembangunan tersebut dijalankan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, upaya pembangunan tersebut menorehkan banyak keberhasilan yang diraih dan prestasi yang diukir dari kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan selama ini. Keberhasilan tersebut secara umum dapat meningkatkan tingk;at ekonomi, kehidupan sosial dan budaya serta peningkatan kualitas lingkungan. Namun demikian, di samping keberhasilan tersebut masih banyak program yang belum tuntas dan timbulnya masalah baru sebagai konsekuensi dari dinamika perkembangan daerah akibat dari pembangunan. Identifikasi permasalahan pembangunan Sumatera Selatan yang harus ditangani selama lima tahun mendatang (2018-2023) adalah sebagai berikut:

### 4.1.2. Permasalahan Indikator Makro

**Tabel 4.1**
Indikator Makro

| No | Indikator Kinerja | Satuan | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Status |
| 1 | PDRB Harga Berlaku | Rp.Triliun | 392,99 | 419,72 | Tercapai |
| 2 | PDRB Harga Konstan 2010 | Rp.Triliun | 297,54 | 298,57 | Tercapai |
| 3 | Pendapatan Per Kapita atas dasar harga konstan 2010 | Rp. Juta | 35,33 | 49,209 | Tercapai |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,80 | 6,04 | Tercapai |
| 5 | Inflasi | Persen | 4,00 | 2,74 | Tercapai |
| 6 | Pendapatan Daerah | Rp.Miliar | 8.318,10 | 9.343,16 | Tercapai |
| | Pendapatan Asli Daerah | Rp.Miliar | 3.135,01 | 3.267,21 | Tercapai |
| | Dana Perimbangan | Rp.Miliar | 5.163,40 | 5.513,02 | Tercapai |
| | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp.Miliar | 362,11 | 398,94 | Tercapai |
| 7 | Investasi: | | | | |
| | Nilai Investasi PMDN | Rp.Triliun | 11,11 | 7,45 | Tidak Tercapai |
| | Nilai Investasi PMA | Rp.Triliun | 14,58 | 15,613 | Tercapai |
| 8 | Jumlah Penduduk | Ribu jiwa | 8.372,64 | 8.217,55 | Tidak Tercapai |
| 9 | Laju Pertumbuhan penduduk | Persen | 1,85 | 3,04 | Tercapai |
| 10 | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 12,69 | 12,82 | Tidak Tercapai |
| 11 | Jumlah Penduduk Miskin | Jiwa | 1.048.954 | 1.076,400 | Tidak Tercapai |
| 12 | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | Skor | 2,14 | 2,40 | Tidak Tercapai |
| 13 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 4,00 | 4,23 | Tidak Tercapai (Tapi lebih baik dari Nas) |
| 14 | Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru) | Indeks | 68,50 | 69,39 | Tercapai |
| 15 | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 8,11 | 8,00 | Tidak Tercapai |
| 16 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,57 | 12,36 | Tidak Tercapai |
| 17 | Pengeluaran Per Kapita | Rp.000 | 10.220 | 10.652 | Tercapai |
| 18 | Angka Harapan Hidup | Tahun | 71,30 | 69,41 | Tidak Tercapai |
| 19 | Gini Rasio | Indeks | 0,350 | 0,341 | Tercapai |

1. **PDRB Harga Berlaku**

   PDRB Harga Berlaku di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 419,72 triliun pada tahun 2018 dan telah tercapai bahkan melampaui target yang ditentukan sebesar 392,99 triliun. Akan tetapi PDRB Sumatera Selatan masih lebih lambat tumbuh dibandingkan dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk dan mendorong balik pendapatan perkapita ke tingkat keseimbangan stabilnya *(low middle income trap)*. Sehingga upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ternyata diikuti oleh laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi lagi.

2. **PDRB Harga Konstan 2010**

   PDRB Harga Konstan 2010 di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2018 yang memiliki target sebesar 297,54 triliun telah tercapai,dengan angka realisasi pada Tahun 2018 sebesar 298,57 triliun.

3. **Pendapatan Per Kapita atas dasar Harga konstan 2010**

   Pendapatan Per Kapita atas dasar Harga konstan 2010 pada Tahun 2018 telah terealisasi sebesar 49,209 juta dari target yang di tentukan yaitu 35,33 juta.

4. **Pertumbuhan Ekonomi**

   Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Pada Tahun 2018 telah mencapai target yang ditentukan, realisasi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 6,04 % , lebih besar 0,24 % dari target yang ditentukan yaitu sebesar 5,80 %. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh 13,15%.

5. **Inflasi**

   Penekanan persentase Inflasi yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2018 telah berhasil dan mencapai target yang di tentukan yaitu 2,74 % dari target yang ditentukan yaitu 4,00%. Inflasi terjadi akibat kenaikan indeks harga beberapa kelompok pengeluaran, seperti di Kota Palembang (1.Bahan makanan, 2. Transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, 3. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, 4. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga, 5. Kesehatan, 6. Sandang Besar, 7. Makan Jadi, Minuman, Rokok dan tembakau. Kota Lubuklinggau (1. Bahan makanan, 2. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, 3. Transportasi dan komunikasi dan jasa keuangan, 4. Pendidikan, 5. Kesehatan, 6. Sandang)

6. **Pendapatan Daerah**

   Pendapatan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 secara keseluruhan telah mencapai target yang ditentukan, realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2018 sebesar 9.343,16

Milyar dari target yang ditentukan sebesar 8.318,10 Milyar. Penerimaan pendapatan daerah berasal dari 3 sumber penerimaan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar 3.267,01 Milyar dari target 3.135,01 Milyar, kemudian realisasi Dana Perimbangan 5.513,02 Milyar dari target yang ditentukan sebesar 5.163,40 Milyar dan penerimaan Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah juga telah mencapai target dengan realisasi sebesar 398,94 Milyar, dari target 362,11 Milyar.

7. **Investasi**

   Investasi yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2018 belum optimal dikarenakan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN masih fluktuatif. Nilai Investasi PMDN yang terealisasi sebesar 7,45 Triliun, belum mencapai Target sebesar 11,11 %, akan tetapi Nilai Investasi PMA telah mencapai target, dengan realisasi sebesar 15,613 Triliun, dengan target yang seharusnya dicapai adalah 14,58 Triliun. Permasalahan yang ada yaitu belum maksimalnya pelayanan perizinan dan investasi penanaman modal, belum berkembangnya perwilayahan industri sebagai potensi investasi unggulan daerah (KEK TAA, 5KI, 7 KPI dan 2 WPPI), dan belum optimalnya jumlah investor yang berinvestasi karena lemahnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor.

8. **Jumlah Penduduk**

   Jumlah Penduduk yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2018 adalah 8.217.551 jiwa

9. **Laju Pertumbuhan Penduduk**

   Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2018 sebesar 3,04 %.

10. **Persentase Penduduk Miskin**

    Persentase Penduduk Miskin yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan tahun 2018 adalah 12,69 % namun yang terealisasi di lapangan adalah 12,82 %.

11. **Jumlah Penduduk Miskin**

    Jumlah Penduduk Miskin yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2018, yang awalnya di targetkan sebesar 1.048.954 jiwa, namun yang terjadi dilapangan adalah 1.076.400, melebihi target jumlah penduduk miskin yang telah ditentukan. Sehingga diperlukan usaha yang lebih maksimal, agar angka jumlah penduduk miskin dapat turun dan sesuai dengan target yang ditentukan.

12. **Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)**

    Indeks Kedalaman Kemiskinan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2018 belum bisa mencapai target yang telah ditentukan. Realisasi

Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah 2,40 Skor, lebih tinggi dibanding skor maksimal target yang ditentukan yaitu 2,14.

**13. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran Terbuka juga masih menjadi problema di Provinsi Sumatera Selatan, Angka maksimal yang seharusnya menjadi target yaitu 4,00 %, namun pada Tahun 2018 hal tersebut tidak bisa tercapai, dengan realisasi sebesar 4,23% akan tetapi masih lebih baik dari angka nasional.

**14. Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)**

Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru) yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2018 telah berjalan dengan baik dan berhasil mencapai target yang ditentukan, realisasi yang terjadi adalah sebesar 69,39 Indeks dari target yang ditentukan sebesar 68,50 %.

**15. Rata-Rata Lama Sekolah**

Angka rata-rata lama sekolah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2018 belum mencapai target yang ditentukan, Rata-Rata Lama Sekolah yang terealisasi di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2018 selama 8,00 Tahun dari target 8,11 Tahun yang ditentukan.

**16. Harapan Lama Sekolah**

Harapan Lama Sekolah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2018 memiliki jangka waktu yang tinggi, yaitu 12,36 Tahun dan hal ini belum mencapai target yang ditentukan yaitu 12,57 Tahun. Sehingga Tingkat Pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat harus lebih di tingkatkan lagi, agar meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

**17. Pengeluaran Per Kapita**

Pengeluaran Per Kapita Provinsi Sumatera Selatan Pada Tahun 2018 telah melebihi target yang ditentukan yaitu 10.220 dengan realisasi 10.652.

**18. Angka Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2018 adalah 69,41 Tahun, hal tersebut belum bisa mencapai target yang ingin dicapai yaitu sebesar 71,30 Tahun.

**19. Gini Rasio**

Gini Rasio atau Tingkat Ketimpangan Pendapatan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2018 sebesar 0,341 Indeks, telah mencapai target yaitu 0,350 Indeks akan tetapi lebih rendah dibanding nasional 0,384 indeks.

**Tabel 4.2**

Indikator Kinerja Akhir RPJMD 2013-2018

| No | Misi | Capaian | | | | Total Indikator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | >100% | 100% | <100% | na | |
| 1 | Misi I.<br>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi | 31 | 29 | 40 | 0 | 100 Program |
| 2 | Misi II.<br>Meningkatkan Stabilitas Daerah | 8 | 15 | 29 | 0 | 52 Program |
| 3 | Misi III.<br>Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan | 29 | 9 | 44 | 0 | 82 Program |
| 4 | Misi IV.<br>Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan Pengelolaan Bencana | 4 | 9 | 7 | 0 | 20 Program |

**Tabel 4.3**

Permasalahan IKD per Misi

| MISI | PERMASALAHAN |
|---|---|
| ***Misi I*** | Terkait Peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah permasalahan yang terjadi antara lain, tidak tercapainya kerjasama investasi, rendahnya persentase pertumbuhan industri kreatif, peningkatan dana bagi hasil PNBP batubara tidak tercapai, rendahnya pemanfaatan sumberdaya geologi, rendahnya optimalisasi pengolahan dan pemasaran produk perikanan, dsb |
| ***Misi II*** | Terkait Pemantapan Stabilitas daerah, permasalahan yang terjadi adalah belum tercapainya kebijakan satu data dan satu peta, rendahnya persentase penanganan daerah rawan pangan, rendahnya perumusan kebijakan bidang kesra, rendahnya capaian peningkatan pendapatan daerah, rendahnya peningkatan kapasitas aparatur |
| ***Misi III*** | Terkait Peningkatan Pemerataan yang berkeadilan, permasalahan adalah tidak tercapainya peningkatan persentase pendidikan inklusi, Rata-rata Lama sekolah dan angka melek huruf masih di bawah target, jumlah SOP/SPM pendidikan tidak tercapai, tidak Sekolah sekolah masih belum mencapai, persentase peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan tidak tercapai, tidak tercapainya peningkatan jumlah PMKS penerima manfaat. |
| ***Misi IV*** | Terkait Pengelolaan Lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana, permaslahan yang terjadi adalah luasan inventarisasi sumber daya hutan, kelembagaan pengelolaan DAS Terpadu Musi, rendahnya jumlah kawasan banjir yang ditandatangani, jumlah penyerapan dan penyimpanan CO2 tidak tercapai karena UPTD KPH belum definitif, dll |

### 4.1.3. Permasalahan Per Urusan

**Tabel 4.4**

Tabel Resume Permasalahan Pada Kondisi Awal RPJMD 2019-2023

| NO | URUSAN | PERMASALAHAN | |
|---|---|---|---|
| **I** | **Urusan Wajib Pelayanan Dasar** | | |
| 1 | Pendidikan | a | Rata-rata lama sekolah di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan; RLS Sumsel Tahun 2018 sebesar 8,00 sementara Nasional sebesar 8,17 tahun; |
| | | b | Angka Harapan Lama Sekolah belum tercapai; Capaian Sumsel Tahun 2018 sebesar 12,36 tahun sedangkan nasional 12,91 tahun |
| | | c | Masih rendah Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK pada Tahun 2018 baru sebesar 59,87% sedangkan nasional 60,67% |
| | | d | Masih rendah persentase Sekolah yang terakreditasi A, baru 23,76% |
| | | e | Rasio guru/murid pendidikan menengah pada tahun 2018 untuk SMA sebesar 1:15 dan untuk SMK sebesar 1 : 17 (perbandingan antara guru (PNS + non PNS) dan murid), namun untuk perbandingan guru PNS dan murid masih belum mencukupi sebesar 1 : 37 untuk SMA dan 1:57 untuk SMK; |
| | | f | Kurang meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan di kabupaten/kota; |
| | | g | Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan; Data Tahun 2018 ada 2.934 ruang kelas kondisi baik, 3.843 ruang kelas kondisi rusak ringan dan 315 ruang kelas kondisi rusak berat |
| | | h | Belum seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan memiliki Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri; yaitu Kabupaten Empat Lawang, Musi Rawas Utara dan OKU Selatan belum memiliki SLB Negeri. |
| | | i | Angka kelulusan belum tercapai 100 %, baru sebesar 98,56%. |
| | | j | Masih kurangnya akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan mengenai Tahfidz Al-Qur'an dan seni baca tulis huruf Al-Qur'an, dan juga belum optimalnya dukungan terhadap peran Lembaga Pendidikan Tilawatil Al-Qur'an (LPTQ) Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. |
| 2 | Kesehatan | | |
| | | a | Masih rendahnya angka harapan hidup Sumsel. Pada Tahun 2018 sebesar 69,41 tahun, sedangkan nasional sebesar 71,20 Tahun. Rata-rata Harapan hidup kabupaten/kota dibawah usia harapan hidup Provinsi; |
| | | b | Kematian ibu tahun 2018 sebesar 120 kasus dari total 168.121 kelahiran hidup. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan belum mencapai target (93,11%). |
| | | c | Tingginya Kematian bayi; 497 kasus (2018) |
| | | d | Angka Kesembuhan Penderita TB Paru (BTA +) masih di bawah target (89%) |
| | | e | Meningkatnya jumlah kasus HIV; Penderita HIV AIDS di Sumatera Selatan secara kumulatif dari tahun 2005 sampai tahun 2017 berjumlah 2.669 kasus, yang terdiri dari pengidap HIV berjumlah 1.263 jiwa dan penderita AIDS berjumlah 1.406 jiwa. |
| | | f | Masih rendahnya penduduk yang belum memiliki Jaminan Kesehatan, baru sebesar 58,4% |
| | | g | Rendahnya akses sanitasi (80,3%) dan air bersih (62,38%) |
| | | h | Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk) sebesar 2,1 % masih di atas target yang harus di bawah 1 %, kurang gizi dan Masih Tingginya angka stunting sebesar 22,8% (pemantauan status gizi, 2018), balita gizi kurang 10,20% |
| | | i | Masih banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakreditasi (yang telah terakreditasi sebesar 60%); |
| | | j | Masih kurang dan belum meratanya penempatan dokter (baru mencapai 11 orang per 100.000 penduduk); |

| NO | URUSAN | PERMASALAHAN | |
|---|---|---|---|
| | | k | Belum optimalnya dukungan terhadap peran Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP.UKS) Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. |
| 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | |
| | | a | Kondisi jalan mantap baru 61,22 %, jalan tidak mantap tahun masih tinggi 38,78% dengan kondisi rusak ringan sepanjang 224,6 km' dan rusak berat sepanjang 362,71 km; |
| | | b | Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi terus meningkat (43,69%), kondisi rusak di atas 50% di Kab. Muara Enim, Lahat, Pagar Alam; |
| | | c | Belum dimanfaatkan potensi daerah irigasi rawa (OKI 14.000 ha, OI 14.992 ha, Muba 11.641 ha kewenangan provinsi (Banyuasin 220.458 ha); |
| | | d | Persentase kawasan bebas banjir dan longsor baru mencapai 46%; |
| | | e | Belum semuanya diperdakan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi (KSP), baru 1 (satu) Perda RTR KSP yakni KSP Kawasan Terpadu Tanjung Api-Api. |
| | | f | Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten/kota. Persentase kesesuaian pemanfaaatan ruang baru 80,00%. |
| 4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | |
| | | a | Luas kawasan kumuh dengan sarana prasarana yang baik baru 1.047,78 ha. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani seluas 2.096,05 Ha dari total luas kawasan kumuh seluas 3.331,83 Ha ; |
| | | b | Masih kurangnya akses rumah tangga yang terlayani sanitasi layak karena capaian penyediaan infrastruktur sanitasi termasuk sarana prasarananya masih dibawah angka target nasional (100%) sebesar 80,32% pada tahun 2018; |
| | | c | Masih kurangnya akses rumah tangga yang terlayani air bersih/minum karena capaiannya masih jauh di bawah target nasional (100%) yaitu 62,84% pada tahun 2018; |
| | | d | Masih adanya rumah yang tidak layak huni Tahun 2018 sebesar 6,43% |
| | | e | Masih adanya ketimpangan/backlog bagi Kepala Keluarga/Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak memiliki rumah sebanyak 78.265 KK pada tahun 2017. |
| 5 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | |
| | | a | Masih tingginya kejadian bencana yaitu 713 kejadian pada tahun 2017 di Provinsi Sumatera Selatan, meliputi banjir, kebakaran, tanah longsor dan puting beliung; |
| | | b | Masih kurangnya sistem peringatan dini; |
| | | c | Masih terbatasnya desa tangguh bencana, saat ini terdapat 12 desa tangguh bencana dari 396 desa atau 118 kecamatan sangat rawan bencana; |
| | | d | Luas hotspot Sebesar 37.362 ha, dengan jumlah titik hotspot 1.895 titik; |
| | | e | Terlambatnya penanganan bencana (respon time berkisar 1 jam) dikarenakan akses informasi dan akses menuju lokasi bencana sulit dijangkau; |
| 6 | Sosial | | |
| | | a | Kondisi sejumlah panti asuhan yang dikelola pemerintah masih belum sesuai standar. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan baru 11,90%; |
| | | b | Banyaknya bantuan sosial belum tepat sasaran antara lain disebabkan karena Basis Data Terpadu (BDT) belum terupdate secara berkelanjutan; |
| **II** | **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar** | | |
| 1 | Tenaga Kerja | | |
| | | a | Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,23 % dan tingginya setengah pengangguran (penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu) sebesar 8,73%; |

| NO | URUSAN | PERMASALAHAN | |
|---|---|---|---|
| | | b | Tingginya Pengangguran Terdidik (lulusan SMA/SMK dan S1) dimana pencari kerja teridiidik cenderung memilih milih pekerjaan khususnya pada sektor formal saja, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi sebesar 24,65% |
| | | c | Belum terlindunginya tenaga kerja dari ancaman PHK dan belum terjaminnya hak dan kewajiban pekerja. |
| 2 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | |
| | | a | Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dilihat dari pencapaian komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,62 (urutan ke-9 dari 34 Provinsi) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 73,53 (urutak ke-6 dari 34 Provinsi); |
| | | b | Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak, Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak pada tahun 2018 sebesar 646 kasus; |
| | | c | Belum optimalnya pemenuhan Hak Anak. Dari 17 kabupaten/kota, baru 2 kabupaten yang menjadi kabupaten layak anak yaitu Kabupaten MUBA dan PALI |
| 3 | Pangan | | |
| | | a | Ketersedian cadangan pangan masih rendah, baru sebesar 539 ton |
| | | b | Kecamatan rawan pangan masih di atas target. Penurunan rawan pangan pada Tahun 2018 hanya 0,17%; |
| | | c | Arus Supply demand hasil ternak (daging, susu dan telur) masih berfluktuasi. |
| | | d | Produksi daging, telur dan susu masih rendah. |
| 4 | Pertanahan | | |
| | | a | Masih terdapat bidang tanah yang belum terdaftar sebanyak 24.981.492 bidang tanah yang jumlahnya sangat banyak dibandingkan dengan bidang tanah yang sudah terdaftar sebesar 692.035 bidang tanah. |
| | | b | Masih adanya konflik lahan yang belum diselesaikan, dimana jumlah konflik pertanahan sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 68 kasus yang terjadi di 15 kabupaten/kota sebanyak 66 kasus dan 2 kasus di Provinsi Sumatera Selatan. |
| 5 | Lingkungan Hidup | | |
| | | a | Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan, dimana dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 masuk di dalam kategori cukup yaitu berkisar antara 66 sampai dengan 74. IKLH pada Tahun 2018 sebesar 67,34 |
| | | b | Masih meningkatnya emisi gas rumah kaca di 4 sektor meliputi Lahan dan Gambut, Pertanian dan Perternakan, Energi dan Transportasi, dan limbah sebesar 2.926.640.719 juta ton CO2Eq. |
| 6 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| | | a | Persentase penerbitan e-KTP di kabupaten/kota belum 100%. |
| 7 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | |
| | | a | Masih banyak jumlah desa di Sumatera Selatan yang masuk ke kategori tertinggal dan sangat tertinggal menurut Indeks Desa Membangun Tahun 2017. |
| 8 | Pengendalian Penduduk dan KB | | |
| | | a | Pemerataan distribusi alkon yang tidak tepat waktu khususnya di daerah perairan terpencil dan perbatasan sehingga berdampak kepada akses pelayanan; |
| | | b | Capaian Pasangan Usia Subur (PUS) menggunakan kontrasepsi KB baru 77,65%. |
| | | c | Masih banyaknya PUS yang ber-KB-nya tidak penuhi (*unmeed need*) sebesar 12,03%. |
| 9 | Perhubungan | | |
| | | a | Terjadinya pendangkalan alur sungai sebagai dampak sedimentasi |
| | | b | Masih terdapat bandara perintis yang belum operasional, meliputi bandara Pendopo Pali, Bandara Banding Agung (Kab. OKU Selatan), dan Bandara Sekayu (Kab. Musi Banyuasin); |
| | | c | Belum menurunnya angka kecelakaan lalu lintas secara signifikan, persentase angka kecelakaan lalu lintas masih sebesar 12% |

| NO | URUSAN | PERMASALAHAN | |
|---|---|---|---|
| | | d | Belum optimalnya fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Laut Regional Tanjung Api-Api; |
| | | e | Belum optimalnya Fungsi Layanan Kereta Api mahasiswa Unsri di Indralaya. |
| | | f | Belum optimalnya penumpang menggunakan layanan angkutan umum *Light Rail Transit (*LRT) Palembang. |
| 10 | Komunikasi dan Informasi | | |
| | | a | Belum memadainya infrastruktur teknologi, komunikasi dan informatika yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sampai ke pelosok desa yang ada di wilayah Sumatera Selatan; |
| | | b | Belum terintegrasinya Sistem Penerapan Berbasis Elektronik (SPBE); |
| | | c | Belum optimal dan sesuai standar Penerapan Sistem Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE di tiap Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. |
| 11 | Statistik (Penambahan Baru) | | |
| | | a | Belum tersedianya sistem integrasi data sektoral |
| 12 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | |
| | | a | Rendahnya pertumbuhan modal koperasi masih pada kisaran 0,27%. |
| | | b | Persentase pertumbuhan UMKM masih pada kisaran 0,25%. |
| 13 | Penanaman Modal | | |
| | | a | Persentase pertumbuhan PMA dan PMDN terjadi penurunan (minus). |
| | | b | Rencana Umum Penanaman Modal Daerah belum tersusun. |
| | | c | Pelayanan PTSP (5 hari) masih di bawah target nasional (3 hari). |
| 14 | Kepemudaan dan Olahraga | | |
| | | a | Peringkat Sumsel pada PON 2016 berada di posisi 21. |
| | | b | Jumlah pelatih yang bersertifikat masih rendah. |
| | | c | Jumlah dan kualitas pembinaan cabor masih rendah. |
| | | d | Persentase organisasi pemuda yang aktif masih rendah. |
| 15 | Kebudayaan | | |
| | | a | Belum optimalnya dukungan dan peran Lembaga Seni Qasidah (LASQI) Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. |
| | | b | Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang tersertifikasi secara nasional masih rendah. |
| 16 | Perpustakaan | | |
| | | a | Budaya baca masyarakat Sumatera Selatan berada di kategori rendah yaitu 38,38% |
| | | b | Pengembangan dan pengelolaan perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan masih banyak yang belum memenuhi standart nasional perpustakaan. |
| 17 | Kearsipan | | |
| | | a | Gedung tempat penyimpanan arsip yang belum standar nasional; |
| | | b | Minimnya tenaga SDM kearsipan yang terlatih dalam pengelolaan arsip; |
| | | c | Kurangnya sarana dan prasaran obat-obatan untuk pengamanan arsip. |
| **III** | **Urusan Pemerintah Pilihan** | | |
| 1 | Pariwisata | | |
| | | a | Kunjungan Wisman masih tergantung pada even-even internasional. |
| 2 | Pertanian | | |
| | | a | Nilai tukar petani (NTP) masih dibawah 100. |
| | | b | Share PDRB ADHB sektor pertanian yang merupakan sektor utama (menyerap tenaga kerja terbesar) trennya cenderung turun dari tahun ke tahun; |
| | | c | Terjadinya alih fungsi lahan dari komoditi tanaman pangan ke non pertanian; |
| | | d | Produktivitas padi dan kedelai masih di bawah rata-rata angka nasional. |
| | | e | Produktivitas Hortikultura untuk komoditi-komoditi utama nasional dan unggulan daerah rata-rata masih di bawah angka nasional; |

| NO | URUSAN | PERMASALAHAN | |
|---|---|---|---|
| | | f | Tenaga penyuluh pertanian masih kurang (1 penyuluh menangani 3 desa). |
| | | g | Belum Optimalnya Produktivitas Perkebunan rakyat , karet baru 1,32 ton/ha, kelapa sawit 3,43 ton/ha, kopi 0,88 ton/ha dan kelapa 1,10 ton/ha |
| | | h | Tanaman perkebunan yang banyak memasuki fase tua sehingga perlu diremajakan; |
| | | i | Kelembagaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar belum terbentuk di setiap desa; |
| | | j | Rendahnya harga komoditas di tingkat petani; |
| 3 | Kehutanan | | |
| | | a | Realisasi produksi kayu dari pemanfaatan hutan belum sesuai target yang direncanakan, baru sebesar 5.471.085 M3 |
| | | b | Luas penanaman per tahun tidak sebanding dengan jumlah lahan kritis yang ada, persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis baru 0,16% |
| | | c | Terjadinya peningkatan kebakaran hutan dari 2017 seluas 9.286 Ha dengan 1.206 hotspot menjadi ± 41.150 ha dengan jumlah titik hotspot sebanyak 1.954 titik hotspot pada tahun 2018 yang menyebabkan terjadinya kerusakan kawasan hutan; |
| | | d | Belum optimalnya fungsi kawasan lindung di Provinsi Sumatera Selatan sehingga rasio kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keamekaragaman hayati masih kurang, rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan hutan sebesar 0,44 |
| | | e | Adanya konflik/permasalahan lahan dan permukiman masyarakat dalam kawasan hutan, luasan penyelesaian konflik lahan dan permukiman dalam kawasan hutan baru 73.761 ha |
| 4 | Energi dan Sumber Daya Mineral | | |
| | | a | Belum maksimalnya pemanfaatan dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan; |
| | | b | Belum maksimalnya pengelolaan pertambangan minerba. Nilai PNBP pertambangan (royalti dan landrent sebesar 349,98M |
| | | c | Belum maksimalnya penerimaan daerah sektor ESDM. Nilai PNBP minyak bumi sebesar 47,60 M. PNBP gas bumi sebesar 308,95 M |
| | | d | Jaringan listrik yang belum mencapai lokasi di pelosok dan pesisir. Rasio elektrifikasi baru 92,22% |
| 5 | Perdagangan | | |
| | | a | Rendahnya surplus neraca perdagangan, baru sebesar 2,88% |
| | | b | Nilai Perdagangan Antar Wilayah/Perdagangan Antar Pulau (Moda Transpotasi Laut) tidak Tercapai. Baru sebesar 1.023.251 ton |
| 6 | Perindustrian | | |
| | | a | Jumlah Industri Hilir masih rendah. |
| 7 | Transmigrasi | | |
| | | a | Masih adanya sengketa pertanahan dan legalitas di kawasan transmigrasi. |
| | | b | Kurangnya infrastruktur jalan, fasilitas umum, dan permukiman di kawasan transmigrasi. |
| 8 | Kelautan dan Perikanan | | |
| | | a | Rendahnya konsumsi ikan /perkapita/tahun (dibawah target nasional, sumsel 2018 sebesar 40,60 kg/kapita/tahun sedangkan nasional sebesar 50,69 kg/kapita/tahun); |
| | | b | Rendahnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) dibandingkan rata-rata nasional (NTN sumsel 2018 sebesar 102,00 sedangkan nasional sebesar 108,17, dan NTPI sumsel tahun 2018 sebesar 99,46, Sedangkan nasional 98,59 |
| | | c | Kebutuhan benur udang dan nener bandeng untuk budidaya perikanan payau semuanya didatangkan dari luar Provinsi Sumatera Selatan; |
| | | d | Rendahnya volume ekspor produk kelautan dan perikanan; |
| | | e | Terjadinya konflik kepentingan pemanfaatan zona ruang laut, (Jumlah konflik tahun 2017 : 12 konflik); |
| | | f | Tingginya Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan (Jumlah Pelanggaran tahun 2017 : 20 Pelanggaran). |

| NO | URUSAN | | PERMASALAHAN |
|---|---|---|---|
| **IV** | **Urusan Penunjang Pemerintahan** | | |
| 1 | Perencanaan Pembangunan | | |
| | | a | Belum terlaksananya integrasi aplikasi sistem perencanaan dengan sistem penganggaran. |
| | | b | Belum optimalnya sinergi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, baik pemerintah (APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota) dan non pemerintah (KPBU, CSR, dll). |
| 2 | Keuangan | | |
| | | a | Nilai kemandirian keuangan daerah terus mengalami penurunan walaupun masih diatas 50 %. |
| | | b | Belum optimalnya penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).Pertumbuhan PAD baru sebesar 13,79% pada Tahun 2018 |
| | | c | Masih ada 1 Kabupaten yang masih WDP |
| 3 | Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan | | |
| | | a | Persentase ASN yang telah mengikuti diklat baru 30% |
| | | b | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial baru sebesar 75% |
| 4 | Penelitian dan Pengembangan | | |
| | | a | Hasil – hasil Penelitian belum dimanfaatkan dengan optimal; |
| | | b | Budaya Inovasi masih rendah. Indeks Inovasi Daerah baru sebesar 8,2 |
| 5 | Pengawasan | | |
| | | a | Belum adanya survey indeks integritas pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, akan dilakukan mulai 2019 |
| | | b | Masih rendahnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Provinsi Sumsel (baru di level 2,1), skor maturitas SPIP sebesar 3,08. |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan permasalahan per urusan sebagai berikut:

**a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

**1. Pendidikan**

a) Rendahnya tingkat pendidikan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari rata-rata lama sekolah di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Data terakhir yang dirilis BPS, Pada Tahun 2018 angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk Usia 25 tahun ke atas Provinsi Sumatera Selatan sebesar 8,00 tahun. Sementara nasional sebesar 8,10 tahun.

b) Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 yang diukur pada penduduk usia 7 tahun baru sebesar 12,36 tahun. Sedangkan nasional sebesar 12,85 tahun.

c) Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat pendidikan Menengah, yaitu SMA/SMK. Pada Tahun 2018 APM SMA/SMK baru sebesar 59,87%. Sedangkan nasional sudah sebesar 60,67%.

d) Masih rendah persentase Sekolah yang terakreditasi A;. Pada tahun 2018 baru sebesar 23,76%.

e) Rasio guru/murid pendidikan menengah pada tahun 2018 untuk SMA sebesar 1:15 dan untuk SMK sebesar 1 : 17 (perbandingan

antara guru (PNS + non PNS) dan murid), namun untuk perbandingan guru PNS dan murid masih belum mencukupi sebesar 1 : 37 untuk SMA dan 1:57 untuk SMK.

f) Kurang meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan di kabupaten/kota. Pada Tahun 2017 jumlah guru SD/MI di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 60.627 guru, paling banyak di Kota Palembang sebanyak 8.449 guru, paling sedikit di Kota Prabumulih sebanyak 1.236 guru.

g) Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Pada Tahun 2018 untuk jenjang Pendidikan Menengah, SMA, ada 2.934 ruang kelas kondisi baik, 3.843 ruang kelas kondisi rusak dan terdapat 315 ruang kelas dalam kondisi rusak berat.

h) Belum seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan memiliki Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, yaitu Kabupaten Empat Lawang, Musi Rawas Utara dan OKU Selatan belum memiliki SLB Negeri.

i) Angka kelulusan belum mencapai 100 %. Capaian Tahun 2018 baru sebesar 98.56%.

j) Masih kurangnya akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan mengenai Tahfidz Al-Qur'an dan seni baca tulis huruf Al-Qur'an, dan juga belum optimalnya dukungan terhadap peran Lembaga Pendidikan Tilawatil Al-Qur'an (LPTQ) Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga menjadi sebagian dari sebab sulitnya meningkatkan capaian prestasi Kafilah Musabaqoh Tilawatil Al-Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Al-Qur'an (STQ) pada ajang MTQ/STQ Tingkat Nasional. Dengan demikian dapat meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang religius.

**2. Kesehatan**

a) Masih rendahnya angka harapan hidup Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2018 baru sebesar 69,41 tahun, sedangkan nasional 71,06 tahun. Rata-rata angka harapan hidup kabupaten/kota dibawah usia harapan hidup Provinsi.

b) Masih tingginya jumlah kematian ibu. Pada Tahun 2018 jumlah kematian ibu sebesar 120 dari total 168.121 kelahiran hidup.

c) Masih tingginya angka Kematian bayi Sumatera Selatan. Pada Tahun 2018 terdapat 497 kasus kematian bayi.

d) Meningkatnya jumlah kasus HIV dimana penderita HIV/AIDS Sumatera Selatan secara kumulatif berjumlah 2.669 kasus kurun waktu 2005 sampai Tahun 2017. Terdiri dari 1.263 pengidap HIV dan 1.406 penderita AIDS.

e) Masih rendahnya penduduk yang belum memiliki Jaminan Kesehatan, baru sebesar 58,4%.

f) Rendahnya akses fasilitas kesehatan dasar, yaitu akses sanitasi, baru sebesar 80,3% dan akses air bersih baru sebesar 62,38%.

g) Tingginya masalah gizi buruk, kurang gizi dan stunting. Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk) sebesar 2,1 % masih di atas target yang harus di bawah 1%. Angka stunting sebesar 22,8% (Data pemantauan status gizi, 2018) dan balita gizi kurang masih sebesar 10,20%.

h) Masih banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakreditasi, 40%, yang telah terakreditasi baru sebesar 60%.

i) Masih kurang dan belum meratanya penempatan dokter, capaian Sumatera Selatan. Rasio dokter baru mencapai 11 orang per 100.000 penduduk.

j) Belum optimalnya dukungan terhadap peran Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP.UKS) Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, Lembaga Pemerintah Non-Struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Empat Menteri, sehingga menjadi salah satu faktor masih rendahnya jumlah Sekolah yang sesuai dengan standar minimal sekolah sehat. Adapun capaian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada ajang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional sudah lebih baik dengan beberapa kali mendapat penghargaan Best Achievement dan/atau Best Performance di beberapa kategori sekolah, namun dengan demikian perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga jumlah sekolah yang memenuhi standar minimal sekolah sehat semakin meningkat. Dengan demikian dapat meningkatkan derajat kesehatan dalam rangka membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

**3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

a) Kondisi jalan mantap Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 baru sebesar 61,22%. Sedangkan jalan tidak mantap masih tinggi yaitu sebesar 38,78% dengan kondisi rusak ringan sepanjang 224,6 km' dan rusak berat sepanjang 362,71 km.

b) Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi terus meningkat menjadi sebesar 43,69%, kondisi rusak di atas 50% berada di Kabupaten Muara Enim, Lahat, Pagar Alam.

c) Belum dimanfaatkannya potensi daerah irigasi rawa, di Kabupaten OKI 14.000 ha, Kabupaten Ogan Ilir 14.992 ha, dan Kabupaten MUBA 11.461 ha kewenangan provinsi (Banyuasin 220.458 ha).

d) Persentase kawasan bebas banjir dan longsor baru mencapai 46%. Banjir dan longsor banyak terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, OKI , Musi Rawas dan Lahat.

e) Belum semua Rencana Tata Ruang (RTR) di Sumatera Selatan ditetapkan Peraturan Daerahnya. Kawasan Strategis Provinsi (KSP), baru 1 (satu) Perda RTR KSP yakni KSP Kawasan Terpadu Tanjung Api-Api.

f) Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten/Kota yang disebabkan tidak tersedianya SDM bidang penataan ruang, mengingat belum adanya Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota. Persentase kesesuaian pemanfaaatn ruang baru 80,00%.

**4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

a) Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani seluas 2.096,05 Ha dari total luas kawasan kumuh seluas 3.331,83 Ha. Luasan kawasan kumuh dengan sarana prasarana baik baru mencapai 1.047,78 ha.

b) Masih kurangnya akses rumah tangga yang terlayani sanitasi layak karena capaian penyediaan infrastruktur sanitasi termasuk sarana prasarananya masih dibawah angka indikator nasional (100%) sebesar 80,32% pada tahun 2018.

c) Masih kurangnya akses rumah tangga yang terlayani air bersih/minum karena capaiannya masih jauh di bawah indikator nasional (100%) yaitu 62,84% pada tahun 2018.

d) Masih adanya rumah yang tidak layak huni, di mana persentase rumah tidak layak huni. Pada Tahun 2018 angkanya sebesar 6,38%.

e) Masih adanya ketimpangan/backlog bagi Kepala Keluarga/Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak memiliki rumah sebanyak 78.181 KK pada tahun 2017.

**5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

a) Masih tingginya kejadian bencana di Provinsi Sumatera Selatan, meliputi banjir, kebakaran, tanah longsor dan puting beliung. Hal ini dikarenakan faktor alam dan faktor ulah tangan manusia tanpa memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan (seperti pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar hutan, sistem tanam padi sonor dan berbagai kegiatan lainnya).

b) Belum kurangnya sistem peringatan dini.
c) Masih terbatasnya desa tangguh bencana, saat ini terdapat 12 desa tangguh bencana karhutlah dari 396 desa atau 118 kecamatan sangat rawan bencana.
d) Masih tingginya luasan hotspot. Luas hotspot Sebesar 37.362 ha, dengan jumlah titik hotspot 1.895 titik.
e) Terlambatnya penanganan bencana. Respon time berkisar 1 jam disebabkan akses menuju lokasi sulit dijangkau.

**6. Sosial**

a) Kondisi sejumlah panti asuhan yang dikelola pemerintah masih belum sesuai standar. Kondisi ini disebabkan karena terhitung per 1 Januari 2017, semua UPT panti pemerintah yang ada di Sumsel tanggung jawabnya dikembalikan ke Dinas Sosial Provinsi Sumsel. total saat ini 16 Panti. Persentase panti social yang meneydiakan sarana prasarana kesehatan baru mencapai 11,90%.
b) Banyak bantuan sosial belum tepat sasaran antara lain disebabkan Basis data terpadu (BDT) belum terupdate secara berkelanjutan.

**b. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

**1. Tenaga Kerja**

a) Tingkat pengangguran terbuka Sumatera Selatan pada Tahun 2018 sebesar 4,23 %, sedangkan Tahun 2017 sebesar 4,33%. Angka setengah pengangguran Sumatera Selatan (yang bekerja di bawah 35 jam seminggu) pada tahun 2018 sebesar 8,73% dan didominasi bekerja pada sektor informal.
b) Tingginya Pengangguran Terdidik (lulusan SMA/SMK dan S1) yaitu tamatan SMA/SMK dan Perguruan Tinggi pada Tahun 2018 sebesar 24,65% dimana pencari kerja teridiidik cenderung memilih milih pekerjaan khususnya pada sektor formal saja.
c) Belum terlindunginya tenaga kerja dari ancaman PHK dan belum terjaminnya hak dan kewajiban pekerja.

**2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

a) Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dilihat dari pencapaian komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,62 (urutan ke-9 dari 34 Provinsi) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 73,53 (urutak ke-6 dari 34 Provinsi).
b) Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak, Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak pada tahun 2018 sebesar 646 kasus.

c) Belum optimalnya pemenuhan Hak Anak. Dari 17 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan, baru 2 (dua) kabupaten yang menjaid kabupaten layak anak yaitu Kabupaten Musi Banyuasin dan kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

**3. Pangan**

a) Rendahnya ketersedian cadangan pangan Sumatera Selatan, baru sebesar 539 ton.

b) Kecamatan rawan pangan masih di atas target. Pada Tahun 2018 penurunan rawan pangan hanya sebesar 0,17%.

c) Arus Supply demand hasil ternak (daging, susu dan telur) masih berfluktuasi.

**4. Pertanahan**

a). Masih terdapat bidang tanah yang belum terdaftar sebanyak 24.981.492 bidang tanah yang jumlahnya sangat banyak dibandingkan dengan bidang tanah yang sudah terdaftar sebesar 692.035 bidang tanah.

b). Masih adanya konflik lahan yang belum diselesaikan, di mana jumlah konflik pertanahan sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 68 kasus yang terjadi di 15 kabupaten/kota sebanyak 66 kasus dan 2 kasus di Provinsi Sumatera Selatan terkait sengketa asset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tim Fasilitasi Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sedang memproses sebanyak 62 kasus (92%), 3 kasus (4%) diteruskan dengan upaya hukum (litigasi) dan 3 kasus (4%) lainnya dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat (ADR/Non litigasi).

**5. Lingkungan Hidup**

a) Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan, di mana dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 masuk di dalam kategori cukup yaitu berkisar antara 66 sampai dengan 74.

b) Masih meningkatnya emisi gas rumah kaca di 4 sektor meliputi Lahan dan Gambut, Pertanian dan Perternakan, Energi dan Transportasi, dan limbah. Dimana sektor yang paling tinggi menyumbang emisi adalah di sektor lahan dan gambut.

**6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Persentase penerbitan e-KTP di kabupaten/kota Sumatera Selatan belum 100 %.

**7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Masih banyak jumlah desa di Sumatera Selatan yang masuk ke kategori tertinggal dan sangat tertinggal menurut Indeks Desa Membangun Tahun 2017.

**8. Pengendalian Penduduk dan KB**

a) Pemerataan distribusi alkon yang tidak tepat waktu khususnya di daerah perairan terpencil dan perbatasan sehingga berdampak kepada akses pelayanan.

b) Informasi PUS terhadap pelayanan KB masih rendah. Capaian Psangan Usia Subur (PUS) menggunakan kontrasepsi KB baru sebesar 77,65%.

c) Masih banyaknya PUS yang ber-KB-nya tidak penuhi (*unmet need*) dan distribusi alkon tidak merata (daerah perairan terpencil dan perbatasan) sehingga terjadi putus pakai. Unmet need Sumatera Selatan masih sebesar 12,03%.

**9. Perhubungan**

a) Terjadinya pendangkalan alur sungai sebagai dampak sedimentasi.

b) Masih terdapat bandara perintis yang belum operasional,meliputi bandara Pendopo Pali, Bandara Banding Agung (Kab. OKU Selatan), dan Bandara Sekayu (Kab. Musi Banyuasin).

c) Belum menurunnya angka kecelakaan lalu lintas secara signifikan. Persentase angka kecelakaan lalu lintas masih sebesar 12%.

d) Belum optimalnya fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Laut Regional Tanjung Api-Api.

e) Belum optimalnya fungsi layanan Kereta Api Mahasiswa Kertapati-Inderalaya.

f) Belum optimalnya penumpang menggunakan layanan angkutan umum *Light Rail Transit (*LRT) Palembang dilihat dari jumlah penumpang yang tiap bulannya cenderung berfluktuasi. menurun dan tidak stabil, di mana pada bulan Agustus 2018 sebanyak 262.316 penumpang, kemudian terus menurun pada bulan Oktober 2018 sebanyak 144.653 penumpang dan naik kembali pada bulan Desember 2018 sebanyak 186.035 penumpang, namun turun kembali pada bulan Februari 2019 dengan jumlah penumpangnya sebanyak 108.978 penumpang.

**10. Komunikasi dan Informasi**

a) Belum memadainya infrastruktur teknologi, komunikasi dan informatika yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sampai ke pelosok desa yang ada di wilayah Sumatera Selatan.
b) Belum terintegrasinya Sistem Penerapan Berbasis Elektronik (SPBE).
c) Belum optimal dan sesuai standar Penerapan Sistem Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE di tiap Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**11. Statistik (Penambahan Baru)**

a) Belum tersedianya sistem integrasi data sektoral.

**12. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

a) Rendahnya pertumbuhan modal koperasi masih pada kisaran 0,27%.
b) Persentase pertumbuhan UMKM masih pada kisaran 0,25%.

**13. Penanaman Modal**

a) Persentase pertumbuhan PMA dan PMDN terjadi penurunan (minus).
b) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah belum tersusun.
c) Pelayanan PTSP (5 hari) masih di bawah target nasional (3 hari).

**14. Kepemudaan dan Olahraga**

a). Minimnya prestasi atlit Sumatera Selatan, peringkat Sumsel pada PON 2016 berada di posisi 21 dan jumlah Atlet Berprestasi Sumatera Selatan pada tahun 2018 sebanyak 30 atlit.
b). Jumlah pelatih yang bersertifikat masih rendah.
c). Jumlah dan kualitas pembinaan cabor masih rendah.
d). Persentase organisasi pemuda yang aktif masih rendah.

**15. Kebudayaan**

a). Belum optimalnya dukungan dan peran Lembaga Seni Qasidah (LASQI) Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sehingga menjadi salah satu penyebab kurangnya capaian prestasi Kafilah Qasidah Provinsi Sumatera Selatan pada ajang Qasidah Tingkat Nasional. Dengan demikian dapat meningkatkan seni dan budaya serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama sehingga dapat mendorong terwujudnya Sumsel maju untuk semua;
b). Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang tersertifikasi secara nasional masih rendah.

**16. Perpustakaan**

a). Budaya baca masyarakat Sumatera Selatan berada di kategori rendah;

b). Pengembangan dan pengelolaan perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan masih banyak yang belum memenuhi standart nasional perpustakaan.

**17. Kearsipan**

a). Gedung tempat penyimpanan arsip yang belum standar nasional.

b). Minimnya tenaga SDM kearsipan yang terlatih dalam pengelolaan arsip.

c). Kurangnya sarana dan prasaran obat-obatan untuk pengamanan arsip.

**c. Urusan Pemerintahan Pilihan**

**1. Pariwisata**

Kunjungan Wisatawan Mancanegara (wisman) masih tergantung pada even even internasional yang diadakan di Sumatera Selatan.

**2. Pertanian**

a) Nilai tukar petani (NTP) masih di bawah 100.

b) Share PDRB ADHB sektor pertanian yang merupakan sektor utama (menyerap tenaga kerja terbesar) trennya cenderung turun dari tahun ke tahun.

c) Terjadinya alih fungsi lahan dari komoditi tanaman pangan ke non pertanian;

d) Produktivitas Padi dan kedelai masih di bawah rata-rata angka nasional.

e) Produktivitas Hortikultura untuk komoditi-komoditi utama nasional dan unggulan daerah rata-rata masih di bawah angka nasional.

f) Kurangnya tenaga penyuluh pertanian di Sumatera Selatan. Terlihat bahwa 1 orang penyuluh menangani 3 desa. Idealnya 1 penyuluh menangani 1 desa.

g) Belum Optimalnya Produktivitas Perkebunan rakyat di Sumatera Selatan. Produktivitas karet 1,32 ton/ha, kelapa sawit 3,34 ton/ha, kopi 0,88 ton/ha dan kelapa 1,10 ton/ha.

h) Masih kurangnya kualitas karet rakyat.

i) Tanaman perkebunan yang banyak memasuki fase tua sehingga perlu diremajakan.

j) Kelembagaan petani yang belum terbentuk di setiap desa.

k) Rendahnya harga komoditas di tingkat petani

**3. Kehutanan**

a) Realisasi produksi kayu dari pemanfaatan hutan belum sesuai target yang direncanakan. Baru sebesar 5.471.085 M3.

b) Luas penanaman per tahun tidak sebanding dengan jumlah lahan kritis yang ada. Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis baru sebesar 0,16%.

c) Terjadinya peningkatan kebakaran hutan dari tahun 2017 seluas 9,286 ha dengan 1.206 hotpsot menjadi sekitar 41.150 ha dengan titik hotspot sebanyak 1.954 titik hotpsot pada Tahun 2018 yang menyebabkan terjadinya kerusakan kawasan hutan.

d) Belum optimalnya fungsi kawasan lindung di Provinsi Sumatera Selatan sehingga rasio kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keamekaragaman hayati masih kurang;. Rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan hutan sebesar 0,44.

e) Adanya konflik/permasalahan lahan dan permukiman masyarakat dalam kawasan hutan. Luasan peneylesaian konfliklahan dan permukiman dalam kawasan hutan baru sebesar 73.761 ha.

**4. Energi dan Sumber Daya Mineral**

a) Belum maksimalnya pemanfaatan dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan;

b) Belum maksimalnya pengelolaan pertambangan minerba. Nilai PNBP pertambangan (royalty dan landrent) sebesar 349,98M.

c) Belum maksimalnya penerimaan daerah sektor ESDM. Nilai PNBP minyak bumi sebesar 46,60M. Nilai PNBP gas bumi sebesar 308,95M.

d) Jaringan listrik yang belum mencapai lokasi di pelosok dan pesisir. Rasio elektrifikasi belum 100%, baru sebesar 92,22%.

**5. Perdagangan**

a) Rendahnya surplus neraca perdagangan, baru sebesar 2,88%.

b) Nilai Perdagangan Antar Wilayah/Perdagangan Antar Pulau (Moda Transpotasi Laut) tidak Tercapai, Baru sebesar 1.023.251 ton;

**6. Perindustrian**

Jumlah Industri Hilir Sumatera Selatan masih rendah.

**7. Transmigrasi**

a) Permasalahan krusial dalam penyelenggaraan transmigrasi di Sumsel adalah sengketa pertanahan. Tahun 2017 masih ada sekitar 58 permasalahan sengketa pertanahan di 8 Kabupaten yang dibagi

kedalam empat jenis permasalahan yaitu sengketa terhadap tuntutan penduduk sebanyak 18 masalah, sengketa terhadap investor sebanyak 15 masalah, sengketa terhadap hak transmigrasi sebanyak 11 masalah dan sengketa terhadap Kawasan hutan sebanyak 14 masalah.

b) Kurangnya infrastruktur di kawasan transmigrasi (penambahan masalah).

**8. Kelautan dan Perikanan**

a) Rendahnya konsumsi ikan /perkapita/tahun (dibawah target nasional, sumsel 2018 sebesar 40,60 kg/kapita/tahun sedangkan nasional sebesar 50,69 kg/kapita/tahun).

b) Rendahnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) dibandingkan rata-rata nasional (NTN sumsel 2018 sebesar 102,00 sedangkan nasional sebesar 108,17, dan NTPI sumsel tahun 2018 sebesar 99,46, Sedangkan nasional 98,59.

c) Kebutuhan benur udang dan nener bandeng untuk budidaya perikanan payau semuanya didatangkan dari luar Provinsi Sumatera Selatan (kebutuhan benur tahun 2017 sebesar 410 juta ekor dan kebutuhan nener bandeng sebesar 205 juta ekor).

d) Rendahnya volume ekspor produk kelautan dan perikanan.

e) Terjadinya konflik kepentingan pemanfaatan zona ruang laut, (Jumlah konflik tahun 2017 : 12 konflik).

f) Tingginya Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan (Jumlah Pelanggaran tahun 2017 : 20 Pelanggaran).

**d. Urusan Penunjang Pemerintahan**

**1. Perencanaan Pembangunan**

a). Belum terlaksananya integrasi aplikasi sistem perencanaan dengan system penganggaran. e-sumsel baru dimulai Tahun 2019.

b). Belum optimalnya sinergi sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik pemerintah (APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota) dan non pemerintah (KPBU, CSR, dll).

**2. Keuangan**

a) Nilai kemandirian keuangan daerah terus mengalami penurunan walaupun masih diatas 50 %.

b) Belum optimalnya penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).Pertumbuhan PAD baru sebesar 13,79% pada Tahun 2018.

c) Masih ada 1 Kabupaten yang masih WDP.

**3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

a). Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengikuti diklat. Persentase ASN yang telah diklat baru sebesar 30%.

b). Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial baru sebesar 75%.

**4. Penelitian dan Pengembangan**

a). Hasil – hasil Penelitian belum dimanfaatkan dengan optimal.

b). Budaya Inovasi masih rendah. Indeks Inovasi Daerah baru sebesar 8,2.

**5. Pengawasan**

a) Belum adanya survey indeks integritas pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, akan dilakukan mulai 2019.

b) Masih rendahnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Provinsi Sumsel (baru di level 2,1), skor maturitas SPIP sebesar 3,08.

## 4.2 Isu Strategis

### 4.2.1. Telaah RPJPD

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025. Seperti termaktub dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025 dinyatakan bahwa, visi yang ingin dicapai oleh Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 adalah : "*Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025*". Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, misi Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 adalah (1) menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional, (2) meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan, (3) mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, dan (4) meningkatkan kapasitas manajemen kepemerintahan.

Tahapan keempat RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025 difokuskan untuk memantapkan perwujudan masyarakat Sumatera Selatan yang mandiri, maju, sejahtera, lestari, unggul dan terdepan melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Sumatera Selatan yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Adapun tahapan yang dilakukan pada tahap keempat RPJPD sebagai berikut :

1. Memantapkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi;
2. Memantapkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
3. Pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan;
4. Pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih, dan bertanggung jawab.

Secara lebih rinci, hasil telaah RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 untuk periode perencanaan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**

Hasil Telaahan RPJPD Periode Perencanaan Tahun 2019-2023

| No. | Arah Kebijakan RPJDP | Sasaran Pokok | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1. | Pemantapan pertumbuhan ekonomi dan penegasan arah pembangunan ekonomi | Pertumbuhan Ekonomi Daerah minimal 6,5 % per tahun | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat |
| | | | Investasi yang meningkat sejalan dengan ICOR |
| | | Struktur Ekonomi Primer (Pertanian dan Pertambangan Penggalian) yang didukung oleh sektor manufaktur dan jasa | Nilai Tambah Sektor Primer tumbuh dan meningkat |
| | | | Nilai Tambah Sektor Manufaktur tumbuh dan meningkat |
| | | | Ada saling keterkaitan (linkage) yang erat antara sektor primer (pertanian), sekunder (industri) dan tersier (jasa) |
| | | Pemantapan Sektor Unggulan Provinsi Sumatera Selatan | Alokasi APBD yang proporsional untuk sektor-sektor potensial |
| | | | Produktivitas Sektor meningkat |
| | | | Sektor Pariwisata dan Jasa Bank tumbuh dan memberi kontribusi yang signifikan |
| | | Pemantapan Surplus Neraca Perdagangan Daerah | Investasi bertambah |
| | | | Daya saing meningkat |
| | | | Efisiensi berjalan dengan baik |
| | | | Ekspor Daerah cenderung meningkat |
| | | | Impor Daerah cenderung menurun |
| | | Penurunan Angka Pengangguran | Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja yang bekerja meningkat |
| | | | Investasi yang tumbuh dapat menyerap banyak tenaga kerja |
| | | Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Kesenjangan Pendapatan | Jumlah Penduduk Miskin berkurang |
| | | | Indeks Gini menurun |
| | | | UKMK berkembang dengan baik |
| | | Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia | Indeks Pendidikan meningkat |
| | | | Indeks Kesehatan meningkat |
| | | | Indeks Daya Beli meningkat |
| 2. | Peningkatan Kemandirian dan Kesejahteraan | Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan | Rasio Sertifikasi Guru bertambah baik |
| | | | Rasio Sekolah bertambah baik |
| | | | Rasio Guru bertambah baik |
| | | | Angka Melek Huruf (AMH) |

| No. | Arah Kebijakan RPJDP | Sasaran Pokok | Indikator |
|---|---|---|---|
| | | | meningkat |
| | | | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat |
| | | | Angka Partisipasi Kasar/ Murni (APK/ AKM) meningkat |
| | | Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan teknologi | Akesesibilitas terhadap IT (Internet) lebih mudah |
| | | | Jumlah Lembaga Riset meningkat |
| | | | Publikasi Hasil Kajian meningkat |
| | | | Implementasi Hasil Riset bertambah banyak |
| | | Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat | Angka Kematian Bayi menurun |
| | | | Angka Kematian Ibu Melahirkan menurun |
| | | | Rasio Paramedis bertambah baik |
| | | | Rasio Sarana Kesehatan bertambah baik |
| | | Permukiman dan Perumahan | Ketersediaan Perumahan Sederhana Sehat bertambah |
| | | | Kawasan Kumuh berkurang |
| | | | Prasarana Permukiman (Air Bersih, Drainase) bertambah dan berfungsi baik |
| | | Pembangunan Kesejahteraan Sosial | Rasio Gender bertambah baik |
| | | | Perlindungan Perdagangan Anak dan Pekerja Anak terjamin dengan baik |
| | | | Aktivitas Keagamaan berjalan baik dan Sarana Keagamaan bertambah dan baik |
| | | | Aktivitas Kebudayaan berjalan baik dan Sarana serta Kelembagaan Kebudayaan berfungsi baik |
| | | | Seni dan budaya lokal tumbuh dan berkembang baik |
| | | | Rasio Organisasi Pemuda bertambah baik |
| | | | Kelembagaan Kepemudaan berfungsi |
| | | | Sarana dan Prestasi Olah Raga meningkat dan berkualitas |
| | | | Kelembagaan dan jaringan KB berfungsi baik dan bertambah |
| | | | Akses pelayanan sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraa Sosial (PMKS) dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) lebih mudah |
| | | | Prakarsa dan peran akhif masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial semakin meningkat |
| | | Ketenagakerjaan | UMR makin tinggi dan lebih baik serta |

| No. | Arah Kebijakan RPJDP | Sasaran Pokok | Indikator |
|---|---|---|---|
| | | | mencukupi kebutuhan hidup |
| | | | Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Informal terjamin dengan baik |
| | | | Hubungan Industrial Buruh, Pengusaha dan Pemerintah makin baik dan harmonis |
| | | | Kelembagaan Buruh berfungsi lebih baik |
| 3. | Pembangunan Yang Berorientasi Pada Pemanfaatan Sumberdaya yang Berkelanjutan | Pengelolaan energi dan lingkungan | |
| | | a. Inventarisasi dan pemutahiran data aspek fisik dan lingkungan | Teridentifikasinya kawasan lindung geologi (resapan air, rawan bencana, karst, dan lain-lain) |
| | | | Teridentikasinya kawasan budidaya secara geologis |
| | | b. Pengembangan sumber daya energi | Pemanfaatan Sumberdaya Energi yang berwawasan lingkungan (tingkat polusi dan dampak lingkungan) |
| | | | Sistim pengelolaan energi yang optimal (terkendalinya supply-demand energi) |
| | | | Teknologi energi tumbuh dan berkembang baik |
| | | | Kecukupan cadangan energi terjamin dan berkesinambungan |
| | | | Ekspor energi dapat memberikan nilai tambah yang besar |
| | | | Berkembangnya sumberdaya energi alternatif berbasis komoditi pertanian |
| | | Pengembangan Tata Ruang yang Adil dan Seimbang | |
| | | a. Sistim kota-kota yang hirarkis dan memiliki keterkaitan fungsional dan spasial | Pola lokasi kota-kota terpetakan dengan jelas |
| | | | Distribusi hirarki kota seimbang dalam setiap tingkatan |
| | | | Distribusi fungsi kota mampu diterjemahkan sesuai dengan potensinya |
| | | | Keterkaitan fungsional mampu menjamin percepatan pertumbuhan |
| | | b. Pengembangan Kawasan Budidaya dan Pemantapan kawasan lindung | Pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan peruntukan, fungsi dan potensinya |
| | | | Pelestarian kawasan lindung terjamin baik |
| | | | Pengembangan kawasan kerjasama regional berjalan harmonis dan saling menguntungkan |
| | | Pengembangan Sistim Transportasi | |
| | | a. Sistim Transportasi Internal | Rasio panjang jalan terhadap luas daerah meningkat |
| | | | Akses antar pusat-pusat permukiman lebih mudah dan baik |
| | | | Akses ke kawasan sentra produksi lebih mudah dan baik |

| No. | Arah Kebijakan RPJDP | Sasaran Pokok | Indikator |
|---|---|---|---|
| | | | Wilayah pelayanan moda transportasi semakin bertambah |
| | | | Intregrasi antar moda berjalan baik dan efektif |
| | | b. Sistim Transportasi eksternal | Variasi moda gateway meningkat |
| | | | Kapasitas prasarana gateway bertambah besar |
| | | | Akses ke wilayah sekitar semakin mudah dan baik |
| | | Pembangunan jaringan infrastruktur | Wilayah teritorial pelayanan (jumlah desa terlayani) semakin meningkat |
| | | | Penduduk terlayani semakin banyak |
| | | Pertanian dan Tanaman Pangan | |
| | | a. Revitalisasi Pertanian: | |
| | | • Pengembangan areal produksi pertanian (tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) yang cukup signifikan | Luas tanam dan luas panen meningkat |
| | | | Populasi ternak (sapi dan ayam) meningkat |
| | | | Areal (luas) tambak meningkat |
| | | • Penataan dan pengembangan jaringan distribusi agro-input | Sarana produksi pertanian (bibit, pupuk, obat-obatan, dll) makin mudah diperoleh |
| | | | Produktivitas pertanian meningkat |
| | | • Pemetaan dan penataan kawasan (cluster) komoditi unggulan | Terciptanya kawasan-kawasan komoditi unggulan |
| | | b. Pengembangan dan pemantapan sistem agribisnis | |
| | | • Pemantapan keterkaitan antar sub sistem agribisnis | Terciptanya sinergisme, kerjasama dan koordinasi antara sub sistem produksi, sub sistem distribusi dan sub sistem pemasaran |
| | | | Adanya peningkatan kuantitas, kualitas manajemen dan usaha mandiri di bidang pertanian |
| | | c. Pengembangan dan pemantapan institusi dan kelembagaan pengelola pertanian | |
| | | • Pembentukan dan pengembangan kelembagaan pertanian | Terbentuknya institusi dan lembaga-lembaga pertanian yang kuat dan mandiri |
| | | • Pembinaan dan pemberdayaan institusi dan kelembagaan pertanian | Makin profesionalnya institusi dan lembaga pertanian dalam mata rantai produksi dan distribusi produk pertanian |
| 4. | Pembangunan Pemerintahan yang Jujur, Adil, Bersih dan Bertanggung-Jawab | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemda | Kapasitas Sistem semakin menguat |
| | | | Kapasitas Organisasi semakin menguat |
| | | | Kapasitas Individu semakin menguat |
| | | Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum | Kompetensi SDM aparatur meningkat |

| No. | Arah Kebijakan RPJDP | Sasaran Pokok | Indikator |
|---|---|---|---|
| | | | Standar Pelayanan Minimal diterapkan dengan benar |
| | | | SOP diterapkan dengan benar |
| | | | Pemimpinan Birokrasi makin beretika |
| | | Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah | Struktur Anggaran makin kuat dan baik |
| | | | Anggaran makin efisien |
| | | | Anggaran makin efektif |
| | | | PAD makin meningkat dan beragam |
| | | Peningkatan Peran serta masyarakat | Partisipasi dalam Proses Perencanaan Daerah meningkat |
| | | | Pengawasan Masyarakat makin meningkat |
| | | | Pengaduan oleh Masyarakat tersalurkan dan ditindaklanjuti |
| | | | Organisasi Kemasyarakatan / LSM berperan dan berfungsi baik |
| | | Keterbukaan Informasi dan Komunikasi | Berkembangnya informasi dan komunikasi |
| | | | Terjaminnya transparansi dan keterbukaan informasi |
| | | | Adanya kebebasan media yang bertanggung jawab |
| | | | Adanya peraturan perundangan yang menjamin keterbukaan informasi dan komunikasi |
| | | Pembangunan Politik Lokal | Kapasitas Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah semakin baik |
| | | | Kapasitas kelembagaan Organisasi dan Partai Poilitik semakin baik |
| | | | Pendidikan Politik Masyarakat berjalan baik |
| | | | Etika Politik Lokal berjalan baik |
| | | Penegakan Hukum dan Tata Peraturan Daerah | Pendayagunaan Perda lebih optimal |
| | | | Pelanggaran Perda ditindaklanjuti dengan benar |
| | | | Tata Peraturan Daerah lebih efektif |
| | | | Ada dan diakuinya Kesetaraan (equality) |
| | | Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana | Kelembagaan Perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana semakin kuat dan berfungsi |
| | | | Kerawanan sosial dapat teratasi |
| | | | Penanggulangan bencana dapat teratasi |
| | | Pemantapan Ketertiban dan Keamanan Daerah | Aparat makin profesional |
| | | | Pelayanan masyarakat semakin meningkat |
| | | | Peran serta masyarakat dalam keamanan lingkungan makin besar dan meningkat |

### 4.2.2. Telaah RPJMN

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 merupakan tahapan ketiga dari RPJPN 2005-2025. Pembangunan RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Indonesia menghadapi tiga masalah pokok dan tantangan, yaitu: 1) merosotnya kewibawaan negara/pemerintah; 2) lemahnya sendi-sendi perekonomian; dan 3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

RPJMN 2015-2019 telah mengidentifikasi beberapa kondisi yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan nasioanl termasuk Sumatera Selatan, yaitu:

1. Kondisi Geo-Ekonomi

Kondisi geo-ekonomi global akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke depan. Tantangan dan peluang tersebut antara lain adalah:

a. Proses pemulihan ekonomi global saat ini diperkirakan akan berlangsung secara moderat
b. Pusat Ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik
c. Tren perdagangan global ke depan tidak saja dipengaruhi oleh peranan perdagangan barang.
d. Harga komoditas secara umum diperkirakan menurun, namun harga produk manufaktur dalam tren meningkat
e. Semakin meningkatnya hambatan non tarif di negara tujuan ekspor
f. Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
g. Pergeseran fenomena kerjasama ekonomi ke arah plurilateral dan mega block

2. Kondisi Geo-Politik

a. Konstelasi Geo-politik global
b. Lingkungan Geo-politik Regional
c. Lingkungan Strategis Nasional

3. Bonus Demografi

RPJMN memuat visi nasional yaitu terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Selanjutnya tercermin dalam misi-misi sebagai berikut :

a. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
b. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
c. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
d. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
e. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
f. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
g. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
h. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia Internasional

Secara prinsip antara agenda prioritas pembangunan nasional dan sasaran pokok pembangunan nasional merupakan satu bagian integral yang tidak terpisahkan dalam penyelanggaraan pembangunan nasional jangka menengah (2015-2019). Agenda prioritas pembangunan nasional dijabarkan menjadi 9 Agenda ( Nawacita ) sebagai berikut :

a. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis , dan terpercaya.
b. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
d. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
e. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
f. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
g. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,bermartabat, dan terpercaya.
h. Melakukan revolusi karakter bangsa
i. Mempengaruhi kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

### 4.2.3. Telaah RTRW

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 terdiri dari:

**Tabel 4.6**

Hasil Telaah Struktur Ruang Provinsi Sumatera Selatan

| No | Rencana Struktur Ruang | Lokasi | Instansi | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| I. | **Rencana pusat permukiman / Struktur Perkotaan** | | | |
| I.1 | Pemantapan Kota Palembang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) | Palembang | Kementerian/ Lembanga Pemerintah Provinsi | Tahun 2017 – 2018 |
| I.2 | Pengembangan dan Pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) | 1. Kayuagung<br>2. Prabumulih<br>3. Baturaja<br>4. Muara Enim<br>5. Lahat<br>6. Lubuk Linggau<br>7. Sekayu | Pemerintah, SKPD Provinsi | Tahun 2017 – 2018 |
| I.3 | Peningkatan status menjadi Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) | 1. Indralaya<br>2. Martapura<br>3. Sungsang<br>4. Pagar Alam | SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/ Kota | Tahun 2017 – 2018 |
| I.4 | Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) | 1. Sungai Lilin<br>2. Tebing Tinggi<br>3. Muara Beliti<br>4. Muara Dua<br>5. Pangkalan Balai<br>6. Gumawang<br>7. Tugumulyo<br>8. Talang Ubi<br>9. Peninjauan<br>10. Muara Rupit<br>11. Bayung Lencir<br>12. Tanjung Raja<br>13. Muara Lakitan<br>14. Pengadonan | SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/ Kota | Tahun 2017 – 2020 |
| II. | **Rencana jaringan transportasi** | | | |
| II.1 | **Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi dan Perhubungan Darat** | | | |
| II.1.1 | Peningkatan fungsi jaringan jalan Arteri Primer | 1. Lintas Timur<br>2. Lintas Tengah<br>3. Lintas Penghubung | BBPJN V, Dishub, PU Bina Marga | Tahun 2016-2036 |
| II.1.2 | Peningkatan fungsi jaringan jalan Kolektor Primer | 1. Lingkar Palembang<br>2. Palembang-Tanjung Api-Api<br>3. Tugumulyo-Gumawang-Martapura<br>4. Sekayu-Babat toman-Muaralakitan-Muara Beliti<br>5. Sekayu-Talangubi-Gunung Megang<br>6. Prabumulih-Karangagung-Baturaja<br>7. Tebingtinggi - | BBPJN V, Dishub, PU Bina Marga | Tahun 2016-2036 |

| No | Rencana Struktur Ruang | Lokasi | Instansi | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| | | Pendopo-Muarapinang-Pagar Alam- Tanjungsakti-Lahat<br>8. Muaradua-Madukisam-PulauPanggung-Kotaagung-Pagaralam | | |
| II.1.3 | Pengembangan Terminal Terpadu Multi Moda Palembang (Tipe A) | Karya Jaya (Palembang) | Kementerian Perhubungan Dishub, PU Bina Marga | Tahun 2017-2021 |
| II.1.4 | Pengembangan Terminal Tipe A | Karya Jaya, Alang-Alang Lebar, Sekayu, Betung, Sungsang, Lubuk Linggau, Baturaja, Muara Enim, Pagar Alam, Kayuagung dan Lahat serta Simpang Periuk (Kabupaten Musi Rawas) | Kementerian Perhubungan | Tahun 2019-2020 |
| II.1.5 | Pengembangan Terminal Tipe B | Pangkalan Balai, Sekayu, Inderalaya, Martapura, Muara Dua, Lahat, Pagar Alam, Prabumulih, Tebing Tinggi, Tugumulyo OKI, Muara Rupit, Sungai Lilin, Terusan Sebalik, Jakabaring, Simpang Kodim, Bantingan, Talang Ubi, Lakitan, Terawas, Simpang Perintis, Randik Sekayu, Mangunjaya, Tanjung Raja dan Tulung Selapan | Dishub Provinsi | Tahun 2017-2021 |
| II.1.6 | Pengembangan Terminal Tipe C | Berada sesuai kewenangan Kabupaten/Kota | Dishub Kab/Kota | Tahun 2017-2026 |
| II.1.7 | Studi Kelayakan pengembangan jalur kereta api untuk melayani Sumatera Selatan bagian barat dan timur | Sumatera Selatan bagian barat dan timur | Dishub, BAPPEDA | Tahun 2022 |
| II.1.8 | Pengembangan jalur kereta api lintas antar PKN (Lampung-Palembang-Jambi | Lampung-Palembang-Jambi | | Tahun 2022-2036 |
| II.1.9 | Pengembangan lintas jalur lintas kereta api baru dan stasiun | 1. Tanjung Enim-Tanjung Api-api.<br>2. Lubuk linggau-Simpang Tanjung Api-api<br>3. Muare Enim-Prabumulih.<br>4. Tanjung Enim-Pelabuhan Linau. | Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi | 2020-2030 |

| No | Rencana Struktur Ruang | Lokasi | Instansi | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| | | 5. Lubuk Linggau-Kota Padang-Pelabuhan Pulau Balai.<br>6. Palembang-Betung-Batas Jambi | | |
| **II.2** | **Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi dan Perhubungan Laut** | | | |
| II.2.1 | Pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Api-Api | Banyuasin | Dishub | Tahun 2017-2036 |
| II.2.2 | Pembangunan infrtastruktur pendukung Pelabuhan Tanjung Api-Api | Banyuasin | APBN Dishub, PU Bina Marga, PU Cipta Karya | Tahun 2022-2036 |
| II.2.3 | Optimalisasi dan peningkatan Fungsi dan pelayanan Pelabuhan Nasional | Palembang | Kementerian Perhubungan, PT.Pellindo, Dishub | Tahun 2017-2026 |
| II.2.4 | Peningkatan pelayanan pelabuhan penyeberangan dan pelayaran | Banyuasi) | Dishub | Tahun 2017-2026 |
| **II.3** | **Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi dan Perhubungan Udara** | | | |
| II.3.1 | Peningkatan pelayanan dan fasilitas pendukung tatanan kebandarudaraan Bandara Internasional SMB II | Palembang | Kementerian Perhubungan,PT .Angkasa Pura, Dishub | Tahun 2017-2021 |
| II.3.2 | Perluasan runway dan fasilitas bandara SMB II | Palembang | Kementerian Perhubungan, PT.Angkasa Pura, Dishub | Tahun 2022-2026 |
| II.3.3 | Peningakatan fasilitas kebandarudaraan bandara pendukung | 1. Silampari<br>2. Atung Bungsu | Dishub, Kementerian Perhubungan | Tahun 2022-2036 |
| **III.** | **Rencana jaringan energi** | | | |
| **III.1** | **Pengembangan Sistem Jaringan Energi Listrik** | | | |
| III.1.1 | Peningkatan pelayanan listrik masuk desa se Provinsi | Sumatera Selatan | PLN | Tahun 2017-2036 |
| III.1.2 | Idetifikasi potensi dan eksplorasi sumber listrik baru | 1. PLTA, PLTU, Geothermal<br>2. Mikro Hidro<br>3. Lainnya | PLN | Tahun 2017-2036 |
| **IV.** | **Rencana jaringan telekomunikasi** | | | |
| **IV.1** | **Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi** | | | |

| No | Rencana Struktur Ruang | Lokasi | Instansi | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| IV.1.1 | Peningkatan pelayanan jaringan komunikasi :1. Kabel2. Nirkabel (wireless) | Sumatera Selatan | Telkom, Investor | Tahun 2017-2036 |
| IV.1.2 | Peningakatan pelayanan jaringan Internet/Data :<br>1. Broadband/ 3,5G-4G<br>2. WiFi 2,4 dan 5,8 Ghz<br>3. Wimax<br>4. Leased Line/Kabel | Perangkat Daerah Pemprov Sumatera Selatan | Badan Komunikasi dan Informatika, Telkom, Investor | Tahun 2017-2036 |
| V. | Rencana sistem jaringan sumber daya air | Sumatera Selatan | | Tahun 2017-2036 |

**Tabel 4.7**
Hasil Telaah Pola Ruang Provinsi Sumatera Selatan

| No | Rencana Pola Ruang | Lokasi | Instansi | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Rencana kawasan lindung** | | | |
| I.1 | Inventarisasi kawasan lindung | Kawasan Lindung yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi | Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional | Tahun 2017-2021 |
| I.2 | Penetapan tata batas kawasan Hutan Lindung | Banyuasin,Musi Banyuasin, Musi Rawas,Empat Lawang,Lahat,Pagar Alam,OKU,OKUS | Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional | Tahun 2019-2021 |
| I.3 | Penghutanan kembali (reforesty) dan reboisasi kawasan hutan lindung | Seluruh Hutan Lindung yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan | Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional | Tahun 2017-2036 |
| I.4 | Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung nasional | Wilayah TNKS di Sumatera Selatan, Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Suaka Margasatwa | BPKH, Balai Taman Nasional | Tahun 2021-2036 |
| | Pemantauan dan pengawasan di kawasan lindung | Seluruh wilayah | Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional, BP DAS | Tahun 2017-2036 |
| | Pembangunan jalan inspeksi untuk pengendalian kawasan TNKS, hutan lindung, konservasi dan suaka margasatwa | Seluruh wilayah | PU Bina Marga, Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional | Tahun 2017-2021 |
| | Pengelolaan hutan bersama masyarakat | Seluruh wilayah | Dinas Kehutanan,BPKH, Balai Taman Nasional | Tahun 2017-2036 |
| | Evaluasi terhadap hak penguasaan lahan yang telah dikeluarkan/ direkomendasikan oleh pemerintah pusat dan | Seluruh Kawasan lindung | Dinas Kehutanan, Bappeda | Tahun 2017-2026 |

| No | Rencana Pola Ruang | Lokasi | Instansi | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| | daerah. | | | |
| **II.** | **Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis** | | | |
| II.1 | Pengembangan infrastruktur dan sarana sosial ekonomi | 1. Metropolitan Palembang<br>2. Perkotaan Lubuk Linggau.<br>3. Muara Enim dan sekitarnya<br>4. Pelabuhan Tanjung Api-Api<br>5. Kawasan Koridor Palembang-Prabumulih<br>6. Kawasan Koridor Lahat – Muara Enim<br>7. Kawasan Palembang dan sekitarnya (termasuk Sekayu dan Kayuagung).<br>8. Kawasan Tulung Salapan- Cengal Kabupaten OKI.<br>9. Kawasan Koridor Baturaja-Martapura.<br>10. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Danau Ranau. | Seluruh Stakeholder | Tahun 2017-2036 |
| II.2 | Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung nasional | Kawasan Pesisir OKI | BAPEDALDA, Bappeda, BPKH Balai Taman Nasional | Tahun 2017-2026 |
| II.3 | Pemantauan dan pengawasan di kawasan Untuk menjaga fungsi dan kelestarian kawasan | Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) | Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional | Tahun 2017-2036 |
| II.4 | Pemantauan dan pengawasan untuk menjaga kelestarian kawasan | Kawasan Perkotaan Pagar Alam. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda | Tahun 2017-2036 |
| II.5 | Pengembangan kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi Tinggi | Kawasan Panas Bumi (Geotermal) Lumut Balai Rantau Dedap (Semendo Darat Laut, Darat Tengah, Darat Ulu Kabupaten Muara Enim). | Bappeda, Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi | Tahun 2017-2036 |
| II.6 | Pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian dan perikanan | Kawasan Agropolitan Musi Rawas.<br>Kawasan Agropolitan OKI.<br>Kawasan Agropolitan OKU Timur. | Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan | Tahun 2017-2026 |
| II.7 | Kawasan yang memiliki nilai strategis dalam bidang Pertahanan dan Keamanan | Kawasan Pusat Latihan Tempur Baturaja (dahulu OMIBA). | KODAM, KODIM | Tahun 2022-2031 |

| No | Rencana Pola Ruang | Lokasi | Instansi | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| II.8 | Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis | Kawasan-kawasan strategis di seluruh kawasan | Bappeda<br>PU Cipta Karya<br>APBD Provinsi<br>APBD Kabupaten | Tahun 2017-2022 |

### 4.2.4. Telaah SDGs

Analisa permasalahan dan Isu Strategis capaian SDGs Sumatera Selatan dilakukan dengan melihat gambaran pencapaian Sumatera Selatan (pada Bab II) yang telah di*tagging* dengan beberapa indikator utama yang belum tercapai dan melakukan analisa permasalahan dengan melakukan *cascading* per pilar untuk mengetahui akar permasalahan dan mendapatkan isu strategis tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Selatan yang akan menjadi acuan pada RPJMD Sumatera Selatan Periode 2018-2023.

**Pilar I (Pembangunan Sosial)**

**Goal 1 Tanpa Kemiskinan.**

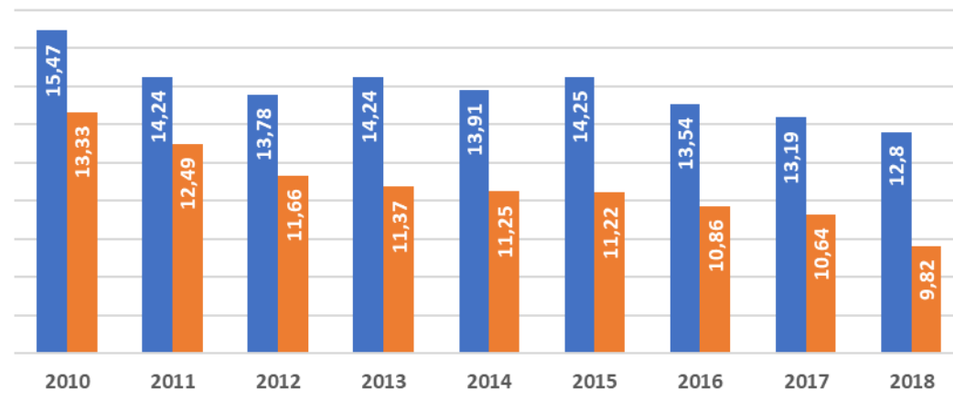
Tingkat kemiskinan Sumatera Selatan adalah indikator utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Goal 1 yang angkanya masih di bawah nasional.

Tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan cukup berfluktuatif dari tahun 2009 hingga 2018. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun dari 16,28% pada tahun 2009 menjadi 12,80% pada tahun 2018 (angka Maret). Angka tersebut setara dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 1,125 juta penduduk pada tahun 2010 menjadi 1,076 juta penduduk yang berarti secara rata-rata, jumlah penduduk miskin hanya menurun 6,125 jiwa/tahun.

Penanggulangan kemiskinan di Sumatera Selatan dihadapkan pada laju penurunan angka kemiskinan yang cenderung lambat. Selama kurun waktu 2010-2018, rata-rata laju penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 0,33%. Laju penurunan angka kemiskinan tertinggi dicapai pada tahun 2011 dengan penurunan sebesar 1,23%, sementara laju penurunan terendah sebesar 0,33% terjadi pada tahun 2014. Dalam kurun waktu 8 tahun yakni dari tahun 2010 hingga 2018, persentase kemiskinan bahkan pernah juga mengalami peningkatan di tahun 2013 dan 2015. Meskipun persentase kemiskinan di Sumatera Selatan mengalami penurunan, namun angka tersebut masih berada di atas tren kemiskinan nasional.

**Gambar 4.2.**

Laju Penurunan Angka Kemiskinan, 2010-2018




Sumber: BPS 2018

Isu lain terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan adalah terjadinya laju pertumbuhan pengeluaran kelompok menengah ke bawah yang lebih rendah. Secara umum, pengeluaran per kapita Sumatera Selatan tahun 2017 yaitu sebesar 924,847 rupiah. Angka tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2011 sebesar 557,869 rupiah. Dalam kurun waktu selama 6 tahun dari 2011 hingga 2017, terjadi peningkatan laju pertumbuhan konsumsi perkapita masyarakat Sumatera Selatan sebesar 65,78%.

Selama periode tahun 2013 sampai 2017 pada semua kelas penduduk yang berpendapatan rendah, sedang dan tinggi terlihat berfluktuatif. Kelas 40 persen penduduk berpendapatan paling rendah tercatat 18,29 persen pada tahun 2017 menurun tiap tahun dari tahun 2014 yang mencapai 20,58 persen. Keadaan ini menggambarkan bahwa pada kelas 40 persen penduduk berpendapatan rendah membaik dengan tingkat ketimpangan pendapatan sedang. Menurunnya persentase penduduk berpendapatan menengah diduga beralih menjadi penduduk berpendapatan tinggi. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase penduduk berpendapatan tinggi yang semula sebesar 42,50 persen pada tahun 2016 meningkat menjadi 43,36 persen pada tahun 2017.

Terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, yang memang perlu mendapat perhatian adalah rendahnya pertumbuhan konsumsi pada kelompok masyarakat miskin termasuk rentan miskin atau status 40% terendah. Rendahnya pertumbuhan konsumsi tersebut secara tidak langsung menghambat upaya penanggulangan kemiskinan dan menandakan perlunya upaya peningkatan pendapatan agar pengeluaran kelompok masyarakat miskin mengalami peningkatan.

Berdasarkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Selatan Tahun 2016-2018, dimana telah dilakukan telaah terhadap

kemiskinan sumatera selatan, maka isu strategis Kemiskinan Sumatera Selatan terkait dengan akar masalah kemiskinan di Sumatera Selatan. Akar masalah ini yang menjadi isu strategis yang memerlukan upaya yang serius dalam penangannya, yaitu:

1. Peningkatan Perlindungan sosial
2. Peningkatan Akses masyarakat terhadap sumberdaya tidak bias gender
3. Peningkatan ketahanan masyarakat miskin,
4. Peningkatan mobilisasi sumber daya,
5. Peningkatan aset dan
6. Peningkatan daya beli masyarakat.

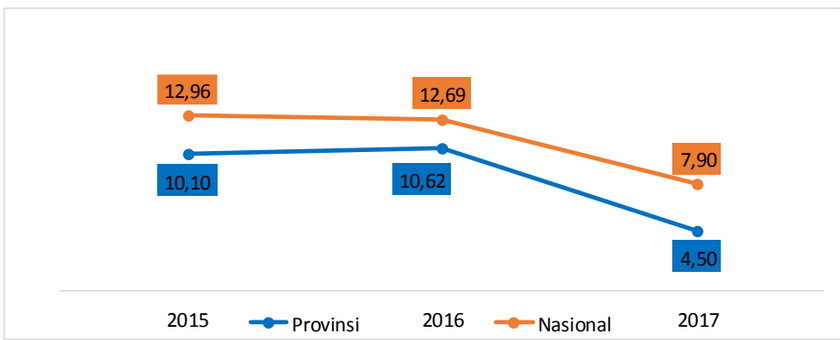
Tabel hasil pelingkupan akar masalah telah dilakukan berupa *cascading* permasalahan (terlampir di Lampiran).

**Goal 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahan Pangan dan Gizi yang Baik serta Meningkatkan Pertanian yang Berkelanjutan**

Beberapa indikator utama yang belum tercapai antara lain Proporsi penduduk Provinsi Sumatera Selatan dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari atau penduduk sangat rawan pangan. Selama tahun 2015-2017 indikator ini berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2015, proporsi tersebut adalah sebesar 10,10% (BPS) dan naik sedikit menjadi sebesar 10,62% pada tahun 2016 (BPS) serta turun menjadi 4,51% pada tahun 2017 (BPS) tetapi masih berada dibawah capaian Nasional 7,90%.

**Gambar 4.3.**

Proporsi Penduduk Provinsi Sumatera Selatan dengan Asupan Kalori Minimum di bawah 1.400 kkal/Kapita/hari




Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Dari sisi kebutuhan pangan, masalah dan tantangan yang dihadapi antara lain: (1) permintaan pangan dalam hal : jumlah, keragaman, kualitas, kandungan gizi, serta keamanan pangan, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan rumah tangga, dan pengetahuan gizi masyarakat; (2) permintaan makanan jadi dan kebiasaan makan di luar rumah meningkat sejalan dengan urbanisasi dan meningkatnya proporsi perempuan bekerja; dan

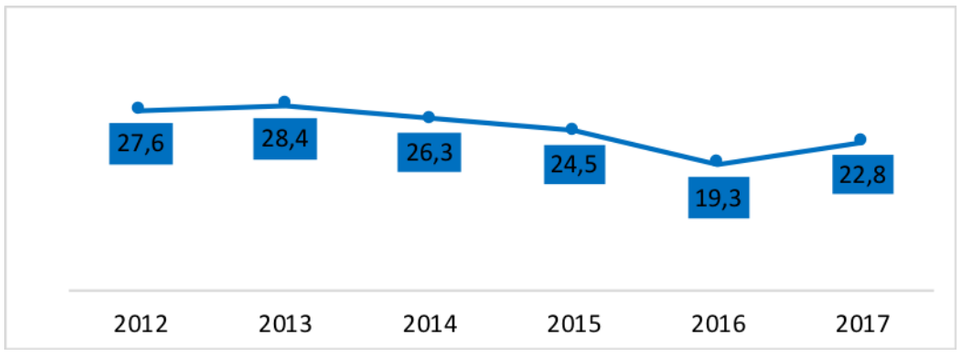
(3) akses pangan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil termasuk pulau-pulau kecil (akses fisik) dan bagi masyarakat berpendapatan rendah (akses ekonomi) masih terbatas.

Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi. Prevalensi stunting pada anak bayi di bawah lima tahun (balita) dan bayi di bawah dua tahun (baduta) masih cukup tinggi, walaupun menunjukkan kecenderungan yang menurun selama periode 2012-2017. Persentase stunting pada anak balita Provinsi Sumatera Selatan dalam enam tahun terakhir mengalami trend penurunan namun sedikit naik pada tahun 2017. Pada tahun 2012 sebesar 27,6%, naik menjadi 28,4% (Riskesdas, 2013) pada tahun 2013, turun menjadi 26,3% pada tahun 2014, kemudian turun menjadi 24,5% pada tahun 2015, turun lagi menjadi 19,30 (PSG, 2016) pada tahun 2016 kemudian naik sedikit menjadi 22,8% (PSG, 2017) pada tahun 2017 tetapi capaian Provinsi Sumatera Selatan masih berada di bawah capaian Nasional yaitu 29,6% (PSG,2017).

**Gambar 4.4**

Persentase Stunting Pada Balita Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2012 – 2017




Sumber : Buku Saku Pemantauan Status Gizi (PSG) Kementerian Kesehatan RI; Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

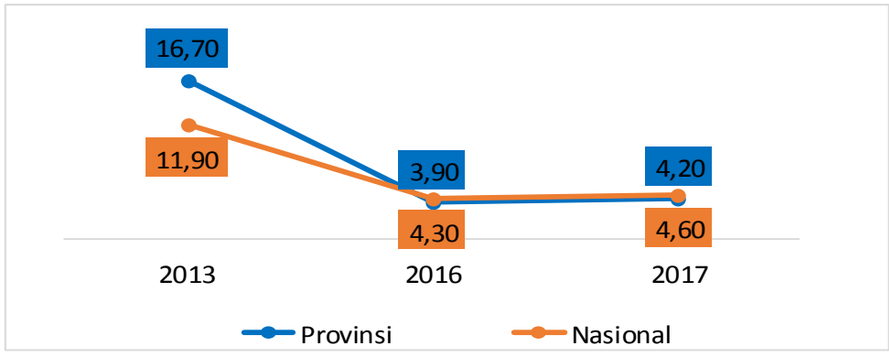
Sementara persentase stunting pada anak baduta Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 16,8% (Riskesdas, 2013) menurun cukup signifikan menjadi 14,2% (PSG, 2016) kemudian turun sedikit menjadi 14,3% (PSG, 2017). Sementara itu, prevalensi balita kurus dari 6,4% (Riskesdas, 2013) naik sedikit menjadi 7,3% (PSG, 2016) dan naik menjadi 7,7% (PSG, 2017). Salah satu faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi status gizi balita adalah status gizi ibu hamil dan pola pemberian ASI eksklusif.

Permasalahan kekurangan gizi pada anak erat kaitannya dengan kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga. Rendahnya ketahanan pangan rumah tangga dapat menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas asupan gizi anak. Faktor lain yang mempengaruhi adalah buruknya pola asuh terutama pemberian makanan bayi dan balita yang disebabkan oleh rendahnya

tingkat pendidikan orangtua, buruknya kondisi lingkungan seperti akses sanitasi dan air bersih, dan rendahnya akses pada fasilitas kesehatan.

**Gambar 4.5**

Obesitas pada anak Balita Provinsi Sumatera Selatan

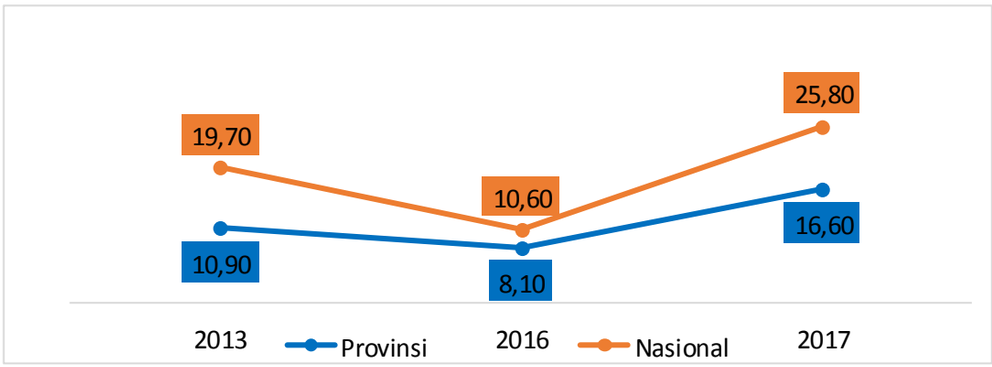



Sumber :Buku Saku Pemantauan Status Gizi (PSG) Kementerian Kesehatan RI; Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Di sisi lain, terjadi peningkatan penurunan yang cukup signifikan pada prevalensi obesitas (kegemukan). Anak balita yang mengalami obesitas pada tahun 2013 sebesar 16,7% (Riskesdas, 2013) dan menurun pada Tahun 2016 sebesar 3,9% (PSG, 2016) dan naik sedikit pada Tahun 2017 sebesar 4,2% (PSG, 2017) tetapi capaian tersebut lebih baik dari capaian Nasional sebesar 4,6% (PSG, 2017).

**Gambar 4.6**

Obesitas pada Penduduk Dewasa > 18 Tahun Provinsi Sumatera Selatan




Sumber : Buku Saku Pemantauan Status Gizi (PSG) Kementerian Kesehatan RI; Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Dalam penyediaan pangan, tantangan dan masalah yang dihadapi antara lain: (1) konversi lahan pertanian pangan terus berlangsung sementara perluasan/pembukaan lahan pertanian terbatas; (2) degradasi kualitas sumber daya air dan perairan serta meningkatnya persaingan pemanfaatan air dengan penggunaan lain; (3) usaha pertanian pangan didominasi usaha tani skala kecil dengan rata-rata usia petani yang semakin tua (aging farmer) dan pendidikan

formal yang relatif rendah, yang mengakibatkan akses pada sumber teknologi, informasi, pasar, dan pembiayaan usaha terbatas; (4) frekuensi dan intensitas kejadian perubahan iklim ekstrim semakin tinggi; (5) proporsi kehilangan hasil dan pemborosan pangan (food losses and waste) masih besar; (6) prasarana logistik dan distribusi pangan belum merata terutama di wilayah timur Indonesia, menyebabkan kecukupan dan kontinuitas penyediaan pangan terbatas dan berdampak pada risiko rentan pangan di wilayah tersebut; dan (7) kemitraan yang setara antara usaha pertanian skala kecil dan besar masih sangat terbatas.

Dalam upaya mencapai pertanian berkelanjutan, pemerintah melepas varietas unggul tanaman pangan yang sesuai dengan agroekosistem dan mampu merespon perubahan lingkungan. Sejak pertengahan tahun 1970-an, Indonesia mulai mengembangkan berbagai varietas unggul baru (VUB) tanaman pangan bekerja sama dengan lembaga penelitian internasional. Sampai dengan tahun 2015, telah dilepas lebih dari 400 VUB padi inbrida hasil pemuliaan para peneliti (pemulia atau breeder) Indonesia dan 100 VUB padi hibrida yang dihasilkan peneliti Indonesia dan yang diintroduksi oleh perusahaan multinasional.

Selama periode 2010-2016, pemerintah telah melepas 60 VUB padi, 31 VUB jagung, dan 11 VUB kedelai hasil para peneliti nasional (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian/Balitbangtan). Untuk tanaman padi, VUB dirancang untuk dimanfaatkan pada berbagai agroekosistem, yaitu 35 varietas di lahan irigasi, 10 varietas di lahan tadah hujan/kering, dan 6 varietas di lahan rawa. Untuk tanaman jagung, dari 31 VUB sebanyak 9 verietas berupa jenis VUB hibrida.

Untuk proporsi hewan ternak dan sejenisnya yang diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan, sejak 1998 Balitbangtan telah melakukan eksplorasi sumber daya genetik hewan ternak lokal rumpun ayam, itik, dan domba. Berdasarkan hasil eksplorasi dan identifikasi karakterisasi sifat-sifat produksi ternak, selanjutnya dilakukan serangkaian proses seleksi untuk mendapatkan rumpun atau galur ternak yang menghasilkan bibit unggul. Melalui proses pemuliaan ternak ini, pada tahun 2014-2016 telah dilepas satu bibit unggul ayam lokal petelur, satu bibit unggul ayam pedaging, dua itik unggul, dan satu ternak domba komposit Sumatera (komposisi genetik 50% domba lokal, 25% *St. Croix*, 25 *Barbados Blackbelly*).

Berdasarkan hasil *cascading* terhadap Goal 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahan Pangan dan Gizi yang Baik serta Meningkatkan Pertanian yang Berkelanjutan, maka Sumatera Selatan memiliki isu strategis yaitu:

1. Penurunan Kelaparan
2. Peningkatan Kecukupan Gizi

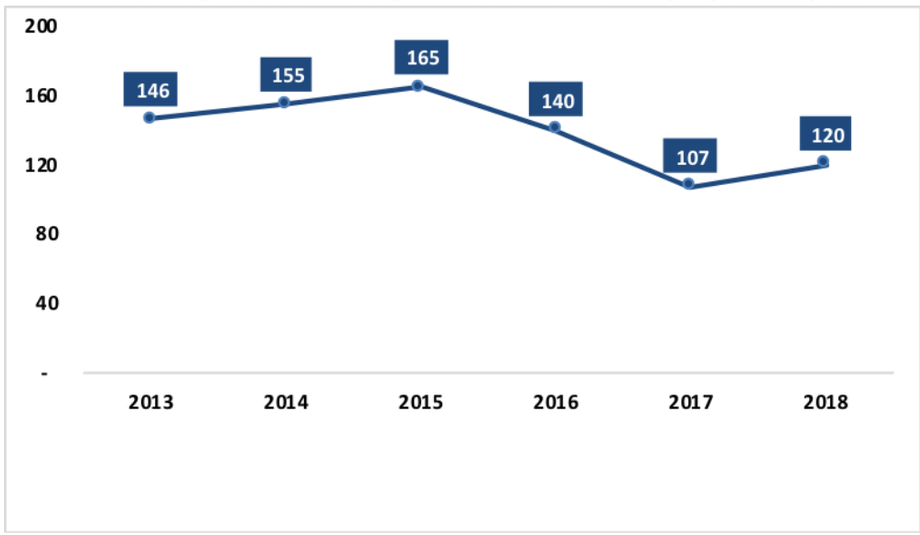
3. Peningkatan Produktivitas Pertanian
4. Peningkatan Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan
5. Pengelolaan Keragaman Tanaman dan hewan
6. Peningkatan Investasi untuk meningkatkan Produktivitas pertanian
7. Penguatan Fungsi Pasar Komoditas
8. Penurunan Kerawanan Pangan Berdasarkan Pengalaman

**Goal 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia**

Sampai saat ini ukuran untuk Maternal Mortality Rate (MMR) atau Angka Kematian Ibu (AKI) adalah adalah jumlah kematian ibu akibat komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang dicatat selama 1 tahun per 100.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Untuk capaian AKI saat ini masih menggunakan SDKI tahun 2012 yaitu secara nasional 359 per 100.000 kelahiran hidup dan hanya mewakili angka Nasional tidak sampai ke tingkat provinsi. Oleh karena datanya diperoleh 5 (lima) tahunan sehingga untuk mengukur kinerja program kesehatan ibu menggunakan angka absolut jumlah kematian ibu.

Jumlah kematian ibu di Provinsi Sumatera Selatan cenderung mengalami penurunan dari 146 kasus pada tahun 2013 menjadi 120 kasus pada tahun 2018, seperti terlihat pada Trend berikut :

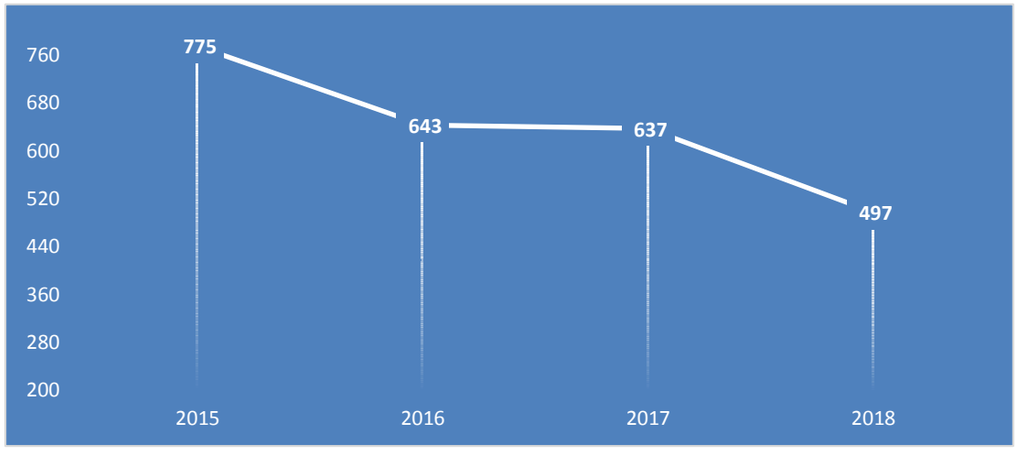
**Gambar 4.7**
Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018




Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan data laporan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) angka kematian bayi di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 sebanyak 497 orang, jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun 2017 sebanyak 637 orang. Trend kematian bayi selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

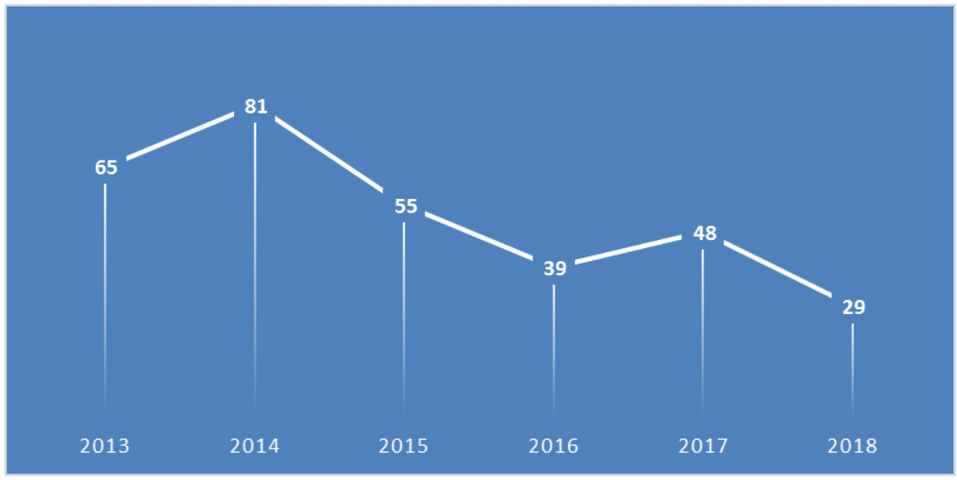
**Gambar 4.8**
**Angka Kematian Bayi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018**




Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Tren Jumlah Kematian Balita di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 berjumlah 65 kasus, dan di tahun 2014 mengalami kenaikan berjumlah 81 kasus, serta ditahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan berjumlah 29 kasus tahun 2018.

**Gambar 4.9**
Jumlah Kematian Balita di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018




Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Dalam SDKI, imunisasi dasar lengkap (IDL) didefinisikan sebagai persentase anak usia 12-23 bulan yang menerima imunisasi BCG, campak, dan tiga kali untuk DPT dan polio. Sementara itu, menurut Riskesdas adalah jika anak 12- 23 bulan sudah mendapatkan semua jenis imunisasi: satu kali HB-0, satu kali BCG, tiga kali DPT-HB, empat kali polio, dan satu kali imunisasi campak. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Provinsi Sumatera Selatan selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 mencapai 91,20%, mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2016 yaitu 98,80%. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 juga mengalami peningkatan yaitu menjadi 99,00% dan 99,40%.

**Gambar 4.10**
Persentase anak usia 0-11 bulan
yang mendapat imunisasi dasar lengkap
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018




Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan maternal termasuk kompetensi SDM, fasilitas, puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); 2) peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi ibu dan remaja, serta pentingnya pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil; 3) peningkatan pengetahuan ibu tentang pola asuh bayi dan anak; 4) peningkatan peran Posyandu; dan 5) peningkatan upaya promosi dan edukasi kesehatan terutama imunisasi dan manfaatnya kepada masyarakat umum.

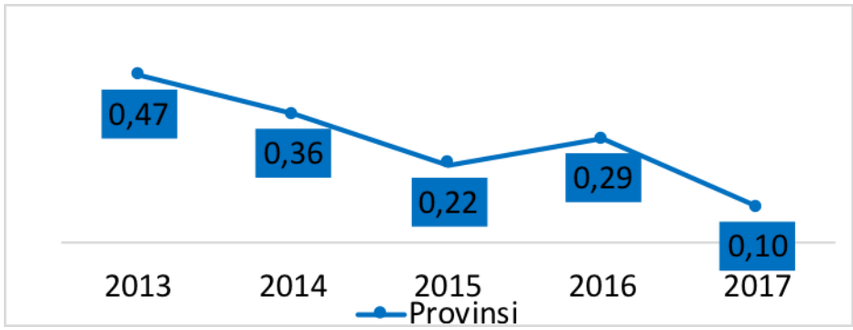
Mengakhiri Epidemi Penyakit Menular. Kasus HIV/AIDS menunjukkan kecenderungan meningkat, namun prevalensi masih dapat ditahan di bawah 0,5%. Pada tahun 2016 dan 2017 capaian prevalensi HIV Sumatera Selatan sebesar 0,3%.

Penanggulangan dan pengendalian Penyakit TB Paru di Sumatera Selatan dengan melaksanakan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-course), TB Paru merupakan masalah kesehatan, berdasarkan hasil survey prevalensi TB di Indonesia tahun 2004 menunjukkan bahwa angka prevalensi TB BTA positif secara regional untuk wilayah Sumatera adalah 160 per 100.000 penduduk.

Kemajuan yang signifikan dicapai dalam upaya mengakhiri epidemi malaria, kusta dan filariasis. Kecenderungan angka kesakitan malaria di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Annual Paracite Incidence (API)

menurun cukup signifikan dari 0,47% pada tahun 2013 menjadi 0,10% per 1000 penduduk pada tahun 2017.

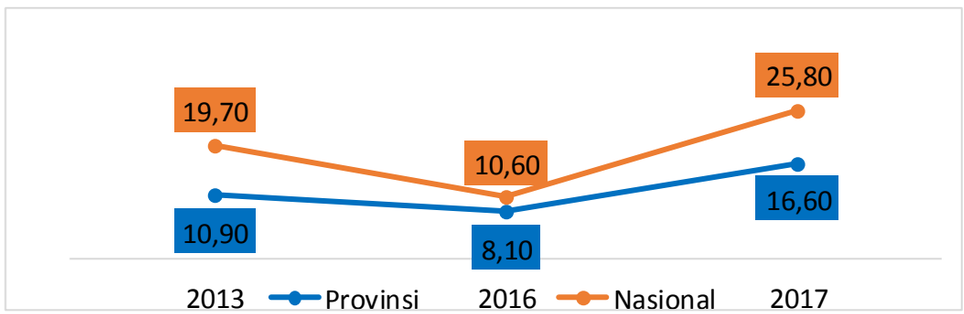
**Gambar 4.11**
Kejadian Malaria per 1000 orang
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2017




Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Prevalensi obesitas pada penduduk dewasa (usia lebih dari 18 tahun) pada kelompok ini sebesar 10,9% (Riskesdas, 2013), menurun sedikit menjadi 8,1% (PSG, 2016),dan meningkat kembali menjadi 16,6% (PSG, 2017) tetapi capaian tersebut lebih baik dari capaian Nasional sebesar 25,8% (PSG, 2017).

**Gambar 4.12**
Obesitas pada Penduduk Dewasa > 18 Tahun
Provinsi Sumatera Selatan




Sumber : Buku Saku Pemantauan Status Gizi (PSG) Kementerian Kesehatan RI; Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Perilaku merokok, selain pola makan dengan gizi tidak seimbang dan kurangnya aktivitas fisik, menyumbang pada peningkatan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk pengendalian faktor resiko salah satunya adalah melalui kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) dan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR). Untuk kawasan tanpa rokok (KTR) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan pada tahun 2018 mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan untuk implementasi Kawasan Tanpa Rokok.

Tantangan untuk mengakhiri epidemi penyakit menular adalah: 1) perluasan screening wajib pada ibu hamil; 2) perluasan penggunaan metode

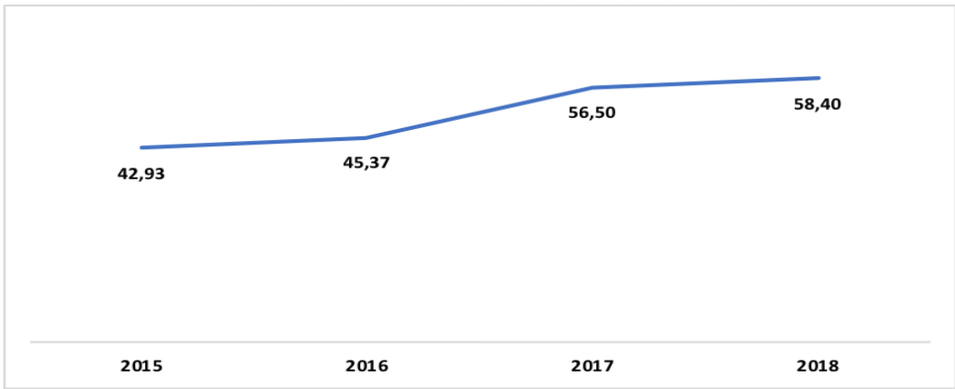
Tes Cepat Molekuler (TCM) TB ke seluruh RS untuk meningkatkan temuan kasus baru TB; 3) peningkatan upaya mencegah Multi Drug Resistance (MDR); dan 4) peningkatan kebutuhan logistik, SDM dan pembiayaan untuk HIV/AIDS (obat ARV, reagen dan diagnostic kit) dan TB. Sementara, tantangan untuk menurunkan kematian akibat PTM diantaranya: 1) penjangkauan 2/3 penderita PTM yang belum mengetahui bahwa telah menderita PTM; 2) peningkatan upaya promotif dan preventif untuk pengendalian faktor risiko PTM; dan 3) peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, serta fasilitas layanan kesehatan seiring dengan meningkatnya jumlah penderita PTM.

Akses Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi. Berdasarkan BPS, angka kelahiran total *(Total Fertility Rate/TFR)* Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 yaitu 2,5 anak per 1.000 perempuan, sedangkan pada tahun 2015 yaitu 2,8 anak per 1.000 perempuan. Sementara itu, angka kelahiran perempuan usia 15-19 tahun Provinsi Sumatera Selatan *(Age Specific Fertility Rate/ASFR)* menaik dari 51 (2007) menjadi 66 kelahiran per 1.000 perempuan (2012). Dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan reproduksi, angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) semua cara meningkat dari 61,4% (2007) menjadi 61,9% (2012). Namun, capaian tersebut menurun sepanjang tahun 2013-2015, dari 61,98% menjadi 59,98% (Susenas). Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan partisipasi pendidikan perempuan untuk mencegah pernikahan dini; 2) peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); dan 3) peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi terutama bagi anak usia sekolah.

Mencapai Cakupan Kesehatan Universal. Sejak tahun 2009 Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai *Universal Coverage* dengan Program Jamsoskes Sumsel Semesta. Provinsi Sumatera Selatan menjadi Provinsi pertama yang mencapai universal coverage dan menjadi percotohan Nasional. Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan yang tercakup dalam JKN terus ditingkatkan.

Integrasi Jamsoskes ke JKN, sesuai amanat UU No.40/2004 tentang SJSN, UU No.24/2011 tentang BPJS, PP No.12/2013 tentang Jaminan Kesehatan, PP 109/2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial, PP No.74/2014 tentang pedomanan penyusunan peta jalan penyelenggaraan jaminan sosial bidang kesehatan dan bidang ketenagakerjaan, dan TL surat Mendagri No. 440/3889/SJ 19 Okt 2016 tentang Dukungan Pemda pada program JKN. Berikut ini persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan :

**Gambar 4.13.**
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 – 2018




*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*

Berdasarkan Susenas, perluasan cakupan berdampak pada menurunnya *unmet need* pelayanan kesehatan dari 9,5% (2015) menjadi 10,6% (2017). Pelaksanaan cakupan kesehatan universal perlu diarahkan pada upaya pemerataan pelayanan kesehatan antarwilayah. Upaya ke depan diantaranya: 1) menjangkau kepesertaan JKN dari pekerja informal dan pekerja penerima upah; 2) memperluas kerja sama BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) swasta/mandiri; dan 3) meningkatkan akses pada fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah.

Berdasarkan hasil *cascading* terhadap goal ini, maka isu strategis pada Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia adalah,

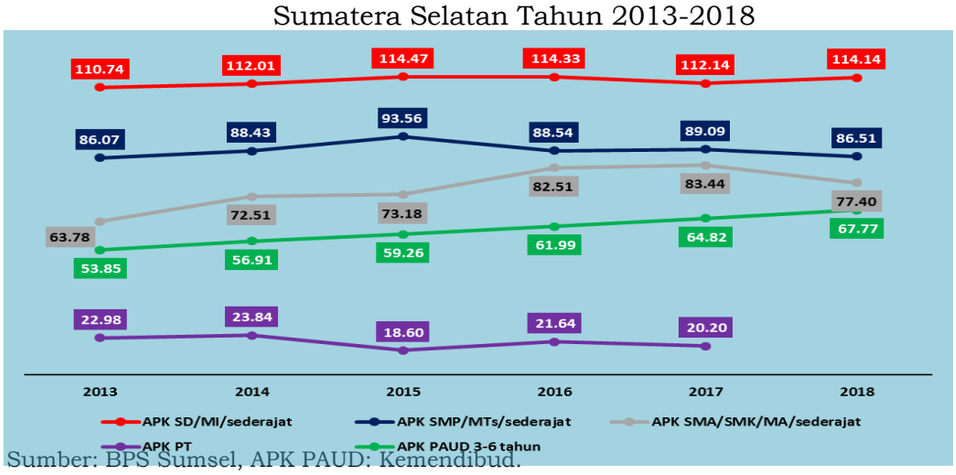
1. Penurunan Angka Kematian Ibu
2. Penurunan Angka Kematian Bayi
3. Mengakhiri Epidemi AIDs dan penyakit menular lainnya
4. Penurunan angka kematian akibat penyakit tidak menular
5. Pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan Narkoba
6. Penurunan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas
7. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi
8. Peningkatan Akses terhadap pelayanan kesehatan dasar
9. Penurunan jumlah kematian akibat bahan kimia dan polusi
10. Perkuatan pelaksanaan The Framework Convention on Tobacco Control WHO
11. Penelitan dan pengembangan vaksin
12. Peningkatan pembiayaan kesehatan dan pelatihan tenaga kesehatan.

**Goal.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar sepanjang Hayat untuk Semua**

Partisipasi pendidikan penduduk Provinsi Sumatera Selatan terus meningkat. Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 3-6 tahun, tingkat partisipasi pendidikan terus membaik. Hal ini ditunjukkan dengan

meningkatnya tingkat partisipasi PAUD usia 3-6 tahun sebesar dari 56,38% (2013) menjadi 67,72% (2018). Peningkatan partisipasi PAUD ini tidak terlepas dari tingginya peran dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

**Gambar 4.14**
Tren APK PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan Perguruan Tinggi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018



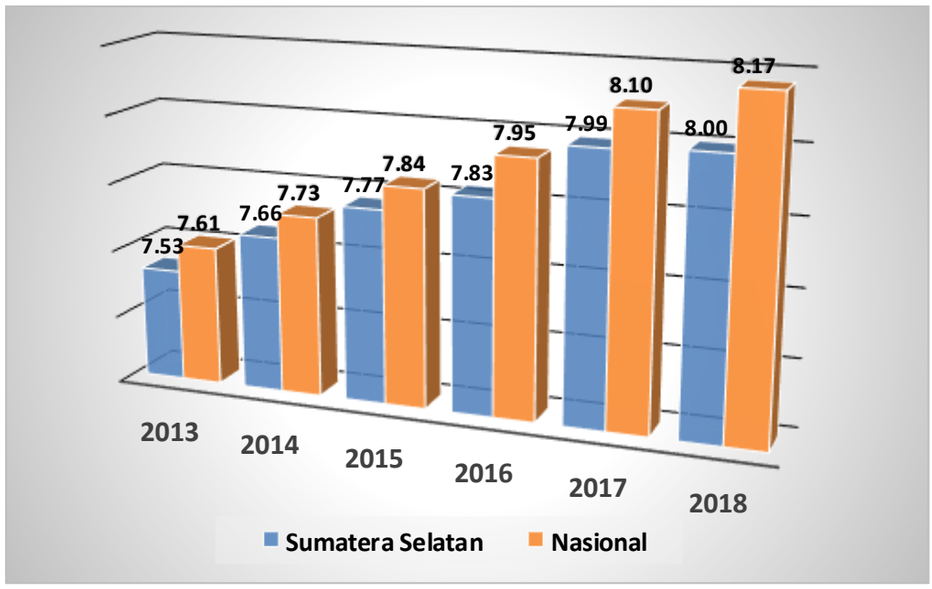

Sumber: BPS Sumsel, APK PAUD: Kemendibud.

Selain itu, tingkat pendidikan penduduk pada jenjang pendidikan dasar sampai tinggi terus meningkat. Gambar 4.13 menggambarkan perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat hingga jenjang Pendidikan Tinggi tahun 2013-2018. Partisipasi pendidikan pada jenjang SD/MI/sederajat pada tahun 2013-2018 mengalami fluktuasi, terjadi peningkatan hingga tahun 2015 akan tetapi kembali turun pada tahun berikutnya hingga pada tahun 2018 menyentuh nilai 114,14%.

APK SMP/MTs/sederajat mengalami peningkatan dari 86,07% pada tahun 2013 menjadi 86,51% (2018). Tingkat partisipasi jenjang SMA/ SMK/MA/sederajat juga mengalami peningkatan dari 63,78% (2013) menjadi 77,40% (2018). APK pendidikan tinggi mengalami penurunan dari 22,98% (2013) menjadi 20,20% (2017).

Indikator rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan berada pada 7,53% meningkat menjadi 8,00% pada tahun 2018.

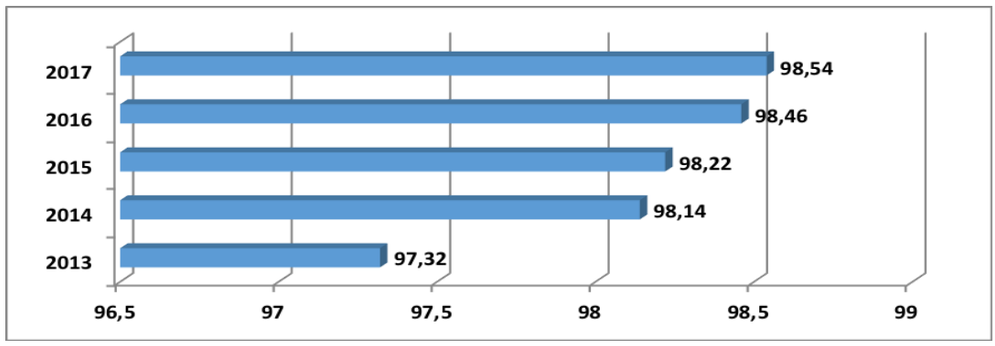
**Gambar 4.15**
Tren Rata-Rata Lama Sekolah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018




Sumber: BPS Sumsel

Capaian kinerja pembangunan pendidikan Sumatera Selatan yang menggambarkan program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sudah tepat sasaran digambarkan dengan meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. Pada tahun 2013 persentase angka melek aksara Provinsi Sumatera Selatan sebesar 97,32% meningkat sebesar 1,22% menjadi 98,54% pada tahun 2017.

**Gambar 4.16**
Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥15 Tahun



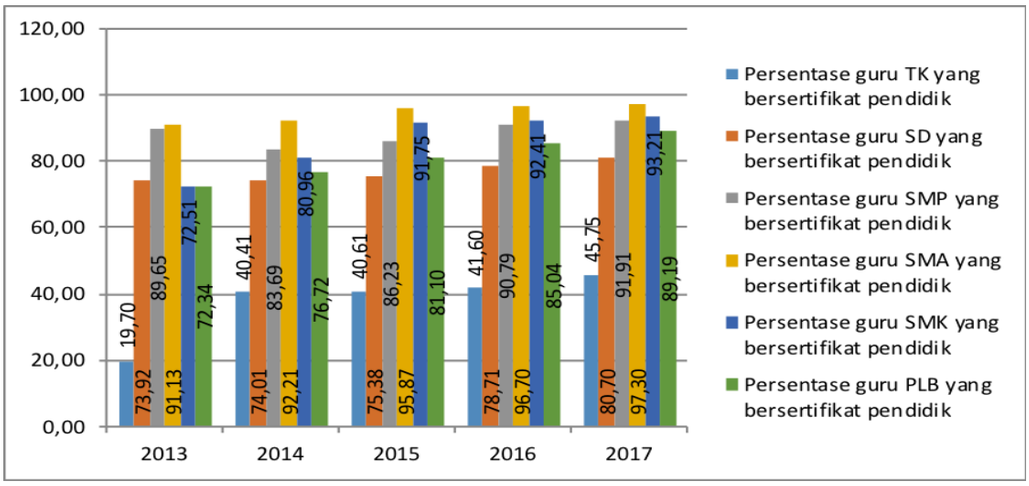

Sumber: BPS Sumsel

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan sangat memperhatikan kualitas sumber daya pendidik. Peningkatan kualitas sumber daya pendidik diprogramkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan guru dalam angka peningkatan kompetensi para pendidik disetiap tingkat pendidikan. Berdasarkan gambar berikut dapat dilihat peningkatan

persentase guru yang bersertifikat pendidik. Pada tingkat TK, persentase guru dengan sertifikat pendidik pada tahun 2013 sebesar 19,70% meningkat menjadi 45,75% pada tahun 2017. Guru SD yang bersertifikat pendidik pada tahun 2013 sebesar 73,92% meningkat menjadi 80,70% pada tahun 2017. Pada tingkat SMP persentase guru bersertifikat pendidik pada tahun 2013 sebesar 89,65% meningkat menjadi 91,91% pada tahun 2017. Peningkatan juga terjadi pada persentase guru yang bersertifikat pendidik pada tingkat SMA, pada tahun 2013 persentasenya sebesar 91,13% meningkat menjadi 97,30% pada tahun 2017. Begitu juga pada tingkat SMK terjadi kenaikan persentase jumlah guru bersertifikat pendidik, ada tahun 2013 sebesar 72,51% meningkat menjadi 93,21%. Terakhir adalah guru Pendidikan Luar Biasa yang persentase pendidik bersertifikat pada tahun 2013 sebesar 72,34% meningkat menjadi 89,19% pada tahun 2017.

**Gambar 4.17**

Persentase Guru Yang Bersertifikat Pendidik Tahun 2013-2017

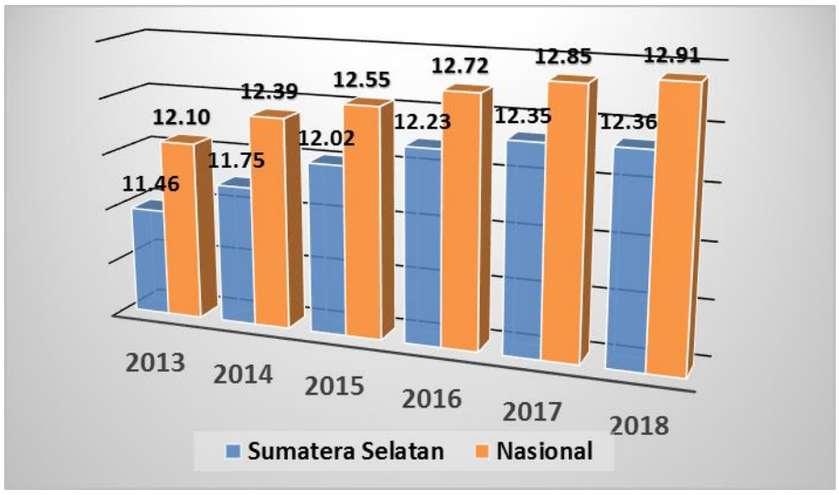



Sumber: BPS Sumsel

Selain itu capaian terkait pendidikan adalah Persentase Harapan Lama Sekolah. Pada tahun 2013 Persentase Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Selatan mencapai 11,46% meningkat menjadi 12,36% pada tahun 2018.

**Gambar 4.18**

Persentas Harapan Lama Sekolah Tahun 2013-2018



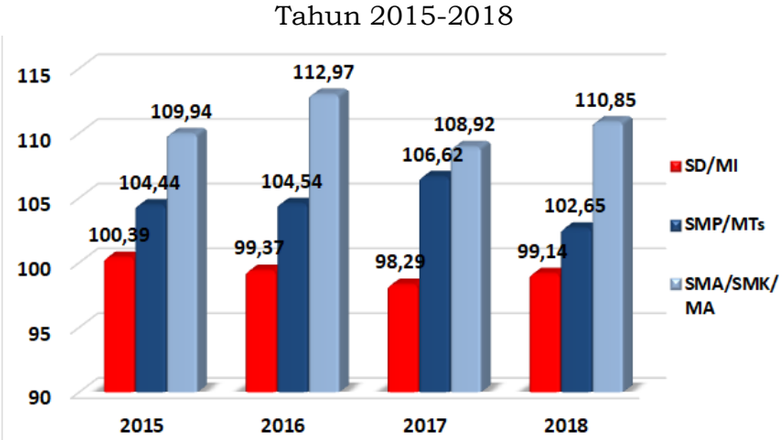

Sumber: BPS Sumsel

Rasio APM-SD adalah perbandingan antara APM tingkat SD (SD, MI, Salafiah Ula, dan Paket A setara SD) perempuan terhadap APM tingkat SD laki-laki. Rasio APM-SMP adalah perbandingan antara APM tingkat SMP (SMP, MTs, Salafiah Wustha, dan Paket B setara SMP) perempuan terhadap APM tingkat SMP laki-laki. Rasio APM SMA adalah perbandingan antara APM tingkat menengah (SMA, SMK, MA, Salafiah Ulya dan paket C setara SM) perempuan terhadap APM tingkat menengah laki-laki.

Capaian Provinsi Sumatera Selatan terhadap indikator-indikator adalah sebagaimana yang terlihat pada grafik berikut. Rasio APM-SD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 sebesar 100,39 pada tahun 2015 menurun menjadi 99,14 pada tahun 2018. Rasio APM-SMP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 sebesar 104,44 menurun menjadi 102,65 pada tahun 2018. Rasio APM SMA Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 sebesar 109,94 meningkat menjadi 110,85 pada tahun 2018.

**Gambar 4.19**

Rasio APM Perempuan dan Laki-Laki SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Tahun 2015-2018




Sumber: BPS Sumsel

Berdasarkan uraian di atas serta hasil *cascading*, maka isu strategis pada goal ini adalah,

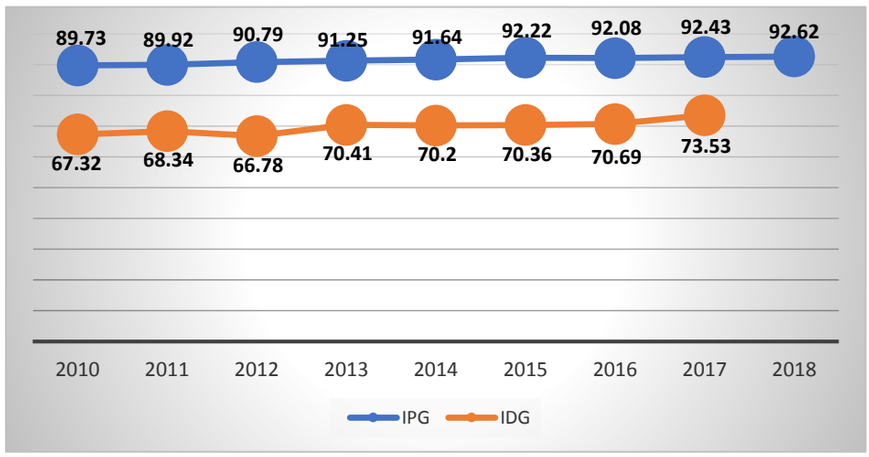
1. Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat
2. Pendidikan Dasar dan Menengah Yang Gratis dan Berkualitas
3. Peningkatan Akses terhadap Perkembangan dan Pengasuhan anak usia dini yang berkualitas
4. Peningkatan akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan teknis kejuruan, pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas
5. Peningkatan ketreampilan untuk pekerjaan layak dan kewirausahaan
6. Peningkatan akses untuk semua tingkat pendidikan bagi masyarakat tanpa disparitas gender
7. Peningkatan Literasi dan Numerasi
8. Peningkatan pasokan guru yang berkualitas.

**Goal.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan**

Daya saing suatu negara salah satunya ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia, baik menyangkut kemampuan, skill maupun produktivitas. Dilihat dari komposisi jumlah penduduk, sumberdaya manusia laki-laki dan perempuan nyaris setara. Dengan demikian, separuh dari daya saing tadi ditentukan oleh perempuan. Untuk meningkatkan daya saing negara dan pembangunan, sebuah negara perlu meningkatkan kesetaraan gender, yaitu meningkatkan hak, tanggung jawab, kapasitas dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Terkait hal tersebut di atas, Indonesia menggunakan dua (2) indikator pengukuran kesetaraan gender, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kedua indeks ini penting untuk melihat capaian pembangunan kesetaraan gender. Jika Indeks pembangunan Gender lebih melihat bagaimana perempuan mengkases pembangunan dari sisi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan yaitu IPM yang dilihat berdasarkan data pilah perempuan, maka Indeks Pemberdayaan Gender lebih melihat bagaimana pemberdayaan perempuan dilihat dari dimensi ekonomi dan politik yaitu dimensi perempuan di dunia kerja dan keterwakilan perempuan di parlemen, dimensi perempuan pada posisi manajerial dan lain sebagainya.

**Gambar 4.20**
Trend IPG dan IDG Sumsel Tahun 2010-2018




Sumber: BPS, 2018

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Sumatera Selatan dari tahun 2010–2018 menunjukkan trend meningkat dari 89,73% pada tahun 2010 menjadi 92,62% pada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan perempuan di Sumatera Selatan selama periode tersebut mengalami peningkatan. Namun demikian apabila dilihat dari capaian komponen IDG Sumatera masih perlu ditingkatkan.

Capaian IPG Provinsi Sumatera Selatan yang sebesar 92,62%, hampir mendekati 100 sebetulnya mengindikasikan bahwa perempuan Sumatera Selatan memiliki kesetaraan yang hampir menyamai laki-laki dalam hal mengakses pembangunan. Capaian IPG tidak lain adalah Rasio IPM Perempuan terhadap IPM Laki-laki yag dihitung berdasarkan capaian data terpilah (Perempuan dan laki-laki) indikator pembentuk IPM (Derajat kesehatan: Usia Harapan Hidup, pendidikan; Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah; kesejahteraan: Pengeluaran per kapita). Dapat diartikan bahwa kesempatan perempuan Sumatera Selatan untuk mengakses pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan hampir setara dengan laki-laki.

Berdasarkan Angka Partisipasi Sekolah diketahui bahwa perempuan mencapai partisipasi sekolah lebih tinggi di beberapa jenjang usia. Baik pada usia 7-12 Tahun, 13-15 Tahun dan 16-18 Tahun. Persentase perempuan yang menamatkan pendidikan juga cukup tinggi dibandingkan laki-laki, terutama pada jenjang, SD, SMP dan Perguruan Tinggi.

**Tabel 4.8**
Keadaan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menurut jenis kelamin

| No | Kondisi Pendidikan | Jenis Kelamin | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur | | | |
| | 5-6 | 41,64 | 43,33 | 42,45 |
| | 7-12 | 99,47 | 99,75 | 99,61 |
| | 13-15 | 92,89 | 94,54 | 93,68 |
| | 16-18 | 64,66 | 72,87 | 68,67 |
| 2 | Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | | | |
| | <SD | 14,38 | 18,04 | 16,18 |
| | SD Sederajat | 34,50 | 35,05 | 34,77 |
| | SLTP Sederajat | 17,97 | 16,93 | 17,46 |
| | SMU Sederajat | 26,05 | 22,45 | 24,27 |
| | Akademi/Universitas | 7,10 | 7,53 | 7,32 |
| 3 | Rata-rata Lama Sekolah | 8,52 | 8,12 | 8,32 |
| 4 | Angka Buta Huruf | 0,63 | 2,47 | 1,54 |

Sumber: Susenas 2016

Indeks Pemberdayaan Gender. Selanjutnya, agak berbeda dengan IPG, pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) capaian Provinsi Sumatera Selatan sedikit lebih rendah dibanding nasional. Komponen pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terdiri dari (1) Keterwakilan perempuan di parlemen; (2) perempuan sebagai tenaga profesional; dan (3) sumbangan pendapatan perempuan. Hasil Pemilu tahun 2014 keterwakilan perempuan di legislatif Sumsel sebesar 17,33%. Sedangkan tahun 2017 dengan adanya PAW meningkat menjadi 20,27%. Untuk komponen sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja terdapat masih tingginya kesenjangan ekonomi perempuan. Pengeluaran perkapita perempuan hanya 8.927 (ribu rupiah) jauh lebih rendah dibanding laki-laki 14.330 (ribu rupiah). Sumbangan pendapatan perempuan hanya sebesar 34,70 persen. Untuk komponen Perempuan sebagai Tenaga Manajer Profesional Administrasi Teknis masih sebesar 49,25% di tahun 2017.

Beradasarkan capaian tersebut maka dapat dikatakan bahwa Pemberdayaan Gender Provinsi Sumatera Selatan belum sebaik capaian indeks pembangunan gender. Terdapat ketimpangan yang cukup besar pada indeks pemberdayaan gender. Indeks Pemberdayaan gender tidak lain adalah refleksi sejauh mana peran perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Perempuan Sumatera Selatan masih mengalami ketidakadilan gender atau dikriminasi ketika memasuki dunia kerja, serta pada sektor lain seperti politik. Pola patriarkhi yang mengakar kuat juga membuat perempuan Sumatera Selatan mengalami marginalisasi.

Tetapi hal yang perlu dilihat juga adalah Sex Ratio atau perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan perempuan di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data BPS Tahun 2017, maka Sex Ratio Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 sebesar 103,36 yang menunjukkan bahwa dari setiap jumlah 100 perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. Artinya berdasarkan komposisi penduduk, jumlah laki-laki memang lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan.

Tantangan kedepan adalah bagaimana agar peningkatan kesetaraan gender tersebut lebih signifikan karena saat ini Provinsi Sumatera Selatan masih tergolong Provinsi yang memiliki Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tinggi. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengarusutamaan gender. Hal lain yang diperlukan adalah optimalisasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.

Keterwakilan Perempuan di Legislatif dan Eksekutif. Keterwakilan perempuan Sumatera Selatan di dunia politik masih jauh dari kuota yang disediakan pemerintah sebesar 30%. Perempuan Sumatera Selatan belum berpartisipasi Penuh dan Efektif, serta belum optimal memanfaatkan peluang kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memasuki dunia politik (parlemen). Pada Pemilu tahun 2014 untuk periode 2014-2019, keterwakilan perempuan di DPRD baru mencapai 17,33 %. Sedangkan keterwakilan di DPD cukup tinggi yaitu sebesar 75% Hanya terdapat 13 orang Legislatif perempuan diantara 62 orang legislatif laki-laki di DPRD dan 3 perempuan dari 4 orang anggota DPD. Persentase perempuan sebagai pengambil keputusan di Pemerintah juga masih rendah yang ditunjukkan oleh persentase pejabat perempuan eselon I adalah 15,6% sedangkan di eselon II-a adalah 15,21% yaitu 7 0rang dari 46 orang pejabat eselon II-a (Profil Gender Sumatera Selatan Tahun 2017).

Proporsi perempuan pada posisi manjerial meningkat dari sebesar 20,66 % pada Tahun 2015 menjadi sebesar 27,51 % pada Tahun 2016. Angka ini lebih baik daripada capaian nasional yang sebesar 22,04 % pada Tahun 2015 dan menjadi 24,17% pada Tahun 2016 (Susenas 205 dan 2016).

Tantangan yang dihadapi adalah peningkatan kapasitas bagi:

1) Perempuan kader partai politik;
2) Perempuan sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat;
3) Perempuan calon kepala daerah;
4) Perempuan anggota legislatif yang terpilih; dan
5) Perempuan sebagai kepala daerah.

Sumbangan Pendapatan Perempuan. Perempuan Sumatera Selatan belum sepenuhnya mengalami kesetaraan dalam dunia kerja. Dengan demikian sumbangan pendapatan perempuan belum setinggi laki-laki. Ada banyak streoptype yang membebani perempuan. Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Beberapa bidang pekerjaan lebih didominasi laki-laki, pada beberapa sektor bahkan perempuan cenderung lebih tinggi tidak dibayar dibandingkan laki-laki.

**Tabel 4.9**
Keadaan Ketenagakerjaan Sumatera Selatan berdasarkan jenis kelamin

| No | Keadaan Ketenagakerjaan Sumatera Selatan | Jenis Kelamin | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 85,13 | 57,67 | 71,59 |
| 2 | Lapangan Pekerjaan | | | |
| | Sektor Primer | 53,97 | 44,48 | 50,19 |
| | Sektor Sekunder | 12,30 | 6,28 | 9,90 |
| | Sektor Tersier | 33,74 | 49,24 | 39,90 |
| 3 | Status Pekerjaan Berusaha | 48,29 | 29,21 | 48,29 |
| | Buruh/Karyawan | 37,46 | 31,69 | 37,46 |
| | Pekerja Bebas | 5,93 | 3,33 | 5,93 |
| | Pekerja Tak dibayar | 8,32 | 35,77 | 8,32 |
| 4 | Angka Pengangguran | 4,39 | 4,19 | 4,31 |

Sumber : Susenas, 2016

Penggunaan Teknologi. Meningkatkan Penggunaan Teknologi. Pada tahun 2016 sebesar 47,23%. Sementara, untuk laki-laki adalah 65,42% (Susenas 2016). Kepemilikan tertinggi terjadi di Kota Palembang, laki-laki sebesar 65,42% dan perempuan 66,69 %. Paling rendah kepemilikan telepon seluler perempuan di Kabupaten OKU Selatan dengan perbandingan laki-laki 57,34% dan perempuan 30,55 %. Tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan penggunaan teknologi adalah meningkatkan cakupan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatannya untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan. Tetapi hal yang perlu dilihat juga adalah Sex Ratio atau perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan perempuan di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data BPS Tahun 2017, maka Sex Ratio Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 sebesar 103,36 yang menunjukkan bahwa dari setiap jumlah 100 perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. Artinya berdasarkan komposisi penduduk, jumlah laki-laki memang lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan. Termasuk Kota Palembang dan Kabupaten OKU Selatan.

Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2016 menunjukkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan, sebagai berikut:

1) Kekerasan oleh pasangan: (a) sekitar 2 dari 11 perempuan yang pernah/sedang menikah mendapat kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangannya selama hidup mereka (18,3%) dan sekitar 1 dari 20 perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (4,9%); serta (b) sekitar 28,3% perempuan yang pernah/sedang menikah mendapat minimal 1 dari 3 jenis kekerasan (fisik, seksual dan emosional) dari pasangannya selama hidupnya dan sekitar 10,4% dalam 12 bulan terakhir.
2) Kekerasan oleh selain pasangan: sekitar 1 dari 4 perempuan yang pernah, sedang atau belum menikah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari selain pasangan selama hidup mereka (23,7%) dan sekitar 1 dari 18 perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (5,6%). Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak (14,4%).

Selanjutnya, hasil survei Kekerasan terhadap Anak (KtA) tahun 2013 menunjukkan sekitar 38,62% anak laki-laki dan 20,48% anak perempuan umur 13-17 tahun menyatakan dirinya pernah mengalami tindak kekerasan dalam satu tahun terakhir.

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), adalah: (i) membangun sistem data dan informasi KtP; (ii) meningkatkan komitmen pemangku kepentingan terkait serta koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP; (iii) meningkatkan efektifitas upaya-upaya pencegahan KtP dan penanganan korban KtP; dan (iv) meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KtP.

Menghapus Semua Praktik Berbahaya. Prevalensi perkawinan usia anak (<18 tahun) mengalami penurunan dalam 8 tahun terakhir. Data tahun 2016menunjukkan sekitar 22,4% perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin, menikah pertama kali sebelum usia 18 tahun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2008 sebesar 27,4%. Penurunan yang lebih cepat terjadi pada usia perkawinan pertama kurang dari 15 tahun, yaitu menjadi 1,1% dari sekitar 3% pada periode yang sama (Susenas, BPS). Menurunnya prevalensi perkawinan usia anak tersebut meningkatkan median umur kawin pertama perempuan dari 19,8 tahun pada tahun 2007 menjadi 20,1 tahun pada 2012. Peningkatan umur kawin pertama tersebut berkorelasi positif dengan meningkatnya pendidikan perempuan (SDKI, BPS). Sejak tahun 2011, rasio APK perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SMA/SMK/MA/sederajat mencapai sekitar 100, yang berarti partisipasi perempuan pada jenjang sekolah menengah sama dengan laki-laki. Selanjutnya, penurunan perkawinan usia anak dan peningkatan median usia kawin pertama perempuan menurunkan

angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun, dari 62 tahun 1997 menjadi 48 tahun 2012.

Tantangan yang dihadapi untuk menurunkan angka perkawinan anak dan juga angka kelahiran pada usia 15-19 tahun adalah: 1) mensinergikan dan mengharmonisasikan perundang-undangan dan kebijakan yang ada, seperti UU Perkawinan, UU Pemilu, UU Kependudukan dengan UU Perlindungan Anak; 2) mengubah norma dan nilai dalam masyarakat akan perkawinan dini; 3) menangani kerentanan akibat kemiskinan dan terus memberi kesempatan lebih besar pada anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi; dan 4) terus meningkatkan cakupan pelayanan pendidikan khususnya di daerah terluar, terpencil dan tertinggal.

Kesehatan dan KB. Menjamin Akses Universal Terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan Hak Reproduksi. Data Statistik Rutin BKKBN Perwakilan Sumatera Selatan Tahun 2018 menunjukkan *Unmet Need* pelayanan KB Provinsi Sumatera Selatan telah menurun dari 14,30% pada tahun 2015 menjadi 12,03% pada Tahun 2017. Selain itu berdasarkan Susenas Tahun 2016, persentase perempuan berusia 15-49 tahun berstatus kawin yang pernah menggunakan alat/cara KB di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 73,82%. Terdiri dari pernah menggunakan alat KB sebesar 8,77% dan sedang menggunakan alat/cara KB sebesar 65,05%, dan perempuan yang tidak pernah lagi menggunakan KB sebesar 26,17%. Ada kecenderungan yang tidak menggunakan KB lagi lebih besar di perkotaan dibandingkan di pedesaan (perkotaan sebesar 35,68%, perdesaan 21,27%). Untuk menjamin perempuan mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan reproduksi, Undang- Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan menetapkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi, pendidikan dan pelayanan kepada remaja sepanjang tidak bertentangan dengan nilai moral dan agama. Selanjutnya, untuk pelaksanaannya telah ada Peraturan Pemerintah No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Tantangan yang dihadapi adalah pelaksanaan advokasi dan KIE yang efektif responsif gender yang dapat meningkatkan kesertaan berKB. Tantangan lainnya adalah peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan wilayah serta manajemen dan distribusi alat dan obat kontrasepsi.

Kebijakan dan Perundang-Undangan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Kaum Perempuan. Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi anggaran umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang sudah dikembangkan adalah Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender. Meski demikian, peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada pembangunan kesetaraan gender di

Sumatera Selatan terus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hal di atas dan hasil cascading goal 5, maka isu strategis adalah,

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan
2. Menghapuskan segala bentuk kkerasan terhadap perempuan
3. Menghapuskan segala praktik yang berbahaya bagi perempuan
4. Peningkatan Partisipasi perempuan di semua tingkat pengambilan keputusan
5. Peningkatan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi
6. Peningkatan penggunaan TIK untuk pemberdayaan perempuan
7. Peningkatan dukungan Kebijakan untuk peningkatan kesetraan gender dan pemberdayaan perempuan

**Pilar 2 ( Pembangunan Ekonomi )**

**Goal 7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern**

Peningkatan daya saing perekonomian Sumatera Selatan menjadi hal utama yang perlu menjadi perhatian. Salah satu titik berat peningkatan daya saing perekonomian diarahkan pada ketahanan energi khususnya pasokan energi primer dan optimalisasi penggunaan gas dan batubara, serta menghindari ketergantungan berlebihan pada impor atau pada jenis energi tertentu. Dalam rangka mencapai ketahanan energi, sisi penyediaan maupun permintaan harus mendapat perhatian yang sama. Pada sisi penyediaan perlu dilakukan optimalisasi pasokan minyak bumi, gas, batubara serta peningkatan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi daerah. Optimalisasi penyediaan energi dapat dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas infrastruktur energi. Pada sisi pemanfaatan, perlu terus digalakkan dan ditingkatkan efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor.

Kebutuhan Energi Daerah. Seiring pertumbuhan populasi penduduk, kebutuhan akan energi turut meningkat. Untuk itu perencanaan energi perlu dilakukan demi menjamin ketersediaan sumberdaya dan cadangan energi yang cukup serta infrastruktur energi yang memadai dengan harga yang terjangkau untuk jangka panjang sehingga tidak mengganggu kemampuan daya beli masyarakat.

**Tabel 4.10**
Sasaran Umum Pembangunan Sektor Energi Tahun 2014-2018

| Indikator | 2014 (Realisasi) | 2015 (Realisasi) | 2016 (Realisasi) | 2017 (Realisasi) | 2018 (Target) |
|---|---|---|---|---|---|
| Produksi Sumberdaya Energi | | | | | |
| Lifting Minyak Bumi (ribu Barrel) | 27.160 | 24.120 | 21.030 | 20.290 | 26.200* |
| Lifting Gas Bumi (ribu MMBTU) | 623.480 | 581.560 | 542.260 | 538.840 | 626.072* |
| Batubara (juta ton) | 24,63 | 24,37 | 24,56 | 39,60 | 26,00* |
| Listrik | | | | | |
| Rasio Elektrifikasi (%) | 73,86 | 80,88 | 83,82 | 87,61 | 89,01 |
| Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh) | - | - | 1.489 | n.a | 1.534 |
| Energi Baru Terbarukan | | | | | |
| Porsi EBT dalam Bauran Energi (%) | - | - | 11,90 | n.a | 14,90 |

Keterangan: *: Target RPJMD Sumsel 2013-2018
a: Data Realisasi

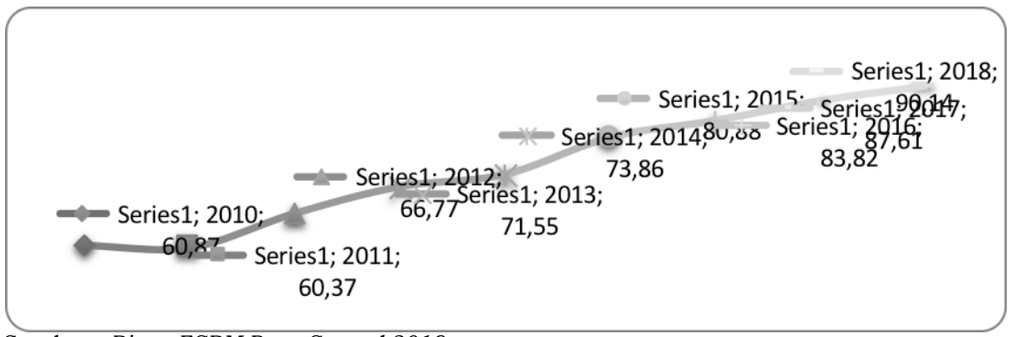
Produksi Energi. Lifting minyak bumi ditargetkan meningkat menjadi 26.200 ribu Barel pada tahun 2018 sesuai dengan RPJMD Sumatera Selatan 2013-2018. Namun, data realisasi menunjukkan terjadi penurunan lifting minyak bumi, yaitu pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing menurun menjadi 24.120 dan 21.030 ribu Barrel dan pada tahun 2017 kembali menurun menjadi sebesar 20.290 ribu Barrel.

Lifting gas bumi juga mengalami penurunan dari tahun 2014-2017. Pada tahun 2014, lifting gas bumi mencapai 623.480 ribu MMBTU, namun kemudian turun menjadi 581.560 ribu MMBTU pada tahun 2015 dan terus menurun pada tahun 2016 menjadi 542.260 ribu MMBTU pada tahu 2017 kembali turun menjadi 538.840 ribu MMBTU.

Produksi batubara meningkat cukup pesat terutama pada tahun 2016 sejalan dengan peningkatan permintaan domestik dan ekspor, meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2015. Pada tahun 2014, produksi batubara mencapai 24,63 juta ton, namun kemudian turun menjadi 24,37 juta ton dan kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi 24,56 juta ton dan pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 39,60 juta ton.

Dari indikator terkait listrik, rasio elektrifikasi di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 mencapai 90,14 persen, terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya seperti yang terlihat pada Grafik Indikator 7.1.1 di bawah ini. Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah rumah tangga yang berlistrik dan jumlah keseluruhan rumah tangga. Rasio elektrifikasi ini menggambarkan tingkat ketersediaan energi listrik untuk masyarakat. Pada Tahun 2023, rasio elektrifikasi ditargetkan meningkat menjadi 100 persen.

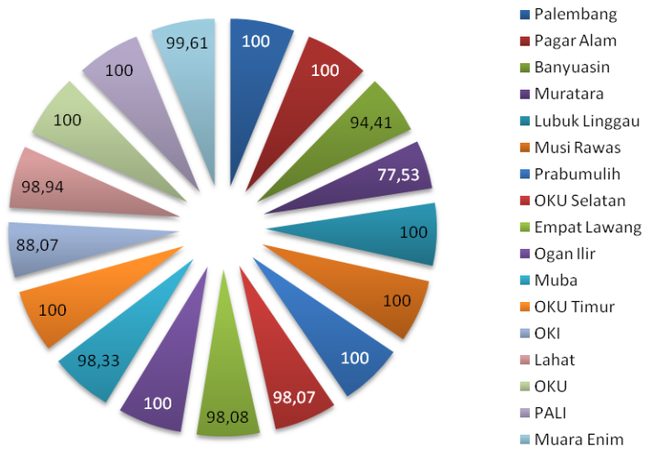
**Gambar 4.21**
Rasio Elektrifikasi Sumsel (Persen) 2008-2018




Sumber : *Dinas ESDM Prov. Sumsel 2019*

Namun, dilihat dari rasio elektrifikasi per kabupaten/kota, aksesibilitas listrik masih mengalami ketimpangan. Beberapa daerah masih memiliki tingkat rasio elektrifikasi di bawah 80% pada tahun 2017, seperti Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 77,53 persen.

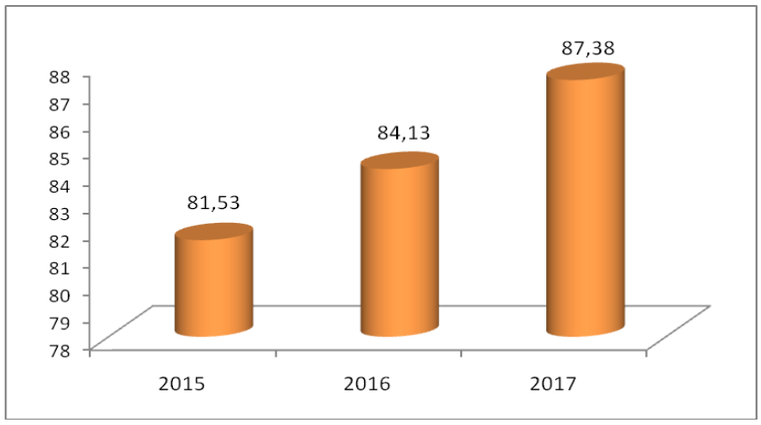
**Gambar 4.22**
Rasio Elektrifikasi Kab/Kota di Sumsel (Persen) 2017




Sumber : *Dinas ESDM Prov. Sumsel 2018*

Mengenai hal kelistrikan, Sumsel menjadi salah satu penyokong besar dalam memberikan energi hingga menerangi berbagai daerah di sekitarnya. Sebagai provinsi dengan sumber daya energi yang berlimpah, Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2017 mempunyai daya kapasitas sebesar 2.168,44 MW, dengan 48 unit pembangkit. Potensi sumber energi di Sumatera Selatan sangat banyak yaitu berupa batubara, gas bumi, minyak bumi, panas bumi, dan gas metan batubara (CBM). Untuk rumah tangga yang telah dialiri listrik, di kabupaten/kota di Sumatera Selatan sampai tahun 2017 telah mencapai sebanyak 2.140,79 rumah tangga, yang terdiri dari rumah tangga pelanggan PLN dan Non PLN, secara keseluruhan setiap tahun terjadi peningkatan. Rumah yang teraliri listrik mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan ini terjadi juga akibat pembangunan perumahan dan penambahan kapasitas listrik yang dialokasikan untuk Sumatera Selatan.

**Gambar 4.23**
Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga Sumsel (Persen) 2015-2017




Sumber : Badan Pusat Statistik

Rasio penggunaan gas rumah tangga Sumatera Selatan sepanjang tahun 2015-2017 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 rasio penggunaan gas rumah tangga di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 81,53 persen meningkat hingga menjadi 87,38 persen di tahun 2017.

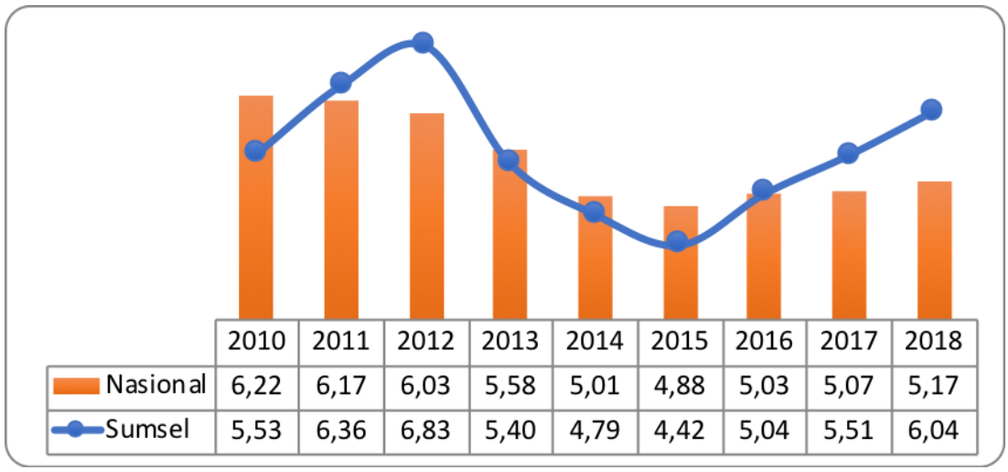
Berdasarkan uraian diatas dan hasil cascading goal tersebut, maka isu strategis pada goal 7 adalah:

1. Peningkatan akses universal layanan energi yang terjangkau adil dan modern
2. Peningkatan energi terbarukan
3. Peningkatan efisiensi enrgi

**Goal 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan**

Perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2018 tumbuh 6,04 persen, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang tumbuh sebesar 5,51 persen. Pertumbuhan ini berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,17 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang semakin baik ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2013 setelah terjadinya penurunan harga komoditas unggulan Sumatera Selatan di pasar internasional yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang turun menjadi 4,79% pada tahun 2014 dan berlanjut pada tahun 2015 menjadi 4,42%.

**Gambar 4.24**
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional
Tahun 2010-2018



| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasional | 6,22 | 6,17 | 6,03 | 5,58 | 5,01 | 4,88 | 5,03 | 5,07 | 5,17 |
| Sumsel | 5,53 | 6,36 | 6,83 | 5,40 | 4,79 | 4,42 | 5,04 | 5,51 | 6,04 |

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,15 persen, diikuti Jasa Perusahaan sebesar 9,51 persen serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,27 persen.

Lima sektor lapangan usaha utama yang berkontribusi tertinggi dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sumatera Selatan tahun 2017, diantaranya adalah:

1) Pertambangan dan Penggalian sebesar 20,24 persen;
2) Industri pengolahan sebesar 19,52 persen;
3) Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14,80 persen;
4) Konstruksi sebesar 12,98 persen; dan
5) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,94 persen.

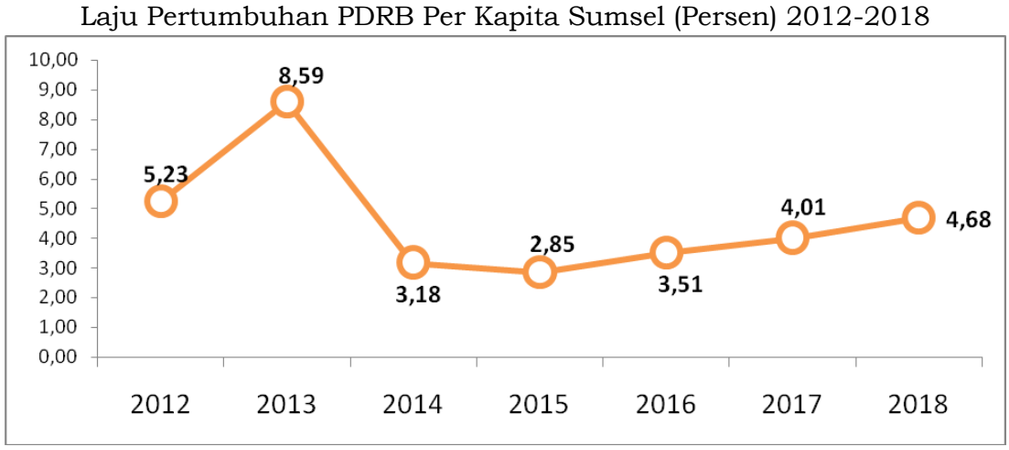
Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 8,57 persen. Diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 6,64 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,41 persen.

Meningkatnya harga komoditas global terutama karet dan batubara mendorong peningkatan ekspor Sumatera Selatan. Namun disinyalir perbaikan harga masih bersifat temporer. Sementara pertumbuhan komponen investasi ditopang oleh aktivitas pembangunan Proyek Strategis Nasional yang masih tinggi dan pembangunan infrastruktur terkait Asian Games 2018. Sejalan dengan itu, terdapat peningkatan realisasi anggaran di kuartal akhir tahun 2018 yang mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran pemerintah, hal ini terlihat dari pengeluaran konsumsi pemerintah tahun 2018 yaitu sebesar 31,8 triliun rupiah.

Pada tahun 2018 pertumbuhan PDRB per kapita Sumatera Selatan bergerak tumbuh meningkat setelah dalam kurun waktu 2014-2015 cenderung mengalami perlambatan. Tercatat laju pertumbuhan PDRB per Kapita tahun 2018 sebesar 4,68 persen. Meski masih jauh dari target sebesar 7 persen per tahun, namun mulai tumbuhnya PDRB per kapita membawa angin segar untuk mewujudkan ekonomi Sumatera Selatan yang inklusif dan berkelanjutan.

**Gambar 4.25**

Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Sumsel (Persen) 2012-2018

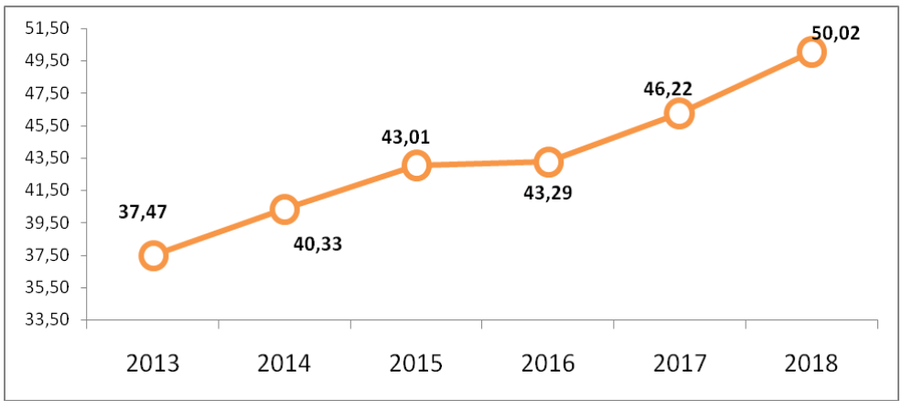



*Sumber : BPS Prov. Sumsel 2019 diolah BAPPEDA Prov. Sumsel*

Salah satu ukuran yang paling dapat diandalkan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu wilayah yaitu pendapatan per kapita. PDRB Per Kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nominal PDRB dan jumlah penduduk. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk.

Data BPS menunjukkan PDRB per kapita Sumatera Selatan menunjukan kenaikan dalam lima tahun terakhir 2013-2015, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan. Pendapatan per kapita yang meningkat dapat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per kapita masyarakat Sumatera Selatan meningkat cukup baik dari Rp. 37,47 juta meningkat menjadi Rp 50,02 juta pada tahun 2018.

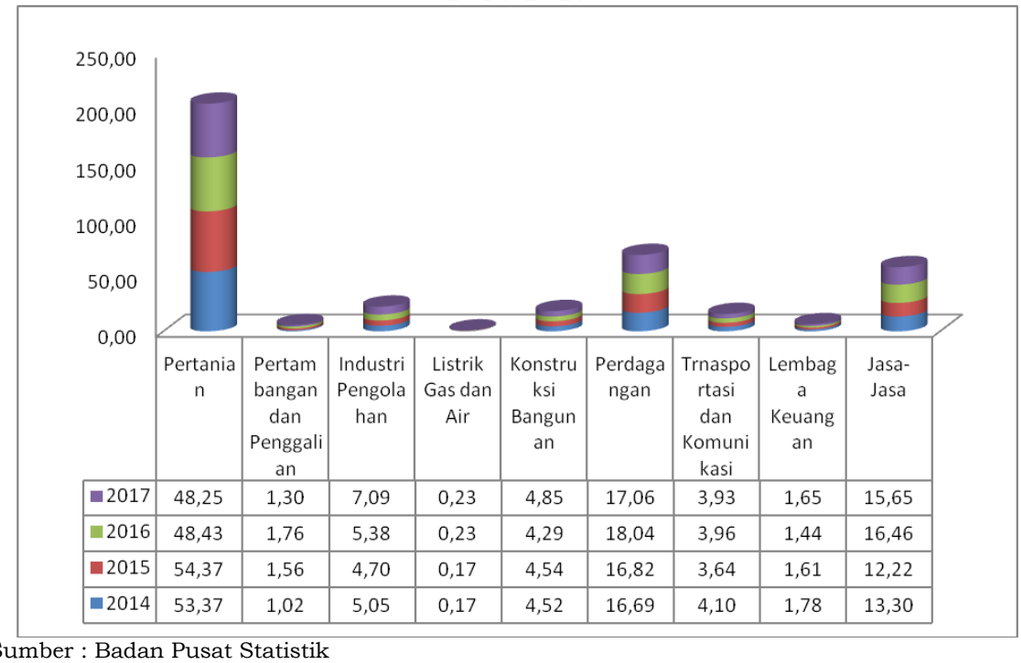
**Gambar 4.26**
PDRB Per Kapita Sumsel Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta) 2013-2018




Sumber : Badan Pusat Statistik

Sedangkan penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha utama di Sumatera Selatan tahun 2017 masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu sebesar 48,25 persen, selanjutnya disusul oleh sektor perdagangan sebesar 17,06 persen dan sektor jasa-jasa sebesar 15,65 persen.

**Gambar 4.27**
Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama, (Persen), 2014-2017




| | Pertanian | Pertambangan dan Penggalian | Industri Pengolahan | Listrik Gas dan Air | Konstruksi Bangunan | Perdagangan | Trnasportasi dan Komunikasi | Lembaga Keuangan | Jasa-Jasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 48,25 | 1,30 | 7,09 | 0,23 | 4,85 | 17,06 | 3,93 | 1,65 | 15,65 |
| 2016 | 48,43 | 1,76 | 5,38 | 0,23 | 4,29 | 18,04 | 3,96 | 1,44 | 16,46 |
| 2015 | 54,37 | 1,56 | 4,70 | 0,17 | 4,54 | 16,82 | 3,64 | 1,61 | 12,22 |
| 2014 | 53,37 | 1,02 | 5,05 | 0,17 | 4,52 | 16,69 | 4,10 | 1,78 | 13,30 |

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pekerja informal di sektor non pertanian adalah penduduk yang bekerja di sektor non pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas.

Dengan pengukuran ini diharapkan mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja yang baik, kewirausahaan, kreatifitas dan inovasi, dan

mendorong pertumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan.

**Gambar 4.28**
Persentase Pekerja Informal Sektor Non Pertanian, 2015-2018



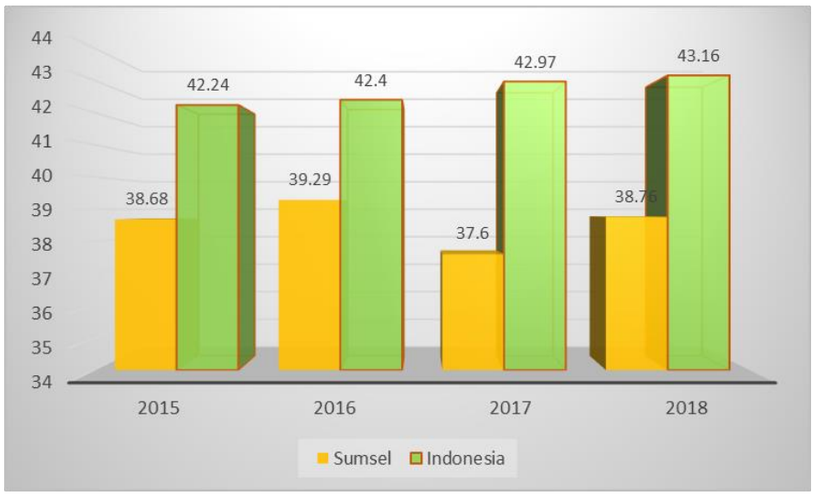

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari grafik indikator di atas terlihat adanya peningkatan persentase lapangan kerja informal sektor non pertanian di Sumsel, yang naik dari 41,66 persen pada tahun 2015 menjadi 42,77 persen di tahun 2018. Sama halnya dengan kondisi Sumatera Selatan, di Indonesia terjadi peningkatan persentase lapangan kerja informal sektor non pertanian, meningkat dari 43,37 persen pada tahun 2015 menjadi 44,13 persen di tahun 2018. Hal ini merupakan tantangan bagi Indonesia dan Sumatera Selatan khususnya untuk dapat menciptakan kondisi yang mendukung penciptaan lapangan kerja yang lebih *secure* bagi masyarakat.

Pekerja formal dan informal dapat diidentifikasi secara sederhana berdasarkan status pekerjaannya. Pekerja formal mencakup penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan status sebagai buruh karyawan. Sementara yang lainnya dapat dikatakan sebagai pekerja informal. Persentase tenaga kerja formal di Sumatera Selatan meningkat dari 38.68 persen ditahun 2015 menjadi 38.76 persen di tahun 2016. Peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan karena di tahun 2017 persentase tenaga kerja formal di Sumsel turun cukup drastis hingga 37,6 persen padahal di tahun 2015 persentasenya sudah mencapai 39,29 persen.

**Gambar 4.29**

Persentase Tenaga Kerja Formal (Persen), 2015-2018

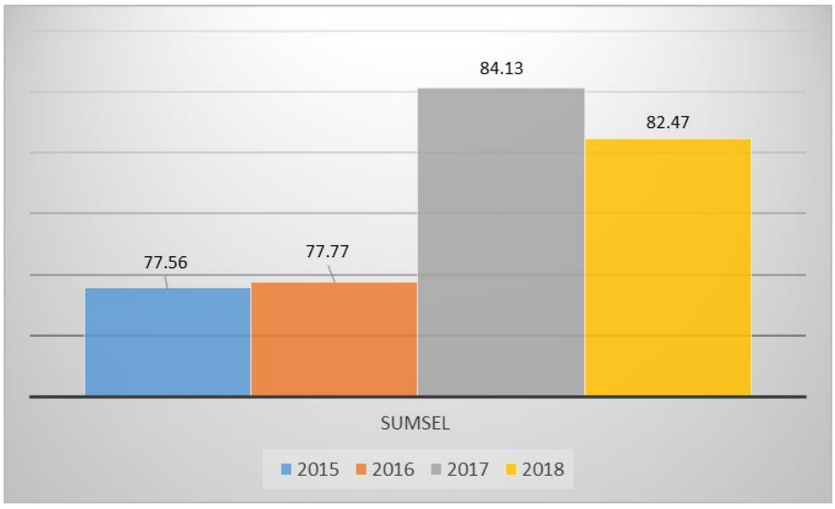



Sumber : Badan Pusat Statistik

Sektor pertanian merupakan sektor/lapangan pekerjaan yang masih banyak menyerap tenaga kerja di Sumatera Selatan. Banyak pekerja khususnya di daerah perdesaan yang menggantungkan pekerjaannya pada sektor ini. Sebagian besar dari pekerja di sektor pertanian merupakan pekerja informal. Bila dibandingkan dengan total tenaga kerja, pekerja informal di sektor pertanian pada tahun 2018 mencapai 82,47 persen atau mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang sebesar 77,56 persen (BPS, 2019). Meningkatnya tenaga kerja informal sektor pertanian mengindikasikan masih kurangnya penyediaan lapangan kerja yang lebih terlindungi.

**Gambar 4.30**

Persentase tenaga kerja informal sektor Pertanian Sumsel (Persen)
Tahun 2015-2018



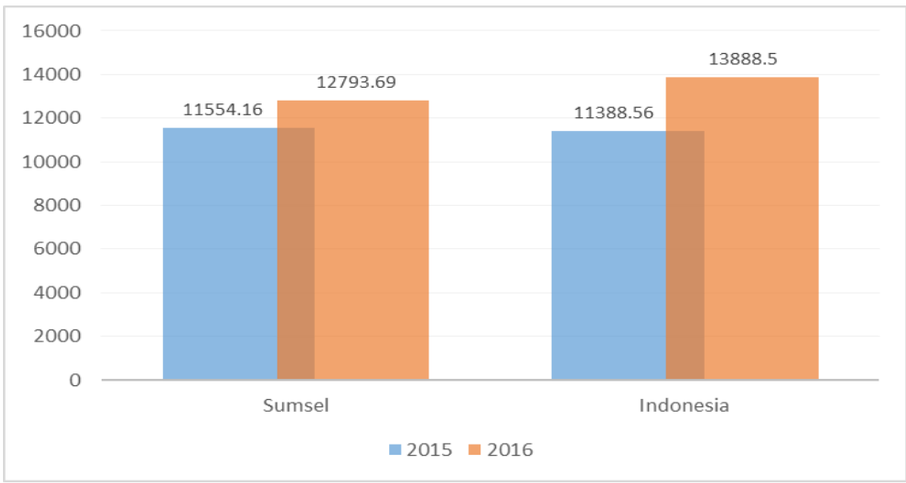

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2015, Upah rata-rata per jam pekerja Sumsel di atas Upah rata-rata per jam nasional. Akan tetapi di tahun 2016, Provinsi Sumatera

Selatan secara rata-rata hanya mengalami kenaikan upah sebesar 10,82 persen. Sedangkan secara nasional, Rata-Rata kenaikan upah rata-rata per jam sebesar 21,95 persen. Hal ini menjadikan upah rata-rata per jam pekerja di Sumsel lebih rendah dibanding nasional pada 2016.

**Gambar 4.31**

Upah Rata-Rata Per Jam Pekerja (rupiah) Tahun 2015 dan 2016




Sumber : Badan Pusat Statistik

Antara tahun 2015 dan 2018 terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka Sumsel yang sangat signifikan dari 6,07 persen di tahun 2015 menjadi 4,23 persen pada 2018. Bila dilihat menurut jenis kelamin, TPT penduduk laki-laki lebih tinggi dari penduduk perempuan yaitu masing-masing 4,65 dan 3,97. TPT berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan baik pada laki-laki maupun perempuan tertinggi terdapat pada kelompok dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sedangkan ditinjau menurut daerah perkotaan dan pedesaan TPT pencari kerja di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan dan secara urutan masing-masing sebesar 6,12 dan 3,23 persen. Tingginya TPT di daerah perkotaan menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia di perkotaan belum mampu menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Hal ini terkait dengan jumlah lapangan kerja yang terbatas dan adanya kecenderungan penyerapan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Tingginya pengangguran di perkotaan juga disebabkan urbanisasi yang terjadi sehingga banyak angkatan kerja yang tadinya berada di perdesaan yang pindah ke wilayah perkotaan. Sementara sebagian besar tenaga kerja di perdesaan terserap di kategori pertanian, dimana kategori ini memberikan kesempatan kerja yang lebih luas karena tidak perlu mempunyai keahlian khusus. Ditambah lagi dengan dibukanya kesempatan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia sudah semakin banyak dan terus bertambah.

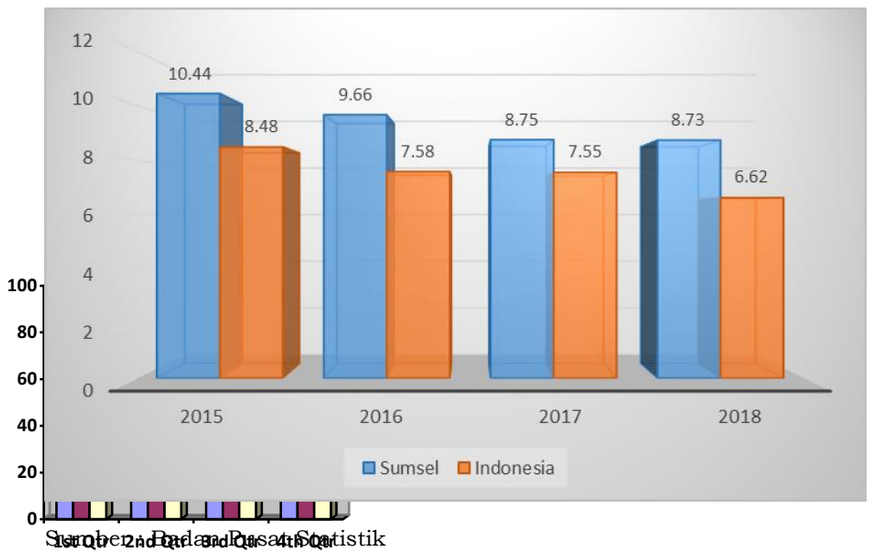
**Tabel 4.11**
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2018

| Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (2) | (3) | (4) |
| 1. SD ke Bawah | 2,81 | 2,63 | 1,67 | 1,43 |
| 2. Sekolah Menengah Pertama | 5,18 | 3,88 | 2,57 | 2,32 |
| 3. Sekolah Menengah Atas | 12,26 | 7,34 | 9,76 | 8,78 |
| 4. Sekolah Menengah Kejuruan | 13,23 | 9,75 | 11,58 | 9,94 |
| 5. Diploma (D-I/D-II/D-III) | 7,26 | 2,29 | 7,54 | na |
| 6. Universitas (D-IV/S-1/S-2/S-3) | 5,98 | 3,21 | 3,25 | 5,93 |
| Jumlah | 6,07 | 4,31 | 4,39 | 4,23 |

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jika dibandingkan dengan data tahun 2017, tahun 2018 terjadi penurunan tingkat setengah pengangguran di Sumsel maupun di Indonesia. Hal ini berarti terjadi peningkatan utilisasi dan produktivitas pekerja.

**Gambar 4.32**
Tingkat Setengah Pengangguran (Persen), 2015-2018




Sumber : Badan Pusat Statistik

Penduduk usia muda Sumatera Selatan yang tidak sekolah, bekerja, dan mengikuti pelatihan ada sebesar 23,5 persen pada tahun 2018. Angka ini menurun jika dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 25,78 persen. Jika penurunan ini terjadi pada tahun berikutnya, maka target untuk mengurangi penduduk muda tanpa sekolah, bekerja, dan pelatihan akan terwujud di 2020 mendatang.

**Gambar 4.33**
Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan, 2015-2018

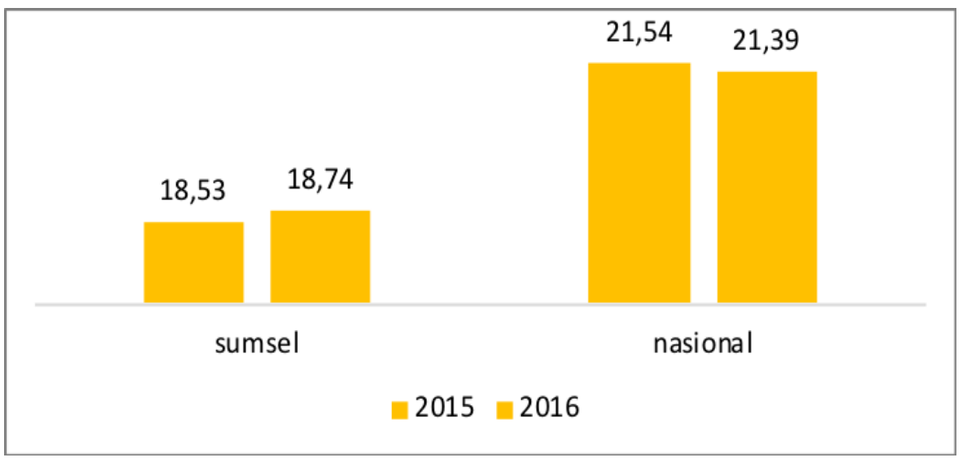



Sumber : Badan Pusat Statistik

2.5.2.3. Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB/PDRB dan per kapita. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang sangat penting dan sebagai sektor yang menyumbang paling besar dalam pembentukan PDB/PDRB. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB tahun 2015 sebesar 21,54 persen, turun menjadi 21,39 persen pada tahun 2016. Berkebalikan dari kondisi nasional, tahun 2016 proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB Sumsel naik dari 18,53 persen di tahun 2015 menjadi 18,74 persen pada tahun 2016.

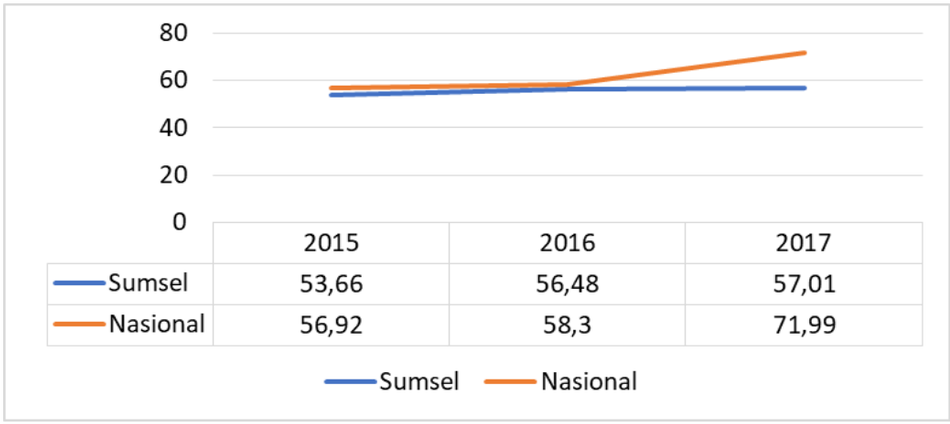
**Gambar 4.34**
Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB/PDRB




Sumber : Badan Pusat Statistik

Proporsi Individu Yang Menggunakan Telepon Genggam. Tingkat akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi melalui jaringan bergerak (mobile) FixedWireless Access dan seluler dapat diketahui dengan indikator proporsi individu yang menggunakan telepon genggam/telepon seluler. Saat ini lebih dari setengah penduduk Sumatera Selatan telah menggunakan telepon genggam.

**Gambar 4.35**
Proporsi Individu yang Menggunakan Telepon Genggam
di Sumatera Selatan, 2015-2017

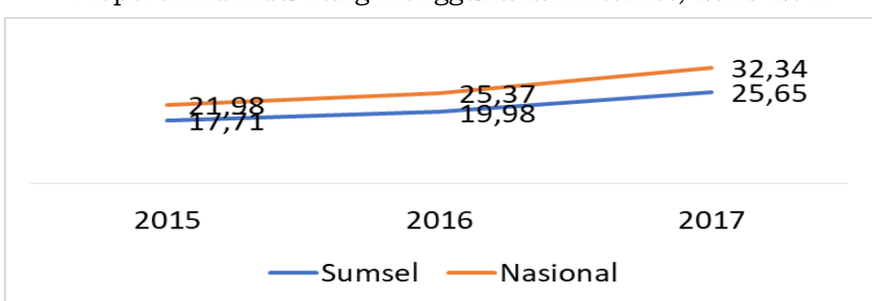



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2015 dan 2016 lebih dari 50 persen masyarakat Sumsel telah menggunakan telpon genggam, hampir menyamai proporsi masyarakat nasional yang menggunakan telpon genggam. Namun pada 2017 trejadi kenaikan drastis proporsi individu nasional yang menggunakan telpon genggam hingga mencapai hampir 72 persen, sementara Sumsel meningkat menjadi 57,01 persen.

Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet. Internet (*Interconnection-networking*) adalah sebuah sistem jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia secara global. Fasilitas akses internet tidak diasumsikan hanya melalui komputer, melainkan juga bisa menggunakan telepon selular, PDA, perangkat game elektronik, televisi digital, dll.

**Gambar 4.36**
Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet, 2015-2017




Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah orang yang menggunakan internet di Sumatera Selatan. Tahun 2015 terdapat sekitar 17,71 persen penduduk yang telah menggunakan internet dan naik menjadi 19,98 persen pada tahun 2016. Pada 2017 lebih dari seperempat penduduk Sumatera Selatan telah mengakses internet. Hal ini disebabkan internet saat ini telah menjadi alat yang penting bagi publik untuk mengakses informasi yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informasi. Selain itu, internet juga dapat menjadi indikator kunci yang digunakan oleh pengambil kebijakan untuk mengukur pembangunan masyarakat bidang informasi dan perrtumbuhan isi internet. Penggunaan internet disini termasuk dalam mengakses media social seperti facebook, twitter, BBM, Whatsapp dan lain-lain. Beradasarkan hal di atas dan hasil cascading terhadap gol 8 maka isu strategis goal tersebut adalah.

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi per kapita
2. Peningkatan tingkat produktivitas tenaga kerja
3. Peninkatan lapangan kerja layak dan akses ke layanan keuangan
4. Peningkatan Upah layak dan perkerjaan untuk semua
5. Peningkatan pembinaan penduduk usia muda yang produktif
6. Peningkatan hak tenaga kerja
7. Peningkatan kinerja pertanian

**Goal 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

Goal ini bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi dalam rangka pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, meningkatkan infrastruktur dan *retrofit* industri agar dapat berkelanjutan, memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet.

Sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, kebijakan pemerintah terkait dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan target TPB/SDGs Tujuan 9 melingkupi:

1. Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan;
2. Perbaikan kualitas lingkungan hidup, termasuk peningkatan kualitas udara melalui *(i)* pengendalian pencemaran udara dari sektor industri,

transportasi dan pertambangan, *(ii)* peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca, dan *(iii)* pemantauan kualitas udara ambien;

3. Peningkatan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati;
4. Penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
5. Penguatan instrumen pengelolaan lingkungan serta sistem insentif dan disinsentif, Pengelolaan lingkungan hidup; dan
6. Penegakan hukum lingkungan.

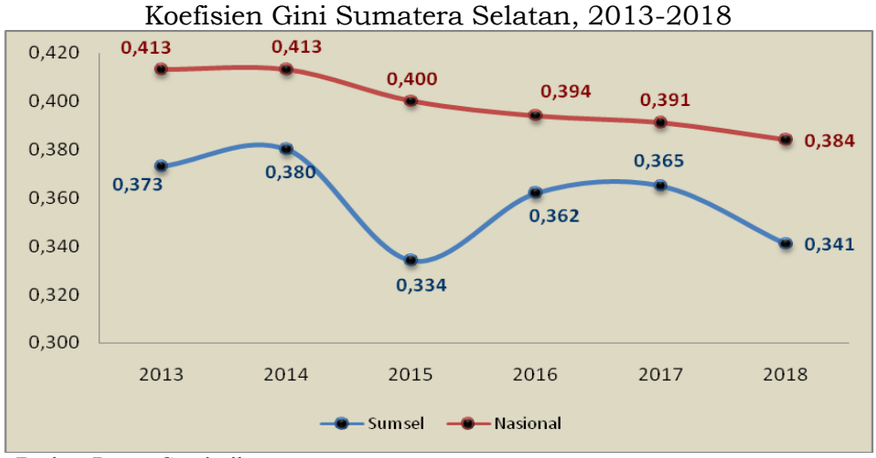
Berdasarkan hal di atas dan hasil cascading goal 9, maka isu strategis yang akan dikembangkan adalah,

1. Peningkatan infrastruktur berkualitas
2. Peningkatan promosi industrialisasi berkelanjutan
3. Peningkatan akses terhadap Tekniologi Informasi dan telekomunikasi yang berkualitas

**Goal 10. Mengurangi Kesenjangan**

Nilai koefisien gini Sumatera Selatan tahun 2018 turun menjadi sebesar 0,341. Hal ini mencerminkan keberhasilan pembangunan karena berhasil menurunkan koefisien gini setelah sebelumnya sempat naik dari 0,365 ditahun 2017. Bila dibandingkan dengan nasional, nilai koefisien gini Sumatera Selatan selalu dibawah nasional.

**Gambar 4.37**
Koefisien Gini Sumatera Selatan, 2013-2018




Sumber : Badan Pusat Statistik

Saat ini di Sumatera Selatan terdapat dua Kabupaten yang termasuk dalam katergori daerah tertinggal yaitu Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Beberapa catatan terkait Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.12**
Kondisi Makro dan Infrastruktur Dasar pada Kabupaten Daerah Tertinggal di Sumatera Selatan

| No | Kabupaten Musi Rawas | Kabupaten Musi Rawas Utara |
|---|---|---|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi Berada Posisi Ke-6 Tertinggi, Lebih Baik Dari Capaian Provinsi dan Nasional | Tren PDRB dari Tahun 2012 – 2015 Selalu Menunjukan Peningkatan yang Positif |
| 2 | Gini Ratio Posisi Ke-3 Terendah, Lebih Baik Dari Capaian Provinsi | Gini Ratio Posisi Ke-1 Terendah, Lebih Baik Dari Capaian Provinsi |
| 3 | Tren PDRB dari Tahun 2012 – 2015 Selalu Menunjukan Peningkatan yang Positif | Tren PDRB dari Tahun 2012 – 2015 Selalu Menunjukan Peningkatan yang Positif |
| 4 | Tingkat Kemiskinan ke-5 Tertinggi, Lebih Tinggi Dari Provinsi dan Nasional. Namun Capaian telah mencapai Target di Dalam RPJMD | Tingkat Kemiskinan ke-1 Tertinggi, Lebih Tinggi Dari Provinsi dan Nasional. |
| 5 | Capaian IPM Berada Peringkat Ke-5 Terendah atau Masuk Dalam Kategori Sedang | Capaian IPM Berada Peringkat Ke-5 Terendah atau Masuk Dalam Kategori Sedang |
| 6 | Akses Sanitasi Layak Peringkat Ke-5 Terendah, Berada dibawah capaian Provinsi dan Nasional | Akses Sanitasi Layak Peringkat Ke-3 Terendah, Berada dibawah capaian Provinsi dan Nasional |
| 7 | Akses Sanitasi Layak Peringkat Ke-5 Terendah, Berada dibawah capaian Provinsi dan Nasional | Akses Air Bersih Layak Peringkat Ke-5 Terendah, Berada dibawah capaian Provinsi dan Nasional |

Sumber : RAD-PPDT Sumsel 2017-2019

Jika dilihat dari nilai koefisien ketertinggalan, maka total nilai indeks ketertinggalan Kabupaten Musi Rawas adalah sebesar 7 dan nilai indeks ketertinggalan Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebesar 11.

**Tabel 4.13**
Nilai Indeks Ketertinggalan Kabupaten Daerah Tertinggal di Sumatera Selatan

| No. | INDIKATOR | MUSI RAWAS | | MURATARA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Indeks | Keter-tinggalan | Indeks | Keter-tinggalan |
| **EKONOMI** | | | | | |
| 1 | Persentase Penduduk Miskin | 0.494 | 1 | 0.493 | 1 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi Perkapita | 0.502 | - | 0.486 | 1 |
| **SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | |
| 3 | Harapan Hidup | 0.495 | - | 0.498 | - |
| 4 | Rata-Rata Lama Sekolah | 0.497 | - | 0.496 | - |
| 5 | EYS | 0.495 | 1 | 0.489 | 1 |
| **KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | |
| 6 | KKD | 0.505 | - | 0.493 | 1 |
| **INFRASTRUKTUR** | | | | | |
| 7 | Jumlah desa dengan jenis permukaan jalan terluas aspal | 0.500 | - | 0.498 | 1 |
| 8 | Jumlah desa dengan jenis permukaan jalan terluas diperkeras | 0.501 | - | 0.498 | 1 |
| 9 | Jumlah desa dengan jenis permukaan jalan terluas tanah | 0.501 | 1 | 0.501 | - |

| No. | INDIKATOR | MUSI RAWAS | | MURATARA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Indeks | Keter-tinggalan | Indeks | Keter-tinggalan |
| 10 | Jumlah desa dengan jenis permukaan jalan terluas lainnya | 0.500 | - | 0.500 | - |
| 11 | Jumlah Desa yang mempunyai Pasar Tanpa bangunan Permanen | 0.500 | 1 | 0.503 | - |
| 12 | Jumlah Prasarana Kesehatan Per 1000 Penduduk | 0.499 | 1 | 0.499 | 1 |
| 13 | Jumlah Dokter Per 1000 Penduduk | 0.497 | 1 | 0.498 | 1 |
| 14 | Jumlah SD/SMP Per 1000 Penduduk | 0.499 | 1 | 0.497 | 1 |
| 15 | Persentase Rumah tangga Pengguna Listrik | 0.502 | - | 0.501 | - |
| 16 | Persentase Rumah tangga Pengguna Telepon (HP) | 0.501 | - | 0.500 | - |
| 17 | Persentase Rumah tangga Pengguna Air Bersih | 0.499 | - | 0.499 | - |
| **AKSESIBILITAS** | | | | | |
| 18 | Rata-rata Jarak dari Kantor Desa/Kel. Ke Kantor Kab yang Membawahi (Km) | 0.499 | - | 0.500 | - |
| 19 | Akses ke Pelayanan Kesehatan > 5 Km (Jumlah Desa) | 0.503 | - | 0.503 | - |
| 20 | Akses Ke Pelayanan Pendidikan Dasar (Km) | 0.501 | - | 0.503 | - |
| **KARAKTERISTIK DAERAH** | | | | | |
| 21 | % Desa Gempa bumi | 0.501 | - | 0.501 | - |
| 22 | % Desa Tanah Longsor | 0.502 | - | 0.501 | - |
| 23 | % Desa Banjir | 0.501 | - | 0.499 | 1 |
| 24 | % Desa Bencana Lainnya | 0.502 | - | 0.500 | 1 |
| 25 | % Desa di Kawasan Hutan | 0.502 | - | 0.502 | - |
| 26 | % Desa berlahan Kritis | 0.501 | - | 0.501 | - |
| 27 | % Rata2 Desa Konflik 1 tahun terakhir | 0.502 | - | 0.500 | - |
| | **Total** | | **7** | | **11** |

Dari data Indeks Desa Membangun (IDM) di Sumatera Selatan tahun 2017 teridentifikasi sejumlah 1 desa berstatus Desa Mandiri, 46 desa berstatus Desa Maju, 976 desa berstatus Desa Berkembang, 1644 desa berstatus Desa Tertinggal dan 176 desa berstatus Desa Sangat Tertinggal.

Berdasarkan analisa di atas dan hasil cascading goal 10, maka isu strategis untuk goal ini adalah,

1. Pengurangan ketimpangan pendapatan
2. Inklusi Sosial, ekonomi dan politik bagi semua
3. Peningkatan jaminan kesempatan yang sama
4. Peningkatan perlindungan sosial

**Goal 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan**

Mobilisasi Sumber Daya Domestik. Bagi Indonesia salah satu target penting yang berkaitan dengan mobilisasi sumberdaya domestik adalah rasio penerimaan pajak terhadap PDB. Pajak merupakan sumber daya domestik yang terpenting bagi negara dalam membiayai pembangunannya termasuk dalam mewujudkan TPB/SDGs. Pendapatan negara dari pajak berkisar antara 85-86% dari total penerimaan negara dalam periode 2016-2017 (Kementerian Keuangan, 2017). Rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia antara tahun 2010 hingga tahun 2017 menujukkan fluktuasi dengan kecenderungan yang menurun. Pada periode 2010-2013 sempat mengalami kenaikan dengan nilai tertinggi sebesar 11,90% pada tahun 2012, namun nilai rasio tersebut terus menurun dan mencapai titik terendah pada tahun 2016 yang hanya 10,36%. Penurunan tersebut disebabkan oleh faktor yang kompleks seperti: (i) perlambatan laju pertumbuhan ekonomi baik karena faktor domestik maupun faktor global dan (ii) sumber-sumber pajak yang belum tergali secara optimal baik dari sektor unggulan maupun sektor informal (RKP 2014).

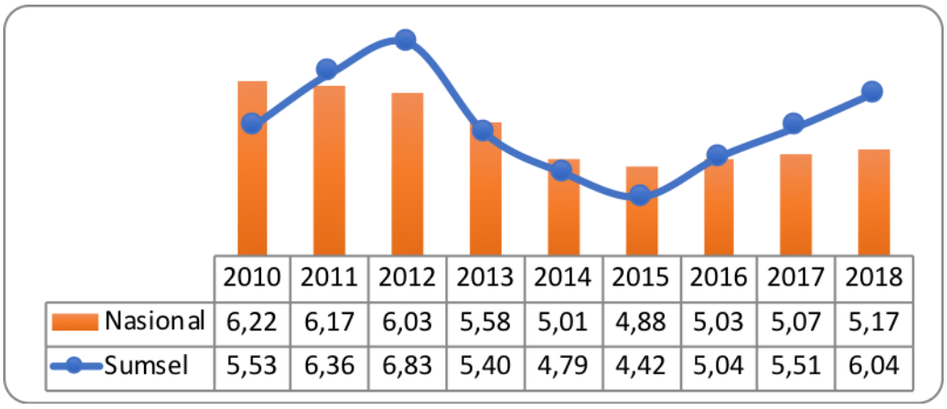
Untuk masa mendatang, penerimaan pajak masih akan menghadapi beberapa tantangan terutama berkaitan dengan (i) belum optimalnya penggalian potensi sumber pajak dan efektivitas pengumpulan; serta (ii) rendahnya kesadaran wajib pajak, serta pertumbuhan ekonomi domestik yang diperkirakan masih sekitar 5%. Hal ini disebabkan oleh faktor global seperti (i) pertumbuhan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih karena ada kecenderungan peningkatan proteksi atau inward looking yang semakin menguat; (ii) harga komoditas di pasar global yang masih rendah; dan (iii) ketidakpastian kebijakan global terkait dengan isu regulasi dan kebijakan fiskal Amerika Serikat, negosiasi setelah Brexit, dan resiko geopolitik seperti gejolak di Semenanjung Korea.

Untuk mengukur aktivitas ekonomi wilayah selain negara seperti provinsi atau kabupaten dan kota, istilah yang sering digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu.

Perkembangan PDRB Sumatera Selatan periode 2010-2018 berfluktuatif, pada tahun 2010-2012 pertumbuhan ekonomi Sumsel terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 5,53 persen meningkat menjadi 6,83 persen ditahun 2012, pada tahun 2013-2015 tren pertumbuhan ekonomi Sumsel mengalami perlambatan dari tahun ke tahu hingga mencapai 4,42 persen ditahun 2015 dan pada tahun 2016-2018 tren pertumbuhan ekonomi Sumsel kembali mengalami peningkatan, dari tahun 2016 sebesar 5,04 persen meningkat menjadi 6,04 persen ditahun 2018. Pertumbuhan

PDRB tertinggi dicapai pada tahun 2012 yakni 6,83 persen. Rata-rata pertumbuhan PDRB ini relatif lebih tinggi dari pencapaian rata-rata nasional.

**Gambar 4.38**
Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2018



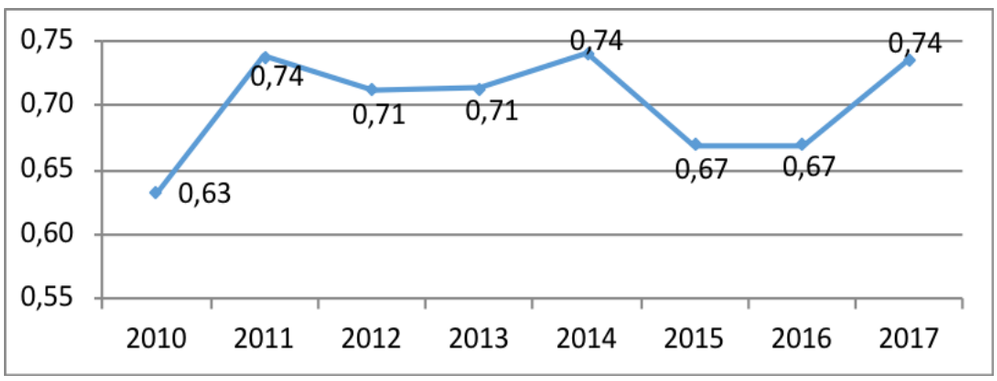
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasional | 6,22 | 6,17 | 6,03 | 5,58 | 5,01 | 4,88 | 5,03 | 5,07 | 5,17 |
| Sumsel | 5,53 | 6,36 | 6,83 | 5,40 | 4,79 | 4,42 | 5,04 | 5,51 | 6,04 |

Sumber: *BPS Prov. Sumsel 2019*

Jika dilihat dari pendekatan pendapatan, PDRB diartikan sebagai jumlah nilai balas jasa dari faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi, dengan tren PDRB yang meningkat maka diharapkan akan memacu peningkatan sektor lain seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Bagi pemerintah daerah, hal ini akan mempunyai dampak positif terhadap penerimaan pemerintah daerah yakni dari komponen pendapatan asli daerah yakni penerimaan pajak daerah yang berkaitan dengan kemampuan mobilisasi sumberdaya daerah yang diukur dengan rasio Rasio Pajak daerah terhadap PDRB.

Mobilisasi sumberdaya daerah yang diukur dengan Rasio pajak daerah terhadap PDRB Sumatera Selatan sepanjang tahun 2010-2017 menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata rasio pajak terhadap PDRB adalah sebesar 0,7 persen.

**Gambar 4.39**
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Sumatera Selatan Tahun 2010-2017

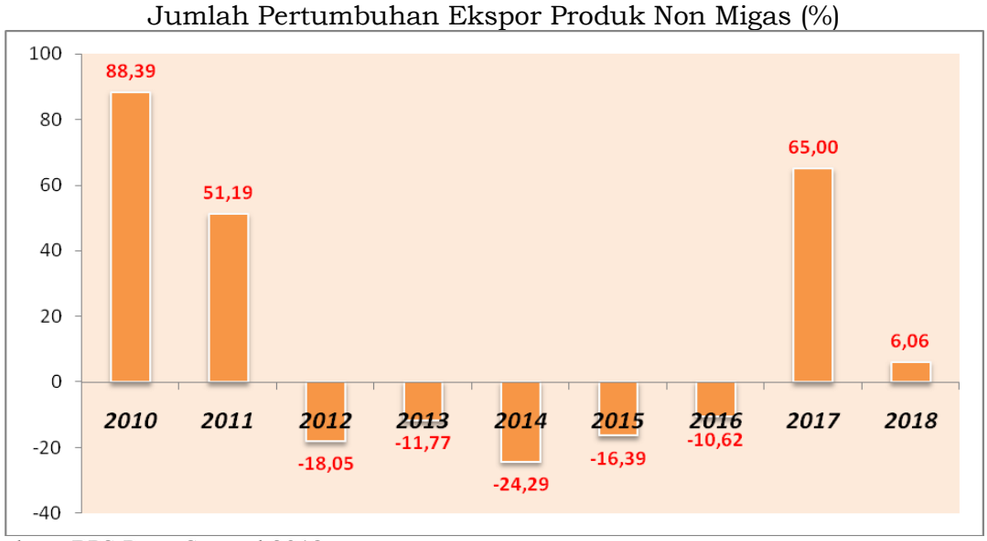



Sumber : BPS Tahun 2017, data diolah.

Perdagangan Internasional. Salah satu sarana pelaksanaan yang penting bagi pencapaian semua target TPB/SDGs adalah peran dari perdagangan, khususnya perdagangan internasional yang mendorong peningkatan penerimaan negara dan menunjukkan kemitraan global. Target yang relevan dengan hal ini antara lain target kerjasama perdagangan internasional terutama penurunan tarif dan peningkatan ekspor.

Untuk meningkatkan ekspor, salah satu indikator penting adalah pertumbuhan ekspor produk nonmigas. Pada tahun 2010, ekspor nonmigas Sumatera Selatan meningkat tajam dengan laju sebesar 88,39%. Akibat krisis global yang dimulai tahun 2010, laju ekspor nonmigas Sumatera Selatan terus menurun dan mencapai titik terendah tahun 2014 dengan penurunan menjadi sebesar minus 24,29%. Ekspor nonmigas Sumatera Selatan mulai mengalami perbaikan kinerja pada tahun 2017 ditujukkan dengan adanya pertumbuhan sebesar 65,00% dan pada tahun 2018 nilai eksor Sumatera Selatan kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 6,06%. Nilai ekspor nonmigas Sumatera Selatan pada periode Januari - Desember 2018 masih didominasi oleh komoditas karet yang mencapai nilai sebesar US$ 1.511,62 juta, diikuti oleh bubur kayu/pulp sebesar US$ 1.059,22 juta dan batubara sebesar US$ 893,52 juta.

**Gambar 4.40**
Jumlah Pertumbuhan Ekspor Produk Non Migas (%)




Sumber : BPS Prov. Sumsel 2019

Tantangan-tantangan perdagangan yang dihadapi saat ini terkait dengan upaya penurunan tarif dan peningkatan ekspor produk nonmigas antara lain: (i) pemulihan perekonomian global yang dibayangi peningkatan ketegangan geopolitik; (ii) kebijakan inward looking yang menguat terutama di negara maju seperti Amerika Serikat; (iii) masih berlangsungnya penyelesaian proses perundingan perdagangan internasional baik multilateral, regional maupun bilateral; serta (iv) pemanfaatan fasilitas FTA seperti pemanfaatan fasilitas tarif yang masih rendah.

Selain kemitraan global, capaian di bidang kerja sama juga itunjukkan dengan kerja sama antara pemerintah dan swasta. Dengan keterbatasan anggaran pemerintah, kerja sama pemerintah swasta (KPS) dan masyarakat sipil merupakan salah satu alternatif pembiayaan dalam upaya mewujudkan TPB/SDGs. Indikator yang dinilai sangat penting adalah jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Salah satu bentuk KPBU yang kini terus ditingkatkan adalah dalam bidang infrastruktur karena kualitas infrastruktur yang memadai merupakan salah faktor penentu dalam mewujudkan pencapaian TPB/SDGs. Di sisi lain pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang sangat besar, sementara kemampuan pendanaan dari pemerintah terbatas. Pendanaan infrastruktur diutamakan melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) serta Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur di dalam Perpres Nomor 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Beberapa proyek pembangunan di Sumatera Selatan yang dilaksanakan dengan menggunakan skema pembiayaan pembangunan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha adalah :

a. Rencana Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung)

   Ruas Palembang–Betung merupakan bagian dari jalan Lintas Timur Sumatera dan merupakan jalan akses menuju jalan penghubung Lintas Timur dengan jalan Lintas Tengah Sumatera dimana arus lalu lintasnya cukup padat. Untuk mengatasi kemacetan pada ruas tersebut diperlukan pembangunan jalan alternatif dengan tingkat kualitas yang lebih tinggi serta tingkat aksesibilitas dan mobilitas yang memadai. Kewajiban menyediakan jalan merupakan tanggung-jawab Pemerintah, namun demikian dengan keterbatasan dana Pemerintah diperlukan peran serta badan usaha (sektor swasta) melalui pembangunan jalan tol dalam rangka percepatan perwujudan jaringan jalan bebas hambatan.

   Pada beberapa daerah yang berkembang dan mendesak disediakan jalan tol bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan/atau pengembangan wilayah. Sesuai dengan PP. No. 15/2005 tentang Jalan Tol, pengusahaan/pembangunan jalan tol dilakukan melalui 3 (tiga) skema didasarkan atas tingkat kelayakan keuangan. Pada ruas-ruas dengan tingkat kelayakan keuangan belum cukup memadai dibutuhkan dukungan Pemerintah/Pemerintah. Daerah dengan penerapan poIa Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP). Dukungan tersebut dapat berupa pembebasan tanah, pembangunan sebagian dengan dana Pemerintah/Pemerintah Daerah

maupun dukungan selama masa operasi dan pemeliharaan. Selanjutnya sesuai dengan Perpres No. 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Dalam penyediaan infrastruktur, dukungan Pemerintah dapat diberikan oleh Menteri/Kepala lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan proyek kerjasama dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian resiko keuangan dalam APBD.

Pembangunan jalan Tol ini akan menimbulkan dampak yaitu perubahan lingkungan fisik, biologis maupun sosial. Dampak adanya perubahan lingkungan ini dapat bersifat positif yang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun dampak negatif yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk dapat melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, maka berdasarkan kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), untuk kegiatan pembangunan jalan baru dengan kualifikasi Tol perlu dilakukan Studi AMDAL.

Selanjutnya Pra Design disiapkan sebagai bahan pedoman semua pihak khususnya para penentu kebijakan dan pihak masyarakat/ lembaga/Badan Usaha yang memiliki minat atau kepentingan sebagai investor guna terselenggaranya pembangunan jalan Tol. Pra Design merangkum seluruh permasalahan dan merupakan hasil analisis yang diperlukan untuk membuat pengambilan keputusan di bidang investasi jalan Tol di masa mendatang.

Total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan Jalan Tol ini adalah sebesar Rp 17.350.000.000.000,-. Pada tahun 2016-2018 ini akan dibangun Jalan Tol Tahap I sepanjang 33,50 km,- dan tahap II sepanjang 33,9 km,- dan tahap III sepanjang 44,25 km.

b. Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Tanjung Enim-Tanjung Api-Api

Dalam rangka menunjang proses pengembangan hulu-hilir ini pemerintah Sumatera Selatan berencana akan membangun sarana prasarana angkutan penunjang yaitu Rencana Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Tanjung Enim-Tanjung Api-Api dan pengembangan terminal khusus batubara di Pelabuhan Tanjung Carat. Jalur kereta api yang akan dibangun ini sepanjang 372 km dan lebar gandar 1,435 dengan daerah administrasi Muara Enim, Lahat, Pali, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin dan Banyuasin. Selanjutnya ialah pembangunan jembatan bentang panjang Sungai Musi sepanjang 112 m dan Jembatan

Sungai Lematang 320 m dengan aksesbilitas simpul produksi Tanjung Enim, Lawang Wetan, Keluang, Rawas Ilir 1 dan Rawas Ilir 2. Total batubara yang mampu diangkut keseluruhan mencapai 57 juta ton per tahun. Dari sisi ekonomi proyek pembangunan jalan Kereta Api Tanjung Enim – Tanjung Api-Api ini akan memberikan nilai Economic Internal Rate Return (EIRR) sebesar 28,87 %, Benefit Cost Ratio (BCR) sebesar 2,41 dan Economic Net Present Value (ENPV) sebesar US$ 6.287,40 juta. Dari sisi kelayakan finansial rencana proyek ini memberikan nilai Financial Internal Rate Return (FIRR) sebesar 17,48 %, dengan Net Present Value (NPV) sebesar US$ 6.175 juta dan Payback Period selama 12 tahun (Hasil Studi Jalur Kereta Api Batubara Tanjung Enim-Tanjung Api-Api, 2014).

Rencana Jalur Kereta Api Tanjung Enim - Tanjung Api-Api ini juga terintegrasi untuk mensuplai angkutan bahan mentah ke Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api dan Kawasan Ekonomi Tanjung Carat. Enam Kabupaten yang dilewati rencana trase Kereta Api selain merupakan sentra produksi batubara juga merupakan sentra produksi karet dan sawit. Rencana Jalur Kereta Api Tanjung Enim – Tanjung Api-Api ini akan dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan inisiatif/pemrakarsa dari Pihak Swasta (unsolicitied project) total biaya untuk pembangunan Jalur Kereta Api dan Dermaga khususnya adalah sebesar 34,2 triliun rupiah.

c. Hibah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, *Water Resources And Irrigation Sector Management Program 2* (WISMP 2)

Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Program ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan proses penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencapai peningkatan kinerja. Disamping itu melalui perbaikan pengaturan dan perencanaan sektor sumber daya air dan irigasi untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan pendanaan dari instansi-instansi terkait dan masyarakat petani pemakai air dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan irigasi. Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2017 adalah fasilitas pembentukan Komisi Penyuluhan, Internalisasi PPSIP dalam dokumen perencanaan daerah, pengadaan dan operasional TPM/KTPM, Penguatan Komir Provinsi, Penyusunan, konsultasi public, penetapan, dan sosialisasi Peraturan Gubernur tentang pengutan KPI, rapat koordinasi kegiatan PSETK.

d. Kegiatan Asian Games

Sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 2 tahun 2016 tentang Dukungan Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII tahun 2018, bahwa untuk

persiapan penyelenggaraan dapat didukung melalui dana APBD Provinsi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menganggarkan beberapa kegiatan untuk sarana dan prasarana ASIAN GAMES antara lain: Pembangunan Jembatan Musi 6 serta jaringan jalan akses menuju Kawasan Jakabaring Sport City (JSC), pembebasan lahan dan penimbunan untuk pengembangan lokasi Venue Dayung, Shooting Range, Wisma Atlet dan RS Provinsi sebagai fasilitas rujukan kesehatan para atlet dan official.

**Tabel 4.14**
Rekapitulasi Pendanaan KPBU Penugasan

| Tahun | Kegiatan | Pelaksanaan | Total Dana |
|---|---|---|---|
| 2015-2018 (TOTAL) | - TOL PALINDRA (Palembang - Indralaya) | PT Hutama Karya | Rp. 3,3 T |
| 2015 | - TOL PALINDRA (Palembang - Indralaya) | PT Hutama Karya | Rp. 0,5 T |
| 2016 | - TOL PALINDRA (Palembang - Indralaya) | PT Hutama Karya | Rp. 1,2 T |
| 2017 | - TOL PALINDRA (Palembang - Indralaya) | PT Hutama Karya | Rp. 1,2 T |
| 2018 | - TOL PALINDRA (Palembang - Indralaya) | PT Hutama Karya | Rp. 0,401 T |
| 2016-2018 (TOTAL) | - LRT Kota Palembang | PT Waskita Karya | Rp. 12,4 T |
| 2016 | - LRT Kota Palembang | PT Waskita Karya | Rp. 5,3 T |
| 2017 | - LRT Kota Palembang | PT Waskita Karya | Rp. 5,3 T |
| 2018 | - LRT Kota Palembang | PT Waskita Karya | Rp. 1,8 T |

Dalam meningkatkan KPBU di masa mendatang, Indonesia masih akan menghadapi beberapa tantangan seperti (i) masih belum optimalnya koordinasi dan perencanaan terutama koordinasi yang berkaitan dengan prioritisasi proyek dan alokasi dana; (ii) kesenjangan peraturan antarsektor seperti aturan keuangan dan kewenangan Pusat/Daerah terkait mekanisme pembiayaan; dan (iii) belum memadainya kapasitas kelembagaan terkait tatakelola, sumber daya manusia, motivasi dan sistem insentif, serta (iv) tersebarnya kewenangan yang tidak diimbangi dengan kemampuan atau mekanisme koordinasi yang baik.
Berdasarkan uraian di atas, dan hasil cascading goal 17, maka isu strategis goal ini adalah

1. Peningkatan kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat
2. Peningkatan mobilisasi sumberdaya domestik
3. Peningkatan mobilisasi tambahan sumberdaya keuangan
4. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi
5. Peningkatan eskpor
6. Peningkatan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya

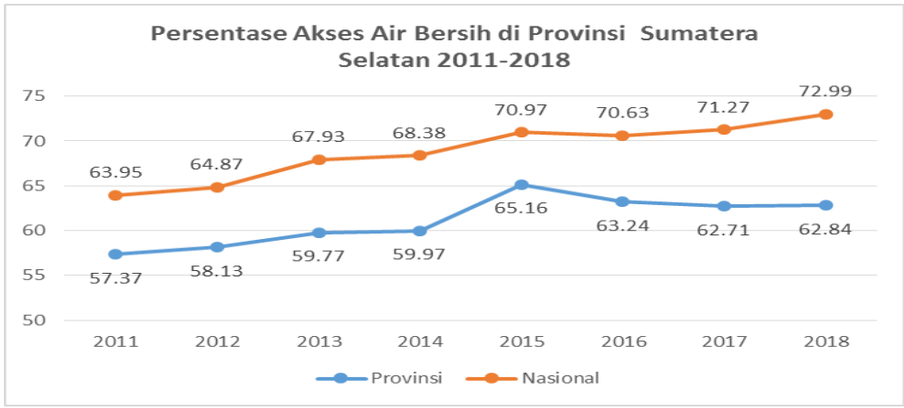
**Pilar 3 ( Pembangunan Lingkungan )**

**Goal 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua**

Akses Air Bersih. Berdasarkan Data Susenas BPS, akses rumah tangga terhadap fasilitas air bersih layak di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tahun 2011 sebesar 58,11 persen menjadi 62,84 persen pada tahun 2018 dengan rata-rata peningkatan pertahun selama lima tahun sebesar 4.70%. Pada tahun 2017, akses capaian tertinggi dicapai Kota Pagar Alam dan Terendah di Kabupaten Empat Lawang. Tantangan yang cukup berat untuk mencapai target RPJMD Sumatera Selatan di tahun 2018 sebesar 80% dan RPJMN tahun 2019 sebesar 100%.

**Gambar 4.41**

Persentase Akses Air Bersih di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2018




*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

**Tabel 4.15**

Persentase Akses Air Bersih di Provinsi Sumatera SelatanTahun 2011-2018

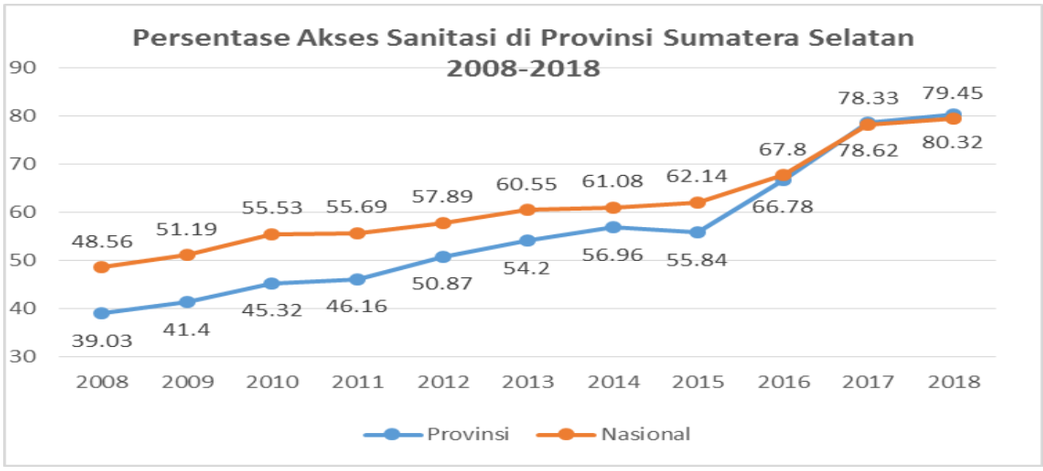
| NO | WILAYAH | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 67,16 | 62,52 | 67,51 | 71,28 | 62,57 | 65,41 | 68,76 | 61,52 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 49,02 | 46,81 | 39,62 | 42,16 | 57,08 | 59,75 | 61,83 | 59,54 |
| 3 | Muara Enim | 59,56 | 61,09 | 58,74 | 54,58 | 67,59 | 72,17 | 61,02 | 65,63 |
| 4 | Lahat | 39,56 | 42,19 | 42,75 | 38,29 | 42,89 | 54,68 | 45,83 | 43,70 |
| 5 | Musi Rawas | 41,86 | 60,48 | 55,32 | 54,22 | 58,91 | 61,62 | 59,34 | 59,52 |
| 6 | Musi Banyuasin | 46,75 | 47,66 | 43,22 | 49,32 | 60,37 | 60,40 | 58,28 | 65,47 |
| 7 | Banyuasin | 43,02 | 43,19 | 45,58 | 48,32 | 47,71 | 43,55 | 41,71 | 44,49 |
| 8 | OKU Selatan | 27,34 | 29,91 | 39,46 | 39,77 | 41,52 | 28,00 | 36,86 | 41,60 |
| 9 | OKU Timur | 63,21 | 62,20 | 69,16 | 69,16 | 72,48 | 59,14 | 61,50 | 59,06 |
| 10 | Ogan Ilir | 46,18 | 43,00 | 57,76 | 56,11 | 56,40 | 57,97 | 61,14 | 58,29 |
| 11 | Empat Lawang | 22,23 | 20,80 | 37,22 | 20,32 | 32,08 | 12,11 | 22,19 | 26,03 |
| 12 | Kota Palembang | 95,08 | 94,23 | 96,07 | 98,37 | 97,92 | 96,68 | 97,28 | 61,46 |
| 13 | Kota Prabumulih | 74,49 | 69,65 | 68,47 | 72,27 | 68,73 | 72,85 | 66,51 | 53,45 |
| 14 | Kota Pagar Alam | 37,34 | 44,29 | 35,75 | 32,19 | 59,39 | 52,38 | 53,87 | 95,03 |
| 15 | Kota Lubuk Linggau | 62,12 | 54,41 | 68,26 | 64,24 | 66,17 | 73.57 | 65,17 | 69,64 |
| 16 | PALI | - | - | - | - | 57.89 | 64,09 | 61,39 | 49,57 |
| 17 | Muratara | - | - | - | - | 51.87 | 50,34 | 46,20 | 61,84 |
| **Sumatera Selatan** | | **58,11** | **56,02** | **61,18** | **60,75** | **65,16** | **63,24** | **62,71** | **62,84** |

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Rendahnya Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih di Sumsel tahun 2015 baru mencapai 65,16%. (peringkat 22 & dibawah rata-rata nasional 70,97%). Masih banyaknya penduduk yang belum terlayani PDAM dari kapasitas yang tersedia (idle capacity). Rata-rata idle capacity sumsel sebesar 80,74% tahun 2015. Dalam rangka upaya pengembangan infrastruktur dasar air minum (jaringan SPAM IKK) dan menurunkan Idle Capacity PDAM di Kab/Kota, pemerintah melaksanakan beberapa strategi antara lain: 1) mendorong Kab/Kota untuk membangun sambungan Rumah (SR) di Kab/Kota, 2) Mengoptimalkan SPAM IKK yang sudah ada.

Akses Sanitasi. Akses sanitasi yang layak Provinsi Sumatera Selatan sebesar 80,32 persen pada tahun 2018. Kondisi lahan basah di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Selatan menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan sanitasi yang layak. Diperlukan biaya yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur sanitasi di daerah lahan basah dibandingkan di daerah lahan kering. Dengan memperhatikan kecenderungan capaian akses sanitasi layak selama ini, Pemerintah Sumatera Selatan harus memberikan perhatian khusus, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi, guna mencapai target RPJMD Sumatera Selatan pada tahun 2018 sebesar 80 persen dan target RPJMN tahun 2019 sebesar 100 persen.

**Gambar 4.42**
Persentase Akses Sanitasi di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2008-2018




*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

**Tabel 4.16**
Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak
Tahun 2011 – 2018

| NO | WILAYAH | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 59,57 | 56,37 | 64,50 | 63,18 | 64.12 | 74,46 | 91,41 | 90,48 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 28,1 | 30,65 | 35,64 | 42,26 | 46.59 | 55,41 | 68,19 | 65,94 |
| 3 | Muara Enim | 59,3 | 53,7 | 65,69 | 61,25 | 61.13 | 72,08 | 91,68 | 90,75 |
| 4 | Lahat | 28,59 | 40,63 | 45,98 | 43,44 | 47.19 | 53.47 | 68,65 | 75,89 |
| 5 | Musi Rawas | 31,1 | 33,95 | 37,70 | 40,88 | 42.11 | 61.98 | 63,42 | 74,43 |
| 6 | Musi Banyuasin | 43,24 | 56,93 | 44,28 | 49,54 | 49.80 | 64.35 | 58,91 | 72,70 |
| 7 | Banyuasin | 40,49 | 41,34 | 42,55 | 52,16 | 47.94 | 57,32 | 73,35 | 66,08 |
| 8 | OKU Selatan | 26,99 | 22,37 | 28,98 | 32,11 | 35.57 | 44.32 | 60,54 | 72,53 |
| 9 | OKU Timur | 44,25 | 53,17 | 58,31 | 61,20 | 64.76 | 72.39 | 82,75 | 81,03 |
| 10 | Ogan Ilir | 46,27 | 43,49 | 50,94 | 55,50 | 51.11 | 73.27 | 74,86 | 71,68 |
| 11 | Empat Lawang | 32,81 | 40,31 | 37,93 | 14,46 | 28.95 | 20.68 | 67,13 | 82,70 |
| 12 | Kota Palembang | 77,49 | 76,08 | 78,19 | 84,40 | 75.70 | 89.39 | 94,79 | 98,07 |
| 13 | Kota Prabumulih | 70,36 | 75,21 | 68,01 | 80,65 | 80.35 | 92,08 | 98,54 | 95,24 |
| 14 | Kota Pagar Alam | 48,7 | 55,21 | 47,77 | 51,10 | 41.55 | 45.34 | 33,80 | 91,77 |
| 15 | Kota Lubuklinggau | 69,96 | 66,73 | 84,39 | 75,12 | 66.48 | 81.40 | 88,42 | 96,87 |
| 16 | PALI | - | - | - | - | 57.18 | 54.42 | 92,01 | 63,30 |
| 17 | Muratara | - | - | - | - | 37.51 | 53.76 | 74,57 | 90,84 |
| | **Sumatera Selatan** | **47,89** | **50,39** | **54,48** | **59,79** | **61,30** | **66,78** | **78,62** | **80,32** |

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Sumsel tahun 2015 baru mencapai 61,30%. (peringkat 16 & dibawah rata-rata nasional 70,97%). Masih adanya RT MBR (Masyarakat Berpendapatan Rendah) di Provinsi Sumatera Selatan yang tidak memiliki akses fasilitas tempat BAB (Jamban Individu dan Komunal) sebesar 8,49% (170.890 KK). Dalam rangka mencapai percepatan peningkatan cakupan akses Universal pembangunan sanitasi dan pengembangan infrastruktur dasar sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase permukiman) berdasarkan arah kebijakan 2018 bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah, pemerintah mengupayakan strategi diantaranya: 1) Memanfaatkan dana pihak ketiga terutama CSR di dalam membangun infrastruktur dasar sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase permukiman), 2) Membangun kerjasama dengan swasta, masyarakat di dalam pembangunan infrastruktur dasar sanitasi.

Berdasarkan hasil uaraian di atas dan hasil cascading yang telah dilakukan, maka isu strategis pada goal ini adalah,

1. Meningkatkan kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat
2. Mobilisasi Sumberdaya Domestik
3. Mobilisasi tambahan sumberdaya keuangan
4. Peningkatan penggunaan teknlologi informasi dan komunikasi
5. Peningkatan ekspor
6. Peningkatan ketersediaan data berkualiats tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya

**Goal 11.Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan**

Pesatnya pertumbuhan penduduk dan tingginya urbanisasi di p erkotaan di Provinsi Sumatera Selatan terutama di Kota Palembang dan Ibu Kota Kabupaten/Kota merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari dan dicegah. Kepadatan penduduk Sumatera selatan mencapai 93,35 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di 17 Kabupaten/kota beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di kota Palembang sebesar 4.405,17 jiwa/km2 dan terendah di Kabupaten Musi rawas Utara sebesar 31,75 jiwa/km2.

Pesatnya pertumbuhan perkotaan, pembangunan fasilitas perkotaan dan kebutuhan pemukiman yang menuntut ketersediaan lahan di perkotaan, penataaan kawasan kumuh dan penyediaaan akses infrastruktur dasar merupakan salah satu agenda prioritas yang harus tercapai hingga tahun 2030 melalui Tujuan 11 mengenai kota dan permukiman yang berkelanjutan.

Ketersediaan hunian layak yang didukung infrastruktur dan pelayanan dasar perkotaan memiliki fungsi vital dalam menjamin kehidupan penduduk yang sejahtera di perkotaan. Di Provinsi Sumatera Selatan, belum semua penduduk dapat menghuni hunian layak yang didukung oleh infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai. Sesuai dengan Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, selain menyediakan hunian layak dan terjangkau, infrastruktur perkotaan yang menjadi perhatian antara akses terhadap perumahan yang layak, aman dan terjangkau, penataan kawasan kumuh dan terhadap pelayanan dasar perkotaan (Target 11.1), akses terhadap transportasi (Target 11.2), memperkuat urbanisasi yang inklusif (Target 11.3), warisan budaya (Target 11.4),pengurangan resiko bencana (Target 11.5 ), dan Jumlah kota hijau (Target 11.6.1). Di bidang perumahan dan permukiman, masih banyak rumah tangga di perkotaan yang tinggal di kawasan permukiman kumuh dengan akses terhadap air minum dan sanitasi layak, serta kondisi bangunan yang tidak layak, kurang sehat dan tanpa kepastian bermukim. Di bidang transportasi, proporsi pengguna angkutan pribadi masih tinggi dibanding pengguna angkutan umum. Kualitas dan kuantitas angkutan

umum yang aman, nyaman, cepat dan terjangkau masih perlu ditingkatkat melalui Bus Way (Trans Musi) dan Kereta Api Perkotaan (Kertalaya dan LRT) dan revitalisasi moda angkutan pinggiran (angkot) dengan pengembangan trayek-trayek baru, perparkiran dan terminal di kota termasuk angkutan sungai karena beberapa kota di Provinsi Sumsel dilintasi sungai. Di bidang warisan budaya, upaya membangun menjaga kota pusaka harus diperluas.

Tantangan yang dihadapi: (1) penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah; (2) infrastruktur dan pelayanan dasar permukiman yang belum memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh; (3) penyediaan lahan untuk perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan; (4) terbatasnya jangkauan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (5) konektivitas dalam kota dan antar kota yang masih belum optimal; (6) terbatasnya sumber daya untuk mewujudkan kota pusaka; dan (7) belum optimalnya upaya untuk menyediakan RTH/ruang publik di perkotaan hingga memenuhi 30% dari total luas wilayah. (8) Laju urbanisasi yang sulit dikendalikan, sehingga perlu dilakukan upaya pemerataaan pembangunan sampai kedesa-desa.

Risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan diperkirakan akan semakin besar mengingat pesatnya pertumbuhan penduduk perkotaan, berkembangnya industri di perkotaan dan banyaknya kendaraaan yang memadati jalan menggunakan bahan bakar posil. Pembangunan kota dan permukiman juga harus memperhatikan keberlanjutan dan kualitas lingkungan hidup (Target 11.5 dan 11.6). Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi semakin memperburuk kualitas udara akibat asap dan debu yang ditimbulkan semakin meningkat.

**Tabel 4.17**
Indikator Kualitas Lingkungan Hidup
di Provinsi Sumatera Selatan

| Komponen | Tahun | Capaian |
|---|---|---|
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 2014 | 61,62 |
| | 2015 | 57,04 |
| | 2016 | 66,34 |
| | 2017 | 62,04 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov.Sumsel 2018

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di tahun 2016 sebesar 146,9 kota dan kabupaten di Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi. Tantangan untuk mewujudkan pembangunan kota-kota yang tanggap terhadap bencana dan perubahan iklim, antara lain: (1) terbatasnya kajian risiko

bencana dan peta risiko bencana hingga tingkat kabupaten/kota; (2) belum memadai dan terintegrasinya basis data dan sistem informasi mengenai kerawanan dan kerentanan kota terhadap bencana dan perubahan iklim; (3) Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tahun 2017 menurun 11,65% dari tahun sebelumnya dengan nilai capaian Provinsi Sumsel 2.706.851.997 Ton CO2-eq, nilai tersebut masih dianggap tinggi sehingga perlu upaya-upaya khusus untuk penurunannya terutama terkait pencemaran udara di perkotaan dengan meningkatnya konsentrasi NO2, SO2, dan CO2, yang sumbangan terbesarnya dari kendaraan bermotor; dan (4) menurunnya kualitas air sungai dan danau akibat pencemaran dan perubahan tata guna lahan, sehingga berimplikasi pada kuantitas dan kualitas air minum. (5) Pengendalian Kebakaran Hutan Lahan (Karhutla). Tercatat semula tahun 2015 ada 27.043 hotspot dan lahan yang terbakar 736.563,000 hektar, dan pada tahun 2017 turun sekitar 1.142 hotspot atau sekitar 95,78%.

Pembangunan kota yang terpadu dan inklusif. Untuk mengukur proses pembangunan perkotaan yang inklusif (Target 11.3), digunakan ukuran keterlibatan dan partisipasi masyarakat, sektor swasta, komunitas filantropi, serta akademisi dalam proses perencanaan pembangunan seperti misalnya dalam Musrenbang. Namun, ukuran keterwakilan para pemangku kepentingan masih perlu diperjelas. Tantangan multi-dimensi untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang inklusif, diantaranya: (1) kesenjangan yang tinggi antarkota di Pulau Jawa-Bali dengan di luar Pulau Jawa-Bali; (2) kesenjangan antara perkotaan dan daerah sekitarnya; (3) tidak inklusifnya proses pembangunan yang terjadi di kota-kota Indonesia, sehingga tidak semua kelompok masyarakat memiliki peluang yang sama dalam mengakses pelayanan dasar perkotaan.

Untuk mempercepat pembangunan perkotaan terutama Palembang Metropolitan dalam konsep Metropolitan Patung Raya Agung (Palembang-Betung-Indralaya-Kayu Agung) dan terintegrasi dengan rencana Wilayah Pengembangan Strategis Pemerintah Pusat melalui BPIW Kementerian PUPR yaitu (WPS 5 meliputi Merak Bakahueni Bandar Lampung Tanjung Api-api dan WPS 6 Jambi-Betung-Palembang-TAA-Bangka Belitung) diharapkan akan mendorong percepatan berkembangnya kota-kota sekitar dalam rangka pengembangan wilayah dan keseimbangan pembangunan yang membuat berkurangnya urbanisasi dari Daerah.

Beradasarkan uraian di atas serta hasil *cascading* yang telah dilakukan, maka isu strategis goal 11 ini adalah,

1. Peningkatan Akses Perumahan yang berkelanjutan
2. Peningkatan aksessibilitas siste, transportasi
3. Urbanisasi inklusif berkelanjutan

4. Perkuatan warisan budaya dan warisan alam dunia
5. Penurunan jumlah kematian terdampak bencana
6. Penurunan dampak merugikan lingkungan perkotaan per kapita
7. Kota dan pemukiman yang menerapkan Rhe Sendal Framework for disaster reduction 2015-2030

**Goal 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab**

*Sustainable Consumption and Production* (SCP) atau konsumsi dan produksi yang berkelanjutan merupakan salah satu sub-tema aksi menuju perwujudan pembangunan berkelanjutan yang telah dicanangkan sejak Deklarasi Rio tahun 1992, yang dikuatkan dengan *Johannesburg Plan of Implementation* tahun 2002 dan Konferensi *United Nations Conference on Sustainable Development* (Konferensi Rio+20) di Rio de Janeiro, Brasil pada bulan Juni 2012. Dokumen "*The Future We Want*" yang merupakan hasil Konferensi Rio+20 memuat kesepakatan tentang penerapan 10 *Year Framework of Programme on SCP* (10 YFP SCP) pada tingkat internasional dan nasional.

Indonesia telah aktif di berbagai forum Internasional dalam bidang SCP sejak tahun 2001, dan menjadi tuan rumah *Asia Pasific Roundtable on Sustainable Consumption and Production* (APRSCP) ke-10 pada November 2011 di Yogyakarta. Pada tahun 2013 Indonesia meluncurkan Dokumen Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia 2013-2023 yang memuat peta jalan Indonesia dalam menerapkan konsumsi dan produksi berkelanjutan. Pada tahun yang sama, hasil pertemuan *United Nations High Level Panel of Eminent Persons* (UN HLPEP) "*Post-2015 Development Agenda*" di Bali, Maret 2013, yang dipimpin oleh Presiden RI menetapkan SCP sebagai salah satu tema dalam "*Post-2015 Development Agenda*". Selanjutnya, SCP juga telah dimasukkan sebagai salah satu agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

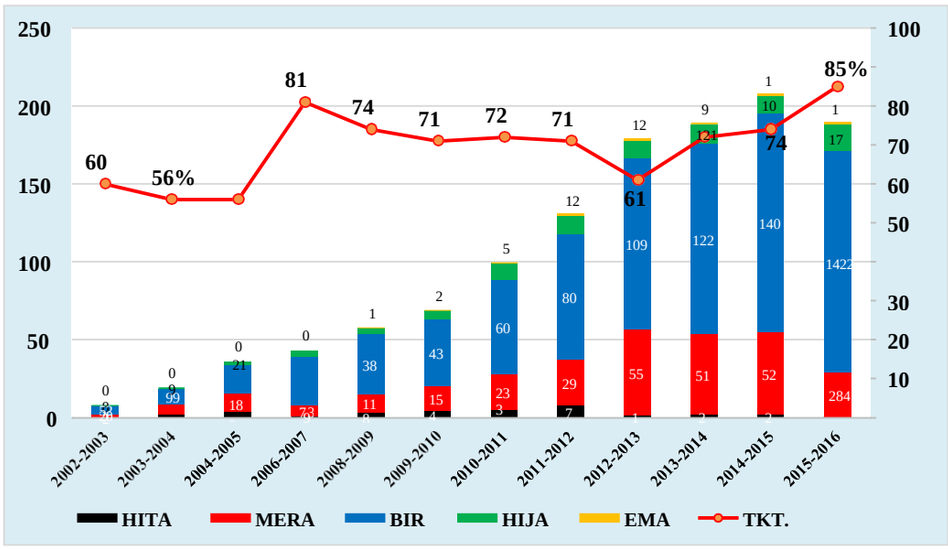
Penerapan SCP di Indonesia meliputi (1) pengembangan perangkat kebijakan dan teknis penerapan produksi bersih (eko-efisiensi), (2) verifikasi kinerja teknologi ramah lingkungan, (3) sistem manajemen lingkungan untuk penerapan produksi berkelanjutan, (3) kriteria ekolabel untuk sertifikasi produk ramah lingkungan dan pengadaan barang/jasa ramah lingkungan untuk penerapan konsumsi berkelanjutan, (4) sistem kompetensi keahlian dan lembaga penyedia jasa untuk penyediaan sumberdaya manusia yang kompeten; dan (5) pembinaan dan peningkatan kapasitas produsen dan konsumen, termasuk pihak pendukung, a.l. sektor pembiayaan (*green banking*), serta (6) penerapan efisiensi energi, industri hijau, dan pariwisata

ramah lingkungan oleh berbagai instansi.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan SCP di Indonesia antara lain (1) perlu intervensi kebijakan operasional mengenai penerapan prinsip-prinsip SCP dalam "*business cycle*" dan "*business process*" di pihak pemerintah, swasta dan masyarakat secara menyeluruh termasuk dalam hal pendanaan, (2) perlu menghilangkan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi yang menurunkan kualitas lingkungan dan cadangan sumberdaya alam. (3) perlu menerapkan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan untuk mengubah pola pembangunan yang tidak berkelanjutan (konsep "*de- coupling*") menjadi pembangunan yang berkelanjutan.

Program penilaian peringkat kinerja perusahaan (Proper). Salah satu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terkait dengan SCP adalah penerapan Proper yang menggambarkan pola produksi berkelanjutan yang dicerminkan dengan ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Proper dikembangkan dengan prinsip dasar antara lain peserta bersifat selektif, artinya peserta Proper diperuntukkan bagi industri yang proses produksinya menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan peduli terhadap citra atau reputasi perusahannya. Terdapat lima kategori Proper, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam, yang merupakan urutan capaian kinerja perusahaan dari yang terbaik/konsisten sampai dengan terendah (Kategori Emas untuk industri yang telah konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat. Kategori Hijau bagi yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyarakatkan dalam peraturan melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan juga telah memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggungjawab sosial dengan baik. Kategori Biru adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kategori Merah untuk yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Kategori Hitam, diberikan kepada perusahaan dan/atau kegiatannya yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta melanggar peraturan perundangan yang berlaku). Jumlah perusahaan yang menerima Proper untuk masing-masing kategorinya pada tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 12 Emas, 172 Hijau, 1.422 Biru, 284 Merah, dan sebanyak 3 (tiga) perusahaan mendapat kategori Hitam.

**Gambar 4.43**
Jumlah Ketaatan Proper 2002-2016




*Sumber: KLHK, 2017*

Secara umum penerima Proper Biru meningkat dari 52 perusahaan pada tahun 2002-2003 menjadi 1.422 perusahaan pada tahun 2015-2016. 12 perusahaan Peringkat Emas yang terdiri atas 7 (tujuh) perusahaan migas, 2 (dua) perusahaan panas bumi, 1 (satu) perusahaan farmasi, 1 (satu) perusahaan tambang, dan 1 (satu) perusahaan pembangkit listrik tenaga uap. Terdapat 5 (lima) perusahaan berperingkat hitam yang terdiri atas perusahaan air minum dalam kemasan, perusahaan makanan dan minuman, perusahaan peleburan logam, perusahaan pengolahan ikan, dan perusahaan briket arang (KLHK 2016). Tingkat ketaatan perusahaan terhadap Proper tahun 2015-2016 mengalami peningkatan menjadi 85% dari sebelumnya 74% pada tahun 2014-2015, namun tantangan yang dihadapi antara lain perlunya upaya untuk mendorong perusahaan besar melaksanakan praktek usaha berkelanjutan dan pelibatan perusahaan lainnya dalam program Proper. Selain itu, saat ini telah dicetuskan program *Green Industry* melalui *Green Industry Award* oleh Kementerian Perindustrian. Program ini merupakan bentuk insentif nonfinansial kepada perusahaan ramah lingkungan dengan karakteristik yang mirip dengan Proper yang dilaksanakan oleh KLHK. Kedua program tesebut perlu dilakukan sinkronisasi agar memberi nilai tambah bagi industri.

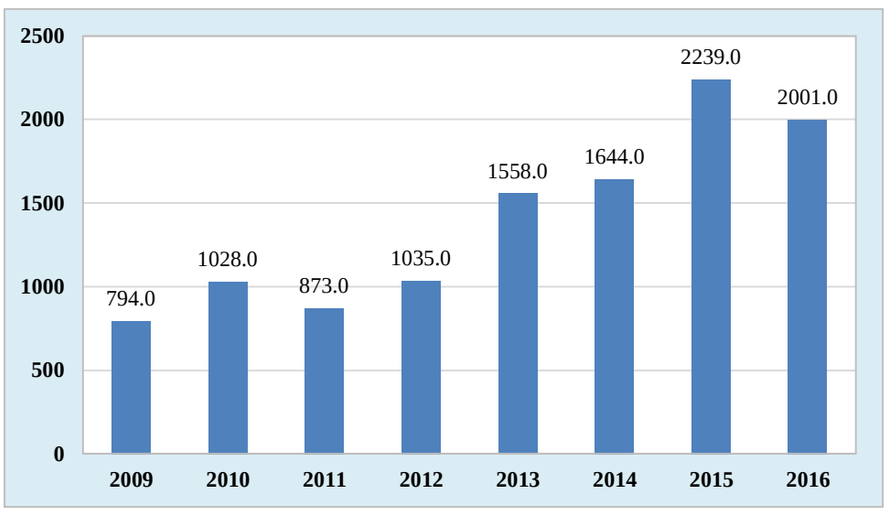
Untuk Jumlah perusahaan yang merima Proper di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 ada 115 perusahaan, dengan kategori rangking biru sebanyak 95 Proper, rangking emas sebanyak 3 Proper, rangking hijau sebanyak 17 Proper.

Pengelolaan sampah untuk mendukung pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Hingga tahun 2017 telah dilakukan pengelolaan sampah terpadu *Reduce, Reuse, and Recycle* (3R) melalui beroperasinya 3 (tiga) unit

pusat daur ulang skala kota dengan kapasitas masing-masing 20, 10 dan 5 (lima) ton per hari yang berpotensi mengurangi timbulan sampah sebesar 12.775 ton/tahun. Selain itu, sebanyak 5.244 unit Bank Sampah telah dibangun untuk mengelola sampah sebanyak 4.402.643 ton selama kurun waktu 2014-2017. Tantangan penerapan prinsip 3R di bank sampah hanya mampu mengelola 1,7% dari total timbulan sampah nasional. Untuk itu diperlukan upaya tindak lanjut untuk mensinergikan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, peningkatan kesadaran pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk menerapkan prinsip 3R secara lebih luas.

Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) merupakan salah satu upaya penerapan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Dari tahun 2009-2015 jumlah perusahaan yang telah memiliki sertifikat SML terus meningkat. Tercatat pada tahun 2016 sebanyak 2.001 perusahaan telah memiliki Sertifikat SML (Gambar 42.). Permasalahan penerapan SNI ISO 14001, meskipun telah menunjukkan adanya peningkatan, namun dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang beroperasi, masih terdapat peluang besar untuk ditingkatkan. Tantangan untuk meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001 adalah aspek manfaat bisnis, dimana sertifikasi ISO 14001 masih dipandang tidak memberikan manfaat langsung dari sisi pendapatan usaha, sehingga perusahaan akan mengutamakan sertifikasi yang bersifat mandatori, maupun yang memberikan manfaat bisnis secara langsung.

**Gambar 4.44**
Jumlah Perusahaan yang memiliki sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan (SML)




*Sumber: ISO Survey, 2017*

Sistem label ramah lingkungan dalam pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan ditujukan untuk mendukung dan mendorong perubahan perilaku dari sisi konsumsi maupun produksi. Dari sisi konsumsi (*demand*) perubahan

operasional di pihak pemerintah diindikaasikan menjadi lebih ramah lingkungan termasuk yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sementara pada sisi produksi (*supply*) diarahkan untuk mendorong pelaku usaha/kegiatan beralih menghasilkan barang dan jasa ramah lingkungan, menumbuhkan pasar hijau, mengembangkan *circular economy*, dan mendapatkan insentif.

Dalam hal pengadaan barang, jasa ramah lingkungan dan pengembangan sistem label ramah lingkungan telah diamanatkan pada Pasal 43 Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 32, pasal 31-37 PP 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup mengatur sistem label ramah lingkungan, pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan sebagai instrumen insentif.

Daftar rujukan barang dan jasa ramah lingkungan untuk penerapan *Green Public Procurement* (GPP) berasal dari berbagai skema standar dan verifikasi/registrasi yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga sesuai substansi kewenangannya dan memenuhi kriteria dalam Pasal 34 PP No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). Pada tahap awal, skema untuk menyusun daftar rujukan barang/jasa dan teknologi ramah lingkungan adalah skema yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Ekolabel, Verifikasi Teknologi

Ramah Lingkungan dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) Kementerian ESDM, dan *Green Hotel* Kementerian Pariwisata. Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan merupakan salah satu strategi perbaikan kualitas lingkungan hidup (RPJMN 2015-2019) sehingga perubahan perilaku masyarakat yang pro-lingkungan (*pro-environment awareness*) sangat dibutuhkan untuk pencapaian tujuan. Fasilitas publik merupakan tempat ideal untuk mewujudkan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan karena fasilitas publik merupakan tempat pertemuan antara perilaku masyarakat selaku pengguna fasilitas publik dengan perilaku pemerintah dan swasta selaku pengelola fasilitas publik.

Standar Pelayanan Masyarakat di fasilitas publik (SPM-FP) mendorong tersedianya informasi, edukasi, dan sarana untuk perubahan perilaku di fasilitas publik. Fokus besar SPM-FP terletak pada perubahan perilaku di fasilitas publik sejalan dengan Program Gerakan Indonesia Bersih dan Program Gerakan Indonesia Tertib, sebagaimana diamanatkan pada Instruksi Presiden No. 12/2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Standar Pelayanan Masyarakat di fasilitas publik mendorong perubahan gaya hidup yang ramah lingkungan, tidak hanya dilakukan melalui edukasi di pendidikan formal tetapi juga dilakukan di fasilitas publik.

SPM-FP merupakan standar khusus yang ditetapkan KLHK sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. P.90/MenLHK/Setjen/Set.1/11/2016 tentang Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-Pos Fasilitas Publik Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan. SPM-FP bertujuan antara lain untuk menyediakan standar bagi pengelola fasilitas publik dengan materi substansi pengelolaan lingkungan hidup terpadu, menyediakan fasilitas publik yang ramah lingkungan, serta layanan informasi, edukasi, sarana dan apresiasi bagi masyarakat pengguna fasilitas publik.

Berdasarkan uraian di aats serta hasil cascading, maka isu strategis sumatera selatan untuk goal ini adalah,

1. Penurunan produksi limbah
2. Pengelolaan Bahan Kimia dan Limbah Yang ramah lingkungan
3. Pencapaian *The 10 Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and production pattern*

**Goal 13. Penanganan Perubahan Iklim**

Dalam rangka mencapai tujuan penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 8 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pengurangan risiko bencana (PRB), pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari potensi risiko atau bahaya yang ditimbulkan dari perubahan iklim, Indonesia secara serius dan konsisten terus menjalankan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dan melaksanakan program aksi adaptasi perubahan iklim, yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs). Pengarusutamaan penanganan perubahan iklim sebagai agenda pembangunan nasional lintas bidang terus dilakukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam jangka menengah (RPJMN 2015-2019) dan perencanaan pembangunan tahunan (RKP). Selain itu, Indonesia juga berperan aktif dalam melaksanakan komitmen global dalam penanganan perubahan iklim. Secara reguler, dokumen bukti kontribusi terhadap penanganan perubahan iklim disampaikan ke UNFCCC, baik dalam bentuk *National Communication* maupun *Biennial Update Report* (BUR).

Untuk mewujudkan target penurunan emisi GRK, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2011 tentang (RAN-GRK). RAN- GRK memiliki kerangka kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam penurunan emisi GRK

sebesar 26% (skenario fair/menggunakan kemampuan sendiri) dan sebesar 41% (skenario ambisius/jika mendapat dukungan internasional) pada bidang berbasis lahan, energi dan pengelolaan limbah dalam kurun waktu 2010-2020. Perpres tersebut mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing daerah. Komitmen tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 29% (skenario fair) dan 41% (skenario ambisius) untuk tahun 2030.

Target penurunan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 hingga 2020. Target penurunan emisi tersebut ditargetkan mencapai 26 % pada tahun 2020. Ketika target penurunan tersebut di tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang telah diundangkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 34 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dijabarkan bahwa target penurunan sebesar 10,16 % dari BAU hingga tahun 2020. Target penurunan emisi GRK di Provinsi Sumatera Selatan meliputi lima sektor prioritas Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut, Energi yang meliputi transportasi dan Industri, serta Pengolahan Limbah.

Seiring dengan perkembangan masa, rencana aksi daerah yang dicanangkan pada tahun 2012, telah mendekati akhir pelaksanaannya. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perubahan Iklim tahun 2012, akan difinalisasi pada tahun 2020, sehingga harus dibuat suatu rencana baru yang akan dilaksanakan saat berakhirnya tahun 2020.

Di dalam pertemuan *Conference of The Parties* (COP) yang ke 21 di Paris Francis, Negara yang hadir harus membuat suatu komitmen baru untuk implementasi penurunan emisi GRK yang diharapkan tidak membuat kenaikan suhu hingga 2oC. Dalam pertemuan tersebut dibuatlah *Intended Nationally Determined Contribution* (INDC) dari Indonesia. Target yang baru penurunan emisi GRK di Indonesia diubah menjadi 29 % tanpa bantuan dana dari luar atau 41 % dengan bantuan donor.

Selain penyesuaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca akibat komitmen Indonesia yang berubah, terdapat juga perubahan struktur pembangunan di beberapa daerah, dimana lima tahun terakhir terjadi pembangunan infrastruktur secara massive. Dengan adanya pembangunan infrastruktur terjadilah migrasi penduduk, makin menggeliatnya perekonomian masyarakat, serta makin mudahnya masyarakat menjangkau daerah-daerah yang jauh dan sulit.

Konsekuensi hal-hal tersebut di atas adalah penyesuaian terhadap penghitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Secara umum, perubahan profil emisi Gas Rumah Kaca sering

mengalami hal-hal yang tidak bisa diprediksi akibat bencana alam. Seperti tahun 2015, dimana kebakaran hutan dan lahan berdampak meningkatnya jumlah asap di sebagian besar daerah kepulauan Sumatera, yang menandakan meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca. Begitu juga tumbuhnya industri dan jumlah penduduk, menuntut semua pihak yang berkaitan dengan penentuan emisi GRK di Sumatera Selatan harus menghitung ulang atau merevisi angka emisi Gas Rumah Kaca yang sudah ada. Sehingga penentuan kebijakan untuk menyesuaikan kebijakan dalam mitigasi ataupun adaptasi terhadap kemungkinan terjadinya perubahan iklim global.

Dalam pelaksanaan aksi mitigasi diperlukan dukungan anggaran dengan berbagai sumber, antara lain APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBN, dan Pihak Lainnya yang tidak mengikat. Berbagai sumber pendanaan tersebut, akan memudahkan untuk menempatkan alokasi anggaran setiap kegiatan yang diusulkan.

Penanggulangan bencana tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pembangunan nasional, dimana aspek pembangunan yang diselenggarakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan mengintegrasikan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Hal tersebut menggambarkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan multi sektor. Penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk menurunkan indeks risiko bencana khususnya pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi.

Dalam komitmen global untuk mewujudkan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), penanggulangan bencana menjadi salah satu bidang yang memiliki andil agar tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana dalam komitmen global difokuskan pada upaya pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Perubahan paradigma penanggulangan bencana menjadi aspek pengurangan risiko bencana, kemudian diimplementasikan dalam beberapa kegiatan sektor yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan membangun kesiapsiagaan. Namun demikian, hingga akhir tahun 2016, tercatat jumlah kejadian bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim masih terus meningkat. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana dari BNPB, terdapat 322 Kabupaten/Kota yang masih berada pada kelas risiko tinggi dan 174 Kabupaten/Kota pada kelas risiko bencana sedang. Hal ini masih menunjukkan bahwa ke depan, upaya peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana khususnya di daerah masih terus diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil *cascading* yang telah dilakukan maka isu strategis pada goal ini adalah:

1. Peningkatan kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam
2. Integrasi tindakan antisipasi Perubahan Iklim kedalam kebijakan, strategi dan perencanaan
3. Penurunan emisi gas rumah kaca

**Goal 14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan**

Pada tahun 2017, Provinsi Sumatera Selatan baru memiliki Draft awal Peraturan Daerah terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan ditargetkan pada tahun 2019 akan memiliki Perda RZWP3K. Melalui penerbitan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan ruang laut menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yang mencakup sampai 12 mil dari garis pantai.

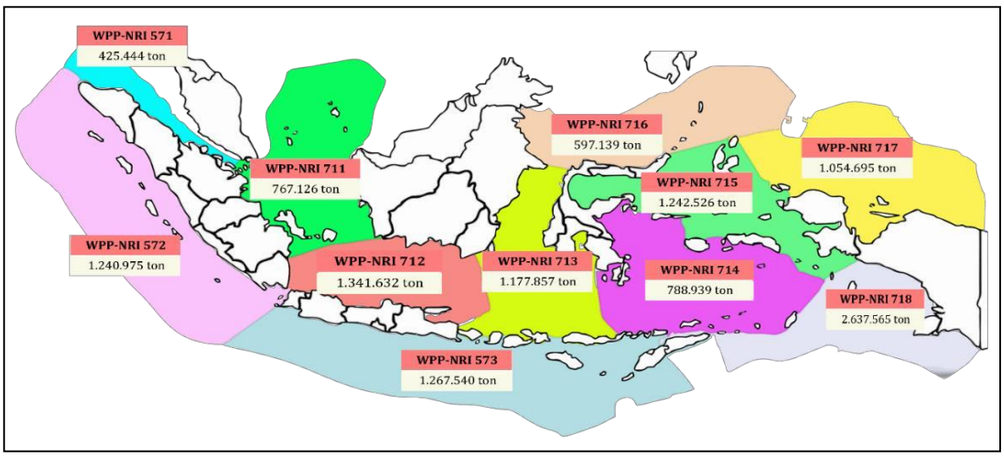
Maksud Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan RZWP3K adalah untuk mendukung pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan terintegrasi melalui: (i) peningkatan perlindungan terhadap lingkungan laut, pesisir dan pulau- pulau kecil; (ii) perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya maritim, masyarakat adat, dan nelayan tradisional; (iii) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan dan kemaritiman, serta (iv) memberi kepastian hukum untuk mendoronginvestasi.

Pengelolaan Kawasan Ekosistem Laut Berkelanjutan. Untuk mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan, Indonesia telah membagi manajemen perikanan ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/2014. Selanjutnya, Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) untuk semua WPP telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan Perikanan (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan : No. 75/2016 (WPP 571), No. 76/2016 (WPP 572), No. 77/2016 (WPP 573), No.78/2016 (WPP 711), No. 79/2016 (WPP 712), No. 80/2016 (WPP 713), No. 81/2016 (WPP 714), No.82/2016 (WPP 715), No.83/2016 (WPP 716), No.84/2016 (WPP 717), dan No. 54/2014 (WPP 718)). RPP ini selain menetapkan status perikanan, juga mengatur pelibatan pemerintah pusat dan daerah serta organisasi nonpemerintah dalam operasionalisasi RPP. Namun demikian, masih diperlukan penguatan dan pengaturan lebih lanjut terkait kelembagaan WPP, dimana saat ini organisasinya masih dalam kendali dan instruksi dari pusat. Untuk membentuk kelembagaan WPP sebagai platformkawasan pengelolaan usaha perikanan yang mandiri, diperlukan struktur dan mekanisme tata kelola yang tepat, efektif dan efisien untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang baik (good fisheriesmanagement).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah menetapkan pembagian WPP menjadi 11 WPP yaitu,

1) WPP-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
2) WPP-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
3) WPP-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat;
4) WPP-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan, di mana pada WPP ini termasuk perairan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
5) WPP-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa;
6) WPP-RI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;
7) WPP-RI 714 Meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
8) WPP-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;
9) WPP-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera;
10) WPP-RI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik;
11) WPP-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.

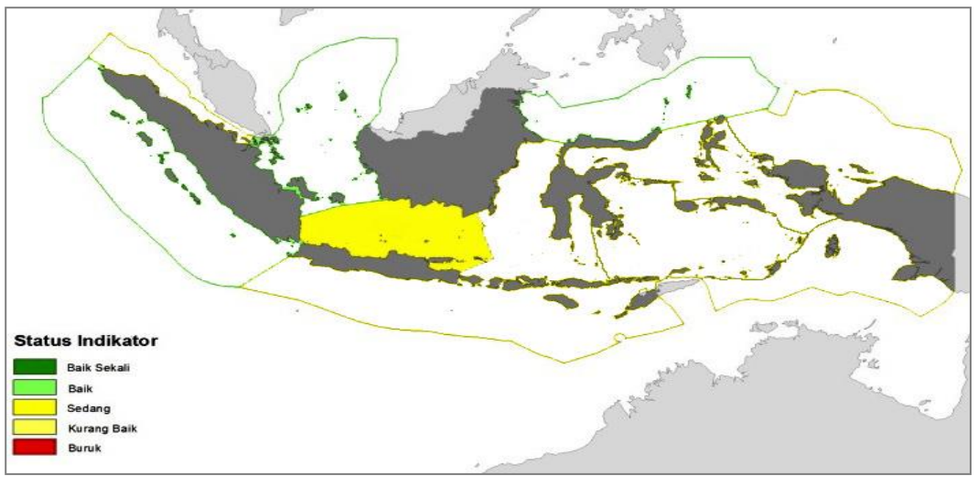
**Gambar 4.45**
Peta Potensi Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)




Wilayah Pengelolaan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan termasuk pada WPP 712. Secara umum, WPP 712 di sebelah utara berbatasan dengan Tanjung Kait di Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan. Berdasarkan analisis terhadap semua parameter, diperoleh penilaian kondisi ekosistem WPP 712 pada masing-masing indikator yaitu habitat 112.50 (buruk), sumberdaya ikan 133.33 (kurang baik), teknis penangkapan ikan 150.00 (kurang baik), sosial ekonomi 185.71 (sedang) dan kelembagaan 166.67 (sedang). Hasil

analisis komposit agregat semua indikator menunjukkan nilai 149.64, dimana kondisi ekosistemnya adalah **'KURANG BAIK'** atau warna flag kuning muda. Kemudian analisis lebih detail, dapat dilihat pada masing-masing WPP berdasarkan indikatornya.

**Gambar 4.46**
Peta Kawasan Konservasi Perairan




Peningkatan Kawasan Konservasi Perairan. Pemerintah Indonesia menargetkan untuk memiliki 20 juta hektar kawasan KKL. Selain upaya untuk meningkatkan luas KKL, juga dilakukan pengukuran kualitas pengelolaannya dengan mengembangkan alat ukur/evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebut dengan E-KKP3K. E-KKP3K telah digunakan secara rutin, termasuk untuk memberikan penghargaan kepada pengelola kawasan konservasi perairan daerah. Tata cara penetapan kawasan konservasi perairan mengacu pada Permen KP No. 2/2009. Sampai tahun 2017 Sumatera Selatan telah dicapai kawasan konservasi perairan seluas1.900 ha, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 1.940 ha. Hal ini membutuhkan upaya peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha. Banyaknya orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang taat terhadap ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan dan kelautan dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha secara keseluruhan pada tahun 2017 sebesar 20% dan diharapkan akan meningkat menjadi 50% pada tahun 2019. Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan pada tahun 2017 masih belum ada, dan ditarget tahun 2019 2%.

Dukungan dan Perlindungan Nelayan Kecil. Indonesia juga terus melakukan perlindungan terhadap nelayan kecil sebagaimana tertuang dalam UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang mengatur beberapa dukungan untuk

nelayan kecil, antara lain: (a) menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; (b) memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; (c) meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam; (d) menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; (e) menumbuh kembangkan sistem, serta kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; (f) melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan (g) memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Jumlah nelayan yang terlindungi pada tahun 2017 sebesar 10.891 orang dan target pada tahun 2019 sebesar 11.100 orang yang diberikan perlindungan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.

Berdasarkan uraian di atas dan ahsil cascading, maka isu strategis untk goal ini adalah

1. Pengelolaan dan perlindungan Ekosistem laut dan pesisir
2. Pelestarian wilayah pesisir dan laut
3. Subsidi sektor perikanan
4. Peningkatan Kapasistas Penelitian dan alih teknologi kelautan
5. Peningkatan akses Nelayan skala kecil

**Goal 15. Ekosistem Daratan**

Peningkatan kinerja tata kelola kehutanan dilaksanakan melalui pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pembentukan wilayah KPH dibagi atas Kesatuan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Hingga akhir tahun 2018, telah beroperasi 29 KPH, meliputi 5 unit KPHK, 10 unit KPHP, 14 unit KPHL. Kehadiran KPH sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan hutan di tingkat tapak, yaitu aktivitas illegal (logging, hunting, encroaching), pencurian plasma nutfah, kebakaran hutan dan lahan masih terus berlangsung di dalam kawasan hutan yang berdampak pada rusaknya ekosistem hutan. Upaya lainnya untuk peningkatan kinerja tata kelola kehutanan adalah dengan peningkatan aset kehutanan melalui upaya restorasi dan rehabilitasi untuk meningkatkan proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.

Konservasi dan Keanekaragaman Hayati. Terdapat sebanyak 25 jenis satwa prioritas yang akan ditingkatkan populasinya yang menjadi target nasional, meliputi harimau sumatera, gajah sumatera, badak, owa, elang, jalak

bali, komodo, banteng, orangutan, kakatua, bekantan, babirusa, anoa, maleo, macan tutul jawa, rusa bawean, cendrawasih, surili, tarsius, monyet hitam sulawesi, julang sumba, kasturi tengkuk-ungu, penyu, kanguru pohon dan celepuk rinjani. Beberapa satwa dari 25 jenis satwa prioritas tersebut yang ada di Provinsi Sumaterat Selatan adalah harimau sumatera, gajah sumatera, dan badak. Disebutkan pula pada dokumen Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Selatan/SeHari Sumsel Tahun 2017-2021 yang disusun oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan disebutkan bahwa keanekaragaman satwa di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 65 spesies amfibi, 71 spesies reptilia, 81 spesies mamalia (11 spesies primata; 70 spesies non-primata), 334 spesies burung/aves, dan 133 spesies arthropoda, dan biota perairan yang terdiri dari 270 spesies ikan, 75 spesies zooplankton, 66 spesies perifiton, 79 spesies zoobenthos, sedangkan untuh tumbuhan sebanyak 877 spesies. Jumlah keanekaragaman satwaliar Provinsi Sumatera Selatan dalam daftar tersebut hanya sebagian dari seluruh populasi satwaliar di Provinsi Sumatera Selatan yang sampai saat ini masih belum dapat diidentifikasi jumlahnya.

Dari keanekaragaman satwa dan tumbuhan tersebut, terdapat 17 spesies satwa dan 15 spesies tumbuhan yang dipilih sebagai satwa dan tumbuhan prioritas konservasi Sumsel, yaitu Mamalia Non Primata (Harimau, Gajah, Tapir, Pelanduk, dan Beruang madu), Burung (Enggang gading, Elang, Raja udang, Burung migran (Bangau Storm)), Primata (Siamang dan Tarsius Bangka), Reptilia (Buaya Sinyulong), Ikan dan Biota Perairan (Ikan tapah, belida, semah, sembilang, Belangkas, dan Lobster), tumbuhan (Bulian/Ulin, Cengal, Duku, Gaharu, Rambai, Ramin, Merawan, Kemenyan, Kempas, Keruing, Tembesu, Blangiran, Merbau, Ketiau, Tembalun, beberapa varietas padi lokal lahan kering dan padi lokal rawa lebak, jenis-jenis anggrek, dan jenis-jenis kantong semar).

Perlindungan satwa liar dan tumbuhan alam menjadi perhatian khusus dan sangat serius agar satwa liar dan langka tidak terancam punah karena adanya perdagangan tanaman dan satwa liar secara ilegal, pembalakan/perburuan ilegal, perambahan/ekspansi lahan pertanian, dan kebakaran hutan, kesadaran masyarakat akan nilai konservasi satwa dan tanaman masih rendah. Dalam upaya untuk meningkatkan jumlah populasi spesies tersebut dapat dilakukan dengan penangkaran spesies, pembudidayaan/penanaman kembali, dan pengembangbiakan spesies. Untuk tindakan preventif, maka perlu dilakukan patroli lebih intensif dengan melibatkan perusahaan, pemerintah dan LSM. Untuk meningkatkan kinerja patroli, perlu dipertimbangkan penambahan personil dan fasilitas untuk monitoring. Bila ditemukan kasus baru, perlu dilakukan tindakan penegakan

hukum yang tegas, sedangkan pada kasus okupasi lahan yang sudah bertahun-tahun perlu mediasi sehingga dapat dicapai kesepakatan yang terbaik.

Melestarikan dan Memanfaatkan Nilai Ekonomi Kehati. Dalam dokumen IBSAP 2015-2020 kehati (yang merupakan dokumen pemutakhiran) dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 1) keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman bentuk dan susunan bentang alam, daratan, maupun perairan dimana mahluk atau organisme hidup berinteraksi dan membentuk keterkaitan dengan lingkungan fisiknya; 2) keaneragaman jenis adalah keaneragaman jenis organisme yang menempati suatu ekosistem di darat maupun di perairan; dan 3) keanekaragaman genetika adalah keanekaragaman individu di dalam suatu jenis. Ketiga tingkat kehati tersebut saling terkait satu dengan lainnya. Tantangan saat ini adalah iklim usaha yang kondusif, serta penyusunan panduan dan standar untuk mengembangkan keekonomian keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan sangat diperlukan. Hal ini diperlukan untuk memperkuat pembangunan perekonomian dengan tetap mempertahankan kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta kemudahan akses untuk pengembangan ketersediaan informasi mengenai nilai ekonomi kehati, pemanfaatan kehati dan jasa lingkungan dan mekanisme insentifnya.

Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pilar penting dalam kegiatan penegakan hukum setelah sanksi administrasi, dan penegakan hukum perdata. Pelaksanaan penegakan hukum LHK terbagi dalam 5 (lima) tipologi, yakni: (1) pembalakan liar, (2) perambahan hutan, (3) peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal, (4) pencemaran lingkungan, dan (5) kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan uraian di atas, dan hasil *cascading* terhadap goal 15 maka isu strategis yang dimunculkan adalah:

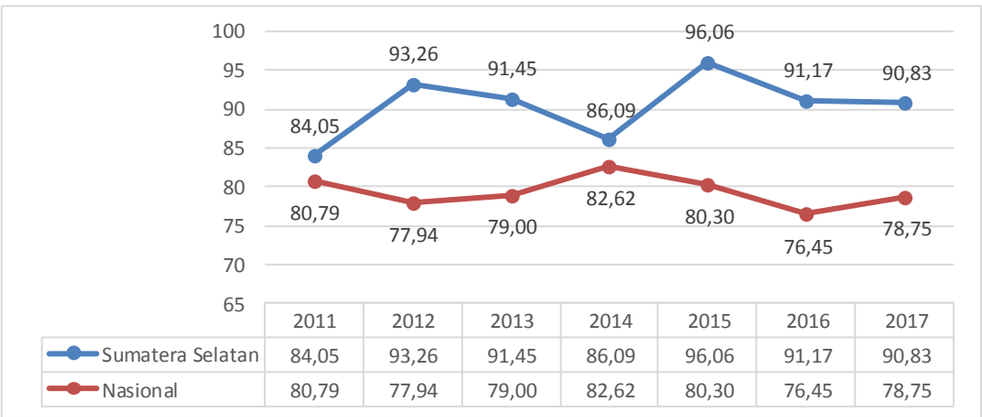
1. Mempertahankan eskosistem daratan
2. Pengelolaan semua jenis hutan berkelanjutan
3. Dunia yang bebas dari lahan yang terdegradasi
4. Pelestarian ekosistem darat yang penting bagi pembangunan berkelanjutan
5. Perlindungan dan pencegahan spesies yang terancam punah
6. Pembagian keuntungan pengelolan ekosistem darat yang adil dan merata sesuai kesepakatan internasional
7. Penguatan tindakan yang cepat mengantisipasi konservasi ilegal.

**Pilar 4 ( Tata Kelola Pelaksanaan )**

**Goal 16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh**

Indeks Kebebasan Sipil Sumatera Selatan tahun 2017 sebesar 90,83 dan masuk kategori baik. Sejak tahun 2011 hingga 2017 indeks ini selalu masuk dalam kategori baik di Sumsel, walaupun selama periode tersebut Indeks Kebebasan Sipil Sumatera Selatan cenderung fluktuatif. Jika dibandingkan dengan angka nasional, capaian Indeks Kebebasan Sipil Sumatera Selatan lebih tinggi daripada nasional.

**Gambar 4.47**
Indeks Kebebasan Sipil Sumatera Selatan dan Nasional (2011-2017)

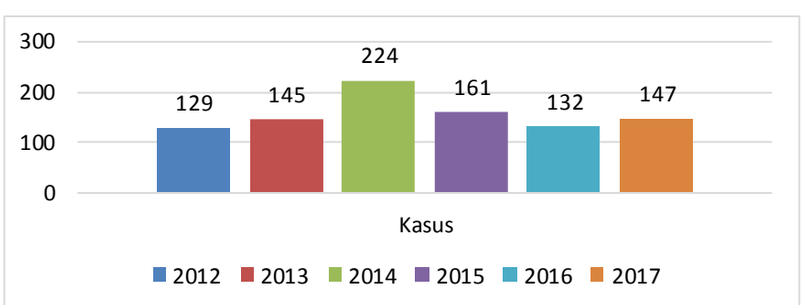



| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumatera Selatan | 84,05 | 93,26 | 91,45 | 86,09 | 96,06 | 91,17 | 90,83 |
| Nasional | 80,79 | 77,94 | 79,00 | 82,62 | 80,30 | 76,45 | 78,75 |

Sumber : Badan Pusat Statistik

Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh. Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan. Upaya pengurangan segala bentuk kekerasan dan angka kematian ditandai dengan menurunnya angka kejahatan pembunuhan pada periode tahun 2012-2017 di Sumatera Selatan, pada tahun 2014 merupakan kondisi pembunuhan paling tinggi yaitu sebanya 224 kasus, sedangkan tahun 2016 menurun menjadi 132 kasus, namun meningkat pada tahun 2017 menjadi 147 kasus (Statistik Kriminal 2018, BPS).

**Gambar 4.48**
Kejahatan terhadap Nyawa (Pembunuhan)




Sumber : Statistik Kriminal 2018, BPS

Indikator utama lainnya adalah kekerasan terhadap anak. Prevalensi kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 19% (baik perempuan maupun laki-laki) masih lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 20,48% kekerasan dialami oleh anak perempuan dan 38,62% dialami oleh anak laki-laki (DPPPA Prov Sumsel, 2018 dan SKtA, 2013). Dalam mencegah dan menurunkan kekerasan terhadap anak dan kejahatan pembunuhan, pemerintah melakukan dua strategi yaitu pembuatan kebijakan dan program pembangunan yang relevan. Strategi pembuatan kebijakan, antara lain: (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23/2002 tentang Perlindungan Anak untuk mempertegas pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak serta Peraturan Menteri Pendidikan No.82/2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan; (2) Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKtA) 2016-2020 sebagai acuan lintas sektor dalam menghapuskan kekerasan anak melalui intervensi yang menyeluruh; (3) penyediaan akses layanan kepada anak seperti menciptakan Kota Layak Anak.

Strategi program pembangunan yang relevan, antara lain: (1) Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak melalui kegiatan Fasilitasi P2TP2A, Fasilitasi Pokja Anak Berhadapan Hukum (ABH), Fasilitasi Pokja Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Fasilitasi Forum Anak, dan Fasilitasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO); dan (2) Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak melalui kegiatan Pelatihan Pelopor dan Pelapor;

Tantangan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kekerasan dan angka kematian, antara lain: (1) peningkatan kualitas layanan untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; (2) penguatan perlindungan anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi; dan (3) peningkatan koordinasi dari para pemangku kepentingan untuk melindungi anak dan perempuan. Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan berbagai program dalam rangka penegakan hukum. Sebagai negara berbasis hukum, pemerintah telah berupaya melindungi masyarakat dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi seluruh warga negara.

Akses keadilan kepada semua yang ditunjukkan dengan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-5 tahun (40% penduduk berpendapatan terendah) mencapai 88,16%. Pencapaian ini dapat dilaksanakan karena kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil baik provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Permendagri No.9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yang memfasilitasi

kemudahan dalam pencatatan akta kelahiran serta pengembangan berbagai model pendekatan untuk mengakselerasi cakupanpencatatan kelahiran. Disamping itu, pemerintah sedang menyusun strategi pencatatan sipil dan statistik hayati yang komprehensif termasuk di dalamnya terkait percepatan pencatatan kelahiran terutama bagi kelompok marginal.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan akses keadilan untuk semua masyarakat di antaranya (1) persebaran organisasi bantuan hukum (OBH) yang masih belum merata, sehingga penyediaan layanan bantuan hukum belum dapat menjangkau dengan optimal seluruh wilayah di Indonesia; (2) ketersediaan data penduduk miskin yang akurat untuk proses penargetan termasuk data registrasi dan administrasi penduduk masih kurang; (3) upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak atas keadilan melalui penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu secara yudisial masih terkendala faktor politis. Proses pemenuhan hak atas keadilan korban perlu ditingkatkan pelaksanaannya untuk membuktikan kehadiran negara dan pemerintah hadir sebagai pelindung dan penjamin hak-hak warga negara.

Membangun Kelembagaan yang Tangguh. Secara umum upaya untuk mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat digambarkan oleh capaian-capaian berikut:

1. Perilaku anti korupsi di Sumatera Selatan;
2. Hasil Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas Laporan Keuangan;
3. Mendorong dan membina keberlanjutan realisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk OPD Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan undang-undang pelayanan publik;
5. Kondisi demokrasi di Sumatera Selatan.

Dalam rangka menilai akuntabilitas lembaga pemerintahan maka Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat akuntabilitas instansi pemerintah. Pada tahun 2017, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan, hasilnya pada tahun 2017 opini WTP dicapai oleh pemerintah provinsi (100%), 16 dari 17 pemerintah kabupaten/kota (94%). Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masih mendapat predikat WDP. (IHPS Semester I BPK RI, 2018).

**Tabel 4.18**
LKPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
di Sumatera Selatan

| Entitas Pemerintah | | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Prov. Sumatera Selatan | 1 | WDP | 1 | WTP DPP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 2 | 105 | Kab. Banyuasin | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 3 | 106 | Kab. Empat Lawang | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 4 | 107 | Kab. Lahat | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 5 | 108 | Kab. Muara Enim | 1 | WTP DPP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 6 | 109 | Kab. Musi Banyuasin | 1 | WTP DPP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 7 | 110 | Kab. Musi Rawas | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 8 | 111 | Kab. Musi Rawas Utara | | | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| 9 | 112 | Kab. Ogan ILir | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 10 | 113 | Kab. Ogan Komering Ilir | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 11 | 114 | Kab. Ogan Komering Ulu | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 12 | 115 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 13 | 116 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 14 | 117 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | | | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WDP |
| 15 | 118 | Kota Lubuk Linggau | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 16 | 119 | Kota Paga Alam | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 17 | 120 | Kota Palembang | 1 | WTP DPP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 18 | 121 | Kota Prabumulih | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |

Sumber: BPK RI, 2018

Salah satu alat ukur akuntabilitas lainnya adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Persentase instansi pemerintah yang memiliki skor SAKIP minimal B mengalami peningkatan dari tahun 2017, pada tahun 2018 persentase instansi pemerintah yang memiliki skor SAKIP minimal B yaitu 100% provinsi dan 47,05% kabupaten/kota. Secara spesifik peningkatan skor SAKIP dipengaruhi antara lain: (1) keterlibatan langsung pimpinan daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja, melalui kegiatan telaah realisasi anggaran dan kinerja secara triwulanan yang semakin meningkat; (2) turunan (cascding) sasaran nasional ke dalam visi-misi organisasi sampai pada tingkatan terendah (indikator kinerja individu) telah diperbaiki; (3) penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja dan pelayanan yang mulai optimal.

Untuk mengukur transparansi lembaga pemerintah maka kepatuhan terhadap pelaksanaan undang-undang pelayanan publik menjadi acuan. Berdasarkan penilaian Ombudsman RI pada tahun 2017,terdapat 2 (dua) kota yang masuk zona hijau yaitu: Kota Lubuklinggau (86,81), dan Kota Palembang (81,06). Kota Prabumulih (51,76), dan Kabupaten Lahat (60,55) masuk pada zona kuning serta Kabupaten Ogan Komering Ulu (17,15) masuk pada zona merah. Namun, masih diperlukan upaya yang optimal untuk mencegah potensi mal administrasi dan perilaku koruptif, termasuk konsistensi peraturan yang relevan. Selain itu, belum terpenuhinya hak pengguna berkebutuhan khusus, belum terpublikasikannya tata cara dan mekanisme pengaduan, serta belum adanya sarana pengukuran kepuasan pelanggaran.

Di bidang politik, kondisi demokrasi Sumatera Selatan diukur dengan menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang terdiri dari tiga aspek yaitu Indeks Lembaga Demokrasi, Indeks Kebebasan Sipil, dan Indeks Hak-hak Politik. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 sebesar 74,04, kondisi tersebut menunjukkan tingkat demokrasi Sumatera Selatan dalam kategori “sedang”. IDI dirancang untuk memotret kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia berdasarkan realitas yang terjadi (*evidence based*). IDI perlu terus dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan perencanaan pembangunan politik di daerah. Salah satu upaya peningkatan IDI adalah memperkuat kelompok kerja IDI di daerah.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil *cascading* yang telah dilakukan, maka isu strategis pada goal ini adalah,

1. Pengurangan tindak kekerasan dan angka kematian
2. Penghentian kekerasan terhadap anak
3. Peningkatan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan
4. Peningkatan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif
5. Pencapaian peningkatan Identitas yang sah bagi penduduk
6. Perkuatan lembaga nasional.

**Isu Strategis**

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal, isu strategis daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam lima tahun (2019-2023) mendatang adalah sebagai berikut:

**1) Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan**

Proporsi penduduk miskin di Sumatera Selatan masih tergolong cukup tinggi, bergerak fluktuatif serta capainnya tidak pernah lebih baik dari capaian nasional. Bahkan di tahun 2013 dan 2015 Proporsi penduduk

miskin sempat mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Berdasarkan Analisis basis data terpadu (BDT By Name By Address) yang dirilis TNP2K, tergambar pola permasalahan kemiskinan yang sama hampir di 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Dari empat dimensi kemiskinan yaitu Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Infrastruktur Dasar didapati bahwa permasalahan infrastruktur dasar dan Ketenagakerjaan-lah yang banyak mempengaruhi penduduk miskin di Sumatera Selatan. Masih banyak penduduk miskin di Sumatera Selatan belum memiliki akses terhadap layanan infrastruktur dasar seperti akses sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak. Selain itu, banyak pula penduduk miskin yang tidak memiliki mata pencaharian dan perkerjaan yang layak bahkan tidak berkerja sama sekali.

Selain itu, penyebab sulitnya penduduk keluar dari kemiskinan akibat rendahnya daya beli penduduk miskin yang ditunjukkan dengan relatif tingginya rata-rata kenaikan Garis Kemiskinan (harga kebutuhan dasar penduduk miskin) dibandingkan peningkatan produktivitas per kapita. Artinya inflasi Garis Kemiskinan (GK) tidak diiringi peningkatan pendapatan/produktivitas penduduk miskin secara nyata. Hal itu antara lain disebabkan anjloknya harga komoditas karet yang merupakan sumber utama pendapatan penduduk miskin (mono culture). Penyumbang GK tertinggi adalah beras, inflasi beras dan komoditas lainnya yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan akan mendorong penduduk miskin tidak bisa keluar dari kemikinan, oleh karena bantuan yang tepat sasaran seperti RASTRA atau sejenisnya serta pendistribusian yang tepat waktu merupakan salah satu solusi untuk meningkan daya beli penduduk miskin. Tantangan yang harus dihadapi dalam 5 tahun kedepan adalah Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan untuk mencapai kemiskinan 1 (satu) digit.

**2) Pengembangan Sumber Daya Manusia**

**a). Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang paling penting. Keberhasilan bidang pendidikan akan memepengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sebagai salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Persentase rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Selatan menurut kabupaten dan kota berkisar antara 6 sampai 10 tahun artinya rata-rata penduduk berusia 15 tahun keatas menamatkan pendidikannya dalam jangka waktu maksimal 10

tahun. Pada tahun 2013 penduduk berusia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan yang paling singkat terdapat pada Kabupaten Musi Rawas yaitu 7,13 tahun untuk penduduk laki -laki dan 6,68 tahun untuk penduduk perempuan.

**b). Kesehatan**

Perkembangan kondisi kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan cenderung membaik yang ditunjukkan dengan beberapa indikator kesehatan. Angka harapan hidup merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya dari sisi kesehatan. Beberapa kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki angka harapan hidup dibawah rata-rata Provinsi yakni 70,10 tahun masih di bawah Nasional 70,98 tahun.

**Persentase Balita Gizi Buruk**

Persentase angka gizi buruk di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Persentase angka gizi buruk di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 0,018 persen dari tahun 2014 yaitu 0,02 persen. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 1,9 persen di tahun 2016 akan tetapi mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 menjadi 0,032 persen. Penurunan persentase ballita gizi buruk menunjukkan tingkat kesehatan yang semakin membaik yang di dukung dengan ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan dalam mengatasi kasus balita gizi buruk.

**Rasio Puskesmas dan Penduduk**

Rasio jumlah sarana kesehatan puskesmas terhadap jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 25.541 yang artinya satu puskesmas melayani 25.541 jiwa penduduk. Pada tahun 2014 rasionya adalah 25.952 yang artinya tiap puskesmas dapat melayani 25.952 jiwa penduduk. Pada tahun 2017 rasio menurun menjadi 24.243. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah puskesmas yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sudah mencukupi dengan standar rasio adalah 1:30.000 penduduk. Selain kuantitas, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kualitas dari setiap puskesmas yang ada baik dari sisi kelayakan gedung puskesmas dan peningkatan fasilitas serta sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia pada setiap puskesmas.

**Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan**

Telah terjadi penurunan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Provinsi Sumatera Selatan

dimana pada tahun 2013 sebesar 92,94% namun meningkat di tahun 2017 menjadi 93,11%.

**Jumlah Kasus HIV dan AIDS**

Jumlah kasus penderita HIV di Provinsi Sumatera Selatan secara umum mengalami penurunan dari tahun 2012-2017. Pada tahun 2012 jumlah kasus HIV sebanyak 147 kasus dan menurun menjadi 106 kasus pada tahun 2014. Pada tahun 2017 jumlah penderita HIV meningkat menjadi 157 kasus. Penurunan jumlah kasus HIV di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan perbaikan kesehatan penduduk namun untuk kasus AIDS justru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 jumlah kasus AIDS sebanyak 215 orang dan meningkat menjadi 189 orang di tahun 2017.

**Jumlah Kasus DBD**

Kasus DBD (Demam Berdarah *Dengue*) di Provinsi Sumatera Selatan. Kasus DBD dari tahun ke tahun terjadi fluktuatif. Pada tahun 2012 jumlah kasus penyakit DBD sebanyak 3.243 kasus dan menurun menjadi 1.450 kasus di tahun 2013, namun terjadinya peningkatan yang drastis dari tahun 2014 ke tahun 2015 menjadi 3.232 kasus dan 3.792 kasus di tahun 2016 dan tahun 2017 menurun menjadi 1.438 kasus. Peningkatan kasus DBD di tahun 2016 perlu mendapat perhatian dari pemerintah terkait sarana dan prasarana kesehatan mencakup ketersediaan air bersih dan sanitasi layak sebagai upaya pencegahan penyakit DBD.

Permasalahan lain adalah belum optimalnya penyelenggaraan program dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembiayaan Jamkesmas dan Jamkesda. Masih terdapat kelompok-kelompok tertentu yang memerlukan akses layanan kesehatan namun belum tersentuh seluruhnya seperti anak-anak berkebutuhan khusus, perempuan bekerja dengan resiko tinggi untuk kesehatan reproduksinya, disabel dan lansia. Di sisi lain pelaksanaan Jamkesda yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi permasalahan terkait dengan tunggakan maupun penatakelolaan program jaminan layanan kesehatan secara umum.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga masih belum optimal pelaksanaannya sehingga masih diperlukan upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar mampu dan mau melakukan PHBS untuk mencegah risiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat.

Sarana pelayanan kesehatan di Sumatera Selatan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masih belum proporsional, sehingga masih diperlukan optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

Terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat, permasalahan yang dihadapi adalah masih dominannya pelayanan kuratif yang mengandalkan industri obat dan belum optimalnya pengembangan kearifan lokal melalui pengembangan obat-obatan herbal atau jamu tradisional.

**c). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Belum optimalnya kondisi pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, dilihat dengan pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Untuk pencapaian IPG Sumsel Tahun 2018 tergolong baik sebesar 92,62 diatas nilai capaian nasional sebesar 90,99 dan berada para peringkat sepuluh namun kondisi capaian beberapa komponen masih terdapat kesenjangan yang besar antara capaian laki-laki dan perempuan, khususnya pada komponen Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita

Pencapaian komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumsel, dalam kurun waktu lima tahun terakhir baru pada tahun terakhir yaitu 2017 sebesar 73,53 berada diatas nasional 71,74 dan berada pada peringkat keenam. Kondisi capaian ketiga komponen IDG yaitu Keterwakilan Perempuan di Parlemen terakhir sebesar 20,27 masih jauh dari kuota affirmatif yang diharapkan yaitu 30%. Ini pun meningkat dari Hasil Pemilu 2014 sebesar 17,33% karena adanya Pergantian antar Waktu (PAW). Persentase Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi dan Teknisi tahun 2017 sebesar 49,25 menurun dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya. Sumbangan pendapatan perempuan baru sebesar 34,70. Masih adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pada berbagai sektor pembangunan mengakibatkan perempuan belum bisa berperan secara optimal.

Pada Pemenuhan Hak Anak dilakukan dengan mendorong terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil evaluasi Penilaian KLA sampai Tahun 2018 baru dua kabupaten dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang masuk kategori Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu: Kabupaten Muba dengan Predikat Madya dan Kabupaten PALI dengan Predikat Pratama.

**3) Pengurangan Pengangguran dan Antisipasi Bonus Demografi**

**a). Pengangguran**

Jumlah angkatan kerja di Sumatera Selatan pada 2018 mencapai 4.139.000 orang atau meningkat 473.956 orang dibanding angkatan kerja tahun 2010 sebanyak 3.665.044 orang. Pada tahun 2013 jumlah angkatan kerja mengalami penurunan menjadi 3.646.996 padahal jumlah penduduk usia kerja meningkat, pada tahun selanjutnya terus meningkat sampai sekarang. Rata-rata penambahan sebesar 59.245 orang setiap tahun dengan pertumbuhan 1,58%. Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Sumatera Selatan pada 2010 mencapai 5.218.600 orang dalam kurun waktu delapan tahun meningkat sebesar 807.300 orang sehingga mencapai 6.025.900 pada tahun 2018. Kecederungannya terus meningkat dengan pertumbuhan 1,82%. Sementara, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 68,69. dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,23%.

Struktur lapangan pekerjaan di Provinsi Sumatera Selatan tidak mengalami perubahan. Sektor pertanian, perdagangan, dan sektor Industri Pengolahan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Pada Agustus 2018 sekitar 46,53% penduduk Sumatera Selatan di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Sementara penduduk yang bekerja di sektor perdagangan sebesar 15,80%, serta penduduk yang bekerja di Industri Pengolahan mencapai 7,79%. Kecenderungannya proporsi tenega kerja di sector pertanian terus menurun meskipun lambat, sedangkan sektor perdagangan dan Industri Pengolahan cendering meingkat. Selain itu, sekitar 2.43 juta orang atau 61.24% pekerja di Provinsi Sumatera Selatan bekerja di sektor informal.

Tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Selatan pada Agustus 2018 mencapai 4,23 persen. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan khususnya di Kota Palembang, Kota Prabumulih dan Kota Lubuk Linggau jauh lebih tinggi dibanding tingkat pengangguran di perdesaan. Hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan alamiah penduduk, arus masuk angkatan kerja dari daerah pedesaan, dan banyaknya pencari kerja pertama kali sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendidikan penduduk di perkotaan. Sementara itu, kesempatan kerja sektor-sektor produktif di perkotaan yang tersedia tidak mampu menampung para pencari kerja. Di sisi lain, tingkat pendidikan penduduk di perdesaan umumnya relatif masih rendah sehingga angkatan kerja yang ada tidak mempunyai banyak tuntutan terhadap jenis pekerjaan yang diinginkan dan mau menerima pekerjaan di sektor tradisional.

Penyebab utama pengangguran adalah terbatasnya lapangan kerja, tidak sebandingnya jumlah tenaga kerja tidak dengan kesempatan kerja dan tidak sesuainya pendidikan tenaga kerja dengan pasar kerja. Permasalahan lain terkait pengangguran yang perlu mendapat perhatian adalah masih banyaknya penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau lebih dikenal dengan istilah setengah penganggur. Dalam lima tahun mendatang, permasalahan dan tantangan bidang ketenagakerjaan yang harus diatasi adalah: (1) terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang baik yang dicerminkan oleh pengangguran lulusan SMA ke atas yang relatif tinggi, (2) tingginya persentase pekerja di sektor informal, (3) adanya kesenjangan upah diantara kelompok pekerja, (4) rendahnya kualitas tenaga kerja, (5) berkembangnya teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia.

**b). Bonus Demografi**

Indonesia diperkirakan akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2020-2030. Bonus demografi adalah jumlah usia angkatan kerja 15-64 tahun mencapai 70 persen. Sedangkan 30 persen penduduknya adalah berusia tidak produktif yaitu usia 14 tahun ke bawah dan di atas 65 tahun. Dengan kata lain Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedangkan yang berusia tidak produktif sekitar 80 juta orang, atau dari 10 orang usia produktif hanya menanggung 3-4 orang usia tidak produktif. Artinya dalam kurun waktu 3-13 tahun ke depan Indonesia akan memiliki SDM yang tengah pada puncak usia produktif, sehingga akan terjadi peningkatan tabungan masyarakat dan tabungan nasional.

Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 sebanyak 8.217.551 jiwa yang terdiri dari 4.183.264 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 4.034.287 jiwa penduduk perempuan. Jika dibanding pada tahun 2013 dimana jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 7.975.145 jiwa maka laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2013-2018 adalah 3,04 persen. Secara umum jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal itu bisa dilihat dari jumlah penduduk di tahun 2014 sebesar 8.049.797 jiwa mengalami pertambahan jumlah menjadi 8.090.956 jiwa di tahun 2015, tahun 2016 menjadi sebesar 8.146.207 jiwa, tahun 2017 menjadi sebesar 8.152.528 jiwa dan di tahun 2018 menjadi sebesar 8.217.551 jiwa.

Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan Provinsi Sumatera Selatan menghadapi masalah kependudukan yang sangat serius terutama dalam penyediaan pelayanan dasar, perumahan,

pemukiman, penyedian prasarana dan penyediaan lapangan pekerjaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah pengendalian pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk secara berkesinambungan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan. Pengendalian pertumbuhan penduduk dimaksud mengindikasikan meningkatnya kembali angka kelahiran, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah salah satunya adalah dengan menggalakkan program KB.

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan jumlah penduduk usia kerja. Jumlah penduduk angkatan kerja pada tahun 2013 di Sumatera Selatan adalah 3.646.996 jiwa yang terdiri dari 2.289.673 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 1.357.323 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah angkatan kerja bertambah menjadi 4.139.000 jiwa. Laju pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013-2018 adalah 13,49 persen.

Oleh karena itu pemerintah harus bekerja lebih focus untuk menyambut bonus demografi tersebut dengan menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan pelayanan umum lainya. Jika pemerintah tidak memanfaatkan SDM tersebut dengan baik akan terjadi banyak masalah yang menjadi beban negara seperti pengangguran dan pesebaran penduduk yang tidak merata. Semua hal tersebut bisa teratasi jika pemerintah dapat menggunakan bonus demografi ini dengan baik dan terencana dari sekarang.

**4) Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan**

**Peningkatan Investasi**

Investasi sangat penting sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan terutama untuk sector-sektor unggulan yang berkontribusi cukup besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan nilai investasi tersebut maka tantangan bagi pemerintah daerah untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya saing daerahnya. Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2014 – 2018 telah berhasil meningkatkan nilai investasinya ( PMA dan PMDN) dengan rata-rata pertumbuhan investasi mencapai 22,76% atau rata-rata realisasi investasi PMA dan PMDN pertahun mencapai Rp 26,86 Trilyun. Rata – rata pertumbuhan masih didominasi oleh investasi PMA dengan capaian

63,06%, sedangkan capaian rata – rata pertumbuhan realisasi investasi PMDN masih cukup rendah dengan capaian 6,07%.

Minat investor PMDN dan PMA untuk berinvestasi di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun ke tahun fluktuatif tetapi cenderung meningkat dengan rata – rata pertumbuhan jumlah investor selama lima tahun terakhir sebesar 33,43 % atau 209 investor per tahun. Adapun Jumlah rata – rata pertumbuhan investor PMDN mencapai angka 53,91%, sangat tinggi dari rata-rata pertumbuhan jumlah investor PMA sebesar 16,74%. Masih rendahnya rata rata pertumbuhan investasi PMDN dan bagaimana meningkatkan minat investor PMA, menjadi tantangan untuk membangun iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing selama lima tahun ke depan bagi provinsi Sumatera Selatan. Beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan, Pengembangan strategi Promosi Investasi dan penanaman modal, penguatan regulasi dan kelembagaanl serta peningkatan daya saing potensi dan peluang investasi sektor unggulan daerah. Mendorong peningkatan nilai investasi dengan Peningkatan kualitas pelayanan perizinan perlu dilaksanakan melalui kelembagaan yang ramah dunia usaha,salah satu indikatornya adalah kemudahan dalam proses pelayanan perizinan. Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan kabupaten/Kota telah memiliki Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang bertujuan meningkatlkkan efisiensi proses perizinan, baik dalam hal prosedur maupun waktu yang dibutuhkan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang berjalannya Kantor PTSP sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 perlu diupayakan untuk mendukung peningkatan investasi dan pelayanan perizinan, selain itu perlu juga dukungan penyediaan sarana Mall Pelayanan Publik dan Sarana Konsultasi Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal ( LKPM). Keberadaan Sistem aplikasi online seperti One Single Submission (OSS) dan Si cantik merupakan upaya peningkatan pelayanan perizinan berbasis IT, tetapi hal tersebut masih menjadi kendala karena belum terintegrasinya antar system tersebut sehingga memerlukan pengembangan system aplikasi pelayanan online yang terintegrasi secara optimal.

Beberapa tantangan lainnya yang perlu kita atasi dalam lima tahun selanjutnya adalah perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sector dalam mendorong berkembangnya perwilayahan industry seperti KEK Tj. Api-api dan Kawasan Industri sebagai Kawasan Pusat Promosi potensi dan peluang investasi daerah yang diharapkan

mampu menarik minat investor PMDN dan PMA untuk menanamkan investasinya di Provinsi Sumatera Selatan.

**Ekonomi Kerakyatan**

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat.Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

**5) Perbaikan Konektivitas dan Infrastruktur Dasar**

Visi dari konektivitas nasional adalah terintegrasi secara lokal, terhubugan secara global (lacally integrated, globally connected). Simpul transportasi (pelabuhan, terminal, stasiun, depo pusat distribusi, kawasan pergudangan serta bandar udara) dapat saling terintegrasi secara efektif dan efisien. Pemerataan pembangunan berbagai proyek infrastruktur fisik (physical connectivity) khususnya konektivitas antar wilayah. Infrastruktur sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Buruknya infrastruktur mengakibatkan dayasaing bangasa menjadi rendah karena infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas antar sector dan wilayah, memperlancar arus pergerakan manusia, barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat.

Ketimpangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan masih relative tinggi. Hal ini disebabkan oleh konektivitas yang masih belum baik karena sarana dan prasarana perhubungan yang masih rendah. Selain itu tranportasi darat dan air yang sangat minim dan frelunsinya yang jarang, sehingga hubungan antar wilayah relative belum memadai. Dampak dari konektivitas antar wilayah yang kurang baik menyebabkan arus barang dan jasa menjadi tersendat. Akibantya tidak terjadi kegiatan yang saling melengkapi antar wilayah. Dengan demikin kegiatan ekonomi menjadi tidak optimal karena tidak ditopang oleh derah lain disekitar.

Dengan dibangunnya konektivitas akan memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan dengan mengubugkan pusat-pusat pertumbuhan. Memperluas wilayah pertumbuhan melalui konektivitas wilayah inter-moda supply chain system yang menghubungkan

hinterland dan yang tertinggal dengan pusat pertumbuhan. Selain itu dapat mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar, mendapat manfaat pembangunan.

Pelaksanaan konektivitas dapat dilakukan secara berjenjang yaitu desa ke kecamatan, ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten/kota, ibukota kabupaten/kota ke ibukota provinsi (Palembang). Konektivitas Palembang dengan sub pusat regional misalnya Prabumulih, Baturaja, Lubuklinggau dan Pagaralam. Konektivitas antara Palembang dengan pusat pertumbuhan nasional dan regianal Sumatera. Konektivitas antara Palembang dengan luar negeri melalui pelabuhan laut dan bandar udara.

Selain itu permasalahan yang masih cukup serius dan perlu penanganan yang baik adalah infrastruktur dasar, berupa pengadaan air bersih dan sanitasi rumahtangga. Sumatera Selatan masih jauh tertinggal dari rata-rata nasional dalam pemenuhan sanitasi dan air bersih. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih keras lagi secara konsisten selama lima tahun ke depan.

**6) Optimalisasi Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah suatu proses transformasi mindset dan culture set yang terarah pada tatanan birokrasi yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Dan hal tersebut sesungguhnya membutuhkan proses yang panjang mengingat reformasi birokrasi hendaknya dapat dilakukan secara bertahap dan sistematis.dan Reformasi Birokrasi ini harus di Optimalkan agar tujuan tujuan tersebut dapat tercapai,khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Optimalisasi Birokrasi di Sumatera Selatan telah berjalan dengan baik, Pemerintah Sumatera Selatan telah berkomitmen akan membuat Pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan menjadi pemerintahan yang efisien,bersih dan transparan. Dengan Optimalisasi Reformasi Birokrasi ini diharapkan bisa membuat pemerintahan di Sumatera Selatan menjadi pemerintahan yang berkarakter, bersih dari KKN, meningkat kualitas pelayanan publik, dan meningkat kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

**7) Pelestarian Ekosistem dan Peningkatan Kualitas Lingkungan**

Jumlah kejadian bencana alam dan non alam atau dikarenakan ulah perbuatan manusia di Sumatera Selatan pada kurun tahun 2013 sampai tahun 2017 berjumlah 879 kejadian. Kejadian bencana terbagi atas bencana banjir, kebakaran, tanah longsor, angin puting beliung dan gempa bumi dengan rumah terdampak bencana berjumlah 4.568 unit.

Sumatera Selatan memiliki lahan rawa seluas 17,11% dari luas wilayah yang di dalamnya sebagian terdapat lahan gambut. Dimana lahan gambut tersebut hampir setiap tahun terbakar dan puncaknya pada tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan rusaknya ekosistem dan menurunnya kualitas lingkungan. Lingkungan yang rusak dapat mengakibatkan terganggunya hidrologi dan ketersediaan air. Selain untuk kebutuhan rumahtangga, air digunakan juga untuk kebutuhan lahan pertanian. Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas lingkungan dan ekosistem menjadi hal yang penting karena dampak yang diakibatkan sangatlah besar dan luas.

Tercacat 403 kejadian bencana kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari Tahun 2012 hingga Tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa potensi bencana kebakaran sangat tinggi terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Sehingga diperlukan penanganan dan upaya antisipasi kebakaran di daerah rawan kebakaran Pada Peta Rawan Bencana Kebakaran hutan dan lahan Tahun 2015, terlihat bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir berada pada status sangat rawan, disusul oleh Kabupaten Banyuasin serta Musi Banyuasin, yang berada pada status Rawan Tinggi.

Dampak dari kebakaran dapat mengakibatkan banjir pada musim penghujan karena vegetasi yang fungsinya menyerap air dan menahan tanah telah berkurang/habis karena terbakar dan ilegal logging. Bencana banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Selama kurun waktu dari tahun 2012 hingga Tahun 2017 tercatat 144 kejadian banjir di Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu penyebab banjir adalah semakin berkurangnya kawasan hutan lindung di daerah hulu dan merupakan penyebab yang paling dominan di wilayah ini.

Selain itu kualitas lingkungan pemukiman yang kurang baik sering kita dapati. Penduduk Sumatera Selatan pada tahun 2017 yang luas yang lebih kecil dari 10$m^2$ per kapita sebanyak 28,19%. Hal ini menunjukkan lingkungan pemukiman yang kumuh dan sitem sanitasi yang kurang baik.

**8) Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Nilai Tukar Petani**

Produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran (output) dengan masukan (input). Produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumberdaya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Produktivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu usaha.Semakin tinggi perbandingannya berarti semakin tinggi produk yang dihasilkan.

Pertanian berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dengan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertanian bukan hanya sekedar menanam dan memanen, namun lebih luas berkaitan dengan filosofi sebuah bangsa, pertimbangan, humanitarian, kebudayaan, spritiual, interaksi dengan alam, lingkungan biotik dan abiotik, memahami kearifan lokal dan ekologis serta persahabatan dengan segenap unsur kemanusiaan.

Salah satu bentuk tanaman hasil Pertanian lokal adalah Padi. Produktivitas padi bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun, contohnya pada Tahun 2017, Produktivitas Padi mengalami penurunan menjadi 49,43 Ku/Ha dari 50,03 Ku/Ha di tahun 2016. Rendahnya intensitas pertanaman dan berkurangnya ketersediaan lahan sebagai akibat meningkatnya alih fungsi lahan mengakibatkan berkurangnya luas tanam tanaman pangan.

Salah satu bentuk tanaman hasil Pertanian lokal adalah Padi. Produktivitas padi bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun, contohnya pada Tahun 2017, Produktivitas Padi mengalami penurunan menjadi 49,43 Ku/Ha dari 50,03 Ku/Ha di tahun 2016. Rendahnya intensitas pertanaman dan berkurangnya ketersediaan lahan sebagai akibat meningkatnya alih fungsi lahan mengakibatkan berkurangnya luas tanam tanaman pangan.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan petani. NTP Sumsel tahun 2013 dan 2014 berada di atas angka dasar NTP yaitu 100 jika biaya produksi yang dikeluarkan petani untuk usaha taninya cenderung sama besar dengan penerimaan yang didapatnya (impas). Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 NTP Sumatera Selatan mengalami penurunan masing-masing menjadi 96,87 dan 95,05. Secara umum menunjukkan bahwa daya beli petani pada bulan Desember 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun dasar 2013 yang disebabkan karena adanya kenaikan indeks harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar petani secara umum.

Angka NTP pada tahun 2016 yaitu sebesar 94,58, angka NTP yang kurang dari 100 menunjukkan bahwa petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan kenaikan harga barang yang dikonsumsi oleh petani. Pada kondisi ini pendapatan petani mengalami penurunan dan cenderung lebih kecil sementara tingkat pengeluaran petani semakin tinggi.

**9) Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan**

Terjadi peningkatan setiap tahun untuk rumah tangga yang teraliri listrik di Sumatera Selatan yaitu sebesar 94,58 persen pada tahun 2013 meningkat menjadi 98,30 persen pada tahun 2017.

Masih ada beberapa desa yang belum dijangkau listrik disebabkan karena kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk aliran listrik PLN, untuk itu diperlukan upaya-upaya pengembangan energi baru terbarukan di lokasi-lokasi tersebut sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

**10) Pengembangan Sosial Budaya dan Olahraga**

Memberdayakan pusat-pusat kegiatan seni dan budaya di Provinsi Sumatera Selatan agar tetap lestari dan terjaga terutama kesenian tradisional yang menjadi ciri khas Sumatera Selatan. Kemudian menggalakkan festival seni dan budaya yang berskala nasional dan internasional serta mengembangkan manajemen olahraga dalam menggabungkan kegiatan promosi, ekonomi dan prestasi olah raga yang bermutu.

# BAB V

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

## 5.1 Visi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013-2018; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2018-2023; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah:

***SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA***

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2019-2023 sebagai berikut:

***Sumsel maju untuk Semua*** adalah keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.

***Sumsel Maju untuk Semua*** adalah kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal, di samping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.

***Sumsel Maju untuk Semua*** adalah kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

***Sumsel Maju untuk Semua*** adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargaai perbedaan, dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan.

## 5.2. Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, yaitu :

**Misi 1 :** Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

**Misi 2 :** Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.

**Misi 3 :** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

**Misi 4 :** Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

**Misi 5 :** Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

## 5.3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, dan memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mendukung Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

**Misi 1: "Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan".**

Tujuan 1 : Meningkatnya perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan (Maju Ekonomi Kerakyatan)
2. Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan)

3. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan (Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan)
4. Menurunnya Pengangguran dan Kemiskinan (Maju Kesejahteraan Masyarakat)
5. Meningkatnya Akses Energi (Maju Akses Energi)

**Misi 2: "Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas".**

Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran :

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Maju Kesehatan Masyarakat)
2. Meningkatnya Akses Pendidikan Berkualitas (Maju Akses Pendidikan Berkualitas)

Tujuan 3 : Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender

Sasaran :

Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak (Maju Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan Anak)

**Misi 3: "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif".**

Tujuan 4 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas)
2. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel)
3. Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah (Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas)

**Misi 4: "Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah".**

Tujuan 5 : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (Maju Kualitas Lingkungan Hidup)
2. Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas (Maju Infrastruktur dan Konektivitas)

**Misi 5: "Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius".**

Tujuan 6 : Terwujudnya Masyarakat Madani

Sasaran :

Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)

Tujuan 7 : Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah melalui Seni, Budaya, dan Religi

Sasaran :

Meningkatnya Seni, Budaya, dan Pariwisata (Maju Seni, Budaya, dan Pariwisata)

Tujuan 8 : Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga

Sasaran :

Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga (Maju Pemuda dan Olahraga)

Adapun indikator dari tujuan dan sasaran di atas beserta target yang hendak dicapai selama tahun 2019-2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.1**

Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

Visi : SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | | Target Capaian Indikator Sasaran Sampai Tahun 2023 | | | | | Kondisi akhir | PD Penanggung Jawab | PD Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| **MISI I :** Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan. | 1 Meningkatnya perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah | 1. Indeks Ekonomi Inklusif | | | Indeks | 5.41 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | | |
| | | 2. Nilai Sistem Inovasi Daerah (SIDa) | | | Nilai | 4.0 | 2.93 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | |
| | | | 1.1 Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan (Maju Ekonomi Kerakyatan) | 1. Pertumbuhan Ekonomi | % | 5.51 | 6.04 | 5,6-5,9 | 5,5-6,0 | 5,5-6,1 | 5,5-6,1 | 5,5-6,1 | 5,5-6,1 | | |
| | | | | 2. Pengeluaran Per Kapita | Rp. Ribu | 10,220 | n.a | 10,552 | 11,268 | 11,831 | 12,422 | 13,044 | 13,044 | | |
| | | | | 3. PDRB per Kapita (ADHB) | Rp. Ribu | 46,421 | 49,209 | 50,490 | 54,199 | 57,077 | 59,087 | 62,067 | 62,067 | | |
| | | | | 4. Rasio Gini | Rasio | 0.365 | 0.341 | 0.355 | 0.354 | 0.353 | 0.352 | 0.350 | 0.350 | | |
| | | | | 5. Inflasi | % | 2.96 | 2,74 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | | |
| | | | | 6. Jumlah Kenaikan Wirausaha Baru | UKM | 1,258 | 463 | 240 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4,761 | Dinas Koperasi dan UMKM | Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian |
| | | | 1.2 Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan) | 1. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan | % | 6.55 | 5.51 | 5.60 | 5.65 | 5.72 | 5.83 | 5.91 | 5.91 | Dinas Perindustrian | |
| | | | | 2. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran | % | 7.69 | 8.09 | 9,4 – 9,6 | 9,6 – 9,8 | 9,8 - 10 | 10 – 10,2 | 10,2-10,4 | 10,2 – 10,4 | Dinas Perdagangan | Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dishub, PU BM TR |
| | | | | 3. Realisasi PMA | Rp. Triliun | 16.03 | 15.613 | 16.71 | 17.88 | 19.13 | 20.47 | 21.90 | 21.90 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | Biro Hukum |
| | | | | 4. Realisasi PMDN | Rp. Triliun | 9.76 | 7.465 | 7.99 | 8.55 | 9.14 | 9.79 | 10.47 | 10.47 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | Biro Hukum |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | | Target Capaian Indikator Sasaran Sampai Tahun 2023 | | | | | Kondisi akhir | PD Penanggung Jawab | PD Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| | | | | 5. Neraca Perdagangan | US$ juta | 2,876 | 2,880 | 2,894 | 2,909 | 2,923 | 2,938 | 2,953 | 2,953 | Dinas Perdagangan | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| | | | 1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan (Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan) | 1. Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian | % | 1.77 | 2.16 | 4.27 | 4.77 | 5.27 | 5.77 | 6.27 | 6.27 | Dinas Pertanian TPH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | | | | 2. Nilai Tukar Petani (NTP) | % | 95.05 | 93.62 | 95.55 | 96.05 | 98.70 | 99.20 | 100.10 | 100.10 | Dinas Pertanian TPH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan | BPS, Dinas PSDA, Dishub, PU BM TR |
| | | | | 3. Nilai Tukar Nelayan (NTN) | % | 101.50 | 102.00 | 102.30 | 102.50 | 102.80 | 103.00 | 103.30 | 103.30 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Dishub, PU BM TR |
| | | | | 4. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) | % | 98.96 | 99.46 | 99.96 | 100.46 | 100.96 | 101.46 | 101.96 | 101.96 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Dinas Pertanian TPH |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | | Target Capaian Indikator Sasaran Sampai Tahun 2023 | | | | | Kondisi akhir | PD Penanggung Jawab | PD Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| | | | 1.4 Menurunnya Pengangguran dan Kemiskinan (Maju Kesejahteraan Masyarakat) | 1. Angka Kemiskinan | % | 13.10 | 12.82 | 12.52 | 10,00-11,65 | 9,9-10,78 | 9,6-9,91 | 9,2-9,5 | 9,2-9,5 | Dinas Sosial | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian TPH, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Bappeda |
| | | | | 2. Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 4.39 | 4.23 | 4.12 | 4.01 | 3.87 | 3.75 | 3.62 | 3.62 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | | | 3. Persentase Pekerja Tidak Penuh (< 35 jam/minggu) | % | 34.95 | 36.92 | 35.68 | 34.76 | 33.84 | 32.91 | 31.99 | 31.99 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | | 1.5 Meningkatnya Akses Energi (Maju Akses Energi) | Rasio Desa Berlistrik | % | 97.13 | 97.75 | 98.48 | 99.21 | 99.95 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | | Target Capaian Indikator Sasaran Sampai Tahun 2023 | | | | | Kondisi akhir | PD Penanggung Jawab | PD Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| **MISI II :** Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat , berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas. | 2 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | | | Indeks | 68.86 | 69.39 | 70.07 | 71.08 | 71.75 | 72.42 | 73.09 | 73.09 | | |
| | | | 2.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Maju Kesehatan Masyarakat) | Angka Usia Harapan Hidup | Tahun | 69.180 | 69.410 | 69.524 | 69.638 | 69.752 | 69.866 | 69.980 | 69.980 | Dinas Kesehatan | |
| | | | 2.2 Meningkatnya Akses Pendidikan Berkualitas (Maju Akses Pendidikan Berkualitas) | 1. Angka Rata-rata lama sekolah | Tahun | 7.99 | 8.00 | 8.22 | 8.47 | 8.63 | 8.79 | 8.95 | 8.95 | Dinas Pendidikan | |
| | | | | 2. Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12.35 | 12.36 | 12.80 | 12.87 | 12.98 | 13.19 | 13.40 | 13.40 | Dinas Pendidikan | |
| | 3 Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | | | Indeks | 92,43 | 92.62 | 92.70 | 93.00 | 93.30 | 93.60 | 93.90 | 93.90 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | | | Indeks | 73.53 | n.a | 73.70 | 73.90 | 74.10 | 74.30 | 74.50 | 74.50 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | | 3.1 Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak (Maju Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan Anak) | 1. Keterlibatan Perempuan di Parlemen | % | 17.33 | 20.27 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | | | 2. Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi dan Teknisi | % | 52.37 | 49.25 | 50.00 | 51.00 | 52.00 | 53.00 | 54.00 | 54.00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | | Target Capaian Indikator Sasaran Sampai Tahun 2023 | | | | | Kondisi akhir | PD Penanggung Jawab | PD Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| | | | | 3. Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja | % | 34.57 | 34.70 | 34.90 | 35.10 | 35.20 | 35.30 | 35.50 | 35.50 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | | | 4. Persentase Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) | % | 5.88 | 11.76 | 23.53 | 35.29 | 47.05 | 58.82 | 70.58 | 70.58 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | | | 5. Selisih Capaian Angka Harapan Hidup Laki-Laki dan Perempuan | Tahun | 3.88 | 3.88 | 3.68 | 3.49 | 3.30 | 3.21 | 3.12 | 3.12 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | | | 6. Selisih Capaian Rata-rata lama sekolah Laki-Laki dan Perempuan | Tahun | 0.7 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | | | 7. Selisih Capaian Harapan Lama Sekolah Laki-Laki dan Perempuan | Tahun | 0.13 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | | | 8. Selisih Capaian Pengeluaran per Kapita Laki-Laki dan Perempuan | Rp. Ribu | 5123 | 5403 | 5400 | 5400 | 5300 | 5300 | 5200 | 5200 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | | Target Capaian Indikator Sasaran Sampai Tahun 2023 | | | | | Kondisi akhir | PD Penanggung Jawab | PD Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| **MISI III :** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan | 4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Indeks Reformasi Birokrasi | | | Indeks | B | - | BB | BB | BB | A | A | A | Biro Organisasi | Seluruh PD |
| | | | 4.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas) | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai) | Nilai | B | B | B | B | B | B | A | A | Biro Organisasi | Seluruh PD |
| | | | | 2. Persentase Inovasi yang terpilih masuk TOP 99 | % | na | 10,71 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Seluruh PD |
| mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif. | | | 4.2 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel) | 1. Nilai SAKIP (Skor) | Nilai | A (80,01) | BB (78,71) | A (81-82) | A (82-83) | A (83-84) | A (84-85) | A (85-86) | A (85-86) | Biro Organisasi | Seluruh PD |
| | | | | 2. Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | BPK |
| | | | 4.3 Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah (Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas) | 1. Level Maturitas SPIP | Skor | 2.15 | 3.02 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4 | Inspektorat | Seluruh PD |
| | | | | 2. Indeks Integritas Daerah | Indeks | - | - | 60 | 65 | 70 | 72.5 | 75 | 75 | Inspektorat | Seluruh PD |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | | Target Capaian Indikator Sasaran Sampai Tahun 2023 | | | | | Kondisi akhir | PD Penanggung Jawab | PD Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| **MISI IV :** Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah. | 5 Terwujudnya pemerataan pembangunan berkelanjutan | 1 Persentase Rumah Tidak Layak Huni | | | % | 7.25 | 6.88 | 6.43 | 5.83 | 5.17 | 4.43 | 3.85 | 3.85 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Sosial, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan |
| | | 2 Rata-rata Waktu tempuh Jalan Provinsi | | | Km/Jam | 28.00 | 30.00 | 35.00 | 38.00 | 40.00 | 43.00 | 45.00 | 45.00 | Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang | Dinas Perhubungan |
| | | 3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | | Indeks | 62.04 | 67.29 | 67.35 | 67.40 | 67.43 | 67.47 | 67.85 | 67.85 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Kehutanan | Dinas Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | 5.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (Maju Kualitas Lingkungan Hidup) | 1. Indeks Kualitas Air | Indeks | 62.64 | 62.64 | 62.74 | 62.82 | 62.89 | 62.93 | 64.04 | 64.04 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan | |
| | | | | 2. Indeks Kualitas Udara | Indeks | 96.11 | 96.11 | 96.19 | 96.23 | 96.25 | 96.32 | 96.45 | 96.45 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan | |
| | | | | 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Indeks | 36.03 | 49.173 | 49.189 | 49.206 | 49.224 | 49.243 | 49.263 | 49.263 | Dinas Kehutanan | |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | | Target Capaian Indikator Sasaran Sampai Tahun 2023 | | | | | Kondisi akhir | PD Penanggung Jawab | PD Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| | | | | 4. Indeks Resiko Bencana Indonesia | Indeks | 142.20 | 142.20 | 133.67 | 125.65 | 118.11 | 111.02 | 104.36 | 104.36 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang |
| | | | 5.2 Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas (Maju Infrastruktur dan Konektivitas) | 1. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak | % | 62.71 | 62.84 | 72.97 | 75.08 | 78.83 | 82.77 | 86.91 | 86.91 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Kesehatan |
| | | | | 2. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak | % | 78.62 | 80.32 | 81.00 | 84.75 | 87.63 | 90.26 | 92.96 | 92.96 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| | | | | 3. Persentase Kondisi Jalan Mantap | % | 74.22 | 61.22 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang | |
| | | | | 4. Persentase Akses Internet | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | | Target Capaian Indikator Sasaran Sampai Tahun 2023 | | | | | Kondisi akhir | PD Penanggung Jawab | PD Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| **MISI V :** Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius. | 6 Terwujudnya masyarakat madani | Indeks Demokrasi Indonesia | | | Indeks | 74.04 | 82 | 87 | 90 | 92 | 94 | 95 | 95 | | |
| | | | 6.1 Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama) | Persentase Penurunan Konflik Sosial | % | 70 | 78 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | Badan Kesbangpol | |
| | 7 Meningkatnya daya saing pariwisata daerah melalui seni, budaya, dan religi | Persentase peningkatan jumlah wisatawan | | | % | 5.95 | 9.96 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | | 7.1 Meningkatnya Seni, Budaya, dan Pariwisata (Maju Seni, Budaya, dan Pariwisata) | 1. Jumlah Wisatawan Mancanegara | Orang | 67,470 | 70,917 | 74,463 | 78,186 | 82,095 | 86,200 | 90,510 | 90,510 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | 2. Jumlah Wisatawan Nusantara | Orang | 7,474,422 | 8,221,864 | 8,632,957 | 9,064,605 | 9,517,835 | 9,993,727 | 10,493,413 | 10,493,413 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | 3. Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan | Sertifikat | 17 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Dinas Perindustrian |
| | 8 Meningkatnya daya saing pemuda dan olahraga | Peringkat Pembangunan Pemuda | | | Peringkat | - | - | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | Dinas Pemuda dan Olahraga | |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | | Target Capaian Indikator Sasaran Sampai Tahun 2023 | | | | | Kondisi akhir | PD Penanggung Jawab | PD Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| | | | 8.1 Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga (Maju Pemuda dan Olahraga) | 1. Peringkat Sumsel pada Pekan Olahraga Nasional (PON) | Peringkat | 21 (th. 2016) | 21 (th. 2016) | - | 10 | - | - | - | - | Dinas Pemuda dan Olahraga | |
| | | | | 2. Jumlah Pemuda Berprestasi (Akademis, Seni, Budaya, Olahraga dan Wirausaha Muda) | Orang | 9 | 24 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Dinas Pemuda dan Olahraga | |
| | | | | 3. Persentase Kabupaten/Kota Layak Pemuda | % | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 11.76 | 17.65 | 23.53 | 23.53 | Dinas Pemuda dan Olahraga | |

### 1.4. Prioritas Pembangunan

Penjabaran visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dirumuskan dalam 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
5. Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan
6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Madani
7. Peningkatan Daya Saing Pariwisata, Seni dan Budaya
8. Peningkatan Daya Saing Pemuda dan Olahraga

Prioritas pembangunan tersebut akan dilaksanakan bertahap selama 5 (lima) tahun melalui sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan sehingga dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan tahunan.

**Tabel 5.2**

Keterkaitan Misi dan Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

| No | Misi | Prioritas Pembangunan |
|---|---|---|
| 1 | Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan | 1. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan |
| 2 | Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia<br>3. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender |
| 3 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif | 4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan |
| 4 | Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus | 5. Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan |

| No | Misi | Prioritas Pembangunan |
|---|---|---|
| | barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah | |
| 5 | Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius | 6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Madani<br>7. Peningkatan Daya Saing Pariwisata, Seni dan Budaya<br>8. Peningkatan Daya Saing Pemuda dan Olahraga |

### 1.5. Janji Gubernur dan Wakil Gubernur

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dalam hal ini memuat juga janji-janji politik dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang secara resmi disampaikan ke KPU, terdiri dari Visi, 5 (lima) Misi, dan 52 (lima puluh dua) program kerja (*Sumber : Visi, Misi dan Program H. Herman Deru, SH, MM dan Ir. H. Mawardi Yahya yang disampaikan ke KPU Prov. Sumsel*).

**Tabel 5.3**

Keterkaitan Misi dan Program Kerja HDMY

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

| No | Misi | Sasaran | Program Kerja Janji Kampanye HDMY |
|---|---|---|---|
| 1 | Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan | 1. Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan (Maju Ekonomi Kerakyatan) | • Membangun insfrastruktur dalam mempercepat pembangunan perekonomian rakyat.<br>• Penyediaan data dan informasi perekonomian secara komprehensif, real time dan online.<br>• Membentuk bank data potensi dan perkembangan ekonomi Sumatera Selatan secara online. |
| | | 2. Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan) | • Pengembangan ekonomi kreatif di sektor jasa dan industri kecil/menengah.<br>• Memfasilitasi Pembangunan industry sektor hilir dari potensi ekonomi masyarakat. |

| No | Misi | Sasaran | Program Kerja Janji Kampanye HDMY |
|---|---|---|---|
| | | 3. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan (Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan) | • Pengembangan kawasan komoditas/sektor unggulan berbasis potensi sumber daya lokal. |
| | | 4. Menurunnya Pengangguran dan Kemiskinan (Maju Kesejahteraan Masyarakat) | • Mengembangkan industri pengolahan (manufaktur) dengan memprioritaskan penggunaan sebesar-besarnya tenaga kerja lokal dan pemanfaatan sumber daya alam (*resources*)/bahan baku lokal.<br>• Menekan tingkat kemiskinan guna memperkecil kesenjangan sosial yang dapat melahirkan konflik sosial. |
| | | 5. Meningkatnya Akses Energi (Maju Akses Energi) | • Penataan pola hubungan ekonomi antar investor di sektor pertanian, jasa, pertambangan, dengan masyarakat lokal yang mengedepankan pendekatan dialogis dan partisipatif. |
| 2 | Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas | 6. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Maju Kesehatan Masyarakat) | • Menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas melalui revitalisasi sarana dan tenaga kesehatan (Puskesmas, Pos Kesehatan Desa, Pondok bersalin Desa, Posyandu, Pos KB, Tanaman Obat Keluarga, Gerakan Sadar Gizi, Perilaku Hidup Sehat}.<br>• Memfasilitasi Dokter Keluarga Mandiri.<br>• Membangun prilaku Masyarakat Hidup Sehat secara partisipatif.<br>• Pembentukan program kesehatan kewilayahan (Desa/Kelurahan Sehat, Kecamatan Sehat). |
| | | 7. Meningkatny Akses Pendidikan Berkualitas (Maju Akses | • Menjamin akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas yang murah mulai tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Taman Kanak-Kanak, SMP/Madrasah, SMU/Aliyah}. |

| No | Misi | Sasaran | Program Kerja Janji Kampanye HDMY |
|---|---|---|---|
| | | Pendidikan Berkualitas) | • Revitalisasi lembaga-lembaga pendidikan yang terfokus pada potensi lokal.<br>• Pembentukan lembaga-lembaga keterampilan/pelatihan yang terfokus pada pengembangan potensi lokal.<br>• Menjamin akses masyarakat terhadap peningkatan keterampilan, baik di tingkat lokal,nasional, maupun internasional.<br>• Mengefektifkan keterlibatan lembaga pendidikan berbasiskan keagamaan untuk pengembangan potensi lokal. |
| | | 8. Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak (Maju Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan Anak) | • Menfasilitasi pembentukan PAUD di setiap desa di Sumatera Selatan sebagai sarana pendidikan untuk memberdayakan generasi emas sebagai upaya membangun SDM yang unggul. |
| 3 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif | 9. Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas) | • Membangun hubungan administrasi pemerintah yang lebih harmonis dengan Bupati/Walikota se-Sumsel sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi.<br>• Mendorong pengutamaan kepentingan publik oleh pelayanan publik dengan pelayanan birokrasi yang berbasis teknologi informasi.<br>• Revitalisasi insfrastruktur pelayanan public, baik secara manual maupun online.<br>• Membangun jaringan interkoneksi layanan publik yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, yang bisa di akses oleh publik secara online 24 jam/hari, 7 hari/minggu.<br>• Menciptakan pelayanan publik secara terpadu, cepat dan mudah. |

| No | Misi | Sasaran | Program Kerja Janji Kampanye HDMY |
|---|---|---|---|
| | | | • Memfasilitasi forum kepala daerah se-Sumatera Selatan dengan menjadwalkan pertemuan rutin dalam jangka waktu tertentu.<br>• Melakukan kunjungan ke semua daerah secara berkala untuk penyerapan aspirasi dan mendorong keunggululan potensi masyarakat. |
| | | 10. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel) | • Melibatkan unsur LSM/Ormas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh lembaga pemerintahan.<br>• Menempatkan posisi semua stakeholder {tokoh masyarakat,tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bupati dan Walikota) di Sumatera Selatan dalam satu kepentingan pembangunan Sumatera Selatan Maju.<br>• Melibatkan institusi pendidikan tinggi di daerah sebagai *think tank* pembangunan daerah.<br>• Menjadikan lembaga pers dan media massa sebagai mitra dalam pembangunan daerah. |
| | | 11. Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah (Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas) | • Peningkatan kualitas aparatur pemerintah di semua bidang.<br>• Mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan dalam rangka pencegahan terhadap tindak korupsi dan tindakan penyelewengan guna menciptakan pemerintahan yang baik (good government). |
| 4 | Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan | 12. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (Maju Kualitas Lingkungan Hidup) | • Memfasilitasi proses eksploitasi, pengolahan, dan distrbusi kegiatan pertambangan yang senantiasa berada dalam koridor partisipasi dan kesejahteraan masyarakat lokal.<br>• Pembangunan industri keenergian kreatif yang |

| No | Misi | Sasaran | Program Kerja Janji Kampanye HDMY |
|---|---|---|---|
| | pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah | | berbasiskan batubara di tingkat masyarakat lokal.<br>• Mengundang Peraturan daerah yang menekankan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah setempat.<br>• Peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat daerah agar mampu terlibat dalam kegiatan pertambangan dan energi.<br>• Membangun pengembangan sektor sektor energi alternative (air,udara, biofuel, biomass) berbasiskan pada potensi di daerah Sumatera Selatan.<br>• Pengembangan sistem teknologi baru dalam efektifitas system tranportasi batubara.<br>• Revitalisasi sistim irigasi yang mendukung sistim pertanian masyarakat. |
| | | 13. Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas (Maju Infrastruktur dan Konektivitas) | • Menciptakan pembangunan Sumatera Selatan yang selaras dengan kondisi kewilayahan yang memiliki infrastruktur yang memadai dan di dukung tersedianya insfrastruktur yang dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah.<br>• Menjamin kemudahan masyarakat untuk mengakses air bersih.<br>• Mempercepat pembangunan insfrastruktur yang mendukung industri pertambngan batubara. |
| 5 | Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan | 14. Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan | • Mendorong penguatan pengetahuan keagamaan masyarakat agar terbentuk masyarakat madani yang relegius.<br>• Menfasilitasi tokoh agama dalam meningkatkan pengetahuan keagamaan.<br>• Reinventing budaya lokal dan pengetahuan lokal dalam membangun identitas cultural masyarakat. |

| No | Misi | Sasaran | Program Kerja Janji Kampanye HDMY |
|---|---|---|---|
| | pariwisata berorientasi pariwisata religius | Kehidupan Beragama) | • Menfasilitasi semua aktifitas lembaga kebudayaan dan keagamaan untuk berpartisipasi dalam membangun penguatan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. |
| | | 15. Meningkatnya Seni, Budaya, dan Pariwisata (Maju Seni, Budaya, dan Pariwisata) | • Mendorong memajukan bahasa lokal sebagai kekayaan khas budaya Sumatera Selatan.<br>• Mendorong budaya lokal dan pengetahuan lokal kedalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah sebagai proses pengembangan budaya lokal yang dapat berkontribusi dalam membangun karakter bangsa.<br>• Menjamin kebebasan untuk mengembangkan dan mengekspresikan seni budaya masing-masing di daerah Sumatera Selatan.<br>• Membangun akses ruang-ruang kreatifitas seni dan budaya yang mampu menciptakan ruang publik yang berbudaya di seluruh Sumatera Selatan. |
| | | 16. Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga (Maju Pemuda dan Olahraga) | • Mendorong program-program kepemudaan yang kreatif dan inovatif di berbagai bidang.<br>• Pengembangan dan memberikan penghargaan terhadap capaian prestasi pemuda di bidang seni, olahraga, budaya, dan akademis. |

Janji Gubernur dan Wakil Gubernur berupa Visi, Misi, dan Program Kerja yang disampaikan selama masa kampanye tersebut diterjemahkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 melalui strategi, arah kebijakan dan program pembangunan sehingga dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan tahunan.

### 1.6. Sinkronisasi RPJPD, RTRW dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan

Terkait penjabaran di atas, maka dapat dijelaskan sinkronisasi antara RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036 dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.4**

Sinkronisasi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025,
RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036 dan
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023

| Arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 | Arahan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036 | Misi dan Sasaran Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 |
|---|---|---|
| 1. Memantapkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi dengan kebijakan<br>(1) Pemantapan laju pertumbuhan ekonomi di atas 6,5 persen per tahun<br>(2) Pemantapan struktur ekonomi yg didukung peningkatan nilai tambah industri dan jasa<br>(3) Pemantapan sektor-sektor baru potensial<br>(4) Penguatan surplus perdagangan dan investasi<br>(5) penurunan pengangguran terbuka kurang dari 10 persen<br>(6) penurunan kemiskinan dan kesenjangan melalui pemberdayaan UMKM, dan<br>(7) Pemantapan kualitas SDM.<br><br>2. Memantapkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan kebijakan:<br>(1) Pemantapan kualitas pelayanan pendidikan<br>(2) Pemantapan penguasaan iptek<br>(3) Pemantapan derajat kesehatan masyarakat<br>(4) Pemantapan kualitas | 1. Mengembangkan sistem perkotaan provinsi yang berkedudukan cukup strategis dan memiliki peran sebagai pintu keluar-masuk (*multi-gate*) dalam menciptakan keterkaitan ekonomi dan spasial dengan daerah luarnya<br><br>2. Mengembangkan sistem infrastruktur wilayah yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk mendukung Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi dan lumbung pangan nasional<br><br>3. Mengembangkan tata ruang yang akomodatif dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam membutuhkan pertimbangan aspek lingkungan, khususnya perwilayahan DAS dan sub DAS. Hal ini berkaitan erat dengan penyediaan sumber daya air bagi pembangunan. Provinsi Sumatera Selatan memiliki wilayah sungai strategis nasional seperti WS Musi, Sugihan, dan Banyuasin<br><br>4. Mengoptimalkan kedudukan dan peranan wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai “salah satu titik sentuh” dan | 1. Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan melalui:<br>(1) Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan (Maju Ekonomi Kerakyatan)<br>(2) Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan)<br>(3) Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan (Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan)<br>(4) Menurunnya Pengangguran dan Kemiskinan (Maju Kesejahteraan Masyarakat)<br>(5) Meningkatnya akses energi (Maju Akses Energi)<br><br>2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas melalui:<br>(1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Maju |

| Arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 | Arahan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036 | Misi dan Sasaran Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 |
|---|---|---|
| permukiman dan perumahan<br>(5) Pemantapan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pekerja anak, dan kelompok marjinal lainnya, peningkatan kualitas kehidupan beragama, seni dan budaya lokal.<br><br>3. Mengembangkan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dengan kebijakan:<br>(1) Pemantapan pemanfaatan sumber daya energi yang berwawasan lingkungan<br>(2) Pemantapan tata ruang yang adil dan seimbang<br>(3) Pemantapan sistem transportasi<br>(4) Pemantapan jaringan infrastruktur<br>(5) Revitalisasi pertanian, pemantapan agribisnis dan kelembagaan pertanian.<br><br>4. Pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih, dan bertanggungjawab dengan kebijakan:<br>(1) Pemantapan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah<br>(2) Pemantapan kualitas pelayanan umum<br>(3) Pemantapan kapasitas keuangan daerah<br>(4) Pemantapan peran serta masyarakat<br>(5) Keterbukaan informasi<br>(6) Pemantapan pembangunan politik lokal<br>(7) Pemantapan penegakan hukum<br>(8) Pemantapan perlindungan masyarakat dan | "pintu gerbang" Kawasan Barat Indonesia ke wilayah Internasional (Asia-Pasifik, Timur Tengah, Eropa, dan lain-lain), serta ke wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) antara Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) dan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan Singapura-Johor-Riau (SIJORI) yang dapat memberi peluang pasar ekspor bagi Provinsi Sumatera Selatan<br><br>5. Mendorong pembentukan sistem kota-kota secara hirarkis dengan memperhatikan keseimbangan antarsub wilayah. | Kesehatan Masyarakat)<br>(2) Meningkatnya akses pendidikan berkualitas (Maju Akses Pendidikan Berkualitas)<br>(3) Meningkatnya pembangunan Gender dan Perlindungan anak (Maju Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan anak)<br><br>3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif melalui :<br>(1) Maju Pelayanan Publik berkualitas (Meningkatnya Pelayanan Publik berkualitas)<br>(2) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel)<br>(3) Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah daerah (Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas)<br><br>4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah melalui: |

| Arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 | Arahan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036 | Misi dan Sasaran Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 |
|---|---|---|
| penanggulangan bencana<br>(9) Pemantapan ketertiban dan keamanan daerah | | (1) Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup (Maju Kualitas Lingkungan Hidup)<br>(2) Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas (Maju Infrastruktur dan Konektivitas)<br>5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius melalui:<br>(1) Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan kehidupan beragama yang berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)<br>(2) Meningkatnya Seni, Budaya, dan Pariwisata (Maju Seni, Budaya, dan Pariwisata)<br>(3) Meningkatnya pembangunan pemuda dan olahraga (Maju Pemuda dan Olahraga) |

# BAB VI

# STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 disusun untuk menjawab tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036, serta janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023. Arahan tersebut menuntun Provinsi Sumatera Selatan pada Prioritas Pembangunan daerah sekaligus Strategi dan Arah Kebijakan sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2019-2023. Strategi dan Arah Kebijakan diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 6.1**

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

| **VISI : Sumsel Maju Untuk Semua** | | | |
|---|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| **MISI I : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.** | | | |
| 1. **Meningkatnya Perekonomian yang Inklusif Berbasis Inovasi Daerah** | 1.1 Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan (*Maju Ekonomi Kerakyatan*) | ▪ Menggali Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Melalui Sektor Pariwisata dan Industri Pengolahan | ▪ Mempercepat berfungsinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sumatera Selatan.<br>▪ Pengembangan Destinasi Wisata potensial.<br>▪ Membangun Infrastruktur dalam Mempercepat Pembangunan Perekonomian Rakyat.<br>▪ Penyediaan Bank Data, Informasi, Potensi dan Perkembangan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Secara Komprehensif, *Realtime* dan *Online*. |
| | | ▪ Mengoptimalkan Ekonomi Produktif Berbasis Kearifan Lokal | ▪ Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia agar dapat Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing yang Lebih Baik.<br>▪ Pengembangan Kerjasama melalui Program *Technopreneur*.<br>▪ Meningkatkan Keterampilan, Wawasan, dan Pengetahuan Usaha Mikro untuk Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Produk.<br>▪ Mendorong Pelaku Usaha Mikro untuk Meningkatkan Standard dan Kualitas Produk.<br>▪ Membuka Wawasan para Usaha Mikro agar mendapat Akses Pembiayaan melalui Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).<br>▪ Menambah Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro mengetahui kelengkapan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan modal dari perbankan. |
| | | ▪ Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok | ▪ Mengefektifkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).<br>▪ Mengoptimalkan Pusat Distribusi Regional (PDR). |

| VISI : Sumsel Maju Untuk Semua | | | |
|---|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| | | ▪ Efektivitas Penggunaan Anggaran Pemerintah | ▪ Meningkatkan Kualitas Belanja Pemerintah untuk Pembangunan.<br>▪ Pengembangan Kerjasama Unsur Akademisi, Bisnis, Government dalam Perumusan Kebijakan. |
| | 1.2 Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan (*Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan*) | ▪ Mendorong Tersedianya Infrastruktur Mendukung Iklim Investasi. | ▪ Mendorong Percepatan Infrastruktur Pendukung beroperasinya KEK Tanjung Api-Api dan Kawasan Industri Lainnya.<br>▪ Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik. |
| | | ▪ Memfasilitasi Pembangunan Industri Sektor Hilir dari Potensi Ekonomi Masyarakat agar dapat Memberikan Kesempatan Kerja Seluas-Luasnya serta Tingkat Pendapatan Pekerja Lebih Besar dan Lebih Merata. | ▪ Mengoptimalkan Proses Perizinan untuk Investasi.<br>▪ Mendorong Kondisi yang Kondusif bagi Investasi.<br>▪ Peningkatan Citra Daerah sebagai Tujuan Investasi yang Menguntungkan Melalui Peningkatan Popularitas dalam berbagai Aspek.<br>▪ Pengemasan Potensi dan Peluang Investasi Wilayah menjadi Menarik.<br>▪ Menyusun dan Menyajikan Peluang Kegiatan Penanaman Modal yang Lebih Konkret.<br>▪ Pengembangan Mekanisme Promosi Investasi yang Lebih Efisien dan Efektif yang antara lain Melalui Penyelarasan Kegiatan Promosi *Tourism, Trade, And Investment* (TTI) dengan OPD terkait serta Peningkatan Penggunaan Media Elektronik yang Meliputi Radio, Televisi, Media Online dan Media Sosial.<br>▪ Pelaksanaan Gelar Promosi Investasi Daerah untuk Mendorong Investor *Awareness And Willingness*.<br>▪ Fasilitasi Keikutsertaan UKM untuk Promosi dalam Rangka *Matchmaking* dengan Perusahaan Skala Besar serta Pembinaan Kemitraan Usaha dengan Strategi Naik Kelas/Aliansi.<br>▪ Kerjasama dengan Pusat Promosi Terpadu di Negara-Negara Tertentu.<br>▪ Peningkatan Pertemuan Bisnis Antara Pelaku Usaha dengan Pemerintah Pusat Maupun Daerah. |

| VISI : Sumsel Maju Untuk Semua | | | |
|---|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| | | | ▪ Pengembangan Ekonomi Kreatif di Sektor Jasa dan IKM. |
| | | ▪ Memperkuat daya saing ekspor dan mengendalikan impor untuk meningkatkan neraca perdagangan. | ▪ Revitalisasi Pasar Tradisional Menuju Pasar Tradisional Modern.<br>▪ Meningkatkan Daya Saing Produk Industri Kecil dan Menengah.<br>▪ Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Industri Kecil dan Menengah.<br>▪ Memfasilitasi Standarisasi Produk Industri Kecil dan Menengah. |
| | 1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan (*Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan*) | ▪ Peningkatan Kesejahteraan Petani | ▪ Pengembangan Kawasan Komoditas/Sektor Unggulan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.<br>▪ Meningkatkan Akses Petani Terhadap Saprodi Berkualitas dan Terjangkau.<br>▪ Meningkatkan Kinerja Jaringan Irigasi Permukaan dan Irigasi Rawa.<br>▪ Menjamin Ketersediaan Air di Lahan Irigasi dan Non Irigasi.<br>▪ Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Prasarana di dan Keluar Sentra Produksi Komoditi Pangan.<br>▪ Mencetak Sawah Baru untuk Meningkatkan Produksi Padi dalam Rangka Meningkatkan Sumsel Lumbung Pangan.<br>▪ Peremajaan Tanaman yang Sudah Tua atau Kurang Produktif.<br>▪ Intensifikasi dan Ekstensifikasi.<br>▪ Peningkatan Sarana Panen.<br>▪ Peningkatan Kemampuan SDM Petani dalam Budidaya Tanaman.<br>▪ Penanggulangan OPT.<br>▪ Meningkatkan Harga Jual Komoditas. |
| | | ▪ Peningkatan Kesejahteraan Nelayan/ Pembudidaya Ikan | ▪ Mengupayakan Pelelangan Ikan di Pelabuhan Perikanan dapat dilaksanakan agar Nilai Jual Nelayan Lebih Tinggi.<br>▪ Mengupayakan Pembudidaya Ikan dapat Memproduksi Pakan Sendiri dengan Mempergunakan Bahan Baku Lokal. |

| VISI : Sumsel Maju Untuk Semua | | | |
|---|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| | | ▪ Pemanfaatan Hutan Berkelanjutan | ▪ Meningkatkan Pembinaan Pemanfaatan Kawasan Hutan.<br>▪ Monitoring Dan Evaluasi Peredaran Hasil Hutan. |
| | | ▪ Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan | ▪ Pemantapan Ketersediaan Pangan,<br>▪ Peningkatan Distribusi dan Harga Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan Serta Ketersediaan Pangan.<br>▪ Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat.<br>▪ Gerakan Diversifikasi Konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan Mutu Pangan Segar.<br>▪ Peningkatan Produksi Hasil Ternak.<br>▪ Penanggulangan Penyakit Ternak dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet).<br>▪ Pemasaran dan Penerapan Teknologi Hasil Ternak. |
| | | ▪ Peningkatan Publikasi dan Pemanfaatan Hasil Litbang Dan Inovasi. | ▪ Riset Berbasis Kebutuhan.<br>▪ Meningkatkan Kualitas SDM Peneliti.<br>▪ Melakukan Koordinasi dengan Pembuat Kebijakan dan Pelaku Bisnis.<br>▪ Meningkatkan Fungsi Intermediator Teknologi.<br>▪ Inventarisasi Permasalahan yang Membutuhkan Litbang dan Inovasi. |
| | 1.4 Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran (*Maju Kesejahteraan Masyarakat*) | ▪ Menekan tingkat kemiskinan guna memperkecil kesenjangan sosial melalui peningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan kegiatan ekonomi produktif | ▪ Mengembangkan Industri Pengolahan (Manufaktur) untuk Hilirisasi SDA Unggulan dengan Memprioritaskan Penggunaan Sebesar-Besarnya Tenaga Kerja Lokal dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (*Resources*)/ Bahan Baku Lokal.<br>▪ Peningkatan Akses Angkatan Kerja Kepada Sumber Daya Produktif melalui Peningkatan Keterampilan Pekerja.<br>▪ Pengembangan Program Kemitraan Antara Pemerintah Provinsi dengan Dunia Industri untuk Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja.<br>▪ Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Bagi Pekerja Rentan agar dapat Memasuki Pasar Kerja.<br>▪ Meningkatkan Aset Masyarakat Miskin Melalui Bedah Rumah dan Pemanfaatan Pekarangan. |

| VISI : Sumsel Maju Untuk Semua | | | |
|---|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| | | | ▪ Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin melalui Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Dasar Berupa Air Bersih, Sanitasi, Bedah Rumah, Sarana Prasarana Kawasan Kumuh, Sarana Perdagangan untuk Orang Miskin, Sarana Industri Untuk Orang Miskin, dan Pemanfaatan Pekarangan (Benih dan Pupuk), Peningkatan Pemberdayaan SDA Lokal,<br>▪ Meningkatkan *Lifeskill* Pemuda melalui Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Miskin. |
| | | ▪ Mengendalikan Harga Kebutuhan Pokok | ▪ Mengefektifkan Peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Meningkatkan Koordinasi Antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/ Kota dalam satu Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).<br>▪ Mengoptimalkan Pusat Distribusi Regional (PDR).<br>▪ Intervensi Pemerintah terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pangan dalam Daerah Khususnya Beras, antara lain : Adanya Kebijakan Pemda yang Mengatur tentang Gapoktan yang Ada.<br>▪ Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah dalam Provinsi dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Beberapa Komoditi Pangan. |
| | | ▪ Menurunkan Daerah Rawan Pangan | ▪ Pengembangan Desa Mandiri Pangan.<br>▪ Penanganan Daerah Rawan Pangan.<br>▪ Kawasan Rumah Pangan Lestari.<br>▪ Pengembangan Ternak di Daerah Pengentasan Kemiskinan. |
| | | ▪ Mengoptimalkan Peran Koordinasi dan Konsultasi Kemiskinan | ▪ Meningkatkan Peran Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.<br>▪ Mengembangankan Program dan Inovasi Penanggulangan Kemiskinan. |

| VISI : Sumsel Maju Untuk Semua | | | |
|---|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| | 1.5 Meningkatnya Akses Energi (*Maju Akses Energi*) | ▪ Mengoptimalkan pengembangan energi berkelanjutan. | ▪ Melaksanakan Pengkajian dan Evaluasi Daerah yang tidak dilalui oleh Jaringan Listrik PLN dengan Meningkatkan Potensi Lokal Berbasis EBT.<br>▪ Melakukan Koordinasi secara Komprehensif bersama Kabupaten/Kota Penghasil Gas untuk Menggalakkan Pemanfaatan Gas Rumah Tangga.<br>▪ Memfasilitasi Proses Pengolahan dan Distribusi Kegiatan Pertambangan yang Berada dalam Koridor Partisipasi dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal.<br>▪ Mendorong Perusahaan Energi dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Rangka Meminimalkan Kerusakan Lingkungan.<br>▪ Penataan Pola Hubungan Ekonomi Antar Investor di Sektor Pertanian, Jasa, Pertambangan, dengan Masyarakat Lokal yang Mengedepankan Pendekatan Dialogis dan Partisipatif.<br>▪ Pembangunan Industri Keenergian Kreatif yang berbasiskan Batubara di Tingkat Masyarakat Lokal.<br>▪ Peningkatan Kualitas Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Daerah agar Mampu Terlibat dalam Kegiatan Pertambangan dan Energi. |
| **MISI II : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Baik Laki-Laki Maupun Perempuan, Yang Sehat, Berpendidikan, Profesional, Dan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Keimanan, Ketaqwaan, Kejujuran, Dan Integritas.** | | | |
| 2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | 2.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (*Maju Kesehatan Masyarakat*) | ▪ Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas (rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu, praktek dokter mandiri, poskesdes, polindes, apotik) | ▪ Revitalisasi Sarana dan Tenaga Kesehatan (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Sanitasi).<br>▪ Meningkatkan Kapasitas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).<br>▪ Riset Berbasis Kebutuhan. |
| | | ▪ Meningkatkan upaya promotif dan preventif. | ▪ Meningkatkan Upaya Deteksi Dini dan Pencegahan Penyakit.<br>▪ Membangun Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Masyarakat Secara Partisipatif. |

| VISI : Sumsel Maju Untuk Semua | | | |
|---|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| | | | ▪ Meningkatkan Kualitas Kesehatan Lingkungan.<br>▪ Peningkatan Ketersediaan, Distribusi serta Konsumsi dan Keamanan Pangan.<br>▪ Meningkatkan Kualitas Kabupaten/Kota Sehat. |
| | | ▪ Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak. | ▪ Meningkatkan Mutu Posyandu.<br>▪ Meningkatkan Akses Balita dan Ibu Hamil Terhadap Makanan Bergizi, Berimbang Dan Beragam.<br>▪ Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) Berbasis Kewilayahan.<br>▪ Meningkatkan Cakupan *Ante Natal Care* (ANC) Sesuai Standar (10 T). |
| | 2.2 Meningkatnya Akses Pendidikan Berkualitas (*Maju Akses Pendidikan Berkualitas*) | ▪ Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dan terjangkau. | ▪ Meningkatkan Kualitas Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal di Setiap Jenjang.<br>▪ Mengoptimalkan Pendidikan Non Formal Bagi Masyarakat Usia Produktif yang Masih Berpendidikan Rendah.<br>▪ Memotivasi Anak Usia Sekolah untuk Bersekolah.<br>▪ Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan.<br>▪ Meningkatkan Pemenuhan, Distribusi dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan<br>▪ Meningkatkan Keterjangkauan Biaya Pendidikan.<br>▪ Mengefektifkan Keterlibatan Lembaga Pendidikan Berbasiskan Keagamaan untuk Pengembangan Potensi Lokal. |
| | | ▪ Revitalisasi SMK | ▪ Penyediaan Guru Produktif.<br>▪ Penyediaan Sarana dan Prasarana (Alat Praktek).<br>▪ Pengembangan Kurikulum (*Link and Match* dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri).<br>▪ Pembentukan Lembaga-Lembaga Keterampilan/Pelatihan yang Terfokus pada Pengembangan Potensi Lokal. |
| | | ▪ Meningkatkan akses layanan perpustakaan terhadap | ▪ Meningkatkan Jumlah Ketersediaan dan Kemerataan Bahan Bacaan di Berbagai Jenis Perpustakaan. |

| VISI : Sumsel Maju Untuk Semua | | | |
|---|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| | | masyarakat. | ▪ Memudahan Akses Terhadap Bahan Bacaan.<br>▪ Mengembangkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.<br>▪ Meningkatkan Pemerataan dan Pemanfaatan Akses Layanan Perpustakaan di Masyarakat.<br>▪ Memfasilitasi Layanan Informasi Berbasis Internet di Seluruh Perpustakaan Desa/Kelurahan.<br>▪ Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan Perpustakaan di Masyarakat.<br>▪ Penyebaran Pusat - Pusat Informasi di Ruang - Ruang Publik.<br>▪ Meningkatkan Jumlah dan Sebaran Tenaga Perpustakaan.<br>▪ Meningkatkan Fungsi Pembinaan Dalam Rangka Penguatan Sumber Daya Perpustakaan (SDM, Bahan Bacaan, Sarpras, Anggaran).<br>▪ Meningkatkan Promosi Penggunaan Perpustakaan. |
| | | ▪ Peningkatan publikasi hasil litbang dan inovasi bidang pendidikan. | ▪ Inventarisasi Permasalahan yang Membutuhkan Litbang Dan Inovasi Bidang Pendidikan. |
| 3 Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender | 3.1 Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak (*Maju Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan Anak*) | ▪ Meningkatkan Implementasi Kebijakan Responsif Gender dan Anak. | ▪ Penyusunan, Reviu, Harmonisasi Kebijakan Terkait Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Data Terpilah. |
| | | ▪ Meningkatkan sinergi pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan | ▪ Penyusunan, Review, Harmonisasi Kebijakan Terkait Pengarustamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Data Terpilah.<br>▪ Peningkatan Pemahaman, Komitmen, serta Kerjasama Antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, Akademisi, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Tentang Pembangunan Responsif Gender, |

| VISI : Sumsel Maju Untuk Semua | | | |
|---|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| | | anak. | Serta Perlindungan Perempuan dan Anak.<br>▪ Peningkatan Kelembagaan Terkait Pengarustamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Pengarustamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Data Gender dan Anak.<br>▪ Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada berbagai Lembaga Terkait Pembangunan Gender, Kualitas Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Data Gender dan Anak Serta Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.<br>▪ Peningkatan Pembangunan Kualitas Keluarga.<br>▪ Pembinaan Kepada Organisasi Perempuan serta Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.<br>▪ Peningkatan Motivasi, Pengetahuan dan Ketrampilan Perempuan untuk Berkiprah dalam Berbagai Sektor Pembangunan.<br>▪ Peningkatan Kapasitas/ Pelatihan Kepemimpinan bagi Perempuan Khususnya Calon Legislatif (Caleg), Calon Kepala Daerah (Cakada) dan Organisasi Perempuan.<br>▪ Peningkatan Kerjasama dengan berbagai Stakeholders Melalui Perjanjian Kerjasama, MoU, dan Keterlibatan Stakeholders Terkait.<br>▪ Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) |
| | | ▪ Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan. | ▪ Pelatihan Keterampilan, Manajemen Usaha dan Bantuan Alat untuk Para Perempuan yang Membutuhkan. |
| | | ▪ Mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). | ▪ Peningkatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG).<br>▪ Pendampingan Teknis Kepada Pokja PUG Kabupaten/Kota dan *Focal Point* OPD Provinsi.<br>▪ Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Paham PUG.<br>▪ Peningkatan Ketersediaan, dan Pemanfaatan Data Terpilah pada Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA). |
| | | ▪ Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak | ▪ Penguatan Kelembagaan KLA.<br>▪ Pendampingan Teknis Kepada Kabupaten/Kota Menuju Provinsi Layak |

| VISI : Sumsel Maju Untuk Semua | | | |
|---|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| | | (PUHA). | Anak (Provila).<br>▪ Pelaksanaan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Indikator KLA.<br>▪ Peningkatan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan<br>▪ Peningkatan Ketersediaan, dan Pemanfaatan Data Anak pada Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA). |
| | | ▪ Meningkatkan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak melalui pengoptimalan usaha pencegahan dan penanganan | ▪ Pendidikan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Termasuk TPPO.<br>▪ Sosialisasi, Advokasi, Desiminasi terkait Pemenuhan Hak Perempuan pada Berbagai Situasi (Tenaga Kerja, Lansia, Perempuan Termarginalkan/Minoritas, termasuk Dalam Situasi Bencana)<br>▪ Pelayanan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Sesuai SOP.<br>▪ Peningkatan SDM Petugas Pelayanan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak.<br>▪ Sistem Pelayanan yang Komprehensif bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.<br>▪ Peningkatan Koordinasi Jejaring Lembaga yang Menangani Kasus Perempuan dan Anak.<br>▪ Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).<br>▪ Peningkatan Ketersediaan, dan Pemanfaatan Data Kekerasan Perempuan dan Anak (Simfoni). |
| **MISI III :** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dengan Mengedepankan Transparansi Dan Akuntabilitas Yang Didukung Aparatur Pemerintahan Yang Jujur, Berintegritas, Profesional, Dan Responsif. | | | |
| 4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | 4.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (*Maju Pelayanan Publik Berkualitas*) | ▪ Menciptakan pelayanan publik yang terpadu, cepat, mudah dan inklusif (mengakomodir kelompok masyarakat berkebutuhan | ▪ Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pelayanan di Fasilitas Pelayanan Publik.<br>▪ Mendorong Pengutamaan Kepentingan Publik oleh Pelayanan Publik dengan Pelayanan Birokrasi yang Berbasis *Information and Technology* (IT). |

| VISI : Sumsel Maju Untuk Semua | | | |
|---|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| | | khusus). | ▪ Revitalisasi Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pelayanan Publik.<br>▪ Menempatkan Petugas Pelayanan yang Kompeten (*Right Man in The Right Place*) dan Menciptakan Perilaku Pelaksana/Petugas dengan Memberikan Pelayanan secara Sopan, Ramah serta saling Menghargai dan Menghormati.<br>▪ Membangun Jaringan Interkoneksi Layanan Publik yang Bersifat Lintas Kabupaten/Kota, yang bisa di Akses oleh Publik Secara *Online* 24 Jam/Hari, 7 Hari/Minggu. |
| | | ▪ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif | ▪ Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Manajemen Pemerintahan.<br>▪ Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi Dalam Pelayanan Publik Menuju *Cyber Province*<br>▪ Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).<br>▪ Peningkatan Pengelolaan Satu Data Pembangunan.<br>▪ Membangun Hubungan Administrasi Pemerintah yang Lebih Harmonis dengan Bupati/Walikota se-Sumsel sebagai Bagian dari Proses Reformasi Birokrasi.<br>▪ Memfasilitasi Forum Kepala Daerah se-Sumatera Selatan dengan Menjadwalkan Pertemuan Rutin dalam Jangka Waktu Tertentu.<br>▪ Melakukan Kunjungan ke Semua Daerah Secara Berkala untuk Penyerapan Aspirasi dan Mendorong Keunggululan Potensi Masyarakat. |
| | | ▪ Peningkatan publikasi hasil litbang dan inovasi. | ▪ Riset Berbasis Kebutuhan.<br>▪ Meningkatkan Kualitas SDM Peneliti.<br>▪ Melakukan Koordinasi dengan Pembuat Kebijakan dan Pelaku Bisnis.<br>▪ Meningkatkan Fungsi Intermediator Teknologi.<br>▪ Inventarisasi Permasalahan yang Membutuhkan Litbang dan Inovasi. |
| | 4.2 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas | ▪ Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, | ▪ Optimalisasi Penganggaran, Perbendaharaan, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Akuntansi Pelaporan yang Baik.<br>▪ Implementasi Aplikasi yang Mengintegrasikan Perencanaan dengan |

| VISI : Sumsel Maju Untuk Semua | | | |
|---|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| | (*Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel*) | dan evaluasi program pembangunan Daerah. | Penganggaran yaitu E-Sumsel.<br>▪ Meningkatkan Kualitas Belanja Pemerintah untuk Pembangunan. |
| | | ▪ Melibatkan seluruh stakeholder dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. | ▪ Melibatkan Institusi Pendidikan Tinggi di Daerah sebagai *Think Tank* Pembangunan Daerah.<br>▪ Menjadikan Lembaga Pers dan Media Massa sebagai Mitra Pembangunan Daerah.<br>▪ Melibatkan Unsur LSM/Ormas dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan oleh Lembaga Pemerintahan.<br>▪ Menempatkan Posisi Semua Stakeholder (Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, Bupati dan Walikota) di Sumatera Selatan dalam Satu Kepentingan Pembangunan Sumatera Selatan Maju.<br>▪ Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi Berbagai Sumber Pendanaan yang Ada.<br>▪ Mengundangkan Peraturan Daerah yang Menekankan Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat Dan Pemerintah Daerah Setempat. |
| | 4.3 Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah (*Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas*) | ▪ Meningkatkan integritas ASN. | ▪ Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah di Semua Bidang.<br>▪ Mengoptimalkan Pengawasan Melekat.<br>▪ Mendorong Masyarakat Untuk Melakukan Kontrol Terhadap Kinerja Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).<br>▪ Meningkatkan Tunjangan ASN Berbasis Kinerja. |
| **MISI IV :** Membangun Dan Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur, Termasuk Infrastruktur Dasar Guna Percepatan Pembangunan Wilayah Pedalaman Dan Perbatasan, Untuk Memperlancar Arus Barang Dan Mobilitas Penduduk, Serta Mewujudkan Daya Saing Daerah Dengan Mempertimbangkan Pemerataan Dan Keseimbangan Daerah. | | | |
| 5 Terwujudnya pemerataan pembangunan | 5.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (*Maju Kualitas* | ▪ Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup meliputi Kualitas Air, Kualitas Udara dan Tutupan | ▪ Pemantauan Kualitas Air dan Udara.<br>▪ Meningkatkan Program Perhutanan Sosial.<br>▪ Meningkatkan Program Pengamanan Hutan. |

| VISI : Sumsel Maju Untuk Semua | | | |
|---|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| berkelanjutan | *Lingkungan Hidup*) | Hutan. | ▪ Meningkatkan Kegiatan Identifikasi Permasalahan dalam Kawasan Hutan.<br>▪ Pengendalian Kebakaran Hutan. |
| | | ▪ Menurunkan emisi GRK di 6 sektor. | ▪ Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas SDM.<br>▪ Revitalisasi Karet dan Sawit yang Berkelanjutan.<br>▪ Meningkatkan Kemampuan Masyarakat untuk Mengelola dan Mendaur Ulang Sampah Menjadi Sumber Ekonomi Baru.<br>▪ Mengembangkan Energi Baru Terbarukan Berbasis Potensi Daerah.<br>▪ Rehabilitasi Lahan.<br>▪ Penggunaan Bibit Pertanian yang Ramah Lingkungan. |
| | | ▪ Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup | ▪ Peningkatan Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati, dan<br>▪ Peningkatan Upaya Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pesisir dan Laut.<br>▪ Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air. |
| | | ▪ Meningkatkan mitigasi bencana, mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah | ▪ Meningkatkan Sistem *Early Warning* dan Sistem Penanganan Bencana.<br>▪ Meningkatkan System Monitoring dan Informasi Bencana.<br>▪ Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Air disemua Sektor dan Memastikan Keberlangsungan Pengambilan dan Pasokan Air Baku untuk Mengatasi Kelangkaan Air.<br>▪ Meningkatkan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana.<br>▪ Meningkatkan Kecepatan Penanganan Bencana. |
| | | ▪ Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing | ▪ Perwujudan Harmonisasi dalam Pemanfaatan, Penataan dan Pengendalian Ruang pada seluruh Kawasan Strategis Provinsi (KSP).<br>▪ Peningkatan Kinerja Perencanaan Ruang.<br>▪ Peningkatan Kinerja Pemanfaatan Ruang.<br>▪ Peningkatan Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang. |

| VISI : Sumsel Maju Untuk Semua | | | |
|---|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| | 5.2 Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas (*Maju Infrastruktur dan Konektivitas*) | ▪ Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang, | ▪ Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Jalan dan Jembatan untuk Menunjang Aktivitas Perekonomian Masyarakat<br>▪ Meningkatkan Aksesibilitas Darat, Sungai, Udara, dan Laut.<br>▪ Menciptakan Pembangunan yang Selaras dengan Kondisi Kewilayahan yang didukung Tersedianya Infrastruktur yang dapat Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah.<br>▪ Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Industri Pertambangan Batubara.<br>▪ Pengembangan Sistem Teknologi Baru dalam Efektifitas Sistem Tranportasi Batubara. |
| | | ▪ Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman | ▪ Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Air Minum.<br>▪ Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik.<br>▪ Peningkatan Cakupan Layanan Persampahan.<br>▪ Peningkatan Ketersediaan Drainase Perkotaan, dan<br>▪ Pengembangan Lingkungan Permukiman Sehat.<br>▪ Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) |
| | | ▪ Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi dan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara | ▪ Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.<br>▪ Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung/Rumah Negara. |
| **MISI V :** Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni, Dan Budaya Untuk Membangun Karakter Kehidupan Sosial Yang Agamis & Berbudaya, Dengan Ditopang Fisik Yang Sehat Melalui Kegiatan Olahraga, Sedangkan Pengembangan Pariwisata Berorientasi Pariwisata Religius. | | | |
| 6 Terwujudnya masyarakat madani | 6.1 Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan kehidupan beragama yang berkualitas | ▪ Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat | ▪ Meningkatkan Kemampuan Aparat Hukum (Penegak Perda/Satpol PP dan PPNS) Melalui Pelatihan dan Pembekalan Aparat Penegak Perda (Satpol PP dan PPNS) untuk Meningkatkan Kinerja Aparat Penegak Perda).<br>▪ Menertibkan Administrasi Maupun Teknis dalam Pelaksanaan |

| VISI : Sumsel Maju Untuk Semua | | | |
|---|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| | (*Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama*) | | Penegakan Perda.<br>▪ Mengoptimalkan Pencegahan untuk Mengurangi Pelanggaran Perda dengan Melakukan Sosialisasi, Pembinaan terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum.<br>▪ Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi Baik Internal Maupun Eksternal.<br>▪ Optimalisi Peranan Tim Penegakan Perda Bersama Tim Terkait.<br>▪ Meningkatkan Penanganan Bencana (Tanggap Darurat).<br>▪ Meningkatkan Upaya Penyelesaian Sengketa Lahan. |
| | | ▪ Mengoptimalkan Upaya Pencegahan Konflik Sosial. | ▪ Meningkatkan Pendidikan Budaya Politik di Masyarakat dan Parpol.<br>▪ Memfasilitasi Semua Aktifitas Lembaga Kebudayaan dan Keagamaan untuk Berpartisipasi dalam Membangun Penguatan Toleransi dalam Kehidupan bermasyarakat.<br>▪ Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah Air.<br>▪ Mengoptimalkan Pengembangan dan Penataan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM. |
| | | ▪ Mendorong penguatan pengetahuan, sikap, dan praktek keagamaan masyarakat agar terbentuk masyarakat madani dan religius. | ▪ Meningkatkan Kualitas Kerukunan Beragama.<br>▪ Memfasilitasi Tokoh Agama dalam Meningkatkan Pengetahuan Keagamaan.<br>▪ Mewujudkan Satu Desa Satu Rumah Tahfidz.<br>▪ Mendorong Penguatan Pengetahuan, Sikap, dan Praktek Keagamaan Masyarakat agar Terbentuk Masyarakat Madani dan Religius. |
| 7 Meningkatnya daya saing pariwisata daerah melalui seni, budaya, dan religi | 7.1 Meningkatnya Seni, Budaya, dan Pariwisata (*Maju Seni, Budaya, dan Pariwisata*) | ▪ Meningkatkan daya saing pariwisata untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan. | ▪ Mengembangkan Obyek Daya Tarik Wisata Religi, *Sport Tourism* dan Wisata Alam Potensial.<br>▪ Peningkatan Aksesibilitas Khususnya Infrastruktur Jalan Menuju Objek dan Daya Tarik Wisata dan Jaringan Internet, Peningkatan Amenitas Higienes dan Sanitasi.<br>▪ Peningkatan Atraksi/Daya Tarik Wisata.<br>▪ Pengembangan Pemasaran (*Branding, Advertising Dan Selling*). |

| VISI : Sumsel Maju Untuk Semua | | | |
|---|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| | | | ▪ Pengembangan Kapasitas SDM, Diklat dan Sertifikasi Profesi serta Usaha Pariwisata. |
| | | ▪ Peningkatan Aset Budaya Lokal | ▪ Mengefektifkan Program Sriwijaya 2020.<br>▪ Revitalisasi Museum dan Aset Budaya Lokal.<br>▪ Reinventing Budaya Lokal dan Pengetahuan Lokal dalam Membangun Identitas Kultural Masyarakat.<br>▪ Mendorong Memajukan Bahasa Lokal sebagai Kekayaan Khas Budaya Sumatera Selatan.<br>▪ Membangun Akses Ruang-Ruang Kreatif, Seni dan Budaya yang Mampu Menciptakan Ruang Publik yang Berbudaya di Seluruh Wilayah Sumsel.<br>▪ Menjamin Kebebasan untuk Mengembangkan dan Mengekspresikan Seni Budaya Masing-Masing di Daerah Sumatera Selatan.<br>▪ Mendorong Budaya Lokal dan Pengetahuan Lokal Kedalam Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah-Sekolah sebagai Proses Pengembangan Budaya Lokal yang dapat Berkontribusi dalam Membangun Karakter Bangsa.<br>▪ Meningkatkan Kemampuan Peserta Melalui Pembinaan oleh Pelatih Qasidah. |
| | | ▪ Peningkatan publikasi hasil litbang dan inovasi. | ▪ Riset Berbasis Kebutuhan.<br>▪ Meningkatkan Kualitas SDM Peneliti.<br>▪ Melakukan Koordinasi dengan Pembuat Kebijakan dan Pelaku Bisnis.<br>▪ Meningkatkan Fungsi Intermediator Teknologi.<br>▪ Inventarisasi Permasalahan yang Membutuhkan Litbang dan Inovasi. |
| 8 Meningkatnya daya saing pemuda dan olahraga | 8.1 Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga (*Maju Pemuda dan Olahraga*) | ▪ Meningkatnya Prestasi Atlit. | ▪ Memanfaatkan Fasilitas Olahraga dan Pembinaan yang Berkelanjutan.<br>▪ Meningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Keolahragaan melalui Pelatihan maupun Kursus.<br>▪ Pemassalan Olahraga dikalangan Masyakarat. |

| VISI : Sumsel Maju Untuk Semua | | | |
|---|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| | | | |
| | | ▪ Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan (Akademis, Seni, Budaya, Olahraga dan Wirausaha Muda) | ▪ Mendorong Program-Program Kepemudaaan Yang Kreatif Dan Inovatif Di Berbagai Bidang.<br>▪ Mengembangan Sistem Penghargaan Terhadap Capaian Prestasi Pemuda Di Bidang Seni, Olahraga, Budaya, Dan Akademis.<br>▪ Meningkatkan Jumlah Kabupaten/Kota Layak Pemuda. |

Berdasarkan hasil perumusan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan atau tema tahunan pada periode tahun 2019-2023, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 6.2**

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

| ***Arah Kebijakan*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** |
| Perbaikan Infrastruktur dan Konektivitas untuk Pemerataan Pembangunan | Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan, Kualitas Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan publik yang Prima, Bersih, Bebas KKN | Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan | *Sumatera Selatan Maju untuk Semua* |

Untuk penjabaran program pembangunan daerah yang mengarah langsung pada perwujudan cita-cita daerah yang tertuang dalam visi dan misi tersaji dalam tabel berikut ini :

**Tabel 6.3**

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | **MISI I : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Tujuan 1 : Meningkatnya perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah** | **1. Indeks Ekonomi Inklusif** | **Indeks** | **5.41** | **5.50** | **5.60** | | **5.70** | | **5.80** | | **5.90** | | **6.00** | | **6.00** | | |
| | | | | **2. Nilai Sistem Inovasi Daerah (SIDa)** | **Nilai** | **4** | **2.93** | **3.5** | | **4** | | **4.5** | | **5** | | **5.5** | | **5.5** | | **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah** |
| | | **1.1** | **Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan (Maju Ekonomi Kerakyatan)** | **1. Pertumbuhan Ekonomi** | **%** | **5.51** | **6.04** | **5,6-5,9** | | **5,5-6,0** | | **5,5-6,1** | | **5,5-6,1** | | **5,5-6,1** | | **5,5-6,1** | | |
| | | | | **2. Pengeluaran Per Kapita** | **Rp. Ribu** | **10,220** | **n.a** | **10,552** | | **11,268** | | **11,831** | | **12,422** | | **13,044** | | **13,044** | | |
| | | | | **3. PDRB per Kapita (ADHB)** | **Rp. Ribu** | **46,421** | **49,209** | **50,490** | | **54,199** | | **57,077** | | **59,087** | | **62,067** | | **62,067** | | |
| | | | | **4. Rasio Gini** | **Rasio** | **0.365** | **0.341** | **0.355** | | **0.354** | | **0.353** | | **0.352** | | **0.350** | | **0.350** | | |
| | | | | **5. Inflasi** | **%** | **2.96** | **2,74** | **2 - 4** | | **2 - 4** | | **2 - 4** | | **2 - 4** | | **2 - 4** | | **2 - 4** | | |
| | | | | **6. Jumlah Kenaikan Wirausaha Baru** | **UKM** | **1,258** | **463** | **240** | | **700** | | **700** | | **700** | | **700** | | **4,761** | | **Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** |
| | | | | | | | | | **5,796** | | **11,437** | | **11,819** | | **12,178** | | **12,461** | | **53,691** | |
| | | | Program Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan Transmigrasi | Persentase usaha ekonomi yang berkembang | % | na | na | 40% | - | 45% | 422 | 50% | 500 | 55% | 550 | 60% | 575 | 60% | 2,047 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Jumlah UMKM naik kelas | UMK | 4,156 | 1,124 | 500 | 3,442 | 500 | 3,500 | 500 | 3,500 | 500 | 3,500 | 500 | 3,500 | 7,780 | 17,442 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Jumlah Koperasi Aktif | Koperasi | 4,699 | 55 | 100 | 50 | 100 | 1,200 | 100 | 1,200 | 100 | 1,200 | 100 | 1,200 | 5,254 | 4,850 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome*) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Perkuatan Permodalan UMKMK | Prosentase Pertumbuhan Modal Koperasi | % | 99.27% | 6.27% | 2% | 50 | 2% | 500 | 2% | 500 | 2% | 500 | 2% | 500 | 115.54% | 2,050 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | Program Peningkatan Pemasaran Hasil UMKMK | Prosentase Kenaikan omset UMKM | % | 4.48% | 17.43% | 1% | 50 | 10% | 1,000 | 10% | 1,000 | 10% | 1,000 | 10% | 1,000 | 62.91% | 4,050 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | Program Penguatan Pengawasan Koperasi | Jumlah Koperasi sehat | Koperasi | na | na | 20 | 50 | 200 | 1,200 | 200 | 1,200 | 200 | 1,200 | 200 | 1,200 | 820 | 4,850 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | Program Pengembangan Kewirausahaan | Jumlah Kenaikan Wirausaha Baru | UKM | 938 | 223 | na | - | 350 | 500 | 350 | 500 | 350 | 500 | 350 | 500 | 2,561 | 2,000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | Program Peningkatan Kegiatan Usaha UMKMK | Prosentase Kenaikan Volume Usaha Koperasi | % | 14.96% | 4.6% | 2% | - | 2% | 500 | 2% | 500 | 2% | 500 | 2% | 500 | 29.56% | 2,000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | Program Pengembangan Kemitraan | Jumlah perusahaan yang bermitra | MOU | na | na | na | - | 3 | 500 | 4 | 600 | 4 | 600 | 4 | 600 | 15 | 2,300 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | Program Pembangunan Bidang Ekonomi | Persentase Data Informasi Pembangunan Ekonomi yang Tersedia | % | 100% | 100% | 100% | 1,152 | 100% | 300 | 100% | 556 | 100% | 645 | 100% | 706 | 100% | 3,359 | Sekretariat Daerah (*Biro Perekonomian*) |
| | | | Program Peningkatan Kinerja BUMD | Persentase BUMD yang memberikan Kontribusi kepada PAD | % | 70% | 70% | 80% | - | 85% | 565 | 90% | 313 | 95% | 313 | 100% | 345 | 100% | 1,536 | Sekretariat Daerah (*Biro Perekonomian*) |
| | | | Program Litbang Bidang Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan | Jumlah Litbang bidang ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Hasil Litbang | 1 | 1 | - | - | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 200 | 1 | 650 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Inkubator Teknologi | Persentase pelaku usaha inovatif yang lulus | % | 100% | 100% | 100% | 177 | 100% | 200 | 100% | 250 | 100% | 350 | 100% | 400 | 100% | 1,377 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang Memenuhi THIS | % | na | na | 70.00 | 825 | 75 | 900 | 80.00 | 1,050 | 85.00 | 1,170 | 90.00 | 1,235 | 90.00 | 5,180 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | **1.2** | **Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan)** | **1. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan** | **%** | **6.55** | **5.51** | **5.60** | | **5.65** | | **5.72** | | **5.83** | | **5,91** | | **5,91** | | **Dinas Perindustrian** |
| | | | | **2. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran** | **%** | **7.69** | **8.09** | **9,4-9,6** | | **9,6-9,8** | | **9,8-10,0** | | **10,0-10,2** | | **10,2-10,4** | | **10,2-10,4** | | **Dinas Perdagangan** |
| | | | | **3. Realisasi PMA** | **Rp. Triliun** | **16.03** | **15.613** | **16.71** | | **17.88** | | **19.13** | | **20.47** | | **21.90** | | **21.90** | | **Dinas Penanaman Modal dan PTSP** |
| | | | | **4. Realisasi PMDN** | **Rp. Triliun** | **9.76** | **7.47** | **7.99** | | **8.55** | | **9.14** | | **9.79** | | **10.47** | | **10.47** | | **Dinas Penanaman Modal dan PTSP** |
| | | | | **5. Neraca Perdagangan** | **US$ juta** | **2,876** | **2,880** | **2,894** | | **2,909** | | **2,923** | | **2,938** | | **2,953** | | **2,953** | | **Dinas Perdagangan** |
| | | | | | | | | | **3,845** | | **20,040** | | **23,462** | | **29,632** | | **33,867** | | **110,375** | |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome*) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN | Rp. Trilyun | 25.79 | 23.08 | 24.70 | 210 | na | - | na | - | na | - | na | - | 24.70 | 210 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| | | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi | % | 10% | 10% | 7% | 220 | na | - | na | - | na | - | na | - | 7% | 220 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| | | | Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan Realisasi Investasi | Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN | Rp. Trilyun | 25.79 | 23.08 | 24.70 | - | 26.43 | 4,186 | 28.27 | 5,330 | 30.26 | 6,580 | 32.37 | 6,280 | 32.37 | 22,376 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| | | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Penanaman Modal | Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi | % | 10% | 10% | 7% | - | 7% | 839 | 7% | 930 | 7% | 1,285 | 7% | 1,518 | 7% | 4,572 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi | Jumlah Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi IKM | Unit Usaha | 12,000 | 12,830 | 13,215 | 200 | 13,611 | - | 14,020 | - | 14,440 | - | 14,873 | - | 14,873 | 200 | Dinas Perindustrian |
| | | | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Jumlah Unit Usaha (UU) IKM non formal menjadi IKM formal | Unit Usaha | 12,000 | 12,830 | 13,215 | 455 | 13,611 | 2,050 | 14,020 | 2,100 | 14,440 | 3,200 | 14,873 | 3,700 | 14,873 | 11,505 | Dinas Perindustrian |
| | | | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | Jumlah penerima bantuan peralatan; IKM yang difasilitasi peningkatan kemampuan teknologi | KUB | na | na | 5 | 140 | 10 | 4,000 | 15 | 4,200 | 15 | 4,900 | 25 | 6,000 | 70 | 19,240 | Dinas Perindustrian |
| | | | Program Pengembangan dan Pembinaan OVOP | Produk OVOP yang menjadi bintang tiga | Produk OVOP | 3 | 3 | 1 | 1,200 | 2 | 1,850 | 3 | 2,200 | 2 | 2,500 | 2 | 3,000 | 10 | 10,750 | Dinas Perindustrian |
| | | | Program Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Industri Daerah | Jumlah Perda RPIK kabupaten/kota yang diperdakan | Perda | 1 | 0 | 1 | 50 | 2 | 450 | 3 | 500 | 2 | 550 | 2 | 600 | 10 | 2,150 | Dinas Perindustrian |
| | | | Program Pengembangan Sentra IKM | Jumlah IKM di Sumatera Selatan yang dikembangkan | Sentra IKM | 33 | 35 | 1 | 150 | 1 | 625 | 1 | 800 | 1 | 1,000 | 1 | 1,500 | 5 | 4,075 | Dinas Perindustrian |
| | | | Program Pengembangan Perwilayahan Industri | Jumlah dokumen inisiasi pembentukan kawasan industri di Sumsel | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 550 | 1 | 1,000 | 1 | 1,300 | 1 | 1,500 | 5 | 4,450 | Dinas Perindustrian |
| | | | Program Peningkatan Kerjasama Pengembangan Industri | Bertambahnya Jumlah Industri Menengah Besar | Industri | 468 | 493 | 503 | 247 | 513 | 700 | 523 | 1,000 | 534 | 1,500 | 544 | 2,000 | 544 | 5,447 | Dinas Perindustrian |
| | | | Program Pengembangan Industri Kreatif | Persentase peningkatan industri kreatif sebesar 10% | % | na | na | 1% | - | 1,5% | 1,220 | 2% | 1,500 | 2,5% | 2,500 | 3% | 3,000 | 10% | 8,220 | Dinas Perindustrian |
| | | | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Persentase Penyelesaian Permasalahan Perselisihan Konsumen | % | 80% | 90% | 90% | 53 | 90% | 1,625 | 90% | 1,788 | 90% | 1,966 | 90% | 2,163 | 90% | 7,595 | Dinas Perdagangan |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome*) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | Persentase pertumbuhan ekspor | % | 1.53% | 2% | 2% | 200 | 2% | 1,365 | 2% | 1,502 | 2.4% | 1,652 | 2.5% | 1,817 | 2.5% | 6,535 | Dinas Perdagangan |
| | | | Program Sistem Informasi Pengembangan Kemitraan | Persentase data/informasi sektor perdagangan yang meningkat | % | na | na | 100% | 50 | 100% | 60 | 100% | 66 | 100% | 73 | 100% | 80 | 100% | 328 | Dinas Perdagangan |
| | | | Program Penguatan Sistem Logistik Daerah | Persentase Fluktuasi Perubahan harga kebutuhan 9 bahan pokok | % | < 10% | < 10% | < 10% | 170 | < 10% | 270 | < 10% | 297 | < 10% | 327 | < 10% | 359 | < 10% | 1,423 | Dinas Perdagangan |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang Memenuhi THIS | % | na | na | 70 | 400 | 75 | 100 | 80 | 100 | 85 | 100 | 90 | 100 | 90 | 328 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Litbang Bidang Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan | Jumlah Litbang bidang ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Hasil Litbang | 1 | 1 | - | - | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 200 | 1 | 250 | 4 | 750 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | **1.3** | **Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan (Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan)** | **1. Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian** | **%** | **1.77** | **2.16** | **4.27** | | **4.77** | | **5.27** | | **5.77** | | **6.27** | | **6.27** | | **Dinas Pertanian TPH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan** |
| | | | | **2. Nilai Tukar Petani (NTP)** | **%** | **95.05** | **93.62** | **95.55** | | **96.05** | | **98.70** | | **99.20** | | **100.10** | | **100.10** | | **Dinas Pertanian TPH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan** |
| | | | | **3. Nilai Tukar Nelayan (NTN)** | **%** | **101.50** | **102.00** | **102.30** | | **102.50** | | **102.80** | | **103.00** | | **103.30** | | **103.30** | | **Dinas Kelautan dan Perikanan** |
| | | | | **4. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)** | **%** | **98.96** | **99.46** | **99.96** | | **100.46** | | **100.96** | | **101.46** | | **101.96** | | **101.96** | | **Dinas Kelautan dan Perikanan** |
| | | | | | | | | | **158,820** | | **244,409** | | **282,856** | | **321,832** | | **340,533** | | **1,348,450** | |
| | | | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | | | | | | 1,050 | | 1,155 | | 1,271 | | 1,398 | | 1,537 | | 6,410 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | Produksi perikanan budidava | Ton | 428,500 | 436,800 | 460,000 | | 480,000 | | 500,000 | | 525,000 | | 545,000 | | 545,000 | | |
| | | | | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) | Nilai | na | 99.46 | 99.96 | | 100.46 | | 100.96 | | 101.46 | | 101.96 | | 101.96 | | |
| | | | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | | | | | | 1,160 | | 1,276 | | 1,404 | | 1,544 | | 1,698 | | 7,082 | Dinas Kelautan dan Perikanan |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome*) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | | Produksi perikanan tangkap | Ton | 190,100 | 96,678 | 197,000 | | 204,000 | | 212,000 | | 220,000 | | 228,000 | | 228,000 | | |
| | | | | Nilai Tukar Nelayan/NTN | Nilai | 101.50 | 102.00 | 102.30 | | 102.50 | | 102.80 | | 103.00 | | 103 | | 103 | | |
| | | | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | | | | | | 1,241 | | 2,731 | | 3,004 | | 3,305 | | 3,635 | | 13,916 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | Volume ekspor produk kelautan dan perikanan | Ton | 1,001.89 | 1,150.00 | 1,850.00 | | 2,000.00 | | 2,250.00 | | 2,400.00 | | 2,500.00 | | 2,500.00 | | |
| | | | | Konsumsi ikan | Kg/ Kapita/ Tahun | 40.04 | 40.50 | 42.00 | | 42.50 | | 43.00 | | 43.50 | | 44.00 | | 44.00 | | |
| | | | | Produk olahan kelautan dan perikanan | Ton | 209,450 | 252,679 | 290,581 | | 334,168 | | 384,293 | | 441,937 | | 508,228 | | 508,228 | | |
| | | | Program Pengembangan Budidaya Air Laut dan Payau | Produksi Benur dan Nener | Ekor | na | na | 8,000,000 | 12,193 | 17,000,000 | 13,212 | 26,000,000 | 14,289 | 35,000,000 | 16,029 | 44,000,000 | 17,652 | 44,000,000 | 73,375 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | Program Optimalisasi LPPMHP | | | | | | 667 | | - | | - | | - | | - | | 667 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | Jumlah Sampel yang Teruji | Sampel | na | na | 100 | | na | | na | | na | | na | | na | | |
| | | | | Penerbitan Sertifikasi Produk Hasil Perikanan | Sertifikat | na | na | 2 | | na | | na | | na | | na | | na | | |
| | | | Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan | | | | | | 2,350 | | - | | - | | - | | - | | 2,350 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | Jumlah Orang yang dibina dalam rangka penurunan ilegal fishing | Orang | na | na | 200 | | na | | na | | na | | na | | na | | |
| | | | | Luas kawasan konservasi | Ha | na | na | 1,000 | | na | | na | | na | | na | | na | | |
| | | | Program Pengembangan Pelabuhan Perikanan | Jumlah kapal nelayan yang dilayani | Kapal | na | na | 450 | 350 | 500 | 385 | 600 | 424 | 700 | 466 | 800 | 512 | 800 | 2,137 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan | | | | | | - | | 6,925 | | 5,850 | | 4,625 | | 6,625 | | 24,025 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | Jumlah Orang yang dibina dalam rangka penurunan *illegal fishing* | Orang | na | na | 200 | | 220 | | 240 | | 260 | | 280 | | 1,200 | | |
| | | | | Luas kawasan konservasi | Ha | na | na | 1,000 | | 1,100 | | 1,200 | | 1,500 | | 1,617 | | 1,617 | | |
| | | | Program Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) | | | | | | - | | 934 | | 1,057 | | 1,187 | | 1,427 | | 4,605 | Dinas Kelautan dan Perikanan |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | | Jumlah Sampel yang Teruji | Sampel | na | na | 100 | | 110 | | 115 | | 120 | | 125 | | 125 | | |
| | | | | Penerbitan Sertifikasi Produk Hasil Perikanan | Sertifikat | na | na | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 6 | | |
| | | | Program Peningkatan Sistem Distribusi dan Harga Pangan | Cadangan Pangan Daerah (Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat (beras)) | Ton | 498 | 539 | 818 | 600 | 827 | 800 | 835 | 1,075 | 843 | 1,250 | 852 | 1,800 | 852 | 5,525 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | | Koefisien Varian (CV) Harga Pangan Strategis | % | ≤ 15% | ≤ 15% | ≤ 15% | 100 | ≤ 15% | 400 | ≤ 15% | 450 | ≤ 15% | 500 | ≤ 15% | 600 | ≤ 15% | 2,050 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan | | | | | | 1,500 | | - | | - | | - | | - | | 1,500 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | | Ketersediaan Energi untuk konsumsi | Kkal/ kap/ hr | 2075 | 2124 | 2400 | | na | | na | | na | | na | | 2400 | | |
| | | | | Ketersediaan Protein untuk di konsumsi | Gram/ kap/hr | 61 | 62 | 63 | | na | | na | | na | | na | | 63 | | |
| | | | | Jumlah Pemberdayaan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Petani Pangan | Orang | na | na | 4,000 | | na | | na | | na | | na | | 4,000 | | |
| | | | | Jumlah KK yang dibantu yang dibantu (Rawan Pangan) | Kepala Keluarga | na | 450 | 100 | | na | | na | | na | | na | | 100 | | |
| | | | Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar | | | | | | 1,150 | | 3,050 | | 4,350 | | 4,950 | | 5,800 | | 19,300 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | | Pola Pangan Harapan | Skor | 92.2 | 93.4 | 94.5 | | 95.6 | | 96.7 | | 97.8 | | 98.9 | | 98.9 | | |
| | | | | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Beredar Aman dan Bermutu | % | 100% | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | | | Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Bersertifikat | Sertifikat/ Registrasi | 77 | 153 | 178 | | 203 | | 228 | | 263 | | 288 | | 288 | | |
| | | | | Jumlah KK yang dibantu yang dibantu (Rawan Pangan) | Kepala Keluarga | na | 450 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Pencegahan Penangulangan Penyakit Ternak | | | | | | 500 | | 1,920 | | 2,190 | | 2,400 | | 3,250 | | 10,260 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | | Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Ternak | % | 2.4% | 2.5% | 2.8% | | 5.0% | | 5.0% | | 5.0% | | 5.0% | | 5.0% | | |
| | | | | Jumlah Peternakan yang Ikut Asuransi Ternak Sapi | Ekor | na | 4,000 | 5,000 | | 6,000 | | 7,000 | | 8,000 | | 10,000 | | 36,000 | | |
| | | | Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Ketahanan Pangan | Dokumen | 4 | 3 | 3 | 302 | 3 | 350 | 3 | 400 | 3 | 450 | 4 | 600 | 4 | 2,102 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | | | | | | 2,050 | | 3,150 | | 4,000 | | 3,500 | | 4,500 | | 17,200 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | | Produksi Daging | Ton | 76,519 | 82,315 | 86,431 | | 90,752 | | 95,290 | | 100,054 | | 105,057 | | 105,057 | | |
| | | | | Produksi Telur | Ton | 71,304 | 90,316 | 94,832 | | 99,573 | | 104,552 | | 109,780 | | 115,269 | | 115,269 | | |
| | | | | Produksi Susu | Liter | 118,931 | 127,208 | 133,569 | | 140,247 | | 147,259 | | 154,622 | | 162,354 | | 162,354 | | |
| | | | | Jumlah KK Miskin yang dibantu | Kepala Keluarga | na | 159 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | | | | | | 250 | | - | | - | | - | | - | | 250 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | | Jumlah Promosi Hasil Peternakan | kali | 2 | 2 | 2 | | na | | na | | na | | na | | 2 | | |
| | | | | Jumlah Peternakan yang Ikut Asuransi Ternak Sapi | Ekor | 0 | 4,000 | 5,000 | | na | | na | | na | | na | | 5,000 | | |
| | | | Program Pengembangan Informasi dan Statistik Peternakan | Jumlah Dokumen Data Statistik Peternakan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 150 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 250 | 1 | 900 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan | Jumlah Sentra Peternakan Rakyat yang menggunakan Teknologi Peternakan | Kabupaten | 6 | 6 | 6 | 50 | 8 | 1,500 | 8 | 2,000 | 8 | 2,000 | 8 | 2,000 | 8 | 7,550 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | Program Peningkatan Ketersedian Pangan | | | | | | - | | 150 | | 200 | | 300 | | 400 | | 1,050 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | | Ketersediaan Energi Untuk di Konsumsi | Kkal/kap/ hr | 2,075 | 2,124 | 2,400 | | 2,400 | | 2,400 | | 2,400 | | 2,400 | | 2,400 | | |
| | | | | Ketersediaan Protein untuk di Konsumsi | Gram/ kap/hr | 61 | 62 | 63 | | 63 | | 63 | | 63 | | 63 | | 63 | | |
| | | | Program Peningkatan Sumber Daya Pangan | Jumlah Pemberdayaan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Petani Pangan | Orang | na | na | 4,000 | - | 1,000 | 2,500 | 4,000 | 1,500 | 4,000 | 1,500 | 4,000 | 1,500 | 4,000 | 7,000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | Program Pengembangan Informasi dan Statistik Ketahanan Pangan | Jumlah Dokumen Data Statistik Ketahanan Pangan | Dokumen | na | na | na | - | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 700 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome*) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pangan | Jumlah penyediaan sarana dan perbaikan prasarana UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan | Paket<br>Unit | na<br>na | na<br>na | na<br>na | - | 2<br>4 | 2,500 | 3<br>5 | 6,000 | 2<br>3 | 3,000 | 2<br>4 | 4,000 | 9<br>16 | 15,500 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | Program Peningkatan Promosi Hasil Produksi Peternakan | Jumlah Promosi Hasil Peternakan | Kali | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 300 | 3 | 400 | 4 | 500 | 5 | 750 | 5 | 1,950 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | Program Perencanaan dan Monev Peternakan | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Peternakan | Dokumen | na | na | na | - | 3 | 250 | 2 | 250 | 2 | 300 | 2 | 400 | 2 | 1,200 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan | Jumlah penyediaan sarana dan perbaikan prasarana UPT Balai Pembibitan dan HPT Sembawa | Paket<br>Unit | na<br>na | na<br>na | 3<br>5 | - | 2<br>3 | 1,500 | 3<br>2 | 3,000 | 3<br>2 | 3,000 | 3<br>2 | 3,000 | 14<br>14 | 10,500 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan | Jumlah Produksi hasil perkebunan | Ton | 4,938,827 | 4,939,500 | 4,950,000 | 950 | 4,960,000 | 42,662 | 4,970,000 | 49,031 | 4,980,000 | 53,031 | 4,990,000 | 58,911 | 4,990,000 | 204,585 | Dinas Perkebunan |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan | Persentase peningkatan sarana dan prasaraan perkebunan | % | 5% | 5% | 5% | 80 | 5% | 6,700 | 5% | 6,950 | 5% | 7,300 | 5% | 7,200 | 5% | 28,230 | Dinas Perkebunan |
| | | | Program Pengembangan Perbenihan Perkebunan | Jumlah Benih Unggul yang beredar | Batang | 30,672,655 | 36,000,000 | 37,000,000 | 100 | 38,000,000 | 600 | 39,000,000 | 600 | 39,000,000 | 600 | 40,000,000 | 600 | 193,000,000 | 2,500 | Dinas Perkebunan |
| | | | Program Proteksi Tanaman Perkebunan | Jumlah serangan OPT yang dikendalikan | Ha | 100 | 2,750 | 2,800 | 1,605 | 2,850 | 2,700 | 2,900 | 2,850 | 2,950 | 2,850 | 3,000 | 2,850 | 14,500 | 12,855 | Dinas Perkebunan |
| | | | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan/P2HP | Persentase Petani yang tergabung dalam pengolahan pemasaran bersama | % | 5.4% | 5.6% | 5.9% | 75 | 6.1% | 11,515 | 6.3% | 11,300 | 6.5% | 11,300 | 6.7% | 11,300 | 6.7% | 45,490 | Dinas Perkebunan |
| | | | Program Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan/PKUP | Jumlah usaha perkebunan serta peningkatan kelembagaan unit usaha perkebunan yang terawasi | Unit | 228 | 229 | 230 | 75 | 230 | 1,450 | 230 | 2,950 | 230 | 3,000 | 230 | 3,000 | 230 | 10,475 | Dinas Perkebunan |
| | | | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Luas Area Pertanian yang Dialiri Irigasi, Sistem Tata Air Rawa dan Jaringan pengairan Lainnya | Ha | 23,673 | 25,776 | 28,795 | 83,946 | na | - | na | - | na | - | na | - | na | 83,946 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome*) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Jumlah pemenuhan kebutuhan tampungan air dan penyediaan air baku | Tampungan Air Baku | 28 | 28 | 30 | 28,706 | 32 | 20,000 | 36 | 42,000 | 42 | 60,000 | 48 | 60,000 | 48 | 210,706 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | | | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Permukaaan | Luas daerah irigasi permukaan yang terairi | Ha | 23,673 | 25,776 | na | - | 30,595 | 21,600 | 32,095 | 18,000 | 33,595 | 18,000 | 35,095 | 18,000 | 35,095 | 75,600 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | | | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa (DIR) | Luas daerah irigasi rawa yang terairi | Ha | na | na | na | - | 8,700 | 30,000 | 11,700 | 30,000 | 17,400 | 57,000 | 23,100 | 57,000 | 23,100 | 174,000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | | | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Partisipatif (IPDMIP) | Luas daerah irigasi secara partisipatif yang terairi | Ha | na | na | 2,009 | - | 4,209 | 26,400 | 6,446 | 27,034 | 7,646 | 13,200 | 8,846 | 13,200 | 8,846 | 79,834 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | | | Program Peningkatan Luas Lahan Siap Tanam | Peningkatan Luas Lahan Siap Tanam : | | | | | 1,075 | | 3,000 | | 4,000 | | 5,000 | | 6,000 | | 19,075 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | | | - Padi | Ha | 11,920 | 785 | 1,538 | | 1,688 | | 1,838 | | 1,988 | | 2,127 | | 9,179 | | |
| | | | | - Jagung | Ha | 8,171 | 1,072 | 225 | | 300 | | 375 | | 450 | | 1,650 | | 3,000 | | |
| | | | | - Kedelai | Ha | 1,343 | 880 | 23 | | 26 | | 29 | | 32 | | 122 | | 232 | | |
| | | | | - Cabe | Ha | | 3,846 | 70 | | 70 | | 77 | | 84 | | 321 | | 622 | | |
| | | | | - Bawang Merah | Ha | | 193 | 20 | | 15 | | 17 | | 18 | | 69 | | 139 | | |
| | | | Program Penerapan Teknologi Tanaman Pangan | Peningkatan Luas Tanam Tanaman Pangan : | | | | | 3,585 | | 4,500 | | 5,500 | | 6,500 | | 7,500 | | 27,585 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | | | - Padi | Ha | 79,465 | 5,236 | 10,250 | | - | | - | | - | | - | | 10,250 | | |
| | | | | - Jagung | Ha | 54,475 | 7,144 | 1,500 | | - | | - | | - | | - | | 1,500 | | |
| | | | | - Kedelai | Ha | 8,953 | 5,865 | 150 | | - | | - | | - | | - | | 150 | | |
| | | | | Luas Layanan Keberlanjutan Budidaya Tanaman Pangan : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - Padi | Ha | | | | | 10,526 | | 11,579 | | 12,632 | | 13,684 | | 48,821 | | |
| | | | | - Jagung | Ha | | | | | 2,000 | | 2,500 | | 3,000 | | 3,500 | | 11,000 | | |
| | | | | - Kedelai | Ha | | | | | 170 | | 190 | | 210 | | 230 | | 800 | | |
| | | | Program Penerapan Teknologi Tanaman Hortikultura | Peningkatan Luas Tanam Tanaman Hortikultura : | | | | | 8,729 | | 9,425 | | 10,005 | | 10,505 | | 11,505 | | 50,169 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | | | - Cabe | Ha | 39 | 60 | 65 | | - | | - | | - | | - | | 65 | | |
| | | | | - Bawang Merah | Ha | 10 | 12 | 14 | | - | | - | | - | | - | | 14 | | |
| | | | | - Jeruk | Ha | 25 | 30 | 34 | | - | | - | | - | | - | | 34 | | |
| | | | | - Duku | Ha | 40 | 50 | 55 | | - | | - | | - | | - | | 55 | | |
| | | | | - Durian | Ha | 50 | 59 | 69 | | - | | - | | - | | - | | 69 | | |
| | | | | - Nanas | Ha | 18 | 21 | 25 | | - | | - | | - | | - | | 25 | | |
| | | | | Luas Layanan Keberlanjutan Budidaya Tanaman Hortikultura : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - Cabe | Ha | na | na | na | | 10 | | 11 | | 11 | | 11 | | 65 | | |
| | | | | - Bawang Merah | Ha | na | na | na | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 65 | | |
| | | | | - Jeruk | Ha | na | na | na | | 19 | | 49 | | 59 | | 79 | | 65 | | |
| | | | | - Duku | Ha | na | na | na | | - | | - | | - | | - | | 65 | | |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | | - Durian | Ha | na | na | na | | - | | - | | - | | - | | 65 | | |
| | | | | - Nanas | Ha | na | na | na | | - | | - | | - | | | | 65 | | |
| | | | | Jumlah rumah tangga yang mengembangkan tanaman obat | Rumah Tangga | na | na | na | | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 65 | | |
| | | | Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Pertanian | | | | | | 1,036 | | 2,000 | | 3,235 | | 4,505 | | 5,395 | | 16,171 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | | | Jumlah Kelembagaan Penyuluh Pertanian yang meningkatkan kapasitasnya | Unit | 2 | 2 | 6 | | 15 | | 17 | | 17 | | 20 | | 75 | | |
| | | | | Jumlah Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya | Unit | 1 | 5 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 450 | | |
| | | | | Jumlah kemitraan usaha tani | Unit | 2 | 2 | 10 | | 15 | | 15 | | 15 | | 20 | | 75 | | |
| | | | Program Ketersediaan Sarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura | Luas Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | | | - | | 11,575 | | 11,995 | | 12,495 | | 13,495 | | 49,560 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | | | - Padi | Ha | na | na | na | | 1,579 | | 1,600 | | 1,600 | | 2,000 | | 6,779 | | |
| | | | | - Jagung | Ha | na | na | na | | 300 | | 310 | | 310 | | 375 | | 1,295 | | |
| | | | | - Kedelai | Ha | na | na | na | | 45 | | 67 | | 67 | | 67 | | 246 | - | |
| | | | | - Cabe | Ha | na | na | na | | 30 | | 30 | | 32 | | 32 | | 124 | - | |
| | | | | - Bawang Merah | Ha | na | na | na | | 10 | | 10 | | 12 | | 12 | | 44 | - | |
| | | | | - Jeruk | Ha | na | na | na | | 25 | | 35 | | 35 | | 35 | | 130 | - | |
| | | | | - Duku | Ha | na | na | na | | - | | - | | - | | - | | - | - | |
| | | | | - Durian | Ha | na | na | na | | - | | - | | - | | - | | - | - | |
| | | | | - Nanas | Ha | na | na | na | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| | | | Program Peningkatan Produksi dan Pelayanan Usahatani melalui *Integrated Participatory Development of Irrigation Project* (IPDMIP) | Jumlah Produksi Benih F4 yang bisa diakses oleh petani | Ton | 0 | 0 | 55 | 1,205 | 114 | 2,529 | 114 | 1,893 | 57 | 1,673 | | | 340 | 7,300 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | | Program Litbang bidang Pertanian | Jumlah Litbang Bidang Pertanian | Hasil Litbang | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 180 | 2 | 200 | 2 | 250 | 2 | 300 | 8 | 930 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Pelayanan Teknologi Science Techno Park | Jumlah Teknologi yang diseminasikan | Hasil Litbang | 1 | 1 | 1 | 350 | 1 | 335 | 1 | 400 | 2 | 450 | 2 | 550 | 7 | 2,085 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang Memenuhi THIS | % | na | na | 70 | 100 | 75 | 350 | 80 | 100 | 85 | 100 | 90 | 100 | 90 | 750 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terintegrasi Berbasis Partisipasi Masyarakat/ *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) | Persentase Capaian Pembangunan Sistem Irigasi yang Melibatkan Masyarakat | % | na | na | 80% | 1,590 | na | - | na | - | na | - | na | - | 70% | 1,590 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat | Persentase Perencanaan partisipatif yang Memenuhi THIS | % | na | na | na | - | 75% | 1,600 | 80% | 1,350 | 85% | 1,470 | 90% | 1,490 | 90% | 5,910 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | **1.4** | **Menurunnya Pengangguran dan Kemiskinan (Maju Kesejahteraan Masyarakat)** | **1. Angka Kemiskinan** | **%** | **13.10** | **12.82** | **12.52** | | **10,00-11,65** | | **9,9-10,78** | | **9,6-9,91** | | **9,2-9,5** | | **9,2-9,5** | | **Dinas Sosial** |
| | | | | **2. Tingkat Pengangguran Terbuka** | **%** | **4.39** | **4.23** | **4.12** | | **4.01** | | **3.87** | | **3.75** | | **3.62** | | **3.62** | | **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** |
| | | | | **3. Persentase Pekerja Tidak Penuh (< 35 jam/minggu)** | **%** | **34.95** | **36.92** | **35.68** | | **34.76** | | **33.84** | | **32.91** | | **31.99** | | **31.99** | | **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** |
| | | | | | | | | | **29,184** | | **121,651** | | **211,956** | | **215,114** | | **276,509** | | **854,414** | |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan | Persentase masyarakat yang terlibat dalam organisasi dan lembaga masyarakat | % | 90% | 90% | 95% | 1,690 | na | - | na | - | na | - | na | - | 95% | 1,690 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| | | | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/ Kelurahan | Persentase masyarakat yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa | % | 90% | 90% | 95% | 2,659 | 95% | 850 | 95% | 935 | 95% | 980 | 95% | 1,024 | 95% | 6,448 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| | | | Program Peningkatan Kelembagaan masyarakat dan Pemerintahan desa | Persentase lembaga masyarakat yang diberdayakan | % | 90% | 90% | 95% | - | 95% | 7,955 | 95% | 8,713 | 95% | 9,543 | 95% | 10,497 | 95% | 36,707 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| | | | Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | Persentase Kader PKK Aktif | % | 0.15% | 0.15% | na | - | 0.25% | 1,709 | 0.30% | 1,880 | 0.35% | 2,068 | 0.40% | 2,275 | 0.40% | 7,931 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| | | | Program Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan Kemiskinan di desa tertinggal dan sangat tertinggal | | | | | | - | | 1,800 | | 1,847 | | 1,893 | | 1,929 | | 7,469 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | | Jumlah desa tertinggal di Sumatera Selatan yang diberdavakan | Desa | 1,644 | 1,644 | na | | 1,634 | | 1,622 | | 1,607 | | 1,592 | | 1,592 | | |
| | | | | Jumlah desa sangat tertinggal di Sumatera Selatan yang diberdayakan | Desa | 176 | 176 | na | | 167 | | 155 | | 140 | | 125 | | 125 | | |
| | | | Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | | | | - | | 9,000 | | 10,000 | | 11,000 | | 11,500 | | 41,500 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | | | Jumlah Rumah Tangga miskin yang melakukan usahatani Tanaman Pangan | Rumah Tangga Miskin | na | na | na | | 1,736 | | 2,140 | | 2,300 | | 2,300 | | 8,476 | | |
| | | | | Jumlah Rumah Tangga miskin yang melakukan usaha tani Hortikultura | Rumah Tangga Miskin | na | na | na | | 2,500 | | 3,000 | | 4,312 | | 5,000 | | 14,812 | | |
| | | | Program Bedah Kemiskinan Bidang Perkebunan | Jumlah RTM Perkebunan yang diberikan bantuan | Orang | na | na | na | - | 500 | 790 | 500 | 790 | 500 | 790 | 500 | 790 | 2,000 | 3,158 | Dinas Perkebunan |
| | | | Program Penanganan Daerah Rawan Pangan Melalui Pendekatan Keluarga Miskin | Jumlah KK yang dibantu yang dibantu (Rawan Pangan) | Kepala Keluarga | na | 450 | 100 | - | 1,200 | 1,950 | 1,350 | 3,000 | 1,450 | 3,500 | 1,500 | 4,000 | 5,600 | 12,450 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Bidang Peternakan | Jumlah KK Miskin yang dibantu | Kepala Keluarga | na | 159 | 100 | - | 500 | 1,500 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 4,500 | 1,500 | 5,000 | 4,100 | 15,000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | Program Pengembangan Perikanan untuk Masyarakat Miskin | Jumlah Masyarakat Miskin yang dibantu | Orang | na | na | na | - | 200 | 4,000 | 220 | 4,400 | 242 | 4,840 | 266 | 5,324 | 266 | 18,564 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | Program Pengembangan Air Minum Layak Bagi Keluarga Miskin | Persentase rumah tangga Miskin Dengan Akses Air Minum Layak | % | na | na | na | - | 2.43% | 7,350 | 4.22% | 26,208 | 6.32% | 28,828 | 6.85% | 34,594 | 6.85% | 96,980 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | Program Pengembangan Sanitasi Layak Bagi Keluarga Miskin | Persentase rumah tangga Miskin Dengan Akses Sanitasi Layak | % | na | na | na | - | 18.77% | 7,650 | 19.71% | 13,226 | 20.65% | 19,575 | 21.73% | 23,490 | 21.73% | 63,942 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | Program Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Bagi Keluarga Miskin | Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman Bagi Keluarga Miskin yang Tertata | Ha | na | na | na | - | 396.70 | 7,576 | 423.14 | 11,364 | 449.57 | 16,108 | 476.01 | 18,813 | 476.01 | 53,860 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | Program Pengembangan Kewirausahaan Bagi Warga Miskin | Jumlah Kenaikan Wirausaha Baru | UKM | 320 | 240 | 240 | 600 | 350 | 1,700 | 350 | 1,700 | 350 | 1,700 | 350 | 1,700 | 2,200 | 7,400 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome*) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan Sarana/Prasarana Perdagangan bagi Warga Miskin | Jumlah sarana dan prasarana Perdagangan | Unit | 340 | na | na | - | 350 | 655 | 350 | 721 | 350 | 793 | 350 | 872 | 1,740 | 3,040 | Dinas Perdagangan |
| | | | Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM Bagi Kelompok Masyarakat Miskin | Jumlah Peningkatan Unit Usaha (UU) IKM non formal menjadi IKM formal bagi kelompok masyarakat miskin | Unit Usaha | na | na | na | - | 5 | 600 | 5 | 650 | 5 | 700 | 5 | 900 | 20 | 2,850 | Dinas Perindustrian |
| | | | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Persentase Keluarga Miskin dan kelompok rentan yang meningkat produktivitas sosial ekonominya | % | 1.500 jiwa (0,073%) | 168 jiwa (0,008%) | 8.000 jiwa (0,39%) | 12,046 | na | - | na | - | na | - | na | - | na | 12,046 | Dinas Sosial |
| | | | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase Korban Bencana dan Kelompok Rentan yang meningkat kemampuan Bertahan | Orang | 600 | 600 | 500 | 75 | na | - | na | - | na | - | na | - | 500 | 75 | Dinas Sosial |
| | | | Program Penanganan Kemiskinan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Melalui Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)/KUBE dan Rumah Tidak Layak Huni | | | | | | - | | 18,914 | | 62,564 | | 42,600 | | 75,475 | | 199,553 | Dinas Sosial |
| | | | | Persentase Keluarga Miskin dan kelompok rentan yang meningkat produktivitas sosial ekonominya | % | 1.500 jiwa (0,073%) | 168 jiwa (0,008%) | 8.000 jiwa (0,39%) | | 12.000 jiwa (0,59%) | | 28.400 jiwa (1,39%) | | 21.200 jiwa (1,04%) | | 38.400 jiwa (1,89) | | 38.400 jiwa (1,89) | |
| | | | | Persentase Keluarga Miskin dan kelompok rentan yang meningkat kualitas lingkungan rumah tinggal | % | 160 jiwa (0,008%) | 168 jiwa (0,008%) | na | | 240 jiwa (0,012%) | | 4.800 jiwa (0,23%) | | 3.200 jiwa (0,15%) | | 6.400 jiwa (0,31%) | | 6.400 jiwa (0,31%) | |
| | | | Program Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial | | | | | | 5,353 | | 9,510 | | 17,318 | | 17,107 | | 17,313 | | 66,602 | Dinas Sosial |
| | | | | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya melalui pelayanan dan rehabilitasi dalam panti | % | 1.206 jiwa (0,20%) | 720 jiwa (0,12%) | 650 jiwa (0,093%) | | 872 jiwa (0,16%) | | 3.120 jiwa (0,59%) | | 3.410 jiwa (0,64%) | | 3.715 jiwa (0,69%) | | 3.715 jiwa (0,69%) | |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome*) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | | Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya | % | 600 jiwa (100%) | 600 jiwa (100%) | 500 jiwa (100%) | | 2.051 jiwa | | 2.066 jiwa | | 2.370 jiwa | | 2.520 jiwa | | 2.520 jiwa | | |
| | | | Program Pendataan, Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN/KIS dan PMKS Lainnya | Tersedianya Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN/KIS dan PMKS Lainnya yang Valid dan Akuntabel Kabupaten/Kota | Kabupaten/ Kota | na | na | 17 | 1,981 | 17 | 2,000 | 17 | 2,000 | 17 | 2,000 | 17 | 2,300 | 17 | 10,281 | Dinas Sosial |
| | | | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | | | | | | - | | 989 | | 1,698 | | 1,739 | | 2,084 | | 6,509 | Dinas Sosial |
| | | | | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | % | 228 orang (14,99%) | na | na | | 236 orang (15,18%) | | 236 orang (15,18%) | | 236 orang (15,18%) | | 236 orang (15,18%) | | 236 orang (15,18%) | | |
| | | | | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | % | 51 lembaga (1,38%) | na | 60 lembaga (1,62%) | | 60 lembaga (1,62%) | | 60 lembaga (1,62%) | | 60 lembaga (1,62%) | | 60 lembaga (1,62%) | | 60 lembaga (1,62%) | | |
| | | | Program Pengembangan Perpustakaan di Desa Kantong Kemiskinan | Persentase pengembangan perpustakaan desa di kantong kemiskinan | % | 14.25% | 14.52% | na | - | 14.89% | 665 | 15.14% | 965 | 15.39% | 1,050 | 15.79% | 1,050 | 15.79% | 3,730 | Dinas Perpustakaan |
| | | | Program Pemberdayaan Perempuan untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin | Persentase perempuan keluarga miskin yang mengalami peningkatan ekonomi | % | na | 40% | na | - | na | 450 | 25% | 500 | 20% | 500 | 16.67% | 600 | 16.67% | 2,050 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Program Pendidikan Menengah Khusus Siswa miskin | Jumlah siswa miskin yang menerima bantuan pendidikan | Siswa | 303 | 299 | na | - | 300 | 11,423 | 300 | 12,924 | 300 | 17,501 | 300 | 26,456 | 1,200 | 68,303 | Dinas Pendidikan |
| | | | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda di Kantong Kemiskinan | Jumlah Wirausaha Muda Baru di Kantong Kemiskinan | Orang | na | 40 | 25 | - | 150 | 1,000 | 250 | 1,000 | 250 | 1,000 | 250 | 1,200 | 925 | 4,200 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja yang dilatih dan ditempatkan | % | 40% | 45% | 50% | 91 | 60% | 2,705 | 65% | 2,712 | 70% | 2,300 | 75% | 2,630 | 75% | 10,438 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Persentase tenaga kerja yang diserap | % | 30% | 35% | 50% | 230 | 55% | 4,781 | 60% | 4,790 | 65% | 4,900 | 70% | 5,200 | 70% | 19,901 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Persentase buruh yang terlindungi | % | 35.87% | na | 39.25% | 380 | 42.22% | 4,080 | 47.35% | 4,120 | 50.52% | 4,300 | 55.35% | 4,875 | 55.35% | 17,755 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | Program Peningkatan Kesempatan Kerja Untuk Warga Miskin | Persentase laju penduduk miskin yang bekerja | % | na | na | 50% | - | 60% | 4,450 | 65% | 5,000 | 70% | 5,800 | 75% | 6,450 | 75% | 21,700 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan | % | 100% | 100% | 100% | 3,259 | 100% | 3,621 | 100% | 4,533 | 100% | 4,986 | 100% | 5,485 | 100% | 21,883 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Peninkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Percepatan Penurunan Kemiskinan | Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang Penanggulangan Kemiskinan yang Memenuhi THIS | % | na | na | 70 | 720 | 75 | 580 | 80 | 700 | 85 | 815 | 90 | 885 | 90 | 3,700 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Litbang Bidang Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan | Jumlah Litbang bidang ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Hasil Litbang | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 200 | 2 | 250 | 2 | 250 | 3 | 300 | 10 | 1,100 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Inkubator Teknologi | Persentase pelaku usaha inovatif yang lulus | % | 100% | 100% | 0 | - | 100% | 150 | 100% | 200 | 100% | 200 | 100% | 250 | 100% | 800 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Pengembangan Desa Inovasi | Jumlah Desa Inovasi | Desa | na | na | - | - | 17 | 1,050 | 17 | 1,250 | 17 | 1,250 | 17 | 1,250 | 68 | 4,800 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | **1.5** | **Meningkatnya Akses Energi (Maju Akses Energi)** | **Rasio Desa Berlistrik** | **%** | **97.13** | **97.75** | **98.48** | | **99.21** | | **99.95** | | **100.00** | | **100.00** | | **100.00** | | **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral** |
| | | | | | | | | | **515** | | **9,250** | | **10,552** | | **10,680** | | **12,380** | | **43,377** | |
| | | | Program Penguatan Akses Kelistrikan Daerah | Jumlah Desa Baru Berlistrik | Desa | 96 | 60 | 11 | 100 | 13 | 1,400 | 12 | 5,800 | 12 | 5,800 | 12 | 500 | - | 13,600 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | Program Pemanfaatan dan Pengembangan EBT | Meningkatnya persentase pemanfaatan EBT menjadi 20% pada tahun 2018 | % | na | na | 89% | 100 | na | - | na | - | na | - | na | - | 89% | 100 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | Program Pemanfaatan dan Pengembangan Energi | Persentase penurunan pemanfaatan energi primer | % | na | na | na | - | 87% | 1,880 | 86% | 650 | 84% | 650 | 82% | 7,900 | 82% | 11,080 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | Program Peningkatan Penerimaan Sektor ESDM | Jumlah penerimaan sektor ESDM | Milyar | 663.51 | 505.54 | 150 | 150 | 500 | 3,900 | 500 | 1,250 | 500 | 1,250 | 500 | 1,250 | 2,150 | 7,800 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | Program Pembinaan dan Pengusahaan Minerba | Persentase wilayah pertambangan yang sesuai dengan tata ruang | % | na | na | 10% | 50 | 15% | 770 | 15% | 1,172 | 20% | 1,200 | 20% | 1,050 | 20% | 4,242 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Minerba | Persentase pengawasan oleh Inspektur tambang | % | na | na | 5% | 115 | 25% | 900 | 50% | 1,380 | 75% | 1,480 | 100% | 1,380 | 100% | 5,255 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome*) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang memenuhi THIS | % | na | na | 70 | - | 75 | 150 | 80 | - | 85 | - | 90 | - | 90 | 150 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Litbang Bidang Energi | Jumlah Litbang bidang energi | Hasil Litbang | 0 | 0 | - | - | 1 | 250 | 2 | 300 | 2 | 300 | 2 | 300 | 7 | 1,150 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | **Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat , berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia** | **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | **Indeks** | **68.86** | **69.39** | **70.07** | | **71.08** | | **71.75** | | **72.42** | | **73.09** | | **73.09** | | |
| | | **2.1** | **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Maju Kesehatan Masyarakat)** | **Angka Usia Harapan Hidup** | **Tahun** | **69.180** | **69.410** | **69.524** | | **69.638** | | **69.752** | | **69.866** | | **69.980** | | **69.980** | | **Dinas Kesehatan** |
| | | | | | | | | | **632,386** | | **670,213** | | **728,202** | | **755,908** | | **790,521** | | **3,577,229** | |
| | | | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Sesuai Kebutuhan | % | 100% | 100% | 100% | 18,734 | 100% | 20,815 | 100% | 22,897 | 100% | 25,187 | 100% | 27,705 | 100% | 115,338 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Indeks Keluarga Sehat | % | na | 18% | 22% | 16,507 | 25% | 18,341 | 28% | 20,175 | 35% | 22,193 | 40% | 24,412 | 40% | 101,627 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan | Persentase Rumah Tangga ber-PHBS | % | 50% | 55% | 65% | 14,703 | 70% | 16,336 | 75% | 17,970 | 80% | 19,767 | 85% | 21,744 | 85% | 90,520 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Perbaikan Gizi Masvarakat | | | | | | 1,303 | | 1,538 | | 14,875 | | 14,875 | | 14,875 | | 47,465 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase Balita Stunting | % | 22.8% | 29% | 27% | | 26% | | 24% | | 22% | | 20% | | 20% | | |
| | | | | Persentase Balita Gizi Buruk | % | 0.032% | 0.037% | 0.035% | | 0.033% | | 0.031 | | 0.029 | | 0.027 | | 0.027 | | |
| | | | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | | | | | | 2,744 | | 3,049 | | 3,353 | | 3,689 | | 4,058 | | 16,892 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase Desa yang Sanitasi Total Berbasis Masvarakat (STBM) | % | 52.8% | 62.8% | 70% | | 78% | | 86% | | 95% | | 100% | | 100% | | |
| | | | | Persentase kabupaten/Kota Sehat | % | 10% | 20% | 45% | | 65% | | 85% | | 95% | | 100% | | 100% | | |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | 7,006 | | 8,012 | | 8,791 | | 9,647 | | 10,589 | | 44,045 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Angka Kesakitan | Angka | 11.2 | 11.2 | 10.7 | | 10.4 | | 10 | | 9.8 | | 9.4 | | 9.4 | | |
| | | | | Imunisasi Dasar Lengkap | % | 99.4% | 76% | 95% | | 95% | | 95% | | 95% | | 95% | | 95% | | |
| | | | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi | % | 30% | 43% | 60% | 1,333 | 70% | 1,482 | 80% | 1,630 | 90% | 1,793 | 100% | 1,972 | 100% | 8,210 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata | Persentase Rumah Sakit UPT Dinkes yang Memilki Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Sesuai Standar | % | 60% | 70% | 75% | 431,200 | 85% | 433,728 | 90% | 455,522 | 95% | 459,803 | 100% | 468,301 | 100% | 2,248,554 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RSMata | Persentase Rumah Sakit UPT Dinkes yang Memilki Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang terpelihara dan berfungsi dengan baik | % | 70% | 80% | 85% | 1,620 | 88% | 1,800 | 90% | 1,980 | 95% | 2,178 | 100% | 2,396 | 100% | 9,974 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Universal Coverage Jaminan Kesehatan | % | 56.5% | 58.4% | 95% | 468 | 96% | 520 | 97% | 572 | 98% | 629 | 100% | 692 | 100% | 2,881 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | Jumlah Kematian Bayi | Orang | 638 | 497 | 477 | 401 | 458 | 446 | 438 | 491 | 416 | 540 | 394 | 594 | 394 | 2,471 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan Program Usila | % | 65% | 70% | 76% | 259 | 82% | 288 | 88% | 316 | 94% | 348 | 100% | 383 | 100% | 1,594 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah Kematian Ibu Maternal | Orang | 107 | 120 | 118 | 842 | 116 | 935 | 114 | 1,029 | 112 | 1,132 | 110 | 1,245 | 110 | 5,182 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan | Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memiliki izin edar yang memenuhi Persyaratan Kesehatan | % | 86% | 87% | 90% | 490 | 93% | 544 | 95% | 598 | 98% | 658 | 100% | 724 | 100% | 3,014 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | 8,649 | | 9,610 | | 10,571 | | 11,628 | | 12,791 | | 53,248 | Dinas Kesehatan |
| | | | | a. Rasio dokter terhadap 100.000 penduduk | Rasio | 10 | 11 | 13 | | 15 | | 17 | | 19 | | 20 | | 20 | | |
| | | | | b. Rasio dokter gigi terhadap 100.000 penduduk | Rasio | 2 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 7 | | |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome*) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | | c. Rasio bidan terhadap 100.000 penduduk | Rasio | 113 | 119 | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 125 | | |
| | | | | d. Rasio tenaga gizi terhadap 100.000 penduduk | Rasio | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 12 | | 12 | | |
| | | | | e. Rasio tenaga sanitarian terhadap 100.000 penduduk | % | 6% | 6% | 7% | | 8% | | 9% | | 10% | | 12% | | 12% | | |
| | | | Program Keluarga Berencana | Persentase PUS yang Menjadi Peserta KB Aktif | % | 69% | 69.2% | 72% | 241 | 74% | 268 | 76% | 294 | 78% | 324 | 80% | 356 | 80% | 1,482 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat terdampak Bencana dan/atau KLB | | | | | | 1,087 | | 1,208 | | 1,329 | | 1,461 | | 1,608 | | 6,693 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | % | na | na | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | | | Persentase penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | % | na | na | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD | Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit BLUD UPT Dinas Kesehatan | % | 60% | 65% | 70% | 96,685 | 73% | 107,427 | 75% | 118,170 | 78% | 129,987 | 80% | 142,986 | 80% | 595,255 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | Tersedianya sarana dan prasarana RS yang memadai | % | 60% | 65% | 70% | 3,214 | 75% | 12,036 | 80% | 13,354 | 90% | 14,232 | 100% | 14,962 | 100% | 57,798 | RS Ernaldi Bahar |
| | | | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | Terpeliharanya bangunan RS | % | 60% | 65% | 65% | - | 75% | 4,325 | 80% | 5,745 | 90% | 6,347 | 100% | 7,635 | 100% | 24,052 | RS Ernaldi Bahar |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD | Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD | % | 100% | 100% | 100% | 24,681 | 100% | 25,560 | 100% | 26,349 | 100% | 27,148 | 100% | 27,993 | 100% | 131,732 | RS Ernaldi Bahar |
| | | | Program Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan | Persentase Bahan Kebijakan Bidang Kesejahteraan yang ditindaklanjuti | % | 100% | 100% | 100% | 120 | na | - | na | - | na | - | na | - | 100% | 120 | Sekretariat Daerah (*Biro Kesejahteraan Rakyat*) |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome*) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan | Persentase Bahan Kebijakan Bidang Kesejahteraan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti | % | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 1,219 | 100% | 1,292 | 100% | 1,370 | 100% | 1,452 | 100% | 5,333 | Sekretariat Daerah (*Biro Kesejahteraan Rakyat*) |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia | Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia yang Memenuhi THIS | % | na | na | 70 | - | 75 | 125 | 80 | 150 | 85 | 175 | 90 | 200 | 90 | 650 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Litbang Bidang kesehatan | Jumlah Litbang Bidang kesehatan | Hasil Litbang | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 | 600 | 3 | 750 | 4 | 800 | 4 | 850 | 14 | 3,100 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | **2.2** | **Meningkatnya Akses Pendidikan Berkualitas (Maju Akses Pendidikan Berkualitas)** | **1. Angka Rata-rata lama sekolah** | **Tahun** | **7.99** | **8.00** | **8.22** | | **8.47** | | **8.63** | | **8.79** | | **8.95** | | **8.95** | | **Dinas Pendidikan** |
| | | | | **2. Angka Harapan Lama Sekolah** | **Tahun** | **12.35** | **12.36** | **12.80** | | **12.87** | | **12.98** | | **13.19** | | **13.40** | | **13.40** | | **Dinas Pendidikan** |
| | | | | | | | | | **813,981** | | **850,093** | | **861,845** | | **897,397** | | **1,001,664** | | **4,424,955** | |
| | | | Program Pendidikan Menengah | Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah (APK SM) | Angka | 83.44 | 77.40 | 86.46 | 627,544 | 87.36 | 629,559 | 88.24 | 633,037 | 89.12 | 646,903 | 90 | 725,272 | 90 | 3,262,316 | Dinas Pendidikan |
| | | | Program Pendidikan Luar Biasa | | | | | | 4,876 | | 2,594 | | 5,068 | | 10,340 | | 13,775 | | 36,652 | Dinas Pendidikan |
| | | | | Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi | Sekolah | 10 | 92 | 93 | | 94 | | 95 | | 96 | | 97 | | 97 | | |
| | | | | Persentase Sekolah SLB yang terakreditasi : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A | % | 5.90% | 12.90% | 12.90% | | 12.90% | | 12.90% | | 12.9% | | 12.90% | | 12.90% | | |
| | | | | B | % | 41.20% | 45.16% | 48.39% | | 51.61% | | 54.84% | | 58.1% | | 61.29% | | 61.29% | | |
| | | | | C | % | 2.90% | 3.23% | 6.45% | | 9.68% | | 12.90% | | 16.1% | | 25.81% | | 25.81% | | |
| | | | | D | % | 50.00% | 38.71% | 32.26% | | 25.81% | | 19.35% | | 12.9% | | 0.00% | | 0.00% | | |
| | | | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan minimal Berkualifikasi S-1 | % | 94.76% | 95.63% | 96.50% | 1,822 | 97.37 | 1,801 | 98.24 | 4,847 | 99.11 | 11,851 | 100 | 14,764 | 100 | 35,085 | Dinas Pendidikan |
| | | | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | | | | | | 178,773 | | 214,736 | | 217,370 | | 226,602 | | 246,036 | | 1,083,517 | Dinas Pendidikan |
| | | | | Persentase sekolah menengah terakreditasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A | % | 12.85% | 23.76% | 23.76% | | 23.76% | | 23.76% | | 23.76% | | 23.76% | | 23.76% | | |
| | | | | B | % | 10.63% | 26.77% | 28.82% | | 30.54% | | 33.01% | | 35.48% | | 37.42% | | 37.42% | | |
| | | | | C | % | 4.98% | 11.40% | 12.26% | | 13.23% | | 14.19% | | 15.27% | | 16.13% | | 16.13% | | |
| | | | | D | % | 0.11% | 38.06% | 35.16% | | 32.47% | | 29.03% | | 25.48% | | 22.69% | | 22.69% | | |
| | | | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Persentase peningkatan minat dan budaya baca masyarakat | % | 33.33% | 48.60% | 52.10% | 691 | 55.25% | 1,128 | 58.32% | 1,224 | 60.50% | 1,325 | 62.10% | 1,367 | 62.10% | 5,735 | Dinas Perpustakaan |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome*) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Litbang bidang pendidikan | Jumlah Litbang Bidang pendidikan | Hasil Litbang | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 150 | 1 | 150 | 2 | 200 | 2 | 250 | 6 | 750 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia | Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia yang Memenuhi THIS | % | na | na | 70 | 275 | 75 | 125 | 80 | 150 | 85 | 175 | 90 | 200 | 90 | 900 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | **Tujuan 3 : Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender** | **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** | **Indeks** | **92.43** | **92.62** | **92.70** | | **93.00** | | **93.30** | | **93.60** | | **93.90** | | **93.90** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** |
| | | | | **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** | **Indeks** | **73.53** | **n.a.** | **73.70** | | **73.90** | | **74.10** | | **74.30** | | **74.50** | | **74.50** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** |
| | | **3.1** | **Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak (Maju Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan Anak)** | **1. Keterlibatan Perempuan di Parlemen** | **%** | **17.33** | **20.27** | **21.33** | | **21.33** | | **21.33** | | **21.33** | | **21.33** | | **21.33** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** |
| | | | | **2. Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi dan Teknisi** | **%** | **52.37** | **49.25** | **50.00** | | **51.00** | | **52.00** | | **53.00** | | **54.00** | | **54.00** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** |
| | | | | **3. Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja** | **%** | **34.57** | **34.70** | **34.90** | | **35.10** | | **35.20** | | **35.30** | | **35.50** | | **35.50** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** |
| | | | | **4. Persentase Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)** | **%** | **5.88** | **11.76** | **23.53** | | **35.29** | | **47.05** | | **58.82** | | **70.58** | | **70.58** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** |
| | | | | **5. Selisih Capaian Angka Harapan Hidup Laki-Laki dan Perempuan** | **Tahun** | **3.88** | **3.88** | **3.68** | | **3.49** | | **3.30** | | **3.21** | | **3.12** | | **3.12** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** |
| | | | | **6. Selisih Capaian Rata-rata lama sekolah Laki-Laki dan Perempuan** | **Tahun** | **0.7** | **0.63** | **0.60** | | **0.60** | | **0.60** | | **0.50** | | **0.50** | | **0.50** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | | **7. Selisih Capaian Harapan Lama Sekolah Laki-Laki dan Perempuan** | **Tahun** | **0.13** | **0.38** | **0.35** | | **0.35** | | **0.35** | | **0.35** | | **0.32** | | **0.32** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** |
| | | | | **8. Selisih Capaian Pengeluaran per Kapita Laki-Laki dan Perempuan** | **Rp. Ribu** | **5,123** | **5,403** | **5,400** | | **5,400** | | **5,300** | | **5,300** | | **5,200** | | **5,200** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** |
| | | | | | | | | | **1,717** | | **5,775** | | **6,250** | | **6,525** | | **7,100** | | **27,367** | |
| | | | Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak | Persentase keterisian data terpilah dalam Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) | % | na | 29.58% | 32.54% | 35 | 36.98% | 500 | 41.42% | 550 | 53.25% | 650 | 60.65% | 700 | 60.65% | 2,435 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Program Peningkatan Perlindungan Perempuan | Persentase peningkatan perlindungan perempuan | % | 34.26% | 37.96% | 39.00% | 32 | 40.00% | 775 | 41.00% | 850 | 42.00% | 900 | 43.00% | 1,000 | 43.00% | 3,557 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak | Persentase peningkatan perlindungan khusus anak | % | 0.13% | 8.31% | 10.00% | 110 | 12.00% | 1,175 | 14.00% | 1,200 | 16.00% | 1,000 | 18.00% | 1,000 | 18.00% | 4,485 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Program peningkatan Kualitas Hidup Perempuan | Persentase kabupaten/kota yang mendapat Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) | % | na | 5.88% | 5.88% | 1,270 | 23.53% | 1,800 | 23.53% | 1,900 | 47.06% | 2,000 | 47.06% | 2,250 | 47.06% | 9,220 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak | Persentase kabupaten/kota yang melakukan upaya peningkatan pemenuhan hak anak | % | 64.71% | 58.82% | 70.59% | 170 | 76.47% | 1,000 | 82.35% | 1,100 | 82.35% | 1,200 | 100% | 1,300 | 100% | 4,770 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Program Penguatan Kualitas Keluarga | Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan peningkatan ketahanan keluarga | % | na | na | 5.88% | - | 11.76% | 400 | 17.64% | 400 | 29.41% | 500 | 41.18% | 500 | 41.18% | 1,800 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia | Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia yang Memenuhi THIS | % | na | na | 70 | 100 | 75 | 125 | 80 | 150 | 100 | 175 | 90 | 200 | 90 | 750 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Litbang bidang sosial budaya, masyarakat dan agama | Jumlah Litbang bidang sosial budaya, masyarakat dan agama | Hasil Litbang | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 150 | 3 | 350 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | **Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Tujuan 4 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan** | **Indeks Reformasi Birokrasi** | **Indeks** | **B** | **-** | **BB** | | **BB** | | **BB** | | **A** | | **A** | | **A** | | **Biro Organisasi** |
| | | **4.1** | **Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas)** | **1. Indeks Kepuasan Masyarakat** | **Nilai** | **B** | **B** | **B** | | **B** | | **B** | | **B** | | **A** | | **A** | | **Biro Organisasi** |
| | | | | **2. Persentase Inovasi yang terpilih masuk TOP 99** | **%** | **na** | **10,71** | **12** | | **14** | | **16** | | **18** | | **20** | | **20** | | **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah** |
| | | | | | | | | | **362,935** | | **474,304** | | **501,949** | | **537,499** | | **583,193** | | **2,457,838** | |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di selesaikan tepat waktu sesuai SOP | Izin dan Non Izin | 901 | 904 | 940 | - | 974 | 1,968 | 1,006 | 2,575 | 1,036 | 2,800 | 1,064 | 2,775 | 5,020 | 10,118 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| | | | Program Pengembangan Komunikasi Publik | Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Informasi dan Komunikasi Masyarakat/Publik | Kabupaten/ Kota | na | 1 | 2 | 2,053 | 4 | 3,673 | 4 | 5,000 | 5 | 5,475 | 2 | 6,000 | 17 | 22,201 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Program Pengelolaan Informasi Publik dan Media Massa | | | | | | 7,200 | | 4,070 | | 3,868 | | 4,600 | | 5,560 | | 25,298 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | Persentase Informasi Diterima | % | 100% | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | | | Persentase Aduan Ditindaklanjuti | % | 22.13% | 23.31% | na | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | | Program Pelayanan E-Government | Persentase Layanan Penggunaan E-Government | % | na | na | 100% | 1,069 | 100% | 1,285 | 100% | 1,750 | 100% | 2,175 | 100% | 2,700 | 100% | 8,979 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Program Pengembangan Statistik | Persentase Data Sektoral yang Tersedia | % | na | na | 100% | 750 | na | - | na | - | na | - | na | - | 100% | 750 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Program Pengembangan Statistik Sektoral | Persentase Data Sektoral yang Tersedia | % | na | na | 100% | - | 100% | 2,500 | 100% | 3,000 | 100% | 3,500 | 100% | 4,000 | 100% | 13,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome*) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Pengembangan Persandian, Siber dan Keamanan Informasi | Persentase penyelenggaraan pengamanan informasi (Keamanan Informasi) | % | 100% | 100% | 100% | 200 | na | - | na | - | na | - | na | - | 100% | 200 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Program Pengembangan Persandian | Persentase penyelenggaraan pengamanan informasi (Keamanan Informasi) | % | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 300 | 100% | 400 | 100% | 500 | 100% | 600 | 100% | 1,800 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Nilai IKM | Nilai | B | B | B | - | A | 614 | A | 678 | A | 695 | A | 723 | A | 2,709 | Badan Penghubung |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO yang ditangani | % | 100% | 100% | 100% | 75 | 100% | 200 | 100% | 300 | 100% | 400 | 100% | 400 | 100% | 1,375 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Persentase Kualitas dan Kuantitas Komunikasi dan Informasi | % | na | na | 100% | 26,092 | na | - | na | - | na | - | na | - | 100% | 26,092 | Sekretariat Daerah (*Biro Humas dan Protokol*) |
| | | | Program Kerjasama, Kehumasan, dan Mass Media | Persentase Kualitas Komunikasi dan Informasi | % | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 39,850 | 100% | 40,650 | 100% | 42,550 | 100% | 44,700 | 100% | 167,750 | Sekretariat Daerah (*Biro Humas dan Protokol*) |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana prasarana Aparatur yang berfungsi baik | % | 45% | 47% | 48% | 330 | 55% | 864 | 60% | 2,625 | 70% | 1,610 | 75% | 650 | 75% | 6,079 | Dinas Perpustakaan |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya | % | 25% | 27% | 38% | 256 | 45% | 325 | 48% | 345 | 55% | 350 | 60% | 350 | 60% | 1,626 | Dinas Perpustakaan |
| | | | Program Penaatan Administrasi Kependudukan | Prosentase Penataan Administrasi Kependudukan | % | na | na | 100% | 2,677 | 100% | 2,554 | 100% | 2,581 | 100% | 2,608 | 100% | 2,636 | 100% | 13,057 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | | | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | Persentase efektifitas sistem adminitrasi sesuai perundang-undangan | % | 65% | 70% | na | - | 100% | 700 | 100% | 300 | 100% | 425 | 100% | 551 | 100% | 1,976 | Dinas Kearsipan |
| | | | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | Persentase kontinyuitas pemanfaatan sarana dan prasarana kearsipan | % | 87% | 90% | 100% | 100 | 100% | 800 | 100% | 800 | 100% | 1,000 | 100% | 1,100 | 100% | 3,800 | Dinas Kearsipan |
| | | | Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan | Persentase kontinyuitas pemanfaatan sarana dan prasarana kearsipan | % | 60% | 65% | 100% | 30 | 100% | 200 | 100% | 200 | 100% | 300 | 100% | 300 | 100% | 1,030 | Dinas Kearsipan |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | Persentase kualitas dan efektifitas pelayanan informasi | % | 70% | 75% | 100% | 100 | 100% | 1,150 | 100% | 1,150 | 100% | 1,000 | 100% | 1,000 | 100% | 4,400 | Dinas Kearsipan |
| | | | Program Peningkatan dan Pengendalian Arsip | Persentase efektifitas pengendalian arsip | % | 60% | 65% | na | - | 100% | - | 100% | 200 | 100% | 250 | 100% | 350 | 100% | 800 | Dinas Kearsipan |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome*) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Pembinaan Kearsipan | Persentase Pembinaan Kearsipan | % | 100% | na | na | - | 100% | 450 | 100% | 450 | 100% | 490 | 100% | 500 | 100% | 1,890 | Dinas Kearsipan |
| | | | Program Pengawasan dan Pengendalian Arsip | Persentase Pengawasan dan Pengendalian Arsip | % | na | na | na | - | 100% | 350 | 100% | 350 | 100% | 350 | 100% | 700 | 100% | 1,750 | Dinas Kearsipan |
| | | | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Persentase Penetapan Peraturan per Undang-Undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku | % | 100% | 100% | 100% | 2,041 | 100% | 3,175 | 100% | 3,117 | 100% | 3,236 | 100% | 3,373 | 100% | 12,901 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | | | | | *100%* | *2,725* | *100%* | *2,792* | *100%* | *2,886* | *100%* | *2,998* | *100%* | *11,401* | *Biro Hukum dan HAM* |
| | | | | | | | | | | *100%* | *450* | *100%* | *325* | *100%* | *350* | *100%* | *375* | *100%* | *1,500* | *Biro Organisasi* |
| | | | Program Penataan Daerah Otonomi Baru | Prosentase Tertatanya Daerah Otonomi Daerah | % | 100% | 100% | 100% | 942 | 100% | 2,300 | 100% | 1,650 | 100% | 1,766 | 100% | 1,751 | 100% | 8,409 | Sekretariat Daerah (*Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah*) |
| | | | Program Peningkatan Daya Saing | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 0 | 8.2 | na | - | 8.4 | 100 | 8.5 | 200 | 8.6 | 200 | 8.8 | 200 | 9 | 700 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Pengembangan Desa Inovasi | Jumlah Desa Inovasi | Desa | na | na | na | - | 17 | 250 | 17 | 750 | 17 | 750 | 17 | 750 | 68 | 2,500 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Litbang Bidang Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan | Jumlah Litbang bidang ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Hasil Litbang | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 2 | 300 | 6 | 950 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Litbang bidang Pertanian | Jumlah Litbang Bidang Pertanian | Hasil Litbang | na | na | na | - | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 250 | 2 | 250 | 8 | 900 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Litbang Bidang kesehatan | Jumlah Litbang Bidang kesehatan | Hasil Litbang | na | na | na | - | 2 | 200 | 2 | 250 | 3 | 300 | 3 | 350 | 10 | 1,100 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Litbang bidang pendidikan | Jumlah Litbang Bidang pendidikan | Hasil Litbang | na | na | na | - | 1 | 150 | 1 | 200 | 2 | 250 | 2 | 300 | 6 | 900 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Litbang Bidang pemerintahan | Jumlah Litbang Bidang pemerintahan | Hasil Litbang | na | na | na | - | 1 | 200 | 2 | 250 | 3 | 300 | 3 | 350 | 9 | 1,100 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Litbang bidang pelayanan publik | Jumlah Litbang bidang Pelayanan Publik | Hasil Litbang | na | na | na | - | 1 | 150 | 1 | 200 | 2 | 250 | 3 | 300 | 7 | 900 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Litbang bidang energi | Jumlah Litbang bidang energi | Hasil Litbang | na | na | na | - | 1 | 150 | 1 | 150 | 2 | 200 | 2 | 250 | 6 | 750 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Litbang bidang lingkungan | Jumlah Litbang bidang lingkungan | Hasil Litbang | na | na | na | - | na | - | 1 | 150 | 1 | 150 | 2 | 200 | 4 | 500 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Litbang bidang sosial budaya, masyarakat dan agama | Jumlah Litbang bidang sosial budaya, masyarakat dan agama | Hasil Litbang | na | na | na | - | na | - | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 | 3 | 450 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Litbang Bidang Infrastruktur dan Konektifitas | Jumlah Litbang bidang Infrastruktur dan Konektifitas | Hasil Litbang | na | na | na | - | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 150 | 1 | 150 | 4 | 500 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Data dan Informasi | Persentase data dan Informasi kelitbangan yang tersedia | % | na | na | na | - | 25% | 250 | 50% | 355 | 75% | 375 | 100% | 400 | 100% | 1,380 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Inkubator Teknologi | Persentase pelaku usaha inovatif yang lulus | % | 100% | 100% | na | - | 100% | 150 | 100% | 155 | 100% | 200 | 100% | 250 | 100% | 755 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Diseminasi Iptek Hasil Litbang Dan Inovasi | Persentase Hasil Litbang yang di Diseminasikan | % | 70% | 70% | 75% | 60 | 100% | 835 | 100% | 875 | 100% | 900 | 100% | 1,000 | 100% | 3,670 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Kemitraan Inovasi Iptek | Persentase Kemitraan Inovasi Iptek | % | 100% | 100% | 100% | 70 | 100% | 300 | 100% | 325 | 100% | 350 | 100% | 350 | 100% | 1,395 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Konservasi Eks Situ Kebun Raya | Jumlah Jenis Tanaman yang didokumentasikan di Kebun Raya | Jenis | 500 | 540 | 540 | 1,286 | 567 | 993 | 595 | 1,250 | 626 | 1,300 | 657 | 1,500 | 657 | 6,328 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Pelayanan Teknologi Science Techno Park | Jumlah Teknologi yang diseminasikan | Teknologi | 1 | 1 | 2 | 1,070 | 2 | 1,290 | 2 | 1,350 | 3 | 1,400 | 4 | 1,600 | 13 | 6,710 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Penguatan Kelembagaan Litbang | Persentase Pusat inovasi yang terbentuk | % | na | na | 15% | 57 | 29% | 336 | 59% | 350 | 82% | 350 | 100% | 350 | 100% | 1,443 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Pendayagunaan Iptek | Jumlah Teknologi yang didayagunakan | Teknologi | 2 | na | na | - | 1 | 100 | 2 | 200 | 3 | 250 | 3 | 300 | 9 | 850 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 316,427 | 100% | 397,848 | 100% | 419,183 | 100% | 449,908 | 100% | 489,801 | 100% | 2,073,166 | Seluruh Perangkat Daerah |
| | | **4.2** | **Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel)** | **1. Nilai SAKIP (Skor)** | **Nilai** | **A (80,01)** | **BB (78,71)** | **A (81-82)** | | **A (82-83)** | | **A (83-84)** | | **A (84-85)** | | **A (85-86)** | | **A (85-86)** | | **Biro Organisasi dan Tata Laksana** |
| | | | | **2. Opini BPK** | **Opini** | **WTP** | **WTP** | **WTP** | | **WTP** | | **WTP** | | **WTP** | | **WTP** | | **WTP** | | **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** |
| | | | | | | | | | **178,413** | | **286,252** | | **233,219** | | **241,448** | | **284,650** | | **1,221,432** | |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome*) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Atas Bawah - Bawah Atas | Rasio Kegiatan RKPD Provinsi yang Berbasis Partisipasi Masyarakat | % | na | 80 | 82 | 1,170 | 85 | 1,277 | 87 | 1,925 | 89 | 2,075 | 90 | 2,336 | 90 | 8,782 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Teknokratik | Persentase Rekomendasi dan Masukan Akademisi yang Diakomodir dalam RKPD Provinsi | % | na | 70 | 70 | 400 | 75 | 200 | 80 | 800 | 85 | 850 | 90 | 900 | 90 | 3,150 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Perencanaan Pembangunan Strategis | Persentase Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan yang Tepat Waktu | % | na | 70 | 70 | 1,554 | 75 | 1,384 | 80 | 1,460 | 85 | 1,660 | 90 | 1,795 | 90 | 7,852 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan | Persentase Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran | % | na | 70 | 70 | 150 | 75 | 165 | 80 | 182 | 85 | 200 | 90 | 230 | 90 | 927 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan | Persentase Capaian Target Program OPD Provinsi | % | na | 70 | 70 | 797 | 75 | 1,429 | 80 | 1,490 | 85 | 1,620 | 90 | 1,750 | 90 | 7,086 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan bidang Tata Kelola Pemerintahan | Persentase Perencanaan Pembangunan bidang Tata Kelola Pemerintahan yang memenuhi Standar THIS | % | na | 70 | 70 | 100 | 75 | 200 | 80 | 225 | 85 | 160 | 90 | 170 | 90 | 855 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | | | | | | 500 | | 550 | | 605 | | 666 | | 732 | | 3,053 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | Persentase Perda APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota APBD/P Kabupaten/Kota | % | na | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | | | Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota | % | na | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | APBD yang Tepat Waktu | Tepat Waktu/ Tidak | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 10,022 | Tepat Waktu | 11,025 | Tepat Waktu | 12,127 | Tepat Waktu | 13,340 | Tepat Waktu | 14,674 | Tepat Waktu | 61,188 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan | Persentase Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan | % | na | 100% | 100% | 2,550 | 100% | 10,284 | 100% | 11,125 | 100% | 11,675 | 100% | 12,450 | 100% | 45,534 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | | | | | *100%* | *1,990* | *100%* | *2,125* | *100%* | *2,175* | *100%* | *2,450* | *100%* | *8,740* | *Biro Administrasi Pembangunan* |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome*) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| | | | | | | | | | | *100%* | *8,294* | *100%* | *9,000* | *100%* | *9,500* | *100%* | *10,000* | *100%* | *36,794* | *Biro Pengadaan Barang/Jasa* |
| | | | Program Peningkatan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai LAKIP | Nilai | A (80,01) | BB (78,71) | A (81-82) | - | A (82-83) | 550 | A (83-84) | 450 | A (84-85) | 475 | A (85-86) | 575 | A (85-86) | 2,050 | Sekretariat Daerah (*Biro Organisasi*) |
| | | | Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Perumusan Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan, serta Terkoordinasinya Program/Kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi dengan Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota | Dokumen | 2 | na | na | 189 | 2 | 275 | 2 | 275 | 2 | 300 | 2 | 300 | 2 | 1,339 | Dinas Sosial |
| | | | Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | Jumlah Dokumen yang tersedia | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 150 | na | - | na | - | na | - | na | - | 3 | 150 | Dinas Perkebunan |
| | | | Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | Persentase dokumen perencanaan yang disusun | % | 100% | 100% | 100% | 40 | 100% | 55 | 100% | 60 | 100% | 65 | 100% | 70 | 100% | 290 | Inspektorat |
| | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Pencapaian Pendapatan Asli Daerah | % | 92% | na | 100% | 1,826 | 100% | - | na | - | na | - | na | - | 100% | 1,826 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | Program Pengelolaan Pajak Daerah | Persentase Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Daerah | % | na | na | na | - | 100% | 5,054 | 100% | 5,200 | 100% | 5,500 | 100% | 6,000 | 100% | 21,754 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil, Hibah dan Lain Lain Pendapatan | Persentase Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Non Pajak | % | na | na | na | - | 100% | 450 | 100% | 700 | 100% | 700 | 100% | 700 | 100% | 2,550 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | Program Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Pencapaian Penerimanaan Pendapatan Asli Daerah | % | na | na | na | - | 100% | 1,350 | 100% | 1,500 | 100% | 1,450 | 100% | 1,750 | 100% | 6,050 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal. | % | na | na | na | - | 100% | 1,200 | 100% | 1,200 | 100% | 1,200 | 100% | 1,200 | 100% | 4,800 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Bidang Pendapatan Daerah | Persentase Gangguan Teknologi Informasi pada titik pelayanan pajak. | % | na | na | 10% | 3,801 | 10% | 5,227 | 10% | 5,500 | 10% | 5,500 | 10% | 5,500 | 10% | 25,528 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 100% | 100% | 100% | 149,484 | 100% | 225,217 | 100% | 166,630 | 100% | 171,271 | 100% | 208,653 | 100% | 921,256 | Seluruh Perangkat Daerah |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome*) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/ Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | 5,680 | 100% | 10,078 | 100% | 10,640 | 100% | 11,066 | 100% | 12,415 | 100% | 49,879 | Seluruh Perangkat Daerah |
| | | **4.3** | **Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah (Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas)** | **1. Level Maturitas SPIP** | **Skor** | **2.15** | **3.02** | **3.2** | | **3.4** | | **3.6** | | **3.8** | | **4** | | **4** | | **Inspektorat** |
| | | | | **2. Indeks Integritas Daerah** | **Indeks** | **n.a.** | **n.a.** | **60** | | **65** | | **70** | | **72.5** | | **75** | | **75** | | **Inspektorat** |
| | | | | | | | | | **71,815** | | **174,053** | | **161,849** | | **172,482** | | **168,778** | | **735,773** | |
| | | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Persentase peningkatan hasil pengawasan | % | 70% | 80% | 80% | 2,943 | 80% | 3,200 | 80% | 3,400 | 80% | 3,600 | 85% | 3,800 | 85% | 16,943 | Inspektorat |
| | | | Program Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi | Persentase peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi | % | 70% | 70% | 70% | 4,910 | 70% | 4,100 | 75% | 4,400 | 75% | 4,600 | 80% | 4,900 | 80% | 22,910 | Inspektorat |
| | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/ PNS/ Anggota KORPRI | Persentase Aparatur Yang dibina dan dikembangkan | % | 100% | 100% | 100% | 3,906 | 100% | 3,000 | 100% | 4,050 | 100% | 4,525 | 100% | 4,975 | 100% | 20,456 | Sekretariat Daerah (*Biro Organisasi*) |
| | | | Program Dukungan Penguatan Peran dan Kompetensi Staf ahli KDH dalam Mendukung tugas dan fungsi KDH | Persentase Dukungan Penguatan Peran dan Kompetensi Staf Ahli KDH dalam Mendukung Tugas | % | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 5,773 | 100% | 6,119 | 100% | 6,119 | 100% | 6,119 | 100% | 24,130 | Sekretariat Daerah (*Biro Umum dan Perlengkapan*) |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Persentase Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH | % | 100% | 100% | 100% | 13,205 | 100% | 27,721 | 100% | 25,496 | 100% | 24,875 | 100% | 20,700 | 100% | 98,792 | Sekratariat Daerah |
| | | | | | | | | | | *100%* | *10,000* | *100%* | *6,000* | *100%* | *5,000* | *100%* | *2,000* | *100%* | *23,000* | *Biro Umum dan Perlengkapan* |
| | | | | | | | | | | *100%* | *15,500* | *100%* | *17,050* | *100%* | *16,575* | *100%* | *15,100* | *100%* | *64,225* | *Biro Humas dan Protokol* |
| | | | | | | | | | | *100%* | *2,201* | *100%* | *2,271* | *100%* | *3,050* | *100%* | *3,300* | *100%* | *10,822* | *Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah* |
| | | | | | | | | | | *100%* | *20* | *100%* | *175* | *100%* | *250* | *100%* | *300* | *100%* | *745* | *Biro Organisasi* |
| | | | Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah di Jakarta | Persentase Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah di Jakarta | % | 100% | 100% | 100% | 436 | 100% | 900 | 100% | 950 | 100% | 1,000 | 100% | 1,050 | 100% | 4,336 | Badan Penghubung |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome*) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan Rakyat Daerah | Persentase Anggota Dewan yang Meningkat Kapasitasnya | % | 100% | 100% | 100% | 200 | 100% | 450 | 100% | 200 | 100% | 250 | 100% | 250 | 100% | 1,350 | Sekretariat Daerah (*Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah*) |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Persentase anggota Dewan yang meningkat kapasitasnya | % | 84.67% | 82% | 85% | 8,303 | 86% | 16,706 | 87% | 16,748 | 88% | 17,384 | 89% | 17,765 | 89% | 76,906 | Sekretariat DPRD |
| | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/ PNS/ Anggota KORPRI | Persentase peningkatan kapasitas aparatur | % | 100% | 100% | 100% | 2,269 | na | - | na | - | na | - | na | - | 100% | 2,269 | Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia |
| | | | Program Pengembangan Kompetensi Aparatur | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | % | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 15,688 | 55% | 10,034 | 65% | 10,101 | 75% | 11,563 | 75% | 47,385 | Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia |
| | | | Program Pendidikan Kedinasan | Persentase peningkatan keterampilan dan profesional aparatur | % | 100% | 65% | 100% | 276 | 100% | 100 | 100% | 310 | 100% | 121 | 100% | 353 | 100% | 1,160 | Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Persentase peningkatan kompetensi aparatur melalui PPK BLUD | % | 100% | 100% | 100% | 10,971 | 100% | 11,710 | 100% | 13,658 | 100% | 14,204 | 100% | 14,772 | 100% | 65,315 | Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia |
| | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/ PNS/ Anggota KORPRI | Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/Anggota KORPRI | % | 100% | 95% | 95% | 3,259 | 95% | 3,553 | 95% | 3,834 | 96% | 4,107 | 96% | 4,076 | 96% | 18,830 | Badan Kepegawaian Daerah |
| | | | Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS | Persentase pegawai yang diberikan penghargaan purna bhakti | % | na | na | na | - | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 80 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan bidang Tata Kelola Pemerintahan | Persentase Perencanaan Pembangunan bidang Tata Kelola Pemerintahan yang memenuhi Standar THIS | % | na | 70 | 70 | - | 75 | 175 | 80 | 175 | 85 | 380 | 90 | 400 | 90 | 1,130 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program peningkatan disiplin aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | 100% | 100% | 100% | 5,391 | 100% | 23,066 | 100% | 12,063 | 100% | 17,998 | 100% | 15,088 | 100% | 73,607 | Seluruh Perangkat Daerah |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya | % | 100% | 100% | 100% | 15,744 | 100% | 30,171 | 100% | 34,897 | 100% | 38,323 | 100% | 42,247 | 100% | 161,381 | Seluruh Perangkat Daerah |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome*) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | **Misi 4 : Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Tujuan 5 : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan** | **Persentase Rumah Tidak Layak Huni** | **%** | **7.25** | **6.88** | **6.43** | | **5.83** | | **5.17** | | **4.43** | | **3.85** | | **3.85** | | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** |
| | | | | **Rata-rata Waktu tempuh Jalan Provinsi** | **Km/Jam** | **28.00** | **30.00** | **35.00** | | **38.00** | | **40.00** | | **43.00** | | **45.00** | | **45.00** | | **Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang** |
| | | | | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | **Indeks** | **62.04** | **67.29** | **67.35** | | **67.40** | | **67.43** | | **67.47** | | **67.85** | | **67.85** | | **Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Kehutanan** |
| | | **5.1** | **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (Maju Kualitas Lingkungan Hidup)** | **1. Indeks Kualitas Air** | **Indeks** | **62.64** | **62.64** | **62.74** | | **62.82** | | **62.89** | | **62.93** | | **64.04** | | **64.04** | | **Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan** |
| | | | | **2. Indeks Kualitas Udara** | **Indeks** | **96.11** | **96.11** | **96.19** | | **96.23** | | **96.25** | | **96.32** | | **96.45** | | **96.45** | | **Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan** |
| | | | | **3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan** | **Indeks** | **36.03** | **49.173** | **49.189** | | **49.206** | | **49.224** | | **49.243** | | **49.263** | | **49.263** | | **Dinas Kehutanan** |
| | | | | **4. Indeks Resiko Bencana Indonesia** | **Indeks** | **142.20** | **142.20** | **133.67** | | **125.65** | | **118.11** | | **111.02** | | **104.36** | | **104.36** | | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| | | | | | | | | | **43,466** | | **161,496** | | **231,919** | | **220,563** | | **222,059** | | **879,503** | |
| | | | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | | | | | | 205 | | 3,550 | | 3,975 | | 2,865 | | 3,115 | | 13,710 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |
| | | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 62.04 | 67.29 | 67.35 | | 67.40 | | 67.43 | | 67.47 | | 67.85 | | 67.85 | | |
| | | | | Indeks Kualitas Air | Indeks | 62.64 | 62.64 | 62.74 | | 62.82 | | 62.89 | | 62.93 | | 64.04 | | 64.04 | | |
| | | | | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 96.11 | 96.11 | 96.19 | | 96.23 | | 96.25 | | 96.32 | | 96.45 | | 96.45 | | |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome*) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Indeks | 36.030 | 49.173 | 49.189 | | 49.206 | | 49.224 | | 49.243 | | 49.263 | | 49.263 | | |
| | | | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Meningkatnya kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (KPLHD) | Indeks | 6 | 3 | 3 | 825 | 3 | 3,600 | 3 | 2,350 | 3 | 2,070 | 1 | 2,030 | 1 | 10,875 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |
| | | | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | Jumlah Penurunan Laju Peningkatan Emisi GRK di 6 Sektor | Ton CO2 eq/tahun | 4,552,377 | 4,553,329 | 4,554,931 | 65 | na | - | na | - | na | - | na | - | na | 65 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |
| | | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Persentase Peningkatan pengawasan Internal | % | 100% | 100% | 100% | 625 | 100% | 1,000 | 100% | 1,250 | 100% | 250 | 100% | 1,000 | 100% | 4,125 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |
| | | | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan | % | 33.33% | 33.33% | 34.00% | - | 34.50% | 500 | 35.00% | 700 | 35.60% | 800 | 36.00% | 1,000 | 36.00% | 3,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |
| | | | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | Penyelesaian Konflik Lahan yang terselesaikan | % | 9.76% | 10.00% | 11.00% | 250 | 11.66% | 15,211 | 12.00% | 14,409 | 12.45% | 17,452 | 13.00% | 15,310 | 13.00% | 62,632 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan BLUD Laboratorium Lingkungan | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan | % | 60% | 80% | 90% | 12,000 | 95% | 17,000 | 97% | 14,520 | 99% | 15,972 | 100% | 17,569 | 100% | 77,061 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |
| | | | Program Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim | | | | | | - | | 5,060 | | 11,530 | | 11,580 | | 11,830 | | 40,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |
| | | | | Persentase Penurunan Emisi GRK | % | 3.71% | 4.33% | 4.95% | | 5.56% | | 6.18% | | 6.80% | | 7.42% | | 7.42% | | |
| | | | | Jumlah Penurunan Emisi GRK | Ton CO2 eq/tahun | 4,552,377 | 4,553,329 | 4,554,931 | | 4,557,072 | | 4,559,977 | | 4,563,570 | | 4,566,890 | | 4,566,890 | | |
| | | | | Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Sektor Lahan dan gambut | Ton CO2 eq/tahun | 4,367,638 | 4,363,444 | 4,360,108 | | 4,357,545 | | 4,355,678 | | 4,354,439 | | 4,353,765 | | 4,353,765 | | |
| | | | | 2. Sektor Pertanian dan Peternakan | Ton CO2 eq/tahun | 52,094 | 53,554 | 55,013 | | 56,472 | | 57,932 | | 59,391 | | 60,851 | | 60,851 | | |
| | | | | 3. Sektor Energi dan transportasi | Ton CO2 eq/tahun | 52,219 | 54,750 | 57,135 | | 59,337 | | 61,653 | | 64,075 | | 66,609 | | 66,609 | | |
| | | | | 4. Sektor Limbah | Ton CO2 eq/tahun | 80,426 | 81,581 | 82,675 | | 83,718 | | 84,714 | | 85,665 | | 85,665 | | 85,665 | | |
| | | | Program Pengembangan Kinerja Pengelolahan Persampahan | Persentase pengurangan timbulan sampah rumah tangga | % | na | 18% | 20% | - | 22% | 600 | 24% | 620 | 26% | 400 | 27% | 930 | 27% | 2,550 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana | Persentase korban bencana yang dievakuasi saat tanggap darurat | % | 100% | 100% | 100% | 2,991 | 100% | 4,000 | 100% | 4,000 | 100% | 4,000 | 100% | 4,000 | 100% | 18,991 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | Persentase Penanganan Pasca Bencana | % | 100% | 100% | 100% | 275 | 100% | 300 | 100% | 3,000 | 100% | 3,500 | 100% | 4,000 | 100% | 11,075 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana daerah rawan bencana | % | 100% | 100% | 100% | 1,236 | 100% | 3,920 | 100% | 4,890 | 100% | 5,350 | 100% | 5,835 | 100% | 21,231 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | Program Peningkatan Balai Pengobatan Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan | Persentase Korban Bencana yang terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 60 | 100% | 150 | 100% | 200 | 100% | 250 | 100% | 300 | 100% | 960 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | Program Pengembangan Informasi Kebencanaan | Persentase daerah rawan bencana yang mempunyai pelayanan informasi | % | na | na | 80% | - | 100% | 1,000 | 100% | 2,000 | 100% | 3,000 | 100% | 3,500 | 100% | 9,500 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | Program Rehabilitasi | | | | | | 466 | | 10,850 | | 10,850 | | 10,850 | | 10,850 | | 43,866 | Dinas Kehutanan |
| | | | | Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis | % | 0.13% | 0.16% | 0.18% | | 0.19% | | 0.20% | | 0.21% | | 0.22% | | 0.22% | | |
| | | | | Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan | % | 0.27% | 0.30% | 0.27% | | 0.24% | | 0.22% | | 0.19% | | 0.17% | | 0.17% | | |
| | | | Program Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | 413 | | 9,150 | | 9,150 | | 9,150 | | 9,150 | | 37,013 | Dinas Kehutanan |
| | | | | Jumlah Izin Perhutanan Sosial | Izin | 47 | 91 | 5 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | |
| | | | | Jumlah Penetapan Hutan Hak | Dokumen | na | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | | | Jenis Sarpras Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | Jenis | na | 2 | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | |
| | | | | Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dikembangkan | Jenis | na | 3 | 0 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | |
| | | | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan | | | | | | 1,605 | | 6,875 | | 6,900 | | 6,950 | | 6,950 | | 29,280 | Dinas Kehutanan |
| | | | | Penurunan jumlah hotspot di kawasan hutan | Titik Hotspot | 453 | 320 | 791 | | 662 | | 555 | | 464 | | 389 | | 389 | | |
| | | | | Penurunan luas kebakaran hutan | Ha | 749 | 10,135 | 9,122 | | 8,209 | | 7,388 | | 6,650 | | 5,985 | | 5,985 | | |
| | | | | Persentase Penurunan Emisi Sektor Kehutanan | % | 1.70% | 1.56% | 1.60% | | 1.64% | | 1.68% | | 1.70% | | 1.75% | | 1.75% | | |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome*) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | | Rasio Luas Kawasan Lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan | Rasio | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | 0.44 | | 0.44 | | 0.44 | | 0.44 | | 0.44 | | |
| | | | | Jumlah kasus yang tertangani | Kasus | 7 | 5 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | |
| | | | Program Perencanaan | | | | | | 675 | | 7,575 | | 6,650 | | 6,650 | | 6,650 | | 28,200 | Dinas Kehutanan |
| | | | | Produksi Kayu Sub Sektor Kehutanan | $m^3$ | 6,689,742 | 5,471,086 | 5,500,000 | | 5,600,000 | | 5,800,000 | | 5,900,000 | | 6,000,000 | | 6,000,000 | | |
| | | | | Luasan penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan | Ha | na | 73,761 | 18,500 | | 18,500 | | 18,500 | | 12,350 | | 12,350 | | 39,800 | | |
| | | | | Penerimaan sub sektor kehutanan | Rp. Juta | 36,125 | 68,142 | 42,400 | | 44,000 | | 45,500 | | 47,000 | | 50,000 | | 50,000 | | |
| | | | | Jumlah peta tematik yang sesuai Kebijakan Satu Peta (KSP) | Peta | na | na | na | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | | Program Pengendalian Banjir | Jumlah Kawasan Bebas Bencana Banjir | Kawasan | 13 | 24 | 30 | 14,500 | 32 | 47,000 | 37 | 100,000 | 41 | 80,000 | 45 | 80,000 | 45 | 321,500 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | | | Program Turap/Talud dan Bronjong | Jumlah Kawasan Bebas Bencana Longsor | Kawasan | 9 | 11 | 11 | - | 13 | 9,549 | 17 | 20,000 | 22 | 24,504 | 27 | 25,000 | 27 | 79,054 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | | | Program Perencanaan Tata Ruang | Jumlah Dokumen RTR KSP yang di Perdakan | Dokumen | na | na | 1 | 4,500 | 3 | 12,000 | 3 | 12,000 | 3 | 12,000 | 3 | 10,000 | 13 | 50,500 | Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang |
| | | | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | % | 80% | 80% | 80% | 775 | 85% | 1,000 | 85% | 1,000 | 85% | 1,000 | 90% | 1,000 | 90% | 4,775 | Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Persentase Perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang memenuhi Standar THIS | % | na | 70 | 70 | 1,850 | 75 | 1,250 | 80 | 1,375 | 85 | 1,420 | 90 | 1,440 | 90 | 7,335 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Litbang bidang lingkungan | Jumlah Litbang bidang lingkungan | Hasil Litbang | - | - | - | - | 2 | 200 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 11 | 1,100 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Konservasi Eks Situ Kebun Raya | Jumlah Jenis Tanaman yang didokumentasikan di Kebun Raya | Jenis | 500 | 540 | 540 | 150 | 567 | 155 | 595 | 250 | 626 | 250 | 657 | 300 | 657 | 1,105 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | **5.2** | **Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas (Maju Infrastruktur dan Konektivitas)** | **1. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak** | **%** | **62.71** | **62.84** | **71.50** | | **75.08** | | **78.83** | | **82.77** | | **86.91** | | **86.91** | | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | | **2. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak** | **%** | **78.62** | **80.32** | **81.00** | | **84.75** | | **87.63** | | **90.26** | | **92.96** | | **92.96** | | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** |
| | | | | **3. Persentase Kondisi Jalan Mantap** | **%** | **74.22** | **61.22** | **70** | | **72** | | **74** | | **76** | | **80** | | **80** | | **Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang** |
| | | | | **4. Persentase Akses Internet** | **%** | **90** | **90** | **90** | | **90** | | **90** | | **90** | | **90** | | **90** | | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| | | | | | | | | | **1,190,221** | | **1,213,386** | | **1,404,883** | | **1,700,193** | | **1,886,674** | | **7,395,800** | |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Persentase Perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang memenuhi Standar THIS | % | na | 70 | 70 | 375 | 75 | 400 | 80 | 500 | 85 | 510 | 90 | 520 | 90 | 2,750 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Litbang Bidang Infrastruktur dan Konektifitas | Jumlah Litbang bidang Infrastruktur dan Konektifitas | Hasil Litbang | - | - | - | - | - | - | 1 | 150 | 2 | 200 | 2 | 200 | 5 | 550 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Pengembangan Perumahan | Luas Kawasan Kumuh dengan sarana dan prasarana yang baik | Ha | 517.78 | 1,047.78 | 1,147.78 | 30,150 | na | - | na | - | na | - | na | - | na | 30,150 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | Program Lingkungan Sehat Permukiman | | | | | | 34,250 | | 35,993 | | 50,363 | | 71,377 | | 74,672 | | 266,654 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | Persentase Cakupan Akses Air Minum Layak | % | 62.71% | 62.84% | 72.97% | | 75.08% | | 78.83% | | 82.77% | | 86.91% | | 86.91% | | |
| | | | | Persentase rumah tangga dengan akses Sanitasi layak | % | 78.62% | 80.32% | 81.00% | | 84.75% | | 87.63% | | 90.26% | | 92.96% | | 92.96% | | |
| | | | Program Penataan Kawasan | Jumlah Lingkungan Ruang Publik yang dilengkapi sarana dan prasarana Utilitas yang Baik | Kawasan | na | na | 1 | 1,000 | 6 | 10,300 | 7 | 15,450 | 8 | 21,630 | 9 | 22,712 | 31 | 71,092 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | Program Penataan Bangunan | Persentase Bangunan yang Tertata | % | 43.11% | 48.27% | 53.10% | 3,530 | na | - | na | - | na | - | na | - | 53.10% | 3,530 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | Program Penataan Bangunan dan Lingkungan | Persentase Bangunan Gedung dan Lingkungan Ruang Publik yang telah memenuhi NSPK | % | na | na | na | - | 58.41% | 5,833 | 64.25% | 8,166 | 70.67% | 12,249 | 77.74% | 12,862 | 77.74% | 39,110 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | Program Pengembangan Permukiman | | | | | | - | | 46,860 | | 68,065 | | 92,837 | | 101,568 | | 309,330 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | | Luas Kawasan Kumuh dengan sarana dan prasarana yang baik | Ha | 517.78 | 1,047.78 | 1,147.78 | | 1,247.78 | | 1,347.78 | | 1,447.78 | | 1,547.78 | | 1,547.78 | | |
| | | | | Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | % | 7.25% | 6.88% | 6.43% | | 5.83% | | 5.17% | | 4.43% | | 3.85% | | 3.85% | | |
| | | | | Persentase Kepala Keluarga yang memiliki Rumah | % | 83.30% | 87.30% | 88.72% | | 90.15% | | 91.58% | | 93.00% | | 94.43% | | 94.43% | | |
| | | | | Jumlah Kawasan Permukiman yang tertata Prasarana Utilitas | Kawasan | na | na | 11 | | 14 | | 17 | | 20 | | 23 | | 23 | | |
| | | | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | | | | | | 177,254 | | 113,869 | | 114,274 | | 142,145 | | 220,884 | | 768,426 | Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang |
| | | | | Panjang Jalan yang Terpelihara | Km | 1,415.67 | 926.68 | 1,059.56 | | 1,089.83 | | 1,120.10 | | 1,150.37 | | 1,210.92 | | 1,210.92 | | |
| | | | | | % | 74.21% | 61.22% | 70% | | 72% | | 74% | | 76% | | 80% | | 80% | | |
| | | | Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Teknis Jaringan Jalan dan Jembatan yang Tersedia | Dokumen | 12 | 7 | 30 | 51,668 | 30 | 44,815 | 30 | 56,651 | 30 | 65,649 | 30 | 72,235 | 150 | 291,018 | Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang Tersedia | Unit/ Set | 14 | 14 | 14 | 11,560 | 16 | 12,715 | 18 | 13,987 | 20 | 15,386 | 22 | 16,924 | 22 | 70,572 | Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang |
| | | | Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan | | | | | | 778,540 | | 721,896 | | 751,096 | | 963,464 | | 1,081,027 | | 4,296,023 | Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang |
| | | | | Panjang jalan yang terbangun | Km | 5.8 | 1.1 | 5.08 | | 5 | | 10 | | 10 | | 10 | | 40.08 | | |
| | | | | Panjang jalan yang ditingkatkan/dilebarkan | Km | 92.18 | 31.46 | 185 | | 174.49 | | 84.90 | | 99.50 | | 145 | | 688.89 | | |
| | | | Program Pembangunan dan Penggantian Jembatan | Panjang Jembatan yang terbangun | M | 1117.10 | 770.00 | 954.90 | 89,610 | 957.15 | 132,326 | 1,172.00 | 160,101 | 666.90 | 126,521 | 618.35 | 89,150 | 4,369.00 | 597,708 | Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang |
| | | | Program Pengembangan LLAJ | Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas jalan | % | 14% | 12% | 10% | 775 | 8% | 21,620 | 7% | 49,345 | 4% | 48,000 | 0% | 50,000 | 0% | 169,740 | Dinas Perhubungan |
| | | | Program Pengembangan LLALSDP | Jumlah trip pelayanan ALSDP | Trip | 3,048 | 3,568 | 3,672 | 300 | 3,702 | 40,555 | 3,778 | 87,598 | 3,815 | 94,000 | 3,856 | 95,000 | 3,856 | 317,453 | Dinas Perhubungan |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome*) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Kereta Api | Jumlah Penumpang Kereta Api per Tahun meningkat | Orang | 1,928,654 | 2,025,087 | 2,126,341 | 75 | 2,232,658 | 2,300 | 2,344,291 | 2,980 | 2,461,506 | 5,500 | 2,584,581 | 6,500 | 2,713,810 | 17,355 | Dinas Perhubungan |
| | | | Program Penyediaan Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan | Jumlah dokumen perencanaan | Dokumen | 6 | 8 | 2 | 60 | 12 | 1,900 | 16 | 2,800 | 20 | 16,000 | 22 | 16,000 | 22 | 36,760 | Dinas Perhubungan |
| | | | Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi | Persentase Akses Internet | % | 90% | 90% | 90% | 11,050 | 90% | 11,030 | 90% | 11,050 | 90% | 11,025 | 90% | 11,050 | 90% | 55,205 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Program Pengembangan Transmigrasi Sumsel | Jumlah infrastruktur yang di bangun di kawasan transmigrasi | Infrastruktur | na | na | 1 | 25 | na | - | na | - | na | - | na | - | na | 25 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | Program Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Sumsel | Jumlah infrastruktur yang di bangun di kawasan transmigrasi | Infrastruktur | na | na | na | - | 2 | 10,974 | 3 | 12,306 | 3 | 13,700 | 3 | 15,369 | 12 | 52,349 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | **Misi 5 : Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis & berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Tujuan 6 : Terwujudnya masyarakat madani** | **Indeks Demokrasi Indonesia** | **Indeks** | **74.04** | **82** | **87** | | **90** | | **92** | | **94** | | **95** | | **95** | | |
| | | **6.1** | **Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)** | **Persentase Penurunan Konflik Sosial** | **%** | **70** | **78** | **50** | | **60** | | **70** | | **80** | | **80** | | **80** | | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome*) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | | | | | | | **4,993** | | **23,849** | | **24,001** | | **26,788** | | **27,245** | | **106,876** | |
| | | | Program Perumusan Kebijakan Bidang Keagamaan | Persentase Bahan Kebijakan Bidang Keagamaan yang ditindaklanjuti | % | 100% | 100% | 100% | 449 | 100% | 7,423 | 100% | 6,915 | 100% | 8,131 | 100% | 7,608 | 100% | 30,526 | Sekretariat Daerah (*Biro Kesejahteraan Rakyat*) |
| | | | Program Kerjasama Wilayah Perbatasan | Prosentase Kerjasama yang difasilitasi | % | 100% | 100% | 100% | 245 | 100% | 550 | 100% | 600 | 100% | 650 | 100% | 600 | 100% | 2,645 | Sekretariat Daerah (*Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah*) |
| | | | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Persentase meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah prov sumsel | % | 100% | 100% | 100% | 500 | na | - | na | - | na | - | na | - | 100% | 500 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Program Pencegahan Konflik | Persentase Kabupaten/Kota Tanpa Konflik *(Zero Conflict)* | % | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 4,775 | 100% | 4,590 | 100% | 4,835 | 100% | 5,000 | 100% | 19,200 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Persentase Masyarakat yang Mengimplementasi dan Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Pancasila | % | 85.00% | 73.50% | 74.00% | 850 | 75.00% | 3,850 | 76.50% | 3,650 | 78% | 4,100 | 78.50% | 4,550 | 78.50% | 17,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Persentase Mitra yang Mendukung Pengembangan Wawasan Kebangsaan | % | 70% | 70% | 100% | 450 | 100% | 1,100 | 100% | 1,200 | 100% | 1,300 | 100% | 1,350 | 100% | 5,400 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Program Pendidikan Politik Masyarakat | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Berpolitik | % | 70% | 70% | 75% | 600 | 77% | 1,845 | 78% | 2,155 | 79% | 2,360 | 80% | 2,575 | 80% | 9,535 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Prov. Sumsel | % | 5% | 5% | 5% | 910 | 9% | 850 | 11% | 890 | 12% | 930 | 14% | 960 | 14% | 4,540 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Persentase Kepatuhan/ Kesadaran masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap Perda dan Perkada | % | 95% | 99% | 95% | 406 | 95% | 940 | 95% | 960 | 95% | 980 | 95% | 990 | 95% | 4,276 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Ketenteraman Serta Perlindungan Masyarakat | Persentase Satlinmas dan Pos Kamling yang Aktif | % | na | na | 65% | 140 | 75% | 630 | 85% | 750 | 95% | 850 | 99% | 950 | 99% | 3,320 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana Alam | Persentase Penurunan Daerah Rawan Kebakaran | % | na | na | 5% | 258 | 5% | 850 | 5% | 980 | 5% | 980 | 5% | 980 | 5% | 4,048 | Satuan Polisi Pamong Praja |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan Peranan Pembinaan Masyarakat Di Wilayah Sumsel | Jumlah Aparatur/ masyarakat Kab/Kota yang terbina terkait Perda dan Perkada, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masarakat serta Bahaya Kebakaran | Kabupaten/ Kota | 17 | 17 | 17 | 185 | 17 | 861 | 17 | 1,061 | 17 | 1,262 | 17 | 1,262 | 17 | 4,631 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan bidang Tata Kelola Pemerintahan | Persentase Perencanaan Pembangunan bidang Tata Kelola Pemerintahan yang memenuhi Standar THIS | % | na | 70 | 70 | - | 75 | 75 | 80 | 100 | 85 | 260 | 90 | 270 | 90 | 705 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Litbang bidang sosial budaya, masyarakat dan agama | Jumlah Litbang bidang sosial budaya, masyarakat dan agama | Hasil Litbang | - | - | - | - | 1 | 100 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 | 4 | 550 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | **Tujuan 7 : Meningkatnya daya saing pariwisata daerah melalui seni, budaya, dan religi** | **Persentase peningkatan jumlah wisatawan** | **%** | **5.95** | **9.96** | **5.00** | | **5.00** | | **5.00** | | **5.00** | | **5.00** | | | | **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata** |
| | | **7.1** | **Meningkatnya Seni, Budaya, dan Pariwisata (Maju Seni, Budaya, dan Pariwisata)** | **1. Jumlah Wisatawan Mancanegara** | **Orang** | **67,470** | **70,917** | **74,463** | | **78,186** | | **82,095** | | **86,200** | | **90,510** | | **90,510** | | **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata** |
| | | | | **2. Jumlah Wisatawan Nusantara** | **Orang** | **7,474,422** | **8,221,864** | **8,632,957** | | **9,064,605** | | **9,517,835** | | **9,993,727** | | **10,493,413** | | **10,493,413** | | **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata** |
| | | | | **3. Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan** | **Sertifikat** | **17** | **24** | **28** | | **32** | | **36** | | **40** | | **44** | | **44** | | **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata** |
| | | | | | | | | | **17,631** | | **22,211** | | **26,493** | | **31,662** | | **37,840** | | **135,837** | |
| | | | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Sumsel | Orang | 7,541,912 | 8.221.864 | 8,632,957 | 775 | 9,064,605 | 930 | 9,517,835 | 1,116 | 9,993,727 | 1,339 | 10,493,413 | 1,607 | 10,493,413 | 5,767 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Jumlah Paket Wisata Religi | Paket | 53 | 53 | 55 | 5,004 | 57 | 6,004 | 58 | 7,204 | 59 | 8,645 | 60 | 10,374 | 60 | 37,231 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | | Program Pengembangan Kemitraan | Jumlah kemitraan | Kemitraan | 53,858 | 49,047 | 51,499 | 450 | 53,951 | 540 | 56,403 | 648 | 58,855 | 778 | 61,307 | 933 | 61,307 | 3,349 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Angka komulatif jumlah WBTB yang terlindungi, termanfaatkan dan dikembangkan | WBTB | 17 | 24 | 74 | 4,502 | 124 | 5,402 | 174 | 6,483 | 224 | 7,779 | 274 | 9,335 | 274 | 33,502 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome*) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Angka komulatif jumlah cagar budaya yang terlindungi, termanfaatkan dan dikembangkan | Cagar Budaya | 250 | 350 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 720 | 750 | 864 | 850 | 1,037 | 850 | 3,721 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | | Program Pengembangan Nilai Budaya | Angka komulatif jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terlindungi, termanfaatkan dan dikembangkan | Objek Pemajuan Kebudayaan | 350 | 400 | 450 | 375 | 500 | 450 | 550 | 540 | 600 | 648 | 650 | 778 | 650 | 2,791 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | | Program Permuseuman dan Nilai-Nilai Budaya Sumsel | Jumlah kunjungan museum | Orang | 40,350 | 41,350 | 49,620 | 5,925 | 49,720 | 7,110 | 71,452 | 8,532 | 85,743 | 10,238 | 102,892 | 12,286 | 102,892 | 44,091 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Jumlah Wisatawan yang datang ke Anjungan Sumsel Taman Mini Indonesia Indah | Orang | 50,000 | 55,000 | 60,000 | - | 62,000 | 875 | 64,000 | 900 | 66,000 | 950 | 67,000 | 1,000 | 67,000 | 3,725 | Badan Penghubung |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pariwisata | Persentase Perencanaan Pembangunan bidang Pariwisata yang memenuhi Standar THIS | % | na | 70 | 70 | 100 | 75 | 150 | 80 | 200 | 85 | 220 | 90 | 240 | 90 | 910 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Litbang bidang sosial budaya masyarakat dan agama | Jumlah Litbang bidang sosial budaya, masyarakat dan agama | Hasil Litbang | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 150 | 1 | 150 | 2 | 200 | 2 | 250 | 6 | 750 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | **Tujuan 8 : Meningkatnya daya saing pemuda dan olahraga** | **Peringkat Pembangunan Pemuda** | **Peringkat** | **-** | **-** | **15** | | **14** | | **13** | | **12** | | **10** | | **10** | | **Dinas Pemuda dan Olahraga** |
| | | **8.1** | **Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga (Maju Pemuda dan Olahraga)** | **1. Peringkat Sumsel pada Pekan Olahraga Nasional (PON)** | **Peringkat** | **21 (th. 2016)** | **21 (th. 2016)** | **-** | | **10** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **Dinas Pemuda dan Olahraga** |
| | | | | **2. Jumlah Pemuda Berprestasi (Akademis, Seni, Budaya, Olahraga dan Wirausaha Muda)** | **Orang** | **9** | **24** | **31** | | **31** | | **31** | | **31** | | **31** | | **155** | | **Dinas Pemuda dan Olahraga** |
| | | | | **3. Persentase Kabupaten/Kota Layak Pemuda** | **%** | **0** | **0** | **0** | | **5.88** | | **11.76** | | **17.65** | | **23.53** | | **23.53** | | **Dinas Pemuda dan Olahraga** |
| | | | | | | | | | **3,445** | | **48,895** | | **60,510** | | **60,910** | | **61,410** | | **235,170** | |
| | | | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan | Orang | 519 | 422 | 673 | 1,710 | 1,940 | 4,260 | 4,077 | 9,420 | 2,811 | 6,800 | 3,511 | 7,215 | 13,012 | 29,405 | Dinas Pemuda dan Olahraga |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | Jumlah pemuda yang meningkat potensinya dalam berwirausaha | Orang | na | 20 | 25 | 110 | na | - | na | - | na | - | na | - | na | 110 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Peningkatan Imtaq dan Iptek Kepemudaaan serta Penanggulangan HIV-AIDS | Jumlah Duta Pemuda Anti Narkoba | Orang | 460 | 100 | 100 | 70 | 450 | 300 | 1,150 | 950 | 1,150 | 1,000 | 1,150 | 1,000 | 4,000 | 3,320 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia | Paket | na | 3 | 18 | 485 | 393 | 3,050 | 377 | 3,480 | 381 | 4,010 | 377 | 4,340 | 1,546 | 15,365 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Pengelolaan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan | Jumlah tenaga keolahragaan di Sumatera Selatan | Orang | 50 | 550 | 90 | 280 | 190 | 700 | 140 | 750 | 140 | 840 | 140 | 900 | 700 | 3,470 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Pemassalan Olahraga | Angka Partisipasi Masyarakat dalam melakukan aktifitas olahraga | Orang | 3,259 | na | 1,000 | 90 | 1,100 | 300 | 1,100 | 300 | 1,100 | 300 | 1,100 | 300 | 5,400 | 1,290 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Pembinaan dan Pengelolaan Olahraga Pendidikan | | | | | | 500 | | 3,600 | | 11,060 | | 4,600 | | 4,900 | | 24,660 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | Jumlah medali Sumatera Selatan | Medali | 39 Medali Emas | 22 Medali Emas | 30 | | 33 | | 35 | | 37 | | 40 | | 175 | | |
| | | | | Jumlah atlet potensial Sumatera Selatan | Orang | na | na | 200 | | 420 | | 470 | | 420 | | 370 | | 1,910 | | |
| | | | Program Pengelolaan Kejuaraan Olahraga dan | | | | | | 100 | | 35,760 | | 33,550 | | 42,400 | | 41,785 | | 153,595 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | Peringkat Provinsi Sumatera Selatan pada PON dan | Peringkat | 21 | na | na | | 10 | | | | | | | | 10 | | |
| | | | | Jumlah Kompetisi Olahraga yang diselenggarakan | Kompetisi | na | na | 300 | | 1,289 | | 1,299 | | 1,360 | | 1,293 | | 5,541 | | |
| | | | Program Pembinaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda | Jumlah Kabupaten/Kota Layak Pemuda Tingkat Nasional | Kabupaten/ Kota | na | na | na | - | 1 | 300 | 2 | 200 | 3 | 200 | 4 | 200 | 10 | 900 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan | Sarpras | na | na | na | - | 2 | 100 | 2 | 150 | 3 | 200 | 3 | 200 | 10 | 650 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Kepramukaan | Angka Partisipasi Masyarakat dalam melakukan aktifitas Kepramukaan | Orang | na | na | na | - | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 1,200 | 1,600 | Dinas Pemuda dan Olahraga |

| Kode | | | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact/Outcome)* | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya | Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang Memenuhi Standar THIS | % | na | 70 | 70 | 100 | 75 | 125 | 80 | 250 | 85 | 160 | 90 | 170 | 90 | 805 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

# BAB VII

# ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA SELATAN

Arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 disusun dengan menggunakan pendekatan Kabupaten/Kota, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan.

## 7.1 Kondisi Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota, meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, dan Kota Lubuklinggau. Dalam hal pembangunan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan bahwa masih adanya kesenjangan baik ekonomi maupun sosial. Kesenjangan ekonomi antar wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi antar wilayah yang belum merata dan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi. Kesenjangan sosial dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin yang masih cukup tinggi atau mengalami peningkatan angka kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum merata di seluruh wilayah. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial melalui pemerataan pembangunan wilayah sehingga dapat tercapainya pemerataan ekonomi dan pendapatan, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun gambaran kondisi pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang dilihat dari indikator utama makro yakni pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan IPM dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pertumbuhan Ekonomi

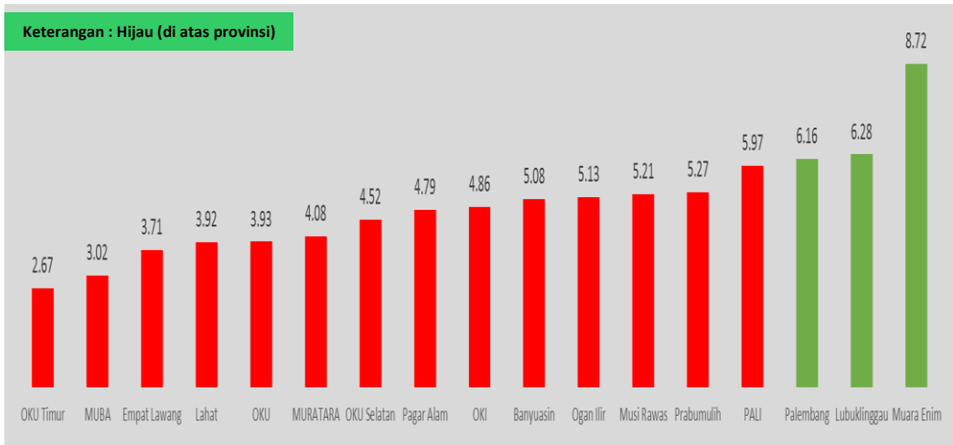
   Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan III Tahun 2018 sebesar 6,14% yang lebih tinggi dibanding tahun 2017 sebesar 5,51%. Pertumbuhan ini berada di atas pertumbuhan

ekonomi nasional sebesar 5,17% dan diatas target RPJMD sebesar 5,80. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan sudah baik. Apabila dilihat dari sebaran pertumbuhan ekonomi yang ada di tiap Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan pada tahun 2017 menunjukan bahwa:

1. Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan ekonomi di atas provinsi sebanyak 3 (tiga) Kabupaten/Kota, meliputi Kabupaten Muara Enim, Kota Lubuklinggau dan Kota Palembang.
2. Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan ekonomi di bawah provinsi sebanyak 14 (empat belas) Kabupaten/Kota, meliputi Kabupaten PALI, Kota Prabumulih, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKI, Kota Pagar Alam, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten OKU, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten OKU Timur.

Kabupaten/Kota yang menunjukan pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah Kabupaten OKU Timur sebesar 2,67%, sedangkan daerah yang paling tinggi adalah Kabupaten Muara Enim sebesar 8,72%. Hal ini dapat dilihat pada **Gambar 7.1** berikut.

**Gambar 7.1**
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017




*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

b. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 12,82% yang lebih rendah dibanding tahun 2017 sebesar 13,19%, namun lebih tinggi dibanding nasional sebesar 9,82%. Dari hasil analisis data susenas disebutkan bahwa penyebab tingginya kemiskinan tersebut karena kenaikan pendapatan penduduk miskin (yang 50,04% bekerja pada sektor perkebunan dan 20,25% bekerja di sektor pertanian) tidak

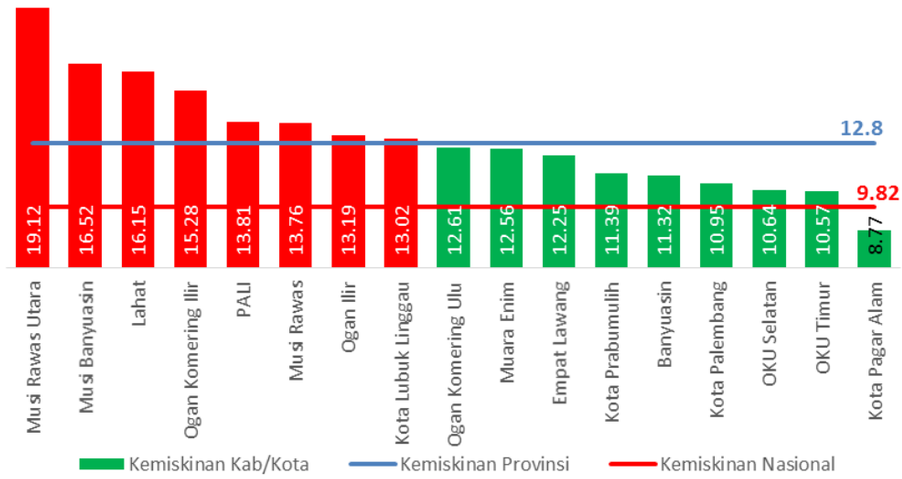
sebanding dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan dasar akibat rendahnya harga komoditas (khusunya sawit/karet) di tingkat petani dan intervensi program pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan sosial selama ini dilakukan belum cukup merata dan tepat sasaran. Selain itu, dari hasil pengolahan Basis Data Terpadu (BDT) diketahui bahwa banyak penduduk miskin belum memiliki akses layanan infrastruktur dasar, seperti akses sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak. Selain itu, banyak pula penduduk miskin yang tidak memiliki mata pencaharian/perkerjaan yang layak bahkan tidak berkerja sama sekali.

Dilihat dari penduduk miskin yang ada di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni Kabupaten/Kota dengan penduduk miskin di atas rata-rata provinsi dan nasional, kabupaten/kota di bawah rata-rata provinsi dan di atas nasional, serta kabupaten/kota di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 menunjukan bahwa:

1. Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin di atas rata-rata provinsi dan nasional sebanyak 8 (delapan) Kabupaten/Kota, meliputi Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kota Lubuklinggau.
2. Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin di bawah rata-rata provinsi dan di atas rata-rata nasional sebanyak 8 (delapan) Kabupaten/Kota, meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Empat Lawang, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten OKU Timur.
3. Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin di bawah rata-rata provinsi dan nasional terdapat 1 (satu) Kota, yakni Kota Pagar Alam.

Kabupaten/Kota yang menunjukan persentase penduduk miskin paling rendah adalah Kota Pagar Alam sebesar 8,77%, sedangkan daerah yang persentase penduduk miskin paling tinggi adalah Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 19,12%. Persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dapat dilihat pada **Gambar 7.2** berikut.

**Gambar 7.2**
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018




*Sumber: Susenas BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2018 dan Profil Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

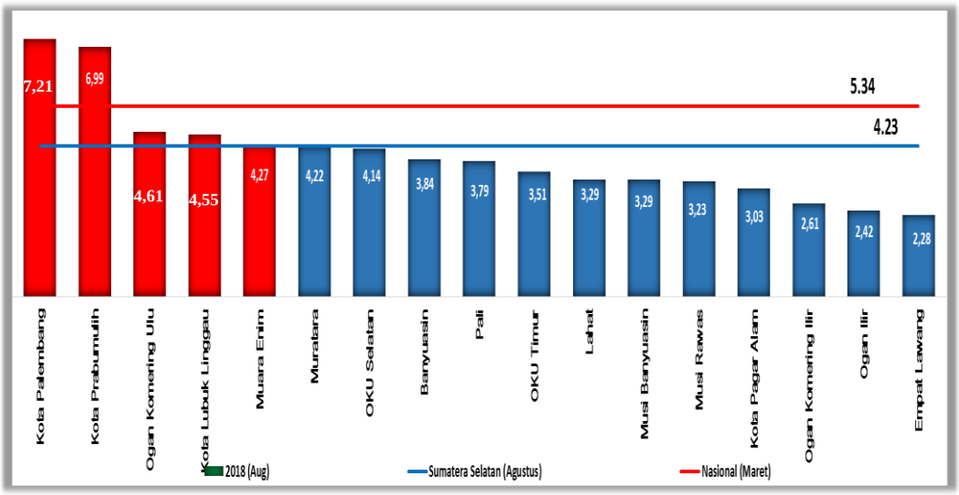
c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Selatan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Selatan per Agustus 2018 tahun sebesar 4,23% lebih rendah atau menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 4,39% dan lebih rendah dibandingkan dengan nasional per Maret tahun 2018 sebesar 5,34%. Hal ini berarti bahwa masih adanya pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah pengggangguran sebanyak 175.122 jiwa yang menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 181.000 jiwa. Apabila dilihat dari TPT Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan menunjukan bahwa:

1. Kabupaten/Kota dengan TPT di atas provinsi dan nasional sebanyak 5 (lima) Kabupaten/Kota, meliputi Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten OKU, Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Muara Enim.
2. Kabupaten/Kota dengan TPT di bawah provinsi dan nasional sebanyak 11 (sebelas) Kabupaten/Kota, meliputi Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Pagar Alam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Empat Lawang.

Kabupaten/Kota yang menunjukan TPT paling rendah adalah Kabupaten Empat Lawang sebesar 2,28%, sedangkan TPT paling tinggi adalah Kota Palembang sebesar 7,21%. Adapun TPT Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dapat dilihat pada **Gambar 7.3** berikut.

**Gambar 7.3**
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan per Agustus Tahun 2018




*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

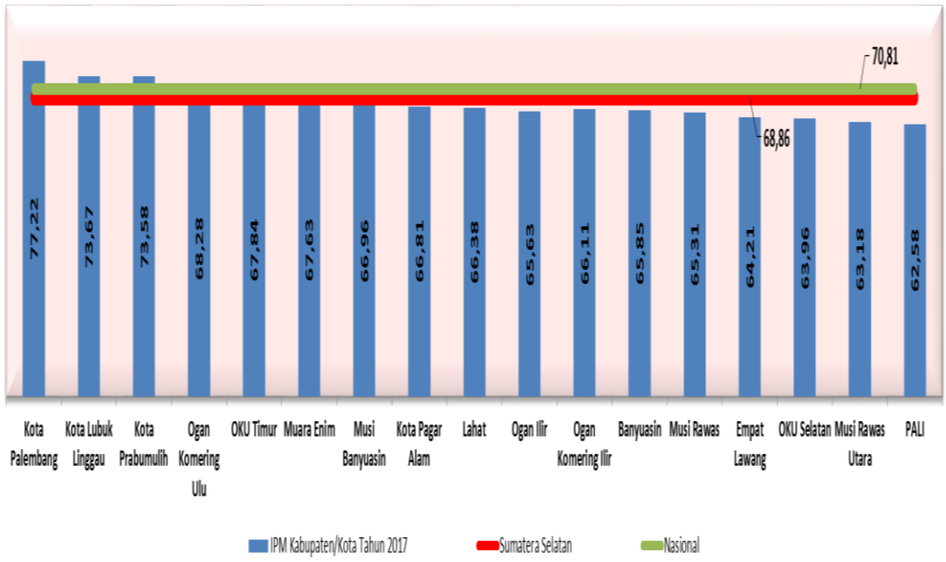
d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 sebesar 68,86% atau meningkat dari tahun 2016 sebesar 68,24% dan lebih tinggi diatas nasional pad atahun 2017 sebesar 68,30%. Hal ini menunjukan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Apabila dilihat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan menunjukan bahwa:

1. Kabupaten/Kota dengan IPM lebih tinggi atau di atas dari provinsi dan nasional sebanyak 3 (tiga) kota, meliputi Kota Palembang, Kota Lubuklinggau dan Kota Prabumulih.
2. Kabupaten/Kota dengan IPM lebih rendah dari provinsi dan nasional sebanyak 14 (empat belas) Kabupaten/Kota, meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Kabupaten/Kota yang menunjukan IPM paling rendah adalah Kabupaten PALI sebesar 62,58%, sedangkan IPM paling tinggi adalah Kota Palembang sebesar 77,22%. Adapun IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 dapat dilihat pada **Gambar 7.4** berikut.

**Gambar 7.4**
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017




*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

e. Infrastruktur

Kondisi Infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari jaringan jalan mantap, akses air minum, dan akses sanitasi (air limbah).

1. Jaringan Jalan

   Kondisi kemantapan jaringan jalan provinsi pada tahun 2017 sebesar 74,2% yang lebih rendah atau mengalami penurunan dibanding tahun 2016 sebesar 82,3%. Kondisi kemantapan jaringan jalan Kabupaten/Kota di Provinsi Suamtera Selatan, yakni

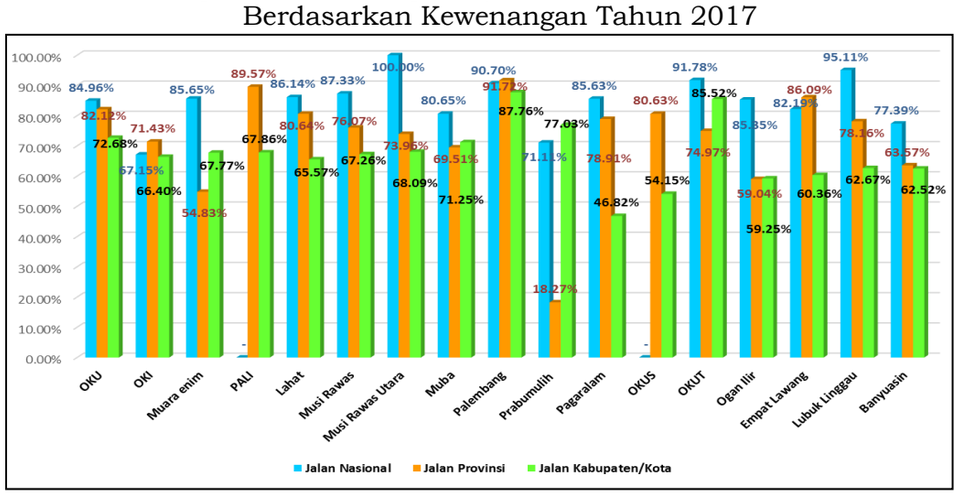
   a) Kabupaten/Kota dengan kemantapan jalan diatas rata-rata kemantapan jalan provinsi sebanyak 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota, meliputi Kabupaten OKU, Kabupaten PALI, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Lubuklinggau.

   b) Kabupaten/Kota dengan kemantapan jalan dibawah rata-rata kemantapan jalan provinsi sebanyak 7 (tujuh) Kabupaten/Kota, meliputi Kabupaten OKI, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Banyuasin.

Kabupaten/Kota yang menunjukan kondisi kemantapan jalan paling rendah adalah Kota Prabumulih sebesar 18,27% sepanjang 2,07 Km dari 11,34 Km yang ada, sedangkan kondisi kemantapan jalan paling tinggi adalah Kota Palembang sebesar 91,72% sepanjang 54,047 dari 58,93 Km.

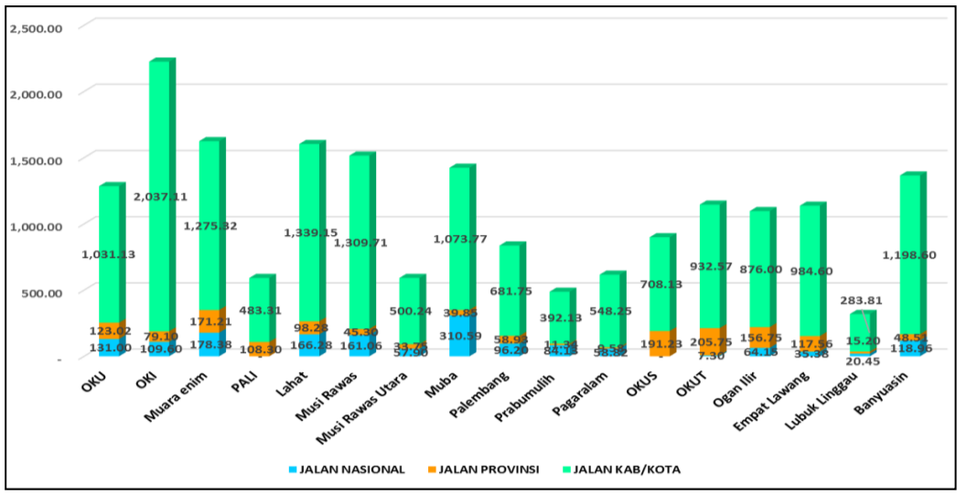
Adapun kondisi kemantapan jalan dan panjang jalan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 dapat dilihat pada **Gambar 7.5** dan **Gambar 7.6** berikut.

**Gambar 7.5**
Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Kewenangan Tahun 2017




*Sumber: BBPJN III, DPU BM Sumsel, dan DAK Kab/Kota, 2018*

**Gambar 7.6**
Panjang Jalan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Kewenangan Tahun 2017




*Sumber: BBPJN III, DPU BM Sumsel, dan DAK Kab/Kota, 2018*

2. Akses Air Minum

Akses Air Minum yang layak Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 sebesar 62,84% dan tidak ada akses sebesar 37,16%, sedangkan capaian nasional sebesar 72,99%.. Adapun akses pembangunan air minum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, yakni:

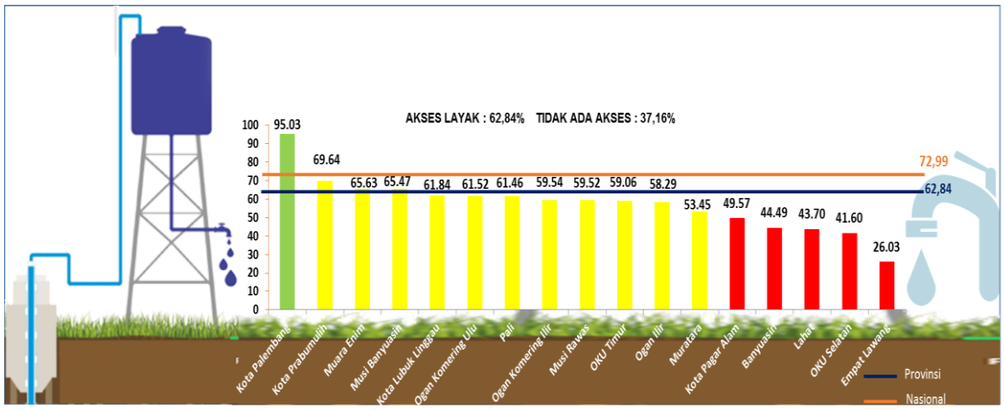
a) Kabupaten/Kota dengan akses air minum layak di atas rata-rata provinsi sebanyak 4 (empat) Kabupaten/Kota, meliputi Kota

Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Musi Banyuasin.

b) Kabupaten/Kota dengan akses air minum layak di bawah rata-rata nasional sebanyak 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota, meliputi Kota Lubuklinggau, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten PALI, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Pagar Alam, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten Empat Lawang.

Kabupaten/Kota yang menunjukan akses air minum paling rendah adalah Kabupaten Empat Lawang sebesar 26,03%, sedangkan kondisi akses air minum paling tinggi adalah Kota Palembang sebesar 95,03%. Adapun akses air minum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dapat dilihat pada **Gambar 7.7** berikut.

**Gambar 7.7**
Akses Air Minum
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018




*Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik, 2018*

3. Akses Sanitasi (Air Limbah)

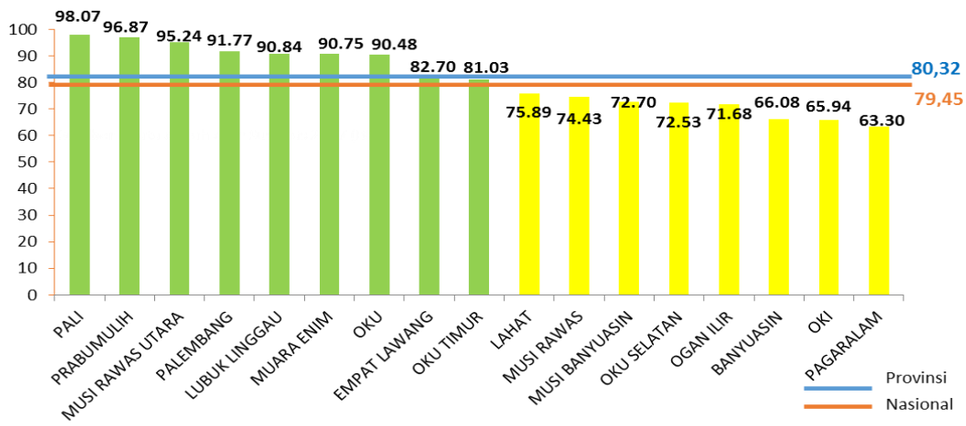
Akses Sanitasi (Air Limbah) yang layak Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 sebesar 80,32%, sedangkan capaian nasional sebesar 79,45%. Adapun akses sanitasi (air limbah) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, yakni:

a) Kabupaten/Kota dengan akses sanitasi (air limbah) layak di atas rata-rata provinsi sebanyak 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, meliputi Kabupaten PALI, Kota Prabumulih, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten OKU, Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten OKU Timur.

b) Kabupaten/Kota dengan akses sanitasi (air limbah) layak di bawah rata-rata nasional sebanyak 8 (delapan) Kabupaten/Kota, meliputi Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKI, dan Kota Pagar Alam.

Kabupaten/Kota yang menunjukan akses sanitasi (air limbah) paling rendah adalah Kota Pagar Alam sebesar 63,30%, sedangkan kondisi akses air minum paling tinggi adalah Kabupaten PALI sebesar 98,07%. Adapun akses sanitasi (air limbah) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dapat dilihat pada **Gambar 7.8** berikut.

**Gambar 7.8**
Akses Sanitasi (Air Limbah)
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018




*Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statitik, 2018*

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai gambaran kondisi pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka dapat disandingkan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, TPT, dan IPM di tiap Kabupaten/Kota. Hal ini dapat ditunjukan ke dalam diagram kartesius yang terdiri dari 4 (empat) kuadran. Adapun penjelasannya yakni sebagai berikut.

a. Pertumbuhan ekonomi dengan penurunan kemiskinan

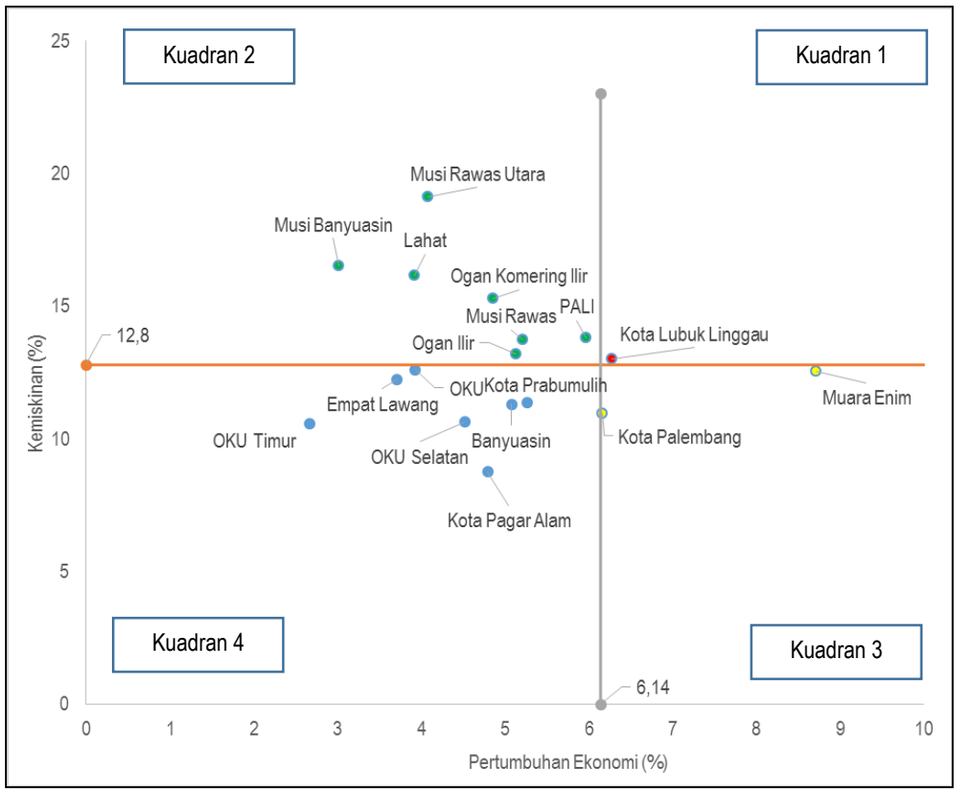
Sebaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan menyandingkan antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan kemiskinan, yakni:

1. **Kuadran 1**, Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan ekonomi dan persentase kemiskinan di atas rata-rata provinsi terdapat 1 (satu) kota, yakni Kota Lubuklinggau. Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota tersebut dapat mendorong penurunan

kemiskinan lebih cepat. Oleh karena itu, wilayah tersebut diharapkan dapat tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta meningkatkan upaya penurunan kemiskinan.

2. **Kuadran 2**, Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi dan persentase angka kemiskinan di atas rata-rata provinsi sebanyak 7 (tujuh) Kabupaten/Kota, meliputi Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota tersebut tetap menjaga konsistensi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif pada sektor dan komoditas unggulan daerah yang berpotensi untuk berkembang.
3. **Kuadran 3,** Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi dan persentase angka kemiskinan di bawah rata-rata provinsi sebanyak 2 (dua) Kabupaten/Kota, meliputi Kabupaten Muara Enim dan Kota Palembang. Hal ini menunjukan bahwa Kabupaten/Kota ini memiliki pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, namun belum memberikan dampak yang signifikan pada penurunan kemiskinan. Diharapkan wilayah tersebut untuk mendorong kegiatan perekonomian yang inklusif pada sektor-sektor unggulan yang berpotensi dan mampu menyerap banyak tenaga kerja, mendorong ekonomi kerakyatan (UMKM dan wirausaha), serta perlunya penajaman kembali kebijakan penanggulangan kemiskinan agar lebih tepat sasaran.
4. **Kuadran 4,** Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan ekonomi dan persentase angka di bawah rata-rata provinsi sebanyak 7 (tujuh) Kabupaten/Kota, meliputi Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU, Kota Pagar Alam, Kabupaten Banyuasin, dan Kota Prabumulih. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota tersebut dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif dengan meningkatkan produktivitas sektor unggulan dan kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terutama masyarakat miskin, perlu penajaman kembali kebijakan penanggulangan kemiskinan yang prioritas dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penduduk miskin.

**Gambar 7.9**
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan




*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2018, Susenas BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2018 dan Profil Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

b. Pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran

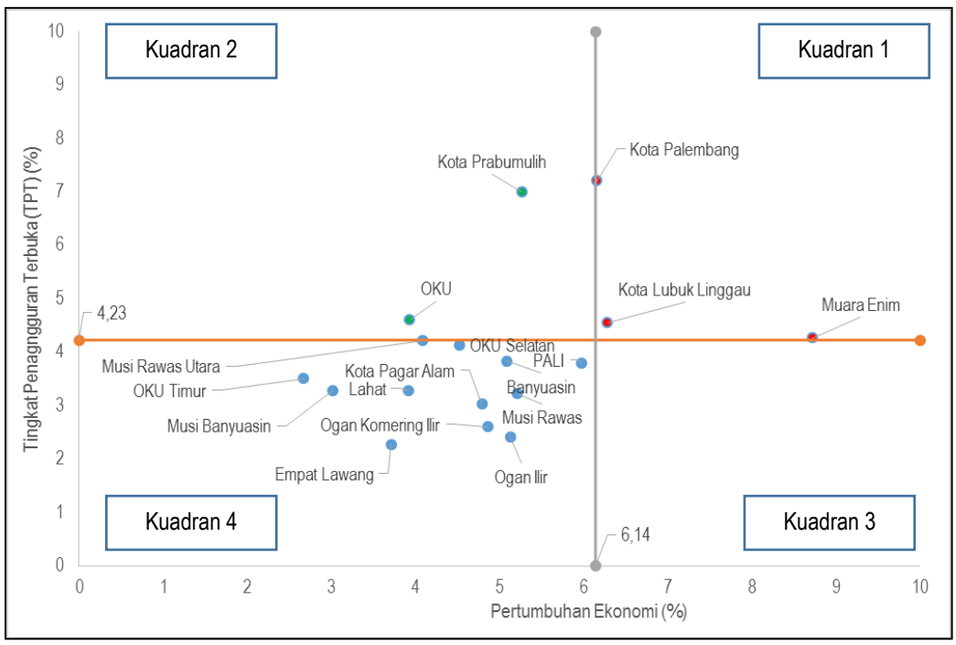
Sebaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan menyandingkan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan pengangguran, yakni:

1. **Kuadran 1**, Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi sebanyak 3 (tiga) Kabupaten/Kota, meliputi Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Muara Enim. Hal ini menunjukan bahwa Kabupaten/Kota tersebut mampu mendorong perluasan lapangan kerja yang baik. Oleh karena itu, diharapkan dapat menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan dan meningkatkan nilai tambah produk sektor dan mengarah pada penyerapan banyak tenaga kerja.
2. **Kuadran 2**, Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi terdapat 2 (dua) Kabupaten/Kota, meliputi Kabupaten OKU dan Kota Prabumulih. Hal ini menunjukan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan lebih rendah. Dengan demikian, perlu mendorong sektor-sektor ekonomi

yang memiliki pertumbuhan yang inklusif dan mampu menyerap banyak tenaga kerja.

3. **Kuadran 3,** tidak ada Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi. Hal ini menunjukan bahwa tidak terdapat daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang tidak mampu mempercepat penurunan pengangguran.
4. **Kuadran 4,** Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi sebanyak 12 (dua belas) Kabupaten/Kota, meliputi Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten OKU Selatan, Kota Pagar Alam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten PALI. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota tersebut belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik yang mampu mengurangi pengangguran, sehingga diharapkan pemerintah Kabupaten/Kota harus mampu memacu pengembangan sektor ekonomi yang inklusif dan dapat menyerap banyak tenaga kerja.

**Gambar 7.10**
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus Tahun 2018
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan




*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

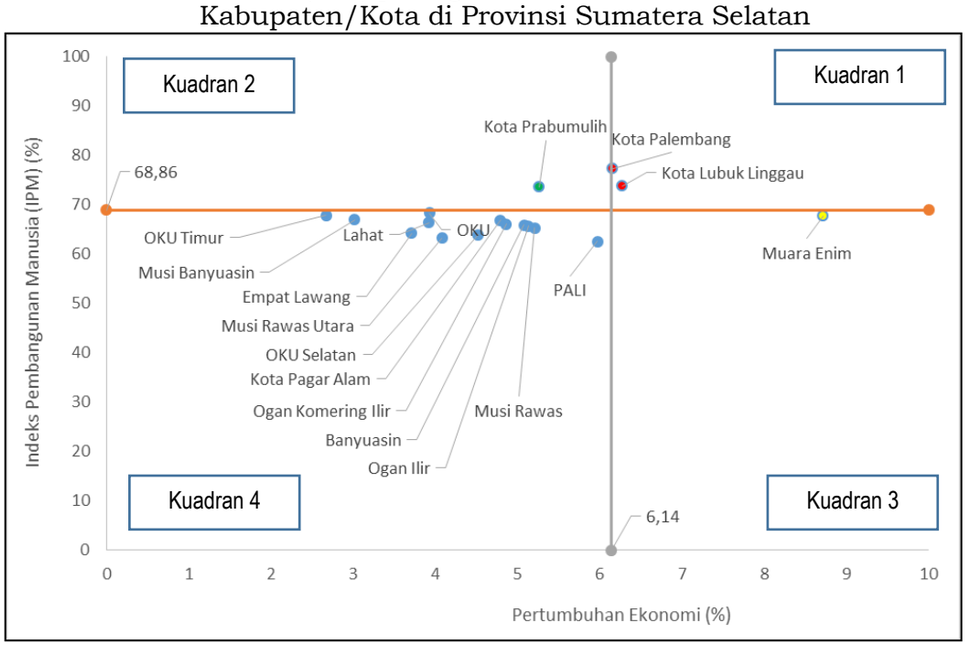
c. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM

Sebaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan menyandingkan antara pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan IPM, yakni:

1. **Kuadran 1**, Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi terdapat 2 (dua) Kabupaten/Kota, meliputi Kota Palembang dan Kota Lubulinggau. Hal ini menunjukan bahwa kebijakan pertumbuhan ekonomi telah sejalan dengan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pemerintah Kabupaten/Kota perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi daerah yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.
2. **Kuadran 2**, Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi terdapat 1 (satu) kota, yakni Kota Prabumulih. Hal ini menunjukan bahwa kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Oleh karena itu, perlu mendorong percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal.
3. **Kuadran 3,** Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi terdapat 1 (satu) kabupaten, yakni Kabupaten Muara Enim. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang sudah baik belum mampu meningkatkan IPM sehingga diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi yang inklusif dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
4. **Kuadran 4,** Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi sebanyak 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota, meliputi Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten OKU, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten OKU Selatan, Kota Pagar Alam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten PALI Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang ada belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan belum mampu meningkatkan IPM. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten/Kota perlu membenahi pelayan publik terutama di bidang

pendidikan dan kesehatan, serta harus mampu memacu permbangunan ekonomi yang inklusif dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi utama daerah.

**Gambar 7.11**
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus Tahun 2018
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan



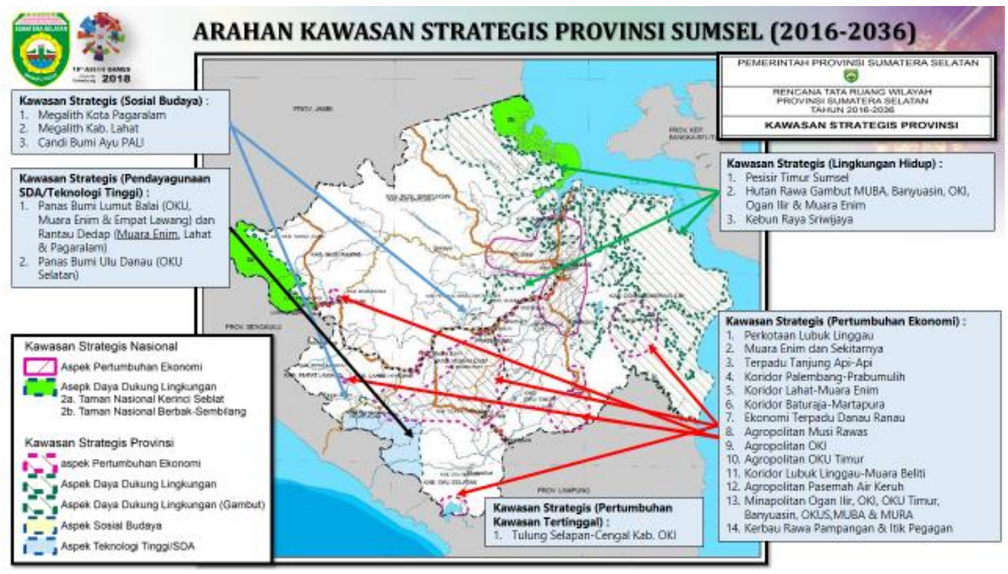

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

## 7.2 Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan berada di 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota dapat dilihat dari Kawasan Strategis Nasional, Proyek Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi, dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, potensi dan keunggulan wilayah, serta arah kebijakan pengembangan wilayah. Kawasan Strategis Nasional (KSN) berada di 5 (lima) Kabupaten/Kota (Kota Palembang, Lubuklinggau, Kabupaten Banyuasin, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara), Proyek Strategis Nasional (PSN) sebanyak 16 proyek yang berada di Kabupaten/Kota, Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK) berada di 17 Kabupaten/Kota.

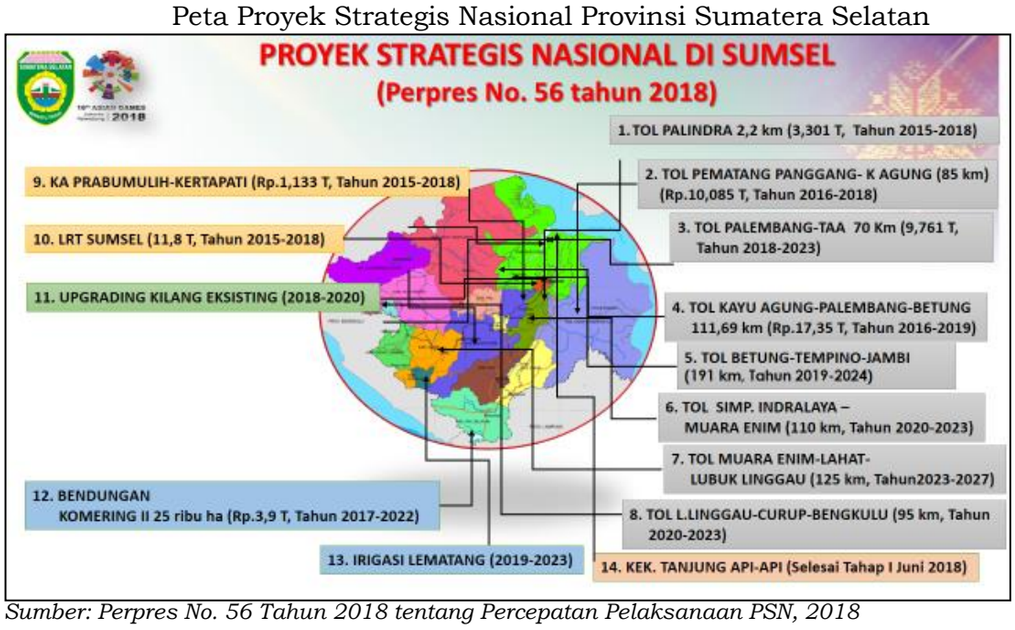
Kawasan Strategis Provinsi terdiri dari kawasan strategis dengan kategori kepentingan pertumbuhan ekonomi, memiliki nilai strategis sosial budaya, memiliki fungsi daya dukung lingkungan hidup, memiliki fungsi pendayagunaan Sumber Daya Alam/Teknologi Tinggi, dan memiliki fungsi memperceat pertumbuhan kawasan tertinggal. Adapun Kawasan Strategis Provinsi yang ada di tiap Kabupaten/Kota dan Proyek Strategis Nasional dapat dilihat pada **Gambar 7.11** dan **Gambar 7.12.**

**Gambar 7.12**
Peta Arahan Kawasan Strategis
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036



*Sumber: Perda No. 11 Tahun 2016 tentang RTRW Prov. Sumsel, 2016*

**Gambar 7.13**
Peta Proyek Strategis Nasional Provinsi Sumatera Selatan



*Sumber: Perpres No. 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, 2018*

Untuk penjelasan secara lebih rinci mengenai arahan pengembangan wilayah, potensi dan keunggulan wilayah dan arah kebijakan pengembangan wilayah tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 7.2.1 Kabupaten Ogan Ilir

a. Arahan Pengembangan Wilayah

Kabupaten Ogan Ilir memiliki Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Strategis Kabupaten, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Strategis, yaitu:

1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP), meliputi Kawasan Minapolitan Pemulutan Barat (kategori kepentingan pertumbuhan ekonomi), dan Kebun Raya Sriwijaya dan Kawasan Hutan Rawa Gambut (memiliki fungsi daya dukung lingkungan hidup).
2) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi Kawasan Perkotaan Indralaya dan sekitarnya (PKW), Kawasan Koridor Kota Palembang-Indralaya, Kawasan Koridor Indralaya-Tanjung Raja, Kawasan Agropolitan Muara Kuang dan Indralaya Utara, Kawasan Minapolitan Pemulutan Barat, Kawasan Kota Terpadu Mandiri Transmigrasi (KTM) Parit Rambutan, Kawasan Kurang Berkembang Rambang Kuang dan Muara Kuang.
3) Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Jalan Tol Palembang-Simpang Indralaya (Palindra) sepanjang 22 Km dengan investasi sekitar Rp. 3,301 Triliun yang dibangun pada tahun 2015-2018 yang merupakan bagian dari 8 (delapan) ruas Trans Sumatera. Selain itu, Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim sepanjang 110 km.

b. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Sektor unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 6 (enam) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 86,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2017, meliputi

1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,06%, terdiri dari tanaman perkebunan (24,06%), perikanan (23,54%), tanaman pangan (18,84%), tanaman hortikultura (16,10%), peternakan (13,79%), jasa pertanian dan perburuan (2,08%), serta kehutanan dan penebangan kayu (1,58%).
2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,59%, terdiri dari perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor sebesar 91,27% dan perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya sebesar 8,73%.
3) Sektor Konstruksi sebesar 17,56%
4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 11,52%, dengan kontribusi terbesar pada industri makanan dan minuman sebesar 59,36%, kemudian industri batubara dan pengilangan migas sebesar 17,22%.
5) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 9,82%.
6) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,65%, dengan kontribusi terbesar dari penggalian pasir, batu kali dan lain sebagainya sebesar 63,00%, kemudian pertambangan minyak, gas, dan panas bumi sebesar 37,00%.

c. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah hingga tahun 2023

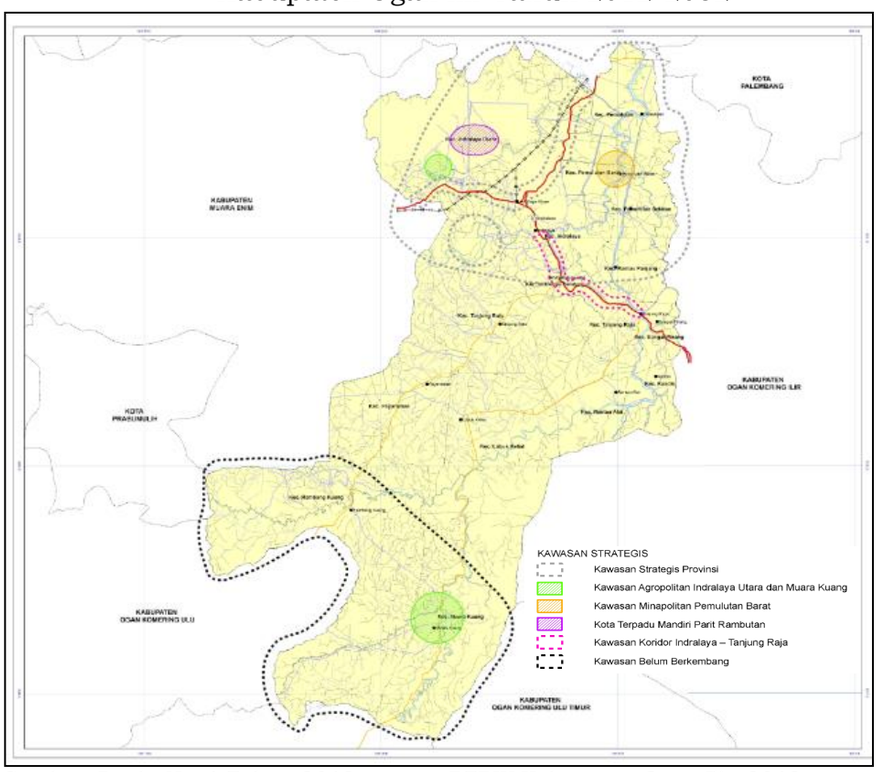
1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 5,03% - 6,13% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,25%, yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Peningkatan IPM menjadi 69,89.
4) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 59,04%, akses air minum layak sebesar 47,96%, dan akses sanitasi layak sebesar 54,80%.
5) Pengembangan Pusat Pendidikan.
6) Pengembangan Kebun Raya Sriwijaya dan *Science Techno Park* (STP).
7) Percepatan Pembangunan Jalan Tol Indralaya-Prabumulih-Muara Enim.
8) Pengembangan Daerah Perbatasan Palembang-Ogan Ilir.
9) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
10) Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rambutan.

**Tabel 7.1**
Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018-2023

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi | IPM | Tingkat Kemiskinan |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5,03-5,93 | 66,16 | 13,19 |
| 2019 | 5,03-5,93 | 67,59 | 12.65 |
| 2020 | 5,03-5,93 | 68,17 | 11,77 |
| 2021 | 5,03-5,93 | 68,74 | 10,89 |
| 2022 | 5,03-6,13 | 69,31 | 10,01 |
| 2023 | 5,03-6,13 | 69,89 | 9,25 |

*Sumber: Konfirmasi Bappeda Kabupaten Ogan Ilir, 2018, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2018*

**Gambar 7.14**
Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012-2032




*Sumber: Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Ogan Ilir, 2012*

### 7.2.2 Kota Palembang

a. Arahan Pengembangan Wilayah

Kota Palembang memiliki Kawasan Strategis Nasional, Proyek Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kota, yaitu:

1) Kawasan Strategis Nasional (KSN), yakni Kota Palembang dan sekitarnya.
2) Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni *Light Rapid Transit* (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang).
3) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dengan kategori kepentingan pertumbuhan ekonomi, yakni Koridor Palembang-Prabumulih.
4) Kawasan Strategis Kota (KSK), meliputi :
   a) Kawasan Strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi
      - Kawasan Jakabaring
      - Kawasan Agropolitan Gandus-Pulokerto
      - Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) Talang Kelapa
      - Kawasan Pusat Kota atau *Central Business District* (CBD)
      - Kawasan Industri Keramasan Karya Jaya
      - Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Karya Jaya
      - Kawasan Industri Sukarami

b) Kawasan Strategis dengan sudut kepentingan Sosial Budaya
   - Kawasan Taman Purbakala Situs Sriwijaya Karang Anyar
   - Kawasan Tepian Sungai Musi

b. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Sektor unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Palembang sebanyak 6 (enam) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 83,66% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2017, meliputi

1) Sektor Industri Pengolahan sebesar 32,80%
2) Sektor Konstruksi sebesar 18,20%
3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,24%
4) Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 6,82%
5) Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,01%
6) Sektor Real Estat sebesar 4,76%

c. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah hingga tahun 2023

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 6,06% - 7,16% melalui sektor unggulan
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 7,68% yang difokuskan pada ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan) dan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak).
3) Peningkatan IPM menjadi 80,96.
4) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 91,72%, akses air minum layak sebesar 90,34%, akses sanitasi sebesar 92,55%.
5) Percepatan penyelesaian Sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpusat (IPALT).
6) Percepatan operasional Jembatan Musi IV dan Musi VI, serta Pengembangan Jalan Lingkar Dalam Musi IV-Jakabaring-Musi VI.
7) Optimalisasi pengelolaan *Light Rapid Transit* (LRT) dalam rangka penyiapan *Transit Oriented Development* (TOD).
8) Perluasan Trase *Light Rapid Transit* (LRT).
9) Pengendalian genangan air.
10) Penanganan kawasan kumuh seluas 2.581,84 Ha.
11) Pengurangan timbunan sampah.
12) Pengembangan destinasi wisata.
13) Pengembangan Kawasan Industri Non Polutan Gandus.
14) Pengembangan Kota Baru Palembang.

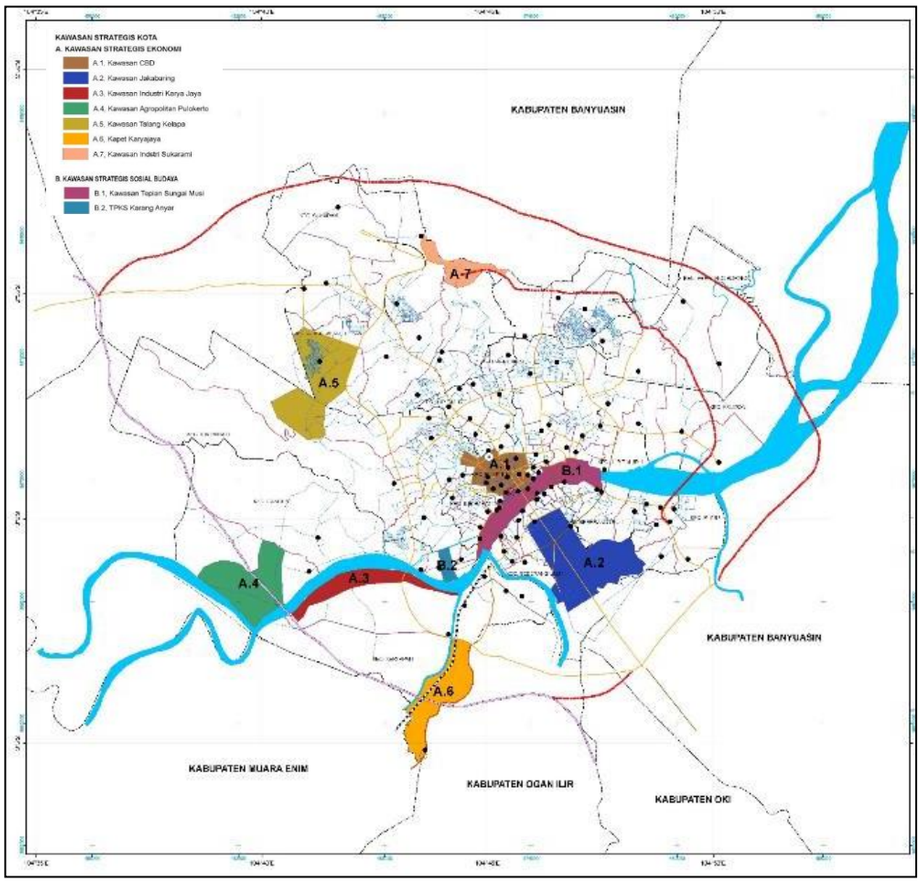
15) Pengembangan Daerah Perbatasan Palembang-Banyuasin dan Palembang-Ogan Ilir.

**Tabel 7.2**
Target Indikator Makro Kota Palembang Tahun 2018-2023

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi | IPM | Tingkat Kemiskinan |
|---|---|---|---|
| 2018 | 6,06-6,96 | 77,74 | 10,95 |
| 2019 | 6,06-6,96 | 78,66 | 10,50 |
| 2020 | 6,06-6,96 | 79,25 | 9,77 |
| 2021 | 6,06-6,96 | 79,83 | 9,44 |
| 2022 | 6,06-7,16 | 80,40 | 8,31 |
| 2023 | 6,06-7,16 | 80,96 | 7,68 |

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2018*

**Gambar 7.15**
Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032




*Sumber: Perda No. 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Palembang, 2012*

### 7.2.3 Kabupaten Musi Rawas

a. Arahan Pengembangan Wilayah

Kabupaten Musi Rawas memiliki Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten, yaitu:

1) Kawasan Strategis Nasional (KSN), meliputi Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
2) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dengan kategori kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi Kawasan Koridor Lubuklinggau-Muara Beliti, Kawasan Agropolitan Muara Beliti, Kawasan Minapolitan Tugumulyo.
3) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), meliputi Kawasan Perkotaan Muara Beliti (dari sudut kepentingan ekonomi) dan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) (dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup).

b. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Sektor unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas sebanyak 4 (empat) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 83,61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2017, meliputi

1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31.35%, terdiri dari tanaman perkebunan (11,55%), perikanan (7,44%), tanaman pangan (5,55%), peternakan (2,70%), kehutanan dan penebangan kayu (2,62%), tanaman hortikultura (0,82%), serta jasa pertanian dan perburuan (0,67%).
2) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 30.39%, dengan kontribusi terbesar dari pertambangan minyak, gas, dan panas bumi sebesar 20,74%, kemudian penggalian lainnya sebesar 9,66%.
3) Sektor Industri Pengolahan sebesar 13,31%, dengan kontribusi terbesar dari industri makanan dan minuman sebesar 9,94%, kemudian industri karet, barang dari karet dan plastik sebesar 2,46%
4) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,56%, dengan kontribusi terbesar dari perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor sebesar 7,93%, kemudian perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya sebesar 0,64%.

c. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah hingga tahun 2023

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 5,11%-6,01% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,65% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Peningkatan IPM menjadi 69,00.

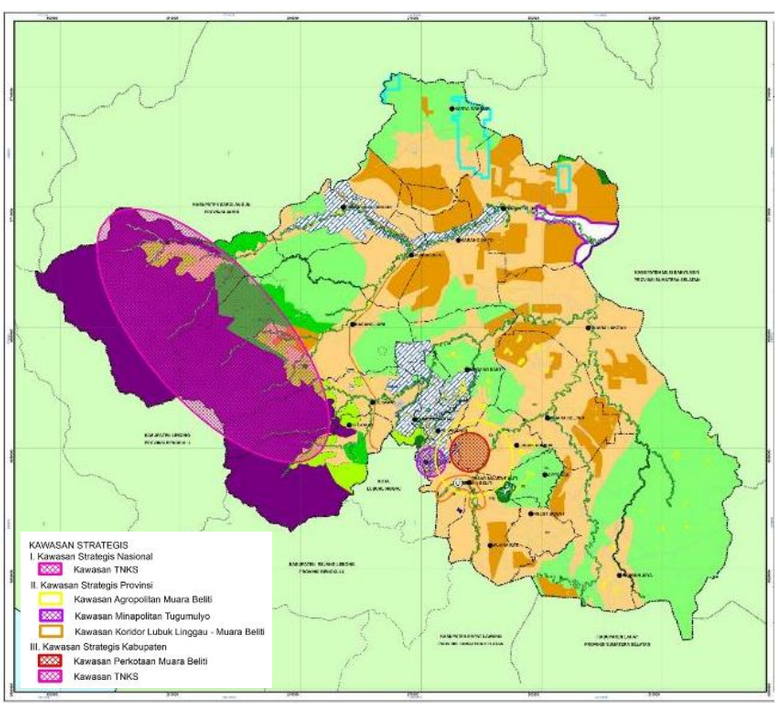
4) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 76,07%, akses air minum layak sebesar 59,49%, dan akses sanitasi layak sebesar 51,70%.
5) Peningkatan produktivitas pertanian dengan mengoptimalkan pemanfaatan jaringan irigasi.
6) Peningkatan produktivitas perikanan.
7) Pengembangan Kawasan Perkotaan Muara Beliti, Kawasan Agropolitan Muara Beliti, dan Kawasan Minapolitan Tugumulyo.
8) Percepatan pembangunan Jalan Tol Musi Rawas-Lubuklinggau-Curup Bengkulu.
9) Pengembangan Perhutanan Sosial.

**Tabel 7.3**
Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2023

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi | IPM | Tingkat Kemiskinan |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5,11-6,01 | 66,09 | 13,76 |
| 2019 | 5,11-6,01 | 66,50 | 12,67 |
| 2020 | 5,11-6,01 | 67,00 | 12,12 |
| 2021 | 5,11-6,01 | 67,60 | 11,36 |
| 2022 | 5,11-6,21 | 68,35 | 10,45 |
| 2023 | 5,11-6,21 | 69,00 | 9,65 |

*Sumber: Konfirmasi Bappeda Kabupaten Musi Rawas, 2019, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2018*

**Gambar 7.16**
Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031




*Sumber: Perda No. 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Musi Rawas, 2013*

### 7.2.4 Kabupaten Musi Rawas Utara

a. Arahan Pengembangan Wilayah

Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Kabupaten, yaitu:

1) Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yakni Kawasan Strategis Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
2) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
   a) Kawasan Strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi
      - Kawasan Perkotaan Muara Rupit dan sekitarnya, meliputi Muara Rupit, Lawang Agung, Desa Sungai Jernih dan bagian barat Desa Remba
      - Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah di Kecamatan Rawas Ulu-Rupit-Karang Dapo-Rawas Ilir-Karang Jaya
      - Kawasan Perikanan di Kecamatan Rawas Ilir
   b) Kawaasan Strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
      - Kawasan Resapan Air di Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Ulu Rawas dan Kecamatan Karang Jaya
      - Kawasan Sekitar Danau Rayo di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit

b. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Sektor unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 4 (empat) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 83,69% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2017, meliputi

1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 47,21%, terdiri dari tanaman perkebunan (27,76%), kehutanan dan penebangan kayu (7,91%), perikanan (4,58%), peternakan (3,02%), tanaman pangan (2,14%), jasa pertanian dan perburuan (1,23%), serta tanaman hortikultura (0,56%).
2) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 23,08%, dengan kontribusi terbesar dari pertambangan minyak, gas, dan panas bumi sebesar 13,35%, kemudian penggalian lainnya sebesar 7,44%.
3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,08%, dengan kontribusi terbesar dari perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor sebesar 6,04%, kemudian perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya sebesar 1,03%.

4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 6,32%, dengan kontribusi terbesar dari industri makanan dan minuman sebesar 3,10%, kemudian industri karet, barang dari karet dan plastik sebesar 2,55%.

c. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah hingga tahun 2023

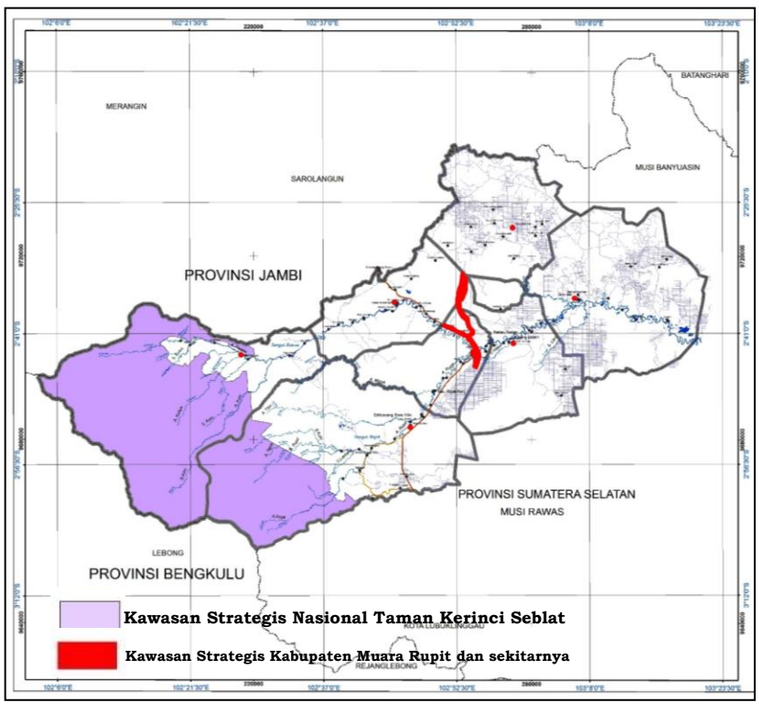
1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 3,98%-5,08% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,94% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Peningkatan IPM menjadi 68,06.
4) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 73,95%, akses air minum layak sebesar 50,69%, dan akses sanitasi layak sebesar 45,56%.
5) Pengembangan kawasan perkotaan Muara Rupit dan sekitarnya.
6) Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, dan perikanan menuju kedaulatan pangan.
7) Pengembangan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Danau Rayo untuk pengendalian bencana banjir.
8) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

**Tabel 7.4**
Target Indikator Makro
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2023

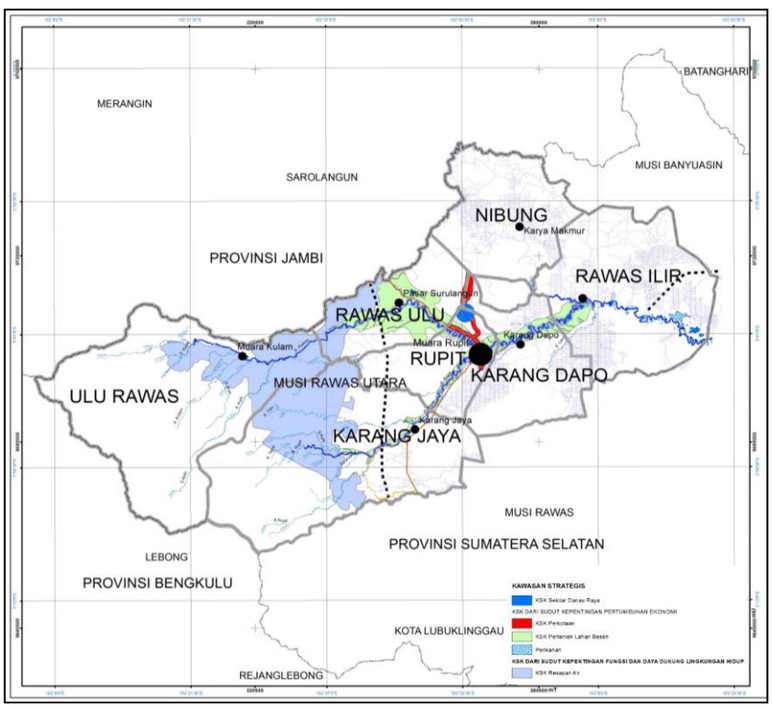
| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi | IPM | Tingkat Kemiskinan |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3,98-4,88 | 63,79 | 19,12 |
| 2019 | 3,98-4,88 | 65,29 | 17,59 |
| 2020 | 3,98-4,88 | 65,98 | 15,32 |
| 2021 | 3,98-4,88 | 66,68 | 13,04 |
| 2022 | 3,98-5,08 | 67,37 | 11,76 |
| 2023 | 3,98-5,08 | 68,06 | 9,94 |

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2018*

**Gambar 7.17**
Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2036




**(a) Kawasan Strategis Nasional**




**(b) Kawasan Strategis Kabupaten**

*Sumber: Perda No. 12 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara, 2018*

### 7.2.5 Kota Pagar Alam

a. Arahan Pengembangan Wilayah

Kota Pagar Alam memiliki Proyek Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kota, yaitu:

1) Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang.
2) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang memiliki nilai strategis Sosial Budaya, yakni Kawasan Situs Purbakala Megalith.
3) Kawasan Strategis Kota (KSK), meliputi
   a) Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi
      - Kawasan sekitar bandara yang berlokasi di kecamatan Dempo Selatan, kelurahan Atung Bungsu, Dusun Mingkik, Dusun Benua Keling, Dusun tanah Pilih, dan Dusun Suka cinta sebesar kurang lebih 500 Ha.
      - Kawasan perdagangan dan jasa yang berada di Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Nendagung sebesar kurang lebih 100 Ha.
      - Kawasan Perkebunan Teh yang berada di Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kelurahan Gunung Dempo sebesar kurang lebih 1.575 Ha
      - Kawasan Perkebunan Kopi yang berada di Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kecamatan Dempo Selatan, Kecamatan Dempo Tengah, dan Kecamatan Dempo Utara,
      - Koridor Jalan Arteri sekunder yang berada di Pusat Kota (Kecamatan Pagar Alam Utara, dan Kecamatan Pagar Alam Selatan) sepanjang kurang lebih 21.766 m.
   b) Kawasan Strategis Sosial Budaya
      - Situs purbakala Megalith yang berada di Dusun Tanjung Aro, Dusun Tegur Wangi, Talang Tinggi dan Tanjung Aro, Dusun Nanding, Dusun Keban Agung, Dusun Tebing Tinggi, dan Dusun Belumai.
   c) Kawasan Strategis Lingkungan Hidup
      - Kawasan Hutan Lindung Kota Pagar Alam yang berada di seluruh wilayah Kota Pagar Alam dengan luas kurang lebih 28.740 Ha.
      - Kawasan Perlindungan setempat berupa sempadan sungai dengan lebar 100 meter kanan kiri sungai.
      - Kawasan rawan bencana letusan Gunung Berapi berada pada radius 15 Km dari kawah termuda berutama.

b. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Sektor unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Pagar Alam sebanyak 7 (tujuh) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar

83,01% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2017, meliputi

1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23.14%
2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,47%
3) Sektor Konstruksi sebesar 17,12%
4) Sektor Jasa Pendidikan sebesar 9,57%
5) Sektor Real Estat sebesar 5.68%
6) Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,42%
7) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3.61%

c. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah hingga tahun 2023

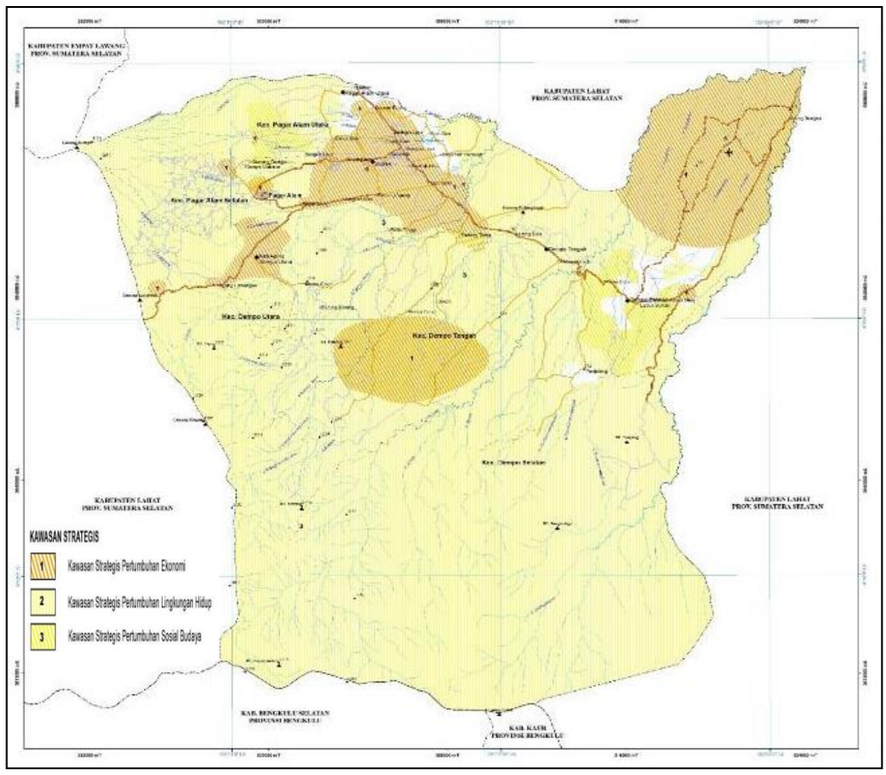
1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 5,5% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,19% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Peningkatan IPM menjadi 70,91.
4) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 78,91%, akses air minum layak sebesar 52,76%, dan akses sanitasi layak sebesar 25,97%.
5) Percepatan Pembangunan Jalan Layang Endikat.
6) Pengembangan destinasi wisata alam Gunung Dempo sebagai tujuan destinasi nasional.
7) Pelestarian Kawasan Bersejarah Situs Purbakala Megalith.
8) Peningkatan akses jalan menuju Kota Pagar Alam dan jalur transportasi udara (Bandara Atung Bungsu).
9) Peningkatan produktivitas hasil perkebunan dan hortikultura.
10) Penataan Kawasan Rawan Bencana sekitar Gunung Dempo.
11) Percepatan Pembangunan Daerah Irigasi Lematang.
12) Pengembangan Pusat Kesehatan Perkotaan.

**Tabel 7.5**
Target Indikator Makro Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi | IPM | Tingkat Kemiskinan |
|---|---|---|---|
| 2018 | 4,69-5,59 | 67,49 | 8,77 |
| 2019 | 5,02 | 68,19 | 8,77 |
| 2020 | 5,14 | 68,86 | 8,65 |
| 2021 | 5,26 | 69,54 | 8,43 |
| 2022 | 5,38 | 70,23 | 8,31 |
| 2023 | 5,50 | 70,91 | 8,19 |

*Sumber: Konfirmasi Walikota Pagar Alam, 2018, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2018*

**Gambar 7.18**
Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah
Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032




*Sumber: Perda No. 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Pagar Alam, 2012*

### 7.2.6 Kota Lubuklinggau

a. Arahan Pengembangan Wilayah

Kota Lubuklinggau memiliki beberapa Kawasan Strategis Nasional, Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kota, yaitu:

1) Kawasan Strategis Nasional (KSN), yakni Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
2) Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Jalan Tol Lubuklinggau-Curup-Bengkulu sepanjang 95 Km yang direncanakan

pembangunannya pada tahun 2020-2023 dan Jalan Tol Muara Enim – Lubuklinggau – Lahat sepanjang 125 Km yang merupakan bagian dari Trans Sumatera.

3) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dengan kategori kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi Kawasan Perkotaan Lubuklinggau dan Kawasan Koridor Lubuklinggau – Muara Beliti

4) Kawasan Strategis Kota (KSK)

a) Kawasan Strategis Pusat Kota (Ekonomi)

- Kawasan perdagangan dan jasa terletak di Pusat Kota di Kecamatan Lubuklinggau Barat II dan Lubuklinggau Timur II.

b) Kawasan Strategis Pertanian (Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup)

- Kawasan pertanian sawah irigasi teknis dengan luas kurang lebih 2.000 Ha di Kelurahan Eka Marga, Kelurahan Marga Bakti, Kelurahan Mangorejo, Kelurahan Karang Ketuan, Kelurahan Siring Agung Kecamatan Lubuklinggau Selatan II dan Kelurahan Ula Lebar Kecamatan Lubuklinggau.

c) Kawasan Strategis Pelestarian Rumah Adat (Sosial Budaya)

- Kawasan Strategis Batu Urip
- Kawasan Strategis Jukung

b. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Sektor unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Lubuklinggau sebanyak 8 (delapan) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 82,21% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2017, meliputi

1) Sektor Konstruksi sebesar 24,65%
2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,15%
3) Sektor Real Estat sebesar 8,25%
4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 6,67%
5) Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,10%
6) Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,70%
7) Sektor Jasa Pendidikan sebesar 5,40%
8) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 5,29%

c. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah hingga tahun 2023

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sekitar 6,44% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 11,47% yang difokuskan pada ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan) dan penyediaan

infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak).

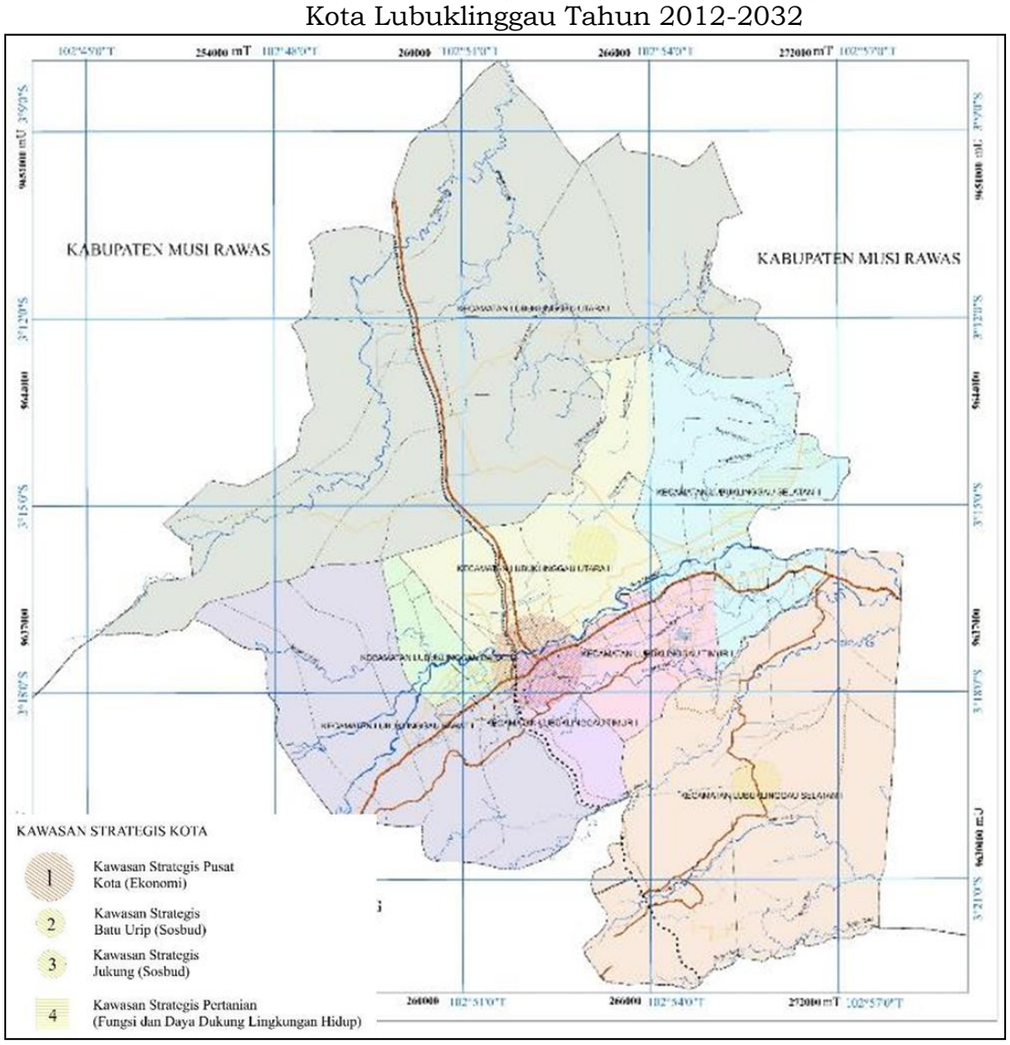
3) Peningkatan IPM menjadi 76,05.
4) Peningkatan infrastruktur, meliputi jalan mantap sebesar 78,16%, akses air minum layak sebesar 75,18%, dan akses sanitasi layak sebesar 77,33%.
5) Peningkatan produktivitas pertanian dalam kedaulatan pangan.
6) Pengembangan destinasi wisata.
7) Pengembangan Kawasan Industri Lubuklinggau.
8) Percepatan Pembangunan Jalan Tol Lubuklinggau-Curup Bengkulu.
9) Pengembangan Pusat Pendidikan Perkotaan dan Kesehatan.

**Tabel 7.6**
Target Indikator Makro Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi | IPM | Tingkat Kemiskinan |
|---|---|---|---|
| 2018 | 6,18-7,08 | 74,01 | 13,02 |
| 2019 | 6,38 | 74,66 | 12,55 |
| 2020 | 6,39 | 75,01 | 12,27 |
| 2021 | 6,41 | 75,36 | 12,00 |
| 2022 | 6,42 | 75,71 | 11,73 |
| 2023 | 6,44 | 76,05 | 11,47 |

*Sumber: Konfirmasi Walikota Lubuklinggau, 2018BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2018*

**Gambar 7.19**
Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah
Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032




*Sumber: Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Lubuklinggau, 2012*

### 7.2.7 Kabupaten Ogan Komering Ulu

a. Arahan Pengembangan Wilayah

Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten, yaitu:

1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
   a) Kawasan Strategis dengan Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, yakni Kawasan Koridor Perkotaan Baturaja-Martapura
   b) Kawasan Strategis yang memiliki Fungsi Pendayagunaan Sumber Daya Alam/Teknologi Tinggi, takni Kawasan Panas Bumi (Geothermal) Lumut Balai di Kabupaten OKU, Muara Enim dan Empat Lawang) yang berada di sepanjang Bukit Barisan Wilayah Sumatera Selatan
2) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

a) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
   - Kawasan Permukiman Ex Transmigrasi
   - Kawasan cepat tumbuh Koridor Baturaja-Lubuk Raja-Martapura
   - Kawasan Industri Semen Baturaja di Kawasan Perkotaan Baturaja
   - Kawasan Minapolitan di Kecamatan Pengandonan, Ulu Ogan dan Muara Jaya dengan pusat utamanya di Pengandonan

b) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Sosial-Budaya, yakni Kawasan Permukiman Penduduk asli suku-suku di Kabupaten OKU, yakni Ogan, Komering, dan Daya.

c) Kawasan Strategis dari sudut pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi
   - Kawasan Pertambangan Minyak Bumi di Kecamatan Peninjauan, dengan cadangan 302.707 Metric Standart Barel (MSTB) dan gas dengan cadangan 484 Billion Standart Cubic Feet (BSCF)
   - Kawasan Pertambangan Batubara di Kecamatan Baturaja Barat, Baturaja Timur, Peninjauan, Pengandonan, Semidang Aji, Sosoh Buay Rayap, Lengkiti, Lubuk Batang, Lubuk Raja, Sinar Peninjauan, Ulu Ogan dan Muara Jaya, dengan cadangan mencapai 621.371.495 ton
   - Potensi Kawasan Panas Bumi di Kecamatan Ulu Ogan, dengan sumberdaya/cadangan 5 Mega Watt Equavalent (MWE);
   - Kawasan Air Terjun di Kecamatan Ulu Ogan, dengan sumberdaya/cadangan 4,083 Mega Watt (MW).

d) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
   - Kawasan Hutan Lindung (Bukit Nanti) dan resapan air
   - Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi Sub-DAS Ogan, Lematang dan Komering.

b. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Sektor unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 80,23% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2017, meliputi

1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 19,00%
2) Sektor Industri Pengolahan sebesar 17,61%

3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,86%
4) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,47%
5) Sektor Konstruksi sebesar 13,29%

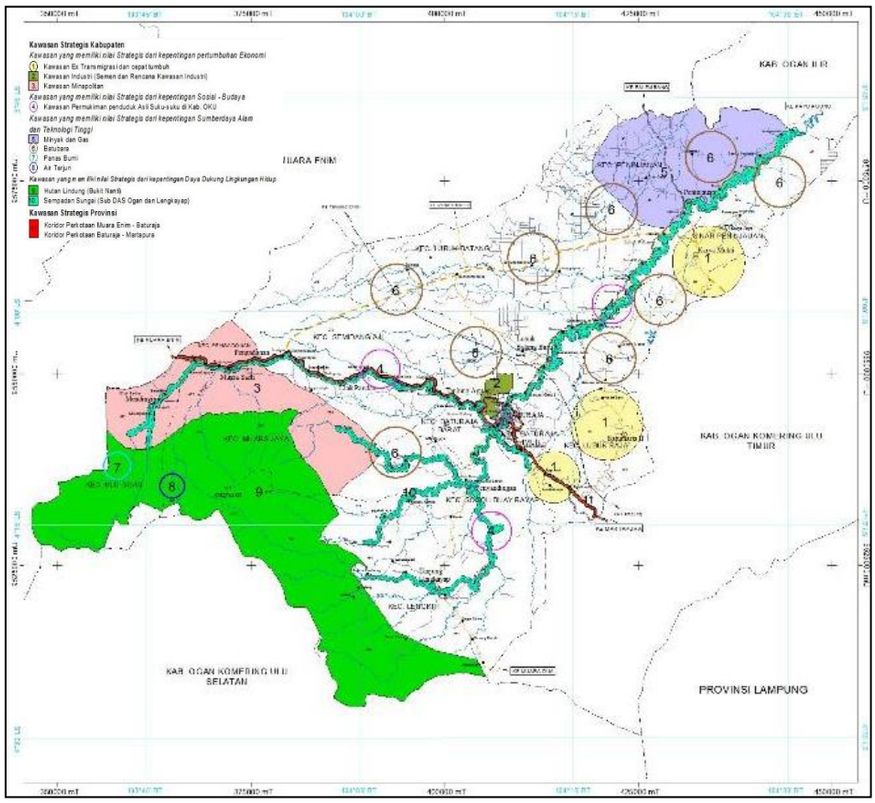
c. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah hingga tahun 2023
1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 3,83%-4,93% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,84% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Peningkatan IPM menjadi 72,36.
4) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 82,12%, akses air minum layak sebesar 64,15%, dan akses sanitasi layak sebesar 69,39%.
5) Pengembangan Kawasan Minapolitan.
6) Pengembangan destinasi wisata.
7) Mempertahankan Kawasan Hutan Lindung dan resapan air, serta Sub-DAS.
8) Peningkatan akses energi melalui pengembangan Kawasan Panas Bumi (Geothermal) Lumut Balai.
9) Pengembangan Kawasan Industri.

**Tabel 7.7**
Target Indikator Makro
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018-2023

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi | IPM | Tingkat Kemiskinan |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3,83-4,73 | 68,89 | 12,61 |
| 2019 | 3,83-4,73 | 69,84 | 12,10 |
| 2020 | 3,83-4,73 | 70,47 | 11,26 |
| 2021 | 3,83-4,73 | 71,10 | 10,41 |
| 2022 | 3,83-4,93 | 71,73 | 9,57 |
| 2023 | 3,83-4,93 | 72,36 | 8,84 |

*Sumber: Konfirmasi Bupati Ogan Komering Ulu, 2018, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2018*

**Gambar 7.20**
Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012-2032




*Sumber: Perda No. 22 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten OKU, 2012*

### 7.2.8 Kabupaten Ogan Komering Ilir

a. Arahan Pengembangan Wilayah

Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Strategis Kabupaten, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Strategis, yaitu:

1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
   a) Kawasan Strategis dengan kategori Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, meliputi Kawasan Kawasan Agropolitan, Kawasan Minapolitan, Kawasan Pengembangan Kerbau Rawa Pampangan, dan Kawasan Palembang dan sekitarnya (termasuk sekayu dan Kota Kayu Agung).
   b) Kawasan Strategis yang memiliki fungsi daya dukung lingkungan hidup, yakni Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan dan Kawasan Hutan Rawa Gambut.
2) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), meliputi
   a) Kawasan Strategis Ekonomi
      - Kawasan penyangga Kota Palembang, meliputi Kecamatan Jejawi, Sirah Pulau Padangm Kayuagung, dan Kecamatan Pampangan

- Kawasan Minapolitan, meliputi Minapolitan Sungai dengan pusat pelayanan di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi dan Minapolitan Pesisir dengan pusat pelayanan di Desa Sungai Lumpur Kecamatan Cengal,
- Kawasan Agropolitan, meliputi Kecamatan Lempuing, Lempuing Jaya, Mesuji, Mesuji Raya, Mesuji Makmur, sebagian Kecamatan Pedamaran dan Pedamaran Timur,Tanjung Lubuk dan Kecamatan Teluk Gelam dengan pusat pelayanan di Tugumulyo.
- Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM), meliputi Kawasan KTM Sungai Menang dan Kawasan KTM Tulung Selapan.

b) Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, meliputi Hutan Mangrove Pantai Timur dan Kawasan Plasma Nutfah Kerbau Rawa Pampangan.

c) Kawasan Strategis Sosial Budaya, yakni Cagar Budaya Kota Lama Kayuagung.

3) Proyek Strategis Nasional (PSN), meliputi Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 85 Km, Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung sepanjang 112 Km merupakan bagian dari 8 ruas Trans Sumatera.

b. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Sektor unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 4 (empat) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 86,71% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2017, meliputi

1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 56,36%, terdiri dari tanaman perkebunan (36,78%), tanaman pangan (18,94%), perikanan (16,81%), kehutanan dan penebangan kayu (15,42%), peternakan (7,04%), tanaman hortikultura (3,39%), serta jasa pertanian dan perburuan (1,61%).
2) Sektor Konstruksi sebesar 13,23%.
3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,88%, terdiri dari perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor sebesar 78,47% dan perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya sebesar 21,53%.
4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 7,24%, dengan kontribusi terbesar pada industri makanan dan minuman sebesar 88,78%, kemudian industri barang galian bukan logam sebesar 4,87%.

c. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah hingga tahun 2023

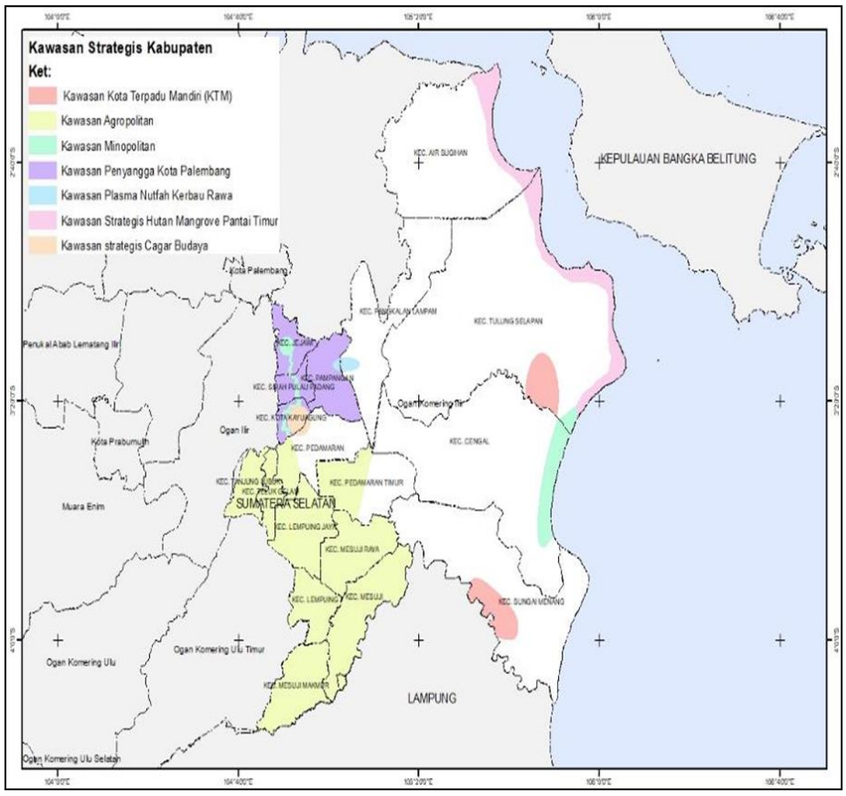
1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sekitar 5,42% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 13,02% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listri dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Peningkatan IPM menjadi 70,43.
4) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 71,43%, akses air minum sebesar 60,44 %, dan akses sanitasi layak sebesar 63,19%.
5) Percepatan pembangunan jalan tol Pematang Panggang-Kayu Agung dan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung.
6) Peningkatan produktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan menuju kedaulatan pangan.
7) Pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri.
8) Pengembangan Kawasan Kerbau Rawa Pampangan.
9) Pengelolaan Gambut seluas 1.030.601 Ha.
10) Pengembangan ekowisata Pulau Maspari.
11) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
12) Pengembangan Jalan Pantai Timur.
13) Penurunan *Stunting.*
14) Pengembangan Daerah Irigasi Rawa dan Teknis.
15) Pengembangan Kawasan Industri Ogan Komering Ilir

**Tabel 7.8**
Target Indikator Makro
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018-2023

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi | IPM | Tingkat Kemiskinan |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5,03 | 66,18 | 15,28 |
| 2019 | 5,11 | 67,03 | 15,08 |
| 2020 | 5,19 | 67,88 | 14,57 |
| 2021 | 5,27 | 68,73 | 14,05 |
| 2022 | 5,34 | 69,58 | 13,53 |
| 2023 | 5,42 | 70,43 | 13,02 |

*Sumber: Konfirmasi Bappeda Kaupaten Ogan Komering Ilir, 2018, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2018*

**Gambar 7.21**
Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2012-2032




*Sumber: Perda No. 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kab. OKI, 2013*

### 7.2.9 Kabupaten OKU Timur

a. Arahan Pengembangan Wilayah

Kabupaten OKU Timur memiliki Kawasan Strategis Provinsi dengan kategori kepentingan pertumbuhan ekonomi dan Kawasan Strategis Kabupaten, yakni

1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP), meliputi Kawasan Agropolitan, Kawasan Minapolitan, dan Kawasan Koridor Baturaja-Martapura.
2) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), meliputi Kawasan Perkotaan Martapura, Kawasan Daerah Tertinggal Bantaran Sungai Komering (Rasuan), dan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Belitang.

b. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Sektor unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKU Timur sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 86,71% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2017, meliputi

1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 35,33%.
2) Sektor Konstruksi sebesar 19,02%.
3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,56%, terdiri dari perdagangan besar dan eceran,

bukan mobil dan sepeda motor sebesar 84,48% dan perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya sebesar 15,52%.

4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 8,85%.

5) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,94%.

c. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah hingga tahun 2023

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 5,29% - 6,39% melalui sektor unggulan.

2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 7,41% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listri dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).

3) Peningkatan IPM menjadi 74,31.

4) Peningkatan infrastruktur, dengan kondsi saat ini jalan mantap sebesar 74,97%, akses air minum layak sebesar 59,57%, dan akses sanitasi layak sebesar 75,66%.

5) Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

6) Pengembangan Kota Terpadu Mandiri.

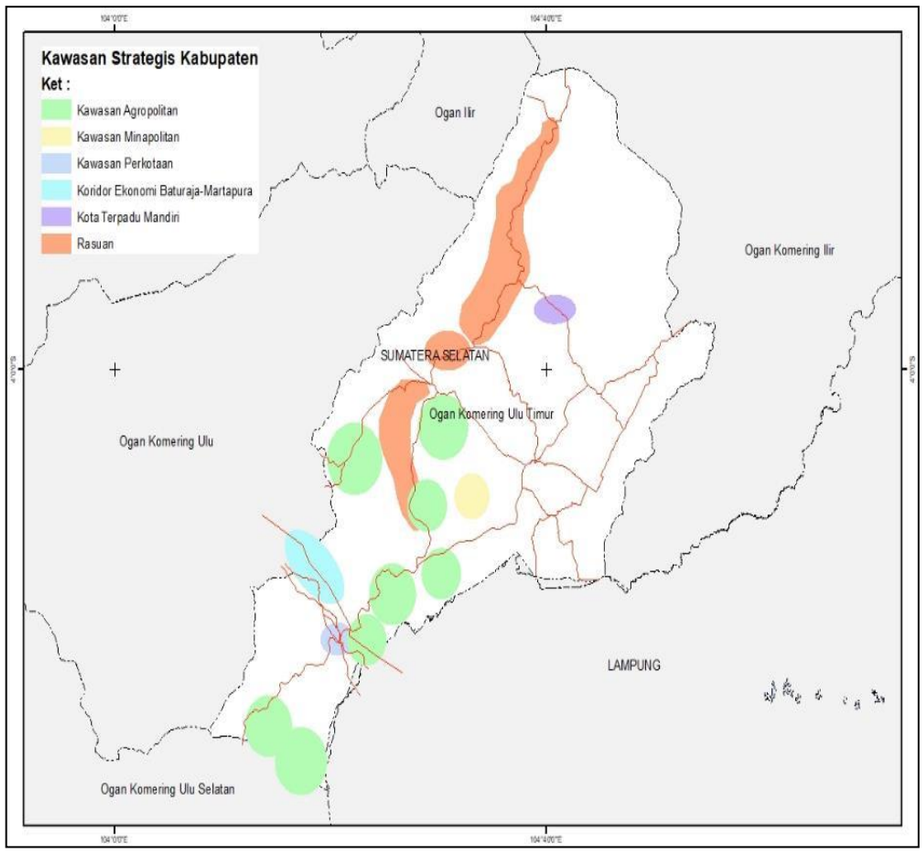
7) Pengembangan Daerah Irigasi Rawa.

**Tabel 7.9**
Target Indikator Makro
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018-2023

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi | IPM | Tingkat Kemiskinan |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5,29-6,19 | 68,44 | 10,57 |
| 2019 | 5,29-6,19 | 69,65 | 10,14 |
| 2020 | 5,29-6,19 | 70,69 | 9,43 |
| 2021 | 5,29-6,19 | 71,82 | 8,73 |
| 2022 | 5,29-6,39 | 73,03 | 8,02 |
| 2023 | 5,29-6,39 | 74,31 | 7,41 |

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2018*

**Gambar 7.22**
Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012-2032




*Sumber: Perda No. 13 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. OKU Timur, 2012*

### 7.2.10 Kabupaten Musi Banyuasin

a. Arahan Pengembangan Wilayah

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten, yakni

1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP), meliputi Kawasan Minapolitan dan Kawasan Palembang dan sekitarnya (termasuk sekayu dan Kota Kayu Agung) (kepentingan pertumbuhan ekonomi) dan Kawasan Hutan Rawa Gambut (memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan hidup).
2) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
   a) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, meliputi
      - Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kecamatan Plakat Tinggi dan Kecamatan Lais
      - Kawasan Strategis Agropolitan di Kecamatan Sungai Lilin
      - Kawasan Strategis Minapolitan di Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Sekayu;

- Kawasan Strategis Pertambangan di beberapa kecamatan
- Kawasan Strategis Perkebunan di Kecamatan Babat Supat

b) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi Kawasan Strategis Buaya Senyulong dan Kawasan Strategis Rawa Gambut.

b. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Sektor unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 6 (enam) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 82,66% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2017, meliputi

1) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 54,90%
2) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,34%
3) Sektor Industri Pengolahan sebesar 8,92%
4) Sektor Konstruksi sebesar 7,90%
5) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,92%
6) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,68%

c. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah hingga tahun 2023

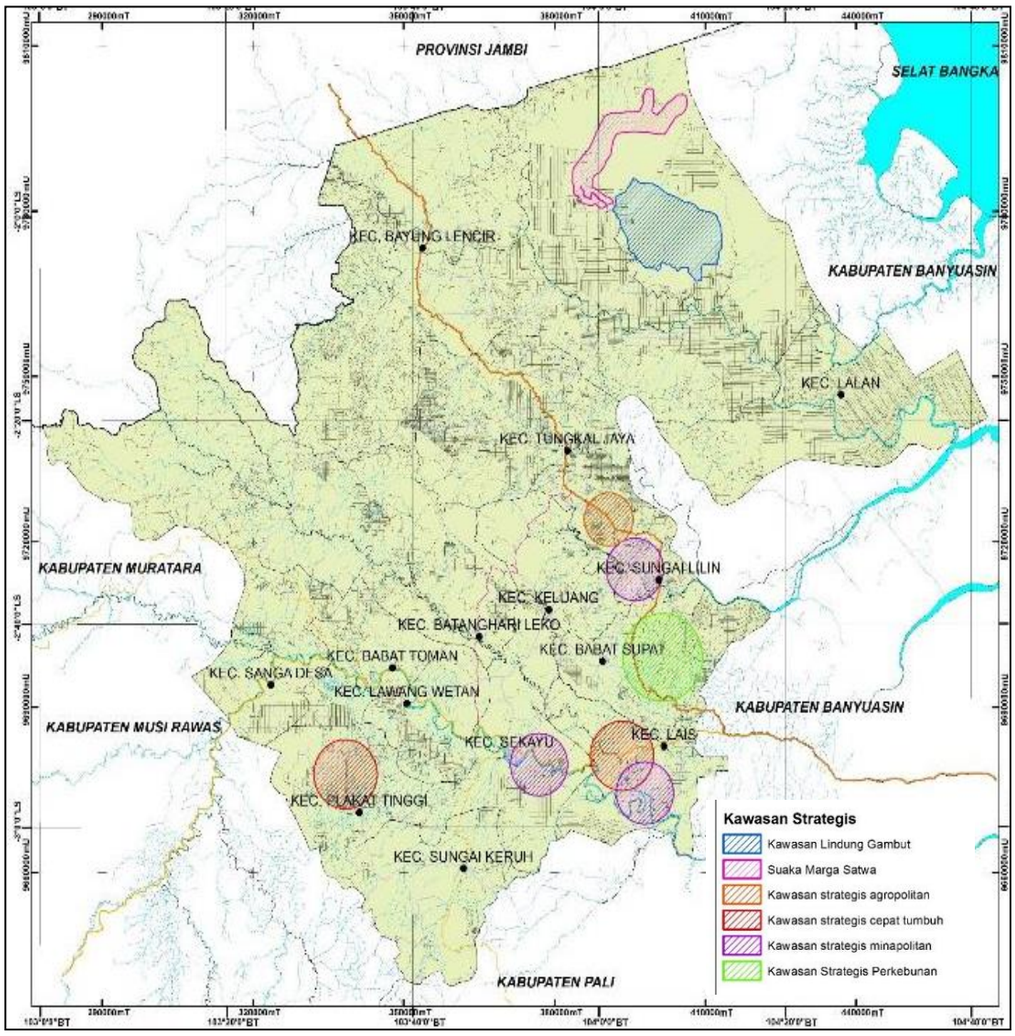
1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 5,00% - 6,00% melalui sektor unggulan
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,93% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Peningkatan IPM menjadi 71,87.
4) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 69,51%, akses air minum layak sebesar 62,15%, dan akses sanitasi layak sebesar 51,64%.
5) Peningkatan produktivitas perkebunan (karet dan sawit), kehutanan dan perikanan menuju kedaulatan pangan.
6) Hilirisasi Karet.
7) Pelestarian Suaka Marga Satwa.
8) Peningkatan akses energi.
9) Pengelolaan Gambut seluas 358.938 ha.
10) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir serta longsor.

**Tabel 7.10**
Target Indikator Makro
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi | IPM | Tingkat Kemiskinan |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5,00 – 6,00 | 67,69 | 16,52 |
| 2019 | 5,00 – 6,00 | 69,88 | 14,20 |
| 2020 | 5,00 – 6,00 | 70,00 | 13,35 |
| 2021 | 5,00 – 6,00 | 70,36 | 12,80 |
| 2022 | 5,00 – 6,00 | 71,42 | 11,70 |
| 2023 | 5,00 – 6,00 | 71,87 | 9,93 |

*Sumber: Konfirmasi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin, 2018,*
*BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2018*

**Gambar 7.23**
Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036




*Sumber: Perda No. 8 Tahun 2016 tentang RTRW Kab. Muba, 2016*

### 7.2.11 Kabupaten Empat Lawang

a. Arahan Pengembangan Wilayah

Kabupaten Empat Lawang memiliki Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten, yakni

1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP), meliputi Kawasan Agropolitan Pasemah Air Keruh (Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi) dan Kawasan Panas Bumi (Geothermal) Lumut Balai (yang memiliki Fungsi Pendayagunaan SDA/Teknologi Tinggi).
2) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
   a) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, meliputi
      - Kawasan Agropolitan di Muara Pinang, Ulu Musi dan Sikap Dalam.
      - Kawasan Pariwisata di Tebing Tinggi, Lintang Kanan, Talang Padang dan Pasemah Air Keruh.
      - Kawasan Pertambangan dan Pemerintah di Tebing Tinggi.
      - Kawasan Rencana Kota Baru di Tebing Tinggi dan Pendopo.
   b) Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, meliputi
      - Kawasan hutan lindung di Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Talang Padang, Kecamatan Sikap Dalam, Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Lintang Kanan, dan Kecamatan Muara Pinang.
      - Kawasan Daerah Aliran Sungai Musi.

b. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Sektor unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Empat Lawang sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 81,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2017, meliputi

1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 34,52%
2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,20%
3) Sektor Konstruksi sebesar 11,69%
4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 11,04%
5) Sektor Real Estat sebesar 4,89%

c. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah hingga tahun 2023

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 3,61%-4,71% melalui sektor unggulan

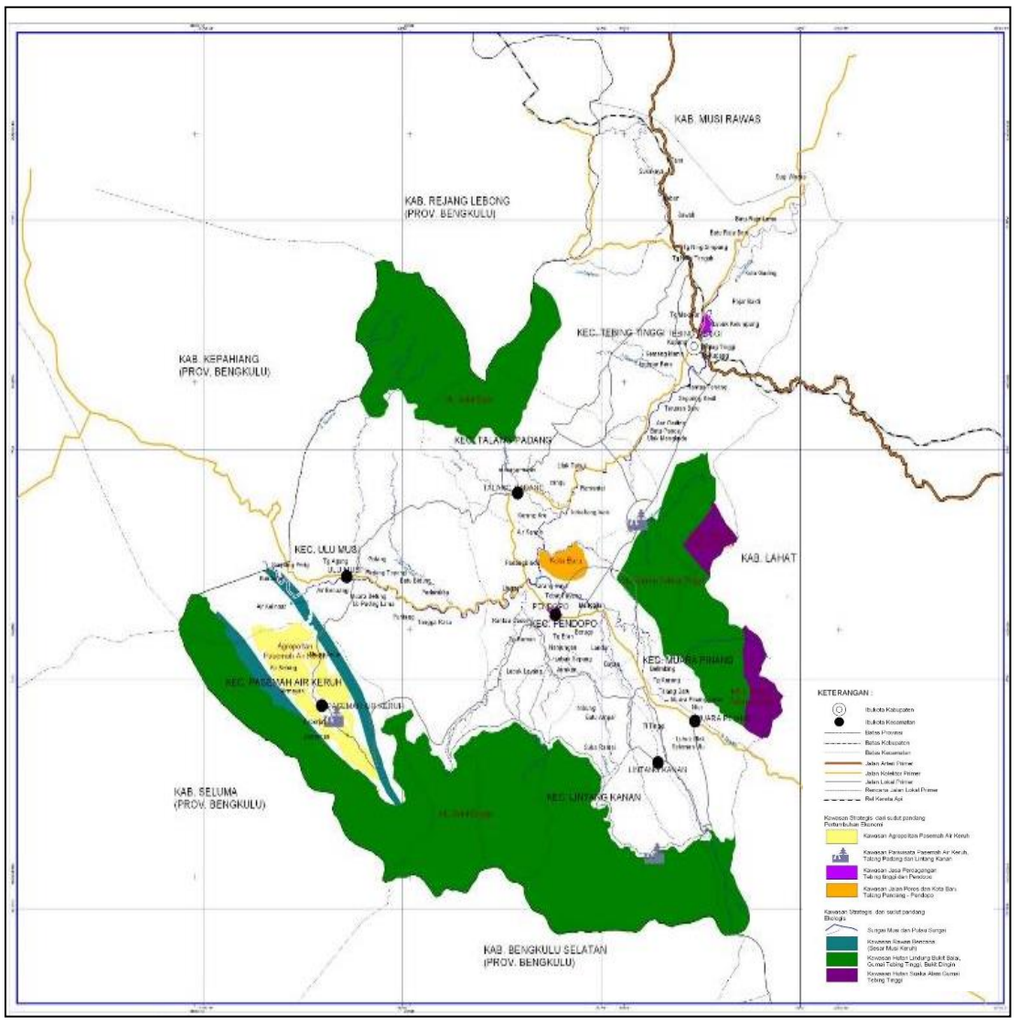
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,59% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Peningkatan IPM menjadi 66,89.
4) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 86,09%, akses air minum layak sebesar 9,33%, dan akses sanitasi layak sebesar 36,54%.
5) Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan (kopi, sawit, dan karet), dan perikanan menuju kedaulatan pangan.
6) Pengembangan destinasi wisata.
7) Peningkatan akses energi.
8) Pengelolaan kawasan hutan lindung dan DAS Musi.
9) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional di Kecamatan Sikap Dalam.

**Tabel 7.11**
Target Indikator Makro
Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi | IPM | Tingkat Kemiskinan |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3,61-4,51 | 64,60 | 12,25 |
| 2019 | 3,61-4,51 | 65,26 | 11,75 |
| 2020 | 3,61-4,51 | 65,67 | 10,93 |
| 2021 | 3,61-4,51 | 66,08 | 10,12 |
| 2022 | 3,61-4,71 | 66,48 | 9,30 |
| 2023 | 3,61-4,71 | 66,89 | 8,59 |

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2018*

**Gambar 7.24**
Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah
Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012-2032




*Sumber: Perda No. 9 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Empat Lawang, 2012*

### 7.2.12 Kabupaten Muara Enim

a. Arahan Pengembangan Wilayah

Kabupaten Muara Enim memiliki Proyek Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi, dan Kawasan Strategis Kabupaten, yakni

1) Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim sepanjang 110 km dan Jalan Tol Muara Enim – Lubuklinggau – Lahat sepanjang 125 km merupakan bagian dari Trans Sumatera.
2) Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
   a) Kawasan Strategis dengan Kategori Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
      - Kawasan Muara Enim dan sekitarnya
      - Kawasan Koridor Lahat – Muara Enim

b) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yakni Kawasan Hutan Rawa Gambut.

c) Kawasan Strategis yang memiliki Fungsi Pendayagunaan SDA/Teknologi Tinggi, yakni Kawasan Panas Bumi (Geothermal) Lumut Balai.

3) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

a) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

- Kawasan Perdagangan dan Jasa di pusat perkotaan Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Lubai, Kecamatan Lebak, dan Kecamatan Gelumbang.
- Kawasan Agropolitan di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Semende Darat Laut, dan Kecamatan Tanjung Agung.
- Kawasan Koridor Jalan Arteri Kecamatan Muara Enim-Kecamatan Ujan Mas.
- Kawasan Ekowisata di Kecamatan Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah, Semende Darat Laut, Kecamatan Panang Enim, dan Kecamatan Tanjung Agung.
- Kawasan Ekonomi Khusus Bukit Asam yang berada di Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Tanjung Agung dengan rencana pengembangan awal kawasan seluas lebih kurang 600 Ha.

b) Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Sosial dan Budaya berada di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, dan Kecamatan Semende Darat Laut..

c) Kawasan Strategis Aspek Lingkungan Hidup

- Kawasan Sempadan Sungai, diantaranya adalah Sungai Lematang dan Sungai Enim yang diidentifikasi sebagai sungai besar, dan Sungai Endikat Kiri, Sungai Enim Kiri, Sungai Enim Tengah, Sungai Miuh, Sungai Benakat, Sungai Belida, Sungai Niru, dan Sungai Lubai, Sungai Kelekar beserta anak sungai yang lain diidentifikasi sebagai sungai kecil.

b. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Sektor unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim sebanyak 4 (empat) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 86,17% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2017, meliputi

1) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 53,23%
2) Sektor Industri Pengolahan sebesar 14,56%
3) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 10,78%

4) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,61%

c. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah hingga tahun 2023

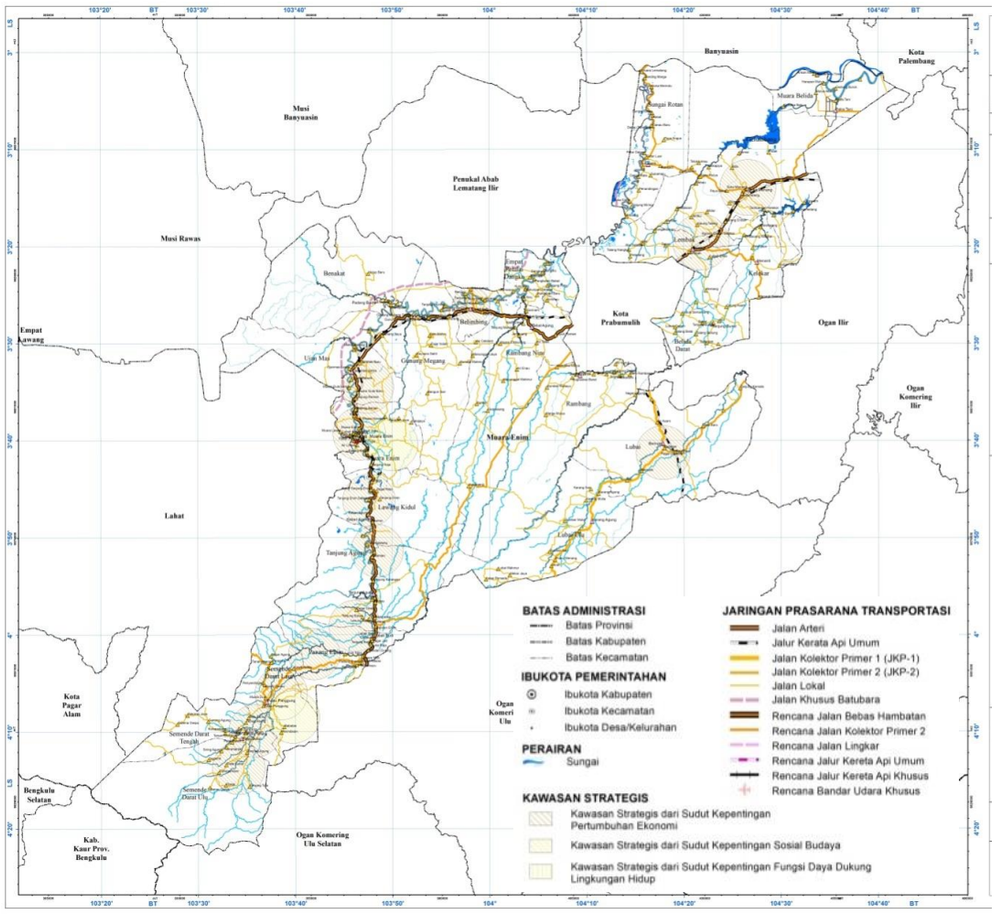
1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 8,00% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,30% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Peningkatan IPM menjadi 72,44.
4) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 54,83%, akses air minum layak sebesar 70,43%, dan akses sanitasi layak sebesar 72,22%.
5) Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup.
6) Peningkatan Akses Energi.
7) Pengembangan Kawasan Industri berbasis batubara.
8) Peningkatan Produktivitas Perkebunan.
9) Pengembangan destinasi pariwisata.
10) Percepatan pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim dan Jalan Tol Muara Enim – Lubuklinggau – Lahat.
11) Pengembangan Jalan Khusus Batubara dan Jalur Kereta Api Tanjung Enim - Tanjung Api-Api.
12) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
13) Penurunan *Stunting*.
14) Pengembangan Pusat Kesehatan.

**Tabel 7.12**
Target Indikator Makro
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi | IPM | Tingkat Kemiskinan |
|---|---|---|---|
| 2018 | 7,35 | 68,43 | 12,56 |
| 2019 | 7,75 | 69,23 | 11,82 |
| 2020 | 7,77 | 70,04 | 11,19 |
| 2021 | 7,80 | 70,84 | 10,56 |
| 2022 | 7,90 | 71,64 | 9,93 |
| 2023 | 8,00 | 72,44 | 9,30 |

*Sumber: Konfirmasi Bupati Muara Enim, 2018, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2018*

**Gambar 7.25**
Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2012-2032




*Sumber: Revisi RTRW Kab. Muara Enim, 2018*

### 7.2.13 Kabupaten OKU Selatan

a. Arahan Pengembangan Wilayah

Kabupaten OKU Selatan memiliki Proyek Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi, dan Kawasan Strategis Kabupaten, yakni

1) Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Bendungan Tiga Dihaji.
2) Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
   a) Kawasan Strategis dengan Kategori Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, yakni Kawasan Minapolitan dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Danau Ranau.
   b) Kawasan Strategis yang memiliki Fungsi Pendayagunaan SDA/Teknologi Tinggi, yakni Kawasan Panas Bumi Ulu Danau yang berada di sepanjang Bukit Barisan di wilayah Sumatera Selatan.
3) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
   a) Kawasan Strategis untuk kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
      - Kawasan Pusat Kota Muaradua.

- Kawasan Agropolitan.
- Kawasan Koridor Muaradua – Banding Agung.
- Kawasan Panas Bumi Geothermal terletak di Danau Ranau (Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Banding Agung), Way Selabung (Kecamatan Mekakau Ilir), Aromantai (Kecamatan Pulau Beringin), Ulu Danau (Kecamatan Sindang Danau), dan Marga Bayur (Kecamatan Muaradua Kisam).

b) Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Sosial dan Budaya
- Kawasan situs sejarah di Kecamatan Banding Agung, yang memiliki situs Batu Tapal, Batu Lesung, Batu Kursi dan Batu Bersusun, Kecamatan Tiga Dihaji, memiliki situs Batu Pengaringan dan situs Tapak Kerbau.
- Kawasan situs purbakala di Kecamatan BPR Ranau Tengah, yang memiliki situs Candi Kebayan dan situs Rumah Lamban Tuha, Kecamatan Mekakau Ilir, yang memiliki situs Batu Bertangkup, Batu Peti, Batu Berjajar, Batu Tapak Puyang dan situs Batu Marmer.
- Kawasan budaya sejarah di Kecamatan Pulau Beringin yang memiliki Makam Serunting Sakti, Piano Tue, Lemari Tue, Kecamatan Sindang Danau yang memiliki Makam Puyang Air Rambutan, Kecamatan Muaradua Kisam yang memiliki Patung Main Sindi, Patung Gajah, Patung Anjing, Lesung Batu, Kecamatan Kisam Tinggi yang memiliki Makam Puyang Bale Seribu, Makam Puyang Raje Kuase, Senjata Pusaka Skin, Banteng Tinggi, Kecamatan Kisam Ilir yang memiliki Batu Jung, Batu Berbentuk Meriam, Batu Berbentuk Tapak Seribu, Batu Berbentuk Lesung, Kecamatan Buay Sandang Aji yang memiliki Makam Abdullah, Batu Beras, Batu Ciuman, Kapal Terbalik, Makam Semberani Sakti, Makam Puyang Sanjaya, Sumur Putri, Sumur Kuning dan situs Benteng Perang Paoh, Kecamatan Muaradua yang memiliki situs Makam Puyang Umpu Serawan, Makam Puyang Komering, Makam Puyang Mambang Suketi dan Makam Puyang Minak Bala;
- Kawasan benda sejarah di Kecamatan Buana Pemaca yang memiliki Kereta Kencana.

c) Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- Tempat perlindungan keanekaragaman hayati.
- Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau

diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan.

- Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian.
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro.
- Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- Kawasan rawan bencana alam.
- Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

d) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, yakni kawasan potensi batubara di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Buay Sadang Aji, Kecamatan Simpang, Kecamatan Muaradua, dan potensi biji besi yang terletak di Kecamatan Sungai Are, Kecamatan Pulau Beringin dan Kecamatan Sindang Danau.

e) Kawasan Perbatasan yang memiliki nilai strategis karena menyangkut paduserasian tata ruang, meliputi kawasan perbatasan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Kabupaten Lampung Barat (Provinsi Lampung), sehingga dapat memberikan investasi fasilitas pelayanan yang dilakukan kedua pemerintah kabupaten.

b. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Sektor unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 83,94% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2017, meliputi

1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 32,66%, terdiri dari tanaman perkebunan (42,51%), tanaman pangan (25,15%), tanaman hortikultura (19,89%), kehutanan dan penebangan kayu (14,4%), perikanan (10,8%), peternakan (7,20%), jasa pertanian dan perburuan (5,26%).
2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,55%, dengan kontribusi terbesar dari Perdagangan

Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 83,09 dan Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya sebesar 16,91%.

3) Sektor Konstruksi sebesar 16,95%.
4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 7,40%, dengan kontribusi terbesar dari industri makanan dan minuman sebesar 84,63%, kemudian industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bamboo, rotan dan sejenisnya sebesar 7,11%.
5) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,38%.

c. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah hingga tahun 2023

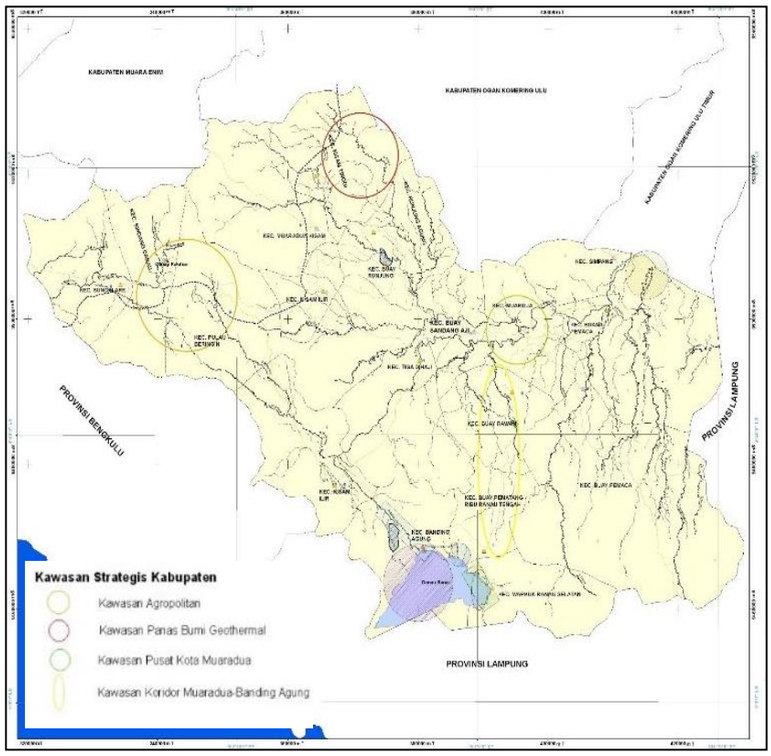
1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 4,42%-5,52% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,97% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Peningkatan IPM menjadi 67,67.
4) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 80,63%, air minum sebesar 29,28%, akses sanitasi sebesar 39,32%.
5) Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
6) Percepatan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji.
7) Revitalisasi Bandara Banding Agung.
8) Peningkatan Akses Energi baik panas bumi maupun batubara.
9) Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu dan Ekowisata Danau Ranau.
10) Pelestarian Kawasan Situs Bersejarah.
11) Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup.
12) Peningkatan kerjasama dengan kawasan perbatasan.
13) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, serta longsor.

**Tabel 7.13**
Target Indikator Makro
Kabupaten OKU Selatan Tahun 2018-2023

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi | IPM | Tingkat Kemiskinan |
|---|---|---|---|
| 2018 | 4,42-5,32 | 64,66 | 10,64 |
| 2019 | 4,42-5,32 | 65,53 | 10,21 |
| 2020 | 4,42-5,32 | 66,27 | 9,50 |
| 2021 | 4,42-5,32 | 67,01 | 9,02 |
| 2022 | 4,42-5,52 | 67,23 | 9,00 |
| 2023 | 4,42-5,52 | 67,67 | 8,97 |

*Sumber: Konfirmasi Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, 2018, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2018*

**Gambar 7.26**
Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah
Kabupaten OKU Selatan Tahun 2012-2032




*Sumber: Perda No. 13 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. OKU Selatan, 2013*

### 7.2.14 Kabupaten Lahat

a. Arahan Pengembangan Wilayah

Kabupaten Lahat memiliki Proyek Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi, dan Kawasan Strategis Kabupaten, yakni

1) Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Jalan Tol Muara Enim-Lubuklinggau-Lahat sepanjang 125 Km yang merupakan bagian dari Trans Sumatera.
2) Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

a) Kawasan Strategis dengan Kategori Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, yakni Kawasan Koridor Lahat –Muara Enim.
b) Kawasan Strategis yang memiliki Nilai Strategis Sosial Budaya, yakni Kawasan Megalith.
c) Kawasan Strategis yang memiliki Fungsi Pendayagunaan SDA/Teknologi Tinggi, yakni Kawasan Panas Bumi (Geothermal) Lumut Balai yang berada di sepanjang Bukit Barisan di wilayah Sumatera Selatan.

3) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
a) Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi
- Kawasan Agropolitan.
- Kawasan perkotaan yang ditetapkan sebagai PKLp.
- Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kikim Selatan.

b) Kawasan Strategis Sosial dan Budaya
- Kawasan situs sejarah, meliputi Megalitikum Tinggi Hari di Kecamatan Gumay Ulu, Megalitikum Batu Tiang Enam di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, dan Megalitikum Batu Macan di Kecamatan Pulau Pinang.
- Kawasan situs sejarah meliputi 2 (dua) Situs kubur batu di Kecamatan Pajar Bulan.
- Kawasan budaya sejarah di Kecamatan Lahat, Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, Kecamatan Jarai, dan Kecamatan Kikim Timur.

c) Kawasan Strategis Lingkungan Hidup
- Kawasan hutan lindung di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, Kecamatan Tanjung Sakti PUMU, Kecamatan Jarai, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Merapi Selatan dan Kecamatan Kikim Selatan.
- Kawasan hutan suaka alam dan cagar budaya di Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan PSEKSU, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Pajar Bulan dan Kecamatan Pagar Gunung.
- Kawasan Daerah Aliran sungai (DAS), meliputi sungai Lematang, sungai Kikim dan sungai Indikat.

b. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Sektor unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lahat sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 82,33% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2017, meliputi

1) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 33,38%.
2) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 19,88%.

3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,39%.
4) Sektor Konstruksi sebesar 9,71%.
5) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,97%.

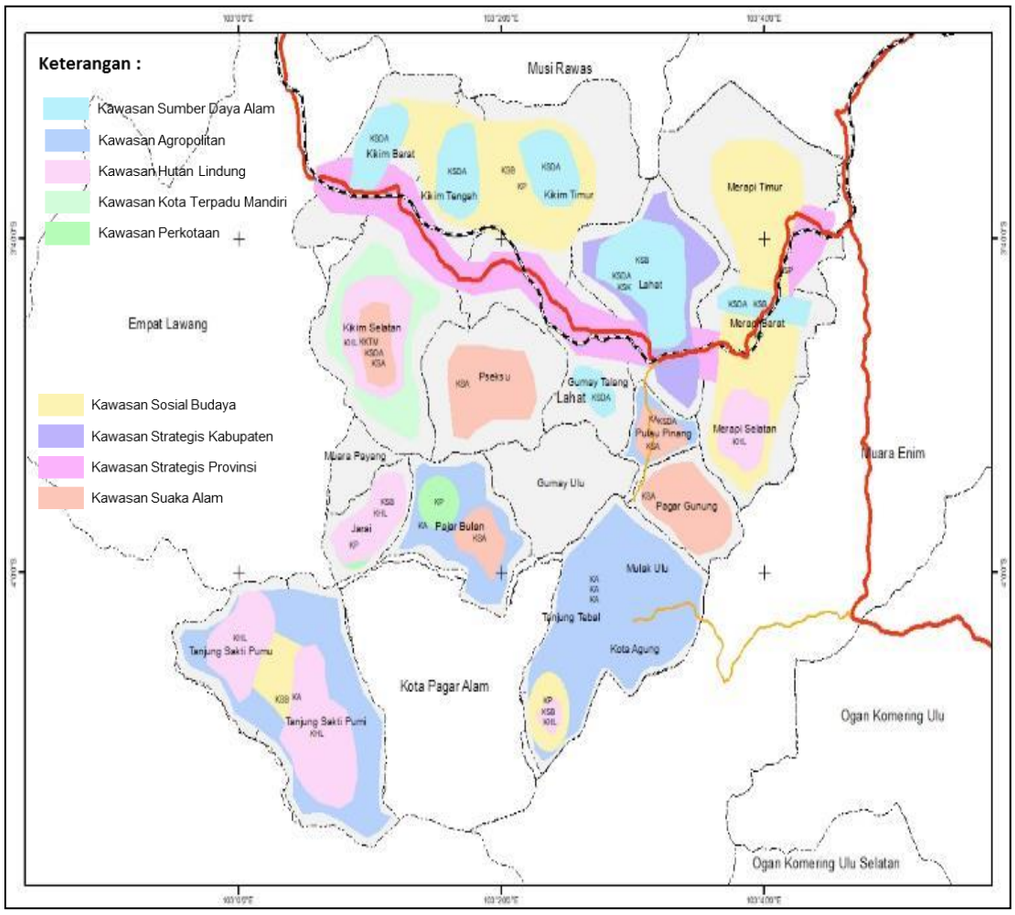
c. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah hingga tahun 2023
1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 3,85%-4,95% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,92% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Peningkatan IPM menjadi 70,02.
4) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 80,64%, akses air minum layak sebesar 54,85%, dan akses sanitasi layak sebesar 49,96%.
5) Peningkatan produktivitas pertanian melalui optimalisasi jaringan irigasi menuju kedaulatan pangan.
6) Pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri.
7) Pelestarian Kawasan situs bersejarah dan budaya sejarah.
8) Pengembangan Pariwisata Megalith dan Pariwisata Alam.
9) Mempertahankan dan Melestarikan Kawasan Hutan Lindung, Suaka Alam dan Cagar Budaya, serta Daerah Aliran Sungai.
10) Percepatan pembangunan Jalan Tol Muara Enim-Lubuklinggau-Lahat.
11) Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup (Galian C) dan Pasca Tambang.
12) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana longsor.

**Tabel 7.14**
Target Indikator Makro
Kabupaten Lahat Tahun 2018-2023

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi | IPM | Tingkat Kemiskinan |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3,85-4,75 | 67,11 | 16,15 |
| 2019 | 3,85-4,75 | 67,68 | 14,29 |
| 2020 | 3,85-4,75 | 68,26 | 13,21 |
| 2021 | 3,85-4,75 | 68,84 | 12,13 |
| 2022 | 3,85-4,95 | 69,42 | 11,05 |
| 2023 | 3,85-4,95 | 70,02 | 9,92 |

*Sumber: Konfirmasi Sekda Kabupaten Lahat, 2018, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2018*

**Gambar 7.27**
Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah
Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032




*Sumber: Perda No. 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Lahat, 2012*

### 7.2.15 Kota Prabumulih

a. Arahan Pengembangan Wilayah

Kota Prabumulih memiliki Proyek Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi, dan Kawasan Strategis Kota, yakni

1) Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Kereta Api Prabumulih – Kertapati yang merupakan bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera.
2) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dengan Kategori Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, yakni Kawasan Koridor Palembang-Prabumulih.
3) Kawasan Strategis Kota (KSK)
   a) Kawasan Strategis Ekonomi, yakni Kawasan Pusat Strategis Ekonomi, meliputi Kelurahan Prabumulih, Muntang Tapus, Mangga Besar, Kelurahan Pasar I, Pasar II, Karang Raja, Prabujaya, dan Tugu Kecil.
   b) Kawasan Strategis Sosial Budaya di Kelurahan Prabumulih.

b. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Sektor unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Prabumulih sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 82,33% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2017, meliputi

1) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 23,37%.
2) Sektor Konstruksi sebesar 19,59%.
3) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,45%.
4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 9,04%.
5) Sektor Real Estat sebesar 7,68%.
6) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 6,64%.
7) Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,79%.

c. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah hingga tahun 2023

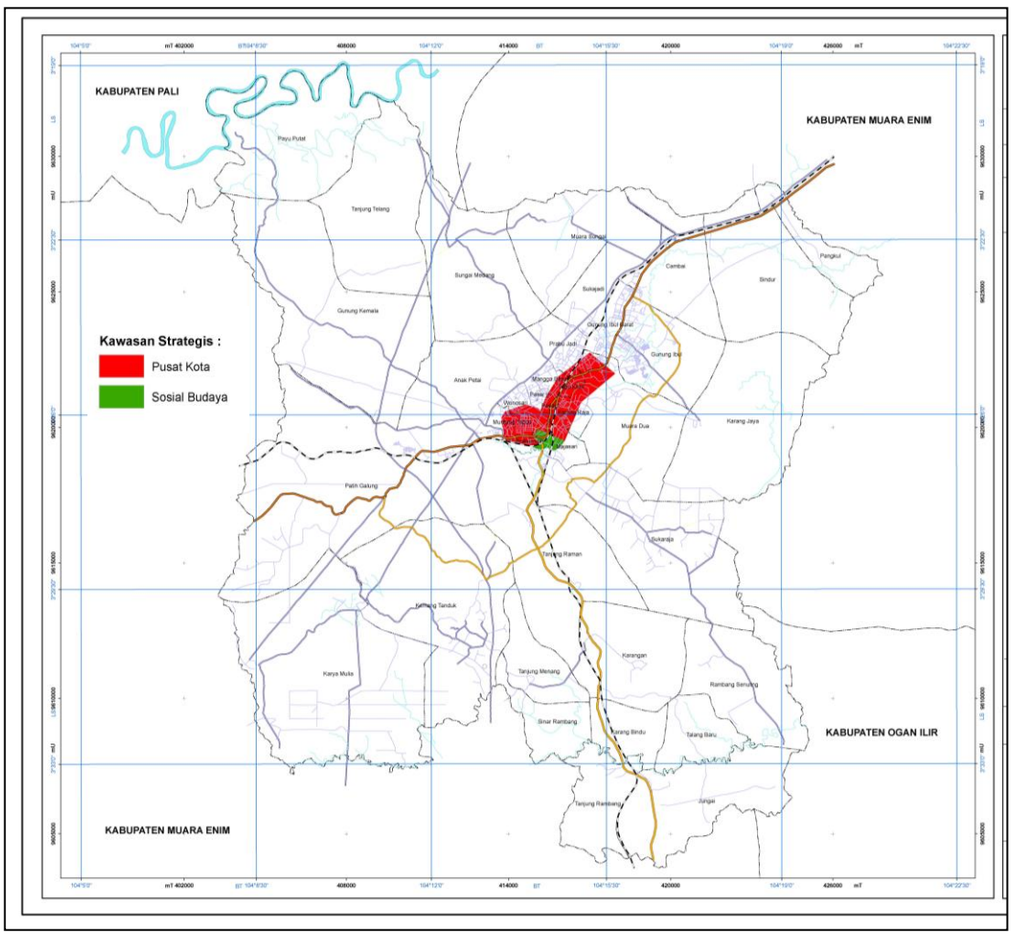
1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 5,17%-6,27% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 7,99% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Peningkatan IPM menjadi 77,92.
4) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 18,27%, akses air minum layak sebesar 70,93%, dan akses sanitasi layak sebesar 92,17%.
5) Percepatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Antar Kota *(Double Track)*.
6) Peningkatan Produktivitas Perkebunan menuju kedaulatan pangan.
7) Pengembangan Perkotaan Prabumulih.

**Tabel 7.15**
Target Indikator Makro
Kota Prabumulih Tahun 2018-2023

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi | IPM | Tingkat Kemiskinan |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5,17-6,07 | 74,12 | 11,39 |
| 2019 | 5,17-6,07 | 75,58 | 10,93 |
| 2020 | 5,17-6,07 | 76,16 | 10,17 |
| 2021 | 5,17-6,07 | 76,75 | 9,41 |
| 2022 | 5,17-6,27 | 77,34 | 8,65 |
| 2023 | 5,17-6,27 | 77,92 | 7,99 |

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2018*

**Gambar 7.28**
Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah
Kota Prabumulih Tahun 2012-2032




*Sumber: Perda No. 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Prabumulih, 2013*

### 7.2.16 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

a. Arahan Pengembangan Wilayah

Kabupaten PALI memiliki Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten, yakni

1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang memiliki nilai strategis Sosial Budaya, yakni Kawasan Candi Bumi Ayu.
2) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
   a) Kawasan Strategis Ekonomi, yakni
      - Kawasan Perkotaan Talang Ubi.
      - Kawasan Strategis Agropolitan Talang Ubi.
      - Kawasan Strategis Agropolitan Penukal Utara.
      - Kawasan pelabuhan khusus batubara yang berada di Desa Prambatan, Kecamatan Abab.
      - Kawasan Koridor Abab – Talang Ubi.
      - Kawasan Koridor Tanah Abang – Penukal Utara.

- Kawasan Strategis Daerah Penyangga Kawasan Industri *Pendopo Integrated Industrial Park* (PIIP).

b) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yakni Kawasan Gambut dan Rawa di Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara, dan Kecamatan Abab.

b. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Sektor unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten PALI sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 89,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2017, meliputi

1) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 41,89%.
2) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 16,73%.
3) Sektor Konstruksi sebesar 14,85%.
4) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,98%.
5) Sektor Industri Pengolahan sebesar 2,40%.

c. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah hingga tahun 2023

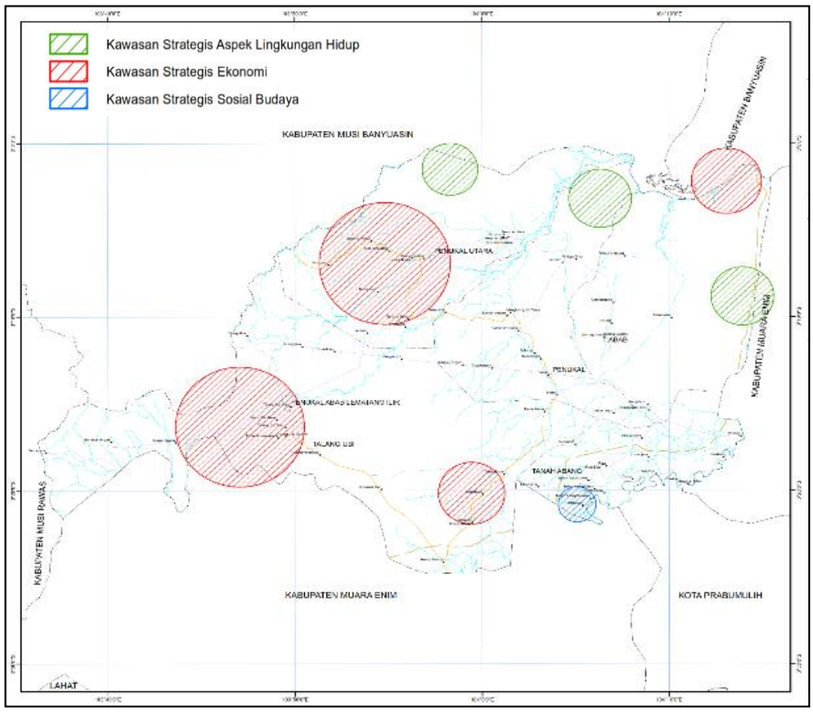
1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 6,97% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,69% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Peningkatan IPM menjadi 67,74.
4) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 89,57%, akses air minum layak sebesar 62,82%, dan akses sanitasi layak sebesar 70,55%.
5) Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan untuk mendukung kedaulatan pangan.
6) Pengelolaan Gambut dan Rawa dengan luasan gambut sebesar 30.305 ha dan Penanganan Hotspot.
7) Pengembangan Pariwisata dan Pelestarian Kawasan Bersejarah Candi Bumi Ayu.
8) Pengembangan Kawasan Industri Talang Ubi.
9) Peningkatan Jalan PALI-Musi Banyuasin.
10) Pengembangan Jalan PALI-Musi Rawas.

**Tabel 7.16**
Target Indikator Makro
Kabupaten PALI Tahun 2018-2023

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi | IPM | Tingkat Kemiskinan |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5,87 | 63,48 | 13,81 |
| 2019 | 5,87 | 64,62 | 13,25 |
| 2020 | 5,96 | 65,40 | 12,33 |
| 2021 | 6,08 | 66,18 | 11,41 |
| 2022 | 6,20 | 66,96 | 10,48 |
| 2023 | 6,97 | 67,74 | 9,69 |

*Sumber: Konfirmasi Sekda Kabupaten PALI, 2018, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2018*

**Gambar 7.29**
Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018-2038




*Sumber: Perda No. 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kab. PALI, 2018*

### 7.2.17 Kabupaten Banyuasin

a. Arahan Pengembangan Wilayah

Kabupaten Banyuasin memiliki Kawasan Strategis Nasional, Proyek Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten, yakni

1) Kawasan Strategis Nasional (KSN), yakni Taman Nasional Sembilang.
2) Proyek Strategis Nasional (PSN), meliputi Jalan Tol Palembang – Tanjung Api-Api sepanjang 70 Km dengan investasi sebesar Rp. 9,761 Triliun yang direncanakan dibangun pada Tahun 2018-2023,

Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung sepanjang 111,69 Km dengan investasi sebesar Rp. 17,35 Triliun yang direncanakan dibangun pada tahun 2016-2019, dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api.

3) Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
   a) Kawasan Strategis dengan Kategori Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, meliputi Kawasan Terpadu Tanjung Api-Api, Kawasan Minapolitan, dan Kawasan Pengembangan Itik Pegagan.
   b) Kawasan Strategis yang memiliki Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup, yakni Kawasan Pesisir Timur dan Kawasan Hutan Rawa Gambut.
4) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
   a) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi
      - Kawasan Pendukung Perkotaan Metropolitan Palembang, meliputi Kota Terpadu Mandiri (KTM) Telang, Kawasan Pusat Perdagangan di Kecamatan Betung, Kawasan Pusat Pemerintahan di Pangkalanbalai, dan Kawasan Pusat Permukiman Perkotaan di Kawasan Sukajadi dan Sukomoro (Kecamatan Talang Kelapa), Jakabaring (Kecamatan Rambutan) dan Mariana (Kecamatan Banyuasin I )
      - Kawasan Strategis Pertanian, meliputi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Tanjung Lago, Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan di Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Air Kumbang, Kecamatan Muara Padang dan Kecamatan Rambutan, dan Kawasan Sentra Produksi Beras Pertanian Pasang Surut di Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan Muara Telang, Kecamatan Makarti Jaya, dan Kecamatan Sumber Marga Telang.
      - Kawasan Migas di Kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan Tungkal Ilir.
      - Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api/Tanjung Carat di Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Sumber Marga Telang.
      - Kawasan Minapolitan, meliputi Kawasan perikanan tangkap di Sungsang, Kawasan perikanan budidaya air tawar dan tambak terletak di Air Batu, Sukamoro, Rantau Bayur, Muara Sugihan dan Karang Agung Ilir, dan Kawasan pengelolahan dan pemasaran ikan terletak di Kuala Air Sugihan dan Sungsang.

b) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pada Aspek Sosial – Budaya, yakni Kawasan kampung Nelayan Sungsang di Kecamatan Banyuasin II.

c) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yakni Kawasan Taman Nasional Sembilang di Kecamatan Banyuasin II dan kawasan suaka margasatwa Padang Sugihan di Kecamatan Muara Padang.

d) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni kawasan *Agrocenter* di Kecamatan Sembawa.

b. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Sektor unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuasin sebanyak 4 (empat) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 84,27% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2017, meliputi

1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 34,38%, terdiri dari tanaman pangan (53,79%), perikanan (41,15%), tanaman perkebunan (19,86%), peternakan (15,54%), jasa pertanian dan perburuan (5,99%), kehutanan dan penebangan kayu (4,13%), hortikultura tahunan (2,99%), tanaman hortikultura (1,83%), dan tanaman perkebunan (0,00%).
2) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 25,02%., dengan kontribusi terbesar adalah pertambangan minyak, gas, dan panas bumi sebesar 59,85%, kemudian pertambangan dan penggalian lainnya sebesar 40,15%.
3) Sektor Konstruksi sebesar 12,67%.
4) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,20%., terdiri dari perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor sebesar 86,87% dan perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya sebesar 13,13%.

c. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah hingga tahun 2023

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 5,08%-6,08% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,03% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Peningkatan IPM menjadi 71,28.

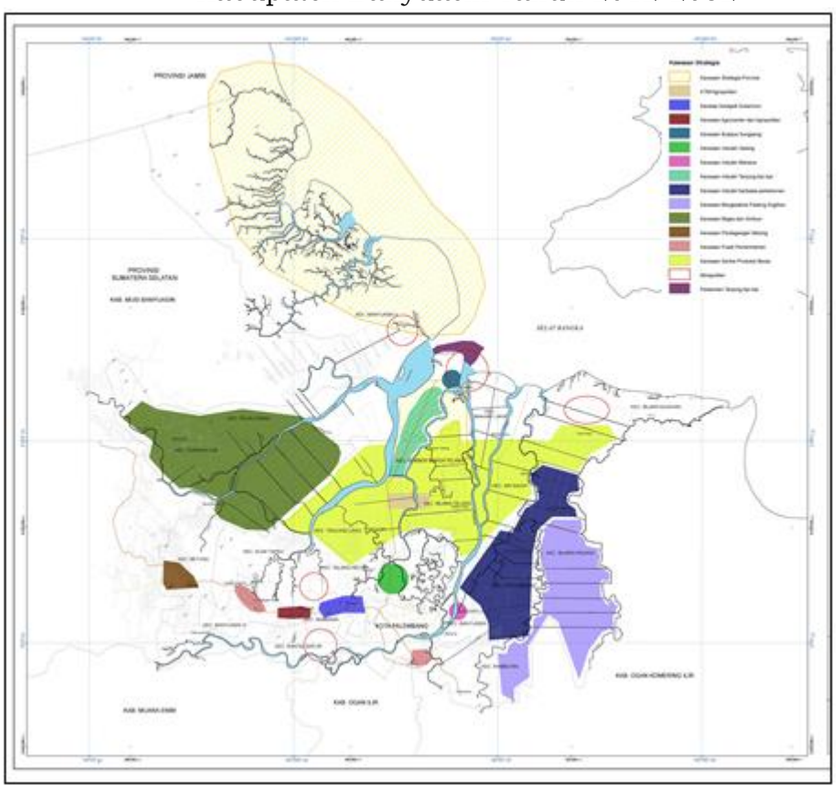
4) Peningkatan infrastruktur, meliputi jalan mantap sebesar 63,57%, akses air minum layak sebesar 66,29%, dan akses sanitasi layak sebesar 61,26%.
5) Perluasan dan Percepatan Operasional Kawasan Ekonomi Khusus yang berkelanjutan (memperhatikan aspek lingkungan).
6) Pengembangan Kawasan Industri Gasing.
7) Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional.
8) Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api.
9) Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Telang.
10) Peningkatan Produktivitas Pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan.
11) Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya Air Tawar, serta pengolahan dan pemasaran ikan.
12) Pengembangan Destinasi Pariwisata (Ekowisata Taman Nasional Sembilang dan Desa Wisata Sungsang IV).
13) Pengembangan Kawasan Sembawa.
14) Pengelolaan gambut seluas 563.083 Ha dan Penanganan Hotspot.
15) Pengembangan Daerah Perbatasan Palembang-Banyuasin.
16) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
17) Pengembangan Daerah Irigasi Rawa.
18) Pengembangan Pusat Kerbau Rawa.

**Tabel 7.17**
Target Indikator Makro
Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi | IPM | Tingkat Kemiskinan |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5,08-5,88 | 66.65 | 11,32 |
| 2019 | 5,08-5,88 | 67.74 | 11,07 |
| 2020 | 5,08-5,88 | 68.63 | 10.31 |
| 2021 | 5,08-5,88 | 69.52 | 9.55 |
| 2022 | 5,08-6,08 | 70.40 | 8.78 |
| 2023 | 5,08-6,08 | 71.28 | 8.03 |

*Sumber: Konfirmasi Kabupaten Banyuasin, 2018, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2018*

**Gambar 7.30**
Peta Arahan Strategis Pengembangan Wilayah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2012-2032



*Sumber: Perda No. 28 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Banyuasin, 2012*

# BAB VIII

# KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang seluruh program prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan tahun 2019-2023 dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah lima tahun kedepan. Bab ini memuat seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah tahun 2019-2023 sebagaimana tabel berikut, dilanjutkan dengan tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lima tahun kedepan.

**Tabel 8.1**
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023
Provinsi Sumatera Selatan

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **KAPASITAS RIIL KEUANGAN** | **3.386.640.270.788,95** | **3.519.162.745.335,00** | **4.299.406.856.981,09** | **4.746.538.499.389,09** | **5.204.720.716.034,66** | **5.715.122.212.174,96** |
| **2** | **BELANJA** | **8.676.818.928.257,95** | **10.167.322.040.656,20** | **10.185.548.163.150,20** | **10.774.524.180.839,00** | **11.425.878.654.587,70** | **12.135.735.068.498,70** |
| **2.1.** | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | **5.290.178.657.469,00** | **6.648.159.295.321,25** | **5.886.141.306.169,08** | **6.027.985.681.449,92** | **6.221.157.938.553,07** | **6.420.612.856.323,760** |
| 2.1.1. | Belanja Pegawai | 1.768.433.252.810,00 | 1.803.716.819.834,31 | 1.839.791.156.231,00 | 1.876.586.979.355,62 | 1.914.118.718.942,73 | 1.952.401.093.321,58 |
| 2.1.2. | Belanja Subsidi | - | 25.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | 35.000.000.000,00 | 40.000.000.000,00 | 45.000.000.000,00 |
| 2.1.3. | Belanja Hibah | 2.265.696.533.459,00 | 1.571.409.184.520,00 | 1.557.959.340.108,75 | 1.538.588.351.773,50 | 1.563.588.351.773,50 | 1.587.588.351.773,50 |
| 2.1.4. | Belanja Bantuan Sosial | - | - | | | | |
| 2.1.5. | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 1.145.725.100.000,00 | 2.510.446.875.374,39 | 1.649.809.815.957,16 | 1.732.300.306.755,01 | 1.818.915.322.092,76 | 1.909.861.088.197,40 |
| 2.1.6. | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota / Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 102.823.771.200,00 | 718.648.565.592,55 | 777.080.993.872,18 | 812.435.043.565,79 | 849.806.795.744,08 | 889.297.135.531,28 |
| 2.1.7. | Belanja Tidak Terduga | 7.500.000.000,00 | 18.937.850.000,00 | 31.500.000.000,00 | 33.075.000.000,00 | 34.728.750.000,00 | 36.465.187.500,00 |
| **2.2.** | **BELANJA LANGSUNG** | **3.386.640.270.788,95** | **3.519.162.745.335,00** | **4.299.406.856.981,09** | **4.746.538.499.389,09** | **5.204.720.716.034,66** | **5.715.122.212.174,96** |
| 2.2.1. | Belanja Pegawai | 11.395.776.940,00 | 21.346.410.141,00 | 36.646.262.388,81 | 38.825.904.637,78 | 41.483.396.968,54 | 44.537.777.772,37 |
| 2.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.686.382.500.884,00 | 1.470.598.225.067,00 | 1.500.799.325.606,92 | 1.510.799.325.606,92 | 1.530.799.325.606,92 | 1.550.799.325.606,92 |
| 2.2.3. | Belanja Modal | 1.688.861.992.964,95 | 2.027.218.110.127,00 | 2.761.961.268.985,36 | 3.196.913.269.144,39 | 3.632.437.993.459,20 | 4.119.785.108.795,67 |

*Catatan: Tahun 2019 ada pembayaran Hutang Bagi Hasil sebesar Rp.1.064.721.775.374,09*
*Tahun 2018 ada pembayaran Hutang Bagi Hasil sebesar Rp.490.540.872.260,31*
*Sumber: Hasil Analisis 2019*

Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 terdapat 66 program yang membutuhkan ruang (spasial) dan 216 program yang tidak membutuhkan ruang (a-spasial) sebagaimana dapat dilihat pada tabel 8.2.

Sedangkan penjabaran program prioritas seluruh perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan, tertuang dalam tabel berikut.

**Tabel 8.2.**

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | **PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | **Layanan Urusan Wajib Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **1** | | **Pendidikan** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 5,351 | 100% | 5,402 | 100% | 5,913 | 100% | 7,683 | 100% | 9,651 | 100% | 33,999 | Dinas Pendidikan |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 78% | 79% | 80% | 705 | 81% | 835 | 82% | 1,585 | 83% | 4,331 | 84% | 7,809 | 84% | 15,264 | Dinas Pendidikan |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | 100% | 100% | na | - | 100% | 646 | na | - | na | - | na | - | 100% | 646 | Dinas Pendidikan |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya | % | 100% | 100% | 100% | 121 | 100% | 150 | 100% | 150 | 100% | 152 | 100% | 200 | 100% | 772 | Dinas Pendidikan |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/ Berkembang | % | 100% | 100% | na | - | 100% | 269 | 100% | 293 | 100% | 293 | 100% | 383 | 100% | 1,238 | Dinas Pendidikan |
| | | | Program Pendidikan Menengah | Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah (APK SM) | Angka | 83.44 | 77.40 | 86.46 | 627,544 | 87.36 | 629,559 | 88.24 | 633,037 | 89.12 | 646,903 | 90 | 725,272 | 90 | 3,262,316 | Dinas Pendidikan |
| | | | Program Pendidikan Luar Biasa | | | | | | 4,876 | | 2,594 | | 5,068 | | 10,340 | | 13,775 | | 36,652 | Dinas Pendidikan |
| | | | | Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi | Sekolah | 10 | 92 | 93 | | 94 | | 95 | | 96 | | 97 | | 97 | | |
| | | | | Persentase Sekolah SLB yang terakreditasi : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A | % | 5.90% | 12.90% | 12.90% | | 12.90% | | 12.90% | | 12.9% | | 12.90% | | 12.90% | | |
| | | | | B | % | 41.20% | 45.16% | 48.39% | | 51.61% | | 54.84% | | 58.1% | | 61.29% | | 61.29% | | |
| | | | | C | % | 2.90% | 3.23% | 6.45% | | 9.68% | | 12.90% | | 16.1% | | 25.81% | | 25.81% | | |
| | | | | D | % | 50.00% | 38.71% | 32.26% | | 25.81% | | 19.35% | | 12.9% | | 0.00% | | 0.00% | | |
| | | | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan minimal Berkualifikasi S-1 | % | 94.76% | 95.63% | 96.50% | 1,822 | 97.37 | 1,801 | 98.24 | 4,847 | 99.11 | 11,851 | 100 | 14,764 | 100 | 35,085 | Dinas Pendidikan |
| | | | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | | | | | | 178,773 | | 214,736 | | 217,370 | | 226,602 | | 246,036 | | 1,083,517 | Dinas Pendidikan |
| | | | | Persentase sekolah menengah terakreditasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A | % | 12.85% | 23.76% | 23.76% | | 23.76% | | 23.76% | | 23.76% | | 23.76% | | 23.76% | | |
| | | | | B | % | 10.63% | 26.77% | 28.82% | | 30.54% | | 33.01% | | 35.48% | | 37.42% | | 37.42% | | |
| | | | | C | % | 4.98% | 11.40% | 12.26% | | 13.23% | | 14.19% | | 15.27% | | 16.13% | | 16.13% | | |
| | | | | D | % | 0.11% | 38.06% | 35.16% | | 32.47% | | 29.03% | | 25.48% | | 22.69% | | 22.69% | | |
| | | | Program Pendidikan Menengah Khusus Siswa miskin | Jumlah siswa miskin yang menerima bantuan pendidikan | Siswa | 303 | 299 | na | - | 300 | 11,423 | 300 | 12,924 | 300 | 17,501 | 300 | 26,456 | 1,200 | 68,303 | Dinas Pendidikan |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| **1** | **2** | | **Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 39,228 | 100% | 43,585 | 100% | 47,943 | 100% | 52,737 | 100% | 58,011 | 100% | 241,503 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase keterpenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 75% | 80% | 85% | 30,864 | 100% | 7,375 | 100% | 7,695 | 100% | 8,464 | 100% | 9,311 | 100% | 63,709 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | 90% | 90% | 90% | 104 | 90% | 685 | 90% | 229 | 90% | 799 | 90% | 251 | 90% | 2,068 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Keterpenuhan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | % | 75% | 80% | 85% | 2,449 | 90% | 2,721 | 90% | 2,993 | 90% | 3,293 | 90% | 3,622 | 90% | 15,079 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | 40 | 100% | 158 | 100% | 174 | 100% | 191 | 100% | 270 | 100% | 833 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Sesuai Kebutuhan | % | 100% | 100% | 100% | 18,734 | 100% | 20,815 | 100% | 22,897 | 100% | 25,187 | 100% | 27,705 | 100% | 115,338 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Indeks Keluarga Sehat | % | na | 18% | 22% | 16,507 | 25% | 18,341 | 28% | 20,175 | 35% | 22,193 | 40% | 24,412 | 40% | 101,627 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Rumah Tangga ber-PHBS | % | 50% | 55% | 65% | 14,703 | 70% | 16,336 | 75% | 17,970 | 80% | 19,767 | 85% | 21,744 | 85% | 90,520 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | | | | | | 1,303 | | 1,538 | | 14,875 | | 14,875 | | 14,875 | | 47,465 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase Balita Stunting | % | 22.8% | 29% | 27% | | 26% | | 24% | | 22% | | 20% | | 20% | | |
| | | | | Persentase Balita Gizi Buruk | % | 0.032% | 0.037% | 0.035% | | 0.033% | | 0.031 | | 0.029 | | 0.027 | | 0.027 | | |
| | | | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | | | | | | 2,744 | | 3,049 | | 3,353 | | 3,689 | | 4,058 | | 16,892 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase Desa yang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | % | 52.8% | 62.8% | 70% | | 78% | | 86% | | 95% | | 100% | | 100% | | |
| | | | | Persentase kabupaten/Kota Sehat | % | 10% | 20% | 45% | | 65% | | 85% | | 95% | | 100% | | 100% | | |
| | | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | 7,006 | | 8,012 | | 8,791 | | 9,647 | | 10,589 | | 44,045 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Angka Kesakitan | Angka | 11.2 | 11.2 | 10.7 | | 10.4 | | 10 | | 9.8 | | 9.4 | | 9.4 | | |
| | | | | Imunisasi Dasar Lengkap | % | 99.4% | 76% | 95% | | 95% | | 95% | | 95% | | 95% | | 95% | | |
| | | | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi | % | 30% | 43% | 60% | 1,333 | 70% | 1,482 | 80% | 1,630 | 90% | 1,793 | 100% | 1,972 | 100% | 8,210 | Dinas Kesehatan |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata | Persentase Rumah Sakit UPT Dinkes yang Memilki Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Sesuai Standar | % | 60% | 70% | 75% | 431,200 | 85% | 433,728 | 90% | 455,522 | 95% | 459,803 | 100% | 468,301 | 100% | 2,248,554 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RSMata | Persentase Rumah Sakit UPT Dinkes yang Memilki Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang terpelihara dan berfungsi dengan baik | % | 70% | 80% | 85% | 1,620 | 88% | 1,800 | 90% | 1,980 | 95% | 2,178 | 100% | 2,396 | 100% | 9,974 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Universal Coverage Jaminan Kesehatan | % | 56.5% | 58.4% | 95% | 468 | 96% | 520 | 97% | 572 | 98% | 629 | 100% | 692 | 100% | 2,881 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | Jumlah Kematian Bayi | Orang | 638 | 497 | 477 | 401 | 458 | 446 | 438 | 491 | 416 | 540 | 394 | 594 | 394 | 2,471 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan Program Usila | % | 65% | 70% | 76% | 259 | 82% | 288 | 88% | 316 | 94% | 348 | 100% | 383 | 100% | 1,594 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah Kematian Ibu Maternal | Orang | 107 | 120 | 118 | 842 | 116 | 935 | 114 | 1,029 | 112 | 1,132 | 110 | 1,245 | 110 | 5,182 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan | Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memiliki izin edar yang memenuhi Persyaratan Kesehatan | % | 86% | 87% | 90% | 490 | 93% | 544 | 95% | 598 | 98% | 658 | 100% | 724 | 100% | 3,014 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | 8,649 | | 9,610 | | 10,571 | | 11,628 | | 12,791 | | 53,248 | Dinas Kesehatan |
| | | | | a. Rasio dokter terhadap 100.000 penduduk | Rasio | 10 | 11 | 13 | | 15 | | 17 | | 19 | | 20 | | 20 | | |
| | | | | b. Rasio dokter gigi terhadap 100.000 penduduk | Rasio | 2 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 7 | | |
| | | | | c. Rasio bidan terhadap 100.000 penduduk | Rasio | 113 | 119 | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 125 | | |
| | | | | d. Rasio tenaga gizi terhadap 100.000 penduduk | Rasio | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 12 | | 12 | | |
| | | | | e. Rasio tenaga sanitarian terhadap 100.000 penduduk | % | 6% | 6% | 7% | | 8% | | 9% | | 10% | | 12% | | 12% | | |
| | | | Program Keluarga Berencana | Persentase PUS yang Menjadi Peserta KB Aktif | % | 69% | 69.2% | 72% | 241 | 74% | 268 | 76% | 294 | 78% | 324 | 80% | 356 | 80% | 1,482 | Dinas Kesehatan |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat terdampak Bencana dan/atau KLB | | | | | | 1,087 | | 1,208 | | 1,329 | | 1,461 | | 1,608 | | 6,693 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | % | na | na | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | | | Persentase penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | % | na | na | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD | Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit BLUD UPT Dinas Kesehatan | % | 60% | 65% | 70% | 96,685 | 73% | 107,427 | 75% | 118,170 | 78% | 129,987 | 80% | 142,986 | 80% | 595,255 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan | % | 100% | 100% | 100% | 3,259 | 100% | 3,621 | 100% | 4,533 | 100% | 4,986 | 100% | 5,485 | 100% | 21,883 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran RS yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 3,571 | 100% | 3,640 | 100% | 3,777 | 100% | 3,846 | 100% | 3,963 | 100% | 18,797 | RS Ernaldi Bahar |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | 60% | 75% | 80% | 20 | 85% | 1,059 | 90% | 540 | 95% | 600 | 100% | 620 | 100% | 2,838 | RS Ernaldi Bahar |
| | | | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | % | 70% | 70% | 70% | 30 | 75% | 924 | 80% | 1,254 | 85% | 1,737 | 100% | 2,315 | 100% | 6,260 | RS Ernaldi Bahar |
| | | | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Meningkatnya kapasitas SDA RS | % | 70% | 75% | 75% | 121 | 80% | 260 | 85% | 550 | 90% | 600 | 100% | 725 | 100% | 2,256 | RS Ernaldi Bahar |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | na | - | 100% | 14 | 100% | 14 | 100% | 14 | 100% | 14 | 100% | 56 | RS Ernaldi Bahar |
| | | | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | Tersedianya sarana dan prasarana RS yang memadai | % | 60% | 65% | 70% | 3,214 | 75% | 12,036 | 80% | 13,354 | 90% | 14,232 | 100% | 14,962 | 100% | 57,798 | RS Ernaldi Bahar |
| | | | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | Terpeliharanya bangunan RS | % | 60% | 65% | 65% | - | 75% | 4,325 | 80% | 5,745 | 90% | 6,347 | 100% | 7,635 | 100% | 24,052 | RS Ernaldi Bahar |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD | Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD | % | 100% | 100% | 100% | 24,681 | 100% | 25,560 | 100% | 26,349 | 100% | 27,148 | 100% | 27,993 | 100% | 131,732 | RS Ernaldi Bahar |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| **1** | **3** | | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 9,451 | 100% | 9,451 | 100% | 9,451 | 100% | 9,451 | 100% | 9,451 | 100% | 47,254 | Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 100% | 100% | 100% | 4,928 | 100% | 1,098 | 100% | 1,098 | 100% | 1,098 | 100% | 1,098 | 100% | 9,318 | Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya | % | 100% | 100% | 100% | 471 | 100% | 350 | 100% | 350 | 100% | 350 | 100% | 350 | 100% | 1,871 | Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | 445 | 100% | 370 | 100% | 370 | 100% | 370 | 100% | 370 | 100% | 1,925 | Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | 100% | 100% | na | - | 100% | 519.20 | 100% | 350 | 100% | 519.20 | 100% | 350 | 100% | 1,738 | Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang |
| | | | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | | | | | | 177,254 | | 113,869 | | 114,274 | | 142,145 | | 220,884 | | 768,426 | Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang |
| | | | | Panjang Jalan yang Terpelihara | Km | 1,415.67 | 926.68 | 1,059.56 | | 1,089.83 | | 1,120.10 | | 1,150.37 | | 1,210.92 | | 1,210.92 | | |
| | | | | | % | 74.21% | 61.22% | 70% | | 72% | | 74% | | 76% | | 80% | | 80% | | |
| | | | Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Teknis Jaringan Jalan dan Jembatan yang Tersedia | Dokumen | 12 | 7 | 30 | 51,668 | 30 | 44,815 | 30 | 56,651 | 30 | 65,649 | 30 | 72,235 | 150 | 291,018 | Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang Tersedia | Unit/ Set | 14 | 14 | 14 | 11,560 | 16 | 12,715 | 18 | 13,987 | 20 | 15,386 | 22 | 16,924 | 22 | 70,572 | Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang |
| | | | Program Perencanaan Tata Ruang | Jumlah Dokumen RTR KSP yang di Perdakan | Dokumen | na | na | 1 | 4,500 | 3 | 12,000 | 3 | 12,000 | 3 | 12,000 | 3 | 10,000 | 13 | 50,500 | Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang |
| | | | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | % | 80% | 80% | 80% | 775 | 85% | 1,000 | 85% | 1,000 | 85% | 1,000 | 90% | 1,000 | 90% | 4,775 | Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang |
| | | | Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan | | | | | | 778,540 | | 721,896 | | 751,096 | | 963,464 | | 1,081,027 | | 4,296,023 | Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang |
| | | | | Panjang jalan yang terbangun | Km | 5.8 | 1.1 | 5.08 | | 5 | | 10 | | 10 | | 10 | | 40.08 | | |
| | | | | Panjang jalan yang ditingkatkan/dilebarkan | Km | 92.18 | 31.46 | 185 | | 174.49 | | 84.90 | | 99.50 | | 145 | | 688.89 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Pembangunan dan Penggantian Jembatan | Panjang Jembatan yang terbangun | M | 1117.10 | 770.00 | 954.90 | 89,610 | 957.15 | 132,326 | 1,172.00 | 160,101 | 666.90 | 126,521 | 618.35 | 89,150 | 4,369.00 | 597,708 | Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 4,315 | 100% | 4,746 | 100% | 5,221 | 100% | 5,743 | 100% | 6,317 | 100% | 26,341 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 100% | 100% | 100% | 7,301 | 100% | 8,031 | 100% | 8,834 | 100% | 9,718 | 100% | 10,689 | 100% | 44,573 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya | % | na | na | 100% | 121 | 100% | 133 | 100% | 146 | 100% | 161 | 100% | 177 | 100% | 738 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/ Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | 211 | 100% | 232 | 100% | 255 | 100% | 281 | 100% | 309 | 100% | 1,287 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | na | na | na | - | 100% | 451 | na | - | 100% | 496 | na | - | 100% | 946 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | | | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Luas Area Pertanian yang Dialiri Irigasi, Sistem Tata Air Rawa dan Jaringan pengairan Lainnya | Ha | 23,673 | 25,776 | 28,795 | 83,946 | na | - | na | - | na | - | na | - | na | 83,946 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | | | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Jumlah pemenuhan kebutuhan tampungan air dan penyediaan air baku | Tampungan Air Baku | 28 | 28 | 30 | 28,706 | 32 | 20,000 | 36 | 42,000 | 42 | 60,000 | 48 | 60,000 | 48 | 210,706 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | | | Program Pengendalian Banjir | Jumlah Kawasan Bebas Bencana Banjir | Kawasan | 13 | 24 | 30 | 14,500 | 32 | 47,000 | 37 | 100,000 | 41 | 80,000 | 45 | 80,000 | 45 | 321,500 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | | | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Permukaaan | Luas daerah irigasi permukaan yang terairi | Ha | 23,673 | 25,776 | na | - | 30,595 | 21,600 | 32,095 | 18,000 | 33,595 | 18,000 | 35,095 | 18,000 | 35,095 | 75,600 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | | | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa (DIR) | Luas daerah irigasi rawa yang terairi | Ha | na | na | na | - | 8,700 | 30,000 | 11,700 | 30,000 | 17,400 | 57,000 | 23,100 | 57,000 | 23,100 | 174,000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | | | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Partisipatif (IPDMIP) | Luas daerah irigasi secara partisipatif yang terairi | Ha | na | na | 2,009 | - | 4,209 | 26,400 | 6,446 | 27,034 | 7,646 | 13,200 | 8,846 | 13,200 | 8,846 | 79,834 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | | | Program Turap/Talud dan Bronjong | Jumlah Kawasan Bebas Bencana Longsor | Kawasan | 9 | 11 | 11 | - | 13 | 9,549 | 17 | 20,000 | 22 | 24,504 | 27 | 25,000 | 27 | 79,054 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| **1** | **4** | | **Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 4,770 | 100% | 4,869 | 100% | 5,843 | 100% | 7,011 | 100% | 7,712 | 100% | 30,206 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 100% | 100% | 100% | 2,890 | 100% | 3,050 | 100% | 3,660 | 100% | 4,392 | 100% | 4,831 | 100% | 18,823 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya | % | 100% | 100% | 100% | 121 | 100% | 471 | 100% | 565 | 100% | 735 | 100% | 808 | 100% | 2,700 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | 320 | 100% | 350 | 100% | 385 | 100% | 462 | 100% | 508 | 100% | 2,025 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | na | na | na | - | 100% | 270 | 100% | 405 | 100% | 608 | 100% | 911 | 100% | 2,194 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | Program Pengembangan Perumahan | Luas Kawasan Kumuh dengan sarana dan prasarana yang baik | Ha | 517.78 | 1,047.78 | 1,147.78 | 30,150 | na | - | na | - | na | - | na | - | na | 30,150 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | Program Lingkungan Sehat Permukiman | | | | | | 34,250 | | 35,993 | | 50,363 | | 71,377 | | 74,672 | | 266,654 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | Persentase Cakupan Akses Air Minum Layak | % | 62.71% | 62.84% | 72.97% | | 75.08% | | 78.83% | | 82.77% | | 86.91% | | 86.91% | | |
| | | | | Persentase rumah tangga dengan akses Sanitasi layak | % | 78.62% | 80.32% | 81.00% | | 84.75% | | 87.63% | | 90.26% | | 92.96% | | 92.96% | | |
| | | | Program Penataan Kawasan | Jumlah Lingkungan Ruang Publik yang dilengkapi sarana dan prasarana Utilitas yang Baik | Kawasan | na | na | 1 | 1,000 | 6 | 10,300 | 7 | 15,450 | 8 | 21,630 | 9 | 22,712 | 31 | 71,092 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | Program Penataan Bangunan | Persentase Bangunan yang Tertata | % | 43.11% | 48.27% | 53.10% | 3,530 | na | - | na | - | na | - | na | - | 53.10% | 3,530 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | Program Penataan Bangunan dan Lingkungan | Persentase Bangunan Gedung dan Lingkungan Ruang Publik yang telah memenuhi NSPK | % | na | na | na | - | 58.41% | 5,833 | 64.25% | 8,166 | 70.67% | 12,249 | 77.74% | 12,862 | 77.74% | 39,110 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Pengembangan Permukiman | | | | | | - | | 46,860 | | 68,065 | | 92,837 | | 101,568 | | 309,330 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | Luas Kawasan Kumuh dengan sarana dan prasarana yang baik | Ha | 517.78 | 1,047.78 | 1,147.78 | | 1,247.78 | | 1,347.78 | | 1,447.78 | | 1,547.78 | | 1,547.78 | | |
| | | | | Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | % | 7.25% | 6.88% | 6.43% | | 5.83% | | 5.17% | | 4.43% | | 3.85% | | 3.85% | | |
| | | | | Persentase Kepala Keluarga yang memiliki Rumah | % | 83.30% | 87.30% | 88.72% | | 90.15% | | 91.58% | | 93.00% | | 94.43% | | 94.43% | | |
| | | | | Jumlah Kawasan Permukiman yang tertata Prasarana Utilitas | Kawasan | na | na | 11 | | 14 | | 17 | | 20 | | 23 | | 23 | | |
| | | | Program Pengembangan Air Minum Layak Bagi Keluarga Miskin | Persentase rumah tangga Miskin Dengan Akses Air Minum Layak | % | na | na | na | - | 2.43% | 7,350 | 4.22% | 26,208 | 6.32% | 28,828 | 6.85% | 34,594 | 6.85% | 96,980 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | Program Pengembangan Sanitasi Layak Bagi Keluarga Miskin | Persentase rumah tangga Miskin Dengan Akses Sanitasi Layak | % | na | na | na | - | 18.77% | 7,650 | 19.71% | 13,226 | 20.65% | 19,575 | 21.73% | 23,490 | 21.73% | 63,942 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | Program Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Bagi Keluarga Miskin | Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman Bagi Keluarga Miskin yang Tertata | Ha | na | na | na | - | 396.70 | 7,576 | 423.14 | 11,364 | 449.57 | 16,108 | 476.01 | 18,813 | 476.01 | 53,860 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **1** | **5** | | **Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 3,153 | 100% | 6,128 | 100% | 7,772 | 100% | 7,707 | 100% | 7,494 | 100% | 32,252 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 100% | 100% | 100% | 240 | 100% | 761 | 100% | 890 | 100% | 898 | 100% | 981 | 100% | 3,769 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya | % | 100% | 100% | 100% | 121 | 100% | 543 | 100% | 543 | 100% | 543 | 100% | 543 | 100% | 2,292 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | 85 | 100% | 121 | 100% | 177 | 100% | 210 | 100% | 210 | 100% | 802 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 852 | 100% | 989 | 100% | 1,054 | 100% | 1,267 | 100% | 4,162 | Satuan Polisi Pamong Praja |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Prov. Sumsel | % | 5% | 5% | 5% | 910 | 9% | 850 | 11% | 890 | 12% | 930 | 14% | 960 | 14% | 4,540 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Persentase Kepatuhan/ Kesadaran masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap Perda dan Perkada | % | 95% | 99% | 95% | 406 | 95% | 940 | 95% | 960 | 95% | 980 | 95% | 990 | 95% | 4,276 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Ketenteraman Serta Perlindungan Masyarakat | Persentase Satlinmas dan Pos Kamling yang Aktif | % | na | na | 65% | 140 | 75% | 630 | 85% | 750 | 95% | 850 | 99% | 950 | 99% | 3,320 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana Alam | Persentase Penurunan Daerah Rawan Kebakaran | % | na | na | 5% | 258 | 5% | 850 | 5% | 980 | 5% | 980 | 5% | 980 | 5% | 4,048 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | Program Peningkatan Peranan Pembinaan Masyarakat Di Wilayah Sumsel | Jumlah Aparatur/ masyarakat Kab/Kota yang terbina terkait Perda dan Perkada, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masarakat serta Bahaya Kebakaran | Kabupaten/ Kota | 17 | 17 | 17 | 185 | 17 | 861 | 17 | 1,061 | 17 | 1,262 | 17 | 1,262 | 17 | 4,631 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 90% | 90% | 65% | 1,690 | 75% | 1,473 | 80% | 1,657 | 85% | 1,814 | 90% | 1,940 | 95% | 8,575 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 70% | 70% | 30% | 530 | 45% | 550 | 50% | 700 | 75% | 850 | 85% | 3,800 | 85% | 6,430 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | na | na | na | - | 55% | 250 | na | - | 80% | 250 | na | - | 80% | 500 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya | % | na | na | 30% | 181 | 40% | 286 | 50% | 287 | 55% | 280 | 65% | 289 | 65% | 1,323 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | na | 90% | 30% | 100 | 35% | 295 | 45% | 310 | 50% | 315 | 60% | 320 | 60% | 1,340 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Persentase meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah prov sumsel | % | 100% | 100% | 100% | 500 | na | - | na | - | na | - | na | - | 100% | 500 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | Program Pencegahan Konflik | Persentase Kabupaten/Kota Tanpa Konflik *(Zero Conflict)* | % | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 4,775 | 100% | 4,590 | 100% | 4,835 | 100% | 5,000 | 100% | 19,200 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Persentase Masyarakat yang Mengimplementasi dan Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Pancasila | % | 85.00% | 73.50% | 74.00% | 850 | 75.00% | 3,850 | 76.50% | 3,650 | 78% | 4,100 | 78.50% | 4,550 | 78.50% | 17,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Persentase Mitra yang Mendukung Pengembangan Wawasan Kebangsaan | % | 70% | 70% | 100% | 450 | 100% | 1,100 | 100% | 1,200 | 100% | 1,300 | 100% | 1,350 | 100% | 5,400 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Program Pendidikan Politik Masyarakat | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Berpolitik | % | 70% | 70% | 75% | 600 | 77% | 1,845 | 78% | 2,155 | 79% | 2,360 | 80% | 2,575 | 80% | 9,535 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 3,562 | 100% | 3,600 | 100% | 3,750 | 100% | 4,000 | 100% | 4,250 | 100% | 19,162 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 100% | 100% | 100% | 2,518 | 100% | 4,000 | 100% | 4,000 | 100% | 4,000 | 100% | 4,000 | 100% | 18,518 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya | % | na | na | 100% | 121 | 100% | 150 | 100% | 300 | 100% | 325 | 100% | 350 | 100% | 1,246 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | na | na | na | - | 100% | 80 | 100% | 110 | 100% | 150 | 100% | 165 | 100% | 505 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | 35 | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% | 435 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana | Persentase korban bencana yang dievakuasi saat tanggap darurat | % | 100% | 100% | 100% | 2,991 | 100% | 4,000 | 100% | 4,000 | 100% | 4,000 | 100% | 4,000 | 100% | 18,991 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | Persentase Penanganan Pasca Bencana | % | 100% | 100% | 100% | 275 | 100% | 300 | 100% | 3,000 | 100% | 3,500 | 100% | 4,000 | 100% | 11,075 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana daerah rawan bencana | % | 100% | 100% | 100% | 1,236 | 100% | 3,920 | 100% | 4,890 | 100% | 5,350 | 100% | 5,835 | 100% | 21,231 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Program Peningkatan Balai Pengobatan Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan | Persentase Korban Bencana yang terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 60 | 100% | 150 | 100% | 200 | 100% | 250 | 100% | 300 | 100% | 960 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Program Pengembangan Informasi Kebencanaan | Persentase daerah rawan bencana yang mempunyai pelayanan informasi | % | na | na | 80% | - | 100% | 1,000 | 100% | 2,000 | 100% | 3,000 | 100% | 3,500 | 100% | 9,500 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| **1** | **6** | | **Sosial** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 2,867 | 100% | 3,000 | 100% | 3,200 | 100% | 3,489 | 100% | 3,700 | 100% | 16,255 | Dinas Sosial |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 100% | 100% | 100% | 546 | 100% | 350 | 100% | 475 | 100% | 932 | 100% | 180 | 100% | 2,483 | Dinas Sosial |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya kapasitas sumber daya ASN | Orang | na | na | 12 | 121 | 12 | 150 | 112 | 150 | 112 | 170 | 112 | 200 | 112 | 791 | Dinas Sosial |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | na | na | na | - | 100% | 60 | 100% | 60 | 100% | 60 | 100% | 60 | 100% | 240 | Dinas Sosial |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | na | na | na | - | 100% | 196 | 100% | 177 | 100% | 49 | 100% | 226 | 100% | 648 | Dinas Sosial |
| | | | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase Korban Bencana dan Kelompok Rentan yang meningkat kemampuan Bertahan | Orang | 600 | 600 | 500 | 75 | na | - | na | - | na | - | na | - | 500 | 75 | Dinas Sosial |
| | | | Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Perumusan Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan, serta Terkoordinasinya Program/Kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi dengan Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota | Dokumen | 2 | na | na | 189 | 2 | 275 | 2 | 275 | 2 | 300 | 2 | 300 | 2 | 1,339 | Dinas Sosial |
| | | | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Persentase Keluarga Miskin dan kelompok rentan yang meningkat produktivitas sosial ekonominya | % | 1.500 jiwa (0,073%) | 168 jiwa (0,008%) | 8.000 jiwa (0,39%) | 12,046 | na | - | na | - | na | - | na | - | na | 12,046 | Dinas Sosial |
| | | | Program Penanganan Kemiskinan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Melalui Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)/KUBE dan Rumah Tidak Layak Huni | | | | | | - | | 18,914 | | 62,564 | | 42,600 | | 75,475 | | 199,553 | Dinas Sosial |
| | | | | Persentase Keluarga Miskin dan kelompok rentan yang meningkat produktivitas sosial ekonominya | % | 1.500 jiwa (0,073%) | 168 jiwa (0,008%) | 8.000 jiwa (0,39%) | | 12.000 jiwa (0,59%) | | 28.400 jiwa (1,39%) | | 21.200 jiwa (1,04%) | | 38.400 jiwa (1,89) | | 38.400 jiwa (1,89) | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | | Persentase Keluarga Miskin dan kelompok rentan yang meningkat kualitas lingkungan rumah tinggal | % | 160 jiwa (0,008%) | 168 jiwa (0,008%) | na | | 240 jiwa (0,012%) | | 4.800 jiwa (0,23%) | | 3.200 jiwa (0,15%) | | 6.400 jiwa (0,31%) | | 6.400 jiwa (0,31%) | | |
| | | | Program Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial | | | | | | 5,353 | | 9,510 | | 17,318 | | 17,107 | | 17,313 | | 66,602 | Dinas Sosial |
| | | | | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya melalui pelayanan dan rehabilitasi dalam panti | % | 1.206 jiwa (0,20%) | 720 jiwa (0,12%) | 650 jiwa (0,093%) | | 872 jiwa (0,16%) | | 3.120 jiwa (0,59%) | | 3.410 jiwa (0,64%) | | 3.715 jiwa (0,69%) | | 3.715 jiwa (0,69%) | | |
| | | | | Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya | % | 600 jiwa (100%) | 600 jiwa (100%) | 500 jiwa (100%) | | 2.051 jiwa | | 2.066 jiwa | | 2.370 jiwa | | 2.520 jiwa | | 2.520 jiwa | | |
| | | | Program Pendataan, Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN/KIS dan PMKS Lainnya | Tersedianya Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN/KIS dan PMKS Lainnya yang Valid dan Akuntabel Kabupaten/Kota | Kabupaten/ Kota | na | na | 17 | 1,981 | 17 | 2,000 | 17 | 2,000 | 17 | 2,000 | 17 | 2,300 | 17 | 10,281 | Dinas Sosial |
| | | | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | | | | | | - | | 989 | | 1,698 | | 1,739 | | 2,084 | | 6,509 | Dinas Sosial |
| | | | | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | % | 228 orang (14,99%) | na | na | | 236 orang (15,18%) | | 236 orang (15,18%) | | 236 orang (15,18%) | | 236 orang (15,18%) | | 236 orang (15,18%) | | |
| | | | | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | % | 51 lembaga (1,38%) | na | 60 lembaga (1,62%) | | 60 lembaga (1,62%) | | 60 lembaga (1,62%) | | 60 lembaga (1,62%) | | 60 lembaga (1,62%) | | 60 lembaga (1,62%) | | |
| | | | **Layanan Urusan Wajib Non Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **7** | | **Tenaga Kerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 2,637 | 100% | 4,437 | 100% | 4,450 | 100% | 4,796 | 100% | 4,996 | 100% | 21,315 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 100% | 100% | 100% | 335 | 100% | 11,719 | 100% | 11,000 | 100% | 11,500 | 100% | 11,719 | 100% | 46,273 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya | % | na | na | 100% | 151 | 100% | 397 | 100% | 450 | 100% | 470 | 100% | 586 | 100% | 2,054 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | 185 | 100% | 505 | 100% | 510 | 100% | 535 | 100% | 560 | 100% | 2,295 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 379 | 100% | 400 | 100% | 462 | 100% | 513 | 100% | 1,754 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja yang dilatih dan ditempatkan | % | 40% | 45% | 50% | 91 | 60% | 2,705 | 65% | 2,712 | 70% | 2,300 | 75% | 2,630 | 75% | 10,438 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Persentase tenaga kerja yang diserap | % | 30% | 35% | 50% | 230 | 55% | 4,781 | 60% | 4,790 | 65% | 4,900 | 70% | 5,200 | 70% | 19,901 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Persentase buruh yang terlindungi | % | 35.87% | na | 39.25% | 380 | 42.22% | 4,080 | 47.35% | 4,120 | 50.52% | 4,300 | 55.35% | 4,875 | 55.35% | 17,755 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | Program Peningkatan Kesempatan Kerja Untuk Warga Miskin | Persentase laju penduduk miskin yang bekerja | % | na | na | 50% | - | 60% | 4,450 | 65% | 5,000 | 70% | 5,800 | 75% | 6,450 | 75% | 21,700 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| **1** | **8** | | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 1,367 | 100% | 1,700 | 100% | 1,800 | 100% | 1,800 | 100% | 1,900 | 100% | 8,567 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Kualitas Pelayanan Aparatur | % | 100% | 100% | 100% | 114 | 100% | 625 | 100% | 500 | 100% | 500 | 100% | 400 | 100% | 2,140 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya | % | 100% | 100% | 100% | 121 | 100% | 70 | 100% | 150 | 100% | 150 | 100% | 150 | 100% | 641 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | 80 | 100% | 129 | 100% | 150 | 100% | 150 | 100% | 200 | 100% | 709 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 176 | 100% | 100 | 100% | 250 | 100% | 100 | 100% | 626 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak | Persentase keterisian data terpilah dalam Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) | % | na | 29.58% | 32.54% | 35 | 36.98% | 500 | 41.42% | 550 | 53.25% | 650 | 60.65% | 700 | 60.65% | 2,435 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Program Peningkatan Perlindungan Perempuan | Persentase peningkatan perlindungan perempuan | % | 34.26% | 37.96% | 39.00% | 32 | 40.00% | 775 | 41.00% | 850 | 42.00% | 900 | 43.00% | 1,000 | 43.00% | 3,557 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak | Persentase peningkatan perlindungan khusus anak | % | 0.13% | 8.31% | 10.00% | 110 | 12.00% | 1,175 | 14.00% | 1,200 | 16.00% | 1,000 | 18.00% | 1,000 | 18.00% | 4,485 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Program peningkatan Kualitas Hidup Perempuan | Persentase kabupaten/kota yang mendapat Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) | % | na | 5.88% | 5.88% | 1,270 | 23.53% | 1,800 | 23.53% | 1,900 | 47.06% | 2,000 | 47.06% | 2,250 | 47.06% | 9,220 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak | Persentase kabupaten/kota yang melakukan upaya peningkatan pemenuhan hak anak | % | 64.71% | 58.82% | 70.59% | 170 | 76.47% | 1,000 | 82.35% | 1,100 | 82.35% | 1,200 | 100% | 1,300 | 100% | 4,770 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO yang ditangani | % | 100% | 100% | 100% | 75 | 100% | 200 | 100% | 300 | 100% | 400 | 100% | 400 | 100% | 1,375 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Program Pemberdayaan Perempuan untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin | Persentase perempuan keluarga miskin yang mengalami peningkatan ekonomi | % | na | 40% | na | - | na | 450 | 25% | 500 | 20% | 500 | 16.67% | 600 | 16.67% | 2,050 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Penguatan Kualitas Keluarga | Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan peningkatan ketahanan keluarga | % | na | na | 5.88% | - | 11.76% | 400 | 17.64% | 400 | 29.41% | 500 | 41.18% | 500 | 41.18% | 1,800 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **1** | **9** | | **Pangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 3,292 | 100% | 3,500 | 100% | 4,000 | 100% | 4,500 | 100% | 5,000 | 100% | 20,292 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 100% | 100% | 100% | 2,645 | 100% | 1,684 | 100% | 2,880 | 100% | 3,026 | 100% | 3,630 | 100% | 13,865 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah aparatur yang mengikuti branchmarking dan capacity building | orang | na | na | 12 | 121 | 12 | 134 | 12 | 200 | 12 | 250 | 12 | 291 | 12 | 996 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% | 200 | 100% | 200 | 100% | 300 | 100% | 900 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | na | na | na | - | 100% | 316 | 100% | 320 | 100% | 360 | 100% | 370 | 100% | 1,366 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | Program Peningkatan Sistem Distribusi dan Harga Pangan | Cadangan Pangan Daerah (Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat (beras)) | Ton | 498 | 539 | 818 | 600 | 827 | 800 | 835 | 1,075 | 843 | 1,250 | 852 | 1,800 | 852 | 5,525 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | | Koefisien Varian (CV) Harga Pangan Strategis | % | ≤ 15% | ≤ 15% | ≤ 15% | 100 | ≤ 15% | 400 | ≤ 15% | 450 | ≤ 15% | 500 | ≤ 15% | 600 | ≤ 15% | 2,050 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan | | | | | | 1,500 | | - | | - | | - | | - | | 1,500 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | | Ketersediaan Energi untuk konsumsi | Kkal/ kap/ hr | 2075 | 2124 | 2400 | | na | | na | | na | | na | | 2400 | | |
| | | | | Ketersediaan Protein untuk di konsumsi | Gram/ kap/hr | 61 | 62 | 63 | | na | | na | | na | | na | | 63 | | |
| | | | | Jumlah Pemberdayaan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Petani Pangan | Orang | na | na | 4,000 | | na | | na | | na | | na | | 4,000 | | |
| | | | | Jumlah KK yang dibantu yang dibantu (Rawan Pangan) | Kepala Keluarga | na | 450 | 100 | | na | | na | | na | | na | | 100 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar | | | | | | 1,150 | | 3,050 | | 4,350 | | 4,950 | | 5,800 | | 19,300 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | Pola Pangan Harapan | Skor | 92.2 | 93.4 | 94.5 | | 95.6 | | 96.7 | | 97.8 | | 98.9 | | 98.9 | | |
| | | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Beredar Aman dan Bermutu | % | 100% | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Bersertifikat | Sertifikat/ Registrasi | 77 | 153 | 178 | | 203 | | 228 | | 263 | | 288 | | 288 | | |
| | | Jumlah KK yang dibantu yang dibantu (Rawan Pangan) | Kepala Keluarga | na | 450 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pencegahan Penangulangan Penyakit Ternak | | | | | | 500 | | 1,920 | | 2,190 | | 2,400 | | 3,250 | | 10,260 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Ternak | % | 2.4% | 2.5% | 2.8% | | 5.0% | | 5.0% | | 5.0% | | 5.0% | | 5.0% | | |
| | | Jumlah Peternakan yang Ikut Asuransi Ternak Sapi | Ekor | na | 4,000 | 5,000 | | 6,000 | | 7,000 | | 8,000 | | 10,000 | | 36,000 | | |
| | Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Ketahanan Pangan | Dokumen | 4 | 3 | 3 | 302 | 3 | 350 | 3 | 400 | 3 | 450 | 4 | 600 | 4 | 2,102 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | | | | | | 2,050 | | 3,150 | | 4,000 | | 3,500 | | 4,500 | | 17,200 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | Produksi Daging | Ton | 76,519 | 82,315 | 86,431 | | 90,752 | | 95,290 | | 100,054 | | 105,057 | | 105,057 | | |
| | | Produksi Telur | Ton | 71,304 | 90,316 | 94,832 | | 99,573 | | 104,552 | | 109,780 | | 115,269 | | 115,269 | | |
| | | Produksi Susu | Liter | 118,931 | 127,208 | 133,569 | | 140,247 | | 147,259 | | 154,622 | | 162,354 | | 162,354 | | |
| | | Jumlah KK Miskin yang dibantu | Kepala Keluarga | na | 159 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | | | | | | 250 | | - | | - | | - | | - | | 250 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | Jumlah Promosi Hasil Peternakan | kali | 2 | 2 | 2 | | na | | na | | na | | na | | 2 | | |
| | | Jumlah Peternakan yang Ikut Asuransi Ternak Sapi | Ekor | 0 | 4,000 | 5,000 | | na | | na | | na | | na | | 5,000 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Pengembangan Informasi dan Statistik Peternakan | Jumlah Dokumen Data Statistik Peternakan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 150 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 250 | 1 | 900 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan | Jumlah Sentra Peternakan Rakyat yang menggunakan Teknologi Peternakan | Kabupaten | 6 | 6 | 6 | 50 | 8 | 1,500 | 8 | 2,000 | 8 | 2,000 | 8 | 2,000 | 8 | 7,550 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | Program Peningkatan Ketersedian Pangan | | | | | | - | | 150 | | 200 | | 300 | | 400 | | 1,050 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | | Ketersediaan Energi Untuk di Konsumsi | Kkal/kap/hr | 2,075 | 2,124 | 2,400 | | 2,400 | | 2,400 | | 2,400 | | 2,400 | | 2,400 | | |
| | | | | Ketersediaan Protein untuk di Konsumsi | Gram/kap/hr | 61 | 62 | 63 | | 63 | | 63 | | 63 | | 63 | | 63 | | |
| | | | Program Peningkatan Sumber Daya Pangan | Jumlah Pemberdayaan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Petani Pangan | Orang | na | na | 4,000 | - | 1,000 | 2,500 | 4,000 | 1,500 | 4,000 | 1,500 | 4,000 | 1,500 | 4,000 | 7,000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | Program Pengembangan Informasi dan Statistik Ketahanan Pangan | Jumlah Dokumen Data Statistik Ketahanan Pangan | Dokumen | na | na | na | - | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 700 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pangan | | | | | | - | | 2,500 | | 6,000 | | 3,000 | | 4,000 | | 15,500 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | | Jumlah penyediaan sarana dan perbaikan prasarana UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan | Paket | na | na | na | | 2 | | 3 | | 2 | | 2 | | 9 | | |
| | | | | | Unit | na | na | na | | 4 | | 5 | | 3 | | 4 | | 16 | | |
| | | | Program Peningkatan Promosi Hasil Produksi Peternakan | Jumlah Promosi Hasil Peternakan | Kali | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 300 | 3 | 400 | 4 | 500 | 5 | 750 | 5 | 1,950 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | Program Perencanaan dan Monev Peternakan | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Peternakan | Dokumen | na | na | na | - | 3 | 250 | 2 | 250 | 2 | 300 | 2 | 400 | 2 | 1,200 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan | | | | | | - | | 1,500 | | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | | 10,500 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | | Jumlah penyediaan sarana dan perbaikan prasarana UPT Balai Pembibitan dan HPT Sembawa | Paket | na | na | 3 | | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | | 14 | | |
| | | | | | Unit | na | na | 5 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | 14 | | |
| | | | Program Penanganan Daerah Rawan Pangan Melalui Pendekatan Keluarga Miskin | Jumlah KK yang dibantu yang dibantu (Rawan Pangan) | Kepala Keluarga | na | 450 | 100 | - | 1,200 | 1,950 | 1,350 | 3,000 | 1,450 | 3,500 | 1,500 | 4,000 | 5,600 | 12,450 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Bidang Peternakan | Jumlah KK Miskin yang dibantu | Kepala Keluarga | na | 159 | 100 | - | 500 | 1,500 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 4,500 | 1,500 | 5,000 | 4,100 | 15,000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |

| Kode | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| **1** | **10** | **Pertanahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | Penyelesaian Konflik Lahan yang terselesaikan | % | 9.76% | 10.00% | 11.00% | 250 | 11.66% | 15,211 | 12.00% | 14,409 | 12.45% | 17,452 | 13.00% | 15,310 | 13.00% | 62,632 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |
| **1** | **11** | **Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 1,628 | 100% | 1,993 | 100% | 1,993 | 100% | 2,037 | 100% | 2,237 | 100% | 9,888 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 100% | 100% | 100% | 567 | 100% | 1,790 | 100% | 1,335 | 100% | 950 | 100% | 1,433 | 100% | 6,075 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya | % | na | na | 100% | 152 | 100% | 245 | 100% | 245 | 100% | 248 | 100% | 348 | 100% | 1,238 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |
| | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | ns | na | na | - | 100% | 435 | 100% | 448 | 100% | 351 | 100% | 400 | 100% | 1,635 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |
| | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | na | na | na | - | 100% | 202 | 100% | 36 | 100% | 47 | 100% | 342 | 100% | 626 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |
| | | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | | | | | | 205 | | 3,550 | | 3,975 | | 2,865 | | 3,115 | | 13,710 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |
| | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 62.04 | 67.29 | 67.35 | | 67.40 | | 67.43 | | 67.47 | | 67.85 | | 67.85 | | |
| | | | Indeks Kualitas Air | Indeks | 62.64 | 62.64 | 62.74 | | 62.82 | | 62.89 | | 62.93 | | 64.04 | | 64.04 | | |
| | | | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 96.11 | 96.11 | 96.19 | | 96.23 | | 96.25 | | 96.32 | | 96.45 | | 96.45 | | |
| | | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Indeks | 36.030 | 49.173 | 49.189 | | 49.206 | | 49.224 | | 49.243 | | 49.263 | | 49.263 | | |
| | | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Meningkatnya kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (KPLHD) | Indeks | 6 | 3 | 3 | 825 | 3 | 3,600 | 3 | 2,350 | 3 | 2,070 | 1 | 2,030 | 1 | 10,875 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |
| | | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | Jumlah Penurunan Laju Peningkatan Emisi GRK di 6 Sektor | Ton CO2 eq/tahun | 4,552,377 | 4,553,329 | 4,554,931 | 65 | na | - | na | - | na | - | na | - | na | 65 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |
| | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Persentase Peningkatan pengawasan Internal | % | 100% | 100% | 100% | 625 | 100% | 1,000 | 100% | 1,250 | 100% | 250 | 100% | 1,000 | 100% | 4,125 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan | % | 33.33% | 33.33% | 34.00% | - | 34.50% | 500 | 35.00% | 700 | 35.60% | 800 | 36.00% | 1,000 | 36.00% | 3,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan BLUD Laboratorium Lingkungan | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan | % | 60% | 80% | 90% | 12,000 | 95% | 17,000 | 97% | 14,520 | 99% | 15,972 | 100% | 17,569 | 100% | 77,061 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |
| | | | Program Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim | | | | | | - | | 5,060 | | 11,530 | | 11,580 | | 11,830 | | 40,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |
| | | | | Persentase Penurunan Emisi GRK | % | 3.71% | 4.33% | 4.95% | | 5.56% | | 6.18% | | 6.80% | | 7.42% | | 7.42% | | |
| | | | | Jumlah Penurunan Emisi GRK | Ton CO2 eq/tahun | 4,552,377 | 4,553,329 | 4,554,931 | | 4,557,072 | | 4,559,977 | | 4,563,570 | | 4,566,890 | | 4,566,890 | | |
| | | | | Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Sektor Lahan dan gambut | Ton CO2 eq/tahun | 4,367,638 | 4,363,444 | 4,360,108 | | 4,357,545 | | 4,355,678 | | 4,354,439 | | 4,353,765 | | 4,353,765 | | |
| | | | | 2. Sektor Pertanian dan Peternakan | Ton CO2 eq/tahun | 52,094 | 53,554 | 55,013 | | 56,472 | | 57,932 | | 59,391 | | 60,851 | | 60,851 | | |
| | | | | 3. Sektor Energi dan transportasi | Ton CO2 eq/tahun | 52,219 | 54,750 | 57,135 | | 59,337 | | 61,653 | | 64,075 | | 66,609 | | 66,609 | | |
| | | | | 4. Sektor Limbah | Ton CO2 eq/tahun | 80,426 | 81,581 | 82,675 | | 83,718 | | 84,714 | | 85,665 | | 85,665 | | 85,665 | | |
| | | | Program Pengembangan Kinerja Pengelolahan Persampahan | Persentase pengurangan timbulan sampah rumah tangga | % | na | 18% | 20% | - | 22% | 600 | 24% | 620 | 26% | 400 | 27% | 930 | 27% | 2,550 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |
| **1** | **12** | | **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 1,355 | 100% | 1,368 | 100% | 1,382 | 100% | 1,396 | 100% | 1,410 | 100% | 6,910 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 100% | 100% | 100% | 664 | 100% | 671 | 100% | 677 | 100% | 684 | 100% | 691 | 100% | 3,388 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Prosentase Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur | % | na | na | 100% | 326 | 100% | 329 | 100% | 332 | 100% | 336 | 100% | 339 | 100% | 1,662 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | 29 | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% | 149 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | na | na | na | - | 100% | 150 | 100% | 150 | 100% | 150 | 100% | 150 | 100% | 600 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | | | Program Penaatan Administrasi Kependudukan | Prosentase Penataan Administrasi Kependudukan | % | na | na | 100% | 2,677 | 100% | 2,554 | 100% | 2,581 | 100% | 2,608 | 100% | 2,636 | 100% | 13,057 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| **1** | **13** | | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **14** | | **Pemberdayaan Masyarakat Desa** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 3,026 | 100% | 3,224 | 100% | 3,325 | 100% | 3,430 | 100% | 3,571 | 100% | 16,576 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 100% | 100% | 100% | 502 | 100% | 552 | 100% | 607 | 100% | 639 | 100% | 703 | 100% | 3,003 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya | % | na | na | 100% | 171 | 100% | 43 | 100% | 47 | 100% | 52 | 100% | 57 | 100% | 370 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | na | na | 100% | 0 | 100% | 62 | 100% | 68 | 100% | 77 | 100% | 62 | 100% | 269 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | na | na | 100% | 0 | 100% | 55 | 100% | 61 | 100% | 113 | 100% | 73 | 100% | 302 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan | Persentase masyarakat yang terlibat dalam organisasi dan lembaga masyarakat | % | 90% | 90% | 95% | 1,690 | na | - | na | - | na | - | na | - | 95% | 1,690 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| | | | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/ Kelurahan | Persentase masyarakat yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa | % | 90% | 90% | 95% | 2,659 | 95% | 850 | 95% | 935 | 95% | 980 | 95% | 1,024 | 95% | 6,448 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| | | | Program Peningkatan Kelembagaan masyarakat dan Pemerintahan desa | Persentase lembaga masyarakat yang diberdayakan | % | 90% | 90% | 95% | - | 95% | 7,955 | 95% | 8,713 | 95% | 9,543 | 95% | 10,497 | 95% | 36,707 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | Persentase Kader PKK Aktif | % | 0.15% | 0.15% | na | - | 0.25% | 1,709 | 0.30% | 1,880 | 0.35% | 2,068 | 0.40% | 2,275 | 0.40% | 7,931 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| | | | Program Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan Kemiskinan di desa tertinggal dan sangat tertinggal | | | | | | - | | 1,800 | | 1,847 | | 1,893 | | 1,929 | | 7,469 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| | | | | Jumlah desa tertinggal di Sumatera Selatan yang diberdayakan | Desa | 1,644 | 1,644 | na | | 1,634 | | 1,622 | | 1,607 | | 1,592 | | 1,592 | | |
| | | | | Jumlah desa sangat tertinggal di Sumatera Selatan yang diberdayakan | Desa | 176 | 176 | na | | 167 | | 155 | | 140 | | 125 | | 125 | | |
| **1** | **15** | | **Perhubungan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 80% | 85% | 88% | 12,985 | 90% | 18,913 | 93% | 25,000 | 95% | 28,000 | 96% | 28,000 | 96% | 112,898 | Dinas Perhubungan |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 78% | 80% | 85% | 590 | 87% | 11,119 | 89% | 15,000 | 92% | 20,542 | 94% | 20,500 | 94% | 67,751 | Dinas Perhubungan |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya | % | 100% | 100% | 100% | 221 | 100% | 1,300 | 100% | 2,500 | 100% | 3,000 | 100% | 3,500 | 100% | 10,521 | Dinas Perhubungan |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | 45 | 100% | 525 | 100% | 800 | 100% | 800 | 100% | 800 | 100% | 2,970 | Dinas Perhubungan |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 475 | 100% | - | 100% | 958 | 100% | - | 100% | 1,433 | Dinas Perhubungan |
| | | | Program Pengembangan LLAJ | Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas jalan | % | 14% | 12% | 10% | 775 | 8% | 21,620 | 7% | 49,345 | 4% | 48,000 | 0% | 50,000 | 0% | 169,740 | Dinas Perhubungan |
| | | | Program Pengembangan LLALSDP | Jumlah trip pelayanan ALSDP | Trip | 3,048 | 3,568 | 3,672 | 300 | 3,702 | 40,555 | 3,778 | 87,598 | 3,815 | 94,000 | 3,856 | 95,000 | 3,856 | 317,453 | Dinas Perhubungan |
| | | | Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Kereta Api | Jumlah Penumpang Kereta Api per Tahun meningkat | Orang | 1,928,654 | 2,025,087 | 2,126,341 | 75 | 2,232,658 | 2,300 | 2,344,291 | 2,980 | 2,461,506 | 5,500 | 2,584,581 | 6,500 | 2,713,810 | 17,355 | Dinas Perhubungan |
| | | | Program Penyediaan Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan | Jumlah dokumen perencanaan | Dokumen | 6 | 8 | 2 | 60 | 12 | 1,900 | 16 | 2,800 | 20 | 16,000 | 22 | 16,000 | 22 | 36,760 | Dinas Perhubungan |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| 1 | 16 | | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 90% | 90% | 90% | 3,241 | 95% | 3,241 | 96% | 3,300 | 98% | 3,550 | 100% | 3,600 | 100% | 16,932 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 85% | 85% | 85% | 480 | 90% | 480 | 95% | 550 | 98% | 560 | 100% | 580 | 100% | 2,650 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya | % | 95% | 95% | 95% | 221 | 96% | 221 | 97% | 240 | 98% | 250 | 100% | 260 | 100% | 1,192 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | na | na | na | - | 100% | 80 | na | - | 100% | 125 | na | - | 100% | 205 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 80% | 80% | 80% | 220 | 82% | 220 | 85% | 242 | 90% | 240 | 95% | 250 | 95% | 1,172 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Program Pengembangan Komunikasi Publik | Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Informasi dan Komunikasi Masyarakat/Publik | Kabupaten/ Kota | na | 1 | 2 | 2,053 | 4 | 3,673 | 4 | 5,000 | 5 | 5,475 | 2 | 6,000 | 17 | 22,201 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi | Persentase Akses Internet | % | 90% | 90% | 90% | 11,050 | 90% | 11,030 | 90% | 11,050 | 90% | 11,025 | 90% | 11,050 | 90% | 55,205 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Program Pengelolaan Informasi Publik dan Media Massa | | | | | | 7,200 | | 4,070 | | 3,868 | | 4,600 | | 5,560 | | 25,298 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | Persentase Informasi Diterima | % | 100% | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | | | Persentase Aduan Ditindaklanjuti | % | 22.13% | 23.31% | na | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | | Program Pelayanan E-Government | Persentase Layanan Penggunaan E-Government | % | na | na | 100% | 1,069 | 100% | 1,285 | 100% | 1,750 | 100% | 2,175 | 100% | 2,700 | 100% | 8,979 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 1 | 17 | | **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkatoran | % | 100% | 100% | 100% | 1,162 | 100% | 1,500 | 100% | 1,700 | 100% | 1,700 | 100% | 1,700 | 100% | 7,762 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase tersedianya sarana dan prasarana | % | 100% | 100% | 100% | 60 | 100% | 3,000 | 100% | 2,500 | 100% | 2,500 | 100% | 2,500 | 100% | 10,560 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya | % | 100% | 100% | 100% | 121 | 100% | 315 | 100% | 340 | 100% | 440 | 100% | 540 | 100% | 1,756 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 300 | 100% | 300 | 100% | 300 | 100% | 300 | 100% | 1,200 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 85 | 100% | 60 | 100% | 60 | 100% | 60 | 100% | 265 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Jumlah UMKM naik kelas | UMK | 4,156 | 1,124 | 500 | 3,442 | 500 | 3,500 | 500 | 3,500 | 500 | 3,500 | 500 | 3,500 | 7,780 | 17,442 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Jumlah Koperasi Aktif | Koperasi | 4,699 | 55 | 100 | 50 | 100 | 1,200 | 100 | 1,200 | 100 | 1,200 | 100 | 1,200 | 5,254 | 4,850 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | Program Perkuatan Permodalan UMKMK | Prosentase Pertumbuhan Modal Koperasi | % | 99.27% | 6.27% | 2% | 50 | 2% | 500 | 2% | 500 | 2% | 500 | 2% | 500 | 115.54% | 2,050 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | Program Peningkatan Pemasaran Hasil UMKMK | Prosentase Kenaikan omset UMKM | % | 4.48% | 17.43% | 1% | 50 | 10% | 1,000 | 10% | 1,000 | 10% | 1,000 | 10% | 1,000 | 62.91% | 4,050 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | Program Penguatan Pengawasan Koperasi | Jumlah Koperasi sehat | Koperasi | na | na | 20 | 50 | 200 | 1,200 | 200 | 1,200 | 200 | 1,200 | 200 | 1,200 | 820 | 4,850 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | Program Pengembangan Kewirausahaan Bagi Warga Miskin | Jumlah Kenaikan Wirausaha Baru | UKM | 320 | 240 | 240 | 600 | 350 | 1,700 | 350 | 1,700 | 350 | 1,700 | 350 | 1,700 | 2,200 | 7,400 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | Program Pengembangan Kewirausahaan | Jumlah Kenaikan Wirausaha Baru | UKM | 938 | 223 | na | - | 350 | 500 | 350 | 500 | 350 | 500 | 350 | 500 | 2,561 | 2,000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | Program Peningkatan Kegiatan Usaha UMKMK | Prosentase Kenaikan Volume Usaha Koperasi | % | 14.96% | 4.6% | 2% | - | 2% | 500 | 2% | 500 | 2% | 500 | 2% | 500 | 29.56% | 2,000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | Program Pengembangan Kemitraan | Jumlah perusahaan yang bermitra | MOU | na | na | na | - | 3 | 500 | 4 | 600 | 4 | 600 | 4 | 600 | 15 | 2,300 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| **1** | **18** | | **Penanaman Modal** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 86.23% | 89.36% | 100% | 1,764 | 100% | 2,222 | 100% | 2,387 | 100% | 2,800 | 100% | 2,752 | 100% | 11,925 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 97.26% | 100% | 100% | 824 | 100% | 11,771 | 100% | 2,040 | 100% | 358 | 100% | 502 | 100% | 15,495 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | na | na | 100% | - | 100% | 272 | 100% | - | 100% | 260 | 100% | - | 100% | 532 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur Yang Meningkat Kapasitasnya | % | na | na | 100% | 121 | 100% | 40 | 100% | 161 | 100% | 40 | 100% | 161 | 100% | 523 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | na | 95% | 100% | 12 | 100% | 23 | 100% | 23 | 100% | 24 | 100% | 24 | 100% | 106 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| | | | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN | Rp. Trilyun | 25.79 | 23.08 | 24.70 | 210 | na | - | na | - | na | - | na | - | 24.70 | 210 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| | | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi | % | 10% | 10% | 7% | 220 | na | - | na | - | na | - | na | - | 7% | 220 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| | | | Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan Realisasi Investasi | Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN | Rp. Trilyun | 25.79 | 23.08 | 24.70 | - | 26.43 | 4,186 | 28.27 | 5,330 | 30.26 | 6,580 | 32.37 | 6,280 | 32.37 | 22,376 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| | | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Penanaman Modal | Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi | % | 10% | 10% | 7% | - | 7% | 839 | 7% | 930 | 7% | 1,285 | 7% | 1,518 | 7% | 4,572 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di selesaikan tepat waktu sesuai SOP | Izin dan Non Izin | 901 | 904 | 940 | - | 974 | 1,968 | 1,006 | 2,575 | 1,036 | 2,800 | 1,064 | 2,775 | 5,020 | 10,118 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| **1** | **19** | | **Kepemudaan dan Olahraga** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 2,197 | 100% | 3,435 | 100% | 3,655 | 100% | 3,845 | 100% | 4,065 | 100% | 17,197 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik | % | 100% | 100% | 100% | 138 | 100% | 1,000 | 100% | 1,300 | 100% | 1,900 | 100% | 1,900 | 100% | 6,238 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | na | na | na | - | 100% | 200 | na | - | 100% | 200 | na | - | 100% | 400 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS | Persentase pegawai yang diberikan penghargaan purna bhakti | % | na | na | na | - | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 80 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya | % | 100% | 100% | 100% | 131 | 100% | 300 | 100% | 300 | 100% | 300 | 100% | 300 | 100% | 1,331 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | 340 | 100% | 1,100 | 100% | 900 | 100% | 1,000 | 100% | 1,100 | 100% | 4,440 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan | Orang | 519 | 422 | 673 | 1,710 | 1,940 | 4,260 | 4,077 | 9,420 | 2,811 | 6,800 | 3,511 | 7,215 | 13,012 | 29,405 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | Jumlah pemuda yang meningkat potensinya dalam berwirausaha | Orang | na | 20 | 25 | 110 | na | - | na | - | na | - | na | - | na | 110 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Peningkatan Imtaq dan Iptek Kepemudaaan serta Penanggulangan HIV-AIDS | Jumlah Duta Pemuda Anti Narkoba | Orang | 460 | 100 | 100 | 70 | 450 | 300 | 1,150 | 950 | 1,150 | 1,000 | 1,150 | 1,000 | 4,000 | 3,320 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia | Paket | na | 3 | 18 | 485 | 393 | 3,050 | 377 | 3,480 | 381 | 4,010 | 377 | 4,340 | 1,546 | 15,365 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Pengelolaan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan | Jumlah tenaga keolahragaan di Sumatera Selatan | Orang | 50 | 550 | 90 | 280 | 190 | 700 | 140 | 750 | 140 | 840 | 140 | 900 | 700 | 3,470 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Pemassalan Olahraga | Angka Partisipasi Masyarakat dalam melakukan aktifitas olahraga | Orang | 3,259 | na | 1,000 | 90 | 1,100 | 300 | 1,100 | 300 | 1,100 | 300 | 1,100 | 300 | 5,400 | 1,290 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Pembinaan dan Pengelolaan Olahraga Pendidikan | Jumlah medali Sumatera Selatan | Medali | 39 Medali Emas | 22 Medali Emas | 30 | 500 | 33 | 3,600 | 35 | 11,060 | 37 | 4,600 | 40 | 4,900 | 175 | 24,660 | Dinas Pemuda dan Olahraga |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | | Jumlah atlet potensial Sumatera Selatan | Orang | na | na | 200 | | 420 | | 470 | | 420 | | 370 | | 1,910 | | |
| | | | Program Pengelolaan Kejuaraan Olahraga dan Olahraga Prestasi | | | | | | 100 | | 35,760 | | 33,550 | | 42,400 | | 41,785 | | 153,595 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | Peringkat Provinsi Sumatera Selatan pada PON dan | Peringkat | 21 | na | na | | 10 | | | | | | | | 10 | | |
| | | | | Jumlah Kompetisi Olahraga yang diselenggarakan | Kompetisi | na | na | 300 | | 1,289 | | 1,299 | | 1,360 | | 1,293 | | 5,541 | | |
| | | | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda di Kantong Kemiskinan | Jumlah Wirausaha Muda Baru di Kantong Kemiskinan | Orang | na | 40 | 25 | - | 150 | 1,000 | 250 | 1,000 | 250 | 1,000 | 250 | 1,200 | 925 | 4,200 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Pembinaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda | Jumlah Kabupaten/Kota Layak Pemuda Tingkat Nasional | Kabupaten/ Kota | na | na | na | - | 1 | 300 | 2 | 200 | 3 | 200 | 4 | 200 | 10 | 900 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan | Sarpras | na | na | na | - | 2 | 100 | 2 | 150 | 3 | 200 | 3 | 200 | 10 | 650 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Kepramukaan | Angka Partisipasi Masyarakat dalam melakukan aktifitas Kepramukaan | Orang | na | na | na | - | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 1,200 | 1,600 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| **1** | **20** | | **Statistik** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pengembangan Statistik | Persentase Data Sektoral yang Tersedia | % | na | na | 100% | 750 | na | - | na | - | na | - | na | - | 100% | 750 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Program Pengembangan Statistik Sektoral | Persentase Data Sektoral yang Tersedia | % | na | na | 100% | - | 100% | 2,500 | 100% | 3,000 | 100% | 3,500 | 100% | 4,000 | 100% | 13,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **21** | | **Persandian** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pengembangan Persandian, Siber dan Keamanan Informasi | Persentase penyelenggaraan pengamanan informasi (Keamanan Informasi) | % | 100% | 100% | 100% | 200 | na | - | na | - | na | - | na | - | 100% | 200 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Program Pengembangan Persandian | Persentase penyelenggaraan pengamanan informasi (Keamanan Informasi) | % | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 300 | 100% | 400 | 100% | 500 | 100% | 600 | 100% | 1,800 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **22** | | **Kebudayaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Angka komulatif jumlah WBTB yang terlindungi, termanfaatkan dan dikembangkan | WBTB | 17 | 24 | 74 | 4,502 | 124 | 5,402 | 174 | 6,483 | 224 | 7,779 | 274 | 9,335 | 274 | 33,502 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Angka komulatif jumlah cagar budaya yang terlindungi, termanfaatkan dan dikembangkan | Cagar Budaya | 250 | 350 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 720 | 750 | 864 | 850 | 1,037 | 850 | 3,721 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | | Program Pengembangan Nilai Budaya | Angka komulatif jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terlindungi, termanfaatkan dan dikembangkan | Objek Pemajuan Kebudayaan | 350 | 400 | 450 | 375 | 500 | 450 | 550 | 540 | 600 | 648 | 650 | 778 | 650 | 2,791 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | | Program Permuseuman dan Nilai-Nilai Budaya Sumsel | Jumlah kunjungan museum | Orang | 40,350 | 41,350 | 49,620 | 5,925 | 49,720 | 7,110 | 71,452 | 8,532 | 85,743 | 10,238 | 102,892 | 12,286 | 102,892 | 44,091 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **23** | | **Perpustakaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 1,137 | 100% | 1,250 | 100% | 1,280 | 100% | 1,340 | 100% | 1,450 | 100% | 6,457 | Dinas Perpustakaan |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana prasarana Aparatur yang berfungsi baik | % | 45% | 47% | 48% | 330 | 55% | 864 | 60% | 2,625 | 70% | 1,610 | 75% | 650 | 75% | 6,079 | Dinas Perpustakaan |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya | % | 25% | 27% | 38% | 256 | 45% | 325 | 48% | 345 | 55% | 350 | 60% | 350 | 60% | 1,626 | Dinas Perpustakaan |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | 35 | 100% | 45 | 100% | 60 | 100% | 60 | 100% | 60 | 100% | 260 | Dinas Perpustakaan |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | na | na | na | - | 100% | 85 | 100% | 85 | na | - | na | - | 100% | 170 | Dinas Perpustakaan |
| | | | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Persentase peningkatan minat dan budaya baca masyarakat | % | 33.33% | 48.60% | 52.10% | 691 | 55.25% | 1,128 | 58.32% | 1,224 | 60.50% | 1,325 | 62.10% | 1,367 | 62.10% | 5,735 | Dinas Perpustakaan |
| | | | Program Pengembangan Perpustakaan di Desa Kantong Kemiskinan | Persentase pengembangan perpustakaan desa di kantong kemiskinan | % | 14.25% | 14.52% | na | - | 14.89% | 665 | 15.14% | 965 | 15.39% | 1,050 | 15.79% | 1,050 | 15.79% | 3,730 | Dinas Perpustakaan |
| **1** | **24** | | **Kearsipan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 2,214 | 100% | 2,829 | 100% | 3,100 | 100% | 3,500 | 100% | 4,200 | 100% | 15,843 | Dinas Kearsipan |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 100% | 100% | 100% | 1,370 | 100% | 12,750 | 100% | 1,710 | 100% | 1,850 | 100% | 2,000 | 100% | 19,680 | Dinas Kearsipan |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | 100% | 100% | 100% | 50 | 100% | 125 | 100% | 125 | 100% | 150 | 100% | 200 | 100% | 650 | Dinas Kearsipan |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya | % | 100% | 100% | 100% | 256 | 100% | 860 | 100% | 860 | 100% | 1,160 | 100% | 1,300 | 100% | 4,436 | Dinas Kearsipan |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | 31 | 100% | 50 | 100% | 60 | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% | 341 | Dinas Kearsipan |
| | | | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | Persentase efektifitas sistem adminitrasi sesuai perundang-undangan | % | 65% | 70% | na | - | 100% | 700 | 100% | 300 | 100% | 425 | 100% | 551 | 100% | 1,976 | Dinas Kearsipan |
| | | | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | Persentase kontinyuitas pemanfaatan sarana dan prasarana kearsipan | % | 87% | 90% | 100% | 100 | 100% | 800 | 100% | 800 | 100% | 1,000 | 100% | 1,100 | 100% | 3,800 | Dinas Kearsipan |
| | | | Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan | Persentase kontinyuitas pemanfaatan sarana dan prasarana kearsipan | % | 60% | 65% | 100% | 30 | 100% | 200 | 100% | 200 | 100% | 300 | 100% | 300 | 100% | 1,030 | Dinas Kearsipan |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | Persentase kualitas dan efektifitas pelayanan informasi | % | 70% | 75% | 100% | 100 | 100% | 1,150 | 100% | 1,150 | 100% | 1,000 | 100% | 1,000 | 100% | 4,400 | Dinas Kearsipan |
| | | | Program Peningkatan dan Pengendalian Arsip | Persentase efektifitas pengendalian arsip | % | 60% | 65% | na | - | 100% | - | 100% | 200 | 100% | 250 | 100% | 350 | 100% | 800 | Dinas Kearsipan |
| | | | Program Pembinaan Kearsipan | Persentase Pembinaan Kearsipan | % | 100% | na | na | - | 100% | 450 | 100% | 450 | 100% | 490 | 100% | 500 | 100% | 1,890 | Dinas Kearsipan |
| | | | Program Pengawasan dan Pengendalian Arsip | Persentase Pengawasan dan Pengendalian Arsip | % | na | na | na | - | 100% | 350 | 100% | 350 | 100% | 350 | 100% | 700 | 100% | 1,750 | Dinas Kearsipan |
| **2** | | | **Layanan Urusan Pilihan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **1** | | **Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 2,131 | 100% | 2,531 | 100% | 2,784 | 100% | 3,062 | 100% | 3,368 | 100% | 13,876 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 100% | 100% | 100% | 480 | 100% | 420 | 100% | 462 | 100% | 508 | 100% | 558 | 100% | 2,427 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya | % | 100% | 100% | 100% | 521 | 100% | 494 | 100% | 544 | 100% | 598 | 100% | 658 | 100% | 2,815 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | na | na | na | - | 100% | 200 | 100% | 200 | 100% | 200 | 100% | 200 | 100% | 800 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | 751 | 100% | 826 | 100% | 909 | 100% | 1,000 | 100% | 1,100 | 100% | 4,585 | Dinas Kelautan dan Perikanan |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | | | | | | 1,050 | | 1,155 | | 1,271 | | 1,398 | | 1,537 | | 6,410 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | Produksi perikanan budidaya | Ton | 428,500 | 436,800 | 460,000 | | 480,000 | | 500,000 | | 525,000 | | 545,000 | | 545,000 | | |
| | | | | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) | Nilai | na | 99.46 | 99.96 | | 100.46 | | 100.96 | | 101.46 | | 101.96 | | 101.96 | | |
| | | | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | | | | | | 1,160 | | 1,276 | | 1,404 | | 1,544 | | 1,698 | | 7,082 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | Produksi perikanan tangkap | Ton | 190,100 | 96,678 | 197,000 | | 204,000 | | 212,000 | | 220,000 | | 228,000 | | 228,000 | | |
| | | | | Nilai Tukar Nelayan/NTN | Nilai | 101.50 | 102.00 | 102.30 | | 102.50 | | 102.80 | | 103.00 | | 103 | | 103 | | |
| | | | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | | | | | | 1,241 | | 2,731 | | 3,004 | | 3,305 | | 3,635 | | 13,916 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | Volume ekspor produk kelautan dan perikanan | Ton | 1,001.89 | 1,150.00 | 1,850.00 | | 2,000.00 | | 2,250.00 | | 2,400.00 | | 2,500.00 | | 2,500.00 | | |
| | | | | Konsumsi ikan | Kg/ Kapita/ Tahun | 40.04 | 40.50 | 42.00 | | 42.50 | | 43.00 | | 43.50 | | 44.00 | | 44.00 | | |
| | | | | Produk olahan kelautan dan perikanan | Ton | 209,450 | 252,679 | 290,581 | | 334,168 | | 384,293 | | 441,937 | | 508,228 | | 508,228 | | |
| | | | Program Pengembangan Budidaya Air Laut dan Payau | Produksi Benur dan Nener | Ekor | na | na | 8,000,000 | 12,193 | 17,000,000 | 13,212 | 26,000,000 | 14,289 | 35,000,000 | 16,029 | 44,000,000 | 17,652 | 44,000,000 | 73,375 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | Program Optimalisasi LPPMHP | | | | | | 667 | | - | | - | | - | | - | | 667 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | Jumlah Sampel yang Teruji | Sampel | na | na | 100 | | na | | na | | na | | na | | na | | |
| | | | | Penerbitan Sertifikasi Produk Hasil Perikanan | Sertifikat | na | na | 2 | | na | | na | | na | | na | | na | | |
| | | | Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan | | | | | | 2,350 | | - | | - | | - | | - | | 2,350 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | Jumlah Orang yang dibina dalam rangka penurunan ilegal fishing | Orang | na | na | 200 | | na | | na | | na | | na | | na | | |
| | | | | Luas kawasan konservasi | Ha | na | na | 1,000 | | na | | na | | na | | na | | na | | |
| | | | Program Pengembangan Pelabuhan Perikanan | Jumlah kapal nelayan yang dilayani | Kapal | na | na | 450 | 350 | 500 | 385 | 600 | 424 | 700 | 466 | 800 | 512 | 800 | 2,137 | Dinas Kelautan dan Perikanan |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdava Kelautan | | | | | | - | | 6,925 | | 5,850 | | 4,625 | | 6,625 | | 24,025 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | Jumlah Orang yang dibina dalam rangka penurunan *illegal fishing* | Orang | na | na | 200 | | 220 | | 240 | | 260 | | 280 | | 1,200 | | |
| | | | | Luas kawasan konservasi | Ha | na | na | 1,000 | | 1,100 | | 1,200 | | 1,500 | | 1,617 | | 1,617 | | |
| | | | Program Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) | | | | | | - | | 934 | | 1,057 | | 1,187 | | 1,427 | | 4,605 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | Jumlah Sampel yang Teruji | Sampel | na | na | 100 | | 110 | | 115 | | 120 | | 125 | | 125 | | |
| | | | | Penerbitan Sertifikasi Produk Hasil Perikanan | Sertifikat | na | na | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 6 | | |
| | | | Program Pengembangan Perikanan untuk Masyarakat Miskin | Jumlah Masyarakat Miskin yang dibantu | Orang | na | na | na | - | 200 | 4,000 | 220 | 4,400 | 242 | 4,840 | 266 | 5,324 | 266 | 18,564 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **2** | **2** | | **Pariwisata** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 2,258 | 100% | 2,710 | 100% | 3,252 | 100% | 3,902 | 100% | 4,682 | 100% | 16,803 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun | % | 100% | 100% | 100% | 192 | 100% | 230 | 100% | 276 | 100% | 332 | 100% | 398 | 100% | 1,429 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peralatan Kantor yang Mendukung Kelancaran Tugas | % | 100% | 100% | 100% | 121 | 100% | 8,000 | 100% | 9,000 | 100% | 10,000 | 100% | 11,000 | 100% | 38,121 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya | % | 100% | 100% | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | 80 | 100% | 96 | 100% | 115 | 100% | 138 | 100% | 166 | 100% | 595 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Sumsel | Orang | 7,541,912 | 8.221.864 | 8,632,957 | 775 | 9,064,605 | 930 | 9,517,835 | 1,116 | 9,993,727 | 1,339 | 10,493,413 | 1,607 | 10,493,413 | 5,767 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Jumlah Paket Wisata Religi | Paket | 53 | 53 | 55 | 5,004 | 57 | 6,004 | 58 | 7,204 | 59 | 8,645 | 60 | 10,374 | 60 | 37,231 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | | Program Pengembangan Kemitraan | Jumlah kemitraan | Kemitraan | 53,858 | 49,047 | 51,499 | 450 | 53,951 | 540 | 56,403 | 648 | 58,855 | 778 | 61,307 | 933 | 61,307 | 3,349 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| **2** | **3** | | **Pertanian** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 5,905 | 100% | 6,704 | 100% | 7,235 | 100% | 8,016 | 100% | 8,816 | 100% | 36,677 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 100% | 100% | 100% | 865 | 100% | 1,335 | 100% | 1,280 | 100% | 1,080 | 100% | 1,305 | 100% | 5,864 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | na | na | na | - | 100% | 950 | na | - | na | - | 100% | 400 | 100% | 1,350 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya | % | 100% | 100% | 100% | 171 | 100% | 55 | 100% | 61 | 100% | 67 | 100% | 74 | 100% | 427 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | 837 | 100% | 921 | 100% | 1,013 | 100% | 1,114 | 100% | 1,225 | 100% | 5,110 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | | Program Peningkatan Produksi dan Pelayanan Usahatani melalui *Integrated Participatory Development of Irrigation Project* (IPDMIP) | Jumlah Produksi Benih F4 yang bisa diakses oleh petani | Ton | 0 | 0 | 55 | 1,205 | 114 | 2,529 | 114 | 1,893 | 57 | 1,673 | | | 340 | 7,300 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | | Program Peningkatan Luas Lahan Siap Tanam | Peningkatan Luas Lahan Siap Tanam : | | | | | 1,075 | | 3,000 | | 4,000 | | 5,000 | | 6,000 | | 19,075 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | | | - Padi | Ha | 11,920 | 785 | 1,538 | | 1,688 | | 1,838 | | 1,988 | | 2,127 | | 9,179 | | |
| | | | | - Jagung | Ha | 8,171 | 1,072 | 225 | | 300 | | 375 | | 450 | | 1,650 | | 3,000 | | |
| | | | | - Kedelai | Ha | 1,343 | 880 | 23 | | 26 | | 29 | | 32 | | 122 | | 232 | | |
| | | | | - Cabe | Ha | | 3,846 | 70 | | 70 | | 77 | | 84 | | 321 | | 622 | | |
| | | | | - Bawang Merah | Ha | | 193 | 20 | | 15 | | 17 | | 18 | | 69 | | 139 | | |
| | | | Program Penerapan Teknologi Tanaman Pangan | Peningkatan Luas Tanam Tanaman Pangan : | | | | | 3,585 | | 4,500 | | 5,500 | | 6,500 | | 7,500 | | 27,585 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | | | - Padi | Ha | 79,465 | 5,236 | 10,250 | | - | | - | | - | | - | | 10,250 | | |
| | | | | - Jagung | Ha | 54,475 | 7,144 | 1,500 | | - | | - | | - | | - | | 1,500 | | |
| | | | | - Kedelai | Ha | 8,953 | 5,865 | 150 | | - | | - | | - | | - | | 150 | | |
| | | | | Luas Layanan Keberlanjutan Budidaya Tanaman Pangan : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - Padi | Ha | | | | | 10,526 | | 11,579 | | 12,632 | | 13,684 | | 48,821 | | |
| | | | | - Jagung | Ha | | | | | 2,000 | | 2,500 | | 3,000 | | 3,500 | | 11,000 | | |
| | | | | - Kedelai | Ha | | | | | 170 | | 190 | | 210 | | 230 | | 800 | | |
| | | | Program Penerapan Teknologi Tanaman Hortikultura | Peningkatan Luas Tanam Tanaman Hortikultura : | | | | | 8,729 | | 9,425 | | 10,005 | | 10,505 | | 11,505 | | 50,169 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | | | - Cabe | Ha | 39 | 60 | 65 | | - | | - | | - | | - | | 65 | | |
| | | | | - Bawang Merah | Ha | 10 | 12 | 14 | | - | | - | | - | | - | | 14 | | |
| | | | | - Jeruk | Ha | 25 | 30 | 34 | | - | | - | | - | | - | | 34 | | |
| | | | | - Duku | Ha | 40 | 50 | 55 | | - | | - | | - | | - | | 55 | | |
| | | | | - Durian | Ha | 50 | 59 | 69 | | - | | - | | - | | - | | 69 | | |
| | | | | - Nanas | Ha | 18 | 21 | 25 | | - | | - | | - | | - | | 25 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | | Luas Layanan Keberlanjutan Budidaya Tanaman Hortikultura : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - Cabe | Ha | na | na | na | | 10 | | 11 | | 11 | | 11 | | 65 | | |
| | | | | - Bawang Merah | Ha | na | na | na | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 65 | | |
| | | | | - Jeruk | Ha | na | na | na | | 19 | | 49 | | 59 | | 79 | | 65 | | |
| | | | | - Duku | Ha | na | na | na | | - | | - | | - | | - | | 65 | | |
| | | | | - Durian | Ha | na | na | na | | - | | - | | - | | - | | 65 | | |
| | | | | - Nanas | Ha | na | na | na | | - | | - | | - | | | | 65 | | |
| | | | | Jumlah rumah tangga yang mengembangkan tanaman obat | Rumah Tangga | na | na | na | | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 65 | | |
| | | | Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Pertanian | | | | | | 1,036 | | 2,000 | | 3,235 | | 4,505 | | 5,395 | | 16,171 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | | | Jumlah Kelembagaan Penyuluh Pertanian yang meningkatkan kapasitasnya | Unit | 2 | 2 | 6 | | 15 | | 17 | | 17 | | 20 | | 75 | | |
| | | | | Jumlah Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya | Unit | 1 | 5 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 450 | | |
| | | | | Jumlah kemitraan usaha tani | Unit | 2 | 2 | 10 | | 15 | | 15 | | 15 | | 20 | | 75 | | |
| | | | Program Ketersediaan Sarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura | Luas Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | | | - | | 11,575 | | 11,995 | | 12,495 | | 13,495 | | 49,560 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | | | - Padi | Ha | na | na | na | | 1,579 | | 1,600 | | 1,600 | | 2,000 | | 6,779 | | |
| | | | | - Jagung | Ha | na | na | na | | 300 | | 310 | | 310 | | 375 | | 1,295 | | |
| | | | | - Kedelai | Ha | na | na | na | | 45 | | 67 | | 67 | | 67 | | 246 | - | |
| | | | | - Cabe | Ha | na | na | na | | 30 | | 30 | | 32 | | 32 | | 124 | - | |
| | | | | - Bawang Merah | Ha | na | na | na | | 10 | | 10 | | 12 | | 12 | | 44 | - | |
| | | | | - Jeruk | Ha | na | na | na | | 25 | | 35 | | 35 | | 35 | | 130 | - | |
| | | | | - Duku | Ha | na | na | na | | - | | - | | - | | - | | - | - | |
| | | | | - Durian | Ha | na | na | na | | - | | - | | - | | - | | - | - | |
| | | | | - Nanas | Ha | na | na | na | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| | | | Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | | | | - | | 9,000 | | 10,000 | | 11,000 | | 11,500 | | 41,500 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | | | Jumlah Rumah Tangga miskin yang melakukan usahatani Tanaman Pangan | Rumah Tangga Miskin | na | na | na | | 1,736 | | 2,140 | | 2,300 | | 2,300 | | 8,476 | | |
| | | | | Jumlah Rumah Tangga miskin yang melakukan usaha tani Hortikultura | Rumah Tangga Miskin | na | na | na | | 2,500 | | 3,000 | | 4,312 | | 5,000 | | 14,812 | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran I Dinas Dan 2 UPTD yang Terlayani | % | 85% | 85% | 90% | 2,296 | 90% | 3,300 | 95% | 3,390 | 95% | 3,532 | 95% | 3,646 | 95% | 16,164 | Dinas Perkebunan |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase peningkatan Sarana dan prasarana aparatur | % | 5% | 5% | 5% | 193 | 5% | 2,005 | 5% | 975 | 5% | 375 | 5% | 375 | 5% | 3,923 | Dinas Perkebunan |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur | % | na | na | 70% | 271 | 80% | 150 | 80% | 150 | 80% | 150 | 100% | 150 | 100% | 871 | Dinas Perkebunan |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | na | na | na | - | 95% | 140 | 95% | 193 | - | - | - | - | 95% | 333 | Dinas Perkebunan |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | na | na | na | - | 100% | 695 | 100% | 770 | 100% | 455 | 100% | 845 | 100% | 2,765 | Dinas Perkebunan |
| | | | Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan | Jumlah Produksi hasil perkebunan | Ton | 4,938,827 | 4,939,500 | 4,950,000 | 950 | 4,960,000 | 42,662 | 4,970,000 | 49,031 | 4,980,000 | 53,031 | 4,990,000 | 58,911 | 4,990,000 | 204,585 | Dinas Perkebunan |
| | | | Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | Jumlah Dokumen yang tersedia | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 150 | na | - | na | - | na | - | na | - | 3 | 150 | Dinas Perkebunan |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan | Persentase peningkatan sarana dan prasaraan perkebunan | % | 5% | 5% | 5% | 80 | 5% | 6,700 | 5% | 6,950 | 5% | 7,300 | 5% | 7,200 | 5% | 28,230 | Dinas Perkebunan |
| | | | Program Pengembangan Perbenihan Perkebunan | Jumlah Benih Unggul yang beredar | Batang | 30,672,655 | 36,000,000 | 37,000,000 | 100 | 38,000,000 | 600 | 39,000,000 | 600 | 39,000,000 | 600 | 40,000,000 | 600 | 193,000,000 | 2,500 | Dinas Perkebunan |
| | | | Program Proteksi Tanaman Perkebunan | Jumlah serangan OPT yang dikendalikan | Ha | 100 | 2,750 | 2,800 | 1,605 | 2,850 | 2,700 | 2,900 | 2,850 | 2,950 | 2,850 | 3,000 | 2,850 | 14,500 | 12,855 | Dinas Perkebunan |
| | | | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan/P2HP | Persentase Petani yang tergabung dalam pengolahan pemasaran bersama | % | 5.4% | 5.6% | 5.9% | 75 | 6.1% | 11,515 | 6.3% | 11,300 | 6.5% | 11,300 | 6.7% | 11,300 | 6.7% | 45,490 | Dinas Perkebunan |
| | | | Program Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan/PKUP | Jumlah usaha perkebunan serta peningkatan kelembagaan unit usaha perkebunan yang terawasi | Unit | 228 | 229 | 230 | 75 | 230 | 1,450 | 230 | 2,950 | 230 | 3,000 | 230 | 3,000 | 230 | 10,475 | Dinas Perkebunan |
| | | | Program Bedah Kemiskinan Bidang Perkebunan | Jumlah RTM Perkebunan yang diberikan bantuan | Orang | na | na | na | - | 500 | 790 | 500 | 790 | 500 | 790 | 500 | 790 | 2,000 | 3,158 | Dinas Perkebunan |
| **2** | **4** | | **Kehutanan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 72.08% | 53,49 | 100% | 5,495 | 100% | 10,140 | 100% | 11,035 | 100% | 12,005 | 100% | 13,359 | 100% | 52,034 | Dinas Kehutanan |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 79,04 | 82.69 | 100% | 1,870 | 100% | 1,763 | 100% | 1,793 | 100% | 1,844 | 100% | 1,907 | 100% | 9,177 | Dinas Kehutanan |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya | % | na | na | 100% | 196 | 100% | 316 | 100% | 241 | 100% | 241 | 100% | 241 | 100% | 1,234 | Dinas Kehutanan |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | na | na | na | - | 100% | 1,663 | - | - | 100% | 1,663 | - | - | 100% | 3,327 | Dinas Kehutanan |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | na | na | 100% | 175 | 100% | 600 | 100% | 609 | 100% | 609 | 100% | 609 | 100% | 2,602 | Dinas Kehutanan |
| | Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan | | | | | | 466 | | 10,850 | | 10,850 | | 10,850 | | 10,850 | | 43,866 | Dinas Kehutanan |
| | | Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis | % | 0.13% | 0.16% | 0.18% | | 0.19% | | 0.20% | | 0.21% | | 0.22% | | 0.22% | | |
| | | Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan | % | 0.27% | 0.30% | 0.27% | | 0.24% | | 0.22% | | 0.19% | | 0.17% | | 0.17% | | |
| | Program Penyuluhan dan Pemberdayaan Masvarakat | | | | | | 413 | | 9,150 | | 9,150 | | 9,150 | | 9,150 | | 37,013 | Dinas Kehutanan |
| | | Jumlah Izin Perhutanan Sosial | Izin | 47 | 91 | 5 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | |
| | | Jumlah Penetapan Hutan Hak | Dokumen | na | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | Jenis Sarpras Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | Jenis | na | 2 | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | |
| | | Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dikembangkan | Jenis | na | 3 | 0 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | |
| | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan | | | | | | 1,605 | | 6,875 | | 6,900 | | 6,950 | | 6,950 | | 29,280 | Dinas Kehutanan |
| | | Penurunan jumlah hotspot di kawasan hutan | Titik Hotspot | 453 | 320 | 791 | | 662 | | 555 | | 464 | | 389 | | 389 | | |
| | | Penurunan luas kebakaran hutan | Ha | 749 | 10,135 | 9,122 | | 8,209 | | 7,388 | | 6,650 | | 5,985 | | 5,985 | | |
| | | Persentase Penurunan Emisi Sektor Kehutanan | % | 1.70% | 1.56% | 1.60% | | 1.64% | | 1.68% | | 1.70% | | 1.75% | | 1.75% | | |
| | | Rasio Luas Kawasan Lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan | Rasio | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | 0.44 | | 0.44 | | 0.44 | | 0.44 | | 0.44 | | |
| | | Jumlah kasus yang tertangani | Kasus | 7 | 5 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | |
| | Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan | | | | | | 675 | | 7,575 | | 6,650 | | 6,650 | | 6,650 | | 28,200 | Dinas Kehutanan |
| | | Produksi Kayu Sub Sektor Kehutanan | $m^3$ | 6,689,742 | 5,471,086 | 5,500,000 | | 5,600,000 | | 5,800,000 | | 5,900,000 | | 6,000,000 | | 6,000,000 | | |
| | | Luasan penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan | Ha | na | 73,761 | 18,500 | | 18,500 | | 18,500 | | 12,350 | | 12,350 | | 39,800 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | | Penerimaan sub sektor kehutanan | Rp. Juta | 36,125 | 68,142 | 42,400 | | 44,000 | | 45,500 | | 47,000 | | 50,000 | | 50,000 | | |
| | | | | Jumlah peta tematik yang sesuai Kebijakan Satu Peta (KSP) | Peta | na | na | na | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| **2** | **5** | | **Energi dan Sumber Daya Mineral** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 2,254 | 100% | 3,846 | 100% | 5,071 | 100% | 5,070 | 100% | 5,718 | 100% | 21,958 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase meningkatnya sarana dan prasarana kantor | % | 100% | 100% | 100% | 62 | 100% | 875 | 100% | 1,350 | 100% | 1,050 | 100% | 1,050 | 100% | 4,387 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya | % | 100% | 100% | 100% | 121 | 100% | 100 | 100% | 250 | 100% | 400 | 100% | 350 | 100% | 1,221 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/ Berkembang | % | na | na | na | - | 100% | 120 | 100% | 170 | 100% | 193 | 100% | 170 | 100% | 653 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | na | na | na | - | 100% | 180 | 100% | 120 | 100% | 120 | 100% | 120 | 100% | 540 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | Program Penguatan Akses Kelistrikan Daerah | Jumlah Desa Baru Berlistrik | Desa | 96 | 60 | 11 | 100 | 13 | 1,400 | 12 | 5,800 | 12 | 5,800 | 12 | 500 | - | 13,600 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | Program Pemanfaatan dan Pengembangan EBT | Meningkatnya persentase pemanfaatan EBT menjadi 20% pada tahun 2018 | % | na | na | 89% | 100 | na | - | na | - | na | - | na | - | 89% | 100 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | Program Pemanfaatan dan Pengembangan Energi | Persentase penurunan pemanfaatan energi primer | % | na | na | na | - | 87% | 1,880 | 86% | 650 | 84% | 650 | 82% | 7,900 | 82% | 11,080 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | Program Peningkatan Penerimaan Sektor ESDM | Jumlah penerimaan sektor ESDM | Milyar | 663.51 | 505.54 | 150 | 150 | 500 | 3,900 | 500 | 1,250 | 500 | 1,250 | 500 | 1,250 | 2,150 | 7,800 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | Program Pembinaan dan Pengusahaan Minerba | Persentase wilayah pertambangan yang sesuai dengan tata ruang | % | na | na | 10% | 50 | 15% | 770 | 15% | 1,172 | 20% | 1,200 | 20% | 1,050 | 20% | 4,242 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Minerba | Persentase pengawasan oleh Inspektur tambang | % | na | na | 5% | 115 | 25% | 900 | 50% | 1,380 | 75% | 1,480 | 100% | 1,380 | 100% | 5,255 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| **2** | **6** | | **Perdagangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 1,494 | 100% | 1,793 | 100% | 1,972 | 100% | 2,169 | 100% | 2,386 | 100% | 9,814 | Dinas Perdagangan |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 100% | 100% | 100% | 1,362 | 100% | 1,200 | 100% | 1,320 | 100% | 1,452 | 100% | 1,597 | 100% | 6,931 | Dinas Perdagangan |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | na | na | na | - | 100% | 120 | 100% | 120 | 100% | 120 | 100% | 120 | 100% | 480 | Dinas Perdagangan |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya | % | na | na | 100% | 121 | 100% | 120 | 100% | 120 | 100% | 120 | 100% | 120 | 100% | 601 | Dinas Perdagangan |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | 190 | 100% | 300 | 100% | 100 | 100% | 100 | 100% | 150 | 100% | 840 | Dinas Perdagangan |
| | | | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Persentase Penyelesaian Permasalahan Perselisihan Konsumen | % | 80% | 90% | 90% | 53 | 90% | 1,625 | 90% | 1,788 | 90% | 1,966 | 90% | 2,163 | 90% | 7,595 | Dinas Perdagangan |
| | | | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | Persentase pertumbuhan ekspor | % | 1.53% | 2% | 2% | 200 | 2% | 1,365 | 2% | 1,502 | 2.4% | 1,652 | 2.5% | 1,817 | 2.5% | 6,535 | Dinas Perdagangan |
| | | | Program Sistem Informasi Pengembangan Kemitraan | Persentase data/informasi sektor perdagangan yang meningkat | % | na | na | 100% | 50 | 100% | 60 | 100% | 66 | 100% | 73 | 100% | 80 | 100% | 328 | Dinas Perdagangan |
| | | | Program Penguatan Sistem Logistik Daerah | Persentase Fluktuasi Perubahan harga kebutuhan 9 bahan pokok | % | < 10% | < 10% | < 10% | 170 | < 10% | 270 | < 10% | 297 | < 10% | 327 | < 10% | 359 | < 10% | 1,423 | Dinas Perdagangan |
| | | | Program Peningkatan Sarana/Prasarana Perdagangan bagi Warga Miskin | Jumlah sarana dan prasarana Perdagangan | Unit | 340 | na | na | - | 350 | 655 | 350 | 721 | 350 | 793 | 350 | 872 | 1,740 | 3,040 | Dinas Perdagangan |
| **2** | **7** | | **Perindustrian** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 1,235 | 100% | 1,235 | 100% | 1,630 | 100% | 1,800 | 100% | 1,850 | 100% | 7,749 | Dinas Perindustrian |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 100% | 100% | 100% | 975 | 100% | 1,401 | 100% | 1,431 | 100% | 1,815 | 100% | 2,304 | 100% | 7,925 | Dinas Perindustrian |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya | % | na | na | 100% | 121 | 100% | 125 | 100% | 127 | 100% | 128 | 100% | 129 | 100% | 630 | Dinas Perindustrian |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | 24 | 100% | 36 | 100% | 46 | 100% | 56 | 100% | 65 | 100% | 227 | Dinas Perindustrian |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | na | na | na | - | 100% | 150 | 100% | 150 | 100% | 150 | 100% | 150 | 100% | 600 | Dinas Perindustrian |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi | Jumlah Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi IKM | Unit Usaha | 12,000 | 12,830 | 13,215 | 200 | 13,611 | - | 14,020 | - | 14,440 | - | 14,873 | - | 14,873 | 200 | Dinas Perindustrian |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Jumlah Unit Usaha (UU) IKM non formal menjadi IKM formal | Unit Usaha | 12,000 | 12,830 | 13,215 | 455 | 13,611 | 2,050 | 14,020 | 2,100 | 14,440 | 3,200 | 14,873 | 3,700 | 14,873 | 11,505 | Dinas Perindustrian |
| | | | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | Jumlah penerima bantuan peralatan; IKM yang difasilitasi peningkatan kemampuan teknologi | KUB | na | na | 5 | 140 | 10 | 4,000 | 15 | 4,200 | 15 | 4,900 | 25 | 6,000 | 70 | 19,240 | Dinas Perindustrian |
| | | | Program Pengembangan dan Pembinaan OVOP | Produk OVOP yang menjadi bintang tiga | Produk OVOP | 3 | 3 | 1 | 1,200 | 2 | 1,850 | 3 | 2,200 | 2 | 2,500 | 2 | 3,000 | 10 | 10,750 | Dinas Perindustrian |
| | | | Program Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Industri Daerah | Jumlah Perda RPIK kabupaten/kota yang diperdakan | Perda | 1 | 0 | 1 | 50 | 2 | 450 | 3 | 500 | 2 | 550 | 2 | 600 | 10 | 2,150 | Dinas Perindustrian |
| | | | Program Pengembangan Sentra IKM | Jumlah IKM di Sumatera Selatan yang dikembangkan | Sentra IKM | 33 | 35 | 1 | 150 | 1 | 625 | 1 | 800 | 1 | 1,000 | 1 | 1,500 | 5 | 4,075 | Dinas Perindustrian |
| | | | Program Pengembangan Perwilayahan Industri | Jumlah dokumen inisiasi pembentukan kawasan industri di Sumsel | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 550 | 1 | 1,000 | 1 | 1,300 | 1 | 1,500 | 5 | 4,450 | Dinas Perindustrian |
| | | | Program Peningkatan Kerjasama Pengembangan Industri | Bertambahnya Jumlah Industri Menengah Besar | Industri | 468 | 493 | 503 | 247 | 513 | 700 | 523 | 1,000 | 534 | 1,500 | 544 | 2,000 | 544 | 5,447 | Dinas Perindustrian |
| | | | Program Pengembangan Industri Kreatif | Persentase peningkatan industri kreatif sebesar 10% | % | na | na | 1% | - | 1,5% | 1,220 | 2% | 1,500 | 2,5% | 2,500 | 3% | 3,000 | 10% | 8,220 | Dinas Perindustrian |
| | | | Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM Bagi Kelompok Masyarakat Miskin | Jumlah Peningkatan Unit Usaha (UU) IKM non formal menjadi IKM formal bagi kelompok masyarakat miskin | Unit Usaha | na | na | na | - | 5 | 600 | 5 | 650 | 5 | 700 | 5 | 900 | 20 | 2,850 | Dinas Perindustrian |
| **2** | **8** | | **Transmigrasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pengembangan Transmigrasi Sumsel | Jumlah infrastruktur yang di bangun di kawasan transmigrasi | Infrastruktur | na | na | 1 | 25 | na | - | na | - | na | - | na | - | na | 25 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | Program Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Sumsel | Jumlah infrastruktur yang di bangun di kawasan transmigrasi | Infrastruktur | na | na | na | - | 2 | 10,974 | 3 | 12,306 | 3 | 13,700 | 3 | 15,369 | 12 | 52,349 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | Program Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan Transmigrasi | Persentase usaha ekonomi yang berkembang | % | na | na | 40% | - | 45% | 422 | 50% | 500 | 55% | 550 | 60% | 575 | 60% | 2,047 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| **3** | | | **Penunjang Urusan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **1** | | **Perencanaan Pembangunan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 70% | 3,299 | 75% | 3,701 | 80% | 3,826 | 85% | 4,616 | 90% | 5,809 | 90% | 21,251 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | na | 70% | 70% | 1,364 | 75% | 2,444 | 80% | 2,837 | 85% | 3,208 | 90% | 3,810 | 90% | 13,663 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | na | na | 70% | 620 | 75% | 400 | 80% | 350 | 85% | 460 | 90% | 500 | 90% | 2,330 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya | % | na | 70% | 70% | 3,197 | 75% | 2,377 | 80% | 2,852 | 85% | 3,177 | 90% | 3,650 | 90% | 15,253 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | na | na | na | - | 100% | 256 | 100% | 270 | 100% | 270 | 100% | 290 | 100% | 1,086 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang Memenuhi THIS | % | na | na | 70% | 1,325 | 75% | 1,500 | 80% | 1,250 | 85% | 1,370 | 90% | 1,435 | 90% | 6,880 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia | Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia yang Memenuhi THIS | % | na | na | 70% | 375 | 75% | 375 | 80% | 450 | 85% | 525 | 90% | 600 | 90% | 2,325 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Kelola Pemerintahan | Persentase Perencanaan Pembangunan bidang Tata Kelola Pemerintahan yang memenuhi Standar THIS | % | na | 70% | 70% | 100 | 75% | 450 | 80% | 500 | 85% | 800 | 90% | 840 | 90% | 2,690 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Persentase Perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang memenuhi Standar THIS | % | na | 70% | 70% | 2,225 | 75% | 1,650 | 80% | 1,875 | 85% | 1,930 | 90% | 1,960 | 90% | 9,640 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya | Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang Memenuhi Standar THIS | % | na | 70% | 70% | 100 | 75% | 125 | 80% | 250 | 85% | 160 | 90% | 170 | 90% | 805 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pariwisata | Persentase Perencanaan Pembangunan bidang Pariwisata yang memenuhi Standar THIS | % | na | 70% | 70% | 100 | 75% | 150 | 80% | 200 | 85% | 220 | 90% | 240 | 90% | 910 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Atas Bawah - Bawah Atas | Rasio Kegiatan RKPD Provinsi yang Berbasis Partisipasi Masyarakat | % | na | 80% | 82% | 1,170 | 85% | 1,277 | 87% | 1,925 | 89% | 2,075 | 90% | 2,336 | 90% | 8,782 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Teknokratik | Persentase Rekomendasi dan Masukan Akademisi yang Diakomodir dalam RKPD Provinsi | % | na | 70% | 70% | 400 | 75% | 200 | 80% | 800 | 85% | 850 | 90% | 900 | 90% | 3,150 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Perencanaan Pembangunan Strategis | Persentase Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan yang Tepat Waktu | % | na | 70% | 70% | 1,554 | 75% | 1,384 | 80% | 1,460 | 85% | 1,660 | 90% | 1,795 | 90% | 7,852 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan | Persentase Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran | % | na | 70% | 70% | 150 | 75% | 165 | 80% | 182 | 85% | 200 | 90% | 230 | 90% | 927 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan | Persentase Capaian Target Program OPD Provinsi | % | na | 70% | 70% | 797 | 75% | 1,429 | 80% | 1,490 | 85% | 1,620 | 90% | 1,750 | 90% | 7,086 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terintegrasi Berbasis Partisipasi Masyarakat/ *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) | Persentase Capaian Pembangunan Sistem Irigasi yang Melibatkan Masyarakat | % | na | na | 80% | 1,590 | na | - | na | - | na | - | na | - | 70% | 1,590 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Percepatan Penurunan Kemiskinan | Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang Penanggulangan Kemiskinan yang Memenuhi THIS | % | na | na | 70% | 720 | 75% | 580 | 80% | 700 | 85% | 815 | 90% | 885 | 90% | 3,700 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Program Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat | Persentase Perencanaan partisipatif yang Memenuhi THIS | % | na | na | na | - | 75% | 1,600 | 80% | 1,350 | 85% | 1,470 | 90% | 1,490 | 90% | 5,910 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| **3** | **2** | | **Keuangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 12,389 | 100% | 14,933 | 100% | 15,060 | 100% | 15,500 | 100% | 15,500 | 100% | 73,382 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 100% | 100% | 100% | 1,881 | 100% | 12,075 | 100% | 10,650 | 100% | 10,000 | 100% | 9,500 | 100% | 44,106 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | na | - | 100% | 50 | 100% | 50 | 100% | 50 | 100% | 50 | 100% | 200 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 750 | 100% | 350 | 100% | 375 | 100% | 400 | 100% | 1,875 | Badan Pendapatan Daerah |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya | % | 100% | 100% | 100% | 254 | 100% | 650 | 100% | 675 | 100% | 615 | 100% | 675 | 100% | 2,869 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Pencapaian Pendapatan Asli Daerah | % | 92% | na | 100% | 1,826 | 100% | - | na | - | na | - | na | - | 100% | 1,826 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Bidang Pendapatan Daerah | Persentase Gangguan Teknologi Informasi pada titik pelayanan pajak. | % | na | na | 10% | 3,801 | 10% | 5,227 | 10% | 5,500 | 10% | 5,500 | 10% | 5,500 | 10% | 25,528 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | Program Pengelolaan Pajak Daerah | Persentase Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Daerah | % | na | na | na | - | 100% | 5,054 | 100% | 5,200 | 100% | 5,500 | 100% | 6,000 | 100% | 21,754 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil, Hibah dan Lain Lain Pendapatan | Persentase Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Non Pajak | % | na | na | na | - | 100% | 450 | 100% | 700 | 100% | 700 | 100% | 700 | 100% | 2,550 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | Program Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Pencapaian Penerimanaan Pendapatan Asli Daerah | % | na | na | na | - | 100% | 1,350 | 100% | 1,500 | 100% | 1,450 | 100% | 1,750 | 100% | 6,050 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal. | % | na | na | na | - | 100% | 1,200 | 100% | 1,200 | 100% | 1,200 | 100% | 1,200 | 100% | 4,800 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 9,377 | 100% | 10,315 | 100% | 11,346 | 100% | 12,481 | 100% | 13,729 | 100% | 57,248 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 100% | 100% | 100% | 13,862 | 100% | 15,468 | 100% | 17,015 | 100% | 18,716 | 100% | 20,588 | 100% | 85,649 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | 0 | 100% | 100% | 600 | 100% | 440 | 100% | 484 | 100% | 532 | 100% | 585 | 100% | 2,641 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya | % | na | 100% | 100% | 321 | 100% | 352 | 100% | 388 | 100% | 427 | 100% | 469 | 100% | 1,957 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | 60 | 100% | 66 | 100% | 72 | 100% | 79 | 100% | 87 | 100% | 364 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | | | | | | 500 | | 550 | | 605 | | 666 | | 732 | | 3,053 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | Persentase Perda APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota APBD/P Kabupaten/Kota | % | na | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | | | Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota | % | na | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | APBD yang Tepat Waktu | Tepat Waktu/ Tidak | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 10,022 | Tepat Waktu | 11,025 | Tepat Waktu | 12,127 | Tepat Waktu | 13,340 | Tepat Waktu | 14,674 | Tepat Waktu | 61,188 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| **3** | **3** | | **Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 99% | 100% | 1,596 | 100% | 1,593 | 100% | 1,673 | 100% | 1,731 | 100% | 1,778 | 100% | 8,372 | Badan Kepegawaian Daerah |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Meningkatnya Kelengkapan Sarana dan Prasarana | % | 100% | 100% | 100% | 247 | 100% | 1,343 | 100% | 468 | 100% | 387 | 100% | 342 | 100% | 2,787 | Badan Kepegawaian Daerah |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentasi Disiplin PNS Prov. Sumsel | % | 100% | 100% | 100% | 150 | 100% | 257 | 100% | 342 | 100% | 342 | 100% | 447 | 100% | 1,537 | Badan Kepegawaian Daerah |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | % | 84.57% | 100% | 100% | 899 | 100% | 326 | 100% | 598 | 100% | 618 | 100% | 688 | 100% | 3,129 | Badan Kepegawaian Daerah |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | na | na | na | - | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 58 | Badan Kepegawaian Daerah |
| | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/ PNS/ Anggota KORPRI | Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/Anggota KORPRI | % | 100% | 95% | 95% | 3,259 | 95% | 3,553 | 95% | 3,834 | 96% | 4,107 | 96% | 4,076 | 96% | 18,830 | Badan Kepegawaian Daerah |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 2,447 | 100% | 4,377 | 100% | 4,610 | 100% | 4,964 | 100% | 5,236 | 100% | 21,634 | Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 100% | 100% | 100% | 585 | 100% | 800 | 100% | 810 | 100% | 820 | 100% | 830 | 100% | 3,845 | Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya | % | na | na | 100% | 121 | na | - | na | - | na | - | na | - | 100% | 121 | Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | 200 | 100% | 200 | 100% | 210 | 100% | 270 | 100% | 320 | 100% | 1,200 | Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | na | na | na | - | 100% | 184 | 100% | 184 | 100% | 184 | 100% | 184 | 100% | 736 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/ PNS/ Anggota KORPRI | Persentase peningkatan kapasitas aparatur | % | 100% | 100% | 100% | 2,269 | na | - | na | - | na | - | na | - | 100% | 2,269 | Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia |
| | | | Program Pengembangan Kompetensi Aparatur | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | % | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 15,688 | 55% | 10,034 | 65% | 10,101 | 75% | 11,563 | 75% | 47,385 | Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia |
| | | | Program Pendidikan Kedinasan | Persentase peningkatan keterampilan dan profesional aparatur | % | 100% | 65% | 100% | 276 | 100% | 100 | 100% | 310 | 100% | 121 | 100% | 353 | 100% | 1,160 | Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Persentase peningkatan kompetensi aparatur melalui PPK BLUD | % | 100% | 100% | 100% | 10,971 | 100% | 11,710 | 100% | 13,658 | 100% | 14,204 | 100% | 14,772 | 100% | 65,315 | Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia |
| **3** | **4** | | **Penelitian dan Pengembangan** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 2,112 | 100% | 2,521 | 100% | 2,611 | 100% | 2,756 | 100% | 2,851 | 100% | 12,851 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana | % | 100% | 100% | 100% | 359 | 100% | 1,699 | 100% | 839 | 100% | 550 | 100% | 450 | 100% | 3,897 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya | % | 100% | 100% | 100% | 171 | 100% | 200 | 100% | 200 | 100% | 200 | 100% | 200 | 100% | 971 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | 40 | 100% | 40 | 100% | 43 | 100% | 45 | 100% | 50 | 100% | 218 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | 100% | 100% | 0% | - | 100% | 320 | - | | 100% | 320 | - | - | 100% | 640 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Penguatan Kelembagaan | Persentase Pusat inovasi yang terbentuk | % | na | na | 15% | 57 | na | - | na | - | na | - | na | - | 15% | 57 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Litbang dan Inovasi Bidang Kesehatan | Persentase Litbang dan Inovasi Bidang Kesehatan yang dimanfaatkan | % | na | na | 50% | 100 | na | - | na | - | na | - | na | - | 50% | 100 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Inkubator Teknologi | Persentase pelaku usaha inovatif yang lulus | % | 100% | 100% | 100% | 177 | 100% | 500 | 100% | 605 | 100% | 750 | 100% | 900 | 100% | 2,932 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Diseminasi Iptek Hasil Litbang dan Inovasi | Persentase Hasil Litbang yang di Diseminasikan | % | 70% | 70% | 75% | 60 | 100% | 835 | 100% | 875 | 100% | 900 | 100% | 1,000 | 100% | 3,670 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Kemitraan Inovasi Iptek | Persentase Kemitraan Inovasi Iptek | % | 100% | 100% | 100% | 70 | 100% | 300 | 100% | 325 | 100% | 350 | 100% | 350 | 100% | 1,395 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Litbang dan Inovasi Bidang Peningkatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan | Jumlah Litbang bidang ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Hasil Litbang | 1 | 1 | 1 | 150 | na | - | na | - | na | - | na | - | 1 | 150 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program UPTB Kebun Raya Sriwijaya Sumsel | Persentase Meningkatnya Pelayanan UPTB Kebun Raya Sriwijaya Sumsel | % | 60% | 65% | 70% | 1,436 | na | - | na | - | na | - | na | - | 70% | 1,436 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Science Techno Park (STP)/ Agro Techno Park (ATP) | Persentase Meningkatnya Pelayanan Science Techno Park (STP)/ Agro Techno Park (ATP) | % | 70% | 75% | 85% | 1,420 | na | - | na | - | na | - | na | - | 85% | 1,420 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Penguatan Kelembagaan Litbang | Persentase Pusat inovasi yang terbentuk | % | na | na | na | - | 29% | 336 | 59% | 350 | 82% | 350 | 100% | 350 | 100% | 1,386 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Litbang Bidang Kesehatan | Persentase Litbang dan Inovasi Bidang Kesehatan yang dimanfaatkan | % | na | na | na | - | 4 | 800 | 5 | 1,000 | 7 | 1,100 | 7 | 1,200 | 7 | 4,100 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Litbang Bidang Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan | Jumlah Litbang bidang ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Hasil Litbang | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 700 | 5 | 750 | 6 | 800 | 7 | 1,050 | 24 | 3,300 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Konservasi Ex Situ Kebun Raya | Jumlah Jenis Tanaman yang didokumentasikan di Kebun Raya | Jenis | 500 | 540 | 540 | - | 567 | 1,148 | 595 | 1,500 | 626 | 1,550 | 657 | 1,800 | 657 | 5,998 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Pelayanan Teknologi Science Techno Park | Jumlah Teknologi yang diseminasikan | Teknologi | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1,625 | 4 | 1,750 | 4 | 1,850 | 6 | 2,150 | 20 | 7,375 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Litbang Bidang Pertanian | Jumlah Litbang Bidang Pertanian | Hasil Litbang | na | na | na | - | 3 | 380 | 3 | 400 | 4 | 500 | 6 | 550 | 16 | 1,830 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Pengembangan Desa Inovasi | Jumlah Desa Inovasi | Desa | na | na | na | - | 17 | 1,300 | 17 | 2,000 | 17 | 2,000 | 17 | 2,000 | 68 | 7,300 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Litbang Bidang Energi | Jumlah Litbang bidang energi | Hasil Litbang | na | na | na | - | 2 | 400 | 3 | 450 | 4 | 500 | 4 | 550 | 13 | 1,900 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Litbang Bidang Pendidikan | Jumlah Litbang Bidang pendidikan | Hasil Litbang | na | na | na | - | 2 | 300 | 2 | 350 | 4 | 450 | 4 | 550 | 12 | 1,650 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Litbang Bidang Sosial Budaya, Masyarakat dan Agama | Jumlah Litbang bidang sosial budaya, masyarakat dan agama | Hasil Litbang | na | na | na | - | 2 | 250 | 4 | 550 | 5 | 600 | 5 | 700 | 16 | 2,100 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Daya Saing | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | na | 8.2 | na | - | 8.4 | 100 | 8.5 | 200 | 8.6 | 200 | 8.8 | 200 | 9 | 700 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Litbang Bidang Pemerintahan | Jumlah Litbang Bidang pemerintahan | Hasil Litbang | na | na | na | - | 1 | 200 | 2 | 250 | 3 | 300 | 3 | 350 | 9 | 1,100 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Litbang Bidang Pelayanan Publik | Jumlah Litbang bidang Pelayanan Publik | Hasil Litbang | na | na | na | - | 1 | 150 | 1 | 200 | 2 | 250 | 3 | 300 | 7 | 900 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Litbang Bidang Lingkungan | Jumlah Litbang bidang lingkungan | Hasil Litbang | na | na | na | - | 2 | 200 | 4 | 450 | 4 | 450 | 5 | 500 | 15 | 1,600 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Litbang Bidang Infrastruktur dan Konektifitas | Jumlah Litbang bidang Infrastruktur dan Konektifitas | Hasil Litbang | na | na | na | - | 1 | 100 | 2 | 250 | 3 | 350 | 3 | 350 | 9 | 1,050 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Data dan Informasi | Persentase data dan Informasi kelitbangan yang tersedia | % | na | na | na | - | 25% | 250 | 50% | 355 | 75% | 375 | 100% | 400 | 100% | 1,380 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Pendayagunaan Iptek | Jumlah Teknologi yang didayagunakan | Teknologi | 2 | na | na | - | 1 | 100 | 2 | 200 | 3 | 250 | 3 | 300 | 9 | 850 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **3** | **5** | | **Pengawasan** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 2,290 | 100% | 2,500 | 100% | 2,700 | 100% | 3,000 | 100% | 3,200 | 100% | 13,690 | Inspektorat |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | persentase meningkatnya sarana dan prasarana | % | 100% | 100% | 100% | 544 | 100% | 570 | 100% | 600 | 100% | 620 | 100% | 640 | 100% | 2,974 | Inspektorat |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | 100% | 100% | na | - | 100% | 220 | 100% | 150 | na | - | na | - | 100% | 370 | Inspektorat |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | % | 100% | 100% | 100% | 1,282 | 100% | 1,500 | 100% | 1,700 | 100% | 2,000 | 100% | 2,200 | 100% | 8,682 | Inspektorat |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | na | - | 100% | 15 | 100% | 17 | 100% | 20 | 100% | 22 | 100% | 74 | Inspektorat |
| | | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Persentase peningkatan hasil pengawasan | % | 70% | 80% | 80% | 2,943 | 80% | 3,200 | 80% | 3,400 | 80% | 3,600 | 85% | 3,800 | 85% | 16,943 | Inspektorat |
| | | | Program Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi | Persentase peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi | % | 70% | 70% | 70% | 4,910 | 70% | 4,100 | 75% | 4,400 | 75% | 4,600 | 80% | 4,900 | 80% | 22,910 | Inspektorat |
| | | | Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | Persentase dokumen perencanaan yang disusun | % | 100% | 100% | 100% | 40 | 100% | 55 | 100% | 60 | 100% | 65 | 100% | 70 | 100% | 290 | Inspektorat |
| **3** | **6** | | **Sekretariat Dewan** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 99,578 | 100% | 126,441 | 100% | 125,364 | 100% | 129,114 | 100% | 135,656 | 100% | 616,154 | Sekretariat DPRD |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 100% | 100% | 100% | 8,026 | 100% | 16,472 | 100% | 8,541 | 100% | 9,962 | 100% | 13,736 | 100% | 56,737 | Sekretariat DPRD |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | 100% | 100% | 100% | 1,764 | 100% | 1,324 | 100% | 1,390 | 100% | 1,459 | 100% | 1,532 | 100% | 7,470 | Sekretariat DPRD |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | % | 100% | 100% | 100% | 241 | 100% | 230 | 100% | 230 | 100% | 230 | 100% | 230 | 100% | 1,161 | Sekretariat DPRD |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | na | 100% | 100% | 15 | na | - | na | - | na | - | na | - | 100% | 15 | Sekretariat DPRD |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Persentase anggota Dewan yang meningkat kapasitasnya | % | 84.67% | 82% | 85% | 8,303 | 86% | 16,706 | 87% | 16,748 | 88% | 17,384 | 89% | 17,765 | 89% | 76,906 | Sekretariat DPRD |
| **3** | **7** | | **Urusan Penunjang Lainnya** | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 2,839 | 100% | 4,530 | 100% | 4,983 | 100% | 5,481 | 100% | 6,029 | 100% | 23,862 | Badan Penghubung |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 100% | 100% | 100% | 3,605 | 100% | 15,000 | 100% | 3,966 | 100% | 4,362 | 100% | 4,798 | 100% | 31,731 | Badan Penghubung |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | % | 100% | 100% | 100% | 121 | 100% | 704 | 100% | 705 | 100% | 710 | 100% | 720 | 100% | 2,960 | Badan Penghubung |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan disiplin Aparatur | % | 100% | 100% | 100% | 5 | 100% | 58 | 100% | 60 | 100% | 66 | 100% | 73 | 100% | 261 | Badan Penghubung |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 20 | 100% | 22 | 100% | 25 | 100% | 27 | 100% | 94 | Badan Penghubung |
| | | | Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah di Jakarta | Persentase Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah di Jakarta | % | 100% | 100% | 100% | 436 | 100% | 900 | 100% | 950 | 100% | 1,000 | 100% | 1,050 | 100% | 4,336 | Badan Penghubung |
| | | | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Jumlah Wisatawan yang datang ke Anjungan Sumsel Taman Mini Indonesia Indah | Orang | 50,000 | 55,000 | 60,000 | - | 62,000 | 875 | 64,000 | 900 | 66,000 | 950 | 67,000 | 1,000 | 67,000 | 3,725 | Badan Penghubung |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Nilai IKM | Nilai | B | B | B | - | A | 614 | A | 678 | A | 695 | A | 723 | A | 2,709 | Badan Penghubung |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani | % | 100% | 100% | 100% | 41,474 | 100% | 59,174 | 100% | 58,743 | 100% | 64,535 | 100% | 78,817 | 100% | 261,269 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | | | | | *100%* | *47,577* | *100%* | *46,499* | *100%* | *51,875* | *100%* | *66,039* | *100%* | *211,990* | *Biro Umum dan Perlengkapan* |
| | | | | | | | | | | *65%* | *3,611* | *70%* | *3,816* | *75%* | *3,948* | *80%* | *3,750* | *85%* | *15,125* | *Biro Humas dan Protokol* |
| | | | | | | | | | | *100%* | *311* | *100%* | *311* | *100%* | *311* | *100%* | *311* | *100%* | *1,242* | *Biro Perekonomian* |
| | | | | | | | | | | *100%* | *1,270* | *100%* | *1,347* | *100%* | *1,427* | *100%* | *1,513* | *100%* | *5,558* | *Biro Kesejahteraan Rakyat* |
| | | | | | | | | | | *100%* | *775* | *100%* | *795* | *100%* | *808* | *100%* | *828* | *100%* | *3,206* | *Biro Hukum dan HAM* |
| | | | | | | | | | | *100%* | *1,050* | *100%* | *1,050* | *100%* | *1,050* | *100%* | *1,050* | *100%* | *4,200* | *Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah* |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | | | | | | *100%* | *765* | *100%* | *850* | *100%* | *950* | *100%* | *1,150* | *100%* | *3,715* | *Biro Organisasi* |
| | | | | | | | | *100%* | *695* | *100%* | *795* | *100%* | *885* | *100%* | *895* | *100%* | *3,270* | *Biro Administrasi Pembangunan* |
| | | | | | | | | *100%* | *3,121* | *100%* | *3,281* | *100%* | *3,281* | *100%* | *3,281* | *100%* | *12,963* | *Biro Pengadaan Barang/Jasa* |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik | % | 100% | 100% | 100% | 54,172 | 100% | 65,983 | 100% | 41,727 | 100% | 32,764 | 100% | 52,893 | 100% | 193,367 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | | | *100%* | *63,142* | *100%* | *38,868* | *100%* | *30,017* | *100%* | *49,786* | *100%* | *181,814* | *Biro Umum dan Perlengkapan* |
| | | | | | | | | *80%* | *700* | *80%* | *1,150* | *80%* | *1,400* | *80%* | *1,650* | *80%* | *4,900* | *Biro Humas dan Protokol* |
| | | | | | | | | *100%* | *15* | *100%* | *17* | *100%* | *18* | *100%* | *20* | *100%* | *70* | *Biro Perekonomian* |
| | | | | | | | | *100%* | *106* | *100%* | *112* | *100%* | *119* | *100%* | *126* | *100%* | *464* | *Biro Kesejahteraan Rakyat* |
| | | | | | | | | *100%* | *320* | *100%* | *330* | *100%* | *330* | *100%* | *360* | *100%* | *1,340* | *Biro Hukum dan HAM* |
| | | | | | | | | *100%* | *150* | *na* | *-* | *na* | *-* | *na* | *-* | *100%* | *150* | *Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah* |
| | | | | | | | | *100%* | *300* | *100%* | *100* | *100%* | *130* | *100%* | *200* | *100%* | *730* | *Biro Organisasi* |
| | | | | | | | | *100%* | *200* | *100%* | *200* | *100%* | *200* | *100%* | *200* | *100%* | *800* | *Biro Administrasi Pembangunan* |
| | | | | | | | | *100%* | *1,050* | *100%* | *950* | *100%* | *550* | *100%* | *550* | *100%* | *3,100* | *Biro Pengadaan Barang/Jasa* |
| | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | % | na | na | na | 2,699 | 100% | 8,027 | 100% | 3,667 | 100% | 4,333 | 100% | 4,760 | 100% | 20,787 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | | | *100%* | *7,100* | *100%* | *2,710* | *100%* | *3,331* | *100%* | *3,660* | *100%* | *16,801* | *Biro Umum dan Perlengkapan* |
| | | | | | | | | *80%* | *350* | *80%* | *375* | *80%* | *400* | *80%* | *475* | *80%* | *1,600* | *Biro Humas dan Protokol* |
| | | | | | | | | *100%* | *-* | *100%* | *50* | *100%* | *55* | *100%* | *61* | *100%* | *166* | *Biro Perekonomian* |
| | | | | | | | | *100%* | *248* | *100%* | *263* | *100%* | *279* | *100%* | *296* | *100%* | *1,087* | *Biro Kesejahteraan Rakyat* |
| | | | | | | | | *100%* | *68* | *100%* | *68* | *100%* | *68* | *100%* | *68* | *100%* | *273* | *Biro Hukum dan HAM* |
| | | | | | | | | *100%* | *200* | *100%* | *200* | *100%* | *200* | *100%* | *200* | *100%* | *800* | *Biro Organisasi* |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | | | | | | | | *100%* | - | *100%* | - | *100%* | - | *100%* | - | *100%* | - | *Biro Administrasi Pembangunan* |
| | | | | | | | | | | *100%* | *60* | *100%* | - | *100%* | - | *100%* | - | *100%* | *60* | *Biro Pengadaan Barang/Jasa* |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya | % | 100% | 100% | 100% | 1,436 | 100% | 5,004 | 100% | 5,196 | 100% | 5,338 | 100% | 5,597 | 100% | 21,136 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | | | | | *100%* | *145* | *100%* | *159* | *100%* | *175* | *100%* | *193* | *100%* | *673* | *Biro Umum dan Perlengkapan* |
| | | | | | | | | | | *100%* | *243* | *100%* | *310* | *100%* | *325* | *100%* | *355* | *100%* | *1,233* | *Biro Humas dan Protokol* |
| | | | | | | | | | | *100%* | *40* | *100%* | *45* | *100%* | *49* | *100%* | *54* | *100%* | *188* | *Biro Perekonomian* |
| | | | | | | | | | | *100%* | *106* | *100%* | *112* | *100%* | *119* | *100%* | *126* | *100%* | *464* | *Biro Kesejahteraan Rakyat* |
| | | | | | | | | | | *100%* | *70* | *100%* | *70* | *100%* | *70* | *100%* | *70* | *100%* | *280* | *Biro Hukum dan HAM* |
| | | | | | | | | | | *na* | - | *100%* | *100* | *100%* | *100* | *100%* | *199* | *100%* | *399* | *Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah* |
| | | | | | | | | | | *100%* | *300* | *100%* | *300* | *100%* | *400* | *100%* | *500* | *100%* | *1,500* | *Biro Organisasi* |
| | | | | | | | | | | *100%* | *200* | *100%* | *200* | *100%* | *200* | *100%* | *200* | *100%* | *800* | *Biro Administrasi Pembangunan* |
| | | | | | | | | | | *100%* | *3,900* | *100%* | *3,900* | *100%* | *3,900* | *100%* | *3,900* | *100%* | *15,600* | *Biro Pengadaan Barang/Jasa* |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang | % | 100% | 100% | 100% | 375 | 100% | 409 | 100% | 449 | 100% | 479 | 100% | 512 | 100% | 1,850 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | | | | | *100%* | *325* | *100%* | *312* | *100%* | *333* | *100%* | *356* | *100%* | *1,326* | *Biro Umum dan Perlengkapan* |
| | | | | | | | | | | *100%* | - | *100%* | *50* | *100%* | *55* | *100%* | *61* | *100%* | *166* | *Biro Perekonomian* |
| | | | | | | | | | | *100%* | *64* | *100%* | *67* | *100%* | *71* | *100%* | *76* | *100%* | *278* | *Biro Kesejahteraan Rakyat* |
| | | | | | | | | | | *na* | - | *na* | - | *na* | - | *na* | - | *100%* | - | *Biro Organisasi* |
| | | | | | | | | | | *100%* | - | *100%* | - | *100%* | - | *100%* | - | *100%* | - | *Biro Administrasi Pembangunan* |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | | | | | | | | *100%* | *20* | *100%* | *20* | *100%* | *20* | *100%* | *20* | *100%* | *80* | *Biro Pengadaan Barang/Jasa* |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan Rakyat Daerah | Persentase Anggota Dewan yang Meningkat Kapasitasnya | % | 100% | 100% | 100% | 200 | 100% | 450 | 100% | 200 | 100% | 250 | 100% | 250 | 100% | 1,350 | Sekretariat Daerah (*Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah*) |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Persentase Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH | % | 100% | 100% | 100% | 13,205 | 100% | 27,721 | 100% | 25,496 | 100% | 24,875 | 100% | 20,700 | 100% | 98,792 | Sekratariat Daerah |
| | | | | | | | | | | *100%* | *10,000* | *100%* | *6,000* | *100%* | *5,000* | *100%* | *2,000* | *100%* | *23,000* | *Biro Umum dan Perlengkapan* |
| | | | | | | | | | | *100%* | *15,500* | *100%* | *17,050* | *100%* | *16,575* | *100%* | *15,100* | *100%* | *64,225* | *Biro Humas dan Protokol* |
| | | | | | | | | | | *100%* | *2,201* | *100%* | *2,271* | *100%* | *3,050* | *100%* | *3,300* | *100%* | *10,822* | *Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah* |
| | | | | | | | | | | *100%* | *20* | *100%* | *175* | *100%* | *250* | *100%* | *300* | *100%* | *745* | *Biro Organisasi* |
| | | | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Persentase Penetapan Peraturan per Undang-Undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku | % | 100% | 100% | 100% | 2,041 | 100% | 3,175 | 100% | 3,117 | 100% | 3,236 | 100% | 3,373 | 100% | 12,901 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | | | | | *100%* | *2,725* | *100%* | *2,792* | *100%* | *2,886* | *100%* | *2,998* | *100%* | *11,401* | *Biro Hukum dan HAM* |
| | | | | | | | | | | *100%* | *450* | *100%* | *325* | *100%* | *350* | *100%* | *375* | *100%* | *1,500* | *Biro Organisasi* |
| | | | Program Penataan Daerah Otonomi Baru | Prosentase Tertatanya Daerah Otonomi Daerah | % | 100% | 100% | 100% | 942 | 100% | 2,300 | 100% | 1,650 | 100% | 1,766 | 100% | 1,751 | 100% | 8,409 | Sekretariat Daerah (*Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah*) |
| | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/ PNS/ Anggota KORPRI | Persentase Aparatur Yang dibina dan dikembangkan | % | 100% | 100% | 100% | 3,906 | 100% | 3,000 | 100% | 4,050 | 100% | 4,525 | 100% | 4,975 | 100% | 20,456 | Sekretariat Daerah (*Biro Organisasi*) |
| | | | Program Perumusan Kebijakan Bidang Keagamaan | Persentase Bahan Kebijakan Bidang Keagamaan yang ditindaklanjuti | % | 100% | 100% | 100% | 449 | 100% | 7,423 | 100% | 6,915 | 100% | 8,131 | 100% | 7,608 | 100% | 30,526 | Sekretariat Daerah (*Biro Kesejahteraan Rakyat*) |
| | | | Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan | Persentase Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan | % | na | 100% | 100% | 2,550 | 100% | 10,284 | 100% | 11,125 | 100% | 11,675 | 100% | 12,450 | 100% | 45,534 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | | | | | *100%* | *1,990* | *100%* | *2,125* | *100%* | *2,175* | *100%* | *2,450* | *100%* | *8,740* | *Biro Administrasi Pembangunan* |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | |
| | | | | | | 2017 | 2018 | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | |
| *(1)* | | | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* |
| | | | | | | | | | | *100%* | *8,294* | *100%* | *9,000* | *100%* | *9,500* | *100%* | *10,000* | *100%* | *36,794* | *Biro Pengadaan Barang/Jasa* |
| | | | Program Pembangunan Bidang Ekonomi | Persentase Data Informasi Pembangunan Ekonomi yang Tersedia | % | 100% | 100% | 100% | 1,152 | 100% | 300 | 100% | 556 | 100% | 645 | 100% | 706 | 100% | 3,359 | Sekretariat Daerah (*Biro Perekonomian*) |
| | | | Program Kerjasama Wilayah Perbatasan | Prosentase Kerjasama yang difasilitasi | % | 100% | 100% | 100% | 245 | 100% | 550 | 100% | 600 | 100% | 650 | 100% | 600 | 100% | 2,645 | Sekretariat Daerah (*Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah*) |
| | | | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Persentase Kualitas dan Kuantitas Komunikasi dan Informasi | % | na | na | 100% | 26,092 | na | - | na | - | na | - | na | - | 100% | 26,092 | Sekretariat Daerah (*Biro Humas dan Protokol*) |
| | | | Program Kerjasama, Kehumasan, dan Mass Media | Persentase Kualitas Komunikasi dan Informasi | % | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 39,850 | 100% | 40,650 | 100% | 42,550 | 100% | 44,700 | 100% | 167,750 | Sekretariat Daerah (*Biro Humas dan Protokol*) |
| | | | Program Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan | Persentase Bahan Kebijakan Bidang Kesejahteraan yang ditindaklanjuti | % | 100% | 100% | 100% | 120 | na | - | na | - | na | - | na | - | 100% | 120 | Sekretariat Daerah (*Biro Kesejahteraan Rakyat*) |
| | | | Program Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan | Persentase Bahan Kebijakan Bidang Kesejahteraan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti | % | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 1,219 | 100% | 1,292 | 100% | 1,370 | 100% | 1,452 | 100% | 5,333 | Sekretariat Daerah (*Biro Kesejahteraan Rakyat*) |
| | | | Program Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga | Persentase Bahan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang ditindaklanjuti | % | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 1,571 | 100% | 2,646 | 100% | 1,729 | 100% | 2,872 | 100% | 8,819 | Sekretariat Daerah (*Biro Kesejahteraan Rakyat*) |
| | | | Program Dukungan Penguatan Peran dan Kompetensi Staf ahli KDH dalam Mendukung tugas dan fungsi KDH | Persentase Dukungan Penguatan Peran dan Kompetensi Staf Ahli KDH dalam Mendukung Tugas | % | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 5,773 | 100% | 6,119 | 100% | 6,119 | 100% | 6,119 | 100% | 24,130 | Sekretariat Daerah (*Biro Umum dan Perlengkapan*) |
| | | | Program Peningkatan Kinerja BUMD | Persentase BUMD yang memberikan Kontribusi kepada PAD | % | 70% | 70% | 80% | - | 85% | 565 | 90% | 313 | 95% | 313 | 100% | 345 | 100% | 1,536 | Sekretariat Daerah (*Biro Perekonomian*) |
| | | | Program Peningkatan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai LAKIP | Nilai | A (80,01) | BB (78,71) | A (81-82) | - | A (82-83) | 550 | A (83-84) | 450 | A (84-85) | 475 | A (85-86) | 575 | A (85-86) | 2,050 | Sekretariat Daerah (*Biro Organisasi*) |

# BAB IX

# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja daerah Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 9.1**
Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2019-2023

| No | Indikator | Satuan | Tahun Dasar | | Target Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,51 | 6,04 | 5,6 -5,9 | 5,5 -6,0 | 5,5 -6,1 | 5,5-6,1 | 5,5- 6,1 |
| 2 | Inflasi | % | 2,96 | 2,74 | 2- 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 |
| 3 | Rasio Gini | Rasio | 0,365 | 0,341 | 0,355 | 0,354 | 0,353 | 0,352 | 0,350 |
| 4 | Angka Kemiskinan | % | 13,10 | 12,82 | 12,52 | 10,00-11,65 | 9,9-10,78 | 9,6-9,91 | 9,2-9,5 |
| 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 4,39 | 4,23 | 4,12 | 4,01 | 3,87 | 3,75 | 3,62 |
| 6 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 68,86 | 69,39 | 70,07 | 71,08 | 71,75 | 72,42 | 73,09 |
| 7 | Pengeluaran Per Kapita | Rp. Ribu | 10.220 | n.a | 10.552 | 11.268 | 11.831 | 12.422 | 13.044 |
| 8 | PDRB per Kapita (ADHB) | Rp. Ribu | 46.421 | 49.209 | 50.490 | 54.199 | 57.077 | 59.087 | 62.067 |
| 9 | Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan | % | 6,55 | 5,51 | 5,60 | 5,65 | 5,72 | 5,83 | 5,91 |
| 10 | Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran | % | 7,69 | 8,09 | 9,4 - 9,6 | 9,6 - 9,8 | 9,8 - 10 | 10-10,2 | 10,2-10,4 |
| 11 | Realisasi PMA | Rp. Triliun | 16,03 | 15,613 | 16,71 | 17,88 | 19,13 | 20,47 | 21,90 |
| 12 | Realisasi PMDN | Rp. Triliun | 9,76 | 7,465 | 7,99 | 8,55 | 9,14 | 9,79 | 10,47 |
| 13 | Neraca Perdagangan | US$ juta | 2.876 | 2.880 | 2.894 | 2.909 | 2.923 | 2.938 | 2.953 |
| 14 | Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian | % | 1,77 | 2,16 | 4,27 | 4,77 | 5,27 | 5,77 | 6,27 |
| 15 | Nilai Tukar Petani (NTP) | % | 95,05 | 93,62 | 95,55 | 96,05 | 98,70 | 99,20 | 100,10 |
| 16 | Nilai Tukar Nelayan (NTN) | % | 101,50 | 102,00 | 102,30 | 102,50 | 102,80 | 103,00 | 103,30 |
| 17 | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) | % | 98,96 | 99,46 | 99,96 | 100,46 | 100,96 | 101,46 | 101,96 |
| 18 | Rasio Desa berlistrik | Rasio | 97,13 | 97,75 | 98,48 | 99,21 | 99,95 | 100,00 | 100,00 |
| 19 | Angka Usia Harapan Hidup | Tahun | 69,180 | 69,410 | 69,524 | 69,638 | 69,752 | 69,866 | 69,980 |
| 20 | Angka Rata-rata lama sekolah | Tahun | 7,99 | 8,00 | 8,22 | 8,47 | 8,63 | 8,79 | 8,95 |
| 21 | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,35 | 12,36 | 12,80 | 12,87 | 12,98 | 13,19 | 13,40 |
| 22 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 92,43 | 92,62 | 92,70 | 93,00 | 93,30 | 93,60 | 93,90 |

| No | Indikator | Satuan | Tahun Dasar | | Target Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 23 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 73,53 | n.a. | 73,70 | 73,90 | 74,10 | 74,30 | 74,50 |
| 24 | Persentase Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) | % | 5,88 | 11,76 | 23,53 | 35,29 | 47,05 | 58,82 | 70,58 |
| 25 | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | B | - | BB | BB | BB | A | A |
| 26 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | B | B | B | B | B | B | A |
| 27 | Nilai SAKIP | Nilai | A (80,01) | BB (78,71) | A (81-82) | A (82-83) | A (83-84) | A (84-85) | A (85-86) |
| 28 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 29 | Indeks Integritas Daerah | Indeks | - | - | 60 | 65 | 70 | 72,5 | 75 |
| 30 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 62,04 | 67,29 | 67,35 | 67,40 | 67,43 | 67,47 | 67,85 |
| 31 | Persentase cakupan akses air minum layak | % | 62,71 | 62,84 | 72,97 | 75,08 | 78,83 | 82,77 | 86,91 |
| 32 | Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak | % | 78,62 | 80,32 | 81,00 | 84,75 | 87,63 | 90,26 | 92,96 |
| 33 | Persentase Kondisi Jalan Mantap | % | 74,22 | 61,22 | 70,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 80,00 |
| 34 | Presentase Akses Internet | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 35 | Persentase penurunan konflik sosial | % | 70 | 78 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 |
| 36 | Jumlah Wisatawan Mancanegara | Orang | 67.470 | 70.917 | 74.463 | 78.186 | 82.095 | 86.200 | 90.510 |
| 37 | Jumlah Wisatawan Nusantara | Orang | 7.474.422 | 8.221.864 | 8.632.957 | 9.064.605 | 9.517.835 | 9.993.727 | 10.493.413 |
| 38 | Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan | Sertifikat | 17 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
| 39 | Peringkat Sumsel pada PON 2020 | Peringkat | 21(th. 2016) | 21(th. 2016) | - | 10 | - | - | - |
| 40 | Jumlah Pemuda Berprestasi (Akademis, Seni, Budaya dan Olahraga) | Orang | 9 | 24 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |

**Tabel 9.2**

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| **I** | **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,51 | 6,04 | 5,6 -5,9 | 5,5 -6,0 | 5,5 -6,1 | 5,5-6,1 | 5,5- 6,1 | 5,5- 6,1 |
| 2 | Inflasi | % | 2,96 | 2,74 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 |
| 3 | PDRB per Kapita (ADHB) | Rp. Ribu | 46.421 | 49.209 | 50.490 | 54.199 | 57.077 | 59.087 | 62.067 | 62.067 |
| 4 | Rasio Gini | Rasio | 0,381 | 0,341 | 0,355 | 0,354 | 0,353 | 0,352 | 0,350 | 0,350 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 68,86 | 69,39 | 70,07 | 71,08 | 71,75 | 72,42 | 73,09 | 73,09 |
| 6 | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,35 | 12,36 | 12,80 | 12,87 | 12,98 | 13,19 | 13,40 | 13,40 |
| 7 | Angka Rata-rata lama sekolah | Tahun | 7,99 | 8,00 | 8,22 | 8,47 | 8,63 | 8,79 | 8,95 | 8,95 |
| 8 | Angka Usia Harapan Hidup | Tahun | 69,180 | 69,410 | 69,524 | 69,638 | 69,752 | 69,866 | 69,980 | 69,410 |
| 9 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 69,50 | 68,79 | 68,95 | 69,15 | 69,41 | 69,72 | 70,08 | 70,08 |
| 10 | Angka setengah menganggur | % | 8,73 | 8,73 | 8,66 | 8,61 | 8,56 | 8,36 | 8,05 | 8,05 |
| 11 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 4,39 | 4,23 | 4,12 | 4,01 | 3,87 | 3,75 | 3,62 | 3,62 |
| 12 | Persentase penurunan konflik sosial | % | 70 | 78 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| 13 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | B | B | B | B | B | B | A | A |
| 14 | Nilai SAKIP | Nilai | A (80,01) | BB (78,71) | A (81-82) | A(82-83) | A (83-84) | A (84-85) | A (85-86) | A (85-86) |
| 15 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 16 | Meningkatnya Peringkat MTQ | Peringkat | - | 21Besar | - | 20 Besar | - | 15 besar | - | 15 besar |
| 17 | Meningkatnya Peringkat STQ | Peringkat | 27 | - | 20 besar | - | 15 besar | - | 15 besar | 15 besar |
| 18 | Pola Pangan Harapan (PPH) | Skor | 92,2 | 93,4 | 94,5 | 95,6 | 96,7 | 97,9 | 98,9 | 98,9 |
| 19 | Cadangan pangan | Ton | 498 | 539 | 818 | 827 | 835 | 843 | 852 | 852 |
| 20 | Produksi peternakan | | | | | | | | | |
| | - Daging | Ton | 76.519 | 82.315 | 86.431 | 90.755 | 95.290 | 100.054 | 105.057 | 105.057 |
| | - Susu | Liter | 118.391 | 127.208 | 133.569 | 140.247 | 147.259 | 154.622 | 162.354 | 162.354 |
| | - Telur | Ton | 71.304 | 90.316 | 94.832 | 99.573 | 104.552 | 109.780 | 115.269 | 115.269 |
| 21 | Jumlah KK Rawan Pangan yang dibantu | KK | - | 450 | 100 | 1.200 | 1.350 | 1.450 | 1.500 | 5.600 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 22 | Jumlah KK Miskin yang dibantu | KK | - | 159 | 100 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 4.100 |
| 23 | Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB | % | 19,24 | 20,24 | 20,81 | 20,91 | 21,01 | 21,11 | 21,21 | 21,21 |
| 24 | Kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB | % | 12,43 | 12,94 | 12,75-13,00 | 13,00-13,25 | 13,25-13,50 | 13,50-13,75 | 13,75-14,00 | 13,75-14,00 |
| 25 | Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB | % | 19,56 | 19,52 | 19,58 | 19,78 | 20,73 | 21,29 | 29,95 | 29,95 |
| 26 | Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan | % | 6,55 | 5,51 | 5,60 | 5,65 | 5,72 | 5,83 | 5,91 | 5,91 |
| 27 | Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran | % | 7,69 | 8,09 | 9,4 – 9,6 | 9,6 – 9,8 | 9,8 - 10 | 10 – 10,2 | 10,2-10,4 | 10,2 – 10,4 |
| 28 | Pertumbuhan PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian | % | 5,32 | 9,27 | 5,42 | 5,52 | 5,62 | 5,72 | 5,82 | 5,82 |
| **II** | **Aspek Daya Saing Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | Pengeluaran Per Kapita | Rp. Ribu | 10.220 | n.a | 10.552 | 11.268 | 11.831 | 12.422 | 13.044 | 13.044 |
| 2 | Nilai Tukar Petani (NTP) | % | 95,05 | 93,62 | 95,55 | 96,05 | 98,70 | 99,20 | 100,10 | 100,10 |
| | | | | | | | | | | |
| **III** | **Aspek Pelayanan Umum** | | | | | | | | | |
| ***III.1*** | ***Layanan Urusan Wajib Dasar*** | | | | | | | | | |
| ***1*** | ***Urusan Pendidikan*** | | | | | | | | | |
| 1.1 | APK Sekolah Menengah | % | 83,44 | 77,40 | 86,46 | 87,36 | 88,24 | 89,12 | 90,00 | 90,00 |
| 1.2 | APM Sekolah Menengah | % | 59,06 | 59,87 | 60,06 | 61,04 | 62,02 | 63,00 | 63,98 | 63,98 |
| 1.3 | APS Sekolah Menengah | % | 69,05 | 69,65 | 73,09 | 75,11 | 77,13 | 79,15 | 81,17 | 81,17 |
| 1.4 | APTS Sekolah Menengah | % | 2,85 | 2,81 | 2,31 | 1,81 | 1,31 | 0,81 | 0,31 | 0,31 |
| 1.5 | Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi | Sekolah | 10 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 |
| 1.6 | Persentase Sekolah SLB yang terakreditasi: | | | | | | | | | |
| | A | % | 5,9 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | B | % | 41,2 | 45,16 | 48,39 | 51,61 | 54,84 | 58,1 | 61,29 | 61,29 |
| | C | % | 2,9 | 3,23 | 6,45 | 9,68 | 12,90 | 16,10 | 25,81 | 25,81 |
| | D | % | 50,0 | 38,71 | 32,26 | 28,81 | 19,35 | 12,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Persentase Pendidik Tenaga Kependidikan minimal Berkualifikasi S-1 | % | 94,76 | 95,63 | 96,50 | 97,37 | 98,24 | 99,11 | 100,00 | 100,00 |
| 1.8 | Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah | | | | | | | | | |
| | SMA | Rasio | 1:32 | 1:37 | 1:35 | 1:33 | 1:31 | 1:29 | 1:27 | 1:27 |
| | SMK | Rasio | 1:47 | 1:57 | 1:55 | 1:53 | 1:51 | 1:49 | 1:47 | 1:47 |
| 1.9 | Persentase sekolah menengah terakreditasi: | | | | | | | | | |
| | A | % | 12,85 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 |
| | B | % | 10,63 | 26,77 | 28,82 | 30,54 | 33,01 | 35,48 | 37,42 | 37,42 |
| | C | % | 4,98 | 11,40 | 12,26 | 13,23 | 14,19 | 15,27 | 16,13 | 16,13 |
| | D | % | 0,11 | 38,06 | 35,15 | 32,47 | 29,03 | 25,48 | 22,69 | 22,69 |
| 1.10 | Lulusan SMK yang terserap kerja | % | - | 53,60 | 55,78 | 57,96 | 60,14 | 62,32 | 64,50 | 64,50 |
| 1.11 | Persentase Kelulusan Sekolah Menengah | % | 99,95 | 99,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ***2*** | ***Urusan Kesehatan*** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase balita stunting | % | 22,8 | 32 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 24 |
| 2.2 | Persentase balita gizi buruk | % | 0,032 | 0,037 | 0,035 | 0,033 | 0,031 | 0,029 | 0,027 | 0,027 |
| 2.3 | Case Detection Rate | % | 44 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 |
| 2.4 | Persentase kasus TBC yang diobati dan sembuh | % | 86 | 85 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 90 |
| 2.5 | Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar dari total penderita yang ditemukan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Jumlah Kab/kota yang Eliminasi Malaria | Jumlah | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2.7 | Cakupan ASI eksklusif | % | 61,66 | 60,7 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 |
| 2.8 | Persentase Rumah Tangga ber-PHBS | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| 2.9 | Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan | % | 56,5 | 58,4 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 2.10 | Persentase Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) | % | 52,8 | 61,4 | 65 | 68 | 72 | 75 | 80 | 80 |
| 2.11 | Persentase kabupaten/Kota Sehat | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 |
| 2.12 | Imunisasi Dasar Lengkap | % | 99,0 | 99,4 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2.13 | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi | % | 30 | 43 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 2.14 | Jumlah Kematian Bayi | Orang | 637 | 497 | 477 | 458 | 438 | 416 | 394 | 394 |
| 2.15 | Persentase puskesmas yang mengembangkan Program Usila | % | 65 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 100 |
| 2.16 | Jumlah Kematian Ibu Maternal | Orang | 107 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 110 |
| 2.17 | Rasio dokter terhadap 100.000 penduduk | Rasio | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 |
| 2.18 | Rasio dokter gigi terhadap 100.000 penduduk | Rasio | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 2.19 | Rasio bidan terhadap 100.000 penduduk | Rasio | 113 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 125 |
| 2.20 | Rasio tenaga gizi terhadap 100.000 penduduk | Rasio | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 2.21 | Rasio tenaga sanitarian terhadap 100.000 penduduk | Rasio | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 2.22 | Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan | % | 88 | 88,4 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 95 |
| 2.23 | Persentase desa/kelurahan UCI | % | 92 | 94,1 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2.24 | Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.25 | Persentase penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.26 | Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit BLUD UPT Dinas Kesehatan | % | 60 | 65 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 80 |
| | | | | | | | | | | |
| ***3*** | ***Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Persentase Kondisi Jalan Mantap | % | 74,22 | 61,22 | 70,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 80,00 | 80,00 |
| 3.2 | Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang | % | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 |
| 3.3 | Luas Daerah Irigasi permukaan yang terairi | Ha | 23.673 | 25.776 | 28.795 | 30.595 | 32.095 | 33.595 | 35.095 | 35.095 |
| 3.4 | Luas Daerah Irigasi Rawa yang terairi | Ha | - | - | 5.700 | 8.700 | 11.700 | 17.400 | 23.100 | 23.100 |
| 3.5 | Luas daerah irigasi secara partisipatif yang terairi | Ha | - | - | 2.009 | 4.209 | 6.446 | 7.646 | 8.846 | 8.846 |
| 3.6 | Jumlah pemenuhan kebutuhan tampungan air dan penyediaan air baku | Kawasan | 28 | 28 | 30 | 32 | 36 | 42 | 48 | 48 |
| 3.7 | Jumlah kawasan bebas bencana banjir | Kawasan | 13 | 24 | 30 | 32 | 37 | 41 | 45 | 45 |
| 3.8 | Jumlah kawasan bebas bencana longsor | Kawasan | 9 | 11 | 11 | 13 | 17 | 22 | 27 | 27 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| ***4*** | ***Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman*** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | % | 7,25 | 6,88 | 6,43 | 5,83 | 5,17 | 4,43 | 3,85 | 3,85 |
| 4.2 | Luas Kawasan kumuh dengan sarana dan prasarana yang baik | Ha | 517,78 | 1.047,78 | 1.147,78 | 1.247,78 | 1.347,78 | 1.447,78 | 1.547,78 | 1.547,78 |
| 4.3 | Persentase cakupan akses air minum layak | % | 62,71 | 62,84 | 72,97 | 75,08 | 78,83 | 82,77 | 86,91 | 86,91 |
| 4.4 | Persentase RT dengan akses sanitasi layak | % | 78,62 | 80,32 | 81,00 | 84,75 | 87,63 | 90,26 | 92,96 | 92,96 |
| 4.5 | Persentase Bangunan Publik dan lingkungan ruang publik yang telah memenuhi NSPK | % | 43,11 | 48,27 | 53,10 | 58,41 | 64,25 | 70,67 | 77,74 | 77,74 |
| 4.6 | Persentase Kepala Keluarga yang Memiliki Rumah | % | 83,3 | 87,3 | 88,72 | 90,15 | 91,58 | 93,00 | 94,43 | 94,43 |
| 4.7 | Jumlah kawasan permukiman yang tertata prasarana utilitas | Kawasan | - | - | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 23 |
| 4.8 | Jumlah lingkungan ruang publik yang dilengkapi sarana dan prasarana utilitas yang baik | Kawasan | - | - | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 31 |
| 4.9 | Luas kawasan perumahan dan permukiman bagi keluarga miskin yang tertata | Ha | - | - | - | 396,70 | 423,14 | 449,57 | 476,01 | 476,01 |
| 4.10 | Persentase rumah tangga miskin dengan akses air minum layak | % | - | - | - | 2,43 | 4,22 | 6,32 | 6,85 | 6,85 |
| 4.11 | Persentase rumah tangga miskin dengan akses sanitasi layak | % | - | - | - | 18,77 | 19,71 | 20,65 | 21,73 | 21,73 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| ***5*** | ***Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat*** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase penegakkan Perda | % | 96 | 92,34 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 5.2 | Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Prov. Sumsel | % | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| 5.3 | Persentase Satlinmas dan Pos Kamling yang Aktif | % | - | - | 65 | 75 | 85 | 95 | 99 | 99 |
| 5.4 | Persentase Penurunan Daerah Rawan Kebakaran | % | - | - | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | 100 |
| 5.5 | Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) | Indeks | 142,20 | 142,20 | 133,67 | 125,65 | 118, | 111,02 | 104,36 | 104,36 |
| 5.6 | Persentase daerah rawan bencana yang mempunyai pelayanan informasi | % | n.a | n.a | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7 | Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana daerah rawan bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.8 | Persentase korban bencana yang dievakuasi saat tanggap darurat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| ***6*** | ***Urusan Sosial*** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | % | 9,30 | 49,42 | 48,87 | 50,80 | 52,73 | 54,67 | 56,60 | 56,60 |
| 6.2 | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial | % | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 17,86 | 17,86 | 23,81 | 29,76 | 29,76 |
| 6.3 | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan | % | 9,29 | 8,29 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ***III.2*** | ***Layanan Urusan Wajib Non Dasar*** | | | | | | | | | |
| ***1*** | ***Urusan Tenaga Kerja*** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase tenaga kerja yang dilatih dan ditempatkan | % | - | 33,59 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
| 1.2 | Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | % | - | 37,34 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
| 1.3 | Persentase pekerja yang mendapat perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | % | - | 54,79 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 70 |
| | | | | | | | | | | |
| ***2*** | ***Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 92,43 | 92,62 | 92,70 | 93,00 | 93,30 | 93,60 | 93,90 | 93,90 |
| 2.2 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 73,53 | n.a. | 73,70 | 73,90 | 74,10 | 74,30 | 74,50 | 74,50 |
| 2.3 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,48 | 0,478 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 2.4 | Persentase Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) | % | 5,88 | 11,76 | 23,53 | 35,29 | 47,05 | 58,82 | 70,58 | 70,58 |
| 2.5 | Rasio Anak Korban Kekerasan | Per 10.000 anak | 1,66 | 1,38 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 2.6 | Rasio Perempuan Korban Kekerasan | Per 100.000 perempuan | 15,15 | 12,21 | 12,00 | 12,00 | 11,5 | 11,5 | 11,00 | 11,00 |
| 2.7 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | % | 4,5 | 5,01 | 5,00 | 5,00 | 5,10 | 5,10 | 5,20 | 5,20 |
| 2.8 | Partisipasi angkatan kerja perempuan | % | 53,63 | 53,56 | 53,7 | 53,8 | 53,8 | 53,9 | 54,0 | 54,0 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| ***3*** | ***Urusan Pangan*** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ketersediaan Energi untuk dikonsumsi | Kkal/Kap/ hari | 2.075 | 2.124 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 3.2 | Ketersediaan Protein untuk dikonsumsi | Gram/kap/ hari | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 3.3 | Koefisien Varian (CV) Harga Pangan Strategis | % | ≤15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
| 3.4 | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Beredar Aman dan Bermutu (sayur dan buah) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.5 | Jumlah Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) | sertifikat/ registrasi | 77 | 153 | 178 | 203 | 228 | 263 | 288 | 288 |
| 3.6 | Jumlah Pemberdayaan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Petani Pangan | orang | - | - | 4.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 17.000 |
| 3.7 | Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Ternak | % | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.8 | Jumlah Peternakan yang ikut Asuransi Ternak Sapi | ekor | - | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 10.000 | 36.000 |
| 3.9 | Jumlah Promosi Hasil Peternakan | kali | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 3.10 | Jumlah Sentra Peternakan Rakyat yang menggunakan Teknologi Peternakan | Kab | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| ***4*** | ***Urusan Pertanahan*** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase konflik lahan yang terselesaikan | % | 9,76 | 10,00 | 11,00 | 11,66 | 12,00 | 12,45 | 13,00 | 13,00 |
| | | | | | | | | | | |
| ***5*** | ***Urusan Lingkungan Hidup*** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 62,04 | 67,29 | 67,35 | 67,40 | 67,43 | 67,47 | 67,85 | 67,85 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 5.2 | Indeks Kualitas Air | Indeks | 62,64 | 62,64 | 62,74 | 62,82 | 62,89 | 62,93 | 64,04 | 64,04 |
| 5.3 | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 96,11 | 96,11 | 96,19 | 96,23 | 96,25 | 96,32 | 96,45 | 96,45 |
| 5.4 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Indeks | 36,03 | 49,173 | 49,189 | 49,206 | 49,224 | 49,243 | 49,263 | 49,263 |
| 5.5 | Persentase penurunan emisi GRK | % | 3,71 | 4,33 | 4,95 | 5,56 | 6,18 | 6,8 | 7,42 | 7,42 |
| 5.6 | Jumlah penurunan emisi GRK: | Ton CO2 eq/tahun | 4.552.377 | 4.553.329 | 4.554.931 | 4.557.072 | 4.559.977 | 4.563.570 | 4.566.890 | 4.566.890 |
| | 1. Sektor lahan dan gambut | Ton CO2 eq/tahun | 4.367.638 | 4.363.444 | 4.360.108 | 4.357.545 | 4.355.678 | 4.354.439 | 4.353.765 | 4.353.765 |
| | 2. Sektor pertanian dan peternakan | Ton CO2 eq/tahun | 52.094 | 53.554 | 55.013 | 56.472 | 57.932 | 59.391 | 60.851 | 60.851 |
| | 3. Sektor energi dan transportasi | Ton CO2 eq/tahun | 52.219 | 54.750 | 57.135 | 59.337 | 61.653 | 64.075 | 66.609 | 66.609 |
| | 4. Sektor limbah | Ton CO2 eq/tahun | 80.426 | 81.581 | 82.675 | 83.718 | 84.714 | 85.665 | 85.665 | 85.665 |
| 5.7 | Persentase penyelesaian kasus lingkungan | % | 33,33 | 33,33 | 34 | 34,5 | 35 | 35,6 | 36 | 36 |
| | | | | | | | | | | |
| ***6*** | ***Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | Rasio | 92,95 | 98,08 | 98,15 | 98,46 | 98,83 | 99,07 | 99,21 | 99,21 |
| 6.2 | Rasio bayi ber akta kelahiran | Rasio | 80,00 | 82,50 | 85,00 | 87,50 | 90,00 | 92,50 | 95,00 | 95,00 |
| 6.3 | Rasio pasangan ber akta Nikah | Rasio | 70,00 | 73,00 | 75,00 | 77,50 | 80,00 | 82,50 | 85,00 | 85,00 |
| 6.4 | Cakupan penerbitan akta kelahiran | % | 80,00 | 82,50 | 85,00 | 87,50 | 90,00 | 92,50 | 95,00 | 95,00 |
| | | | | | | | | | | |
| ***7*** | ***Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*** | | | | | | | | | |
| 7.1 | Persentase Lembaga Masyarakat yang diberdayakan | % | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 7.2 | Persentase Kader PKK aktif | % | 0,15 | 0,15 | na | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,40 |
| 7.3 | Indeks Pembangunan Desa Sumatera Selatan | Indeks | | 59,18 | 59,93 | 60,67 | 61,42 | 62,16 | 62,91 | 62,91 |
| 7.4 | Indeks Desa Membangun Sumatera Selatan | Indeks | 0,5817 | 0,5847 | 0,5877 | 0,5907 | 0,5937 | 0,5967 | 0,5997 | 0,5997 |
| | | | | | | | | | | |
| ***8*** | ***Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*** | | | | | | | | | |
| 8.1 | Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif | % | 69,2 | 60,7 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
| | | | | | | | | | | |
| ***9*** | ***Urusan Perhubungan*** | | | | | | | | | |
| 9.1 | Jumlah arus penumpang Kereta Api | Orang | 1.928.364 | 2.025.087 | 2.126.341 | 2.232.658 | 2.344.291 | 2.461.506 | 2.584.581 | 2.584.581 |
| 9.2 | Jumlah arus penumpang Kapal Laut | Orang | 59.301 | 62.266 | 65.379 | 68.648 | 72.081 | 75.685 | 79.469 | 79.469 |
| 9.3 | Jumlah arus penumpang Bus AKDP | Orang | 1.534.266 | 1.610.979 | 1.691.528 | 1.776.105 | 1.864.910 | 1.958.155 | 2.056.063 | 2.056.063 |
| 9.4 | Jumlah pelabuhan laut pengumpan regional | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.5 | Jumlah terminal tipe B | Unit | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 9.6 | Load faktor angkutan darat | % | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 66 | 68 | 68 |
| 9.7 | Load faktor angkutan laut | % | 44 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 54 |
| 9.8 | Load faktor angkutan kereta api | % | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 53 | 53 |
| 9.9 | Jumlah trip pelayanan ALSDP | Trip | 3.048 | 3.568 | 3.672 | 3.702 | 3.778 | 3.815 | 3.856 | 3.856 |
| 9.10 | Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas jalan | % | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 9.11 | Persentase Tingkat Fatalitas | % | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| ***10*** | ***Urusan Komunikasi dan Informatika*** | | | | | | | | | |
| 10.1 | Persentase layanan pengguna e-government | % | na | na | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 10.2 | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Informasi dan Komunikasi Masyarakat/Publik | Kab/Kota | na | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 17 |
| 10.3 | Presentase Akses Internet | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | | | | | | | | | | |
| ***11*** | ***Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah*** | | | | | | | | | |
| 11.1 | Jumlah UMKM Naik Kelas | UMK | 4.156 | 1.124 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 7.780 |
| 11.2 | Jumlah Kenaikan Wirausaha Baru | UKM | 1.258 | 463 | 240 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4.761 |
| 11.3 | Prosentase Pertumbuhan Modal Koperasi | % | 99,27 | 6,27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 115,54 |
| 11.4 | Prosentase Kenaikan Volume Usaha Koperasi | % | 14,96 | 4,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29,56 |
| 11.5 | Jumlah Koperasi Aktif | Koperasi | 4.699 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5.254 |
| | | | | | | | | | | |
| ***12*** | ***Urusan Penanaman Modal*** | | | | | | | | | |
| 12.1 | Realisasi PMA | Rp. Triliun | 16,03 | 15,613 | 16,71 | 17,88 | 19,13 | 20,47 | 21,90 | 21,90 |
| 12.2 | Realisasi PMDN | Rp. Triliun | 9,76 | 7,465 | 7,99 | 8,55 | 9,14 | 9,79 | 10,47 | 10,47 |
| 12.3 | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di selesaikan tepat waktu sesuai SOP | Unit | 901 | 904 | 940 | 974 | 1.006 | 1.036 | 1.064 | 1.064 |
| 12.4 | Indeks Kepuasan Investor | Indeks | 89,3 | 89,41 | 89,50 | 89,55 | 89,60 | 89,65 | 89,70 | 89,70 |
| 12.5 | Jumlah investor | Perusahaan/ UU | 260 | 333 | 345 | 357 | 369 | 381 | 393 | 393 |
| 12.6 | Persentase pertumbuhan nilai investasi | % | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
| ***13*** | ***Urusan Kepemudaan dan Olah Raga*** | | | | | | | | | |
| 13.1 | Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan | Orang | 519 | 422 | 673 | 1.940 | 4.077 | 2.811 | 3.511 | 13.012 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 13.2 | Jumlah organisasi pemuda yang aktif | OKP | 4 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 115 |
| 13.3 | Jumlah wirausaha muda | Orang | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| 13.4 | Jumlah pelatih yang Bersertifikat | Orang | 25 | 550 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 13.5 | Jumlah pembinaan cabang olahraga | Orang | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 210 |
| 13.6 | Jumlah pembinaan atlet muda | Orang | 232 | 232 | 244 | 251 | 255 | 262 | 267 | 1.278 |
| 13.7 | Jumlah atlet berprestasi | Orang | 23 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 225 |
| 13.8 | Jumlah prestasi olahraga | Cabor | 7 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 79 |
| 13.9 | Jumlah medali atlet muda Sumsel | Medali emas | 29 | 22 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 175 |
| | | | | | | | | | | |
| ***14*** | ***Urusan Statistik*** | | | | | | | | | |
| 14.1 | Tersedianya persentase data sektoral | % | - | - | 19 | 50 | 81 | 100 | 100 | 100 |
| 14.2 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | % | - | - | 18,75 | 50,00 | 81,25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | |
| ***15*** | ***Urusan Persandian*** | | | | | | | | | |
| 15.1 | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan pelayanan persandian | % | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
| ***16*** | ***Urusan Kebudayaan*** | | | | | | | | | |
| 16.1 | Angka Kumulatif Jumlah cagar budaya yang terlindungi, termanfaatkan dan dikembangkan | Cagar Budaya | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 850 |
| 16.2 | Angka komulatif jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terlindungi, termanfaatkan dan dikembangkan | OPK | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 |
| 16.3 | Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan | Sertifikat | 17 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 |
| 16.4 | Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan | Sertifikat | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 16.5 | Jumlah Pergelaran Seni | Kali | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 63 |
| 16.6 | Jumlah Kunjungan Museum | Orang | 40.350 | 41.350 | 49.620 | 59.544 | 71.452 | 85.743 | 102.892 | 102.892 |
| | | | | | | | | | | |
| ***17*** | ***Urusan Perpustakaan*** | | | | | | | | | |
| 17.1 | Persentase peningkatan minat dan budaya baca masyarakat | % | 33,33 | 58,60 | 63,10 | 65,25 | 67,30 | 72,50 | 74,60 | 74,60 |
| 17.2 | Nilai tingkat budaya baca masyarakat | Nilai | 38,38 | 44,81 | 50,10 | 51,98 | 53,16 | 55,48 | 57,19 | 57,19 |
| | | | | | | | | | | |
| ***18*** | ***Urusan Kearsipan*** | | | | | | | | | |
| 18.1 | Persentase Perangkat Daerah provinsi dan kab/kota yang mengelola arsip secara baku | % | 0 | 60 | 60 | 60 | 75 | 85 | 90 | 90 |
| 18.2 | Jumlah SDM pengelola kearsipan yang bersertifikat | Orang | 36 | 34 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | | | | | | | | | | |
| ***III.3*** | **Layanan Urusan Pilihan** | | | | | | | | | |
| ***1*** | ***Urusan Pariwisata*** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Jumlah Wisatawan Mancanegara | Orang | 67.470 | 70.917 | 74.463 | 78.186 | 82.095 | 86.200 | 90.510 | 90.510 |
| 1.2 | Jumlah Wisatawan Nusantara | Orang | 7.474.422 | 8.221.864 | 8.632.957 | 9.064.605 | 9.517.835 | 9.993.727 | 10.493.413 | 10.493.413 |
| 1.3 | Jumlah Paket Destinasi | Paket Destinasi | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 14 |
| | | | | | | | | | | |
| ***2*** | ***Urusan Pertanian*** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian | % | 1,77 | 2,16 | 4,27 | 4,77 | 5,27 | 5,77 | 6,27 | 6,27 |
| 2.2 | Produksi Tanaman Pangan | | | | | | | | | |
| | - Padi | Ton | 4.943.071 | 5.076.131 | 5.175.825 | 5.325.825 | 5.450.825 | 5.575.825 | 5.675.825 | 5.675.825 |
| | - Jagung | Ton | 892.358 | 1.030.994 | 1.108.317 | 1.136.025 | 1.164.426 | 1.193.537 | 1.223.375 | 1.223.375 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | - Kedelai | Ton | 11.792 | 14.791 | 14.936 | 15.084 | 15.234 | 15.386 | 15.543 | 15.543 |
| 2.3 | Produksi Hortikultura | | | | | | | | | |
| | - Cabai | Ton | 40.468 | 42.110 | 45.884 | 47.319 | 48.9 | 50.705 | 52.263 | 52.263 |
| | - Bawang | Ton | 1.376 | 1.430 | 2.056 | 2.072 | 2.321 | 2.478 | 2.637 | 2.637 |
| | - Jeruk | Ton | 39.756 | 40.655 | 41.153 | 42.414 | 43.822 | 48.427 | 53.517 | 53.517 |
| | - Duku | Ton | 12.066 | 49.784 | 49.810 | 49.828 | 49.845 | 49.863 | 49.880 | 49.880 |
| | - Durian | Ton | 19.930 | 56.843 | 56.859 | 56.876 | 56.892 | 56.909 | 56.925 | 56.925 |
| | Nanas | Ton | 109.071 | 134.894 | 135.246 | 136.599 | 137.965 | 138.188 | 138.412 | 138.412 |
| | - Tanaman Obat | Ton | 4.216 | - | 2.885 | 2.942 | 3.001 | 3.061 | 3.122 | 3.122 |
| 2.4 | Produktivitas Tanaman Pangan | | | | | | | | | |
| | - Padi | Ku/Ha | 49,43 | 50,39 | 50,56 | 50,61 | 50,66 | 50,71 | 50,76 | 50,76 |
| | - Jagung | Ku/Ha | 64,56 | 67,71 | 65,03 | 65,05 | 65,07 | 65,09 | 65,11 | 65,11 |
| | - Kedelai | Ku/Ha | 17,49 | 11,72 | 12,32 | 12,33 | 12,34 | 12,36 | 12,38 | 12,38 |
| 2.5 | Produktivitas Hortikultura | | | | | | | | | |
| | - Cabai | Ku/Ha | 59,1 | 69,86 | 73,00 | 74,46 | 76,18 | 77,86 | 79,17 | 79,17 |
| | - Bawang | Ku/Ha | 60,1 | 81,74 | 80,00 | 80,26 | 80,58 | 80,98 | 81,39 | 81,39 |
| | - Jeruk | Ku/Ha | 529,4 | 492,80 | 498,80 | 504,90 | 511,10 | 521,40 | 531,80 | 531,80 |
| | - Duku | Ku/Ha | 29,9 | 123,80 | 123,90 | 124,10 | 124,20 | 124,30 | 124,40 | 124,40 |
| | - Durian | Ku/Ha | 67 | 112,90 | 113,00 | 113,10 | 113,20 | 113,30 | 113,40 | 113,40 |
| | - Nanas | Ku/Ha | 1.200 | 676,20 | 677,90 | 684,70 | 691,60 | 692,70 | 693,80 | 693,80 |
| 2.6 | Nilai Tukar Petani Perkebunan | Nilai | 95,05 | 95,55 | 96,65 | 98,70 | 99,20 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7 | Produktivitas sektor perkebunan | | | | | | | | | |
| | - Karet | Ton/Ha | 1,33 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,36 | 1,36 |
| | - Kelapa Sawit | Ton/Ha | 3,42 | 3,43 | 3,45 | 3,46 | 3,47 | 3,48 | 3,50 | 3,50 |
| | - Kopi | Ton/Ha | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,93 |
| | - Kelapa | Ton/Ha | 1,13 | 1,10 | 1,12 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,17 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| ***3*** | ***Urusan Kehutanan*** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Produksi Kayu Sub Sektor kehutanan | $M^3$ | 6.689.742 | 5.471.085 | 5.500.000 | 5.600.000 | 5.800.000 | 5.900.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 3.2 | Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis | % | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,22 |
| 3.3 | Persentase Kerusakan kawasan hutan | % | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,17 |
| 3.4 | Rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan hutan | Rasio | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 3.5 | Luasan penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan | Ha | 0 | 73.761 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 12.350 | 12.350 | 39.800 |
| 3.6 | Penurunan luas kebakaran hutan | Ha | 749 | 10.135 | 9.121,5 | 8.209,35 | 7.388,42 | 6.649,6 | 5.984,6 | 5.984,6 |
| | | | | | | | | | | |
| ***4*** | ***Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral*** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Rasio Desa Berlistrik | % | 97,13 | 97,75 | 98,48 | 99,21 | 99,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.2 | Rasio Bauran EBT | % | - | - | 10,22 | 12,02 | 13,82 | 15,62 | 17,43 | 17,43 |
| 4.3 | Jumlah Sambungan Gas Rumah Tangga | SR | na | 66.263 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 116.263 |
| 4.4 | Jumlah IUP OP yang berproduksi | IUP | 39 | 40 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 |
| 4.5 | Minimnya Jumlah Kecelakaan Tambang yang mati | Orang | na | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Jumlah PNBP Sektor ESDM | Rp (Milyar) | 3.287 | 3.792 | 3.893 | 3.996 | 4.103 | 4.212 | 4.324 | 4.324 |
| 4.7 | Jumlah Retribusi Sektor ESDM | (Rp Juta) | 994,84 | 1.167 | 300 | 477,4 | 760 | 1.209 | 1.924 | 1.924 |
| | | | | | | | | | | |
| ***5*** | ***Urusan Perdagangan*** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Neraca Perdagangan | US$ juta | 2,876 | 2,880 | 2,894 | 2,909 | 2,923 | 2,938 | 2,953 | 2,953 |
| 5.2 | Persentase pertumbuhan ekspor | % | 1,53 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| ***6*** | ***Urusan Perindustrian*** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Jumlah Industri Kecil Menengah | IKM | 12.000 | 12.830 | 13.215 | 13.611 | 14.020 | 14.440 | 14.873 | 14.873 |
| 6.2 | Jumlah Industri Menengah Besar | IMB | 468 | 493 | 503 | 513 | 523 | 534 | 544 | 544 |
| 6.3 | Jumlah Industri Kreatif | IK | 5.988 | 6.412 | 6.508 | 6.606 | 6.705 | 6.801 | 6.908 | 6.908 |
| 6.4 | Jumlah Sentra Industri Kreatif | SIK | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 41 |
| | | | | | | | | | | |
| ***7*** | ***Urusan Transmigrasi*** | | | | | | | | | |
| 7.1 | Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun di kawasan transmigrasi | Lokasi | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 7.2 | Persentase Peningkatan Jumlah usaha ekonomi yang berkembang | % | 0 | 0 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 |
| | | | | | | | | | | |
| ***8*** | ***Urusan Kelautan dan Perikanan*** | | | | | | | | | |
| 8.1 | Produksi perikanan tangkap | Ton | 190.100 | 96.678 | 197.000 | 204.000 | 212.000 | 220.000 | 228.000 | 228.000 |
| 8.2 | Produksi perikanan budidaya | Ton | 428.500 | 436.800 | 460.000 | 480.000 | 500.000 | 525.000 | 545.000 | 545.000 |
| 8.3 | Volume ekspor produk kelautan dan perikanan | Ton | 1.001,89 | 1.150,00 | 1.850,00 | 2.000,00 | 2.250,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 8.4 | Konsumsi ikan | Kg/kap/Tahun | 40,04 | 40,50 | 42,00 | 42,50 | 43,00 | 43,50 | 44,00 | 44,00 |
| 8.5 | Produksi benur dan nener | Juta ekor | - | - | 8 | 17 | 26 | 35 | 44 | 44 |
| 8.6 | Nilai Tukar Nelayan (NTN) | % | 101,50 | 102,00 | 102,30 | 102,50 | 102,80 | 103,00 | 103,30 | 103,30 |
| 8.7 | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) | % | 98,96 | 99,46 | 99,96 | 100,46 | 100,96 | 101,46 | 101,96 | 101,96 |
| | | | | | | | | | | |
| ***III.4*** | **Penunjang Urusan** | | | | | | | | | |
| ***1*** | ***Perencanaan Pembangunan*** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase Program RKPD yang memenuhi THIS | % | 75 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 |
| 1.2 | Penetapan RKPD Tepat Waktu | Tepat waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1.3 | Persentase Capaian Realisasi Target Sasaran RPJMD | % | 51,95 | 66,83 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 |
| 1.4 | Jumlah peta tematik yang sudah KSP (Kebijakan Satu Peta) | Peta | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 |
| | | | | | | | | | | |
| ***2*** | ***Keuangan*** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2.2 | Penetapan APBD | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
| 2.3 | Pertumbuhan PAD | % | 19,07 | 13,79 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 3,5-4,5 | 3,5-4,5 | 3,5-4,5 | 3,5-4,5 |
| | | | | | | | | | | |
| ***3*** | ***Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan*** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Persentase jabatan pimpinan tinggi yang terisi melalui seleksi terbuka | % | 66,67 | 70,37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Persentase jabatan administrator & Pengawas pada instansi pemerintah yang terisi | % | 87,65 | 83,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu yang terisi pada instansi pemerintah | Jabatan | 9.640 | 9.640 | 9.796 | 10.311 | 10.796 | 11.256 | 11.696 | 11.696 |
| 3.4 | Persentase disiplin pegawai | % | 91,61 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 98,7 |
| 3.5 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial | % | 90 | 75 | 80 | 85 | 90 | 92 | 95 | 95 |
| 3.6 | Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan | % | 42 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 75 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| ***4*** | ***Penelitian dan Pengembangan*** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Jumlah Desa Inovasi | Desa Inovasi | n.a | n.a | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 |
| 4.2 | Jumlah Inovasi yang diterapkan | Inovasi | - | 48 | 55 | 62 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 4.3 | Jumlah jenis tanaman yang didokumentasikan di kebun raya | Jenis | - | 540 | 540 | 567 | 595 | 626 | 657 | 657 |
| 4.4 | Indeks Inovasi Daerah | Poin | 0 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,0 |
| | | | | | | | | | | |
| ***5*** | ***Pengawasan*** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Indeks Integritas Daerah | Indeks | - | - | 60 | 65 | 70 | 72,5 | 75 | 75 |
| 5.2 | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti | % | 90 | 95 | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti | % | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 80 |
| 5.4 | Level Maturitas SPIP | Skor | 2,15 | 3,02 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
| ***6*** | ***Sekretariat Dewan*** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase anggota Dewan yang meningkat kapasitasnya | % | 84,67 | 82 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |

**Tabel 9.3**
Indikator Kinerja Utama Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023

| No | Indikator | Satuan | Tahun Dasar | | Target Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **1** | **Sasaran 1** | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,51 | 6,04 | 5,6 -5,9 | 5,5 -6,0 | 5,5 -6,1 | 5,5-6,1 | 5,5- 6,1 |
| 2 | Inflasi | % | 2,96 | 2,74 | 2- 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 |
| 3 | Rasio Gini | Rasio | 0,365 | 0,341 | 0,355 | 0,354 | 0,353 | 0,352 | 0,350 |
| 4 | Pengeluaran Per Kapita | Rp. Ribu | 10.220 | n.a | 10.552 | 11.268 | 11.831 | 12.422 | 13.044 |
| 5 | PDRB per Kapita (ADHB) | Rp. Ribu | 46.421 | 49.209 | 50.490 | 54.199 | 57.077 | 59.087 | 62.067 |
| **2** | **Sasaran 2** | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan | % | 6,55 | 5,51 | 5,60 | 5,65 | 5,72 | 5,83 | 5,91 |
| 2 | Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran | % | 7,69 | 8,09 | 9,4 - 9,6 | 9,6 - 9,8 | 9,8 - 10 | 10-10,2 | 10,2-10,4 |
| 3 | Realisasi PMA | Rp. Triliun | 16,03 | 15,613 | 16,71 | 17,88 | 19,13 | 20,47 | 21,90 |
| 4 | Realisasi PMDN | Rp. Triliun | 9,76 | 7,465 | 7,99 | 8,55 | 9,14 | 9,79 | 10,47 |
| 5 | Neraca Perdagangan | US$ juta | 2.876 | 2.880 | 2.894 | 2.909 | 2.923 | 2.938 | 2.953 |
| **3** | **Sasaran 3** | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian | % | 1,77 | 2,16 | 4,27 | 4,77 | 5,27 | 5,77 | 6,27 |
| 2 | Nilai Tukar Petani (NTP) | % | 95,05 | 93,62 | 95,55 | 96,05 | 98,70 | 99,20 | 100,10 |
| 3 | Nilai Tukar Nelayan (NTN) | % | 101,50 | 102,00 | 102,30 | 102,50 | 102,80 | 103,00 | 103,30 |
| 4 | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) | % | 98,96 | 99,46 | 99,96 | 100,46 | 100,96 | 101,46 | 101,96 |
| **4** | **Sasaran 4** | | | | | | | | |
| 1 | Angka Kemiskinan | % | 13,10 | 12,82 | 12,52 | 10,00-11,65 | 9,9-10,78 | 9,6-9,91 | 9,2-9,5 |
| 2 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 4,39 | 4,23 | 4,12 | 4,01 | 3,87 | 3,75 | 3,62 |
| **5** | **Sasaran 5** | | | | | | | | |
| 1 | Rasio Desa berlistrik | Rasio | 97,13 | 97,75 | 98,48 | 99,21 | 99,95 | 100,00 | 100,00 |
| **6** | **Sasaran 6** | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 68,86 | 69,39 | 70,07 | 71,08 | 71,75 | 72,42 | 73,09 |

| No | Indikator | Satuan | Tahun Dasar | | Target Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 | Angka Usia Harapan Hidup | Tahun | 69,180 | 69,410 | 69,524 | 69,638 | 69,752 | 69,866 | 69,980 |
| **7** | **Sasaran 7** | | | | | | | | |
| 1 | Angka Rata-rata lama sekolah | Tahun | 7,99 | 8,00 | 8,22 | 8,47 | 8,63 | 8,79 | 8,95 |
| 2 | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,35 | 12,36 | 12,80 | 12,87 | 12,98 | 13,19 | 13,40 |
| **8** | **Sasaran 8** | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 92,43 | 92,62 | 92,70 | 93,00 | 93,30 | 93,60 | 93,90 |
| 2 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 73,53 | n.a. | 73,70 | 73,90 | 74,10 | 74,30 | 74,50 |
| 3 | Persentase Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) | % | 5,88 | 11,76 | 23,53 | 35,29 | 47,05 | 58,82 | 70,58 |
| **9** | **Sasaran 9** | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | B | - | BB | BB | BB | A | A |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | B | B | B | B | B | B | A |
| **10** | **Sasaran 10** | | | | | | | | |
| 1 | Nilai SAKIP | Nilai | A (80,01) | BB (78,71) | A (81-82) | A (82-83) | A (83-84) | A (84-85) | A (85-86) |
| 2 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| **11** | **Sasaran 11** | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Integritas Daerah | Indeks | - | - | 60 | 65 | 70 | 72,5 | 75 |
| **12** | **Sasaran 12** | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 62,04 | 67,29 | 67,35 | 67,40 | 67,43 | 67,47 | 67,85 |
| **13** | **Sasaran 13** | | | | | | | | |
| 1 | Persentase cakupan akses air minum layak | % | 62,71 | 62,84 | 72,97 | 75,08 | 78,83 | 82,77 | 86,91 |
| 2 | Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak | % | 78,62 | 80,32 | 81,00 | 84,75 | 87,63 | 90,26 | 92,96 |
| 3 | Persentase Kondisi Jalan Mantap | % | 74,22 | 61,22 | 70,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 80,00 |
| 4 | Presentase Akses Internet | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **14** | **Sasaran 14** | | | | | | | | |
| 1 | Persentase penurunan konflik sosial | % | 70 | 78 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 |
| **15** | **Sasaran 15** | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Wisatawan Mancanegara | Orang | 67.470 | 70.917 | 74.463 | 78.186 | 82.095 | 86.200 | 90.510 |
| 2 | Jumlah Wisatawan Nusantara | Orang | 7.474.422 | 8.221.864 | 8.632.957 | 9.064.605 | 9.517.835 | 9.993.727 | 10.493.413 |

| No | Indikator | Satuan | Tahun Dasar | | Target Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3 | Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan | Sertifikat | 17 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
| **16** | **Sasaran 16** | | | | | | | | |
| 1 | Peringkat Sumsel pada PON 2020 | Peringkat | 21(th. 2016) | 21(th. 2016) | - | 10 | - | - | - |
| 2 | Jumlah Pemuda Berprestasi (Akademis, Seni, Budaya dan Olahraga) | Orang | 9 | 24 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |

**Tabel 9.4**
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| **1** | **Sasaran 1** | | | | | | | | | |
| **I** | **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,51 | 6,04 | 5,6 -5,9 | 5,5 -6,0 | 5,5 -6,1 | 5,5-6,1 | 5,5- 6,1 | 5,5- 6,1 |
| 2 | Inflasi | % | 2,96 | 2,74 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 |
| 3 | PDRB per Kapita (ADHB) | Rp. Ribu | 46.421 | 49.209 | 50.490 | 54.199 | 57.077 | 59.087 | 62.067 | 62.067 |
| 4 | Rasio Gini | Rasio | 0,381 | 0,341 | 0,355 | 0,354 | 0,353 | 0,352 | 0,350 | 0,350 |
| **II** | **Aspek Daya Saing Daerah** | | | | | | | | | |
| 1 | Pengeluaran Per Kapita | Rp. Ribu | 10.220 | n.a | 10.552 | 11.268 | 11.831 | 12.422 | 13.044 | 13.044 |
| ***7*** | ***Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*** | | | | | | | | | |
| 7.2 | Persentase Kader PKK aktif | % | 0,15 | 0,15 | na | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,40 |
| ***11*** | ***Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah*** | | | | | | | | | |
| 11.1 | Jumlah UMKM Naik Kelas | UMK | 4.156 | 1.124 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 7.780 |
| 11.2 | Jumlah Kenaikan Wirausaha Baru | UKM | 1.258 | 463 | 240 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4.761 |
| 11.3 | Prosentase Pertumbuhan Modal Koperasi | % | 99,27 | 6,27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 115,54 |
| 11.4 | Prosentase Kenaikan Volume Usaha Koperasi | % | 14,96 | 4,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29,56 |
| 11.5 | Jumlah Koperasi Aktif | Koperasi | 4.699 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5.254 |
| ***7*** | ***Urusan Transmigrasi*** | | | | | | | | | |
| 7.2 | Persentase Peningkatan Jumlah usaha ekonomi yang berkembang | % | 0 | 0 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | | | | | | | | |
| **2** | **Sasaran 2** | | | | | | | | | |
| **I** | **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | | | | | |
| 24 | Kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB | % | 12,43 | 12,94 | 12,75-13,00 | 13,00-13,25 | 13,25-13,50 | 13,50-13,75 | 13,75-14,00 | 13,75-14,00 |
| 25 | Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB | % | 19,56 | 19,52 | 19,58 | 19,78 | 20,73 | 21,29 | 29,95 | 29,95 |
| 26 | Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan | % | 6,55 | 5,51 | 5,60 | 5,65 | 5,72 | 5,83 | 5,91 | 5,91 |
| 27 | Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran | % | 7,69 | 8,09 | 9,4 – 9,6 | 9,6 – 9,8 | 9,8 – 10 | 10 – 10,2 | 10,2 –10,4 | 10,2 – 10,4 |
| ***12*** | ***Urusan Penanaman Modal*** | | | | | | | | | |
| 12.1 | Realisasi PMA | Rp. Triliun | 16,03 | 15,613 | 16,71 | 17,88 | 19,13 | 20,47 | 21,90 | 21,90 |
| 12.2 | Realisasi PMDN | Rp. Triliun | 9,76 | 7,465 | 7,99 | 8,55 | 9,14 | 9,79 | 10,47 | 10,47 |
| 12.5 | Jumlah investor | Perusahaan /UU | 260 | 333 | 345 | 357 | 369 | 381 | 393 | 393 |
| 12.6 | Persentase pertumbuhan nilai investasi | % | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ***5*** | ***Urusan Perdagangan*** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Neraca Perdagangan | US$ juta | 2,876 | 2,880 | 2,894 | 2,909 | 2,923 | 2,938 | 2,953 | 2,953 |
| 5.2 | Persentase pertumbuhan ekspor | % | 1,53 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| | | | | | | | | | | |
| ***6*** | ***Urusan Perindustrian*** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Jumlah Industri Kecil Menengah | IKM | 12.000 | 12.830 | 13.215 | 13.611 | 14.020 | 14.440 | 14.873 | 14.873 |
| 6.2 | Jumlah Industri Menengah Besar | IMB | 468 | 493 | 503 | 513 | 523 | 534 | 544 | 544 |
| 6.3 | Jumlah Industri Kreatif | IK | 5.988 | 6.412 | 6.508 | 6.606 | 6.705 | 6.801 | 6.908 | 6.908 |
| 6.4 | Jumlah Sentra Industri Kreatif | SIK | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 41 |
| | | | | | | | | | | |
| **3** | **Sasaran 3** | | | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| **I** | **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | | | | | |
| 18 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Skor | 92,2 | 93,4 | 94,5 | 95,6 | 96,7 | 97,8 | 98,9 | 98,9 |
| 19 | Cadangan pangan | Ton | 498 | 539 | 818 | 827 | 835 | 843 | 852 | 852 |
| 21 | Produksi peternakan | | | | | | | | | |
| | - Daging | Ton | 76.519 | 82.315 | 86.431 | 90.755 | 95.290 | 100.054 | 105.057 | 477.584 |
| | - Telur | Ton | 118.391 | 127.208 | 133.569 | 140.247 | 147.259 | 154.622 | 162.354 | 738.051 |
| | - Susu | Liter | 71.304 | 90.316 | 94.832 | 99.573 | 104.552 | 109.780 | 115.269 | 524.006 |
| **II** | **Aspek Daya Saing Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | Nilai Tukar Petani (NTP) | % | 95,05 | 93,62 | 95,55 | 96,05 | 98,70 | 99,20 | 100,10 | 100,10 |
| ***3*** | ***Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*** | | | | | | | | | |
| 3.3 | Luas Daerah Irigasi permukaan yang terairi | Ha | 23.673 | 25.776 | 28.795 | 30.595 | 32.095 | 33.595 | 35.095 | 35.095 |
| 3.4 | Luas Daerah Irigasi Rawa yang terairi | Ha | - | - | 5.700 | 8.700 | 11.700 | 17.400 | 23.100 | 23.100 |
| 3.5 | Luas daerah irigasi secara partisipatif yang terairi | Ha | - | - | 2.009 | 4.209 | 6.446 | 7.646 | 8.846 | 8.846 |
| 3.6 | Jumlah pemenuhan kebutuhan tampungan air dan penyediaan air baku | % | 28 | 28 | 30 | 32 | 36 | 42 | 48 | 48 |
| ***3*** | ***Urusan Pangan*** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ketersediaan Energi untuk dikonsumsi | Kkal/Kap/ hari | 2.075 | 2.124 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 3.2 | Ketersediaan Protein untuk dikonsumsi | Gram/ Kap/hari | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 3.3 | Koefisien Varian (CV) Harga Pangan Strategis | % | ≤15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
| 3.4 | Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Beredar Aman dan Bermutu (komoditi sayur dan buah) | komoditi | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 3.5 | Jumlah Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) | sertifikat/registrasi | 77 | 153 | 178 | 203 | 228 | 263 | 288 | 288 |
| 3.6 | Jumlah Pemberdayaan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Petani Pangan | orang | - | - | 4.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 17.000 |
| 3.7 | Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Ternak | % | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.8 | Jumlah Peternakan yang ikut Asuransi Ternak Sapi | ekor | - | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 10.000 | 36.000 |
| 3.9 | Jumlah Promosi Hasil Peternakan | kali | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 3.10 | Jumlah Sentra Peternakan Rakyat yang menggunakan Teknologi Peternakan | Kab/Kota | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| ***2*** | ***Urusan Pertanian*** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian | % | 1,77 | 2,16 | 4,27 | 4,77 | 5,27 | 5,77 | 6,27 | 6,27 |
| 2.2 | Produksi Tanaman Pangan | | | | | | | | | |
| | - Padi | Ton | 4.943.071 | 5.076.131 | 5.175.825 | 5.325.825 | 5.450.825 | 5.575.825 | 5.675.825 | 5.675.825 |
| | - Jagung | Ton | 892.358 | 1.030.994 | 1.108.317 | 1.136.025 | 1.164.426 | 1.193.537 | 1.223.375 | 1.223.375 |
| | - Kedelai | Ton | 11.792 | 14.791 | 14.936 | 15.084 | 15.234 | 15.386 | 15.543 | 15.543 |
| 2.3 | Produksi Hortikultura | | | | | | | | | |
| | - Cabai | Ton | 40.468 | 42.110 | 45.884 | 47.319 | 48.986 | 50.705 | 52.263 | 52.263 |
| | - Bawang | Ton | 1.376 | 1.430 | 2.056 | 2.072 | 2.321 | 2.478 | 2.637 | 2.637 |
| | - Jeruk | Ton | 39.756 | 40.655 | 41.153 | 42.414 | 43.822 | 48.427 | 53.517 | 53.517 |
| | - Duku | Ton | 12.066 | 49.784 | 49.810 | 49.828 | 49.845 | 49.863 | 49.880 | 49.880 |
| | - Durian | Ton | 19.930 | 56.843 | 56.859 | 56.876 | 56.892 | 56.909 | 56.925 | 56.925 |
| | - Nanas | Ton | 109.071 | 134.894 | 135.246 | 136.599 | 137.965 | 138.188 | 138.412 | 138.412 |
| | - Tanaman Obat | Ton | 4.216 | - | 2.885 | 2.942 | 3.001 | 3.061 | 3.122 | 3.122 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2.4 | Produktivitas Tanaman Pangan | | | | | | | | | |
| | - Padi | Ku/Ha | 49,43 | 50,39 | 50,56 | 50,61 | 50,66 | 50,71 | 50,76 | 50,76 |
| | - Jagung | Ku/Ha | 64,56 | 67,71 | 65,03 | 65,05 | 65,07 | 65,09 | 65,11 | 65,11 |
| | - Kedelai | Ku/Ha | 17,49 | 11,72 | 12,32 | 12,33 | 12,34 | 12,36 | 12,38 | 12,38 |
| 2.5 | Produktivitas Hortikultura | | | | | | | | | |
| | - Cabai | Ku/Ha | 59,1 | 69,86 | 73,00 | 74,46 | 76,18 | 77,86 | 79,17 | 79,17 |
| | - Bawang | Ku/Ha | 60,1 | 81,74 | 80,00 | 80,26 | 80,58 | 80,98 | 81,39 | 81,39 |
| | - Jeruk | Ku/Ha | 529,4 | 492,80 | 498,80 | 504,90 | 511,10 | 521,40 | 531,80 | 531,80 |
| | - Duku | Ku/Ha | 29,9 | 123,80 | 123,90 | 124,10 | 124,20 | 124,30 | 124,40 | 124,40 |
| | - Durian | Ku/Ha | 67 | 112,90 | 113,00 | 113,10 | 113,20 | 113,30 | 113,40 | 113,40 |
| | - Nanas | Ku/Ha | 1.200 | 676,20 | 677,90 | 684,70 | 691,60 | 692,70 | 693,80 | 693,80 |
| 2.6 | Nilai Tukar Petani Perkebunan | Nilai | 95,05 | 95,55 | 96,65 | 98,70 | 99,20 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7 | Produktivitas sektor perkebunan | | | | | | | | | |
| | - Karet | Ton/Ha | 1,33 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,36 | 1,36 |
| | - Kelapa Sawit | Ton/Ha | 3,42 | 3,43 | 3,45 | 3,46 | 3,47 | 3,48 | 3,50 | 3,50 |
| | - Kopi | Ton/Ha | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,93 |
| | - Kelapa | Ton/Ha | 1,13 | 1,10 | 1,12 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,17 |
| ***3*** | ***Urusan Kehutanan*** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Produksi Kayu Sub Sektor kehutanan | $M^3$ | 6.689.742 | 5.471.085 | 5.500.000 | 5.600.000 | 5.800.000 | 5.900.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| ***8*** | ***Urusan Kelautan dan Perikanan*** | | | | | | | | | |
| 8.1 | Produksi perikanan tangkap | Ton | 190.100 | 96.678 | 197.000 | 204.000 | 212.000 | 220.000 | 228.000 | 228.000 |
| 8.2 | Produksi perikanan budidaya | Ton | 428.500 | 436.800 | 460.000 | 480.000 | 500.000 | 525.000 | 545.000 | 545.000 |
| 8.3 | Volume ekspor produk kelautan dan perikanan | Ton | 1.001,89 | 1.150,00 | 1.850,00 | 2.000,00 | 2.250,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 8.4 | Konsumsi ikan | Kg/kap/ tahun | 40,04 | 40,50 | 42,00 | 42,50 | 43,00 | 43,50 | 44,00 | 44,00 |
| 8.5 | Produksi benur dan nener | Juta ekor | - | - | 8 | 17 | 26 | 35 | 44 | 44 |
| 8.6 | Nilai Tukar Nelayan (NTN) | % | 101,50 | 102,00 | 102,30 | 102,50 | 102,80 | 103,00 | 103,30 | 103,30 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 8.7 | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) | % | 98,96 | 99,46 | 99,96 | 100,46 | 100,96 | 101,46 | 101,96 | 101,96 |
| **4** | **Sasaran 4** | | | | | | | | | |
| **I** | **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | | | | | |
| 9 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 69,50 | 68,69 | 70,47 | 70,96 | 71,46 | 71,96 | 72,46 | 72,46 |
| 10 | Angka setengah menganggur | % | 8,73 | 8,73 | 8,66 | 8,61 | 8,56 | 8,36 | 8,05 | 8,05 |
| 11 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 4,390 | 4,230 | 4,017 | 4,015 | 4,003 | 3,997 | 3,984 | 3,984 |
| 32 | Jumlah KK Rawan Pangan yang dibantu | KK | - | 450 | 100 | 1.200 | 1.350 | 1.450 | 1.500 | 5.600 |
| 33 | Jumlah KK Miskin yang dibantu | KK | - | 159 | 100 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 4.100 |
| ***4*** | ***Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman*** | | | | | | | | | |
| 4.9 | Luas kawasan perumahan dan permukiman bagi keluarga miskin yang tertata | Ha | - | - | - | 396,70 | 423,14 | 449,57 | 476,01 | 476,01 |
| 4.10 | Persentase rumah tangga miskin dengan akses air minum layak | % | - | - | - | 2,43 | 4,22 | 6,32 | 6,85 | 6,85 |
| 4.11 | Persentase rumah tangga miskin dengan akses sanitasi layak | % | - | - | - | 18,77 | 19,71 | 20,65 | 21,73 | 21,73 |
| ***6*** | ***Urusan Sosial*** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | % | 9,30 | 49,42 | 48,87 | 50,80 | 52,73 | 54,67 | 56,60 | 56,60 |
| 6.2 | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial | % | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 17,86 | 17,86 | 23,81 | 29,76 | 29,76 |
| 6.3 | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | % | 9,29 | 8,29 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| ***1*** | ***Urusan Tenaga Kerja*** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase tenaga kerja yang dilatih dan ditempatkan | % | - | 33,59 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
| 1.2 | Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | % | - | 37,34 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
| 1.3 | Persentase pekerja yang mendapat perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | % | - | 54,79 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 70 |
| ***7*** | ***Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*** | | | | | | | | | |
| 7.1 | Persentase Lembaga Masyarakat yang diberdayakan | % | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 7.3 | Indeks Pembangunan Desa Sumatera Selatan | Indeks | | 59,18 | 59,93 | 60,67 | 61,42 | 62,16 | 62,91 | 62,91 |
| 7.4 | Indeks Desa Membangun Sumatera Selatan | Indeks | 0,5817 | 0,5847 | 0,5877 | 0,5907 | 0,5937 | 0,5967 | 0,5997 | 0,5997 |
| | | | | | | | | | | |
| **5** | **Sasaran 5** | | | | | | | | | |
| **I** | **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | | | | | |
| 22 | Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB | % | 19,24 | 20,24 | 20,81 | 20,91 | 21,01 | 21,11 | 21,21 | 21,21 |
| 27 | Pertumbuhan PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian | % | 5,32 | 9,27 | 5,42 | 5,52 | 5,62 | 5,72 | 5,82 | 5,82 |
| ***4*** | ***Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral*** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Rasio Desa Berlistrik | % | 97,13 | 97,75 | 98,48 | 99,21 | 99,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.2 | Rasio Bauran EBT | % | - | - | 10,22 | 12,02 | 13,82 | 15,62 | 17,43 | 17,43 |
| 4.3 | Jumlah Sambungan Gas Rumah Tangga | SR | na | 66.263 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 116.263 |
| 4.4 | Jumlah IUP OP yang berproduksi | IUP | 39 | 40 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 4.5 | Minimnya Jumlah Kecelakaan Tambang yang mati | org | n/a | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Jumlah PNBP Sektor ESDM (Rp Milyar) | Rp (Milyar) | 3.287 | 3.792 | 3.893 | 3.996 | 4.103 | 4.212 | 4.324 | 4.324 |
| 4.7 | Jumlah Retribusi Sektor ESDM (Rp Juta) | (Rp Juta) | 994,84 | 1.167 | 300 | 477,4 | 760 | 1.209 | 1.924 | 1.924 |
| **6** | **Sasaran 6** | | | | | | | | | |
| **I** | **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | | | | | |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 68,86 | 69,39 | 70,07 | 71,08 | 71,75 | 72,42 | 73,09 | 73,09 |
| 8 | Angka Usia Harapan Hidup | Tahun | 69,180 | 69,410 | 69,524 | 69,638 | 69,752 | 69,866 | 69,980 | 69,410 |
| | | | | | | | | | | |
| ***2*** | ***Urusan Kesehatan*** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase balita stunting | % | 22,8 | 32 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 24 |
| 2.2 | Persentase balita gizi buruk | % | 0,032 | 0,037 | 0,035 | 0,033 | 0,031 | 0,029 | 0,027 | 0,027 |
| 2.3 | Case Detection Rate | % | 44 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 |
| 2.4 | Persentase kasus TBC yang diobati dan sembuh | % | 86 | 85 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 90 |
| 2.5 | Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar dari total penderita yang ditemukan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Jumlah Kab/kota yang Eliminasi Malaria | Jumlah | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 2.7 | Cakupan ASI eksklusif | % | 61,66 | 60,7 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 |
| 2.8 | Persentase Rumah Tangga ber-PHBS | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| 2.9 | Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan | % | 56,5 | 58,4 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 2.10 | Persentase Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) | % | 52,8 | 61,4 | 65 | 68 | 72 | 75 | 80 | 80 |
| 2.11 | Persentase kabupaten/Kota Sehat | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 |
| 2.12 | Imunisasi Dasar Lengkap | % | 99,0 | 99,4 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2.13 | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi | % | 30 | 43 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 2.14 | Jumlah Kematian Bayi | Orang | 637 | 497 | 477 | 458 | 438 | 416 | 394 | 394 |
| 2.15 | Persentase puskesmas yang mengembangkan Program Usila | % | 65 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 100 |
| 2.16 | Jumlah Kematian Ibu Maternal | Orang | 107 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 110 |
| 2.17 | Rasio dokter terhadap 100.000 penduduk | Rasio | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 |
| 2.18 | Rasio dokter gigi terhadap 100.000 penduduk | Rasio | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 2.19 | Rasio bidan terhadap 100.000 penduduk | Rasio | 113 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 125 |
| 2.20 | Rasio tenaga gizi terhadap 100.000 penduduk | Rasio | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 2.21 | Rasio tenaga sanitarian terhadap 100.000 penduduk | Rasio | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 2.22 | Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan | % | 88 | 88,4 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 95 |
| 2.23 | Persentase desa/kelurahan UCI | % | 92 | 94,1 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2.24 | Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.25 | Persentase penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2.26 | Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit BLUD UPT Dinas Kesehatan | % | 60 | 65 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 80 |
| ***8*** | ***Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*** | | | | | | | | | |
| 8.1 | Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif | % | 69,2 | 60,7 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
| | | | | | | | | | | |
| **7** | **Sasaran 7** | | | | | | | | | |
| **I** | **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | | | | | |
| 6 | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,35 | 12,36 | 12,80 | 12,87 | 12,98 | 13,19 | 13,40 | 13,40 |
| 7 | Angka Rata-rata lama sekolah | Tahun | 7,99 | 8,00 | 8,22 | 8,47 | 8,63 | 8,79 | 8,95 | 8,95 |
| | | | | | | | | | | |
| ***1*** | ***Urusan Pendidikan*** | | | | | | | | | |
| 1.1 | APK Sekolah Menengah | % | 83,44 | 77,40 | 86,46 | 87,36 | 88,24 | 89,12 | 90,00 | 90,00 |
| 1.2 | APM Sekolah Menengah | % | 59,06 | 59,87 | 60,06 | 61,04 | 62,02 | 63,00 | 63,98 | 63,98 |
| 1.3 | APS Sekolah Menengah | % | 69,05 | 69,65 | 73,09 | 75,11 | 77,13 | 79,15 | 81,17 | 81,17 |
| 1.4 | APTS Sekolah Menengah | % | 2,85 | 2,81 | 2,31 | 1,81 | 1,31 | 0,81 | 0,31 | 0,31 |
| 1.5 | Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi | Sekolah | 10 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 |
| 1.6 | Persentase Sekolah SLB yang terakreditasi: | | | | | | | | | |
| | A | % | 5,9 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| | B | % | 41,2 | 45,16 | 48,39 | 51,61 | 54,84 | 58,1 | 61,29 | 61,29 |
| | C | % | 2,9 | 3,23 | 6,45 | 9,68 | 12,90 | 16,10 | 25,81 | 25,81 |
| | D | % | 50,0 | 38,71 | 32,26 | 28,81 | 19,35 | 12,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Persentase Pendidik Tenaga Kependidikan minimal Berkualifikasi S-1 | % | 94,76 | 95,63 | 96,50 | 97,37 | 98,24 | 99,11 | 100,00 | 100,00 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah | | | | | | | | | |
| | SMA | Rasio | 1:32 | 1:37 | 1:35 | 1:33 | 1:31 | 1:29 | 1:27 | 1:27 |
| | SMK | Rasio | 1:47 | 1:57 | 1:55 | 1:53 | 1:51 | 1:49 | 1:47 | 1:47 |
| 1.9 | Persentase sekolah menengah terakreditasi: | | | | | | | | | |
| | A | % | 12,85 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 |
| | B | % | 10,63 | 26,77 | 28,82 | 30,54 | 33,01 | 35,48 | 37,42 | 37,42 |
| | C | % | 4,98 | 11,40 | 12,26 | 13,23 | 14,19 | 15,27 | 16,13 | 16,13 |
| | D | % | 0,11 | 38,06 | 35,15 | 32,47 | 29,03 | 25,48 | 22,69 | 22,69 |
| 1.10 | Lulusan SMK yang terserap kerja | % | - | 53,60 | 55,78 | 57,96 | 60,14 | 62,32 | 64,50 | 64,50 |
| 1.11 | Persentase Kelulusan Sekolah Menengah | % | 99,95 | 99,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ***17*** | ***Urusan Perpustakaan*** | | | | | | | | | |
| 17.1 | Persentase peningkatan minat dan budaya baca masyarakat | % | 33,33 | 58,60 | 63,10 | 65,25 | 67,30 | 72,50 | 74,60 | 74,60 |
| 17.2 | Nilai tingkat budaya baca masyarakat | Nilai | 38,38 | 44,81 | 50,10 | 51,98 | 53,16 | 55,48 | 57,19 | 57,19 |
| | | | | | | | | | | |
| **8** | **Sasaran 8** | | | | | | | | | |
| ***2*** | ***Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 92,43 | 92,62 | 92,70 | 93,00 | 93,30 | 93,60 | 93,90 | 93,90 |
| 2.2 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 73,53 | n.a. | 73,70 | 73,90 | 74,10 | 74,30 | 74,50 | 74,50 |
| 2.3 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,48 | 0,478 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 2.4 | Persentase Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) | % | 5,88 | 11,76 | 23,53 | 35,29 | 47,05 | 58,82 | 70,58 | 70,58 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2.5 | Rasio Anak Korban Kekerasan | Per 10.000 anak | 1,66 | 1,38 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 2.6 | Rasio Perempuan Korban Kekerasan | Per 100.000 perempuan | 15,15 | 12,21 | 12,00 | 12,00 | 11,5 | 11,5 | 11,00 | 11,00 |
| 2.7 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | % | 4,5 | 5,01 | 5,00 | 5,00 | 5,10 | 5,10 | 5,20 | 5,20 |
| 2.8 | Partisipasi angkatan kerja perempuan | % | 53,63 | 53,56 | 53,7 | 53,8 | 53,8 | 53,9 | 54,0 | 54,0 |
| **9** | **Sasaran 9** | | | | | | | | | |
| **I** | **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | | | | | |
| 13 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | B | B | B | B | B | B | A | A |
| ***6*** | ***Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | Rasio | 92,95 | 98,08 | 98,15 | 98,46 | 98,83 | 99,07 | 99,21 | 99,21 |
| 6.2 | Rasio bayi ber akta kelahiran | Rasio | 80,00 | 82,50 | 85,00 | 87,50 | 90,00 | 92,50 | 95,00 | 95,00 |
| 6.3 | Rasio pasangan ber akta Nikah | Rasio | 70,00 | 73,00 | 75,00 | 77,50 | 80,00 | 82,50 | 85,00 | 85,00 |
| 6.4 | Cakupan penerbitan akta kelahiran | % | 80,00 | 82,50 | 85,00 | 87,50 | 90,00 | 92,50 | 95,00 | 95,00 |
| ***10*** | ***Urusan Komunikasi dan Informatika*** | | | | | | | | | |
| 10.1 | Persentase layanan pengguna e-government | % | na | na | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.2 | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Informasi dan Komunikasi Masyarakat/Publik | Kab/Kota | na | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 17 |
| ***12*** | ***Urusan Penanaman Modal*** | | | | | | | | | |
| 12.1 | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di selesaikan tepat waktu sesuai SOP | Unit | 901 | 904 | 940 | 974 | 1.006 | 1.036 | 1.064 | 1.064 |
| 12.2 | Indeks Kepuasan Investor | Indeks | 89,3 | 89,41 | 89,50 | 89,55 | 89,60 | 89,65 | 89,70 | 89,70 |
| ***14*** | ***Urusan Statistik*** | | | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 14.1 | Tersedianya persentase data sektoral | % | - | - | 19 | 50 | 81 | 100 | 100 | 100 |
| 14.2 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | % | - | - | 18,75 | 50,00 | 81,25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ***15*** | ***Urusan Persandian*** | | | | | | | | | |
| 15.1 | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan pelayanan persandian | % | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 18 |
| ***18*** | ***Urusan Kearsipan*** | | | | | | | | | |
| 18.1 | Persentase Perangkat Daerah provinsi dan kab/kota yang mengelola arsip secara baku | % | 0 | 60 | 60 | 60 | 75 | 85 | 90 | 90 |
| 18.2 | Jumlah SDM pengelola kearsipan yang bersertifikat | Orang | 36 | 34 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ***4*** | ***Penelitian dan Pengembangan*** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Jumlah Desa Inovasi | Desa Inovasi | n.a | n.a | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 |
| 4.2 | Jumlah Inovasi yang diterapkan | Inovasi | - | 48 | 55 | 62 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 4.3 | Jumlah jenis tanaman yang didokumentasikan di kebun raya | Jenis | - | 540 | 540 | 567 | 595 | 626 | 657 | 657 |
| 4.4 | Indeks Inovasi Daerah | Poin | 0 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,0 |
| | | | | | | | | | | |
| **10** | **Sasaran 10** | | | | | | | | | |
| **I** | **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | | | | | |
| 14 | Nilai SAKIP | Nilai | A (80,01) | BB (78,71) | A (81-82) | A (82-83) | A (83-84) | A (84-85) | A (85-86) | A (85-86) |
| 15 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| ***1*** | ***Perencanaan Pembangunan*** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase Program RKPD yang memenuhi THIS | % | 75 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1.2 | Penetapan RKPD Tepat Waktu | Tepat waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
| 1.3 | Persentase Capaian Realisasi Target Sasaran RPJMD | % | 51,95 | 66,83 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 |
| ***2*** | ***Keuangan*** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2.2 | Penetapan APBD | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
| 2.3 | Pertumbuhan PAD | % | 19,07 | 13,79 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 3,5-4,5 | 3,5-4,5 | 3,5-4,5 | 3,5-4,5 |
| **11** | **Sasaran 11** | | | | | | | | | |
| ***3*** | ***Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan*** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Persentase jabatan pimpinan tinggi yang terisi melalui seleksi terbuka | % | 66,67 | 70,37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Persentase jabatan administrator & Pengawas pada instansi pemerintah yang terisi | % | 87,65 | 83,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu yang terisi pada instansi pemerintah | Jabatan | 9.640 | 9.640 | 9.796 | 10.311 | 10.796 | 11.256 | 11.696 | 11.696 |
| 3.4 | Persentase disiplin pegawai | % | 91,61 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 98,7 |
| 3.5 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial | % | 90 | 75 | 80 | 85 | 90 | 92 | 95 | 95 |
| 3.6 | Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan | % | 42 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 75 |
| ***5*** | ***Pengawasan*** | | | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 5.1 | Indeks Integritas Daerah | Indeks | - | - | 60 | 65 | 70 | 72,5 | 75 | 75 |
| 5.2 | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti | % | 90 | 95 | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti | % | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 80 |
| 5.4 | Level Maturitas SPIP | Skor | 2,15 | 3,02 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4 |
| ***6*** | ***Sekretariat Dewan*** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase anggota Dewan yang meningkat kapasitasnya | % | 84,67 | 82 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |
| **12** | **Sasaran 12** | | | | | | | | | |
| **I** | **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | | | | | |
| ***3*** | ***Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*** | | | | | | | | | |
| 3.2 | Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang | % | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 |
| 3.7 | Jumlah kawasan bebas bencana banjir | Kawasan | 13 | 24 | 30 | 32 | 37 | 41 | 45 | 45 |
| 3.8 | Jumlah kawasan bebas bencana longsor | Kawasan | 9 | 11 | 11 | 13 | 17 | 22 | 27 | 27 |
| | | | | | | | | | | |
| ***5*** | ***Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat*** | | | | | | | | | |
| 5.4 | Persentase Penurunan Daerah Rawan Kebakaran | % | - | - | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | 100 |
| 5.5 | Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) | Indeks | 142,20 | 142,20 | 133,67 | 125,65 | 118,11 | 111,02 | 104,36 | 104,36 |
| 5.6 | Persentase daerah rawan bencana yang mempunyai pelayanan informasi | % | n.a | n.a | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 5.7 | Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana daerah rawan bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.8 | Persentase korban bencana yang dievakuasi saat tanggap darurat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| ***5*** | ***Urusan Lingkungan Hidup*** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 62,04 | 67,29 | 67,35 | 67,40 | 67,43 | 67,47 | 67,85 | 67,85 |
| 5.2 | Indeks Kualitas Air | Indeks | 62,64 | 62,64 | 62,74 | 62,82 | 62,89 | 62,93 | 64,04 | 64,04 |
| 5.3 | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 96,11 | 96,11 | 96,19 | 96,23 | 96,25 | 96,32 | 96,45 | 96,45 |
| 5.4 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Indeks | 36,03 | 49,173 | 49,189 | 49,206 | 49,224 | 49,243 | 49,263 | 49,263 |
| 5.5 | Persentase penurunan emisi GRK | % | 3,71 | 4,33 | 4,95 | 5,56 | 6,18 | 6,8 | 7,42 | 7,42 |
| 5.6 | Jumlah penurunan emisi GRK: | | 4.552.377 | 4.553.329 | 4.554.931 | 4.557.072 | 4.559.977 | 4.563.570 | 4.566.890 | 4.566.890 |
| | 1. Sektor lahan dan gambut | Ton CO2 eq/tahun | 4.367.638 | 4.363.444 | 4.360.108 | 4.357.545 | 4.355.678 | 4.354.439 | 4.353.765 | 4.353.765 |
| | 2. Sektor pertanian dan peternakan | Ton CO2 eq/tahun | 52.094 | 53.554 | 55.013 | 56.472 | 57.932 | 59.391 | 60.851 | 60.851 |
| | 3. Sektor energi dan transportasi | Ton CO2 eq/tahun | 52.219 | 54.750 | 57.135 | 59.337 | 61.653 | 64.075 | 66.609 | 66.609 |
| | 4. Sektor limbah | Ton CO2 eq/tahun | 80.426 | 81.581 | 82.675 | 83.718 | 84.714 | 85.665 | 85.665 | 85.665 |
| 5.7 | Persentase penyelesaian kasus lingkungan | % | 33,33 | 33,33 | 34 | 34,5 | 35 | 35,6 | 36 | 36 |
| | | | | | | | | | | |
| ***3*** | ***Urusan Kehutanan*** | | | | | | | | | |
| 3.2 | Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis | % | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,22 |
| 3.3 | Persentase Kerusakan kawasan hutan | % | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,17 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 3.4 | Rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan hutan | Rasio | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 3.5 | Luasan penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan | Ha | 0 | 73.761 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 12.350 | 12.350 | 39.800 |
| 3.6 | Penurunan luas kebakaran hutan | Ha | 749 | 10.135 | 9.121,5 | 8.209,35 | 7.388,42 | 6.649,6 | 5.984,6 | 5.984,6 |
| ***III.4*** | **Penunjang Urusan** | | | | | | | | | |
| ***1*** | ***Perencanaan Pembangunan*** | | | | | | | | | |
| 1.4 | Jumlah peta tematik yang sudah KSP (Kebijakan Satu Peta) | Peta | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 |
| **13** | **Sasaran 13** | | | | | | | | | |
| ***3*** | ***Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*** | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Persentase Kondisi Jalan Mantap | % | 74,22 | 61,22 | 70,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 80,00 | 80,00 |
| ***4*** | ***Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman*** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | % | 7,25 | 6,88 | 6,43 | 5,83 | 5,17 | 4,43 | 3,85 | 3,85 |
| 4.2 | Luas Kawasan kumuh dengan sarana dan prasarana yang baik | Ha | 517,78 | 1.047,78 | 1.147,78 | 1.247,78 | 1.347,78 | 1.447,78 | 1.547,78 | 1.547,78 |
| 4.3 | Persentase cakupan akses air minum layak | % | 62,71 | 62,84 | 72,97 | 75,08 | 78,83 | 82,77 | 86,91 | 86,91 |
| 4.4 | Persentase RT dengan akses sanitasi layak | % | 78,62 | 80,32 | 81,00 | 84,75 | 87,63 | 90,26 | 92,96 | 92,96 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 4.5 | Persentase Bangunan Publik dan lingkungan ruang publik yang telah memenuhi NSPK | % | 43,11 | 48,27 | 53,10 | 58,41 | 64,25 | 70,67 | 77,74 | 77,74 |
| 4.6 | Persentase Kepala Keluarga yang Memiliki Rumah | % | 83,3 | 87,3 | 88,72 | 90,15 | 91,58 | 93,00 | 94,43 | 94,43 |
| 4.7 | Jumlah kawasan permukiman yang tertata prasarana utilitas | Kawasan | - | - | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 23 |
| 4.8 | Jumlah lingkungan ruang publik yang dilengkapi sarana dan prasarana utilitas yang baik | Kawasan | - | - | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 31 |
| ***9*** | ***Urusan Perhubungan*** | | | | | | | | | |
| 9.1 | Jumlah arus penumpang Kereta Api | Orang | 1.928.364 | 2.025.087 | 2.126.341 | 2.232.658 | 2.344.291 | 2.461.506 | 2.584.581 | 2.584.581 |
| 9.2 | Jumlah arus penumpang Kapal Laut | Orang | 59.301 | 62.266 | 65.379 | 68.648 | 72.081 | 75.685 | 79.469 | 79.469 |
| 9.3 | Jumlah arus penumpang Bus AKDP | Orang | 1.534.266 | 1.610.979 | 1.691.528 | 1.776.105 | 1.864.910 | 1.958.155 | 2.056.063 | 2.056.063 |
| 9.4 | Jumlah pelabuhan laut pengumpan regional | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.5 | Jumlah terminal tipe B | Unit | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 9.6 | Load faktor angkutan darat | % | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 66 | 68 | 68 |
| 9.7 | Load faktor angkutan laut | % | 44 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 54 |
| 9.8 | Load faktor angkutan kereta api | % | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 53 | 53 |
| 9.9 | Jumlah trip pelayanan ALSDP | Trip | 3.048 | 3.568 | 3.672 | 3.702 | 3.778 | 3.815 | 3.856 | 3.856 |
| 9.10 | Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas jalan | % | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 9.11 | Persentase Tingkat Fatalitas | % | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| ***10*** | ***Urusan Komunikasi dan Informatika*** | | | | | | | | | |
| 10.3 | Presentase Akses Internet | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ***7*** | ***Urusan Transmigrasi*** | | | | | | | | | |
| 7.1 | Jumlah Infrastruktur yang dibangun di kawasan transmigrasi | Lokasi | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | | | | | | | | |
| **14** | **Sasaran 14** | | | | | | | | | |
| **I** | **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | | | | | |
| 12 | Persentase penurunan konflik sosial | % | 70 | 78 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| 16 | Meningkatnya Peringkat MTQ | Peringkat | - | 21 Besar | - | 20 Besar | - | 15 besar | - | 15 besar |
| 17 | Meningkatnya Peringkat STQ | Peringkat | 27 | - | 20 besar | - | 15 besar | - | 15 besar | 15 besar |
| | | | | | | | | | | |
| ***5*** | ***Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat*** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase penegakkan Perda | % | 96 | 92,34 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 5.2 | Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Prov. Sumsel | % | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| 5.3 | Persentase Satlinmas dan Pos Kamling yang Aktif | % | - | - | 65 | 75 | 85 | 95 | 99 | 99 |
| ***4*** | ***Urusan Pertanahan*** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase konflik lahan yang terselesaikan | % | 9,76 | 10,00 | 11,00 | 11,66 | 12,00 | 12,45 | 13,00 | 13,00 |
| | | | | | | | | | | |
| **15** | **Sasaran 15** | | | | | | | | | |
| ***16*** | ***Urusan Kebudayaan*** | | | | | | | | | |
| 16.1 | Angka Kumulatif Jumlah cagar budaya yang terlindungi, termanfaatkan dan dikembangkan | Cagar Budaya | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 850 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 16.2 | Angka komulatif jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terlindungi, termanfaatkan dan dikembangkan | OPK | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 |
| 16.3 | Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan | Sertifikat | 17 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 |
| 16.4 | Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan | Sertifikat | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| 16.5 | Jumlah Pergelaran Seni | Kali | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 63 |
| 16.6 | Jumlah Kunjungan Museum | Orang | 40.350 | 41.350 | 49.620 | 59.544 | 71.452 | 85.743 | 102.892 | 102.892 |
| ***1*** | ***Urusan Pariwisata*** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Jumlah Wisatawan Mancanegara | Orang | 67.470 | 70.917 | 74.463 | 78.186 | 82.095 | 86.200 | 90.510 | 90.510 |
| 1.2 | Jumlah Wisatawan Nusantara | Orang | 7.474.422 | 8.221. 864 | 8.632. 957 | 9.064.605 | 9.517.835 | 9.993.727 | 10.493.413 | 10.493.413 |
| 1.3 | Jumlah Paket Destinasi | Paket Destinasi | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 14 |
| | | | | | | | | | | |
| **16** | **Sasaran 16** | | | | | | | | | |
| ***13*** | ***Urusan Kepemudaan dan Olah Raga*** | | | | | | | | | |
| 13.1 | Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan | Orang | 519 | 422 | 673 | 1.940 | 4.077 | 2.811 | 3.511 | 13.012 |
| 13.2 | Jumlah organisasi pemuda yang aktif | OKP | 4 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 115 |
| 13.3 | Jumlah wirausaha muda | Orang | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| 13.4 | Jumlah pelatih yang Bersertifikat | Orang | 25 | 550 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 13.5 | Jumlah pembinaan cabang olahraga | Orang | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 210 |
| 13.6 | Jumlah pembinaan atlet muda | Orang | 232 | 232 | 244 | 251 | 255 | 262 | 267 | 1.278 |
| 13.7 | Jumlah atlet berprestasi | Orang | 23 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 225 |
| 13.8 | Jumlah prestasi olahraga | Cabor | 7 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 79 |
| 13.9 | Jumlah medali atlet muda Sumsel | Medali emas | 29 | 22 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 175 |

# BAB X

# PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 ini menjabarkan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang erat kaitannya dengan proses penetapan arah pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam lima tahun mendatang (2019-2023); bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Periodesasi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan ini disesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah, yakni 2018-2023. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan untuk periode satu tahun dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2023. Selain itu dokumen ini juga menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan nantinya akan menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang rancangan Perda RPJMD kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait sesuai dengan amanat ketentuan pasal 253 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## 10.1 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2019 hingga 2023. Perencanaan pembangunan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD 2005-2025 Provinsi Sumatera Selatan dan mengacu pada RKP Tahun 2024. Hal ini didasarkan pada tahun 2024 merupakan masa transisi antara periodesasi RPJMD 2019-2023 dengan RPJMD periode 2023-2028, dimana dalam tahun 2024 merupakan masa transisi antar kedua periode RPJMD.

Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 ini telah dilaksanakan dengan konsisten oleh lembaga perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh *stakeholders* dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi pondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan periode berikutnya.

Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan, dan kesehatan, perekonomian rakyat yang semakin berdaya, makin berkurangnya jumlah penduduk miskin dan keluarga miskin, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus diharapkan kesenjangan atau disparitas antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju dapat terkurangi secara signifikan, dan berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Provinsi Sumatera Selatan juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Program transisi tahun 2024 sudah barang tentu akan dirumuskan dengan tetap berusaha menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk periode selanjutnya, program pembangunan yang dikembangkan dapat lebih banyak berorientasi pada upaya memfasilitasi dan memberi berbagai kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata, dan peluang-peluang sosial (*social opportunities*) yang adil kepada masyarakat. Kemudahan ekonomi adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat terhadap berbagai sumber-sumber produksi dan pasar. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya meningkatkan kesempatan masyarakat melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal didukung kualitas pendidikan dan kesehatan yang

baik, serta makin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan.

## 10.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2019-2023 ini dengan sebaik-baiknya.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2019 hingga 2023.
3. Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja (Renja Perangkat Daerah).
4. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Renstra-PD Kabupaten/Kota, harus memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.
5. Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja dan RPJMD Kabupaten/Kota.
6. Konsepsi prioritas dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 ini baik mengenai aspek program maupun wilayah, hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-prioritas.
7. Konsepsi deskripsi program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja,

tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.

8. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban melakukan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJMD kabupaten/kota, maka Bappeda Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban melaksanakan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja RPJMD Kabupaten/Kota.

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**H. HERMAN DERU**